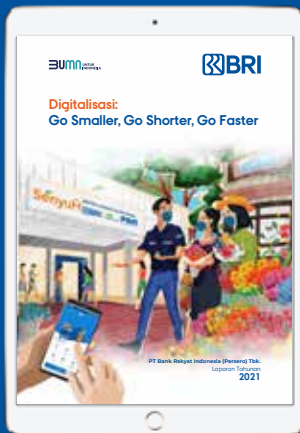


Digitalisasi: Go Smaller, Go Shorter, Go Faster





» 2021

Digitalisasi: *Go Smaller, Go Shorter, Go Faster*

Di tengah kondisi pemulihan ekonomi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) berhasil menjaga fundamental kinerja dapat tumbuh secara sehat, kuat dan berkelanjutan. Keberhasilan BRI mencatatkan kinerja cemerlang tersebut merupakan hasil dari strategi transformasi yang telah dipersiapkan sejak 2016 melalui konsep besar BRRevolution 1.0. Program tersebut dimulai pada 2017 dan telah dilaksanakan hingga tahun 2020 lalu.

Sejak terjadinya pandemi, transformasi tersebut dipertajam menjadi BRRevolution 2.0 yang difokuskan pada dua area utama yaitu *digital* dan *culture*. Visi besar BRI pun turut diubah menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia*. Selain itu, fokus lainnya adalah menjadi *Champion of Financial Inclusion*. Hal itu untuk mengembalikan fokus BRI pada khittahnya di segmen UMKM termasuk usaha Ultra Mikro (UMi).

Champion of Financial Inclusion dimaksudkan guna menjaga pertumbuhan berkesinambungan perseroan. BRI mencari sumber pertumbuhan baru. Dengan strategi *go smaller*, yaitu menysasar pada segmen usaha yang lebih kecil dari mikro, yakni ultra mikro dengan menyalurkan kredit dengan *ticket size* yang lebih kecil. BRI memberikan tenor pendek sesuai kebutuhan atau *go shorter*. Selain itu, BRI memperkuat digitalisasi layanan jasa keuangannya sehingga layanan dan proses bisnis dapat lebih cepat atau *go faster*. Dengan begitu, BRI dapat melayani masyarakat dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas, lebih mudah, lebih cepat dan lebih terjangkau.

Untuk memberikan layanan perbankan hingga ke berbagai wilayah secara *Go Smaller, Go Shorter & Go Faster*, digitalisasi BRI dilakukan dengan mengacu pada 3 (tiga) *framework* utama yaitu pertama *Digitizing Core* atau digitalisasi proses bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan fokus pada efisiensi. Kedua, *Digital Ecosystems* yaitu BRI menyiapkan *platform-platform digital* untuk mendorong BRI masuk ke dalam bisnis ekosistem *value chain* sehingga diharapkan menjadi sumber pertumbuhan baru di sisi CASA, FBI dan Nasabah baru BRI. Ketiga, *New Digital Propositions*, BRI melakukan inovasi teknologi finansial dengan pendekatan digital secara penuh dan bisnis model baru yang dapat memberikan layanan kepada nasabah lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien.

Melalui transformasi serta strategi *go smaller, go shorter* dan *go faster* yang didukung oleh digitalisasi, BRI terbukti dapat menunjukkan kinerja yang solid dengan mencatatkan aset konsolidasian mencapai Rp1.678,10 triliun atau tumbuh 4,23% yoy. Sedangkan untuk total kredit dan pembiayaan BRI Group telah menembus seribu triliun rupiah, tepatnya sebesar Rp1.042,87 triliun. Proporsi kredit UMKM BRI pun terus merangkak naik, sebesar 83,86% dari total penyaluran kredit BRI disalurkan kepada segmen UMKM. Angka ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan BRI akan terus meningkatkan proporsi tersebut hingga mencapai 85% pada tahun 2024.

» Kestinambungan Tema

"BRI konsisten membantu pengembangan sektor UMKM yang unik dan tersebar diseluruh pelosok Indonesia dengan lebih cepat, lebih murah dan mudah melalui layanan *digital*"



2020

» Mengubah Kesulitan Menjadi Ketangguhan

125 tahun sudah BRI mencatatkan perjalanan panjangnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan melayani geliat berkembangnya nasabah dari lapisan masyarakat ekonomi kecil di seluruh pelosok Indonesia. Sepanjang usianya, BRI menunjukkan komitmennya dalam mengutamakan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BRI konsisten memberi layanan terbaik pada segmen ekonomi terbesar yang dijalani sebagian besar masyarakat Indonesia dengan membina, memberdayakan dan mendukung mereka untuk mengoptimalkan kompetensi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Konsistensi BRI telah melahirkan sejumlah besar nasabah UMKM yang "naik kelas" dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahun. Bahkan di usianya ke-125 tahun, pandemi melanda dan menjadi periode terberat yang mengubah dinamika kehidupan dan perekonomian seluruh lapisan masyarakat. BRI tegak berdiri di depan, memberikan dukungan terbaik bagi seluruh nasabahnya. Terutama bagi nasabah UMKM yang didera penurunan omset karena pembatasan sosial ekonomi.

Mengusung visi menjadi "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*" pada tahun 2025, BRI merealisasikan banyak terobosan brilian dalam mengatasi kondisi usaha yang tertekan, yang membatasi mobilitas seluruh pelaku usaha dalam berinteraksi dan mempromosikan produknya. BRI dengan sigap merealisasikan program restrukturisasi kewajiban dan di saat bersamaan mengoptimalkan keunggulan infrastruktur dan produk-produk layanan berbasis teknologi informasi. BRI dengan gencar membentuk ekosistem bisnis berbasis digital teknologi, yang memungkinkan seluruh nasabah pelaku bisnis terkoneksi dengan para konsumennya di seluruh pelosok negeri, bahkan hingga ke berbagai manca negara. BRI telah mengubah kesulitan menjadi peluang mengembangkan usaha dan menjadikan kreativitas dalam mengoptimalkan ekosistem digital sebagai ajang unjuk ketangguhan dalam mengatasi seluruh tantangan berusaha.

Konsistensi dalam mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM, membuat BRI berhasil mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar di Indonesia dengan aset konsolidasian mencapai Rp1.511,81 triliun dan tingkat permodalan yang kuat. BRI, kini dan ke depan, akan tetap konsisten dengan komitmennya untuk mendukung, membina, memberdayakan, dan terus memberi layanan terbaik kepada segmen UMKM. BRI bertekad untuk terus meningkatkan portofolio UMKM agar dapat memberi kontribusi terbaik kepada sebagian besar masyarakat dan memberi ketangguhan bagi daya tahan perekonomian bangsa.



2019

» Tak Pernah Berhenti Menumbuhkembangkan dan Memberdayakan yang Kecil Menjadi Semakin Berarti Bagi Negeri

BRI memiliki sejarah panjang sebagai bank yang telah melayani masyarakat Indonesia berskala ekonomi kecil. Bahkan walau usianya yang telah mencapai 124 tahun pada tahun 2019, BRI senantiasa mengutamakan pelayanan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BRI merupakan satu dari sedikit bank di dunia yang konsisten memberikan yang terbaik pada segmen tersebut untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Jumlah nasabah UMKM BRI yang “Naik Kelas” setiap tahunnya juga terus menunjukkan peningkatan. Oleh karena itu, tema yang diangkat pada laporan tahunan BRI 2019 dan dalam rangka menyambut usia BRI yang akan memasuki 125 tahun di tahun 2020 adalah “Tak Pernah Berhenti Menumbuhkembangkan dan Memberdayakan yang Kecil Menjadi Semakin Berarti Bagi Negeri”.

Dengan meluncurkan visi menjadi *The Most Valuable Bank in Southeast Asia and Home to the Best Talent*, banyak hal yang telah dan akan dilakukan BRI untuk mewujudkannya. Kapasitas BRI menjalankan fungsinya sebagai agen pembangunan dan perantara keuangan tak bisa dipungkiri telah teruji. Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) industri pada tahun 2019, BRI mampu mempertahankan pertumbuhan positif di atas rata-rata industri pada kedua indikator tersebut.

Penuh komitmen menyediakan pelayanan yang prima serta bekerja dengan optimal dan baik telah membawa BRI ke level usaha yang lebih tinggi. Hasilnya, BRI berhasil mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar di Indonesia dengan jumlah aset yang mencapai Rp1.416,8 triliun pada tahun 2019. Selain itu, BRI juga sukses meraih banyak penghargaan atas produk dan layanannya dari institusi-institusi independen terkemuka selama tahun 2019. BRI pun proaktif mendukung program Pemerintah seperti peningkatan inklusi keuangan, penyaluran kredit bersubsidi Kredit Usaha Rakyat, dan atau Bantuan Sosial Non Tunai. Pencapaian semua hasil positif ini tak lepas dari kedisiplinan BRI mengedepankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.



2018

» Akselerasi Pertumbuhan UMKM Melalui Digitalisasi Layanan Perbankan Untuk Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya untuk terus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan menjawab tantangan era disrupsi digitalisasi saat ini, BRI konsisten mengembangkan kompetensi di sektor unggulan UMKM yang didukung kualitas jaringan berbasis teknologi digital terkini, disertai penyempurnaan kegiatan operasional sesuai praktek tata kelola perusahaan terbaik. Melalui arahan strategis yang bijaksana dan kerja keras yang berkualitas sepanjang tahun, BRI mampu mencatat kinerja keuangan yang sangat baik pada tahun 2018.

Di tengah kondisi bisnis perbankan yang penuh tantangan, BRI berhasil menjalankan fungsi *intermediary*-nya dengan baik. Tercatat penyaluran kredit maupun pengumpulan dana masyarakat oleh BRI mampu tumbuh di atas rata-rata industri. Loyalitas nasabah dan kualitas layanan yang meningkat membuat basis nasabah BRI terus tumbuh. BRI juga mampu mencatat pertumbuhan pendapatan non-bunga yang semakin baik, ditopang naiknya transaksi *e-channel*. Selain itu, *business process reengineering* yang dilakukan mampu meningkatkan efisiensi dalam operasional bisnis BRI. Hal tersebut berdampak pada keberhasilan BRI dalam membukukan pertumbuhan laba bersih double digit, naik 11,6% mencapai Rp32,4 triliun, dengan nilai aset Rp1.296,8 triliun, terbesar di Indonesia.

Raihan kinerja yang sangat positif mengukuhkan komitmen BRI dalam memajukan sektor UMKM sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi nasional. BRI juga terus mendukung inklusi keuangan yang menyeluruh dan berkualitas melalui dukungan BRI pada berbagai program pemerintah, maupun melalui program digitalisasi dan peningkatan kualitas *operational excellence*.



2017

» Membangun Negeri Melalui *Integrated Banking Solution* & Transformasi UMKM

Bank BRI terus fokus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tetap menjaga kepemimpinan untuk pangsa pasar bisnis mikro. Bank BRI melakukan transformasi dengan terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku UMKM agar dapat “naik kelas” melalui akses pembiayaan, digitalisasi dan inklusi keuangan.

Digitalisasi UMKM dilakukan dengan terus mengembangkan *platform digital* seperti Indonesia Mall. Layanan ini mendorong pemasaran produk-produk mitra binaan UMKM BRI dari seluruh Indonesia untuk *go online*. Digitalisasi UMKM merupakan bagian dari terobosan BRI dalam mengembangkan *digital banking* melalui penerapan 6 pilar, yaitu *New Way of Working, Fintech Partnership, Mobile First Strategy, Open API, ChatBot* dan *Innovation Ecosystem*. Digitalisasi di Bank BRI didukung dengan teknologi satelit, dimana BRI merupakan satu-satunya bank di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri, yaitu BRIsat.

Dengan dukungan jaringan yang disediakan oleh satelit BRIsat, Bank BRI hadir di seluruh penjuru negeri, tidak terkecuali di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Keberadaan BRI di *remote area* bertujuan untuk menyediakan akses keuangan yang terintegrasi dengan kualitas yang sama seperti di wilayah perkotaan. Terbukanya akses perbankan yang terintegrasi bagi masyarakat di *remote area* merupakan komitmen BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Bank BRI juga terus melakukan penetrasi dan perluasan inklusi keuangan dengan pengembangan agen LAKU PANDAI yang dinamakan agen BRILink. Hingga akhir tahun 2017, BRI memiliki 279.750 agen BRILink yang mampu mencetak transaksi senilai Rp298 Triliun di sepanjang tahun 2017. Selain itu, BRI menjadi satu satunya bank yang berpartisipasi dalam Program Desa Nabung Saham yang bertujuan agar masyarakat di pedesaan melek terhadap investasi di instrumen saham. Komitmen Bank BRI terhadap pemberdayaan UMKM terlihat dari portofolio penyaluran kredit. Per akhir Desember 2017, BRI menyalurkan kredit sebesar Rp739,3 triliun dengan 73,5% diantaranya disalurkan ke segmen UMKM. Dengan demikian UMKM menjadi penyokong utama kinerja BRI sehingga mampu mencetak laba sebesar 29,04 triliun di sepanjang 2017. Pencapaian ini menjadikan BRI sebagai Bank pencetak laba terbesar di Indonesia selama 13 tahun berturut-turut.

LAPORAN TAHUNAN 2021



Kilas Kinerja



Laporan Direksi dan Dewan Komisaris



Profil Perusahaan



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank



Tinjauan Fungsi Pendukung Bisnis

DAFTAR ISI

1	TEMA DAN ARTI TEMA	9	SEKILAS TENTANG PERSEROAN
2	KESINAMBUNGAN TEMA	10	JEJAK LANGKAH
6	DAFTAR ISI	14	KONTRIBUSI TERBAIK KAMI

Kilas Kinerja

28	Pencapaian Kinerja Penting Tahun 2021	41	Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (<i>Suspension</i>) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (<i>Delisting</i>)
30	Ikhtisar Data Keuangan Penting	40	Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi
30	Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan	41	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
35	Ikhtisar Operasional	42	<i>Rating</i> Perusahaan 2021
37	Informasi Harga Saham	43	Peristiwa Penting
40	Aksi Korporasi		

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

54	Laporan Direksi	86	Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan 2021
70	Laporan Dewan Komisaris		

Profil Perusahaan

90	Identitas Perusahaan	134	Profil Dewan Komisaris
91	<i>Brand</i> Perusahaan	146	Profil Pejabat Eksekutif
92	Riwayat Singkat Perusahaan	150	Profil dan Pengembangan Kompetensi Karyawan
94	Keterangan Perubahan Nama	150	Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
96	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	150	Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan
96	Visi	151	Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia
96	Misi	151	Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
96	<i>Review</i> Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	151	Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian
97	Budaya Perusahaan	152	Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi
102	Bidang Usaha	152	Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja
102	Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan	152	Pengembangan Kompetensi Pegawai
103	Produk dan Jasa		
110	Peta Wilayah Usaha		
113	Daftar Keanggotaan Asosiasi		
114	Struktur Organisasi		
116	Profil Direksi		

152	Kebijakan	165	Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang Dari 5%	177	Kronologi Penerbitan Saham
153	Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan	166	Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi	180	Kronologi Penerbitan Obligasi
161	Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi	167	Klasifikasi Pemegang Saham	184	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
162	Biaya Pengembangan Kompetensi	168	Pemegang Saham Utama dan Pengendali	185	Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
162	Komposisi Pemegang Saham	169	Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi	187	Penghargaan dan Sertifikasi
163	Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar	176	Struktur Grup Perusahaan	196	Kantor Cabang Serta Kantor Perwakilan Kantor Cabang
165	Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih	177	Informasi Kelompok Usaha Bank	196	Informasi yang Tersedia Pada <i>Website</i>

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank

202	Tinjauan Perekonomian	292	Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang	381	Pencapaian Target dan Target Ke Depan
202	Analisis Perekonomian Global	295	Suku Bunga Dana	386	Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
205	Analisis Perekonomian Nasional	297	Suku Bunga Dasar Kredit	387	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
209	Analisis Industri Perbankan	298	Analisis Kualitas Aset Produktif	389	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
210	Analisis Posisi BRI dalam Industri Perbankan	300	Rasio Aset Produktif	397	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Bank
212	Tinjauan Operasional	300	Strategi Peningkatan <i>Fee Based Income</i>	403	Perubahan Kebijakan Akuntansi
212	Strategi Bank	300	Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko	404	Tingkat Kesehatan Bank
215	Aspek Pemasaran	300	Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal	404	Informasi Kelangsungan Usaha
215	Strategi Pemasaran Tahun 2021	375	Investasi Barang Modal	405	Aspek Perpajakan
219	Pangsa Pasar	376	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi Hutang dan Modal atau Lainnya	405	Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter
220	Tinjauan Operasi per Segmen Usaha	376	Komitmen dan Kontinjensi	406	Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain dalam Suatu Kelompok Usaha
222	Segmen Operasi	380	Perjanjian Signifikan	410	Transaksi <i>Spot</i> dan Transaksi Derivatif
266	Segmen Geografis	380	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan		
268	Tinjauan Keuangan	380	Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan		
268	Kinerja Keuangan				
268	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian				
282	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian				
289	Laporan Arus Kas Konsolidasian				

Tinjauan Fungsi Pendukung Bisnis

414	Sumber Daya Manusia
433	Teknologi Informasi
448	<i>Fixed Assets Management & Procurement</i>
451	<i>Network & Services</i>

DAFTAR ISI



Tata Kelola Perusahaan



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

457	Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan	705	Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya
457	Komitmen	705	Akses Informasi dan Data Perusahaan
458	Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan	710	Program Anti Korupsi
461	Kerangka Implementasi Tata Kelola Perusahaan	714	Kode Etik
461	Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	716	<i>Whistleblowing System</i>
461	Struktur Organ Perusahaan	719	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
462	<i>Governance Soft Structure</i>	722	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
462	Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	722	<i>Buyback Saham dan Buyback Obligasi</i>
462	Pemegang Saham	722	Rencana Strategis Bank
467	Rapat Umum Pemegang Saham	722	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
487	Dewan Komisaris	722	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
513	Direksi	723	Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)
534	Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris	723	Pencegahan Transaksi Orang Dalam (<i>Insider Trading</i>)
611	Organ dan Komite di Bawah Direksi	723	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
658	Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi	724	Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
664	Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015	731	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
667	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja	739	<i>Governance Principles for Banks</i> yang Diterbitkan oleh <i>Basel Committee in Banking Supervision</i>
668	Akuntan Publik	740	<i>Good Corporate Governance Assessment</i>
668	Manajemen Risiko		
691	Sistem Pengendalian Internal		
695	Fungsi Kepatuhan		
699	Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)		
703	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik		
703	Perkara Hukum		

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

746	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
-----	----------------------------------

747	INDEKS REFERENSI OJK DAN ARA
-----	------------------------------

766	LAPORAN KEUANGAN
-----	------------------

» Sekilas Tentang Perseroan

SEGMENT USAHA



Entitas Anak

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Raya)*	85,72%
BRI Remittance Co. Ltd. (BRI Remittance)	100,00%
PT Asuransi BRI Life (BRI Life)	63,83%
PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)	99,88%
PT BRI Danareksa Sekuritas (BRI DS)	67,00%
PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)	99,97%
PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)	99,97%
PT Pegadaian	99,99%
PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	99,99%

*Sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)

Produk dan Jasa Utama

- Produk Simpanan
- Produk Pinjaman
- Jasa Perbankan

Perusahaan Asosiasi

PT Bahana Artha Ventura (BAV)	15,10%
PT Danareksa Investment Management (DIM)	35,00%
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	4,30%
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	8,01%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI)	17,25%

» Jejak Langkah

“BRI memiliki sejarah dan pengalaman panjang dalam mengembangkan sektor perbankan, yang mengakar di berbagai wilayah di Indonesia dan siap mengembangkannya secara *quantum leap* menggunakan *digital* untuk menghadapi perubahan di era *new normal*”

1895

Raden Aria Wiriatmaja pada tanggal 16 Desember 1895, mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden, sebuah badan pengelola dana masjid di Purwokerto yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Lembaga ini sempat mengalami beberapa kali perubahan nama, yakni Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen (1895), De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank atau Volksbank dan kembali mengalami perubahan nama menjadi Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene (1912). Tahun 1934 berubah menjadi Algemene Volkscredietbank (AVB), hingga pada masa pendudukan Jepang, AVB berganti nama menjadi Syomin Ginko (1942-1945).

1946

Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, mengubah nama Syomin Ginko menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan perekonomian.

1960

Pemerintah mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani Nelayan (BKTN).

1992

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992, terjadi perubahan status badan hukum BRI menjadi perusahaan perseroan (Persero).

1984

Setelah dihentikannya program Bimas oleh Pemerintah, BRI mulai mengelola bisnis mikro secara komersial yang disalurkan melalui BRI Unit.

1969

BRI ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya bank yang bertugas menyalurkan kredit program Bimbingan Masal (Bimas) dan mulai dibentuknya BRI Unit.

1968

Sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968, Pemerintah kembali menetapkan nama Bank Rakyat Indonesia dengan status sebagai bank umum.

2003

Tanggal 10 November 2003, BRI menjadi Perseroan Terbuka melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Jakarta (kini Bursa Efek Indonesia/BEI) dengan ticker “BBRI”. Kini saham BRI tergabung dalam indeks saham LQ-45 dan menjadi salah satu saham unggulan (*blue chip*) di BEI.

2009

Interkoneksi *real time online* seluruh jaringan kerja yang pada saat itu berjumlah 6.480 unit kerja.

2007

BRI melakukan akuisisi Bank Jasa Artha yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRISyariah.

2011

- Tanggal 11 Januari 2011, melaksanakan pemecahan nilai nominal saham dengan perbandingan 1: 2.
- Tanggal 3 Maret 2011, penandatanganan Akta Akuisisi saham PT Bank Agroniaga Tbk. antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun).
- Tanggal 16 Desember 2011, penandatanganan *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* antara BRI dengan PT Asuransi Jiwa BRIngin Jiwa Sejahtera atas saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (Hong Kong).

2014

- Jaringan ATM BRI terus bertumbuh mencapai 20.792 unit ATM dan EDC menembus angka 131.204 unit, merupakan jaringan ATM dan EDC terbesar di Indonesia.
- BRI telah melakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit dan Peluncuran Satelit BRI (BRIsat) dengan *Space System/ Loral* (SSL) dan Arianespace pada tanggal 28 April 2014.

2013

BRI Hybrid Banking merupakan layanan *self-service banking* yang pertama di Indonesia.

2018

- Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah BRI meluncurkan *Artificial Intelligence* bernama Sabrina sebagai BRI New Assistance yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai Bank BRI.
- Bank BRI mendorong UMKM *Go Digital* dengan meluncurkan Indonesia Mall bekerjasama dengan *startup-startup market place* sehingga memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjual produknya dengan pasar yang lebih luas.
- BRI menerbitkan beberapa surat berharga berikut:
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A, jatuh tempo pada 21 Februari 2023, dengan nilai nominal Rp1.837.000.000.000 dan *coupon/discount rate* sebesar 6,65%, serta peringkat AAA dari Pefindo.
 - Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B, jatuh tempo pada 21 Februari 2025, dengan nilai nominal Rp605.000.000.000 dan *coupon/discount rate* sebesar 6,90%, serta peringkat AAA dari Pefindo.
- Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018, jatuh tempo pada 21 Juni 2023, dengan nilai nominal Rp500.000.000.000 dan *coupon/discount rate* sebesar 7,70%, serta peringkat AA dari Pefindo.
- BRI telah melakukan penyertaan pada 3 bisnis baru, yaitu 2 (dua) tambahan perusahaan anak, PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) dan PT BRI Danareksa Sekuritas (DS), serta penyertaan pada PT Danareksa Investment Management (DIM). Atas penyertaan yang telah dilakukan oleh BRI, maka jumlah Perusahaan Anak yang dimiliki oleh BRI Group menjadi 8 (delapan) Perusahaan Anak yaitu Syariah (BRISyariah), Bank Konvensional (BRI Agro), Remittance (BRI Remittance), Asuransi (BRI Life), Multifinance (BRI Finance), Modal Ventura (BRI Ventures) dan Sekuritas (BRI Danareksa Sekuritas) dan General Insurance (BRI Insurance).
- BRI juga meresmikan BRI Institute sebagai salah satu wujud nyata Bank BRI dalam Membangun Kapasitas Nasional atau *National Capacity Building* di segmen UMKM.



2017

- Pada tanggal 14 Maret 2017 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Timor Leste.
- Pada tanggal 24 Februari 2017 BRI resmi meluncurkan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II dan Teras BRI Kapal Bahtera Seva III untuk menjangkau masyarakat pesisir di kepulauan Labuan Bajo dan Halmahera.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017 telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp 250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per saham (Rasio 1:5) dan mulai diperdagangkan pada perayaan 14 Tahun Saham BRI melantai dibursa yakni tanggal 10 November 2017.



2016

- Tanggal 18 Juni 2016, pukul 18.38 Waktu Kourou, Guyanan Prancis, satelit milik BRI, BRIsat meluncur dengan sukses. BRIsat menjadi infrastruktur penunjang layanan digital Bank BRI.
- BRI Mengakuisisi BTMU Finance yang bergerak di bidang *multifinance*. BTMU Finance berubah nama menjadi BRI Finance.
- Meluncurkan layanan *full-digital branch* di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta dan juga program digitalisasi untuk UMKM seperti e-Pasar, Teras BRI Digital. 1 Juta Domain Gratis Untuk UMKM dan Rumah Kreatif BUMN.



2015

- Pada tahun 2015 BRI membuka Unit Kerja Luar Negeri di Singapura serta mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (Bringin Life)
- Pada tanggal 4 Agustus 2015 BRI resmi meluncurkan Teras BRI Kapal untuk menjangkau masyarakat pesisir kepulauan yang selama ini belum dapat menikmati layanan perbankan.
- BRI juga meresmikan BRI *Corporate University* sebagai sarana penunjang yang komprehensif bagi pendidikan pekerja.



2019

- BRI melalui perusahaan anak BRI Agro meluncurkan PINANG, *Digital Lending* Perbankan Pertama di Indonesia. Dengan mengkombinasikan teknologi digital, PINANG mempercepat proses pengajuan sampai dengan pencairan kurang dari 10 menit. Pengajuan dapat dilakukan tanpa harus ke bank dan tanpa tatap muka secara langsung. Melalui proses yang cepat, murah, dan aman, serta plafon yang bersaing, PINANG akan memberikan kemudahan ekstra kepada nasabah untuk mengajukan pinjaman.
- BRI melakukan akuisisi perusahaan yang bergerak di bidang Asuransi Umum yaitu PT Bringin Sejahtera Artha Makmur (BRINS), akuisisi ini merupakan langkah strategis perseroan untuk menjadi *integrated financial solution* yang akan semakin melengkapi layanan keuangan yang dimiliki oleh BRI Group.
- Pada tanggal 28 Maret 2019 BRI menerbitkan obligasi berkelanjutan (*sustainability bond*) dengan nominal sebesar USD500.000.000 (angka penuh) untuk jangka waktu 5 tahun. Penerimaan dari penerbitan obligasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai *Eligible Project* sesuai dengan *Sustainability Framework*.
- Guna memberikan kemudahan dan keamanan layanan transaksi perbankan, BRI kembali meluncurkan terobosan *digital banking* terbarunya. Yang terbaru, BRI meluncurkan aplikasi BRImo, aplikasi BRI Mobile terbaru berbasis data dengan UI/UX (*user interface/ user experience*) dan fitur-fitur terbaru yang dapat digunakan oleh nasabah maupun non nasabah BRI tanpa perlu datang ke kantor cabang dengan pilihan sumber dana giro, tabungan dan Uang Elektronik untuk setiap fitur-fiturnya. BRImo memiliki berbagai keunggulan menarik, yakni kemudahan dalam pembukaan rekening Tabungan BRI Britama Muda, login aplikasi menggunakan *finger print* maupun *face id Recognition*, cek mutasi rekening hingga 1 tahun kebelakang, penggunaan alias rekening serta akses info promo BRI. Pengguna BRImo hingga Desember 2019 telah mencapai 2,96 juta pengguna.
- Pada 12 Desember 2019, BRI melakukan terobosan inovasi atas produk dan layanan keuangannya untuk mengukuhkan diri sebagai lembaga keuangan terdepan dalam digital banking di Indonesia. Yang terbaru, BRI meluncurkan pinjaman online yang diberi nama CERIA. Melalui peluncuran ini, BRI menjadi bank BUMN pertama yang memiliki aplikasi pinjaman *online*.
- Selain berinovasi dengan mengembangkan berbagai produk *digital banking*, selama periode tahun 2019 BRI juga terus melakukan pemberdayaan UMKM melalui penyaluran KUR senilai Rp87,9 Triliun kepada lebih dari 4 juta pelaku UMKM. Dari total KUR yang disalurkan selama tahun 2019 oleh BRI tersebut, Rp75,7 Triliun atau 86,1% diantaranya disalurkan khusus di segmen mikro. Dengan demikian, sejak tahun 2015, BRI telah berhasil menyalurkan KUR dengan total nilai mencapai Rp323,4 Triliun kepada lebih dari 16,6 juta pelaku UMKM diseluruh Indonesia.

2020

BRI secara aktif menjadi mitra utama Pemerintah dalam mengimplementasikan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang telah memberikan dampak positif, tidak hanya bagi Debitur yang sebagian besar UMKM, tetapi juga bagi Perseroan. Sampai dengan Desember 2020, program PEN yang telah dilaksanakan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Penyaluran Kredit UMKM dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp45 triliun (3 kali) dari Penempatan Dana Pemerintah;
2. Penyaluran kredit dengan skema penjaminan pada segmen kecil dan ritel sebesar Rp8,73 triliun kepada lebih dari 14 ribu Debitur;
3. Penyaluran Subsidi Bunga Kredit UMKM sebesar Rp5,47 Triliun kepada lebih dari 8,9 juta penerima;
4. Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp18,64 triliun kepada lebih dari 7,7 juta usaha mikro;
5. Penyaluran KUR Super Mikro sebesar Rp8,66 triliun kepada lebih dari 985 ribu debitur;
6. Penyaluran subsidi gaji sebesar Rp6,45 triliun kepada lebih dari 5 juta penerima.

Selain itu, sebagai upaya penyelamatan debitur terdampak COVID-19, Sampai dengan Desember 2020, BRI telah melakukan restrukturisasi sebesar Rp186,6 Triliun kepada 2,8 juta debitur, dimana sebesar 95% merupakan debitur segmen Mikro, Konsumer, Kecil dan Menengah.

- Untuk memberikan kemudahan bagi nasabah bertransaksi di tengah pandemic, BRI menghadirkan inovasi-inovasi digital sebagai berikut:
 - Peluncuran BRImo New Look
 - Peluncuran Pasar.id. Adanya social distancing & PSBB menyebabkan aktivitas pasar menjadi terbatas, sehingga pedagang mengalami omzet. BRI membantu "Survival Mode" Pasar Tradisional dengan memperkenalkan belanja online (baik melalui WA, Website, Mobile Apps, maupun kerjasama dengan start up).
 - Peluncuran Digital Saving. BRI meluncurkan layanan pembukaan rekening secara digital melalui Platform Digital Saving yang dapat diakses melalui channel Bank BRI ataupun pihak ketiga yang bekerjasama, dengan menggunakan 2 teknologi yaitu face recognition dan digital signature, sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor Bank untuk bertatap muka dengan petugas.
- Peluncuran lembaga sertifikasi profesi perbankan di Indonesia (BRISLP).
- Peluncuran BRI Micro & SME Index (BMSI). Peluncuran BMSI merupakan kepedulian BRI terhadap aktivitas UMKM Indonesia untuk menjadi suatu informasi. BMSI menjadi leading indikator pertama di Indonesia yang mengukur aktivitas UMKM yang suatu saat akan bermanfaat bagi kebijakan publik.

📍 2021

- Sepanjang tahun 2021, selain menghasilkan kinerja pertumbuhan organik yang kuat, BRI melakukan 3 (tiga) aksi korporasi besar sebagai bagian dari pertumbuhan anorganik. Pertumbuhan anorganik yang dilakukan tidak hanya untuk memberikan dukungan pada pertumbuhan yang berkelanjutan, namun juga merupakan bagian dari proses value creation yang tidak pernah berhenti dilakukan. Adapun 3 (tiga) aksi korporasi tersebut antara:
 1. Konsolidasi BRI Syariah bersama Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), dimana pada aksi korporasi ini BRI mampu menciptakan nilai yang ditunjukkan dengan kenaikan harga saham BRI Syariah hingga 4 kali lipat, dari sebelum konsolidasi sekitar Rp500 menjadi saham Bank Syariah Indonesia yang telah mencapai kisaran harga Rp2000 pasca konsolidasi.

Pembentukan Bank Syariah Indonesia merupakan langkah awal dalam mengoptimalkan potensi pasar Syariah di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, serta mampu membawa Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu pemain penting dalam ekonomi Syariah global.
 2. Kerja sama strategis BRI Life bersama FWD dimana pada transaksi ini valuasi BRI Life meningkat 5,6x sejak bergabung bersama BRI pada tahun 2015. Melalui partnership ini, BRI akan mengoptimalkan kekuatan customer base dan infrastruktur perusahaan dengan expertise partner untuk memberikan customer experience serta new value proposition kepada lebih banyak pelanggan.
 3. Pembentukan Ekosistem Ultra Mikro bersama Pegadaian dan PNM yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang terintegrasi kepada segmen Ultra Mikro di Indonesia.

Dalam rangka pembentukan Holding Ultra Mikro tersebut, Perseroan juga telah melakukan rights issue dengan nilai Rp. 95,9 triliun yang tercatat sebagai right issue yang terbesar di Asia Tenggara, terbesar ke-3 di Asia, dan terbesar ke-7 di dunia.
- Sebagai upaya melanjutkan momentum positif kebangkitan perekonomian nasional, BRI menjadi titling sponsor BRI Liga 1 sehingga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional. Khususnya agar industri sepak bola nasional termasuk UKM, UMKM, dan turunannya seperti perusahaan konveksi jersey sepak bola, penjual souvenir, pernak pernik tim, dan industri sepatu sepak bola akan kembali menggeliat.
- BRI membuka *outlet* luar negeri keenam yakni Kantor Cabang di Taipei, Taiwan. yang terletak di No. 166, Sec. 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan. Operasional BRI Taipei Branch (BRITW) ini sudah mulai beroperasi pada Selasa, 30 November 2021. BRI Taipei Branch juga telah mengantongi izin operasional sebagai *Full Retail Foreign Bank Branch Office License* oleh otoritas Taiwan. Dengan lisensi tersebut, BRI Taipei Branch dapat memberikan pelayanan Simpanan, Pinjaman, Remitansi, Trade Finance, dan Treasury kepada nasabah di Taiwan.



» Kontribusi Terbaik Kami

EVP Memberi Makna Indonesia

Dalam upaya mencapai visi perusahaan menjadi *Home to The Best Talent*, manajemen BRI telah merumuskan dan menetapkan atribut unik yang dapat memberikan gambaran dan nilai jual bekerja di BRI Group (*Employee Value Proposition*). Adapun *Employee Value Proposition* (EVP) yang ditetapkan adalah "Memberi Makna Indonesia". Atribut tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan *living values*, *attractive values*, dan *ideal values* yang hidup dan berkembang di BRI.

Secara lebih detail, EVP BRI dapat diterjemahkan ke dalam 3 (tiga) aspek yang lebih mendetail yaitu (1) BRI merupakan tempat belajar dan berkembang bagi setiap Insan BRILiaN, membentuk pribadi unggul yang tangguh, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman (*LEARN*); (2) Bagi setiap Insan BRILiaN, merancang masa depan bukan hanya sekedar harapan. Peluang meraih karier di BRI terbuka luas bagi setiap Insan BRILiaN yang mampu menunjukkan kinerja unggul secara konsisten (*GROW*); dan (3) BRI menciptakan insan pembawa perubahan, para bintang kehidupan yang mengubah kehidupan ekonomi masyarakat dengan semangat tanpa menyerah. Bersama, berkarya, membuat hidup lebih bermakna (*CONTRIBUTE*).

BRIvolution 2.0

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dengan visi perusahaan untuk menjadi "*The Most Valuable Bank in Southeast Asia & Home to the Best Talent*" telah disusun BRI untuk periode tahun 2018-2022. Namun demikian, pandemi COVID-19 yang terjadi secara global berdampak kepada iklim usaha dan pelaku bisnis sehingga berdampak pada kinerja perusahaan.

Merespon kondisi tersebut, BRI melakukan langkah strategis untuk mengevaluasi dan melakukan *re-adjustment* atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2018-2022 atau BRIvolution 1.0 tersebut menjadi RJPP tahun 2021-2025 atau yang lebih dikenal dengan nama BRIvolution 2.0.

BRIvolution 2.0 (RJPP 2021 - 2025) yang telah disusun memiliki visi yang baru yakni menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champions of Financial Inclusion* di 2025. Secara garis besar untuk 5 (lima) tahun ke depan, BRI telah menetapkan strategi Perseroan menjadi tiga fase transformasi, yaitu:

1. *Strengthen the Core* (2021-2022)

BRI akan terus memprioritaskan dan memperkuat strategi pertumbuhan aset bisnis di segmen UMKM dengan meningkatkan penetrasi pasar mikro melalui pemberdayaan usaha ultra mikro (UMi) sebagai sumber pertumbuhan baru Perseroan.

2. *Scale up and Scope up* (2023-2024)

Untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya BRI terus memperluas jangkauan bisnisnya (*scale up*) melalui perluasan pangsa pasar dan pengembangan ekosistem bisnis baru serta memperluas cakupannya dengan mendorong kontribusi perusahaan anak (*scope up*) kepada induk perusahaan.

3. *Sustain* (2025 dan seterusnya)

Pertumbuhan yang atraktif melalui perluasan jangkauan dan cakupan bisnis tersebut diharapkan dapat membuat kondisi keuangan BRI yang *sustain*.

Adapun beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian visi 2025 tersebut antara lain:

Indicators

- *Market Cap* BRI menjadi US\$75 Billion
- *90% Financial Inclusion*

Enablers

- *Digital First DNA*
- *Home to the best talent*
- *Agile and Entrepreneurial Mindset*

Untuk mendukung langkah strategis tersebut, maka proses transformasi perusahaan tentunya akan menyentuh area *Digital* dan *Culture*. Perpaduan keduanya diyakini akan berdampak pada peningkatan bisnis Perseroan, efisiensi proses bisnis untuk menurunkan biaya dan menemukan model bisnis baru serta mendorong budaya perusahaan sehingga semua pihak di BRI turut aktif terlibat di dalamnya.

BRIvolution 2.0 dapat dikelompokkan kedalam 6C unsur utama transformasi, yakni:

1. **Create New Growth Engine**, yakni penciptaan mesin pertumbuhan bisnis yang baru.
2. **Accelerate CASA Growth**, dimana inisiatif strategis akan difokuskan untuk meningkatkan porsi CASA salah satunya adalah dengan pemanfaatan *model analytics* berbasis kecerdasan buatan.
3. **Enhance Cross-sell to Boost Fee Income**, yakni inisiatif yang mendukung peningkatan pendapatan jasa melalui *cross-selling*. Dengan memanfaatkan *Artificial Intelligence (AI)* serta *data analytics* untuk membantu memasarkan produk BRI dan Perusahaan Anak.
4. **Contain Credit Cost**, melalui inisiatif strategis yang difokuskan untuk *me-manage credit cost* serta peningkatan kapabilitas manajemen risiko perusahaan.
5. **Improve Customer Experience**, adalah melalui inisiatif strategis yang dikerjakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sehingga akan lebih loyal dan dengan memanfaatkan AI serta *chatbot* sebagai salah satu perangkatnya.
6. **Adapt Culture & Capabilities**, sebagai kelompok inisiatif yang memiliki peranan sebagai *enabler* dalam proses

transformasi di BRI. Beberapa inisiatif terkait ini diantaranya penerapan kerja berbasis *agile*, peningkatan kompetensi dan kapabilitas berbasis digital/*analytics/digital marketing* sebagai faktor penentu keberhasilan transformasi, serta melanjutkan transformasi budaya yang sedang berjalan guna mendukung BRIvolution 2.0.

Dengan adanya Sistem Informasi baru dan lebih kokoh pada BRIvolution 2.0 ini diharapkan dapat memperbaiki struktur neraca dan laba - rugi BRI melalui perbaikan struktur dana, pengendalian kualitas *earning asset*, diversifikasi *income*, peningkatan produktivitas jaringan melalui *efficiency business process*, peningkatan produktivitas pekerja, serta menerapkan *operational excellence* melalui *business process re-engineering* dan peningkatan kualitas *Information Technology (IT)* dan *Management Information System*, serta terus membangun sinergi BUMN untuk meningkatkan efisiensi.

Seluruh rangkaian strategi dan program kerja BRI tersebut di atas akan dilaksanakan sesuai dengan Visi BRI. Hal ini merupakan komitmen BRI untuk mendukung *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Indonesia yaitu mengembangkan bisnis dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan.

EMBRIO

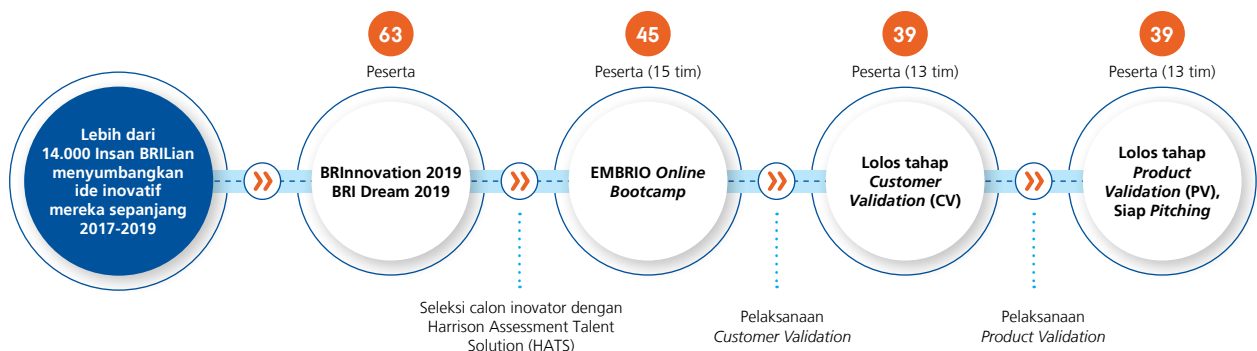
BRI Meluncurkan *Corporate Innovation Lab* bernama EMBRIO: 39 Inovator Mempresentasikan Ide Inovatifnya ke *Business Owner*

Dalam menghadapi era ekonomi *digital* dan lingkungan yang penuh disrupti, kemampuan untuk beradaptasi dan bereksperimen dengan cepat sangatlah dibutuhkan. Penciptaan peluang dan ide bisnis baru menjadi kian penting bagi bisnis untuk tetap bertahan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merespons tantangan-tantangan tersebut dengan agenda transformasi terbarunya: BRIvolution 2.0, yang berfokus pada transformasi *digital* dan *culture*.

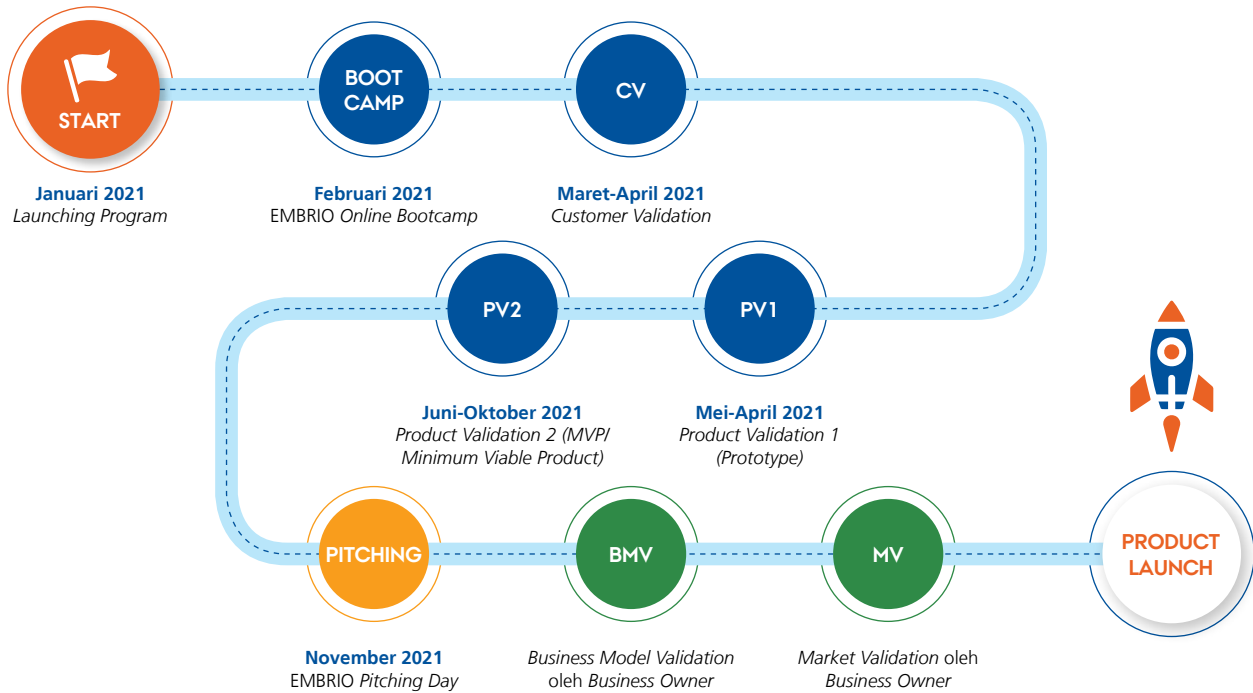
Manajemen BRI telah berkomitmen untuk melibatkan ide-ide dari Insan BRILian untuk menjalankan rencana transformasi yang didukung dengan *Agile* dan *Entrepreneurial Mindset*, penggerak utama dalam transformasi BRIvolution 2.0 selain *Digital-First DNA* dan *Home to the Best Talent*. Saat ini, BRI memiliki *corporate innovation lab* sendiri di mana Insan BRILian dapat mewujudkan ide-ide inovatif mereka untuk mendukung penciptaan mesin pertumbuhan baru di BRI.

Peluncuran EMBRIO

Sepanjang 2017-2019, lebih dari 14.000 Insan BRILian telah menyumbangkan ide-ide inovatifnya untuk membuat model bisnis BRI yang sudah ada saat ini menjadi lebih kompetitif dan lebih relevan dengan nasabahnya. Untuk mengakomodasi ide-ide tersebut, BRI mengadakan BRInnovation dan BRI Dream pada tahun 2019 yang menghasilkan 63 finalis. Pada tahun 2021, BRI meluncurkan *corporate innovation lab* yang disebut "EMBRIO".



EMBRIO diluncurkan untuk mendorong inovasi model bisnis melalui proses *validated learning*. 63 finalis dari program inovasi sebelumnya diseleksi lebih lanjut dengan menggunakan HATS (*Harrison Assessment Talent Solution*). Selanjutnya, 45 peserta terpilih yang terbagi ke dalam 15 tim beranggotakan 3 (tiga) orang masuk ke *online bootcamp* EMBRIO. Perjalanan mereka menjadi inovator kemudian berlanjut ke tahap *Customer Validation*. 13 tim yang lolos tahap *Customer Validation* melanjutkan ke tahap *Product Validation 1*. Tim inovator membuat *prototipe* produk mereka dan tahap *Product Validation 2* (dua) yang setiap tim inovator menghasilkan MVP (*Minimum Viable Product*).



EMBRIO Pitching Day

Tahapan terakhir yang dilalui oleh tim inovator adalah tahap *pitching*. Acara ini diadakan pada 17 November 2021 di BRILian Center. Dalam acara tersebut, 13 tim mempresentasikan idenya kepada para panelis. EMBRIO *Pitching Day* menghadirkan panelis dari jajaran direksi sebagai *business owner* sekaligus calon investor; Indra Utoyo (Direktur Digital & Teknologi Informasi), Handayani (Direktur Bisnis Konsumer), Supari (Direktur Bisnis

Mikro), Amam Sukriyanto (Direktur Usaha Kecil dan Menengah), Achmad Royadi (Senior Executive Vice President Treasury and Global Service), dan Nicko Widjaja (Chief Executive Officer BRI Ventures).

Ide inovasi dari tim inovator didasarkan pada 6C (*accelerate CASA growth, contain credit cost, enhance cross-sell to boost fee income, improve customer experience, adapt culture and capabilities, create new*

growth engine), prioritas strategis dalam BRInnovation 2.0.

Perjalanan Terus Berlanjut

Perjalanan para inovator tidak berhenti di situ. Ketika inovasi mereka bisa memikat panelis dan berhasil memenuhi kriteria, proses inovasi akan berlanjut ke tahap *Business Model Validation* dan *Market Validation* yang akan diawasi langsung oleh divisi *business owner*.



Gelombang pertama EMBRIO telah berhasil mencapai tonggak baru dalam pengembangan manajemen inovasi di BRI, mendukung aspirasi BRI di BRInnovation 2.0 untuk menjadi "The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion" pada tahun 2025 mendatang.

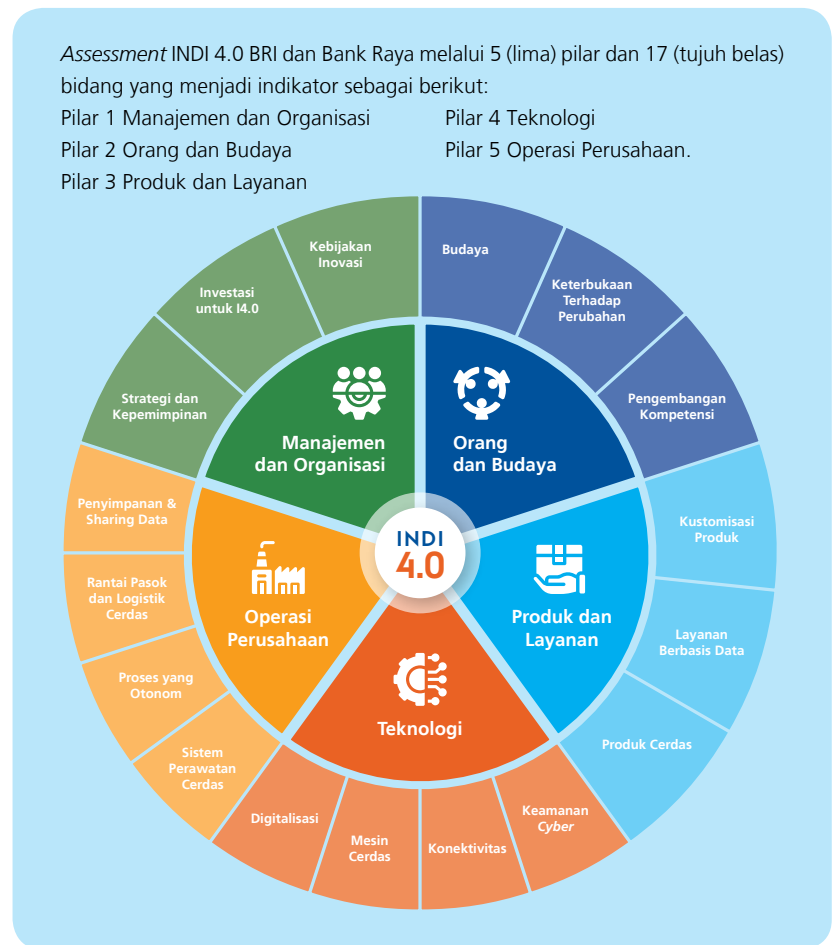
Assessment Indi 4.0 BRI

Seiring dengan pelaksanaan transformasi BRI yang telah dimulai sejak tahun 2017 melalui penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yaitu BRRevolution 1.0 serta dilanjutkan dengan BRRevolution 2.0 pada tahun 2021, BRI secara kontinyu berkomitmen untuk bertransformasi dengan menitik beratkan pada Area *Digital* dan *Culture*. Berbagai perubahan baik dari perubahan bisnis proses yang lebih *robust* yang dibarengi dengan transformasi di Sisi *Culture* Perseroan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan menjangkau layanan keuangan bagi para masyarakat luas. Selaras dengan implementasi berbagai *strategic initiative* BRRevolution 1 dan 2, pada Tahun 2021, BRI Group yang meliputi BRI dan Bank Raya melakukan kegiatan *assessment* Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0). INDI 4.0 adalah sebuah indeks acuan yang digunakan oleh industri dan pemerintah untuk mengukur tingkat kesiapan industri menuju Industri 4.0 dengan menggunakan *framework* yang disusun oleh Kementerian Perindustrian.

BRI memiliki tim transformasi, khususnya pada bidang *digital* dan *culture* untuk membangun berbagai inovasi di bidang produk dan bisnis proses untuk melatih *capability* pekerja sehingga memiliki *mindset intrapreneur* melalui manajemen inovasi BRI. Hal ini menjadi tolak ukur dalam penilaian Pilar Management dan Organisasi.

Untuk mendukung pilar Orang dan Budaya, BRI One Culture membentuk pekerja untuk lebih adaptif dan mampu menerapkan *work from everywhere* dengan memanfaatkan *co-working space* BRI. Selain itu, BRI juga terus meningkatkan Produk dan layanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari nasabah dengan mempertimbangkan berbagai macam segmentasinya.

Dari segi teknologi, BRI selangkah lebih maju dari pesaingnya karena menjadi satu-satunya Bank yang memiliki Satelit untuk menjangkau nasabah hingga ke



pelosok negeri. Melalui teknologi terkini dan sudah tersertifikasi ISO 270001 tahun 2013, BRI tidak hanya memberikan layanan kepada nasabah namun juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pekerja melalui aplikasi-aplikasi internal yang memiliki fitur lengkap.

Pada pilar Operasional Perusahaan, BRI membuktikan kesiapannya dengan pengelolaan data serta optimalisasi cloud. BRI juga menerapkan keamanan berlapis dengan menggunakan sistem otorisasi bertingkat dalam setiap bisnis prosesnya.

Kegiatan *assessment* dilakukan di Kantor Pusat BRI, *Regional Office* dan *Branch Office* BRI dan berlangsung sejak September sampai dengan November 2021. Adapun cakupan *assessment* INDI 4.0 memfokuskan kepada 3 (tiga) produk dan layanan sebagai wujud nyata perjalanan transformasi BRI yaitu BRImo, BRISpot dan BRILink.

Melalui berbagai rangkaian *assessment* yang telah dilakukan, BRI mendapatkan nilai skor akhir INDI 4.0 sebesar 3,61, yang jika diterjemahkan termasuk dalam kategori **'Sudah Menerapkan'** serta mendukung aspirasi BRI untuk menjadi BUMN dengan kategori *"National Lighthouse"*. Melalui *assessment* INDI 4.0 yang telah dilakukan BRI Group menjadi pembuktian bahwa transformasi yang dilakukan BRI semenjak tahun 2017 memberikan dampak signifikan bagi BRI untuk mempersiapkan BRI dalam menghadapi Industri 4.0 khususnya pada bidang *digital* dan *culture*. *Assessment* INDI 4.0 menjadi pendukung bagi BRI dalam mengimplementasikan berbagai *strategic initiative* guna mendukung berjalannya transformasi Perseroan.



Focus Group Discussion INDI 4.0 Desember 2021.



Penyerahan Plakat kepada Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Bapak Imam Bustomi (Kiri) oleh Division Head, Change Management Division, BRI, Bapak Agus Firmansyah.

Brandon Hall Award

BRI telah memulai transformasi sejak 2017, dengan gerakan transformasi yang bernama BRlvolution. Transformasi perusahaan telah melahirkan beberapa inisiatif strategis yang sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan kinerja Perseroan. Namun demikian, dengan munculnya pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi Perseroan yang sedang bertransformasi ini untuk dapat segera mengkalibrasi ulang atas rencana jangka panjang perusahaan. Brivolution 2.0 (*corporate plan 2021-2025*) adalah sebuah penajaman arah strategis perusahaan dengan sekaligus menyesuaikan perubahan perilaku pasar, proses digitalisasi ekonomi, dan beberapa aspek lainnya, sehingga Perseroan memiliki visi yang baru yaitu untuk menjadi *"The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion"*. Pada September 2021, BRI berinisiatif untuk mengikuti ajang penghargaan dari Brandon Hall Group, khususnya dalam program *Excellence in Technology* dengan kategori *Best Advance for Leading Under a Crisis* dan *Best Advance in Business Automation* dengan use case beberapa proyek Brivolution sebagai materi yang menjadi case studinya.

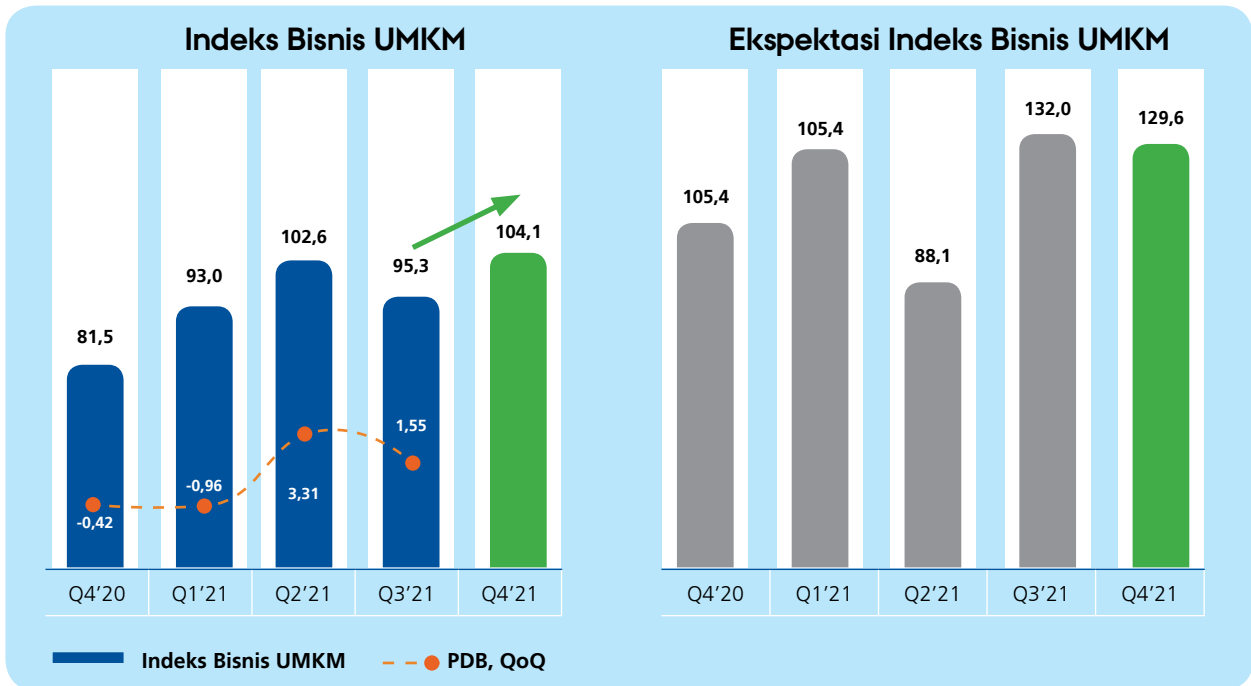
Penilaian untuk *Excellence in Technology Awards* dilakukan oleh tim praktisi dan pakar industri internasional berdasarkan nilai dan manfaat keseluruhan serta hasil yang terukur dari program atau teknologi yang diterapkan oleh Perseroan. Kriteria yang dinilai adalah *value proposition, innovation, unique differentiators, demonstration of the solution* dan *measurable results*.

Sebagai hasil dari keikutsertaan BRI dalam ajang penghargaan dari Brandon Hall Group tersebut, BRI dengan sukses meraih GOLD pada area *Future of Work*, yaitu kategori *Best Advance for Leading Under a Crisis* dan GOLD untuk *Best Advance in Business Automation* setelah bersaing dengan berbagai perusahaan bergengsi lainnya di seluruh dunia seperti Accenture, Capgemini, dan lainnya.



Indeks Bisnis UMKM

Indeks Bisnis UMKM merupakan indeks yang ditujukan untuk penilaian kegiatan Pelaku UMKM untuk menginikan situasi terkini dan mengukur ekspektasi untuk 3 bulan ke depan. Indeks tersebut diluncurkan pada Januari 2021 untuk mengukur aktivitas bisnis UMKM sekaligus sebagai bentuk engagement BRI kepada UMKM Indonesia. Aktivitas bisnis UMKM pada Q4-2021 menunjukkan perbaikan yang signifikan dari periode sebelumnya, terlihat dari peningkatan indeks aktivitas bisnis (IAB), UMKM juga sangat optimis atas kinerja pada Q1-2022 yang tergambar dari indeks ekspektasi IAB yang jauh diatas 100.



BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR

BRI kembali menggelar pameran virtual UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 dalam rangka mendukung UMKM di Indonesia agar dapat menembus pasar global sekaligus menyambut ulang tahun BRI ke 126. Pada tahun 2021, acara ini digelar dengan mengusung tema "Dari Indonesia untuk Dunia". Terdapat 500 peserta UMKM yang telah terpilih melalui serangkaian proses kurasi dan acara ini menjadi pameran bazar virtual terbesar yang pernah diselenggarakan oleh BRI.

Seperti tahun sebelumnya, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR menghadirkan sensasi pameran nyata di dunia maya sekaligus memberikan pengalaman 3D kepada pengunjung dan akan menampilkan konsep *thematical outdoor* yang menghadirkan 5 (lima) destinasi wisata di Indonesia. Destinasi tersebut yaitu Raja Ampat, Borobudur, Toba, Ubud (Bali), dan Tanjung Kelayang (Belitung). Sebagai pelengkap acara, terdapat serangkaian kegiatan seperti *Music Performance*, *Coaching Clinic*, *Inspiration Talk*, *Do It Yourself* (Yuk Berkarya), *Podcast*, dan *Business Matching* yang berisi pelatihan dan *workshop* untuk pelaku UMKM.

Business Matching 2021 kali ini dihadiri oleh 110 buyers yang berasal dari 31 negara dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Timur Tengah, Jepang, Australia, dan berhasil menandatangani *commitment deal* bersama 163 UMKM dengan nilai transaksi mencapai US\$72,13 juta. Pada kesempatan yang sama, BRI juga menyerahkan sejumlah donasi senilai Rp100 juta kepada komunitas Sahabat UMKM. Dana ini diperoleh dari hasil lelang kolaborasi antara produk UMKM dengan para desainer ternama.

Selain itu, selama acara berlangsung nasabah BRI dapat menikmati berbagai promo menarik berupa diskon dan *cashback* hingga 31 Desember 2021. Promo tersebut dapat diperoleh jika melakukan pembelian produk *via e-commerce* Shopee dan PADI UMKM, serta melakukan pembayaran menggunakan debit dan kartu kredit BRI. Pada kesempatan ini, pembelian melalui *e-commerce* telah berhasil membukukan nilai transaksi sebesar Rp10,39 miliar. Seluruh rangkaian kegiatan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 ini dapat diakses melalui *website* brilianpreneur.com yang telah berhasil mendatangkan lebih dari 562 ribu viewers sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 serta melalui channel YouTube BRI, dan media sosial BRI.

Hybrid Bank Business Model

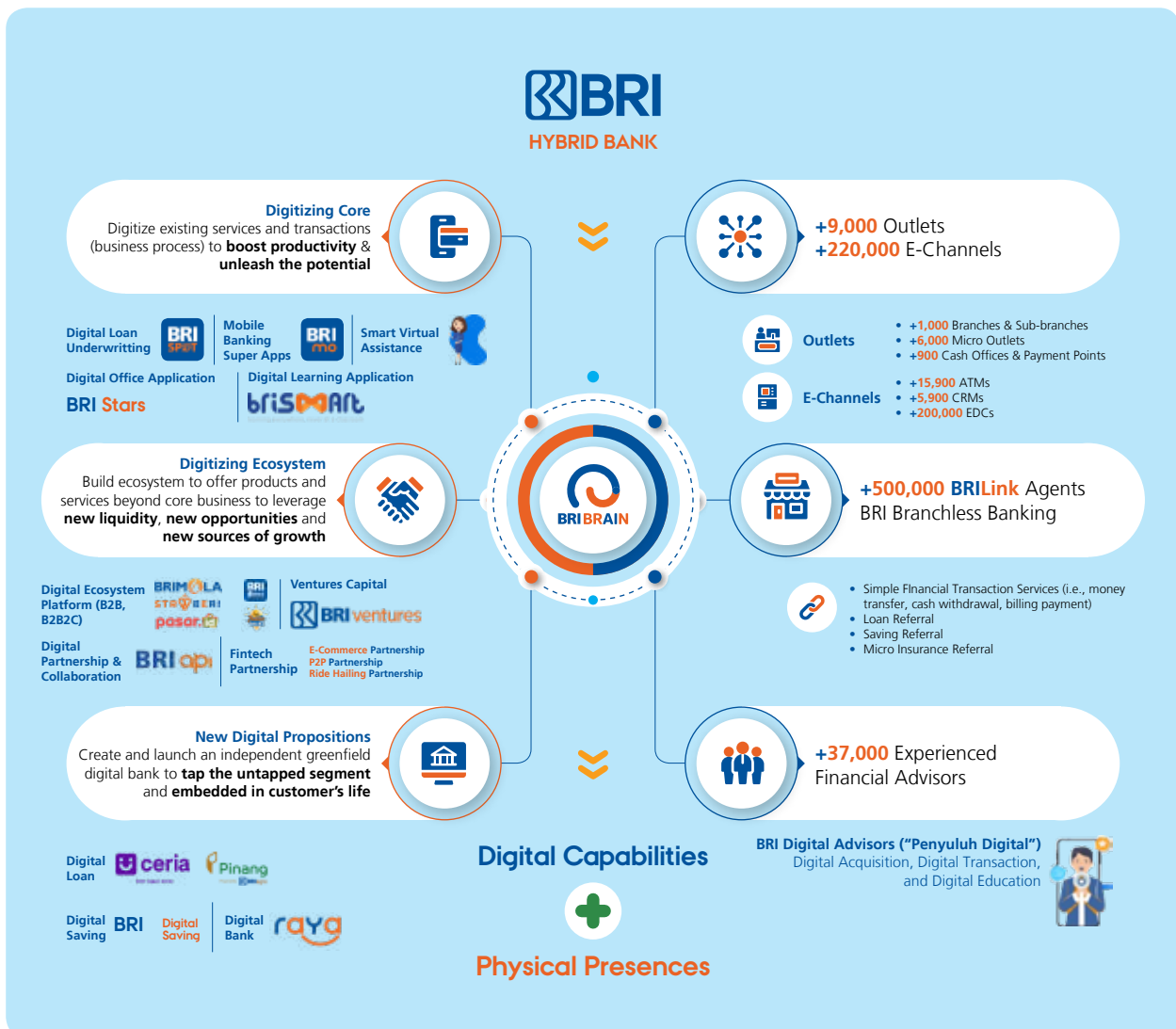
Menghadapi tantangan dunia perbankan dari perubahan preferensi nasabah dan disrupsi dari *fintech* & perbankan digital, BRI menerapkan model bisnis *Hybrid Banking* yang mengkombinasikan kekuatan *physical presence* dan kapabilitas digital BRI sebagai solusi yang *customer-centric* untuk mengakomodir karakteristik segmen pasar BRI.

Untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan, Perseroan memanfaatkan strategi *digital* untuk menjadi BRIVolution 2.0. Hal ini dilakukan dengan membentuk kerangka kerja strategis *digital* yang melibatkan tiga pilar: "*Digitizing the Core*", "*Digital Ecosystem*" dan "*New Digital Proposition*". Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendigitalkan proses bisnis kami dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan menciptakan layanan pelanggan yang andal melalui rekayasa ulang proses bisnis untuk menangkap potensi bisnis yang lebih besar.

Perseroan berharap dapat membangun ekosistem yang mampu menawarkan produk dan layanan di luar bisnis inti. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menangkap potensi likuiditas, peluang bisnis, dan sumber pertumbuhan baru, dengan memanfaatkan segmen bisnis tertentu yang belum dimanfaatkan untuk mengintegrasikan lebih lanjut ke dalam kehidupan pelanggan melalui pengembangan aplikasi super. Strategi ini diharapkan dapat diwujudkan melalui pengembangan *platform digital* untuk bisnis pelanggan, model bisnis baru, dan kemitraan dengan perusahaan *fintech*.

» HYBRID BANK BUSINESS MODEL

Serving the Customers through Physical and Digital Presence



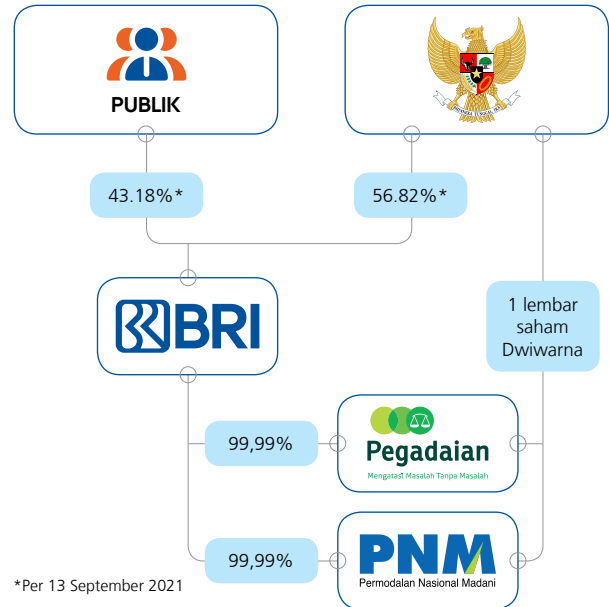
Pembentukan Holding Ultra Mikro

Holding Ultra Mikro dengan melibatkan 3 (tiga) Entitas yakni BRI, Pegadaian dan PNM resmi terbentuk pada tanggal 13 September 2021. Milestone bersejarah ini menghadirkan BRI, Pegadaian dan PNM dalam integrasi ekosistem ultra mikro untuk memenuhi kebutuhan dan membuka peluang pelaku usaha ultra mikro agar lebih tumbuh dan berkembang.

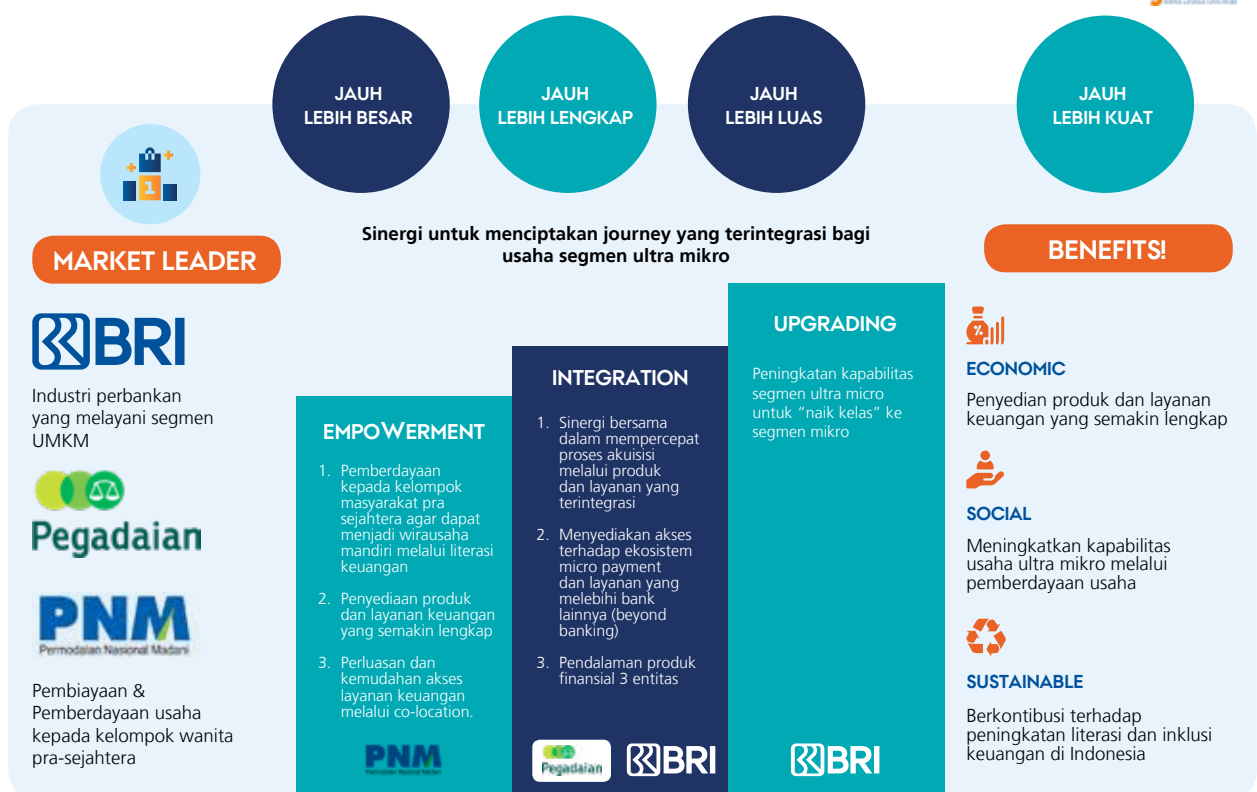
Ekosistem ultra mikro yang dibangun dengan baik akan menjadi sumber pertumbuhan bisnis baru yang berkelanjutan dan dapat memperkuat *core business* BRI di segmen usaha Mikro dan Ultra Mikro. Melalui pembentukan Holding Ultra Mikro juga akan mendukung aspirasi BRI pada tahun 2025 yaitu *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia Champion of Financial Inclusion*.

Sepanjang tahun 2021, wujud sinergi diimplementasikan melalui 3 (tiga) inisiatif utama. Pertama, perluasan Unit Kerja *Co-location* dengan *joint branding* Sentra Layanan Ultra Mikro SenyuM untuk menyediakan layanan lebih lengkap dan mendekatkan akses layanan keuangan bagi pelaku usaha Mikro dan Ultra Mikro. Kedua, wujud sinergi dalam *platform* dan proses pemasaran. Para tenaga pemasar saling merekomendasikan dan memasarkan produk lintas entitas melalui *digital platform* SenyuM Mobile untuk memaksimalkan *cross selling*. Ketiga, integrasi *database* potensial untuk mendukung *cross selling*.

Struktur Holding Ultra Mikro



BENTUK SINERGI ULTRA MIKRO



UMi TARGET SEGMENT



petani/peternak



pedagang pasar basah



pemilik toko/pengrajin



pekerja lepasan

Ekosistem UMi akan Menawarkan 6 Proposisi Nilai



Penawaran Produk Yang Komprehensif

Pemilihan produk lengkap untuk berbagai kebutuhan segmen nasabah ultra mikro



Akses Layanan Keuangan yang Lebih Luas dan Terjangkau

Akses yang lebih mudah dan terjangkau kepada nasabah ultra mikro didukung inisiatif *Co-location* dan optimalisasi peran dan jaringan Agen BRILink



Data Analytics

Pemanfaatan teknologi digital (AI & Data Analytics) untuk meningkatkan customer experience melalui penawaran produk yang sesuai kebutuhan nasabah, serta untuk penguatan manajemen risiko



Program Akuisisi Terintegrasi

Platform penjalarn terintegrasi dan berbasis digital (Senyum Mobile)



Akses ke Micro Payment Ecosystem & Beyond Banking

Memberikan akses yang lebih luas dan terjangkau kepada nasabah ultra mikro kepada ekosistem *micro payment* dan layanan *beyond banking* (misal produk asuransi & investasi)

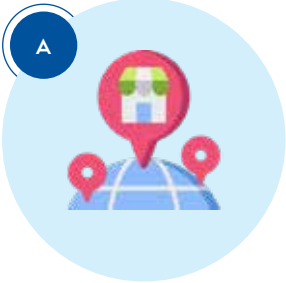


Pemberdayaan Kesejahteraan

Pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas nasabah ultra mikro untuk mendorong proses graduasi nasabah ke segmen mikro

Selain itu, ekosistem UMI akan memberikan 5 (lima) manfaat kepada setiap entitas:

Sinergi Ekosistem Ultra Mikro



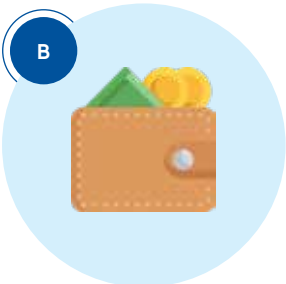
Titik Akses Tambahan

Mencapai Total

16rb+
Jaringan Cabang



~500rb+
Agen



Efisiensi Biaya Dana

» Pengurangan biaya dana bagi Pegadaian dan PNM dari perluasan akses ke sumber pendanaan yang lebih optimal.



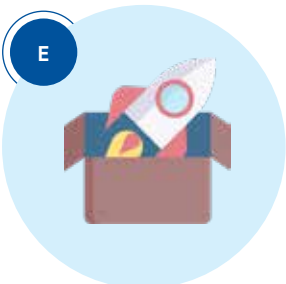
Efisiensi Biaya Operasional

» Melalui peningkatan produktivitas, *co-location* dan digitalisasi.



Kualitas Aset yang Terjaga

» Didorong melalui integrasi data dan *analytics uses case*.



Produk Baru Diluncurkan

» Menawarkan rangkaian produk lengkap yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk Bisnis BRI yang Berkelanjutan

Sebagai salah satu *first-mover* untuk *Sustainable Banking* di Indonesia, BRI senantiasa mempertahankan komitmennya dalam menjalankan bisnis serta mempertahankan kinerja yang baik dan berkelanjutan. Komitmen ini dibuktikan dengan penerapan praktik keuangan berkelanjutan yang mencerminkan implementasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam setiap aktivitas perbankan BRI. BRI pun tak hentinya menggagas *strategic initiatives* baru dalam penerapan LST.

Kebijakan Keberlanjutan BRI

Kebijakan Keberlanjutan BRI telah tertuang dalam Keputusan Direksi BRI No: S.05-DIR/EMP/07/2018, yang mengintegrasikan aspek LST ke dalam aspek ekonomi dan diimplementasikan dalam bentuk strategi *assets, liabilities, operations, & human capital*.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan perhatian pemangku kepentingan terkait pentingnya aspek LST dalam keberlanjutan bisnis bank, BRI telah memperkuat tata kelola LST dengan mengembangkan organisasi yang fokus bertugas untuk menyalurkan aspek LST ke dalam aktivitas bisnisnya. Organisasi

yang dimaksud adalah *Environmental, Social, and Governance Desk*, yang berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan BRI.

BRI telah membentuk struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap implementasi LST yaitu *Environmental, Social, and Governance (ESG) Desk*. Saat ini, organisasi diarahkan dan disupervisi oleh Direktur Kepatuhan BRI.

Di tahun 2021, BRI juga membentuk Komite ESG yang diketuai Direktur Utama BRI. BRI telah melaksanakan Rapat Komite ESG untuk pertama kalinya pada Desember 2021 dan membahas beberapa hal, di antaranya:

- *Update* informasi dan isu terkini yang sedang berkembang terkait LST kepada Dewan Direksi dan Manajemen Eksekutif BRI.
- Penetapan aspirasi ESG BRI serta perencanaan penyusunan *ESG Roadmap* BRI.

Sesuai dengan kebijakan keberlanjutan yang dimiliki, BRI membagi strategi LST pada masing-masing kegiatan perbankan di sisi *assets, liabilities, operations, dan human capital*.



Assets

- » Memberikan hak yang sama dan akses layanan keuangan yang lebih luas kepada nasabah mikro.
- » Penyaluran pembiayaan kepada bisnis berkelanjutan terdiri dari penyaluran kepada debitur yang masuk dalam kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) serta Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Portofolio kredit berkelanjutan BRI mengalami peningkatan sebesar 11,6% YoY dari 550,36 Triliun (komposisi 62,5% dari total kredit) di tahun 2020 menjadi 614,2 Triliun (komposisi 65,1% dari total kredit) di penghujung tahun 2021.
- » Penerbitan kebijakan perkreditan di sektor CPO (*Crude Palm Oil*)
- » *Capacity Building* untuk nasabah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dengan beragam inisiatif, meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui Rumah BUMN, Klaster Usaha, linkumkm, Desa BRILiaN, hingga penunjukan Figur Inspiratif Lokal (FIL).

Liabilities

- Penerbitan BRI *Sustainability Bond* pada tahun 2019 senilai USD500 juta dan memperoleh *rating* kredit *investment grade* (Baa2 oleh Moody's dan BBB- oleh Fitch). *Sustainalytics* memberikan opini "BRI's *Sustainability Bond Framework* is incredible and impactful, and aligns with the *Green Bond Principles 2018, the Social Bond Principles 2018, the*

Sustainability Bond Guidelines 2018, dan ASEAN Sustainability Bond Standards 2018."

Penerbitan *Sustainability Bond* BRI telah berkontribusi setidaknya pada pencapaian tiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia, yaitu:



- Penciptaan Lapangan Kerja, didukung oleh Kredit Mikro BRI; Kupedes.



- Perumahan yang terjangkau.



- Peningkatan kondisi ekonomi-sosial dan penurunan tingkat pengangguran sebagai bentuk pemulihan pascapandemi melalui Kredit Mikro BRI; KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KMK Tangguh.



- Transportasi ramah lingkungan.
- Bangunan berwawasan lingkungan.

Per Desember 2021, BRI mengalokasikan 69% perolehan dana *Sustainability Bond* BRI untuk *social projects*, dan 31% untuk *green projects*.



- Integrasi produk simpanan dengan kebijakan anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme.



- Pembuatan produk simpanan berbasis digital dan ramah lingkungan melalui *Digital Saving* BRI.

Operations & Human Capital

- Digitalisasi Proses Bisnis. BRI terus melakukan inovasi dan pengembangan sebagai inisiasi digitalisasi proses bisnis (*business process reengineering*) yang turut mendukung pelestarian lingkungan. Inisiatif tersebut meliputi Agen BRILink (layanan keuangan tanpa kantor), BRISPOT (*digital loan underwriting system*), BRISTARS (*digital office*), BRISMART (aplikasi pendidikan/pelatihan berbasis digital), BRIImo (super apps pelayanan nasabah), linkumkm.id (situs dan aplikasi pemberdayaan UMKM), SenyuM Mobile (aplikasi pemasaran produk Ultra Mikro dari entitas BRI, Pegadaian, dan PNM), dan lain-lain.
- Manajemen Kerahasiaan Data dan *Cyber Security*.
- Pengelolaan *human capital* yang memperhatikan prinsip-prinsip keberagaman dan kesetaraan.
- BRISMART sebagai sarana pendidikan dan pelatihan yang *eco-friendly*.
- BRI telah melakukan penghitungan emisi karbon (scope 1, scope 2, scope 3 yang terkait perjalanan dinas pekerja) dari kegiatan operasional perbankan BRI. Selama tahun 2021, BRI berhasil menurunkan net emisi karbon perusahaan sebesar 22,36% dibandingkan tahun pelaporan sebelumnya.

Pelaporan LST BRI secara komprehensif dapat dilihat di Laporan Keberlanjutan BRI tahun 2021.



Kilas Kinerja

“Di tengah tantangan pandemi COVID-19, BRI mampu menunjukkan pertumbuhan kinerja yang cukup signifikan baik dari sisi operasional maupun keuangan. Kinerja BRI juga mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal dengan diterimanya penghargaan dalam skala nasional dan internasional”



» Pencapaian Kinerja Penting Tahun 2021



LABA BERSIH
Bank Only

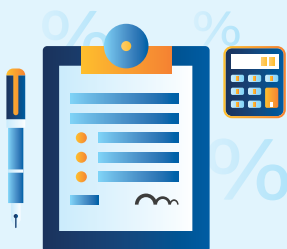
Rp 32,22 triliun **≈ 75,53%**



TOTAL ASET

» Bank Only **Rp 1.572,76** triliun
≈ 10,62% YoY

» Konsolidasian **Rp 1.678,10** triliun



KREDIT

» Bank Only **Rp 943,70** triliun
≈ 7,16% YoY

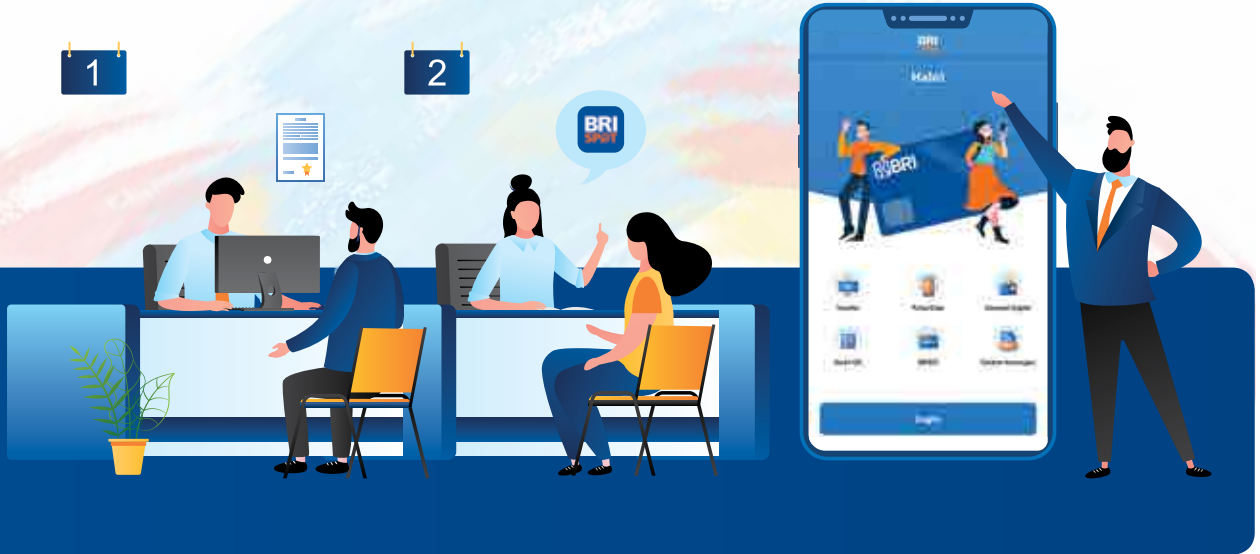
» Konsolidasian **Rp 1.042,87** triliun
Proporsi Kredit UMKM **83,86%** (Termasuk Syariah dan Pembiayaan)



DANA PIHAK KETIGA

» Bank Only **Rp 1.127,85** triliun
≈ 7,14% YoY

» Konsolidasian **Rp 1.138,74** triliun
Didominasi oleh CASA **63,08%**



KREDIT MIKRO

» Bank Only	Rp 396,95 triliun
» Konsolidasian	Rp 483,89 triliun

KREDIT KECIL & MENENGAH

» Bank Only	Rp 224,94 triliun
» Konsolidasian	Rp 240,35 triliun

KREDIT KONSUMER

» Bank Only	Rp 149,38 triliun
» Konsolidasian	Rp 150,35 triliun

KREDIT KORPORASI

» Bank Only	Rp 172,43 triliun
» Konsolidasian	Rp 168,27 triliun

RASIO KEUANGAN

» Bank Only	83,67%	25,28%	3,08%	278,14%
	LDR	CAR	NPL	NPL Coverage
» Konsolidasian	83,53% (Konsolidasi Bank)	27,16%	3,00%	281,16%

» Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020**	2019	2018 ¹⁾	2017 ¹⁾
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
ASET					
Kas	26.299.973	32.274.988	30.219.214	27.421.625	24.798.037
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	51.530.969	71.416.449	71.159.442	58.155.479
Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto	73.012.684	80.005.759	127.092.463	99.695.406	61.289.274
Efek-efek, Wesel Ekspor, Reverse Repo dan Tagihan Lainnya - Neto	455.174.902	400.022.060	252.607.675	226.990.368	215.604.217
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	-	-	1.130.306	1.505.273	3.317.840
Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	1.042.867.453	1.020.192.968	907.388.986	838.141.014	739.336.520
CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	(87.829.417)	(70.394.653)	(39.196.369)	(35.511.191)	(30.104.137)
Tagihan Derivatif - Netto	730.083	1.576.659	210.396	485.810	162.912
Tagihan Akseptasi - Netto	9.066.005	6.271.176	9.346.063	11.643.003	5.693.425
Penyertaan Saham - Netto	6.071.727	1.500.329	745.304	460.096	83.100
Aset Tetap - Netto	47.970.187	43.706.632	31.432.629	26.914.859	24.752.035
Aset Pajak Tangguhan - neto	16.284.898	9.885.990	4.541.298	5.114.653	3.286.732
Aset Lain-lain - neto	32.022.666	33.492.467	19.824.426	22.877.934	21.072.055
TOTAL ASET	1.678.097.734	1.610.065.344	1.416.758.840	1.296.898.292	1.127.447.489
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Simpanan Nasabah ^{***})	1.138.743.215	1.120.921.926	987.405.271	944.268.737	841.656.450
Giro	220.590.197	192.729.992	168.826.135	180.669.095	147.435.604
Tabungan	497.676.739	476.065.986	405.355.483	387.179.625	349.440.873
Deposito	420.476.279	452.125.948	413.223.653	376.420.017	344.779.973
Liabilitas Segera	18.735.387	15.473.574	7.549.312	8.462.958	6.584.201
Simpanan dari Bank lain	13.329.434	23.785.997	17.969.829	9.131.158	5.593.367
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	29.408.508	40.478.672	49.902.938	37.379.394	12.136.684
Liabilitas Derivatif	199.695	407.774	184.605	332.343	200.858
Liabilitas Akseptasi	9.554.238	6.817.436	9.346.063	11.643.003	5.693.425
Utang Pajak	4.214.318	1.949.356	185.433	153.833	569.016
Pinjaman diterima	68.458.547	72.164.236	30.921.771	40.457.429	29.408.694
Surat Berharga yang Diterbitkan Kembali	55.306.697	57.757.028	38.620.837	31.190.216	30.619.658
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	7.000.268	3.681.709	609.493	1.222	2.134
Liabilitas Imbalan Kerja	18.105.921	13.435.842	10.662.581	11.789.366	12.194.261
Liabilitas Lain-lain	22.753.327	22.259.520	19.359.607	15.339.787	13.794.513
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	501.375	1.465.392	1.465.366	1.473.515	986.450
TOTAL LIABILITAS	1.386.310.930	1.380.598.462	1.183.155.670	1.111.622.961	959.439.711



Uraian	2021	2020**	2019	2018 ¹⁾	2017 ¹⁾
EKUITAS					
Modal Saham	7.577.950	6.167.291	6.167.291	6.167.291	6.167.291
Tambahan modal disetor	76.242.898	3.411.813	2.900.994	2.692.663	2.773.858
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	17.006.230	17.099.207	17.099.207	13.824.692	13.824.692
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(115.975)	(54.749)	(14.970)	49.850	54.199
Cadangan kompensasi atas saham bonus	210.266	1.228.805	21.796	426.670	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan Komprehensif lain - bersih	1.949.387	4.623.064	-	-	-
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan Komprehensif lain	547.026	975.877	-	-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	-	-	715.770	(2.070.378)	1.813.625
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(1.423.685)	(1.469.726)	189.519	1.154.343	706.403
Modal saham diperoleh kembali (saham treasury)	(45.997)	(1.649.076)	(2.106.014)	(2.418.948)	(2.418.948)
Opsi saham	19.255	72.894	22.409	10.971	-
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	1.758.580	-	-	-	-
Ekuitas <i>merging entity</i>	-	29.538.484	-	-	443.016
Saldo laba	-	-	181.327.431	163.130.389	143.827.697
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685	3.022.685	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	181.986.363	163.949.482	178.304.746	160.107.704	140.805.012
Total Entitas yang dapat diatribusikan	288.734.983	226.916.051	206.323.433	182.967.543	167.191.833
Kepentingan non-pengendali	3.051.821	2.550.831	2.460.903	2.307.788	815.945
TOTAL EKUITAS	291.786.804	229.446.882	208.784.336	185.275.331	168.007.778
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.678.097.734	1.610.065.344	1.416.758.840	1.296.898.292	1.127.447.489
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Pendapatan Bunga dan Syariah	143.523.329	135.764.561	121.756.276	111.582.804	102.912.375
Beban Bunga dan Syariah	(29.428.900)	(42.180.448)	(40.048.971)	(33.917.032)	(29.894.281)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto	114.094.429	93.584.113	81.707.305	77.665.772	73.018.094
Pendapatan premi - neto	1.043.075	878.710	1.010.728	945.722	385.414
Pendapatan Operasional lainnya	41.215.807	38.099.755	29.463.839	23.425.430	19.271.287
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(35.806.312)	(33.024.492)	(21.556.319)	(17.792.693)	(16.994.115)
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	(3.321.266)	(2.157.162)	(608.271)	912	(1.239)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(163.243)	98.374	(595.015)	(528.982)	(258.524)
Beban Operasional lainnya	(75.918.108)	(67.503.849)	(44.965.625)	(41.990.284)	(38.614.076)
LABA OPERASIONAL	41.144.382	29.778.701	43.431.933	41.725.877	36.806.841

Uraian	2021	2020**	2019	2018 ¹⁾	2017 ¹⁾
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO	(152.317)	214.705	(67.880)	27.817	216.395
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	40.992.065	29.993.406	43.364.053	41.753.694	37.023.236
BEBAN PAJAK	(7.835.608)	(8.951.971)	(8.950.228)	(9.335.208)	(7.978.187)
LABA SEBELUM LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS PENGENDALI	33.156.457	21.041.435	-	-	-
LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS PENGENDALI	(2.400.691)	(2.381.042)	-	-	-
LABA BERSIH	30.755.766	18.660.393	34.413.825	32.418.486	29.045.049
Penghasilan komprehensif lainnya:					
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pengkukuran kembali atas program imbalan pasti	487.841	(2.473.364)	(1.291.782)	601.819	61.655
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(67.751)	464.563	322.945	(150.455)	(15.414)
Surplus revaluasi aset tetap	(92.127)	81.910	3.316.985	-	-
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(61.226)	(39.780)	(64.820)	(4.349)	30.709
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(3.143.546)	4.633.558	-	-	-
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(425.090)	868.462	-	-	-
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual	-	-	3.696.914	(5.141.381)	2.286.250
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	478.796	(698.690)	(895.470)	1.216.705	(527.459)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	(2.823.103)	2.836.659	5.084.772	(3.477.661)	1.835.741
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM PENGHASILAN KOMPREHENSIF PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS PENGENDALI	30.333.354	23.878.094	-	-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI	(2.776.220)	(2.120.315)	-	-	-
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	27.557.134	21.757.779	39.498.597	28.940.825	30.880.790
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	31.066.592	18.654.753	34.372.609	32.351.133	28.997.141
Kepentingan non-pengendali	(310.826)	5.640	41.216	67.353	47.908
TOTAL	30.755.766	18.660.393	34.413.825	32.418.486	29.045.049
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	27.855.902	21.727.515	39.403.628	28.910.721	30.808.443
Kepentingan non-pengendali	(298.768)	30.264	94.969	30.104	72.347
TOTAL	27.557.134	21.757.779	39.498.597	28.940.825	30.880.790



Uraian	2021	2020**	2019	2018 ¹⁾	2017 ¹⁾
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)					
Dasar	238	152	281	265	237
Dilusian	238	151	281	264	-
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN					
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI					
Pendapatan yang diterima					
Penerimaan bunga dan investasi	140.183.030	125.439.096	117.464.011	102.362.132	100.171.404
Pendapatan syariah	2.358.545	6.853.944	3.376.547	3.124.446	2.819.042
Pendapatan premi	6.989.783	6.205.775	5.373.757	4.178.213	3.788.965
Beban yang dibayar					
Beban bunga	(28.533.680)	(39.883.405)	(38.666.742)	(32.166.798)	(28.319.937)
Beban syariah	(1.293.103)	(2.297.043)	(1.377.133)	(1.375.637)	(1.241.591)
Beban klaim	(5.946.708)	(5.327.065)	(4.363.029)	(3.232.491)	(3.403.551)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	9.005.760	7.252.171	7.065.981	6.209.435	5.050.713
Pendapatan operasional lainnya	34.345.472	31.580.969	22.213.637	16.764.733	13.720.663
Beban operasional lainnya	(73.658.162)	(63.609.646)	(46.257.369)	(42.138.028)	(32.309.044)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(203.971)	179.491	(68.021)	27.817	216.325
Pembayaran atas pajak penghasilan badan	(11.164.431)	(5.936.444)	(9.357.307)	(9.668.009)	(9.037.947)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	72.082.535	60.457.843	55.404.332	44.085.813	51.455.042
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					
Penurunan (kenaikan) aset operasi:					
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	945.891	264.550	(2.854.149)	190.262	(390.262)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	9.164.531	(12.440.166)	(12.637.154)	(2.566.448)	(702.761)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(2.091.221)	6.744.495	(6.172.212)	(16.788.338)	925.822
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(8.096.930)	(24.236.324)	(13.185.691)	8.614.473	(16.453.656)
Kredit yang diberikan	(68.377.027)	(80.715.775)	(74.427.400)	(113.206.894)	(85.060.312)
Piutang dan pembiayaan syariah	39.905.977	(23.299.281)	(6.025.669)	(2.600.698)	(258.240)
Piutang sewa pembiayaan	(11.951.573)	(23.148.260)	(803.779)	(949.203)	(305.667)
Aset lain-lain	1.422.631	23.311.739	6.655.602	4.631.594	(9.154.866)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:					
Liabilitas segera	3.261.813	7.924.262	(913.645)	1.878.757	1.153.159
Simpanan:					
Giro	35.741.846	16.022.216	(9.271.846)	32.568.814	4.110.149
Giro Wadiah	(6.258.078)	4.237.212	(256.984)	510.949	639.058
Giro Mudharabah	-	-	-	-	139.535
Tabungan	37.005.372	55.315.884	25.436.778	36.497.967	45.310.331
Tabungan Wadiah	(9.247.604)	2.295.916	1.349.877	852.159	572.891
Tabungan Mudharabah	-	-	-	-	287.363
Deposito berjangka	(5.923.271)	13.175.897	55.810.139	30.995.577	33.388.560
Deposito berjangka Mudharabah	-	-	-	-	2.682.191
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	(10.456.563)	5.816.168	8.838.671	3.537.792	3.363.829

Uraian	2021	2020**	2019	2018 ¹⁾	2017 ¹⁾
Liabilitas Derivatif	(208.079)	223.169	-	-	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(11.070.164)	(9.424.266)	12.523.543	25.242.710	4.834.286
Liabilitas lain-lain	235.264	(1.398.837)	1.252.567	2.673.187	2.530.874
Kenaikan (penurunan) dana <i>syirkah</i> temporer	(33.496.976)	8.678.142	3.859.957	1.186.822	-
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Operasi	32.588.374	29.804.584	44.582.937	57.355.295	39.067.326
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI					
Hasil Penjualan aset tetap	51.654	35.214	141	-	-
Penyertaan saham	(315.724)	(284.347)	(228.110)	-	-
Penerimaan dividen	4.349	5.530	5.857	814	40
Perolehan aset tetap	(8.254.116)	(4.375.066)	(3.695.364)	(1.822.703)	(2.006.347)
(Kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	(1.270.825)	(25.188.955)	(28.915.361)
(Kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	(64.581.768)	(111.830.687)	-	-	-
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Investasi	(73.095.605)	(116.449.356)	(5.188.301)	(27.010.844)	(30.921.668)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	(4.229.199)	41.131.054	(9.592.989)	10.829.393	(5.663.083)
Pembagian laba untuk dividen	(12.125.589)	(20.623.565)	(16.175.565)	(13.048.441)	(10.483.777)
Penerimaan dari surat berharga subordinasi	-	-	-	487.065	(22.060)
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	12.547.672	12.619.200	12.102.950	9.600.185	10.242.963
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(14.608.236)	(11.245.300)	(4.419.500)	(8.939.750)	(4.921.000)
Penambahan modal saham	41.059.206	-	-	(81.195)	-
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan	22.643.854	21.881.389	(18.085.104)	(1.152.743)	(10.846.957)
(PENURUNAN) KENAikan NETO KAS DAN SETARA KAS	(17.863.377)	(64.763.383)	21.309.532	29.191.708	(2.701.299)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	(2.190)	(352.878)	(160.251)	(52.076)	(427)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	171.790.168	236.906.429	215.757.148	186.617.516	189.319.242
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	153.924.601	171.790.168	236.906.429	215.757.148	186.617.516
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:					
Kas	26.299.973	32.274.988	30.219.214	27.421.625	24.798.037
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	51.530.969	71.416.449	71.159.442	58.155.479
Giro pada bank lain	14.065.097	12.614.266	10.237.736	12.677.355	6.132.512
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	57.132.958	65.043.738	113.800.580	86.818.051	54.766.500
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	10.674.207	11.232.450	17.680.675	42.764.988
Total Kas dan Setara Kas	153.924.601	171.790.168	236.906.429	215.757.148	186.617.516
RASIO KEUANGAN (BANK ONLY)					
Likuiditas					
LDR	83,67%	83,66%	88,64%	89,57%	88,13%
Kualitas Kredit					
NPL Gross	3,08%	2,94%	2,62%	2,14%	2,10%



Uraian	2021	2020**	2019	2018 ^{*)}	2017 ^{*)}
NPL Nett	0,70%	0,80%	1,04%	0,92%	0,88%
NPL Coverage	278,14%	247,98%	166,59%	200,61%	195,54%
Profitabilitas					
NIM	6,89%	6,00%	6,98%	7,45%	7,93%
BOPO	74,30%	81,22%	70,10%	68,48%	69,14%
CER	44,39%	46,60%	40,26%	41,02%	41,15%
ROA	2,72%	1,98%	3,50%	3,68%	3,69%
ROE – Tier I	16,87%	11,05%	19,41%	20,49%	20,03%
Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan	21,19%	13,27%	23,78%	24,55%	24,30%
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	81,79%	86,33%	84,84%	85,33%	84,67%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas	449,11%	631,52%	559,45%	581,81%	552,20%
Aset Produktif					
Aset Produktif bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	1,77%	1,82%	1,74%	1,41%	1,38%
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	1,77%	1,81%	1,98%	1,62%	1,59%
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	6,16%	5,42%	3,36%	3,26%	3,11%
Permodalan					
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	25,28%	20,61%	22,55%	21,21%	22,96%
Rasio Kecukupan Modal Tier 1 (CAR Tier 1)	24,27%	19,59%	21,52%	20,15%	21,95%
Kepatuhan					
Persentase Pelanggaran BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Persentase Pelampauan BMPK					
- Pihak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
- Pihak Tidak Terkait	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Giro Wajib Minimum (Rupiah)	4,47%	3,19%	7,16%	6,15%	3,19%
Giro Wajib Minimum (Valas)	4,13%	4,01%	8,01%	8,07%	4,01%
Posisi Devisa Neto	0,81%	1,07%	1,87%	3,73%	4,22%
Rasio Lainnya					
CIR (Rasio Biaya Terhadap Pendapatan)	43,26%	45,40%	40,03%	40,38%	40,89%

*) Setelah reklasifikasi akun

**) Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38

***) Termasuk simpanan mudharabah dan musyarakah

Catatan: Kinerja periode 2017-2019 tidak dilakukan penyajian kembali (restatement) sesuai dengan PSAK No. 38

Ikhtisar Operasional

Tabel Kinerja Operasional Segmen Mikro

(dalam Rupiah)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Bisnis Mikro					
Jumlah Debitur (dalam jutaan)	13,3	11,7	10,6	10,00	9,4
Rekening Simpanan (dalam jutaan)	143	147	129	112	93
Dana Pihak ketiga (dalam triliun)	356	335	297	278	244
Kredit (dalam miliar)	396.959	351.356	307.722	274.279	239.477
Layanan BRILINK (Agen)	503.151	504.233	422.160	401.550	279.750

Tabel Kinerja Operasional Segmen Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Bisnis Kecil dan Menengah	224.938	216.653	220.202	218.651	173.769
Bisnis Kredit Konsumer	149.381	143.680	140.499	130.837	108.240
Dana Pihak Ketiga	429.701	410.298	374.453	341.329	304.439

Tabel Kinerja Operasional Segmen Korporasi

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
Bisnis Korporasi	172.425	168.985	191.135	192.452	174.521
Dana Pihak ketiga	341.879	306.943	298.734	285.057	255.092

Tabel Kinerja Operasional Segmen Entitas Anak

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
PT Bank Raya Indonesia Tbk (Raya)*					
Aset	16.822,13	28.015,00	27.067,92	23.313,67	16.325
Pendapatan	1.774,06	2.002,72	2.128,72	1.714,89	1.324
Laba Bersih	(3,09)	31,26	51,06	204,21	181
BRI Remittance Co. Limited Hong Kong					
Aset	13,13	9,95	8,84	7,71	8,72
Pendapatan	10,16	8,74	7,81	7,09	5,64
Laba Bersih	1,89	1,32	0,14	0,31	0,15
PT Asuransi BRI Life					
Aset	18.246,32	13.044,00	11.085,00	9.357,00	8.163
Pendapatan	7.282,29	5.889,76	5.198,00	4.386,00	4.404
Laba Bersih	144,89	62,39	329,00	600,00	328.221
PT BRI Multifinance Indonesia					
Aset	5.248,41	4.048,31	4.653,28	3.617,08	2.607,10
Pendapatan	65.501,95	493,28	475,93	327,03	110,59
Laba Bersih	41,97	4,79	28,11	62,86	50,37
PT BRI Danareksa Sekuritas					
Aset	1.143,64	702,01	808,95	860,65	1.191,21
Pendapatan	281,27	136,00	201,96	195,10	31,69
Laba Bersih	92,87	(238,04)	(93,00)	(126,05)	3.994,85
PT BRI Ventura Investama					
Aset	2.047,89	1.819,80	1.514,49	7,20	7,83
Pendapatan	255,74	331,52	28,87	1,27	1,11
Laba Bersih	221,74	300,20	11,00	0,45	0,41
PT BRI Asuransi Indonesia					
Aset	3.838,00	3.036,00	2.662,00	2.427,00	2.250,00
Pendapatan	1.984,00	1.749,00	1.689,00	1.436,00	1.256,00
Laba Bersih	280,00	204,00	181,00	147,00	146,00



Uraian	2021	2020	2019	2018	2017
PT Permodalan Nasional Madani					
Aset	43.773,78	31.664,89	24.906,52	17.552,74	11.393
Pendapatan	8.292,78	5.776,26	4.924,09	3.140,05	2.137
Laba Bersih	840,78	358,59	977,31	67,80	35.385
PT Pegadaian					
Aset	65.722,82	71.469,00	65.324,00	52.791,00	48.687
Pendapatan	14.131,19	21.964,00	17.694,00	11.464,00	10.523
Laba Bersih	2.422,15	2.022,00	3.108,00	2.775,00	2.513,54

*Sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

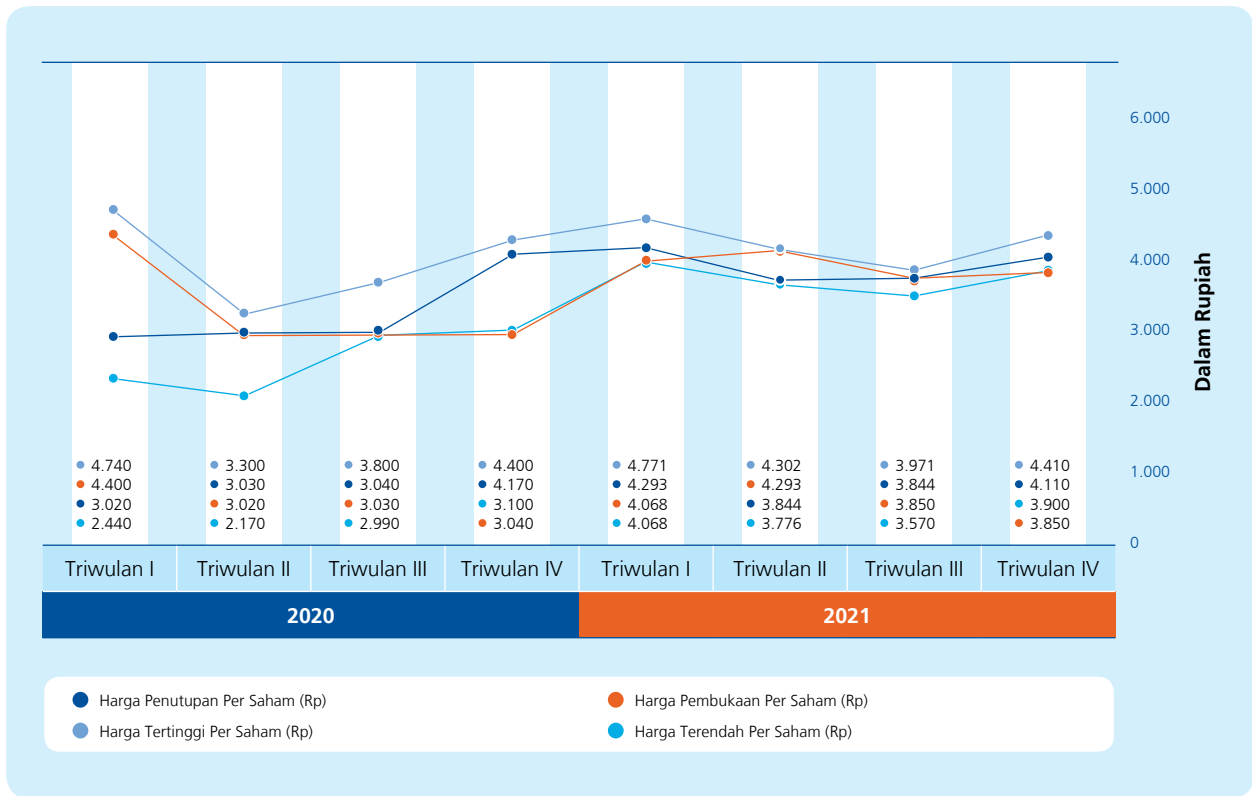
» Informasi Harga Saham

Tabel Informasi Saham Bank BRI 2017-2021

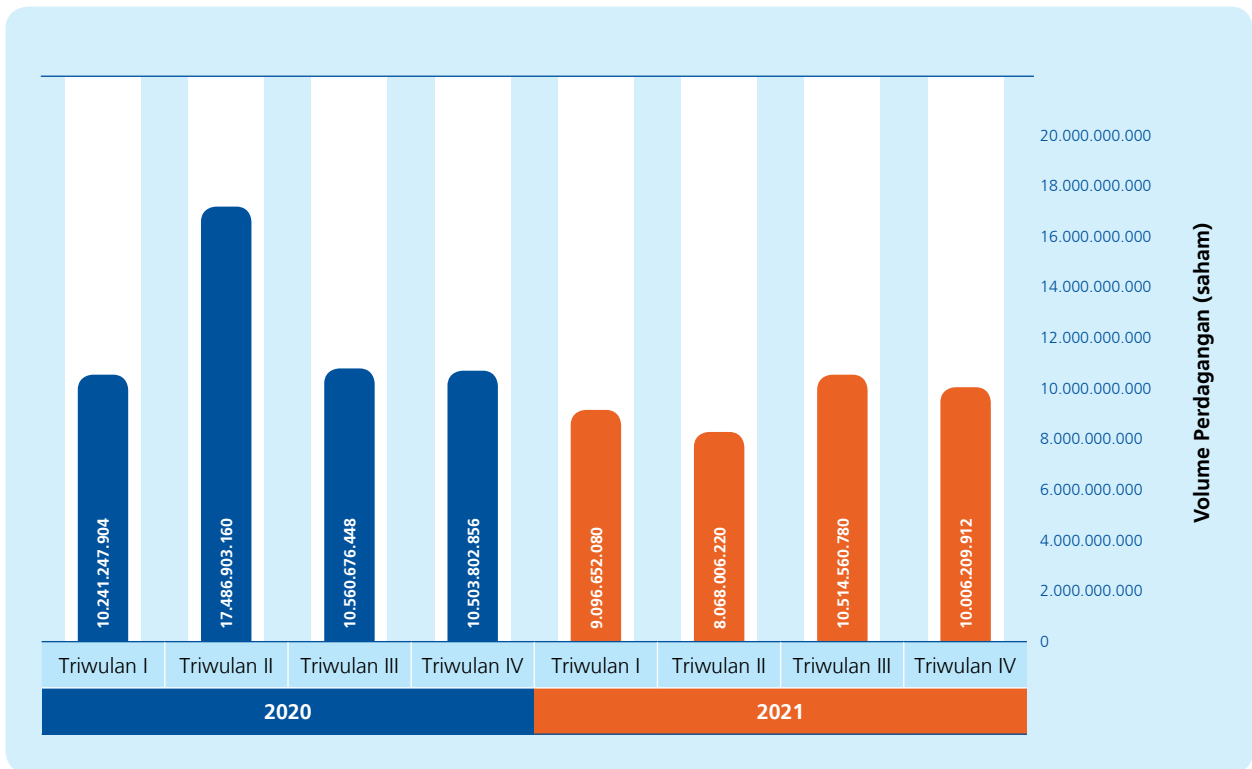
Tahun	Harga per saham (Rp)				Jumlah Saham Beredar (saham)	Volume Perdagangan (saham)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)			
2021							
Triwulan I	4.068	4.771	4.068	4.293	123.345.810.000	9.096.652.080	542,63
Triwulan II	4.293	4.302	3.776	3.844		9.068.006.220	485,90
Triwulan III	3.844	3.971	3.570	3.850	151.558.678.941*	10.514.560.780	578,75
Triwulan IV	3.850	4.410	3.900	4.110		10.006.209.912	621,75
2020							
Triwulan I	4.400	4.740	2.440	3.020	123.345.810.000	10.241.247.904	372,50
Triwulan II	3.020	3.300	2.170	3.030		17.486.903.160	373,74
Triwulan III	3.030	3.800	2.990	3.040		10.560.676.448	374,97
Triwulan IV	3.040	4.400	3.100	4.170		10.503.802.856	514,35
2019							
Triwulan I	3.610	4.140	3.580	4.120	123.345.810.000	6.650.751.600	508,18
Triwulan II	4.140	4.730	3.660	4.360		7.125.444.800	537,79
Triwulan III	4.400	4.560	4.000	4.120		5.934.903.000	508,18
Triwulan IV	4.120	4.470	3.810	4.400		6.691.041.300	542,72
2018							
Triwulan I	3.690	3.920	3.530	3.600	123.345.810.000	7.159.651.000	444,04
Triwulan II	3.500	3.660	3.720	2.840		8.999.924.100	350,30
Triwulan III	2.890	3.410	2.830	3.150		7.056.550.400	388,53
Triwulan IV	3.150	3.710	2.910	3.660		6.966.375.800	451,44

* Pada tanggal 13 September 2021, BRI melakukan aksi korporasi dengan melakukan *right issue* dengan rasio 1:0.23. Seluruh harga saham pada Triwulan III dan Triwulan IV telah disesuaikan dengan harga setelah *right issue* pada tahun 2021.

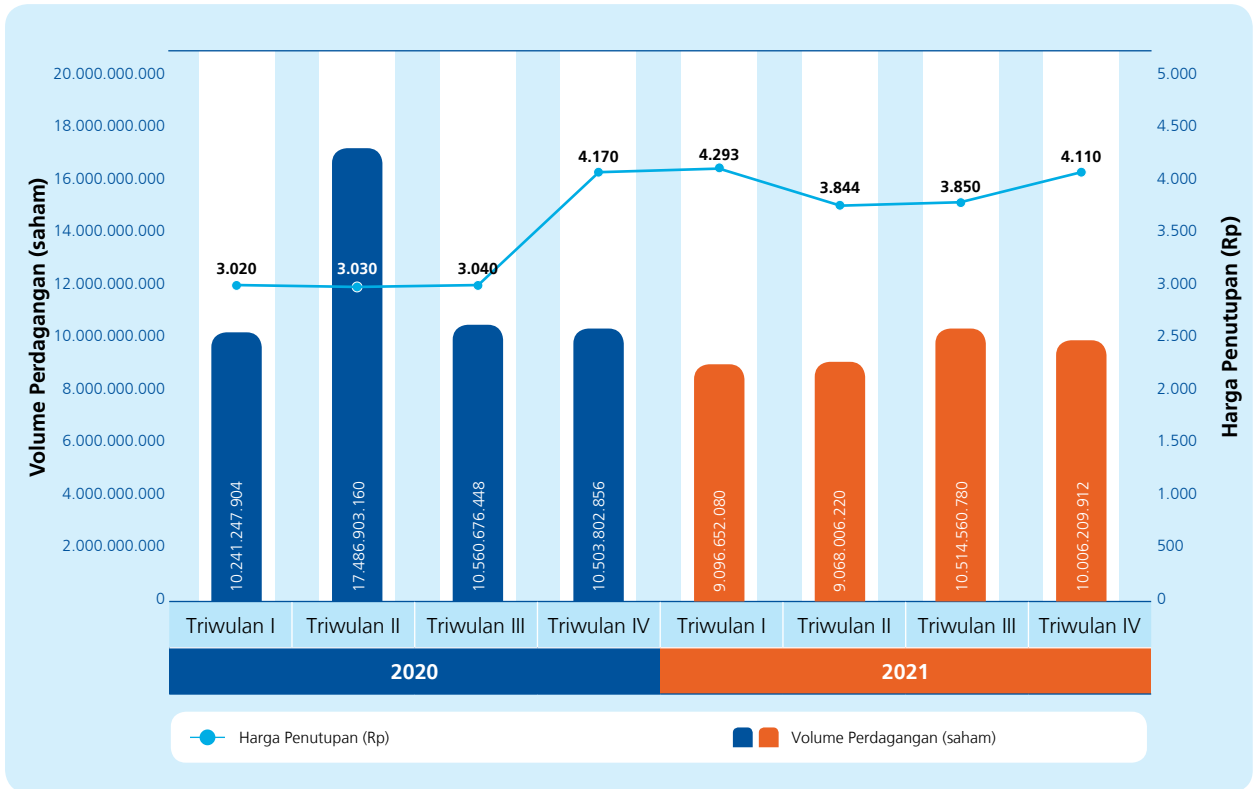
Grafik Pergerakan Harga Saham BRI Tahun 2020 – 2021



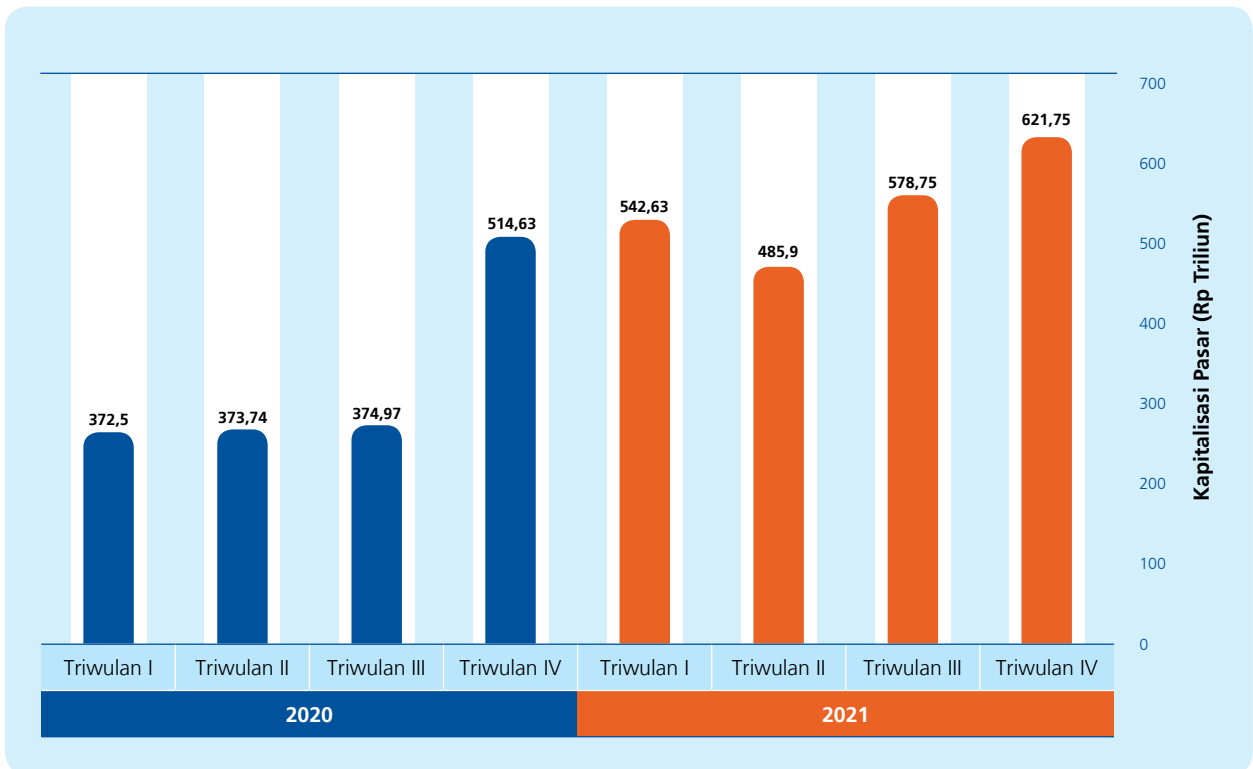
Grafik Volume Perdagangan Saham BRI Tahun 2020 – 2021



Grafik Pergerakan Harga dan Volume Saham BRI Tahun 2020 – 2021



Grafik Kapitalisasi Pasar Saham BRI Tahun 2020 – 2021



Aksi Korporasi

Pada tanggal 13 September 2021 – 22 September 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melakukan *Rights Issue* atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) I dalam rangka pembentukan *Holding* Ultra Mikro yang terdiri dari PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero.

Tanggal Pelaksanaan	Keterangan	Pemegang Saham dan Jumlah Saham yang Beredar					Harga Saham	Jumlah Saham yang Beredar
		Pemerintah		Publik		Nominal		
		Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%	Rp		
13 September 2021 – 22 September 2021	Sebelum <i>Right Issue</i>	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	3.780	123.345.810.000
	Setelah <i>Right Issue</i>	86.108.998.710	56,82	65.450.002.894	43,18	50	3.610	151.559.001.604

Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi

Informasi Obligasi

Tabel Informasi Obligasi yang Masih Beredar

No.	Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (miliar)
1.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	04 Februari 2016	5 tahun	IDR	Rp2.823.500
2.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	25 Mei 2016	5 tahun	IDR	Rp701.000
3.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	01 Desember 2016	7 tahun	IDR	Rp477.000
4.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	01 Desember 2016	10 tahun	IDR	Rp2.350.000
5.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	11 April 2017	5 tahun	IDR	Rp925.000
6.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11 April 2017	10 tahun	IDR	Rp1.300.500
7.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	24 Agustus 2017	5 tahun	IDR	Rp1.652.500
8.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	24 Agustus 2017	7 tahun	IDR	Rp2.517.000
9.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	21 Februari 2018	5 tahun	IDR	Rp1.837.000
10.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	21 Februari 2018	7 tahun	IDR	Rp605.000
11.	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	21 Juni 2018	5 tahun	IDR	Rp500.000
12.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B	07 November 2019	3 tahun	IDR	Rp2.089.350
13.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	07 November 2019	5 tahun	IDR	Rp2.172.800
14.	<i>Global Bond</i> 2018	20 Juli 2018	5 tahun	USD	USD500
15.	<i>Sustainable Bond</i> 2019	28 Maret 2019	5 tahun	USD	USD500

Informasi Sukuk

Sampai dengan 31 Desember 2021, BRI belum menerbitkan sukuk.

Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2021, BRI belum menerbitkan obligasi konversi.

Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2021, BRI tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
					2021	2020	
	100% dari jumlah pokok obligasi	04 Februari 2021	9,60%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	25 Mei 2021	8,70%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Desember 2023	8,65%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	01 Desember 2026	8,90%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	11 April 2022	8,30%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	11 April 2027	8,80%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	24 Agustus 2022	8%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	24 Agustus 2024	8,25%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	21 Februari 2023	6,65%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	21 Februari 2025	6,90%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	26 Juni 2023	7,70%	Belum Lunas	id,AA oleh Pefindo	id,AA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	07 November 2022	7,60%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	100% dari jumlah pokok obligasi	07 November 2024	7,85%	Belum Lunas	id,AAA oleh Pefindo	id,AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
	99,696% dari jumlah pokok obligasi	20 Juli 2023	4,625%	Belum Lunas	BBB- oleh Fitch	BBB- oleh Fitch	BNY Mellon
	99,713% dari jumlah pokok obligasi	28 Maret 2024	3,950%	Belum Lunas	BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys	BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys	BNY Mellon

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Per 31 Desember 2021, BRI tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

» Rating Perusahaan 2021

Lembaga Pemeringkat	Peringkat
Standard & Poor's (S&P)	
<i>Outlook</i>	Negative
<i>Issuer Credit Rating</i>	BBB-
<i>Stand-Alone Credit Profile (SACP)</i>	bbb-
Fitch Ratings	
<i>Long-Term Foreign Currency IDR</i>	BBB-, <i>Stable Outlook</i>
<i>Short -Term Foreign Currency IDR</i>	F3
<i>Support Rating Floor</i>	BBB-
<i>Support Rating</i>	2
<i>Viability Rating</i>	BB-
<i>National Long-Term Rating</i>	AA+(idn), <i>Stable Outlook</i>
<i>Rupiah Subordinated Debt</i>	A+(idn)
<i>Senior Unsecured Notes</i>	BBB-

Lembaga Pemeringkat	Peringkat
Moody's	
<i>Outlook</i>	Stable
<i>Bank Deposit</i>	Baa2/P-2
<i>Baseline Credit Assessment</i>	baa2
<i>Adjusted Baseline Credit Assessment</i>	baa2
<i>Counterparty Risk Assessment</i>	Baa1(cr)/P-2(cr)
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)	
<i>National Rating</i>	_{id} AAA, <i>Stable Outlook</i>
Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR)	
<i>Long-Term Foreign Currency</i>	BBB
<i>Outlook</i>	Stable
<i>Long-Term Local Currency</i>	BBB+
<i>Outlook</i>	Stable



» Peristiwa Penting



06 Januari

Peluncuran BRImo New Look

Peluncuran tampilan baru BRImo bertajuk “Temukan #BEYONDmu” tersebut BRI ingin membudayakan layanan perbankan *digital banking next level beyond expectation* dengan berbagai kemudahan layanan dan fitur yang mengedepankan keamanan dan kenyamanan nasabah khususnya kalangan muda yang benar-benar mobile dan aktif menggunakan layanan BRI. Acara dimeriahkan dengan sebuah konser musik yang menghadirkan NOAH sebagai bintang tamu dan disiarkan melalui *platform* media streaming Vidio.com pada 9 Januari 2021.



20 Januari

Dukung Industri Oil dan Gas, BRI Fasilitasi Layanan Keuangan Pertamina Lubricants

BRI terus berkontribusi dalam mendorong kemajuan industri nasional. Kali ini, untuk mendorong kemajuan industri oil dan gas, BRI kembali menjalin kerjasama dengan PT Pertamina Lubricants dalam bentuk pemberian fasilitas vendor, outlet financing dan pinjaman Ceria. Melalui kerjasama ini, ada banyak manfaat yang diperoleh BRI dan Pertamina Lubricants untuk menunjang bisnis masing-masing perusahaan.



21 Januari

RUPSLB BRI 2021: BRI Perkuat Komitmen Kepada UMKM

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta. Dalam RUPSLB tersebut perseroan kian menegaskan fokus BRI untuk membangkitkan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional melalui perubahan nomenklatur dan pengurusan perusahaan.



28 Januari

BRI Group Economic Forum 2021

Untuk membangun optimisme dan semangat daya juang, di masa-masa seperti ini memang sangat diperlukan, salah satunya melalui berbagai forum yang memberikan informasi menyeluruh seperti BRI Group Economic Forum 2021 yang mengusung tema “INDONESIA ECONOMIC RECOVERY, OPPORTUNITIES IN THE TIME OF PANDEMI”. Acara yang diselenggarakan secara virtual ini dibuka langsung oleh Direktur Utama BRI Sunarso, *Keynote speech* yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, serta Menteri BUMN RI Erick Thohir. Forum ini memberikan gambaran utuh bagaimana arah kebijakan fiskal dan strategis yang akan berpengaruh pada dunia investasi dan bisnis di Indonesia.



31 Januari

BRI Menjadi Pemenang Best The Best Communication

Mengawali tahun 2021, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI memberikan penghargaan bergengsi kepada perusahaan-perusahaan BUMN dalam perhelatan BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) 2020. Salah satu BUMN yang mencuri perhatian yakni pemenang kategori Best of The Best Communications yaitu BRI. Selain itu, BRI juga memenangkan Gold Winner untuk kategori Social Media and Corporate Campaign. BRI dinobatkan sebagai juara perhelatan BCOMSS 2020, mengungguli BUMN lainnya. BRI dinilai mampu menjadi BUMN terdepan dalam menjalankan program komunikasi yang berkelanjutan sepanjang tahun 2021.



02 Februari

BRIAPI, Open API Pertama di Asia Tenggara Bersertifikasi PA-DSS dan ISO 27001

Pionir open banking API di Indonesia, BRIAPI dari BRI, menjadi open API pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan sertifikasi PA-DSS (*Payment Application Data Security Standard*) dari PCI Security Standard Council di Amerika Serikat. Hal ini melengkapi BRIAPI yang sebelumnya telah menjadi yang pertama di Indonesia dalam memperoleh sertifikasi ISO:27001. PADSS merupakan standard keamanan data bagi aplikasi pembayaran maupun integrasinya, terkait penyimpanan, proses, maupun transmisi dari setiap data pelanggannya. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dari data pribadi dan keuangan, dalam setiap transaksi yang dilakukan. Atas berbagai inovasi dan jaminan keamanan yang diberikan, hingga akhir 2020 BRIAPI berhasil mencatat pertumbuhan 290 persen dari tahun sebelumnya dengan Sales Volume lebih dari Rp43 triliun.



19 Maret

BRI Data Hackathon 2021 Tantang Ide Inovatif 11.599 Peserta

Kompetisi Data Science “BRI Data Hackathon 2021” pada 8 Desember 2020 - 17 Maret 2021 sukses menjangkit 11.599 peserta terdaftar dari berbagai daerah dan elemen masyarakat Indonesia. Kegiatan ini juga berhasil membangun awareness akan pentingnya literasi data ke lebih dari 4 juta orang melalui kegiatan sosialisasi dan promosi yang dilakukan secara daring, untuk mendukung pembangunan bangsa melalui literasi data. Dengan memanfaatkan data yang akurat, perusahaan dapat melakukan efisiensi anggaran dan mengambil kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas. Selain itu, dengan memanfaatkan teknik analisis yang tepat organisasi bisnis dapat meningkatkan profit, dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen.



25 Maret

Gelar RUPSLB: BRI Bagikan Dividen Rp12,1 Triliun

BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2021 di Kantor Pusat BRI. Dalam rapat tersebut, BRI menyetujui pembayaran dividen sebesar 65% dari laba bersih konsolidasian tahun 2020 sebesar Rp18,6 triliun, sehingga dividen yang dibagikan BRI di tahun ini mencapai Rp12,1 triliun. Sementara itu sisanya sebesar 35 persen atau sebesar Rp6,5 Triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan.



28 Maret



Jutaan Pengunjung Hadiri KPR BRI Virtual Expo 2021

Sepanjang penyelenggaraan acara bertajuk KPR BRI Virtual Expo sejak 26 Januari 2021 lalu, ada jutaan pengunjung yang meramaikan pameran daring tersebut melalui laman kprbrivirtual.com. Setidaknya ada lebih dari 3 juta pengunjung laman KPR BRI Virtual Expo 2021 selama 2 bulan acara berlangsung. Dari jutaan pengunjung tersebut, terdapat sebanyak 4.000 aplikasi pengajuan KPR. Penyelenggaraan KPR BRI Expo secara virtual tahun ini cukup terbilang sukses menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda. Terbukti, ada 60 persen lebih pengunjung KPR BRI Virtual Expo yang masuk kategori milenial atau berusia kurang dari 35 tahun.



28 April



BRI Microfinance Outlook 2021: "Adapting Through Innovation & Synergy"

BRI menyelenggarakan BRI *Microfinance Outlook* yang mengambil tema "Adapting Through Innovation & Synergy" dan diadakan secara virtual pada 28 April 2021. Direktur Utama Bank BRI Sunarso yang hadir menjelaskan hasil survei Aktivitas Bisnis UMKM pada kuartal I-2021 yang mengindikasikan kegiatan usaha UMKM semakin membaik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks UMKM BRI yang meningkat dari 81,5 pada kuartal IV-2020 menjadi 93,0 di kuartal I-2021. Selain itu, pelaku UMKM juga makin optimis terhadap prospek usahanya di kuartal II-2021 yang ditunjukkan oleh indeks ekspektasi BMSI yang naik signifikan ke 128,0 dari 105,4 di kuartal sebelumnya.



03 Mei



Sinergi dengan Kemenparekraf, BRI Luncurkan Kartu Debit BRI Wisata Nusantara

BRI bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI untuk meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Hal tersebut ditandai dengan diluncurkannya *co-branding* Debit BRI Wisata Nusantara. Diselenggarakan di Berlin Gastro Kitchen & Pool Bar, Kuta, Bali, Senin (03/05). Debit BRI Wisata Nusantara merupakan Kartu Debit dan *Co-Branding* wisata nusantara yang bertemakan wisata nusantara dan mencantumkan logo Wonderful Indonesia. Kartu Debit Wisata Nusantara ini diperuntukkan untuk nasabah usia sekolah (SMP dan SMA) yang diperuntukkan sebagai tabungan karya wisata sekolah.



25 Mei



BRI Cetak Laba Rp6,8 Triliun & Kredit Mikro Tumbuh 12,4%

Pada pemaparan Kinerja Keuangan BRI Triwulan I tahun 2021, BRI berhasil mempertahankan kinerja positif ditengah kondisi yang menantang. Meski ada pencadangan yang cukup, kredit mikro BRI tercatat tumbuh 12,43 % sehingga secara konsolidasian BRI berhasil mencetak laba senilai Rp6,86 triliun pada akhir Kuartal I 2021.



27 Mei

BRI Berkolaborasi dengan Never Too Lavish, Industri Kreatif Lokal, Guna Menyasar Target Milenials

Komitmen untuk mendukung dan mengembangkan UMKM tanah air terus ditunjukkan BRI, salah satunya adalah berkolaborasi dengan salah satu pelaku industri kreatif lokal NeverTooLavish. BRI bereksplorasi secara kreatif dalam memberikan sentuhan yang lebih segar pada produk dan layanan perbankan yang sangat dekat dengan masyarakat. Kolaborasi ini diwujudkan dalam perubahan desain kartu uang elektronik BRIZZI, Galeri ATM BRI, dan aktivasi program BritAma FSTVL yang disesuaikan dengan selera dan minat urban millennials.



31 Mei

BRI Raih Penghargaan Fintech dan Big Data terbaik dari Digital CX Awards 2021

BRI kembali meraih prestasi di kancah internasional dengan menyabet sejumlah penghargaan dalam ajang Digital CX Awards 2021, antara lain Best Fintech for CX untuk Consumer Lender dan Highly Acclaimed in Best Use of Data and Analytics for CX. Award kelas dunia tersebut dianugerahkan kepada BRI atas inisiatif BRI dalam mengembangkan Ceria, *platform digital lending* pertama keluaran dari bank, dan BRIBRAIN, platform big data bertenaga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). BRI mendapat pengakuan sebagai institusi perbankan terbaik kelas dunia dalam pengembangan customer experience (CX), melalui digital lending Ceria yang didukung pemanfaatan big data dan analitik BRIBRAIN yang diintegrasikan di seluruh aplikasi solusi keuangan BRI. Melalui Ceria, nasabah dapat mengakses pinjaman/kredit yang lebih aman, mudah, *fully-digital*, dan *self-service*, dengan waktu pencairan pinjaman super cepat dalam hitungan menit.



17 Juni

BRI Raih 3 Penghargaan Bergengsi Asia Money

BRI terus mencatatkan prestasi di level domestik dan internasional, kali ini BRI mendapatkan 3 (tiga) penghargaan berbeda dari 5 (lima) kategori Asia Private Banking Award. Penghargaan tersebut antara lain Best HNW in Indonesia 2021, Best for Wealth Transfer/Succession Planning in Indonesia 2021, dan Best Domestic Private Bank in Indonesia 2021.



22 Juni

BRI Dinobatkan sebagai Bank Terbaik di Indonesia Versi The Asian Banker

BRI meraih peringkat pertama sebagai The Best Retail Banks in Indonesia versi The Asian Banker. Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap program layanan keuangan ritel BRI yang sangat baik dan prima. Sedangkan untuk peringkat di kawasan Asia, BRI menempati posisi ke-35.



25 Juli

RUPSLB BRI: 96% Suara Menyetujui Penerbitan 28,67 Miliar Lembar Saham Baru pada Gelaran RUPSLB BRI.

RUPSLB BRI yang digelar pada 22 Juni 2021, didapatkan telah disetujui aksi korporasi right issue dalam rangka pembentukan holding ultra mikro yang dilakukan BRI dengan mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). Sebanyak 104,22 miliar suara atau mewakili 95,98% dari seluruh saham dengan hak suara sah dan hadir dalam E-RUPS telah menyetujui terkait dengan rencana perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka PMHMETD untuk jumlah sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 lembar saham.



12 Agustus

BRI Menjadi Title Sponsor/Sponsor Utama Liga 1

BRI resmi menjadi sponsor utama atau title sponsor kompetisi sepakbola BRI Liga 1 musim 2021-2022. Hal ini dilakukan karena selaras dengan strategi perseroan yang tengah melakukan transformasi digital, dan diharapkan melalui ini keberadaan BRI dapat membangkitkan industri sepak bola, serta membangun optimisme masyarakat Indonesia.



13 Agustus

Kemhub dan BRI Mengintegrasikan Sitolaut Dengan Layanan Digital Banking, Untuk Memudahkan UMKM

BRI bersama Kementerian Perhubungan RI melakukan sinergi untuk membangkitkan dan mengembangkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program Tol Laut, melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama mengenai integrasi aplikasi Sitolaut dengan aplikasi BRISTORE dan BRIVA Web Service sebagai layanan pembayaran dan penyampaian informasi pendaftaran pengguna pada aplikasi Sitolaut.

Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dan Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN BRI Agus Noorsanto di Gedung Kementerian Perhubungan RI. Kedepannya, BRI akan terus melakukan dukungan terhadap para pelaku UMKM di Indonesia, salah satunya dengan mensinergikan layanan Tol Laut yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan RI dengan layanan digital perbankan milik BRI.



19 Agustus

Peringati Hari Kemerdekaan RI, BRI Salurkan Dana Pendidikan Bagi 68 Paskibraka dan 1.800 Anak Tenaga Kesehatan

Dalam rangka memaknai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-76, BRI memberikan apresiasi kepada 68 Paskibraka Nasional dan 44 Tenaga Pendukung yang telah menyelesaikan tugasnya pada Upacara Bendera 17 Agustus 2021. Penyerahan apresiasi oleh BRI dilakukan dengan tema "Semangat Berbangsa dari Paskibraka" – Apresiasi BRI kepada Paskibraka Nasional 2021 dan Tenaga Pendukung". Melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR), BRI memberikan apresiasi kepada setiap anggota Paskibraka berupa dana bantuan pendidikan, sementara tenaga pendukung mendapatkan dana apresiasi.



29 Agustus

Menteri BUMN dan BRI Mendukung Produksi Padi Model Bisnis Klaster & Penggunaan Teknologi Modern di Cirebon

Kementerian BUMN mendukung upaya BRI dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan menjalankan berbagai program. Salah satunya, melalui dukungan pembiayaan terhadap salah satu rice mill unit (RMU) di daerah lumbung padi Jawa Barat. RMU CV Bintang Tani Niaga yang berlokasi di Guwa Lor, Kabupaten Cirebon, Jabar, dikunjungi Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama BRI Sunarso untuk melihat keberadaan penggilingan padi yang strategis dalam memasok kebutuhan beras di Jawa Barat tersebut.



08 September

BRI Dinobatkan sebagai "Tempat Bekerja Terbaik di Asia" versi HR Asia.

BRI memperoleh penghargaan internasional bergengsi yakni sebagai salah satu tempat bekerja terbaik di Asia atau *Best Companies to Work For in Asia*. Penghargaan diberikan oleh HR Asia Media, media di bidang HR profesional terpercaya di Asia. Tentunya pencapaian istimewa BRI selama hampir 126 tahun berdiri di Indonesia ini tak lepas dari peran serta dan kontribusi Insan BRILiaN. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa BRI on-track dalam mewujudkan salah satu parameter aspirasinya sebagai "Home to the Best Talent".



13 September

Catatan Sejarah UMKM Indonesia, BRI Resmi Menjadi Induk Holding BUMN Ultra Mikro

Holding Ultra Mikro yang melibatkan tiga entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM resmi terbentuk. Hal ini dibuktikan melalui penandatanganan Akta Inbreng saham pemerintah pada Pegadaian dan PNM sebagai penyertaan modal negara kepada BRI selaku induk holding di Jakarta, 13 September 2021. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Erick Thohir bersama dengan Direktur Utama BRI Sunarso, dan dihadiri oleh Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto, dan Direktur Utama PNM Arief Mulyadi serta Wakil Direktur Utama BRI yang sekaligus sebagai Ketua PMO (Project Management Office) Tim Privatisasi BRI Catur Budi Harto.



29 September

Right Issue BRI Catatan Sejarah Jadi Terbesar di Asia Tenggara Dengan Nilai Mencapai Rp95,9 Triliun

Dalam rangka pembentukan Holding Ultra Mikro, aksi korporasi penerbitan 28,2 miliar saham baru (*right issue*) yang dilakukan oleh BRI telah tersedap seluruhnya dan bahkan mengalami *oversubscribed*. Capaian ini diumumkan langsung oleh Direktur Utama BRI Sunarso dalam acara *Opening Bell* di Bursa Efek Indonesia (29/09). Acara tersebut dihadiri oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir, Wakil Menteri II BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen dan Direktur Utama BEI Inarno Djajadi, Wakil Direktur Utama BRI sekaligus Ketua PMO (*Project Management Office*), Catur Budi Harto, serta Direktur Utama Pegadaian Koeswiyoto. Adapun total nilai *Right Issue* BRI mencapai Rp95,9 triliun, yang terdiri dari Rp54,7 triliun dalam bentuk partisipasi non tunai Pemerintah dan Rp41,2 triliun dalam bentuk *cash proceed* dari pemegang saham publik, dimana Rp27,9 triliun diantaranya berasal dari pemegang saham asing.



03 Oktober



Asia Money Kembali Mengukuhkan BRI Sebagai Bank UKM Terbaik di Indonesia

BRI secara berturut turut kembali dinobatkan sebagai Best Bank for SME 2021 oleh Asia money. Sebelumnya BRI juga telah mendapatkan penghargaan yang sama pada tahun 2020 lalu. Dalam publikasinya terbarunya, Asiamoney mengapresiasi keberhasilan BRI yang mampu menjaga kinerja di tengah pandemi dan di saat bersamaan menyelamatkan UKM melalui strategi *business follow stimulus*.



07 Oktober



Gelar RUPSLB, BRI Kembali Tegaskan Komitmen Penerapan Keuangan Berkelanjutan

BRI menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dalam RUPSLB tersebut, BRI menetapkan dua agenda, pertama adalah mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Kedua, mengenai perubahan susunan pengurus perseroan.



08 Oktober



Transformasi Digital BRI Raih 2 (dua) Penghargaan Internasional

BRI kembali menorehkan prestasi bertaraf internasional atas keberhasilannya melakukan transformasi digital. Kali ini, BRI memperoleh dua penghargaan sekaligus yaitu kategori "Special Award for Digital Resiliency" dan "CIO of the Year" dalam ajang IDC Future of Enterprise Awards 2021 yang digelar secara daring. Penghargaan "Special Award for Digital Resiliency" diberikan kepada BRI atas kemampuannya dalam bertahan dan beradaptasi dengan cepat melalui berbagai krisis dan disrupsi dengan memanfaatkan dan mengembangkan kapabilitas digitalnya.



27 Oktober



BRI Semakin Sehat dan Kuat, Kredit UMKM Tumbuh 12,50%, Laba Rp19,07 triliun

BRI mampu mencatatkan kinerja yang sehat dan kuat hingga akhir kuartal III Tahun 2021. Dalam paparan Kinerja Keuangannya, BRI mencatatkan kinerja positif, hal ini tercermin dari penyaluran kredit pada akhir September 2021 sebesar Rp1.026,42 triliun atau tumbuh 9,74% *year on year (yoy)*, dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan nasional sebesar 2,21%. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama BRI Sunarso dalam *Press Conference* Laporan Keuangan Triwulan III.



17 November



BRI Meraih Penghargaan Tertinggi Asia Sustainability Report Rating 2021

BRI berhasil meraih penghargaan platinum (tertinggi) dalam ajang Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2021 yang diselenggarakan oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR). Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan kiprah BRI sebagai perusahaan BUMN dalam penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia. ASRRAT merupakan kegiatan penganugerahan penghargaan kepada lembaga yang berhasil mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada pemangku kepentingan melalui laporan berkelanjutan dengan baik. NCSR memberikan 3 peringkat laporan keberlanjutan, yaitu Platinum (tertinggi), Gold, dan Silver.



27 November



BRI Meraih 4 (empat) Penghargaan Dalam Bank Indonesia Award 2021

BRI meraih empat penghargaan sekaligus dalam Bank Indonesia Award 2021. Keempat penghargaan yang diraih BRI tersebut yakni kategori Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik; Bank Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Terbaik. Kemudian untuk kategori Bank Buku 3 dan 4 sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) QRIS Dengan Performa Terbaik, serta Bank Pendukung UMKM Terbaik (Bank Buku 3 dan 4).



30 November



BRI Buka Kantor Cabang di Taiwan Guna Mengoptimalkan Potensi Bisnis di Asia Timur

BRI menambah *outlet* luar negeri miliknya, yakni Kantor Cabang di Taipei, Taiwan. Upaya ini menjadi wujud dari komitmen BRI untuk mengembangkan sayap bisnisnya. Kantor cabang BRI luar negeri keenam ini terletak di No. 166, Sec. 3, Nanjing East Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan. Operasional BRI Taipei Branch (BRITW) ini sudah mulai beroperasi pada Selasa, 30 November 2021. BRI Taipei Branch juga telah mengantongi izin operasional sebagai Full Retail Foreign Bank Branch Office License oleh otoritas Taiwan. Dengan lisensi tersebut, BRI Taipei Branch dapat memberikan pelayanan Simpanan, Pinjaman, Remitansi, Trade Finance, dan Treasury kepada nasabah di Taiwan.



09 Desember



BRI Meraih Penghargaan Most Trusted Company 2021

BRI meraih penghargaan *Most Trusted Company* atas konsistensinya dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). BRI meraih indeks "sangat terpercaya" atau tertinggi dalam *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bersama Majalah SWA. Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto yang hadir pada acara penghargaan tersebut menjelaskan bahwa pencapaian ini sekaligus menjadi bukti dalam meneruskan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, bagi *stakeholders* maupun InsanBRILian (Pekerja BRI).



09 Desember



BRI Menggelar UMKM EXPO(BR) Brilianpreneur 2021, Bertema "Mengusung UMKM Indonesia Tembus Pasar Global"

Guna mendukung perkembangan kemajuan para pelaku UMKM, maka menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) BRI ke-126, BRI menggelar UMKM EXPO(BR) BRILIANPRENEUR 2021 secara daring, yang berlangsung pada 9-16 Desember 2021 dengan mengusung tema "Dari Indonesia untuk Dunia". Peserta yang berpartisipasi dalam pagelaran ini mencapai 500 UMKM yang telah terpilih melalui serangkaian proses kurasi.



16 Desember



Rayakan HUT Ke-126, BRI bawa tema "Memberi Makna Indonesia"

BRI rayakan ulang tahunnya yang ke-126 tahun. Diusianya yang ke 126 tahun, BRI terus berkarya untuk memberi makna Indonesia. Dalam perayaan yang dihadiri lebih dari 125.000 pekerja di seluruh Indonesia secara daring tersebut, Sunarso juga memberikan apresiasi terbesarnya bagi insan BRILian yang senantiasa bekerja dan mengawal proses transformasi BRI sejak 2016.



Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

“Komitmen BRI untuk terus tumbuh pada segmen UMKM tidak terlepas dari keberhasilan BRI dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di sepanjang tahun 2021, BRI (bank saja) telah menyalurkan KUR sebesar Rp194,90 triliun kepada lebih dari 6,5 juta nasabah. Penyaluran KUR tersebut sejalan dengan strategi BRI untuk tumbuh lebih selektif dan prudent ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi”





Sunarso

Direktur Utama

“Di tengah kondisi pemulihan ekonomi, BRI berhasil memberi makna kepada seluruh *stakeholders* melalui penciptaan *economic value* dan *social value* untuk menjaga fundamental kinerja Perseroan agar terus tumbuh secara sehat, kuat dan berkelanjutan. Keberhasilan BRI mencatatkan kinerja gemilang pada tahun 2021 tersebut merupakan hasil dari strategi transformasi yang telah dimulai pada 2018 dengan tema BRIVolution 1.0 dan dipertajam menjadi BRIVolution 2.0 sehingga BRI mampu menghadapi tantangan dan peluang bisnis yang ada”

» LAPORAN DIREKSI

Kepada Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada tahun 2021 ini BRI mampu mencatatkan kinerja yang solid dan berkelanjutan, meskipun masih ditengah kondisi perekonomian yang menantang dan belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19. Pencapaian kinerja yang membanggakan ini tidak terlepas dari komitmen BRI untuk tetap tumbuh secara *prudent* pada segmen UMKM yang telah menjadi fondasi pertumbuhan bisnis perusahaan selama lebih dari 126 tahun. Transformasi Digital yang terus kami lakukan juga telah terbukti mampu mendorong produktivitas dan efisiensi bisnis untuk menangkap peluang bisnis di tengah pandemi yang masih berlanjut.

Sepanjang tahun 2021 BRI telah mampu menciptakan nilai melalui sinergi BRI Group, salah satunya melalui pembentukan Ekosistem Ultra Mikro bersama Pegadaian dan PNM. Sinergi Ekosistem Ultra Mikro akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan bagi BRI di segmen Ultra Mikro dan memperkuat *core business* perusahaan di segmen Mikro dan Kecil. Di sisi lain, transformasi perusahaan yang telah kami pertajam menjadi "BRIVolution 2.0" dengan fokus pada aspek digital dan *culture*, serta strategi "*Go Smaller, Go Shorter dan Go Faster*" juga akan terus dilanjutkan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan komitmen BRI dalam memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas, lebih mudah dan lebih terjangkau.

Selanjutnya, ijin kami untuk dapat menyampaikan Laporan Tahunan BRI secara Konsolidasian atau BRI Group untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Sekilas Profil Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, aktivitas utama Perseroan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, investasi, dan berbagai jasa perbankan lainnya. Sesuai dengan aktivitas utama, Perseroan memiliki produk dan jasa sebagai berikut:

1. Produk simpanan yang meliputi Tabungan BRI BritAma, Tabungan BRI Junio dan Junio Rencana, dan Tabungan BRI Simpedes beserta turunannya masing-masing.
2. Produk pinjaman yang meliputi Pinjaman Mikro, Pinjaman Program-program Kemitraan, Pinjaman Cash Coll BRI, Pinjaman Ritel Komersial, Pinjaman Menengah, Pinjaman Konsumtif, Ceria (Kartu Kredit), dan BRI JCB Platinum beserta turunannya masing-masing.
3. Jasa yang meliputi Cash Management System, Jasa Kelembagaan, Jasa Bisnis dan Keuangan, Agen BRILink, Jasa Layanan Bisnis Internasional, BRIfast Remittance, Jasa Layanan Treasury, Jasa Investment Service, dan BRI Prioritas.
4. Produk lainnya, antara lain: Dana Sejahtera, Provest Saving Plan Provestara, Telepro, Asuransi Mikro, Asuransi Jiwa Kredit KPR, dan Agen Penjual Reksadana.

BRI menerapkan konsep hybrid bank yang memadukan kehadiran jaringan kerja dan *branchless banking* (Agen BRILink) yang tersebar di seluruh Indonesia, financial advisor yang kompeten dengan *digital capabilities*. Harmonisasi ketiganya kami yakini mampu menghadirkan layanan perbankan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sesuai dengan *journey* literasi digital masyarakat Indonesia.

Jaringan kerja BRI dan mitra usaha BRI meliputi berbagai wilayah baik di dalam maupun di luar negeri. Di dalam negeri, BRI memiliki 18 Kantor Wilayah (Regional office) dan 1 Kantor Cabang Khusus, 451 Kantor Cabang, 5918 Kantor Cabang Pembantu, 5.222 BRI Unit, 525 Kantor Kas, 1.697 Teras BRI, 132 Teras BRI Keliling, dan 4 (empat) Teras BRI Kapal yang tersebar di wilayah Indonesia. Sedangkan jaringan kantor di luar negeri yang dimiliki BRI adalah BRI New York Agency, BRI Cayman Island Branch, BRI Singapore Branch, BRI Taipei Branch, BRI Timor Leste Colmera Branch, BRI Timor Leste Sub Branch Futuhada, BRI Timor Leste Sub Branch Hudilaran BRI Colmera (Timor-Leste) Branch, BRI Timor Leste Sub Branch Audian dan BRI Hongkong Representative Office. Secara keseluruhan, saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui 8.647 unit kerja, 221.531 jaringan e-channel dan 503.151 agen BRILink. BRI juga memiliki 8 (delapan) Kantor Luar Negeri.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BRI memiliki sebanyak 82.718 orang pekerja dengan rincian tingkat Pendidikan 1.528 orang berjenjang pendidikan S2, 69.471 orang berjenjang pendidikan S1, 10.492 orang berjenjang pendidikan Diploma dan 1.220 orang berjenjang pendidikan SLTA/ sederajat.

Di sisi teknologi informasi, BRI memiliki infrastruktur digital yang handal dengan 3 pilar utama, yaitu:

1. *Digitizing Core*, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menciptakan layanan nasabah yang handal, melalui *business process reengineering*. Strategi ini mampu menghasilkan produk dan layanan antara lain BRISPOT, BRILink Agent dan BRIMO.
2. *Digital Ecosystem* yang bertujuan menciptakan platform berbasis digital dan melakukan kolaborasi yang massif dengan ekosistem digital (*Bank as a Platform*) yang mampu menawarkan produk dan layanan baru di luar bisnis utama Bank, antara lain BRI API, Digital Ecosystem Platform (Pasar.id, BRISMART, BRIMOLA, dan lainnya), Partnership dengan P2P, E-Commerce dan Ride Hailing.
3. *New Digital Proposition* yang bertujuan menciptakan business model baru melalui new digital proposition dengan pendekatan fully digital menghasilkan produk dan layanan antara lain Tabungan Digital (*Digital Saving*), Pinjaman Digital (Ceria, Traveloka Paylater) yang didukung *Big Data Analytics* dan *Artificial Intelligence* (BRIBRAIN).

Analisis Kinerja Perseroan

Pada tahun 2021, BRI mampu mencatatkan kinerja yang solid meskipun ditengah kondisi yang penuh tantangan akibat masih berlanjutnya pandemi COVID-19. Dalam bagian ini kami akan memaparkan kondisi perekonomian yang berdampak langsung pada kinerja BRI, kebijakan strategis yang diterapkan, pencapaian target perseroan serta kendala yang dihadapi serta langkah penyelesaiannya.

Kondisi Makro Ekonomi

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan situasi ekonomi global menghadapi tekanan dan penuh ketidakpastian, namun masifnya kegiatan vaksinasi di awal tahun 2021 telah memberikan harapan baru untuk melawan pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi global di 2021 terlihat dari telah meningkatnya kembali aktivitas perekonomian yang dapat diidentifikasi dari laju ekspansif *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur dan servis. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi dunia menghadapi tantangan dengan terus hadirnya varian baru COVID-19, peningkatan aktivitas ekonomi yang tidak diimbangi dengan jumlah pasokan yang memadai yang menjadi penyebab meningkatnya harga komoditas, serta normalisasi kebijakan moneter bank sentral dunia dalam rangka pengendalian tingkat inflasi.

Tidak berbeda dengan kondisi perekonomian global yang mengalami pemulihan pada tahun 2021, hal yang sama juga terjadi pada perekonomian domestik. Ekonomi Indonesia mampu tumbuh 3,51% YoY pada Q3-21 setelah sebelumnya terkontraksi dengan level terendah -5,32% YoY pada Q2-20. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan dalam arah pemulihan ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 sejak Q2-20. Pemulihan ekonomi Indonesia didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan pelonggaran kebijakan restriksi, peningkatan konsumsi pemerintah dan positifnya kinerja neraca perdagangan nasional. Selain itu, aktivitas bisnis dan optimisme pelaku UMKM juga terus menunjukkan tren yang positif, terlihat dari BRI MSME Index khususnya Business Activity Index di Q4'21 104,1 yang lebih baik dibandingkan 95,3 pada kuartal sebelumnya dan Business Sentiment Index mencapai 131,1 lebih baik dibandingkan 120,7 pada kuartal sebelumnya.

Kedepan, pemulihan ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan dari perkembangan dan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia serta risiko akibat normalisasi *monetary policy* yang dilakukan bank sentral. Kebijakan normalisasi Bank Indonesia akan tetap memperhatikan stabilitas nilai tukar Rupiah, tingkat inflasi serta kemampuan perbankan dalam ekspansi kredit sehingga tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Hingga Oktober 2021, kredit perbankan nasional mampu tumbuh 3,24% YoY dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) berada di level 25,30% lebih baik dibandingkan Oktober 2020 sebesar 23,83% maupun Dec-20 sebesar 23,89%. Sudah positifnya pertumbuhan kredit perbankan nasional menunjukkan menguatnya permintaan kredit seiring dengan menurunnya kasus COVID-19 di Indonesia selama 2021. Kualitas kredit masih terjaga dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada Oktober 2021 sebesar 3,22%, di bawah level maksimum sebesar 5% yang telah ditetapkan oleh regulator. Disisi lain, perbankan nasional mampu menghimpun dana pihak ketiga dengan pertumbuhan 9,44% YoY hingga Oktober 2021. Pemulihan ekonomi Indonesia yang terjadi di tahun 2021 mendukung pencapaian kinerja perbankan nasional yang baik.



Berdasarkan analisis perekonomian dan industri serta memperhatikan tantangan yang ada, maka BRI menetapkan target pertumbuhan kredit di tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 9% - 11% YoY. Target pasar pertumbuhan akan tetap difokuskan pada segmen UMKM dan khususnya Mikro/Ultra Mikro sesuai dengan aspirasi BRI menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*.

Tantangan Yang Dihadapi Perseroan Dan Strategi 2021

Pengendalian pandemi COVID-19 yang baik di Indonesia pada akhir tahun 2021 mulai berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Namun demikian, varian COVID-19 yang terus bermutasi dapat menjadi potensi disrupsi dan masih menjadi tantangan yang dapat berpengaruh pada seluruh aktivitas perekonomian nasional, termasuk aktivitas bisnis industri perbankan.

Di sisi lain, pandemi telah menjadi katalisator perubahan besar pada perilaku konsumen (*consumer megashift*). Salah satunya, nasabah semakin terbiasa dengan pemanfaatan teknologi digital. Hal tersebut mendorong kebutuhan layanan perbankan digital menjadi semakin tinggi dan melebur dengan aktivitas dan gaya hidup nasabah. Hal ini menimbulkan tantangan persaingan dari *fintech* maupun digital bank sekaligus menghadirkan peluang untuk memberikan layanan yang inovatif berbasis digital kepada nasabah. Tantangan lain yang dihadapi BRI selama tahun 2021 juga datang dari perubahan kebijakan perekonomian global yang *unfavorable* serta berbagai regulasi yang menuntut perubahan di industri perbankan.

Memperhatikan tantangan dan peluang kedepan, BRI menyadari bahwa dibutuhkan upaya transformasi untuk menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pada tahun 2021, BRI telah menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2021 – 2025 dengan tema Transformasi "BRIVolution 2.0" yang merupakan penajaman dari RJPP Tahun 2018 – 2022 dengan tema Transformasi "BRIVolution 1.0". Untuk memastikan implementasi dari RJPP yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris BRI serta telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut maka target-target yang diberikan kepada Manajemen maupun pekerja BRI telah tercermin dalam *Key Performance Indikator* (KPI) Manajemen maupun seluruh pekerja BRI Grup.

BRI menetapkan aspirasi RJPP 2021-2025 menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion* yang merupakan manifestasi peran BRI dalam menciptakan *economic value* dan *social value*. Adapun definisi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Most Valuable Banking Group in Southeast Asia* (Grup Perbankan Paling Berharga di Asia Tenggara), diindikasikan dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai USD 75 miliar.
2. *Champion of Financial Inclusion* (Juara Keuangan Inklusif), diindikasikan dengan peran dan kontribusi BRI dalam membantu Indonesia untuk mampu mencapai 90% target

keuangan inklusif. Perusahaan akan tetap fokus pada *core business* yaitu segmen UMKM terutama segmen Mikro dan Ultra Mikro dengan memberikan akses layanan yang lebih luas, lebih cepat dan lebih terjangkau didukung peningkatan produktifitas dan efisiensi melalui transformasi digital. Visi ini menegaskan aspirasi BRI untuk "*Go Smaller, Go Shorter dan Go Faster*"

Untuk mewujudkan visi tersebut, BRIVolution 2.0 akan diimplementasikan dalam 3 fase persisten yang saling terkait satu sama lain, sebagai berikut:

1. **Strengthen the Core (2021-2022)**

BRI akan terus memprioritaskan dan memperkuat strategi pertumbuhan aset bisnis di segmen UMKM dengan meningkatkan penetrasi pasar mikro melalui pemberdayaan usaha Ultra Mikro (UMi) sebagai sumber pertumbuhan baru perusahaan.

2. **Scale up and Scope up (2023-2024)**

Untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya BRI terus memperluas jangkauan bisnisnya (*scale up*) melalui perluasan pangsa pasar dan pengembangan ekosistem bisnis baru serta memperluas cakupannya dengan mendorong kontribusi perusahaan anak (*scope up*) kepada induk perusahaan.

3. **Sustain (2025 dan seterusnya)**

Pertumbuhan yang atraktif melalui perluasan jangkauan dan cakupan bisnis tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kinerja keuangan BRI yang sustain.

Secara umum, semangat Transformasi BRIVolution 2.0 tersebut berfokus pada 6 aspek prioritas atau 6C, yaitu *Create new growth engine, CASA, Cross-sell, Credit cost, Customer experience, Culture & Capabilities*.

Tahun 2021 merupakan tahun transisi bagi BRI dimana perusahaan telah memperkuat kapasitas internal perusahaan untuk dapat lebih kuat mendorong akselerasi bisnis di masa pandemi (fase *Strengthen the Core*) dengan strategi yang fokus pada hal-hal sebagai berikut:

Pertumbuhan Kredit yang Selective dan Prudent

Ekspansi bisnis dilakukan secara selektif dan prudent dengan tetap fokus pada segmen UMKM dan khususnya Mikro. Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan permintaan kredit masih terbatas. Melihat kondisi tersebut, strategi pertumbuhan kredit salah satunya dilakukan dengan strategi "*business follow stimulus*" antara lain dengan menyalurkan KUR maupun Kredit UMKM dengan Skema Penjaminan Pemerintah yang memiliki risiko relatif rendah dan suku bunga yang relatif terjangkau bagi nasabah yang kemampuan bisnisnya belum pulih namun tetap memberikan return yang optimal bagi BRI.

Pengelolaan Kualitas Aset

Pada tahun 2021 BRI juga fokus menjaga kualitas aset dan secara hati-hati dalam mengelola kredit bermasalah khususnya portfolio restrukturisasi kredit terdampak COVID-19. BRI menerapkan strategi "*soft landing*", antara lain dengan lebih selektif

melakukan restrukturisasi kredit dan aktif memastikan kecukupan pencadangan untuk mempersiapkan berakhirnya relaksasi OJK pada Maret 2023. BRI juga terus meningkatkan kualitas *enabler* bisnis (*Human Capital Capability and Information Technology*) untuk mendorong perbaikan dan penguatan kualitas aset.

Peningkatan CASA dan *Fee Based Income*

Peningkatan penghimpunan CASA dan *Fee Based Income* dengan mendorong kenaikan transaksi baik di segmen mikro, ritel dan *wholesale*. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran AgenBRILink dan pengembangan aplikasi pembayaran berbasis digital (BRImo, *Digital Payment Ecosystem* dan *Cash Management System*).

Transformasi Digital

Sebagai bagian dari *hybrid bank business model*, BRI secara berkelanjutan melakukan transformasi digital pada tiga pilar yaitu *Digitizing the Core*, *Digital Platform Ecosystem* dan *New Digital Proposition* dengan fokus utama pada *Business Process Reengineering* dan *New Business Model* untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis.

Sinergi BRI Group

Sesuai dengan *journey* Transformasi BRIVolution 2.0 untuk menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia* dan *Champion of Financial Inclusion* di tahun 2025, pada tahun 2021 BRI juga memperkuat sinergi BRI Group antara induk dengan perusahaan anak BRI yang difokuskan pada tiga aspek yaitu **Diversifikasi Income**, **Spreading Risk**, dan memperkuat **Customer Base**. Sinergi BRI Group dilakukan baik di bidang bisnis seperti *cross selling* dan *joint acquisition*, maupun non bisnis seperti di bidang human capital, IT dan operasional lainnya. Seluruh *resources* BRI Group tersebut akan diarahkan kepada bisnis yang lebih kecil, yaitu *mass market* dan tidak fokus pada korporasi besar. Sesuai dengan strategi "*Go Smaller, Go Shorter, dan Go Faster*", BRI Group akan mengembangkan bisnisnya ke segmen UMKM dan yang lebih kecil yaitu segmen Ultra Mikro, serta membuat sistem yang terstruktur untuk menaikkembangkan nasabah secara terintegrasi

Pencapaian Kinerja Perseroan

Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional, BRI berhasil menutup tahun 2021 dengan gemilang. Perseroan berhasil memberi makna kepada seluruh *stakeholders* melalui penciptaan *economic value* dan *social value* untuk menjaga fundamental kinerja dapat tumbuh secara sehat, kuat dan berkelanjutan. Berbagai strategi yang diajalkan BRI sepanjang tahun 2021 mampu membawa perusahaan mencapai kinerja yang solid baik secara *finansial* maupun *non-finansial*.

Pencapaian Kinerja Finansial Tahun 2021

Laporan Keuangan Konsolidasian BRI Tahun 2020 dan 2021 telah mengkonsolidasikan kinerja Pegadaian dan PNM sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK 38). Sementara itu, dengan

bergabungnya BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia maka pada Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun 2021, BRI tidak lagi mengkonsolidasikan kinerja BRI Syariah.

Berikut kami sampaikan kinerja BRI secara konsolidasian untuk Tahun 2021:

Hingga 31 Desember 2021, BRI mampu membukukan total aset sebesar Rp1.678,10 triliun utamanya disumbang oleh kredit dan pembiayaan yang mencapai Rp1.042,87 triliun atau meningkat 2,2% YoY. Tanpa memperhitungkan kinerja BRI Syariah yang dikonsolidasikan pada tahun 2020, kredit dan pembiayaan BRI Group mampu tumbuh 6,3% YoY.

Pencapaian kredit dan pembiayaan BRI didominasi oleh segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah menjadi *core business* BRI selama lebih dari 126 tahun. Total kredit dan pembiayaan pada segmen UMKM mencapai Rp874,6 Triliun dengan proporsi mencapai 83,86% dari total penyaluran kredit BRI. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dan BRI akan terus meningkatkan proporsi tersebut hingga mencapai 85%.

Pencapaian kredit & pembiayaan UMKM tersebut terdiri dari penyaluran kredit di segmen Mikro sebesar Rp483,9 triliun atau tumbuh 11,87% YoY, sehingga komposisinya mencapai 46,60% atau meningkat dari posisi tahun 2020 yang sebesar 42,40%. Pertumbuhan kredit & pembiayaan di segmen Mikro juga diikuti oleh kenaikan jumlah nasabah pinjaman yang tumbuh 13,5% YoY menjadi 13,3 juta nasabah (bank saja). Sementara itu, Kredit di segmen Kecil dan Menengah mencapai Rp240,4 triliun atau tumbuh terbatas sebesar 0,49% YoY (tanpa memperhitungkan Kredit dan Pembiayaan BRI Syariah yang dikonsolidasikan pada tahun 2020).

Komitmen BRI untuk terus tumbuh pada segmen UMKM tidak terlepas dari keberhasilan BRI dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di sepanjang tahun 2021, BRI (bank saja) telah menyalurkan KUR sebesar Rp194,90 triliun kepada lebih dari 6,5 juta nasabah. Penyaluran KUR tersebut sejalan dengan strategi BRI untuk tumbuh lebih selektif dan *prudent* ditengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Selain itu, bergabungnya Pegadaian dan PNM kedalam BRI Group juga turut mendorong kenaikan proporsi kredit UMKM Perseroan, khususnya di segmen Mikro dan Ultra Mikro, hal tersebut sejalan dengan strategi BRI "*Go Smaller, Go Shorter, Go Faster*".

Untuk kredit & pembiayaan pada segmen Korporasi pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp168,3 triliun atau tumbuh *moderate* 2,15% YoY. Tren pertumbuhan tersebut sejalan dengan strategi BRI untuk lebih fokus tumbuh pada segmen UMKM. Sementara strategi bisnis Korporasi diarahkan pada penguatan *wholesale funding* dan *transaction banking* seperti *trade finance*, *cash management* dan transaksi forex.



Selanjutnya, dari sisi pendanaan atau raihan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2021, BRI mampu menghimpun DPK secara konsolidasian yang mencapai sebesar Rp.1.138,74 triliun atau meningkat 1,59% YoY. Tanpa memperhitungkan kinerja BRI Syariah yang dikonsolidasikan pada tahun 2020, maka DPK mampu tumbuh 6,3% YoY. Apabila dirinci, Tabungan mendominasi sebesar Rp.497,68 triliun, Giro tercatat sebesar Rp.220,59 triliun, dan Deposito sebesar Rp.420,48 triliun.

Fokus Perseroan mengakselerasi kemampuan dalam menghimpun dana murah membuat rasio CASA meningkat menjadi 63,08% pada akhir Desember 2021, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 59,66%. Keberhasilan BRI dalam memperbaiki struktur pendanaan membuat beban bunga BRI turun sebesar 30,2% yoy. Kedepan, BRI pun akan terus mendorong peningkatan dana murah sebagai sumber pendanaan.

Penghimpunan CASA didukung oleh strategi BRI dalam meningkatkan transaksi nasabah pada segmen Ritel maupun *Wholesale*. Pada segmen Ritel penghimpunan CASA didukung oleh optimalisasi transaksi melalui Agen BRILink, *mobile banking* (BRImo) dan *digital payment platform* (BRI API), serta partisipasi aktif Perseroan dalam penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (diantaranya subsidi tunai dan BPUM). Sementara pada segmen *wholesale* penghimpunan CASA dioptimalkan melalui pengembangan *platform digital payment* untuk nasabah korporasi seperti *Cash Management System* maupun peningkatan transaksi *Trade Finance*.

Kinerja Perseroan yang solid tersebut juga ditunjukkan oleh pencapaian laba bersih sebesar Rp30,76 Triliun pada tahun 2021 atau tumbuh 64,82% YoY dari tahun 2020 sebesar Rp18,66 triliun. Pertumbuhan pencapaian laba bersih 2021 tersebut memperhitungkan kinerja Pegadaian dan PNM secara proposional sejak bergabung bersama BRI pada tanggal 13 September 2021.

Pertumbuhan profitabilitas BRI Group yang signifikan tersebut didorong oleh perolehan laba bersih BRI secara bank saja yang sebesar Rp.32,22 triliun atau tumbuh 75,53% year on year. Penopang utama pertumbuhan laba BRI terletak pada kinerja kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh positif disertai penurunan biaya bunga yang signifikan, dan disaat bersamaan Perseroan mampu mengelola portfolio mix serta kualitas asset sehingga dapat meningkatkan yield asset.

Disamping itu, pertumbuhan laba bersih juga didukung oleh strategi pertumbuhan kredit dan pembiayaan yang fokus pada segmen UMKM khususnya segmen Mikro, upaya efisiensi biaya dana yang agresif melalui penghimpunan DPK yang selektif dan fokus pada CASA, serta strategi diversifikasi pendapatan non non kredit (*Fee Based Income, Recovery Income dan Treasury Income*). BRI mencatat total Pendapatan Bunga dan Syariah sebesar Rp143,52 triliun atau tumbuh 5,71% YoY. BRI juga tetap menjaga suku bunga kredit sesuai dengan SBDK sebagai berikut:

Counter Rate Kredit per 31 Desember 2021

Segmen Kredit	Suku Bunga
Kredit Mikro	14,00%
Kredit Ritel	8,25%
Kredit Konsumsi (KPR)	7,25%
Kredit Konsumsi (Non KPR)	8,75%
Kredit Korporasi	8%

Di sisi lain, pada tahun 2021 total Beban Bunga dan Syariah tercatat sebesar Rp29,4 triliun atau turun 30,2% YoY dengan rasio Biaya Dana atau *Cost of Fund* (CoF) BRI secara bank saja mengalami tren penurunan yang signifikan dari 3,22% pada tahun 2020 menjadi 2,05% pada tahun 2021 dan angka ini merupakan level terendah perusahaan. BRI menghimpun DPK melalui tiga produk utama yaitu Giro, Tabungan dan Deposito dengan range suku bunga yang diberikan masing-masing

Counter Rate Simpanan BRI per 31 Desember 2021

Jenis Simpanan	Suku Bunga
Giro	0,25% - 1,9%
Tabungan	0,1% - 0,8%
Deposito	2,35% - 2,8%

Pendapatan *Fee Based* dan Operasional Lainnya (termasuk pendapatan premi bersih) pada tahun 2021 mencapai Rp42,26 triliun atau tumbuh 8,4% YoY. Tren tersebut disumbang oleh *Fee Based Income* BRI (bank saja) sebesar Rp16,55 triliun atau tumbuh 9% YoY, Pendapatan Recovery (bank saja) sebesar Rp8,92 triliun atau 24,5% YoY dan Pendapatan Treasury (Bank Saja) sebesar Rp4.93 triliun atau tumbuh 21,6% YoY.

Pencapaian *Fee Based Income* sebagai kontributor utama kenaikan Pendapatan Operasional Lainnya sejalan dengan kenaikan transaksi nasabah pada layanan *Branchless Banking* BRI (AgenBRILink) sebesar 27,5% YoY dengan jumlah transaksi mencapai 928 juta kali dan volume transaksi sebesar Rp1.143,81 triliun, kenaikan transaksi BRImo sebesar 66,2% YoY dengan jumlah transaksi mencapai 1,27 miliar transaksi, kenaikan transaksi ATM sebesar 13,2% sebanyak 4,2 miliar transaksi, serta peningkatan *Fee Bancassurance* sebesar 71,3% YoY yang didorong oleh sinergi BRI Group (*cross selling* dan strategi *partnership* BRI Life).

Sementara itu, biaya operasional BRI mencapai Rp75,9 triliun atau meningkat 12,5% YoY, kenaikan tersebut disumbang oleh peningkatan Biaya Tenaga Kerja dalam rangka implementasi program kepemilikan saham oleh pekerja yang merupakan strategi Perseroan meningkatkan *engagement* pekerja dalam mendukung pencapaian target dan visi perusahaan, dukungan kesehatan kepada pekerja, serta penerapan beberapa ketentuan baru diantaranya *Omnibus Law* dan Implementasi Qanun.

Sejalan dengan strategi untuk memastikan pencadangan yang memadai dalam menghadapi dampak pandemi terhadap kualitas aset, pada tahun 2021 BRI membukukan biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp39,29 triliun atau

naik 11,4% YoY. Kenaikan biaya ini juga disumbang peningkatan pembentukan pencadangan oleh perusahaan anak BRI yaitu Bank Raya sejalan dengan strategi transformasi menjadi Bank Digital.

Dengan pertumbuhan bisnis dan profitabilitas yang kuat tersebut, BRI mampu menjaga rasio-rasio keuangan pada level yang sehat dan kuat. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank terjaga pada level 83,53%, menunjukkan kondisi likuiditas Perseroan pada kondisi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan bisnis kedepan. Rasio NPL (*Gross*) terjaga pada level 3,00% dan NPL (*Nett*) sebesar 0,70%, menunjukkan pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan yang solid di sepanjang 2021 yang masih menantang akibat gelombang kedua pandemi COVID-19. Perbaikan kualitas kredit juga ditunjukkan dari tren penurunan rasio *Loan at Risk* (LAR) dari 28,3% pada 2020 menjadi 24,1% pada 2021 (bank saja). Membaiknya LAR tersebut disebabkan oleh penurunan kredit yang direstrukturisasi akibat dampak pandemi COVID-19. Dapat kami sampaikan bahwa Perseroan telah melakukan restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 dengan total akumulasi mencapai Rp245,2 triliun kepada lebih dari 3 juta nasabah khususnya di segmen UMKM (bank saja). Pada akhir 2021, *outstanding* kredit restrukturisasi kredit tersebut telah turun menjadi Rp156,95 triliun atau turun Rp82,89 triliun, restrukturisasi tersebut diberikan kepada 2,1 juta nasabah.

Pencapaian Target Kinerja Perseroan

Secara umum, BRI secara bank saja mampu mencapai dan bahkan melampaui target kinerja 2021 yang telah ditetapkan

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Keuangan

(bank saja, dalam miliar Rupiah)

Uraian	Desember 2021 (Bank Saja)		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Aset	1,505,916	1,572,761	104,44%
Pendapatan Bunga	116,198	119,828	103,12%
Kredit yang diberikan	944,978	943,703	99,87%
Dana Pihak Ketiga	1,108,523	1,127,849	101,74%
Laba Bersih	23,516	32,215	136,99%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	79,00%	74,30%	106,33%
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85,25%	83,67%	98,15%
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,38%	3,08%	109,59%
Non Performing Loan (NPL) Net	0,97%	0,70%	138,04%
Net Interest Margin (NIM)	6,48%	6,89%	106,33%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	22,07%	25,28%	114,58%
Credit Cost Nett	2,63%	2,45%	107,50%
Cost to Income Ratio (CIR)	46,08%	43,26%	106,52%

Kinerja BRI menunjukkan performa yang solid pada tahun 2021, hal ini ditandai dengan realisasi atas target yang telah dicanangkan sebelumnya. Seluruh indikator pencapaian menunjukkan realisasi diatas target yang ditetapkan, hanya pada aspek Kredit yang diberikan dan LDR yang sedikit berada di bawah target dimana Kredit Yang Diberikan tercapai sebesar 99,87% dan Rasio LDR tercapai sebesar 98,15%. Meskipun pencapaian Kredit berada tipis dibawah target sebesar 0,13% pertumbuhan Kredit Perseroan mampu tumbuh sebesar 7,16% yoy, pertumbuhan Kredit Perseroan ini juga sebagai stimulus penggerak kenaikan kredit Industri yang tumbuh sebesar 5,2% yoy. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Perseroan sebagai *market leader* di industri perbankan nasional yang dapat tumbuh di atas rata-rata industri.



Pertumbuhan kredit yang baik tidak terlepas dari support likuiditas yang utamanya bersumber dari Dana Pihak Ketiga khususnya Dana Murah (CASA), tercatat Dana Pihak Ketiga mencapai Rp1.127.849 juta atau tercapai 101,74% dari target dengan rasio CASA sebesar 63,30%. Pertumbuhan kredit yang baik dan Pertumbuhan Simpanan yang utamanya didorong dari CASA mampu mendorong pendapatan bunga Perseroan yang mencapai Rp119.828 juta atau tercapai 103,12% dari target dan Net Interest Margin (NIM) mencapai 6,89% atau mencapai 106,33% dari target. Pencapaian NIM yang baik juga diikuti oleh peningkatan pendapatan di luar bunga dan terjaganya biaya operasional non bunga, hal ini ditunjukkan oleh rasio CIR yang mencapai 43,26% lebih rendah dari target sebesar 46,08%.

Kinerja solid *upper line* tersebut ter-refleksi pada peningkatan laba bersih Perseroan dimana tercatat sebesar Rp32.215 juta tumbuh 75,53% secara YoY dan tercapai sebesar 136,99% dibandingkan target Rp23.516 juta.

Pencapaian Kinerja Non Finansial Tahun 2021 (Human Capital, Organisasi, Teknologi Informasi dan Jaringan Kerja)

Pencapaian kinerja finansial BRI didukung oleh transformasi yang juga dilakukan BRI pada aspek-aspek Human Capital, Organisasi, Teknologi Informasi, dan Jaringan Kerja.

Human Capital

Untuk meningkatkan produktifitas pekerja, BRI senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi yang sistematis dan komprehensif yang dilakukan sejak awal rekrutmen sampai dengan pension (BRILiaN Development Center).

Selain itu, BRI juga mengembangkan sistem BRI *Continuous Performance Management* (BRICORE), sebagai suatu sistem *monitoring* untuk menyelaraskan sasaran unit kerja dan target individu pekerja serta memfasilitasi diskusi yang objektif, terbuka dan berfokus pada pengembangan human capital ke depan.

Selain itu BRI juga membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta sertifikasi keprofesian kepada pekerja BRI. Sepanjang tahun 2021, BRI telah berhasil memberikan sertifikasi profesi kepada 2.032 pekerja.

BRI berkomitmen menjaga kondusifitas lingkungan kerja dan menjangkau aspirasi perbaikan dalam pengelolaan *human capital*, salah satunya melalui pengukuran tingkat keterikatan pekerja terhadap perusahaan melalui *Employee Engagement Survey* (EES). Hasilnya, indeks keterikatan pekerja BRI mengalami peningkatan 0.07 poin menjadi 3.46 (skala 4) di tahun 2021, dengan persentase pekerja *engaged* sebesar 92%.

Organisasi

Transformasi BRI juga dilakukan pada aspek organisai dengan tujuan menyederhanakan hierarki (*less structure, less hierarchical & less bureaucracy*) sehingga perusahaan dapat lebih *agile*, mendorong pekerja untuk semakin inovatif dan adaptif untuk menghadapi tantangan saat ini dan dimasa mendatang. Simplifikasi organisasi dilakukan pada level *Head Office, Regional Office* maupun Unit Kerja Operasional. Berdasarkan hasil evaluasi efektivitas Organisasi, transformasi organisasi mampu mendorong kenaikan skor evaluasi efektivitas Organisasi dan menjadi faktor pendukung kenaikan nilai engagement pekerja.

Teknologi Informasi

Pada tahun 2021, BRI mengusung tema Teknologi Informasi: *Industry Leader on Digital & IT Maturity in Indonesia*, dengan *masterpiece* program *Leading Omni Channel Innovation, Strengthening DRP Implementation, Integrated Cyber Threat Detection System*, dan *BRIBRAIN for Analytics Scoring*. Dari *masterpiece* program tersebut, didapatkan *score IT maturity* 4,72 dari skala 5,00, *availability* layanan IT pada 99,85%, serta *success rate* pada skor 99,95%.

Tidak hanya dari aspek IT *Governance dan Digital Maturity assessment*, namun dari sisi *International Standards Certification* seperti ISO dan PCI juga berhasil didapatkan BRI pada fasilitas IT dan juga produk-produk BRI selama periode 2019-2020. Di tahun 2021, BRImo dan BRILink Mobile menjadi *digital apps* yang berhasil memperoleh rekomendasi ISO 20000-1:2018.

Networks

Keberhasilan pencapaian kinerja Perseroan juga tidak terlepas dari dukungan infrastruktur jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2021 Perseroan secara Bank Saja memiliki 8.647 jaringan kantor. Untuk menjangkau masyarakat lebih luas, Perseroan juga memiliki layanan AgenBRILink yang jumlahnya mencapai 503.151 Agen.

Transformasi berbasis digital pada jaringan kerja tersebut mencatatkan pencapaian yang positif. Pada layanan AgenBRILink tercatat jumlah transaksi finansial agen tumbuh 27,73% YoY menjadi 929,38 juta transaksi di tahun 2021, dengan *sales volume* tercatat mencapai Rp1.143 triliun. *Fee Based Income* AgenBRILink *mencapai* sebesar Rp1,34 triliun atau tumbuh 15,80% YoY. Selain itu, AgenBRILink juga meningkatkan perolehan dana murah (CASA) sebesar Rp19,38 triliun atau tumbuh 46,02% YoY.

Selain itu, pada tanggal 30 November 2021, BRI secara resmi telah membuka unit kerja luar negeri baru di Taipei yang ditujukan untuk mengakomodasi potensi bisnis yang ada di negara Taiwan dengan menawarkan layanan ritel maupun *wholesale*. Layanan yang ditawarkan meliputi simpanan, pinjaman dan *trade finance*. Sebagai bagian dari transformasi model bisnis jaringan kerja, pada tahun 2021, BRI juga telah mengimplementasikan 2.619 *Universal Banker* pada 539 Unit Kerja, 13 *Regional Office* yang

berperan aktif untuk membantu nasabah melakukan migrasi transaksi dari Unit Kerja ke *Digital* atau *Remote Channel* dengan mengimplementasikan *New Machine Banking* diantaranya *Self Services Passbook Printing (SSPP)* di 40 Unit Kerja dan *Replacement Card Machine (RCM)* di 42 Unit Kerja untuk mempercepat proses layanan dan meningkatkan *customer experience*.

Apresiasi Stakeholder

Pencapaian Kapitalisasi Pasar

Dengan berbagai pencapaian dan aksi korporasi yang dilakukan, BRI mampu mencatatkan nilai kapitalisasi pasar mencapai Rp621,75 triliun pada akhir tahun 2021 atau meningkat 20,88% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp514,35 triliun. Posisi tersebut menjadikan BRI sebagai BUMN dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia dan Bank dengan kapitalisasi pasar terbesar ketiga di Asia Tenggara.

Penghargaan yang Diterima

Pengakuan terhadap prestasi BRI sepanjang tahun 2021 juga ditunjukkan dari berbagai penghargaan yang diperoleh baik dari tingkat nasional maupun internasional, diantaranya *World Largest Company in Indonesia* dari Forbes Global 2000, *Best Bank Awards: Indonesia's Best Bank for SMEs 2021* dari Asia Money, *The Most Valuable Brand in Indonesia 2021* dari Brand Finance, Bank Pendukung UMKM Terbaik Kategori Bank Buku 3 & 4 dari Bank Indonesia, *Indonesia Most Trusted Companies* dari Corporate Governance Perception Index. Secara keseluruhan, BRI mendapatkan lebih dari 150 penghargaan atau award baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Perubahan Penting di BRI Grup untuk Penciptaan Nilai melalui Corporate Action

Sejalan dengan visi BRI menjadi *The Most Valuable Banking Group In Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*, BRI juga terus berkomitmen melakukan perubahan-perubahan penting baik di induk maupun di BRI Grup sehingga mampu menciptakan nilai bagi para stakeholders antara lain melalui pengembangan bisnis secara anorganik. Beberapa *corporate action* yang dilakukan selama tahun 2021 sebagai berikut:

1. Merger BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia

Pada tahun 2021 PT. Bank Syariah Indonesia bersama dengan PT. Bank Mandiri Syariah dan PT. Bank Negara Indonesia Syariah resmi bergabung menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pembentukan Bank Syariah Indonesia merupakan langkah awal dalam mengoptimalkan potensi pasar Syariah di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, serta mampu membawa Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu pemain global yang berperan penting dalam ekonomi Syariah global. Melalui aksi korporasi tersebut Perseroan mampu menciptakan nilai yang ditunjukkan dengan kenaikan harga saham BRI Syariah dari level sekitar Rp500/ lembar saham sebelum konsolidasi menjadi sekitar Rp2.000 pasca konsolidasi pada bulan Januari – Februari 2021. Sebagai dampak transaksi merger tersebut,

kepemilikan BRI di Bank Syariah Indonesia turun dari 71,64% menjadi 17,25% dan BRI tidak melakukan konsolidasi terhadap kinerja Bank Syariah Indonesia dalam laporan keuangan 2021.

2. Strategic Partnership BRI Life

Kerja sama strategis BRI Life bersama FWD Financial Services Pte. Ltd dimana pada transaksi ini valuasi BRI Life meningkat 5,6x sejak bergabung bersama BRI pada tahun 2015. Melalui *partnership* ini, BRI akan mengoptimalkan kekuatan *customer base* dan infrastruktur perusahaan dengan *expertise partner* untuk memberikan *customer experience* serta *new value proposition* kepada lebih banyak nasabah.

3. Pembentukan Ekosistem Ultra Mikro (Holding Ultra Mikro)

Pada tanggal 13 September 2021, Perseroan bersama PT. Pegadaian dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) resmi bergabung dalam Holding Ultra Mikro dan Perseroan secara resmi telah menjadi Induk dari Pegadaian dan PNM. Pembentukan Holding Ultra Mikro merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru di segmen mikro dan khususnya segmen ultra mikro yang saat ini potensinya masih sangat besar. Ekosistem Ultra Mikro bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang terintegrasi dengan membuka akses yang lebih luas dan lebih terjangkau kepada segmen ultra mikro di Indonesia. Disamping itu, sinergi ini juga akan berkontribusi pada inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka pembentukan Holding Ultra Mikro tersebut, Perseroan juga telah melakukan aksi korporasi Penambahan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau *rights issue*. Total nilai *right issue* tersebut mencapai Rp95,9 triliun, yang terdiri dari Rp54,7 triliun dalam bentuk partisipasi non tunai pemerintah (inbreng saham Pegadaian dan PNM) dan Rp41,2 triliun dalam bentuk *cash proceed* dari pemegang saham publik. Aksi *rights issue* BRI pada tahun 2021 ini berhasil menjadikan ***right issue* terbesar di Asia Tenggara, terbesar ke-3 di Asia, dan terbesar ke-7 di dunia.**

Penciptaan Social Value

Pada tahun 2021 BRI terus memperkuat implementasi LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola Perusahaan) dengan melakukan berbagai inisiatif dan inovasi yang sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perjanjian Paris. BRI juga mampu mewujudkan komitmen penuh dalam implementasi POJK No.51/POJK.30/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik.

BRI menerapkan strategi keberlanjutan dengan mengintegrasikan seluruh aspek Environmental, Social & Governance (ESG) yang berfokus pada 4 (empat) aspek yaitu Aset, Liabilitas, Sumber Daya Manusia dan Operasional. Dengan fokus pada strategi tersebut BRI mampu menyalurkan Rp. 614,2 Triliun atau 65.1% dari total pinjaman BRI kepada kegiatan usaha yang berkelanjutan.

BRI memperkuat tata kelola perusahaan dengan membentuk Komite ESG dibawah Direksi serta unit kerja khusus yang membidangi ESG yaitu *Desk ESG*. Dengan dibentuknya Komite ESG dan Desk ESG, kedepan BRI akan memiliki strategi ESG yang lebih kuat.

BRI juga berkomitmen untuk memberikan *social value* bagi masyarakat melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) yang diimplementasikan melalui program BRI Peduli. Program BRI Peduli disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang sejalan dengan target Pemerintah dan Visi perusahaan dalam mencapai target-target tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada 4 (empat) pilar yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan serta Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Sampai dengan Desember 2021 BRI telah menyalurkan Program TJSL BRI Peduli sebesar Rp270,46 miliar.

Komitmen ini terus berlanjut melalui aksi nyata dengan mengembangkan program Desa BRILiaN, yaitu program inkubasi dan literasi Desa Binaan BRI melalui optimalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Hingga akhir tahun 2021, BRI telah memberdayakan 1.191 BUMDes yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Prospek Usaha dan Hal-Hal Penting yang Akan Terjadi di Masa yang Akan Datang

Kami meyakini pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 akan berlanjut di tahun 2022. IMF dan OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia berada pada kisaran 4,9% dan 4,5% di tahun 2022 didukung pulihnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan Eropa. Proyeksi pemulihan ekonomi dunia tersebut kami yakini akan menjadi pendorong pulihnya pertumbuhan perekonomian Indonesia. Hal ini juga ditunjukkan dengan parameter makroekonomi yang positif yaitu tingkat kepercayaan konsumen yang semakin optimis dan konsumsi rumah tangga yang terus meningkat.

Di sisi lain, kebijakan Pemerintah yang tetap proaktif dalam menghadapi dampak pandemi melalui program vaksinasi maupun melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional di tahun 2022 disertai kebijakan regulator yang akomodatif akan turut mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, kami optimis prospek industri perbankan khususnya BRI akan membaik dan positif di tahun 2022. Kami memproyeksikan pertumbuhan kredit BRI mampu tumbuh pada level 9% - 11% didukung oleh segmen UMKM khususnya Mikro dan Ultra Mikro sebagai pendorongnya.

Seperti yang terjadi di tahun 2021, BRI melihat terdapat beberapa hal-hal penting yang dapat terjadi di masa yang akan datang, seperti:

- Shifting preferensi digital yang semakin cepat dari pengusaha ultra mikro maupun mikro, sehingga akan mengakselerasi penetrasi layanan keuangan (financial inclusion) di Indonesia
- Persaingan yang semakin ketat di industri perbankan, khususnya segmen ultra mikro dan mikro yang tidak hanya datang dari sesama perbankan tetapi juga dari fintech
- Kebijakan tapering off dan kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan oleh The FED, yang akan secara langsung dapat berdampak pada kebijakan suku bunga acuan di Indonesia dan berpengaruh pada potensi pertumbuhan kredit di Indonesia
- Kemungkinan adanya varian baru COVID-19 yang masih akan muncul, yang dapat mengganggu lajunya pemulihan ekonomi Indonesia di 2022

Strategi Perseroan Kedepan

Untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan mencapai visi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion* pada tahun 2025, BRI akan melanjutkan transformasi perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2021–2025 atau Transformasi “BRIVolution 2.0”. Tahun 2022 akan menjadi bagian dari fase awal perjalanan di mana dalam periode ini perusahaan fokus pada penguatan internal sebagai bekal untuk melakukan *scale up* dan *scope up* cakupan bisnis di tahun berikutnya (***Strengthening The Core, to Scale Up and Scope Up***), demi terjaganya kepemimpinan dan penguasaan pasar BRI di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, pencapaian visi dan strategi jangka panjang Perseroan di atas, pada tahun 2022 akan dilakukan eksekusi strategi yang berfokus pada lima aspek, yaitu:

1. *Asset Quality*, menjaga kualitas aset produktif dengan fokus pada kualitas kredit (LAR), peningkatan *success rate* restrukturisasi kredit, serta pengendalian biaya CKPN;
2. *Selective Growth*, ekspansi bisnis secara selektif dengan memanfaatkan stimulus pemerintah, serta melakukan eksplorasi *new growth engine* termasuk optimalisasi *ultra micro business* dan *salary based loan* yang lebih kompetitif;
3. *Excellence Enabler*, memperkuat kompetensi aspek-aspek penunjang bisnis terutama pada bidang teknologi digital, *human capital, culture, distribution channel*, dan tata kelola risiko;
4. *CASA*, meningkatkan perolehan dana murah dengan mengendalikan biaya dana sekaligus mendorong aktivitas transaksi nasabah untuk menjaga stabilitas pengendapannya;
5. *BRI Group Sinergy*, penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan Anak Perusahaan maupun antar sesama Perusahaan Anak untuk meningkatkan *cross selling* produk BRI Group, *sharing resources*, dan eksplorasi *new investment opportunities*.

Disamping itu, untuk terus tumbuh berkelanjutan strategi pertumbuhan BRI Group kedepan adalah dengan mengoptimalkan sinergi Holding UMi, antara lain dengan mendorong nasabah eksisting naik kelas dan memperbesar customer base melalui

digitalisasi bisnis proses dengan meng-create sumber pertumbuhan baru (*new source of growth*).

Pembentukan Holding Ultra Mikro memastikan adanya sumber pertumbuhan baru bagi BRI Group. Sesuai dengan jargon *Go Smaller*, BRI konsisten untuk tumbuh kepada segmen yang lebih kecil yaitu UMi. Potensi nasabah Ultra Mikro (UMi) sangat besar, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi & UKM didapatkan informasi bahwa terdapat sekitar 65 juta usaha mikro di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 58 juta diantaranya merupakan usaha di segmen ultra mikro. Berdasarkan analisis kami, sekitar 46 juta usaha ultra mikro tersebut membutuhkan sumber pendanaan dari luar, namun hanya sekitar 20 juta diantaranya yang dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal. Sisanya, 26 juta usaha ultra mikro saat ini belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal, bahkan 14 juta diantaranya tidak memiliki akses pendanaan sama sekali baik dari lembaga keuangan formal maupun informal.

Melalui Holding Ultra Mikro, BRI Group dapat membuka akses layanan keuangan seluas-luasnya dengan biaya se-efisien mungkin. Ketiga entitas yang tergabung dalam holding akan bersinergi dan membangun ekosistem berdasarkan model bisnis yang didukung dengan teknologi digital, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi biaya untuk penyaluran pinjaman nasabah UMi, serta berkontribusi pada inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Holding Ultra Mikro akan memperkuat ekosistem, serta memperdayakan dan menaikkelaskan segmen UMi melalui 3 (tiga) fase:

- Fase Empowerment. PNM melalui model bisnis Lending Group-nya, PNM Mekaar, memberikan pemberdayaan kepada nasabah yang unfeasible dan *unbanked* untuk menjadi pengusaha Ultra Mikro yang lebih independen. Literasi keuangan nasabah PNM Mekaar terus ditingkatkan melalui kepemilikan produk tabungan Simpedes UMi yang dibuat sesuai dengan karakteristik mereka beserta program-program social empowerment pendukungnya serta memudahkan Pemerintah dalam menyalurkan stimulus kepada masyarakat.
- Fase Integration. Saat nasabah PNM Mekaar sudah menjadi *feasible* dengan kapasitas bisnis yang semakin meningkat, mereka dapat ditawarkan produk serta layanan Ultra Mikro berupa pinjaman berbasis fidusia dari BRI atau pinjaman berbasis gadai dari Pegadaian. Dari sisi *liabilities product*, nasabah juga dapat ditawarkan produk Tabungan BRI Simpedes, BritAma maupun tabungan emas Pegadaian.
- Fase Upgrade. Merupakan tujuan akhir dari integrasi dalam ekosistem Ultra Mikro ini, dimana nasabah berkembang menjadi pengusaha dengan kapasitas bisnis yang semakin meningkat dan siap naik kelas menjadi nasabah mikro BRI.

Dengan semakin terinklusnya nasabah UMi, tidak hanya menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI Group, tetapi juga akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam jangka panjang, BRI akan melanjutkan fase berikutnya yaitu fase *Scale Up and Scope Up* (2023 – 2024) dan *Sustain* (2025 dan seterusnya). Pencapaian aspirasi perusahaan tersebut juga akan didorong melalui inisiatif bersifat *breakthrough* dan berskala

moonshot yaitu Pengembangan *Hyperlocal Ecosystem*, *BRImo SuperApps*, *B2B Ecosystem Platform*, dan *Build Market Leading Tailored Propositions for Ecosystem*.

Dengan strategi jangka panjang yang telah disiapkan secara menyeluruh, Perseroan meyakini mampu menghadapi berbagai tantangan dan peluang kedepan untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan *men-deliver economic* maupun *social value* bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tata Kelola Perusahaan

Pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan aspek penting dalam mendukung kesehatan dan keberlangsungan usaha Perseroan serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Implementasi GCG di BRI diterapkan berdasarkan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Direksi bersama Dewan Komisaris dan seluruh insan BRI berkomitmen mewujudkan visi Perseroan menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion*.

Sepanjang 2021, BRI telah melaksanakan penerapan GCG sesuai dengan ketentuan regulator, standar terbaik atau *best practice* terkini dari institusi nasional maupun internasional. BRI senantiasa meningkatkan kualitas mutu GCG, pada tahun 2021, *adapun* aktivitas peningkatan pelaksanaan GCG antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan kebijakan *Whistleblowing System*,
2. Penambahan saluran penyampaian *Whistleblowing System*,
3. Surveillance ISO 37001:2016 tentang Sistem Management Anti Penyuapan,
4. *Enhancement* GCG Online System 2.0,
5. Aplikasi Sistem Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan *Company tree*,
6. Penyempurnaan dan penerapan hierarki tata kelola peraturan di BRI,
7. Reorganisasi unit kerja pelaksana tugas *supporting organ* GCG diantaranya namun tidak terbatas pada unit kerja Manajemen Risiko, *Corporate Secretary*, unit kerja Audit Internal.

Salah satu wujud pelaksanaan prinsip GCG, Perseroan pada tahun 2021 telah melaksanakan 4 (empat) kali RUPS diantaranya 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa. BRI senantiasa memenuhi prinsip *fairness* kepada para pemegang saham dalam hal hak-hak dan kewenangannya dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Selain itu wujud keterbukaan dan kesetaraan informasi kepada shareholder dan *stakeholders* diwujudkan dalam berbagai laporan dan informasi Perseroan yang diterbitkan melalui *website* Perseroan, Bursa Efek Indonesia serta sarana komunikasi ke media massa.

Hasil *Self Assessment* GCG BRI selama tahun 2021 mencapai nilai komposit 2 (BAIK). Hasil ini mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek *Governance*



Structure, Governance Process, dan Governance Outcome yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI.

Selama tahun 2021, BRI juga mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi di bidang tata kelola perusahaan, diantaranya Top PLCs Indonesia dalam pemeringkatan ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dengan skor 110.22 (perolehan pada tahun 2019), Hasil penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) berdasarkan penilaian tahun 2021 mendapat skor 95.10 poin dengan peringkat Sangat Terpercaya (*Most Trusted*), Terbaik 1 Tata Kelola Perusahaan (GCG) Kategori BUMN & Anak Perusahaan BUMN pada acara 10th Anugerah BUMN 2021 dan berbagai penghargaan lainnya. Hal tersebut menunjukkan salah satu bukti dari keseriusan Manajemen BRI dalam melakukan peningkatan implementasi GCG secara berkesinambungan dalam rangka mendukung visi dan misi Perseroan serta memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan *shareholders*.

Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha Bank

Manajemen Perseroan senantiasa menjaga independensi dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kepemilikan saham BBRI oleh Direksi dan Dewan Komisaris (Non-Independen) pada dasarnya merupakan tantiem/ insentif kinerja berbentuk *Long Term Incentive (LTI)* sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN RI guna menciptakan tujuan kerja yang berkelanjutan. Kepemilikan saham Direksi, Dewan Komisaris sebagaimana dilaporkan pada Bab Profil Perusahaan.

Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Direksi

Selama tahun 2021, Direksi menilai bahwa seluruh Komite dibawah Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan optimal. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi masing-masing komite kepada Perseroan termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi. Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank, Direksi BRI dibantu oleh sepuluh komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Kesepuluh komite tersebut adalah *Asset and Liability Committee* (ALCO), *Risk Management Committee* (RMC), Komite Kredit, Komite *Capital & Investment*, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Pengarah Teknologi Informasi & Tata Kelola Data, Komite Pengadaan Barang & Jasa, Komite *Human Capital*, Komite Produk dan Komite Environment, Social & Governance (ESG). Pelaksanaan tugas komite tersebut senantiasa di-review oleh sekretaris komite dan dinilai oleh Direksi yang membidangi yang didasarkan atas pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan dalam Komite.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2021, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi sebagaimana penjelasan berikut:

Komposisi Direksi Sebelum RUPS Luar Biasa Tanggal 21 Januari 2021

Komposisi Direksi sebelum RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI. Komposisi Direksi sebelum RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Sunarso	: Direktur Utama
Catur Budi Harto	: Wakil Direktur Utama
Haru Koesmahargyo	: Direktur Keuangan
Agus Noorsanto	: Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
Supari	: Direktur Bisnis Mikro
Indra Utoyo	: Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi
Priyastomo	: Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah
Ahmad Solichin Lutfiyanto	: Direktur Jaringan dan Layanan
R. Wisto Prihadi	: Direktur Kepatuhan
Agus Sudiarto	: Direktur Manajemen Risiko
Handayani	: Direktur Konsumer
Herdy Rosadi Harman	: Direktur Human Capital

Komposisi Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tanggal 21 Januari 2021

Pada tanggal 21 Januari 2021, RUPS Luar Biasa memutuskan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

- Menguatkan pemberhentian dengan hormat R. Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang sebelumnya telah diputuskan pemberhentiannya oleh Dewan Komisaris.
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - Priyastomo : sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah;
 - Herdy Rosadi Harman : sebagai Direktur Human Capital;
 - Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan.
- Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Semula Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah menjadi Direktur Bisnis Kecil dan Menengah.
 - Semula Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi.

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - Indra Utoyo, semula Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi
 - Ahmad Solichin Lutfiyanto, semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Kepatuhan
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - Amam Sukriyanto : sebagai Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
 - Agus Winardono : sebagai Direktur *Human Capital*;
 - Viviana Dyah Ayu Retno : sebagai Direktur Keuangan;
 - Arga Mahanana Nugraha : sebagai Direktur Jaringan dan Layanan.

Komposisi Direksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI. Komposisi Direksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

Sunarso	: Direktur Utama
Catur Budi Harto	: Wakil Direktur Utama
Viviana Dyah Ayu Retno	: Direktur Keuangan
Agus Noorsanto	: Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN
Supari	: Direktur Bisnis Mikro
Indra Utoyo	: Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Amam Sukriyanto	: Direktur Bisnis Kecil dan Menengah
Arga Mahanana Nugraha	: Direktur Jaringan dan Layanan
Ahmad Solichin Lutfiyanto	: Direktur Kepatuhan
Agus Sudiarto	: Direktur Manajemen Risiko
Handayani	: Direktur Konsumer
Agus Winardono	: Direktur Human Capital

Komposisi Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Oktober 2021

Melalui RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021, RUPS memutuskan mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Semula Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN menjadi Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan.
- Semula Direktur Konsumer menjadi Direktur Bisnis Konsumer.

Komposisi Direksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI. Komposisi Direksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Sunarso	: Direktur Utama
Catur Budi Harto	: Wakil Direktur Utama
Viviana Dyah Ayu Retno	: Direktur Keuangan
Agus Noorsanto	: Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan
Supari	: Direktur Bisnis Mikro
Indra Utoyo	: Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Amam Sukriyanto	: Direktur Bisnis Kecil dan Menengah
Arga Mahanana Nugraha	: Direktur Jaringan dan Layanan
Ahmad Solichin Lutfiyanto	: Direktur Kepatuhan
Agus Sudiarto	: Direktur Manajemen Risiko
Handayani	: Direktur Bisnis Konsumer
Agus Winardono	: Direktur Human Capital

Penutup

Pada kesempatan ini, kami jajaran Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi yang positif atas pencapaian kinerja Perseroan yang baik di tahun 2021. Direksi juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh nasabah atas kepercayaan yang diberikan kepada BRI sebagai bank kepercayaan nasabah. Kepada pemegang saham, Direksi mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Direksi untuk menjalankan fungsi kepengurusan yang telah diberikan.

Kepada Dewan Komisaris, segenap jajaran Direksi mengucapkan terimakasih atas pengawasan dan nasihat serta arahan yang diberikan, sehingga kepengurusan Perseroan dapat dilaksanakan

dengan baik dan menghasilkan kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Kepada seluruh mitra kerja dan para pemangku kepentingan lainnya, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjalin dengan sangat baik.

Akhir kata, kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja BRI, Direksi memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas dedikasi dan kontribusi terbaik yang telah diberikan kepada Perseroan. Segenap jajaran Direksi akan tetap berkomitmen untuk menghasilkan kinerja yang terbaik kedepannya.

Terima Kasih, Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 7 Februari 2022

Atas Nama Direksi

Sunarso

Direktur Utama

Direksi

Dari kiri ke kanan:

Agus Winardono (Direktur Human Capital), **Agus Noorsanto** (Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan), **Arga Mahanana Nugraha** (Direktur Jaringan & Layanan), **Handayani** (Direktur Bisnis Konsumer), **Ahmad Solichin Lutfiyanto** (Direktur Kepatuhan), **Sunarso** (Direktur Utama), **Catur Budi Harto** (Wakil Direktur Utama), **Supari** (Direktur Bisnis Mikro), **Viviana Dyah Ayu Retno** (Direktur Keuangan), **Agus Sudiarto** (Direktur Manajemen Risiko), **Amam Sukriyanto** (Direktur Bisnis Kecil & Menengah), **Indra Utoyo** (Direktur Digital & Teknologi Informasi).







Kartika Wirjoatmodjo

Komisaris Utama

“BRI telah mencatatkan kinerja yang baik pada tahun 2021. Pendapatan bunga dan syariah meningkat sebesar 5,71%, dan laba bersih Perseroan meningkat 64,8%. Sejalan dengan peningkatan tersebut, total aset secara konsolidasi pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,23%”

» LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut "Perseroan atau BRI" tetap mampu memberikan yang terbaik bagi Indonesia di tengah kondisi yang cukup menantang di tahun 2021. Dengan menerapkan strategi yang tepat dan atas kerjasama yang solid antara Dewan Komisaris, Direksi dan para pemangku kepentingan lainnya, Perseroan tetap dapat tumbuh berkelanjutan dan sehat yang tampak dari peningkatan penyaluran kredit secara konsolidasi menjadi sebesar Rp1.042,9 triliun atau tumbuh sebesar 2,2% (yoy) dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) terjaga pada 3,00% serta membukukan laba bersih mencapai Rp30,8 triliun atau meningkat 64,8%.

Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi sepanjang tahun 2021 yang terdiri dari penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola Bank, serta susunan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Direksi

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasehat Kepada Direksi

Sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan bahwa tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Dalam mengoptimalkan tugas dan tanggung

jawab fungsi pengawasan, salah satu metode yang dilakukan Dewan Komisaris antara lain dengan menyelenggarakan rapat bersama dengan Direksi (Radirkom) sesuai dengan fokus pengawasan Dewan Komisaris maupun Rapat Internal Dekom (Rakom) baik secara reguler maupun insidental. Selanjutnya, atas nasehat yang telah disampaikan pada rapat tersebut dituangkan dalam surat Dewan Komisaris kepada Direksi sesuai dengan topik terkait. Pemberian nasehat kepada Direksi Perseroan dapat pula melalui rapat komite-komite di bawah Dewan Komisaris, melakukan kunjungan kerja dalam rangka memperoleh informasi di lapangan untuk pengawasan implementasi strategi Perseroan di lapangan. Dewan Komisaris juga menyampaikan pendapat, nasehat dan tanggapan atas usulan Direksi yang dituangkan dalam surat kepada Direksi, surat persetujuan maupun surat keputusan sesuai dengan kewenangannya.

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan Radirkom sebanyak 24 kali dan Rakom sebanyak 12 kali, antara lain membahas beberapa surat persetujuan serta mengukuhkan beberapa keputusan pada surat keputusan Dewan Komisaris. Persetujuan yang dilakukan antara lain terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan serta Rencana-rencana strategis lainnya yang tertuang pada Rencana Bisnis Bank serta Rencana Jangka Panjang Perseroan, persetujuan atas aksi korporasi yang dilakukan Perseroan sesuai dengan kewenangan Dewan Komisaris, persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait, persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, persetujuan atas penelaahan *Risk Appetite Statement*, *Recovery Plan*, serta persetujuan lain yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan Terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan yang berbasis risiko atas penerapan strategi dan kebijakan Bank sepanjang tahun 2021, termasuk dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi dan pandemi COVID-19. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan strategi Perseroan, khususnya pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2021-2023, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2021 dan Rencana Jangka Panjang BRI 2021-2025 tersebut diharapkan dapat membawa Perseroan mempertahankan kinerja yang baik ini dan berkelanjutan.

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris memfokuskan pengawasan terhadap beberapa aspek penting antara lain:

1. Aspek strategis antara lain pengawasan terhadap strategi setiap segmen bisnis di Perseroan termasuk teknologi informasi dan jaringan, pengawasan terhadap implementasi Penerapan Desain Fungsi *Secondline* dan *Thirdline*, dan pengawasan terhadap *Strategy Workforce Planning*.
2. Aspek perkreditan, antara lain tindak lanjut pengelolaan LaR (*Loan at Risk*), penelaahan atas kondisi debitur-debitur *high risk*, pengawasan terhadap portofolio debitur restrukturisasi COVID-19, penelaahan kualitas dan portofolio aktiva produktif, pengawasan terhadap penerapan PSAK 71 khususnya *collective impairment* dan pengawasan terhadap implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
3. Aspek pendanaan antara lain pengawasan terhadap kondisi dan strategi BRI dalam menghadapi posisi likuiditas dan posisi surat berharga, pengawasan atas kondisi dan strategi dalam penghimpunan Dana dan *Fee Based Income*.
4. Aspek kebijakan antara lain pengawasan terhadap Kebijakan Umum Perkreditan dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko, penelaahan *Risk Appetite Statement* (RAS), dan *Recovery Plan*.
5. Aspek konglomerasi keuangan antara lain pengawasan terhadap pelaksanaan aksi korporasi yang dilakukan perseroan yaitu Holding Ultra Mikro, pengawasan terhadap transformasi yang dilakukan perusahaan anak sejalan dengan arah perseroan untuk melakukan penguatan tata kelola konglomerasi keuangan sehingga berdampak positif pada peningkatan kontribusi laba perusahaan anak ke Perseroan.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, bahwa Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK pada tiap semester, sebagai berikut:

1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk, Semester II Tahun 2020 dengan Nomor: R.08-KOM/02/2021 Tanggal 16 Februari 2021.

2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT BRI (Persero) Tbk, Semester I th 2021 dengan Nomor: R.61-KOM/08/2021 Tanggal 25 Agustus 2021.

Selain penyampaian laporan tersebut di atas, mengacu pada Surat Kementerian BUMN No.5-76/D3.MBU/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentang Permintaan Tanggapan atas Laporan Triwulanan, Dewan Komisaris wajib menyampaikan tanggapan atas pencapaian Kinerja Perseroan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tiap triwulan. Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah memberikan laporan terkait tanggapan dan capaian kinerja Perseroan kepada Kementerian BUMN termasuk terkait implementasi strategi Perseroan, sebagai berikut:

1. Surat Nomor R.07-KOM/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal Evaluasi Kinerja PT BRI (Persero) Tbk Triwulan IV Tahun 2020.
2. Surat Nomor R.60-KOM/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 perihal Evaluasi Kinerja PT BRI (Persero) Tbk Triwulan II Tahun 2021.
3. Surat Nomor R.84-KOM/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Evaluasi Kinerja PT BRI (Persero) Tbk Triwulan III Tahun 2021.

Pandangan Atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Direksi sangat baik yang terlihat dari kemampuan untuk dapat merealisasikan berbagai strategi inisiatif dalam rangka mencapai BR!volution 2.0 sehingga dari kinerja Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan laba yang cukup signifikan. Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh pencapaian kinerja Perseroan baik dari segi finansial maupun non finansial dapat tercapai melalui dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan kepada Perseroan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan seluruh Insan Brilian yang dapat terus menumbuhkembangkan Perseroan dengan luar biasa di masa pandemi COVID-19.

Tahun 2021 perekonomian nasional masih dipengaruhi oleh dampak lanjutan dari pandemi COVID-19. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tertinggi terjadi pada kuartal kedua sebesar 7,07% dan kemudian terjadi penurunan pada kuartal ketiga menjadi 3,51% sebagai dampak munculnya Varian Delta yang berpengaruh luas terhadap pembatasan aktivitas masyarakat. Namun di sisi lain, secara umum kondisi perekonomian mulai membaik. Pemerintah memperkirakan sampai dengan akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 3,2% sampai dengan 4,0% yang utamanya didorong oleh konsumsi rumah tangga, arus investasi dan kegiatan ekspor impor yang mengalami peningkatan. Capaian pertumbuhan tersebut dianggap sebagai upaya terbaik setelah perekonomian nasional mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal pertama dan pelambatan pada kuartal ketiga akibat meningkatnya angka infeksi COVID-19.



Dampak pandemi COVID-19 yang masih berlanjut pada tahun 2021, berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit perbankan nasional yang secara keseluruhan hanya sebesar 5,2%. Namun demikian, Perseroan secara *bank only* mampu mencatat peningkatan kredit sebesar 7,2% di atas rata-rata pertumbuhan kredit industri perbankan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan *selective growth* dalam rangka menjaga pertumbuhan kredit yang sehat. Pencapaian pertumbuhan kredit tahun 2021 dikontribusi oleh fokus penetrasi kredit pada portofolio segmen UMKM dengan komposisi kredit UMKM sebesar 81,7 % (bank saja) dan 83,9% (konsolidasian) dari total *outstanding* yang meningkat dari periode sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan komitmen Perseroan untuk tetap membantu segmen UMKM yang menjadi *backbone* perekonomian di Indonesia dan menjadikan perseroan *Agent of Development*. Kedepannya masih terdapat banyak potensi penyaluran kredit pada *new source of growth* perseroan yaitu segmen Ultra Mikro.

Jika dilihat dari sisi kualitas kredit, terjadi penurunan yang tercermin dari meningkatnya rasio NPL *gross (bank only)* menjadi 3,08% pada tahun 2021 dari sebelumnya sebesar 2,94% pada tahun 2020. Peningkatan Rasio NPL tersebut secara umum merupakan strategi *risk management* Perseroan dalam rangka memetakan kondisi nyata debitur yang masih memiliki kemampuan membayar dan memiliki prospek usaha di tengah kebijakan relaksasi kredit yang masih berlangsung. Salah satu langkah mitigasi yang dilakukan untuk menjaga *sustainability* Perseroan yaitu dengan menjaga NPL *coverage* dengan rasio yang tergolong sangat memadai yaitu sebesar 278,14% pada akhir 2021. Hal ini di tempuh dalam rangka mengantisipasi penurunan kualitas kredit serta upaya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik. Rasio kualitas aset lainnya juga tercermin pada Rasio LaR yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya menjadi sebesar 24,11% (yoy). Perseroan telah melakukan restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 pada posisi tertinggi di bulan September 2020 sejumlah Rp193,7 triliun yang terus memperlihatkan kecenderungan penurunan dengan *outstanding* restrukturisasi pada akhir tahun 2021 sebesar Rp157 triliun. Penurunan angka restrukturisasi tersebut juga tercermin pada penurunan *loan at risk* (LAR) yang terus melandai. Pelaksanaan program restrukturisasi tersebut merupakan komitmen Perseroan dalam merespon kebijakan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit sesuai POJK Nomor 48 Tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selektif dan melalui pengawasan ketat serta dengan tetap memperhatikan kondisi debitur.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), Perseroan (*bank only*) berhasil mencapai Rp1.127,8 triliun. Posisi Simpanan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,1% dengan pangsa pasar 15,1%. Komposisi *Current Account-Saving Account* (CASA) pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 63,3% dibandingkan dengan periode sebelumnya (yoy) yaitu sebesar 61,0%. Peningkatan komposisi CASA tersebut tentu saja berimbas positif pada *cost of fund* (CoF) (*bank only*) yang mengalami penurunan yang cukup tajam dari semula tahun 2020 sebesar 3,22% menjadi sebesar

2,05% di tahun 2021. Hal tersebut menjadi salah satu faktor bahwa Perseroan mampu meningkatkan profitabilitas dengan tingkat *Net Interest Margin* (NIM) (*bank only*) tetap optimal di angka 6,89% meningkat dari posisi tahun 2020 sebesar 6,00%. Peningkatan CASA dan efektifitas *Cost of Fund* (CoF) juga merupakan salah satu fokus pengawasan Dewan Komisaris.

Dari sisi tingkat efisiensi, Perseroan berhasil menjaga rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) sebesar 74,3% atau turun dari posisi tahun 2020 sebesar 81,2%. Penurunan tersebut dikontribusi oleh upaya Perseroan dalam melakukan upaya efisiensi dari berbagai sisi dan renegotiasi suku bunga simpanan tercermin pada penurunan *Interest Expense* sebesar 31,0% (yoy) dari tahun 2020.

Perseroan terus berkomitmen terhadap pertumbuhan segmen kredit UMKM yang pada kenyataannya berkontribusi terhadap ketahanan perekonomian secara nasional. Sebagai bagian dari hal tersebut, Perseroan telah diberikan amanah oleh Pemerintah melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai landasan terbentuknya Holding Ultra Mikro. Dengan bergabungnya PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani dalam keluarga besar BRI Group diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang kuat dan komprehensif dalam mengembangkan segmen Ultra Mikro di seluruh Indonesia dan sebagai ekosistem yang saling mendukung antar entitas anggota holding untuk tumbuh bersama.

Kondisi permodalan Perseroan juga semakin kuat yang tercermin pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) mencapai 25,28% secara *bank only* dan sebesar 27,16% secara konsolidasian, jauh di atas minimal ketentuan regulator dan *risk appetite* perusahaan, dan dapat melampaui target posisi CAR yang telah ditetapkan. Peningkatan CAR tersebut dikontribusi pula oleh keberhasilan Perseroan dalam melaksanakan *rights issue*, sebagai bagian dari proses pembentukan Holding Ultra Mikro, yang sekaligus mencatatkan sejarah sebagai transaksi *rights issue* terbesar di Indonesia. Di sisi lain, posisi rasio *Return On Asset* (ROA) *before tax* sebesar 2,72% secara *bank only* dan sebesar 2,64% secara konsolidasian menunjukkan bahwa tingkat produktivitas bisnis Perseroan lebih baik dibandingkan industri perbankan.

Dewan Komisaris juga memberikan apresiasi terkait upaya Direksi dalam menciptakan dan mengembangkan layanan *e-channel* pada berbagai platform *superapps*, antara lain BRImo, Brispot dan Brilink. Peningkatan layanan digital sangat diperlukan sebagai strategi dalam mengakomodasi perubahan trend perilaku transaksi masyarakat ke arah digital. Selain itu, dengan adanya diversifikasi layanan dapat mendukung peningkatan perolehan *fee based Income* yang lebih optimal.

BRI sebagai mitra utama pemerintah dalam implementasi Program PEN dan menjalankan tugas sebagai *Agent of Development* telah

mendukung pemerintah dengan mengimplementasikan kebijakan PEN. Sebagai bisnis inti perseroan, UMKM merupakan salah satu segmen yang mendapat dukungan penuh dalam kebijakan PEN. Pada tahun 2021, Perseroan tercatat memiliki kelolaan lebih dari 9,8 juta debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, dengan total penyaluran kredit untuk segmen mikro (Kupedes, Kupedes Rakyat dan KUR Mikro) sebesar Rp397 triliun. Dengan bergabungnya PT PNM dan PT Pegadaian yang merupakan sumber pertumbuhan baru, perseroan juga fokus pada ekspansi KUR dengan skema KUR Super Mikro dengan penyaluran kepada 1,12 juta nasabah pada tahun 2021.

Sebagai salah satu inisiatif *branchless banking* dan inklusi keuangan, Agen BRILink menjadi salah satu kekuatan perseroan yang bisa menjangkau dan tersebar diseluruh nusantara. Agen BRILink dapat melakukan transaksi kapan saja dimana saja seperti pembelian pulsa, pembayaran tagihan, pembelian token listrik, pembayaran angsuran pinjaman, transfer dana, pengambilan tunai, bahkan saat ini terdapat Agen BRILink yang juga dapat melakukan referral pinjaman. Perseroan senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan untuk terus menjaga kesinambungan usaha. Selama tahun 2021, Agen BRILink dengan total sebanyak 503.151 agen memberikan kontribusi kuat kepada *fee based income* Perseroan sebesar Rp1,34 triliun atau naik sebesar 15,8% (yoy).

Dengan menerapkan *Hybrid Bank Business Model* memadukan *Digital Capabilities* dan *Physical Presences*, BRI terus hadir untuk nasabah untuk melayani berbagai transaksi baik langsung secara fisik maupun digital. BRI telah membangun *digital ecosystem platform* yang menawarkan produk dan layanan untuk memperoleh peluang baru, *me-leverage new liquidity* dan *new source of growth* antara lain BRIMola LPG Gas 3 kg *Ordering System*, pasar.id yang merupakan ekosistem pasar tradisional, BRISmart Billing, Stroberi C2C *Micro Payment Transaction*. Selain itu juga terdapat *Digital Partnership & Collaboration* yaitu BRIApi yang merupakan *open application programming interface*, adanya *fintech partnership* serta secara konglomerasi BRI juga memiliki modal ventura.

Adanya pandemi COVID-19, tidak membuat Perseroan patah semangat untuk memberdayakan UMKM *go international*. Dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai yang diatur oleh Pemerintah, Perseroan menyelenggarakan "UMKM EXPO(RT) *Brilianpreneur 2021*" untuk dapat melakukan pembinaan, dukungan dan membuka akses pengusaha UMKM kepada akses internasional yang diikuti lebih dari 500 UMKM selama 9-16 Desember 2021 dengan *business matching* sebesar US\$72,1 juta dan *sales volume* sebesar Rp10,3 miliar.

Perseroan sebagai *first mover* dalam implementasi *Environment, Social and Governance* (ESG) senantiasa berkomitmen dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan kategori *sustainable*. Konsentrasi yang cukup besar dalam portofolio UMKM ditambah dengan adanya ekosistem Ultra Mikro juga menjadikan BRI sebagai bank dengan portofolio terbesar di

Indonesia untuk *sustainable businesses*. Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan berkomitmen untuk memberikan nilai yang optimal kepada para pemangku kepentingan terutama yang fokus dalam *Sustainable Finance*. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan penghargaan terhadap prestasi dan capaian Perseroan oleh berbagai lembaga yang kredibel antara lain penghargaan *Platinum Rank Asia Sustainability Reporting Rating, Top CSR Awards #Star Five oleh Top Business Award 2021, Top Leader On CSR Commitment oleh Top Business Award 2021, Top Three Public Listed Company oleh Asean Corporate Governance*, dan berbagai penghargaan lainnya.

Sebagai entitas utama dalam konglomerasi keuangan BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi melakukan pengawasan kepada perseroan sampai dengan perusahaan anak. Sepanjang 2021, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan aksi korporasi perseroan meliputi tambahan penyertaan modal pada perusahaan anak dan rencana strategis lainnya. Sejalan dengan aspirasi perseroan yaitu "*The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion*" maka perlu ditingkatkan kontribusi dari perusahaan anak terhadap kinerja keuangan perseroan.

Salah satu roadmap Perseroan untuk menjadi *Champion of Financial Inclusion* adalah dengan menerapkan *Performance Driven Culture* dalam rangka meningkatkan produktifitas pekerja dan mengoptimalkan performa bisnis Perseroan. BRI telah menerapkan *BRI One Culture* yang tetap berlandaskan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai *core values* dan acuan budaya kerja yang telah di amanahkan oleh Kementerian BUMN. Insan Brilian diharapkan dapat terus *agile* terhadap transformasi yang sedang berlangsung, menerapkan budaya yang aktif, terbuka dan egaliter sehingga dapat terus memberikan inovasi kepada perseroan. Dewan Komisaris yakin bahwa Perseroan dapat memenangkan persaingan, mencapai segala target yang telah ditetapkan, tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap Indonesia sesuai dengan *Employee Value Proposition* yaitu "Memberi Makna Indonesia".

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Secara garis besar Dewan Komisaris melihat bahwa prospek usaha yang disusun oleh Direksi yang disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank 2022-2024 dan Rencana Jangka Panjang BRI (*Corporate Planning*) 2021-2025 sudah baik, tepat dan selaras dengan *journey* yang disusun oleh perseroan yaitu Brivolution 2.0. Prospek usaha tersebut, telah disusun dengan memperhatikan asumsi-asumsi dalam makro ekonomi global dan nasional. Terlebih dengan melihat pencapaian kondisi keuangan dan bisnis Perseroan pada tahun 2021 yang kuat, memberikan optimisme bahwa kinerja tahun 2021 sebagai landasan pertumbuhan bisnis Perseroan yang lebih tinggi ke depan seiring dengan mulai pulihnya iklim perekonomian. Walaupun terdapat risiko yang membayangi yaitu ketimpangan penanganan dan kecepatan vaksinasi antar



negara, mutasi COVID-19, dan isu gangguan *supply chain* yang harus diantisipasi.

Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi mampu menjalankan seluruh strategi dengan baik dan memanfaatkan peluang yang ada pada industri perbankan. Tahun 2022 tetap menjadi tahun *strengthen the core for growth* yang dimulai sejak tahun 2021 dimana pertumbuhan bisnis perseroan tetap difokuskan pada bisnis inti Perseroan. Ketahanan fundamental menjadi salah satu fokus dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan Perseroan yang mencerminkan status BRI sebagai *top tier company in Indonesia*. Aspek fokus Perseroan sesuai dengan yang disampaikan oleh Direksi antara lain dengan ekspansi bisnis secara selektif dan bisnis mengikuti stimulus kebijakan Pemerintah dengan tetap menjaga kualitas aset produktif dan memastikan proses restrukturisasi berjalan baik, meningkatkan perolehan dana murah dengan mengendalikan biaya dana serta mengoptimalkan sinergi bisnis antara Perseroan dan anak perusahaan guna mendukung layanan *Integrated Financial Solution* bagi nasabah serta mendukung peningkatan kontribusi anak. Perseroan secara konsolidasi telah menetapkan *guideline* pertumbuhan bisnis pada tahun 2022 yaitu proyeksi pertumbuhan kredit pada kisaran 9%-11% dan dari sisi NIM diproyeksikan pada kisaran 7,6% - 7,8%.

Pertumbuhan bisnis Perseroan juga didukung oleh transformasi dengan menempatkan nasabah sebagai unsur penting dengan menerapkan konsep *hybrid bank* dalam perbaikan bisnis proses, inovasi model bisnis, dan penatakelolaan jaringan kerja yang memadukan *digital capabilities, physical networks*, serta layanan *financial advisor*. Dengan harmonisasi ketiga aspek tersebut diyakini mampu menghadirkan layanan perbankan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sesuai dengan *journey* literasi digital masyarakat Indonesia.

Posisi bisnis mikro Perseroan semakin kuat melalui pembentukan *Holding Ultra Mikro* dengan bergabungnya PT Pegadaian dan PT PNM menjadi bagian dari BRI Group. Dengan terbentuknya holding ini menjadikan Perseroan memiliki permodalan kuat dan membuka potensi bisnis yang besar bagi perkembangan bisnis seluruh entitas holding serta semakin menegaskan dalam mewujudkan visi perusahaan sebagai *The Most Valuable Banking Group di Asia Tenggara dan Champion of Financial Inclusion*.

Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Bank

BRI senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan/*good corporate governance* (GCG) dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan *best practice* implementasi tata kelola perusahaan yang baik oleh institusi nasional maupun internasional. BRI juga terus berkomitmen menerapkan GCG yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Pada proses jalannya penerapan GCG di Perseroan, Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Perseroan

yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat yang dibutuhkan atas setiap tindakan strategis dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.

Pada Tahun 2021, Perseroan telah melakukan beberapa perbaikan dalam lingkup GCG, diantaranya memberikan tanggapan dan masukan dalam penyusunan Revisi Surat Edaran *Whistle Blowing System (WBS)* dan mekanisme penetapan laporan WBS BRI tindak pidana korupsi, memberikan, tanggapan dan persetujuan pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, melakukan penunjukan Dewan Pengarah pada ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan BRI. Dalam rangka meningkatkan kesadaran pekerja terkait implementasi GCG, pengendalian gratifikasi dan penyuapan, kode etik serta ketentuan-ketentuan perbankan lainnya.

Dalam melaksanakan evaluasi dan penilaian GCG, BRI menggunakan pendekatan dari pihak internal yang *mandatory* sesuai POJK Nomor 55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Pihak Eksternal. Evaluasi dan penilaian dari pihak internal dilakukan secara *self assessment* setiap semester. Hasil *self assessment* menjadi bagian penilaian tingkat kesehatan bank yang disampaikan kepada regulator.

Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari empat faktor penilaian yaitu Profil Risiko, GCG, Rentabilitas, dan Permodalan. Peringkat Tingkat Kesehatan Bank BRI pada semester II/2020 berada pada peringkat komposit 2 (sehat) yang artinya kondisi Bank yang secara umum Sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat Komposit tersebut tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Semester I/2021. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilaporkan kepada regulator (OJK) setiap semesteran pada periode Juni dan Desember.

Penerapan tata kelola yang telah dilaksanakan oleh Perseroan berlandaskan pada lima prinsip dasar GCG, dalam penerapannya Perseroan melaksanakan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap 11 faktor GCG sebagaimana ketentuan yang diatur oleh regulator.

Pada tahun 2021, penilaian GCG Perseroan juga dilakukan oleh pihak eksternal sebagai berikut:

- *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)
CGPI diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil penilaian CGPI tahun 2021, BRI mendapat skor 95,10 poin dengan peringkat Sangat Terpercaya (*Most Trusted*). Hasil Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) BRI selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dan pada tahun 2021 BRI menduduki perusahaan dengan skor tertinggi pada CGPI Award 2021.

- GRC & Performance Excellence Award 2021
Perseroan berhasil mendapatkan lima penghargaan dalam GRC & Performance Excellence Award 2021 yang merupakan apresiasi atas implementasi *Governance, Risk, and Compliance* (GRC) yang telah dilaksanakan perseroan. Penghargaan tersebut yaitu *The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2021 (Retail and Micro Banking)*, *The Best Board of Commissioners in Banking Industries*, *The Best Chief Compliance Officer*, *The Best Chief Risk Management Officer*. Perseroan akan terus menjaga dan meningkatkan tata Kelola perusahaan yang baik dan senantiasa menghadirkan pelayanan *excellent* bagi nasabah.

Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip GCG perseroan sudah baik yang tercermin pada hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG yakni Peringkat 2 (Baik). Hal ini mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* yang secara umum dikategorikan Baik.

Pembahasan mengenai kualitas manajemen risiko dan implementasi GCG dilakukan secara berkala dan tidak hanya terbatas di lingkup induk Perseroan tetapi juga dilakukan bersama dengan Perusahaan Anak dalam konteks konglomerasi keuangan BRI.

Penerapan GCG di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen sebagai berikut.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Direksi secara rutin selalu melaporkan laporan fungsi kepatuhan disajikan dengan tujuan untuk menggambarkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Jajaran Satuan Kerja Fungsi Kepatuhan dalam rangka untuk memastikan bahwa kebijakan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan regulator dan senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pengawasan agar Perseroan terus berkomitmen dalam menerapkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan antara lain memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang dan mengawasi pencegahan penyimpangan terhadap ketentuan *prudential banking* seperti terjaganya minimum Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Batas Maksimum Penyediaan Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), transaksi derivatif, Giro Wajib Minimum (GWM) dan sebagainya. Pengawasan juga dilakukan terhadap pengelolaan profil risiko kepatuhan agar senantiasa rendah dan terjaga dan mewujudkan terlaksananya penguatan budaya kepatuhan dan GCG pada setiap level organisasi serta

penerapan pelaksanaan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Dewan Komisaris menilai bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT berdasarkan laporan dari Direksi telah berjalan dengan baik. Sesuai dengan arahan dari Dewan Komisaris, Direksi telah mengembangkan Aplikasi Identifikasi dan Penilaian Kepatuhan APU dan PPT melalui pendekatan risiko (*Risk Based Approach*) dan aplikasi tersebut telah di-*deploy* pada *core system* BRI.

Dewan Komisaris bersama Direksi terus mendorong pelaksanaan fungsi kepatuhan berjalan dengan semakin baik di semua jenjang organisasi dan fungsi. Dewan Komisaris senantiasa memberikan nasehat kepada Direksi dan seluruh Insan Brilian untuk terus-menerus memperkuat *Compliance Culture*, selalu memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis operasional yang dikeluarkan oleh internal agar penerapan sanksi denda oleh regulator dapat ditekan dan diminimalkan, dan mengoptimalkan penyelesaian komitmen temuan hasil pemeriksaan oleh pihak eksternal dan regulator. Dewan Komisaris juga meminta agar Direksi senantiasa memonitor dan mendorong pelaksanaan pengkinian data nasabah dan tetap memperhatikan Kebijakan APU dan PPT dalam memberikan layanan *digital*.

Evaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dibantu oleh organ pendukung Dewan Komisaris yaitu oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko. Laporan Fungsi Kepatuhan disampaikan kepada Dewan Komisaris setiap semesteran. Dewan Komisaris telah menyampaikan evaluasi terhadap Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Surat Dewan Komisaris yaitu:

1. Fungsi Kepatuhan semester II tahun 2020 Melalui surat Nomor: B.28-KOM/03/2021 tanggal 9 Maret 2021.
2. Fungsi Kepatuhan semester I tahun 2021 Melalui surat Nomor: B.118-KOM/09/2021 tanggal 28 September 2021.

Profil risiko kepatuhan Perseroan berada pada peringkat komposit 2 (*Low to Moderate*). Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan Fungsi Kepatuhan Perseroan sudah berjalan dengan baik dan harus terus ditingkatnya kesadaran dan budaya kepatuhan di seluruh jajaran dan berpesan untuk terus melakukan penyempurnaan pada Tata Kelola Perusahaan (GCG) terutama dengan kepatuhan pelaporan dan pengendalian *fraud*.

Strategi Anti Fraud

Dalam rangka meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan, Perseroan telah memiliki kebijakan Strategi *Anti Fraud* yang telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor: 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum yang kemudian dituangkan dalam kebijakan internal perseroan. Kebijakan tersebut merupakan wujud komitmen dari manajemen dalam mengendalikan *fraud* yang diterapkan dalam sistem pengendalian *fraud* dan merupakan wujud perhatian serius dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tidak memberikan toleransi (*zero tolerant*) pada setiap bentuk *fraud* baik internal maupun eksternal.

Pada kebijakan tersebut diatur mengenai organisasi dan penerapan Strategi *Anti Fraud* di Bank BRI yang didasarkan pada empat pilar sebagaimana ketentuan yang di atur oleh regulator yaitu:

1. Pilar 1: Pencegahan : *Anti Fraud Awareness*, Identifikasi Kerawanan, *Know Your Employee (KYE)*.
2. Pilar 2: Deteksi : *Whistleblowing*, *Continuous Monitoring*, *Continuous Auditing*, *Surprise Audit*, *Surveillance System*.
3. Pilar 3: Investigasi, Pelaporan dan Sanksi.
4. Pilar 4: Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

Selama tahun 2021, berbagai jenis *fraud* masih terjadi yang dilakukan oleh oknum internal maupun pihak eksternal. Dewan Komisaris memperhatikan dengan serius frekuensi kejadian dan kerugian potensial yang ditimbulkan dikarenakan berkaitan dengan risiko operasional dan reputasi Perseroan. Sebagai wujud perhatian serius Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *fraud*, Manajemen terus melakukan perbaikan dalam implementasi Strategi *Anti Fraud* pada setiap pilarnya.

Pada Pilar 1 Pencegahan Perseroan telah melakukan beberapa hal antara lain: penyusunan identifikasi kerawanan, penyampaian *Risk Awareness* melalui buku *Top Fraud Risk*, pembuatan dan sosialisasi video prinsip kontrol sebagai *awareness* bagi Uker, edukasi nasabah melalui SMS *Blast* dan *face to face*, pengembangan aplikasi *Know Your Employee (KYE)* untuk tenaga pemasar mikro, dan lain-lainnya.

Pada pilar 2 Deteksi, Perseroan telah menerima beberapa pengaduan antara lain: WBS atas pelanggaran dan indikasi *fraud* melalui berbagai media seperti SMS, Surat, Telepon, *Email*, *Website*, dan *Whatsapp*, serta *Enhancement Dashboard* Pengawasan dengan menambahkan beberapa indikator krusial, *Enhancement Rules*.

Pada Pilar 3, Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, Perseroan telah melakukan antara lain: investigasi pelaporan inventarisasi kejadian *fraud* dan laporan insidental atas *fraud* signifikan yang dapat mengganggu kegiatan operasional Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada regulator, memberikan sanksi kepada para pelaku *fraud*.

Pada pilar 4, Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perseroan melakukan kegiatan antara lain: implementasi penguatan fungsi second line dengan adanya organisasi *Regional Risk Management (RRM)*, melakukan *Risk Management Committee (RMC)* berdiskusi dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko yang dalam agenda tersebut dilakukan pembahasan perihal *fraud* dan Strategi Anti *Fraud* untuk mengarah ke *zero fraud*.

Perseroan selalu berupaya untuk menekan dan menurunkan kejadian *fraud* serta mengoptimalkan *recovery* kerugian akibat *fraud* tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain melakukan pengembangan sistem dan tata kelola eksekusi pada *Fraud Detection System (FDS)*, Penguatan *Governance Risk Compliance Culture* pada seluruh jajaran pekerja,

mengoptimalkan *RRM (Regional Risk Management) Team* dengan menyempurnakan *framework* *RRM Team* dan melakukan peningkatan *recovery fraud*.

Dewan Komisaris juga telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Strategi Anti *fraud* Semester II 2020, Semester I 2021, laporan kejadian *fraud* yang berdampak signifikan dan telah memberikan nasehat kepada Direksi dalam penguatan Strategi *Anti Fraud* pada setiap pilarnya, melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan dan upaya *recovery atas kejadian fraud*.

Dewan Komisaris selalu mengingatkan Direksi dan seluruh Insan Brijian untuk senantiasa waspada terhadap seluruh modus *fraud* yang terjadi, menjaga reputasi Perseroan dan kepercayaan masyarakat.

Pengendalian Gratifikasi

Komitmen Perseroan terhadap larangan gratifikasi terus digaungkan, antara lain dengan menerbitkan kebijakan mengenai Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi yang dijadikan pedoman seluruh insan BRI dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan yang dapat merugikan kepentingan BRI dan bertentangan dengan prinsip GCG sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif sesuai Surat Edaran Direksi Tentang Strategi *Anti Fraud* BRI. Perseroan melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dan dengan siapapun sesuai undang-undang yang berlaku yang di tuangkan dalam pakta integritas serta penyampaian surat pengumuman larangan memberikan dan menerima gratifikasi kepada seluruh pengurus dan pekerja kepada seluruh jajaran pekerja menjelang hari raya keagamaan. Perseroan telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi BRI yang menyusun program, memberikan layanan informasi dan pelaporan gratifikasi serta perlu mengembangkan deteksi anti *fraud* yang berbasis *big data*.

Selama tahun 2021, Perseroan telah menjalankan program-program pengendalian gratifikasi antara lain:

1. Pakta Integritas
Dewan Komisaris dan Direksi beserta seluruh pekerja melakukan penandatanganan komitmen anti gratifikasi dan penyuapan yang tertuang dalam Pakta Integritas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional. Penandatanganan Pakta Integritas juga dilakukan pada saat proses aksi korporasi dan pengadaan barang dan jasa dengan rekanan Perseroan.
2. Program Pendidikan dan Sosialisasi
Unit Pengendalian bekerja sama dengan BRI *Corporate University* telah melaksanakan sosialisasi melalui *e-learning* kebijakan gratifikasi kepada seluruh pekerja.
3. Pelaporan Penerimaan/Penolakan Gratifikasi
Selama tahun 2021, Unit Pengendalian Gratifikasi menerima jumlah laporan gratifikasi sebanyak 805 laporan yang meningkat dari tahun sebelumnya dan menunjukkan peningkatan awareness pekerja terhadap pengendalian gratifikasi.

Dewan Komisaris berpesan bahwa pengendalian gratifikasi internal harus terus menerus diperhatikan untuk menjaga agar proses bisnis BRI berjalan sesuai dengan etika bisnis yang berlaku dan untuk menjunjung tinggi nilai integritas.

Whistleblowing System

Sejalan dengan salah satu pilar pada Strategi Anti *Fraud* yaitu pilar deteksi sebagaimana ketentuan yang di atur oleh regulator maka dilakukan identifikasi untuk menemukan kejadian *fraud* yaitu melalui WBS. Proses pelaporan pelanggaran melalui WBS merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan publikasi negatif terhadap Perseroan. Dewan Komisaris memandang bahwa WBS dapat menciptakan lingkungan kerja yang bersih, berakhlak dan berintegritas, bagian dari upaya memelihara budaya kepedulian di lingkungan kerja dan diperlukan partisipasi aktif dari seluruh jajaran pekerja dan pemangku kepentingan untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BRI.

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan dan masukan dalam penyusunan Revisi Surat Edaran WBS dan mekanisme penetapan laporan WBS tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memiliki media pelaporan pelanggaran yang bersifat independen dan rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan pelapor. Perlindungan pelapor dapat terjaga dengan baik yang dibuktikan dengan masuknya laporan tindak pelanggaran melalui WBS.

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik untuk memastikan berjalannya sistem WBS dengan baik, dalam pelaksanaannya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Satuan Kerja Audit Internal dan unit-unit terkait lainnya dalam rangka melakukan evaluasi dan tindak lanjut atas laporan yang diterima.

Kami berpendapat bahwa secara umum penerapan dan tindak lanjut WBS selama tahun 2021 di Perseroan berjalan dengan baik. Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan kepada Direksi untuk terus melakukan sosialisasi penerapan WBS dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional dan berintegritas.

Penerapan Manajemen Risiko

Pada masa pasca Pandemi COVID-19, terdapat peningkatan tantangan ekonomi yang tentu saja diikuti dengan peningkatan kompleksitas risiko terutama pada kegiatan usaha perbankan, Dewan komisaris menyadari bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi salah satu faktor krusial yang harus diawasi dan dijaga dalam rangka mendukung terciptanya pertumbuhan bisnis yang sehat, berkesinambungan, dan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Perseroan maupun yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha bank.

Perseroan memiliki kerangka *Governance Risk Management & Compliance* untuk mengendalikan risiko dan memastikan kepatuhan pelaksanaan pilar bisnis serta *support*, sehingga kinerja BRI tetap sehat dan berkesinambungan dengan didukung oleh *operational excellence* guna menaikkan nilai Perseroan. Dalam kerangka penerapan Manajemen Risiko terdapat empat pilar yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan batas Risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi pendukung
4. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh

Dalam menjalankan penerapan pengendalian risiko, Perseroan telah menyusun pedoman dan kebijakan yang tertuang pada Kebijakan Umum Manajemen Risiko yang merupakan acuan yang bersifat strategis dan komprehensif dalam rangka penerapan serta pelaksanaan Manajemen Risiko Perseroan. Kebijakan Manajemen Risiko mengacu kepada Peraturan OJK Nomor.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Peraturan OJK Nomor.17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan manajemen risiko perseroan yang dibantu oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko. Pengawasan dilakukan melalui rapat dengan Direktur Bidang Manajemen Risiko maupun Direktur terkait lainnya sesuai dengan topik pembahasan. Forum diskusi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dijalankan secara langsung melakukan penelaahan atas laporan yang disampaikan oleh Direksi. Pada tahun 2021, pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan antara lain yaitu menelaah persetujuan atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko, *Risk Appetite Statement*, *Recovery Plan*, *Loan Portfolio Guideline* dan *Enhancement Credit Risk Rating (CRR)* dan *Credit Risk Scoring (CRS)*, dan lain sebagainya.

Sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan BRI, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi merupakan hal penting untuk mengetahui eksposur risiko yang akan timbul dalam aktifitas konglomerasi keuangan secara terintegrasi. Entitas terintegrasi BRI semakin besar dengan telah memasukkan PT PNM dan PT Pegadaian dalam konglomerasi keuangan setelah resmi bergabung dalam Ekosistem Ultra Mikro dengan BRI sebagai induk. Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dimana pada tingkat pengawasan Dewan Komisaris dibantu Komite Tata Kelola Terintegrasi dan pada Perseroan juga memiliki *Risk Management Committee* Terintegrasi yang beranggotakan Direksi, Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko dan Pengurus Perusahaan Anak. Komite ini melakukan pembahasan, rekomendasi atas penyusunan, perbaikan serta penyempurnaan usulan *Risk Appetite Statement* Perusahaan Anak, *Key Risk Issues* Perusahaan Anak, dan lain sebagainya.



Dalam menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi maupun terintegrasi, Perseroan telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI yang merupakan salah satu bentuk kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Direktur atau *Senior Executive Vice President (SEVP)* yang membidangi.

Perseroan telah melakukan penguatan fungsi *second line* dengan adanya RRM di setiap wilayah di BRI yang membawahi fungsi manajemen risiko baik secara bisnis maupun secara operasional. Penguatan tersebut sejalan dengan *building block* pada *Corporate Plan* yaitu manajemen risiko sebagai salah satu *enabler*. Penerapan Manajemen Risiko di BRI antara lain fokus pada kualitas kredit dimana akan tumbuh selektif dengan melihat *business opportunity* dan target pasar, semakin meningkatkan data *awareness*, dan peningkatan pada *risk culture*. Hal tersebut merupakan bagian dari langkah pengendalian risiko Perseroan untuk mempertahankan *sustainability*.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan sistem manajemen risiko telah diterapkan dengan baik dan dilakukan secara proaktif oleh Perseroan dengan memelihara tingkat profil risiko selama tahun 2021. Hal tersebut tercermin pada hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas risiko-risiko utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga pada Triwulan IV/2021 Perseroan tetap menjaga Peringkat Komposit Profil Risiko pada level "*low to moderate*". Tingkat Profil Risiko Perseroan tidak berbeda dengan hasil penilaian profil risiko pada periode sebelumnya, yang menunjukkan Perseroan dapat terus beradaptasi terhadap perubahan dengan tetap melakukan penerapan pengendalian risiko dengan baik.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan manajemen risiko maupun manajemen risiko terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik. Perseroan telah memiliki kecukupan kebijakan manajemen risiko dan manajemen risiko terintegrasi yang terus dilakukan penyempurnaan, *risk appetite* dan *risk tolerance* yang terukur, senantiasa mengedepankan upaya untuk memitigasi risiko melalui pengawasan aktif dan pro aktif, serta penguatan *second line* yang terus disempurnakan kerangka kerjanya. Kami berpesan agar Direksi senantiasa menjaga peringkat profil risiko dengan baik.

Sistem Pengendalian Internal

Seluruh manajemen dan pekerja BRI memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BRI. Dewan Komisaris juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan membentuk budaya pengendalian di Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian

Intern dan memberikan arahan untuk terus memperkuat pengendalian internal di seluruh aktivitas perseroan. Selain itu, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) secara periodik melaporkan hasil temuan audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal serta hasil tindak lanjutnya.

Pengendalian internal perusahaan dipastikan oleh *third line of defence* yang merupakan jajaran Audit internal yang memastikan bahwa pengelolaan risiko agar tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*), serta proses dan sistem tata kelola telah diterapkan secara efektif dan memadai dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memiliki sistem pengendalian internal yang berstandar internasional yaitu Sistem Pengendalian Internal yang dikembangkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO)* yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta aktivitas pemantauan.

Pada tahun 2021 telah dilakukan penerapan ICOFR (*Internal Control Over Financial Report*) untuk lebih menyempurnakan efektifitas proses bisnis yang berbasis *internal control*, memaksimalkan akurasi data dan informasi, memberikan penguatan kecukupan kebijakan, menumbuhkan budaya peduli risiko, sehingga meningkatkan nilai bagi para pemangku kepentingan dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris mengharapkan keterlibatan seluruh jajaran baik dari Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran di berbagai level untuk berperan aktif dalam melakukan implementasi ICOFR.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa secara umum sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Perseroan telah berjalan dengan baik, berfungsi efektif dan memberikan keyakinan yang memadai. Dewan Komisaris menyarankan agar sistem pengendalian internal terus ditingkatkan terutama dengan telah diimplementasikannya ICOFR.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BRI memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan kinerja berbasis ESG yang mana tercermin dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) salah satunya adalah kegiatan Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat. Kegiatan Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat di BRI terdiri dari Program Pendanaan UMK dan Program TJSL BRI Peduli. Program TJSL BRI Peduli merupakan salah satu bentuk tanggung jawab, kepedulian dan kontribusi BRI kepada sosial masyarakat dan lingkungan.

Dewan Komisaris memandang bahwa Program TJSL BRI Peduli yang telah disalurkan BRI sejalan dengan fokus dan strategi Perseroan yaitu *concern* terhadap kondisi lingkungan (*Pro Planet*), Masyarakat (*Pro People*) dan ekonomi (*Pro Profit*). Pelaksanaan Program TJSL BRI Peduli saat ini mengacu kepada Peraturan

Menteri BUMN Nomor : PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN tersebut, terjadi perubahan sektor penyaluran Program TJSL BRI Peduli yang sebelumnya mengacu pada tujuh sektor Bina Lingkungan menjadi mengacu pada empat pilar utama yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan serta Pilar Hukum & Tata Kelola dengan sasaran kegiatan mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dewan Komisaris berpesan agar Perseroan terus menjalankan program TJSL yang sejalan dengan prinsip berkelanjutan dan strategi Perseroan.

Rencana Kerja 2022

Dewan Komisaris telah menyetujui Rencana Kerja Anggaran dan Perseroan 2022 yang telah disusun oleh Direksi dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi global dan ekonomi Indonesia, asumsi makro ekonomi yang relevan. Dewan Komisaris menilai tepat atas Rencana Kerja Anggaran dan Perseroan 2022 yang mencakup *selective growth*, *asset quality*, *CASA*, *Excellence Enabler* dan *Sinergi BRI Group*.

Dewan Komisaris optimis target kinerja keuangan dan non-keuangan akan tercapai mengingat secara historis Perseroan memiliki inisiatif-inisiatif strategis dalam mencapai target yang ditetapkan. Ketahanan fundamental diperlukan dalam perencanaan strategi di masa pandemi guna menjaga kemampuan BRI untuk tetap tumbuh sehat dan berkelanjutan yang mencerminkan status BRI sebagai *top tier company* di Indonesia.

Dalam jangka pendek, Perseroan menyusun langkah strategis antara lain:

1. Fokus menjaga kualitas aset, peningkatan *success rate* restrukturisasi dan pengendalian pencadangan.
2. *Business follow stimulus* serta eksplorasi penggerak *new source of growth* diantaranya segmen Ultra Mikro.
3. Peningkatan rasio dana murah, efisiensi *Cost of Fund (CoF)*, serta *transaction boost* sebagai sumber pertumbuhan *CASA*.
4. Penguatan kapabilitas di bidang digital, *human capital*, manajemen risiko, serta transformasi budaya dan jaringan kerja.
5. Penguatan Sinergi BRI Group. Melalui *cross selling* produk BRI Group, *Sharing resources*, eksplorasi *new investment opportunities*.

Dewan Komisaris juga akan fokus melakukan pengawasan sesuai dengan langkah strategi ke depan yang dilakukan oleh Direksi.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Memperhatikan hasil kinerja dan evaluasi pada tahun 2021, *economics outlook*, kondisi di era disrupsi pasca Pandemi COVID-19 serta tuntutan pemangku kepentingan yang semakin kompleks, maka Dewan Komisaris berpendapat masih terdapat ruang untuk perbaikan dan menyarankan beberapa hal yang harus menjadi perhatian Direksi untuk peningkatan kinerja Perseroan, antara lain:

1. Implementasi Rencana Bisnis Perseroan dalam rangka mencapai target agar dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian (*Risk Prudential Banking*) memperhatikan kondisi disrupsi ekonomi, perkembangan Pandemi COVID-19, perekonomian global dan domestik serta berpedoman pada GCG.
2. Direksi diharapkan fokus terhadap Prioritas Inisiatif Strategis terutama pada hal-hal yang berpengaruh terhadap profitabilitas BRI antara lain seperti pengurangan *Cost of Credit* dan pertumbuhan *CASA* yang harus didukung dengan program kerja yang *tangible*.
3. Terus fokus terhadap aspek keuangan, pelanggan, produk, proses, jaringan dan budaya dalam melakukan arah pengembangan bisnis BRI disamping tetap mengutamakan perannya sebagai *Agent of Development*.
4. Penguatan pada jajaran *second lines of defense* agar didukung dari sisi kompetensi, kemampuan dan kecukupan human capital, penataan jaringan dan proses digitalisasi. Penguatan manajemen risiko perlu dilakukan dalam mencapai target pertumbuhan serta aksi korporasi yang telah direncanakan untuk tetap tumbuh sehat.
5. Menanamkan budaya risiko dalam aktivitas bank termasuk *risk awareness* yang mampu melakukan budaya kontrol risiko pada setiap aktivitas sehingga mampu meminimalisasi seluruh risiko yang terjadi dalam pengelolaan bank.
6. Manajemen diharapkan terus menjaga pencadangan yang dimiliki serta melakukan pengawasan dan penelaahan kemampuan debitur secara berkala terhadap debitur restrukturisasi terutama akibat dampak COVID-19.
7. Sebagai bank dengan segmentasi mikro dengan nasabah terbesar dan tersebar diperlukan keakuratan pencatatan transaksi yang teragregasi di laporan keuangan. Implementasi ICOFR diperlukan terkait eksposur bisnis dan *span of control* BRI yang sangat luas.
8. Holding Ultra Mikro menjadikan BRI sebagai *leading* di sektor UMKM dan menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Penguatan tata kelola secara konglomerasi yang tepat dan sesuai diperlukan dan agar terus dimonitor dan diimplementasikan dengan baik.
9. BRI sebagai *holding* harus dapat memperkuat *Parenting Strategy* dan mempertajam *Segmentasi/Playing Field* yang sesuai untuk masing-masing Perusahaan Anak. Sinergi dan Kolaborasi dapat dilakukan baik dari segi finansial maupun non finansial baik seperti sisi jaringan, wilayah kerja, teknologi, fokus pelanggan, pengetahuan dan lain sebagainya.

10. Manajemen perlu memastikan bahwa penataan jaringan kerja, sistem keamanan dan kualitas jaringan komunikasi baik untuk layanan konvensional maupun layanan digital selalu terjaga dengan baik dalam rangka memberikan layanan yang prima kepada nasabah serta dan mengantisipasi kemungkinan adanya *cybercrime* dan *fraud*.
11. Peningkatan *awareness* terhadap pentingnya ESG, sehingga penerapan *sustainable financing* menjadi penting. Direksi perlu mempersiapkan dari sisi operasional, sumber daya, pengelolaan aset, maupun pemilihan teknologi sesuai *Sustainable Development Goals*.
12. Transformasi budaya yang merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan human capital BRI agar dilakukan secara konsisten sehingga tercipta internalisasi budaya kerja antara lain nilai AKHLAK di setiap pekerja.

Penilaian Atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan peran aktif Dewan Komisaris pada saat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk empat komite yaitu:

1. Komite Audit,

Komite Audit bertindak secara *independent* dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu Dewan Komisaris memperkuat fungsi pengawasan (*oversight*) guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Perseroan. Komite Audit telah mengawasi proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur, dan praktik pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan Perseroan secara baik dalam pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit antara lain pemantauan dan evaluasi atas perencanaan serta pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal serta pemantauan tindak lanjutnya, melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan, dan tugas lainnya yang disampaikan secara rinci pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Manajemen Risiko,

Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan agar penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan. Komite Pemantau Manajemen Risiko melakukan evaluasi dan analisa secara berkala atas kecukupan kebijakan manajemen risiko Perseroan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan, antara lain : melakukan evaluasi dan analisa terhadap profil risiko Perseroan setiap triwulanan,

memantau Tingkat Kesehatan Bank setiap semester, memberikan rekomendasi atau pendapat atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi oleh Dewan Komisaris, dan tugas lainnya yang disampaikan secara rinci pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

3. Komite Nominasi dan Remunerasi,

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab pengawasannya terhadap pelaksanaan kebijakan nominasi dan remunerasi pada setiap tingkatan organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas antara lain: memberikan saran dan masukan yang konstruktif atas sistem dan prosedur pemilihan *talent* memberikan masukan atas hasil kajian kebijakan pengelolaan *human capital*, mengevaluasi kebijakan *talent pool*, memberikan rekomendasi atas usulan persetujuan pengurus perusahaan anak sesuai dengan kewenangannya, dan tugas lainnya yang disampaikan secara rinci pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan tata Kelola yang komprehensif dan efektif yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi memantau proses perbaikan yang berkesinambungan atas kebijakan, prosedur, dan praktek pada semua tingkatan dalam Perseroan guna memastikan telah dilakukannya pengendalian internal, pelaksanaan fungsi kepatuhan, dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi. Pada tahun 2021 Komite Tata Kelola Terintegrasi terus melakukan penguatan tata Kelola terintegrasi BRI yang dilakukan antara lain : menyempurnakan *framework* tata Kelola, mengevaluasi pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris masing-masing Perusahaan Anak, mengevaluasi atas strategi pengembangan bisnis BRI dan Perusahaan Anak terutama yang baru bergabung di konglomerasi keuangan BRI yaitu PT PNM dan PT Pegadaian, dan tugas lainnya yang disampaikan secara rinci pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja. Sepanjang tahun 2021, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan seluruh rencana kerja masing-masing komite sesuai dengan yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2020.

Pelaksanaan rencana kerja komite-komite tersebut dapat dilakukan melalui rapat komite dengan mengundang Direktorat, Forum Diskusi dengan Divisi dan Satuan kerja terkait maupun

secara tidak langsung dengan melakukan evaluasi terhadap laporan yang telah diterima untuk kemudian seluruhnya dilakukan penelaahan secara mendalam oleh masing-masing komite dan kemudian hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

- Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama tahun 2021, dengan telah melaksanakan rapat sebanyak 16 kali.
- Komite Pemantau Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selama tahun 2021, dengan telah melaksanakan rapat sebanyak 48 kali.
- Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik selama tahun 2021 dan telah melaksanakan rapat sebanyak 18 kali.
- Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di tahun 2021, dengan telah melaksanakan rapat sebanyak 15 kali.

Dewan Komisaris dan Komite telah menyusun berbagai Tata Tertib Kerja, yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta tantangan yang dihadapi. Tata Tertib Kerja tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan setiap tindakan dan kepastian pertanggung-jawaban.

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2021 Komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif serta memberikan apresiasi atas pencapaian program maupun rencana kerja. Dewan Komisaris berharap kinerja Komite dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih, dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris sebagaimana penjelasan berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Oktober 2021

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI. Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Kartika Wirjoatmodjo	: Komisaris Utama
Ari Kuncoro	: Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim	: Komisaris Independen
R. Widyo Pramono	: Komisaris Independen
Hendrikus Ivo	: Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa	: Komisaris Independen

Zulnahr Usman	: Komisaris Independen
Rabin Indrajad Hattari	: Komisaris
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	: Komisaris
Hadiyanto	: Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Oktober 2021

Pada tanggal 7 Oktober 2021, RUPS Luar Biasa memutuskan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Mengukuhkan pemberhentian Sdr. Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS') Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 18 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021, dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Rofikoh Rokhim yang semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen.
3. Mengangkat Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen.

Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Ari Kuncoro atas segala dedikasi dan kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris BRI. Pengalaman yang mumpuni dan pengetahuan yang dalam industri jasa keuangan dan perbankan sangat terasa dalam memberikan pemikiran dan gagasan dalam kapasitas sebagai Dewan Komisaris maupun sebagai anggota Komite.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen, 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI. Komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Kartika Wirjoatmodjo	: Komisaris Utama
Rofikoh Rokhim	: Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen
R. Widyo Pramono	: Komisaris Independen
Hendrikus Ivo	: Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa	: Komisaris Independen
Zulnahr Usman	: Komisaris Independen
Heri Sunaryadi*	: Komisaris Independen
Rabin Indrajad Hattari	: Komisaris
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	: Komisaris
Hadiyanto	: Komisaris

*Berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Penutup

Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemegang saham. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah mampu menjalankan kepengurusan Perseroan dengan baik di tahun 2021 khususnya pada masa transisi Pandemi COVID-19. Dewan Komisaris juga menyampaikan

apresiasi kepada seluruh Insan Brilian yang telah memberikan kontribusinya secara optimal. Dewan Komisaris sangat berharap, bahwa seluruh jajaran Perseroan dapat terus merumuskan strategi jangka pendek maupun jangka panjang yang tepat dan mampu membawa Perseroan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Jakarta, 7 Februari 2022
Atas nama Dewan Komisaris

Kartika Wirjoatmodjo

Komisaris Utama

Dewan Komisaris

Dari kiri ke kanan:

R. Widyo Pramono (Komisaris Independen), **Heri Sunaryadi** (Komisaris Independen), **Dwi Ria Latifa** (Komisaris Independen), **Nicolaus Teguh Budi Harjanto** (Komisaris), **Kartika Wirjoatmodjo** (Komisaris Utama), **Rofikoh Rokhim** (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen), **Hendrikus Ivo** (Komisaris Independen), **Hadiyanto** (Komisaris), **Rabin Indrajad Hattari** (Komisaris), **Zulnahr Usman** (Komisaris Independen).





» Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan 2021

Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Februari 2022

Direksi



Sunarso
Direktur Utama



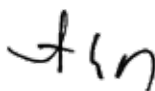
Catur Budi Harto
Wakil Direktur Utama



Viviana Dyah Ayu Retno
Direktur Keuangan



Supari
Direktur Bisnis Mikro



Amam Sukriyanto
Direktur Bisnis Kecil & Menengah



Handayani
Direktur Bisnis Konsumer



Indra Utoyo
Direktur Digital & Teknologi Informasi




Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Kepatuhan



Agus Winardono
Direktur Human Capital



Agus Sudiarto
Direktur Manajemen Risiko



Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan



Arga Mahanana Nugraha
Direktur Jaringan & Layanan

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Februari 2022

Dewan Komisaris



Kartika Wirjoatmodjo

Komisaris Utama



Rofikoh Rokhim

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen



Rabin Indrajad Hattari

Komisaris



Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Komisaris



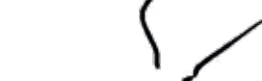
Hadiyanto

Komisaris



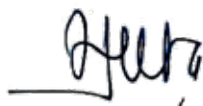
R. Widyo Pramono

Komisaris Independen



Hendrikus Ivo

Komisaris Independen



Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen



Zulnahr Usman

Komisaris Independen



Heri Sunaryadi*

Komisaris Independen

* Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Profil Perusahaan

“Perjalanan bisnis BRI dimulai pada tahun 1895, saat ini BRI memiliki 1 Kantor Pusat serta melayani seluruh nasabah melalui 8.647 unit kerja dan 224.954 jaringan *e-channel* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia”



» Identitas Perusahaan

 Nama Perusahaan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
 Bidang Usaha	Perbankan	
 Dasar Hukum Pendirian	Undang-Undang No 21 Tahun 1968	
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp7.577.950.080.200 per 31 Desember 2021	
 Tanggal Pendirian	16 Desember 1895	
 Modal Dasar	Rp15.000.000.000.000	
 Jumlah Pekerja	82.718 orang per 31 Desember 2021	
 Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	Saham Perseroan telah dicatitkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003.	
 Kode Saham	BBRI	
 Komposisi Pemegang Saham	Pemerintah Indonesia : 53,19% Publik : 46,81%	
 Data Jaringan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Kantor Pusat • 18 Kantor Wilayah • 457 Kantor Cabang • 591 Kantor Cabang Pembantu • 5.222 BRI Unit* 	<ul style="list-style-type: none"> • 525 Kantor Kas* • 1.697 Teras BRI* • 132 Teras BRI Keliling* • 4 Teras BRI Kapal* <p><small>* Sesuai dengan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, disesuaikan bahwa untuk type UKO BRI Unit, Kantor Kas, Teras, Teras Keliling, Teras Kapal termasuk dalam status jenis UKO KCP.</small></p> <p>Keterangan: Termasuk jumlah Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Luar Negeri.</p>
 Alamat Perusahaan	Kantor Pusat Sentra BRI Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta 10210 No. Tel. : (021) 251-0244, 251-0254, 251-0264, 251-0269, 251-0279 No. Fax : (021) 250-0077 Website : www.bri.co.id	Sekretaris Perusahaan Aestika Oryza Gunarto Corporate Secretary Division Gedung BRI 1, Lt.15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Email : humas@bri.co.id Telp : (021) 5751966 Fax : (021) 5700916
 Contact Address	Call center : 14017/1500017 Email : callbri@bri.co.id	Media Sosial @BRIofficialpage @kontakBRI @bankbri_id BANK BRI

» Brand Perusahaan

Logo BRI adalah sebagai berikut:



Dengan makna logo:

THE LEADER OF CHANGE

Sebagai *The Leader of Indonesian Banking Industry*, diperlukan peremajaan sistem komponen visual BRI, penggunaan logo dalam materi komunikasi membutuhkan sedikit penyesuaian demi menunjang ketepatan sistem komponen visual secara keseluruhan.

Penyesuaian logo ketika BRI berdiri sebagai Perusahaan Induk pun perlu dilakukan terkait dengan relevansi BRI yang juga menaungi berbagai anak perusahaan yang bukan bergerak di bidang perbankan.

Perubahan Logotype "Bank BRI" menjadi "BRI" sebagai statement bahwa BRI sebagai Induk Perusahaan tidak hanya memiliki berbagai anak perusahaan yang bergerak di dalam bidang perbankan, tetapi jauh lebih luas lagi.



Logogram dengan bentuk segi empat sama sisi menandakan keseimbangan. Sementara garis sudut lengkung menggambarkan dinamis/fleksibel dalam menyikapi perkembangan zaman.

Garis dan bentuk pada Huruf "BRI" terbentuk dari bentuk garis lurus yang menggambarkan bahwa BRI memiliki ketegasan untuk selalu hadir dan melayani seluruh masyarakat Indonesia, dan garis lengkung yang mencerminkan layanan BRI juga dapat bersifat fleksibel karena selalu mengedepankan keamanan & kenyamanan para nasabah BRI (*Consumer Centric*).

Garis, bentuk, dan pewarnaan (*bold*) secara tegas, sederhana, serta terukur pada logo merupakan cerminan dari sistem manajemen yang baik, kemudahan, maupun keamanan.

Bentuk dan pewarnaan secara tegas dan teratur diharapkan akan mampu menampilkan suatu kesan lembaga yang modern dan profesional, sehingga tercermin ciri dunia perbankan yang mementingkan ketelitian dan ketepatan terkait dengan manajemen modern dalam suatu kegiatan usaha nasional dengan wawasan internasional dan berlandaskan semangat pembaharuan.

Garis, bentuk, dan pewarnaan ditampilkan secara lugas dan sederhana tetapi mantap mencerminkan salah satu misi BRI sebagai bagian terdepan dalam mengemban kebijaksanaan pemerintah dalam memenuhi pelayanan perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat dari yang paling kecil dan terpencil sampai yang besar di kota-kota.

Warna biru melambangkan rasa nyaman, tenang, dan menyejukkan.

Filosofi Tagline:

"Melayani Dengan Setulus Hati"

Kalimat ini menggambarkan semangat serta visi dan misi BRI yang selalu dengan tulus memberikan pelayanan terbaik. Kalimat ini adalah komitmen BRI untuk selalu mengutamakan kepuasan nasabahnya yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

» Riwayat Singkat Perusahaan



Perjalanan bisnis BRI dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI" atau "Perseroan") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584. HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya

Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04. TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.



Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi S.H., No. 3 tanggal 09 Maret 2021, mengenai perubahan-perubahan terhadap beberapa ketentuan dari Anggaran Dasar BRI, yang telah mendapatkan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-



AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021. Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta modal disetor.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

Keterangan Perubahan Nama



16 Desember 1895



De Poerwokertosche Hulp Spaaren
Landbouw Credietbank



10 Juli 1912

De Poerwokertosche Hulp en
Spaarbank der Inlandsche Hoofden
Hulp en Spaarbank der Inlandshe
Bestuurs Ambtenareen

De Poerwokertosche Hulp Spaaren
Landbouw Credietbank atau
Volksbank

11 Agustus 1897

Centrale Kas Voor
Volkscredietwezen Algemene



24 September 1960



Bank Rakyat Indonesia
(Bank Umum)



10 November 2003

Bank Koperasi Tani Nelayan
(BKTN)

PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk

18 Desember 1968



19 Februari 1934



Syomin Ginko



22 Februari 1946

Algemene Volkscredietbank
(AVB)

Bank Rakyat Indonesia
(BRI)

3 Oktober 1942

Tabel Riwayat Pendirian BRI

No	Perihal	Akta/peraturan Terkait	Tanggal	Notaris
1	Pendirian BRI	PP Nomor 1 Tahun 1946 tentang Bank Rakyat Indonesia	22 Februari 1946	
2	Pendirian BRI	UU Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia	18 Desember 1968	
3	Penyesuaian bentuk hukum Persero	PP Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan	29 April 1992	
4	Persetujuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas	Akta Nomor 133 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	31 Juli 1992	Muhani Salim, S.H.
5	Initial Public Offering	Akta Nomor 7 tentang Status Perusahaan & Penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal	3 Oktober 2003	Imas Fatimah, S.H.

» Visi, Misi dan Budaya Perusahaan



Visi

The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion.

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memastikan kesesuaian Visi dan Misi, BRI senantiasa melakukan review terhadap Visi dan Misi tersebut. Visi misi BRI tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan tahun 2021-2025 yang telah disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris BRI serta telah disampaikan kepada OJK melalui surat No. R.394-DIR/CDS/06/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Misi

- **Memberikan yang Terbaik**

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

- **Menyediakan Pelayanan yang Prima**

Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*), teknologi informasi yang handal dan *future ready*, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan *risk management excellence*.

- **Bekerja dengan Optimal dan Baik**

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.





Budaya Perusahaan

BRI One Culture: Definisi & Arsitektur



BRI *One Culture* dijadikan pedoman melaksanakan dan membangun budaya perusahaan yang kuat untuk mencapai visi perusahaan. BRI *One Culture* terdiri dari *Core Values* Akhlak, BRILiaN *Belief*, dan BRILiaN *Ways* sebagai perilaku kunci yang mampu mendorong pencapaian kinerja perusahaan.

ARSITEKTUR TATA KELOLA BUDAYA BRI



Arsitektur Tata Kelola Budaya BRI (BRI One Culture) terdiri dari 3 (tiga) elemen utama yaitu, Perilaku (*Behavior*), Sistem (*System*) dan Simbol (*Symbol*) dengan BRI One Culture menjadi intinya.



PERILAKU

Pengelolaan budaya kerja bertujuan untuk membentuk sikap perilaku setiap insan BRILiaN sesuai dengan nilai-nilai pokok BRI One Culture.

- Keteladanan *Culture Leader*
- *Culture Agent (CA) Coordinator & CA Forum 8 BRILiaN Ways*
- 8 BRILiaN Ways



SIMBOL (*SYMBOL*)

Penggunaan slmbol budaya kerja bertujuan untuk mengefektifkan proses internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai pokok budaya kerja melalui penggunaan media atau sarana komunikasi.

- *Community-Based*
- *Culture Activation Program*
- Program Komunikasi



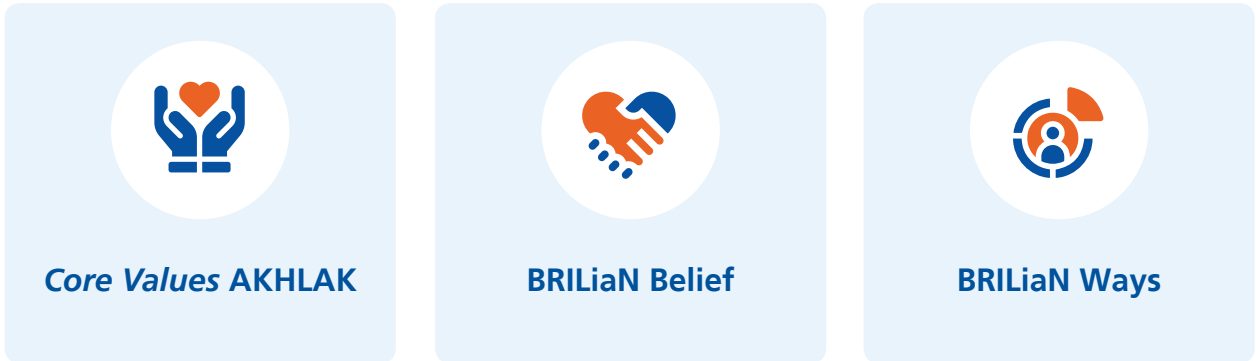
SISTEM (*SYSTEM*)

Penggunaan sistem budaya kerja bertujuan untuk mengukur implementasi budaya kerja dengan menggunakan pola aturan tertentu.

- Mekanisme Kerja *Culture Leader & Culture Agent*
- *Rewards & Recognition System*
- Indikator & Alat Ukur Budaya Kerja

BRI ONE CULTURE

Budaya kerja yang digunakan di lingkungan BRI Group atau BRI One Culture terdiri dari :















Core Values Akhlak bersama panduan perilakunya menaungi BRILiaN Belief dan BRILiaN Ways yang merupakan perilaku kunci untuk mendukung pencapaian Kinerja Perusahaan.

Core Values Akhlak bersama panduan perilakunya menaungi BRILian Belief dan BRILian Ways yang merupakan perilaku kunci untuk mendukung pencapaian Kinerja Perusahaan.

AKHLAK

Core Values AKHLAK adalah nilai-nilai utama Sumber Daya Manusia dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan menjadi pondasi *Corporate Culture* BRI. Core Values AKHLAK memiliki 6 (enam) nilai pokok (values) dan diterjemahkan menjadi 6 (enam) kata kunci dan 18 (delapan belas) perilaku.

	Value	AMANAH	KOMPETEN
	Kata Kunci	Integritas, tulus, konsisten, dapat dipercaya.	Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli di bidangnya.
	Kalimat afirmasi (Ikrar)	Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.	Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
	Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> Memenuhi janji dan komitmen. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan & tindakan yang dilakukan. Berpegang teguh kepada Perilaku nilai moral & etika. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang belajar. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
	Value	HARMONIS	LOYAL
	Kata Kunci	Peduli (<i>caring</i>), perbedaan (<i>diversity</i>).	Komitmen, dedikasi (rela berkorban), kontribusi.
	Kalimat afirmasi (Ikrar)	Kami saling peduli dan menghargai perbedaan.	Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
	Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 	<ol style="list-style-type: none"> Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN & Negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum & etika.
	Value	ADAPTIF	KOLABORATIF
	Kata Kunci	Innovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif.	Kesediaan bekerjasama, sinergi untuk hasil yang lebih baik.
	Kalimat afirmasi (Ikrar)	Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.	Kami mendorong kerjasama yang sinergis.
	Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Bertindak proaktif. 	<ol style="list-style-type: none"> Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BRILiaN Belief

BRILiaN Belief merupakan prinsip-prinsip yang diyakini oleh insan BRILiaN dalam bersikap dan berperilaku.

"Insan BRILiaN senantiasa menjaga integritas dan bersikap *professional* dalam menjalankan tugasnya dengan saling respek (*trust*) untuk menghasilkan jasa dan layanan BRI Group yang inovatif berlandaskan semangat *customer centric* yang memberikan nilai tambah bagi nasabah, masyarakat, dan *stakeholders*"

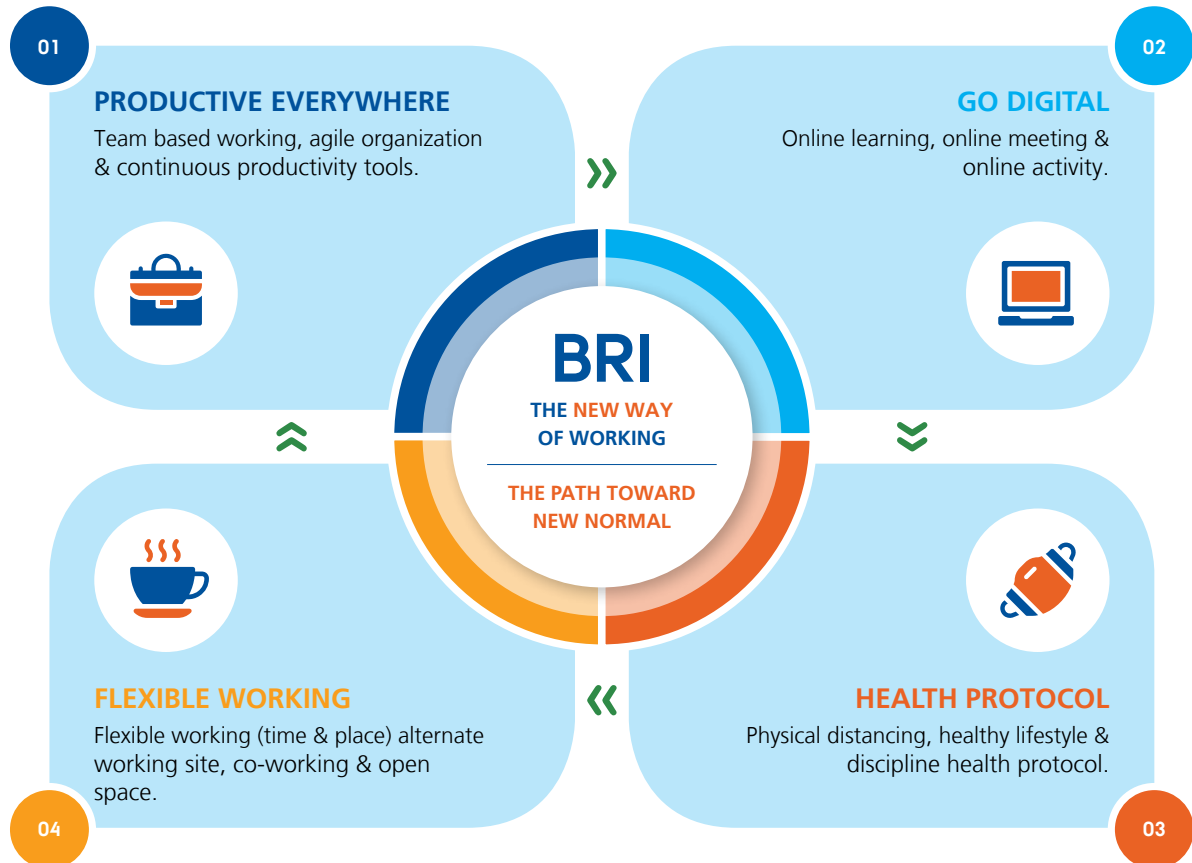
BRILiaN Ways

BRILiaN Ways sebagai *performance driven behaviour* yaitu perilaku utama yang melekat dan senantiasa ditunjukkan oleh Insan BRILiaN dalam berkinerja yang terdiri dari 8 (delapan) perilaku, yaitu:

1. BRILiaN jujur, tulus dan patuh pada peraturan.
2. BRILiaN cakap dan handal, terus belajar, mengembangkan diri dan orang lain (*continuous learner*).
3. BRILiaN bekerja tuntas dengan penuh tanggung jawab berorientasi pada kinerja terbaik.
4. BRILiaN membangun kolaborasi yang produktif.
5. BRILiaN terbuka dan menghargai kemajemukan (*respect to diversity*).
6. BRILiaN proaktif, adaptif, inovatif dan berorientasi pada pertumbuhan yang berkelanjutan.
7. BRILiaN berempati memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan melebihi harapan.
8. BRILiaN peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.

BRILiaN Ways tersebut dapat disesuaikan oleh perusahaan anak/perusahaan terafiliasi menyesuaikan dengan karakteristik serta jenis industri ataupun strategi perusahaan anak.

BRILiaN Belief



» Bidang Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Kegiatan usaha BRI berdasarkan Akta Perubahan terakhir Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta serta telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021 BRI adalah:

Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - 1) Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.
- k. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan selaku Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut dapat dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- n. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.
- p. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan ketentuan otoritas yang berwenang.
- q. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- r. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/ penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh Kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan oleh Perseroan.

Produk dan Jasa

Produk Simpanan



Tabungan BRI
BritAma

Tabungan BRI BritAma

Tabungan BRI BritAma Umum

Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dan *system real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Selain itu tabungan BritAma memiliki Gratis Cover asuransi kecelakaan, Fitur *e-banking* dan suku bunga kompetitif.

Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas *e-banking* yang akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun, serta fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) cuma-cuma. Tabungan BRI BritAma memiliki berbagai jenis varian yaitu BritAma Umum, BritAma Bisnis, BritAma Rencana, BritAma Muda, BritAma Mitra, BritAma TKI, BritAma Valas dengan pilihan mata uang USD, SGD, AUD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY dan SAR.

Tabungan BRI BritAma Bisnis

Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan yang menunjang bisnis, dengan didukung fasilitas *e-banking* dan *system real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Selain itu tabungan BritAma memiliki Gratis Cover asuransi kecelakaan, Fitur E-banking dan suku bunga kompetitif dan pencatatan transaksi lebih detail pada buku Tabungan dan pengiriman rekening koran melalui email.

Tabungan BRI BritAma Muda

Produk tabungan dengan desain kartu debit khusus yang elegan untuk anak muda serta memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dan *system real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Tabungan BRI
Junio
Tabungan asih sahabat rita

Tabungan BRI Junio & Junio Rencana

Tabungan BRI Junio diperuntukkan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan Bank sejak dini. Tabungan BRI Junio dilengkapi dengan fasilitas *e-banking*, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta Kartu Debit desain khusus yang menarik.

Tabungan BRI Simpedes

Tabungan BRI Simpedes merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari Internet *Banking* dan *Mobile Banking*. Tersedia juga varian dari Simpedes seperti Simpedes Umum, Simpedes TKI, Simpedes Impian, Simpedes Usaha dan Simpedes UMi. Selain itu Bisnis Mikro BRI juga memiliki produk simpanan lainnya yaitu:

1. TabunganKu
2. SimPel (Simpanan Pelajar)
3. Deposito

Tabungan BRI
Simpedes



Selain itu BRI memiliki produk tabungan lainnya yaitu:

1. Tabunganku dan Tabunganku BSA
2. Tabungan BRI Sempel
3. Tabungan BRI SiMuda

Giro

1. Giro Rupiah
2. Giro Valas

Deposito

1. DepoBRI Rupiah
2. DepoBRI Valas
3. Deposito On CALL
4. Deposito On CALL Valas

Digital Saving

BRI Digital Saving merupakan service pembukaan rekening secara *fully digital* yang pada tahap awal dibangun berbentuk aplikasi berbasis web, yang dapat diintegrasikan di berbagai aplikasi lain dalam bentuk *launcher* sehingga memiliki standar secara metode *Know Your Customer* (KYC), alur pembukaan rekening, dan *User Experience*. Digital Saving dapat dipergunakan untuk perluasan channel pembukaan rekening BRI, karena dapat ditempatkan di Website dan Aplikasi BRI sendiri, Bank Subsidiary, atau pihak ketiga yang bekerjasama seperti Gojek, Tokopedia, LinkAja, Dana, Bukalapak dan lain lain.

Deposito BRI



Pinjaman Mikro



Kupedes

Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan yang memenuhi persyaratan.

Varian produk kupedes yaitu:

1. Kupedes Modal Kerja
2. Kupedes Investasi
3. Kredit Ekstra Cepat (KECE)
4. Kupedes Cash Coll / Kupedes Agunan Kas

Kupedes Rakyat:

1. Kupedes Rakyat Modal Kerja
2. Kupedes Rakyat Investasi
3. Kupedes Rakyat TKI

KUR Super Mikro

KUR Super Mikro merupakan fasilitas pembiayaan khusus bagi nasabah baru yang belum pernah mengajukan kredit yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif dengan pinjaman maksimal sebesar Rp10 juta per debitur dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun.

KUR Mikro

KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula dengan pinjaman maksimal sebesar Rp50 juta per debitur yang dapat berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun. KUR TKI merupakan fasilitas pembiayaan yang berlaku khusus bagi TKI dengan penempatan di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia dengan pembiayaan maksimal sebesar Rp25 juta.



Pinjaman Kecil

KMK Kecil

1. KMK Kecil Komersial
2. KMK Dinamis Kecil Komersial
3. KMK Mitra Kecil Komersial
4. KMK Konstruksi Kecil Komersial
5. KMK SPBU Kecil Komersial
6. KMK Pengembang/Developer Komersial
7. KMK Angsuran Tetap Komersial
8. KMK Waralaba Kecil Komersial
9. KMK Valas Kecil Komersial
10. KMK Executing Kecil Komersial

KI Kecil

1. KI Kecil Komersial
2. KI Mitra Kecil Komersial
3. KI SPBU Kecil Komersial
4. KI Waralaba Kecil Komersial
5. KI Angsuran Tetap

KUR Kecil

1. KI KUR Khusus
2. KMK KUR Khusus
3. KUR Linkage
4. KUR Kecil KI
5. KUR Kecil KMK

Pinjaman Cash Coll

**KUR
KECIL BRI**

Pinjaman Menengah dan Korporasi

KMK Menengah

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. KMK Menengah | 6. KMK Impor Menengah |
| 2. KMK Dinamis Menengah | 7. KMK SPBU Menengah |
| 3. KMK Mitra Menengah | 8. KMK Konstruksi Menengah |
| 4. KMK Ekspor Menengah | 9. KMK Valas Menengah |
| 5. KMK Executing Menengah | |

KI Menengah

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. KI Menengah | 4. KI Valas Menengah |
| 2. KI Mitra Menengah | 5. KI Waralaba Menengah |
| 3. KI SPBU Menengah | |

KMK Korporasi

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. KMK Korporasi | 4. KMK Valas |
| 2. KMK Impor Korporasi | 5. KMK WA Konstruksi Korporasi |
| 3. KMK Ekspor Korporasi | |

KI Korporasi

1. KI Korporasi
2. KI Valas Korporasi
3. KI Waralaba Korporasi

**Kredit
UMKM BRI**

KKPEBRI

Pinjaman Konsumtif

Kredit BRIGUNA BRI

Briguna Karya

1. Briguna Karya
2. Briguna Talangan
3. Briguna Profesi
4. Briguna Pendidikan
5. Briguna Smart

Briguna Pra Purna

1. Briguna Pra Purna
2. Briguna Smart

Briguna Purna

1. Briguna Purna
2. Briguna Profesi

KPR

1. KPR
2. KPR Subsidi

KKB

1. KKB Kerjasama

Kartu Kredit dan Digital Lending

KARTU KREDIT BRI

Kartu Kredit BRI (Reguler)

Mastercard

1. Easy Card
2. Platinum
3. World Access
4. Business Card
5. Corporate Card
6. Kartu Kredit Pemerintah

VISA

1. Touch
2. Infinite

JCB

Platinum

Digital Lending

Ceria

Kartu Kredit BRI Co-Branding

1. Traveloka Paylater Card
2. OVO U Card
3. Kartu Emas Pegadaian
4. BTN Gold/Platinum
5. Wonderful Indonesia
 - Edisi Borobudur
 - Edisi Mandalika
 - Edisi Gunung Bromo
 - Edisi Danau Toba
 - Edisi Labuan Bajo
1. BRI Agro
2. BRI UGM-KAGAMA Card

Jasa



Cash Management System

Layanan CMS BRI memungkinkan nasabah korporasi melakukan *monitoring* dan transaksi keuangan perusahaan secara langsung melalui fasilitas *online*. Juga menyediakan fasilitas *national pooling*, *added value service* dari GiroBRI untuk nasabah grup korporasi, yang menyediakan saldo terkonsolidasi serta memungkinkan anggota grup melakukan *borrowing* berdasarkan saldo konsolidasi yang diperjanjikan, serta fasilitas *corporate virtual account* berupa layanan tambahan *virtual account* yang memudahkan nasabah dalam melakukan identifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran secara terintegrasi (*Integrated Banking Solution*), serta berbagai layanan *cash management* lainnya.

e-Tax BRI

Memudahkan dan Mengamankan Pajak Anda

Jasa Kelembagaan

1. SIM (Surat Izin Mengemudi) - *Online*
2. MPN GII (Modul Penerimaan Negara Generasi II)
3. E-Tax (Electronic Tax)
4. Hospital Online
5. SPP-Online Mahasiswa
6. Visa on Arrival (VoA)
7. Layanan terkait Nasabah Instansi Kerja Sama (NIK)
8. Layanan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
9. Layanan terkait Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN)
10. Kartu Identitas Multifungsi (KIM)
11. KTA Elektronik
12. E-Samsat
13. E-Tilang (Tilang *Online*)
14. PDAM Online
15. BPJS-TK Service Point Office
16. Corporate Billing Management
17. BRICams
18. E-Tax

Jasa Bisnis dan Keuangan

1. Bank Kliring
2. *Bill Payment*
3. Penerimaan Setoran
4. Transaksi Online
 - a. Automatic Fund Transfer (AFT)
 - b. Automatic Grab Fund (AGF)
 - c. Account Sweep
 - d. New Account Sweep (NAS)
 - e. Salary Crediting
 - f. Mass Debet
 - g. Auto Payment
 - h. Auto debet
5. Transfer LLG (Lalu Lintas Giro)
6. RTGS (Real Time Gross Settlement)

Agen BRILink

AgenBRILink

Layanan Transaksi Keuangan Tanpa Kantor

AgenBRILink merupakan perluasan layanan dimana BRI menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online dengan konsep sharing fee. Melalui AgenBRILink, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama seperti halnya di unit kerja BRI.

E-Banking



1. ATM BRI
2. SMS Banking (SMS plain text)
3. Internet Banking BRI
4. CRM BRI
5. EDC BRI
6. BRIZZI (*Electronic Money* BRI)
7. BRImo
8. QRIS
9. iBBIZ BRI
10. Kartu Debit BRI
11. BRIVA
12. E-Pay BRI
13. BRISore
14. BRIMola
15. BRI Smart Billing
16. BRI Smart Junio
17. Stroberi
 - a. Stroberi Kasir
 - b. Stroberi Tagihan
 - c. Stroberi Order

Jasa Layanan Bisnis Internasional

Bank Garansi

1. *Tender/Bid Bond*
2. *Advance Payment Bond*
3. *Performance Bond*
4. *Maintenance Bond*
5. *Financial Bond*
6. *Bond Payment*
7. *Bea Cukai*
8. *BG Akhir Tahun*

Collection

1. *Document Against Payment*
2. *Document Against Acceptance*

Domestic Documented Credit Letters (SKBDN)

Letter of Credit (LC)

1. *Sight*
2. *UPAS*
3. *Usance*

Back to Back LC Standby LC (SBLC)

1. *Bid Bond Standby*
2. *Advance Payment Standby*
3. *Commercial Standby*
4. *Performance Bond Standby*
5. *Direct Pay Standby*
6. *Counter Standby*
7. *Financial Standby*

Negosiasi LC/SKBDN/Non LC/Non SKBDN

1. *SCF*
2. *Forfaiting Non Bank*
3. *Shipping Guarantee*
4. *Receivable Financing*
5. *Demand Guarantee*
6. *Pembayaran Pajak Impor*
7. *PIB*
8. *Counter Guarantee Bank*
9. *Risk Participation (Bank Risk)*

LCS (Local Currency Settlement)

1. *UCL dan Bank Line Management*

Refinancing LC (BRI as Borrower/Lender)

1. *Pre Import Financing*
2. *Post Import Financing*

Bilateral Loan (Bank Risk)

Confirming Bank Business

SWIFT

Pengelolaan Nostro & Vostro

Forfaiting (Bank Risk)

Relationship Manager Application (RMA)-SWIFT

BRI Money Changer

BRIfast Remittance

BRIfast Remittance adalah layanan *remittance* BRI untuk melayani pengiriman uang ke luar negeri maupun penerimaan uang dari luar negeri ke Indonesia. Layanan Remittance BRI meliputi fitur *outgoing*

remittance ke 144 *currency* di seluruh dunia, fitur *incoming remittance credit to BRI account* (kiriman masuk ke rekening BRI) dan *credit to other bank account* (kiriman masuk ditujukan ke rekening bank lain), serta fitur *incoming remittance cash pick-up* (kiriman masuk tanpa rekening diambil tunai) yang dapat dicairkan di seluruh unit kerja BRI di Indonesia secara *real time online*.

Jasa Layanan Treasury

BRIfx (Foreign Exchange Product)

1. *Today*
2. *FX Tomorrow*
3. *FX Spot*

Foreign Exchange Derivative Product

1. *FX Forward*
2. *FX Par Forward*
3. *FX Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)*
4. *FX Swap*
5. *FX Option*
6. *Cross Currency Swap (CCS)*
7. *Interest Only Swap (IOS)*
8. *Principal Only Swap (POS)*

Interest Rate Derivative Product

1. *Forward Rate Agreement (FRA)*
2. *Interest Rate Swap (IRS)*

Structured Product

1. *Call Spread Option (CSO)*
2. *BRI Swap Deposit*
3. *Bond Option*
4. *Overnight index Swap (OIS)*

Interest Rate Product

1. *Jual/Beli Surat Berharga Pada Pasar Primer*
2. *Jual/Beli Surat Berharga Pada Pasar Sekunder*
3. *Repo/Reverse Repo Surat Berharga*
4. *Placement/Borrowing*
5. *Term deposit*
6. *Deposit/lending Facility*

Jasa Investment Service

BRI Kustodian

1. *Jasa Kustodian Reksadana*
2. *Jasa Kustodian Efek Beragun Aset*
3. *Jasa Kustodian General Safekeeping*
4. *Jasa Kustodian Surat Berharga Global*
5. *Jasa Kustodian Tapera*
6. *Jasa Kustodian Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund)*

BRI Trust

1. *Payment Agent*
2. *Escrow Agent*
3. *Investment Agent*
4. *Security Agent*

Wali Amanat BRI

1. *Wali Amanat*
2. *Agen Pemantau*
3. *Agen Pembayar*
4. *Agen Jaminan*



BRI Future Investment (BRIFine)

1. PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti)
2. Program Manfaat Lain

Bank Pembayaran KSEI

Bank Administrator RDN

BRI Prioritas

Layanan *Wealth Management* dari BRI untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan dari nasabah terpilih BRI. Dengan konsep *one stop financial solution* dalam mengelola keuangan nasabah yang didukung tenaga pemasar yang profesional dan tersertifikasi, layanan *Wealth Management* BRI menawarkan antara lain produk Reksa Dana, Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, *Saving Bond* Ritel, Sukuk Tabungan, DPLK, dan produk-produk Bancassurance.

Produk Lainnya antara lain:

Dana Sejahtera

1. Dana Investasi Sejahtera (Davestara)
2. Dana Sehat Sejahtera (Dasetera)
3. Dana Investasi Sejahtera Proteksi
4. Dana Investasi Sejahtera Optima

Provest Saving Plan Provestara

1. Provestara Ultima Link
2. Provestara Assurance Link
3. Provestara Smart Health

Telepro

1. Telepro Sehat Optima
2. Telepro Beasiswa Berjangka
3. Telepro Tanggap Prima
4. Telepro Jiwa

Asuransi Mikro (AM)

1. Asuransi Mikro – Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (AM-KKM)
2. Asuransi Mikro – Cepat, Mudah, Murah (AMCAMAR)

Asuransi Jiwa Kredit KPR

1. Asuransi Lengkap Ekonomis Nyaman Sejahtera (Lentera)
2. Asuransi Kerugian Kredit Kendaraan Bermotor
3. Asuransi Kredit

Agen Penjual Reksadana

1. *Sucorinvest Money Market Fund*
2. Ashmore Dana Progresif Nusantara (AII)
3. BNP Paribas Pesona Syariah (AII)
4. Manulife Dana Saham (AII)
5. Reksa Dana BNP Paribas Ekuitas (AII)
6. Reksa Dana Dana Ekuitas Prima (AII)
7. Reksa Dana Danareksa Indeks Syariah (AII)
8. Reksa Dana Danareksa Mawar Konsumer 10 (AII)
9. Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas (AII)
10. Reksa Dana Kresna Indeks 45 (AII)
11. Reksa Dana MNC Dana Ekuitas (AII)

12. Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund (AII)
13. Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (AII)
14. Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund (AII)
15. Syailendra Equity Opportunity Fund (AII)
16. Trim Kapital (AII)
17. Manulife Obligasi Negara Indonesia II (AII)
18. Manulife Pendapatan Bulanan II (AII)
19. Reksa Dana Bahana Makara Prima (AII)
20. Reksa Dana BNP Paribas Prima Utama USD (AII)
21. Reksa Dana Danareksa Melati Pendapatan Utama (AII)
22. Reksa Dana MRS Bond Kresna (AII)
23. Reksa Dana Schroder USD Bond Fund (AII)
24. Reksa Dana Bahana Dana Likuid (AII)
25. Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus (AII)
26. Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus (Reguler)
27. Reksa Dana Danareksa Seruni Pasar Uang II (AII)
28. Reksa Dana Schroder Dana Likuid (Reguler)
29. Reksa Dana Schroder Dana Likuid (AII)
30. Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund (AII)
31. Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund (Reguler)
32. Reksa Dana Syailendra Dana Kas (AII)
33. Reksa Dana Syailendra Dana Kas (Reguler)
34. Reksa Dana Trim Kas 2 (Reguler)
35. Reksa Dana Trim Kas 2 (AII)
36. BNP Paribas Spektra (AII)
37. BNP Paribas Spektra (Reguler)
38. Manulife Dana Campuran II (AII)
39. Manulife Dana Campuran II (Reguler)
40. Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur (Reguler)
41. Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur (AII)
42. Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel (AII)
43. Reksa Dana Danareksa Anggrek Fleksibel (Reguler)
44. Reksa Dana Danareksa Syariah Berimbang (AII)
45. Reksa Dana Kresna Flexima (AII)
46. Reksa Dana Kresna Flexima (Reguler)
47. Reksa Dana MNC Dana Kombinasi (Reguler)
48. Reksa Dana MNC Dana Kombinasi (AII)
49. Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II (AII)
50. Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II (Reguler)
51. Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (AII)
52. Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund (Reguler)
53. Schroder Dana Kombinasi (AII)
54. Schroder Dana Kombinasi (Reguler)
55. Sucorinvest Flexi Fund (AII)
56. Sucorinvest Flexi Fund (Reguler)
57. Trim Kombinasi 2 (Reguler)
58. Trim Kombinasi 2 (AII)
59. Reksa Dana Danareksa Balanced Regular Income Fund
60. Reksa Dana Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap
61. Reksa Dana Hpam Syariah Ekuitas

Agen Penjual Obligasi negara Retail Indonesia (ORI)

Agen Penjual Sukuk Retail

Agen Penjual Saving Bonds Retail

Agen Penjual Saving Sukuk

Safe Deposit Box (SDB) BRI

Layanan Cash Pick Up Nasabah

Surat Referensi Bank

» Peta Wilayah Usaha



Tabel Jaringan Kantor Tahun Selama 5 Tahun Terakhir

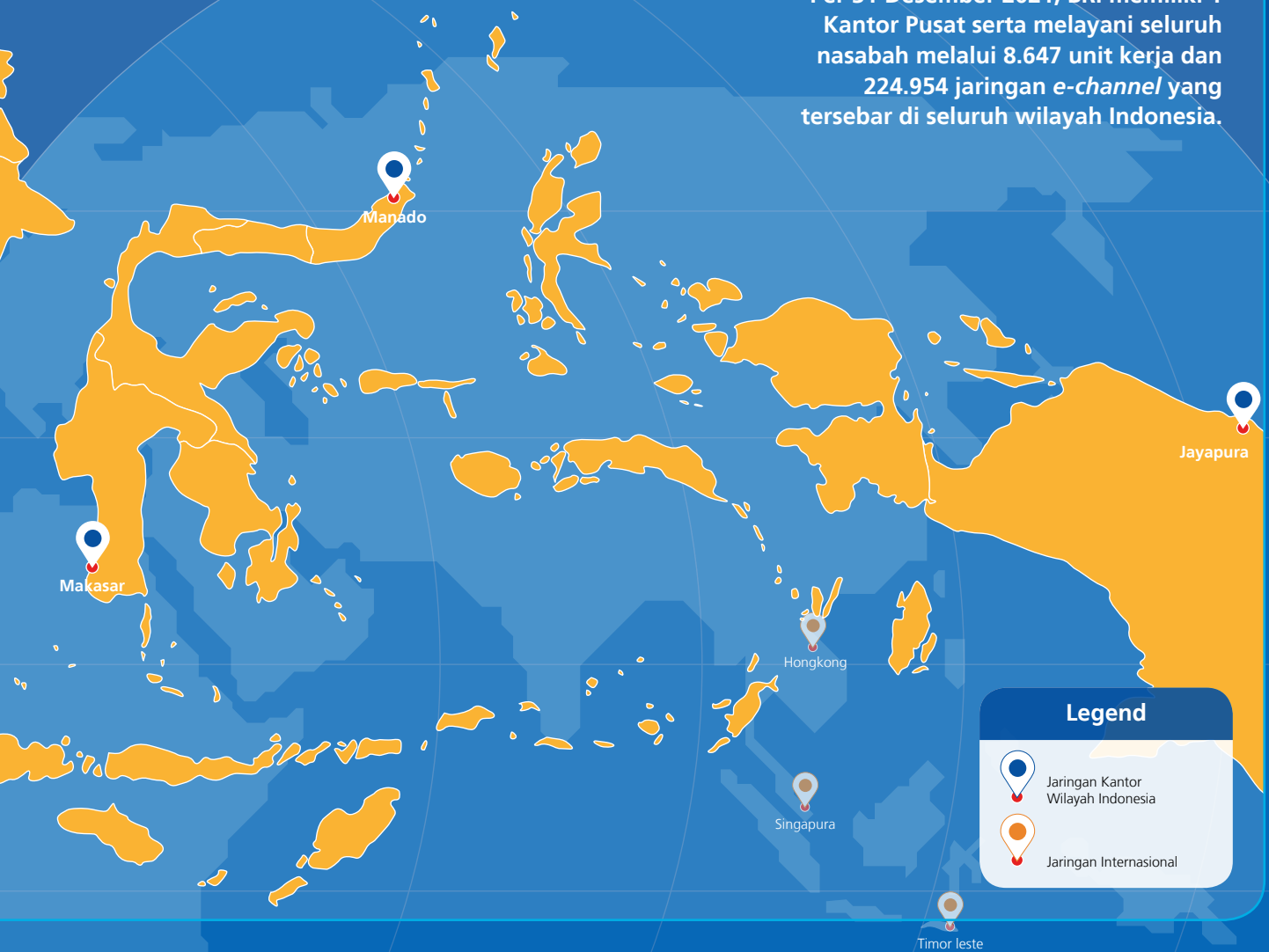
Jenis Kantor	2021	2020	2019	2018*)	2017*)
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Wilayah	18	19	19	19	19
Kantor Cabang	457	467	467	468	468
Kantor Cabang Pembantu	591	611	611	609	610
BRI Unit*	5.222	5.382	5.382	5.381	5.382
Kantor Kas*	525	547	952	964	992
Teras BRI*	1.697	1.867	2.049	2.069	2.536
Teras BRI Keliling*	132	132	133	133	638
Teras BRI Kapal*	4	4	4	3	3
Total	8.647	9.030	9.618	9.647	10.649

* Untuk Kantor Kas terdapat perubahan status SSB (di OJK tercatat sebagai Kantor Kas) menjadi *Payment Point* dengan mekanisme Buka-Tutup sebanyak 384. Sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, disesuaikan bahwa untuk type UKO BRI Unit, Kantor Kas, Teras, Teras Keliling, Teras Kapal termasuk dalam status jenis UKO KCP.

Keterangan: Termasuk jumlah Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Luar Negeri.

Wilayah Operasi, Jaringan Kantor dan E-Channel

Per 31 Desember 2021, BRI memiliki 1 Kantor Pusat serta melayani seluruh nasabah melalui 8.647 unit kerja dan 224.954 jaringan e-channel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



Tabel Jaringan E-Channel selama 5 tahun terakhir

Jenis Kantor	2021	2020	2019	2018	2017
ATM	14.463	16.880	19.184	22.684	24.684
EDC	203.027	198.785	204.386	224.618	302.921
CRM	7.407	5.809	3.809	2.609	1.992
E-Buzz	57	57	57	57	57
Total	224.954	221.531	227.436	309.776	329.654

Tabel Jaringan Kantor Per Wilayah Tahun 2021

Wilayah	Outlet							
	Kantor Wilayah	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	BRI Unit*	Kantor Kas*	Teras BRI*	Teras BRI Keliling*	Teras Kapal*
Bandar Lampung	1	14	16	188	12	57	-	-
Bandung	1	30	40	595	52	175	26	-
Banjarmasin	1	31	31	290	20	112	7	-
Denpasar	1	31	27	298	19	150	4	1
Jakarta 1	1	25	54	96	66	54	-	-
Jakarta 2	1	31	69	191	67	56	21	-
Jakarta 3	1	36	55	260	41	93	-	1
Jayapura	1	13	13	86	10	27	1	-
Makassar	1	36	28	348	20	124	-	-
Malang	1	24	36	528	19	195	5	-
Manado	1	18	17	205	16	48	43	1
Medan	1	24	34	270	27	90	15	-
Padang	1	14	8	157	11	49	-	-
Palembang	1	21	29	234	12	53	-	-
Pekanbaru	1	22	20	171	19	96	1	1
Semarang	1	22	38	421	38	88	-	-
Surabaya	1	25	39	290	17	101	8	-
Yogyakarta	1	33	34	594	55	129	1	-
KCK	-	1	-	-	4	-	-	-
Total	18	451	588	5.222	525	1.697	132	4

* Sesuai dengan POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, disesuaikan bahwa untuk type UKO BRI Unit, Kantor Kas, Teras, Teras Keliling, Teras Kapal termasuk dalam status jenis UKO KCP.

Tabel Jaringan E-Channel Wilayah Tahun 2021

KANTOR WILAYAH	E-CHANNEL			
	ATM	EDC	CRM	E-BUZZ
Bandar Lampung	420	6.489	248	2
Bandung	680	8.329	867	4
Banjarmasin	975	5.122	395	3
Denpasar	762	8.080	411	3
Jakarta 1	906	3.544	297	3
Jakarta 2	1.624	4.558	430	4
Jakarta 3	1.738	4.934	405	4
Jayapura	360	1.996	153	1
Makassar	885	10.324	471	3
Malang	778	8.349	593	3
Manado	508	4.688	228	3
Medan	927	7.290	419	4
Padang	371	3.720	163	2
Palembang	632	5.754	298	3

KANTOR WILAYAH	E-CHANNEL			
	ATM	EDC	CRM	E-BUZZ
Pekanbaru	541	6.610	250	3
Semarang	631	10.037	599	3
Surabaya	653	6.490	494	3
Yogyakarta	1.047	10.487	663	4
KCK	25	193	23	2
Chain	-	18.277	-	-
Kanins	-	7	-	-
Kanpus	-	28.896	-	-
Sendik	-	7	-	-
Program Pemerintah	-	38.202	-	-
Total	14.463	203.027	7.407	57

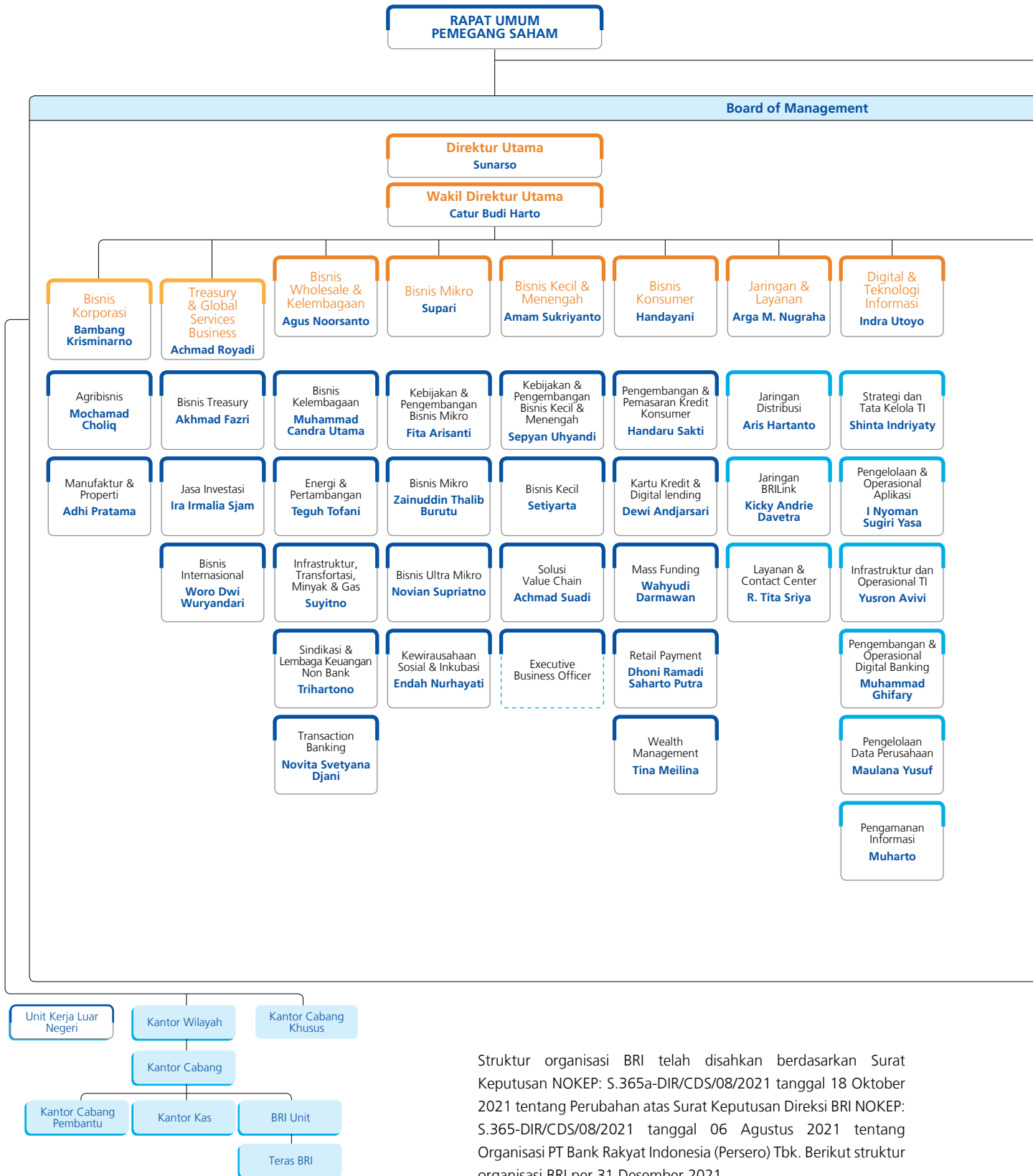
» Daftar Keanggotaan Asosiasi

Keanggotaan BRI pada sejumlah asosiasi yang relevan dengan bisnisnya mempunyai arti strategis bagi perusahaan, yakni dapat mengikuti perkembangan dunia perbankan terkini dan turut berkontribusi terhadap pengetahuan serta pengalaman kepada anggota perusahaan. Keanggotaan BRI dalam berbagai asosiasi tersebut juga mendukung BRI dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Namun demikian BRI tidak memberikan kontribusi secara finansial di luar iuran keanggotaan rutin.

Tabel Keanggotaan Asosiasi

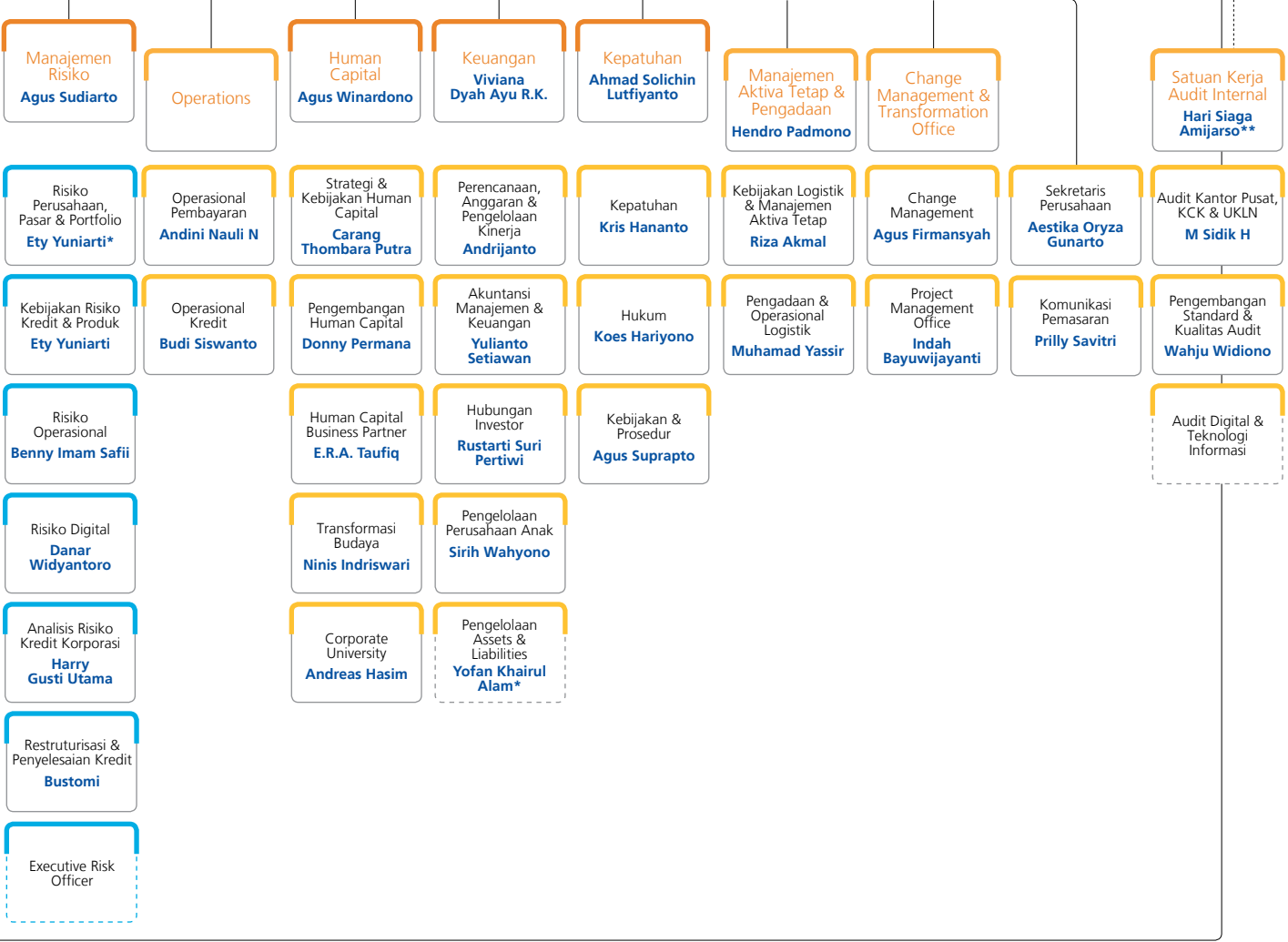
Nama Asosiasi/Forum	Tujuan	Posisi Kesertaan
Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)	Mengembangkan pasar modal Indonesia sebagai industri yang mampu menopang perekonomian nasional.	Ketua
Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas)	Merumuskan kebijakan terkait dengan perbankan.	Wakil Sekretaris Jendral
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP)	Ajang tukar menukar informasi tentang ketentuan/peraturan Bank Indonesia maupun standar internasional perbankan.	Bendahara
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Mengoptimalkan fungsi dan profesionalisme di dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	Anggota Badan Pengawas
Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI)	Mendukung implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko perubahan iklim serta mengambil peluang bisnis dalam ekonomi Indonesia yang berketahanan terhadap perubahan iklim, dan berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	Ketua

» Struktur Organisasi



Struktur organisasi BRI telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan NOKEP: S.365a-DIR/CDS/08/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: S.365-DIR/CDS/08/2021 tanggal 06 Agustus 2021 tentang Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berikut struktur organisasi BRI per 31 Desember 2021.

Dewan Komisaris



Perusahaan Anak

Audit Intern Wilayah

- Direktur
- Bisnis
- SEVP
- Penunjang Bisnis
- Divisi
- Support
- Desk
- Fungsional

Komite Dewan Komisaris : Audit, Nominasi & Remunerasi, Pemantau Manajemen Risiko, Tata Kelola Terintegrasi***
Komite Direksi : Manajemen Risiko, Kebijakan Perkreditan, Kredit, ALCO, Human Capital, TI, Capital & Investment, Produk, Pengadaan Barang & Jasa***
 * Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.)
 ** Menjabat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.
 *** Nama anggota Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi disampaikan pada bagian Tata Kelola Perusahaan

» Profil Direksi



Sunarso
Direktur Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Pasuruan, pada tahun 1963. Usia 58 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Utama BRI untuk pertama kalinya berdasarkan RUPS Luar Biasa pada tanggal 02 September 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.56/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019.



PERIODE MENJABAT

2019 – 2024 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (1988)
- Magister Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia (2002)
- Pendidikan Profesional:
 1. Managing Cyber Risk Post Pandemic, Risk Management Refreshment Program, BARa (2020).
 2. Geopolitic Risk Related to Asia, International Risk Management Refreshment Program, National Chengchi University, Taipei Taiwan and IBI and UGM (2018).
 3. Systemic, Operational, and Infrastructure Risk Management, Università Commerciale Luigi Bocconi, Italy and Erasmus University (2016).
 4. Decision Making for Leaders – Melbourne University, Australia (2014).
 5. Leadership, Strategy and Implementation – Kellogg School of Management, Northwestern University – Evanston, Illinois – USA (2013).
 6. High Performance Leadership – The IMD – Lausanne, Switzerland (2012).
 7. Strategic Business Leadership: Engagement, Performance & Execution – University of Chicago – Graduate School of Business, USA (2011).
 8. Market Driving Strategies – London Business School, UK (2009).
 9. Creative Strategic Thinking for Innovation – Australian Graduates School of Management, University of New South Wales, Sydney Australia (2008).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5



PENGALAMAN KERJA

- Direktur Comercial & Business Banking Bank Mandiri (2010 – 2015).
- Wakil Direktur Utama BRI (2015 – 2017).
- Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) (2017 – 2019).
- Wakil Direktur Utama BRI (2019).
- Direktur Utama BRI (2019 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

1.810.356 lembar



PENGHARGAAN

- The Most Influential People in Southeast Asia - Leading Corporate & Commercial Bankers from Alpha Southeast Asia Magazine (2012).
- The Best SME Banker of The Year 2013 in Asia Pacific The Triple A Awards from The Asset Magazine (Hongkong) (2013).
- The Best CEO diberikan oleh Data GovAi Award.
- Most Admired CEO Award 2018 pada kategori Leadership for Digital Transformation of Pawning Business yang diberikan oleh Warta Ekonomi (2018).
- CEO terbaik dan pemimpin perubahan (transformative leader) dalam kategori Tata Kelola Perusahaan dan Pelayanan yang diberikan oleh 7 Sky Media Award 2018.
- The Best CEO Anugerah BUMN Award 2018 kategori Talent Development (2018).
- Indonesia Humane Entrepreneurship Award 2019.
- The Best CEO Talent Development, Anugerah BUMN Award 2020.
- The Best CEO Visioner Perusahaan Tbk, Anugerah BUMN Award 2020.
- The Best CEO & GRC Leader 2020, GRC & Performance Excellence Award 2020.
- CEO Inovatif Terbaik, IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2020.
- The Best CEO, Bisnis Indonesia TOP BUMN Award 2020.
- Best CEO of The Year kategori Sustainable Development Goals Contribution, MetroTV People of The Year 2020.
- The Best CEO in Banking Transformation, CNBC Indonesia Award 2020.
- Top National Banker 2020 (Tokoh Finansial Indonesia 2020) - Majalah Investor.
- The Best CEO - I News Maker Award 2021 (MNC Televisi Network).
- The Best CEO, Kategori Strategic Orientation Perusahaan (Tbk), 10th Anugerah BUMN 2021.
- The Best CEO perusahaan Tbk - 10th Anugerah BUMN 2021.
- Top CEO Award 2021 - Trans n Co.
- The Best CEO - GRC & Performance Excellence Award (2021).
- The Best CEO - Infobank Award 2021.
- The Best CEO CSR of The Year - Nusantara CSR Award 2021 (La Tofi School of CSR).
- The Best CEO In Value Creation - Infobank Top BUMN 2021.
- Tokoh Keuangan 2021 - Economic Review: Indonesia Finance Award-IV 2021.
- The Most Popular Leader In Social Media 2021 (Kategori Pemimpin BUMN Tbk) - PR Indonesia.
- Infobank Bankers of The Year 2021 - Infobank Top 100 CEO 2021.
- Top National Banker 2021 - Tokoh Finansial Indonesia & BUMN Terbaik 2021 - Majalah Investor, Berita Satu Media Holding.
- Indonesia Most Admired CEO 2021 with Outstanding Leadership in Developing Digital Business Transformation Through Financial Technology - Warta Ekonomi.
- The Best CEO - CNBC Indonesia Award 2021.



Catur Budi Harto

Wakil Direktur Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Demak, pada tahun 1963. Usia 58 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama BRI untuk pertama kalinya berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 02 September 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atas Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.57/ KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019.



PERIODE MENJABAT

2019 – 2024 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Agronomi, Institut Pertanian Bogor (1986)
- Magister Manajemen, Universitas Prasetya Mulya (2002)



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Certified Wealth Manager dari The Certified Wealth Managers' Association



PENGALAMAN KERJA

- Senior Executive Vice President (SEVP) BRI (2016)
- Direktur Comersial Funding, Digital Banking & Distribution BTN (Persero) Tbk (2016 – 2017)
- Direktur Bisnis Kecil & Jaringan BNI (2017 – 2019)
- Wakil Direktur Utama BRI (2019 – sekarang)



KEPEMILIKAN SAHAM

815.957 lembar



Supari
Direktur Bisnis Mikro

Warga negara Indonesia, lahir di Ngawi, pada tahun 1966. Usia 55 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Bisnis Ritel & Menengah BRI untuk pertama kalinya berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: KEP- 34/KDK.03/2018 tanggal 04 Desember 2018. Kemudian dialihkan penugasannya sebagai Direktur Bisnis Mikro pada RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019.



PERIODE MENJABAT

2018 – 2023 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya (1989).
- Magister Manajemen Agribisnis, Universitas Gadjah Mada (2005).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5



PENGALAMAN KERJA

- SEVP UKM Konsumer BRI (2016 – 2017)
- SEVP Manajemen Jaringan BRI (2017)
- SEVP Transformation BRI (2017 – 2018)
- Direktur Bisnis Ritel & Menengah BRI (2018 – 2019)
- Direktur Bisnis Mikro BRI (2019 – sekarang)



KEPEMILIKAN SAHAM

1.923.514 lembar



Amam Sukriyanto
Direktur Bisnis Kecil & Menengah

Warga negara Indonesia, lahir di Situbondo, pada tahun 1968. Usia 53 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Bisnis Kecil & Menengah BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No: 34/KDK.03.2021 tanggal 14 April 2021.



PERIODE MENJABAT

2021 – 2026 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya (1991).
- Master of Business Administration, the University of Adelaide, Australia (2006).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5



PENGALAMAN KERJA

- EVP Bisnis Internasional BRI (2018 – 2020).
- EVP Corporate Secretary Division BRI (2020).
- SEVP Fixed Assets Management & Procurement BRI (2020 – 2021).
- Direktur Bisnis Kecil & Menengah BRI (2021 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

537.454 lembar



Priyastomo*

Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah

Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tahun 1963. Usia 58 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.

*Berhenti menjabat sejak 21 Januari 2021



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2016, dengan jabatan terakhir Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah. Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. SR-105/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016.



PERIODE MENJABAT

2016 – 2021 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1987).
- Magister Management, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2008).



SERTIFIKASI

- Enterprise Risk Management Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Perusahaan (2018).
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 (2019).



PENGALAMAN KERJA

- Pemimpin Wilayah Jayapura PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2012-2014).
- Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).
- Pemimpin Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2016).
- Pemimpin Wilayah Bandung PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016).
- Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016).
- Direktur Human Capital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017).
- Direktur Kredit Mikro dan Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2019).
- Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah BRI (2019 – 2021).



KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Handayani

Direktur Bisnis Konsumer

Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tahun 1965. Usia 56 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.

(Berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 terdapat perubahan nomenklatur yang semula Direktur Konsumer menjadi Direktur Bisnis Konsumer)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Konsumer BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2017. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. KEP-44/ D.03/2018 tanggal 14 Maret 2018.



PERIODE MENJABAT

2017 – 2022 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Airlangga (1988)
- Magister Manajemen, Universitas Padjadjaran (2001)



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5



PENGALAMAN KERJA

- Direktur Marketing & Alternate Distribution PT AXA Mandiri (2013 – 2014).
- Direktur Komersial PT Garuda Indonesia Tbk (2014 – 2016).
- Direktur Consumer Banking BTN (2016 – 2017)
- Direktur Bisnis Konsumer BRI (2017 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

2.459.000 lembar



Viviana Dyah Ayu R.K.
Direktur Keuangan

Warga negara Indonesia, lahir di Surakarta, pada tahun 1978. Usia 43 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Keuangan BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 36/KDK.03.2021 tanggal 14 April 2021.



PERIODE MENJABAT

2021 – 2026 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Peternakan, Institut Pertanian Bogor (2001)
- Master of Business Administration, University of Rochester, USA (2010)



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Certified Financial Planner (FPSB)



PENGALAMAN KERJA

- AVP Planning, Corporate Development & Strategy BRI (2016 – 2017).
- AVP Equity Management, Corporate Development & Strategy BRI (2017 – 2018).
- VP Subsidiary Management Desk BRI (2018 – 2019).
- EVP Subsidiary Management Division BRI (2019 – 2021).
- Direktur Keuangan BRI (2021 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

473.500 lembar



Haru Koesmahargyo*
Direktur Keuangan

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1966. Usia 55 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.

*Berhenti menjabat sejak 21 Januari 2021



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Keuangan BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Tahunan tanggal 19 Maret 2015. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. SR-109/D.03/2015 tanggal 8 Juni 2015.



PERIODE MENJABAT

2015 – 2021 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang (1989).
- MBA, Investment Banking, Emory University, Amerika Serikat (2000).



SERTIFIKASI

- Progressive Value at Risk The Art of Creating Risk Benefits (2002).
- On Integrated Risk management & Risk to Value (2002).
- Risk Management (2002).
- Perspektif Implementasi MR Ops. PD Perbankan di Indonesia (2003).
- Enhanced ALMA: Empowering ALMA With Var Model (2003).
- TOT Sertifikasi Manajemen Risiko Level III (2007).
- Bank Financial Management Stimulation (Banksim) (2010).
- Executive Leadership Program (2017).
- Effective Execution of Organization Strategy (2017).
- ERM Marterclass & Benchmarking in Europe (2017).
- Caping with Complex Digital Society (2019).



PENGALAMAN KERJA

- General Manager, Kantor Cabang New York BRI (2011-2014).
- Kepala Divisi Treasury BRI (2014-2015).
- Presiden Komisaris PT BTMU BRI Finance (2014-2015).
- Direktur Keuangan BRI (2015-2017).
- Direktur Strategi & Keuangan BRI (2017).
- Direktur Strategi Bisnis & Keuangan BRI (2017-2018).
- Direktur Keuangan BRI (2018 – 2021).



KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Indra Utoyo

Direktur Digital & Teknologi Informasi

Warga negara Indonesia, lahir di Bandung, pada tahun 1961. Usia 60 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Keputusan sesuai Surat OJK No. Kep-141/ D. 03/2017 tanggal 19 Juli 2017.



PERIODE MENJABAT

2017 – 2022 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi, Institut Teknologi Bandung (1985).
- Magister Communication and Signal Processing, Imperial College, London, UK (1994).
- Doctor Strategic Management Universitas Indonesia (2019).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5



PENGALAMAN KERJA

- Direktur IT Solution & Supply PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2007 – 2012).
- Komisaris Utama PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra) (2009 – 2016).
- Direktur Digital & Strategic Portfolio Telkom Group PT Telkom (2012 – 2017).
- CEO CFU Digital Service Telkom Group PT Telkom (2016 – 2017).
- Direktur Digital Banking & Teknologi Informasi BRI (2017 – 2018).
- Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi BRI (2018 – 2021).
- Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI (2017 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

2.511.792 lembar



Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Kepatuhan

Warga negara Indonesia, lahir di Malang, pada tahun 1970. Usia 51 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat pertama kali sebagai Direktur BRI sejak tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan. Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan BRI berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatuhan sesuai Surat OJK No. SR-94/PB.12/2021 tanggal 1 April 2021.



PERIODE MENJABAT

2018 – 2023 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Jember (1990).
- Magister Manajemen, Marketing/MIS, UGM/Adger Collage University Norway (1999).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5



PENGALAMAN KERJA

- Wakil Kepala Divisi Jaringan Bisnis Ritel BRI (2012 – 2016).
- Kepala Divisi Transaction Banking BRI (2016 – 2017).
- Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital BRI (2017 – 2018).
- Direktur Kepatuhan BRI (2018 – 2019).
- Direktur Jaringan & Layanan BRI (2019 – 2021).
- Direktur Kepatuhan BRI (2021 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

2.621.270 lembar



Agus Winardono

Direktur Human Capital

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1965. Usia 56 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Human Capital BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 33/KDK.03.2021 tanggal 14 April 2021.



PERIODE MENJABAT

2021 – 2026 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Perusahaan, Universitas Krisna Dwipayana (1988).
- Magister Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Manajemen PPM (2001).



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Certified Wealth Manager dari The Certified Wealth Managers' Association
- Qualified Internal Auditor



PENGALAMAN KERJA

- EVP PT Bringin Karya Sejahtera (2016 – 2018).
- Head of Regional Internal Audit BRI (Padang, Lampung, Jakarta 2) (2018 – 2020).
- CEO of PT Prima Karya Sarana Sejahtera (2020 - 2021).
- Direktur Human Capital BRI (2021 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

509.981 lembar



Herdy Rosadi Harman*
Direktur Human Capital

Warga negara Indonesia, lahir di Bandung, pada tahun 1963. Usia 58 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.

*Berhenti menjabat sejak tanggal 21 Januari 2021.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 59/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019.



PERIODE MENJABAT

2019 – 2021 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Universitas Padjajaran (1986).
- Master of Business Administration (MBA), Asian Institute Management Philippines, Institute Management Bandung (TELKOM University) (1993).
- Master of Law (LLM Program), American University, Washington College of Law (1998).



SERTIFIKASI

- Telecom Fraud 2003 (2003).
- Building Relationship That Works (2010).
- Advance Human Resource Executive Program (2014).
- Human Resource Strategy in Transforming Organisations (2016).



PENGALAMAN KERJA

- VP Regulatory Management PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2007-2012).
- Direktur human Capital Management PT Telekomunikasi Seluler (2012-2014).
- Direktur Human Capital PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2014-2019).
- Staf Khusus V Menteri BUMN Bidang Pengembangan SDM, Kementerian BUMN (2019).
- Direktur Human Capital BRI (2019 – 2021).



KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Agus Sudiarto
Direktur Manajemen Risiko

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1965. Usia 56 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Keputusan sesuai Surat OJK No. 59/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019.



PERIODE MENJABAT

2019 – 2024 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1988).
- Magister Manajemen, Universitas Indonesia (2004).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5



PENGALAMAN KERJA

- Group Head Special Asset Management Bank Mandiri (2010 – 2014).
- Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (2014 – 2017).
- SEVP Special Asset Management Bank Mandiri (2017 – 2019).
- Direktur Manajemen Risiko BRI (2019 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

751.200 lembar



Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan

Warga negara Indonesia, lahir di Pandeglang, pada tahun 1964. Usia 57 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.

(Berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 terdapat perubahan nomenklatur yang semula Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN menjadi Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 59/KDK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019.



PERIODE MENJABAT

2019 – 2024 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Universitas Padjadjaran (1988).
- Magister Manajemen, Institut Pertanian Bogor (1999).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5



PENGALAMAN KERJA

- SEVP Bussiness Small, Medium & Consumer BRI (2016).
- SEVP Jaringan dan Layanan BRI (2016 – 2017).
- Direktur Utama BRI Agro (2017 – 2019).
- Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI (2019 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

899.841 lembar



Arga M. Nugraha
Direktur Jaringan & Layanan

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1980. Usia 41 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Direktur Jaringan & Layanan BRI untuk pertama kalinya berdasarkan Hasil RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 35/KDK.03.2021 tanggal 14 April 2021.



PERIODE MENJABAT

2021 – 2026 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

Tidak memiliki jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknik Informatika, Universitas Bina Nusantara (2003).
- Master of Science, Carnegie Mellon University, USA (2011).



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Certification IS Auditor (NP)



PENGALAMAN KERJA

- AVP Cash Management, Transaction Banking Division BRI (2017 – 2018).
- VP E-Banking, Retail Payment Division BRI (2018 – 2020).
- EVP Brilink Network Division BRI (2020 – 2021).
- Direktur Jaringan & Layanan BRI (2021 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

374.485 lembar

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2021, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi sebagaimana penjelasan berikut:

Komposisi Direksi Sebelum RUPS Luar Biasa Tanggal 21 Januari 2021

Komposisi Direksi sebelum RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI.

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi sebelum RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Sunarso	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 19 Maret 2015 dan diangkat kembali pada RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	8 Juni 2015
Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Supari	Direktur Bisnis Mikro	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018	4 Desember 2018
Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi	OJK	RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017	19 Juli 2017
Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah	OJK	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2016	21 Juni 2016
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Jaringan & Layanan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018	27 Juli 2018
R. Wisto Prihadi	Direktur Kepatuhan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	-
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Handayani	Direktur Konsumer	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2017	14 Maret 2018
Herdy Rosadi Harman	Direktur Human Capital	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019

Komposisi Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tanggal 21 Januari 2021

Pada tanggal 21 Januari 2021, RUPS Luar Biasa memutuskan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

- Menguatkan pemberhentian dengan hormat R. Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang sebelumnya telah diputuskan pemberhentiannya oleh Dewan Komisaris
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - Priyastomo : sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah;
 - Herdy Rosadi Harman : sebagai Direktur *Human Capital*;
 - Haru Koesmahargyo : sebagai Direktur Keuangan.
- Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Semula Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah menjadi Direktur Bisnis Kecil & Menengah.
 - Semula Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi menjadi Direktur Digital & Teknologi Informasi.
- Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - Indra Utoyo, semula Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi menjadi Direktur Digital & Teknologi Informasi
 - Ahmad Solichin Lutfiyanto, semula Direktur Jaringan & Layanan menjadi Direktur Kepatuhan
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - Amam Sukriyanto : sebagai Direktur Bisnis Kecil & Menengah;
 - Agus Winardono : sebagai Direktur *Human Capital*;
 - Viviana Dyah Ayu Retno : sebagai Direktur Keuangan;
 - Arga Mahanana Nugraha : sebagai Direktur Jaringan & Layanan.

Komposisi Direksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI.

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Sunarso	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021
Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Supari	Direktur Bisnis Mikro	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018	4 Desember 2018
Indra Utoyo	Direktur Digital & Teknologi Informasi	OJK	RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017	19 Juli 2017
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil & Menengah	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Jaringan & Layanan	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018, diangkat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	1 April 2021
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Handayani	Direktur Konsumer	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2017	14 Maret 2018
Agus Winardono	Direktur Human Capital	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021

Komposisi Direksi Setelah RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Oktober 2021

Melalui RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021, RUPS memutuskan mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Semula Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN menjadi Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan.
- Semula Direktur Konsumer menjadi Direktur Bisnis Konsumer.

Komposisi Direksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 10 (sepuluh) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI.

Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi setelah RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Sunarso	Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Supari	Direktur Bisnis Mikro	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018	4 Desember 2018
Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	OJK	RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017	19 Juli 2017
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Jaringan & Layanan	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018, diangkat sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	1 April 2021
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 2 September 2019	20 Desember 2019
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2017	14 Maret 2018
Agus Winardono	Direktur Human Capital	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021	14 April 2021

» Profil Dewan Komisaris



Kartika Wirjoatmodjo
Komisaris Utama

Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, pada tahun 1973. Usia 48 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Utama BRI pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.46/ KDK.03/2020 tanggal 03 Juli 2020.



PERIODE MENJABAT

2020 – 2025 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II (2019 – sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2020 – sekarang).



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Universitas Indonesia (tahun 1996).
- Master of Business Administration, Erasmus University, Rotterdam, Belanda (tahun 2001).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5



PENGALAMAN KERJA

- Direktur Utama Bank Mandiri (2016 – 2019).
- Komisaris Utama Bank Mandiri (2019 – 2020).
- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II (2019 – sekarang).
- Komisaris Utama BRI (2020 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

178.300 lembar



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya. Namun memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Rofikoh Rokhim
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Klaten, pada tahun 1971. Usia 50 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2017. Diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.64 /KDK.03/2021 tanggal 30 November 2021.



PERIODE MENJABAT

2017 – 2022 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

- Anggota Komite Audit BRI (2018 – sekarang).
- Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2018 – sekarang).
- Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2021 – sekarang).
- Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2021 – sekarang).



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1993).
- Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994).
- Master Specialist bidang Public Finance dari French Prime Minister, Institute International d' Administration Publique (IIAP)-Ecole National d' Administration (ENA) Paris (2000).
- D.E.A (M.Phil) bidang International and Development Economics dari Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris (2002).
- Ph.D. bidang Economics (Applied Macro and Micro Economics Development Studies in Finance) dari Université de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Paris (2005).
- Pendidikan Profesional: Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (2007), Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (2008-2009), INSEAD (2014), Harvard Kennedy School (2015), Harvard Business School (2016), Wharton Business School (2018), Stanford Graduate School of Business (2018), Said Business School of Oxford (2018), Chicago Booth School of Business (2019), London School of Economics and Political Science (2019), Institute Management Development (2021).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2



PENGALAMAN KERJA

- Dosen dan Peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2006 – sekarang).
- Kepala Bisnis Indonesia Intelligence Unit (2008-2013)
- Komite Manajemen Risiko dan Audit PT Pos Indonesia (2012-2015).
- Satgas Anti Mafia Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2014-2015).
- Komite Pelayanan dan Kepesertaan serta Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi dan SDM BPJS TK (2015-2017).
- Komisaris Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (2015-2017).
- Satgas Dana Desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2016-2017).
- Komisaris Independen BRI (2017 – 2021).
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI (2021 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



Ari Kuncoro*

Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1961. Usia 60 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.

*Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan keputusan RUPST BRI tahun 2020. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.70/KDK.03/2020 tanggal 15 September 2020.



PERIODE MENJABAT

2020 – 2021 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

- BOD East Asian Economist Association (2013 – sekarang).
- Rektor Universitas Indonesia (2019 – sekarang).



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia (1986).
- Master of Arts University of Minnesota, USA (1990).
- Ph.D. in Economics, Brown University, USA (1994).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2



PENGALAMAN KERJA

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2013 – 2019).
- BOD East Asian Economist Association (2013 – sekarang).
- Rektor Universitas Indonesia (2019 – sekarang).
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI (2020 – 2021).



KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Rabin Indrajad Hattari

Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1975. Usia 46 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris BRI pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.54/KDK.03/2020 tanggal 27 Juli 2020.



PERIODE MENJABAT

2020 – 2025 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

- Staf Ahli Perencanaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI (2020 - sekarang).
- Anggota Komite Remunerasi dan SDM, Indonesia Investment Agency (INA) (2021 - sekarang).
- Staff Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN (2021 – sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2020 – sekarang).



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi & Matematika, University of Georgia, USA (1996).
- Magister Manajemen, Universitas Indonesia (2001).
- Ph.D. in Economics, George Mason University, USA (2008).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1



PENGALAMAN KERJA

- Lead Adviser for Australia Indonesia Economic Partnership (2017 - 2018)
- Senior Economist Asian Development Bank (2010 – 2020).
- Staf Khusus V Kementerian BUMN (2020 – 2021).
- Staf Ahli Perencanaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI (2020 - sekarang).
- Anggota Komite Remunerasi dan SDM, Indonesia Investment Agency (INA) (2021 - sekarang).
- Staff Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN (Januari 2021 – sekarang).
- Komisaris BRI (2020 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

160.400 lembar



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya. Namun memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan utama.



Nicolaus Teguh Budi Harjanto

Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Sleman, pada tahun 1972. Usia 49 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris BRI pada tanggal 15 Maret 2017 berdasarkan Hasil RUPST BRI Tahun 2017. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK Nokep-140/D. 03/2017 tanggal 19 Juli 2017.



PERIODE MENJABAT

2017 – 2022 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

- Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan (2016 – sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2017 – sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2017 – sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2020 – sekarang).



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada (1996).
- Master of Arts, Ohio University, USA (2003).
- Ph.D, Perbandingan Politik dan Hubungan Internasional, Northern Illinois University, USA (2010).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2



PENGALAMAN KERJA

- Sekretaris Jenderal Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (API) (2015 – 2019).
- Komisaris PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (2016 – 2017).
- Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan (2016 – sekarang).
- Komisaris BRI (2017 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

849.161 lembar



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



Hadiyanto

Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Ciamis, pada tahun 1962. Usia 59 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris BRI pada tahun 2018 berdasarkan Hasil RUPS Tahunan pada tanggal 22 Maret 2018. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.30/ KDK.03/2018 tanggal 18 September 2018.



PERIODE MENJABAT

2018 – 2023 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

- Direktur Jendral Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021 – sekarang).
- Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2015 – sekarang).
- Dewan Pengawas pada RS Dr. Cipto Mangunkusumo (2016 – sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2018 – sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2021 – sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2018 – sekarang).



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Universitas Padjadjaran (1986).
- Master of Law, Harvard University Law School, USA (1993).
- Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran (2012).



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2.
- Certificate International Tax Program Harvard University.



PENGALAMAN KERJA

- Direktur Jendral Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan (2006 - 2015).
- Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (2007 - 2012).
- Komisaris PT Telkom Tbk (2012 - 2018).
- Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan (2015 – 2021).
- Ketua Dewan Pengawas pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2015 – sekarang).
- Ketua Dewan Pengawas pada RS Dr. Cipto Mangunkusumo (2016 – sekarang)
- Komisaris BRI (2018 – sekarang)
- Direktur Jendral Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2021 – Sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

810.700 lembar



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



R. Widyo Pramono

Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Nganjuk, pada tahun 1957. Usia 64 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.59/KDK.03/2020 tanggal 07 Agustus 2020.



PERIODE MENJABAT

2020 – 2025 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

- Anggota Komite Audit BRI (2020 – sekarang).
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2020 – sekarang).



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Universitas Sebelas Maret (1984).
- Magister Manajemen, STIE IPWI (2001).
- Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada (2007).
- Doktor, Hukum Pidana, Universitas Padjadjaran (2012).
- Profesor/ Guru Besar Tidak Tetap Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (2015).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2



PENGALAMAN KERJA

- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (2013 – 2015).
- Jaksa Agung Muda Pengawasan (2015 – 2017).
- Komisaris Bank Mandiri (2017 – 2020).
- Komisaris Independen BRI (2020 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



Hendrikus Ivo
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1958. Usia 63 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen untuk pertama kalinya BRI pada tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan hasil RUPST BRI Tahun 2019. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK Nokep-41/ KDK.03/2019 tanggal 29 Agustus 2019.



PERIODE MENJABAT

2019 – 2024 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

- Ketua Komite Audit BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2018 – sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2018 – sekarang).



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara (1982).
- Magister Manajemen, STIE IPWI (2000).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3



PENGALAMAN KERJA

- Kepala Kantor Regional 6 wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014).
- Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2014).
- Kepala Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2015).
- Deputi Komisioner Penyidikan & APU PPT Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016).
- Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan SDM Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2017).
- Advisor Senior Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2018).
- Komisaris Independen BRI (2019 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tahun 1966. Usia 55 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No. 2/KDK.03/2021 Tanggal 20 Januari 2021.



PERIODE MENJABAT

2020 – 2025 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2020 – sekarang).



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum, Universitas Pancasila (1990).
- Alumni Lemhanas-40 (2007).
- Magister of Science, Universitas Gadjah Mada (2012).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2



PENGALAMAN KERJA

- Pendiri dan Pimpinan Kantor Rialatifa & Partners (1992 – sekarang).
- Anggota DPR-RI (2014 – 2019).
 - Anggota DPR RI (2000-2004)
 - Anggota DPR RI (2014-2019)
- Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Cairo (2016 – 2020).
- Komisaris Independen BRI (2020 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



Zulnahr Usman
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Medan, pada tahun 1963. Usia 58 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Februari 2020 berdasarkan hasil keputusan RUPST BRI tahun 2020. Efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK atau Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai Surat OJK No.68/KDK.03/2020 tanggal 07 September 2020.



PERIODE MENJABAT

2020 – 2025 (Periode Pertama)



JABATAN RANGKAP

- Anggota Badan Pertimbangan Organisasi HKTl (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Audit BRI (2021 – sekarang).
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI (2020 – sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI (2020 – sekarang).



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Teknik Perminyakan, Universitas Trisakti (1989).



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2



PENGALAMAN KERJA

- Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Kelautan dan Teknologi KADIN INDONESIA (2005 – 2010).
- Wakil Ketua Komite Tetap Industri Penangkapan Hasil Laut, Bidang Kelautan dan Perikanan KADIN INDONESIA (2010 – 2012).
- Ketua Komite Tetap Infrastruktur Energi dan Migas, Bidang Infrastruktur KADIN INDONESIA (2012 – 2014).
- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN INDONESIA) Bidang Infrastruktur (2014 – 2015).
- Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN INDONESIA) (2015 – 2020).
- Ketua Pokja Energi dan Sumber Daya Mineral KEIN R.I (2016 – 2019).
- Anggota Komite Ekonomi dan Industri Republik Indonesia (KEIN R.I) (2016 – 2019).
- President Director/CEO PT Trans Borneo Gas (2019 – 2020).
- Komisaris Independen BRI (2020 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki



Heri Sunaryadi*
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Jember, pada tahun 1965. Usia 56 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.

*Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Diangkat sebagai Komisaris Independen BRI untuk pertama kalinya pada tanggal 07 Oktober 2021 berdasarkan hasil keputusan RUPSLB BRI tahun 2021.



PERIODE MENJABAT

2021 – 2026 (Periode Pertama).



JABATAN RANGKAP

Komisaris Independen, PT Integra Indocabinet Tbk. (2017 - sekarang).



HUBUNGAN AFILIASI

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1987).



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2.
- Sertifikasi Dasar Pembiayaan, PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI).



PENGALAMAN KERJA

- Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2009 – 2013).
- Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2013 – 2014).
- Direktur Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (2014 – 2016).
- Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (2015 – 2018).
- Komisaris Independen PT Indo Premier (2016 – 2021).
- Komisaris PT Merdeka Copper Gold Tbk (2018 – 2021).
- Komisaris Independen PT Solusi Sinergi Digital Tbk (2020-2021).
- Komisaris Independen PT Integra Indo Cabinet Tbk (2017 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

Tidak memiliki

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2021, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris sebagaimana penjelasan berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Sebelum RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Oktober 2021

Komposisi Dewan Komisaris sebelum RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris sebelum RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	3 Juli 2020
Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	15 September 2020
Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2017	24 Januari 2018
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	7 Agustus 2020
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2019	29 Agustus 2019
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	20 Januari 2021
Zulnihar Usman	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	7 September 2020
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	27 Juli 2020
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017	19 Juli 2017
Hadiyanto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018	18 September 2018

Komposisi Dewan Komisaris Setelah RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Oktober 2021

Pada tanggal 7 Oktober 2021, RUPS Luar Biasa memutuskan perubahan susunan pengurus Perseroan sebagai berikut:

1. Memberhentikan Sdr. Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan disebabkan pengunduran diri oleh yang bersangkutan.
2. Mengalihkan penugasan Rofikoh Rokhim yang semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen.
3. Mengangkat Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen.

Sehingga komposisi Dewan Komisaris setelah RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 sebanyak 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris Utama/Komisaris Independen, 5 (lima) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BRI.

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris setelah RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	3 Juli 2020
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021	30 November 2021
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	7 Agustus 2020
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 15 Mei 2019	29 Agustus 2019
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	20 Januari 2021
Zulnihar Usman	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	7 September 2020
Heri Sunaryadi	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021	Masih dalam <i>fit and proper test</i>
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 18 Februari 2020	27 Juli 2020
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 15 Maret 2017	19 Juli 2017
Hadiyanto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 22 Maret 2018	18 September 2018

» Profil Pejabat Eksekutif

Senior Executive Vice President (SEVP)



Achmad Royadi

SEVP Treasury & Global Services

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tahun 1975. Usia 46 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Pembangunan, Universitas Padjajaran (1998).
- MBA in Finance, Tulane University USA (2009).



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

SK NOKEP: 410 – DIR/HCB/07/2021 tentang Promosi Sebagai Senior Executive Vice President Direktorat Treasury & Global Services.



PERIODE MENJABAT

Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 – SK Perubahan berikutnya.



PENGALAMAN KERJA

Menjabat sebagai SEVP Treasury & Global Services BRI sejak Juli 2021. Sebelumnya menjabat sebagai:

- Pj. Kepala Bagian Manajemen Likuiditas Kantor Pusat (2013 – 2014).
- Group Head Global Market Kantor Pusat (2013 – 2014).
- Group Head Derivatives & Product Development Bidang Global Market Kantor Pusat (2014 – 2016).
- Pejabat Level Senior Manager Divisi Kebijakan & Pengembangan Human Capital Kantor Pusat (2016 – 2017).
- Pj. Wakil Kepala Divisi Bidang Strategy & Business Development Divisi Corporate Development & Strategy Kantor Pusat (2017 – 2019)
- Pj. Kepala Divisi Investor Relation Direktorat Strategi & Keuangan Kantor Pusat (2019 – 2021).
- SEVP Treasury & Global Services (2021 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

802,527 lembar



Bambang Krisminarno

SEVP Corporate Banking

Warga negara Indonesia, lahir di Malang, pada tahun 1967. Usia 54 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Tangerang.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum Perdata, Universitas Brawijaya (1990).
- Magister Manajemen, Universitas Gajah Mada (2019).



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

SK NOKEP: 225 – DIR/HCB/05/2021 tentang Promosi Sebagai Senior Executive Vice President Direktorat Corporate Banking.



PERIODE MENJABAT

Terhitung mulai tanggal 01 Mei 2021 – SK Perubahan berikutnya.



PENGALAMAN KERJA

Menjabat sebagai SEVP Corporate Banking BRI sejak Mei 2021. Sebelumnya menjabat sebagai:

- Wapinwil Bidang Bisnis Regional Office Jakarta 1 (2016).
- Pj. Kepala Divisi Agribisnis Kantor Pusat (2016 – 2017).
- Pj. Kepala Divisi Bisnis Komersial Kantor Pusat (2017 – 2018).
- Pejabat Level Executive Vice President PT Bank Agroniaga Tbk (2018 – 2019).
- Kepala Divisi Bisnis Ritel Kantor Pusat (2019).
- Kepala Divisi Bisnis Korporasi Kantor Pusat (2019 – 2020).
- Executive Vice President Corporate Banking 1 Kantor Pusat (2020).
- Executive Vice President Corporate Banking 2 Kantor Pusat (2020).
- SEVP Corporate Banking (2021 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

518,128 lembar



Hendro Padmono

SEVP Fixed Assets Management & Procurement

Warga negara Indonesia, lahir di Wonogiri, pada tahun 1967. Usia 54 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Sleman.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Teknologi Pertanian, Universitas Gajah Mada (1991)
- Manajemen Pemasaran, Universitas Gajah Mada (2012).



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

SK NOKEP: 178 – DIR/HCB/04/2021 tentang Promosi Sebagai Senior Executive Vice President Direktorat Fixed Asset Management & Procurement.



PERIODE MENJABAT

Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2021 – SK Perubahan berikutnya.



PENGALAMAN KERJA

Menjabat sebagai SEVP Fixed Assets Management & Procurement BRI sejak Maret 2021. Sebelumnya menjabat sebagai:

- Pemimpin Cabang Kantor Cabang Yogyakarta Cik Ditiro Kantor Wilayah Yogyakarta (2010 – 2013).
- Pemimpin Cabang Kantor Cabang Jakarta Kebayoran Baru Kantor Wilayah Jakarta 2 (2013 – 2014).
- Pj. Wapinwil Bidang Bisnis Regional Office Semarang (2014 – 2016).
- Wapinwil Bidang Bisnis Kantor Wilayah Jakarta 1 (2016 – 2017).
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis Regional Office Jakarta 1 (2017).
- Pj. Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Menengah Kantor Pusat (2017 – 2018).
- Pj. Kepala Divisi Bisnis Ritel Kantor Pusat (2018 – 2019).
- Pemimpin Wilayah Regional Office Bidang Jaringan & Layanan Regional Office Bandung (2019 – 2020).
- Pemimpin Wilayah Regional Office Bidang Jaringan & Layanan Regional Office Jakarta 2 (2020 – 2021).
- SEVP Fixed Assets Management & Procurement (2021 – sekarang).



KEPEMILIKAN SAHAM

985,400 lembar

Eselon 1 dan Unit Kerja BRI

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
Regional CEO	
Wahyu Sulistiyono	Regional Office Semarang
Triswahju Herlina	Regional Office Surabaya
Prasetya Sayekti	Regional Office Malang
Rudy Andimono	Regional Office Denpasar
Budhi Novianto	Regional Office Medan
Mohamad Fikri Satriawan	Regional Office Makassar
Nazaruddin	Regional Office Banjarmasin
Wahju Hidayat	Regional Office Yogyakarta
Mochammad Suratin	Regional Office Pekanbaru
Hari Purnomo	Regional Office Bandar Lampung
Anto Ariyanto	Regional Office Palembang
John Sarjono	Regional Office Manado
Rudhy Sidharta	Regional Office Jakarta 1
Hery Santoso	Regional Office Jakarta 2
Ariesta Krisnawan	Regional Office Jakarta 3
Narto Laksono	Regional Office Padang
Ida Bagus Ketut Subagia	Regional Office Bandung
Akhmad Purwakajaya	Kantor Cabang Khusus

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
Division Head	
Bustomi	Credit Restructuring & Recovery Loan Division
Donny Permana	Human Capital Development Division
Yusron Avivi	IT Infrastructure & Operation Division
Muhamad Yassir	Procurement & Logistic Operation Division
Tina Meilina	Wealth Management Division
Novita Svetiana Djani	Transaction Banking Division
I Nyoman Sugiri Yasa	Application Management & Operation Division
Muhamad Sidik Heruwibowo	Audit Intern Kantor Pusat
Handaru Sakti	Consumer Lending, Sales & Development Division
Andrijanto	Corporate Development & Strategy Division
Aestika Oryza Gunarto	Corporate Secretary Division
Ninis Indriswari	Culture Transformation Division
Ira Irmalia Sjam	Investment Services Division
Aris Hartanto	Distribution Network Division
Yulianto Setiawan	Financial & Management Accounting Division
Riza Akmal	Fixed Assets Management & Procurement Policy Division
Carang Thombara Putra	Human Capital Strategy & Policy Division

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
Audit Intern	
Muhamad Sidik Heruwibowo	Audit Intern Kantor Pusat
Anik Hidayati	Audit Intern Jakarta 2
Yudi Priambodo P.	Audit Intern Manado
R. Tetuko Setyo Tjahyono	Audit Intern Medan
Donny Himawan Ratri D.	Audit Intern Bandung
Mahmud Fathoni	Audit Intern Makassar
Arif Suhirman	Audit Intern Jayapura
Puguh Puji Wibowo	Audit Intern Pekanbaru
Djoko Purwanto	Audit Intern Denpasar
Ruslina Harsono	Audit Intern Padang
Widodo Hery Suryanto	Audit Intern Yogyakarta
Ely Sofyan	Audit Intern Surabaya
Rahman Arif	Audit Intern Palembang
Helmi Nasser	Audit Intern Malang
Muhammad Fauzi	Audit Intern Bandar Lampung
Kaspiyah	Audit Intern Semarang
Yoyok Mulawarman	Audit Intern Jakarta 3

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
Division Head	
Suyitno	Infrastructure, Transportation, Oil & Gas Division
Wahju Widiono	Audit Standard & Quality Development Division
Koes Hariyono	Legal Division
Prilly Savitri	Marketing Communication Division
Agus Suprpto	Policy & Procedure Division
Basuki Prabowo	Medium Business 2 Division
Andini Nauli Nasution	Payment Operation Division
Dhoni Ramadi Saharto Putra	Retail Payment Division
R. Tita Sriyati	Service & Contact Center Division
Sepyan Uhyandi	Small & Medium Business Development Division
Sandra Chalik	Tim Implementasi BRI Financial Enterprise System
Akhmad Fazri	Treasury Business Division
Harry Gusti Utama	Wholesale Credit Risk Analyst Division
Andreas Hassim	Corporate University
Mochamad Choliq	Agribusiness Division
Budi Siswanto	Credit Operation Division
Dewi Andjarsari	Card & Digital Lending Division
Agus Firmansyah	Change Management Division

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
Division Head	
Kris Hananto	Compliance Division
E.R.A. Taufiq	Human Capital Business Partner Division
Danar Widiantoro	Digital Risk Division
Teguh Tofani	Energy & Mining Division
Maulana Yusuf	Enterprise Data Management Division
Endah Nurhayati	Social Entrepreneurship & Incubation Division
Muharto	Information Security Division
Setiyarta	Small Sales Management Division
Muhammad Candra Utama	Institutional Business Division
Trihartono	International Business Division
Rustarti Suri Pertiwi	Investor Relation Division
Adhi Pratama	Manufacturing & Property Division
Wahyudi Darmawan	Mass Funding Division
Zainuddin Thalib Burutu	Micro Sales Management Division
Indah Bayuwijayanti	Project Management Office Division
Kicky Andrie Davetra	BRILink Network Division
Benny Imam Safii	Digital & Operation Risk Management Division

Pemimpin Unit Kerja	Unit Kerja
Division Head	
Novian Supriatno	Ultra Micro Business Division
Achmad Suadi	Value Chain Solution Division
Ety Yuniarti	Credit & Product Risk Policy Division
Shinta Indriyaty	IT Strategy & Governance Division
Brahmoko Kristiaji	Medium Business 1 Division
Fita Arisanti	Micro Business Development Division
Muhammad Ghifary	Digital Banking Development & Operation Division
Donny Permana	Human Capital Development Division
Yusron Avivi	IT Infrastructure & Operation Division
Benny Imam Safii	Risiko Operasional
Andrijanto	Perencanaan, Anggaran & Pengelolaan Kinerja
Sirih Wahyono	Pengelolaan Perusahaan Anak
Trihartono	Bisnis Internasional
Yofan Khairul Alam	Pengelolaan Assets & Liabilities

» Profil dan Pengembangan Kompetensi Karyawan

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2021	2020
Wanita	34.364	37.354
Pria	48.354	50.830
Jumlah	82.718	88.184

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

(dalam satuan orang)

Level Jabatan	2021			2020		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
Senior Executive Vice President	-	3	3	2	3	5
Executive Vice President	10	59	69	89	13	102
Vice President/Senior Vice President	40	182	222	161	31	192



Level Jabatan	2021			2020		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
Assistant Vice President	119	383	502	310	76	386
Senior Manager	158	587	745	639	202	841
Manager	495	1.520	2.015	1.238	391	1.629
Assistant Manager	1.032	3.662	4.694	4.005	1.120	5.125
Officer	4.461	9.127	13.588	8.850	4.319	5.125
Assistant	28.049	32.831	60.880	35.536	31.199	66.735
Jumlah	34.364	48.354	82.718	37.354	50.830	88.184

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2021			2020		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
20 – 24	823	515	1.338	2.081	1.199	3.280
25 – 29	8.802	8.738	17.540	11.350	11.448	22.798
30 – 34	13.975	19.849	33.824	13.990	20.407	34.397
35 – 39	4.990	9.286	14.276	4.098	7.792	11.890
40 – 44	2.578	4.745	7.323	2.346	4.307	6.653
45 – 49	1.250	2.131	3.381	1.407	2.224	3.631
50 – 54	1.623	2.581	4.204	1.745	2.815	4.560
> 54	323	509	832	337	638	975
Jumlah	34.364	48.354	82.718	37.354	50.830	88.184

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2021			2020		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
≤ SLTA / Setingkat	523	697	1.220	646	883	1.529
Diploma	5.165	5.327	10.492	5.433	5.493	10.926
Strata 1	28.283	41.188	69.471	30.885	43.311	74.196
Strata 2	393	1.135	1.528	388	1.139	1.527
Strata 3	-	7	7	2	4	6
Jumlah	34.364	48.354	82.718	37.354	50.830	88.184

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2021			2020		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
Pekerja Tetap	20.142	40.843	60.985	20.378	42.010	62.388
Pekerja Kontrak	14.164	7.456	21.620	16.923	8.773	25.696

Status Kepegawaian	2021			2020		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
Trainee	58	55	113	53	47	100
Outsourcing	4.578	25.966	30.544	5.277	27.636	32.913
Jumlah	38.942	74.320	113.262	42.631	78.466	121.097

Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Generasi

(dalam satuan orang)

Generasi	2021			2020		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
Baby Boomers	1	12	13	34	64	98
Gen X	4.534	7.684	12.218	5.115	8.715	13.830
Millennials	27.782	39.258	67.040	30.162	40.877	71.039
Gen Z	2.047	1.400	3.447	2.043	1.174	3.217
Jumlah	34.364	48.354	82.718	37.354	50.830	88.184

Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

Tabel Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

(dalam satuan orang)

Masa Kerja	2021			2020		
	Wanita	Pria	Total	Wanita	Pria	Total
< 3	15.855	12.257	28.112	19.107	14.774	33.881
3 – 5	4.226	8.429	12.655	5.602	11.460	17.062
6 – 10	7.705	16.769	24.474	5.545	13.185	18.730
11 – 15	938	2.240	3.178	1.298	2.510	3.808
16 – 20	2.532	3.962	6.494	2.349	3.708	6.057
21 – 25	1.152	2.051	3.203	1.263	2.197	3.460
26 – 30	964	1.370	2.334	1.465	1.982	3.447
> 30	992	1.276	2.268	725	1.014	1.739
Jumlah	34.364	48.354	82.718	37.354	50.830	88.184

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Kebijakan

BRI telah memiliki kebijakan terkait pelaksanaan pengembangan kompetensi karyawan. Kebijakan tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Nomor KEP.013/PHIJSK-PK/PKB//2020 pada pasal 13 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam rangka mengembangkan kompetensi Pekerja, maka perusahaan memberikan hak kepada Pekerja untuk memperoleh pendidikan, pelatihan dan pengembangan Pekerja, baik di dalam Perusahaan maupun di luar Perusahaan, di dalam negeri maupun di luar negeri minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perusahaan.”

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan

Tabel Pengembangan Kompetensi per Level Jabatan

No.	Level Jabatan	Jenis Pelatihan		Tujuan Pelatihan	Jumlah Pekerja	Jumlah Pekerja yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	
1	Senior Executive Vice President	Enhancement	IHT <i>Special Request/Public Course</i> Dalam Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di dalam negeri.	3	2	100%	
			Executive <i>Education/Public Course</i> Luar Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di luar negeri.		2		
		FGD	FGD	Wadah partisipasi secara aktif Pekerja dalam kegiatan penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja.		1		
2	Executive Vice President	Enhancement	BBOP/BIP/BSDP 0	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan calon pekerja/pekerja yang akan menduduki suatu jabatan tertentu menjadi spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.	69	7	100%	
			BSDP (1, 2, 3)	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		14		
			IHT <i>Special Request/Public Course</i> Dalam Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di dalam negeri.		68		
			Sertifikasi	Program pendidikan untuk kegiatan sertifikasi yang bersifat <i>mandatory</i> sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak regulator dan sertifikasi lain yang ditetapkan perusahaan.		18		
			Executive <i>Education/Public Course</i> Luar Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di luar negeri.		5		
			BLRP	Program persiapan memasuki pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam menjalani masa pensiun.		1		
			E-Learning	E-Learning		Pendidikan bermetode internet/teknologi sebagai alat penyampaian materi dan interaksi sesama peserta pendidikan.		59
			FGD	FGD		Wadah partisipasi secara aktif Pekerja dalam kegiatan penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja.		55
			Sosialisasi	Sosialisasi		Kegiatan penyampaian informasi mengenai kebijakan, ketentuan, program kegiatan, dan informasi penting terkait perkembangan bisnis melalui kegiatan presentasi di masing-masing unit kerja.		19

No.	Level Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pekerja	Jumlah Pekerja yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	
3	Vice President/ Senior Vice President	Development	BLDP	Program persiapan <i>Great Leader</i> melalui pengembangan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan perbankan, serta wawasan teknologi.	222	34	99,5%
			BSEP	Program persiapan <i>Top Talent</i> dalam BRILian <i>Society Member Band 2</i> dan 1 untuk menghadapi peran leader yang lebih kompleks.		10	
		Enhancement	BSDP (1, 2, 3)	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		69	
			IHT <i>Special Request/Public Course</i> Dalam Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di dalam negeri.		219	
			Sertifikasi	Program pendidikan untuk kegiatan sertifikasi yang bersifat <i>mandatory</i> sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak regulator dan sertifikasi lain yang ditetapkan perusahaan.		77	
			<i>Executive Education/Public Course</i> Luar Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di luar negeri.		8	
			BBOP/BIP/BSDP 0	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan calon pekerja/pekerja yang akan menduduki suatu jabatan tertentu menjadi spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		2	
			BLRP	Program persiapan memasuki pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam menjalani masa pensiun.		2	
			E-Learning	<i>E-Learning</i>		Pendidikan bermetode internet/teknologi sebagai alat penyampaian materi dan interaksi sesama peserta pendidikan.	
		FGD	FGD	Wadah partisipasi secara aktif Pekerja dalam kegiatan penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja.		171	
		Sosialisasi	Sosialisasi	Kegiatan penyampaian informasi mengenai kebijakan, ketentuan, program kegiatan, dan informasi penting terkait perkembangan bisnis melalui kegiatan presentasi di masing-masing unit kerja.		44	

No.	Level Jabatan	Jenis Pelatihan		Tujuan Pelatihan	Jumlah Pekerja	Jumlah Pekerja yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	
4	Assistant Vice President	Development	BLDP	Program persiapan Great Leader melalui pengembangan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan perbankan, serta wawasan teknologi	502	128	100,0%	
			BBOP/BIP/BSDP 0	Program pengembangan Technical Competency spesifik untuk mempersiapkan calon pekerja/pekerja yang akan menduduki suatu jabatan tertentu menjadi spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		12		
		Enhancement	BSDP (1, 2, 3)	Program pengembangan Technical Competency spesifik untuk mempersiapkan spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		317		
			IHT Special Request/Public Course Dalam Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di dalam negeri.		481		
			Sertifikasi	Program pendidikan untuk kegiatan sertifikasi yang bersifat mandatory sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak regulator dan sertifikasi lain yang ditetapkan perusahaan.		112		
			Executive Education/Public Course Luar Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di luar negeri.		2		
			BBSP	Program Pendidikan untuk Pekerja tetap BRI untuk mengejar gelar Master disponsori BRI.		2		
			BLRP	Program persiapan memasuki pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam menjalani masa pensiun.		3		
			E-Learning	E-Learning		Pendidikan bermetode internet/teknologi sebagai alat penyampaian materi dan interaksi sesama peserta pendidikan.		467
			FGD	FGD		Wadah partisipasi secara aktif Pekerja dalam kegiatan penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja.		455
Sosialisasi	Sosialisasi	Kegiatan penyampaian informasi mengenai kebijakan, ketentuan, program kegiatan, dan informasi penting terkait perkembangan bisnis melalui kegiatan presentasi di masing-masing unit kerja.	111					

No.	Level Jabatan	Jenis Pelatihan		Tujuan Pelatihan	Jumlah Pekerja	Jumlah Pekerja yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan
5	Senior Manager	Development	BLDP	Program persiapan <i>Great Leader</i> melalui pengembangan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan perbankan, serta wawasan teknologi.	745	222	99,5%
			BBOP/BIP/BSDP 0	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan calon pekerja/pekerja yang akan menduduki suatu jabatan tertentu menjadi spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		14	
		Enhancement	BSDP (1, 2, 3)	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		465	
			IHT <i>Special Request/Public Course</i> Dalam Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di dalam negeri.		712	
			Sertifikasi	Program pendidikan untuk kegiatan sertifikasi yang bersifat <i>mandatory</i> sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak regulator dan sertifikasi lain yang ditetapkan perusahaan.		292	
			BBSP	Program Pendidikan untuk Pekerja tetap BRI untuk mengejar gelar Master disponsori BRI.		5	
		E-Learning	E-Learning	Pendidikan bermetode internet/teknologi sebagai alat penyampaian materi dan interaksi sesama peserta pendidikan.		686	
		FGD	FGD	Wadah partisipasi secara aktif Pekerja dalam kegiatan penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja.		612	
Sosialisasi	Sosialisasi	Kegiatan penyampaian informasi mengenai kebijakan, ketentuan, program kegiatan, dan informasi penting terkait perkembangan bisnis melalui kegiatan presentasi di masing-masing unit kerja.	190				

No.	Level Jabatan	Jenis Pelatihan		Tujuan Pelatihan	Jumlah Pekerja	Jumlah Pekerja yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan
6	Manager	Development	BLDP	Program persiapan <i>Great Leader</i> melalui pengembangan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan perbankan, serta wawasan teknologi.	2.015	964	99,7%
			BBOP/BIP/BSDP 0	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan calon pekerja/pekerja yang akan menduduki suatu jabatan tertentu menjadi spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		152	
		Enhancement	BSDP (1, 2, 3)	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		1.348	
			IHT <i>Special Request/Public Course</i> Dalam Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di dalam negeri.		1.768	
			Sertifikasi	Program pendidikan untuk kegiatan sertifikasi yang bersifat <i>mandatory</i> sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak regulator dan sertifikasi lain yang ditetapkan perusahaan.		647	
			<i>Executive Education/Public Course</i> Luar Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di luar negeri.		2	
			BBSP	Program Pendidikan untuk Pekerja tetap BRI untuk mengejar gelar Master disponsori BRI.		11	
			BLRP	Program persiapan memasuki pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam menjalani masa pensiun.		7	
			E-Learning	E-Learning		Pendidikan bermetode internet/teknologi sebagai alat penyampaian materi dan interaksi sesama peserta pendidikan.	
		FGD	FGD	Wadah partisipasi secara aktif Pekerja dalam kegiatan penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja.		1.738	
		Sosialisasi	Sosialisasi	Kegiatan penyampaian informasi mengenai kebijakan, ketentuan, program kegiatan, dan informasi penting terkait perkembangan bisnis melalui kegiatan presentasi di masing-masing unit kerja.		439	

No.	Level Jabatan	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Pekerja	Jumlah Pekerja yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	
7	Assistant Manager	Development	BLDP	Program persiapan <i>Great Leader</i> melalui pengembangan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan perbankan, serta wawasan teknologi.	4.694	2.037	99,7%
			BNLP	Program persiapan pekerja baru sumber internal untuk <i>level Corporate Title Officer</i> .		3	
			BFLP	Program persiapan pekerja baru sumber eksternal untuk <i>level Corporate Title Officer</i> .		2	
		Enhancement	BBOP/BIP/BSDP 0	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan calon pekerja/pekerja yang akan menduduki suatu jabatan tertentu menjadi spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		438	
			BSDP (1, 2, 3)	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		3.713	
			IHT <i>Special Request/Public Course</i> Dalam Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di dalam negeri.		4.058	
			Sertifikasi	Program pendidikan untuk kegiatan sertifikasi yang bersifat <i>mandatory</i> sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak regulator dan sertifikasi lain yang ditetapkan perusahaan.		852	
			<i>Executive Education/Public Course</i> Luar Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di luar negeri.		1	
			BBSP	Program Pendidikan untuk Pekerja tetap BRI untuk mengejar gelar Master disponsori BRI.		4	
			BLRP	Program persiapan memasuki pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam menjalani masa pensiun.		106	
			E-Learning	E-Learning		Pendidikan bermetode internet/teknologi sebagai alat penyampaian materi dan interaksi sesama peserta pendidikan.	
		FGD	FGD	Wadah partisipasi secara aktif Pekerja dalam kegiatan penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja.		3.976	
		Sosialisasi	Sosialisasi	Kegiatan penyampaian informasi mengenai kebijakan, ketentuan, program kegiatan, dan informasi penting terkait perkembangan bisnis melalui kegiatan presentasi di masing-masing unit kerja.		774	

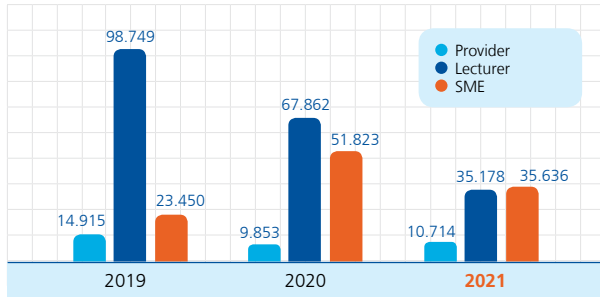
No.	Level Jabatan	Jenis Pelatihan		Tujuan Pelatihan	Jumlah Pekerja	Jumlah Pekerja yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan
8	Officer	Development	BLDP	Program persiapan <i>Great Leader</i> melalui pengembangan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan perbankan, serta wawasan teknologi.	13.588	1.987	99,9%
			BNLP	Program persiapan pekerja baru sumber internal untuk <i>level Corporate Title Officer</i> .		16	
			BFLP	Program persiapan pekerja baru sumber eksternal untuk <i>level Corporate Title Officer</i> .		196	
		Enhancement	BBOP/BIP/BSDP 0	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan calon pekerja/pekerja yang akan menduduki suatu jabatan tertentu menjadi spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		1.113	
			BSDP (1, 2, 3)	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		12.462	
			IHT <i>Special Request/Public Course</i> Dalam Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di dalam negeri.		11.579	
			Sertifikasi	Program pendidikan untuk kegiatan sertifikasi yang bersifat <i>mandatory</i> sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak regulator dan sertifikasi lain yang ditetapkan perusahaan.		1.133	
			<i>Executive Education/Public Course</i> Luar Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di luar negeri.		2	
			BLRP	Program persiapan memasuki pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam menjalani masa pensiun.		139	
			E-Learning	E-Learning		Pendidikan bermetode internet/teknologi sebagai alat penyampaian materi dan interaksi sesama peserta pendidikan.	
		FGD	FGD	Wadah partisipasi secara aktif Pekerja dalam kegiatan penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja.		11.758	
		Sosialisasi	Sosialisasi	Kegiatan penyampaian informasi mengenai kebijakan, ketentuan, program kegiatan, dan informasi penting terkait perkembangan bisnis melalui kegiatan presentasi di masing-masing unit kerja.		2.612	

No.	Level Jabatan	Jenis Pelatihan		Tujuan Pelatihan	Jumlah Pekerja	Jumlah Pekerja yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan
9	Assistant	Development	BLDP	Program persiapan Great Leader melalui pengembangan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan perbankan, serta wawasan teknologi.	60.880	15	98,8%
			BNLP	Program persiapan pekerja baru sumber internal untuk <i>level Corporate Title Officer</i> .		25	
		Enhancement	BBOP/BIP/BSDP 0	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan calon pekerja/pekerja yang akan menduduki suatu jabatan tertentu menjadi spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		5.475	
			BSDP (1, 2, 3)	Program pengembangan <i>Technical Competency</i> spesifik untuk mempersiapkan spesialis sesuai kebutuhan perusahaan.		52.130	
			IHT <i>Special Request/Public Course</i> Dalam Negeri	Program pendidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga di luar BRI Corporate University diadakan di dalam negeri.		34.545	
			Sertifikasi	Program pendidikan untuk kegiatan sertifikasi yang bersifat <i>mandatory</i> sesuai ketentuan yang ditetapkan pihak regulator dan sertifikasi lain yang ditetapkan perusahaan.		6.294	
			BLRP	Program persiapan memasuki pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam menjalani masa pensiun.		50	
			E-Learning	E-Learning		Pendidikan bermetode internet/teknologi sebagai alat penyampaian materi dan interaksi sesama peserta pendidikan.	
		FGD	FGD	Wadah partisipasi secara aktif Pekerja dalam kegiatan penciptaan strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan kinerja setiap unit kerja.		50.020	
		Sosialisasi	Sosialisasi	Kegiatan penyampaian informasi mengenai kebijakan, ketentuan, program kegiatan, dan informasi penting terkait perkembangan bisnis melalui kegiatan presentasi di masing-masing unit kerja.		6.936	
		JUMLAH TOTAL					

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

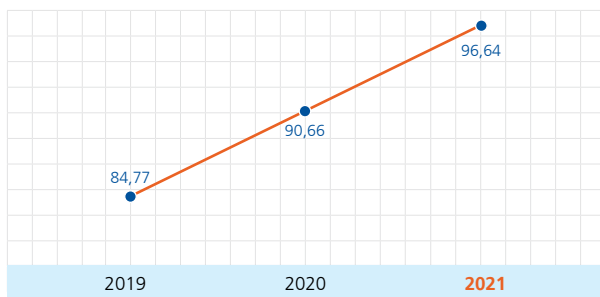
Dalam melaksanakan evaluasi efektifitas pengembangan kompetensi, BRI Corporate University menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:

Sesi Mengajar



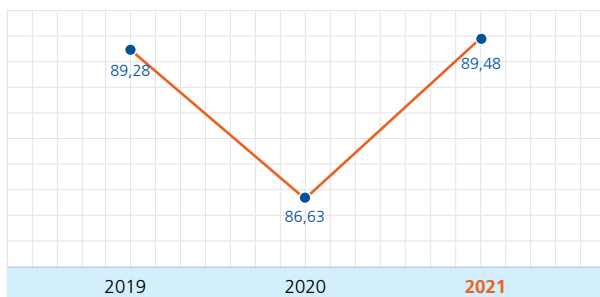
Pada tahun 2019, pendidikan intensif dilakukan secara *offline* melalui sesi *lecturing* yang fokus pada pengajaran *Lecturer*. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mendorong transisi menuju pembelajaran *distance learning*, *new way of learning*, dan *blended learning* yang berdampak penurunan sesi mengajar oleh *Lecturer* dan peningkatan pengajaran oleh *Subject Matter Expert*. Pada tahun 2021, penerapan pembelajaran *self learning* dan modular lebih difokuskan dan berdampak penurunan sesi mengajar.

Evaluasi Level 01



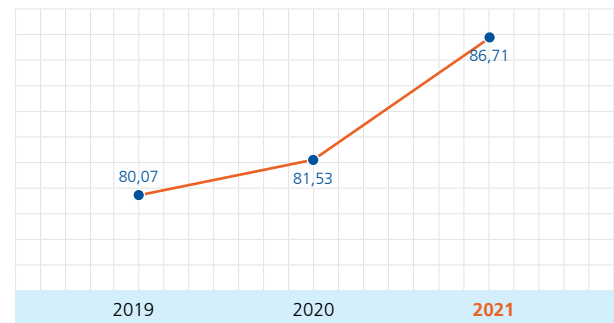
Penerapan metode pendidikan baru pada tahun 2020 dan 2021 berdampak positif terhadap *feedback* peserta terhadap bahan ajar, pengajar, dan fasilitator kelas (Eva 01).

Evaluasi Level 02



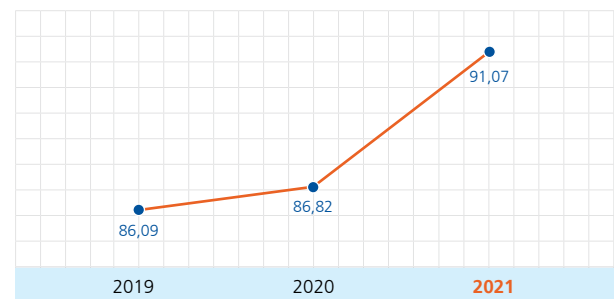
Pada tahun 2020, peserta pendidikan masih berusaha untuk beradaptasi terhadap penerapan jenis pendidikan baru dan membutuhkan penyesuaian. Pada tahun 2021, peserta pendidikan sudah dapat beradaptasi dengan baik dan mengalami peningkatan terhadap hasil evaluasi nilai peserta (Eva 02).

Evaluasi Level 03



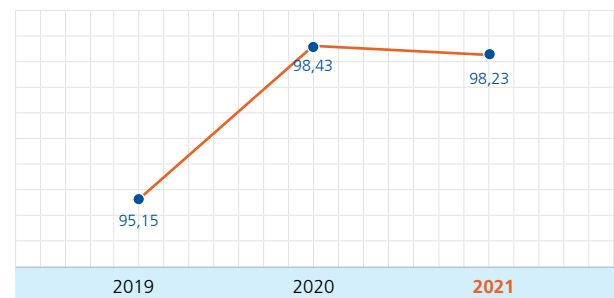
Dalam tahun berjalan, peningkatan perilaku peserta melalui aplikatif pembelajaran yang diterapkan (Eva 03) peserta dapat terlihat.

Total Evaluation



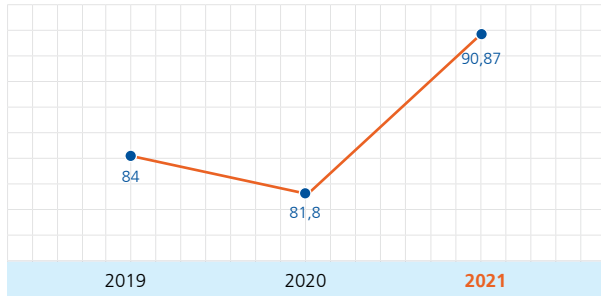
Dalam tahun berjalan, peningkatan pada evaluasi level 1, level 2, dan level 3 secara rata-rata dapat terlihat.

E-Learning



Dalam tahun berjalan, peserta pendidikan dapat beradaptasi dengan baik terhadap pengerjaan materi-materi *E-Learning*.

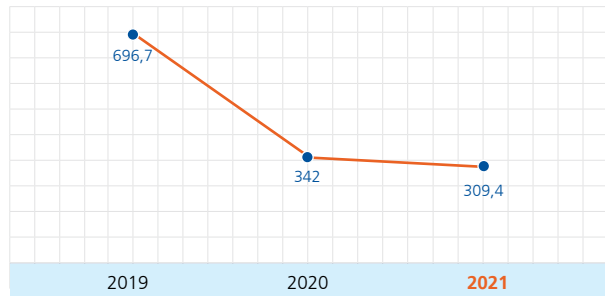
BRI Group



Efektivitas penerapan pendidikan pada BRI Group dapat dilihat dari peningkatan rata-rata menyeluruh dari Evaluasi level 1, level 2, dan level 3.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Realiasi anggaran BRI Corporate University 2019-2021 (Dalam Miliar Rupiah)



Pada tahun 2021, terdapat penurunan biaya secara signifikan. Hal ini dikarenakan transisi *offline to online* yang menyebabkan menurunnya biaya *offline* seperti akomodasi seperti biaya perjalanan, penginapan, konsumsi, dan uang saku pekerja.

» Komposisi Pemegang Saham

Jumlah pemegang saham BRI pada akhir tahun 2021 tercatat sebanyak 392.159 pemegang saham yang terdiri dari 389.897 pemodal nasional termasuk Pemerintah RI dan 2.262 pemodal asing. Mayoritas kepemilikan saham BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 53,19%. Masyarakat atau publik memiliki porsi kepemilikan saham sebesar 46,81% dan tidak terdapat pemegang saham publik yang memiliki lebih dari 5% dari total saham sebagaimana tercatat dalam Biro Administrasi Efek.

Tabel Komposisi Pemegang Saham BRI per 1 Januari 2021

Klasifikasi Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
Negara RI			
Negara RI	1	70.000.000.000	56,75%
Publik			
Publik	281.160	53.345.810.000	43,25%
Pemodal Nasional			
Pemodal Nasional	278.956	12.059.436.774	9,78%
Perorangan	216.601	2.238.474.024	1,81%
Karyawan	61.449	244.250.900	0,20%
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,00%
Bank	7	894.073.600	0,72%
Koperasi	13	2.727.152	0,00%
Yayasan	28	203.779.900	0,17%
Dana Pensiun	148	2.468.756.800	2,00%
Asuransi	112	2.795.561.900	2,27%
Perseroan Terbatas	246	209.807.849	0,17%
Reksa Dana	351	3.000.414.649	2,43%

Klasifikasi Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
Pemodal Asing			
Perorangan	355	35.802.300	0,03%
Badan Usaha Asing	1.849	41.250.570.926	33,44%
TOTAL	281.161	123.345.810.000	100,00%

Tabel Komposisi Pemegang Saham BRI per 31 Desember 2021

Klasifikasi Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
Negara RI			
Negara RI	1	80.610.976.876	53,19%
Publik			
Publik	392.158	70.948.024.728	46,81%
Pemodal Nasional			
Pemodal Nasional	389.896	17.965.239.373	11,85%
Perorangan	378.142	3.847.770.700	2,54%
Karyawan	10.756	34.238.740	0,02%
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,00%
Bank	7	149.074.332	0,10%
Koperasi	17	5.501.619.358	3,63%
Yayasan	34	365.575.238	0,24%
Dana Pensiun	152	2.126.533.321	1,40%
Asuransi	120	2.701.541.349	1,78%
Perseroan Terbatas	326	261.524.536	0,17%
Reksa Dana	341	2.975.771.799	1,96%
Pemodal Asing			
Perorangan	281	39.383.340	0,03%
Badan Usaha Asing	1.981	52.943.402.015	34,93%
TOTAL	392.159	151.559.001.604	100,00%

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BRI Per 1 Januari 2021

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
1.	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Negara Republik Indonesia	70.000.000.000	56,75%
2.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Asuransi	1.156.560.800	0,94%
3.	GIC S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE	Badan Usaha Asing	1.124.954.772	0,91%
4.	JPMCB NA RE-EUROPACIFIC GROWTH FUND	Badan Usaha Asing	1.032.412.900	0,84%
5.	JPMBL SA UCITS CLT RE-JPMORGAN FUNDS	Badan Usaha Asing	798.913.430	0,65%
6.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	767.030.328	0,62%
7.	JPMBLSAA AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL	Badan Usaha Asing	696.635.900	0,56%
8.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	691.903.558	0,56%
9.	THE NT TST CO S/A FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND	Badan Usaha Asing	629.334.300	0,51%
10.	PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Asuransi	606.232.300	0,49%

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
11.	PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DINAMIC MONEY	Asuransi	537.840.300	0,44%
12.	JPMBL SA UCITS CLT RE-NORDEA 1 SICAV	Badan Usaha Asing	484.916.480	0,39%
13.	BNYMSANV RE BNYM RE PEOPLE'S BANK OF CHINA-2039845393	Badan Usaha Asing	476.207.500	0,39%
14.	HSBC BANK PLC S/A SAUDI ARABIAN MONETARY AUTHORITY	Badan Usaha Asing	444.622.315	0,36%
15.	SSB 2Q27 S/A ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF-2144613424	Badan Usaha Asing	435.400.800	0,35%
16.	JPMCB NA RE-JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Badan Usaha Asing	427.056.500	0,35%
17.	THE NORTHERN TRUST CO S/A CANTILLON FUNDS PLC	Badan Usaha Asing	410.269.900	0,33%
18.	HSBC BK PLC S/A THE PRUDENTIAL ASSURANCE CO LTD	Badan Usaha Asing	363.495.300	0,29%
19.	SSB SWV4 S/A CALIFORNIA PUBLIC EMP RETIREMENT SYS-2144618013	Badan Usaha Asing	316.337.810	0,26%
20.	CITIBANK NA-BANK RAKYAT INDONESIA	Badan Usaha Asing	308.343.350	0,25%

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar BRI per 31 Desember 2021

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
1	NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Negara Republik Indonesia	80.610.976.876	53,19%
2.	INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY	Badan Hukum Sui Generis	5.498.021.834	3,63%
3.	GIC PRIVATE LIMITED S/A GOS	Badan Usaha Asing	1.370.714.262	0,90%
4.	JPMBL SA UCITS CLT RE-JPMORGAN FUNDS	Badan Usaha Asing	1.130.337.972	0,75%
5.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Asuransi	931.038.514	0,61%
6.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETSTOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	903.989.060	0,60%
7.	THE NT TST CO S/A FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OP	Badan Usaha Asing	859.576.939	0,57%
8.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND	Badan Usaha Asing	852.713.969	0,56%
9.	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFDBOARD-2039927326	Badan Usaha Asing	811.890.389	0,54%
10.	JPMBLSAA AIF CLT RE-STICHTING DEPOSITARYAPG EMERGING MARKETS EQUITY POOL	Badan Usaha Asing	801.111.304	0,53%
11.	JPMCB NA RE-JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	Badan Usaha Asing	655.689.271	0,43%
12.	STATE STREET BANK-ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Badan Usaha Asing	578.937.695	0,38%
13.	BNYMSANV RE BNYM RE PEOPLE'S BANK OF CHINA-2039845393	Badan Usaha Asing	570.274.355	0,38%
14.	PT AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES S/A MANDIRI DINAMIC MONEY RP	Asuransi	552.112.540	0,36%
15.	THE NORTHERN TRUST CO S/A CANTILLON FUNDS PLC	Badan Usaha Asing	499.186.801	0,33%
16.	PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE - REF	Asuransi	482.029.792	0,32%
17.	JPMBL SA RE - ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	Badan Usaha Asing	473.869.141	0,31%
18.	CITIBANK NA-BANK RAKYAT INDONESIA	Badan Usaha Asing	463.660.600	0,31%
19.	THE NT TST CO S/A FEDERATED HERMES INVESTMENT FUNDS PLC	Badan Usaha Asing	436.375.973	0,29%
20.	GIC PRIVATE LIMITED S/A MAS	Badan Usaha Asing	427.166.082	0,28%

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih BRI Per 1 Januari 2021

Nama Investor	Jumlah Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
Negara Republik Indonesia	1	80.610.976.876	56,75%

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih BRI per 31 Desember 2021

Nama Investor	Jumlah Saham	Jumlah Saham (lembar)	Kepemilikan
Negara Republik Indonesia	1	80.610.976.876	53,19%

Komposisi Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%

Komposisi Pemegang Saham Kurang dari 5% BRI Per 1 Januari 2021

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Pemodal Nasional			
Perorangan Indonesia	216.601	2.238.474.024	1,81%
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,00%
Karyawan	61.449	244.250.900	0,20%
Koperasi	12	2.727.152	0,00%
Yayasan	28	203.779.900	0,17%
Dana Pensiun	148	2.468.756.800	2,00%
Asuransi	112	2.795.561.900	2,27%
Bank	7	894.073.600	0,72%
Perseroan Terbatas	237	209.807.849	0,17%
Sub Total	278.902	9.059.022.125	7,74%
Pemodal Asing			
Perorangan Asing	355	39.383.340	0,03%
Badan Usaha Asing	1.848	52.943.402.015	33,44%
Sub Total	2.203	52.982.785.355	33,47%
Total	281.105	70.948.024.728	41,21%

Komposisi Pemegang Saham Kurang dari 5% BRI per 31 Desember 2021

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Pemodal Nasional			
Perorangan Indonesia	378.142	3.847.770.700	2,54%
Pemerintah Daerah	1	1.590.000	0,00%
Karyawan	10.756	34.238.740	0,02%
Koperasi	17	5.501.619.358	3,63%
Yayasan	34	365.575.238	0,24%
Dana Pensiun	152	2.126.533.321	1,40%
Asuransi	120	2.701.541.349	1,78%
Bank	7	149.074.332	0,10%
Perseroan Terbatas	326	261.524.536	0,17%
Reksa Dana	341	2.975.771.799	1,96%
Sub Total	389.896	17.965.239.373	11,85%

Kepemilikan Saham Publik	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Pemodal Asing			
Perorangan Asing	281	39.383.340	0,03%
Badan Usaha Asing	1.981	52.943.402.015	34,93%
Sub Total	2.262	52.982.785.355	34,96%
Total	392.158	70.948.024.728	46,81%

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BRI per 1 Januari 2021

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Dewan Komisaris			
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	-	-
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-
Ari Kuncoro*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	-	-
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	816.300	0,000662%
Hadiyanto	Komisaris	625.800	0,000507%
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	-	-
Hendricus Ivo	Komisaris Independen	-	-
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	-	-
Zulnahr Usman	Komisaris Independen	-	-
Heri Sunaryadi**	Komisaris Independen	-	-
Direksi			
Sunarso	Direktur Utama	1.008.000	0,00082%
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	329.200	0,00027%
Haru Koesmahargyo***	Direktur Keuangan	1.835.600	0,00149%
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	380.800	0,00031%
Supari	Direktur Bisnis Mikro	1.242.300	0,00101%
Indra Utoyo	Direktur Digital & Teknologi Informasi	1.726.400	0,00140%
Priyastomo***	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	1.835.600	0,00149%
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	1.819.400	0,00148%
Wisto Prihadi***	Direktur Kepatuhan	-	-
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	294.600	0,00024%
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	1.602.500	0,00130%
Herdy Rosadi Harman***	Direktur Human Capital	311.900	0,00025%
TOTAL		13.828.400	0,01121%

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021

** Berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*)

*** Berhenti menjabat sejak 21 Januari 2021

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi BRI per 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Dewan Komisaris			
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	178.300	0,00012%
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-
Ari Kuncoro*	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	-	-
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	160.400	0,00011%
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	849.161	0,00056%
Hadiyanto	Komisaris	810.700	0,00053%
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	-	-
Hendricus Ivo	Komisaris Independen	-	-
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	-	-
Zulnahr Usman	Komisaris Independen	-	-
Heri Sunaryadi**	Komisaris Independen	-	-
Direksi			
Sunarso	Direktur Utama	1.810.356	0,00119%
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	815.957	0,00054%
Supari	Direktur Bisnis Mikro	1.923.514	0,00127%
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	537.454	0,00035%
Handayani	Direktur Konsumer	2.459.000	0,00162%
Viviana Dyah Ayu R.K.	Direktur Keuangan	473.500	0,00031%
Indra Utoyo	Direktur Digital & Teknologi Informasi	2.511.792	0,00166%
Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	2.621.270	0,00173%
Agus Winardono	Direktur Human Capital	509.981	0,00034%
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	751.200	0,00050%
Agus Noorsanto	Direktur Wholesale dan Kelembagaan	899.841	0,00059%
Arga M. Nugraha	Direktur Jaringan dan Layanan	374.485	0,00025%
TOTAL		17.686.911	0,01167%

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021

** Berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Sampai dengan 31 Desember 2021, Dewan Komisaris dan Direksi BRI tidak memiliki kepemilikan saham tidak langsung.

Klasifikasi Pemegang Saham

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham BRI Per 31 Desember 2021

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan
Institusi Lokal	999	94.694.206.809	62,48%
Institusi Asing	1.981	52.943.402.015	34,93%
Individu Lokal	388.898	3.882.009.440	2,56%
Individu Asing	281	39.383.340	0,03%
Total	392.159	151.559.001.604	100,00%

» Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Pemerintah Republik Indonesia

53,19%

Pemegang Saham Utama dan Pengendali BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia melalui kepemilikan satu lembar saham Seri A Dwiwarna dan 53,19% saham Seri B. Pemegang Saham Utama dan Pengendali BRI adalah Pemerintah Republik Indonesia, sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemilik individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.



» Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi








Entitas Anak

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Raya)*		
Bidang Usaha	Bank Umum Swasta Nasional	
Tanggal Penyertaan BRI	3 Maret 2011	
Jumlah Aset	Rp16.822 miliar	
Kepemilikan (%)	85,72%	
Mulai Beroperasi, Status	27 September 1989, Masih Beroperasi	
Alamat	Jl. Warungjati Barat No. 139, Kel. Kalibata Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, 12740 Telp : (021) 80667600 Web : https://briagro.co.id/	
Pengurus Perusahaan	Dewan Komisaris	
	Budi Satria	Komisaris Utama
	Eko B. Supriyanto	Komisaris Independen
	Rina Saadah	Komisaris Independen
	Rama Notowidigdo	Komisaris Independen
	Achmad F.C. Bahrir	Komisaris
	Direksi	
	Kaspar Situmorang	Direktur Utama
	Bhimo Wikan Hantoro	Direktur
	Ernawan	Direktur
Sigit Murtiyoso	Direktur	








*Sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)

BRI Remittance Co. Ltd. (BRI Remittance)		
Bidang Usaha	Perusahaan Remittance	
Tanggal Penyertaan BRI	16 Desember 2011	
Jumlah Aset	Rp13.192 miliar	
Kepemilikan (%)	100,00%	
Mulai Beroperasi, Status	7 April 2005, Masih Beroperasi	
Alamat	Bay View Mansion Shopping Arcade, 33 Moreton terrace, Causeway Bay, Hongkong Telp : (852) 2890 2709, (852) 5165 6683 Web : http://www.brchk.com	
Pengurus Perusahaan	Manajemen Eksekutif	
	Muhammad Adli Yusrizal	Non-Executive Director
	Dimas Hendrasaputra	Executive Director

PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

	Bidang Usaha	Perusahaan Asuransi Jiwa	
	Tanggal Penyerahan BRI	29 Desember 2015	
	Jumlah Aset	Rp18.246 miliar	
	Kepemilikan (%)	63,83%	
	Mulai Beroperasi, Status	28 Oktober 1987, Masih Beroperasi	
	Alamat	Graha Irama Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2, Jakarta Telp : (021) 526-1260, 526-1261 Web : http://brilife.co.id/	
	Pengurus Perusahaan	Dewan Komisaris	
		Muhammad Syafri Rozi	Komisaris Utama
		Jonathan Hekster	Komisaris
		Premita Fifi Widhiawati	Komisaris Independen
		Ubaidillah Nugraha	Komisaris Independen
		Eko Wahyu Andriastono	Komisaris Independen
		Direksi	
		Iwan Pasila	Direktur Utama
		Danny Cahya R	Direktur
		Yosie William Iroth	Direktur
		Sutadi	Direktur
		Lim Chet Ming	Direktur
		Dewan Pengawas Syariah	
		KH. DR.Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua
M Ir. H. Agus Haryadi.AAAIJ, FIIS	Anggota		
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH	Anggota		

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)

	Bidang Usaha	Perusahaan Pembiayaan	
	Tanggal Penyerahan BRI	7 Desember 1983	
	Jumlah Aset	Rp5.246 miliar	
	Kepemilikan (%)	99,88%	
	Mulai Beroperasi, Status	7 Desember 1983, Masih Beroperasi	
	Alamat	Menara BRILiaN Lantai GF, 21 dan 22 Jl. Gatot Subroto No. 177A Kav. 64, Menteng, Tebet, Jakarta Selatan 12870 Telp : (021) 574 5333 Web : http://www.brifinance.co.id/	
	Pengurus Perusahaan	Dewan Komisaris	
		I Komang Sudiarsa	Komisaris Utama
		Ngalim Sawega	Komisaris
		Sumantri Soewarno	Komisaris Independen
		Direksi	
		Azizatun Azhimah	Direktur Utama
		Primartono Gunawan	Direktur
		Ari Prayuwana	Direktur
		Willy Halim Sugiarda	Direktur








PT BRI Danareksa Sekuritas (BRI DS)

	Bidang Usaha	Perusahaan Efek bidang Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek	
	Tanggal Penyertaan BRI	21 Desember 2018	
	Jumlah Aset	Rp1.144 miliar	
	Kepemilikan (%)	67,00%	
	Mulai Beroperasi, Status	1 Juli 1992, Masih Beroperasi	
	Alamat	Gedung BRI II Lt. 23 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telp : (021) 50914100, (021) 1500688 Web : www.BRIDanareksasekuritas.co.id	
	Pengurus Perusahaan	Dewan Komisaris	
		Rico Rizal Budidarmo	Komisaris
		Soehandjono	Komisaris Independen
		Sumihar Manullang	Komisaris Independen
		Direksi	
		Friderica Widyasari	Direktur Utama
		Mohammad Adib	Direktur
		Santi Suryandari	Direktur
		Boumediene Samurung Halomoan	Direktur








PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)

	Bidang Usaha	Perusahaan Modal Ventura	
	Tanggal Penyertaan BRI	20 Desember 2018	
	Jumlah Aset	Rp2.048 miliar	
	Kepemilikan (%)	99,97%	
	Mulai Beroperasi, Status	22 Januari 1998, Masih Beroperasi	
	Alamat	District 8 Office, Prosperity Tower Lt. 16 Unit F, SCBD Lot 28 Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190 Telp : (021) 5092 8500 Web : https://briventures.id/	
	Pengurus Perusahaan	Dewan Komisaris	
		Hadi Susanto	Komisaris Utama
		Arip Tirta	Komisaris Independen
		Agoosh Yoosran	Komisaris Independen
		Direksi	
		Nicko Widjaja	Direktur Utama
		Yosephine Ajeng Sekar Putih	Direktur
		William Gozali	Direktur

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)

	Bidang Usaha	Perusahaan Asuransi Umum	
	Tanggal Penyertaan BRI	26 September 2019	
	Jumlah Aset	Rp3.808 miliar	
	Kepemilikan (%)	99,97%	
	Mulai Beroperasi, Status	17 April 1989, Masih Beroperasi	
	Alamat	Graha BRI Insurance Jl. Mampang Prapatan Raya No. 18 Jakarta Selatan 12790 Telp : (021) 791 70477/78 Web : https://www.brins.co.id/	
	Pengurus Perusahaan	Dewan Komisaris	
		Bambang Krisminarno	Komisaris Utama
		Soegeng Hernowo	Komisaris Independen
		Imam Sundoro	Komisaris Independen
		Direksi	
		Fankar Umran	Direktur Utama
		Rahmat Budi Legowo	Direktur
		Sony Harsono	Direktur
		Heri Supriyadi	Direktur
		Ade Zulfikar	Direktur
	Dewan Pengawas Syariah		
	Hj. Nilmayetty Yusri	Ketua	
	Abdul Ghoni	Anggota	

PT Pegadaian

	Bidang Usaha	Perusahaan Gadai	
	Tanggal Penyertaan BRI	13 September 2021	
	Jumlah Aset	Rp65.723 miliar	
	Kepemilikan (%)	99,99%	
	Mulai Beroperasi, Status	1 April 1901, Masih Beroperasi	
	Alamat	Jl. Kramat Raya No.162, Kenari Senen, Jakarta Pusat	
	Pengurus Perusahaan	Dewan Komisaris	
		Loto Srinaita Ginting	Komisaris Utama
		Umiyatun Hayati T.	Komisaris
		Sudarto	Komisaris
		Makmur Keliat	Komisaris Independen
		Rini Widyantini	Komisaris
		Otok Kuswandaru	Komisaris
		Muhammad Sulhan Fauzi	Komisaris Independen

PT Pegadaian

Direksi

Kuswiyoto	Direktur Utama
Harianto Widodo	Direktur
Damar Latri Setiawan	Direktur
Teguh Wahyono	Direktur
Ridwan Arbian Syah	Direktur
Ninis Kesuma Adriani	Direktur
Gunawan Sulistyio	Direktur

Dewan Pengawas Syariah

Muhammad Cholil Nafis	Ketua
Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh	Anggota

PT Permodalan Nasional Madani (PNM)



Bidang Usaha

Perusahaan Pembiayaan



Tanggal Penyertaan BRI

13 September 2021



Jumlah Aset

Rp43.779 miliar



Kepemilikan (%)

99,99%



Mulai Beroperasi, Status

1 Juni 1999, Masih Beroperasi



Alamat

Menara PNM - Kuningan Center
 Jl. Kuningan Mulia Karet Kuningan Jakarta 12940
 Telp : (021) 2511404
 Web : <http://www.pnm.co.id/>

Dewan Komisaris

Arif Rahman Hakim	Komisaris Utama
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen
Veronica Colondam	Komisaris Independen
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen
Parman Nataatmadja	Komisaris



Pengurus Perusahaan

Direksi


Arief Mulyadi	Direktur Utama
Tjatur H. Priyono	Direktur Keuangan dan Operasional
Anton Fahlevie	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Kindaris	Direktur Bisnis
Sunar Basuki	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan

Dewan Pengawas Syariah


Didin Hafidhuddin	Ketua Dewan Pengawas Syariah
Muhammad Syafii Antonio	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Perusahaan Asosiasi



PT Bahana Artha Ventura (BAV)

	Bidang Usaha	Perusahaan Modal Ventura
	Tanggal Penyertaan BRI	21 November 2017
	Jumlah Aset	Rp2.098 miliar
	Kepemilikan (%)	15,10%
	Mulai Beroperasi, Status	5 Agustus 1992, Masih Beroperasi
	Alamat	Wisma Prima Lantai 5 Jl. Kapten P. Tendean No. 34, Jakarta Selatan 12790

PT Danareksa Investment Management (DIM)

	Bidang Usaha	Perusahaan Efek bidang Manajer Investasi
	Tanggal Penyertaan BRI	20 Desember 2018
	Jumlah Aset	Rp282,97 miliar
	Kepemilikan (%)	35,00%
	Mulai Beroperasi, Status	9 Oktober 1992, Masih Beroperasi
	Alamat	Plaza BP Jamsostek Lt 11 Jl. HR. Rasuna Said No. 112 Blok B Jakarta 12910

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

	Bidang Usaha	Lembaga Penyelesaian Efek
	Tanggal Penyertaan BRI	5 Desember 1997
	Jumlah Aset	Rp2.935 miliar
	Kepemilikan (%)	4,30%
	Mulai Beroperasi, Status	11 November 1998, Masih Beroperasi
	Alamat	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 5 th Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

	Bidang Usaha	Perusahaan Pemeringkat Efek
	Tanggal Penyertaan BRI	15 Juni 1995
	Jumlah Aset	Rp270,29 miliar
	Kepemilikan (%)	8,01%
	Mulai Beroperasi, Status	21 Desember 1993, Masih Beroperasi
	Alamat	Panin Tower Senayan City, 17 th Floor Jl. Asia Afrika Lot. 19, Gelora, Jakarta 12220

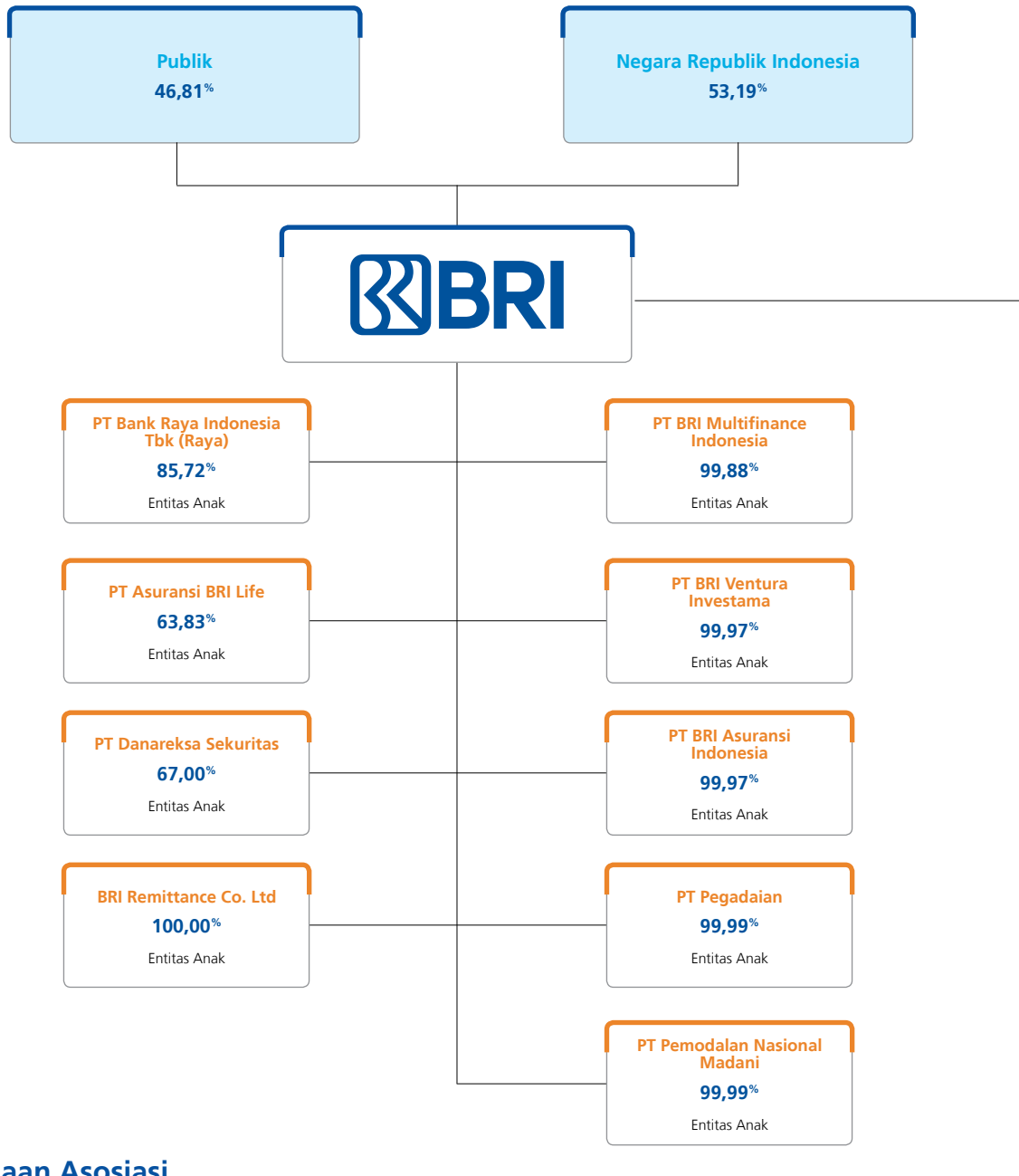
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI)

	Bidang Usaha	Bank Umum Syariah
	Tanggal Penyertaan BRI	19 Desember 2007
	Jumlah Aset	Rp265.289 miliar
	Kepemilikan (%)	17,25%
	Mulai Beroperasi, Status	16 Oktober 2008, Masih Beroperasi Keterangan: Per 01 Februari 2021, Efektif bergabung dengan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
	Alamat	The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Perusahaan Ventura Bersama

Per 31 Desember 2021, BRI tidak memiliki Perusahaan Ventura Bersama.

» Struktur Grup Perusahaan



Perusahaan Asosiasi



Sampai dengan tahun 2021 BRI tidak memiliki Entitas Induk, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

» Informasi Kelompok Usaha Bank

Struktur Kelompok Usaha Bank

Struktur kelompok usaha Bank telah disajikan pada sub bagian Struktur Grup Perusahaan dan pada sub bagian pemegang saham utama dan pengendali.

Struktur Keterkaitan Kepengurusan dalam Kelompok Usaha Bank

BRI mempunyai 9 (sembilan) Perusahaan Anak, yang mana kepemilikan BRI di Perusahaan Anak tersebut adalah lebih dari 50%. BRI sebagai pemegang saham mayoritas mempunyai hak untuk menominasikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Hak Nominasi
1.	PT Bank Raya Indonesia Tbk.	BRI berhak menominasikan calon Direksi dan Dewan Komisaris.
2.	PT Pegadaian	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN No.SKK – 87/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 BRI dapat mengajukan usulan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris.
3.	PT Permodalan Nasional Madani	Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN No.SKK – 87/MBU/09/2021 tanggal 13 September 2021 BRI dapat mengajukan usulan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris.
4.	PT Asuransi BRI Life	Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Maret 2021 Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life, BRI berhak menominasikan Direktur Utama, Direktur Kepatuhan & legal dan Direktur Pemasaran. Selanjutnya, BRI berhak untuk menominasikan Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Independen.
5.	PT BRI Asuransi Indonesia	BRI berhak menominasikan calon Direksi dan Dewan Komisaris.
6.	PT BRI Danareksa Sekuritas	Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham antara BRI dengan PT Danareksa (Persero) BRI berhak menominasikan Direktur Utama, Direktur Operasional, Keuangan & Manajemen Risiko dan Direktur Institutional & Retail Capital Market. Selanjutnya, BRI berhak untuk menominasikan Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen.
7.	PT BRI Multifinance Indonesia	BRI berhak menominasikan calon Direksi dan Dewan Komisaris.
8.	PT BRI Ventura Investama	BRI berhak menominasikan calon Direksi dan Dewan Komisaris.
9.	BRI Remittance Co.Ltd	BRI berhak menominasikan calon <i>Executive Director</i> dan <i>Non Executive Director</i> .

Sehubungan dengan susunan Pengurus Perusahaan Anak BRI, terdapat 2 (dua) Pengurus di Perusahaan Anak BRI yang saat ini juga menjabat di BRI, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nama	Jabatan di BRI	Jabatan di Perusahaan Anak
1	PT BRI Asuransi Indonesia	Bambang Krisminarno*	SEVP Corporate Banking	Komisaris Utama
2	BRI Remittance Indonesia Co.Ltd.	Muhammad Adly Yusrizal	Chief Representative	Non - Executive Director

*Sedang dalam proses persetujuan OJK

Pemegang Saham Yang Bertindak Atas Nama Pemegang Saham Lain

Tidak terdapat Pemegang Saham Yang Bertindak Atas Nama Pemegang Saham Lain.

» Kronologi Penerbitan Saham

TAHUN 2003 PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA (INITIAL PUBLIC OFFERING/IPO)

Pada 31 Oktober 2003, BRI melakukan Penawaran Saham Perdana (*Initial Public Offerings*) sebesar 3.811.765.000 Saham Biasa Seri B kepada investor domestik maupun asing. Jumlah saham tersebut merupakan saham divestasi Negara Republik Indonesia sebesar 2.047.060.000 dan saham portepel sebesar 1.764.705.000.

Penawaran Saham Perdana tersebut berdasarkan pernyataan pendaftaran efektif yang dikeluarkan oleh Bapepam – sekarang OJK (Surat Ketua Bapepam No. S-2646/PM/2003) tanggal 31 Oktober 2003). Saham yang ditawarkan bernominal Rp500,00 dan mulai diperdagangkan pada 10 November 2003 dengan harga penawaran per saham sebesar Rp875,00 (Rp87,50 setelah memperhitungkan stock split pada tahun 2011 dan 2017), serta dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Dengan dilakukannya penawaran saham perdana ini, BRI menerbitkan dua jenis saham; Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B. Saham Seri A Dwiwarna diterbitkan dan dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.

Selanjutnya pada 10 November 2003, BRI melaksanakan opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan pada 3 Desember 2003 melakukan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 Saham Biasa Seri B milik Negara Republik Indonesia (divestasi). Divestasi dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

TAHUN 2004-2010 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI MANAJEMEN (MANAGEMENT STOCK OPTION PROGRAM/MSOP)

Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 3 Oktober 2003, pemegang saham BRI menyetujui pelaksanaan Program Opsi Pembelian Saham bagi Manajemen (*Management Stock Option Plan/ MSOP*). Jumlah saham yang diterbitkan dalam MSOP BRI tercatat sebanyak 588.235.250 lembar. Pelaksanaan MSOP tersebut dilakukan dalam tiga tahap dimana masa *exercise* MSOP Tahap I dan II telah berakhir masing-masing pada tanggal 9 November 2008 dan 9 November 2009, sedangkan MSOP Tahap III berakhir pada 9 November 2010.

Ketiga tahap MSOP tersebut mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 dan Peraturan BEI No.1-A Lamp. Keputusan Direksi BEI No.Kep.305/BEI/07-2004 tentang Pencatatan Efek. Saham MSOP yang telah di-*exercise* sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan MSOP adalah sebesar 569.876.000 lembar. Sampai dengan berakhirnya masa *exercise*, masih terdapat 18,3 juta lembar saham yang tidak di-*exercise* yang terdiri dari 4,3 juta lembar MSOP Tahap I, 5,2 juta lembar MSOP Tahap II dan 8,8 juta lembar MSOP Tahap III. Dengan berakhirnya *exercise* MSOP pada tahun 2010 maka komposisi kepemilikan saham pemerintah berubah dari 59,07% di tahun 2004 menjadi 56,75% di tahun 2010.

TAHUN 2011 STOCK SPLIT 1:2

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2011, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp500 per saham menjadi Rp250 per saham (Rasio 1:2). Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp9.300,00 pada tanggal 10 Januari 2011 menjadi sebesar Rp4.800 pada penutupan perdagangan 11 Januari 2011. Dengan adanya *stock split* dimaksud, per 11 Januari 2011 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan *stock split* adalah 12.334.581.000 lembar dan 24.669.162.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*.

Pelaksanaan Stock Split Tahun 2011

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%	Rp	
Sebelum <i>Stock Split</i>	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25	500	12.334.581.000
Setelah <i>Stock Split</i>	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000

TAHUN 2015-2016 PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK)

BRI melakukan *Stock buyback* selama tiga bulan yaitu dari tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Januari 2016 dengan total pembelian sebanyak 221.718.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.419 triliun. Target awal pelaksanaan *buy back* ini direncanakan sebesar Rp2,5 triliun dengan ketentuan jumlah

saham *buy back* BRI tidak melebihi 20% dari jumlah modal disetor dan paling sedikit saham yang beredar 7,5% dari modal disetor. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih serta opsi penjatahan, maka Pemerintah Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI.

Pelaksanaan Buyback Saham di tahun 2015-2016

Total Jumlah saham	Rata-rata Harga Pembelian	Peningkatan Laba per Lembar Saham
221.718.000 lembar	Rp10.910/lembar	Rp9.5/lembar

Ket: sebelum *stock split* 1:5

Dalam melaksanakan pembelian kembali saham dan/atau obligasi, BRI mengikuti kebijakan-kebijakan eksternal yang berlaku diantaranya:

- Undang-undang (UU) RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Peraturan OJK (POJK) No. 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.



- Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 22/SEOJK.04/2013 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik Peraturan.
- Bank Indonesia (PBI) No. 15/12/PBI/2013 tentang Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara.

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan buyback ini berasal dari kas internal Perseroan dan diyakini bahwa biaya tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan untuk membiayai kegiatan Perseroan. Seluruh transaksi *buy back* telah dilaporkan kepada OJK pada tanggal 13 Januari 2016. Saham yang telah dibeli direncanakan untuk Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja BRI.

TAHUN 2017 STOCK SPLIT 1:5

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2017, pemegang saham telah menyetujui antara lain pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari semula Rp250 per saham menjadi Rp50 per saham (Rasio 1:5). Harga saham sebelum *stock split* sebesar Rp16.450 pada tanggal 9 November 2017 menjadi sebesar Rp3.280 pada penutupan perdagangan 10 November 2017. Dengan adanya *stock split* dimaksud, per 10 November 2017 jumlah lembar saham yang beredar sebelum dan pelaksanaan *stock split* adalah 24.669.162.000 lembar dan 123.945.810.000 lembar. Tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan saham Pemerintah maupun Publik sebelum dan sesudah *stock split*. Kronologi dari pencatatan saham yang terkait dengan aksi korporasi ini adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan Stock Split Tahun 2017

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%	Rp	
Sebelum <i>Stock Split</i>	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25	250	24.669.162.000
Setelah <i>Stock Split</i>	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000

TAHUN 2019 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI PEKERJA (EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM/ESOP)

Berdasarkan Putusan RUPS tanggal tgl 23 Maret 2016 pada Agenda 5 (lima) yakni menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Pekerja serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis pemegang saham seri A Dwiwarna, serta memperhatikan Surat Kementerian BUMN yang berisi bahwa mendukung implementasi kepemilikan saham bagi Pekerja BRI/*Employee Stock Ownership Program* (ESOP), BRI pada tahun 2019 telah melaksanakan ESOP dalam bentuk Bonus Saham untuk tahap I. Saham Treasuri yang telah dipakai untuk ESOP tahap I tersebut dan telah dilimpahkan kepada masing-masing Pekerja pada tanggal 23 dan 24 Mei 2019 dalam bentuk Script Saham sebanyak 143.415.500 lembar saham. Pelimpahan saham treasuri untuk ESOP dimaksud telah dilaporkan kepada OJK pada bulan Mei 2019.

TAHUN 2020 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM BAGI PEKERJA (EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM/ESOP)

Pada tahun 2020, BRI telah melaksanakan distribusi program kepemilikan saham Pekerja atau *Employee Stock Allocation* (ESA) dengan total 231.111.000 lembar saham, yang terdiri dari ESA Tahap 1 sebesar 4.396.700 lembar saham dan ESA Tahap 2 sebesar 226.714.300 lembar saham.

TAHUN 2020 PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (BUYBACK)

Pada tahun 2020 BRI melakukan aksi pembelian kembali saham (*buyback*) sebagai respon kebijakan OJK dalam meredam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan akibat pandemi COVID-19. Pembelian kembali tersebut secara bertahap dalam periode 13 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 16.400.000 lembar saham (nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp47.254.000.000 dengan rata-rata harga pembelian Rp2.881,34.

TAHUN 2021 RIGHT ISSUE (PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD") I DALAM RANGKA PEMBENTUKAN HOLDING ULTRA MIKRO YANG TERDIRI DARI PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) PERSERO)

Pada tanggal 13 September 2021 – 22 September 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melakukan *Rights Issue* atau Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") I dalam rangka pembentukan *Holding Ultra Mikro* yang terdiri dari PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero. BRI menawarkan sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50 per saham atau sebanyak-banyaknya 18,62% dari modal ditempatkan dan disetor penuh BRI setelah PMHMETD

I. Setiap pemegang 1.000.000.000 saham lama BRI yang namanya tercatat dalam DPS BRI pada tanggal 9 September 2021 berhak atas 230.128.553 (HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk untuk membeli 1 Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp3.400- (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham.

Jumlah dana dan hasil *inbreng* yang diterima BRI dalam PMHMETD I ini sebesar Rp95.924.851.453.600, dimana Rp54.770.595.614.000 berasal dari Pemerintah Republik Indonesia berupa *inbreng (non-cash)*, dan Rp41.154.255.839.600 berasal dari Publik (*cash*). Setelah *Right Issue*, jumlah saham beredar BRI bertambah sebesar 28.213.191.604 dari 123.345.810.000 menjadi 151.559.001.604 dengan TERP sebesar Rp3,810.

Tabel Pelaksanaan *Right Issue* Tahun 2021

Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar
	Pemerintah		Publik		Nominal	
	Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%	Rp	
Sebelum <i>Right Issue</i>	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25	50	123.345.810.000
Setelah <i>Right Issue</i>	86.108.998.710	56,82	65.450.002.894	43,18	50	151.559.001.604

Kronologis Penerbitan/Pencatatan Saham BRI

Tabel Kronologis Penerbitan/Pencatatan Saham 2013 – 2021

Tahun	Aksi Korporasi	Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan
2003	Penawaran Umum Saham Perdana	500	875	3.811.765.000
2004	<i>Exercise</i> MSOP 85.385.500	500	-	85.385.500
2005	<i>Exercise</i> MSOP 185.610.000	500	-	185.610.000
2006	<i>Exercise</i> MSOP 250.721.000	500	-	250.721.000
2007	<i>Exercise</i> MSOP 31.379.000	500	-	31.379.000
2008	<i>Exercise</i> MSOP 7.499.000	500	-	7.499.000
2009	<i>Exercise</i> MSOP 4.553.000	500	1.750	4.553.000
2010	<i>Exercise</i> MSOP 4.728.500	500	-	4.728.500
2011	<i>Stock Split</i> 1:2 tanggal 11 Januari 2011	250	-	-
2015	<i>Stock Buy- Back</i> sebanyak 221.718.000 lembar saham	250	-	-
2016		250	-	-
2017	<i>Stock Split</i> 1:5 tanggal 10 November 2017	50	-	-
2019	<i>Exercise</i> ESOP 143.415.500	50	2.240	-
2020	<i>Exercise</i> ESA 231.111.000	50	-	-
2020	<i>Stock Buy-Back</i> sebanyak 16.400.000 lembar saham	50	-	-
2021	<i>Right Issue</i>	50	3.400	28.213.191.604
	Pengalihan Sebagian Saham Milik Pemerintah ke LPI	50	-	-

Keterangan: - MSOP, ESOP dan ESA tidak terdapat harga penawaran dikarenakan Perusahaan langsung memberikan saham kepada Pekerja yang berhak sesuai dengan perhitungan, metode dan asumsi dari laporan pihak ketiga yang kompeten.
 - *Stock Buy-Back* tidak terdapat harga penawaran dikarenakan Perusahaan langsung membeli saham melalui mekanisme pasar.

» Kronologi Penerbitan Obligasi

Informasi Obligasi

Tabel Informasi Obligasi

No.	Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Juta)
1.	Subordinate Notes due 2003	25 September 2003	120 bulan	USD	USD150
2.	Obligasi Subordinasi I Bank BRI Tahun 2004	09 Januari 2004	120 bulan	IDR	Rp500.000
3.	Obligasi Subordinasi II Bank BRI Tahun 2009	22 Desember 2009	60 bulan	IDR	Rp2.000.000



2021 PENGALIHAN SEBAGIAN SAHAM MILIK PEMERINTAH KE LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI (LPI)

Dalam rangka pemenuhan PP No 111 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi, Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali BRI melakukan penambahan modal kepada LPI dalam bentuk saham BBRI yang dimiliki oleh Pemerintah. Pemerintah menyetorkan sebanyak 5.498.021.834 saham seri B BRI dengan harga pengalihan Rp4.061/lembar saham pada tanggal 23 Desember 2021. Sebagai dampak atas pengalihan tersebut kepemilikan Pemerintah atas saham seri B BBRI berkurang dari 86.108.998.709 (56,82%) lembar saham menjadi 80.610.976.875 (53,19%) lembar saham. Pemerintah tetap memiliki saham seri A Dwiwarna dan juga Pemegang Saham Pengendali BRI.

Perubahan Kepemilikan Perseroan

Keterangan	Kepemilikan Jumlah Lembar Saham		% Kepemilikan	
	2020	2021	2020	2021
Pemerintah Republik Indonesia	70.000.000.000	80.610.976.876	56,75%	53,19%
Publik	53.345.810.000	70.948.024.728	43,25%	46,81%
Total	123.345.810.000	151.559.001.604	100,00%	100,00%

	Total Jumlah Saham Disetor Akhir Periode	Nilai Modal Disetor Akhir Periode (Rp Juta)	Komposisi Pemegang Saham setelah Aksi Korporasi			
			Pemerintah		Masyarakat	
			Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%
	11.764.705.000	5.882.353	7.000.000.000	59,50	4.764.705.000	40,50
	11.850.090.500	5.925.045	7.000.000.000	59,07	4.850.090.500	40,93
	12.035.700.500	6.017.850	7.000.000.000	58,16	5.035.700.500	41,84
	12.286.421.500	6.143.211	7.000.000.000	56,97	5.286.421.500	43,03
	12.317.800.500	6.158.900	7.000.000.000	56,83	5.317.800.500	43,17
	12.325.299.500	6.162.650	7.000.000.000	56,79	5.325.299.500	43,21
	12.329.852.500	6.164.926	7.000.000.000	56,77	5.329.852.500	43,23
	12.334.581.000	6.167.291	7.000.000.000	56,75	5.334.581.000	43,25
	24.669.162.000	6.167.291	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25
	24.669.162.000	6.167.291	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25
	24.669.162.000	6.167.291	14.000.000.000	56,75	10.669.162.000	43,25
	123.345.810.000	6.167.291	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25
	123.345.810.000	6.167.291	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25
	123.345.810.000	6.167.291	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25
	123.345.810.000	6.167.291	70.000.000.000	56,75	53.345.810.000	43,25
	151.559.001.604	7.577.950	86.108.998.710	56,82	65.450.002.894	43,18
	151.559.001.604	7.577.950	80.610.976.876	53,19	70.948.024.728	46,81

	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
					2021	2020	
-	-	30 Oktober 2013	7,75%	Lunas	-	-	-
-	-	09 Januari 2014	13,5%	Lunas	-	-	-
-	-	22 Desember 2014	10,95%	Lunas	-	-	-

No.	Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Juta)
4.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri A	25 Juni 2015	370 Hari	IDR	Rp655.000
5.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri B	25 Juni 2015	36 bulan	IDR	Rp925.000
6.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2015 Seri C	02 Juli 2015	60 bulan	IDR	Rp1.420.000
7.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri A	19 Januari 2016	370 Hari	IDR	Rp808.000
8.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri B	19 Januari 2016	36 bulan	IDR	Rp1.018.500
9.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	04 Februari 2016	5 tahun	IDR	Rp2.823.500
10.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri A	04 Mei 2016	370 Hari	IDR	Rp1.212.000
11.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri B	04 Mei 2016	36 bulan	IDR	Rp2.437.000
12.	Obligasi Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2016 Seri C	25 Mei 2016	5 tahun	IDR	Rp701.000
13.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri A	02 Desember 2016	370 Hari	IDR	Rp616.000
14.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri B	02 Desember 2016	36 bulan	IDR	Rp964.000
15.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri C	01 Desember 2016	5 tahun	IDR	Rp193.000
16.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	01 Desember 2016	7 tahun	IDR	Rp477.000
17.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	01 Desember 2016	10 tahun	IDR	Rp2.350.000
18.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri A	12 April 2017	370 Hari	IDR	Rp1.131.000
19.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri B	11 April 2017	36 bulan	IDR	Rp1.743.500
20.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	11 April 2017	5 tahun	IDR	Rp925.000
21.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	11 April 2017	10 tahun	IDR	Rp1.300.500
22.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri A	24 Agustus 2017	36 bulan	IDR	Rp980.500
23.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	24 Agustus 2017	5 tahun	IDR	Rp1.652.500
24.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	24 Agustus 2017	7 tahun	IDR	Rp2.517.000
25.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	21 Februari 2018	5 tahun	IDR	Rp1.837.000
26.	Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	21 Februari 2018	7 tahun	IDR	Rp605.000
27.	Senior Notes due 2018	28 Maret 2013	60 bulan	USD	USD500
28.	Obligasi Subordinasi III Bank BRI Tahun 2018	21 Juni 2018	5 tahun	IDR	Rp500.000
29.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri A	07 November 2019	370 Hari	IDR	Rp737.850
30.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B	07 November 2019	3 tahun	IDR	Rp2.089.350
31.	Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	07 November 2019	5 tahun	IDR	Rp2.172.800
32.	Global Bond 2018	20 Juli 2018	5 tahun	USD	USD500
33.	Sustainable Bond 2019	28 Maret 2019	5 tahun	USD	USD500

	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
					2021	2020	
100% dari jumlah pokok obligasi		07 Juli 2016	8,4%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		03 Juli 2018	9,2%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		03 Juli 2020	9,5%	Lunas	-	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		08 Februari 2017	8,5%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		04 Februari 2019	9,25%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		04 Februari 2021	9,60%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		30 Mei 2017	7,5%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		25 Mei 2019	8,2%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		25 Mei 2021	8,70%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		06 Desember 2017	7,25%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		01 Desember 2019	8%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		01 Desember 2021	8,20%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		01 Desember 2023	8,65%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		01 Desember 2026	8,90%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		16 April 2018	7,2%	Lunas	-	-	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		11 April 2020	8,1%	Lunas	-	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		11 April 2022	8,30%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		11 April 2027	8,80%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		24 Agustus 2020	7,6%	Lunas	-	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		24 Agustus 2022	8%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		24 Agustus 2024	8,25%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		21 Februari 2023	6,65%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		21 Februari 2025	6,90%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
-		28 Maret 2018	2,95%	Lunas	-	-	BNY Mellon
100% dari jumlah pokok obligasi		26 Juni 2023	7,70%	Belum Lunas	^{id} AA oleh Pefindo	^{id} AA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		17 November 2020	6,5%	Lunas	-	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		07 November 2022	7,60%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
100% dari jumlah pokok obligasi		07 November 2024	7,85%	Belum Lunas	^{id} AAA oleh Pefindo	^{id} AAA oleh Pefindo	Bank Negara Indonesia
99,696% dari jumlah pokok obligasi		20 Juli 2023	4,625%	Belum Lunas	BBB- oleh Fitch	BBB- oleh Fitch	BNY Mellon
99,713% dari jumlah pokok obligasi		28 Maret 2024	3,950%	Belum Lunas	"BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys"	"BBB- oleh Fitch Rating Baa2 oleh Moodys"	BNY Mellon

» Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Penerbitan *Negotiable Certificate Deposit (NCD)* yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor	Mata Uang	Nilai (juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i> I Bank BRI Tahun 2020 Seri A	24 Juni 2020	3 Bulan	IDR	Rp630.000	24 September 2020	5,35% (Diskonto)	Lunas
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i> I Bank BRI Tahun 2020 Seri B	24 Juni 2020	6 Bulan	IDR	Rp520.000	23 Desember 2020	5,30% (Diskonto)	Lunas
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i> I Bank BRI Tahun 2020 Seri C	24 Juni 2020	12 Bulan	IDR	Rp850.000	24 Juni 2021	5,75% (Diskonto)	Lunas

Penerbitan *Medium Term Notes (MTN)* yang Pernah Diterbitkan dan Telah Jatuh Tempo

Uraian	Tanggal Penerbitan	Tenor	Mata Uang	Nilai (juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga (%)	Status Pembayaran
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri A	10 Oktober 2014	370 Hari	IDR	Rp300.000	15 Oktober 2015	8,75	Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri B	10 Oktober 2014	24 Bulan	IDR	Rp60.000	10 Oktober 2016	9,25	Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2014 Seri C	10 Oktober 2014	36 Bulan	IDR	Rp360.000	10 Oktober 2017	9,50	Lunas
MTN BRI Tahap II Tahun 2014	24 Desember 2014	12 Bulan	IDR	Rp520.000	24 Desember 2015	8,90	Lunas
MTN BRI Tahap I Tahun 2016	16 September 2016	370 Hari	IDR	Rp1.925.000	21 September 2017	7,40	Lunas

» Lembaga dan/atau Profesi Penunjang

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik (KAP)	
Purwanto, Sungkoro & Surja	
Jaringan Asosiasi	Ernst & Young Global Limited
Alamat	Indonesia Stock Exchange Building. Tower 2 Lantai 7, Jl. Jend Sudirman Kav 52, 53, Jakarta 1290, Indonesia
Periode Penugasan	Tahun ke – 6

Akuntan Publik (AP)	
Christophorus Alvin Kossim	
Periode Penugasan	Tahun ke – 2
Jasa yang Diberikan	Audit Laporan Keuangan dan Review atas Laporan Keuangan
Fee Audit	Rp13.215.296.000
Fee Non Audit	Jasa non assurans berupa Perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan. Total fee untuk penugasan tersebut sebesar Rp500.000.000 atas revidi KPI Direksi (Kolegial & Individu) dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri BUMN RI perihal Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Lembaga Pemeringkat Efek

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
<p>Panin Tower - Senayan City, 17th Floor Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270, Indonesia</p> <p>Telp : (021) 7278 2380 Faks : (021) 7278 2370 Web : www.pefindo.com Email : -</p> <p>Jasa yang diberikan Pemeringkatan Perusahaan, Pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan Bank BRI, Obligasi Subordinasi BRI</p> <p>Fee Rp165.000.000,-</p>

Fitch Ratings Indonesia
<p>Prudential Tower 20th Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910, Indonesia</p> <p>Telp : (021) 5795 7755 Faks : (021) 5795 7750 Web : www.fitchratings.co.id Email : -</p> <p>Jasa yang diberikan Pemeringkatan Perusahaan, Global Bond BRI 2018, Sustainable Bond 2019</p> <p>Fee Rp136.000.000,-</p>

Fitch Ratings International
<p>30 North Colonnade London E14 SGN United Kingdom</p> <p>Telp : +44(0)20 3530 1000 Web : www.fitchratings.com Email : lonaccounts.receivable@fitchratings.com</p> <p>Jasa yang diberikan Pemeringkatan Perusahaan</p> <p>Fee USD52.941,06</p>

Moody's Investors Service
<p>50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623</p> <p>Telp : 65 6398 8339 Faks : 65 6398 8301 Web : www.moodys.com/indonesia Email : clientservices@moodys.com</p> <p>Jasa yang diberikan Pemeringkatan Perusahaan, Global Bond BRI 2018, Sustainable Bond 2019</p> <p>Fee USD183.765</p>

SnP Global Rating
<p>Singapore 12 Marina Boulevard 018982 Singapura Head of Sales, Asia-Pacific</p> <p>Telp : (0852) 2533-3522</p> <p>Jasa yang diberikan Pemeringkatan Perusahaan</p> <p>Fee USD103.530</p>

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 5150515
Faks : (021) 5154153
Web : www.idx.co.id
Email : listing@idx.co.id

Jasa yang diberikan Jasa Pencatatan Tahunan Saham

Fee -

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120
Telp : (021) 3508077
Faks : (021) 350 8078
Web : www.datindo.com
Email : dm@datindo.com

Jasa yang diberikan Jasa Administrasi Saham Pasar Sekunder

Fee Rp99.000.000 (diluar jasa Aksi Korporasi)

Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 5152855
Fax : (021) 52991199
Web : www.ksei.co.id
Email : helpdesk@ksei.co.id

Jasa yang diberikan Pengelolaan administrasi efek (saham dan obligasi) dan *Paying Agent*

Fee Rp154.916.664 (Termasuk PPN)

Paying Agent Fee Rp429.449.238

Notaris

Notaris & PPAT Fathiah Helmi

Graha Irama Lantai 6C
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1& 2, Kuningan Timur,
Kec. Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

Jasa yang diberikan Pembuatan akta keputusan RUPS dan Anggaran Dasar

Fee Rp115.000.000

» Penghargaan dan Sertifikasi



Tanggal	Penghargaan	Kategori	Acara	Penyelenggara	Level
29 Januari 2021	Best of The Best Communications	Corporate Communications	BCOMSS 2020	Kementerian BUMN	Nasional
29 Januari 2021	Gold Winner Social Media and Corporate Campaign	Social Media & Corporate Campaign	BCOMSS 2020	Kementerian BUMN	Nasional
9 Februari 2021	BRIImo Peringkat 1	Satisfaction index	Infobank 4 th Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2021	Infobank	Nasional
9 Februari 2021	ATM BRI Peringkat 2	Satisfaction index	Infobank 4 th Satisfaction Loyalty Engagement Awards 2021	Infobank	Nasional
25 Februari 2021	BritAma Peringkat 2	Tabungan	Top Brand Award 2021	TOP Brand	Nasional
25 Februari 2021	Simpedes Peringkat 3	Tabungan	Top Brand Award 2021	TOP Brand	Nasional
25 Februari 2021	BritAma Rencana Peringkat 1	Tabungan Berjangka	Top Brand Award 2021	TOP Brand	Nasional
25 Februari 2021	Simpedes Impian Peringkat 3	Tabungan Berjangka	Top Brand Award 2021	TOP Brand	Nasional
25 Februari 2021	Tabungan BRI Junio Peringkat 1	Tabungan Junior	Top Brand Award 2021	TOP Brand	Nasional
25 Februari 2021	Deposito BRI Peringkat 2	Deposito, Mobile Banking, & Internet Banking	Top Brand Award 2021	TOP Brand	Nasional
25 Februari 2021	BRIImo Peringkat 2	Deposito, Mobile Banking, & Internet Banking	Top Brand Award 2021	TOP Brand	Nasional
25 Februari 2021	Internet Banking BRI Peringkat 2	Deposito, Mobile Banking, & Internet Banking	Top Brand Award 2021	TOP Brand	Nasional
10 Maret 2021	Syndicated Financial Institution Deal of the Year	Financial	10 th Asia Pacific Syndicated Loan Market Awards 2020	Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)	Internasional
16 Maret 2021	Model Bank Financial Inclusion	Perbankan	Celent Model Bank 2021	Celent	Nasional
25 Maret 2021	Produk Tabungan	Perbankan	Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2021	Tras n Co	Nasional
25 Maret 2021	Kartu Kredit	Perbankan	Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2021	Tras n Co	Nasional
25 Maret 2021	Kartu Prepaid	Perbankan	Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2021	Tras n Co	Nasional



Tanggal	Penghargaan	Kategori	Acara	Penyelenggara	Level
25 Maret 2021	Produk Deposito	Perbankan	Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2021	Tras n Co	Nasional
25 Maret 2021	Mobile Banking	Perbankan	Indonesia Digital Popular Brand Award (IDPBA) 2021	Tras n Co	Nasional
25 Maret 2021	Call Center Peringkat 1	Produk dan layanan Brand	Indonesia WOW Brand 2021	MarkPlus	Nasional
25 Maret 2021	Internet Banking Peringkat 2	Produk dan layanan Brand	Indonesia WOW Brand 2021	MarkPlus	Nasional
25 Maret 2021	ATM Peringkat 2	Produk dan layanan Brand	Indonesia WOW Brand 2021	MarkPlus	Nasional
25 Maret 2021	Mortgage Peringkat 2	Produk dan layanan Brand	Indonesia WOW Brand 2021	MarkPlus	Nasional
25 Maret 2021	Saving Account Peringkat 2	Produk dan layanan Brand	Indonesia WOW Brand 2021	MarkPlus	Nasional
25 Maret 2021	E-money Peringkat 3	Produk dan layanan Brand	Indonesia WOW Brand 2021	MarkPlus	Nasional
25 Maret 2021	Mobile Banking Peringkat 3	Produk dan layanan Brand	Indonesia WOW Brand 2021	MarkPlus	Nasional
25 Maret 2021	Digital Saving Peringkat 3	Produk dan layanan Brand	Indonesia WOW Brand 2021	MarkPlus	Nasional
25 Maret 2021	Digital Lounge Peringkat 3	Produk dan layanan Brand	Indonesia WOW Brand 2021	MarkPlus	Nasional
25 Maret 2021	BrilianPreneur UMKM Export nominasi Gold	BTL	Branding Campaign Award	MarkPlus	Nasional
25 Maret 2021	BRIimo nominasi Gold	Digital	Branding Campaign Award	MarkPlus	Nasional
30 Maret 2021	Penurunan Emisi Korporasi Sektor Emiten Perbankan Kategori Green	Emiten Perbankan	Penghargaan Emisi Korporasi	Beritasatu	Nasional
30 Maret 2021	Penurunan Emisi Korporasi Sektor BUMN Perbankan Kategori Green	BUMN Perbankan	Penghargaan Emisi Korporasi	Beritasatu	Nasional
31 Maret 2021	The Most Innovative Conventional Bank for The Ultra Micro Digital Risk Management Framework	Perbankan	Indonesia Digital Innovation Awards (IDIA) 2021	Warta Ekonomi	Nasional
31 Maret 2021	The Best IT Development & Innovation	Transformasi Teknologi Digital	Digital Technology & Innovation Award (Digitech) 2021	Majalah Itech	Nasional
31 Maret 2021	The Best IT Leadership in Banking Industries	Transformasi Teknologi Digital	Digital Technology & Innovation Award (Digitech) 2021	Majalah Itech	Nasional



Tanggal	Penghargaan	Kategori	Acara	Penyelenggara	Level
31 Maret 2021	The Best Chief Information Officer	Transformasi Teknologi Digital	Digital Technology & Innovation Award (Digitech) 2021	Majalah Itech	Nasional
31 Maret 2021	Program Kepedulian Sosial Bantu Dampak COVID-19	CSR	Merdeka Award 2021	Merdeka.com	Nasional
7 April 2021	The Best CEO	Company	iNews Maker Awards 2021	iNews TV	Nasional
7 April 2021	Best of The Best Innovation Company	Company	iNews Maker Awards 2021	iNews TV	Nasional
8 April 2021	Sunarsjo sebagai The Best CEO perusahaan Tbk	BUMN & Anak Perusahaan BUMN	10 th Anugerah BUMN 2021	BUMN Track	Nasional
8 April 2021	Sunarsjo sebagai CEO Strategic Orientation Perusahaan (Tbk)	BUMN & Anak Perusahaan BUMN	10 th Anugerah BUMN 2021	BUMN Track	Nasional
8 April 2021	The Best Corporate (Tbk)	BUMN & Anak Perusahaan BUMN	10 th Anugerah BUMN 2021	BUMN Track	Nasional
8 April 2021	Terbaik 1 Tata Kelola Perusahaan (GCG)	BUMN & Anak Perusahaan BUMN	10 th Anugerah BUMN 2021	BUMN Track	Nasional
8 April 2021	Terbaik 1 Transformasi Bisnis & Organisasi	BUMN & Anak Perusahaan BUMN	10 th Anugerah BUMN 2021	BUMN Track	Nasional
21 April 2021	KPR BRI sebagai brand penyedia solusi di tengah pandemi	Brand penyedia solusi	Liputan6.com Award	Liputan6.com	Nasional
22 April 2021	Bank Buku 4	Corporate	Corporate Branding PR Award 2021	Iconomics	Nasional
22 April 2021	Gold Champion in Corporate Social Responsibility Program	BUMN	BISRA 2021	Bisnis Indonesia	Nasional
22 April 2021	Bintang 5	Corporate	TOP CSR 2021	Top Business	Nasional
22 April 2021	Top Leader on CSR Commitment	Corporate	TOP CSR 2021	Top Business	Nasional
29 April 2021	Emisi Korporasi Terbaik 2021	Corporate	Emisi Korporasi 2021	Beritasatu	Nasional
30 April 2021	Inovasi Digital Layanan Kredit dan Pendampingan UMKM	Layanan Perbankan	GATRA Innovation Awards	GATRA	Nasional
20 Mei 2021	Best Fintech for Digital CX: Ceria	Banking	Digital CX Awards 2021	The Digital Banker	Internasional
20 Mei 2021	Best Use of Data and Analytics for CX: BRIBrain	Banking	Digital CX Awards 2021	The Digital Banker	Internasional
25 Mei 2021	3G Best of The Best Award (Microfinance) 2021	Microfinance	Global Good Governance Awards 2021	Cambridge IFA	Internasional Internasional
25 Mei 2021	3G Corporate Governance Disclosure Award 2021	Corporate	Global Good Governance Awards 2021	Cambridge IFA	Internasional
3 Juni 2021	BRI Platinum Trophy Peringkat 1	Bank Umum Konvensional	Infobank 10 th Digital Brand Awards	Infobank	Nasional
3 Juni 2021	KKB BRI Golden Trophy Peringkat 1	KKB Bank Umum Konvensional	Infobank 10 th Digital Brand Awards	Infobank	Nasional
3 Juni 2021	BRIZZI Golden Trophy Peringkat 1	e-money Bank	Infobank 10 th Digital Brand Awards	Infobank	Nasional



Tanggal	Penghargaan	Kategori	Acara	Penyelenggara	Level
3 Juni 2021	Deposito BRI Best Overall Peringkat 2	Deposito Bank Umum Konvensional	Infobank 10 th Digital Brand Awards	Infobank	Nasional
3 Juni 2021	KPR BRI Best Overall Peringkat 3	KPR Bank Umum Konvensional	Infobank 10 th Digital Brand Awards	Infobank	Nasional
3 Juni 2021	Tabungan BRItama Peringkat 3	Tabungan Bank Umum Konvensional	Infobank 10 th Digital Brand Awards	Infobank	Nasional
9 Juni 2021	Best of the Best Company	BUMN	BUMN Marketeers Awards 2021	Markplus.inc	Nasional
9 Juni 2021	The Most Promising Company in Strategic Marketing	BUMN	BUMN Marketeers Awards 2021	Markplus.inc	Nasional
16 Juni 2021	Best Domestic Private Bank	Domestic Private Banking	Private Banking Awards 2021	Asiamoney Award	Internasional
16 Juni 2021	Best for Wealth Transfer/ Succession Planning	Wealth Transfer/ Succession Planning	Private Banking Awards 2021	Asiamoney Award	Internasional
16 Juni 2021	Best for HNW	HNW	Private Banking Awards 2021	Asiamoney Award	Internasional
2 Juli 2021	Best FX Bank for Retail Clients	Banks in Southeast Asia	11 th Alpha Southeast Asia Treasury & FX Awards	Alpha Southeast Asia	Internasional
2 Juli 2021	Best FX Bank for Money Market Product	Banks in Southeast Asia	11 th Alpha Southeast Asia Treasury & FX Awards	Alpha Southeast Asia	Internasional
2 Juli 2021	Best FX Bank for Structured Product	Banks in Southeast Asia	11 th Alpha Southeast Asia Treasury & FX Awards	Alpha Southeast Asia	Internasional
7 Juli 2021	Merek Terbaik Di Solo (Tabungan Anak)	Perbankan	SBBI Award 2021	Solopos	Nasional
7 Juli 2021	Merek Terbaik Di Solo (Kartu Bayar Digital)	Perbankan	SBBI Award 2021	Solopos	Nasional
15 Juli 2021	Top Corporate	Corporate	Top Corporate Award 2021	Tras n Co	Nasional
15 Juli 2021	Top CEO	Corporate	Top Corporate Award 2021	Tras n Co	Nasional
Juli 2021	Overall E-banking Peringkat 2	Bank Umum Konvensional	Banking Service Excellence Award 2021	Infobank	Nasional
Juli 2021	Overall Contact Center Peringkat 2	Bank Umum Konvensional	Banking Service Excellence Award 2021	Infobank	Nasional
Juli 2021	Overall Digital Channel Peringkat 3	Bank Umum Konvensional	Banking Service Excellence Award 2021	Infobank	Nasional
Juli 2021	Best Overall Performance Peringkat 5	Bank Umum Konvensional	Banking Service Excellence Award 2021	Infobank	Nasional
23 Juli 2021	Employees' Choice	Perbankan	Indonesia Best CEO Award 2021	Iconomics	Nasional
28 Juli 2021	Best Media Relation	Perbankan	Teropong Public Relation Award 2021	TeropongSenayan.com	Nasional



Tanggal	Penghargaan	Kategori	Acara	Penyelenggara	Level
28 Juli 2021	Best CSR Communication	Perbankan	Teropong Public Relation Award 2021	TeropongSenayan.com	Nasional
28 Juli 2021	The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance	Perbankan	GRC & Performance Excellence Award 2021	BusinessNews Indonesia	Nasional
28 Juli 2021	The Best Chief Compliance Officer (CCO)	Perbankan	GRC & Performance Excellence Award 2021	BusinessNews Indonesia	Nasional
28 Juli 2021	The Best Chief Risk Management Officer	Perbankan	GRC & Performance Excellence Award 2021	BusinessNews Indonesia	Nasional
28 Juli 2021	The Best Overall for Corporate Governance & Performance 2021	Perbankan	GRC & Performance Excellence Award 2021	BusinessNews Indonesia	Nasional
28 Juli 2021	The Best CEO	Perbankan	GRC & Performance Excellence Award 2021	BusinessNews Indonesia	Nasional
28 Juli 2021	The Best Chief Compliance Officer	Perbankan	GRC & Performance Excellence Award 2021	BusinessNews Indonesia	Nasional
28 Juli 2021	The Best Chief Risk Management Officer	Perbankan	GRC & Performance Excellence Award 2021	BusinessNews Indonesia	Nasional
28 Juli 2021	The Best Board of Commissioners in Banking Industries	Perbankan	GRC & Performance Excellence Award 2021	BusinessNews Indonesia	Nasional
19 Agustus 2021	Top Corporate Social Responsibility of The Year	CSR	Top Corporate Social Responsibility of The Year 2021	Infobrand	Nasional
24 Agustus 2021	Bank Terbaik 2021	Bank Umum dengan Modal Inti > 30 T	Majalah Investor Awards	Beritasatu	Nasional
24 Agustus 2021	Bank dengan Nasabah UMKM Terbesar	Perbankan	Majalah Investor Awards	Beritasatu	Nasional
25 Agustus 2021	Indonesia Best Bank 2021 with Great Financial Health and Corporate Performance: Maintaining Investor Relationship	BUKU 4 with total assets over 5 trillion	Best Bank Award 2021	Warta Ekonomi	Nasional
7 September 2021	Leading in Precedented Time: Predikat sangat bagus tahun kerja 2020	Perbankan	26 th Infobank Awards 2021	Infobank	Nasional
7 September 2021	Leading in Precedented Time: Predikat sangat bagus 20 tahun beruntun: Diamond Trophy	Perbankan	26 th Infobank Awards 2021	Infobank	Nasional
7 September 2021	Leading in Precedented Time: The Most Profitable Bank kelas Bank Buku 4: indikasi ROA & ROE selama 6 tahun terakhir	Perbankan	26 th Infobank Awards 2021	Infobank	Nasional



Tanggal	Penghargaan	Kategori	Acara	Penyelenggara	Level
7 September 2021	Leading in Precedented Time: Penghargaan individu Pak Sunarso terpilih sebagai The Best CEO 2021	Perbankan	26 th Infobank Awards 2021	Infobank	Nasional
15 September 2021	The Best Nusantara CSR Awards 2021/The Best CSR Of The Year	CSR	Nusantara CSR Awards 2021	La Tofi School Of CSR	Nasional
15 September 2021	CEO CSR Of The Year 2021 untuk Direktur Utama BRI (Bapak Sunarso)	CSR	Nusantara CSR Awards 2021	La Tofi School Of CSR	Nasional
20 September 2021	Indonesia's Best Bank for SMEs 2021	Perbankan	Best Bank Awards	Asiamoney	Internasional
7 Oktober 2021	Special Award For Digital Resiliency	Corporate	IDC Future of Enterprise Award	IDC	Internasional
7 Oktober 2021	CIO of The Year	Corporate	IDC Future of Enterprise Award	IDC	Internasional
8 Oktober 2021	2021 Best Stellar Workplace in Digital Transformation Readyness Category	Corporate	Stellar Workplace Award	Kontan	Nasional
8 Oktober 2021	2021 Best Stellar Workplace in Innovative Engagement During Pandemic Category	Corporate	Stellar Workplace Award	Kontan	Nasional
8 Oktober 2021	2021 Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment & Satisfaction	Corporate	Stellar Workplace Award	Kontan	Nasional
19 Oktober 2021	The Best Financial Performance Bank	Keuangan	Tempo Financial Award 2021	Tempo	Nasional
19 Oktober 2021	The Best Bank In Digital Services	Keuangan	Tempo Financial Award 2021	Tempo	Nasional
19 Oktober 2021	The Best Bank In Financial Sustainability	Keuangan	Tempo Financial Award 2021	Tempo	Nasional
22 Oktober 2021	Platinum Trophy	BUMN	Infobank Top BUMN 2021	Infobank	Nasional
22 Oktober 2021	The Best Dividen Contributor	BUMN	Infobank Top BUMN 2021	Infobank	Nasional
22 Oktober 2021	Sunarso Sebagai "The Best CEO In Value Creation"	BUMN	Infobank Top BUMN 2021	Infobank	Nasional
10 November 2021	Most Popular Leader in Social Media (Pak Sunarso)	PR	PR Indonesia	PR Indonesia	Nasional
19 November 2021	Public Bank Company Platinum Award	Public Bank Company	Indonesia Finance Award IV 2021	Economic Review	Nasional
19 November 2021	Tokoh Keuangan 2021 (Sunarso)	Keuangan	Indonesia Finance Award IV 2021	Economic Review	Nasional
23 November 2021	Pemimpin Humas/Public Relation Berpengaruh 2021	PR	PR Indonesia	PR Indonesia	Nasional



Tanggal	Penghargaan	Kategori	Acara	Penyelenggara	Level
24 November 2021	Outstanding Corporate Social Responsibility in Handling Pandemic	CSR	Indonesia Awards 2021	MNC Televisi Network	Nasional
24 November 2021	Penghargaan Utama Untuk Integrated CSR Strategy for BRILiaN Tourism Village Development	CSR	Anugerah CSR IDX Channel 2021	IDX Channel	Nasional
25 November 2021	Bank Peserta Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Terbaik: Bank Buku 3 & 4	Perbankan	Bank Indonesia Award	Bank Indonesia	Nasional
25 November 2021	Bank Konvensional Pendukung Pengadlan Moneter Rupiah dan Valas Terbaik	Perbankan	Bank Indonesia Award	Bank Indonesia	Nasional
25 November 2021	Bank Mendukung UMKM Terbaik: Bank Buku 3 & 4	Perbankan	Bank Indonesia Award	Bank Indonesia	Nasional
25 November 2021	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) QRIS Dengan Perorma Terbaik	Perbankan	Bank Indonesia Award	Bank Indonesia	Nasional
29 November 2021	Top 20 Financial Institution 2021	Corporate	Top 20 Financial Institution 2021	The Finance	Nasional
29 November 2021	Best CTO In Banking 2021	Best CTO In Banking 2021	Top 20 Financial Institution 2021	The Finance	Nasional
30 November 2021	Top CFO In Enterprise Risk Management	Top CFO BUMN	Top BUMN Awards 2021	Bisnis Indonesia	Nasional
30 November 2021	Top Korporasi BUMN	Top Korporasi BUMN	Top BUMN Awards 2021	Bisnis Indonesia	Nasional
6 Desember 2021	The Most Participate Brand (Silver)	Brand	Co-Branding Awards 2021	Kememparekraf	Nasional
6 Desember 2021	The Most Creative Brand (Silver)	Brand	Co-Branding Awards 2021	Kememparekraf	Nasional
6 Desember 2021	The Best Associate Brand Exposure (Sliver)	Brand	Co-Branding Awards 2021	Kememparekraf	Nasional
8 Desember 2021	Indonesia Most Trusted Companies	CGPI	Indonesia Most Trusted Companies Award	IICG & Majalah SWA	Nasional
10 Desember 2021	Best Secondary Deal of the Year (for USD 6.72 Billion Rights Offering)	Perbankan	15th Annual Best Deal & Solution Awards 2021	Alpha Southeast Asia	Southeast Asia

Sertifikasi



Divisi	Sertifikasi	Masa Berlaku	Keterangan	Penerbit Sertifikasi
Payment Operation Division	ISO 9001:2015	12 Desember 2020 – 11 Desember 2023	Provision of payment system including RTGS & Clearing, Remittance & Collection, Settlement Treasury & E Banking, Cash Operation, ATM Cash Operation, Card Perso, ATM/CRM Cash Reconciliation 1, ATM/CRM Cash Reconciliation 2, Payment System Reconciliation, Trade Processing Center Jakarta, Trade Processing Center Surabaya and Quality Assurance	PT Lloyd's Register Indonesia
Procurement, Logistic Policy & Fixed Assets Management Division	ISO 9001:2015	26 November 2018 – 25 November 2021	Provision of Establishment Strategy and Policy of AT Management Division & Property Procurement Including Vendor Management	PT Lloyd's Register Indonesia
Procurement, Logistic Policy & Fixed Assets Management Division	ISO 9001:2015	29 November 2018 – 28 November 2021	Provision of Cost Estimation Processes	PT Lloyd's Register Indonesia
IT Strategy & Governance Division	IT Maturity Assessment Direktorat DTO Bank BRI	30 Desember 2020 – 30 Desember 2021	This certificate attests the Maturity Level of the Information Technology Governance through as assessment based on COBIT 4.1	PT Sharing Vision Indonesia
Payment Operation Division	ISO 27001:2013	13 November 2019 – 12 November 2022	The Management of information security in personalize debit card	PT BSI Group Indonesia
Divisi INF	ISO 27001:2013	29 Agustus 2019 – 28 Agustus 2022	The Management of information security in provision of spacecraft operation by Division of Satellite and Telecommunication Network	PT BSI Group Indonesia
Divisi INF	ISO 27001:2013	22 Desember 2020 – 21 Desember 2023	The information security management system of Data Center Facility BRI Ragunan Site and Tabanan Site	PT BSI Group Indonesia
Divisi DCE	ISO 27001:2013	10 April 2019 – 09 April 2022	The Management of information security in provision of BRI API platform by Digital Center of Excellence Division	PT BSI Group Indonesia
Divisi DCE	ISO 27001:2013	14 Desember 2018 – 13 Desember 2021	The Management of information security in provision of Big Data & Analytic by Digital Center of Excellence Division	PT BSI Group Indonesia
Divisi ISG	ISO 20000-1:2018	18 Oktober 2020 – 17 Oktober 2023	The service management system of Digital, Information Technology & Operation Directorate that deliver BRINets Express application for internal business unit at BRI	PT BSI Group Indonesia
Divisi Enterprise Data Management	ISO 27001:2013	14 Desember 2018 – 13 Desember 2021	The management of information security in provision of Big Data Advanced Analytics by Enterprise Data Management Division	PT BSI Group Indonesia
Divisi INF	Tier III Certification of Data Center Design	27 Juni 2020 – 27 Juni 2022	Data Center Design Certification that rates our Data Center with 99.982% uptime and operation.	Uptime Institute, Inc.



Divisi	Sertifikasi	Masa Berlaku	Keterangan	Penerbit Sertifikasi
Divisi INF	ISO 14644-1	17 November 2020 – 17 November 2021	Provision of air cleanliness in terms of the number of particles expressed as a concentration in air volume from our Data Center and its Infrastructures.	PT Data Clean Indonesia
Divisi INF	ISO 9001:2015	22 Desember 2020 – 22 Desember 2023	Provision of quality management and workflow processes of Data Center Infrastructure	PT BSI Group Indonesia
BRI Corporate University	ISO 9001:2015	30 Desember 2019 – 24 Desember 2022	Provision of Banking Training Services	PT Lloyd's Register Indonesia
Divisi PSKA	ISO 9001:2015	12 Desember 2020 – 12 Desember 2023	Quality Management System (QMS)	PT SGS Indonesia
Audit Intern Kantor Pusat	ISO 9001:2015	12 Desember 2020 – 12 Desember 2023	Quality Management System (QMS)	PT SGS Indonesia
Audit Intern Teknologi Informasi	ISO 9001:2015	12 Desember 2020 – 12 Desember 2023	Quality Management System (QMS)	PT SGS Indonesia
Procurement & Logistic Operation Division	ISO 37001:2016	10 Agustus 2020 – 9 Agustus 2023	Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Sucofindo
Procurement, Logistic Policy & Fixed Assets Management Division				
Divisi FMA	ISO 9001:2015	21 Januari 2018 – 21 Januari 2021	Quality Management System (QMS) untuk Divisi AMK BRI: <i>Design of Accounting Policy & Accounting Control, Preparation and Verification of Published Financial Statements, Budget Planning and Control and Corporate Financial & Tax Compliance.</i> Catatan: Sertifikat ISO 9001:2015 Sudah keluar dari PT SGS Indonesia, dijadwalkan terbit di bulan Februari 2021. Untuk saat ini baru diberikan Surat Keterangan rekomendasi ISO 9001:2015	PT SGS Indonesia
Divisi Marketing Communication	ISO 9001:2015	23 Okt 2019 – 22 Okt 2022	Quality Management System (QMS) Sertifikat ISO 9001: 2015 Sudah keluar dari PT Lloyd's Register Indonesia, Untuk fungsi Provision of Marketing Communication Support. No. <i>Approval</i> ISO 9001/00022513/ Llyod's Register	PT Lloyd's Register Indonesia
Divisi Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan Properti	ISO 37001:2016	10 Agustus 2020 – 9 Agustus 2023	Sistem Manajemen Anti Penyuapan (Anti-Bribery Management System)	Sucofindo
Divisi Pengadaan Barang dan Jasa				
Desk Estimasi				
Internal Audit	ISO 9001:2015	Maret 2021 – 4 Desember 2023	Quality Management System (QMS)	PT SGS Indonesia

» Nama dan Alamat Kantor Cabang serta Kantor Perwakilan Kantor Cabang

Kantor Pusat



Gedung BRI I dan II

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
 Jakarta 10210
 Telp : (021) 2510244, 2510254, 2510264
 Faks : (021) 2500065, 2500077

Regional Office

<p>Yogyakarta</p> <p>Jl. Cik Di Tiro No. 3 Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta Telp : (0274) 510850, 520268 Faks : (0274) 514166, 584883 Email : h0197@corp.bri.co.id</p>	<p>Bandar Lampung</p> <p>Jl. Raden Intan No. 51, Kel. Tanjung Karang Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung, Lampung 35118 Telp : (0721) 259340 Faks : (0721) 259397 Email : j0449@corp.bri.co.id</p>	<p>Bandung</p> <p>Gedung Menara BRI Lt. 4 Jl. Asia Afrika 57 - 59, Kel. Braga, Kec. Sumur Bandung, Bandung 40111 Telp : (022) 4200363, 4207977 Faks : (022) 4236710 Email : f0198@corp.bri.co.id</p>
<p>Banjarmasin</p> <p>Jl. Jend A. Yani KM 3,5 No. 151 Banjarmasin Telp : (0511) 3252056, 3257057, 3251647, 3251649 Faks : (0511) 3252992, 32521649 Email : L0204@corp.bri.co.id</p>	<p>Denpasar</p> <p>Jl. Jl. Dr. Kusuma Atmaja No. 1, Denpasar Telp : (0361) 228715 Faks : (0361) 225402 Email : M0203@corp.bri.co.id</p>	<p>Jakarta 1</p> <p>Jl. Veteran No. 8, Jakarta Pusat Telp : (021) 3840802 Faks : (021) 3453685 Email : e0199@corp.bri.co.id</p>
<p>Jakarta 2</p> <p>Gedung Mulia Lt. 2 No. 72 Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan 13330 Telp : (021) 52920581, 52920585 Faks : (021) 52920586, 52920587 Email : i0317@corp.bri.co.id</p>	<p>Jakarta 3</p> <p>Jl. Kapten Soebianto Djojokusumo Kav. CBD II No. I, Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong Telp : (021) 29703751 ex 52 Faks : (021) 7255732 Email : q0853@corp.bri.co.id</p>	<p>Jayapura</p> <p>Gedung BRI Jl. Pasifik Permai, Kompleks Ruko Dok II, Kel. Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99112 Telp : (0967) 524652, 524453 Faks : (0967) 524862, 537191 Email : 0856@corp.bri.co.id</p>
<p>Makassar</p> <p>Jl. Jl. Ahmad Yani No. 8 Kel. Pattunuang Kec. Wajo, Kota Makassar Telp : (0411) 312498, 323507 Faks : (0411) 312731 Email : p0202@corp.bri.co.id</p>	<p>Malang</p> <p>Jl. Laksmana Martadinata 80 Lt. 4, Malang Telp : (0341) 555422, 555425, 555620, 555423, 555420 Faks : (0341) 555421 Email : R0854@corp.bri.co.id</p>	<p>Manado</p> <p>Jl. Sarapung No. 4-6, Manado Telp : (0431) 863592, 863378 Faks : (0431) 862779, 866966 Email : n0254@corp.bri.co.id</p>
<p>Medan</p> <p>Gedung Uniland Plaza West Tower Lt. 7-9 Jl. M.T. Haryono No. A-1 Medan Telp : (061) 45256666, 4528323 Faks : (061) 4536082 Email : b0201@corp.bri.co.id</p>	<p>Padang</p> <p>Jl. Bagindo Azis Chan No. 30 Padang Telp : (0751) 7052111, 7052528/(Sementara) (0751) 71045, 778910 892311, 892312 Faks : (0751) 7054995/(0751) 72653 Email : C0205@corp.bri.co.id</p>	<p>Palembang</p> <p>Jl. Kapten A. Rivai No. 15, Palembang Telp : (0711) 310173, 310178 Faks : (0711) 312343 Email : d0200@corp.bri.co.id</p>



Regional Office

Pekanbaru	Semarang	Surabaya
Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru Telp : (0761) 7865018 Faks : (0761) 7865019 Email : x0855@corp.bri.co.id	Jl. Teuku Umar No. 24 Semarang Telp : (024) 8311110 Faks : (024) 8318436 Email : Admin.0196@corp.bri.co.id	Gedung BRI Tower Lt. 20 Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 122 – 138 Surabaya Telp : (031) 5324230 Email : K0146@corp.bri.co.id

Kantor Cabang Khusus

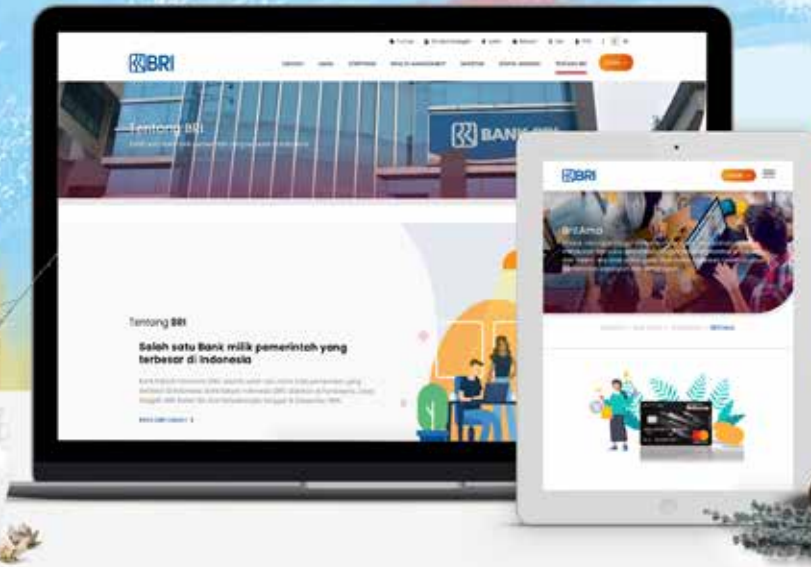
Gedung BRI II

Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46 Jakarta Pusat
Telp: (021) 5709060
Faks: (021) 5713181

Kantor Cabang Luar Negeri

BRI New York Agency 140 Broadway, 36th Floor, Suite: 3610, New York, NY 10005 Telp : +1 (212) 379 3840 Faks : +1 (212) 379 3850 Web : https://www.brinya.com Email : brinya@brinya.com	BRI Hong Kong Representative Office Room 2211, 22/F. Lippo Centre Tower II 89 Queensway, Hong Kong Telp : +852 2527 1318 Faks : +852 2861 3693 Web : https://www.brihongkong.com Email : brihk@brihongkong.com	BRI Cayman Island Branch Harbour Place, 5th Floor, 103 South Church Street, P.O. Box 1353 GT, Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands Telp : +1 (212) 379 3840 Faks : +1 (212) 379 3850 Web : -
BRI Singapore Branch 50 Collyer Quay #08-06, OUE Bayfront, Singapore 049321 Telp : +65 6805 0680 Faks : +65 6509 1742 Web : https://bankbri.com.sg Email : bri.sg@bankbri.com.sg	BRI Timor Leste Colmera Branch Grand Diocese Colmera Complex, Rua Nicolau Doc Reis Lobato Colmera Dili, Timor Leste Telp : +670 3311372 Faks : +670 3310198 Web : - Email : timorleste@bri.co.id	BRI Timor Leste Sub Branch Futuhada Time Square Complex, Rua Nicolau Doc Reis Lobato Fatuhada, Timor Leste Telp : +670 3310436
BRI Timor Leste Sub Branch Hudilaran Top One Complex, Rua Hudilaran Bairopite, Timor Leste Telp : +670 3311378	BRI Timor Leste Sub Branch Audian Rua 12 De Novembro No. 2, Santa Cruz - Municipiu, Timor Leste Telp : +670 3311208	BRI Taipei Branch No. 166, Section 3, Nanjing East Road Zhongshan District, Taipei City, Taiwan Telp : +886 2 2721 6330 Faks : +886 2 2721 0320 Web : https://www.britaipei.com Email : britaipei@corp.bri.co.id

» Informasi yang Tersedia pada Website



Sebagai perusahaan terbuka, BRI memberikan kemudahan akses informasi kepada seluruh *stakeholder* melalui situs *web* resmi BRI dengan alamat www.bri.co.id yang berdasar pada peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015. POJK tersebut mewajibkan *web* perusahaan emiten untuk mencantumkan informasi, yakni:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan; dan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Informasi pada *web* BRI terdiri dari:

- Informasi umum tentang BRI yang terdiri dari: Sejarah BRI, Visi dan Misi, Informasi Umum Emiten, Manajemen, dan Informasi Bagi Investor.
- Informasi tentang produk Simpanan, yang terdiri dari: Tabungan, Deposito dan Giro BRI.
- Informasi tentang produk Pinjaman, yang terdiri dari: Pinjaman Mikro, Pinjaman Ritel Komersial dan Menengah, serta BRIGuna.
- Informasi tentang produk Internasional, yang terdiri dari: BRI Trade Finance & Services, BRIFast Remittance, Financial Institution, BRI Money Changer, Unit Kerja Luar Negeri.
- Informasi tentang Jasa Bank, yang terdiri dari: Jasa Bisnis, Jasa Keuangan, Jasa Kelembagaan, E-Banking, dan Treasury.

- Informasi tentang Produk Konsumer, yang terdiri dari: Kartu Kredit, Kredit Pemilikan Rumah, dan Kredit Kendaraan Bermotor.
- Informasi tentang Investasi Perbankan, yang terdiri dari: DPLK, ORI & SR, Jasa Wali Amanat, Jasa Kustodian.
- Informasi tentang Layanan Prioritas, yang terdiri dari: Produk Layanan & Privileges, Reksadana, Kartu BRIPrioritas, Outlet, Kriteria Nasabah.
- Informasi tentang Info Lelang, yang terdiri dari: Lelang Aset, Lelang Pengadaan.
- Informasi tentang GCG, yang terdiri dari: Rapat Umum Pemegang Saham, Anggaran Dasar, Struktur dan Kebijakan GCG, Kode Etik, *Asean Corporate Governance Scorecard*, Komite Audit termasuk Piagam Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, *Whistleblowing System*, dan Hak-hak Pemegang Saham.
- Pada bagian Karir, BRI membuka kesempatan berkarir kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi karyawan melalui menu *e-recruitment* BRI.
- Sementara bagian Hubungan Investor menjelaskan mengenai *overview*, Informasi Keuangan, GCG, Layanan bagi Pemegang Saham, *Event*, dan Berita.
- Selanjutnya pada bagian perusahaan anak memberikan informasi umum mengenai perusahaan anak dan dapat disambungkan dengan *website* masing-masing perusahaan anak.
- Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, *website* BRI telah memuat, Struktur Grup Perusahaan, Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta Informasi bagi Pemegang Saham.

Website BRI juga memenuhi standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang mencakup:

- Part A. *Rights of Shareholders*
- Part B. *Equitable Treatment of Shareholders*
- Part C. *Role of Stakeholder*
- Part D. *Disclosure & Transparency*
- Part E. *Responsibilities of the Board*

Secara keseluruhan, *Website* BRI telah mencerminkan komitmen BRI dalam menjunjung asas keterbukaan dan transparansi.





Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank



“Terbentuknya *Holding Ultra Mikro* yang mengintegrasikan seluruh layanan keuangan BRI, Pegadaian, dan PNM ke dalam satu ekosistem, semakin memperkuat peran BRI dalam mendukung pemberdayaan dan pengembangan usaha masyarakat, khususnya untuk usaha segmen mikro dan *ultra* mikro. Hal ini sejalan dengan *spirit* BRI yaitu memberikan layanan keuangan dengan *Go Smaller, Go Shorter* dan *Go Faster. Holding Ultra Mikro* juga akan berdampak pada semakin kuatnya peran BRI dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah”



» Tinjauan Perekonomian



Analisis Perekonomian Global

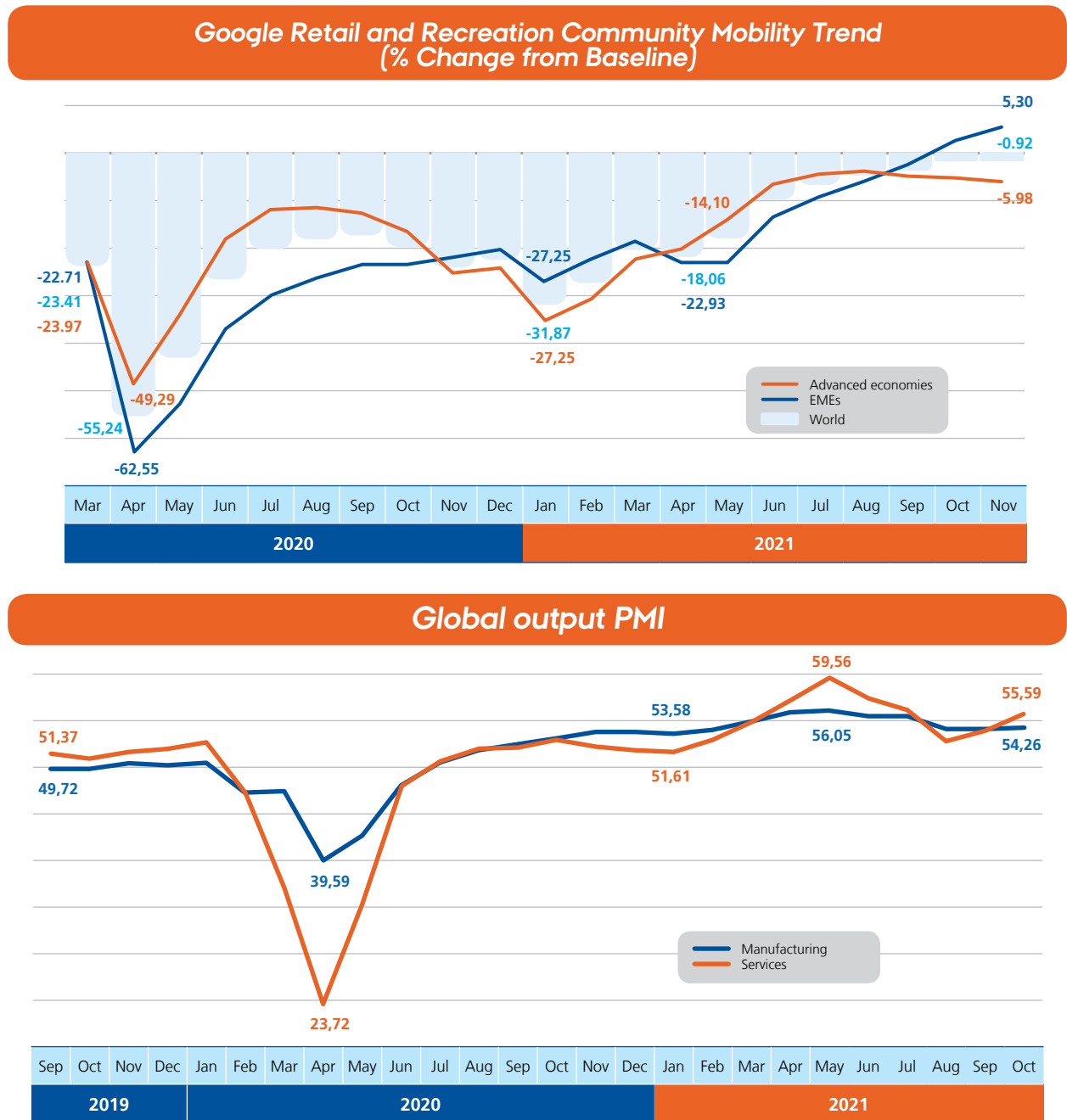
Pandemi COVID-19 yang terjadi pada pertengahan tahun 2020 menyebabkan pertumbuhan ekonomi global mengalami ketidakpastian dan berkontraksi di tahun tersebut. Hadirnya vaksin di awal tahun 2021 menjadi titik terang dan harapan akan pemulihan pandemi COVID-19. Hal ini menjadi dasar tahap awal pemulihan perekonomian global yang terjadi di tahun ini. Hadirnya vaksin diharapkan dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal dan roda perekonomian kembali bergerak sebagaimana mestinya. Pada Oktober 2021 lalu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan kembali pulih dan bergerak cukup ekspansif di atas level sebelum pandemi yaitu sebesar 5,9% YoY pada tahun 2021 dan 4,9% YoY pada tahun 2022.

Pemulihan ekonomi global dapat terlihat pada Gambar 1 yang menunjukkan peningkatan mobilitas masyarakat di tahun 2021 dan mendukung peningkatan aktivitas perekonomian yang ditandai dengan laju ekspansif dari *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur dan servis. Peningkatan aktivitas masyarakat tersebut terutama didorong oleh pelonggaran kebijakan *lockdown* dari Pemerintah berbagai negara seiring dengan penurunan kasus COVID-19 dan adanya vaksinasi. Keadaan tersebut menyebabkan aktivitas produksi dan manufaktur global mengalami tren yang meningkat. Meskipun demikian, tantangan terhadap pemulihan ekonomi dunia masih ada dari hadirnya varian baru COVID-19. Terkini, muncul varian baru yang disebut sebagai Omicron. Varian ini ditemukan pertama kali pada 24 November 2021 di Afrika Selatan.

Studi dari Jepang menunjukkan bahwa varian Omicron memiliki kecepatan penularan sebesar 4,2 kali lebih cepat dibandingkan dengan varian Delta. Kabar baiknya, sejauh ini varian Omicron

tidak menyebabkan tingkat kematian harian meningkat. Bahkan, beberapa produsen vaksin seperti Pfizer dan Moderna menyatakan produk mereka cukup ampuh untuk menangkal varian tersebut

Gambar 1 Pergerakan Mobilitas Masyarakat dan Laju *Purchasing Managers Index* (PMI) Global

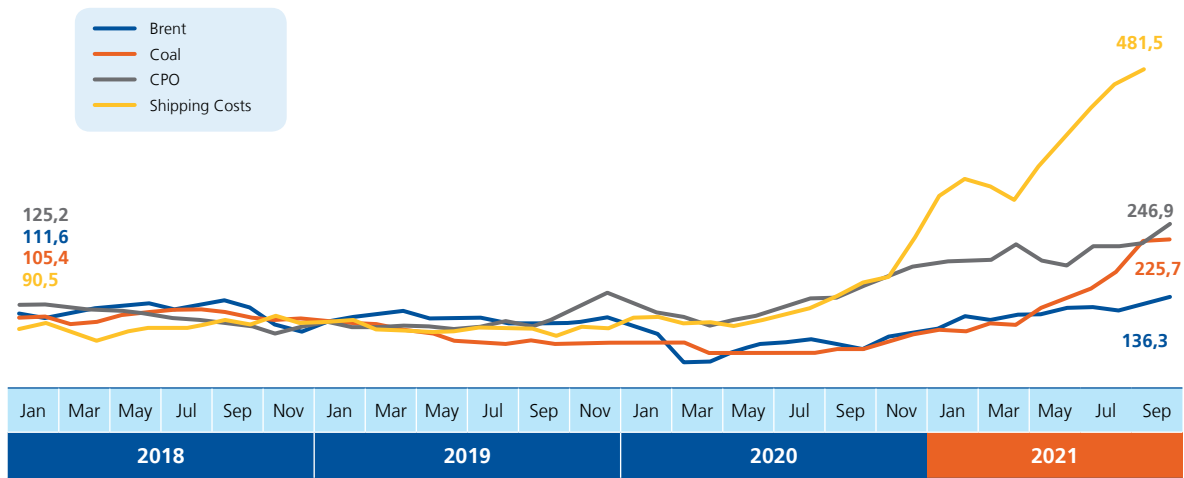


Sumber: Economic Outlook, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Desember 2021

Selain dinamika perkembangan pandemi, pemulihan ekonomi global yang berlanjut pada tahun 2022 turut diwarnai tantangan lain yang hadir sejak pertengahan Q3-2021. yaitu krisis energi global. Pada Agustus 2021 lalu, krisis energi terjadi dimulai di Inggris, harga gas alam di negara tersebut mengalami lonjakan harga yang signifikan. Krisis energi dipengaruhi oleh adanya peningkatan aktivitas ekonomi seiring dengan pemulihan ekonomi sehingga permintaan gas alam untuk kegiatan produksi meningkat cukup tajam. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan *supply* gas alam yang memadai, bahkan saat itu Rusia menurunkan *supply* gas alamnya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang substitusi gas alam

yaitu komoditas lain seperti batu bara, sehingga mengakibatkan peningkatan harga pada komoditas lain. *Tren* pemulihan ekonomi global juga mendapatkan tantangan dari disrupsi rantai pasok global yang sedang terjadi. *Shut down* sementara akibat pandemi yang dilakukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang logistik menjadi penyebab disrupsi rantai pasok dimana peningkatan permintaan dunia tidak dapat diimbangi kesiapan pengiriman barang akibat belum normalnya aktivitas perusahaan pengiriman barang. Peningkatan permintaan barang dan belum normalnya aktivitas pengiriman barang menyebabkan naiknya biaya pengiriman (*shipping costs*).

Gambar 2 Indeks Biaya Pengiriman dan Harga Komoditas (Januari 2019 = 100)

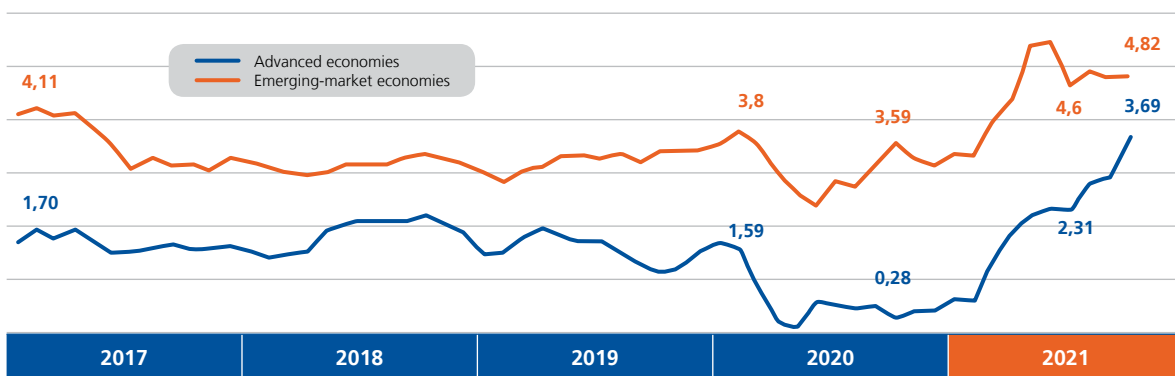


Sumber: Bloomberg, Oktober 2021, data diolah

Krisis energi yang menyebabkan harga komoditas menjadi mahal dan tingginya biaya pengiriman akibat disrupsi rantai pasok menyebabkan harga *input* global mengalami kenaikan (Gambar 2). Hal tersebut mendorong peningkatan tingkat inflasi di berbagai negara secara signifikan. Peningkatan tingkat inflasi terjadi pada hampir seluruh negara di dunia, utamanya pada negara-negara maju. Gambar 3 menunjukkan bagaimana curamnya pergerakan kenaikan inflasi pada kelompok negara

maju dibandingkan dengan negara berkembang. Selain tekanan harga *input*, tingginya peningkatan inflasi pada negara-negara maju dibandingkan negara berkembang disebabkan oleh peningkatan permintaan yang lebih tinggi terjadi pada negara maju. Hal tersebut karena laju vaksinasi yang lebih cepat sehingga aktivitas ekonomi kembali meningkat dan membuat permintaan konsumen meningkat.

Gambar 3 Headline Inflasi Consumer Price Index (CPI) pada Median Kelompok Negara (% YoY)

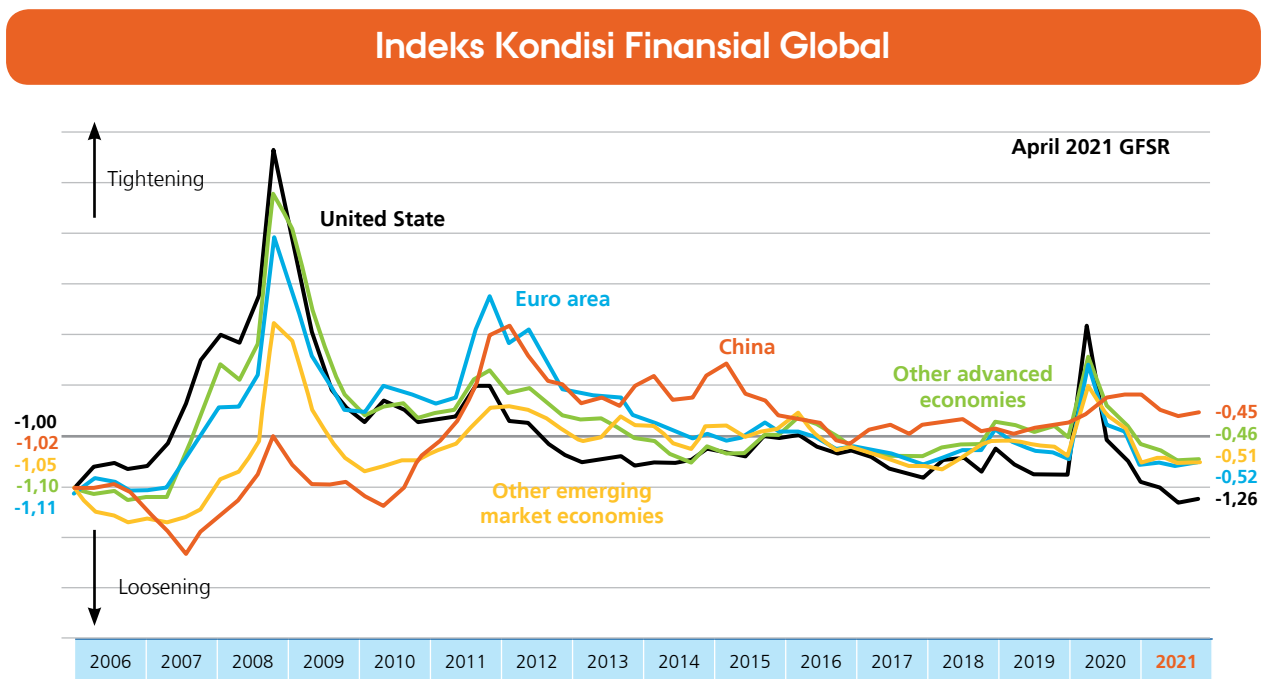


Sumber: Economic Outlook, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Desember 2021

Peningkatan tingkat inflasi global yang tinggi menyebabkan bank sentral dari berbagai negara mulai menormalisasi kebijakan moneter mereka, termasuk The FED. Tingkat inflasi AS (Amerika Serikat) pada tahun 2021 mengalami tren yang meningkat dan lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan The FED mengambil langkah untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter mereka, dimana mereka mengumumkan tapering off yang dimulai pada akhir November 2021. Kebijakan tapering off tersebut diperkirakan akan selesai pada Maret 2022, dan kemungkinan The FED akan mulai menaikkan suku bunga. Kebijakan tapering off dan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh The FED tentunya dapat memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi global, mengingat AS sebagai salah satu motor utama penggerak pemulihan ekonomi global saat ini.

Dari sektor finansial, kondisi keuangan global mengalami pergerakan yang lebih *loose* pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Gambar 4 menunjukkan indeks kondisi finansial global yang cenderung bergerak menurun pada tahun 2021. Hal ini mengimplikasikan bahwa sektor finansial global sudah mulai berkurang kecemasannya dan bergerak lebih baik. Kondisi ini terjadi baik pada negara maju maupun berkembang. Namun demikian, ke depan kondisi finansial global diperkirakan dapat kembali menegang dan berfluktuasi seiring normalisasi kebijakan yang dilakukan oleh berbagai bank sentral di dunia.

Gambar 4 Indeks Kondisi Finansial Global



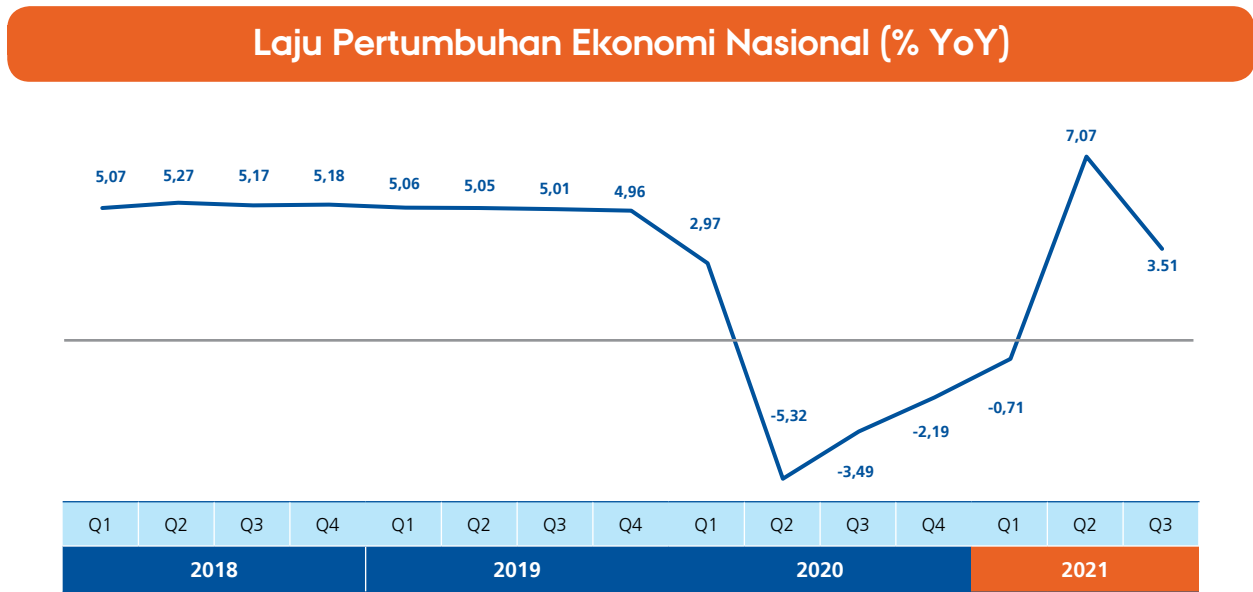
Sumber: World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF) Oktober 2021

Analisis Perekonomian Nasional

Tidak berbeda dengan kondisi perekonomian global yang mulai kembali pulih pada tahun 2021, perekonomian nasional juga mengalami hal yang serupa. Sempat terkontraksi ke level terendah pada Q2-2020 sebesar -5,32% YoY akibat dampak dari pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi nasional mulai kembali pulih secara perlahan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali bernilai positif pada Q2-2021 lalu dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,07% YoY. Angka tersebut jauh melebihi rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi yang berkisar 5% YoY. Namun, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut disebabkan oleh *low base effect*

yang terjadi karena kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup dalam pada Q2-2020 lalu. Walaupun demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada Q2-2021 yang terus berlanjut pada Q3-21 menunjukkan konsistensi perbaikan dalam arah pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap positif pada Q3-2021 sebesar 3,51% walaupun terdapat *second wave* COVID-19 akibat varian delta pada bulan Juli 2021. Gambar 5 menunjukkan pergerakan pertumbuhan ekonomi nasional sejak Q1-2018 hingga Q3-2021.

Gambar 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional (% YoY)

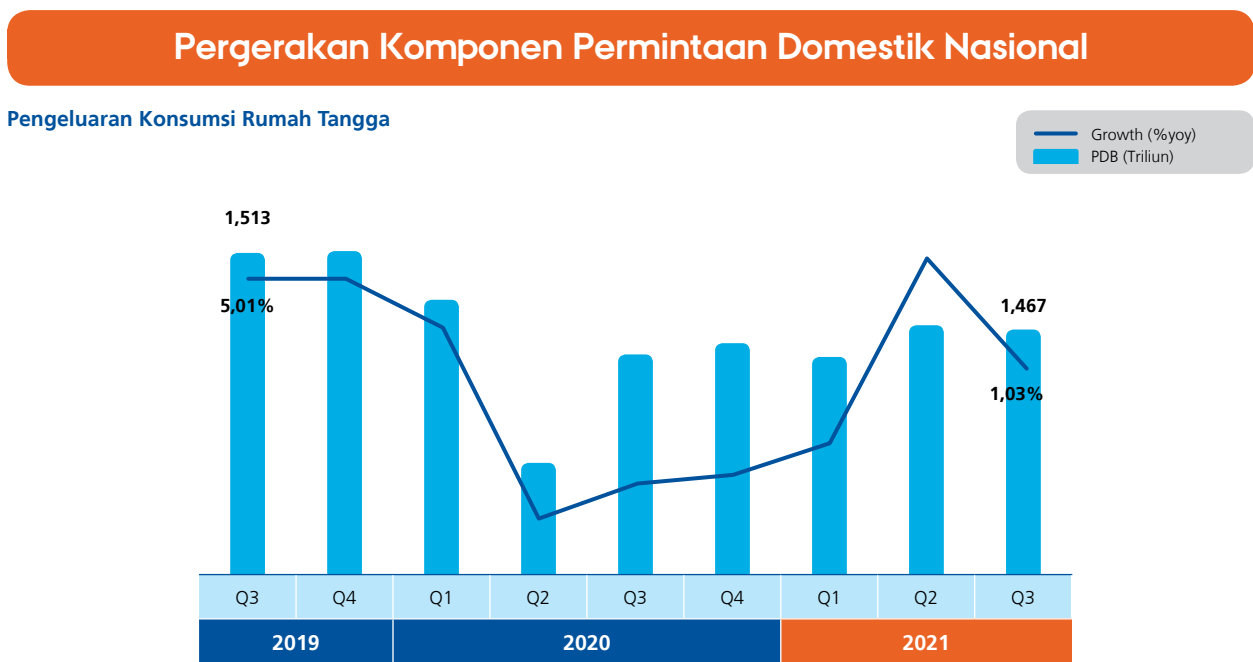


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) November 2021, data diolah

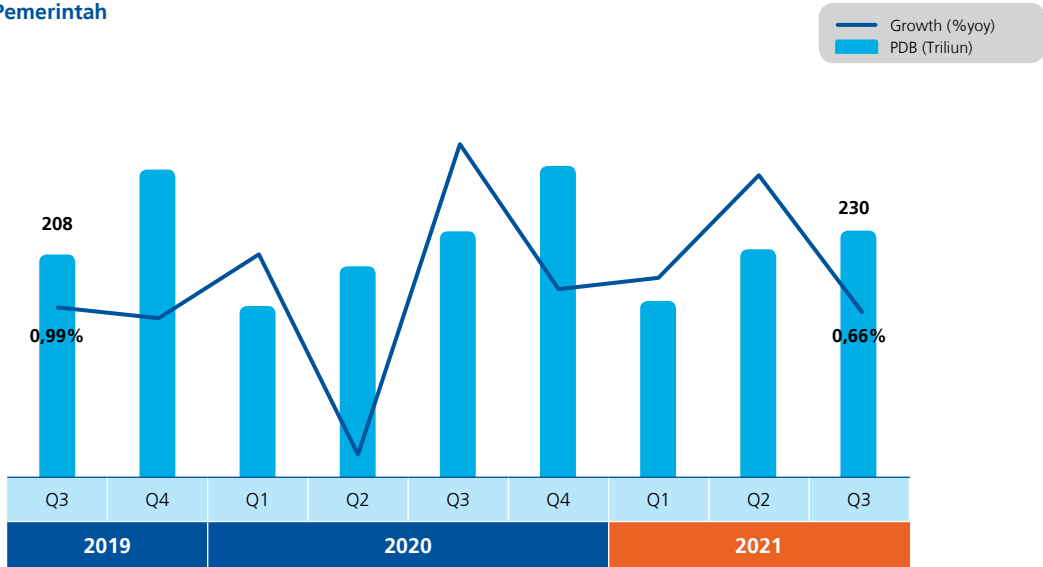
Dari sisi permintaan domestik secara agregat, seluruh komponen pengeluaran dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2021 telah menunjukkan pemulihan. Seluruh komponen permintaan domestik mengalami tren yang meningkat pada tahun 2021 dan relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 (Gambar 6). Dari Gambar 6, konsumsi rumah tangga terlihat meningkat pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pelonggaran kebijakan restriksi yang dilakukan oleh Pemerintah pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun

2020, dimana hal ini sejalan dengan menurunnya kasus COVID-19 dan peningkatan vaksinasi. Konsumsi Pemerintah juga bergerak meningkat secara konsisten sepanjang tahun 2021 dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi perdagangan internasional, kinerja ekspor nasional mengalami peningkatan sejak Q3-2020 hingga Q3-2021. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan harga komoditas yang menjadi andalan ekspor nasional. Sisi impor nasional juga bergerak meningkat pada tahun 2021, hal tersebut menjadi tanda peningkatan aktivitas produksi nasional.

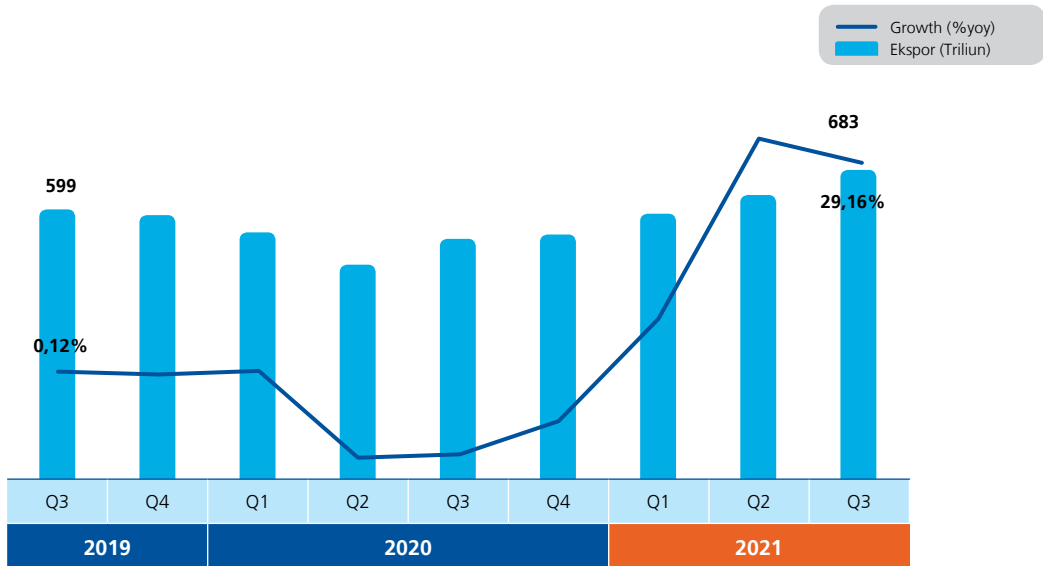
Gambar 6 Pergerakan Komponen Permintaan Domestik Nasional



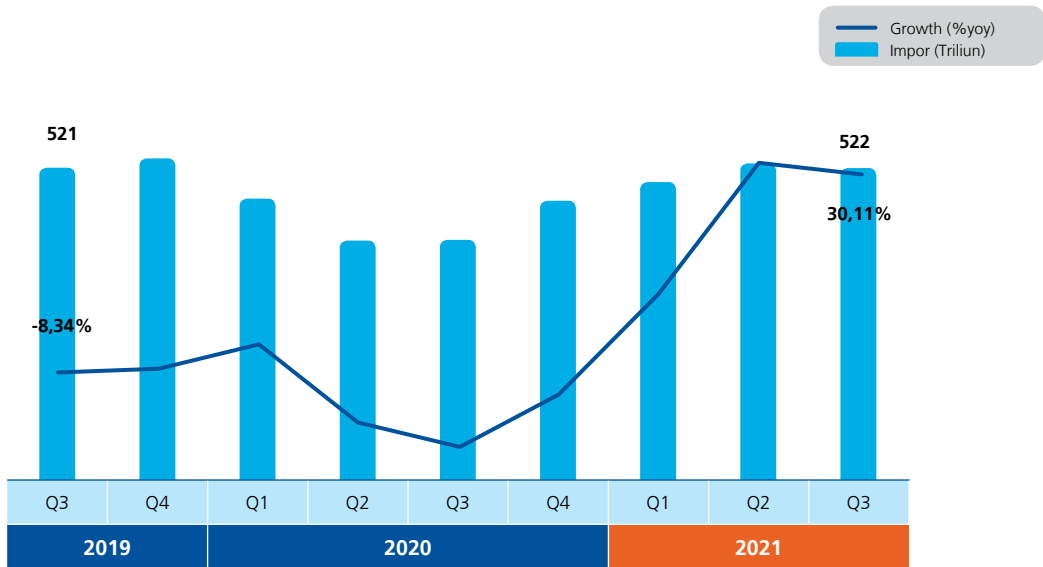
Pengeluaran Pemerintah



Ekspor



Impor

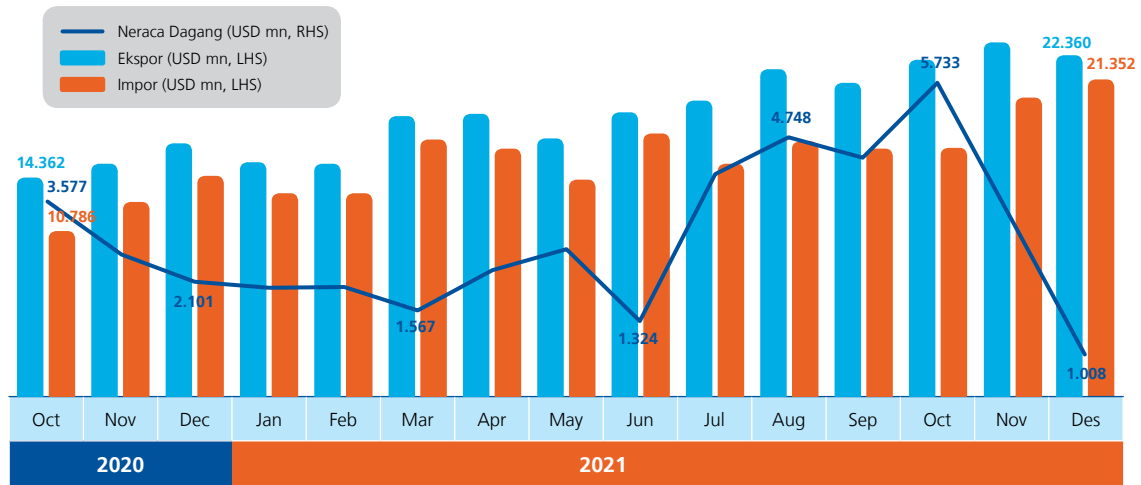


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) November 2021, data diolah

Selain pemulihan yang kuat pada sisi internal, ketahanan eksternal nasional juga menunjukkan tren perbaikan yang cukup konsisten di tahun 2021. Hal tersebut terlihat dari kinerja perdagangan internasional Indonesia yang cukup melesat di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Sepanjang tahun 2021, kinerja Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) secara konsisten mencatatkan nilai

surplus. Selain itu, nilai NPI pada tahun 2021 memiliki tren yang meningkat, berbeda dengan kinerja NPI pada tahun 2020 yang cenderung menurun di akhir tahun. Kinerja NPI yang konsisten mencatatkan surplus pada tahun 2021 disebabkan oleh nilai ekspor yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impornya (Gambar 7).

Gambar 7 Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia

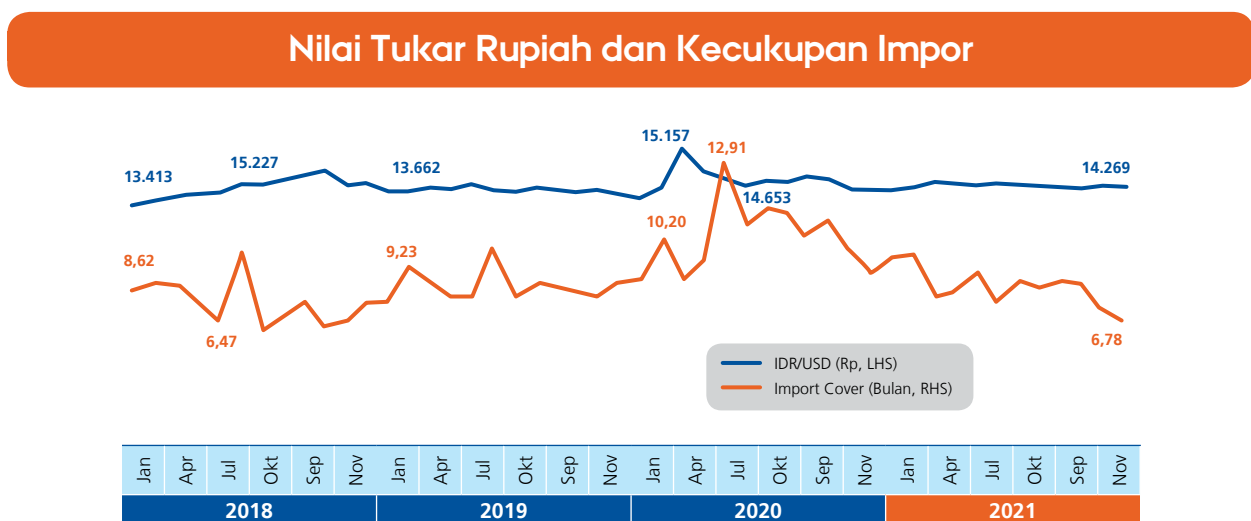


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) November 2021, data diolah

Kinerja Neraca Perdagangan nasional yang baik mendukung ketahanan eksternal dalam hal nilai tukar Rupiah terhadap USD yang bergerak stabil. Gambar 8 menunjukkan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang cenderung stabil di kisaran Rp14.200/Dollar AS hingga Rp14.500/Dollar AS. Rata-rata bulanan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS pada tahun 2021 sekitar Rp14.300/Dollar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata bulanan pada tahun 2020 sekitar Rp14.600/Dollar AS.

Kondisi tersebut tentunya didukung oleh kuatnya pemulihan ekonomi nasional, kebijakan moneter yang akomodatif oleh BI dan tingkat cadangan devisa nasional yang cenderung meningkat sepanjang tahun 2021. Hal tersebut membuat nilai kecukupan impor nasional (rasio cadangan devisa terhadap pembiayaan impor) cenderung stabil dan berada di atas 8 bulan pembiayaan impor, jauh di atas standar kecukupan impor internasional sebesar 3 bulan pembiayaan impor.

Gambar 8 Pergerakan Nilai Tukar dan Kecukupan Impor Nasional

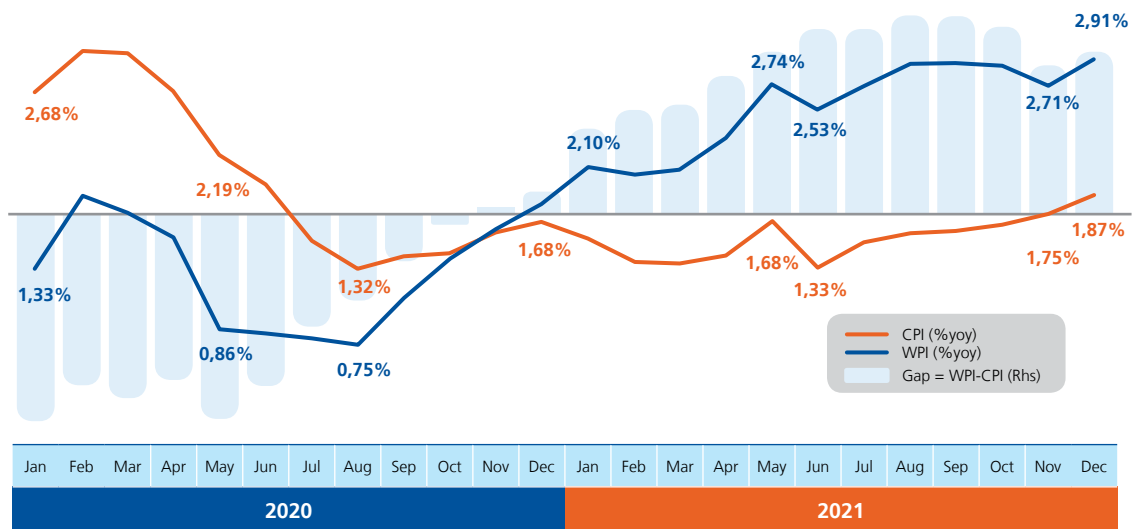


Sumber: Census and Economic Information Center (CEIC) Oktober 2021, data diolah

Pemulihan ekonomi nasional pada sisi internal maupun eksternal tidak lepas dari peran Bank Indonesia dengan kebijakannya yang bersifat akomodatif untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan menjaga kestabilan nilai Rupiah. Sepanjang 2021, BI menurunkan suku bunga sebanyak satu kali yakni pada Rapat Dewan Gubernur Februari 2021 sebesar 25 bps, dari 3,75% pa menjadi 3,50% pa. Hal tersebut dilakukan untuk terus mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kredit dan pada akhirnya mendorong kegiatan konsumsi dan investasi nasional. Kebijakan tersebut didukung pula pergerakan tingkat inflasi yang cenderung stabil dan konsisten berada di bawah 2% YoY pada tahun 2021, dimana angka tersebut berada di bawah sasaran inflasi BI sebesar $3 \pm 1\%$ YoY. Gambar 9 menunjukkan bagaimana pergerakan tingkat inflasi nasional sepanjang tahun 2021.

Pada tahun 2022, tingkat inflasi diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut didorong oleh peningkatan permintaan domestik yang sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional dan tekanan inflasi dari berbagai negara di dunia, khususnya *partner* dagang utama Indonesia. Kemungkinan naiknya inflasi dan rencana *tightening monetary policy* beberapa Bank Sentral Dunia khususnya The FED diperkirakan dapat mendorong BI untuk melakukan kebijakan moneter yang ketat di tahun 2022. Namun demikian, kebijakan *tightening monetary policy* yang dilakukan BI akan bersifat gradual dengan tetap melihat stabilitas nilai tukar dan tingkat inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Gambar 9 Pergerakan Tingkat Inflasi Consumer Price Index (CPI) dan Wholesale Price Index (WPI) Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Desember 2021, data diolah

Analisis Industri Perbankan

Di tengah situasi yang penuh tantangan dan ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, kinerja industri perbankan di Indonesia masih terjaga dengan baik. Berdasarkan data OJK per Oktober 2021, Rasio Kecukupan Modal (CAR) berada pada level 25,30%, lebih tinggi dibandingkan Oktober 2020 sebesar 23,83% maupun Desember 2020 sebesar 23,89%. Industri perbankan juga memiliki likuiditas yang memadai, seperti yang ditunjukkan oleh *Loan Deposit Ratio* (LDR) sebesar 78,09%.

Pada bulan Oktober 2021, total aset industri perbankan nasional adalah sebesar Rp9,824 triliun atau meningkat 8,27% YoY. Tren yang sama dapat dilihat pada pinjaman bank umum yang tumbuh 3,24% YoY menjadi Rp5,657 triliun. Hal ini menunjukkan menguatnya permintaan kredit seiring dengan menurunnya kasus

COVID-19 di Indonesia. Kualitas kredit masih terjaga dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada Oktober 2021 sebesar 3,22%, di bawah level maksimum sebesar 5% yang telah ditetapkan oleh regulator. Dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan sebesar 9,44% YoY menjadi Rp7,244 triliun. Situasi pandemi yang terus berlanjut mendorong masyarakat untuk menahan konsumsi, sehingga menyebabkan tren kenaikan dana pihak ketiga.

Dari sisi profitabilitas, industri perbankan nasional mencatat laba bersih sebesar Rp117 triliun per Oktober 2021 dengan rasio profitabilitas ROA yang menunjukkan peningkatan dimana ROA Industri Perbankan di Oktober 21 mencapai 1,92% lebih baik dibandingkan Oktober 2020 1,7% maupun Desember 2020 sebesar 1,59%.

Tabel Kinerja Industri Perbankan

Indikator	Oktober 2021	2020	2019	2018
Aset (Rp Miliar)	9.824.498	9.177.894	8.562.974	8.068.346
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	7.244.983	6.665.390	5.998.648	5.630.448
Kredit (Rp Miliar)	5.657.605	5.481.560	5.616.992	5.294.882
Laba Bersih (Rp Miliar)	117.996	104.718	156.487	150.013
Capital Adequacy Ratio/CAR (%)	25,30	23,89	23,40	22,97
Non Performing Loan/NPL Gross (%)	3,22	3,06	2,53	2,37
Net Interest Margin (NIM) (%)	4,52	4,45	4,91	5,14
Return on Assets/ROA before tax (%)	1,92	1,59	2,47	2,55
Beban Operasional dan Pendapatan Operasional/BOPO (%)	83,14	86,58	79,39	77,86
Loan to Deposits Ratio/LDR (%)	78,09	82,54	94,43	94,78

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, Oktober 2021)

Analisis Posisi BRI dalam Industri Perbankan

Sebagai perbandingan kinerja BRI terhadap industri perbankan, berikut ini merupakan rincian kinerja pertumbuhan BRI dibandingkan dengan rata-rata industri Perbankan.

Tabel Kinerja Pertumbuhan BRI Dibandingkan Industri Perbankan

(Bank Saja, dalam %)

Kinerja	BRI (Desember 2021)	Industri Perbankan (Oktober 2021)
Aset	10,62	8,27
Kredit	7,16	3,24
Dana Pihak Ketiga	7,14	9,44
Pendapatan Bunga Bersih	27,51	13,43
Laba Operasional	50,52	28,56
Laba Bersih	75,53	27,36

Sumber: Laporan Keuangan BRI (Bank Saja) Desember 2021; Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Oktober 2021

Total kredit yang disalurkan BRI sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp943,7 triliun. Pertumbuhan kredit BRI pada Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,16% YoY lebih baik jika dibandingkan dengan peningkatan kredit industri 3,24% YoY (Oktober 2021). Kualitas aset BRI masih terjaga dengan baik dengan NPL Desember 2021 berada di level 3,08% berada dibawah NPL Industri Oktober 2021 sebesar 3,22%. BRI menjalankan *soft landing strategy* dalam mengelola risiko kredit dimana BRI melakukan *assessment* terhadap risiko kredit sesuai dengan kondisi debitur dan melakukan *dowgrade* terhadap kredit yang tidak dapat dilakukan restrukturisasi meskipun secara regulasi dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi dan mengakui kualitas kredit yang direstrukturisasi dalam kategori lancar.

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI pada Desember 2021 sebesar 7,14% berada di bawah pertumbuhan DPK industri perbankan Oktober 2021 yang tumbuh sebesar 9,44%. BRI selektif dalam pertumbuhan DPK dengan fokus pertumbuhan pada CASA sejalan dengan strategi BRI untuk menurunkan *Cost of Fund*. Pada Desember 2021, CASA BRI 63,3% lebih baik dibandingkan CASA Industri 60,12% (Oktober 2021). Likuiditas BRI masih terjaga dengan

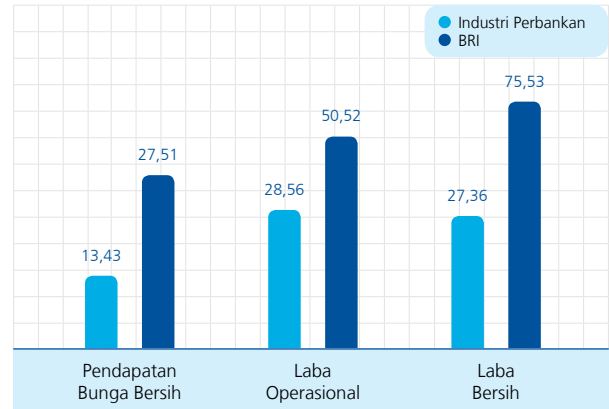
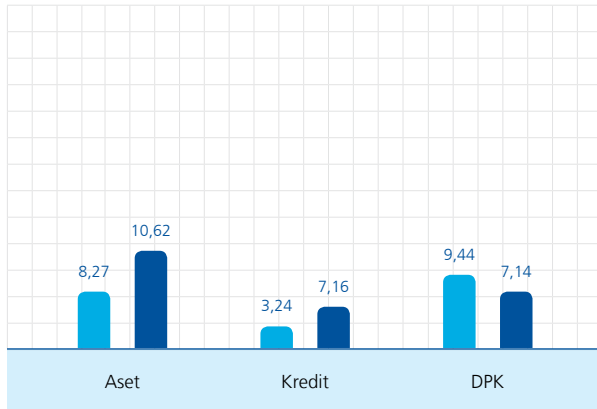
baik dimana LDR BRI Desember 2021 berada di level 83,67% lebih tinggi dibandingkan LDR Industri Oktober 2021 78,09%. Masih terdapat ruang bagi BRI untuk dapat mengoptimalkan LDR.

Dalam menjalankan operasionalnya, BRI terus meningkatkan efisiensi dan menjaga produktivitas selama masa Pandemi COVID-19. Efisiensi yang dilakukan tercermin pada rasio BOPO pada Desember 2021, dimana BOPO BRI berada di level 74,30%, di bawah BOPO secara industri perbankan pada oktober 2021 yang berada pada level 83,14%.

Pencapaian kinerja yang baik mendukung pencapaian laba BRI 2021 sebesar Rp32,2 triliun mengalami pertumbuhan 75,53% YoY di atas pertumbuhan industri sebesar 27,4% YoY pada oktober 2021. Pertumbuhan laba bersih BRI yang lebih baik dibandingkan industri didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga, efisiensi beban bunga serta pertumbuhan pendapatan operasional non-bunga yang lebih baik dibandingkan industri. Rasio profitabilitas BRI lebih baik dibandingkan industri yang tercermin dari ROA *before tax* Desember 2021 BRI 2,72% lebih baik dibandingkan ROA *before tax* Industri 1,92% (Oktober 2021).

Grafik Kinerja Pertumbuhan BRI Dibandingkan Industri Perbankan

(Bank Saja, dalam %)



Tabel Perbandingan Rasio BRI Dibandingkan Industri Perbankan

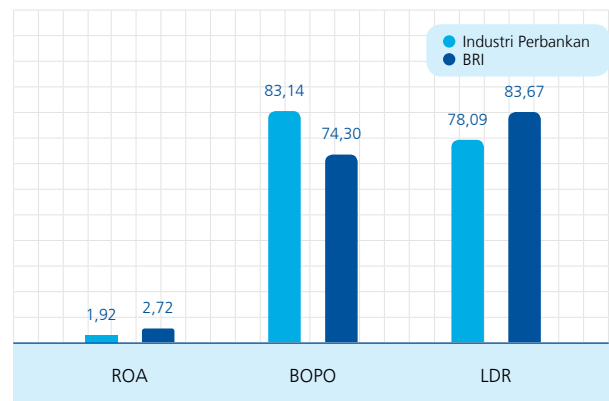
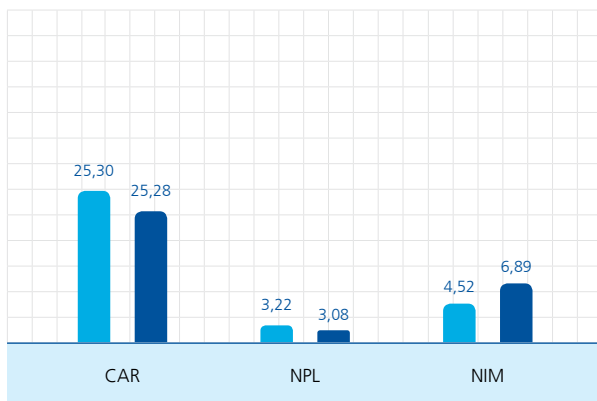
(Bank Saja, dalam %)

Kinerja Rasio	BRI (Desember 2021)	Industri Perbankan (Oktober 2021)
Capital Adequacy Ratio (CAR)	25,28	25,30
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,08	3,22
Net Interest Margin (NIM)	6,89	4,52
Return on Assets (ROA before tax)	2,72	1,92
Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)	74,30	83,14
Loan to Deposits Ratio (LDR)	83,67	78,09

Sumber: Laporan Keuangan BRI Desember 2021; Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Oktober 2021

Grafik Perbandingan Rasio Bank Dibandingkan Industri Perbankan

(Bank Saja, dalam %)



» Tinjauan Operasional



Strategi Bank

Pengendalian pandemi COVID-19 yang baik di Indonesia pada akhir tahun 2021 mulai berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Namun demikian, varian COVID-19 yang masih bermutasi dapat menjadi potensi disrupsi di kemudian hari yang dapat berpengaruh pada seluruh aktivitas perekonomian nasional, termasuk bisnis industri perbankan.

Di sisi lain, pandemi telah merubah perilaku masyarakat dengan terbiasa dalam pemanfaatan teknologi digital. Hal tersebut mendorong tantangan baru dalam hal persaingan layanan perbankan digital. Hadirnya layanan perbankan digital juga memberikan peluang dalam memberikan layanan inovatif kepada nasabah.

Dalam menghadapi tantangan dan juga peluang yang hadir, BRI melakukan transformasi agar dapat bersaing dan tumbuh secara berkelanjutan. BRI telah menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2021 - 2025 dengan tema "BRIVolution 2.0". Dalam BRIVolution 2.0, BRI menetapkan visi untuk menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion*. Untuk mewujudkan visi

tersebut, BRIVolution 2.0 akan diimplementasikan dalam 3 fase yang saling terkait dan berkesinambungan yaitu:

1. *Strengthen the Core* (2021 - 2022)
2. *Scale up and Scope up* (2023 - 2024)
3. *Sustain* (2025 dan seterusnya).

Tahun 2021 masih merupakan tahun transisi bagi BRI. BRI memperkuat kapasitas internal perusahaan untuk dapat lebih kuat mendorong akselerasi bisnis di masa pandemi. Semangat penguatan atas aspek-aspek inti (bisnis beserta *enabler*-nya) sebagai strategi jangka pendek fundamental terus dilakukan selama tahun 2021.

Pada tahapan selanjutnya, tahun 2022-2023 akan menjadi tahun bagi BRI dalam memperkokoh konglomerasi keuangan BRI Grup. Tujuan tersebut akan direalisasikan dengan melakukan perluasan lingkup bisnis (*scope up*) Entitas Induk sekaligus meningkatkan level bisnis (*scale up*) Entitas Anak. Perluasan bisnis tentu akan dilakukan sebagai upaya untuk menghadirkan ragam pilihan layanan jasa keuangan yang semakin lengkap bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, prioritas akan lebih ditujukan pada strategi peningkatan level bisnis Entitas Anak untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembentukan *value* BRI Grup secara utuh.

Strategi BRI dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Strategi Jangka Pendek

Pandemi COVID-19 pada sisi lain telah menjadi katalisator perubahan besar pada perilaku konsumen (*consumer megashift*), di mana nasabah semakin terbiasa dengan pemanfaatan teknologi digital. Hal tersebut mendorong kebutuhan layanan perbankan digital menjadi semakin tinggi dan melebur dengan aktivitas dan gaya hidup nasabah. Kendati demikian, perusahaan menyadari bahwa kondisi geografis dan populasi penduduk Indonesia begitu beragam. Literasi keuangan (baik konvensional maupun *digital*) yang belum merata menjadi salah satu sebab utamanya. Hal ini memberikan tantangan sangat besar sekaligus menjadi peluang bagi BRI. Semangat melayani Indonesia setulus hati melatarbelakangi perusahaan untuk tetap berkomitmen dalam menghadirkan layanan keuangan yang menjangkau masyarakat ke seluruh pelosok Negeri.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, dalam jangka pendek, BRI menyusun langkah-langkah strategi antara lain:

1. *Asset Quality*, menjaga kualitas aset produktif dengan fokus pada kualitas kredit (LAR), peningkatan *success rate* restrukturisasi kredit, serta pengendalian biaya CKPN;
2. *Selective Growth*, ekspansi bisnis secara selektif sejalan dengan arah stimulus pemerintah, serta melakukan eksplorasi *new growth engine* termasuk optimalisasi *ultra micro business* dan *salary based loan* yang lebih kompetitif;
3. *Excellence Enabler*, memperkuat kompetensi aspek-aspek penunjang bisnis terutama pada bidang teknologi digital, *human capital*, *culture*, *distribution channel*, dan tata kelola risiko;
4. CASA, meningkatkan perolehan dana murah dengan mengendalikan biaya dana sekaligus mendorong aktivitas transaksi nasabah untuk menjaga stabilitas pengendapannya;
5. *BRI Group Sinergy*, penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI induk dan Anak Perusahaan maupun antar sesama Perusahaan Anak untuk meningkatkan *cross selling* produk *BRI Group*, *sharing resources*, dan eksplorasi *new investment opportunities*.

Strategi Jangka Menengah

Rencana jangka menengah Perseroan merupakan milestone untuk pencapaian visi dan misi Perseroan ke depan. Untuk meningkatkan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, Perseroan juga

menetapkan tema-tema tahunan agar strategi yang dilakukan dapat terfokus untuk mencapai target jangka panjang. Perseroan juga fokus pada *sustainability finance* dimana Perseroan tidak hanya tumbuh tetapi juga peduli pada keberlanjutan usaha serta lingkungan. Dalam jangka menengah Perseroan fokus pada beberapa hal berikut:

1. *Financial*
Melakukan efisiensi bisnis melalui peningkatan komposisi dana murah untuk menekan *cost of fund*, optimalisasi sumber pertumbuhan terutama dari segmen mikro dan ultra mikro, meningkatkan *recovery rate*, dan fokus ekspansi bisnis terutama pada sektor ekonomi yang sejalan dengan stimulus yang berikan pemerintah.
2. *Customer*
Optimalisasi *value chain* dari segmen korporasi yang turunan bisnisnya dapat dilayani hingga segmen bisnis Mikro untuk mendorong peningkatan transaksi, pengembangan produk dan layanan dengan *omni channel* yang fokus pada *customer centric*, serta peningkatan sinergi dengan BRI group melalui *cross selling* produk dan layanan.
3. *Product dan Process*
Akselerasi proses digitalisasi bisnis dan produk untuk meningkatkan layanan nasabah, meningkatkan *reliability IT*, pengembangan *risk scoring system* untuk pengendalian risiko bisnis, dan optimalisasi *big data analytics* untuk memperoleh *insight* dalam peningkatan layanan nasabah.
4. *Channel*
Melakukan penataan jaringan kerja melalui *Delivery Channel Transformation*, peningkatan peran Agen BRILink untuk memperluas jangkauan layanan kepada nasabah, serta meningkatkan reliabilitas perangkat perbankan elektronik dengan dukungan kapabilitas IT termasuk pemanfaatan Open API.

Strategi Jangka Panjang

Meski pandemi COVID-19 telah mulai terkendali, dampak pandemi diyakini masih akan membayangi kinerja bisnis perusahaan seiring dengan upaya pemulihan perekonomian nasional. Sebagai entitas bisnis milik negara, BRI memiliki peran untuk turut menopang ketahanan ekonomi nasional melalui aktivitas perbankan yang diberikan. Di sisi lain, BRI yang juga merupakan perseroan terbuka dituntut untuk tetap menjadi entitas bisnis yang mampu tetap menjaga kualitas bisnisnya agar mampu menghasilkan laba yang menjadi salah satu *delivered value* bagi para *shareholders*. Dengan mengakomodasi dua kepentingan utama tersebut, BRI kemudian

menetapkan aspirasi rencana jangka panjang periode 2021-2025 menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion* dengan parameter sebagai berikut:

1. *Most Valuable Banking Group in Southeast Asia* (Grup Perbankan Paling Berharga di Asia Tenggara), diindikasikan dengan target nilai kapitalisasi pasar mencapai USD 75 miliar.
2. *Champion of Financial Inclusion* (Juara Keuangan Inklusif), diindikasikan dengan peran dan kontribusi BRI dalam membantu Indonesia untuk mampu mencapai 90% target keuangan inklusif melalui perluasan layanan perbankan *unbanked population* di Indonesia.

Pencapaian aspirasi tersebut diupayakan melalui skenario transformasi bertajuk BRIVolution 2.0. Semangat transformasi

yang telah berlangsung sejak tahun 2018 kembali dilanjutkan dengan penguatan dan penajaman beberapa aspek sesuai dengan kondisi eksternal yang mengalami perubahan begitu ekstrem. BRIVolution 2.0 menjadi representasi semangat perusahaan untuk menciptakan eksistensi BRI yang lebih berkualitas, kuat, dan berkelanjutan.

BRIVolution 2.0 akan diimplementasikan dalam 3 fase persisten yang saling terkait satu sama lain. Tahun 2021 dan 2022 menjadi fase awal dari perjalanan di mana dalam periode ini perusahaan fokus pada penguatan internal sebagai bekal untuk melakukan *scale up* dan *scope up* cakupan bisnis di 2023 dan 2024 demi terjaganya kepemimpinan dan penguasaan pasar BRI di kawasan Asia Tenggara.

Journey Transformasi 2021-2025



2025: "The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion"

2021-2022

Strengthen the care for growth

2023-2024

Scale up & scope up
(scale up: subsidiary & scope up: BRI)

2025 onwards..

Sustain top-tier position
in Southeast Asia



Secara umum, semangat transformasi BRIVolution 2.0 berfokus pada 6 aspek prioritas (6C: CASA, Cross-sell, Culture & Capabilities, Credit cost, Customer experience, Create new growth engine), dengan rincian sebagai berikut:

1. Akselerasi pertumbuhan CASA melalui inisiatif BRIMo lifestyle SuperApp dan layanan keuangan berbasis *data analytics* dan *artificial intelligence*.
2. Peningkatan aktifitas *Cross-Sell* untuk meningkatkan *fee income*, terutama *transaction based fee* dan *fee* yang bersumber dari sinergi dengan perusahaan anak perseroan.
3. Adaptasi *Culture & Capabilities* dengan transformasi budaya perseroan.
4. Menjaga *Credit Cost* dengan optimalisasi manajemen risiko terutama di segmen SME dan *wholesale*.
5. Meningkatkan *Customer Experience* melalui transformasi jaringan kerja dan proses bisnis secara *digital*.
6. *Create New Growth Engine* dengan optimalisasi potensi di segmen mikro dan ultra mikro.

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan bisnis BRI baik dari sisi *fee based income*, simpanan, maupun pinjaman, diperlukan dukungan aktivitas pemasaran yang terintegrasi antara produk, jasa dan layanan BRI (*integrated marketing communication*). Strategi pemasaran terintegrasi bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dari produk, jasa serta program yang dimiliki oleh BRI, namun juga diperlukan untuk meningkatkan *awareness*, *knowledge*, dan *engagement* kepada para nasabah *existing* (meningkatkan loyalitas) dan calon nasabah (meningkatkan *awareness* dan *purchase intention*) sesuai *life journey* nasabah agar bisnis BRI dapat terus berkembang dan berkelanjutan. Diharapkan dengan menerapkan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi (*integrated marketing communication*) dikombinasikan dengan penggunaan media yang efektif dan efisien, maka akan tercapai

awareness yang optimal serta *positioning* yang tepat serta relevan untuk masing-masing target *audience* di tiap segmen sehingga dapat meningkatkan *brand value* bagi BRI.

BRI secara rutin melakukan *Brand Health Tracking* (BHT) untuk memonitor capaian *brand* sehingga ke depan dapat menetapkan target *awareness* dan *image brand* sesuai dengan kondisi persaingan pasar. Di tahun 2021, BRI dapat mempertahankan peringkat 1 (satu) pada beberapa level *awareness* produk seperti pada *brand* Simpedes, Junio, BRIGuna dan Agen BRILink. Selain itu, BRI juga dapat mempertahankan peringkat 2 (dua) untuk *brand* BritAma dan BRIImo. Ke depan BRI memiliki target untuk memiliki level *brand awareness* di peringkat 1 (satu) untuk seluruh produk-produk unggulan BRI baik di perkotaan hingga ke pelosok.

Adapun dalam menjangkau pasar secara lebih luas dan menjaga *engagement* dengan nasabah, berikut beberapa program unggulan BRI di tahun 2021 dalam upaya menjangkau masyarakat yang lebih luas sekaligus membantu menggeliatkan ekonomi UMKM di masa pandemi, antara lain:

1. Gernas Bangsa Buatan Indonesia (BBI) – Lokal Keren Jatim Road to BRILIANPRENEUR 2021

BRI menggelar pameran *virtual industry* kreatif UMKM yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 yang mengambil tema "Lokal Keren Jatim:" guna mendorong pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur. Lokal Keren Jatim Road to Brilianpreneur 2021 dilangsungkan selama sebulan penuh pada 01-31 Agustus 2021 dan merupakan wujud nyata upaya BRI mendorong bangkitnya UMKM di Indonesia seiring dengan Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan Presiden Jokowi pada tahun 2020. Kegiatan Lokal Keren Jatim melibatkan 251 UMKM Jawa Timur yang telah dikurasi yang terdiri dari beberapa bidang industri seperti fesyen, makanan dan minuman, kerajinan dan dekorasi rumah, hingga aksesoris dan kecantikan. Acara ini dikemas menjadi beberapa rangkaian acara antara lain *webinar*, *podcast*, *coaching clinic*, *fashion show* produk fesyen UMKM,

virtual expo di www.lokalkerenjatim.id, *bazaar online* UMKM di *e-commerce*, lelang produk kolaborasi UMKM dengan *designer*, *business matching* antara UMKM dengan pembeli lokal dan internasional, serta hiburan musik. Di akhir periode Agustus 2021, Lokal Keren Jatim mampu mendapatkan *potential deal business matching* Rp4,9 miliar, *sales volume* transaksi *e-commerce* sebesar Rp11,2 miliar, pengunjung *website* lebih dari 40 ribu orang, dan pengunjung acara *streaming* lebih dari 600 ribu orang. Harapannya melalui kegiatan ini pelaku UMKM mampu menjadikan bisnis mereka lebih modern (*Go Modern*), menerapkan digitalisasi (*Go Digital*), serta memperluas jejaring pasar daring (*Go Online*) yang tidak hanya mampu bersaing di pasar lokal, namun juga dapat menembus pasar dunia sebagai UMKM Ekspor (*Go Global*).



2. UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021

BRI kembali menggelar pameran *virtual* UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 dalam rangka mendukung UMKM di Indonesia agar dapat menembus pasar global sekaligus menyambut ulang tahun BRI ke 126 yang berlangsung mulai dari tanggal 9-16 Desember 2021 dengan mengusung tema "Dari Indonesia untuk Dunia". Terdapat 500 peserta UMKM yang telah terpilih melalui serangkaian proses kurasi dan acara ini menjadi pameran bazar *virtual* terbesar yang pernah diselenggarakan oleh BRI. Seperti tahun sebelumnya UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR menghadirkan sensasi pameran nyata di dunia maya sekaligus memberikan pengalaman 3 (tiga) Dimensi (3D) kepada pengunjung dan akan menampilkan konsep *thematical outdoor* yang menghadirkan lima destinasi wisata di Indonesia, yaitu Raja Ampat, Borobudur, Toba, Ubud (Bali), dan Tanjung Kelayang (Belitung). Sebagai pelengkap acara adapula serangkaian kegiatan seperti *Music Performance*, *Coaching*

Clinic, *Inspiration Talk*, *Do It Yourself* (Yuk Berkarya), *Podcast*, dan *Business Matching* yang berisi pelatihan dan *workshop* untuk pelaku UMKM. UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 kali ini dihadiri 110 potensial *buyers* dari 31 negara dalam sesi *business matching*, melalui kesempatan ini *buyer* internasional dan peserta UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 dapat bertemu melakukan transaksi bisnis yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu selama acara berlangsung, nasabah BRI dapat menikmati berbagai promo menarik berupa diskon dan *cashback* hingga 31 Desember 2021. Promo tersebut dapat diperoleh jika melakukan pembelian produk via *e-commerce* Shopee dan PADI UMKM, serta melakukan pembayaran menggunakan debit dan kartu kredit BRI. Seluruh rangkaian kegiatan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 ini dapat diakses melalui *website* brilianpreneur.com, YouTube BRI, dan media sosial BRI.



3. Desa BRILiaN

Dalam rangka mendukung Pemerintah dalam menggerakkan perekonomian di segmen mikro, BRI juga menyelenggarakan kegiatan Desa BRILiaN yaitu pemberdayaan desa dan peningkatan kapabilitas yang ditujukan untuk Direktur BUMDes dan Badan Permusyawaratan Desa melalui *webinar online* dan pendampingan kewirausahaan desa. Pagelaran Desa BRILiaN Indonesia #DESABRILIANUNTUKINDONESIA dihelat dari The Sultan Hotel and Residence Jakarta pada 13-

14 Desember 2021 yang diikuti oleh para finalis Desa BRILiaN dan kepala desa inspiratif. Dalam kegiatan ini, BRI menilai dan memilih #DESABRILIANUNTUKINDONESIA yang dinilai berhasil membangun ketangguhan ekonomi yang dikemas dengan rangkaian kegiatan seperti Bincang Desa BRILiaN, Rembuk Desa Nasional, dan Nugraha Karya Desa BRILiaN, hingga *showcase* produk-produk kreasi masyarakat desa.



4. Pesta Rakyat Simpedes (PRS) Virtual 2021

Pesta Rakyat Simpedes 2021 yang diselenggarakan oleh BRI hadir kembali dengan konsep jauh lebih spektakuler yang dimulai dari tanggal 25 Juli sampai dengan 18 Desember 2021 *live* melalui RCTI+ dan *Channel* Youtube RCTI Entertainment. Selain menghadirkan bintang tamu yang spesial, Pesta Rakyat Simpedes 2021 melalui tujuh episodenya mengajak para pelaku usaha yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk dapat saling *sharing* wawasan, tips, serta edukasi untuk mengembangkan usahanya melalui beberapa kegiatannya yaitu *workshop*, kuis interaktif, UMKM BRILiaN *Check*, serta *talk show* dengan narasumber ternama. Berikut ini adalah

tujuh tema yang dihadirkan dalam Pesta Rakyat 2021 yaitu antara lain Episode (EPS) 1: Membangun Peluang Jadi Sultan, EPS 2: Bikin *Brand* Jadi *Branded*, EPS 3: Kreativitas Jitu Untuk UMKM Maju, EPS 4: Banyak Koneksi Banyak Rejeki, EPS 5: UMKM Tangguh Era *Digital*, EPS 6: Pimpin Berkelas Untuk UMKM Naik Kelas, EPS 7: Memberi Makna UMKM. Pesta Rakyat Indonesia 2021 yang dipersembahkan untuk Tabungan BRI Simpedes ini akan ditutup dengan pembagian hadiah istimewa kepada para nasabah BRI yang beruntung lewat pengundian program Panen Hadiah Simpedes.



5. BritAma FSTVL 2021

BritAma FSTVL merupakan bentuk apresiasi BRI kepada masyarakat dan nasabah pemilik Tabungan BRI BritAma yang setia dan loyal dalam menggunakan berbagai fasilitas layanan perbankan BRI. Rangkaian *event* BritAma FSTVL diselenggarakan mulai dari 01 Agustus hingga 31 Desember 2021 dengan menggunakan pola hadiah undian. Namun terdapat sedikit perbedaan dari program sebelumnya yakni khusus untuk pembayaran BRIVA, pembelian dan pembayaran listrik PLN, dan transaksi menggunakan Kartu Debit BRI selama periode program akan mendapatkan *triple poin* kupon undian, tidak hanya itu saja, pada program kali ini terdapat hadiah yang berbeda-beda di setiap regional atau

wilayah. Program undian BritAma FSTVL Periode 01 Agustus sampai dengan 31 Desember 2021 telah diundi pada bulan Januari 2022, dengan *grand prize* yaitu 8 (delapan) Unit Hyundai Kona EV dan ribuan hadiah menarik lainnya, seperti sepeda motor, sepeda, *gadget*, dan logam mulia. Untuk mengikuti program undian BritAma FSTVL ini sangat mudah bagi yang belum memiliki rekening BritAma cukup buka rekening melalui bukarekening.bri.co.id atau yang sudah memiliki Tabungan BRI BritAma dengan meningkatkan saldo tabungan, memperbanyak transaksi, menjaga rata-rata saldo tabungan bulanan sebesar Rp5 juta dan memiliki *user* BRImo.



6. KPR Virtual Expo

Melihat kesuksesan KPR BRI *Virtual Expo* Volume 1 pada tahun 2020, BRI kembali menggelar peluncuran KPR BRI *Virtual Expo* 2021 Volume 2 yang diselenggarakan penuh selama tiga bulan dari tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan 15 Januari 2022 dan dapat diakses melalui *website* www.kprbrivirtual.com. Acara ini merupakan bentuk apresiasi BRI kepada seluruh nasabah dan *developer* rekanan dalam memperingati HUT BRI ke 126 tahun. BRI berkolaborasi dengan 567 mitra *developer* dengan 664 proyek perumahan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian tidak hanya menampilkan pameran *property*, KPR BRI *Virtual Expo* Volume 2 ini juga memberikan sesi *edutainment* seperti

talkshow, *podcast*, *master class*, dan sesi konsultasi dengan *expert* desain *interior* dan arsitektur. Dalam program ini BRI juga menawarkan promo-promo menarik seperti suku bunga mulai dari 1,26% *fixed* 1 (satu) tahun pertama hingga *free* biaya provisi, *free* biaya administrasi, *free* biaya appraisal, diskon menarik di area *home and living bazar* dari *merchant - merchant* rekanan BRI, sampai dengan total tawaran hadiah sebesar Rp150 juta bagi pengunjung *expo* yang beruntung, sehingga diharapkan acara ini dapat memudahkan seluruh masyarakat khususnya milenial untuk mencari rumah tanpa keluar rumah dengan tawaran yang menarik.

Selain program-program di atas, BRI juga aktif melaksanakan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan *awareness* dan kepuasan para *customer* di berbagai segmen, contohnya untuk segmen *mass/ritel* seperti kegiatan Peluncuran Kartu Kredit OVO U Card yaitu kartu kredit *co-branding* BRI dengan OVO. Kartu ini ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya generasi milenial terhadap layanan keuangan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi *digital* dengan beragam kemudahan dan keuntungan di dalamnya, dalam hal ini BRI menjadi bank pertama di Indonesia yang menerbitkan kartu kredit *co-branding* dengan layanan *Application Programming Interface* (API) yang terintegrasi dengan *platform partner co-branding*. Di sisi lain, untuk segmen premium, BRI melakukan peluncuran BRI *Private Signature Outlet* yang terletak di Gedung BRI 2, Kantor Pusat BRI, hal tersebut sebagai bentuk apresiasi BRI kepada nasabah premiumnya serta menjadi bukti bahwa BRI terus berinovasi untuk meningkatkan layanan perbankan kelas dunia tanpa meninggalkan identitas kebangsaan. Acara peresmian BRI *Private Signature Outlet* dibungkus dengan tema “Harmoni Untuk Negeri” serta terdapat rangkaian acara “*Auction & Charity* Harmoni Untuk Negeri” yang merupakan kegiatan lelang karya seni dan produk artisan karya Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tulola Jewellery, serta lukisan hasil karya Arin Dwihartanto Sunaryo. Hasil lelang tersebut akan disumbangkan kepada organisasi atau yayasan seni budaya yang bergerak membangun Indonesia.

Pangsa Pasar

Posisi BRI dibandingkan dengan industri perbankan dapat dilihat berdasarkan jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga, dan jumlah kredit yang disalurkan sebagai berikut.

Tabel Pangsa Pasar BRI dibandingkan Industri Perbankan

(Bank saja, dalam miliar Rupiah)

Uraian	Keterangan	Oktober 2021	Oktober 2020	Pertumbuhan YoY (%)
Aset	Industri Perbankan	9.824.498	9.074.478	8,27
	BRI	1.558.596	1.363.902	14,27
	Pangsa Pasar (%)	15,86	15,03	0,83
Kredit	Industri Perbankan	5.657.605	5.480.271	3,24
	BRI	938.012	874.031	7,32
	Pangsa Pasar (%)	16,58	15,95	0,63
Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	7.244.983	6.619.881	9,44
	BRI	1.133.963	1.049.161	8,08
	Pangsa Pasar (%)	15,65	15,85	(0,20)

Sumber: Laporan Keuangan BRI Oktober 2021; Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Oktober 2021

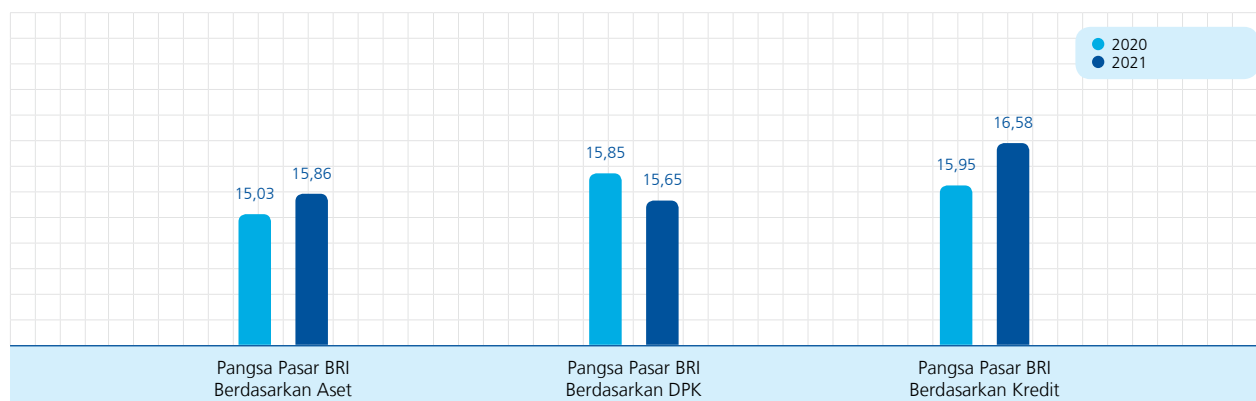
Berdasarkan total aset, pertumbuhan total aset BRI mencapai 14,27% YoY atau mencapai Rp1.558,6 triliun pada Oktober 2021, berada di atas industri perbankan nasional yang tumbuh sebesar 8,27% YoY. Pada Oktober 2021, BRI menguasai 15,86% total aset perbankan nasional, meningkat 0,83% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 15,03%.

Pada sisi kredit, sampai dengan Oktober 2021 BRI berhasil menumbuhkan kredit 7,32% YoY menjadi Rp938,01 triliun. Pertumbuhan kredit BRI berada di atas pertumbuhan kredit perbankan nasional yang tumbuh sebesar 3,24%. Pangsa pasar kredit BRI meningkat 63 bps menjadi 16,58%.

Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), pada Oktober 2021 pangsa pasar BRI mencapai 15,65%, menurun 0,20% dari Oktober 2020 yang mencapai pangsa pasar DPK sebesar 15,85%.

Grafik Pangsa Pasar Pangsa Pasar BRI dibandingkan Industri Perbankan

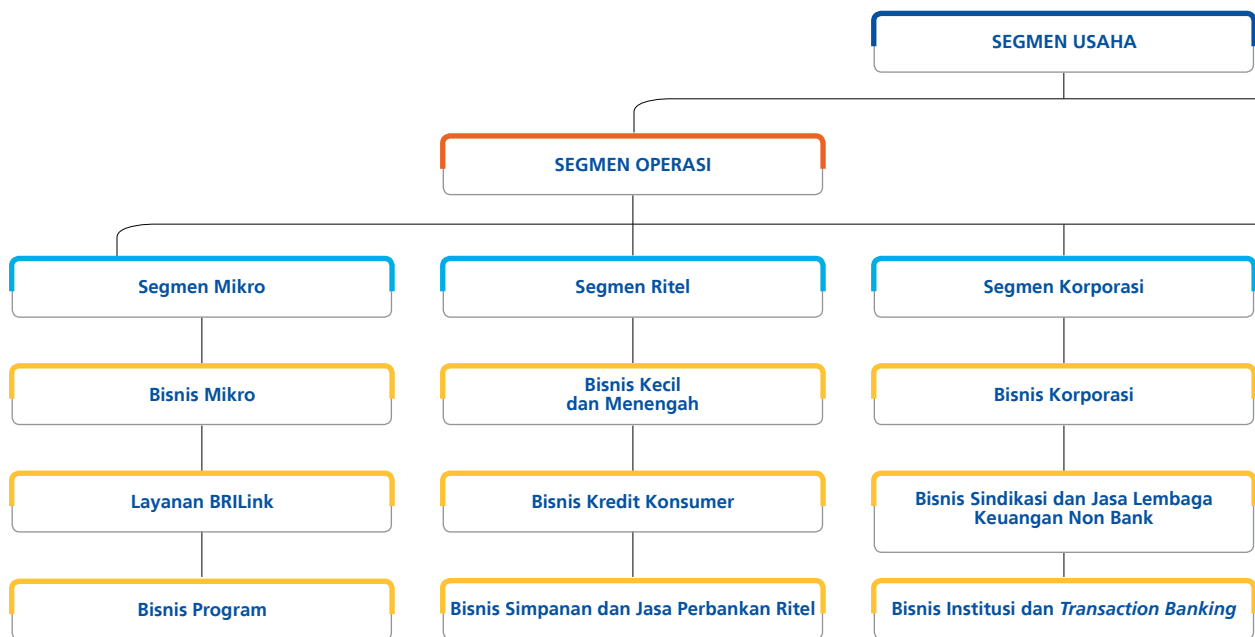
(dalam %)



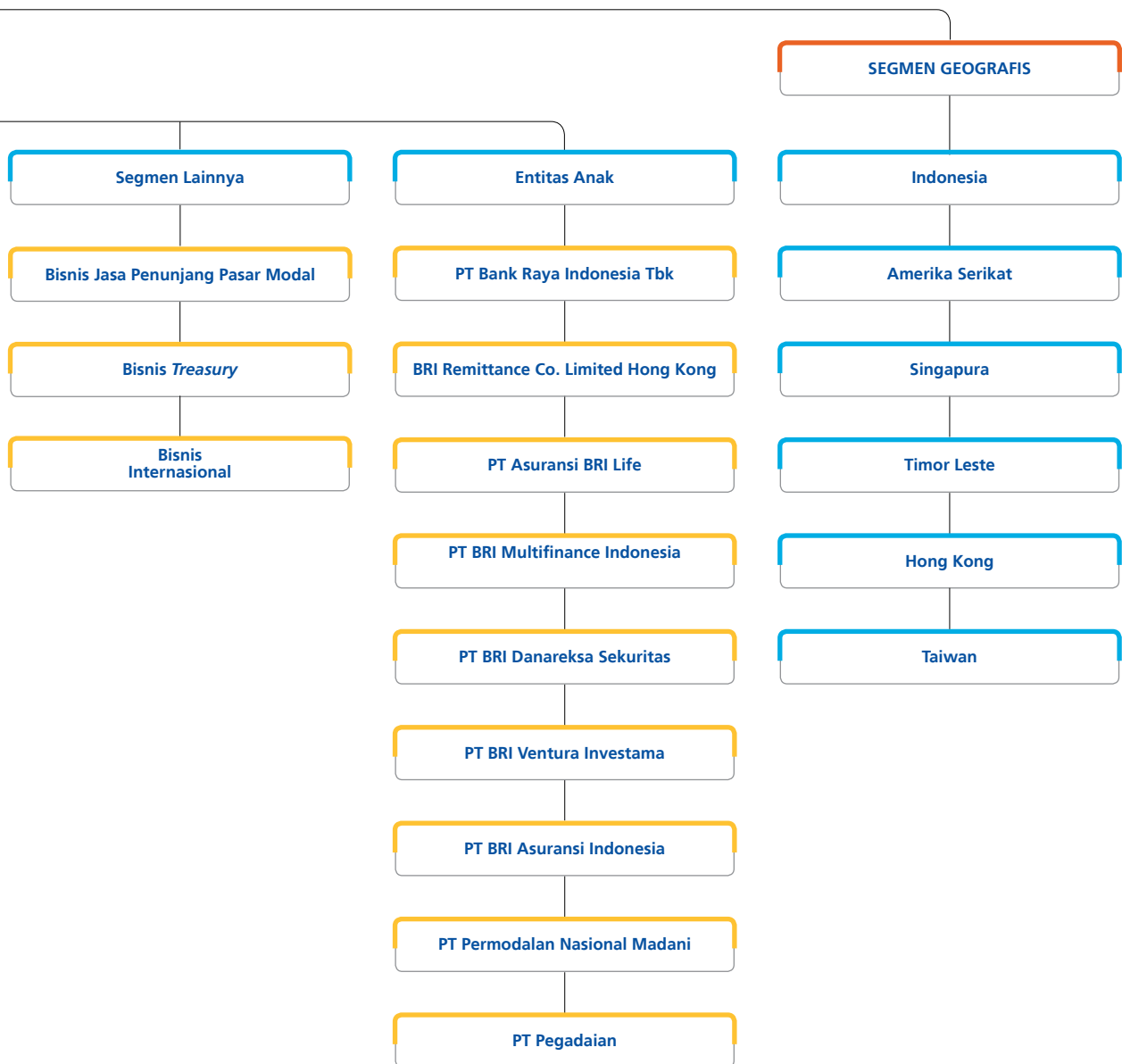
Tinjauan Operasi per Segmen Usaha

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari BRI dan entitas anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen operasi), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

BRI dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi. BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen operasi) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi, lainnya dan entitas anak, serta berdasarkan segmen geografis.



Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Timor Leste dan Taiwan.



Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan ke dalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Ritel
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Operasi

Segmen Mikro

Segmen mikro ditujukan untuk melayani kebutuhan produk dan jasa perbankan nasabah individual dan pengusaha mikro dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat. Segmen mikro meliputi Bisnis Mikro, Layanan BRILink dan Bisnis Program.

BISNIS MIKRO

Pada tahun 2021, selama masa pandemi COVID-19, kinerja bisnis mikro BRI secara umum tetap mampu mencatat pertumbuhan positif. Baik itu dari sisi kredit maupun dana pihak ketiga mikro. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis mikro BRI mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang turut berdampak pada lingkup bisnis dan ekonomi nasional. Selain itu, penerapan program dan strategi yang relevan dengan situasi dan kondisi juga menjadi salah satu kunci BRI dapat melalui tahun 2021 dengan baik.

Segmen mikro yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia akan selalu menjadi bisnis utama BRI. Dengan kompetensi profesional yang dimiliki di bisnis mikro, BRI secara konsisten telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada segmen mikro. BRI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro yang diselenggarakan dengan perkembangan kebutuhannya.

Keberadaan sektor usaha mikro merupakan bagian dari DNA-nya BRI. Oleh karena itu BRI berkomitmen untuk memperbesar dukungan dan pemberdayaan segmen ultra mikro di tahun 2021, yang dikemas dengan semangat transformasi *digital* yaitu *go smaller, go shorter, go faster*. Sehingga pelayanan keuangan BRI seperti proses penyaluran pembiayaan dapat dilakukan secara lebih cepat dengan biaya yang lebih terjangkau (*affordable*). Selain itu, BRI juga akan terus meningkatkan variasi dari produk yang ditawarkan kepada customer, sehingga semakin sesuai dengan karakteristik nasabah mikro, yaitu pinjaman dengan besaran yang lebih kecil (*go smaller*) dan jangka waktu yang lebih pendek (*go shorter*). Melalui pinjaman ringan ini, pelaku usaha ultra mikro diharap bisa mempertahankan usahanya dan segera pulih akibat dampak pandemi COVID-19.

BRI kini juga telah memiliki indeks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bernama Indeks Bisnis UMKM guna mengukur aktivitas bisnis, sentimen, serta ekspektasi pelaku usaha mikro terhadap kondisi perekonomian nasional. Berdasarkan data terkini BMSI, terlihat kondisi usaha serta optimisme pelaku UMKM terhadap pemulihan ekonomi ke depannya semakin meningkat.

Terkait sistem transaksi *micropayment*, upaya BRI untuk meningkatkan penetrasinya selama tahun 2021 antara lain yaitu mengajak dan menjalin kerja sama para pedagang agar bertransaksi secara non tunai (*cashless*) lewat instrumen *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) BRI serta *platform* pasar.id sebagai sarana transaksi untuk mempertemukan pembeli dengan penjual tanpa harus bertatap muka. Selain mempermudah perhitungan arus kas, manfaat yang ditawarkan BRI kepada para pedagang dari penggunaan ini juga untuk mendukung program Pemerintah meminimalisir potensi penularan COVID-19 selama pandemi masih berlangsung.

BRI akan terus mendorong pengetahuan masyarakat terkait transaksi non tunai khususnya QRIS, agar transaksi menggunakan sistem terpadu ini terus meningkat. BRI meyakini dengan sistem pembayaran yang simpel dan aman melalui QRIS, bisnis para pelaku usaha mikro dapat terbantu untuk semakin tumbuh besar. Pertumbuhan ini akan berujung pada semakin positifnya laju perekonomian nasional, dan membaiknya kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2021, produk-produk pinjaman bisnis mikro yang ditawarkan kepada nasabah mikro adalah Kupedes, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, KUR Kecil, KUR Super Mikro, dan KUR TKI. Sedangkan produk-produk simpanan bisnis mikro yang tersedia yaitu Tabungan BRI Simpedes dengan berbagai varian seperti Simpedes Umum, Simpedes BISA, Simpedes TKI, Simpedes Impian, dan Simpedes Usaha.

Produk dan Layanan Bisnis Mikro

1. Kupedes

Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro yang dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan yang memenuhi persyaratan.

2. KUR Mikro

KUR mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula dengan pinjaman maksimal sebesar Rp50 juta per debitur yang dapat berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun.

3. BRIGuna Mikro

BRIGuna Mikro merupakan kredit multiguna mikro yang ditujukan kepada segmen berpenghasilan tetap.

4. KUR Super Mikro

KUR super mikro merupakan fasilitas pembiayaan khusus bagi nasabah baru yang belum pernah mengajukan kredit yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif dengan pinjaman maksimal sebesar Rp10 juta per debitur dengan maksimum masa pinjaman 3 (tiga) tahun dan atau Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman 5 (lima) tahun.

5. Tabungan BRI Simpedes

Tabungan BRI Simpedes merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari *internet banking* dan *mobile banking*. Tersedia juga varian dari Simpedes seperti Simpedes Umum, Simpedes BISA, Simpedes TKI, Simpedes Impian, dan Simpedes Usaha. Selain itu bisnis mikro BRI juga memiliki produk simpanan lainnya yaitu: TabunganKu, SimPel (Simpanan Pelajar) dan Deposito.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Mikro

Uraian	Posisi		Pertumbuhan	
	2021	2020	Nominal	%
Outstanding (OS) Kredit (dalam miliar Rupiah)	396.959	351.356	45.603	12,98%
Kupedes	131.760	144.653	(12.893)	(8,91%)
KUR Mikro	180.110	118.157	61.953	52,43%
BRIGuna Mikro	74.929	79.944	(5.014)	(6,27%)
KUR Super Mikro	10.159	8.602	1.557	18,10%
Debitur (dalam juta orang)	13,31	11,81	1,50	12,67%
Kupedes	2,77	3,49	(0,72)	(20,57%)
KUR Mikro	8,21	6,53	1,67	25,63%
BRIGuna Mikro	0,71	0,81	(0,10)	(12,64%)
KUR Super Mikro	1,62	0,98	0,64	65,59%
Simpanan (dalam miliar Rupiah)	356.268	335.397	20.871	6,22%
Giro	1.597	1.219	377	30,94%
Deposito	43.414	45.074	(1.660)	(3,68%)
Tabungan	311.258	289.104	22.154	7,66%
Rekening Simpanan (dalam nilai penuh)	142.881.089	122.344.775	20.536.314	16,79%
Giro	97.740	110.836	(13.096)	(11,82%)
Deposito	443.090	472.385	(29.295)	(6,20%)
Tabungan	142.340.259	121.761.554	20.578.705	16,90%

Total *outstanding* kredit bisnis mikro tahun 2021 sebesar Rp396,96 triliun, meningkat 12,98% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp351,36 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan KUR Mikro sebesar 52,45% dan KUR Super Mikro sebesar 18,10%. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan debitur pinjaman sebesar 12,67% dari 11,81 juta orang di tahun 2020 menjadi 13,31 juta orang di tahun 2021.

Strategi Bisnis Mikro Tahun 2021

Target bisnis mikro pada tahun 2021 adalah memperkuat dan mempertahankan BRI sebagai *market leader* bisnis mikro di Indonesia. BRI menyadari bahwa kompetisi di bisnis mikro semakin ketat ke depannya. Sebab persaingan tidak hanya dengan perbankan lain, melainkan juga dengan *fintech company*.

Meskipun masa pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 masih berlangsung, BRI tetap optimis dapat mencapai target komposisi kredit mikro sebesar 40% dari total kredit di tahun 2021. Hal ini didukung oleh pengalaman BRI melayani segmen mikro, ribuan unit kerja BRI yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, proses bisnis yang semakin baik dan didukung dengan kapabilitas *digital* yang andal, serta sumber daya manusia BRI yang mumpuni. Oleh karenanya, strategi bisnis mikro BRI di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. *Efficiency* melalui perbaikan CASA dan efisiensi operasional proses bisnis.
2. *Assets quality* melalui perbaikan proses penyaluran kredit maupun monitoring kredit melalui digitalisasi proses bisnis.
3. *Selective growth* melalui ekspansi di produk *low risk* dan eksplorasi *new source of growth*.
4. *Community development* melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas nasabah bisnis mikro.

5. Menjalankan "SOLID Survival Strategy" yaitu dengan cara meningkatkan *fee based income*, memperkuat *recovery* dan *new source of growth*.
6. Menjalankan strategi inisiatif "Gaining Sustainable Micro Business" yang terbagi menjadi empat inisiatif sebagai berikut:
 - a. Inisiatif produk
 - b. Inisiatif proses bisnis
 - c. Inisiatif SDM Mikro
 - d. Inisiatif pemberdayaan

Jaringan Bisnis Mikro

Untuk melayani kebutuhan produk dan layanan perbankan para nasabah Bisnis Mikro, BRI memiliki jaringan sebanyak 7.112 *outlet* Mikro per tahun 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 5.222 BRI Unit, 1.697 Teras BRI, 132 Teras *Mobile*, 4 Teras Kapal dan 57 E-Buzz.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Mikro

Peningkatan kinerja kredit dan dana pihak ketiga bisnis mikro selama tahun 2021 tak lepas dari upaya BRI yang telah melakukan berbagai inovasi. Inovasi dimaksud antara lain:

- **Simpedes BISA**
Tabungan BRI Simpedes dengan fasilitas tabungan yang memiliki fitur transaksi/*saving*, investasi dan proteksi dalam bentuk asuransi mikro yang terakomodir dalam 1 (satu) produk sehingga kebutuhan nasabah dalam pengelolaan keuangannya dapat terpenuhi dengan baik sehingga nasabah lebih leluasa dalam melakukan "*financial planning*" mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang.
- **Commodity Platform**
BRI memberikan solusi kepada pelaku ekosistem komoditas untuk kemudahan dalam layanan bertransaksi dengan BRI yang terintegrasi secara holistik melalui *commodity platform* yang bernama Pasar Rakyat Indonesia (PARI). Pada tahun 2021, BRI fokus pada pengembangan ekosistem telur.
- **Pasar.id BRI**
Munculnya pandemi COVID-19 di hampir seluruh wilayah di Indonesia membuat BRI merespon dengan cepat atas kondisi yang terjadi dengan membuat web pasar.id guna untuk menyelamatkan debitur UMKM terutama pedagang pasar terdampak COVID-19 yang menyebabkan pedagang pasar tidak bisa berjualan secara langsung. Dengan adanya media web pasar.id dapat membuat pedagang pasar dapat bertahan di tengah kondisi pandemi COVID-19.
- **Churn Out Modelling Nasabah Simpanan**
Churn out modelling dikembangkan untuk dapat menganalisis data profil perilaku nasabah simpanan yang memiliki kemungkinan menutup rekening tabungan (*churn out*) yang tinggi serta prediksi dalam kehilangan nasabah sehingga BRI dapat mencegah nasabah Simpedes yang diprediksi *churn*, mengurangi *churn rate* Simpedes dan mengurangi terjadinya *revenue loss* akibat penutupan rekening Simpedes dengan tujuan informasi yang diperoleh dari permodelan tersebut mampu *generate* volume bisnis lebih besar.

- **Kolaborasi Bisnis Mikro BRI dengan E-Commerce dan Fintech Company.**

Untuk meningkatkan jangkauan pemasaran pinjaman produktif segmen mikro, BRI telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah *e-commerce* dan *fintech* ternama seperti Amarta, Modal Rakyat, TaniFund, Esta Kapital Grab, Gojek, Tokopedia, dan Shopee.

Dukungan Terhadap Program Pemerintah

Keberadaan Bisnis Mikro BRI juga merupakan dukungan BRI dalam menyukseskan program Pemerintah, baik dalam hal peningkatan literasi dan inklusi keuangan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, bisnis mikro BRI telah memasarkan produk *Basic Saving Account* (BSA) untuk masyarakat. Produk dimaksud adalah Tabunganku dan Tabungan Simpanan Pelajar.

Di masa pandemi bisnis mikro juga berkomitmen penuh dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, antara lain dengan menjadi mitra utama Pemerintah dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain:

1. Melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit terdampak pandemi COVID-19.
2. Menyalurkan subsidi bunga kredit.
3. Menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro.
4. Menyalurkan subsidi berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Mikro Tahun 2022

Segmen mikro yang mewakili sekitar 99% dari total jumlah usaha di Indonesia memiliki peran utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, sejalan dengan *core competence* BRI di bisnis mikro dan juga sebagai *agent of development*, BRI tetap berkomitmen dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan bisnis di segmen ini. Meski perekonomian mulai menunjukkan geliat pemulihan pada era pandemi COVID-19, BRI masih menghadapi tekanan khususnya pada ekspansi bisnis pinjaman komersial segmen mikro. Tantangan yang dihadapi saat ini di antaranya adalah adanya persaingan di pasar mikro baik dari bank maupun *fintech* serta perbaikan kualitas kredit khususnya kredit restrukturisasi akibat COVID-19. Tantangan tersebut menuntut kelincihan perusahaan untuk menjaga *value* bisnis mikro sebagai *core business* yang berperan penting bagi keberlangsungan Perseroan.

Memperhatikan hal tersebut, strategi bisnis mikro BRI diarahkan pada prinsip *go smaller, go shorter, go faster*. Terbentuknya *holding* ultra mikro merupakan salah satu strategi BRI untuk masuk ke segmen yang lebih kecil (ultra mikro) dan menangkap potensi segmen ultra mikro melalui sinergi secara harmonis dengan penguasaan ultra mikro Pegadaian dan PMN. Sinergi ini nantinya dimanfaatkan secara optimal bagi perusahaan untuk

menciptakan sumber-sumber baru pendapatan (*new sources of income*) sebagai penggerak baru bagi pertumbuhan bisnis perusahaan (*new growth engine*).

Selain bertujuan untuk memperkuat sumber pertumbuhan baru, *holding* ultra mikro juga berkontribusi pada pencapaian aspirasi *financial inclusion*. *Holding* ultra mikro akan memberikan akses layanan keuangan yang lebih luas dan lebih mudah kepada segmen ultra mikro di Indonesia. Dengan adanya sinergi ini, bisnis model BRI, Pegadaian dan PNM yang saling melengkapi akan mampu memberikan *journey* layanan keuangan yang terintegrasi untuk keberlanjutan pemberdayaan usaha ultra mikro. Model bisnis yang saling melengkapi tersebut dapat memberikan nilai tambah dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang terintegrasi dalam satu ekosistem.

Pengembangan bisnis mikro BRI ke depan difokuskan pada peningkatan kapabilitas Perseroan untuk menciptakan *value* bisnis mikro yang lebih kuat dengan melakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Rejuvenasi produk konvensional (pinjaman dan simpanan) dengan pemanfaatan teknologi dalam bentuk *micro digital lending* dan *micropayment*, terutama untuk menyasar segmen ultra mikro.
2. Efisiensi proses bisnis melalui revitalisasi Mantri, *enhancement* BRISpot Mikro, serta memperbarui *operating model end to end* tenaga pemasar, yang berdampak pada peningkatan produktivitas Mantri.

3. Menjaga kualitas aset produktif melalui optimalisasi *success rate* restrukturisasi, *monitoring* penyaluran KUR Super Mikro dan Mikro, *monitoring* kinerja bisnis mikro, serta menggunakan *data analytic* untuk memperkuat proses *credit underwriting*.
4. Meningkatkan proposisi ekosistem mikro dan ultra mikro dengan mengembangkan *hyperlocal ecosystem* dengan fokus pada ekosistem desa, pasar, kelompok pelaku usaha, dan komoditas tertentu.
5. Mengembangkan model bisnis kemitraan dengan memanfaatkan Agen BRILink dan mitra UMi untuk memasarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai.
6. Berperan aktif membantu Pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha mikro Indonesia melalui *financial literacy*, *social economic empowerment*, *digital penetration*, dan penyaluran program-program Pemerintah.

LAYANAN BRILINK

BRI memiliki *platform hybrid human machine* yang diberi nama AgenBRILink. Ini adalah model kemitraan yang ditawarkan oleh BRI kepada masyarakat untuk memperluas layanan keuangan BRI. Model bisnis AgenBRILink menerapkan nilai sosial berupa pemberdayaan masyarakat, inklusi keuangan, pemerataan ekonomi, penyebaran pengetahuan. Sementara itu penerapan nilai ekonomi melalui penghasilan tambahan untuk mitra, saling menguntungkan kemitraan ekonomi, diversifikasi usaha mitra, perpanjangan jaringan bank (efisiensi operasional).

Tabel Kinerja (Produktivitas) Layanan BRILink

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
AgenBRILink (Agen)	503.151	504.233	(1.082)	(0,21%)
Transaksi Finansial (transaksi)	929.380.697	727.615.014	201.765.683	27,73%
Fee Base Income (jutaan Rupiah)	1.342.914	1.159.720	183.194	15,80%
CASA (jutaan Rupiah)	19.376.721	13.270.059	6.106.662	46,02%
Volume Transaksi (jutaan Rupiah)	1.143.618.036	843.208.425	300.409.611	35,63%
Akuisisi BUMDES	17.109	12.434	4.675	37,60%
Referral Simpanan	140.106	87.342	52.764	60,41%
Referral Pinjaman	166.657	42.439	124.218	292,70%

Sampai dengan 31 Desember 2021, terdapat 503.151 AgenBRILink yang tersebar di lebih dari 54 ribu desa di seluruh Indonesia, melingkupi 17 ribu BUMDes telah menjadi AgenBRILink. Luasnya jaringan AgenBRILink ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat terutama saat pandemi COVID-19 karena dengan adanya AgenBRILink mendekatkan masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan. AgenBRILink juga dapat melayani kredit UMKM melalui sistem *referral* pinjaman dan dapat melakukan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak COVID-19. AgenBRILink berperan penting dalam mewujudkan inklusi keuangan yang sesungguhnya bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Adapun transaksi finansial tumbuh 27,73% dari 727,62 juta transaksi menjadi 929,38 juta transaksi di tahun 2021. Adanya peningkatan jumlah transaksi finansial ini mencerminkan layanan AgenBRILink yang dekat, aman dan canggih untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan masyarakat. Peningkatan transaksi finansial tersebut, diiringi dengan peningkatan *sales volume* BRILink yang tercatat mencapai Rp1.143 triliun.

Dari transaksi yang sudah dilakukan AgenBRILink, BRI memperoleh *fee based income* sebesar Rp1,34 triliun di akhir Desember 2021. Nilai tersebut tumbuh 15,80% dari periode yang sama di tahun 2020 sebesar Rp1,16 triliun. Peningkatan ini berdampak positif terhadap pendapatan BRI secara keseluruhan. Selain itu, AgenBRILink juga meningkatkan perolehan dana murah (CASA) sebesar Rp19,38 triliun, tumbuh 46,02% dari tahun sebelumnya sejumlah Rp13,27 triliun.

Strategi BRILink Tahun 2021

Pada tahun 2021, BRI fokus melakukan perbaikan kualitas AgenBRILink yang tidak produktif dan peningkatan produktivitas AgenBRILink. Dengan adanya perbaikan kualitas tersebut, secara keseluruhan produktivitas AgenBRILink membaik.

Lalu, terdapat klasifikasi AgenBRILink yang terdiri dari Agen Juragan, Jawara dan Pemula. Klasifikasi AgenBRILink dihitung berdasarkan tingkat jumlah dan volume transaksinya. Hal ini terbukti telah membantu mendorong AgenBRILink untuk berkompetisi dalam meningkatkan jumlah transaksi dan kelas agennya. Penggunaan klasifikasi ini juga memberikan tambahan insentif bagi agen berdasarkan tingkat kelasnya.

Kemajuan teknologi saat ini membuat BRILink terus melakukan inovasi dan terobosan baru yaitu dengan implementasi *Electronic Data Capture* (EDC) Android (*Mobile Point Of Sale*/MPOS) dan penerapan teknologi *chips* (*National Standard for Indonesian Chip Card Specification*/NSICCS). EDC berbasis OS Android dengan dukungan aplikasi BRILink Mobile sebagai alat transaksi yang lebih canggih bagi AgenBRILink untuk melayani kebutuhan keuangan dan perbankan masyarakat. Pada EDC Android tersebut terdapat fitur-fitur BRILink terkini yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi perbankan menjadi lebih cepat, aman dan efisien. Dari peningkatan keamanan bertransaksi telah diterapkan teknologi berbasis *chips* untuk memastikan transaksi tetap aman.

BRI telah melakukan inisiatif baru yaitu berkolaborasi dalam pembiayaan dengan Pegadaian dan PNM (Permodalan Madani) pada segmen ultra mikro. Pembiayaan ultra mikro tersebut bertujuan memperluas jalur distribusi produk dan layanan ultra mikro melalui jaringan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia. Kolaborasi tersebut berperan efektif dalam membangun perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19.

Selain itu, BRI telah melakukan *partnership initiatives* dengan:

1. Bank Raya dalam memberikan fasilitas dana talangan bagi AgenBRILink. Fasilitas dana talangan tersebut bertujuan untuk menambah modal agen dalam meningkatkan usahanya. Fasilitas dana talangan tersebut dibuka untuk kelas Agen Juragan dan Jawara.
2. Pertashop, yaitu kerjasama BRI dengan pertamina retail yaitu memberikan fasilitas pertashop bagi AgenBRILink yang sesuai dengan persyaratan.
3. SRC, yaitu kerjasama BRI dengan Sampoerna *Retail Community* (SRC) dengan akuisisi panel SRC menjadi AgenBRILink.
4. Koperasi TNI dan POLRI, yaitu kerjasama akuisisi koperasi TNI dan POLRI sebagai AgenBRILink.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi BRILink

Dengan adanya lebih dari 530 ribu AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat keunggulan kompetitif pada AgenBRILink yaitu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan tanpa harus ke Bank. AgenBRILink dapat melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan EDC BRILink ataupun BRILink *Mobile* secara *real time online*. Fitur yang terdapat pada BRILink *Mobile* pun juga terus *update* disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Serbuan kompetitor, *digital disruption* serta kondisi sulit akibat pandemi semakin mensaturasi pasar sehingga BRI menciptakan *new source of growth* sebagai peluang baru bagi BRILink dalam meningkatkan kinerjanya dengan melakukan *partnership initiatives*. Selain itu, BRI juga mempunyai misi untuk mencapai *champion of financial inclusion*. Tentunya dengan hal tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi AgenBRILink.

Inovasi BRILink terus dikembangkan untuk terus bersaing dengan kompetitor lain yang satu per satu bermunculan yaitu dengan dilakukan implementasi EDC berbasis android tentunya salah satu terobosan inovasi BRILink untuk terus bertahan dan meningkatkan kinerjanya. Diharapkan dengan adanya implementasi EDC Android ini memudahkan para AgenBRILink untuk *update* fitur terbaru BRILink sehingga dapat meningkatkan bisnis BRILink. Pemberian fasilitas dana talangan juga merupakan salah satu inovasi untuk menambah modal agen dalam usaha sehingga kinerja AgenBRILink dapat meningkat.

BRI juga melakukan kerjasama dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk layanan pemesanan tiket ferry melalui AgenBRILink. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 BRI dan ASDP bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia meluncurkan integrasi PeduliLindungi pada layanan pemesanan tiket ferry melalui AgenBRILink, sehingga masyarakat pengguna jasa akan semakin aman, cepat dan nyaman saat membeli tiket ferry, khususnya pengguna jasa penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk.

Prospek Usaha dan Strategi BRILink Tahun 2022

Pada tahun 2022, BRILink tetap akan melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas AgenBRILink dengan strategi perluasan *delivery channel*. Dengan 503 ribu AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia dan didukung dengan pemanfaatan BRISat sehingga dapat menjangkau daerah yang belum terjangkau layanan komunikasi. Pada tahun depan, BRI akan meningkatkan implementasi EDC berbasis Android yang memiliki banyak keunggulan dan kemudahan dalam mendukung bisnis secara *digital*. Selain itu, untuk peningkatan kualitas layanan BRILink terus memberikan inisiatif dan terobosan baru dengan menambah fitur produk/layanan dan memaksimalkan *partnership* dengan perusahaan rintisan (*startups*) yang memiliki layanan dan produk bernilai jual serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan penetrasi bisnis *digital*.

Jumlah AgenBRILink yang terus bertambah, perlu adanya peningkatan dan *maintenance* loyalitas konsumen AgenBRILink agar lebih kompetitif. Pengetahuan AgenBRILink tentang produk dan *marketing skill* pun perlu dikalibrasi seiring dengan bertambahnya produk dan layanan BRILink. Nantinya akan diakomodir dengan adanya aplikasi BRILinkers sebagai wadah bagi Agen untuk *sharing* produk, layanan dan ide antar AgenBRILink.

BRILink bukan hanya menjadi enabler untuk segmen tertentu, namun BRILink dapat sebagai *business collaborator* yang melayani bisnis untuk BRI Group dan menjadi *center of community*. BRILink terus melayani pasar mikro, menjual produk konsumen dan UKM, dan menyediakan bisnis tambahan untuk AgenBRILink melalui kemitraan Korporasi.

BISNIS PROGRAM

Bisnis Program meliputi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Klaster Usaha, Desa BRILiaN, UMKM Naik Kelas dan Figur Inspiratif Lokal. Uraian masing-masing penjelasan layanan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Bantuan Sosial (Bansos)

Merupakan program Pemerintah untuk penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan.

2. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Klaster Usaha

Merupakan kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

4. Desa Brilian

Program Desa Brilian merupakan program inkubasi desa sebagai komitmen Bank BRI dalam mengembangkan potensi desa binaan BRI.

5. UMKM Naik Kelas/Link UMKM

Merupakan *platform* pemberdayaan *digital* yang bertujuan membawa UMKM Indonesia naik kelas melalui program terpadu yang dapat diakses melalui *website* dan aplikasi.

6. Figur Inspiratif Lokal

Program Figur Inspiratif bertujuan untuk mendapatkan tokoh pemberdayaan masyarakat lokal yang dapat berkolaborasi dengan Mantri BRI dalam rangka pengembangan bisnis BRI.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Program

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Penyaluran Bansos				
Program Keluarga Harapan (PKH)	11.029.154	15.106.454	(4.077.300)	(26,99%)
Sembako	16.674.805	14.846.288	1.828.517	12,32%
Sembako Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	2.490.075	-	2.490.075	100,00%
Kemiskinan Ekstrem	236.908	-	236.908	100,00%
Total	30.430.942	29.952.742	478.200	1,60%
Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)	12.428.625	18.638.023	(6.209.398)	(33,32%)
Klaster Usaha (nilai penuh)	13.327	10.262	3.065	29,87%
Desa BRILiaN	1.191	125	1.066	852,80%
Figur Inspiratif Lokal (nilai penuh figur)	584	-	584	100,00%

Total Penyaluran Bansos tahun 2021 sebesar Rp30,43 triliun, meningkat 1,60% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp29,95 triliun. Kenaikan tersebut terutama berasal dari peningkatan penyaluran bansos dari Sembako PPKM sebesar Rp2,49 triliun.

Penyaluran BPUM tahun 2021 sebesar Rp12,43 triliun, turun 33,32% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp18,64 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh nilai bantuan yang diberikan pada tahun 2021 yang sebesar Rp1,2 juta per pelaku usaha mikro menurun dibandingkan nilai bantuan yang diberikan pada tahun 2020 yang sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha.

Pada tahun 2021 Desa BRILiaN meningkat 852,80% dari 125 Desa Brilian di tahun 2020 menjadi 1.191 Desa BRILiaN. Sedangkan, klaster usaha dan figur inspiratif lokal berhasil tumbuh masing-masing menjadi 13.327 klaster usaha dan 584 figur inspiratif lokal di tahun 2021.

Strategi Bisnis Program Tahun 2021

1. Bansos

- a. Melakukan sosialisasi kepada petugas Kanwil BRI yang merupakan PIC Program yang ditunjuk terkait adanya pembukaan rekening dan KKS baru sesuai dengan program dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai kegiatan akselerasi program.
- b. Mengadakan pertemuan rutin *onsite/off site* bersama pihak *stakeholder* (internal dan eksternal) mengenai monitoring dan evaluasi program.
- c. Pengembangan Portal Bansos dalam rangka perbaikan profil bisnis dan pengembangan alat *monitoring* yang dapat diakses seluruh unit kerja.
- d. Melakukan publikasi kegiatan pelaksanaan Bansos (*media plan*).
- e. Tersedia laporan realisasi penyaluran dan pemanfaatan program bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada pihak internal dan eksternal di setiap bulan.

2. BPUM

- a. Sosialisasi kepada Unit Kerja baik untuk prosedural, *progress* maupun kendala penyaluran BPUM 2021 di lapangan.
- b. Berkoordinasi aktif dengan Dinas yang membidangi KUKM tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai upaya akselerasi penyaluran BPUM 2021.
- c. Pemanfaatan eform.bri.co.id/bpum sebagai portal informasi pengecekan penerima BPUM 2021.
- d. Pengembangan eform.bri.co.id/bpum dengan BPUM *Reservation System* untuk melakukan reservasi nomor antrean sesuai dengan unit kerja terdekat dengan penerima untuk mengurangi kerumunan.
- e. *Monthly* rekonsiliasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemendag dan UKM) untuk melaporkan *progress* serta *sharing* kendala dalam penyaluran BPUM 2021.

3. Klaster Usaha

- a. Aktif melakukan sosialisasi secara *online* maupun *offline* bersama RO, Kanca, Unit dan Mantri.
- b. Identifikasi, kunjungan lapangan dan Pendampingan langsung kepada unit kerja dalam akuisisi pemberdayaan Klaster usaha.
- c. Berkoordinasi dengan *Corporate Secretary Division* dalam implementasi pemberdayaan Klaster Usaha.
- d. Berkoordinasi dengan Divisi Markom dan CTR dalam publikasi program klaster usaha.
- e. Bisnis matching klaster melalui program bazaar klaster mantriku
- f. Pemasaran produk klaster melalui *marketplace* Localoka.

4. Desa BRILiaN

- a. Aktif melakukan sosialisasi/rapat bersama RO, Kanca, Unit dan Mantri manfaat Program Desa Brilian.
- b. Bersama RO, Kanca, Unit mengadakan Gathering bersama Desa dan Bumdes untuk mengakuisi program Desa Brilian dan produk BRI.

- c. Optimalisasi Program Pojok Mantri Desa (kolaborasi dengan Divisi MSM).
- d. Koordinasi dengan Divisi BRILink untuk optimalisasi Petugas Agen BRILink di uker untuk mensosialisasikan Program kepada Bumdes.
- e. Berkoordinasi dengan Kementerian (Kemendes, Kemenparekraf).
- f. Mempromosikan Program Desa Brilian melalui sosial media, media cetak maupun media *digital*.

5. UMKM Naik Kelas

- a. Identifikasi potensi-potensi UMKM binaan di seluruh unit kerja regional.
- b. Program satu mantri satu UMKM Naik Kelas perhari.
- c. Pemanfaatan Rumah BUMN sebagai sarana pemberdayaan UMKM Naik Kelas.
- d. Kolaborasi dengan pihak eksternal baik dari Kementerian, Lembaga, Asosiasi, Universitas dan Komunitas.
- e. Melengkapi sarana pemberdayaan digital yaitu LinkUMKM dengan fasilitas pemberdayaan yang menarik dan lengkap.
- f. Memberikan pendampingan kepada UMKM untuk peningkatan kapasitas dan kompetensinya melalui pelatihan secara *online* dan *offline*.

6. Figur Inspiratif Lokal (FIL)

- a. Identifikasi figur- figur inspiratif lokal melalui aktivitas bisnis Mantri BRI (*canvassing* kredit) dan diassest melalui form *assesment* figur inspiratif lokal.
- b. Identifikasi dan automasi pengusulan figur inspiratif lokal melalui portal klaster usaha untuk figur yang bersumber dari klaster usaha (sebagai inisiator pembentukan klaster usaha)
- c. Identifikasi figur inspiratif lokal melalui Program Desa BRILiaN yaitu Kepala Desa dan atau Pengurus BUMDes yang memiliki inisiatif inovasi dan *digital*, memanfaatkan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa.
- d. Aktivitas pemberdayaan bagi para figur inspiratif lokal terpilih untuk mendapatkan pelatihan dan sertifikasi kewirausahaan sebagai pendamping UMKM bersertifikasi BNSP.
- e. Pelibatan figur inspiratif lokal sebagai narasumber dalam pelatihan/pemberdayaan klaster usaha.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Program

1. Bansos

Penyaluran Bantuan Sosial melalui HIMBARA merupakan penugasan dari pemerintah untuk mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif yang tertuang didalam Perpres No. 63 Th 2017. Untuk memperbanyak channel transaksi bantuan sosial, mulai dari tahun 2021 telah dilakukan uji coba transaksi atau pencairan bantuan sosial dengan menggunakan Biometrik dan QRIS dalam rangka proses digitalisasi pencairan secara cashless. Uji coba digitalisasi tersebut masih dilakukan oleh HIMBARA di tahun 2022 sesuai dengan arahan dari Tim

Pengendali Bantuan Sosial diantaranya Bapenas, Kemenko PMK, TNP2K, BI dan OJK. Aplikasi Portal Bansos yang merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Bank BRI sebagai tools monitoring pendistribusian Buku Tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) serta monitoring transaksi dana bantuan yang dicaikan oleh penerima bantuan.

2. BPUM

- Akses eform.bri.co.id/bpum oleh masyarakat umum untuk melakukan pengecekan penerima BPUM tahun 2021.
- BPUM *Reservation System* yang dikembangkan di dalam fitur eform.bri.co.id/bpum sehingga penerima dapat melakukan reservasi untuk melakukan pencairan sesuai dengan waktu dan Unit Kerja terdekat yang dikehendaki.

3. Klaster Usaha

Keunggulan kompetitif program ini adalah sebagai metode baru cara akuisisi bisnis mikro BRI yang semakin efisien, dan *sustainable* yaitu tidak dengan metode pendekatan individu namun dengan metode pendekatan klaster/kelompok usaha. Mantri dibekali program yang dapat memudahkan melakukan akuisisi bisnis BRI di kelompok-kelompok usaha. Program yang diberikan berupa bantuan pemberdayaan usaha produktif yang dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi usaha sebuah klaster. Misalnya meningkatkan kapasitas produksi, promosi dan pemasaran usaha klaster. Dukungan BRI mendorong keberhasilan usaha klaster ini diproyeksikan akan memberikan dampak juga pada peningkatan dan keberlanjutan bisnis BRI di klaster tersebut.

4. Desa BRILiaN

Program pemberdayaan ekosistem desa ini selaras dengan Revitalisasi Mantri yang juga akan menjadi *new way of working* Mantri BRI yang tujuan utamanya adalah mencari sumber pertumbuhan baru bagi Bisnis Mikro BRI. Keunggulan kompetitif program ini adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan desa dengan berbalut program pemberdayaan (peningkatan kapabilitas perangkat desa, BUMDes, dan Pelaku Usaha termasuk Klaster Usaha Binaan BRI). Program ini menysasar tidak hanya dampak finansial terhadap BRI yang bersumber dari akuisisi bisnis di desa namun juga dampak sosial kepada masyarakat desa dengan harapan desa-desa binaan ini akan loyal kepada BRI dan mendukung pertumbuhan bisnis mikro yang berkelanjutan bagi BRI.

5. UMKM Naik Kelas

UMKM Naik Kelas merupakan salah satu hasil dari proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BRI untuk para UMKM binaan, sehingga bisa mengembangkan bisnis secara kontinu. Melalui *platform* pemberdayaan *digital* yaitu LinkUMKM yang sudah bisa diakses oleh seluruh kalangan masyarakat melalui *website* maupun melalui aplikasi yang terdapat di Playstore dan IOS dan sudah dilengkapi dengan ratusan modul pembelajaran, jadwal pelatihan yang bisa akses oleh para UMKM, fasilitas menu etalase produk yang bisa dimanfaatkan oleh para UMKM untuk mempromosikan produknya.

6. Figur Inspiratif Lokal (FIL)

Figur Inspiratif Lokal merupakan inisiatif bisnis mikro dalam hal implementasi *partnership* pemberdayaan antara Bank BRI dengan tokoh masyarakat/sosok inspiratif untuk meng-influence pelaku usaha mikro agar maju sesuai inisiatif/inspirasi dari figur-figur inspiratif tersebut. Keunggulan kompetitif dari program FIL adalah kolaborasi antara Mantri BRI dengan figur inspiratif lokal untuk menjalankan fungsi literasi kepada masyarakat/pelaku usaha mikro agar mendapat akses inklusi keuangan dari Bank BRI. Figur inspiratif lokal merupakan implementasi dari konsep "*crowdsourcing*" untuk memperluas akses akuisisi inklusi BRI.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Program Tahun 2022

1. Bansos

BRI berperan aktif dalam penyaluran Bantuan Sosial yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi Nasional (PEN) dengan harapan dapat meningkatkan daya beli di tengah masyarakat. Untuk mengoptimalkan data penerima Bantuan Sosial yang telah disalurkan kepada penerima bantuan program PKH, Sembako Reguler, Sembako PPKM dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Divisi SEI berkolaborasi dengan Divisi lainnya terutama di segmen Mikro untuk diberikan pemberdayaan selanjutnya menjadikan data penerima bantuan sosial sebagai *pipeline* bisnis yang dapat ditindaklanjuti oleh RM di Unit Kerja BRI.

2. BPUM

Sebagai Bank Penyalur, Bank BRI masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) selaku pemilik program apakah akan ada Penyaluran BPUM tahun 2022 atau tidak. Namun demikian, untuk mengoptimalkan data penerima BPUM yang telah menjadi nasabah simpanan BRI, Divisi berkolaborasi dengan Divisi Bisnis terutapan di segmen Mikro menjadikan data penerima BPUM sebagai *pipeline* bisnis yang terintegrasi dengan Brispot sehingga dapat ditindaklanjuti oleh tim RM di Unit Kerja BRI.

3. Klaster Usaha

Tahun 2021 ditutup dengan pencapaian 78,4% inklusi keuangan pada program Klaster usaha. Sebuah pencapaian yang belum optimal, meskipun demikian ini menjadi jawaban sekaligus tantangan untuk ditingkatkan, bahwa kontribusi klaster usaha cukup signifikan dalam mendukung percepatan akuisisi bisnis mikro BRI. Oleh karena itu, di tahun 2022 upaya ini tetap diteruskan dengan tetap mencanangkan minimal 500 program pemberdayaan klaster, dan program akuisisi 1 Mantri 1 klaster. Dengan asumsi jumlah mantri adalah 26.000 maka, dan minimal anggota klaster adalah 8 orang, maka minimal akan ada sekitar 208.000 potensi bisnis mikro baru.

4. Desa BRILiaN

BRI menargetkan minimal 500 desa binaan baru yang akan diberdayakan melalui Program Desa BRILiaN 2022.

Berikutnya, BRI akan tetap memperdalam *financial literacy and inclusion* dari Desa yang sudah tergabung pada Program Desa BRILiaN 2020-2021 dengan meningkatkan pemanfaatan *micropayment* di desa. Idealnya, dari total kurang lebih 74 ribu desa yang ada di seluruh Indonesia, terdapat 56 ribu yang memiliki status Desa Berkembang, Maju, dan Mandiri, yang dapat diikuti program Desa BRILiaN. Masih banyak ruang untuk tumbuh dan akuisisi Ekosistem Desa oleh BRI.

5. **UMKM Naik Kelas**

Di tahun 2022 ditargetkan terdapat 1 juta UMKM Naik Kelas yang diberdayakan baik secara *online* melalui *platform* LinkUMKM maupun secara *offline* melalui Rumah BUMN, melalui 2.000 pelatihan yang akan dilaksanakan yang bisa diikuti oleh seluruh UMKM dengan ratusan pengajar/mentor yang memiliki spesifikasi dan keahlian di bidangnya dan dengan melibatkan mantri untuk bisa mendampingi dan membimbing para nasabah binaannya untuk dapat Naik Kelas.

6. **Figur Inspiratif Lokal (FIL)**

Program figur inspiratif lokal bisnis mikro BRI dapat dinilai memiliki prospek yang baik untuk mendukung pertumbuhan bisnis mikro BRI (*New source of growth* BRI). Pada Tahun 2022 program figur inspiratif lokal BRI ditargetkan dapat menjangkau 500 figur-figur inspiratif lokal di seluruh Indonesia untuk dikolaborasi dengan bisnis mikro BRI dalam menjalankan fungsi literasi dan akuisisi inklusi keuangan BRI. Adapun strategi FIL di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Cari dan Temukan
 - Masing-masing unit kerja bisnis (termasuk regional dan KP) mengidentifikasi potensi figur-figur inspiratif lokal yang dapat bersumber dari:
 - Tokoh Masyarakat/kepala Desa/pengurus BUMDes yang memiliki inspiratif/inisiatif dengan mekanisme penjangkauan melalui program Desa BRILiaN.
 - Inisiator bisnis/pembentukan kluster usaha yang memiliki dampak positif bagi peningkatan kapasitas usaha/ekonomi melalui pembentukan kelompok usaha tersebut (mekanisme penjangkauan melalui program kluster usaha).
- b. Berdayakan
 - Pemberdayaan figur inspiratif lokal melalui:
 - Peningkatan *soft* dan *hard* kompetensi melalui pelatihan/sertifikasi, bekerjasama dengan pusat inkubasi bisnis atau universitas.
 - Pelibatan Figur Inspiratif Lokal dalam pelatihan atau event-event pemberdayaan.
- c. Publikasi
 - Menyusun *media plan* untuk publikasi inspirasi-inspirasi figur lokal inspiratif dan program kolaborasi BRI dalam rangka mendukung UMKM Naik kelas.

Segmen Ritel

Segmen Bisnis Ritel ditujukan untuk melayani wirausaha kecil dan menengah (UKM) antara lain melalui produk dan layanan perbankan konsumen dan komersial. Segmen Ritel meliputi Bisnis Program, Bisnis Kecil dan Menengah, Bisnis Kredit Konsumer, Bisnis Simpanan dan Jasa Perbankan Ritel.

BISNIS KECIL DAN MENENGAH

BRI melalui Bisnis Kecil dan Menengah memiliki produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, BRI mengklasifikasikan Bisnis Kecil dan Menengah berdasarkan plafon kredit, plafon kredit Bisnis Kecil sebesar >Rp250 juta-Rp25 miliar, sedangkan plafond kredit Bisnis Menengah sebesar >Rp25 miliar-Rp200 miliar.

Produk-produk Bisnis Kecil dan Menengah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. **Kredit Modal Kerja**
 - Fasilitas kredit produktif untuk pembiayaan operasional usaha dalam rangka proses produksi atau tambahan modal kerja. Produk ini memiliki keunggulan di antaranya jangka waktu dan pengembalian kredit sesuai dengan karakter bisnis debitur dan *new account sweep*.
- 2. **Kredit Investasi**
 - Fasilitas kredit produktif dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, renovasi, atau penggantian biaya perolehan (*refinancing*) barang modal. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan seperti jangka waktu kredit sesuai dengan kemampuan arus kas debitur.
- 3. **Kredit Mitra/Supply Chain Financing**
 - a. KMK *Pre Financing* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada vendor/pemasok untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka pengerjaan proyek kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
 - b. KMK *Post Financing* adalah fasilitas kredit modal kerja kepada vendor/pemasok untuk membiayai pengambilalihan piutang atas tagihan penyelesaian proyek kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
 - c. KMK Distributor (*Distributor Financing*) adalah fasilitas kredit modal kerja kepada distributor/agen, khusus untuk pembayaran pembelian produk kepada Perusahaan Inti rekanan BRI.
 - d. Kredit Investasi Mitra adalah fasilitas kredit investasi dalam rangka pembelian, pembangunan, perluasan, renovasi, termasuk *refinancing* aktiva tetap dalam rangka mendukung operasional bisnis mitra Perusahaan Inti rekanan BRI. Produk-produk tersebut memiliki sejumlah keunggulan antara lain:
 - Suku bunga dan biaya kredit menarik.
 - Relaksasi agunan dan *sharing* dana sendiri.
 - Operasionalisasi secara *digital* melalui modul *supply chain* pada *cash management system* BRI.

4. Kredit Dinamis

Kredit dinamis adalah kredit modal kerja maupun kredit investasi dengan fitur berupa insentif suku bunga kredit yang berubah dinamis secara otomatis setiap bulan, berdasarkan penyaluran transaksi keuangan dan *performance* giro BRI debitur pada bulan sebelumnya. Keunggulannya memiliki suku bunga kredit yang lebih menarik dibanding kredit konvensional dan *new account sweep*.

5. Kredit Ritel Dengan Pola Angsuran Tetap

Merupakan fasilitas kredit produktif untuk tujuan modal kerja maupun investasi yang diperuntukkan bagi debitur segmen ritel dengan sistem pembayaran angsuran berupa pokok dan bunga dengan jumlah tetap.

Keunggulan produk dengan pola angsuran tetap antara lain:

- Jangka waktu kredit hingga 5 (lima) tahun.
- Maksimal angsuran adalah 70% dari RPC.

6. Invoice Financing Melalui Platform Investree (Fintech Peer to Peer Lending)

BRI melakukan kolaborasi dengan perusahaan *financial technology* (*fintech*) antara lain dalam penyaluran *invoice*

financing dengan skema kerjasama yang dilakukan melalui *platform online*. Prosedur pelayanan kredit dilakukan secara *digital* dan cepat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta biaya kredit relatif murah dan tanpa agunan tambahan.

7. KMK Tangguh

Merupakan produk pinjaman dengan penjaminan Pemerintah untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (dalam rangka PMK 71). Program ini ditujukan untuk pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.

8. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil

KUR Kecil merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha Kecil Menengah dengan pinjaman sebesar Rp50 juta - Rp500 juta per debitur yang dapat berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI). Keunggulan KUR Kecil antara lain suku bunga yang relatif murah dan proses kredit yang lebih simple dan cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Kecil dan Menengah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Kredit Kecil	173.193.545	175.880.942	(2.687.397)	(1,53%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	30.947.239	21.348.402	9.598.837	44,96%
Kredit Menengah	20.797.110	19.423.550	1.373.560	7,07%
Small Medium Enterprise (SME)	224.937.894	216.652.894	8.285.000	3,82%

Total *outstanding* kredit Bisnis Kecil dan Menengah tahun 2021 sebesar Rp224,94 triliun, meningkat 3,82% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp216,65 triliun. Peningkatan tersebut dikontribusi oleh kredit kecil sebesar 3,50% YoY yang sebagian besar disumbang oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tumbuh 44,96% dan Kredit Menengah sebesar 7,07% YoY.

Pada tahun 2021, hampir semua sektor bisnis masih dalam pemulihan dari tekanan pandemi COVID-19, termasuk segmen bisnis Kecil dan Menengah. Penyaluran bisnis dilakukan secara selektif untuk menjaga kualitas aset pinjaman, dengan fokus

pada sektor yang masih bertumbuh di masa pandemi, dan memanfaatkan *guaranteed loan* dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Strategi tersebut menghasilkan hasil positif, dengan pencapaian kinerja segmen SME posisi Desember 2021, yaitu jumlah total Nasabah 469.461 (naik dari posisi 420.652 di Desember 2020), total *outstanding* kredit Rp224,94 triliun dibandingkan posisi tahun sebelumnya 31 Desember 2020 Rp217,22 triliun, atau tumbuh 3,55% secara *year on year*. Kualitas kredit SME relatif terjaga, dimana pinjaman kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) sebesar 3,26% dan NPL terjaga di kisaran 3,94% pada bulan Desember 2021.

Tabel Rincian Kinerja (Produktivitas) Bisnis Kecil dan Menengah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Desember 2021	Desember 2020	Pertumbuhan	
			Nominal	(%)
Kredit Kecil				
Debitur	286.397	283.532	2.865	1,01%
<i>Outstanding</i>	173.193.545	175.880.942	(2.687.397)	(1,53%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR Kecil)				
Debitur	176.085	130.671	45.414	34,75%
<i>Outstanding</i>	30.947.239	21.348.402	9.598.837	44,96%

Uraian	Desember 2021	Desember 2020	Pertumbuhan	
			Nominal	(%)
Kredit Menengah				
Debitur	1.312	1.290	22	1,71%
Outstanding	20.797.110	19.423.550	1.373.560	7,07%
Bisnis Kecil dan Menengah (Segmen Small and Medium Enterprises (Segmen SME))				
Debitur	463.794	415.493	48.301	11,62%
Outstanding	224.937.894	216.652.894	8.285.000	3,82%

Sebagai bagian dari dukungan BRI kepada nasabah di segmen Kecil dan Menengah serta dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021, BRI telah menyalurkan KMK Tangguh sejumlah Rp18,53 triliun sehingga total penyaluran KMK Tangguh dalam kurun waktu tahun 2020 – 2021 sejumlah Rp27,31 triliun.

Tabel Penyaluran KMK Tangguh

Tahun	Rekening	Penyaluran (Jutaan Rupiah)
2020 Total	14.478	8.778.112
2021 Total	27.537	18.536.284
Grand Total	42.015	27.314.396

Strategi Bisnis Kecil dan Menengah Tahun 2021

Dalam rangka menghadapi tantangan bisnis perbankan di masa pandemi COVID-19, segmen Bisnis Kecil dan Menengah menerapkan strategi *new SME business model* di *Regional Office*, bisnis berbasis *digital*, implementasi produk yang inovatif, serta peningkatan kapabilitas Pekerja *Relationship Manager* (RM), guna menjaga pertumbuhan bisnis secara *sustainable*. Adapun strategi dan inovasi yang telah diterapkan di segmen Bisnis Kecil dan Menengah tahun 2021 sebagai berikut:

1. Implementasi *New SME Business Model in Regional Office* berupa pembentukan *SME Center*, telah diterapkan di seluruh *Regional Office* dan Kantor Cabang Khusus sejak 1 Oktober 2021.
2. Peningkatan bisnis *value chain*, ekosistem *digital* berbasis komoditas dan kerjasama dengan *fintech*, yang berusaha menghubungkan aliran *value* antara pelaku industri level korporasi, level menengah hingga level UMKM.
3. Inovasi produk dan proses bisnis lainnya di segmen SME antara lain KMK Tangguh sebagai implementasi program PEN, perluasan KUR untuk petani plasma segmen Bisnis Kecil, *special program* untuk pengusaha Rice Mill Unit (RMU), Kredit Dinamis untuk *outstanding* secara dinamis yang diperhitungkan dari mutasi transaksi dan CASA, Kredit Skema Resi Gudang (SRG) dan Subsidi Resi Gudang (SSRG), Kredit Modal Kerja skema *withdrawal approval* dan *invoice based*, Kredit Mitra *Pre financing* untuk *vendor* dan *distributor*, serta Kredit Mitra *post financing* yang secara bertahap akan dialihkan ke skema *Supply Chain Financing* (SCF). Inovasi produk ini juga dibarengi dengan mitigasi risiko dalam bentuk kerjasama asuransi, yaitu asuransi kerugian untuk agunan, dan asuransi kredit/ penjaminan kredit.
4. Guna percepatan proses bisnis SME dengan prinsip Kehati-hatian, juga diterapkan berbagai program internalisasi *culture* dan peningkatan kapabilitas Pekerja RM SME. *Culture*

Activation Program (CAP) bagi RM SME yaitu agar dapat berperan sebagai C.E.A Agent (*CASA Creator, Ecosystem Builder* dan *SME Business Advisor*). Telah diimplementasikan juga program pendidikan BRICamp dan *SME Banking Academy*, yang selama tahun 2021 telah diikuti oleh sekitar 5.700 RM SME dan Pekerja di SME Center.

5. Segmen SME juga berkomitmen untuk meningkatkan bisnis Nasabah SME melalui berbagai program. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan program Pengusaha Muda BRILiAN, yaitu akselerasi bisnis untuk para pengusaha muda di Indonesia yang digelar di beberapa kota di Indonesia. Digelar pula acara UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 yang merupakan *event* tahunan lintas Direktorat bisnis, yang menampilkan hasil karya produk-produk terbaik Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) Indonesia.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Kecil dan Menengah

Dengan implementasi berbagai strategi dan inovasi proses bisnis tersebut di atas, segmen SME BRI semakin memperkuat posisinya sebagai *market leader* di segmen UMKM Nasional dan menjadi lini bisnis BRI terbesar kedua setelah segmen mikro. Adapun keunggulan kompetitif di segmen bisnis kecil dan menengah antara lain:

1. Didukung oleh unit kerja berupa *SME Center* di *Regional Office* dan Kantor Cabang Khusus (KCK), Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Implementasi *SME Center* di *Regional Office* dan KCK semakin memperkuat penggalan potensi bisnis, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis serta meningkatkan kualitas mitigasi risiko.
3. *Marketing arm* yaitu pekerja RM SME yang berjumlah sekitar 5.000 orang.
4. Selain *channel* unit kerja fisik, juga didukung oleh *channel online* berupa kerjasama dengan *fintech*, yaitu saat ini melalui *Investree* dan Modal Rakyat. BRI tidak memposisikan *fintech* sebagai pesaing namun sebagai *partner* untuk memperluas *market reach*.

5. Proses bisnis kecil sampai dengan Rp5 miliar sudah melalui proses secara *digital* melalui aplikasi BRISPOT.
6. Fokus di bisnis berbasis ekosistem, antara lain dengan *platform* Link5 untuk menciptakan ekosistem bisnis, produk *digital* ekosistem berbasis komoditas (Tebu *chain*, Padi *chain*, dan lain-lain), serta bisnis *value chain*.
7. Pembentukan Divisi baru, *Value Chain Solution Division* sebagai upaya optimalisasi pengembangan bisnis berbasis *value chain*.
8. Penguatan mitigasi risiko bisnis dengan kerjasama asuransi kerugian dan asuransi kredit sampai dengan *plafond* Rp3 miliar.
9. Dilaksanakannya program pendidikan BRICamp RM SME untuk mendukung transformasi RM SME dan meningkatkan kapabilitas RM.
10. Pemberdayaan nasabah UMKM melalui program Pengusaha Muda BRILiaN dan Brilianpreneur yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas UMKM dalam rangka memperluas akses pasar lokal dan internasional.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Kecil dan Menengah Tahun 2022

Memasuki Q4 tahun 2021, seiring dengan efektivitas penanganan pandemi COVID-19, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan memasuki tren positif. Hal ini apabila didukung kondisi makroekonomi yang stabil dan dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka tren penguatan ekonomi diproyeksikan akan berlanjut di tahun 2022 dan berdampak positif pada kinerja segmen SME. Adapun strategi bisnis kecil dan menengah yang akan diterapkan di tahun 2022 secara umum adalah *faster, stronger, healthier*, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Faster*: Fokus pada peningkatan akselerasi dan kapasitas ekspansi bisnis SME.
2. *Stronger*: Fokus pada penguatan bisnis segmen SME sesuai prinsip kehati-hatian.
3. *Healthier*: Fokus pada peningkatan kualitas aset SME, yaitu dengan cara tata kelola.

BISNIS KREDIT KONSUMER

Bisnis kredit konsumen BRI menawarkan produk yang memudahkan nasabah individu memperoleh berbagai kebutuhan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, dan barang konsumsi lainnya. Kredit konsumen BRI memberikan suku bunga yang kompetitif dan proses yang cepat. Produk-produk kredit konsumen BRI yang tersedia di tahun 2021 yaitu:

1. **Kredit BRIGuna**
Kredit multiguna yang ditujukan kepada segmen berpenghasilan tetap, dengan jenis antara lain BRIGuna Karya, BRIGuna Purna, BRIGuna Umum, BRIGuna Pendidikan, dan BRIGuna Talangan.
2. **Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)**
KPR merupakan kredit konsumtif perumahan baik untuk pembelian baru/bekas, ambil alih, pembangunan serta renovasi dengan obyek berupa rumah tinggal, rumah toko (ruko) dan rumah kantor (rukan).
3. **Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)**
KKB merupakan kredit dalam rangka pembiayaan kendaraan roda dua, roda dua *premium* dan roda empat yang dilakukan melalui pola langsung maupun pola kerjasama.
4. **Kartu Kredit dan *Digital Lending***
Produk dan layanan KMG meliputi kartu kredit dan layanan *digital lending*.
 - a. Kartu kredit merupakan kredit tanpa agunan berbasis kartu yang memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabah bertransaksi *merchant-merchant* yang bekerja sama. Sejak tahun 2021, agar penyaluran KKB BRI Group dapat berjalan dengan efektif dan optimal, seluruh penyaluran KKB BRI Group telah difokuskan melalui entitas anak BRI, yaitu BRIFinance (*single gateway system*)
 - b. Layanan *digital lending* yaitu produk pinjaman *digital* CERIA dan *Paylater Card*. CERIA merupakan aplikasi di *smartphone* yang memberikan nasabah kemudahan memperoleh pembiayaan yang ditransaksikan melalui *e-commerce* dengan limit maksimal hingga Rp20 juta. Produk yang telah menggunakan teknologi *digital verification, credit scoring, dan digital signature* ini dalam hal prosesnya hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit dengan tenor yang fleksibel sampai dengan 12 bulan, serta pengajuan bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor cabang maupun bertatap muka dengan pegawai bank. Sedangkan Traveloka *Paylater Card* adalah sinergi BRI dengan Traveloka *Paylater* yang menciptakan ekosistem pembayaran *digital* secara komprehensif. Registrasi Traveloka *Paylater Card* dapat dilakukan dengan mudah oleh nasabah dari rumah dan didukung dengan verifikasi yang cepat serta persetujuan atas aplikasi dilakukan melalui proses penilaian kredit yang efisien dan cangguh.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Kredit Konsumer

(dalam juta Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Kredit BRIGuna	104.820.795	101.336.755	3.484.040	3,44%
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	39.125.670	35.733.166	3.392.504	9,49%
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB Langsung) *)	1.090.424	3.002.139	(1.911.715)	(63,68%)
Kartu Kredit dan <i>Digital Lending</i>	4.343.869	3.608.433	735.436	20,38%
Total Bisnis Kredit Konsumer	149.380.759	143.680.493	5.700.266	3,97%

*) Per Oktober 2020 KKB dialihkan ke BRI Finance

Di tengah masa pandemi COVID-19 bisnis konsumen khususnya BRIGuna dan KPR tumbuh dan kompetitif, Kredit BRIGuna tahun 2021 sebesar Rp104,82 triliun, meningkat 3,44% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp101,34 triliun. Demikian pula dengan KPR yang tumbuh 9,49% dari Rp35,73 triliun di tahun 2020 menjadi Rp39,13 triliun di tahun 2021. Pertumbuhan kredit BRIGuna pada 2021 didukung dengan digitalisasi proses dengan implementasi sistem *pre approval* yang mana hal tersebut mampu meningkatkan efisiensi bisnis proses dengan fokus pada nasabah *payroll* BRI, serta penggunaan BRISPOT konsumen sehingga calon nasabah dapat melakukan pengajuan BRIGuna secara langsung menggunakan aplikasi di *mobile phone*. Pencairan baru kredit BRIGuna pada 2021 sebesar Rp36,88 triliun. Sedangkan pertumbuhan KPR karena didukung beberapa hal antara lain perbaikan *business proces engineering* berupa implementasi *Consumer Loan Factoring* (CLF) dan juga implementasi BRISPOT konsumen, serta program pemasaran KPR BRI Virtual EXPO yang dilaksanakan dua kali pada tahun 2021. Selain itu adanya penyaluran program KPR FLPP sebanyak 12.746 unit dengan total

plafond Rp1,9 triliun. Secara total pencairan baru KPR pada 2021 sebesar Rp8,64 triliun.

Kartu kredit dan *digital lending* tumbuh sebesar Rp735 miliar atau 20,38% dari Rp3,61 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,34 triliun pada tahun 2021, hal tersebut disebabkan peningkatan transaksi sales volume pada *merchant partner* BRI di samping dengan terus dilakukannya inovasi pengembangan akuisi kartu kredit digital yaitu *paylater* dan *ceria*. Kedua produk yang baru diluncurkan pada akhir 2019 nyatanya disambut baik oleh masyarakat yang tercermin dari peningkatan *outstanding* tahun 2021.

Secara *market share*, pada Q3 2021 BRIGuna masih menguasai pasar dengan presentase sebesar 26,92%, lebih tinggi dibandingkan Bank Pesaing. Pertumbuhan KPR BRI pada Q3 2021 sebesar Rp3,47 triliun merupakan yang tertinggi dengan YoY 10,01% dibanding dengan Industri.

Tabel Pertumbuhan KPR

(dalam miliar Rupiah)

No	Bank	Q3 2020	Q4 2020	Q3 2021	YoY Q3 2021 (Rp)	YoY Q3 2021 (%)
1	BRI	34.648	35.912	38.115	3.467	10,01%
2	Total Industri	529.861	541.433	575.789	45.928	8,67%

Strategi Bisnis Kredit Konsumer Tahun 2021

Pelemahan aktivitas ekonomi serta kondisi makro ekonomi Indonesia yang tidak stabil adalah dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Hampir semua sektor bisnis terdampak pandemi. Hal ini akan menjadi perhatian khusus bagi bisnis konsumen untuk lebih prudent dalam menyalurkan kredit. Efisiensi akan dilakukan melalui perbaikan bisnis proses guna mendorong pertumbuhan bisnis konsumen yaitu dengan fokus pada nasabah *payroll* BRI, dan membangun *Digital On-boarding* BRIGuna. Untuk mencapai aspirasi bisnis konsumen, BRI akan tetap fokus meningkatkan *market share* bisnis konsumen dengan tumbuh selektif melalui ekspansi terarah dengan memanfaatkan program-program taktikal Kredit Briguna, Kredit Perumahan Rakyat (KPR), KPR BRI *Virtual Expo* dengan *prudent* dalam risiko yang terkendali guna menghindari pemburukan kualitas kredit dan mendorong perbaikan kolektibilitas. Di tengah kondisi makro ekonomi yang tidak stabil, perbaikan NPL melalui program *recovery* dengan mengandalkan relaksasi program-program Pemerintah menjadi *booster* dalam mempertahankan kinerja perusahaan. Untuk itu BRI akan fokus pada perbaikan kolektibilitas dengan memberikan kemudahan program restrukturisasi bagi nasabah-nasabah terdampak pandemi COVID-19.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Kredit Konsumer

Peningkatan layanan dan kemudahan menjadi kunci dalam pertumbuhan kredit konsumen, hal ini didukung dengan digitalisasi

proses kredit BRIGuna dan KPR. Efisiensi akan dilakukan melalui perbaikan bisnis proses guna mendorong pertumbuhan bisnis konsumen, antara lain adalah

1. *Digital On-boarding* BRIGuna
2. *Mortgage Ecosystem*

Dengan *customer base* yang besar dan jaringan tersebar luas di seluruh Indonesia maka digitalisasi proses bisnis menjadi salah satu kunci pertumbuhan yang terjaga ke depannya. Dengan ini diharapkan pelayanan kredit konsumen semakin mudah namun tetap memperhatikan *risk* dan tetap *prudent*. BRI saat ini menjadi salah satu *market leader* dalam penyaluran *payroll loan*, sedangkan untuk penyaluran KPR, saat ini BRI berada pada Top 5 Bank Penyalur KPR terbesar di Indonesia.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Kredit Konsumer Tahun 2022

Bisnis Konsumer BRI yang memiliki jangkauan produk dan layanan yang luas baik dari produk pinjaman (*consumer loan and credit card*), produk dan layanan transaksi simpanan (*retail payment and mass funding*) dan produk pengelolaan keuangan (*wealth management*). Strategi bisnis konsumen BRI diarahkan untuk dapat mencapai aspirasi pada tahun 2025 yaitu *Become The Leading Consumer Bank In Indonesia on The Back of Distinctive Customer Experience and Market Beating Digital Solutions*.

Untuk mendukung pencapaian aspirasi tersebut serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal perusahaan, maka pada tahun 2022 bisnis konsumen BRI akan mengusung tema *Enhancing Digital Collaboration* yang berfokus pada pengembangan kapabilitas *digital* produk dan layanan konsumen dalam bentuk peningkatan fitur yang bertujuan untuk memenuhi setiap kebutuhan keuangan nasabah melalui SuperApp BRImo, serta memberikan *user experience* yang lebih baik dengan melakukan *integrated payment* dan *partnership* dengan mitra untuk meningkatkan *engagement* dengan nasabah. Pengembangan kapabilitas *digital* tersebut pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis.

Adapun langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mendukung hal-hal tersebut yaitu mendorong pertumbuhan pinjaman bisnis konsumen secara berkelanjutan melalui peningkatan kapabilitas *digital* diantaranya dalam bentuk penguatan bisnis *unsecure lending* BRI melalui BRIGuna *Digital*, inisiatif ekspansi KPR melalui BRI *Mortgage Ecosystem* dan integrasi dengan BP Tapera.

BISNIS SIMPANAN DAN JASA PERBANKAN RITEL

BRI memiliki produk simpanan ritel yang beragam untuk memenuhi kebutuhan seluruh nasabah. Pada tahun 2021, produk simpanan ritel antara lain:

1. Tabungan

Varian produk tabungan yaitu sebagai berikut:

- a. Tabungan BRI BritAma
 - Tabungan BRI BritAma Umum

Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dan *system real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Selain itu tabungan BritAma memiliki gratis *cover* asuransi kecelakaan, fitur *e-banking* dan suku bunga kompetitif. Saat ini pembukaan Tabungan BRI BritAma dapat dilakukan secara cepat dan mudah tanpa datang ke unit kerja BRI dengan mengakses bukarekening.bri.co.id.

Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas *e-banking* yang akan memudahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun, serta fasilitas perlindungan asuransi kecelakaan diri (*personal accident*) cuma-cuma. Tabungan BRI BritAma memiliki berbagai jenis varian yaitu BritAma Umum, BritAma Bisnis, BritAma Rencana, BritAma Muda, BritAma Mitra, BritAma TKI, BritAma Valas dengan pilihan mata uang USD, SGD, AUD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY dan SAR.

- Tabungan BRI BritAma Bisnis

Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan yang menunjang bisnis, disertai dengan pencatatan transaksi yang lebih detail, dan didukung fasilitas *e-banking* dan *system real time online* yang

akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun. Selain itu tabungan BritAma memiliki gratis *cover* asuransi kecelakaan, fitur *e-banking* dan suku bunga kompetitif dan pencatatan transaksi lebih detail pada buku tabungan dan pengiriman rekening koran melalui *email*.

- Tabungan BRI BritAma X

Produk tabungan dengan desain kartu debit khusus yang elegan untuk anak muda serta memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas *e-banking* dan *system real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.
 - b. Tabungan BRI Junio dan Junio Rencana

Tabungan BRI Junio diperuntukkan bagi anak-anak dengan tujuan untuk mendorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan Bank sejak dini. Tabungan BRI Junio dilengkapi dengan fasilitas *e-banking*, fitur perencanaan keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta kartu debit desain khusus yang menarik.
 - c. Tabungan BRI Simpedes

Tabungan BRI Simpedes merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari *internet banking* dan *mobile banking*. Tersedia juga varian dari Simpedes seperti Simpedes Umum, Simpedes TKI, Simpedes Impian dan Simpedes Usaha.
 - d. Selain itu BRI memiliki produk tabungan lainnya yaitu:
 - Tabunganku dan Tabunganku BSA
 - Tabungan BRI Sempel
 - Tabungan BRI SiMuda
- ### 2. Giro
- Varian produk giro yang ditawarkan yaitu:
- a. Giro BRI Rupiah
 - b. Giro BRI Valas

3. Deposito BRI (DEPOBRI)

Deposito BRI sebagai pilihan investasi bagi nasabah tersedia dalam berbagai pilihan mata uang, baik Rupiah maupun valas dengan suku bunga yang kompetitif. Produk ini cocok bagi nasabah yang menginginkan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan produk tabungan. Untuk kemudahan pembukaan rekening, nasabah diberikan pilihan pembukaan melalui unit kerja BRI yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia atau melalui *internet banking*. Dengan setoran awal yang terjangkau, nasabah juga diberikan fleksibilitas untuk memilih mekanisme pemberian bunga, baik langsung diberikan melalui rekening ataupun ingin ditambahkan ke dalam komponen pokok deposito (*add on*). BRI telah mengembangkan produk *deposito scriptless* untuk mengakomodir kebutuhan nasabah yang memiliki banyak *bilyet*. *Deposito scriptless* merupakan deposito yang bukti penempatan dananya berupa *email* notifikasi agar para nasabah

dapat mengelola rekening depositonya lebih efektif dan efisien. Adapun varian produk deposito yaitu:

- a. DepoBRI Rupiah
- b. DepoBRI *Valas*
- c. Deposito *On Call*
- d. Deposito *On Call Valas*

Sedangkan jasa layanan yang ditawarkan bisnis jasa perbankan ritel antara lain sebagai berikut:

1. **Internet Banking BRI**

Merupakan salah satu fasilitas perbankan yang dapat dipergunakan nasabah untuk mengakses rekening simpanan melalui jaringan internet. Internet banking BRI memiliki beragam keunggulan seperti mudah dipahami dan digunakan, nasabah bisa bertransaksi perbankan dengan aman dan setiap saat.

2. **SMS Banking BRI**

Layanan *e-banking* BRI yang satu ini dapat digunakan untuk mengakses rekening simpanan nasabah melalui ponsel. SMS Banking BRI akan melayani kebutuhan transaksi perbankan nasabah dengan dua jenis layanan, yakni berbasis *menu* dan *plain text*. SMS berbasis menu yaitu layanan SMS Banking yang menggunakan *menu* sebagai perintah transaksinya. Sementara *plain text* merupakan layanan SMS Banking dengan mengirimkan perintah transaksi yang akan dilakukan ke nomor 3300.

3. **BRImo**

BRImo merupakan aplikasi keuangan *digital* BRI berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah bertransaksi dengan *User Interface* dan *User Experience* (UI UX) yang baik. Fitur-fitur menarik lainnya seperti *online opening account*, tarik tunai tanpa kartu, alias rekening, info *promo*, *login* dengan *fingerprinf/face id*, dan mutasi rekening sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2021, telah dilakukan perubahan pada tampilan dan beberapa penambahan fitur untuk melengkapi kebutuhan nasabah yang saat ini terus berkembang. Ke depannya diharapkan Brimo dapat menjadi *one stop solution* untuk seluruh *customer* BRI.

4. **BRIZZI**

Merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang bisa dipakai untuk membayar transaksi belanja atau transaksi lainnya yang disediakan oleh penyedia barang atau jasa. Semua transaksi BRIZZI dapat dilakukan di seluruh *merchant* dengan menggunakan mesin EDC BRI. Isi ulang (*top up*) BRIZZI saat ini juga mudah dan dapat dilakukan di *merchant-merchant* yang telah bekerja sama dengan BRI, seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Yomart, dan lain-lain. Selain itu, kartu BRIZZI juga

dapat dipergunakan untuk transaksi pembayaran jalan tol, KRL, parkir, maupun transportasi umum lainnya seperti Transjakarta.

5. **Wealth Management**

Wealth management BRI memiliki beragam produk investasi untuk memudahkan nasabah yang ingin meningkatkan nilai aset yang dimilikinya. Produk investasi *wealth management* BRI antara lain Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, *Saving Bond Ritel*, Sukuk Tabungan, Surat Berharga Negara (SBN) yang diritelkan Valas (INDON & INDOIS), SBN yang diritelkan Rupiah, *Swap Deposit*, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain produk investasi tersebut, BRI bekerja sama dengan Manajer Investasi terpercaya dan terkemuka yang memiliki beragam varian produk Reksa Dana, antara lain Reksa Dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan Reksa Dana terproteksi. BRI memiliki produk investasi *bancassurance* dengan *selling point* tersendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Portofolio nasabah *bancassurance* BRI terbagi dalam tiga segmen, yaitu segmen mikro, ritel, dan prioritas. Layanan BRI Prioritas memberikan pelayanan dan jasa perbankan bagi Pribadi Terpilih BRI Prioritas, yang tidak hanya mencakup pelayanan dan jasa perbankan secara umum, namun juga jasa konsultasi perencanaan keuangan dan investasi, asuransi (*bancassurance*), serta perencanaan dana pensiun.

6. **Aplikasi Cash Management System BRI**

Merupakan solusi layanan keuangan perbankan berbasis internet dengan *User Interface* dan *User Experience* (UI UE) yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Keunggulan CMS BRI antara lain sangat mudah di akses secara mobile, *user friendly*, *real time*, fitur keamanan yang memadai, serta dilengkapi dengan fitur-fitur transaksi yang mendukung kebutuhan transaksi keuangan pada umumnya atau dapat disesuaikan (*customized*) terhadap kebutuhan nasabah.

7. **Giro BRI**

Merupakan produk yang melayani kebutuhan transaksional nasabah, dengan fasilitas penarikan melalui warkat (cek/bilyet giro) serta dapat dilakukan melalui ATM atau secara *digital* melalui CMS BRI.

8. **Trade Finance BRI**

Merupakan layanan ekspor secara komprehensif dan terintegrasi bagi eksportir/importir baik melalui *Letter of Credit* (L/C) ataupun Non L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

9. **Bank Garansi BRI**

Merupakan layanan kebutuhan penjaminan Bank melalui fasilitas bank garansi.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Simpanan dan Perbankan Ritel

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Dana Pihak Ketiga (dalam juta)				
Total DPK	429.700.844	410.298.277	19.402.567	4,73%
Rekening (dalam unit rekening)				
Deposito	337.237	360.683	(23.446)	(6,50%)
Giro	528.055	494.805	33.250	6,72%
Tabungan	34.147.114	29.390.516	4.756.598	16,18%
Total Rekening	35.012.406	30.246.004	4.766.402	15,76%
Transaction Banking Retail (Non Wholesale)				
Volume Trade Finance	90.557.613	36.485.331	54.072.282	148,20%
Fee Based Trade Finance	175.024	97.699	77.325	79,15%
Volume Bank Garansi	31.415.275	19.625.903	11.789.372	60,07%
Fee Based Bank Garansi	276.817	185.479	91.338	49,24%
Volume Cash Management	1.595.704.596	975.212.837	620.491.759	63,63%
Feebased Cash Management	78.437	60.221	18.216	30,25%
Average Balance Giro	79.832.000	69.346.000	10.486.000	15,12%
Volume Transaksi BRImo	1.344.786	197.428	1.147.358	581,15%
Volume Internet Banking	1.786.571	1.248.474	538.097	43,10%
Feebased E-Channel dan E-Banking	6.895	6.377	517	8,11%

Total DPK tahun 2021 sebesar Rp429,70 triliun, meningkat 4,73% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp410,29 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan giro sebesar 12,78% dan tabungan sebesar 7,81% yang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas transaksi nasabah dalam melakukan proses bisnis meskipun dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Deposito mengalami sedikit penurunan sebesar 1,54% dari Rp170,47 triliun menjadi Rp167,84 triliun dikarenakan fokus simpanan ritel pada tahun 2021 adalah peningkatan transaksi serta efisiensi biaya dana.

Pertumbuhan DPK tersebut sejalan dengan pertumbuhan rekening simpanan ritel di tahun 2021, secara total rekening tahun 2021 berhasil tumbuh sebesar 15,76%, meningkat dari 30.246.004 unit rekening di tahun 2020 menjadi 35.012.406 unit rekening di tahun 2021.

Dari sisi layanan perbankan ritel, secara umum mengalami pertumbuhan. Bisnis *transaction banking* merupakan salah satu pilar pertumbuhan BRI ke depan terutama dalam mengakselerasi penghimpunan dana dan peningkatan perolehan *fee based income*.

Strategi Bisnis Simpanan dan Jasa Perbankan Ritel Tahun 2021

1. Simpanan Ritel

Strategi bisnis yang telah dilakukan bisnis simpanan ritel di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

 - a. *Digitalisasi on boarding* utk memudahkan pembukaan rekening tabungan, dengan pengembangan *digital saving* menggunakan teknologi *face recognition* dan *digital signature*.
 - b. Memperluas akses pembukaan rekening secara *digital* melalui bekerjasama dengan platform *e-commerce*, *fintech* dan platform *digital* lainnya.
 - c. *Solution selling*, dengan mengedepankan *bundling offer product* sebagai solusi atas kebutuhan nasabah dalam upaya membangun *ecosystem payment* di *emerging ecosystem*.
 - d. Mengembangkan program *loyalty* dengan *campaign* program-program yang menarik seperti Britama Fstvl, BRI Point.
 - e. Mengembangkan *culture cross selling* di lingkungan pekerja dan RM Dana melalui program BRILian Xtraordinary dan BRI X.

- f. Mengembangkan *platform digital ecosystem* dalam upaya membangun ekosistem *payment* di lingkungan sekolah, universitas, hunian dan *reatailer*.
2. Jasa Perbankan Ritel
- Strategi perbankan ritel tahun 2021 adalah fokus pada memperkuat digitalisasi produk (*strengthen product digitization*) yang terdiri dari:
- a. *Customer Acquisition*
Melakukan penetrasi sumber pertumbuhan baru dan *leveraging tiering* transaksi nasabah.
 - b. *Commercialization*
Fokus pada *customer* yang telah mendapatkan *value proposition* eksisting dalam kebutuhan transaksinya agar semakin memperkuat loyalitasnya.
 - c. *Organization Transformation*
Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan terkait *agile organization* baik dalam rangka memenuhi kebutuhan *client handling* maupun *technology development*.
 - d. *Product Digitization and Integrated Solutions*
Meningkatkan kapabilitas produk melalui layanan *digital* yang terintegrasi dalam menyediakan solusi transaksi mulai dari *current account*, *liquidity for cash solution platform*, *trade solution*, *guarantee*.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Simpanan dan Jasa Perbankan Ritel

Transformasi dalam bidang layanan, termasuk di dalamnya produk dan *platform*, diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan standar operasional dan *enhancement platform cash management* dan *trade finance*. Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan menambah *customer based*, serta diharapkan akan menghasilkan *low cost funding* yang berasal dari transaksi.

Prospek Usaha dan Strategi Simpanan dan Jasa Perbankan Ritel Tahun 2022

- 1. Simpanan Ritel
Prospek usaha dan strategi tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Akuisisi rekening dengan kemudahan *on boarding process* baik pembukaan
 - b. Mendorong transaksi dengan program *transaksi digital ecosystem platform CASA*
 - c. Meningkatkan disiplin *sales process* dan *cross selling culture* melalui BRIX
 - d. Meningkatkan produktivitas RM dana dengan modifikasi KPI produktivitas
 - e. Mengembangkan *advance analytic sales model* untuk *cross selling* RM Dana
- 2. Jasa Perbankan Ritel
Transformasi dalam bidang layanan dengan mengedepankan *client oriented approach*, termasuk di dalamnya produk dan *platform* seperti BRICAMS (*Cash management Platform*), BRIVA (*Virtual Account*), CBM (*Corporate Billing Management*) for *value chain solutions*, portal bank garansi yang diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan standar

operasional dan *enhancement platform cash management*, *virtual account* dan *trade solutions*. Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan menambah *customer based*, serta diharapkan akan menghasilkan *low cost funding* yang berasal dari transaksi.

BRI Digital Saving

BRI *Digital Saving* merupakan *service* pembukaan rekening secara *fully digital* yang pada tahap awal dibangun berbentuk aplikasi berbasis *web*, yang dapat diintegrasikan di berbagai aplikasi lain dalam bentuk *launcher* sehingga memiliki standar secara metode *Know Your Customer* (KYC), alur pembukaan rekening, dan *user experience*. *Digital saving* dapat dipergunakan untuk perluasan *channel* pembukaan rekening bank BRI, karena dapat ditempatkan di *Website* dan Aplikasi BRI sendiri, *Bank Subsidiary*, atau pihak ketiga yang bekerjasama seperti Gojek, Tokopedia, LinkAja, Dana, Bukalapak dan lain lain. Adapun Pencapaian Posisi Desember 2021 adalah sebesar 1, 1 Juta Rekening dengan Total saldo Rp2,4 triliun.

Kelebihan Digital Saving

Digital Saving mengedepankan 3 (tiga) keuntungan bagi nasabah yang melakukan pembukaan rekening melalui BRI *Digital Saving* ini, yaitu:

- 1. **Simple**
Karena nasabah tidak perlu datang ke unit kerja BRI, tidak perlu mengunduh aplikasi tersendiri karena BRI *Digital Saving* dapat diakses melalui *website* atau aplikasi yang biasa digunakan nasabah.
- 2. **Efficient**
Pembukaan rekening dipandang efisien karena dapat dilakukan tanpa perlu menunggu antrian, tidak boros paket data karena tidak dilakukan *video call* dan proses pembukaan rekening hanya berkisar 5-10 menit. Selain itu, nasabah juga dapat didaftarkan *user* BRImo secara otomatis dan rekening dapat langsung digunakan untuk bertransaksi finansial.
- 3. **Secure**
Pembukaan rekening melalui BRI *Digital Saving* lebih *secure* karena:
 - a. *Customer driven* data (menghindari *human error* karena diinput orang lain).
Data inputan diverifikasi secara *host to host* ke database Dukcapil, dan BRI melakukan verifikasi *One Time Password* (OTP) yang dikirimkan ke nomor ponsel yang didaftarkan.
 - b. *Customer Due Diligence* (CDD) dilakukan dengan *engine face recognition* sehingga objektif dan terukur, karena membandingkan foto nasabah yang diambil dari video 8 detik yang telah direkam dengan data biometrik yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan *threshold* yang telah ditetapkan oleh pihak BRI.
 - c. Menerapkan *liveness detection* yaitu mekanisme pengecekan kedipan mata dan cuap mulut nasabah sehingga tidak memungkinkan proses pembukaan rekening digantikan oleh robot, gambar bergerak atau benda mati lainnya yang bukan pemilik Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesungguhnya.

- d. Penerbitan *digital certificate* oleh CA (*Certificate Authority*) yang juga kredibel dan telah diaudit oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sehingga *non repudiation* atau tidak ada potensi tolakan pada pembuktian penandatanganan dokumen pembukaan rekening nasabah.
- e. *Scoring* data pembukaan rekening, untuk pengkategorian nasabah (*low, med, high*) risk sehingga dapat dilakukan *filtering* nasabah berdasarkan potensi risikonya.

Penjelasan Proses Know Your Customer (KYC)

Untuk aspek KYC yang diterapkan, sesuai dengan POJK No.23/POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 pasal 17 ayat 1 tentang identifikasi calon nasabah untuk mengetahui profil calon nasabah dan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung calon nasabah serta berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2018 tanggal 6 Agustus 2018 pasal 11 ayat 4 dan 5, dimana dalam melakukan verifikasi dengan perangkat keras dan/atau perangkat lunak bank harus memperhatikan minimal 2 (dua) faktor keaslian (*authentication factor*) dan salah satunya adalah **Who You Are**, maka BRI *Digital Saving* menerapkan hal tersebut yang mencakup, **What You Know** yaitu data pribadi nasabah meliputi NIK dan Nama gadis ibu kandung, data pendukung, data pekerjaan dan data keuangan nasabah; **Who You Are** yaitu data *biometric* berupa foto wajah nasabah yang digunakan untuk proses *face recognition* dan yang terakhir adalah **What You Have** yaitu dokumen KTP, NPWP, Tanda tangan elektronik dan sertifikat *digital* yang dimiliki nasabah. BRI *Digital Saving* melakukan verifikasi kesesuaian data inputan nasabah dengan data Dukcapil dan meminta nasabah untuk mengupload dokumen KTP, NPWP Video rekam wajah dan swafoto bersama KTP yang kemudian dilanjutkan dengan pengecekan di sisi PERURI yang diawali dengan registrasi *digital certificate* untuk pembubuhan tanda tangan pada form AR-01 sehingga anti pemalsuan dan penyalahgunaan serta terdapat *brand protection*. Setelah itu PERURI melakukan pengecekan *liveness* dari video yang diunggah sehingga tidak memungkinkan proses pembukaan rekening digantikan oleh robot, gambar bergerak atau benda mati lainnya yang bukan pemilik NIK sesungguhnya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, *liveness detection* ini mengecek kedipan mata dan cuap mulut untuk memastikan pembuka rekening adalah manusia.

Pemasaran Produk Digital Saving

Selain pemasaran secara *massive* oleh tenaga pemasaran BRI, secara gencar juga dilaksanakan kerjasama penempatan *Uniform Resource Locator* (URL) BRI *Digital Saving* melalui pihak ketiga. Penempatan ini dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas bagi nasabah ketika mengakses *platform* pembukaan rekening tabungan BritAma secara mudah. BRI *Digital Saving* yang dikembangkan dalam bentuk *web view* dan *mobile view* ini sangat fleksibel untuk dipergunakan di beberapa bentuk kerjasama, yaitu:

1. Unit Kerja BRI/BRI Grup/Aplikasi BRI

Untuk mengurai antrian pembukaan rekening di unit kerja, telah dilakukan sosialisasi *platform* BRI *Digital Saving* ini kepada para *customer service* dan *security platform* BRI

Digital Saving ini dan para *customer service* serta *security* juga telah dilengkapi dengan *cue card* sehingga dapat langsung mengarahkan nasabah yang ingin melakukan pembukaan rekening ke *platform* ini. Selain untuk *walk in customer*, BRI *Digital Saving* juga dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi internal BRI. Saat ini telah selesai dikembangkan pembukaan rekening melalui aplikasi BRIMO Super Apps, dan selanjutnya akan dikembangkan *opening account* melalui Aplikasi BRILINK *Mobile*.

2. Kerjasama dengan Website Atau Aplikasi Pihak Ketiga

Kerjasama ini mencakup seluruh nasabah baik yang diinisiasi oleh Kantor Pusat (*fintech, marketplace, electronic money*) maupun yang diinisiasi kerjasamanya oleh kantor wilayah (*website* universitas, instansi atau perusahaan lokal).

3. Event Akuisisi Unit Kerja

Event akuisisi unit kerja atau program pemasaran yang berskala lokal juga saat ini dapat menggunakan BRI *Digital Saving*. Beberapa *event* yang telah berlangsung dan memanfaatkan BRI *Digital Saving* sebagai salah satu syarat registrasinya.

Segmen Korporasi

Segmen Korporasi meliputi Bisnis Korporasi, Bisnis Institusi dan *Transaction Banking*, Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank, serta Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal.

BISNIS KORPORASI

Bisnis Korporasi meliputi Bisnis Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bisnis Korporasi Non BUMN. Cakupan produk dan layanan Bisnis Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di BRI meliputi pengelolaan simpanan, pemberian berbagai jenis fasilitas pembiayaan, serta pelayanan beragam *transaction banking* dan layanan jasa bisnis perbankan. Sektor-sektor usaha yang dilayani oleh Bisnis Korporasi BUMN antara lain sektor infrastruktur, konstruksi, komoditi dari hulu ke hilir beserta bisnis pendukungnya, manufaktur, transportasi, energi, dan sektor jasa. Bisnis Korporasi Non BUMN melayani nasabah korporasi Non BUMN dengan klasifikasi top tier di masing-masing sektor industri serta memberikan solusi produk dan layanan keuangan terpadu, baik untuk kebutuhan fasilitas pinjaman, maupun penempatan dan pengelolaan dana serta transaksi. Dalam memberikan fasilitas pinjaman, Bisnis Korporasi Non BUMN juga berupaya mengoptimalkan peluang dari sisi *value chain business* dan *cross selling*. Sehingga segmen Micro dan SME BRI dapat turut bertumbuh. Segmen agribisnis, *manufacturing, consumer goods, health industry* serta *e-commerce* merupakan target pasar dari Bisnis Korporasi Non BUMN. Pengembangan kredit agribisnis memprioritaskan pembiayaan pada komoditi ekspor yang memiliki *competitive advantage* dan *multiplier effect* kepada Usaha Mikro, dan SME. Sedangkan segmen non-agribisnis menyalurkan kredit ke sejumlah industri seperti *pulp and paper, consumer goods, otomotif, e-commerce* serta *health industry*.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Operasional Segmen Korporasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Nominal	(%)
Pinjaman	172.424.790	168.985.146	3.257.644	1,93%
Simpanan	341.879.461	306.943.422	34.936.039	11,38%

Pinjaman segmen korporasi tahun 2021 sebesar Rp172,42 triliun, meningkat sebesar 2,04% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp168,99 triliun. Dari sisi simpanan tahun 2021 meningkat 11,38% dari Rp306,94 triliun di tahun 2020 menjadi Rp341,88 triliun di tahun 2021.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Segmen Bisnis Korporasi Per Sektor

(dalam jutaan Rupiah)

No	Segmen Korporasi per Sektor	2021	2020	Pertumbuhan	
				Nominal	(%)
1	Pertanian	25.676.061	31.054.552	(5.378.491)	(17,32%)
2	Pertambangan	6.298.828	5.743.043	555.785	9,68%
3	Perindustrian	44.886.183	36.653.568	8.232.614	22,46%
4	Listrik, Gas Dan Air	33.560.574	34.682.604	(1.122.030)	(3,24%)
5	Konstruksi	21.304.096	25.098.708	(3.794.612)	(15,12%)
6	Perdagangan, Restoran Dan Hotel	12.988.852	11.305.130	1.683.723	14,89%
7	Pengangkutan, Pergudangan, Komunikasi	9.136.539	8.945.357	191.182	2,14%
8	Jasa-Jasa Dunia Usaha	16.977.753	13.340.168	3.637.586	27,27%
9	Jasa Pelayanan Sosial	1.562.269	2.129.232	(566.963)	(26,63%)
10	Lain-Lain	33.633	32.783	850	2,59%
Total		172.424.790	168.985.146	3.257.644	1,93%

Total kinerja Segmen Bisnis Korporasi per sektor tahun 2021 sebesar Rp172,42 triliun, meningkat 2,04% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp168,99 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan sektor jasa dunia usaha sebesar Rp3,63 triliun (27,27% *year on year*), sektor perindustrian sebesar Rp8,23 triliun (22,46% *year on year*) serta sektor perdagangan, restoran dan hotel yang tumbuh sebesar Rp1,68 triliun (14,89% *year on year*).

Strategi Bisnis Korporasi Tahun 2021

Strategi bisnis Korporasi tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

- a. Melakukan implementasi *client service team* sebagai pendekatan terintegrasi dalam melayani nasabah korporasi.
- b. Berkomitmen untuk melakukan *review* proses kredit (*simplified* dan *regularly review*) terhadap kondisi terkini nasabah
- c. Mengoptimalkan kegiatan yang mengacu pada *Building World Class Wholesale Bank (Industry Specialist, Enhance in Wider Business Perspective, Benchmarking, Negotiating and Advisory Skill, IRA)*.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Korporasi

Adapun keunggulan kompetitif dan inovasi bisnis Korporasi yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan Aplikasi RM *Workbench* sebagai *tools* untuk memudahkan RM dalam melakukan *monitoring* bisnis.

- b. Menjalankan *piloting* Aplikasi *Payment Point Online Banking* (PPOB) kepada nasabah utama Bisnis Korporasi BRI.
- c. Mengimplementasikan Aplikasi BRI *Integrated Sublimit* (BRITASK) untuk mempermudah dalam hal *monitoring* fasilitas kredit.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Korporasi Tahun 2022

Prospek usaha dan strategi bisnis Korporasi yang akan dilakukan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumber pertumbuhan bisnis korporasi melalui nasabah baru pada ekosistem bisnis yang telah ada di BRI, dengan target peningkatan giro dan transaksi, yang mana dapat digunakan juga sebagai katalis dalam upaya menaikkan kelas segmen SME dan mikro.
- b. Meningkatkan target simpanan giro pada nasabah eksisting.
- c. *Exit strategy* terhadap nasabah yang terindikasi akan menjadi *bad debt*.
- d. Diversifikasi pembiayaan pada sektor agribisnis selain kelapa sawit, untuk membagi konsentrasi risiko portofolio dan kredit melalui kredit sindikasi.
- e. Menumbuhkan transaksi untuk meningkatkan *Fee Based Income* (FBI) serta sebagai dasar pertumbuhan dana dan pinjaman nasabah eksisting.

BISNIS INSTITUSI DAN TRANSACTION BANKING

Bisnis Institusi

BRI memiliki peran besar di bisnis institusi untuk menyediakan produk dan jasa layanan perbankan bagi lembaga atau institusi Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Solusi perbankan yang diberikan meliputi, pengelolaan layanan simpanan, *Cash Management System* (CMS), penyaluran bantuan sosial, penyaluran gaji dan tunjangan kinerja PNS dan pelayanan jasa perbankan lainnya untuk memenuhi kebutuhan lembaga atau institusi, termasuk layanan *digital banking* serta *value chain* sehingga BRI melayani ekosistem bisnis secara keseluruhan. Nasabah yang di layani bisnis institusi adalah Kementerian Lembaga Pemerintah, TNI/Polri, Badan Layanan Umum, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi Negeri.

Bisnis Transaction Banking

Bisnis *transaction banking* telah memainkan peran penting sebagai salah satu pilar utama untuk menjaga kelangsungan usaha BRI di tahun 2021 maupun di masa mendatang. Sebab peran besar bisnis *transaction banking* adalah mengakselerasi penghimpunan dana dan meningkatkan perolehan *fee based income*.

Sasaran segmen bisnis *transaction banking* yaitu perusahaan dan atau instansi yang memiliki kebutuhan transaksi keuangan

kompleks dan tetap dapat mengelolanya sendiri. Selain layanan *host to host*, produk dan jasa yang ditawarkan Bisnis *transaction banking* diantaranya adalah sebagai berikut:

- Aplikasi Cash Management System BRI**
 Merupakan solusi layanan keuangan perbankan berbasis internet dengan *User Interface dan User Experience* (UI/UE) yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Keunggulan CMS BRI antara lain sangat mudah di akses secara mobile, *user friendly, real time*, fitur keamanan yang memadai, serta dilengkapi dengan fitur-fitur transaksi yang mendukung kebutuhan transaksi keuangan pada umumnya atau dapat disesuaikan (*customized*) terhadap kebutuhan nasabah.
- Giro BRI**
 Merupakan produk yang melayani kebutuhan transaksional nasabah, dengan fasilitas penarikan melalui warkat (cek/bilyet giro) serta dapat dilakukan melalui ATM atau secara *digital* melalui CMS BRI.
- Trade Finance BRI**
 Merupakan layanan ekspor secara komprehensif dan terintegrasi bagi eksportir/importir baik melalui *Letter of Credit* (L/C) ataupun Non L/C dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
- Bank Garansi BRI**
 Merupakan layanan kebutuhan penjaminan Bank melalui fasilitas bank garansi.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Institusi dan Transaction Banking

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Bisnis Institusi				
Giro	32.913.000	29.179.000	3.734.000	12,80%
Deposito	79.143.000	75.859.000	3.284.000	4,33%
Transaction Banking (Wholesale)				
Volume Trade Finance	397.685.280	256.092.338	141.592.942	55,29%
Fee Based Trade Finance	1.154.334	1.397.804	(243.470)	(17,42%)
Volume Bank Garansi	32.022.711	25.208.878	6.813.833	27,03%
Fee Based Bank Garansi	66.861	35.697	31.164	87,30%
Volume Cash Management	2.212.105.670	1.947.619.065	264.486.605	13,58%
Feebased Cash Management	8.121	5.534	2.587	46,75%
Average Balance Giro	138.933.000	111.978.000	26.955.000	24,07%

Giro Bisnis Institusi tahun 2021 sebesar Rp32,91 triliun, meningkat 12,80% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp29,18 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan penghimpunan dana murah berbasis transaksi dengan mengoptimalkan bisnis nasabah *wholesale*. Demikian pula dengan Deposito Bisnis Institusi tahun 2021 sebesar Rp79,14 triliun, meningkat 4,33% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp75,86 triliun.

Kinerja *transaction banking (wholesale)* tahun 2021, secara umum menunjukkan peningkatan. Hal tersebut terlihat dari *volume trade finance* yang meningkat sebesar 55,29% dan *volume bank garansi* sebesar 27,03%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai perbaikan prosedur operasional, produk, serta *platform* pendukung seperti *dashboard monitoring, system trade partnership* dan *otomasi pre advising*. Transaksi nasabah melalui *platform Cash Management System* (CMS) selama tahun 2021 juga mengalami peningkatan. *Volume cash management*

mengalami pertumbuhan sebesar 13,58%, hal ini menunjukkan peningkatan pemanfaatan *platform* transaksi oleh nasabah sejalan dengan kondisi pandemi di tahun 2021.

Strategi Bisnis Institusi dan Transaction Banking Tahun 2021

- a. **Bisnis Institusi**
 Digitalisasi layanan keuangan negara, fokus pada *value chain*, dan menjadi penghubung/jembatan yang baik bagi Divisi/ Unit Kerja (Uker) lain untuk menggarap potensi bisnis di Kementerian/Lembaga dan fokus pada pertumbuhan CASA.
- b. **Transaction Banking**
 Strategi *Transaction Banking* untuk tahun 2021 adalah fokus pada digitalisasi produk (*strengthen product digitization*) yang terdiri dari:
 - *Customer acquisition* dengan melakukan penetrasi sumber pertumbuhan baru dan *leveraging tiering* transaksi nasabah.
 - *Commercialization* melalui fokus pada *customer* yang telah mendapatkan *value proposition* eksisting dalam kebutuhan transaksinya agar semakin memperkuat loyalitasnya.
 - *Organization transformation* yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan terkait *agile organization* baik dalam rangka memenuhi kebutuhan *client handling* maupun *technology development*.
 - *Product digitization and integrated solutions* dengan meningkatkan kapabilitas produk melalui layanan *digital* yang terintegrasi dalam menyediakan solusi transaksi mulai dari *current account*, *liquidity for cash solution platform*, *trade solution*, *guarantee*.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Institusi dan Transaction Banking

- a. **Bisnis Institusi**
 Bisnis Institusi merupakan *leader* di dalam pengelolaan keuangan negara. Lebih dari 65% giro serta gaji (*payroll*) dan tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga RI dikelola BRI. BRI telah melakukan digitalisasi layanan keuangan negara melalui berbagai produk seperti migrasi giro Kementerian menjadi *virtual account* yang dilengkapi dengan *Cash Management System* (CMS) serta Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Aplikasi Digipay 002 (untuk pembelanjaan keuangan negara), dan terlibat aktif dalam berbagai proses digitalisasi keuangan di setiap Kementerian/Lembaga. Selain itu selama masa pandemi BRI menjadi Bank Mayoritas untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang tentunya bersumber dari APBN Kementerian/Lembaga.
- b. **Transaction Banking**
 Transformasi dalam bidang layanan dengan mengedepankan *Client Oriented Approach*, termasuk di dalamnya produk dan *platform* seperti BRICAMS (*Cash management Platform*), BRIVA (*Virtual Account*), CBM (*Corporate Billing Management*) for *value chain solutions*, portal bank garansi yang diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan standar operasional dan *enhancement platform cash management*, *virtual account* dan *trade solutions*. Langkah-langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan menambah *customer*

based, serta diharapkan akan menghasilkan *low cost funding* yang berasal dari transaksi

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Institusi dan Transaction Banking Tahun 2022

- a. **Bisnis Institusi**
 Prospek Bisnis dari Kementerian/Lembaga masih sangat baik karena masih banyak peluang yang selama ini belum tergarap. Selama ini, BRI kuat dalam dalam Sektor Belanja Pegawai Kementerian/Lembaga. Namun masih minoritas dalam sektor belanja barang dan modal. Untuk itu, BRI telah mencanangkan untuk menggarap *value chain* Kementerian, seperti *vendor financing*, bank garansi, pinjaman pegawai, DPLK, dan lain sebagainya. Selain itu INS fokus pada pertumbuhan dana murah (giro).
- b. **Transaction Banking**
Expanding New Target Markets, yaitu melakukan ekspansi terhadap sumber pertumbuhan baru dan peningkatan *tiering* melalui *value propositions* yang dapat ditawarkan kepada *target market* untuk mendapatkan *wallet share* yang lebih mendalam dalam sektor-sektor baru seperti *e-commerce* dan *Multi National Companies*. Kemudian melakukan penguatan digitalisasi produk dalam rangka komersialisasi pada nasabah eksisting yang telah mendapatkan *value proposition* saat ini dengan meningkatkan berbagai solusi dan layanan terintegrasi termasuk di dalamnya *platform platform* seperti BRICAMS (*Cash management Platform*), BRIVA (*Virtual Account*), CBM (*Corporate Billing Management*) for *value chain solutions*, portal bank garansi.

BISNIS SINDIKASI DAN JASA LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Bisnis *Syndication and Financial Institution Non Bank* memiliki dua lini bisnis utama, yaitu bisnis jasa sindikasi dan penyediaan limit fasilitas baik yang bersifat *committed* maupun yang bersifat *uncommitted* kepada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) baik BUMN ataupun Non BUMN.

Pinjaman sindikasi diperuntukkan bagi nasabah korporasi yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dengan lebih dari satu kreditur. Sindikasi BRI berpengalaman menangani kredit sindikasi di berbagai sektor usaha, seperti infrastruktur, kelistrikan, manufaktur, migas, perdagangan/perhotelan/restoran, perkebunan, pertambangan dan properti yang meliputi fungsi *arranger*, agen fasilitas, *agen escrow* dan agen jaminan.

Sedangkan untuk *Financial Institution Non Bank Division* memberikan jasa terintegrasi untuk perusahaan keuangan non bank, baik berupa pemberian fasilitas pendanaan maupun simpanan, dan jasa keuangan lainnya. Pemberian fasilitas meliputi pemberian fasilitas *security line*, *forex line*, fasilitas pinjaman jangka pendek, fasilitas *intraday*, bank garansi dan penjaminan untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang menjadi sasaran penyaluran pinjaman BRI meliputi perusahaan pembiayaan (*multifinance*), asuransi, sekuritas, lembaga keuangan khusus dan lembaga keuangan non bank lainnya.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Fee Based Income	185.650	184.122	1.528	0,83%
Outstanding Pinjaman	4.921.013	4.680.533	240.480	5,14%

Sampai dengan Desember 2021, *Syndication and Financial Institution Non Bank Division* telah membukukan pendapatan *fee based income* sebesar Rp185,65 miliar meningkat sebesar 0,83% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp184,12 miliar. Peningkatan yang cenderung flat ini terjadi akibat kondisi makro ekonomi yang masih terimbas pandemi COVID-19 sehingga strategi yang diterapkan lebih mengutamakan selektif dalam melakukan ekspansi dan menjaga kualitas aset eksisting.

Outstanding pinjaman tahun 2021 sebesar Rp4,92 triliun, meningkat 5,14% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp4,68 triliun. Peningkatan *outstanding* pinjaman tersebut sejalan dengan strategi BRI dalam melakukan reorganisasi atas nasabah korporasi dimana *Syndication and Financial Institution Non Bank Division* menangani nasabah *Financial Institution Non Bank* baik untuk BUMN maupun Non BUMN.

Strategi Tahun Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank Tahun 2021

Di tahun 2021, BRI melalui bisnis sindikasi tetap memprioritaskan penyaluran kredit terutama untuk proyek infrastruktur, agribisnis, dan elektrifikasi. Selain penyaluran kredit, munculnya pandemi COVID-19 membuat sindikasi BRI di tahun 2021 mengambil langkah strategis untuk mengutamakan selektif dalam melakukan ekspansi dan menjaga kualitas aset. Selain itu, sindikasi BRI tetap aktif bekerjasama dengan Bank BUMN, Bank Swasta Nasional, entitas anak BRI, Bank Asing, Lembaga Pembiayaan, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kolaborasi yang ditingkatkan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan *Fee Based Income* (FBI).

Sedangkan untuk bisnis Jasa Lembaga Keuangan Non Bank, BRI fokus memberikan fasilitas penjaminan dan bank garansi kepada perusahaan asuransi, fasilitas *intraday* kepada perusahaan sekuritas dan *security line* untuk meningkatkan *fee based income* serta memperluas kerjasama dengan mitra strategis dalam rangka optimalisasi peluang bisnis, khususnya yang menyediakan bisnis *value chain* ke segmen bisnis BRI lainnya.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank

Jasa sindikasi BRI menyediakan solusi korporasi bagi Perusahaan maupun Institusi dalam pembiayaan mulai dari fungsi *arranger* sindikasi dan keagenan yang terdiri dari agen fasilitas, agen *escrow* dan agen jaminan. Fungsi *arranger* dan operasional agen sindikasi didukung dengan SDM kompeten dan spesialis di bidangnya. Pemberian fasilitas untuk perusahaan di sektor jasa keuangan non bank juga menyediakan *one stop solution* bagi nasabah.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Sindikasi dan Jasa Lembaga Keuangan Non Bank Tahun 2022

Di tahun 2022, Bisnis Sindikasi *Syndication and Financial Institution Non Bank* akan menerapkan strategi untuk mencoba mengimplementasikan sindikasi di tingkat regional. Dengan hadirnya *Small, Medium, Enterprise dan Commercial* (SMEC) di *regional office* dan Perjanjian kerjasama antara Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia, maka penerapan skema sindikasi di *regional office* dapat diimplementasikan dalam rangka pengembangan segmen menengah, sumber *fee based income* dan *value chain*, dan pengendalian risiko bersama dengan kreditur lain.

Sementara dari bisnis IKNB, akan melakukan kolaborasi dan memberikan dukungan dengan BRI Group (Permodalan Nasional Madani, BRI Finance, BRI Danareksa), Pengembangan ekosistem pasar modal, asuransi, dan *multifinance*, serta pemberian fasilitas kepada *top tier* perusahaan sekuritas dan *multifinance*.

Segmen Lainnya

Segmen lainnya meliputi Bisnis Jasa Bisnis Penunjang Pasar Modal, Bisnis *Treasury* dan Bisnis Internasional

BISNIS JASA PENUNJANG PASAR MODAL

Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal (*Investment Services Business*) fokus pada pengembangan jasa penunjang investasi pada dua ekosistem bisnis, yaitu: ekosistem *human resources* bagi nasabah dan ekosistem penunjang investasi pasar modal. Pada ekosistem *human resources*, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) melalui produk BRIFINE (BRI *Future Investment*) membantu nasabah baik korporasi maupun individu untuk mempersiapkan kesejahteraan di masa purnakarya. Pada ekosistem penunjang investasi pasar modal, BRI memiliki beberapa layanan unggulan yaitu Jasa Bank Kustodian, *Trustee* dan Wali Amanat, serta Bank Pembayar & dan Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN).

Produk dan jasa yang ditawarkan Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal diantaranya sebagai berikut:

1. DPLK BRI

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) DPLK BRI yang mulai beroperasi sejak tahun 2006. Jenis investasi DPLK cukup beragam. Ada 5 (lima) pilihan instrumen investasi yang ditawarkan oleh DPLK BRI, antara lain:

- BRIFINE Pasar Uang
- BRIFINE Pendapatan Tetap
- BRIFINE BRI Saham
- BRIFINE BRI Pasar Uang Syariah
- BRIFINE BRI Berimbang Syariah.

DPLK BRI menawarkan 3 (tiga) program pengelolaan dana, antara lain:

- a. Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI)
- b. Program Pengelolaan Dana Pesangon (PPDP)
- c. Program Pengelolaan Dana Santunan Kesehatan (PPDSK)

DPLK BRI tidak hanya menarget pasar korporasi, tetapi juga menawarkan Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI) kepada nasabah individual.

2. Jasa Wali Amanat

BRI telah berpengalaman dalam bertindak sebagai wali amanat dan telah mendapat kepercayaan dari berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan dan korporasi lainnya dalam hal penerbitan obligasi dan *Medium Term Notes* (MTN). BRI memahami betul tugasnya sebagai jasa wali amanat dengan mewakili dan melindungi kepentingan para pemegang obligasi atau MTN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta perjanjian perwaliamanatan.

3. Jasa Trustee

BRI merupakan Bank Pertama di Indonesia yang memperoleh Pertujuan Prinsip (Surat BI No.15/19/DPB1/PB1-3) dan Surat Penegasan (Surat BI No.15/30/DPB1/PB1-3) dari Bank Indonesia untuk dapat menjalankan Layanan Jasa Trust pada bulan Maret 2013. Jasa yang disediakan oleh BRI Trust antara lain:

- a. *Payment Agent* (Agen Pembayaran)
- b. *Investment Agent* (Agen Investasi)
- c. *Borrowing Agent* (Agen Pinjaman)

4. Jasa Kustodian

BRI telah menjalankan usaha sebagai Bank Kustodian sejak Tahun 1996 dan menjadi lima Bank Kustodian terbesar di Indonesia. Pelayanan Kustodian BRI adalah jasa penitipan dan administrasi surat-surat berharga. Kustodian BRI termasuk pula mewakili nasabah dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Obligasi terkait efek yang dimiliki. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah oleh BRI dari jasa kustodian tersebut adalah:

- a. *Customization*, layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah termasuk dalam hal laporan yang dapat diseleraskan dengan kebutuhan.
- b. *One Stop Service*, layanan terpadu satu pintu melalui *relationship officer* yang memberikan kenyamanan bagi nasabah.
- c. *Reliable*, didukung dengan sistem Teknologi Informasi yang andal oleh tim *accounting, tax and reporting, settlement, dan compliance* yang berpengalaman.
- d. *Experienced*, berpengalaman mengelola berbagai jenis efek, reksa dana, unit link, Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), efek beragun aset dan *private placement*.
- e. *Global Network*, terhubung dengan jaringan *international central securities depository euro clear* untuk transaksi efek global.
- f. *Competitives Fees*, imbalan jasa kustodian yang disesuaikan dengan kompleksitas layanan.
- g. Jaringan kerja luas, kustodian BRI bekerjasama dengan MI terpercaya dan juga dengan seluruh jaringan kerja BRI yang tersebar baik di dalam maupun luar negeri yang siap untuk membantu menemukan solusi kebutuhan investasi nasabah.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Fee Based Income	271.349	237.600	33.749	14,40%
Aset Kelolaan Kustodian	523.266.664	440.482.007	82.784.657	18,79%
Aset Kelolaan DPLK	17.301.405	16.699.884	601.521	3,60%

Fee based income bisnis jasa penunjang pasar modal tahun 2021 sebesar Rp271,35 miliar, meningkat 14,40% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp237,600 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan penambahan *customer/client* dengan strategi kolaborasi dengan divisi BRI untuk menarik nasabah-nasabah existing BRI dan dan transformasi *digital*.

Strategi Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal Tahun 2021

Pada tahun 2021 Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal fokus pada strategi pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi inovasi *digital* seperti:

1. Efisiensi *business process* melalui digitalisasi.
2. Penambahan variasi *product investment services*.
3. Perluasan pasar dengan menarget segmen-segmen baru.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal

Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal fokus dalam pengembangan jasa penunjang investasi pada dua ekosistem bisnis, yaitu: ekosistem *human resources* bagi nasabah dan ekosistem penunjang investasi pasar modal. Pada ekosistem *human resources*, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) melalui produk BRIFINE (BRI *Future Investment*) membantu nasabah baik



korporasi maupun individu untuk mempersiapkan kesejahteraan di masa purnakarya. Pada ekosistem penunjang investasi pasar modal, BRI memiliki beberapa layanan unggulan yaitu jasa bank kustodian, *trustee* dan wali amanat, serta bank pembayar dan bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN).

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal Tahun 2022

Pada tahun 2022 Bisnis Jasa Penunjang Pasar Modal fokus pada strategi pertumbuhan berkelanjutan melalui inovasi-inovasi *digital* dan kolaborasi dengan bisnis-bisnis Bank BRI seperti:

1. Peningkatan kapasitas dan rehabilitasi infrastruktur.
2. Efisiensi *business process*.
3. Penambahan variasi *product investment services*.
4. Perluasan pasar dengan menarget nasabah-nasabah existing BRI dan memanfaatkan jangkauan unit kerja BRI.

BISNIS TREASURY

BRI senantiasa berupaya menjadi penyedia solusi perbankan *Treasury* yang reliabel dan berkualitas untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah individu, korporat, ataupun nasabah institusi keuangan. Keperluan nasabah tersebut diantaranya adalah melakukan transaksi *Foreign Exchange (Forex)*, *money market*, *fixed market*, dan transaksi terkait produk derivatif. Penjelasan dari masing-masing jasa layanan Bisnis *Treasury* BRI tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Foreign Exchange**

Perdagangan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya dengan waktu penyerahan pada suatu tanggal tertentu. Adapun produk *foreign exchange* meliputi transaksi TOD, TOM, *Spot* maupun *forward*.

2. **Money Market**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang, Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang Rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

3. **Fixed Income**

Produk investasi dengan tingkat pendapatan tetap dalam bentuk layanan perdagangan surat hutang atau obligasi, yang

diterbitkan oleh Pemerintah maupun swasta baik melalui *primary market* maupun *secondary market*.

4. **Produk Derivatif**

Transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari, seperti suku bunga dan nilai tukar, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

Pendapatan non-bunga bisnis *Treasury* tahun 2021 tumbuh 30,79% secara *year-on-year* yang ditopang oleh peningkatan pendapatan transaksi surat berharga yang tumbuh 26,89% dan pendapatan transaksi valuta asing yang tumbuh sebesar 38,62%. Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan *client flow* untuk masing-masing aktivitas. *Client flow* untuk transaksi valuta asing tumbuh sebesar 54,55% YoY sedangkan *client flow* untuk transaksi surat berharga tumbuh sebesar 9,87% pada tahun 2021.

Strategi bisnis *Treasury* baik melalui peningkatan *market share* dengan fokus pada *client-based transaction* maupun melalui pengelolaan portofolio yang optimum termasuk manajemen likuiditas yang baik berperan penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan *Treasury* yang signifikan di tahun 2021. *Treasury* BRI juga akan terus mengoptimalkan fungsi sebagai *market maker* di pasar surat berharga domestik mempertimbangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki dalam pengelolaan portofolio. Perkembangan kondisi perekonomian domestik dan global pada masa pandemi yang merubah beberapa kebijakan utama bank sentral dunia, salah satunya melalui kebijakan *tapering* di Amerika Serikat menjadi tantangan utama aktivitas bisnis *treasury*, baik di pasar nilai tukar, pasar surat berharga maupun pasar lainnya yang menjadi ranah bisnis *treasury*.

Pada tahun 2022, pengembangan bisnis *Treasury* masih akan fokus pada optimalisasi *client-based transaction*. Strategi dalam menjalankan fungsi secara optimum dilakukan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di tengah kondisi pasar dan ekonomi yang masih belum menentu. Sehingga *Treasury Business* dapat terus meningkatkan kontribusinya terhadap kinerja Perseroan dalam berbagai kondisi likuiditas, pasar dan ekonomi.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis *Treasury*

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
<i>Interest Income Non - Loan</i>	14.944.518	14.333.107	611.411	4,27%
<i>Security Gain</i>	3.189.223	2.513.408	675.815	26,89%
<i>Forex Gain</i>	1.735.943	1.252.340	483.603	38,62%

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset Produktif Non - Loan (dalam triliun Rp)				
GWM	49	44	5	11,36%
Penempatan Pada BI	47	54	(7)	(12,96%)
Penempatan Pada Bank Lain	24	21	3	14,29%
Surat Berharga	281	255	26	10,20%
Reverse Repo	54	44	10	22,73%
Total	455	418	37	8,85%
Aktivitas Surat Berharga (dalam triliun Rp)				
Ritel	3,20	0,99	2,21	223,23%
Institusi	322	295	27	9,15%
Banking Purpose	228	213	15	7,04%

Strategi Bisnis Treasury Tahun 2021

Pada 2021 strategi Bisnis Treasury berfokus pada beberapa hal antara lain:

1. Peningkatan *client flow* dalam aktivitas surat berharga maupun nilai tukar sebagai strategi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, baik untuk segmen ritel maupun korporasi.
2. Optimalisasi pertumbuhan kinerja melalui pengelolaan aset dan liabilitas yang dinamis dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko likuiditas, pasar, kredit yang terukur.
3. *Market deepening* melalui *cross selling* nasabah *existing* maupun *walk in customer* serta meningkatkan sinergi dengan seluruh Unit Kerja dan BRI Group.
4. *Business Process transformation* melalui pengembangan bisnis dan produk sesuai kebutuhan *client* (*customer driven products*) untuk mewujudkan BRI sebagai *one stop financial solution for client*
5. Pengelolaan risiko yang komprehensif dalam melaksanakan seluruh aktivitas mempertimbangkan kondisi pasar yang masih sangat tidak menentu.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Treasury

Perkembangan Bisnis Treasury khususnya pada segmen ritel ditopang oleh salah satu *competitive advantage* BRI yang memiliki jaringan yang tersebar dan paling besar di seluruh Indonesia. Selain itu, struktur fundamental BRI yang kuat juga mendorong kinerja Bisnis Treasury BRI khususnya di pasar domestik. Pada tahun 2021, Treasury BRI mendapatkan beberapa penghargaan atas kinerja dan kontribusinya di pasar keuangan, yaitu:

1. Alpha Southeast Asia - Best FX Bank for Structured Product
2. Alpha Southeast Asia - Best FX Bank for Money Market Products
3. Alpha Southeast Asia - Best FX Bank for Retail Clients
4. Dealer Utama SUN dengan kinerja ternaik di Pasar Perdana Tahun 2020
5. Dealer Utama SUN dengan Kinerja Terbaik Tahun 2020
6. Dealer Utama SBSN dengan Kinerja Terbaik Tahun 2020
7. Bank Konvensional Pendukung Pengendalian Moneter Rupiah dan Valas Terbaik

Keunggulan kompetitif bisnis Treasury BRI terus didorong melalui berbagai inovasi yang dilakukan dengan tujuan utama adalah peningkatan produktivitas serta kontribusi yang berkelanjutan bagi kinerja Perseroan secara umum. Beberapa kegiatan inovasi yang dilakukan sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. *Treasury Management System* (TEAMS) yang merupakan *dashboard* otomatis untuk seluruh aktivitas treasury yang digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan strategi.
2. Pengembangan *core system* aktivitas treasury untuk menunjang aktivitas yang semakin beragam memenuhi kebutuhan nasabah, termasuk memfasilitasi isu terkait *libor transition*.
3. Pengembangan produk FX *Cash Transaction* (FXCT) yang dapat memfasilitasi nasabah non-pinjaman untuk melakukan transaksi nilai tukar di BRI dengan valuta *tod*, *tom* dan *spot*.
4. *Risk forecasting model* yang digunakan dalam memproyeksikan dampak suatu kondisi ekonomi terhadap portofolio treasury secara lebih komprehensif.
5. Melakukan *development* fitur konversi valas pada aplikasi BRImo.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Treasury Tahun 2022

Penyusunan strategi Bisnis Treasury tahun 2022 diselenggarakan dengan tujuan utama BRI di tahun 2025 untuk menjadi *The Most Valuable Banking Group in South East Asia & Champion of Financial Inclusion* dengan komitmen untuk terus meningkatkan kontribusi positif bagi BRI. Di tengah suku bunga yang diproyeksikan akan naik di tahun 2022 dan 2023, peningkatan *client flow* masih menjadi fokus utama Bisnis Treasury BRI untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selain bisnis, aktivitas investasi dan pemenuhan kebutuhan pendanaan di luar DPK juga diarahkan untuk lebih terkait dengan ESG (*Environmental, Social and Governance*) sehingga aktivitas Bisnis Treasury tidak hanya memiliki dampak terhadap kinerja Perseroan namun juga terhadap lingkungan. Peningkatan sinergi baik dengan bisnis lainnya di BRI maupun dengan Entitas Anak juga menjadi salah satu fokus treasury dalam optimalisasi layanan dan pendapatan.

Fokus pada nasabah pinjaman dan simpanan valas serta nasabah yang memiliki kebutuhan valas di seluruh *Regional Office* BRI menjadi strategi peningkatan aktivitas nilai tukar di segmen ritel. Sedangkan di segmen korporasi, akuisisi nasabah baru dan eksisting di beberapa sektor potensial menjadi strategi dalam peningkatan *market share* dan penetrasi produk *treasury* sejalan dengan cita-cita BRIVolution 2.0 segmen Bisnis *Treasury and Global Services* (TGS) yaitu 50% penetrasi produk *treasury*.

BISNIS INTERNASIONAL

BRI memiliki kapabilitas dan pengalaman dalam melayani kebutuhan aktivitas keuangan nasabah akan produk dan jasa di bidang bisnis Bank Koresponden, bisnis Remitansi dan bisnis *Banknotes*. Semua bidang bisnis tersebut telah berkontribusi besar dalam mendukung pertumbuhan pendapatan dari sisi *interest income*, *fee-based income*, dan atau berpotensi besar dalam meningkatkan penghimpunan dana maupun *trickle down* bisnis BRI lainnya.

Layanan Bisnis Internasional BRI didukung oleh kehadiran Unit Kerja Luar Negeri yang berada di New York, Cayman Island, Singapura, Hongkong, Timor-Leste dan Taipei. Selain itu, terdapat pula *Remittance Representatives* BRI untuk meningkatkan layanan bisnis Remitansi di koridor Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Hongkong, Jepang, dan Brunei Darussalam.

Bisnis Internasional BRI turut didukung pekerja profesional yang telah memiliki sertifikasi internasional seperti *Certified Documentary Credit Specialist (CDCS)*, *Certified Specialist for Demand Guarantee (CSDG)*, *Certified International Trade Finance (CITF)*, dan *Certified Trade Finance Professional (CTFP)* yang terus diperbaharui secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa BRI memiliki komitmen penuh untuk menjadi rekan bisnis terpercaya dan bisa diandalkan, guna menyediakan layanan Bisnis Internasional yang terbaik dan sejalan dengan perkembangan bisnis nasabah.

Bisnis Internasional BRI telah bekerja sama dengan kurang lebih 1.280 Bank Koresponden di seluruh dunia dengan 16 mata uang asing, 100 *Remittance Company*, serta didukung Unit Kerja seluruh Indonesia. BRI juga melayani transaksi jual beli mata uang asing dalam 22 jenis mata uang asing di unit kerja operasional di seluruh Indonesia secara *real-time online*.

Ada pun tim yang mendukung perkembangan Bisnis Internasional BRI hingga saat ini adalah *Foreign Correspondent Banking Business Team*, *Domestic and Asean Correspondent Banking Business Team*, *Remittance Business Team*, *Banknotes Business Team*, *Overseas Channel Management & Development Team*, dan *Bank Line Management Team*. Sedang produk dan layanan dari masing-masing Tim tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasabah adalah sebagai berikut:

1. **Correspondent Banking Business Products**
 - a. **Bank Guarantee Issuance Under Counter Guarantee**, yaitu Penerbitan Bank Garansi Lokal kepada *Bouwheer* yang diterbitkan atas dasar *Counter Guarantee* yang diterima dari Bank Koresponden.
 - b. **LC/SKBDN Refinancing Business**, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan oleh BRI kepada Bank (*issuing bank*) atas dasar *underlying trade transaction* berupa LC/SKBDN.
 - c. **LC / SKBDN Confirmation Business**, yakni jaminan tambahan dari BRI yang diberikan kepada *beneficiary* atas LC/SKBDN yang diterbitkan oleh *counterpart bank* (*issuing bank*).
 - d. **Trade Asset Participation Business**, ialah pengambilalihan sebagian atau keseluruhan tagihan (*bank risk* atau *country risk*) dengan *underlying trade* yang mengacu pada ketentuan dalam *Banker's Association Finance and Trade* (BAFT).
 - e. **Banker Acceptance**, merupakan fasilitas likuiditas jangka pendek yang diberikan BRI sebagai *lender* atau *funding bank* dengan *underlying trade* LC/Non-LC.
 - f. **Bank to Bank Forfeiting Business**, adalah pengambilalihan tagihan (*payment claim*) tanpa hak *regress* dengan *underlying Trade Transaction* yang mengacu pada *Uniform Custom Rules for Forfeiting* (URF).
 - g. **Bank Loan**, merupakan fasilitas pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh BRI kepada Bank Koresponden dalam rangka pemenuhan likuiditas bagi bank koresponden dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. **Remittance Business Development Products**
Remittance (Fund Transfer) dapat didefinisikan sebagai suatu pergerakan/perpindahan dana dari pengirim (*The Originator of Payment*) kepada penerima (*The Beneficiary of Payment*). Produk ini meliputi *BRIfast Remittance Incoming* (Kerjasama dan Non Kerjasama) dan *BRIfast Remittance Outgoing*.
 - a. **BRIfast Remittance Incoming (Kerjasama dan Non Kerjasama)**
 - Brifast Incoming Kerjasama merupakan layanan pengiriman uang ke dalam negeri menggunakan aplikasi Brifast dengan menggunakan *channel Counterpart* Kerjasama BRI yang ada di luar negeri, umumnya transaksi ini bersumber dari remitansi TKI.
 - Brifast Incoming Non-Kerjasama merupakan layanan penerimaan dana dari luar negeri ke Indonesia dengan menggunakan *platform* SWIFT, umumnya transaksi ini merupakan transaksi yang memiliki *underlying trade* (ekspor-impor).
 - b. **BRIfast Remittance Outgoing**
 Merupakan layanan transfer dengan tujuan luar negeri menggunakan mata uang valas termasuk transfer dana ke dalam negeri menggunakan mata uang valas.

- c. **Layanan Global Remittance MT 940 dan MT 101**
Merupakan fasilitas layanan untuk mengakomodasi kebutuhan layanan SWIFT bagi perusahaan global non - finansial ataupun lembaga non-bank, khususnya yang memiliki jaringan unit usaha di Indonesia.
- 3. **Banknotes Business Products**
 - a. **Pembelian dan Penjualan Banknotes**, yaitu transaksi pembelian dan penjualan Uang Kertas Asing (UKA) secara fisik melalui transaksi *money changer* atau *same currency*. Negosiasi harga kurs banknotes dilakukan melalui RTB Kanwil atau *Banknotes Business Team, International Business Division*.
 - b. **Tarik dan Setor Tunai Banknotes**, yaitu penarikan maupun penyeteroran *Banknotes* dari dan ke rekening simpanan valas nasabah dikenakan provisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilayani di unit kerja operasional BRI.
- 4. **Overseas Channel Management and Development**
Daftar Unit Kerja Luar Negeri BRI yaitu sebagai berikut:
 - a. **BRI New York Agency**
Berdiri tahun 1988, BRINYA menjadi Unit Kerja Luar Negeri Pertama BRI untuk *following customer business* atau menjawab kebutuhan bisnis nasabah BRI dalam memfasilitasi transaksi *international trade* serta *payment and settlement* dalam mata uang USD. Bisnis di BRINYA meliputi *loan, trade finance, treasury and wire transfer*.
 - b. **BRI Cayman Island Branch**
Berdiri tahun 1992 sebagai Unit Kerja Luar Negeri Ketiga, BRI Cayman Island memiliki lisensi tipe B dari Cayman Island *Monetary Authority*. Pendirian BRI Cayman Island ditujukan untuk mengakomodasi transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan atas proyek-proyek pemerintah Republik Indonesia. Aktivitas bisnis termasuk pinjaman, *trade finance* dan *treasury*.
 - c. **BRI Hongkong Representative Office**
Berdiri tahun 1989 sebagai Unit Kerja Luar Negeri Kedua, BRI HKRO memiliki lisensi sebagai *Representative Office* dan didirikan untuk menindaklanjuti likuidasi BRIFL. Peran BRI HKRO adalah sebagai perwakilan dari Kantor Pusat BRI di Hong Kong dalam berkomunikasi dengan seluruh

- stakeholders* (nasabah, pemegang saham, regulator, dan lain-lain). Saat ini BRI HKRO sedang dalam proses peningkatan menjadi BRI Hong Kong Branch.
- d. **BRI Singapore Branch**
BRISG berdiri pada tahun 2015 sebagai *offshore wholesale banking* serta menjadi *trade-hub* antara Indonesia dan Asia. Pembukaan Kantor Cabang BRI di Singapura juga merupakan langkah BRI dalam upaya *following customer business*. Aktivitas bisnis BRI Singapore Branch meliputi layanan *loan, trade finance and treasury* kepada nasabah
- e. **BRI Timor Leste Colmera Branch**
BRITL memiliki Lisensi Level B dari Banco Central de Timor-Leste (BCTL) dan resmi beroperasi sejak tanggal 14 Maret 2017. Pendirian BRI Timor Leste ditujukan untuk memperluas *retail market* BRI dengan menawarkan produk berupa pinjaman, simpanan, aktivitas *treasury, remittance, trade finance*, penyampaian jasa referensi kredit dan konsultan finansial. Transaksi bersifat *multi-currencies*. 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu adalah sebagai berikut: Futuhada *Sub-Branch Office*, Hudilaran *Sub-Branch Office* dan Audian *Sub-Branch Office*.
- f. **BRI Taipei Branch**
BRI Taipei Branch secara resmi beroperasi pada tanggal 30 November 2021. Pembukaan BRI Taipei Branch ditujukan untuk mengakomodasi potensi bisnis yang ada di negara Taiwan dengan menawarkan layanan ritel maupun wholesale. Layanan yang ditawarkan meliputi simpanan, pinjaman dan *trade finance*.
- 5. **Bank Line Management**
Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Analisis kondisi makro dan risiko negara *counterpart*.
 - b. Prakarsa, analisis, rekomendasi dan *review* fasilitas *Uncommitted Credit Line* (UCL) untuk Bank Koresponden.
 - c. *Due diligence* terhadap *counterpart* dalam rangka menjalin hubungan koresponden, rekening nostro dan analisis *credit line*.
 - d. Penyusunan, sosialisasi, evaluasi dan penyempurnaan kebijakan/ketentuan, produk dan layanan fungsi *Bank Line Management*.

Tabel Kinerja (Produktivitas) Bisnis Internasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Bisnis Internasional	334.621	374.448	(39.826)	(10,64%)
Remittance Business	153.705	152.369	1.337	0,88%
Banknotes Business	88.599	99.590	(10.991)	(11,04%)
Correspondent Banking Business	92.317	122.489	(30.172)	(24,63%)

Ditengah pandemi COVID-19 yang masih berlanjut pada tahun 2021, Kinerja BIsnis Internasional masih mampu mencatatkan pendapatan, meskipun secara pertumbuhan masih terkontraksi.

Secara total, Pendapatan BIsnis Internasional mencapai Rp334,62 miliar atau turun 10,64% YoY. Mayoritas atau 60% dari Pendapatan ini disumbang oleh Jasa Remitansi sebesar Rp153,75 miliar yang tumbuh terbatas 0,88% YoY. Pencapaian jasa remitansi didukung oleh optimalisasi bisnis *remittance representative* BRI serta entitas anak untuk mengoptimalkan potensi transaksi remitansi PMI di negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong-Kong, Korea Selatan, Jepang, UAE, dan Saudi Arabia. Penyumbang Pendapatan Bisnis Internasional pendapatan selanjutnya yaitu Jasa Bisnis *correspondent banking* sebesar Rp92,32 miliar yang secara YoY tumbuh negatif 24,63% YoY, dan Jasa Bank *notes Business* sebesar Rp88,60 miliar atau terkontraksi 11,04% YoY.

Perlambatan pertumbuhan bisnis internasional dikarenakan pandemi COVID-19 yang berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi secara global.

Strategi Bisnis Internasional Tahun 2021

1. **Remittance Business Strategy**

Maintaining Strong Existence In Incoming Remittance Business And Optimizing Performance Of Outgoing Remittance Business.

2. **Banknotes Business Strategy**

a. *New Banknotes Business*

Integrasi seluruh aktivitas *banknotes business* yang terakomodasi dalam aplikasi *money changer* dengan penambahan aktivitas baru (transaksi jual/beli *same currency banknotes*).

b. *Digitalisasi Dashboard Money Changer*

Pengembangan *dashboard money changer* yang terintegrasi dengan aplikasi BRI *System Information Management* (BRISIM) Pengembangan *dashboard money changer* ini dilakukan sebagai monitoring kinerja uker sehingga dapat menentukan potensi bisnis serta *best pricing* dari data *dashboard* yang telah diberikan.

3. **Correspondent Banking Business Strategy**

a. Otomasi transaksi *correspondent banking system* digitalisasi dan sentralisasi pada administrator untuk proses operasional bisnis atas produk *correspondent banking* melalui aplikasi terintegrasi sehingga proses bisnis tidak lagi dilakukan secara manual.

b. Sinergi Bank Pembangunan Daerah – BRI Kolaborasi dengan Divisi terkait dalam rangka kerjasama dengan BPD untuk menjadikan BRI sebagai *one stop financial solution*.

c. *Pemasaran Produk Bank Loan*

Pemenuhan kebutuhan likuiditas jangka pendek Bank BUKU II dan BUKU III untuk dapat meningkatkan *interest income* dan *arrangement fee*.

4. **Overseas Channel Management and Development Strategy**

a. *Grand Opening* Kantor Cabang BRI Taipei November 2021.

5. **Bank Line Management Strategy**

a. *Bank Line Approval System* (BLAST) Vice President atau Executive Vice President UCL *One Day Approval* untuk peningkatan SLA.

b. *Dashboard Bank Line Management* penyediaan data utilisasi secara instan untuk efisiensi proses bisnis dan peningkatan produktivitas.

c. Penyusunan *country profile* dengan menganalisis kondisi makro dan risiko negara *counterpart*.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Bisnis Internasional

1. **Remittance Business**

a. Keunggulan Kompetitif

- Memiliki Perwakilan *Remittance Representative* dan entitas anak di negara tujuan utama pekerja migran Indonesia (Malaysia, Singapura, Brunei, Hong-Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, UAE, dan Saudi Arabia).
- Memiliki 100 *counterpart remittance* kerjasama yang tersebar di seluruh dunia.

b. Inovasi

- Pengembangan transaksi *outgoing remittance/transfer international* via BRI Mobile.
- Aplikasi *incoming remittance* bekerjasama dengan *counterpart remittance* BRI.

2. **Banknotes Business**

a. Keunggulan Kompetitif

- *Banknotes* bisnis memiliki *rate* transaksi yang bersaing dengan kompetitor.
- Jaringan kerja banknotes bisnis tersebar luas di seluruh Indonesia yang dapat di layani di Unit kerja BRI Kantor Cabang, KCP, Kantor Kas dan BRI Unit.
- Dapat melayani 22 Currency yaitu USD, EUR, AUD, JPY, SGD, GBP, SAR, THB, HKD, CNY, NZD, AED, MYR, BND, CHF, KRW, PGK, CAD, TWD, PHP, INR dan VND

- b. Inovasi
Transaksi *samecurrency* yaitu layanan transaksi jual/beli *banknotes* dengan mekanisme pembayaran melalui *nostro account* menggunakan mata uang yang sama dengan *banknotes* yang di transaksikan. Terdapat provisi atas transaksi *samecurrency* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilayani di unit kerja operasional BRI.

3. **Correspondent Banking Business**

- a. Keunggulan Kompetitif
Memiliki Jaringan korespondensi yang luas di berbagai Bank di seluruh dunia dengan total jaringan korespondensi sebanyak 1.280 Bank di seluruh dunia.
- b. Inovasi
 - Implementasi produk *bank loan* untuk melayani pemenuhan kebutuhan likuiditas bank domestik maupun *foreign bank* di Indonesia.
 - Implementasi transaksi *correspondent banking system*. Digitalisasi dan sentralisasi pada administrator untuk proses operasional bisnis atas produk *correspondent banking* melalui aplikasi terintegrasi.

4. **Overseas Channel Management and Development Strategy**

- a. Keunggulan Kompetitif
 - Memiliki Perwakilan *remittance representative* dan entitas anak di negara tujuan utama pekerja migran Indonesia (Malaysia, Singapura, Brunei, Hong-Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, UAE, dan Saudi Arabia)
 - Memiliki 100 *counterpart remittance* kerjasama yang tersebar di seluruh dunia.
- b. Inovasi
 - Pengembangan transaksi *outgoing remittance/transfer international* via BRI Mobile
 - Aplikasi *incoming remittance* bekerjasama dengan *counterpart remittance* BRI.

5. **Bank Line Management Strategy**

- a. Keunggulan Kompetitif
Fungsi prakarsa *Bank Line* yang terpisah dari fungsi *marketing* sehingga lebih terfokus dalam pengelolaan *Bank Line* untuk mendukung pencapaian Bisnis Internasional dan *Treasury*.
- b. Inovasi
 - Efisiensi proses bisnis melalui otomatisasi prakarsa *Bank Line*.
 - *Enhancement dashboard* untuk portofolio dan utilisasi *Bank Line*.

Prospek Usaha dan Strategi Bisnis Internasional Tahun 2022

Bisnis Internasional BRI terus berupaya meningkatkan produktivitas di tengah pandemi dan menjaga kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis nasabah yang dinamis. BRI berkomitmen meningkatkan kontribusi pendapatan perusahaan melalui peningkatan volume transaksi baik Bank Koresponden, bisnis Remitansi maupun bisnis *banknotes*. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bisnis Internasional BRI tahun 2022 memiliki strategi sebagai berikut:

1. **Remittance Business**

- a. Prospek Usaha
 - Bisnis *Incoming Remittance* PMI yang mulai pulih pasca pandemi COVID-19, ditandai dengan peningkatan pemberangkatan jumlah pekerja migran Indonesia.
 - Penambahan *customer based* transaksi *outgoing remittance/transfer International* melalui *platform digital* BRI Mobile.
- b. Strategi Bisnis
Meningkatkan Bisnis *incoming remittance* dan penetrasi kuat untuk bisnis *outgoing remittance*.
 - Terintegrasi dengan *Global Money Transfer Operator (MTO)*/Perusahaan *fintech*.
 - *Mobile outgoing remittance* melalui BRI Mo.
 - Perluasan ke Koridor Baru Potensi *Incoming PMI*.
 - Pengembangan dan perluasan layanan bagi nasabah melalui fitur *remittance* tujuan *e-wallet*, Agen BRILink, dan *digital saving*.

2. **Banknotes Business**

- a. Prospek Usaha
Peluang usaha *banknotes* bisnis masih didominasi oleh *wholesale* dengan jenis *currency* yang paling banyak diminati yaitu USD, SGD, EUR dan AUD.
- b. Strategi Bisnis
 - Pengembangan aplikasi *money changer* dengan digitalisasi inventori dan penggunaan kartu debit sebagai sarana transaksi pembelian valas melalui EDC.
 - *Money changer on wheels*, layanan *money changer mobile* (menggunakan mobil terling) di lokasi-lokasi wisata unggulan seperti Denpasar, Malang, Danau Toba, dan Lampung.

3. **Correspondent Banking Business**

- a. Prospek Usaha
 - Peningkatan Suku Bunga Acuan Transaksi.
Upaya pemulihan perekonomian global akibat Pandemi COVID 19 di tahun 2021, diiringi dengan peningkatan nilai suku bunga acuan yang semakin membaik. Hal ini menjadi momentum bagi *correspondent banking business* untuk dapat mengoptimalkan *yield enhancement* atas transaksi *correspondent banking* yang menghasilkan *interest income*.
 - Pemberhentian London Interbank Offered Rate (LIBOR) sebagai suku bunga acuan transaksi USD.
Pada tahun 2022, penggunaan suku bunga acuan London Interbank Offered Rate (LIBOR) akan segera di hentikan dan akan beralih pada *Secured Overnight Financing Rate (SOFR)*. Hal ini dapat menjadikan peluang bagi *correspondent banking business team* BRI untuk dapat memberikan penawaran *rate* yang lebih baik bila dibandingkan dengan kompetitor.
- b. Strategi Bisnis
 - Optimalisasi *yield enhancement* atas transaksi *correspondent banking business* yang menghasilkan *interest income*.

- Eksplorasi potensi diversifikasi portfolio aset di Indonesia diversifikasi *portofolio assets* melalui pengembangan pasar *trade finance asset* di *secondary market* melalui *platform*, dimana BRI dapat bertindak sebagai pembeli ataupun penjual *asset trade finance*. Hal tersebut sebagai bentuk resiprokal bisnis sekaligus meningkatkan *revenue correspondent banking*.
- Penyediaan data *market share* Bank koresponden melalui kerjasama dengan SWIFT sebagai dasar penetapan strategi bisnis.

4. **Overseas Channel Management and Development Strategy**

- a. Sharpen Overseas Channel Strategy
Optimalisasi *asset* dan *liabilities* pada *overseas channel* sebagai *source of new growth engine* untuk BRI.
- b. Penyusunan *kajian/feasibility study* pengembangan *overseas channel*.
Penyusunan kajian dalam menetapkan wilayah baru dengan potensi bisnis untuk pengembangan *overseas channel* BRI di luar negeri.
- c. Program *Internship* Pekerja BRI Kantor Pusat ke *overseas channel*.
Program pengembangan untuk pekerja BRI dalam rangka meningkatkan kapabilitas *human capital* BRI serta membantu *overseas channel* untuk mengembangkan aktivitas bisnis di luar negeri.

5. **Bank Line Management Strategy**

- a. Pengembangan Aplikasi *Bank Line Analysis System* (BLAST) untuk prakarsa *bank line* putusan Komite Kredit/SEVP.
- b. Pengembangan *dashboard bank line management* dan *database country limit, country risk* dan *country profile* yang terintegrasi dengan aplikasi *BRI System Information Management* (BRISIM)

- c. Dukungan optimal dalam pemberian *bank line* yang mendukung kebutuhan bisnis Internasional dan *Treasury* dengan tetap menjaga kualitas kredit.
- d. *Banking Industry update* untuk negara yang memiliki eksposur atau risiko tinggi.

Entitas Anak

Segmen Bisnis Entitas Anak meliputi perbankan konvensional, layanan pembiayaan, layanan remitansi, asuransi jiwa, asuransi umum, modal ventura dan sekuritas. BRI memiliki 9 (sembilan) entitas anak yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk), BRI Remittance Co. Limited Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas (dahulu PT Danareksa Sekuritas), PT BRI Ventura Investama dan PT BRI Asuransi Indonesia (dahulu PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur). Uraian Kinerja entitas anak BRI disajikan sebagai berikut.

PT BANK RAYA INDONESIA TBK (BANK RAYA)

Sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. 23 tanggal 27 September 2021 telah memberikan Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat (1) melakukan perubahan nama Perseroan, semula bernama "PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk" dengan nama komersial BRI AGRO, menjadi bernama "PT Bank Raya Indonesia Tbk" dengan nama komersial Bank RAYA. Perubahan Anggaran Dasar ini sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.24 tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn telah mendapatkan Persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052731.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Raya Indonesia Tbk.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT Bank Raya Indonesia Tbk

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	16.927.208	27.966.392	(11.069.184)	(39,58%)
Kredit	11.608.327	19.492.624	(7.884.297)	(40,44%)
DPK	13.496.292	22.995.279	(9.495.516)	(41,29%)

Aset Bank Raya tahun 2021 sebesar Rp16,93 triliun, turun 39,79% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp28,02 triliun. Demikian pula dengan kredit dan DPK tahun 2021 yang juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 40,45% dan 41,29%. Penurunan yang secara umum tersebut disebabkan adanya transformasi dan perubahan fokus bisnis menjadi Bank *Digital*.

Strategi PT Bank Raya Indonesia Tbk Tahun 2021

Bank Raya telah memulai kegiatan konsolidasi internal baik dari sisi sumber daya manusia, strategi bisnis maupun pengembangan jaringan. Selain fokus pada bidang usaha agribisnis, Bank Raya fokus di segmen bisnis retail dan konsumen melalui produk-produk

berbasis *digital*. Beberapa strategi fundamental Bank Raya telah dilakukan adalah:

1. Menentukan Visi Baru Bank yaitu "*The Best Digital Bank for Agri & Beyond by Becoming House of Fintech & Home for Gig Economy*".
2. Melaksanakan proses transformasi bisnis Bank ke arah Bank *Digital* yang terdiri dari 3 (tiga) pilar utama, yaitu *Digital, Digitize, dan Revamp*. Serta memperkuat beberapa aspek yang menjadi *enablers* yaitu *Good Corporate Governance* (GCG), *Internal Capability* di Teknologi dan Informasi, memperluas *partnership* dengan berbagai entitas yang relevan dengan target *customer* Bank untuk membangun ekosistem bisnis.

3. Menentukan strategi inisiatif sebagai turunan dari Visi Transformasi Bisnis Bank, dan membentuk *Project Management Office* (PMO) dan *Revamp Management Office* (RMO) untuk memonitoring pelaksanaan proses transformasi berjalan sesuai dengan *timeline*.
4. Melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi agar sesuai dengan aspirasi baru Bank, dan membentuk *Digital Bisnis Unit* setingkat Direktorat yang akan fokus dalam mengembangkan produk-produk *digital*.
5. Mengembangkan *talent management system* yang terdiri dari *employee value proposition*, *digital culture* dan *employee persona* serta menerapkan pengukuran kinerja profesional berbasis *Key Performance Indicators* (KPI) dan *Objective Key Result* (OKR).

Kebijakan strategis yang diterapkan oleh Bank Raya dalam upaya mencapai tujuan serta sebagai bentuk strategi dalam menghadapi persaingan di industri perbankan Indonesia, meliputi:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Melakukan pengembangan layanan pembukaan rekening simpanan secara *online* dengan tujuan mengurangi risiko konsentrasi *fund resources* dari dana mahal ke dana murah serta mempermudah akses calon nasabah dalam pembukaan rekening tabungan di Bank Raya.
2. Kredit Yang Diberikan (KYD)

Kredit yang diberikan (KYD) lebih difokuskan kepada pengembangan produk *digital lending* untuk segmen mikro dan kecil melalui produk Pinang Mikro, Pinang Ritel, Pinang Konsumer dan Pinang Connect. Sedangkan *lead acquisition* yang sebelumnya hanya mengandalkan *internal resources* yaitu *account officer*, kedepannya akan dilakukan juga melalui pembukaan jaringan *lead acquisition* baru yakni *partnership* dengan *startup*, *fintech*, *Peer to Peer* (P2P), bisnis keagenan serta entitas lainnya.
3. *Non Performing Loan* (NPL)

Bank Raya terus berupaya mengelola NPL pada tingkat yang aman yaitu di bawah 5% dengan cara:

 - a. Pemberian kredit yang selektif dengan memperhatikan prinsip *prudential banking* dan *four eyes principle*.
 - b. Meningkatkan pembinaan dan *monitoring* yang berkesinambungan terhadap seluruh kredit yang telah diberikan.
 - c. Mengintensifkan penagihan.
 - d. Melakukan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah.
 - e. Mengupayakan penjualan aset yang dijamin sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah.
 - f. Litigasi.

Strategi khusus untuk pengembangan bisnis yang merupakan langkah-langkah spesifik yang dilakukan dalam pengembangan bisnis, antara lain:

1. Mengembangkan produk pinjaman berbasis *digital* (*digital lending*) untuk segmen mikro dan kecil yang terdiri dari Pinang Mikro (plafon sampai dengan Rp100 juta), Pinang Ritel (plafon >Rp100 juta sampai dengan Rp1 miliar), Pinang Konsumer (plafon sampai dengan Rp25 juta) dan Pinang Connect untuk

- individu yang mengajukan pinjaman melalui *platform* Fintech atau P2P *lending* yang telah bermitra dengan Bank.
2. Mengembangkan produk simpanan berbasis *digital* (*digital saving*), untuk dapat menjangkau lebih luas nasabah di seluruh Indonesia.
3. Mengembangkan layanan *Open API* (*Application Programming Interface*) untuk membantu meningkatkan transaksi dari seluruh produk Bank.
4. Membangun ekosistem bisnis melalui perluasan kerjasama (*partnership*) dengan induk usaha (BRI) dan institusi lainnya (*Startup*, *Fintech*, *Peer to Peer Lending*, Grup Bisnis dan entitas lainnya).
5. Mengembangkan layanan *beyond banking* dengan mengusung konsep *super aggregator* dalam *supply chain* bisnis yang menjadi target Bank.
6. Menerapkan teknologi terkini dan melakukan revitalisasi infrastruktur IT untuk mendukung pengembangan Visi dan *Value Proposition* Bank yang baru.
7. Melaksanakan proses *revamp* (penyesuaian) yang terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu *revamp* portofolio bisnis, *people*, dan *branch network*.
8. Mengembangkan *talent management system* yang terdiri dari *Employee value proposition*, *digital culture* dan *employee persona* serta menerapkan pengukuran kinerja profesional berbasis *Key Performance Indicators* (KPI) dan *Objective Key Result* (OKR).

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT Bank Raya Indonesia Tbk

Dalam mengupayakan pencapaian target-target usahanya, Bank Raya memiliki beberapa faktor kekuatan utama sehingga mampu bersaing di industri perbankan Indonesia, yaitu:

1. Dukungan Penuh dari Pemegang Saham Pengendali Bank Raya secara mayoritas dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai bagian dari BRI Group, Bank Raya selalu bersinergi dengan BRI sebagai pemegang saham pengendali untuk menghadirkan berbagai layanan dan produk perbankan terbaik bagi para nasabah.

BRI sebagai pemegang saham pengendali telah berkomitmen untuk terus mengembangkan Bank Raya dan memiliki aspirasi baru dengan komitmen untuk menjadikan Bank Raya sebagai *digital attacker* bank BRI Group melalui pengembangan layanan perbankan berbasis teknologi baik funding maupun lending melalui inisiatif sebagai berikut:

- a. *Digital*, inisiasi Bank Raya untuk pengembangan produk *digital lending* (produktif dan konsumtif) serta *digital saving* dengan *value proposition* baru yang fokus penyalurannya pada bisnis keagenan dan ekosistem *startup* dan *fintech*.
- b. *Digitize*, inisiasi Bank Raya untuk digitalisasi bisnis proses *existing business* (segmen Ritel) dengan fokus *lending* berupa *supplier financing*.
- c. *Revamp*, Inisiasi Bank Raya dalam rangka menyehatkan kondisi perbankan melalui peningkatan kapabilitas SDM, penataan unit kerja dan portofolio bisnis dan manajemen aset yang lebih baik

2. Strategic Initiatives

Strategic Initiatives merupakan salah satu bentuk sinergi penyampaian aspirasi antara BRI dengan Entitas Anak dalam rangka optimalisasi pendapatan dan efisiensi pengelolaan bisnis BRI Grup. *Strategic Initiatives* berupa program kerja non rutin yang bersifat strategis dan *critical*. Dampaknya juga cukup besar untuk perusahaan, sehingga diperlukan dukungan Entitas Induk yang pelaksanaannya diwujudkan dalam aktivitas proyek. Kegiatan sinergi BRI Group perlu dikelola agar dalam pelaksanaannya sehingga dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan sinergi tersebut meliputi: BRI Open API, Pinang Konsumer (*non payroll*), Kerjasama Agen (Pinang *Pay Later*).

3. Kapasitas Teknologi yang Mendukung Pengembangan Produk *Digital*

Sesuai dengan strategi umum Bank yang akan bertransformasi menjadi Bank *Digital*, maka Bank Raya melakukan pengembangan dari sisi Infrastruktur IT yaitu antara lain *Re-design all user interface and Flow BRI Agro Digital*, *Cloud Implementation untuk Development area*, *Big Data Implementation*, *Enterprise Server*, *Operational Excellence*. Dari sisi produk, saat ini Bank Raya juga terus mengembangkan produk *digital* salah satunya adalah produk *digital lending* yang telah dikembangkan bersama BRI yaitu Pinang yang fokus pada segmen konsumen serta pengembangan pembiayaan produktif untuk segmen mikro dan ritel serta produk *digital saving*. Selain mengembangkan sendiri layanan perbankan berbasis teknologi, Bank Raya juga akan mulai berkolaborasi dengan berbagai platform *start up* baik *e-commerce*, *fintech* maupun *Peer to Peer Lending*. Diharapkan melalui kolaborasi ini Bank Raya dapat semakin memperluas basis nasabahnya baik nasabah simpanan maupun pinjaman.

Prospek Usaha dan Strategi

PT Bank Raya Indonesia Tbk Tahun 2022

1. Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 diproyeksikan akan kembali tumbuh positif dan inflasi tetap terjaga 2% +/- 1%. Faktor utama yang akan mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi adalah penanganan COVID-19, percepatan vaksinasi dan stimulus fiskal untuk melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi global karena Indonesia merupakan bagian *dari supply chain ekonomi global*. Sehingga faktor-faktor yang patut dicermati karena dapat menjadi penentu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 adalah eskalasi COVID-19, ketersediaan vaksin, efektivitas stimulus dan tensi geopolitik global. Keberlangsungan sektor usaha juga menjadi fokus Pemerintah, serangkaian insentif fiskal telah diberikan untuk meningkatkan kinerja sektor usaha.

Prospek transaksi ekonomi dan keuangan *digital* terus tumbuh seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja *daring*, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran *digital*, serta akselerasi *digital banking*. Nilai transaksi Uang Elektronik sampai dengan triwulan III-2021 meningkat 45,05% (YoY) menjadi Rp209,8 triliun. Demikian pula, nilai transaksi *digital banking* sampai dengan triwulan III-2021 meningkat 46,72% (YoY) menjadi Rp28,7 triliun. Bank Indonesia akan berupaya mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi ekonomi keuangan digital nasional. Berbagai program digitalisasi sistem pembayaran, seperti perluasan QRIS, Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP) dan reformasi regulasi, serta rencana implementasi *BI-FAST* terus diakselerasi. Hal ini sejalan dengan model bisnis baru dan aspirasi Bank Raya sebagai *Digital Attacker* BRI Group. Salah satu upaya Bank Raya untuk masuk ke *digital ecosystem* dimulai dengan aktif melakukan kolaborasi dengan beberapa *fintech*, mengembangkan *digital banking* baik dari sisi *saving* maupun *lending*.

2. Strategi

Disrupsi teknologi di industri perbankan merupakan sebuah keniscayaan. *Smartphone* telah menjadi *game changer* di industri perbankan. Perkembangan teknologi yang berjalan dengan sangat cepat juga telah mengubah perilaku konsumen, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha dan hasil usaha pelaku di industri perbankan. Merebaknya pandemi COVID-19 sejak kuartal pertama tahun 2020 yang membatasi mobilitas masyarakat juga semakin mempercepat perubahan perilaku nasabah. Selain itu, perkembangan teknologi *digital* yang berpengaruh terhadap perubahan perilaku konsumen dalam bertransaksi di perbankan.

Adaptasi masyarakat terhadap digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari akan semakin tinggi, terutama di masyarakat Urban di area perkotaan. Sekitar 56% dari total 268 Juta masyarakat Indonesia saat ini merupakan masyarakat urban yang sangat lekat dengan berbagai produk *digital*, hal tersebut dikarenakan semakin tingginya pengguna aktif *internet* di Indonesia yaitu sekitar 65% dari masyarakat Indonesia atau sekitar 170 juta orang adalah pengguna aktif *internet*. Tingginya jumlah pengguna *internet* juga selaras dengan tingginya jumlah *smartphone* di Indonesia, sekitar 355 juta *smartphone* beredar di masyarakat melebihi jumlah penduduk Indonesia, dengan *active media social* sekitar 160 Juta orang. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah pengguna *internet* dan penetrasi *smartphone* meningkat sekitar 10%.

Bank Raya sebagai *digital attacker* yang masuk ke ekosistem *digital* mewakili BRI Group, melakukan langkah transformasi *digital*. Strategi tersebut diambil dalam rangka menghadapi era digitalisasi Perbankan ditambah dengan persaingan dengan *fintech*.

Sejak 2019, Bank berhasil meluncurkan pinjaman *digital* melalui aplikasi *digital* Pinjam Tenang atau disebut PINANG. PINANG adalah pinjaman berbasis *digital* yang merupakan produk pinjaman bank berbasis aplikasi pertama di Indonesia. Aplikasi PINANG sudah *fully digital* dengan sistem *digital verification*, *digital scoring* dan *digital signature*.

Pada tahun 2020, selain melakukan pengembangan produk Bank melakukan penetrasi ke ekosistem digital melalui *partnership* atau kolaborasi dengan berbagai perusahaan *Financial Technology (fintech)*. *Fintech* memiliki keunggulan dengan proses yang cepat, lebih mudah dan serba *digital*. Kolaborasi ini merupakan peluang yang baik untuk membuka peluang bisnis selagi Bank mempersiapkan model bisnis baru. Selain memberikan akses pendanaan kepada *fintech*, Bank juga memberikan dukungan layanan perbankan bagi *fintech*.

Tahun 2021 Bank Raya secara resmi bertransformasi menjadi Bank *Digital*. Saat ini Bank telah mencanangkan aspirasi baru yaitu *“The Best Digital Bank by Becoming House of Fintech & Home for Gig Economy”*. Dengan aspirasi ini, maka Bank Raya akan bertransformasi dalam segala hal antara lain aspek *Human Capital*, *Network*, *Infrastructure*, Model Bisnis, Produk dan Layanan, serta Portofolio Kredit baik dalam hal *ticket size* maupun kualitas. Bank Raya berkomitmen untuk membangun pondasi keuangan yang kuat untuk *business model* yang baru dan fokus untuk menyalurkan pendanaan berbasis digital kepada segmen *market* yang baru, terutama segmen *Gig Economy*. Untuk memberikan layanan prima bagi para *Gig Workers*, Bank Raya akan menginisiasi *Community Branch*, terutama untuk melayani komunitas ekonomi sektor informal (*gig economy*) dan agen-agen *fintech* di beberapa area untuk membangun infrastruktur *digital* bagi sektor *gig economy* dengan melalui *customer experience* yang koheren.

BRI REMITTANCE CO. LIMITED HONG KONG

Aset BRI Remittance Co. Limited Hong Kong tahun 2021 sebesar Rp13,14 miliar*, meningkat 30,78% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp10,05 miliar. Peningkatan tersebut adalah kontribusi dari laba perusahaan yang meningkat dan berdampak pada kenaikan aset. Selain itu, peningkatan aset pada tahun 2021 juga dipengaruhi oleh implementasi HKFRS16 (PSAK 73) yang berdampak pada peningkatan *right of use asset* atas *lease* yang dilakukan oleh BRI Remittance di tahun 2021. Sehingga peningkatan dari *right of use asset* tersebut berdampak signifikan pada peningkatan aset BRI Remittance secara keseluruhan.

Pendapatan BRI Remittance Co. Limited Hong Kong tahun 2021 sebesar Rp10,06 miliar (HKD5,50 juta) , meningkat 14,06 % dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp8,82 miliar (HKD4,82 juta). Kenaikan pendapatan tersebut adalah kontribusi dari penambahan jumlah *counterpart* BRI Remittance di beberapa koridor seperti Macau, Taiwan, dan Hong kong sehingga dapat meningkatkan total pendapatan secara keseluruhan. Selain itu digitalisasi proses bisnis pada *counter* BRI Remittance semakin memperlancar *flow* transaksi, peningkatan kapasitas transaksi di *counter* BRI Remittance khususnya pada hari minggu, serta peningkatan kualitas layanan yang juga berdampak pada peningkatan pendapatan BRI Remittance Co. Limited Hong Kong.

Laba bersih BRI Remittance Co. Limited Hong Kong tahun 2021 tercapai sebesar Rp1,89 miliar (HKD1,03 juta) meningkat sebesar 41,58 % dari pencapaian 2020 sebesar Rp1,33 miliar (HKD729 ribu). Peningkatan tersebut karena ditopang oleh porsi pendapatan di 2021 yang semakin meningkat, selain itu terdapat efisiensi proses bisnis melalui re-organisasi di internal BRI Remittance yang mampu menekan BOPO sehingga laba di 2021 dapat meningkat secara signifikan.

Tabel Kinerja (Produktivitas) BRI Remittance Co. Limited Hong Kong

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset (dalam Dollar Hongkong)	7.163.273	5.492.451	1.690.628	30,78%
Aset (dalam Rupiah)	13.094.686.918	10.051.185.330	3.093.849.240	30,78%
Nominal Transaksi	249.954	155.271	94.683	60,98%
Jumlah Transaksi	596.878.705	379.440.315	217.438.390	57,31%

Kurs HKD 1 per 31 Desember 2021 = Rp1.823,03; Kurs HKD 1 per 31 Desember 2020 = Rp1.812,30

Strategi BRI Remittance Co. Limited Hong Kong Tahun 2021

Beberapa strategi yang dilakukan oleh BRI Remittance Co. Limited Hong Kong pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat infrastruktur IT serta melakukan otomasi proses bisnis dan layanan.
2. Melakukan diversifikasi *source of income*.
3. Melakukan kerjasama dengan *counterpart*

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi BRI Remittance Co. Limited Hong Kong

BRI Remittance selama bertahun-tahun telah menjadi pilihan para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Hong Kong untuk mengirimkan uang ke keluarga mereka di Indonesia. Menjadi bagian dari BRI Group merupakan *competitive advantage* dari BRI Remittance. Dengan jaringan kerja BRI yang menjangkau sampai ke pelosok Indonesia, membuat BRI Remittance menjadi pilihan utama TKI



untuk melakukan pengiriman uang ke Indonesia agar langsung sampai ke rekening BRI tujuan di Indonesia. Dengan dukungan sistem dan layanan yang terintegrasi dengan Induk (BRI), BRI Remittance dapat memberikan *additional services* kepada para TKI seperti layanan cek saldo, print buku rekening, cetak rekening koran, dan layanan lainnya kepada para TKI di Hong Kong. BRI Remittance ingin memberikan layanan terbaik serta menjadi *one stop solution* bagi TKI di Hong Kong. Perusahaan terus berupaya melakukan inovasi untuk meningkatkan layanan, seperti misalnya layanan tagging sehingga customer mendapat kemudahan untuk melakukan booking transaksi di cabang BRI Remittance serta mengurangi antrian yang panjang.

Prospek Usaha dan Strategi BRI Remittance Co. Limited Hong Kong Tahun 2022

Kondisi ekonomi diproyeksikan akan tetap tumbuh positif di 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%-6,5%. Namun demikian pendapatan per kapita Hong Kong yang masih mengalami penurunan yang berdampak pada permintaan TKI di Hong Kong. Selain itu kebijakan Pemerintah Indonesia terkait *zero cost* dimana total biaya keberangkatan ditanggung oleh majikan di Hong Kong juga berdampak pada permintaan. Kondisi tersebut menjadikan majikan di Hong Kong saat ini lebih cenderung memilih tenaga kerja (*domestic helper*) dari Philipina. Memperhatikan kondisi tersebut di atas untuk diversifikasi *market* dan memperoleh *customer base* yang baru maka BRI Remittance di tahun 2022 akan masuk ke koridor Philipina untuk menggarap *market remittance* Hong Kong ke Philipina.

Digitalisasi layanan *remittance* dengan kolaborasi *whitelabeling* perusahaan pengiriman uang di Hong Kong juga akan dilakukan *launching* layanan tersebut pada tahun 2022. Dengan masuk ke *digital remittance* diharapkan BRI Remittance dapat secara cepat meningkatkan *market share* dan penetrasi pasar di Hong Kong, sehingga dengan pertumbuhan *customer base* yang akan meningkat dengan digitalisasi diharapkan akan *generate revenue* bagi BRI Remittance yang semakin besar serta meningkatkan aset dan valuasi BRI Remittance.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT Asuransi BRI Life

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	18.334.912	13.042.450	5.292.462	40,58%
Ekuitas	6.755.242	2.792.968	3.962.274	141,87%
Pendapatan Premi	6.390.836	5.679.455	711.381	12,52%

Penambahan modal yang dilakukan oleh FWD berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekuitas maupun aset BRI Life. Pada akhir tahun 2021, Ekuitas BRI Life tumbuh 138,57% YoY menjadi Rp6,67 triliun. Selain itu, aset BRI Life mencapai Rp18,25 triliun atau tumbuh 39,88% secara tahunan.

PT ASURANSI BRI LIFE (BRI LIFE)

Pada 6 Oktober 2015, BRI menandatangani perjanjian jual beli dengan pemegang saham PT Asuransi BRI Life (d/h PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera) untuk mengakuisisi 91,001% kepemilikan di BRI Life. Seluruh rangkaian aktivitas akuisisi selesai pada tanggal 29 Desember 2015 sesuai dengan Akta No 41 Notaris Fathiah Helmi, S.H. sehingga BR memiliki saham BRI Life sebesar 91,001% dan sisanya sebesar 8,999% dimiliki Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI YKP BRI). Selanjutnya pada 23 Februari 2017, PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera berganti nama menjadi PT Asuransi BRI Life (BRI Life).

Pada 2 Maret 2021 BRI Life resmi memiliki pemegang saham baru yakni FWD Financial Services Pte Ltd yang telah melakukan penambahan modal kepada BRI Life sebesar 936.458 lembar saham melalui penerbitan saham baru. Dengan demikian, struktur pemegang saham BRI Life setelah transaksi tersebut yakni BRI memiliki 2.002.022 lembar saham dengan kepemilikan 63,83%. Kemudian, kepemilikan FWD sebesar 29,86% dengan 936.458 lembar saham, serta Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI sebesar 6,31% dari 197.978 lembar saham. Perubahan struktur Pemegang Saham ini sebelumnya telah memperoleh persetujuan OJK melalui surat No. S-12/NB.1/2021 tanggal 4 Februari 2021.

Pada tanggal 13 Oktober 2021 struktur Pemegang Saham berubah, Pemegang Saham menyetujui pengalihan kepemilikan saham milik FWD Financial Services Pte. Ltd. kepada FWD Management Holding Limited, sehingga struktur Pemegang Saham BRI Life menjadi: BRI 63,83%, YKP BRI 6,31%, dan FWD Management Holding Limited 29,86%. Perubahan Struktur Pemegang Saham tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan OJK melalui surat No.S.93/NB.1/2021 tanggal 29 Desember 2021.

Kantor Pusat BRI Life berlokasi di Gedung Graha Irama Lt 15, Jl H.R Rasuna Said Blok X-1 No 1 dan 2, Jakarta, BRI Life juga memiliki 6 Kantor Customer Care Center dan 21 Kantor Customer Care.

BRI Life mencatatkan perolehan laba Rp170,88 miliar atau tumbuh sebesar 132,22% YoY dibandingkan periode sama tahun lalu Rp62,39 miliar. Pertumbuhan laba pada tahun 2021 ditopang oleh pertumbuhan premi yang tumbuh 15,2% YoY atau mencapai Rp6,78 triliun, pendapatan hasil investasi tumbuh tumbuh 25,82% YoY atau mencapai Rp775,17 miliar.

Pertumbuhan premi BRI Life diatas rata-rata industri asuransi jiwa yang hanya tumbuh kisaran 6%-7%. Pertumbuhan premi diperoleh dari kanal bisnis *inbranch* yang tumbuh sebesar 31,93% YoY atau mencapai Rp2,40 triliun dan juga kanal bisnis alternate tumbuh sebesar 55,36% YoY atau mencapai Rp541,49 miliar. Pertumbuhan pada kanal *inbranch* seiring dengan strategi yang telah dijalankan oleh BRI Life yaitu meningkatkan kemampuan tenaga penjualan (BFA), pembuatan *sales story telling* dan pembuatan *marketing program*. Sedangkan untuk kanal alternate strategi yang dijalankan oleh BRI Life yaitu penjualan AMKMM melalui aplikasi pemasaran MyLife, pembuatan *sales story telling* untuk AMKMM Agen BRILink.

Strategi PT Asuransi BRI Life Tahun 2021

Beberapa strategi utama BRI Life yang telah dijalankan di tahun 2021 antara lain:

1. Penjualan produk asuransi mikro yakni Pijar dan AMKMM melalui *platform digital* MyLife.
2. Pembuatan story telling untuk produk Dasetera, Davestera, Davestera Optima, Pelita, Pijar, Aurora, Lentera, Davespro dan AMKMM BRILink.
3. Pengembangan produk untuk meningkatkan pangsa pasar BRI Life yakni PIJAR, Double Care, Pelita, Aurora, Maxipro, dan lain-lain.
4. Peluncuran *single customer apps* yakni MyAccess sehingga informasi kepesertaan hingga layanan *after sales* dapat diakses nasabah dengan mudah.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT Asuransi BRI Life

Beberapa keunggulan kompetitif dan inovasi yang dilakukan BRI Life pada tahun 2021 antara lain:

1. Inovasi BRI Life kepada nasabah berupa Implementasi *E-Policy* untuk polis dan *summary pages* nasabah BRI Life.
2. Pada Oktober 2021 BRI Life resmi melakukan implementasi *whatsapp corporate* untuk melengkapi kanal komunikasi resmi yang dimiliki BRI Life dan menghadirkan kemudahan akses layanan bagi pemegang polis dan seluruh *stakeholders*.
3. Pada Desember 2021 BRI Life juga meluncurkan sentralisasi *contact center*, dimana hal tersebut merupakan strategi inisiatif sebagai langkah korporasi dalam memberikan layanan prima dan menciptakan *customer journey* yang positif kepada seluruh pemegang polis dan *stakeholders*. Tidak hanya sebagai pusat layanan nasabah, *contact center* menjalankan fungsi mitigasi risiko dan edukasi literasi keuangan dalam kerangka *three lines of defence* yaitu mitigasi risiko sebagai berikut:
 - a. Melakukan *welcome call* dan konfirmasi polis sehingga memastikan pemegang polis memahami segala manfaat dan ketentuan dalam perjanjian pertanggungan dan edukasi literasi keuangan.
 - b. Melakukan penjelasan terkait prinsip-prinsip asuransi dan perencanaan keuangan sesuai dengan produk layanan BRI Life (manfaat dan ketentuan polis).

Prospek Usaha dan Strategi PT Asuransi BRI Life Tahun 2022

Pada tahun 2022 BRI Life menargetkan peningkatan kontribusi berupa FBI dan Laba hingga mencapai lebih dari Rp1 triliun, untuk itu BRI Life menargetkan pertumbuhan premi sekitar 15%-20% dan pertumbuhan target pemegang polis sebesar 60%-65% melalui produk-produk unggulan BRI Life seperti Davestera, Pijar, dan AMKMM. Adapun beberapa strategi BRI Life guna mencapai target yang ditetapkan Pemegang Saham di tahun 2022 antara lain:

1. Penetrasi penjualan produk asuransi melalui BRILink.
2. Penetrasi penjualan produk asuransi ke segmen prioritas BRI.
3. Filtering database sesuai dengan karakteristik nasabah *telemarketing*.
4. *Development mobile apps* yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan transaksi kepada nasabah.
5. Perbaikan proses klaim untuk semua produk melalui MoKlaim yang bertujuan untuk efisiensi dan keakuratan proses klaim.
6. Pengembangan produk asuransi kesehatan untuk segmen *Small and Medium Sized Enterprise* (SME).

PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA (BRI FINANCE)

Aset BRI Finance 2021 sebesar Rp5,25 triliun, meningkat 29,89% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp4,05 triliun. Peningkatan tersebut karena pertumbuhan positif pada piutang pembiayaan konsumen dengan nilai Rp2,83 triliun naik sebesar 119,38% (YoY) secara organik termasuk didalamnya penambahan portofolio KKB BRI sebesar Rp194,3 miliar.

Pendapatan BRI Finance tahun 2021 sebesar Rp655,02 juta, meningkat 33,03% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp492,37 juta. Hal tersebut karena meningkatnya penyaluran pembiayaan baru BRI Finance pada tahun 2021 mencapai Rp3,72 triliun yang terdiri dari pembiayaan bisnis komersial sebesar Rp1,24 triliun, pembiayaan bisnis OPL sebesar Rp310,41 miliar dan pembiayaan bisnis konsumen sebesar Rp2,17 triliun. Total penyaluran pembiayaan naik sebesar 174,53% (YoY) dimana total penyaluran bisnis konsumen naik sebesar 277,67%, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan pembiayaan pada kategori mobil baru dampak positif perpanjangan pemberlakuan relaksasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dilakukan Pemerintah dan penurunan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Laba bersih BRI Finance tahun 2021 meningkat sebesar 766,39% dari Rp4,79 juta di tahun 2020 menjadi Rp41,50 juta di tahun 2021. Peningkatan tersebut karena BRI Finance berhasil meningkatkan pendapatan melalui peningkatan pembiayaan baru secara organik, perluasan *coverage area* yang dilakukan BRI Finance pada 100 unit kerja BRI, peningkatan produktivitas pekerja, membaiknya keadaan ekonomi disertai stimulus PPnBM yang dilakukan pemerintah. BRI Finance juga berhasil melakukan efisiensi dengan penurunan beban bunga sebesar 4% dan perbaikan kualitas pembiayaan sehingga dapat mengurangi beban CKPN sebesar -29% YoY dengan tetap menjaga NPF *coverage* sebesar 158,7%.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT BRI Multifinance Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	5.246.043	4.055.885	1.190.158	29,34%
Pembiayaan (<i>gross</i>)	4.774.315	3.698.854	1.075.461	29,08%
Pembiayaan Konsumer	2.165.115	573.289	1.591.826	277,67%

Strategi PT BRI Multifinance Indonesia Tahun 2021

BRI Finance berfokus pada pembiayaan konsumen dalam rangka melakukan diversifikasi portofolio BRI Finance merencanakan untuk meningkatkan porsi pembiayaan multiguna menjadi minimal 60% terhadap total portofolio. BRI Finance mengoptimalkan sinergi yang telah terjalin dengan Entitas Induk Bank BRI melalui pengembangan *branchless financing* dengan menempatkan tenaga pemasar BRI Finance di unit kerja Bank BRI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Komitmen BRI Finance untuk berfokus pada pengembangan pembiayaan multiguna ditunjukkan melalui peluncuran beragam produk pembiayaan seperti pembiayaan dengan angsuran fleksibel (BRIFlexy), pembiayaan motor premium bagi karyawan BRI Grup, pembiayaan fasilitas dana KKB BRI (BRIFast) dan program KKB motor baru bagi pekerja kontrak dan outsourcing BRI Group. BRI Finance berupaya memaksimalkan potensi pasar BRI Grup dan mempersiapkan pengembangan pasar bagi debitur umum yang potensial.

BRI Finance berupaya mengoptimalkan pengembangan sistem teknologi untuk meningkatkan bisnis pembiayaan multiguna dilakukan melalui pengembangan aplikasi *mobile* BRI Finance My-BRIF yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap debitur dengan memberi kemudahan memperoleh informasi tentang produk-produk pembiayaan BRI Finance. Pemanfaatan aplikasi My-BRIF juga berguna sebagai sarana pemberian *referral* dari debitur dan agen kepada seluruh unit kerja yang dimiliki BRI Finance.

BRI Finance berupaya menjalin kerjasama yang baik dengan *dealer/showroom* melalui *joint marketing campaign* dalam memperkenalkan produk pembiayaan yang ditawarkan BRI Finance dan menanamkan *value proposition* bagi debitur tentang BRI Finance sebagai perusahaan pembiayaan yang kompetitif dengan servis level yang memuaskan. Pengenalan BRI Finance juga dilakukan dengan memanfaatkan media sosial BRI Finance maupun media komunikasi yang telah dimiliki Entitas Induk.

Pembiayaan sewa operasi BRI Finance terus dikembangkan melalui penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor bagi BRI Grup dan berkembang ke perusahaan BUMN serta debitur korporasi Entitas Induk BRI untuk pengadaan sewa kendaraan operasional. Melalui sinergi yang terjalin dengan BRI Group dan BUMN, BRI Finance akan mengoptimalkan basis data nasabah korporat yang dimiliki BRI Grup untuk memberikan penawaran sewa kendaraan operasional bagi pekerja maupun level manajerial.

Penyaluran pembiayaan investasi dan modal kerja dilakukan secara selektif dengan mengoptimalkan sinergi bersama BRI Grup serta lebih diarahkan pada jenis aset bernilai jual kembali yang relatif tinggi, seperti *truck* dan *forklift*. Pengembangan pembiayaan investasi dilakukan secara *prudent* dengan mengedepankan kualitas portofolio debitur *existing* sedangkan peningkatan pembiayaan modal kerja lebih diarahkan pada *value chain* dan debitur korporasi BRI Grup.

BRI Finance telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pembiayaan berbasis Surat Perintah Kerja (SPK) di bulan September 2020. Untuk itu, BRI Finance telah melakukan pelatihan dan penempatan tenaga pemasar di Divisi *Procurement, Logistic Policy & Fixed Asset Manage* (PLM) dan *Procurement & Logistic Operation* (PLO) Bank BRI guna menggarap potensi pembiayaan SPK yang diterbitkan oleh Bank BRI. Penempatan tenaga pemasar untuk mendukung peningkatan pembiayaan BRI Finance ke depan direncanakan terus dikembangkan dengan menasar BUMN lainnya.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT BRI Multifinance Indonesia

Penetapan *single gateway autoloan* bagi BRI Finance sudah ditetapkan sejak Oktober 2020 menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki BRI Finance. Ekspansi BRI Finance dapat dilakukan melalui penempatan tenaga pemasar pada jaringan unit kerja Bank BRI, sampai dengan Desember 2021 sudah ditempatkan di sebanyak 168 unit kerja. Pengalihan portofolio KKB dari Bank BRI ke BRI Finance sudah selesai dilakukan pada Oktober 2021 sejumlah Rp194,3 Miliar.

Transformasi juga dilakukan dalam 3 (tiga) aspek yaitu model bisnis, *digital*, dan budaya kerja. Transformasi model bisnis dilakukan melalui kerja sama dengan unit kerja Bank BRI untuk penyimpanan dokumen agunan dan penempatan tenaga pemasar. Transformasi *digital* melalui pengembangan aplikasi MyBRIF, Penerapan *scoring system, digital prescreening, digital KYC*, dan pengembangan data *warehouse*. Penyelarasan nilai serta budaya perusahaan dengan BUMN dan Entitas Induk menjadi transformasi budaya di BRI Finance.

Prospek Usaha dan Strategi PT BRI Multifinance Indonesia Tahun 2022

Strategi bisnis BRI Finance di tahun 2022 berfokus pada pengembangan pembiayaan multiguna bertujuan dalam peningkatan total aset dan menjaga kualitas pembiayaan. Produk pembiayaan multiguna yang menjadi fokus pengembangan BRI Finance adalah pembiayaan mobil

baru namun optimalisasi juga akan tetap dilakukan untuk fasilitas dana dan mobil bekas. Target pasar BRI Finance secara umum masih memaksimalkan potensi dari BRI Group dan pengembangan jaringan kerjasama dengan *dealer* dan *supplier*.

Pemasaran produk BRI Finance tahun 2022 akan dilakukan melalui *joint marketing campaign* guna mendukung peningkatan pembiayaan dengan penggunaan biaya operasional yang efektif dan efisien. Kegiatan pemasaran produk pembiayaan BRI Finance bersama *dealer* dan *supplier* sekaligus ditujukan untuk perluasan jaringan kerjasama dan memperkenalkan BRI Finance ke seluruh wilayah Indonesia. BRI Finance akan terus berinovasi dalam pengembangan produk pembiayaan, khususnya pembiayaan multiguna, agar dapat memenangkan debitur dan meningkatkan kontribusi pada pangsa pasar pembiayaan. Untuk mendukung perluasan pangsa pasar, BRI Finance akan memanfaatkan jasa agen pemasar yang juga berperan sebagai *brand ambassador* BRI Finance.

BRI Finance juga mengembangkan laporan keuangan dan profil resiko per unit kerja, hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko BRI Finance dan sebagai media monitoring secara aktif sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Perbaikan kualitas piutang pembiayaan pasca pandemi COVID-19 menjadi salah satu fokus BRI Finance sehingga penyaluran pembiayaan investasi dan modal kerja ke depannya akan dilakukan dengan lebih selektif untuk meminimalkan risiko piutang bermasalah.

Pengembangan sistem pendukung operasional bisnis dari segi teknologi informasi yang akan dilakukan BRI Finance tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan *mobile application* BRI Finance (*My-BRIF*) yang telah dimiliki sejak 2020, berfungsi sebagai sarana pemasaran produk BRI Finance, menjadi media *online* yang dapat memberi informasi seperti rincian kontrak, jumlah piutang dan jadwal jatuh tempo angsuran, serta menjadi media pemberi *referral* yang berasal dari *dealer* maupun agen pemasar kepada seluruh jaringan kerja BRI Finance. Pengembangan aplikasi ini akan mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang saling menguntungkan antara BRI Finance dengan pihak *dealer*, bengkel maupun pengguna otomotif yang dapat membuka peluang pengembangan bisnis BRI Finance untuk memberikan pembiayaan bagi perawatan kendaraan.

2. Pengembangan program *fast track approval* untuk mempercepat proses dan pemberian keputusan kredit.
3. Implementasi dan pengembangan *credit scoring* sebagai *modelling tools* dalam seleksi pengajuan aplikasi sehingga dapat mempercepat proses putusan secara akurat dan meningkatkan mitigasi risiko pembiayaan. Hal ini bertujuan memperkuat pengelolaan manajemen risiko BRI Finance serta kontrol atas kualitas pembiayaan.
4. Pengembangan *payment gateway* dengan beberapa pihak terkait seperti dengan bisnis ritel maupun *mobile payment* (Brimo).
5. Penggunaan *big data* dengan memaksimalkan ketersediaan basis data Entitas Induk BRI sehingga mampu dimanfaatkan secara optimal oleh BRI Finance untuk menganalisis potensi pengembangan bisnis ke depan.
6. Penggunaan data BRI Finance sebagai *business intelligent* untuk mendukung *data driven business* dan mempermudah proses pembuatan laporan ke regulator, pemegang saham, maupun *stakeholders*.

PT BRI VENTURA INVESTAMA (BRI VENTURES)

Pada tahun 2021 BRI Ventures membukukan total aset sebesar Rp2,05 triliun, meningkat 12,53% diandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp1,82 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan total investasi yang terdiri dari penyertaan (*deployment*) saham baru dan pendapatan penyertaan saham *unrealized*. Total investasi 2021 sebesar Rp1,76 triliun, meningkat sebesar 30,99% dibandingkan tahun 2020. Sampai dengan bulan Desember 2021, BRI Ventures telah melakukan penyertaan saham kepada 19 (sembilan belas) *investee*.

Pada periode 2021, BRI Ventures mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp221,74 miliar, yang berasal dari pendapatan penyertaan saham *realized*, pendapatan penyertaan saham *unrealized*, pendapatan *fee* dari pengelolaan dana ventura, laba non operasional BRI Ventures serta efisiensi biaya operasional.

Selama periode 2021, disamping pertumbuhan total investasi yang positif, BRI Ventures juga berhasil melakukan perbaikan kualitas investasinya. Hal ini ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Investment* (NPI) tahun 2021 sebesar 0,001%, membaik dari posisi tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,01%.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT BRI Ventura Investama

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Total Aset	2.047.893	1.822.745	225.148	12,35%
Total Investasi	1.762.529	1.345.586	416.943	30,99%
Laba Bersih	221.735	304.387	(82.652)	(27,15%)
<i>Non Performing Investment</i> (NPI) (%)	0,001%	0,008%	(0,000)	(87,50%)



Strategi PT BRI Ventura Investama Tahun 2021

Fokus pengembangan bisnis BRI Ventures tahun 2021 adalah *Building Capability* yang diuraikan sebagai berikut:

1. BRI Ventures fokus membangun network investor dan *startup digital*.
2. *Co-invest* dengan *leading venture capital*.
3. Kerjasama dengan unit bisnis BRI untuk realisasi *strategic benefits*.
4. Berperan sebagai *general partner* dan mencari investor eksternal untuk Dana Ventura Sembrani Nusantara.
5. Menyelenggarakan program *accelerator startup* UMKM (Sembrani Wira) untuk mendukung percepatan pertumbuhan *startup digital*.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi

PT BRI Ventura Investama

BRI Ventures telah memperoleh lisensi Dana Ventura dari OJK sesuai dengan Surat OJK No. S-2094/NB.111/2020 tanggal 12 Juni 2020. Sehubungan dengan itu, telah dibentuk Kontrak Investasi Bersama (KIB) antara BRI Ventures dan Bank Kustodian dengan dana ventura yang bernama Dana Ventura BVI Saham Alokasi Sembrani Nusantara (Dana Ventura Sembrani Nusantara I atau DVSN I). Selama tahun 2021 BRI Ventures telah melakukan penyertaan saham melalui Dana Ventura kepada 4 (empat) *investee* dan berhasil melakukan *fundraising (capital call)* dari 8 (delapan) *limited partner*.

Selain itu selama periode 2021 BRI Ventures telah merilis program *accelerator* yaitu "Sembrani Wira" untuk para founders yang ingin mengembangkan startupnya. Program ini telah meluluskan sebanyak 13 (tiga belas) *startup* Indonesia terpilih. Selama program berjalan, terdapat 3 (tiga) *startup* finalis mendapatkan pendanaan dari BRI Ventures yang dapat membantu mereka semakin berkembang.

Prospek Usaha dan Strategi

PT BRI Ventura Investama Tahun 2022

Di tahun 2022, BRI Ventures masih memfokuskan kegiatan investasinya pada perusahaan/*startup* di sektor *fintech* maupun *non fintech* yang berpotensi meningkatkan kapabilitas, berdampak positif terhadap bisnis, dan membuka akses untuk ekosistem baru bagi BRI Grup. Dalam berinvestasi pada *startup* dengan kegiatan usaha utama yang tidak berada pada sektor keuangan (*non*

fintech), antara lain di sektor "EARTH" (*education, agro maritime, ritel, transportasi, health*), BRI Ventures menggunakan instrumen dana ventura.

Dalam rangka mewujudkan visi BRI Ventures menjadi Perusahaan Modal Ventura terdepan di Indonesia, BRI Ventures melakukan pengembangan produk/instrumen investasi alternatif guna melengkapi *capital stack* yang sudah ada yang dapat ditawarkan kepada target *investee* BRI Ventures. Inisiatif ini diawali dengan dibentuknya Dana Ventura Sembrani Nusantara I (DVSN I) dan yang terus dikembangkan dengan pembentukan dana ventura baru yang memiliki instrumen pendanaan yang sesuai dengan *appetite* dan tingkat risiko bervariasi seperti sistem bagi hasil (*revenue sharing model*), *venture debt* maupun Investasi di *Intellectual Property* (IP). Selain itu, BRI Ventures juga akan secara aktif melakukan eksplorasi di sektor-sektor oportunistik non konvensional seperti *Direct to Consumer* (D2C) melalui Dana Ventura Sembrani Nusantara II bersama *investor* dan *partner* strategis lainnya.

PT BRI ASURANSI INDONESIA

Aset PT BRI Asuransi Indonesia tahun 2021 sebesar Rp3,83 triliun, meningkat sebesar 25,40% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp3,04 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain penambahan aset tetap diantaranya untuk pengembangan IT BRINS, kenaikan nilai investasi sebesar 36,48% dibandingkan tahun 2020 serta kenaikan cadangan umum (kenaikan laba ditahan) sebesar 31,99% dibandingkan tahun 2020.

Pendapatan premi bruto PT BRI Asuransi Indonesia tahun 2021 sebesar Rp2,01 triliun, meningkat 13,23% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,78 triliun. Hal tersebut karena pertumbuhan premi COB *property* sebesar 57,23%, *liability* sebesar 1,13%, *personal accident* sebesar 28,83%, dan *surety bond* sebesar 137,82% serta pertumbuhan yang signifikan ada pada asuransi mikro sebesar 63,76%.

Ekuitas PT BRI Asuransi Indonesia tahun 2021 meningkat sebesar 24,33% dari Rp1,32 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1,26 triliun di tahun 2021. Peningkatan tersebut karena kenaikan laba tahun berjalan sebesar 41,29% dibandingkan tahun 2020 dan pertumbuhan laba ditahan sebesar 31,99% dibandingkan tahun 2020.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT BRI Asuransi Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	3.838.163	3.048.871	789.292	25,89%
Premi Bruto	999.738	712.199	287.539	40,37%
Ekuitas	1.319.479	1.038.593	280.886	27,04%

Strategi PT BRI Asuransi Indonesia Tahun 2021

Uraian strategi PT BRI Asuransi Indonesia tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan variasi produk asuransi mikro.
2. Ekspansi pasar asuransi mikro ke market BRI dan non BRI.
3. Melakukan optimalisasi bisnis ritel dan mikro.
4. Meningkatkan bisnis korporasi dan BUMN.
5. Mengembangkan asuransi Syariah.
6. Melakukan peningkatan produk, layanan, kualitas bisnis proses secara digital dengan sistem IT yang handal.
7. Peningkatan layanan *call center* yang terintegrasi.
8. Meningkatkan budaya kepatuhan dan pengelolaan eksposur risiko.
9. Pengembangan SDM dengan meningkatkan kompetensi dan kinerja pekerja.
10. Meningkatkan implementasi budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi

PT BRI Asuransi Indonesia

Keunggulan kompetitif dan inovasi yang dimiliki oleh PT BRI Asuransi Indonesia yaitu:

1. PT BRI Asuransi Indonesia memiliki Jaringan kerja sebanyak 91 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.
2. Secara konsisten PT BRI Asuransi Indonesia melakukan Sertifikasi dengan hasil terbaru Rating yang diperoleh $_{id}AA$ dari Pefindo naik dari tahun sebelumnya $_{id}AA-$.
3. Sebagai salah satu perusahaan asuransi umum terkemuka PT BRI Asuransi Indonesia memiliki lebih dari 70 produk termasuk produk unggulan dan produk *customized*.
4. Salah satu perusahaan asuransi umum yang menguasai *market share* asuransi mikro.
5. Pertumbuhan premi, laba, dan rasio keuangan PT BRI Asuransi Indonesia dalam 5 tahun terakhir selalu berada di atas rata-rata industri.
6. Memiliki GRC dan *corporate culture* yang baik (skor profil risiko *low to moderate*)
7. Perusahaan dengan layanan yang semakin berkembang dengan layanan berbasis digitalisasi dan otomasi (misalnya: *e-policy*, *customer care*, dan *claim center*).

Prospek Usaha dan Strategi PT BRI Asuransi Indonesia Tahun 2022

Dengan kondisi pandemi di tahun 2021, perusahaan tetap tumbuh dengan kenaikan premi bruto sebesar 13,23% dan laba 41,29%. Dengan adanya pemulihan ekonomi di tahun 2022, prospek usaha industri asuransi di proyeksikan akan mengalami peningkatan, dilihat dari daya beli masyarakat yang mulai naik dan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi

berbagai elemen dalam kehidupannya. Dengan kondisi tersebut, PT BRI Asuransi Indonesia yakin akan dapat bersaing dan terus meningkatkan pendapat dengan tetap menjalankan proses bisnis sesuai *core* bisnis dengan fokus pada 4 (empat) pilar utama BRINS yaitu mikro, *retail*, *wholesale*, dan syariah.

Adapun strategi PT BRI Asuransi Indonesia di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Generate New Growth Engine
Fokus dalam peningkatan premi dari empat pilar bisnis dan diversifikasi *source of income* melalui sinergi BRI Group dan ekosistem digital, mengoptimalkan potensi untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.
2. Selection of Risk
Pilihan preferensi portfolio (*risk appetite*), prudensi *underwriting*, serta kebijakan reasuransi yang efektif.
3. Business and Culture Transformation
Penguatan efektifitas organisasi dan digitalisasi proses bisnis (BRINESIA).
4. Investment Boost
Peningkatan kapasitas investasi dengan premium *collection ratio* yang baik dan pengelolaan yang *pruden*.
5. Service Quality Improvement
Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas produk, dan sumber daya manusia yang unggul dalam inovasi dan kompetensi.
6. GRC Reinforcement
Peningkatan *risk culture* dan tata kelola yang baik di seluruh fungsi Perusahaan dalam memastikan aktifitas bisnis dan operasional Perusahaan memberikan value bagi seluruh *stakeholder* dengan pertumbuhan yang sehat, sustain, dan patuh pada peraturan yang berlaku.

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Selama tahun 2021, PT BRI Danareksa Sekuritas mencatatkan kinerja keuangan terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan usaha tercatat mengalami peningkatan sebesar Rp127,14 miliar, atau tumbuh 52,98%, dari Rp239,99 miliar di tahun 2020 menjadi Rp367,14 miliar di tahun 2021. Peningkatan kinerja keuangan tersebut didorong oleh kinerja bisnis penjaminan emisi efek (*underwriting*) yang membukukan pendapatan usaha mencapai Rp108,1 miliar, atau naik signifikan dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 sebesar Rp12,4 miliar. Selain itu, dari sisi kinerja perantara perdagangan efek juga mengalami peningkatan dari Rp105,2 miliar menjadi Rp147,3 miliar di tahun 2021. Hal tersebut juga dapat dilihat dari nilai transaksi *brokerage* saham dan obligasi Pemerintah yang juga mengalami peningkatan signifikan. Perusahaan juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp92,8 miliar, tumbuh signifikan dari pencapaian tahun 2020 yang mencatatkan rugi bersih sebesar Rp224,7 miliar.



Tabel Kinerja (Produktivitas) PT BRI Danareksa Sekuritas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	1.143.643	1.095.480	48.163	4,39%
Pendapatan Usaha	367.140	239.996	127.143	52,98%
Akumulasi Nilai Transaksi <i>Brokerage</i>				
Saham	69.334.692	58.891.078	10.443.614	17,73%
Obligasi Pemerintah	255.193.150	214.363.050	40.830.100	19,05%
Obligasi Korporasi	18.769.800	23.680.519	(4.910.719)	(20,74%)

Strategi PT BRI Danareksa Sekuritas Tahun 2021

Di tahun 2021, PT BRI Danareksa Sekuritas melakukan pembaharuan retail *online trading system* (BRIGHTS) sebagai salah satu upaya pengembangan pasar ritel yang mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Selain itu, PT BRI Danareksa Sekuritas juga menerapkan transformasi budaya perusahaan yang merujuk pada pelaksanaan BRlone Culture di BRI Group. Transformasi budaya pelayanan nasabah juga dilakukan Perusahaan dengan optimalisasi *digital asset* terutama dalam kegiatan *marketing* dan literasi untuk nasabah ritel melalui beberapa produk-produk seperti Sapa Mentari, Saham Kramat, *Investalk Series*, Bekal Buat Besok, dan BRIDS Eduvest. Di tengah kondisi yang masih diliputi ketidakpastian pandemi COVID-19 selama 2021, PT BRI Danareksa Sekuritas juga memperkuat tata kelola dan manajemen risiko untuk mendukung setiap kegiatan bisnis.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi

PT BRI Danareksa Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas pertama sekaligus merupakan *pioneer* di pasar modal Indonesia. Dengan bekal pengalaman tersebut dan didukung oleh sinergi dengan BRI Grup, Perusahaan memiliki akses jangkauan terluas di Indonesia melalui *channel* distribusi Induk.

Prospek Usaha dan Strategi

PT BRI Danareksa Sekuritas Tahun 2022

Di tahun 2022, fokus utama PT BRI Danareksa Sekuritas masih dalam pengembangan bisnis ritel dengan tema "*Back on Track: Fokus Pada Pengembangan Bisnis Ritel*". PT BRI Danareksa Sekuritas akan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi dengan perusahaan induk (Bank BRI) untuk mengembangkan bisnis ritel melalui kerjasama sinergi dengan *Wealth Management Group* (WMG) dan Direktorat Usaha Kecil Menengah (UKM) BRI dengan menjadikan nasabah UKM BRI sebagai investor dan pemegang saham BRI, optimalisasi proses akuisisi nasabah melalui integrasi layanan pembukaan rekening pada aplikasi BRlmo BRI, serta program desentralisasi Rekening Dana Nasabah (RDN) BRI untuk mempercepat pertumbuhan RDN BRI di BRIDS. Penguatan dan penyempurnaan layanan berbasis *digital* juga menjadi fokus strategi seperti lanjutan pembaharuan *online trading system*, optimalisasi penggunaan *digital asset*, serta pengembangan produk *fixed income* untuk nasabah ritel.

Dalam rangka peningkatan layanan sebagai *dealer participant*, PT BRI Danareksa Sekuritas berencana untuk mengembangkan bisnis *Exchanged Traded Fund* (ETF) yang dimulai dengan pengembangan sistem pendukung di tahun 2022. Sinergi dengan BRI juga diterapkan untuk penguatan bisnis jasa penjamin emisi dan penasihat keuangan dimana PT BRI Danareksa Sekuritas akan melakukan penetrasi kepada nasabah *corporate banking* serta membentuk tim khusus dalam menangani nasabah BRI terkait *loan structuring*. Dengan sinergi dengan BRI dan Grup BRI, PT BRI Danareksa Sekuritas mencanangkan untuk kembali menjadi penjamin emisi berskala besar (*high profile underwriter*).

Dalam menjalankan bisnis dan strategi di tahun 2022, penguatan Tata Kelola Perusahaan (GCG) tetap dilakukan terutama dari sisi manajemen risiko, kepatuhan dan internal audit. Selain itu sesuai dengan NO.51/POJK.03/2017, Perusahaan untuk pertama kali turut berpartisipasi dalam dukungannya terhadap penerapan *Environmental, Social Responsibility and Governance* (ESG) sehingga penyusunan infrastruktur kebijakan serta sosialisasi dan edukasi kepada karyawan terkait hal tersebut akan dilakukan PT BRI Danareksa Sekuritas di tahun 2022.

PT PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM)

PNM yang didirikan pada tahun 1999 dengan visi menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang saat ini fokus utamanya adalah pemberdayaan perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Pada akhir tahun 2021 melalui 3.673 kantor layanan yang tersebar di 422 kabupaten/kotamadya dan 34 provinsi PNM memberdayakan lebih dari 11 juta nasabah perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dan lebih dari 173 ribu nasabah UMK.

Aset PT Permodalan Nasional Madani tahun 2021 sebesar Rp43,78 triliun, meningkat 38,26% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp31,67 triliun. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari peningkatan aset produktif pembiayaan dimana tahun 2021 mencapai sebesar Rp33,15 triliun meningkat 44,51% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp22,94 triliun.

Dari sisi pendapatan PT Permodalan Nasional Madani membukukan pendapatan tahun 2021 sebesar Rp8,67 triliun, meningkat 50,09% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp5,78 triliun. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari peningkatan pendapatan pembiayaan PNM Mekaar dan ULaMM dimana pada tahun 2021 sebesar Rp8,35 triliun, meningkat 52,14% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp5,49 triliun, sementara pendapatan usaha lainnya meningkat 11,39% dari Rp0,29 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp0,32 triliun pada tahun 2021.

Demikian pula dengan laba bersih PT Permodalan Nasional Madani tahun 2021 yang meningkat sebesar 135,11% dari Rp358,97 miliar di tahun 2020 menjadi Rp843,97 miliar di tahun 2021. Peningkatan tersebut karena peningkatan pendapatan usaha sebesar 50,09% sementara dengan adanya efektifitas dan efisiensi peningkatan beban usaha hanya sebesar 37,62% dari Rp5,56 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp7,65 triliun.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT Permodalan Nasional Madani

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	43.797.911	31.659.127	12.138.784	38,34%
Penyaluran Pembiayaan	50.160	27.395	22.765	83,10%
Outstanding	35.088	24.090	10.998	45,66%

Strategi PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2021

PNM menetapkan strategi dan kebijakan strategis untuk mencapai target perusahaan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Penetrasi pasar yang secara selektif dan efektif. Dalam hal ini, PNM melakukan pemetaan area yang berpotensi dibiayai, memperluas area layanan melalui pembukaan kantor-kantor cabang Mekaar di wilayah potensial dan meningkatkan produktivitas kantor-kantor cabang yang ada, merangkul nasabah-nasabah lama melalui peningkatan kualitas pelatihan/pendampingan nasabah melalui program pengembangan kapasitas usaha, serta melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan bisnis nasabah dalam rangka pengembangan produk.
2. Optimalisasi pendanaan internal serta diversifikasi sumber pendanaan baik dari pasar modal dan perbankan maupun pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah sehingga dapat menekan tingkat suku bunga pinjaman secara keseluruhan.
3. Peningkatan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia, guna mendukung pemberdayaan nasabah perempuan prasejahtera dan pelaku usaha mikro kecil, PNM mengoptimalkan program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan baik secara luring dan daring untuk meningkatkan kompetensi terutama bagi karyawan milenial dan perempuan, dan meningkatkan anggaran kesehatan karyawan guna mendukung peningkatan produktivitas karyawan secara keseluruhan dalam mencapai target perusahaan.
4. Mendukung program pemerintah dalam kaitannya membatasi penyebaran COVID-19, melalui pelaksanaan kegiatan bisnis dan pendukung operasional dengan mengikuti protokol era baru dan disesuaikan dengan kondisi peraturan dan kebijakan wilayah setempat sehingga kegiatan pemberdayaan nasabah tetap dapat berjalan.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT Permodalan Nasional Madani

PNM menekankan pemberdayaan UMK melalui pemberian pendampingan dan pelatihan usaha kepada para nasabah disamping pemberian permodalan bagi pelaku usaha utamanya melalui pembiayaan berbasis kelompok kepada para nasabah perempuan. Selain itu, PNM juga mendukung program *Sustainable Development Goals* diantaranya pembiayaan untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan air bersih serta pembiayaan untuk renovasi sarana/prasarana usaha para nasabah.

Pemanfaatan teknologi dan informasi juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabah dan mendukung kegiatan bisnis dan operasional sehingga produktivitas kinerja dapat ditingkatkan, selain itu dengan sinergi *Holding Ultra Mikro* diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Strategi Pencapaian Kegiatan Usaha

Guna tercapainya target jumlah 12 juta nasabah kelompok perempuan prasejahtera tersebut, PT Permodalan Nasional Madani berencana memperluas jaringan layanan sebanyak 101 kantor cabang Mekaar (52 diantaranya direncanakan merupakan kantor cabang syariah) sehingga jumlah kantor layanan pada akhir Desember 2022 sebanyak 62 kantor cabang ULaMM, 626 unit ULaMM dan 3.086 kantor cabang Mekaar serta 415 kantor Co-Location sinergi *Holding Ultra Mikro*. Manajemen juga berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas SDM sehingga sejalan dengan kebutuhan bisnis PNM.

Untuk bisnis pembiayaan ultra mikro melalui Mekaar masih tetap difokuskan pada pembiayaan berbasis kelompok kepada para perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro

dimana jumlahnya masih cukup besar dan belum tergarap secara maksimal. Selain itu adanya sinergi Holding Ultra Mikro memberikan kesempatan sinergi bisnis melalui UMi Corner yang berujung pada peningkatan pelayanan kepada nasabah atas diversifikasi produk yang ada serta pencapaian target bisnis perusahaan secara keseluruhan.

Untuk bisnis pembiayaan mikro melalui ULaMM pada tahun 2022 akan difokuskan pada pembiayaan kepada pelaku UMK individu dengan plafon maksimal Rp50 juta dalam rangka pemberdayaan berkelanjutan bagi nasabah Mekaar yang ingin dan dinilai sudah mampu untuk mengembangkan kapasitas usahanya.

Selain menyalurkan pembiayaan, perusahaan menyadari bahwa kegiatan pendampingan usaha, pelatihan kepada nasabah serta pembentukan klaster usaha nasabah dapat membantu para nasabah meningkatkan kapasitas usaha mereka, hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat retensi nasabah sehingga dapat meningkatkan persentase jumlah nasabah yang lanjut.

Dari sisi pendanaan, selain dari modal sendiri PT Permodalan Nasional Madani akan melakukan diversifikasi sumber pendanaan baik dari pasar modal, perbankan maupun pemerintah hal ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan penyaluran pembiayaan serta untuk menekan biaya pendanaan.

Inisiatif Strategis PT Permodalan Nasional Madani Tahun 2022

Pada tahun 2022 PT Permodalan Nasional Madani menerapkan beberapa inisiatif strategi utama, yakni perluasan penerima manfaat pemberdayaan UMi dan peningkatan pembiayaan nasabah UMi berkelanjutan, peningkatan laba usaha dan pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas disertai dengan peningkatan kualitas

sumber daya manusia termasuk pengembangan talenta perempuan dan milenial serta pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung digitalisasi proses bisnis dan operasional disertai penguatan manajemen risiko dan tetap memperhatikan tata kelola perusahaan sesuai *Good Corporate Governance*.

PT PEGADAIAN

Pertumbuhan kinerja aset PT Pegadaian tahun 2021 mencapai Rp65,72 triliun atau turun secara YoY sebesar 8,04%. Penurunan pertumbuhan aset ini dipengaruhi oleh komponen terbesar yaitu *outstanding loan* yang turun 8,79% dari tahun 2020 yaitu dari Rp57,47 triliun menjadi Rp52,42 triliun akibat penurunan harga emas sehingga terjadi peningkatan jumlah lelang tahun 2021 dan dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penyaluran kredit non gadaai yang selektif.

Dari sisi pendapatan PT Pegadaian membukukan pendapatan tahun 2021 sebesar Rp20,64 triliun atau turun 6,02% YoY dari realisasi tahun 2020 yang sebesar Rp21,96 triliun. Penurunan pendapatan usaha ini tidak terlepas dari pencapaian bisnis dalam penyaluran pinjaman ke nasabah yang mengalami penurunan, sehingga berdampak khususnya pada turunnya pendapatan sewa modal sebesar 5,20%, disamping juga adanya penurunan yield pendapatan sewa modal akibat adanya program relaksasi dan restrukturisasi kredit kepada nasabah.

Laba usaha PT Pegadaian tahun 2021 yang meningkat sebesar 16,03% dari Rp2,79 triliun di tahun 2020 menjadi Rp3,24 triliun di tahun 2021. Meskipun *outstanding loan* yang disalurkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari segi biaya usaha mengalami penghematan sehingga PT Pegadaian masih membukukan laba dengan pertumbuhan positif.

Tabel Kinerja (Produktivitas) PT Pegadaian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Nominal)	(%)
Aset	65.156.475	70.830.542	(5.674.067)	(8,01%)
Pembiayaan (<i>Outstanding Loan/OSL Gross</i>)	52.419.756	57.474.599	(5.054.843)	(8,79%)
Laba Usaha	3.238.648	2.791.259	447.389	16,03%

Strategi PT Pegadaian Tahun 2021

Di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global dan nasional, semangat pemulihan ekonomi di era pandemi, serta terangkatnya tren *digital* di era *force contactless*, maka pada tahun 2021 PT Pegadaian mengusung tema Penguatan *Core Business* dan Perluasan Bisnis *Digital*, dengan fokus strategi yang menitikberatkan pada:

1. Peningkatan nilai ekonomi dan sosial, dengan melakukan integrasi/sinergi layanan ultra mikro, perluasan inklusi keuangan, serta mendukung program *sustainable development goals*.
2. *Customer experience*, melalui peningkatan *customer intimacy* untuk *maintaining* basis jumlah nasabah dan loyalitas

nasabah, standarisasi outlet dan layanan, serta optimalisasi *customer touchpoint* melalui teknologi dan layanan yang mampu memberikan *seamless*, efektivitas dan efisiensi.

3. Diversifikasi produk dan *customer*, dengan melakukan intensifikasi pasar untuk menangkap *specific target market*, pengembangan *feebased*, serta *monetizing* nasabah eksisting untuk memaksimalkan *repeat order* nasabah dan mendorong nasabah untuk menggunakan produk/layanan lain.
4. Pengembangan kapabilitas, dengan pengembangan budaya dan kapabilitas organisasi dan SDM, pemberdayaan talenta internal, serta penguatan infrastruktur dan pengembangan IT.

5. Inovasi berkelanjutan, merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam bentuk inovasi *digital*, *partnership*, dan pengembangan fitur baru guna menjamin *sustainability* PT Pegadaian.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi PT Pegadaian

Mendorong langkah inovasi dalam rangka memperkuat daya saing dan penyediaan produk/layanan yang terbaik bagi nasabah dan mitra PT Pegadaian, khususnya dalam memanfaatkan penggunaan teknologi dan perubahan budaya masyarakat yang terjadi selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, adanya program-program *marketing* dan penjualan yang beragam, penguatan produk berbasis gadai, optimalisasi produk non KCA/ *Rahn*, optimalisasi *digital leads* dan *co-location*.

Prospek Usaha dan Strategi PT Pegadaian Tahun 2022

Dengan dilatarbelakangi atas semangat pemulihan ekonomi nasional, sinergi ultra mikro dan iklim industry yang semakin kolaboratif, efisiensi biaya operasional, kemajuan teknologi berbasis *society (industry 5.0)*, serta perkembangan *culture* dan pola kerja SDM yang lebih *agile* dan *result oriented*, maka

PT Pegadaian pada tahun 2022 mengusung tema Perluasan Ekosistem yang *Inklusif* dan *Empowering* dengan fokus strategi yang akan dititikberatkan pada:

1. *Business acceleration*, meliputi pengembangan produk/fitur/ dan proses bisnis beserta implementasi yang berorientasi pada *new revenue stream* dan peningkatan kinerja bisnis gadai dan non gadai.
2. *Market expansion*, melalui sinergi ultra mikro dan fokus pada penambahan jumlah nasabah dengan peningkatan *customer experience*, perluasan *outreach*, penguatan agen dan *partnership*, serta *monetizing* nasabah potensial.

3. *Productivity and efficiency*, meliputi peningkatan kapabilitas SDM serta IT dan *digital*, dan mengembangkan sistem *talent management* yang terintegrasi secara komprehensif untuk mendapatkan SDM yang unggul, disamping itu fokus pada efisiensi proses bisnis antara lain melalui otomasi untuk percepatan bisnis dan operasional, serta mereduksi *errors*.
4. *Sustainable future*, fokus untuk peningkatan kualitas aset produktif, dan program peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk meningkatkan *value added* PT Pegadaian.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi

Meskipun masih berada dalam masa masa pemulihan ekonomi yang terdampak akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021, secara umum laba BRI tetap mampu mencatat pertumbuhan laba bersih sebesar 64,82%. Segmen Mikro yang merupakan segmen utama Perseroan menunjukkan performa yang solid dengan perolehan laba bersih Rp17,21 triliun hal ini membuktikan bahwa segmen UMKM khususnya Mikro memiliki resiliansi yang sangat kuat meskipun diterpa krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 serta menandakan bahwa Perseroan semakin fokus untuk mengembangkan Segmen Mikro.

Pertumbuhan laba bersih Perseroan tidak terlepas dari pertumbuhan NII sebesar 27,51% *year on year* yang utamanya didorong oleh efisiensi beban bunga Perseroan dimana pada tahun 2021 berhasil mencatatkan COF sebesar 2,05% atau terendah sepanjang sejarah.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2021

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021					Total
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	
Pendapatan bunga dan premi - neto	51.845.156	25.577.930	3.058.623	15.337.403	19.318.392	115.137.504
Pendapatan operasional lainnya	12.331.701	11.402.685	2.746.155	5.919.971	8.815.296	41.215.807
Total pendapatan	64.176.857	36.980.615	5.804.778	21.257.374	28.133.687	156.353.311
Beban operasional lainnya	(33.277.144)	(18.137.277)	(1.823.531)	(1.539.750)	(21.140.406)	(75.918.108)
Beban CKPN	(11.112.437)	(10.612.154)	(11.775.361)	(518.124)	(5.272.745)	(39.290.821)
Total beban	(44.389.581)	(28.749.431)	(13.598.892)	(2.057.874)	(26.413.151)	(115.208.929)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(9.875)	(61.529)	(101.586)	(30.149)	50.822	(152.317)
Laba sebelum beban pajak	19.777.401	8.169.655	(7.895.700)	19.169.351	1.771.358	40.992.065
Beban pajak	(2.571.062)	(1.877.540)	-	(2.556.644)	(830.362)	(7.835.608)
Laba sebelum laba bersih pro forma dari transaksi akuisi dengan Entitas sependangali	17.206.339	6.292.115	(7.895.700)	16.612.707	940.996	33.156.457
Laba bersih pro forma dari transaksi akuisi dengan entitas sependangali	-	-	-	-	(2.400.691)	(2.400.691)
Laba Bersih	17.206.339	6.292.115	(7.895.700)	16.612.707	(1.459.695)	30.755.766



Uraian	2021					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Aset segmen						
Kredit	396.959.250	374.318.653	172.424.789	-	50.713.831	994.416.523
CKPN	(22.351.340)	(21.679.657)	(36.880.215)	-	(3.922.521)	(84.833.734)
Non kredit	-	-	39.855.985	658.546.201	55.806.177	754.208.363
CKPN Non Kredit	-	-	(1.630.470)	(326.555)	(21.291)	(1.978.316)
	374.607.910	352.638.995	173.770.090	658.219.646	102.576.195	1.661.812.836
Liabilitas segmen						
Pendanaan	356.268.411	429.700.844	341.879.461	-	10.894.499	1.138.743.215
Non pendanaan	-	-	16.435.156	142.059.534	89.073.025	247.567.715
	356.268.411	429.700.844	358.314.617	142.059.534	99.967.524	1.386.310.930

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2020

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2020					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	35.234.044	27.969.778	4.685.993	7.257.183	19.315.825	94.462.823
Pendapatan operasional lainnya	9.074.782	12.020.213	3.583.072	3.752.066	9.669.622	38.099.755
Total pendapatan	44.308.826	39.989.991	8.269.065	11.009.249	28.985.447	132.562.578
Beban operasional lainnya	(19.658.307)	(18.911.219)	(3.129.596)	(4.697.136)	(21.107.591)	(67.503.849)
Beban CKPN	(12.370.463)	(12.654.674)	(3.488.650)	(2.475.351)	(4.290.890)	(35.280.028)
Total beban	(32.028.770)	(31.565.893)	(6.618.246)	(7.172.487)	(25.389.481)	(102.783.877)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(38.614)	37.234	(30.077)	833	245.329	214.705
Laba sebelum beban pajak	12.241.442	8.461.332	1.620.742	3.837.595	3.832.295	29.993.406
Beban pajak	(3.653.469)	(2.525.292)	(483.712)	(1.145.335)	(1.144.163)	(8.951.971)
Laba sebelum laba bersih proforma dari transaksi akuisisi dengan entitas sependangali	8.587.973	5.936.040	1.137.030	3.692.260	2.688.132	21.041.435
Laba bersih proforma dari transaksi akuisisi dengan entitas sependangali	-	-	-	-	(2.381.042)	(2.381.042)
Laba Bersih	8.587.973	5.936.040	1.137.030	2.692.260	307.090	18.660.393
Aset segmen						
Kredit	351.356.224	360.333.387	168.985.146	-	61.112.877	943.787.634
CKPN Kredit	(17.107.904)	(18.587.559)	(28.433.803)	-	(2.698.285)	(66.827.551)
Non kredit	-	-	-	599.948.908	30.709.926	630.658.834
CKPN Non Kredit	-	-	-	(2.314.494)	(18.810)	(2.333.304)
	334.248.320	341.745.828	140.551.343	597.634.414	89.311.178	1.503.491.083
Liabilitas segmen						
Pendanaan	335.422.171	410.298.277	306.943.422	-	34.891.303	1.087.555.173
Non pendanaan	-	-	-	174.762.035	16.029.068	190.791.103
	335.422.171	410.298.277	306.943.422	174.762.035	50.920.371	1.380.598.462

Tabel Pertumbuhan Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi Tahun 2020-2021

(dalam %)

Uraian	Pertumbuhan 2020-2021					Total
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	
Pendapatan bunga dan premi - neto	47,15%	(8,55%)	(34,73%)	111,34%	290,70%	43,76%
Pendapatan operasional lainnya	35,89%	(5,14%)	(23,36%)	57,78%	752,79%	39,89%
Total pendapatan	44,84%	(7,53%)	(29,80%)	93,09%	370,60%	42,72%
Beban operasional lainnya	69,28%	(4,09%)	(41,73%)	(67,22%)	498,01%	52,04%
Beban CKPN	(10,17%)	(16,14%)	237,53%	(79,07%)	183,37%	19,61%
Total beban	38,59%	(8,92%)	105,48%	(71,31%)	389,51%	39,17%
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(74,43%)	(265,25%)	237,75%	(3719,21%)	(371,86%)	208,85%
Laba sebelum beban pajak	61,56%	(3,45%)	(587,17%)	399,51%	214,22%	53,39%
Beban pajak	(29,63%)	(25,65%)	(100,00%)	123,22%	223,55%	(2,84%)
Laba sebelum laba bersih pro forma dari transaksi akuisisi dengan Entitas sependangali	100,35%	6,00%	(794,41%)	517,05%	(64,99%)	57,58%
Laba bersih pro forma dari transaksi akuisisi dengan entitas sependangali	-	-	-	-	0,83%	0,83%
Laba Bersih	100,35%	6,00%	(794,41%)	517,05%	(575,33%)	64,82%
Aset segmen						
Kredit	12,98%	3,88%	2,04%	-	(17,29%)	5,57%
CKPN	30,65%	16,64%	29,71%	-	45,37%	26,94%
Non kredit	-	-	-	9,77%	81,72%	19,59%
CKPN Non Kredit	-	-	-	(85,89%)	1.031,90%	(15,21%)
	12,07%	3,19%	23,63%	10,14%	14,85%	10,53%
Liabilitas segmen						
Pendanaan	6,22%	0,55%	16,96%	-	(68,78%)	4,71%
Non pendanaan	-	-	-	(18,71%)	454,88%	29,75%
	6,22%	0,55%	22,35%	(18,71%)	96,06%	8,44%

Segmen Geografis

Penjelasan Segmen Geografis

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Timor-Leste dan Taiwan.

Produktivitas, Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

Secara kinerja berdasarkan Geografis wilayah Indonesia menempati komposisi utama, memang hal ini dikarenakan fokus Perseroan untuk lebih mengoptimalkan potensi yang ada di dalam negeri. Tercatat sampai dengan akhir tahun 2021 kinerja di wilayah Indonesia mengalami pertumbuhan tahunan yang baik dimana aset tercatat tumbuh 3,3%, pendapatan tumbuh 18,08% dan Laba sebelum pajak tumbuh



37,34%. Meskipun fokus pada pertumbuhan yang ada di dalam negeri, Perseroan juga memiliki unit kerja yang berada di luar negeri untuk menangkap peluang bisnis yang ada, pada tahun 2021 Perseroan secara resmi telah menambah satu perwakilan baru di Taiwan. Seluruh Unit kerja Perseroan yang berada di luar wilayah Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan aset dan pendapatan yang positif meskipun terdapat sedikit penurunan pendapatan di beberapa unit kerja dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya pulih di wilayah tersebut.

Tabel Produktivitas, Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Geografis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			(Rp)	(%)
PENDAPATAN				
Indonesia	155.591.153	131.771.610	23.819.543	18,08%
Amerika Serikat	472.261	510.377	(38.116)	(7,47%)
Singapura	184.666	170.540	14.126	8,28%
Timor Leste	95.089	101.482	(6.393)	(6,30%)
Hong Kong	10.097	8.569	1.528	17,83%
Taiwan	45	-	45	100,00%
Total Pendapatan	156.353.311	132.562.578	23.790.733	17,95%
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK				
Indonesia	40.556.868	29.529.835	11.027.033	37,34%
Amerika Serikat	275.570	275.445	125	0,05%
Singapura	96.861	124.907	(28.046)	(22,45%)
Timor Leste	70.013	62.597	7.416	11,85%
Hong Kong	2.120	622	1.498	240,84%
Taiwan	(9.367)	-	(9.367)	(100,00%)
Total Laba Sebelum Pajak	40.992.065	29.993.406	10.998.659	36,67%
ASET				
Indonesia	1.622.979.782	1.567.580.966	55.398.816	3,53%
Amerika Serikat	21.170.200	19.708.131	1.462.069	7,42%
Singapura	15.513.263	11.695.606	3.817.657	32,64%
Timor Leste	2.016.606	1.186.169	830.437	70,01%
Hong Kong	13.094	8.482	4.612	54,37%
Taiwan	119.891	-	119.891	100%
Total Aset	1.661.812.836	1.600.179.354	61.633.482	3,85%
LIABILITAS				
Indonesia	1.348.381.407	1.349.059.048	(677.641)	(0,05%)
Amerika Serikat	20.664.957	18.970.475	1.694.482	8,93%
Singapura	15.297.947	11.500.136	3.797.811	33,02%
Timor Leste	1.834.188	1.067.486	766.702	71,82%
Hong Kong	3.231	1.317	1.914	145,33%
Taiwan	129.200	-	129.200	100%
Total Liabilitas	1.386.310.930	1.380.598.462	5.712.468	0,41%

» Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, dan Surja (*Member of Ernst and Young Global*) dan mendapat opini wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip PSAK yang berlaku, untuk tahun 2021 akan terdapat penyajian khusus terkait PSAK 38 (Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali) sehubungan dengan adanya akuisisi Pegadaian dan PNM. Dengan adanya penerapan PSAK 38 ini akan berdampak pada penyajian laporan keuangan Perseroan yang mengharuskan adanya restatement (penyajian kembali) pada tahun 2020 dan 2021, dimana seolah-olah Pegadaian dan PNM telah diakuisi penuh sejak awal tahun 2020 dan 2021, namun setelah laba bersih akan terdapat pos pengurang laba untuk mengembalikan posisi laba bersih kembali sesuai kondisi sebelumnya.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan BRI terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020* (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
ASET				
Kas	26.299.973	32.274.988	(5.975.015)	(18,51%)
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	51.530.969	4.895.604	9,50%
Giro dan Penempatan pada bank lain - Neto	73.012.684	80.005.759	(6.993.075)	(8,74%)
Efek-efek, Wesel Ekspor, Reverse Repo dan Tagihan Lainnya	455.174.902	400.022.060	55.152.842	13,79%
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	-	-	-	-
Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	1.042.867.653	1.020.192.968	22.674.485	2,22%
CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	(87.829.417)	(70.394.653)	(17.434.764)	24,77%
Tagihan Derivatif - Neto	730.083	1.576.659	(846.576)	(53,69%)
Tagihan Akseptasi - Neto	9.066.005	6.271.176	2.794.829	44,57%
Penyertaan Saham - Neto	6.071.727	1.500.329	4.571.398	304,69%
Aset Tetap - Neto	47.970.187	43.706.632	4.263.555	9,75%
Aset Pajak Tangguhan - neto	16.284.898	9.885.990	6.398.908	64,73%
Aset Lain-lain - neto	32.022.666	33.492.467	(1.469.801)	78,58%
TOTAL ASET	1.678.097.734	1.610.065.344	68.032.390	4,23%

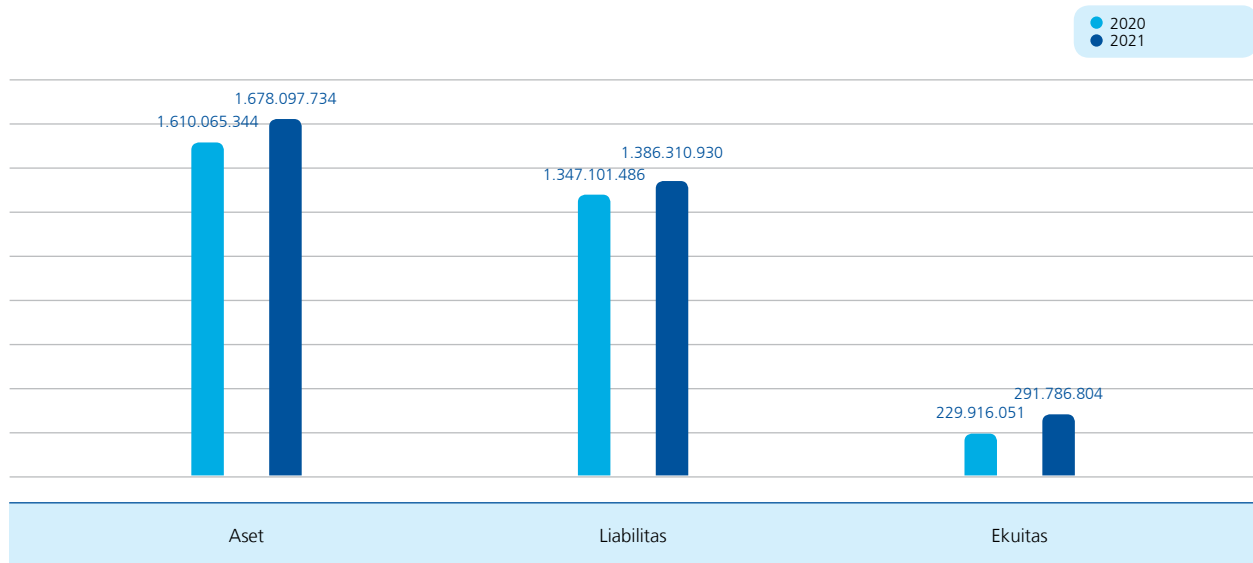


Uraian (1)	2021 (2)	2020* (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER				
Simpanan Nasabah*	1.138.743.215	1.120.921.926	17.821.289	1,59%
Giro	220.590.197	191.106.429	27.860.205	14,46%
Tabungan	497.676.739	469.918.971	21.610.753	4,54%
Deposito	420.476.279	426.399.550	(31.649.669)	(7,00%)
Liabilitas Segera	18.735.387	15.473.574	3.261.813	21,08%
Simpanan dari Bank lain	13.329.434	23.785.997	(10.456.563)	(43,96%)
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	29.408.508	40.478.672	(11.070.164)	(27,35%)
Pinjaman diterima	68.458.547	72.164.236	(3.705.689)	(5,14%)
Surat Berharga yang Diterbitkan Kembali	55.306.697	57.757.028	(2.450.331)	(4,24%)
Liabilitas Lain-lain	62.329.142	50.017.029	12.312.113	24,62%
TOTAL LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER	1.386.310.930	1.347.101.486	5.712.468	0,41%
EKUITAS				
Modal Saham	7.577.950	6.167.291	1.410.659	22,87%
Tambahan modal disetor	76.242.898	3.411.813	72.831.085	2.134,67%
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	17.006.230	17.099.207	(92.977)	(0,54%)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(115.975)	(54.749)	(61.226)	111,83%
Cadangan kompensasi atas saham bonus	210.266	1.228.805	(1.018.539)	(82,89%)
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan Komprehensif lain - bersih	1.949.387	4.623.064	(2.673.677)	(57,83%)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan Komprehensif lain	547.026	975.877	(428.851)	(43,95%)
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(1.423.685)	(1.469.726)	46.041	(3,31%)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(45.997)	(1.649.076)	1.603.079	(97,21%)
Opsi saham	19.255	72.894	(53.639)	(73,58%)
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	1.758.580	-	1.758.580	100,00%
Ekuitas merging entity	-	29.538.484	(29.538.484)	(100,00%)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685	0	-
Belum ditentukan penggunaannya	181.986.363	163.949.482	18.036.881	10,80 %
Total Entitas yang dapat diatribusikan	288.734.983	226.916.051	79.906.978	40,48%
Kepentingan non-pengendali	3.051.821	2.550.831	464.418	18,33%
Total Ekuitas	291.786.804	229.446.882	62.319.922	27,16%
Total Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	1.678.097.734	1.610.065.344	68.032.390	4,23%

*) Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38

Grafik Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)



Aset

Posisi Aset BRI pada 31 Desember tahun 2021 tercatat sebesar Rp1.678.097.734 juta, meningkat 4,23% dibandingkan pada akhir tahun 2020 yang sebesar Rp1.610.065.344 juta. Kenaikan aset ini antara lain dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa akun seperti, Giro pada bank lain, Penyertaan Saham, dan Aset Pajak Tangguhan.

Tabel Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
Kas	26.299.973	32.274.988	(5.975.015)	(18,51%)
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	51.530.969	4.895.604	9,50%
Giro dan Penempatan pada bank lain - Neto	73.012.684	80.005.758	(6.993.074)	(8,74%)
Efek-efek, Wesel Ekspor, Reverse Repo dan Tagihan Lainnya	455.174.902	400.022.059	55.152.842	13,79%
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah	-	-	-	-
Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	1.042.867.453	1.020.197.140	22.670.485	2,22%
CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	(87.829.417)	(70.394.652)	(17.434.765)	24,77%
Tagihan Derivatif - Neto	730.083	1.576.659	(846.576)	-53,69%
Tagihan Akseptasi - Neto	9.066.005	6.271.176	2.794.829	44,57%
Penyertaan Saham - Neto	6.071.727	1.496.156	4.575.571	305,82%
Aset Tetap - Neto	47.970.187	43.892.559	4.263.555	9,75%
Aset Pajak Tangguhan - neto	16.284.898	10.002.746	6.398.908	64,73%
Aset Lain-lain - neto	32.022.666	33.493.207	(1.469.801)	78,58%
TOTAL ASET	1.678.097.734	1.610.368.765	68.032.390	4,23%



Kas

Posisi Kas BRI pada 31 Desember tahun 2021 tercatat sebesar Rp26.299.973 juta, mengalami penurunan sebesar 18,51% dibandingkan akhir tahun 2020 yang sebesar Rp32.274.988 juta. Penurunan kas ini terutama pada Rupiah yang mengalami penurunan sebesar 19,84%. Penurunan Kas ini merupakan strategi Perseroan mengelola likuiditas dalam operasional bisnis.

Tabel Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	25.083.698	31.291.635	(6.207.937)	(19,84%)
Mata uang asing				
Dolar Amerika Serikat	549.934	443.966	105.968	23,87%
Ringgit Malaysia	351.840	33.962	317.878	935,98%
Dolar Singapura	117.029	156.601	(39.572)	(25,27%)
Riyal Arab Saudi	94.858	102.319	(7.461)	(7,29%)
Dolar Taiwan	40.010	90.169	(50.159)	(55,63%)
Euro Eropa	25.263	48.893	(23.630)	(48,33%)
Yen Jepang	8.909	21.929	(13.020)	(59,37%)
Dirham Uni Emirat Arab	6.462	9.842	(3.380)	(34,34%)
Dolar Australia	5.508	39.015	(33.507)	(85,88%)
Renminbi	4.413	3.166	1.247	39,39%
Dolar Hong kong	3.937	8.884	(4.947)	(55,68%)
Dolar Brunei Darussalam	2.233	4.931	(2.698)	(54,72%)
Dolar Selandia Baru	1.568	2.643	(1.075)	(40,67%)
Pound Sterling Inggris	1.346	4.358	(3.012)	(69,11%)
Franc Swiss	851	3.250	(2.399)	(73,82%)
Kina Papua Nugini	648	561	87	15,51%
Baht Thailand	619	5174	(4.555)	(88,04%)
Dolar Kanada	392	1.134	(742)	(65,43%)
Won Korea Selatan	252	508	(256)	(50,39%)
Rupiah India	127	125	2	1,60%
Peso Filipina	62	566	(504)	(89,05%)
Dong Vietnam	14	1.357	(1.343)	(98,97%)
	1.216.275	983.353	232.922	23,69%
Total	26.299.973	32.274.988	(5.975.015)	(18,51%)

Giro pada Bank Indonesia

Saldo Giro pada Bank Indonesia (BI) mencapai Rp56.426.573 juta pada 31 Desember 2021, atau naik 9,50% dibandingkan akhir tahun 2020 yang sebesar Rp51.530.969 juta. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan Simpanan Perseroan. Rata maksimal bulanan pada tahun 2021 (*bank only*) sebesar Rp1.077.520 juta naik 7,01% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.006.960 juta.

Tabel Giro pada Bank Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah	47.402.684	43.139.976	4.262.708	9,88%
Dolar Amerika Serikat	9.023.889	8.390.993	632.897	7,54%
Total	56.426.573	51.530.969	4.895.605	9,50%

Giro pada Bank Lain - Neto

Giro pada Bank lain mengalami peningkatan 15,31% pada 31 Desember 2021 menjadi Rp14.036.019 juta dari Rp12.172.423 juta pada akhir tahun 2020. Kenaikan yang cukup signifikan pada beberapa bank seperti, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dan JP Morgan Chase Bank. Kenaikan ini tersebut dalam rangka optimalisasi likuiditas yang dimiliki oleh BRI guna dialihkan ke aset yang memiliki yield yang lebih optimal.

Tabel Giro Pada Bank Lain Berdasarkan Mata Uang

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga				
Rupiah				
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	522.520	20.954	501.926	2.437,24%
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	188.980	85.435	103.545	121,20%
PT Bank Central Asia Tbk	120.740	270.888	(150.148)	(55,43%)
PT Bank Permata Tbk	88.348	80.644	7.704	9,55%
PT Bank MNC Internasional Tbk	76.444	16.091	60.353	375,07%
PT Bank Mega Syariah	74.361	141.626	(67.265)	(47,49%)
Lainnya	246.953	232.463	14.490	6,25%
	1.318.346	848.101	470.605	55,51%
Mata uang asing				
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	3.863.022	2.925.377	937.645	32,05%
Standard Chartered Bank	1.461.687	1.764.602	(302.915)	(17,17%)
Citibank N.A.	938.559	429.023	509.536	(118,77%)
Bank of America	795.892	576.623	219.269	38,03%
The Bank of New York Mellon	711.845	190.116	521.729	274,43%
Bank of China, Ltd	438.909	338.481	100.428	29,67%
MUFG Bank, Ltd.	414.669	528.333	(113.664)	(21,51%)
Lainnya	2.139.574	2.048.016	91.558	4,47%
	10.764.157	8.800.571	1.963.586	22,31%
	12.082.503	9.648.672	2.433.831	25,23%



Tabel Giro Pada Bank Lain Berdasarkan Mata Uang

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pihak berelasi				
Rupiah				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.056.092	849.706	206.386	24,29%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	504.703	1.163.378	(658.672)	(56,62%)
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	209.764	-	209.764	100,00%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	177.787	368.557	(190.770)	(51,76%)
PT Bank Syariah Mandiri	-	87.855	(87.855)	(100,00%)
PT Bank BNI Syariah	-	92.326	(92.236)	(100,00%)
	1.948.346	2.561.822	(613.476)	(223,94)
Mata uang asing				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.478	7.730	11.748	151,98%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.770	48.042	(33.272)	(69,26%)
	34.248	55.772	(21.524)	(38,59%)
	1.982.594	2.617.594	(635.000)	(24,26%)
Total	14.065.097	12.266.266	1.795.831	14,64%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.078)	(93.843)	64.765	69,01%
Bersih	14.036.019	12.172.423	1.863.596	15,31%

Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain menurun 13,06% pada 31 Desember 2021 menjadi Rp58.976.665 juta dari Rp67.833.336 juta pada akhir tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan adanya optimalisasi dana yang dimiliki oleh Perseroan kepada aset produktif lain yang memiliki *yield* yang lebih optimal

Tabel Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain Berdasarkan Mata Uang dan Jenis

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Pihak ketiga				
Rupiah				
Bank Indonesia	27.369.392	6.881.518	20.484.874	297,72%
Inter-bank call money	303.788	1.087.350	(783.562)	(72,06%)
Deposito Berjangka	922.842	718.870	203.972	28,37%
Deposit on Call	23.700	13.100	10.600	80,92%
	28.619.722	8.700.838	19.918.884	228,93%
Dolar Amerika Serikat				
Bank Indonesia	21.378.726	49.102.412	(27.723.686)	(56,46%)
Inter-bank call money	5.508.950	7.683.163	(2.174.213)	(28,30%)
Deposito berjangka	768.231	106.999	661.232	617,98%
Penempatan lainnya	142.525	342.118	(199.593)	(58,34%)
Dolar Singapore		8.476	(8.476)	(100,00%)
	27.798.432	57.243.168	(29.444.736)	(51,44%)
	56.418.154	65.944.006	(9.525.852)	(14,45%)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi				
Rupiah				
<i>Inter-bank call money</i>	7.000	-	7.000	100,00%
Deposit on Call	-	3.000	(3.000)	(100,00%)
Deposito berjangka	1.177.350	850.650	326.699	38,41%
	1.184.350	853.650	330.699	38,74%
Dolar Amerika Serikat				
<i>Inter-bank call money</i>	1.211.463	1.053.750	157.713	14,97%
Deposito berjangka		-		
	1.211.463	1.053.750	157.713	14,97%
Dolar Singapura				
<i>Inter-bank call money</i>	168.875	-	168.875	100,00%
	168.875	-	(8.868.564)	(13,07%)
Total	58.982.842	67.851.406	11.863	(65,65%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.177)	(18.070)	(8.856.671)	13,06%
Bersih	58.976.665	67.833.336	(8.856.671)	(13,06%)

Efek-Efek Neto

Pada 31 Desember 2021 posisi Efek-efek BRI sebesar Rp371.737.528 juta atau naik sebesar 13,70% dari posisi tahun 2020 sebesar Rp326.956.678 juta. Kenaikan ini bersumber dari efek-efek klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sebesar 6,6% dan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi sebesar 37,50%. Kenaikan tersebut terutama dalam rangka optimalisasi excess likuiditas sebagai dalam rangka *yield enhancement*.

Tabel Efek-Efek Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga				
Rupiah	13.604.052	8.422.016	5.182.036	61,53%
Mata uang asing	34.875.951	20.542.450	14.333.501	69,78%
	48.480.003	28.964.466	19.515.537	67,38%
Pihak berelasi				
Rupiah	233.018.174	219.863.714	13.154.460	5,98%
Mata uang asing	90.550.471	78.477.439	12.073.032	15,38%
	323.568.645	298.341.153	25.227.492	8,46%
Total	372.048.648	327.305.619	44.743.029	13,67%
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(311.120)	(348.941)	37.821	10,84%
Bersih	371.737.528	326.956.678	44.780.850	13,70%



Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya Neto

Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya naik 8,67% dari Rp26.246.814 juta pada akhir tahun 2020 menjadi Rp28.521.876 juta pada 31 Desember 2021. Kenaikan wesel ekspor dan tagihan lainnya sejalan dengan mulai pulihnya kegiatan ekspor setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan akibat dampak COVID-19.

Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada 31 Desember 2021 sebesar Rp54.915.498 juta mengalami kenaikan sebesar 17,29% dari Rp46.818.568 juta pada posisi 31 Desember 2020. Kenaikan Efek-Efek yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali merupakan strategi Perseroan dalam diversifikasi *income* dan optimalisasi pendapatan bunga.

Tagihan Derivatif

Tagihan Derivatif Perseroan pada tahun 2021 sebesar Rp730.083 juta atau mengalami penurunan sebesar 53,69% dari periode sebelumnya sebesar Rp1.576.659 juta pada tahun 2020. Penurunan ini didorong utamanya oleh transaksi pembelian dan penjualan forward mata uang yang turun sebesar 92,69% dan transaksi swap mata uang asing yang turun 69,94%.

Kredit yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah, Serta Piutang Sewa Pembiayaan

Outstanding Kredit diberikan BRI pada 31 Desember 2021 mencapai Rp1.042.867.453 juta atau naik 2,22% dari akhir tahun 2020 yang sebesar Rp1.020.192.968 juta. Peningkatan kredit ini didukung utamanya oleh peningkatan kredit bank saja sebesar 7,16% dimana utamanya didorong oleh kredit mikro yang mampu tumbuh sebesar 12,98%, kredit konsumen 3,97%, kredit kecil 3,50%, kredit menengah 4,05%, kredit korporasi 2,37%. Dengan pertumbuhan kredit ini mendorong komposisi mikro Perseroan secara bank saja dan konsolidasian masing-masing sebesar 42,06% dan 46,40% serta komposisi UMKM masing-masing menjadi 81,73% dan 83,86%, hal ini semakin menguatkan bahwa Perseroan semakin fokus untuk tumbuh di segmen UMKM khususnya segmen mikro.

Pertumbuhan Kredit yang diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah serta Piutang Sewa Pembiayaan naik 2,22% atau terlihat lebih rendah dari pertumbuhan bank saja sebesar 7,16% hal ini disebabkan oleh masih tercatatnya kredit BRI Syariah pada posisi Desember 2020 sedangkan pada tahun 2021 kredit BRI Syariah tidak lagi dilakukan konsolidasi kedalam group Perseroan setelah resmi melakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia, jika tanpa memperhitungkan kredit BRI Syariah, Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 6%

Tabel Kredit yang Diberikan Berdasarkan Jenis Penggunaan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Kupedes	396.952.830	351.337.166	45.615.664	12,98%
Modal kerja	232.623.703	219.281.437	13.342.266	6,08%
Konsumsi	189.254.118	191.306.486	(2.052.368)	(1,07%)
Investasi	128.567.024	140.433.361	(11.866.337)	(8,45%)
Program	43.008.167	35.879.902	7.128.265	19,87%
Sindikasi	3.825.658	5.362.649	(1.536.991)	(28,66%)
Karyawan Kunci	185.023	186.633	(1.610)	(0,86%)
Piutang dan Pembiayaan Syariah	9.159.501	49.065.478	(39.905.977)	(81,33%)
Piutang Pembiayaan	39.291.429	27.339.856	11.951.573	43,71%
Total Kredit Yang Diberikan	1.042.867.453	1.020.192.968	22.674.485	2,22%
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(87.829.417)	(70.394.653)	(17.434.764)	24,77%
Bersih	955.038.036	1.090.587.621	(135.549.585)	(12,43%)

Tagihan Akseptasi

Pada tahun 2021 tagihan akseptasi Perseroan mencapai Rp9.066.005 juta, naik 44,57% dibanding dengan Desember 2020 yang sebesar Rp6.271.176 juta. Kenaikan tersebut sebagian besar dikarenakan mulai pulihnya transaksi terkait ekspor dan impor yang mana sebelumnya mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19.

Penyertaan Saham

Penyertaan saham BRI pada 31 Desember 2021 sebesar Rp6.071.727 juta naik Rp4.571.398 juta atau naik 304,69% dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp1.500.329 juta. Kenaikan tersebut berasal dari penyertaan BRI kepada Bank Syariah Indonesia (d/h Bank Rakyat Indonesia Syariah) sebesar Rp4.055.194.740 juta atau setara dengan 17,25% kepemilikan, dimana menjadi bagian dari penyertaan BRI sejak resmi dilakukan *merger* pada 1 Februari 2021.

Aset Tetap

Pada tahun 2021, jumlah aset tetap BRI mencapai Rp47.970.187 juta, naik 9,75% dibanding tahun 2020 sebesar Rp43.706.632 juta. Peningkatan ini karena adanya penambahan terutama dari nilai hak atas tanah, bangunan, kendaraan bermotor dan komputer dan mesin.

Program revaluasi aset tetap dilakukan BRI pada tahun 2016 dan 2020 kemudian pada 2021 BRI kembali melakukan kegiatan revaluasi aset tetap. Kenaikan nilai tercatat tersebut timbul dari penilaian kembali hak atas tanah sebesar Rp8.125.368 juta.

Aset Pajak Tangguhan – Neto

Pada tahun 2021, jumlah aset pajak tangguhan neto mencapai Rp16.284.898 juta, naik 64,73% dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp9.885.990 juta. Peningkatan ini terjadi didorong oleh pos pembentukan cadangan kerugian aset produktif yang naik Rp4.484.494 juta atau sebesar 708,20%, kenaikan ini sejalan dengan peningkatan biaya CKPN yang dibentuk oleh Perseroan sebagai bentuk mitigasi atas potensi adanya risiko pemburukan kualitas aset khususnya kredit terdampak COVID-19.

Aset Lain-Lain – Neto

Aset lain-lain hingga 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp32.022.666 juta, menurun 4,39% dibanding tahun 2020 sebesar Rp33.492.467 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan Aset Ijarah dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.094.000 juta namun di tahun 2021 Nihil hal ini sejalan dengan tidak lagi dikonsolidasikannya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h Bank Rakyat Indonesia Syariah) ke dalam laporan konsolidasian Perseroan.

Tabel Aset Lain-Lain Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Rupiah				
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	2.321.009	4.180.805	(1.859.796)	(44,48%)
Tagihan kepada Pemerintah terkait pemberian KUR	4.698.675	3.870.918	827.757	21,38%
Biaya dibayar di muka	4.956.905	3.463.717	1.493.188	43,11%
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan	4.358.420	3.161.845	1.196.575	37,84%
Piutang bunga:				
Efek-efek	3.027.840	2.581.705	446.135	17,28%
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah				
Lain-lain	2.287.171	2.224.490	62.681	2,82%
Aset reasuransi	1.623.169	1.383.245	239.924	17,35%
Aset Ijarah	-	1.094.012	(1.094.012)	(100,00%)
Pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan prinsip syariah	-	757.189	(757.189)	(100,00%)
Persekot intern	240.501	386.457	(145.956)	(37,77%)
Persediaan kantor	647.077	629.384	17.693	2,81%
Sewa kantor, gudang, dan ruang kelas	11.364	250.444	(239.080)	(95,46%)
Tagihan atas penyaluran bantuan sosial Pemerintah	-	89.907	(89.907)	(100,00%)
Estimasi tagihan pajak	139.282	72.647	66.635	91,72%

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Piutang premi	61.642	71.467	(9.825)	(13,75%)
Agunan yang diambil alih	63.922	67.211	(3.289)	(4,89%)
Tagihan pinalti pokok dan bunga kredit	66.915	59.993	6.922	11,54%
Uang muka pajak	-	22.720	(22.720)	(100,00%)
Lain-lain	6.331.948	8.086.771	(1.754.823)	(21,70%)
	30.922.210	32.454.927	(1.532.717)	(4,72%)
Mata uang asing				
Piutang Bunga:				
Efek-efek	1.092.871	939.757	153.114	16,29%
Lainnya	34.176	54.437	(20.261)	(37,22%)
Lain-lain	249.664	157.707	91.957	58,31%
	1.376.711	1.151.901	224.810	19,52%
Total	32.298.921	32.606.828	(307.907)	(0,94%)
Dikurangi cadangan penurunan nilai	(276.255)	(114.361)	(161.894)	141,56%
Bersih	32.022.666	33.492.467	(1.469.801)	(4,39%)

Liabilitas

Liabilitas hingga 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp1.386.310.930 juta, menurun 0,41% dibanding tahun 2020 sebesar Rp1.380.598.462. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan liabilitas berbiaya diantaranya Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya dan Efek-Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dimana masing-masing mencatatkan penurunan sebesar 43,96% dan 27,35% sejalan dengan kecukupan likuiditas yang didukung dari simpanan pihak ketiga.

Tabel Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas Segera	18.735.387	15.473.573	3.261.814	21,08%
Simpanan Nasabah				
Giro	220.590.197	184.848.351	35.741.846	19,34%
Giro Wadiah	-	6.258.078	(6.258.078)	(100,00%)
Giro Mudharabah	-	1.623.563	(1.623.563)	(100,00%)
Tabungan	497.676.740	460.671.367	37.005.373	8,03%
Tabungan Mudharabah	-	6.147.015	(6.147.015)	(100,00%)
Tabungan Wadiah	-	9.247.604	(9.247.604)	(100,00%)
Deposito Berjangka	420.476.279	426.399.550	(5.923.271)	(1,39%)
Deposito Berjangka Mudharabah		25.726.398	(25.726.398)	(100,00%)
Total Simpanan Nasabah	1.138.743.215	1.120.921.926	17.821.289	1,59%
Total Simpanan Nasabah	1.138.743.215	1.087.424.950	51.318.265	4,72%
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	13.329.434	23.785.997	(10.456.563)	(43,96%)
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	29.408.508	40.478.672	(11.070.164)	(27,35%)
Liabilitas Derivatif	199.695	407.774	(208.079)	(51,03%)
Liabilitas Akseptasi	9.554.238	6.817.436	2.736.802	40,14%
Utang Pajak	4.214.318	1.949.356	2.264.962	116,19%

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Surat Berharga yang Diterbitkan	55.306.697	57.757.028	(2.450.331)	(4,24%)
Pinjaman yang Diterima	68.458.547	72.164.236	(3.705.689)	(5,14%)
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	7.000.268	3.681.709	3.318.559	90,14%
Liabilitas Imbalan Kerja	18.105.921	13.435.842	4.670.079	34,76%
Liabilitas Lain-lain	22.753.327	22.259.520	1.035.643	4,66%
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	501.375	1.465.392	(964.017)	(65,79%)
TOTAL LIABILITAS	1.386.310.930	1.380.598.462	5.712.468	0,41%

Liabilitas Segera

Liabilitas segera antara lain terdiri dari, titipan *advanced payment*, kewajiban BRI sebagai bank penerbit kartu ATM dan kartu kredit, kiriman uang, dana setoran cek, titipan deposito, transaksi kliring, setoran pajak yang diterima oleh BRI dan penampungan bantuan sosial. Liabilitas Segera pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp18.735.387 juta, naik 21,08% dibanding tahun 2020 sebesar Rp15.473.574 juta. Komponen Liabilitas Segera yang mengalami kenaikan adalah titipan *advanced payment* yang naik 86,05%, titipan *advanced payment* ini merupakan pos untuk menampung pembayaran pinjaman nasabah sebelum tanggal jatuh tempo.

Simpanan Nasabah

Pada tahun 2021 simpanan nasabah mencapai Rp1.138.743.215 juta, meningkat 1,59% dibanding tahun 2020 sebesar Rp1.120.921.926 juta. Pertumbuhan ini terlihat jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan simpanan secara *bank only* yang mampu tumbuh sebesar 7,14%, penurunan ini disebabkan karena tidak lagi di konsolidasikan simpanan Bank Syariah Indonesia (d/h Bank Rakyat Indonesia Syariah) pada tahun 2021 sedangkan dimana pada 31 Desember 2020 simpanan Bank Syariah Indonesia tercatat sebesar Rp49.002.658 juta.

Pertumbuhan simpanan Perseroan pada tahun 2021 semakin difokuskan pada pertumbuhan simpanan berbiaya rendah (CASA), dimana CASA tercatat tumbuh sebesar 7,40% untuk konsolidasi dan sebesar 11,18% secara *bank only*. Pertumbuhan ini juga tercermin dari rasio CASA Perseroan baik konsolidasi dan *bank only* yang masing-masing tercatat sebesar 63,08% dan 63,30% yang pada tahun sebelumnya tercatat sebesar 59,66% dan 61,00%.

Tabel Simpanan Nasabah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro	220.590.197	184.848.351	35.741.846	19,34%
Giro Wadiah	-	6.258.078	(6.258.078)	(100,00%)
Giro Mudharabah	-	1.623.563	(1.623.563)	(100,00%)
Tabungan	497.676.739	460.671.367	37.005.373	8,03%
Tabungan Mudharabah	-	6.147.015	(6.147.015)	(100,00%)
Tabungan Wadiah	-	9.247.604	(9.247.604)	(100,00%)
Deposito Berjangka	420.476.279	426.399.550	(5.923.271)	(1,39%)
Deposito Berjangka Mudharabah	-	25.726.398	(25.726.398)	(100,00%)
Total Simpanan Nasabah	1.138.743.215	1.120.921.926	17.821.289	1,59%

Simpanan dari Bank Lain dan Lembaga Keuangan Lainnya

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya pada tahun 2021 mencapai Rp13.329.434 juta, turun sebesar 43,96% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp23.785.997 juta. Penurunan ini disebabkan sebagian besar oleh *deposits on call* dan *inter-bank call money* sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk optimalisasi likuiditas yang dimiliki utamanya yang bersumber dari dana pihak ketiga serta efisiensi beban bunga di tengah kondisi *ample liquidity*.

Efek-Efek yang dijual dengan Janji dibeli Kembali

Pada tahun 2021 efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali mencapai Rp29.408.508 juta, turun 27,35% dibanding dengan tahun 2020 yang sebesar Rp40.478.672 juta. Penurunan tersebut sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk optimalisasi likuiditas yang dimiliki utamanya yang bersumber dari dana pihak ketiga serta efisiensi beban bunga di tengah kondisi *ample liquidity*.

Liabilitas Derivatif

Liabilitas derivatif pada tahun 2021 mencapai Rp199.695 juta, turun sebesar 51,03% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp407.774 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan pada sisi tagihan derivatif yang merupakan strategi *Treasury* Perseroan dalam mengelola aset dan tagihan *Treasury*.

Liabilitas Akseptasi

Liabilitas akseptasi pada tahun 2021 mencapai Rp9.554.238 juta, naik sebesar 40,14% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp6.817.436 juta. Kenaikan liabilitas akseptasi sejalan dengan mulai pulihnya kegiatan perekonomian khususnya terkait ekspor impor yang membutuhkan akseptasi dalam kegiatan transaksinya.

Utang Pajak

Utang pajak pada tahun 2021 mencapai Rp4.214.318 juta, naik sebesar 116,19% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.949.356 juta. Kenaikan ini disebabkan koreksi total fiskal positif yang meningkat dibanding tahun 2020.

Tabel Utang Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
BRI (entitas induk)				
Pajak penghasilan				
Pasal 29	3.490.305	1.064.461	2.425.844	227,89%
	3.490.305	1.064.461	2.425.844	227,89%
Entitas anak				
Pajak penghasilan	645.588	815.955	(170.367)	(20,88%)
Pajak Pertambahan Nilai	78.425	68.940	9.485	13,76%
	724.013	884.895	(160.882)	(18,18%)
Total	4.214.318	1.949.356	2.264.962	116,34%

Surat Berharga yang Diterbitkan

Surat Berharga yang di terbitkan pada tahun 2021 mencapai Rp55.306.697 juta, turun sebesar 4,24% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp57.757.028 juta. Penurunan ini utamanya didorong oleh surat berharga khususnya surat berharga rupiah yang turun Rp2.671.527 juta atau 6,10% hal ini merupakan strategi Perseroan untuk optimalisasi likuiditas yang dimiliki utamanya yang bersumber dari dana pihak ketiga serta efisiensi beban bunga di tengah kondisi *ample liquidity*.

Pinjaman yang Diterima

Pada tahun 2021, jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp68.458.547 juta, turun 5,14% dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp72.164.236 juta. Penurunan Pinjaman yang diterima tahun 2021 antara lain berasal dari pinjaman sindikasi *club loan* valuta asing yang turun Rp10.066.521 juta, penurunan ini sebagai upaya *matching maturity* dan digunakan untuk pembiayaan pinjaman yang bersifat jangka panjang.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Pada tahun 2021 estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi sebesar Rp7.000.268 juta, naik 90,14% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.681.709 juta. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan atas pencadangan kerugian untuk aset liabilitas komitmen kontinjensi sesuai dengan PSAK 71, peningkatan terbesar terdapat pada pos fasilitas kredit yang belum ditarik dan garansi yang diterbitkan yang masing-masing tumbuh sebesar 72,35% dan 89,09%.

Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tahun 2021 liabilitas imbalan kerja BRI mencapai Rp18.105.921 juta, mengalami kenaikan sebesar 29,46% dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp13.435.842 juta. Kenaikan ini salah satunya dipengaruhi oleh pembentukan cadangan pekerja kontrak yang naik Rp705.984 juta dimana tidak terdapat pada tahun sebelumnya, pembentukan cadangan ini sebagai bentuk implementasi UU Cipta Kerja yang diimplementasikan oleh Perseroan.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Cadangan Bonus dan Insentif	6.487.862	3.627.108	1.809.477	41.88%
Cadangan atas program imbalan jangka panjang bagi pekerja	9.597.223	8.901.588	697.233	7.83%
Cadangan Tunjangan Hari raya	1.314.852	567.362	723.224	170.62%
Cadangan khusus PHK (Qonun)	-	339.784	(339,784)	(100.00%)
Cadangan Pekerja Kontrak	705.984	-	705.984	100.00%
Total	18.105.921	13.435.842	3.593.068	25.69%

Liabilitas Lain-Lain

Pada tahun 2021 liabilitas lain-lain BRI mencapai Rp22.753.327 juta, mengalami kenaikan sebesar 54,99% dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp22.259.520 juta. Kenaikan dipengaruhi oleh cadangan kewajiban litigasi dan estimasi liabilitas klaim yang mengalami kenaikan.

Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi

Pinjaman dan surat berharga subordinasi BRI tahun 2021 mencapai Rp501.375 juta, turun sebesar 65,79% dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp1.465.392 juta. Kenaikan dipengaruhi oleh tidak lagi dikonsolidasikannya sukuk mudharabah subordinasi I sebesar Rp964.505 juta milik Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) setelah resminya BRIS merger menjadi Bank Syariah Indonesia.

Ekuitas

Ekuitas BRI pada tahun 2021 mencapai Rp291.786.804 juta, naik sebesar Rp62.301.922 juta atau tumbuh 27,15% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp229.466.882 juta. Kenaikan bersumber dari dana *right issue* yang dilakukan Perseroan pada tahun 2021 dengan perolehan dana cash dari publik sebesar Rp41 triliun, proses *right issue* ini dilakukan dalam rangka akuisisi Pegadaian dan PNM ke dalam *Ultra Micro Holding (Umi Holding)*

Tabel Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian (1)	2021 (2)	2020 (3)	Pertumbuhan	
			Rp (4) = (2)-(3)	% (5) = (4)/(3)
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B)	7.577.950	6.167.291	1.410.659	22,87%

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tambahan modal disetor	76.242.898	3.411.813	72.831.085	2.134,67%
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	17.006.230	17.009.207	(2.977)	(0,02%)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(115.975)	(54.749)	(61.226)	(111,83%)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	1.949.387	4.623.064	(2.673.677)	(57,83%)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	547.026	975.877	(428.851)	(43,95%)
(Kerugian)/Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(1.423.685)	(1.469.726)	46.041	3,13%
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(45.997)	(1.649.076)	1.603.079	(97,21%)
Opsi saham	19.255	72.894	(53.639)	(73,58%)
Cadangan kompensasi atas saham bonus	210.266	1.228.805	(1.018.539)	(82,89%)
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	1.758.580	-	1.758.580	100,00%
Modal pro forma atas transaksi akuisisi dengan entitas sependengali	-	29.538.484	(29.538.484)	(100,00%)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	181.986.363	163.949.482	18.036.881	11,00%
Total Saldo Laba	185.009.048	166.972.167	18.036.881	11,00%
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada				
Entitas induk	288.734.983	226.916.051	61.818.932	27,24%
Kepentingan non-pengendali	3.051.821	2.550.831	500.990	19,64%
TOTAL EKUITAS	291.786.804	229.466.822	62.301.922	27,15%

Modal Saham

Modal saham BRI pada tahun 2021 mencapai Rp7.577.950 juta, naik sebesar 22,87% dibanding tahun 2020 yaitu sebesar Rp6.167.291 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan *Treasury Stock* pada tahun 2021 sebesar Rp1.649.078 juta diakibatkan oleh pembagian ESA (*Employee Stock Allocation*) pada tahun 2021.

Tabel Modal Saham

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B)	7.577.950	6.167.291	1.410.659	22,87%

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

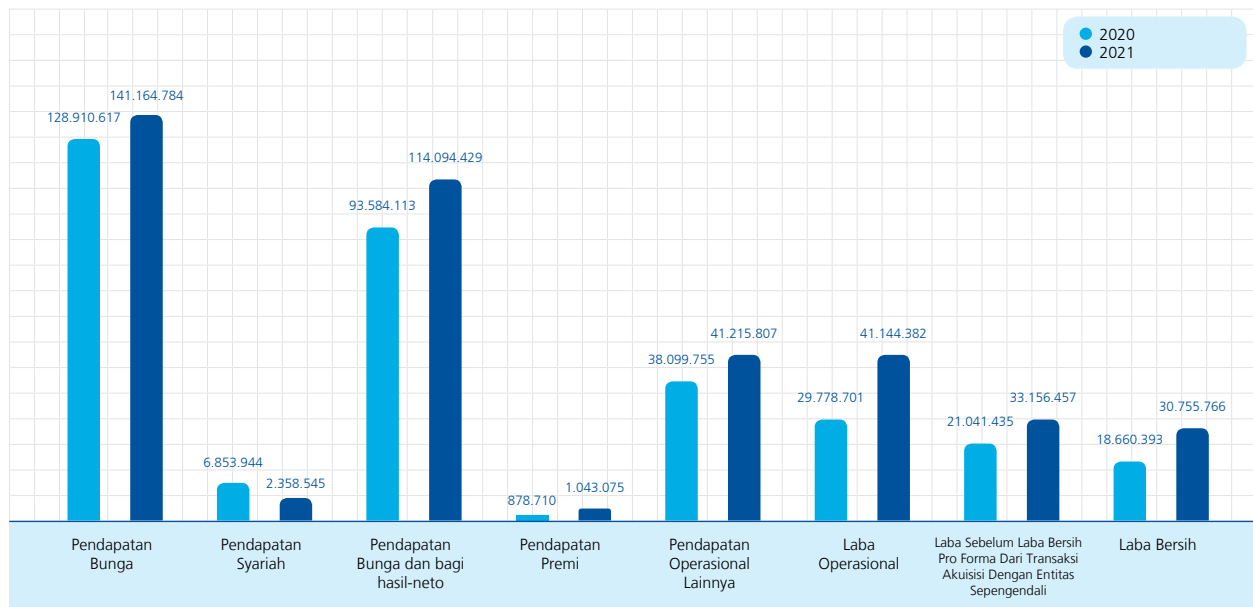
Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga	141.164.784	128.910.617	12.254.167	9,52%
Pendapatan syariah	2.358.545	6.853.944	(4.495.399)	(65,59%)
Dikurangi: Beban Bunga dan Syariah	(29.428.900)	(42.180.448)	12.751.548	(30,23%)
Pendapatan Bunga dan bagi hasil - neto	114.094.429	93.584.113	20.510.316	21,92%
Pendapatan premi	6.989.783	6.205.775	784.008	12,63%
Beban klaim	(5.946.708)	(5.327.065)	(619.643)	11,63%
Pendapatan premi - neto	1.043.075	878.710	164.365	18,71%
Total Pendapatan Operasional lainnya	41.215.807	38.099.755	3.116.052	8,18%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(35.806.312)	(33.024.492)	(2.781.820)	8,42%
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	(3.321.266)	(2.157.162)	(1.164.104)	53,96%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(163.243)	(98.374)	(64.869)	65,94%
Total Beban Operasional lainnya	(75.918.108)	(67.503.849)	(8.414.259)	12,46%
LABA OPERASIONAL	41.144.382	29.778.701	11.365.681	38,17%
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO	(152.317)	214.705	(367.022)	(170,94%)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	40.992.065	29.993.406	10.998.659	36,67%
BEBAN PAJAK	(7.835.608)	(8.951.971)	1.116.363	(12,47%)
LABA SEBELUM LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI	33.156.457	21.041.435	12.115.022	57,58%
LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI	(2.400.691)	(2.381.042)	(19.649)	0,83%
LABA BERSIH	30.755.766	18.660.393	12.095.373	64,82%

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)



Pendapatan Bunga dan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah pada tahun 2021 mencapai Rp143.523.329 juta, naik sebesar 5,71% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp135.764.561 juta. Kenaikan ini utamanya didorong oleh pendapatan bunga yang bersumber dari pinjaman yang naik sebesar 8,03%, dari pendapatan bunga pinjaman tersebut pertumbuhan terbesar terdapat pada segmen mikro dimana mampu tumbuh sebesar 14,52%. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari pertumbuhan kredit Mikro sebesar 14,08% dan memiliki komposisi sebesar 42,06%.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga	141.164.784	128.910.617	12.254.167	9,51%
Pendapatan syariah	2.358.545	6.853.944	(4.495.399)	(65,59%)
Total Pendapatan Bunga dan Syariah	143.523.329	135.764.561	7.758.768	5,71%

Beban Bunga dan Syariah

Beban bunga dan syariah pada tahun 2021 mencapai Rp29.428.900 juta, turun sebesar 30,23% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp42.180.448 juta. Penurunan ini didorong oleh seluruh pos beban bunga baik simpanan dan non simpanan, dimana beban bunga simpanan turun sebesar Rp10.438.599 juta atau turun 37,27% dan beban bunga non simpanan turun sebesar Rp2.312.959 juta atau turun -16,32%. Penurunan ini juga tercermin dari *cost of fund* rasio Perseroan menjadi sebesar 2,36% (konsolidasi) dan 2,05% (bank saja) atau yang terendah sepanjang masa. Penurunan ini merupakan bagian dari strategi Perseroan dalam melakukan efisiensi beban bunga di tengah kondisi *ample* likuiditas selama Pandemi COVID -19.

Tabel Beban Bunga dan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban bunga	(28.135.797)	(39.883.405)	11.747.608	(29,45%)
Beban syariah	(1.293.103)	(2.297.043)	1.003.940	(43,71%)
Total Beban Bunga dan Syariah	(29.428.900)	(42.180.448)	12.751.548	(30,23%)

Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto

Pendapatan Bunga dan Syariah – Neto pada tahun 2021 mencapai Rp114.094.429 juta, naik sebesar 21,92% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp93.584.113 juta. Kenaikan ini tidak terlepas dari kenaikan pendapatan bunga sebesar 5,71% dan penurunan beban bunga sebesar 30,23%.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Bunga dan Syariah	143.523.329	135.764.561	7.758.768	5,71%
Beban Bunga dan Syariah	(29.428.900)	(42.180.448)	12.751.548	(30,23%)
Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto	114.094.429	93.584.113	20.510.316	21,92%

Pendapatan Premi - Neto

Pendapatan Premi Neto pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp1.043.075 juta, naik sebesar 18,71% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp878.710 juta. Kenaikan ini disumbang oleh kinerja entitas anak Perseroan yang bergerak di bidang asuransi yaitu BRI Life dan BRI Finance.

Tabel Pendapatan Premi - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan premi	6.989.783	6.205.775	784.008	12,63%
Beban klaim	(5.946.708)	(5.327.065)	(619.643)	11,63%
Pendapatan premi - neto	1.043.075	878.710	164.365	18,71%

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp41.215.807 juta, naik sebesar 8,18% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp38.099.755 juta. Kenaikan ini disumbang oleh beberapa pos antara lain *fee based income* sebesar 5,45%, penerimaan aset yang telah dihapusbukukan sebesar 24,18% dan keuntungan penjualan surat berharga sebesar 20,25%. Kenaikan *fee based income* di dorong oleh transaksi yang berasal dari pendapatan *fee* berbasis asuransi sebesar 71,3% yang bersumber dari *bancassurance* segmen mikro dan ritel masing-masing sebesar 51,96% dan 65,38%, selain itu kenaikan didorong dari kenaikan *E-Channel related fee* sebesar 19,51% yang didorong oleh kenaikan jumlah transaksi BRImo sebesar 66,24% *year on year* atau mencapai 1,72 miliar transaksi.

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Provisi dan komisi lainnya	17.062.124	16.180.935	881.189	5,45%
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	9.005.760	7.252.171	1.753.589	24,18%
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah neto	3.452.785	2.871.332	581.453	20,25%
Keuntungan transaksi mata uang asing neto	1.713.531	1.257.838	455.693	36,23%
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	120.067	342.351	(222.284)	(64,93%)
Lain-lain	9.861.540	10.195.129	(333.589)	(3,27%)
Total Pendapatan Operasional lainnya	41.215.807	38.099.755	3.116.052	8,18%

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan – Neto

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan (CKPN) – neto pada tahun 2021 sebesar Rp35.806.312 juta mengalami kenaikan sebesar 8,42% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp33.024.492 juta. Kenaikan ini merupakan strategi Perseroan untuk memastikan kecukupan pencadangan terhadap aktiva produktif sebagai bentuk mitigasi atas adanya risiko pemburukan khususnya aset produktif yang terdampak COVID-19.

Tabel Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan – Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(35.806.312)	(33.024.492)	(2.781.820)	8,42%

Pembalikan (Beban) Penyisihan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi – Neto

Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi – neto pada tahun 2021 sebesar Rp3.321.266 juta mengalami kenaikan sebesar 53,96% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.157.162 juta. Kenaikan ini untuk mitigasi atas adanya potensi pemburukan aset komitmen dan kontinjensi.

Tabel Pembalikan (Beban) Penyisihan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi – Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi – neto	(3.321.266)	(2.157.162)	(1.164.104)	53,96%

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Non-Kuangan - Neto

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan pada tahun 2021 sebesar Rp163.243 juta mengalami kenaikan sebesar 65,94% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp98.374 juta.

Tabel Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Non-Kuangan – Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(163.243)	(98.374)	(64.869)	65,94%

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp75.918.108 juta mengalami kenaikan sebesar 12,46% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp67.503.849 juta. Kenaikan beban operasional lainnya disumbang utamanya oleh biaya tenaga kerja yang naik Rp4.941.857 juta atau tumbuh sebesar 14,93% dibandingkan tahun 2020, kenaikan beban tenaga kerja dialokasikan terkait implementasi ketentuan baru terkait ketenagakerjaan serta kenaikan manfaat bagi para pekerja dan pensiunan.

Tabel Beban Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tenaga kerja dan tunjangan	(38.047.126)	(33.105.269)	(4.941.857)	14,93%
Umum dan administrasi	(23.269.044)	(21.004.682)	(2.264.362)	10,78%
Lain-lain	(14.601.938)	(13.393.898)	(1.208.040)	9,02%
Total Beban Operasional lainnya	(75.918.108)	(67.503.849)	(8.414.259)	12,46%

Laba Operasional

Dengan kinerja *upperline* yang solid tersebut Perseroan berhasil meraih Laba Operasional sebesar Rp41.144.382 juta atau naik sebesar 38,17% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp29.778.701 juta. Peningkatan laba operasional tersebut sejalan dengan kenaikan pendapatan bunga dan syariah neto.

Tabel Laba Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto	114.094.429	93.584.113	20.510.316	21,92%
Pendapatan premi - neto	1.043.075	878.710	164.365	18,71%
Pendapatan Operasional lainnya	41.215.807	38.099.755	3.116.052	8,18%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(35.806.312)	(33.024.492)	(2.781.820)	8,42%
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	(3.321.266)	(2.157.162)	(1.164.104)	53,96%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(163.243)	(98.374)	(64.869)	65,94%
Beban Operasional lainnya	(75.918.108)	(67.503.849)	(8.414.259)	12,46%
Labanya Operasional	41.144.382	29.778.701	11.365.681	38,17%

Pendapatan dan (Beban) Non Operasional - Neto

Pendapatan dan (beban) non operasional – neto merupakan pos diluar kinerja operasional Perseroan dengan nilai yang tidak terlalu material. Pada tahun 2021 Perseroan mencatatkan pendapatan dan (beban) non operasional – neto sebesar (Rp152.317) juta atau turun sebesar 170,94% dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel Pendapatan dan (Beban) Non Operasional - Neto

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba (Rugi) penjualan aset tetap	44.164	41.211	16.440	46,69%
Pendapatan sewa	1.375	4.927	(3.552)	(72,09%)
Sumbangan	(10.143)	(9.257)	(886)	9,57%
Corporate Social Responsibility	(21.071)	(30.074)	9.003	(29,94%)
Biaya bina lingkungan	(270.460)	(179.224)	(91.234)	50,90%
Lain-lain - neto	96.456	393.120	(296.664)	(75,46%)
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	(152.317)	214.705	(366.893)	(170,88%)

Labanya Sebelum Beban Pajak

Labanya sebelum beban Pajak tahun 2021 tercatat sebesar Rp40.992.065 juta tumbuh sebesar 36,67% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp29.993.406 juta.

Tabel Labanya Sebelum Beban Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Labanya Operasional	41.144.382	29.778.701	11.365.681	38,17%
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	(152.317)	214.705	(367.022)	(170,94%)
Labanya Sebelum Beban Pajak	40.992.065	29.993.406	10.998.659	36,67%

Beban Pajak

Beban Pajak tahun 2021 tercatat sebesar Rp7.835.608 juta atau mengalami penurunan sebesar 12,47% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp8.951.971 juta. Meskipun laba sebelum pajak mengalami pertumbuhan sebesar 36,67% namun disisi lain beban pajak mencatatkan penurunan, hal ini disebabkan adanya penyesuaian *deferred tax rate* yang dilakukan sejalan dengan penetapan UU Harmonisasi Perpajakan yang ditetapkan Pemerintah.

Tabel Beban Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban Pajak	(7.835.608)	(8.951.971)	1.116.363	(12,47%)

Laba Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan periode 2021 tercatat sebesar Rp30.755.766 juta atau mampu tumbuh sebesar 64,82% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp18.660.393 juta. Pertumbuhan laba bersih konsolidasian tersebut didorong oleh pertumbuhan laba bersih Perseroan secara *Bank Only* dimana tercatat sebesar Rp32.215.461 atau mampu tumbuh sebesar 75,53% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp18.353.303 juta.

Tabel Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba Sebelum Beban Pajak	40.992.065	29.993.406	10.998.659	36,67%
Beban Pajak	(7.835.608)	(8.951.971)	1.116.363	(12,47%)
Laba Sebelum Laba Bersih Pro Forma dari Transaksi Akuisisi dengan Entitas Sepengendali	33.156.457	21.041.435	12.115.022	57,58%
Laba Bersih Pro Forma dari Transaksi Akuisisi dengan Entitas Pengendali	(2.400.691)	(2.381.042)	(19.649)	0,83%
Laba Bersih	30.755.766	18.660.393	12.095.373	64,82%

Tabel Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk	31.066.592	18.654.753	12.411.839	66,53%
Kepentingan non-pengendali	(310.826)	5.640	(316.466)	(5.611,10%)
TOTAL	30.755.766	18.660.393	12.095.373	64,82%

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak tahun 2021 tercatat (Rp2.823.103) lebih rendah 199,52% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 2.836.659. Hal ini utamanya disebabkan oleh pos keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar, dimana pada tahun 2021 mencatatkan kerugian sebesar Rp3.143.546 juta atau mengalami penurunan sebesar 167,84% dibandingkan posisi tahun 2020 yang mencatatkan keuntungan Rp4.633.588 juta. Keugian ini sejalan dengan mulai tertekannya *mark to market* efek-efek seiring dengan kenaikan suku bunga acuan obligasi pengaruh dari kebijakan ekonomi global.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	487.841	(2.473.364)	2.961.205	(119,72%)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(67.751)	464.563	(532.314)	(114,58%)
Surplus revaluasi aset tetap	(92.127)	81.910	(174.037)	(212,47%)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(61.226)	(39.780)	(21.446)	53,91%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(3.143.546)	4.633.558	(7.777.104)	(167,84%)
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(425.090)	868.462	(1.293.552)	(148,95%)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	478.796	(698.690)	1.177.486	(168,53%)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	(2.823.103)	2.836.659	(5.659.762)	(199,52%)

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Sebelum Penghasilan Komprehensif Pro Forma Dari Transaksi Akuisisi Dengan Entitas Sepengendali	30.333.354	23.878.094	6.455.260	27,03%
Penghasilan Komprehensif Pro Forma Dari Transaksi Akuisisi Dengan Entitas Sepengendali	(2.776.220)	(2.120.315)	(702.788)	33,15%
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	27.557.134	21.757.779	5.799.355	26,65%

Tabel Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk	27.855.902	21.727.515	6.128.387	28,21%
Kepentingan non-pengendali	(298.768)	30.264	(329.032)	(1.087,21%)
TOTAL	27.557.134	21.757.779	5.799.355	26,65%

Laba Tahun Berjalan Per Saham



Dengan capaian kinerja yang baik pada tahun 2021, Perseroan mampu mencatatkan kenaikan Laba Tahun Berjalan Per Saham sebesar 56,58% menjadi Rp238 dari tahun sebelumnya sebesar Rp152.

Tabel Laba Per Lembar Saham

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)	31.066.592	18.654.753	12.411.839	66,53%
Dasar	238	152	86	56,58%
Dilusian	238	151	87	57,62%

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

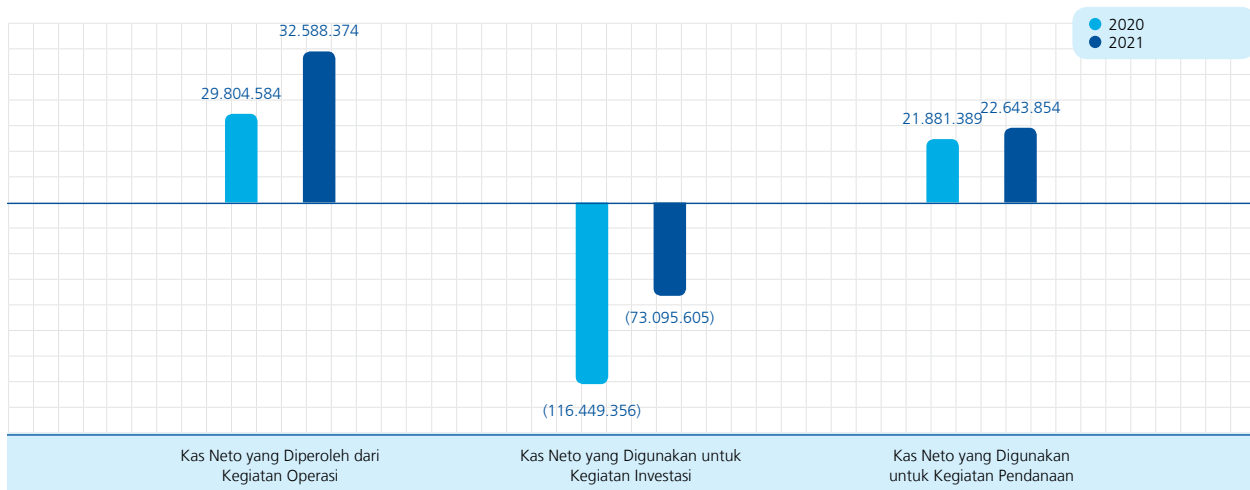
Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Pendapatan yang diterima				
Penerimaan bunga dan investasi	140.183.030	125.439.096	14.743.934	11,75%
Pendapatan syariah	2.358.545	6.853.944	(4.495.399)	(65,59%)
Pendapatan premi	6.989.783	6.205.775	784.008	12,63%
Beban yang dibayar				
Beban bunga	(28.533.680)	(39.883.405)	11.349.725	(28,46%)
Beban syariah	(1.293.103)	(2.297.043)	1.003.940	(43,71%)
Beban klaim	(5.946.708)	(5.327.065)	(619.643)	11,63%
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	9.005.760	7.252.171	1.753.589	24,18%
Pendapatan operasional lainnya	34.345.472	31.580.969	2.764.503	8,75%
Beban operasional lainnya	(73.658.162)	(63.609.646)	(10.048.516)	15,80%
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(203.971)	179.491	(383.462)	(213,64%)
Pembayaran atas pajak penghasilan badan	(11.164.431)	(5.936.444)	(5.227.987)	88,07%
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	72.082.535	60.457.843	11.624.692	19,23%
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	945.891	264.550	681.341	257,55%
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	9.164.531	(12.440.166)	21.604.697	(173,67%)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(2.091.221)	6.744.495	(8.835.716)	(131,01%)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(8.096.930)	(24.236.324)	16.139.394	(66,59%)
Kredit yang diberikan	(68.377.027)	(80.715.775)	12.338.748	(15,29%)
Piutang dan pembiayaan syariah	39.905.977	(23.299.281)	63.205.258	(271,28%)
Piutang sewa pembiayaan	(11.951.573)	(23.148.260)	11.196.687	(48,37%)
Aset lain-lain	1.422.631	23.311.739	(21.889.108)	(93,90%)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	3.261.813	7.924.262	(4.662.449)	(58,84%)
Simpanan:				
Giro	35.741.846	16.022.216	19.719.630	123,08%
Giro Wadiah	(6.258.078)	4.237.212	(10.495.290)	(247,69%)
Tabungan	37.005.372	55.315.884	(18.310.512)	(33,10%)
Tabungan Wadiah	(9.247.604)	2.295.916	(11.543.520)	(502,78%)
Deposito berjangka	(5.923.271)	13.175.897	(19.099.168)	(144,96%)
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	(10.456.563)	5.816.168	(16.272.731)	(279,78%)
Liabilitas Derivatif	(208.079)	223.169	(431.248)	(193,24%)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(11.070.164)	(9.424.266)	(1.645.898)	17,46%
Liabilitas lain-lain	235.264	(1.398.837)	1.634.101	(116,82%)
Kenaikan (penurunan) dana syirkah temporer	(33.496.976)	8.678.142	(42.175.118)	(485,99%)
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Operasi	32.588.374	29.804.584	2.783.790	9,34%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil Penjualan aset tetap	51.654	35.214	16.440	46,69%
Penyertaan saham	(315.724)	(284.347)	(31.377)	11,03%
Penerimaan dividen	4.349	5.530	(1.181)	(21,36%)
Perolehan aset tetap	(8.254.116)	(4.375.066)	(3.879.050)	88,66%
(Kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo				
(Kenaikan) efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	(64.581.768)	(111.830.687)	47.248.919	(42,25%)
Kas Neto yang (Digunakan untuk) Diperoleh dari Kegiatan Investasi	(73.095.605)	(116.449.356)	43.353.751	(37,23%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	(4.229.199)	41.131.054	(45.360.253)	(110,28%)
Penambahan Modal	41.059.206	-	41.059.206	100,00%
Pembagian laba untuk dividen	(12.125.589)	(20.623.565)	8.497.976	(41,21%)
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	12.547.672	12.619.200	(71.528)	(0,57%)
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(14.608.236)	(11.245.300)	(3.362.936)	29,91%
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan	22.643.854	21.881.389	762.465	3,48%
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(17.863.377)	(64.763.383)	46.900.006	(72,42%)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	(2.190)	(352.878)	350.688	(99,38%)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	171.790.168	236.906.429	(65.116.261)	(27,49%)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	153.924.601	171.790.168	(17.865.567)	(10,40%)
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:				
Kas	26.299.973	32.274.988	(5.975.015)	(18,51%)

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	51.530.969	4.895.604	9,50%
Giro pada bank lain	14.065.097	12.266.266	1.798.831	14,66%
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	57.132.958	65.043.738	7.910.780	(12,16%)
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	10.674.207	(10.674.207)	(100,00%)
Total Kas dan Setara Kas	153.924.601	171.790.168	(17.865.567)	(10,40%)

Grafik Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)



Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasional utama Perseroan. Sampai dengan akhir Desember 2021 Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi tercatat sebesar Rp32.588.374 juta atau naik sebesar 9,34% jika dibandingkan posisi Desember 2020 sebesar Rp29.804.584 juta. Peningkatan utamanya didorong oleh pendapatan yang diterima dari penerimaan bunga dan investasi Rp140.183.030 juta, penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan Rp9.005.760 juta dan simpanan yang berbasis CASA (Tabungan dan Giro) sebesar Rp72.747.218 juta

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas terkait investasi Perseroan. Sampai dengan akhir Desember 2021 Kas Neto yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar (Rp73.095.605) juta atau turun sebesar 37,23% jika dibandingkan posisi Desember 2020 sebesar

(Rp116.449.356) juta. Penggunaan arus kas investasi sebagian besar digunakan pada investasi efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas terkait pendanaan baik dari sisi likuiditas liabilitas maupun permodalan. Sampai dengan akhir Desember 2021 Kas Neto yang diperoleh dari kegiatan pendanaan tercatat *surplus* sebesar Rp22.643.854 juta, meningkat 3,48% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp21.881.389 juta. *Surplus* kas dari aktivitas pendanaan tidak terlepas dari perolehan *cash proceed* sebesar Rp41.059.206 dari proses *right issue* yang dilakukan Perseroan sedangkan faktor pengurang bersumber dari beberapa aktivitas antara lain pembagian laba untuk dividen, pembayaran surat berharga yang jatuh tempo dan pembayaran pinjaman yang diterima.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang tercermin dari likuiditas dan solvabilitas Bank. Berkenaan dengan obligasi yang diterbitkan, kemampuan membayar utang tercermin dari lancarnya pembayaran bunga dan pemingkatan obligasi.

Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang dituangkan pada setiap Perjanjian Kredit antara BRI dengan debitur. Pada perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti transparansi laporan keuangan kepada kreditur.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Rasio likuiditas merupakan perbandingan antara pinjaman dengan simpanan (*Loan to Deposit Ratio* atau LDR). Rasio LDR BRI 2021 sebesar 83,67% (bank saja), menurun dibandingkan dengan LDR 2020 yang sebesar 83,66% (bank saja), menunjukkan kondisi likuiditas masih dapat terjaga dengan baik di tengah kondisi pandemi COVID-19. Secara *year on year*, tren LDR yang menurun tidak terlepas dari melimpahnya simpanan di masa pandemi meskipun *demand* kredit telah berangsur meningkat.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/4/PBI/2018 tanggal 3 April 2018, Perbankan harus menjaga rasio RIM sebesar 84% sampai 94%. Dalam perhitungan RIM, diperhitungkan surat berharga yang diterbitkan dan ditatausahakan oleh Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI) dan tidak dimiliki oleh bank minimal 2 (dua) bulan sebelum tanggal laporan dan obligasi korporasi yang dimiliki. Perhitungan RIM disempurnakan juga dengan PBI nomor 21/12/PBI/2019 yang berlaku pada 2 Desember 2019 dengan memperhitungkan *offshore loan* sebagai komponen pendanaan. Rasio RIM BRI 2021 sebesar 83,45% (bank saja), meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 82,78% (bank saja). Peningkatan rasio RIM BRI pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh peningkatan komposisi aset yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan komposisi liabilitas dan juga terdapat penambahan komponen wesel ekspor yang mulai diperhitungkan sejak bulan Mei 2021.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, BRI melakukan pengelolaan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang merupakan rasio antara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam kondisi krisis. Pada tahun 2021 LCR BRI terjaga sebesar 219,33% (bank saja), dengan pencapaian LCR tersebut, BRI berhasil mempertahankan rasio kecukupan likuiditas jauh di atas batas minimal sebesar 100%. Sementara, dalam rangka menjaga ketahanan likuiditas jangka Panjang, BRI melakukan pengukuran terhadap rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang merupakan perbandingan antara *available stable funding* (pendanaan stabil yang tersedia) terhadap *required stable funding* (pendanaan stabil yang dibutuhkan). Pada tahun 2021 rasio NSFR BRI berada di angka 136,94%, dengan pencapaian tersebut BRI berhasil mempertahankan kecukupan pendanaan stabil jangka Panjang di atas 100%.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Rasio kecukupan permodalan (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) mencerminkan kemampuan Bank untuk memitigasi risiko. Pada tahun 2021, CAR BRI tercatat sebesar 25,28% (bank saja), naik dari tahun 2020 yang sebesar 20,61% (bank saja), Rasio CAR tersebut jauh di atas rasio minimal yang harus dijaga BRI sebesar 14,75% atau sebesar 12,00% jika memperhitungkan relaksasi *Capital Conservation Buffer* (CCB) sampai dengan Maret 2022 dan masih berada di atas *Risk Appetite Statement* BRI sebesar 17%. Dengan rasio kecukupan modal yang masih tinggi tersebut, BRI mampu mengantisipasi seluruh risiko utama yang terjadi dalam pengelolaan bank baik risiko pasar, risiko kredit maupun risiko operasional serta pengimplementasian Basel 3.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek-Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek-efek yang diterbitkan Bank yaitu Obligasi. Efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh lembaga pemingkatan guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efek nya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek-Efek Yang Diterbitkan

Uraian	Peringkat	
	2021	2020
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 Seri D	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 Seri E	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 Seri C	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 Seri D	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 Seri B	AAA oleh Pefindo	AAA oleh Pefindo

Uraian	Peringkat	
	2021	2020
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C	id _{AAA} oleh Pefindo	id _{AAA} oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	id _{AAA} oleh Pefindo	id _{AAA} oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	id _{AAA} oleh Pefindo	id _{AAA} oleh Pefindo
Obligasi Subordinasi III BRI Tahun 2018	id _{AA} oleh Pefindo	id _{AA} oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 Seri B	d _{AAA} oleh Pefindo	d _{AAA} oleh Pefindo
Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 Seri C	id _{AAA} oleh Pefindo	id _{AAA} oleh Pefindo
Unsecured Notes due 2023	BBB- oleh Fitch dan Baa2 oleh Moody's	BBB- oleh Fitch dan Baa2 oleh Moody's
Unsecured Notes due 2024	BBB- oleh Fitch dan Baa2 oleh Moody's	BBB- oleh Fitch dan Baa2 oleh Moody's

Tabel Arti Peringkat

Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Arti Peringkat
Pefindo	id _{AAA}	Surat utang dengan peringkat id _{AAA} memiliki peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, lebih unggul.
	id _{AA}	Surat utang peringkat id _{AA} berbeda dari utang peringkat tertinggi hanya untuk tingkat kecil. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya atas surat utang, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, sangat kuat.
Fitch	BBB-	Peringkat BBB menunjukkan bahwa ekspektasi risiko gagal bayar saat ini rendah. Kapasitas untuk pembayaran komitmen keuangan dianggap memadai, tetapi kondisi bisnis atau ekonomi yang merugikan lebih mungkin untuk mengganggu kapasitas ini.
Moody's	Baa2	Obligasi dengan peringkat Baa2 dinilai menengah dan tunduk pada risiko kredit moderat dan dengan demikian dapat memiliki karakteristik spekulatif tertentu.

Rasio Keuangan Lain

Rasio Rentabilitas

Pada industri perbankan, rasio rentabilitas umumnya diukur dengan menggunakan tingkat imbal hasil terhadap aset (*Return on Assets/ROA*), imbal hasil terhadap ekuitas (*Return on Equity/ROE*) dan marjin pendapatan bunga bersih (*Net Interest Margin/NIM*). BRI mampu membukukan kinerja rentabilitas positif selama tahun 2021.

Tabel Rasio Rentabilitas

(Bank Saja, dalam %)

Uraian	2021	2020
(1)	(2)	(3)
ROA	2,72	1,98
ROE	16,87	11,05
NIM	6,89	6,00

Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) BRI sebesar 2,72% (bank saja) di tahun 2021, atau meningkat 0,74% dibanding tahun 2020 yang sebesar 1,98% (bank saja). Kenaikan ROA tidak terlepas oleh kenaikan performa Perseroan yang didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga serta kemampuan Perseroan untuk mendorong efisiensi beban bunga dengan tetap tumbuh pada pendapatan non operasional non bunga.

Return on Equity (ROE)

Pada tahun 2021, *Return on Equity* (ROE) BRI sebesar 16,87% (bank saja), atau meningkat 5,82% dibanding tahun 2020 yang

sebesar 11,05% (bank saja). Kenaikan ROE tidak terlepas dari kenaikan laba bersih Perseroan yang tumbuh 75,5% *year on year*.

Net Interest Margin (NIM)

Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) BRI pada tahun 2020 sebesar sebesar 6,89% (bank saja) atau lebih tinggi 0,89% dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 6,00% (bank saja). Kenaikan NIM tidak terlepas oleh naiknya pendapatan bunga perseroan yang dihasilkan utamanya dari pertumbuhan kredit serta kemampuan Perseroan untuk mendorong efisiensi beban bunga.

Rasio Efisiensi

Beban Operasional Atas Pendapatan Operasional (BOPO)

Pada tahun 2021, Rasio Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) BRI 74,30% (bank saja), menurun signifikan 6,92% dari tahun 2020 yang sebesar 81,22% (bank saja). Penurunan pada BOPO didorong oleh kenaikan pendapatan bunga sejalan dengan pertumbuhan kredit sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, selain itu terjadi penurunan beban bunga secara signifikan sebagai hasil dari gerakan efisiensi *cost of fund* 2021.

Tabel Rasio Efisiensi

(Bank Saja, dalam %)

Uraian	2021	2020
(1)	(2)	(3)
BOPO	74,30	81,22

Rasio Kepatuhan

Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Pada tahun 2021, BRI tidak memiliki debitur baik pihak terkait maupun tidak terkait yang tidak memenuhi atau melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Rasio Posisi Devisa Neto (PDN)

Posisi Devisa Neto (PDN) merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah terhadap modal.

Pada tahun 2021, rasio PDN sebesar 0,81% (bank saja), naik dari tahun 2020 sebesar 1,07% (bank saja). Angka PDN tersebut masih jauh di bawah jumlah maksimum yang ditetapkan BI berdasarkan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 mengenai Perubahan Keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal.

Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit dapat diukur dengan rasio kualitas aset atau *Non-Performing Loan* (NPL). Di masa pandemi COVID-19, BRI masih mampu menjaga kualitas kredit dengan sangat baik hal ini terlihat dalam rasio kredit bermasalah (NPL) pada tahun 2021 sebesar 3,08%, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2,99%. Peningkatan ini sejalan dengan strategi *soft landing* yang dilakukan oleh Perseroan khususnya kredit yang terdampak oleh COVID-19. Meskipun terdapat kenaikan, rasio NPL BRI masih berada di bawah ketentuan maksimal regulasi yang sebesar 5% *nett* (PBI No3/25/2001). BRI akan terus meningkatkan efektivitas manajemen risiko kredit untuk menjaga dan meningkatkan kualitas asetnya.

Tabel Kolektibilitas Kredit

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020	2019
Kredit	1.042.867.454	938.373.880	903.197.389
Lancar	971.904.533	883.196.258	842.166.910
Dalam Perhatian Khusus	39.724.546	27.156.025	35.737.908
Kurang Lancar	3.662.029	2.479.943	4.397.703
Diragukan	4.679.568	3.751.019	3.404.717
Macet	22.896.778	21.790.635	17.490.151
NPL	31.238.375	28.021.597	25.292.571
NPL (%)	3,08%	2,99%	2,80%

Suku Bunga Dana

Berikut adalah informasi suku bunga produk deposito, tabungan, dan giro Bank per 31 Desember tahun 2021.

Tabel Suku Bunga Deposito Per 31 Desember 2021

Nominal	Jangka Waktu	Suku Bunga Counter (% Per Annum/P.A)
Rupiah		
< Rp100 Juta	1	2,35
	3	2,40
	6	2,75
	12	2,85
	24	2,85
	36	2,85
Rp100 Juta - < Rp2 Miliar	1	2,35
	3	2,40
	6	2,75
	12	2,85
	24	2,85
	36	2,85
> Rp2 Miliar	1	2,35
	3	2,40
	6	2,75
	12	2,85
	24	2,85
	36	2,85
Valas		
< USD100.000	1	0,20
	3	0,20
	6	0,20
	12	0,30
	24	0,30
	36	0,30
≥ USD100.000	1	0,20
	3	0,20
	6	0,20
	12	0,30
	24	0,30
	36	0,30

Tabel Suku Bunga Tabungan Per 31 Desember 2021

Keterangan	Saldo	Suku Bunga Counter (% Per Annum/P.A)
Rupiah		
Simpedes	0 - <Rp1 Juta	0,00
	>=Rp1 Juta - <Rp50 Juta	0,00
	>= Rp50 Juta - <Rp500 Juta	0,10
	>= Rp500 Juta - <Rp1 Miliar	0,60
	>=Rp1 Miliar	0,80
BritAma Umum	0 - <Rp1 Juta	0,00
	>= Rp1 Juta - < Rp50 Juta	0,00
	>= Rp50 Juta - < Rp500 Juta	0,10
	>= Rp500 Juta - <Rp1 Miliar	0,60
	>=Rp1 Miliar	0,80
BritAma Bisnis	0 - < Rp500.000	0,00
	Rp500.000 - Rp5 Juta	0,00
	> Rp5 Juta - Rp50 Juta	0,40
	> Rp50 Juta - Rp100 Juta	0,70
	>Rp100 Juta - 1 RpMiliar Juta	0,90
	> Rp1 Miliar - < Rp2 Miliar	1,50
	≥ Rp2 Miliar	1,50
Valas		
BritAma USD	0 - USD1.000	0,00
	> USD1.000 - 10.000	0,10
	> USD10.000 - 100.000	0,10
	Di atas USD100.000	0,10

Tabel Suku Bunga Giro Per 31 Desember 2021

Keterangan	Saldo	Suku Bunga Counter (% Per Annum/P.A)
Rupiah		
Giro	0 - < Rp5 Juta	0,00
	Rp5 Juta - Rp25 Juta	0,25
	> Rp25 Juta - Rp100 Juta	0,25
	> Rp100 Juta - Rp1 Miliar	1,00
	> Rp1 Miliar	1,90
Valas		
BritAma USD	0 - USD1.000	0,00
	> USD1.000 Ke Atas	0,05

Suku Bunga Dasar Kredit

Secara umum Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dihitung berdasarkan tiga komponen, yaitu Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana nasabah, beban operasional yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit, serta komponen profit margin dari penyaluran kredit.

Perhitungan SBDK belum memperhitungkan komponen premi risiko dari debitur, yang besarnya tergantung dari penilaian terhadap risiko masing-masing debitur. Untuk itu, besarnya suku

bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Perhitungan SBDK berlaku untuk jenis kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (KPR dan nonKPR). Dalam kredit konsumsi non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui Kartu Kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Namun demikian, Bank Indonesia menyerahkan klasifikasi kredit tersebut sesuai dengan kriteria internal bank.

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

(dalam %)

Suku Bunga	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non-KPR
Desember 2021	8,00	8,25	14,00	7,25	8,75



Analisis Kualitas Aset Produktif

Kualitas aset produktif Perseroan berada pada kondisi yang sangat baik, untuk aset produktif diluar kredit tercatat tidak terdapat satupun yang berada pada kolektabilitas macet, sedangkan untuk aset produktif yang diklasifikasikan sebagai Kredit Yang Diberikan memiliki kualitas yang sangat terjaga hal ini terlihat dari rasio NPL sebesar 3,08%, rasio ini mencerminkan kemampuan Perseroan dalam menjaga kualitas kredit meskipun berada pada masa pandemi COVID-19, rasio ini pula masih berada jauh di bawah ketentuan maksimal NPL regulasi sebesar 5% - *nett* (Peraturan Bank Indonesia No.3/25/2001). Perseroan akan terus meningkatkan efektivitas manajemen risiko untuk menjaga dan meningkatkan kualitas aset produktif yang dimiliki.

Tabel Kualitas Aset Produktif

No	POS-POS	INDIVIDUAL					
		31 Desember 2021					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
I	PIHAK TERKAIT						
1	Penempatan pada bank lain	71.263	-	-	-	-	71.263
2	Tagihan <i>spot</i> dan derivatif	-	-	-	-	-	-
3	Surat berharga						
4	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-
7	Kredit	184.189					184.189
8	Penyertaan	-	-	-	-	-	-
9	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
11	Komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-
12	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-
II	PIHAK TIDAK TERKAIT						
1	Penempatan pada bank lain	19.478.446	-	-	-	-	19.478.446
2	Tagihan <i>spot</i> dan derivatif	730.083	-	-	-	-	730.083
3	Surat berharga	351.294.034	287.464	-	-	654	351.582.152
4	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)	32.082.028	-	-	-	-	32.082.028
5	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)	54.265.120	-	-	-	-	54.265.120
6	Tagihan akseptasi	9.043.196	418.481	-	-	-	9.461.677
7	Kredit	1.043.089.754	57.441.817	4.501.326	8.101.994	35.850.218	1.148.985.109
8	Penyertaan	46.050.734	-	-	-	-	46.050.734
9	Penyertaan modal sementara	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
11	Transaksi rekening administratif	200.095.003	847.440	64.579	72.017	108.283	201.187.322
12	Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	63.922



(dalam jutaan Rupiah)

INDIVIDUAL						
31 Desember 2020						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	710.750	-	-	-	-	710.750
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	201.856	-	-	-	-	201,856
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	19.860.680	-	-	-	-	19.860.680
	1.576.659	-	-	-	-	1.576.659
	292.530.360	65.867	-	-	-	292.596.227
	35.685.278	-	-	-	-	35.685.278
	43.770.835	-	-	-	-	43.770.835
	6.773.743	-	-	-	-	6.773.743
	1.029.144.088	38.493.889	3.683.854	6.539.230	33.235.823	1.112.669.675
	12.566.424	-	-	-	-	12.566.424
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	175.120.035	867.395	13.312	753.017	64.241	176.818.000
	-	-	-	-	-	58.922

Rasio Aset Produktif

BRI mengelola aset produktif secara prudent untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang *sustainable*. Kualitas aset produktif BRI mengalami peningkatan dimana rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produk di 2021 1,77% lebih rendah dibandingkan 2020 sebesar 1,81%. Untuk memitigasi risiko pemburukan kualitas aset produktif, BRI membentuk pencadangan yang memadai. Rasio CKPN Aset Keuangan terhadap aset produktif BRI mengalami peningkatan 0,74% menjadi 6,16% dibandingkan posisi 2020 5,42%, begitu pula *coverage* terhadap pinjaman NPL dimana NPL *coverage* BRI mengalami peningkatan menjadi 278,14% lebih tinggi 30,16% dibandingkan posisi 2020 sebesar 247,98%.

Tabel Rasio Aset Produktif

(dalam %)

Uraian	2021	2020	Perubahan
Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif	1,77%	1,81%	(0,04%)
CKPN Aset Keuangan Terhadap Aset Produktif	6,16%	5,42%	0,74
NPL Coverage	278,14%	247,98%	30,16%

Strategi Peningkatan *Fee Based Income*

Selama tahun 2021, BRI mampu membukukan pendapatan *fee based income* dan *others income (bank only)* sebesar Rp32,40 triliun atau tumbuh 13,97% YoY. Pendapatan ini berasal dari pendapatan berbasis *fee* sebesar Rp16,54 triliun atau tumbuh 8,99% YoY, Pendapatan atas transaksi *treasury* sebesar Rp4,93 triliun atau tumbuh 21,60% YoY, Pendapatan *recovery* atas aktiva produktif yang telah dihapus buku sebesar Rp8,92 triliun atau tumbuh 24,52% *year on year* dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp2,01 triliun atau turun 1,28% YoY. Pada tahun 2021, peningkatan *fee based income* BRI diperoleh terbesar pada transaksi *e-channel*, *e-banking*, jasa asuransi serta BRILink. BRI akan terus meningkatkan *fee based income* dengan fokus pada penetrasi tiap segmen mulai dari mikro hingga *wholesale* dengan memberikan jasa dan layanan yang beragam sesuai dengan ciri khas segmen tersebut didukung dengan *digital* inisiatif yang dimiliki sehingga memudahkan tiap nasabah dalam melakukan transaksi seperti BRIMO, *Digital Saving*, *Cash Management System* dan *Branchless Banking*.

Di samping fokus pada optimalisasi perolehan pendapatan pada *fee based income* berbasis transaksi, BRI fokus pula pada pertumbuhan pendapatan yang bersumber dari transaksi *Treasury*. Kemampuan *treasury* BRI dalam optimalisasi liabilitas yang dimiliki dalam rangka *yield enhancement* serta fokus pada perolehan *capital gain* mampu menyumbang hasil yang optimal dalam rangka penciptaan sumber pendapatan baru bagi BRI. *Treasury* BRI juga terus berinovasi dalam memberikan layanan kepada nasabah melalui penciptaan *digital platform* seperti BRIFX maupun layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan

dan profil nasabah seperti transaksi jual beli valas, layanan investasi obligasi serta layanan lindung nilai dan *structured product*. Sebagai upaya untuk memberikan layanan yang semakin optimal saat ini *treasury* BRI telah memiliki perwakilan di setiap kantor wilayah BRI untuk memberikan layanan yang cepat dan responsif kepada nasabah BRI yang tersebar diseluruh Indonesia.

Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

Struktur Permodalan

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Pengelolaan struktur modal memiliki tujuan untuk memastikan bahwa BRI senantiasa menjaga kecukupan permodalan untuk menutup risiko-risiko yang inheren dalam mengelola bisnisnya tanpa mengurangi optimalisasi nilai bagi pemegang saham.

Hingga Desember 2021, BRI memiliki CAR sebesar 25,28%. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2016 dan Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, menyebutkan bahwa profil risiko level 2 (*satisfactory*) memiliki minimal CAR sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%. Diluar ketentuan minimal CAR



tersebut, sebagai bagian dari penerapan Basel 3, BRI diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sesuai dengan yang terdiri dari:

1. *Capital Conservation Buffer* Sebesar 2,50% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
2. *Countercyclical Buffer* sebesar 0,00% dari ATMR
3. *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik sebesar 2,50% dari ATMR

Namun, sesuai No.17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, BRI sebagai bank umum kegiatan usaha 4 dapat tidak memenuhi *capital conservation buffer* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko. Pemenuhan *capital conservation buffer* sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

Sehingga total CAR minimum BRI berada di level 12,1% maka CAR BRI pada tahun 2021 yang sebesar 25,28% (bank saja) dan 27,16% (konsolidasian) telah memenuhi ketentuan regulator perbankan dan jasa keuangan tersebut.

Secara struktur permodalan, hingga Desember 2021, BRI memiliki modal inti (*Tier-1*) sebesar Rp231,98 triliun (bank saja) dan sebesar Rp266,17 triliun (konsolidasian) dan Modal Pelengkap (*Tier-2*) sebesar Rp9,68 triliun (bank saja) dan Rp10,22 triliun (konsolidasian) dengan rasio CAR *Tier-1* mencapai 24,27% (bank saja) dan 26,16% (konsolidasian). *Tier-1* BRI terdiri dari CET-1 karena sumber utama modal BRI adalah laba ditahan. Oleh karena itu, Rasio *Tier-1* BRI jauh diatas ketentuan minimum rasio *Tier-1* sebesar 6% maupun ketentuan minimum CET-1 sebesar 4,5% yang ditentukan oleh Regulator.

Rincian Struktur Modal

Tabel Struktur Permodalan

(konsolidasian, dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020
Modal Inti (Tier 1)	266.166.171	187.205.189
Modal Inti Utama (CET 1)	266.166.171	187.205.189
Modal Pelengkap (Tier 2)	10.219.887	10.614.325
Total Modal Tersedia	276.386.058	197.819.514
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	813.938.417	783.091.416
ATMR untuk Risiko Pasar	4.299.790	5.189.201
ATMR untuk Risiko Operasional	199.281.257	194.008.561
Total ATMR	1.017.519.464	982.289.178
Rasio CAR	27,16%	20,14%
Rasio CET 1	26,16%	19,06%
Rasio Tier 1	26,16%	19,06%
Rasio Tier 2	1,00%	1,08%
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50%	4,50%
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	9,60%	9,50%

Praktik Manajemen Risiko

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis-jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Risiko Kredit

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit Per Wilayah, Jangka Waktu dan Sektor Ekonomi

Dengan menggunakan Pendekatan Standar, berikut adalah pengungkapan eksposur per wilayah, jangka waktu dan sektor ekonomi Bank BRI.

Tabel M.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021								
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah								
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	469.863.456	-	-	-	-	-	2.319.749	472.183.205	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	55.791.678	117.844	6.781.376	-	1.962.641	302.264	273.797	65.229.598	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	84.819.806	-	-	-	-	-	-	84.819.806	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.654.804	1.207.163	468.749	721.375	767.212	580.429	74.809	5.474.541	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	4.587.509	1.007.252	225.667	382.005	237.667	530.313	90.454	7.060.866	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	20.855.575	63.147.775	13.789.652	10.829.963	14.471.804	23.182.678	5.555.904	151.833.350	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	63.868.596	115.813.751	46.962.762	82.261.740	70.991.774	70.314.303	16.521.627	466.734.552	
9	Tagihan kepada Korporasi	120.289.390	31.024.062	10.137.685	14.864.533	20.249.718	22.193.818	21.371.503	240.130.708	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.335.770	1.662.394	770.219	654.450	1.012.456	843.233	168.908	6.447.429	
11	Aset Lainnya	36.020.324	13.498.404	5.750.192	6.291.037	4.407.401	8.313.375	2.538.592	76.819.326	
	TOTAL	859.086.907	227.478.644	84.886.301	116.005.103	114.100.672	126.260.412	48.915.343	1.576.733.381	

Tabel M.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Konsolidasi

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021								
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah								
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	475.101.865	-	-	-	-	-	2.319.749	477.421.614	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	57.193.593	117.844	6.781.376	-	1.962.641	302.264	273.797	66.631.513	

Pengungkapan Kuantitatif Ekspose Risiko

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Pasal 13A Bank wajib menambahkan informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi Bank pada Laporan Publikasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 9/SEOJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional serta POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko.

	31 Desember 2020							
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah							
	Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
429.718.013	-	-	-	-	-	-	1.112.644	430.830.657
54.949.209	250.243	7.706.098	-	2.543.512	1.073.089	404.204	66.926.355	
-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.185.030	-	-	-	-	-	-	-	68.185.030
2.269.381	1.292.851	511.397	821.634	828.618	630.797	84.062	6.438.740	
4.468.477	1.309.645	335.511	348.113	299.440	737.140	116.513	7.614.839	
21.302.306	66.283.422	14.047.566	10.801.604	14.848.372	22.339.229	5.954.886	155.577.385	
51.446.006	100.319.227	41.373.207	74.588.228	62.383.043	59.768.755	14.383.653	404.262.119	
129.579.056	29.358.665	6.724.868	15.789.270	19.958.690	23.179.062	12.639.384	237.228.995	
1.456.979	1.407.711	765.870	437.148	783.592	1.323.254	157.227	6.331.781	
39.092.719	11.727.215	6.366.658	5.635.073	4.309.855	6.634.630	1.649.590	75.415.740	
802.467.176	211.948.979	77.831.175	108.421.070	105.955.122	115.685.956	36.502.163	1.458.811.641	

	31 Desember 2020							
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah							
	Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
437.300.293	-	-	-	-	-	-	1.112.644	438.412.937
56.405.539	250.243	7.706.098	-	2.543.512	1.073.089	404.204	68.382.685	

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021								
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah								
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	91.226.191	4.836	11	21	36	68	232	91.231.394	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	1.846.891	1.231.088	487.105	745.731	802.476	687.011	74.809	5.875.110	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	4.592.536	1.007.252	225.667	382.005	258.373	530.313	90.454	7.086.599	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	21.047.199	63.153.953	13.821.309	10.844.665	14.477.310	23.444.817	5.555.904	152.345.156	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	72.666.877	141.733.867	59.580.278	91.541.432	83.484.461	87.364.069	17.155.603	553.526.587	
9	Tagihan kepada Korporasi	128.880.817	31.474.535	10.511.663	15.063.223	20.584.373	22.994.881	21.371.504	250.880.996	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.370.735	1.675.588	821.635	661.743	1.028.752	860.719	168.908	6.588.079	
11	Aset Lainnya	41.367.400	18.491.903	7.672.988	7.870.042	6.501.279	11.192.875	3.059.509	96.155.996	
	TOTAL	895.294.102	258.890.864	99.902.032	127.108.861	129.099.700	147.377.016	50.070.469	1.707.743.044	

Tabel N.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	430.344	1.139	-	68.578.659	403.173.063	472.183.205
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	21.694.265	15.331.842	4.964.574	23.187.902	51.016	65.229.598
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	14.774.598	8.016.993	7.569.018	10.038.508	44.420.689	84.819.806
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	10.196	189.745	5.274.601	-	5.474.541
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	76.287	695.548	6.289.031	-	7.060.866
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	62.946	3.208.581	14.348.778	134.212.682	364	151.833.350
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	39.778.343	198.543.125	114.565.670	107.462.651	6.384.763	466.734.552
9	Tagihan kepada Korporasi	22.293.434	42.268.787	30.796.466	119.270.051	25.501.970	240.130.708
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	286.146	1.420.395	1.490.812	3.250.076	-	6.447.429
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	76.819.326	76.819.326
	TOTAL	99.320.076	268.877.344	174.620.610	477.564.161	556.351.191	1.576.733.381

31 Desember 2020							
Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah							
Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-
68.565.431	30	11	20	36	78	-	68.565.606
2.479.282	1.320.686	531.008	847.776	865.889	753.478	84.062	6.882.181
4.476.260	1.309.645	335.511	348.113	320.574	737.140	116.513	7.643.756
21.448.146	66.298.051	14.095.323	10.821.315	14.859.774	22.729.112	5.954.886	156.206.607
53.998.206	100.686.043	41.429.349	74.740.150	62.570.356	60.748.651	14.383.653	408.556.408
141.004.396	29.417.687	6.743.462	15.857.971	19.958.690	23.531.000	12.639.384	249.152.590
1.803.951	1.408.215	769.463	440.196	857.188	1.384.791	157.227	6.821.031
39.443.660	11.733.674	6.375.762	5.641.134	4.313.534	6.668.748	1.649.590	75.826.102
826.925.164	212.424.274	77.985.987	108.696.675	106.289.553	117.626.087	36.502.163	1.486.449.903

31 Desember 2020						
Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						
≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
45.100	-	-	46.680.499	384.105.058	430.830.657	
12.541.781	10.932.787	2.205.269	41.246.518	-	66.926.355	
-	-	-	-	-	-	
46.147.193	4.729.815	3.715.209	5.906.770	7.686.043	68.185.030	
-	12.899	245.754	6.180.087	-	6.438.740	
329	243.837	1.365.085	6.005.588	-	7.614.839	
76.250	2.986.773	14.082.722	138.431.020	620	155.577.385	
39.768.629	173.464.318	108.631.974	78.882.506	3.514.692	404.262.119	
25.740.734	41.611.819	35.331.605	124.235.935	10.308.902	237.228.995	
335.593	1.363.779	1.647.018	2.985.391	-	6.331.781	
-	-	-	-	75.415.740	75.415.740	
124.655.608	235.346.027	167.224.636	450.554.314	481.031.055	1.458.811.641	

Tabel N.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Konsolidasi

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	5.668.753	1.139	-	68.578.659	403.173.063	477.421.614
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	22.048.589	15.728.761	5.083.699	23.719.450	51.016	66.631.514
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	20.879.744	8.071.347	7.569.018	10.038.508	44.672.775	91.231.393
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	5.399	25.847	230.920	5.612.923	20	5.875.110
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	96.993	700.575	6.289.031	-	7.086.599
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	115.393	3.331.681	14.416.190	134.481.527	364	152.345.156
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	75.856.702	240.632.191	122.213.937	107.805.019	7.018.739	553.526.588
9	Tagihan kepada Korporasi	26.825.375	43.940.086	31.612.190	123.001.375	25.501.970	250.880.995
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	359.375	1.443.803	1.533.153	3.251.724	22	6.588.078
11	Aset Lainnya	239.276	10.990	421.494	-	95.484.236	96.155.996
	TOTAL	151.998.606	313.282.839	183.781.175	482.778.217	575.902.205	1.707.743.041

Tabel O.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2021					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	1.692.337	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	872.611	-	-
3	Industri pengolahan	-	5.645.019	-	194.792
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	12.489.200	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	8.080.564	-	35.954
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	825	5.382.747	-	18.188
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	4.482.593	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	153.452	-	1.203
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	329.642.626	3.099.102	-	24.296.627
12	Real Estat	-	305.199	-	142
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.319.749	59.516	-	71

	31 Desember 2020					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	≤ 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	7.627.380	-	-	46.680.499	384.105.058	438.412.937
	13.274.842	11.202.318	2.360.389	41.545.136	-	68.382.685
	-	-	-	-	-	-
	46.482.129	4.775.455	3.715.209	5.906.770	7.686.043	68.565.606
	3.858	29.363	290.782	6.558.178	-	6.882.181
	329	264.971	1.365.085	6.013.371	-	7.643.756
	97.510	3.090.303	14.203.125	138.815.049	620	156.206.607
	41.076.197	173.731.740	109.116.436	81.117.343	3.514.692	408.556.408
	29.272.191	42.568.645	36.234.500	130.768.352	10.308.902	249.152.590
	356.129	1.515.040	1.712.898	3.236.964	-	6.821.031
	-	-	-	-	75.826.102	75.826.102
	138.190.564	237.177.835	168.998.424	460.641.662	481.441.417	1.486.449.903

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	563	221.640	4.168	89.832.915	21.456.135	494.101	-
	536	3.700	62	494.689	4.038.096	27.511	-
	727	258.950	981	36.665.447	43.208.982	350.399	-
	-	3.104.473	581	528.753	16.210.979	10.407	-
	-	-	-	-	-	-	-
	3.665	292.388	917	1.410.795	19.930.892	158.225	-
	23.058	1.153.619	13.364	216.126.809	68.936.796	3.530.417	-
	8.729	161.783	1.158	6.112.822	6.899.393	117.099	-
	1.229	1.267.011	1.631	13.081.392	1.981.683	112.717	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1.034	3.897	530	394.836	6.605.906	10.079	-
	160.535	183.388	5.053	4.688.370	3.304.942	83.468	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2.128	1.402	41.549	20.993	71.782	252	-

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Pendidikan	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	991.301	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	46.029.450	193.840	-	1.512.086
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
23	Lainnya	94.190.555	21.782.118	-	58.760.742
	TOTAL	472.183.205	65.229.598	-	84.819.806
31 Desember 2020					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	2.186.324	-	-
2	Pertambangan dan Penggalian	-	334.830	-	-
3	Industri pengolahan	-	6.324.662	-	29.181
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	16.228.636	-	-
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	6.312.298	-	6.384
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	825	5.907.792	-	14.268
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	5.584.833	-	-
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	50.150	-	1.191
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	297.155.034	12.621.058	-	24.793.783
12	Real Estat	-	38.876	-	26
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.112.644	131.222	-	-
16	Pendidikan	-	-	-	-
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	2.472.121	-	-
19	Aktivitas Jasa Lainnya	46.336.920	430.339	-	1.888.059
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
23	Lainnya	86.225.234	8.303.214	-	41.452.138
	TOTAL	430.830.657	66.926.355	-	68.185.030

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	237	37.445	2.390	355.286	315.313	3.772	-
	1.971	108.601	4.441	1.295.139	1.886.871	11.616	-
	10.545	248.515	23.816	30.892.708	8.213.380	347.003	-
	7.942	596	643.045	20.336.401	5.706.350	71.368	-
	-	9.628	1.346	940.176	160.191	13.573	-
	-	-	-	-	-	-	-
	5.251.642	3.830	151.088.318	43.546.466	20.646.882	1.105.422	-
	-	-	-	10.555	10.556.135	-	76.819.326
	5.474.541	7.060.866	151.833.350	466.734.552	240.130.708	6.447.429	76.819.326
	670	297.139	5.981	70.230.052	29.731.458	846.376	-
	560	43.911	96	465.034	4.476.744	302.602	-
	871	305.754	1.024	29.807.859	38.340.661	245.421	-
	-	2.744.582	292	493.999	15.993.727	4.105	-
	-	-	-	-	-	-	-
	4.216	123.014	1.390	1.322.631	28.202.884	154.011	-
	32.023	1.586.976	17.623	196.305.126	68.750.833	3.049.700	-
	8.821	316.454	1.785	6.001.231	5.672.669	76.940	-
	1.213	1.487.657	1.736	10.142.723	1.848.314	71.735	-
	-	-	-	-	-	-	-
	1.080	5.239	602	372.763	6.554.793	3.036	-
	182.185	238.185	7.271	4.493.365	3.866.547	246.008	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	2.377	1.614	43.760	27.124	39.620	436	-
	667	57.225	4.357	362.458	362.376	4.951	-
	2.497	163.977	6.472	1.222.611	1.668.626	24.110	-
	6.776	227.624	24.335	24.671.475	6.419.073	183.894	-
	9.869	1.425	1.314.443	13.707.007	6.199.754	103.613	-
	-	11.945	1.809	1.209.594	197.326	12.066	-
	-	-	-	-	-	-	-
	6.184.915	2.118	154.144.409	43.422.352	10.876.746	1.002.777	-
	-	-	-	4.715	8.026.844	-	75.415.740
	6.438.740	7.614.839	155.577.385	404.262.119	237.228.995	6.331.781	75.415.740

Tabel O.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31 Desember 2021					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	2.200.377	0	0
2	Pertambangan dan Penggalian	0	872.611	0	0
3	Industri pengolahan	0	5.645.019	0	194.792
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0	12.548.901	0	0
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	0	0	0	0
6	Konstruksi	0	8.378.695	0	35.954
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	825	5.382.747	0	18.188
8	Pengangkutan dan Pergudangan	0	4.482.593	0	0
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0	153.452	0	1.203
10	Informasi dan Komunikasi	0	0	0	0
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	329.642.626	3.545.951	0	30.069.232
12	Real Estat	0	393.424	0	142
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	0	0	0	0
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	0	0	0	0
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.319.749	59.516	0	71
16	Pendidikan	0	0	0	0
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	0	0	0	0
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	0	991.301	0	0
19	Aktivitas Jasa Lainnya	46.029.450	194.810	0	1.512.086
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	0	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0
22	Bukan Lapangan Usaha	0	0	0	0
23	Lainnya	99.428.964	21.782.118	0	59.399.727
	TOTAL	477.421.614	66.631.513	-	91.231.395
31 Desember 2020					
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0	2.736.502	0	0
2	Pertambangan dan Penggalian	0	334.830	0	0
3	Industri pengolahan	0	6.324.662	0	29.181
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0	16.328.196	0	0
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	0	0	0	0
6	Konstruksi	0	6.610.794	0	6.384
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	825	5.907.792	0	14.268
8	Pengangkutan dan Pergudangan	0	5.584.833	0	0
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0	50.150	0	1.191
10	Informasi dan Komunikasi	0	0	0	0
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	297.155.034	13.041.435	0	25.174.359

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	563	221.640	4.168	99.425.692	24.736.520	494.731	99.984
	536	3.700	62	660.580	4.356.453	48.599	0
	727	258.950	981	39.826.698	44.487.221	396.804	24.590
	0	3.104.473	581	562.672	16.868.789	10.415	0
	0	0	0	0	0	0	0
	3.665	318.121	917	5.591.029	20.981.215	173.867	0
	23.058	1.153.619	13.364	248.849.548	70.485.328	3.547.056	0
	8.729	161.783	1.158	6.439.959	7.325.105	130.622	0
	1.229	1.267.011	1.631	13.177.840	2.015.575	113.090	314.619
	0	0	0	11.154	57	84	0
	1.034	3.897	530	652.735	6.807.982	12.358	1.379.431
	160.535	183.388	5.053	4.755.491	3.377.131	83.468	0
	0	0	0	223.589	10.858	1.237	0
	0	0	0	1.121.405	58.249	18.950	0
	2.128	1.402	41.549	20.993	71.782	252	0
	237	37.445	2.390	406.788	315.313	3.879	0
	1.971	108.601	4.441	1.395.722	1.906.305	11.708	0
	10.545	248.515	23.816	30.933.492	8.266.606	347.075	0
	408.511	596	1.154.851	21.495.796	5.860.448	72.356	498.726
	0	9.628	1.346	951.299	162.175	13.573	0
	0	0	0	0	0	0	0
	5.251.642	3.830	151.088.318	43.546.466	20.646.882	1.105.422	0
	0	0	0	33.477.638	12.141.002	2.532	93.838.646
	5.875.110	7.086.599	152.345.156	553.526.588	250.880.995	6.588.077	96.155.996
	670	297.139	5.981	72.822.757	34.767.265	1.165.183	0
	560	43.911	96	477.565	4.483.524	302.638	0
	871	305.754	1.024	29.956.427	40.975.139	246.342	0
	0	2.744.582	292	502.404	16.546.429	41.182	0
	0	0	0	0	0	0	0
	4.216	151.931	1.390	1.504.135	29.861.193	180.059	0
	32.023	1.586.976	17.623	197.189.999	70.039.484	3.111.612	0
	8.821	316.454	1.785	6.103.645	5.876.801	77.617	0
	1.213	1.487.657	1.736	10.194.055	1.910.996	72.488	0
	0	0	0	0	0	0	0
	1.080	5.239	602	404.025	6.772.260	27.777	0

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Real Estat	0	126.594	0	26
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	0	0	0	0
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	0	0	0	0
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.112.644	131.222	0	0
16	Pendidikan	0	0	0	0
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	0	0	0	0
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	0	2.472.121	0	0
19	Aktivitas Jasa Lainnya	46.336.920	430.339	0	1.888.059
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	0	0	0	0
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0	0	0	0
22	Bukan Lapangan Usaha	0	0	0	0
23	Lainnya	93.807.514	8.303.214	0	41.452.138
	TOTAL	438.412.937	68.382.685	-	68.565.606

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Pencadangan

Bank BRI mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan pencadangan kerugian penurunan nilai aktiva.

Pencadangan per Wilayah - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel Pa Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Keterangan	31 Desember 2021							
		Wilayah							
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tagihan	825.230.902	230.400.024	84.034.873	116.270.649	118.069.968	152.353.902	39.463.487	1.565.823.804
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)	69.404.312	51.632.912	22.027.593	32.358.900	29.263.003	33.679.704	1.582.789	239.949.213
	a. Belum jatuh tempo	58.021.439	47.188.017	19.280.081	28.714.569	25.862.793	30.310.416	1.427.020	210.804.335
	b. Telah jatuh tempo	11.382.873	4.444.895	2.747.512	3.644.331	3.400.210	3.369.288	155.769	29.144.878
3	CKPN - Stage 1	3.711.502	4.717.339	1.851.109	2.750.759	2.606.285	3.488.934	247.183	19.373.112
4	CKPN - Stage 2	21.889.480	4.214.236	4.261.756	2.667.688	2.810.503	4.946.703	262.246	41.052.612
5	CKPN - Stage 3	9.973.659	2.922.618	1.888.663	2.823.536	2.326.193	2.303.849	203.997	22.442.515
6	Tagihan yang dihapus buku	4.038.123	3.576.340	1.558.740	1.462.687	1.557.123	2.247.367	334.242	14.774.622

	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	182.185	238.185	7.271	4.634.795	4.128.165	246.753	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	2.377	1.614	43.760	27.124	39.620	436	0
	667	57.225	4.357	363.220	362.376	4.951	0
	2.497	163.977	6.472	1.248.529	1.668.626	24.117	0
	6.776	227.624	24.335	24.779.476	6.419.084	184.095	0
	453.310	1.425	1.943.665	13.707.007	6.200.713	120.938	410.362
	0	11.945	1.809	1.214.178	197.326	12.066	0
	0	0	0	0	0	0	0
	6.184.915	2.118	154.144.409	43.422.352	10.876.746	1.002.777	0
	0	0	0	4.715	8.026.844	0	75.415.740
	6.882.181	7.643.756	156.206.607	408.556.408	249.152.591	6.821.031	75.826.102

	31 Desember 2020							
	Wilayah							
	Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	733.459.758	215.565.143	75.531.151	105.745.144	104.721.476	138.841.849	32.272.688	1.406.137.209
	36.593.933	6.299.407	5.497.805	4.725.995	6.030.438	7.143.912	2.069.696	68.361.186
	26.732.552	3.556.610	3.893.673	3.767.581	4.380.953	4.081.189	1.690.568	48.103.126
	9.861.381	2.742.797	1.604.132	958.414	1.649.485	3.062.723	379.128	20.258.060
	8.425.747	4.985.073	2.114.870	3.032.329	2.865.942	3.123.082	728.250	25.275.294
	9.731.084	3.085.292	2.523.503	1.697.883	1.877.726	3.007.512	1.092.280	23.015.280
	10.501.387	1.586.103	1.253.691	1.830.294	1.176.094	1.433.027	372.592	18.153.187
	3.572.628	2.882.243	1.580.600	1.177.110	1.355.972	2.701.273	1.328.060	14.597.887

Tabel P.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Keterangan	31 Desember 2021								
		Wilayah								
		Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Tagihan	835.349.871	243.382.012	94.371.676	129.209.885	135.506.333	179.570.202	39.463.487	1.656.853.466	
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (Stage 2 dan Stage 3)	69.437.074	51.645.425	22.078.885	32.365.946	29.278.942	33.695.959	1.582.789	240.085.020	
	a. Belum jatuh tempo	111.843.612	55.091.015	23.358.995	34.966.985	34.098.327	35.537.447	1.427.020	296.323.402	
	b. Telah jatuh tempo	15.459.941	4.474.364	2.768.653	3.658.188	3.422.849	3.402.555	155.769	33.342.319	
3	CKPN - Stage 1	8.019.212	4.775.935	1.818.725	2.754.295	2.562.679	3.073.271	247.183	23.251.301	
4	CKPN - Stage 2	22.678.076	4.320.960	4.306.093	2.748.300	2.899.695	4.957.022	262.246	42.172.393	
5	CKPN - Stage 3	11.704.273	2.935.726	1.827.547	2.774.954	2.286.853	2.158.098	203.997	23.891.447	
6	Tagihan yang dihapus buku	6.288.379	3.583.755	1.568.113	1.846.122	1.604.125	2.523.402	334.242	17.748.138	

Pencadangan per Sektor Ekonomi - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel Q.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 Desember 2021				
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	125.903.924	28.260.646	2.689.686
2	Pertambangan dan Penggalian	8.208.396	1.569.749	1.364.413
3	Industri pengolahan	91.951.691	20.051.749	4.527.615
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	34.836.905	7.899.940	393.776
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-
6	Konstruksi	31.752.360	7.146.877	592.525
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	307.803.950	68.520.297	13.593.563
8	Pengangkutan dan Pergudangan	3.435.097	740.689	205.752
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	17.623.618	3.898.212	627.715
10	Informasi dan Komunikasi	16.340.850	3.606.027	618.852
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	8.154.689	1.864.471	25.739
12	Real Estat	5.179.813	1.077.702	481.114
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	470.711	107.440	2.281
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	3.392.244	763.325	64.208
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	712.487	163.291	551
16	Pendidikan	772.349	174.914	9.738
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3.459.231	787.068	27.675
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	41.408.321	9.334.584	710.255
19	Aktivitas Jasa Lainnya	22.519.547	5.040.025	545.428

31 Desember 2020							
Wilayah							
Jakarta	Indonesia Timur & Tengah	Jawa Barat	Jawa Tengah & DIY	Jawa Timur	Sumatera	Lainnya	Total
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
776.865.539	231.734.069	89.366.843	120.175.997	122.281.336	182.394.812	42.640.800	1.565.459.395
39.481.982	6.728.063	5.707.133	5.154.003	6.261.480	8.589.008	2.069.695	73.991.363
28.661.706	3.948.374	4.052.413	4.149.710	4.448.545	5.263.533	1.690.567	52.214.848
15.234.163	3.225.522	1.895.292	1.364.017	2.158.568	3.607.492	379.128	27.864.182
12.244.477	5.233.177	2.132.937	3.205.868	2.803.363	3.019.879	747.060	29.386.761
10.736.875	3.104.572	2.493.940	1.687.478	1.837.983	2.964.000	1.092.280	23.917.129
11.600.479	1.587.299	1.235.585	1.963.286	1.130.179	1.349.697	372.592	19.239.117
3.698.514	2.939.174	1.857.779	1.202.195	1.415.764	3.074.015	1.539.451	15.726.894

Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
(6)	(7)	(8)	(8)
3.164.866	7.631.190	2.627.877	2.946.615
45.243	832.404	1.794.102	232.941
1.438.838	6.415.838	6.119.954	725.115
185.749	486.571	384.029	16.873
-	-	-	-
172.989	3.393.361	583.570	250.520
7.514.685	9.322.310	5.874.561	7.656.671
22.673	99.513	661.578	-
454.273	716.882	527.934	349.517
171.606	2.390.374	535.977	213.181
49.618	45.321	16.701	9.011
80.515	190.637	430.232	154.878
13.053	7.763	1.443	-
87.026	118.908	41.757	-
10.569	782	299	101
18.531	33.139	6.155	15.362
69.380	98.655	18.071	35.632
1.034.005	7.123.303	644.863	609.448
702.188	705.423	567.441	20.721

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.164.471	259.816	31.693
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	218.612.039	49.537.514	2.632.299
23	Lainnya	622.121.111	-	-
	Total	1.565.823.804	210.804.335	29.144.878
31 Desember 2020				
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111.593.787	12.676.022	3.062.542
2	Pertambangan dan Penggalan	7.873.354	1.781.200	1.716.871
3	Industri pengolahan	82.277.806	9.331.365	4.017.345
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35.813.132	2.468.572	424.255
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	57.920	-	5.661
6	Konstruksi	36.451.010	7.271.449	400.945
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	280.526.612	5.612.495	6.484.155
8	Pengangkutan dan Pergudangan	15.490.302	2.878.066	236.634
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	14.340.162	1.806.054	178.583
10	Informasi dan Komunikasi	3.867.768	691.446	3.819
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	7.225.930	76.783	6.395
12	Real Estat	3.822.880	240.406	46.167
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	408.811	12.067	5.836
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	5.217.228	314.933	488.770
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.359.043	13	838
16	Pendidikan	797.294	4.323	10.785
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3.145.943	88.103	58.193
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	2.483.707	1.001.872	362.618
19	Aktivitas Jasa Lainnya	49.560.885	977.567	674.190
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.444.944	5.184	24.389
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	216.915.382	865.205	2.049.070
23	Lainnya	525.463.310	-	-
	Total	1.406.137.209	48.103.126	20.258.060

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
	(6)	(7)		(8)
	23.214	48.540	20.758	37.915
	-	-	-	-
	4.114.091	1.391.698	1.585.213	1.500.121
	-	-	-	-
	19.373.112	41.052.612	22.442.515	14.774.622
	3.889.214	6.441.196	2.705.694	2.445.848
	101.575	223.095	2.158.881	33.696
	2.064.167	4.379.404	5.067.301	1.080.629
	1.184.869	258.692	559.873	80.172
	1.553	661	3.070	267
	837.701	2.251.815	288.633	425.612
	7.438.656	4.535.419	3.945.837	7.008.124
	393.612	843.664	407.672	212.730
	468.754	736.153	142.930	257.958
	133.871	243.221	352.783	20.531
	157.004	15.127	3.646	8.654
	146.625	104.940	31.609	73.172
	16.174	2.913	3.210	5.370
	157.642	118.298	269.462	94.342
	20.142	439	424	10.727
	25.329	6.967	5.938	9.887
	101.311	39.014	39.348	18.113
	29.055	468.693	359.264	24.607
	2.250.465	645.214	651.098	489.771
	41.750	24.551	14.169	36.220
	-	-	-	-
	4.070.096	1.109.193	1.140.170	1.322.188
	1.745.729	566.612	2.175	939.269
	25.275.294	23.015.280	18.153.187	14.597.887

Tabel Q.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 Desember 2021				
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136.285.685	35.602.969	3.076.416
2	Pertambangan dan Penggalian	8.747.420	1.669.569	1.365.373
3	Industri pengolahan	94.822.251	21.273.951	4.544.548
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35.594.040	7.928.234	393.882
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-
6	Konstruksi	37.625.128	11.671.745	612.854
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	311.195.164	69.901.672	13.613.293
8	Pengangkutan dan Pergudangan	4.289.545	949.337	255.605
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	38.993.345	24.160.876	665.757
10	Informasi dan Komunikasi	16.352.395	3.606.110	618.852
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	76.131.919	50.746.851	3.663.554
12	Real Estat	5.412.519	1.166.416	482.469
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	710.219	108.677	2.281
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	4.613.942	769.465	77.017
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	712.487	163.291	551
16	Pendidikan	824.849	175.020	9.738
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3.963.423	1.150.354	28.307
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	41.504.820	9.334.584	710.793
19	Aktivitas Jasa Lainnya	24.638.163	6.146.949	553.583
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.178.313	259.816	31.693
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	218.612.039	49.537.514	2.632.299
23	Lainnya	594.645.801	-	3.455
	TOTAL	1.656.853.466	296.323.402	33.342.319
31 Desember 2020				
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	114.293.084	13.969.345	3.251.769
2	Pertambangan dan Penggalian	8.101.091	1.791.242	1.717.282
3	Industri pengolahan	83.282.067	9.531.125	4.025.095
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	36.176.876	2.468.572	424.283
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	57.920	-	5.661
6	Konstruksi	37.296.482	7.538.426	407.637
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	384.542.988	7.868.401	13.825.960
8	Pengangkutan dan Pergudangan	15.817.823	2.887.239	261.395
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	14.409.053	1.806.054	179.971
10	Informasi dan Komunikasi	3.873.540	691.488	3.819
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	14.993.610	105.137	28.261
12	Real Estat	3.939.232	284.763	46.845
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	528.565	12.686	5.836



	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
	(6)	(7)		(8)
	4.128.772	7.929.993	2.891.460	3.216.768
	90.647	835.654	1.815.858	236.029
	1.467.005	6.615.771	6.167.313	823.603
	190.456	487.321	384.411	68.723
	-	-	-	-
	352.560	3.516.032	646.392	301.661
	8.192.358	9.119.068	4.850.326	9.680.398
	35.393	103.497	715.770	320.634
	800.373	1.042.213	768.992	444.608
	171.731	2.390.441	536.031	213.181
	1.562.217	359.560	1.753.174	31.483
	128.922	192.613	431.405	161.815
	15.640	8.135	2.616	2.190
	98.731	120.564	60.735	6.760
	10.569	782	299	101
	19.057	33.177	6.262	16.013
	77.271	105.383	22.441	37.247
	1.036.876	7.125.624	645.329	610.691
	735.265	745.948	585.740	38.195
	23.350	48.922	20.758	37.915
	-	-	-	-
	4.114.091	1.391.698	1.585.213	1.500.121
	16	-	923	-
	23.251.300	42.172.393	23.891.447	17.748.138
	4.330.855	6.552.591	2.809.479	2.573.765
	123.601	224.082	2.169.289	35.120
	2.071.277	4.472.796	5.086.136	1.128.634
	1.186.982	258.841	559.898	106.054
	1.553	661	3.070	267
	893.657	2.281.256	296.542	445.174
	10.959.582	5.171.153	4.827.614	7.514.375
	398.359	844.135	433.648	372.761
	470.045	736.885	144.132	274.998
	133.934	243.254	352.810	20.531
	171.450	29.392	25.545	8.833
	170.829	105.928	32.196	76.641
	17.468	3.099	3.796	6.465

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	5.828.077	318.003	495.175
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.359.043	13	838
16	Pendidikan	823.544	4.376	10.785
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	3.207.756	88.149	58.193
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	2.531.957	1.001.872	362.887
19	Aktivitas Jasa Lainnya	50.040.256	977.567	677.304
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.451.865	5.184	24.389
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
22	Bukan Lapangan Usaha	216.915.382	865.205	2.049.070
23	Lainnya	565.989.186	-	1.727
	TOTAL	1.565.459.396	52.214.848	27.864.181

Rincian Mutasi Pencadangan - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel R.a Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

No.	Keterangan	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 1	Stage 2	Stage 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Saldo awal CKPN	25.275.310	23.015.282	18.153.188	16.240.168	19.071.393	17.083.161
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	-	-	-	-	-	-
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	1.779.518	23.054.106	18.694.223	10.387.402	6.024.921	12.301.989
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(7.537.184)	(4.306.041)	(1.134.541)	-	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(141.367)	(773.537)	(13.859.718)	(1.258.287)	(2.093.639)	(11.245.961)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	(3.165)	62.802	589.363	(93.989)	(12.605)	13.998
	Saldo akhir CKPN	19.373.112	41.052.612	22.442.515	25.275.293	23.015.281	18.153.187

Tabel R.b Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Keterangan	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 1	Stage 2	Stage 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Saldo awal CKPN	27.409.257	23.378.868	19.863.675	16.538.390	19.547.391	17.590.053
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	-	-	-	-	-	-
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	5.635.137	22.172.365	21.384.546	13.175.013	5.139.395	14.710.084
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	(9.977.771)	(2.253.868)	(1.154.097)	-	-	-

	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) -Stage 3	Tagihan yang dihapus buku
	(6)	(7)		(8)
	163.494	119.126	278.951	97.722
	20.142	439	424	10.727
	25.592	6.986	5.991	10.213
	102.178	39.476	39.394	18.374
	30.491	469.853	359.497	25.228
	2.257.621	656.630	653.729	496.842
	41.818	24.742	14.169	36.220
	-	-	-	-
	4.070.096	1.109.193	1.140.170	1.528.681
	1.745.737	566.612	2.637	939.269
	29.386.761	23.917.129	19.239.117	15.726.894

No.	Keterangan	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Stage 1	Stage 2	Stage 3	Stage 1	Stage 2	Stage 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(141.367)	(773.537)	(16.833.234)	(772.929)	(847.131)	(14.222.308)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	326.045	(351.436)	630.558	446.287	77.474	1.161.288
Saldo akhir CKPN		23.251.301	42.172.393	23.891.448	29.386.761	23.917.129	19.239.117

Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank BRI mengacu pada ketentuan regulator sebagai berikut:

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar,
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 48/SEOJK.03/2017 perihal Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, serta
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2018 perihal Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank BRI menggunakan peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh regulator sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan. Hasil perhitungan eksposur berdasarkan peringkat eksternal sesuai dengan pendekatan standar seperti terlihat pada tabel berikut.

Tagihan Bersih sesuai Skala Peringkat - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel S.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

31 Desember 2021								
	Kategori Portofolio	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang					
		<i>Standard and Poor's</i>	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		<i>Fitch Ratings</i>	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		<i>Moody's</i>	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		<i>PT. Fitch Ratings Indonesia</i>	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	42.937.532	3.440.245	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	352.942	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	1.001.391	919.974	762.797	10.276.226	3.907.720	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	40.054	185.265	-	8.238.336	4.914.446	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	-	1.041.445	1.105.239	762.797	61.805.036	12.262.411	

31 Desember 2021

Tagihan Bersih

Peringkat Jangka Pendek							Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	425.805.428	472.183.205	
-	-	-	-	-	-	64.876.656	65.229.598	
-	-	-	-	-	-	-	-	
104.306	-	-	-	-	-	67.847.392	84.819.806	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	226.752.607	240.130.708	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
104.306	-	-	-	-	-	785.282.083	862.363.317	

31 Desember 2020								
(1)	(2)	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang					
			Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
			Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
			Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
			PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
			PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	40.530	-	45.510.452	1.170.047	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	1.018	-	269.527	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	798.358	819.025	1.194.776	6.768.842	1.849.576	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	50.116	-	6.100.546	4.800.653	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	-	798.358	910.689	1.194.776	58.649.367	7.820.276	

Tabel S.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

31 Desember 2021								
Tagihan Bersih								
(1)	(2)	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang					
			Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
			Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
			Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
			PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
			PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	48.175.941	3.440.245	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	41.163	-	-	352.942	-	

31 Desember 2020
Tagihan Bersih

Peringkat Jangka Pendek							Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	384.109.628	430.830.657	
-	-	-	-	-	-	66.655.810	66.926.355	
-	-	-	-	-	-	-	-	
46.120	-	-	-	-	-	56.708.333	68.185.030	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	226.277.680	237.228.995	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
46.120	-	-	-	-	-	733.751.451	803.171.037	

31 Desember 2021
Tagihan Bersih

Peringkat Jangka Pendek							Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	425.805.428	477.421.614	
-	-	-	-	-	-	66.237.409	66.631.514	

31 Desember 2021								
Tagihan Bersih								
(1)	(2)	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang					
			Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
			Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
			Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
			PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
			PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	1.001.621	919.974	762.797	10.276.226	3.907.720	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	40.054	185.265	-	8.238.336	4.914.446	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	-	1.082.838	1.105.239	762.797	67.043.445	12.262.411	

31 Desember 2020								
Tagihan Bersih								
(1)	(2)	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang					
			Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
			Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
			Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3
			PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
			PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	40.530	-	45.510.452	1.170.047	1.170.047	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	342.770	1.018	-	300.016	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	798.358	819.025	1.194.776	6.768.842	1.849.576	1.849.576	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	

31 Desember 2021
Tagihan Bersih

	B+ s.d B-	Kurang dari B-	Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
			A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3	(15)	(16)
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.306	-	-	-	-	-	74.258.749	91.231.393
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	237.502.893	250.880.994
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	104.306	-	-	-	-	-	803.804.479	886.165.515

31 Desember 2020
Tagihan Bersih

	B+ s.d B-	Kurang dari B-	Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
			A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3	(15)	(16)
	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	-	-	-	-	-	-	391.691.908	438.412.937
	-	-	-	-	-	-	67.738.881	68.382.685
	-	-	-	-	-	-	-	-
	46.120	-	-	-	-	-	57.088.909	68.565.606
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

31 Desember 2020								
Tagihan Bersih								
(1)	(2)	Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang					
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	106.364	-	6.100.546	4.800.653	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	-	1.141.128	966.937	1.194.776	58.679.856	7.820.276	

Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

Risiko kredit akibat pihak lawan (*counterparty credit risk*) dapat terjadi akibat transaksi *derivative*, *repo* dan *reverse repo*. Sesuai kondisi pasar keuangan Indonesia yang belum memiliki banyak instrumen derivatif, Bank BRI memiliki eksposur derivatif yang tidak terlalu signifikan. Berdasarkan pelaporan Pendekatan Standar, eksposur risiko kredit pihak lawan (*Counterparty Credit Risk*) adalah sebagai berikut.

Transaksi Derivatif - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel T.a Pengungkapan Tagihan Bersih Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan Berdasarkan Pendekatan Yang digunakan

		a	b	c	d	e	f
		Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	729.166	933.479	-	1,4	2.327.703	909.201
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)	-	-	-	-	N/A	N/A
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)	-	-	-	-	N/A	N/A

31 Desember 2020

Tagihan Bersih

		Peringkat Jangka Pendek					Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
B+ s.d B-	Kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	238.145.027	249.152.590	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
46.120	-	-	-	-	-	754.664.725	824.513.818	

		a	b	c	d	e	f
		Replacement cost (RC)	Potential future exposure (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD	Tagihan Bersih	ATMR
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)	-	-	-	-	0	0
5	VaR untuk SFT	-	-	-	-	N/A	N/A
6	Total	-	-	-	-	-	909.201

Tabel T.b Pengungkapan Capital Charge untuk Credit Valuation Adjustment

		a	b
		EAD setelah MRK	ATMR
	Total portfolios berdasarkan Advanced CVA capital charge	N/A	N/A
1	(i) komponen VaR (termasuk 3x multiplier)		N/A
2	(ii) komponen Stressed VaR (termasuk 3x multiplier)		N/A
3	Semua Portfolio sesuai Standardised CVA Capital Charge	1.857.495	155.368
4	Total sesuai CVA Capital Charge	1.857.495	155.368

Tabel T.c Pengungkapan Tagihan Bersih Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan Berdasarkan Bobot Risiko Pengungkapan Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portfolio dan Bobot Risiko

Bobot Risiko	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Kategori Portofolio	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Others	Total Tagihan Bersih
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	53.919.992	-	-	-	-	-	-	-	53.919.992
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	366.664	-	-	-	-	366.664
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Bank Lain	-	-	3.051.106	947.019	-	-	-	-	3.998.125
Tagihan kepada perusahaan sekuritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	118.933	-	-	118.933
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan aset lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	53.919.992	-	3.051.106	1.313.683	-	118.933	-	-	58.403.713

Tabel T.d Pengungkapan Tagihan Bersih Derivatif Kredit

	a	b
	Proteksi yang dibeli	Proteksi yang dijual
Notional	-	-
Single-name credit default swaps	-	-
Index credit default swaps	-	-
Total return swaps	-	-
Credit options	-	-
Derivatif kredit lainnya	-	-
Total notional	-	-
Nilai wajar	-	-
Nilai wajar positif (aset)	-	-
Nilai wajar negatif (kewajiban)	-	-

Ket: Bank BRI baik secara individu dan konsolidasi tidak memiliki transaksi derivatif kredit

Mitigasi Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar sesuai SEOJK No.42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman perhitungan ATMR risiko kredit, Bank dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai Teknik MRK, dengan beberapa syarat pengakuan yang harus dipenuhi oleh Bank. Jenis agunan keuangan yang diakui (*eligible financial collateral*) dalam Teknik MRK-Agunan diantaranya adalah uang tunai, giro/tabungan/deposito, emas, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan lain-lain yang diatur dalam SE OJK tersebut di atas. Sementara agunan berupa *fixed asset, inventory, tanah/bangunan* yang dimiliki oleh Bank, tidak diakui dalam pendekatan standar.



Pengungkapan Eksposur Risiko Kredit dan Mitigasi Risiko Kredit

Berdasarkan pelaporan pendekatan standar, eksposur Bank, dan mitigasi risiko kredit yang digunakan adalah sebagai berikut.

Transaksi Bersih per Bobot Risiko Setelah Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel U.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021											ATMR	Beban Modal	
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
A Eksposur Laporan Posisi Keuangan															
1	Tagihan Kepada Pemerintah	417.029.015	-	-	-	-	-	-	-	1.234.198	-	-	1.234.198	98.736	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	397.578	5.804.189	-	-	-	-	41.704.597	-	-	-	-	22.013.136	1.761.051	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	50.913.262	-	-	-	-	9.067.510	-	7.928	-	-	14.724.335	1.177.947	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	1.462.327	2.568.208	1.444.006	-	-	-	-	-	-	-	1.439.920	115.194	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	7.060.866	-	-	7.060.866	564.869	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	151.833.350	-	-	-	-	75.916.675	6.073.334	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	561.401	21.714.448	-	-	-	-	-	444.296.477	-	-	-	337.565.247	27.005.220	
9	Tagihan kepada Korporasi	15.548.193	2.527.060	-	-	-	-	89.367	-	219.455.621	-	-	220.005.717	17.600.457	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	95	-	-	-	-	-	-	-	122.660	6.324.674	-	9.609.671	768.774	
11	Aset Lainnya	26.190.243	-	-	-	-	-	-	-	50.493.914	135.169	-	50.696.668	4.055.733	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	459.726.525	82.421.286	2.568.208	1.444.006	-	-	202.694.824	444.296.477	278.375.187	6.459.843	-	740.266.433	59.221.315	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif															
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	16.956.571	-	-	-	-	8.478.285	678.263	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	3.060.564	-	-	-	-	17.772.418	-	-	-	-	9.498.322	759.866	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	162.226	-	-	-	121.670	9.734	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	2.391.534	-	-	2.391.534	191.323	

	31 Desember 2020											ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
	0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
	387.204.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	260.264	6.269.649	-	-	-	-	49.028.107	-	-	-	-	25.767.984	2.061.439
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	30.828.131	-	-	-	-	13.470.866	-	8.173	-	-	12.909.232	1.032.739
	-	1.349.174	2.998.656	2.090.910	-	-	-	-	-	-	-	1.751.318	140.105
	-	-	-	-	-	-	-	-	7.614.839	-	-	7.614.839	609.187
	-	-	-	-	-	-	155.577.385	-	-	-	-	77.788.693	6.223.095
	833.903	23.198.291	-	-	-	-	-	380.127.939	-	-	-	289.735.612	23.178.849
	18.667.691	1.857.440	-	-	-	-	112.748	-	212.420.646	-	-	212.848.508	17.027.881
	563	-	-	-	-	-	-	-	117.921	6.213.297	-	9.437.867	755.029
	31.020.727	-	-	-	-	-	-	-	44.340.225	54.788	-	44.422.407	3.553.793
	437.987.579	63.502.685	2.998.656	2.090.910	-	-	218.189.106	380.127.939	264.501.804	6.268.085	-	682.276.460	54.582.117
	3.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	10.899.518	-	-	-	-	5.449.759	435.981
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	450.327	-	-	-	-	19.107.261	-	-	-	-	9.643.695	771.496
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	101.986	-	-	-	76.490	6.119
	-	-	-	-	-	-	-	-	4.098.239	-	-	4.098.239	327.859

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021											ATMR	Beban Modal	
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	-	3.060.564	-	-	-	-	34.728.989	162.226	2.391.534	-	-	20.489.811	1.639.185	
C Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)															
1	Tagihan Kepada Pemerintah	53.919.992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	366.664	-	-	-	-	183.332	14.667	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	3.051.106	-	-	-	-	947.019	-	-	-	-	1.083.731	86.698	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	118.933	-	-	118.933	9.515	
7	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.368	12.429	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	53.919.992	3.051.106	-	-	-	-	1.313.683	-	118.933	-	-	1.541.364	123.309	

Transaksi Bersih per Bobot Risiko Setelah Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel U.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021											ATMR	Beban Modal	
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
A Eksposur Laporan Posisi Keuangan															
1	Tagihan Kepada Pemerintah	421.617.046	-	-	-	-	-	-	-	1.234.198	-	-	1.234.198	98.736	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	397.578	6.094.677	-	-	-	-	42.815.054	-	-	-	-	22.626.462	1.810.117	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	356.631	56.323.247	-	-	-	-	9.712.480	-	7.928	-	-	16.128.817	1.290.305	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	1.462.327	2.646.892	1.765.871	-	-	-	-	-	-	-	1.572.243	125.779	

	31 Desember 2020											ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
	0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.964	450.327	-	-	-	-	30.006.779	101.986	4.098.239	-	-	19.268.183	1.541.455
	43.622.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.018	-	-	-	-	467.799	-	-	-	-	234.103	18.728
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	3.591.474	-	-	-	-	728.798	-	-	-	-	1.082.693	86.615
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	72.231	-	-	72.232	5.779
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.068	19.605
	43.622.262	3.592.492	-	-	-	-	1.196.597	-	72.231	-	-	1.634.096	130.728

	31 Desember 2020											ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
	0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
	394.786.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	260.264	6.612.419	-	-	-	-	50.126.667	-	-	-	-	26.385.818	2.110.865
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	31.158.800	-	-	-	-	13.520.773	-	8.173	-	-	13.000.319	1.040.026
	-	1.349.174	3.089.627	2.443.371	-	-	-	-	-	-	-	1.897.422	151.794

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021											ATMR	Beban Modal	
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	7.086.599	-	-	7.086.599	566.928	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	152.345.116	-	-	-	-	76.172.558	6.093.805	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	44.888.760	26.709.086	-	-	-	-	32.377.176	449.380.351	-	-	-	358.565.668	28.685.253	
9	Tagihan kepada Korporasi	16.646.887	2.527.060	-	-	-	-	89.367	-	228.984.726	-	-	229.534.822	18.362.786	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	13.969	-	-	-	-	-	-	-	125.396	6.448.617	-	9.798.321	783.866	
11	Aset Lainnya	26.907.791	-	-	-	-	-	-	-	67.638.363	1.609.842	-	70.053.127	5.604.250	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	510.828.662	93.116.397	2.646.892	1.765.871	-	-	237.339.193	449.380.351	305.077.210	8.058.459	-	792.772.815	63.421.825	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif															
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	16.957.541	-	-	-	-	8.478.770	678.302	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	3.060.564	-	-	-	-	17.772.418	-	-	-	-	9.498.322	759.866	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	7	1	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	20	2	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	171.215	-	-	-	128.411	10.273	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	2.514.023	-	-	-	-	2.514.023	201.122	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-	146	12	
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	-	3.060.564	-	20	-	-	37.244.022	171.215	-	97	-	20.619.699	1.649.576	
C Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)															
1	Tagihan Kepada Pemerintah	54.570.370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	366.664	-	-	-	-	183.332	14.667	

	31 Desember 2020											ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
	0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	7.643.756	-	-	7.643.756	611.500
	-	-	-	-	-	-	156.206.546	-	-	-	-	78.103.274	6.248.262
	833.903	23.198.291	-	-	-	-	-	384.369.353	-	-	-	292.916.673	23.433.334
	18.667.691	1.857.440	-	-	-	-	168.996	-	224.119.301	-	-	224.575.287	17.966.023
	563	-	-	-	-	-	-	-	154.512	6.665.956	-	10.153.447	812.276
	31.034.802	-	-	-	-	-	-	-	44.728.326	62.974	-	44.822.787	3.585.823
	445.583.934	64.176.124	3.089.627	2.443.371	-	-	220.022.982	384.369.353	276.654.068	6.728.930	-	699.498.783	55.959.903
	3.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	10.914.518	-	-	-	-	5.457.259	436.581
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	450.327	-	-	-	-	19.107.261	-	-	-	-	9.643.695	771.496
	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	3	0
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	61	-	-	-	-	31	2
	-	-	-	-	-	-	-	154.861	-	-	-	116.146	9.292
	-	-	-	-	-	-	-	-	4.266.932	-	-	4.266.932	341.355
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.964	450.327	-	9	-	-	30.021.840	154.861	4.266.932	-	-	19.484.066	1.558.725
	43.622.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1.018	-	-	-	-	467.799	-	-	-	-	234.103	18.728

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021											ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	3.051.106	-	-	-	-	947.019	-	-	-	-	1.083.731	86.698
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	118.933	-	-	118.933	9.515
7	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.368	12.429
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	54.570.370	3.051.106	-	-	-	-	1.313.683	-	118.933	-	-	1.541.364	123.309

Transaksi Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel V.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021						
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin	
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	
A Eksposur Laporan Posisi Keuangan								
1	Tagihan Kepada Pemerintah	418.263.213	-	-	-	-	418.263.213	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	47.906.364	397.578	-	-	-	47.508.786	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	59.988.700	-	-	-	-	59.988.700	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	5.474.541	-	-	-	-	5.474.541	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	7.060.866	-	-	-	-	7.060.866	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	151.833.350	-	-	-	-	151.833.350	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	466.572.326	561.401	-	21.714.448	-	444.296.477	
9	Tagihan kepada Korporasi	237.620.241	15.548.193	-	-	-	222.072.048	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	6.447.429	95	-	-	-	6.447.334	
11	Aset Lainnya	76.819.326	-	-	-	-	76.819.326	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan-	1.477.986.356	16.507.267	-	21.714.448	-	1.439.764.641	

	31 Desember 2020											ATMR	Beban Modal
	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												
	0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	3.591.474	-	-	-	-	728.798	-	-	-	-	1.082.693	86.615
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	72.231	-	-	72.232	5.779	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.068	19.605	
	43.622.262	3.592.492	-	-	-	-	1.196.597	-	72.231	-	1.634.096	130.728	

	31 Desember 2020					
	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
		Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9) - [(10)+(11)+(12)+(13)]	
387.204.431	-	-	-	-	387.204.431	
55.558.020	260.264	-	-	-	55.297.756	
-	-	-	-	-	-	
44.307.170	-	-	-	-	44.307.170	
6.438.740	-	-	-	-	6.438.740	
7.614.839	-	-	-	-	7.614.839	
155.577.385	-	-	-	-	155.577.385	
404.160.133	833.903	-	23.198.291	-	380.127.939	
233.058.525	18.667.691	-	-	-	214.390.834	
6.331.781	563	-	-	-	6.331.218	
75.415.740	-	-	-	-	75.415.740	
1.375.666.764	19.762.421	-	23.198.291	-	1.332.706.052	

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021						Bagian Yang Tidak Dijamin	
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan						
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]		
B Eksposur Transaksi Rekening Adminstratif									
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-		
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.956.571	-	-	-	-	16.956.571		
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-		
4	Tagihan Kepada Bank	20.832.982	-	-	-	-	20.832.982		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-		
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-		
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-		
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	162.226	-	-	-	-	162.226		
9	Tagihan kepada Korporasi	2.391.534	-	-	-	-	2.391.534		
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-		
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	40.343.313	-	-	-	-	40.343.313		
C Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)									
1	Tagihan Kepada Pemerintah	53.919.992	-	-	-	-	53.919.992		
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	366.664	-	-	-	-	366.664		
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-		
4	Tagihan Kepada Bank	3.998.125	-	-	-	-	3.998.125		
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-		
6	Tagihan kepada Korporasi	118.933	-	-	-	-	118.933		
	Total Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)	58.403.714	-	-	-	-	58.403.714		
TOTAL (A+B+C)		1.576.733.383	16.507.267	-	21.714.448	-	1.538.511.668		

Catatan:

Sesuai dengan SE OJK No.42/SEOJK.03/2016 perihal "Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar", yang termasuk dalam mitigasi risiko kredit adalah agunan (*eligible financial collateral*), garansi, penjaminan atau asuransi kredit.

Diluar agunan *eligible financial collateral* tersebut, BRI memiliki agunan berupa Aset Tetap, piutang dagang, persediaan, dan agunan lainnya. "

31 Desember 2020						
Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin	
	Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9) - [(10)+(11)+(12)+(13)]	
3.964	-	-	-	-	3.964	
10.899.518	-	-	-	-	10.899.518	
-	-	-	-	-	-	
19.557.588	-	-	-	-	19.557.588	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
101.986	-	-	-	-	101.986	
4.098.239	-	-	-	-	4.098.239	
-	-	-	-	-	-	
34.661.295	-	-	-	-	34.661.295	
43.622.262	-	-	-	-	43.622.262	
468.817	-	-	-	-	468.817	
-	-	-	-	-	-	
4.320.272	-	-	-	-	4.320.272	
-	-	-	-	-	-	
72.231	-	-	-	-	72.231	
48.483.582	-	-	-	-	48.483.582	
1.458.811.641	19.762.421	-	23.198.291	-	1.415.850.929	

Tabel V.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A Eksposur Laporan Posisi Keuangan							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	422.851.244	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	49.307.309	-	-	397.578	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	66.400.286	-	-	714.225	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	5.875.090	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	7.086.599	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	152.345.116	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	553.355.373	26.709.086	-	77.265.936	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	248.248.040	-	-	16.646.887	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	6.587.981	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	96.155.996	-	-	-	-	
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan-	1.608.213.034	26.709.086	-	95.024.626	-	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.957.541	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	20.832.982	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	20	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	40	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	171.215	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	2.514.023	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	97	-	-	-	-	
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	40.475.918	-	-	-	-	
C Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan Kepada Pemerintah	54.570.370	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	366.664	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	



31 Desember 2020							
	Bagian Yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
	(8) = (3)- [(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)- [(10)+(11)+(12)+(13)]
		394.786.711	-	-	-	-	394.786.711
		56.999.350	260.264	-	-	-	56.739.086
		-	-	-	-	-	-
		44.687.746	-	-	-	-	44.687.746
		6.882.172	100	-	-	-	6.882.072
		7.643.756	-	-	-	-	7.643.756
		156.206.546	-	-	-	-	156.206.546
		408.401.547	1.030.827	-	23.198.291	-	384.172.429
		244.813.428	19.609.046	-	-	-	225.204.382
		6.821.031	563	-	-	-	6.820.468
		75.826.102	-	-	-	-	75.826.102
		1.403.068.389	20.900.800	-	23.198.291	-	1.358.969.298
		3.964	-	-	-	-	3.964
		10.914.518	-	-	-	-	10.914.518
		-	-	-	-	-	-
		19.557.588	-	-	-	-	19.557.588
		9	-	-	-	-	9
		-	-	-	-	-	-
		61	-	-	-	-	61
		154.861	-	-	-	-	154.861
		4.266.932	-	-	-	-	4.266.932
		-	-	-	-	-	-
		34.897.933	-	-	-	-	34.897.933
		43.622.262	-	-	-	-	43.622.262
		468.817	-	-	-	-	468.817
		-	-	-	-	-	-

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
4	Tagihan Kepada Bank	3.998.125	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	118.933	-	-	-	-	
	Total Eksposur Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)	59.054.092	-	-	-	-	
	TOTAL (A+B+C)	1.707.743.044	26.709.086	-	95.024.626	-	

Catatan:

Sesuai dengan SE OJK No.42/SEOJK.03/2016 perihal "Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar", yang termasuk dalam mitigasi risiko kredit adalah agunan (*eligible financial collateral*), garansi, penjaminan atau asuransi kredit.

Diluar agunan *eligible financial collateral* tersebut, BRI memiliki agunan berupa Aset Tetap, piutang dagang, persediaan, dan agunan lainnya. "

Sekuritisasi Aset

Tabel W.a. Pengungkapan Eksposeur Sekuritisasi Pada Banking Book

No	Individu	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor		
		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	Retail (total) –antara lain	0	0	0	0	0	
2	Kredit perumahan	0	0	0	0	0	
3	Kartu kredit	0	0	0	0	0	
4	Eksposur ritel lainnya	0	0	0	0	0	
5	Re-sekuritisasi	0	0	0	0	0	
6	Non-retail (total) – antara lain	0	0	0	0	0	
7	Kredit korporasi	0	0	0	0	0	
8	Kredit komersil	0	0	0	0	0	
9	Sewa dan piutang	0	0	0	0	0	
10	Non-retail lainnya	0	0	0	0	0	
11	Re-sekuritisasi	0	0	0	0	0	

Tabel W.b. Pengungkapan Eksposeur Sekuritisasi Pada Trading Book

No	Individu Indonesia	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor		
		Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal
1	Retail (total) – antara lain	0	0	0	0	0	
2	pinjaman perumahan	0	0	0	0	0	
3	kartu kredit	0	0	0	0	0	
4	eksposeur ritel lainnya	0	0	0	0	0	
5	re-sekuritisasi	0	0	0	0	0	

31 Desember 2020							
	Bagian Yang Tidak Dijamin	Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
	(8) = (3) - [(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9) - [(10)+(11)+(12)+(13)]
		4.320.272	-	-	-	-	4.320.272
		-	-	-	-	-	-
		72.231	-	-	-	-	72.231
		48.483.582	-	-	-	-	48.483.582
		1.486.449.904	20.900.800	-	23.198.291	-	1.442.350.813

Bank sebagai investor				
	Sub-total	Tradisional	Sintetis	Sub-total
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Bank sebagai investor				
	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

No	Individu	Bank sebagai originator			Bank sebagai sponsor		
	Indonesia	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	
6	Non-retail(total) – antara lain	0	0	0	0	0	
7	kredit korporasi	0	0	0	0	0	
8	kredit komersil	0	0	0	0	0	
9	sewa dan piutang	0	0	0	0	0	
10	non-retail lainnya	0	0	0	0	0	
11	re-sekuritisasi	0	0	0	0	0	

Tabel X.a. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi Pada Banking Book Ketika Bank Sebagai Originator atau Sponsor dan Persyaratan Permodalannya

No	Individu	Nilai Eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai Eksposur (berdasarkan regulatory approach)				
	Indonesia	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	
1	Total eksposur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Sekuritisasi tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Dimana <i>underlying</i> sekuritisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	ritel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	non-ritel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Dimana re-sekuritisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Non-senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Sekuritisasi sintetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Dimana <i>underlying</i> sekuritisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	ritel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	non-ritel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Dimana re-sekuritisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Non-senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi pada *Banking Book* dan Persyaratan Permodalannya - Bank sebagai Investor

Tabel X.b. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi Pada Banking Book Ketika Bank Investor

No	Individu	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				
	Indonesia	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	
1	Total eksposur	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Sekuritisasi tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		Bank sebagai investor		
	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap			
	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap		
	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

No	Individu	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)						Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)			
	Indonesia	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA
3	Dimana underlying sekuritisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ritel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	non-retail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Dimana re-sekuritisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Non-senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Sekuritisasi sintetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dimana underlying sekuritisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ritel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	non-retail	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Dimana re-sekuritisasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Non-senior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Individu

No	Konsolidasi	Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					
	Indonesia	≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA
1	Total eksposur	0	0	0	0	0	0
2	Sekuritisasi tradisional	0	0	0	0	0	0
3	Dimana underlying sekuritisasi	0	0	0	0	0	0
4	ritel	0	0	0	0	0	0
5	non-retail	0	0	0	0	0	0
6	Dimana re-sekuritisasi	0	0	0	0	0	0
7	Senior	0	0	0	0	0	0
8	Non-senior	0	0	0	0	0	0
9	Sekuritisasi sintetis	0	0	0	0	0	0
10	Dimana underlying sekuritisasi	0	0	0	0	0	0
11	ritel	0	0	0	0	0	0
12	non-retail	0	0	0	0	0	0
13	Dimana re-sekuritisasi	0	0	0	0	0	0
14	Senior	0	0	0	0	0	0
15	Non-senior	0	0	0	0	0	0

	ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap		
	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

	Exposure Values (berdasarkan regulatory approach)				ATMR (berdasarkan regulatory approach)				Capital charge after cap		
	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit menggunakan Pendekatan Standar

Berdasarkan kategori eksposur sesuai pendekatan standar, Bank BRI memiliki eksposur sebagai berikut.

Eksposur Aset di Neraca - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel Y.a. Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	418.263.213	1.234.198	1.234.198	387.204.431	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	417.029.015	-	-	385.789.092	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	1.234.198	1.234.198	1.234.198	1.415.339	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	47.906.364	22.211.925	22.013.136	55.558.020	25.898.116	25.767.984
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	59.988.699	14.724.335	14.724.335	44.307.170	12.909.232	12.909.232
	a. Tagihan Jangka Pendek	47.334.422	9.480.364	9.480.364	26.883.305	5.376.661	5.376.661
	b. Tagihan Jangka Panjang	12.654.278	5.243.971	5.243.971	17.423.865	7.532.571	7.532.571
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	5.474.541	1.439.920	1.439.920	6.438.740	1.751.318	1.751.318
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	7.060.866	7.060.866	7.060.866	7.614.839	7.614.839	7.614.839
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	151.833.350	75.916.675	75.916.675	155.577.385	77.788.693	77.788.693
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	466.572.326	349.929.245	337.565.247	404.160.133	303.120.100	289.735.612
9.	Tagihan Kepada Korporasi	237.620.241	235.553.910	220.005.717	233.058.525	231.516.199	212.848.508
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6.447.429	9.609.814	9.609.671	6.331.781	9.438.713	9.437.867
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	122.660	122.660	122.660	117.920	117.920	117.920
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	6.324.769	9.487.154	9.487.011	6.213.861	9.320.793	9.319.947
11.	Aset Lainnya	76.819.326	-	50.696.668	75.415.740	-	44.422.407
	a. Uang tunai, emas, dan commemorative coin	26.190.243	-	-	31.020.727	-	-
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	4.132.252	-	4.170.781	1.110	-	1.665
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	-	-	-	-	-	-
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	77.057	-	115.586	1.110	-	1.665
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	4.055.195	-	4.055.195	-	-	-
	c. Aset tetap dan inventaris neto	33.908.295	-	33.908.295	30.530.046	-	30.530.046
	d. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	58.112	-	87.168	53.678	-	80.517
	e. Antar kantor neto	-	-	-	-	-	-
	f. Lainnya	12.530.424	-	12.530.424	13.810.179	-	13.810.179
	TOTAL	1.477.986.356	717.680.887	740.266.433	1.375.666.764	670.037.210	682.276.460



Tabel Y.b Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca - Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	422.851.244	1.234.198	1.234.198	391.738.979	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	421.617.046	-	-	390.323.640	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	1.234.198	1.234.198	1.234.198	1.415.339	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	49.307.309	22.825.251	22.626.462	56.999.350	26.515.949	26.385.817
3.	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan Kepada Bank	66.400.287	16.092.865	16.128.817	44.687.746	13.000.320	13.000.320
	a. Tagihan Jangka Pendek	53.458.633	10.705.206	10.741.158	27.213.974	5.442.795	5.442.795
	b. Tagihan Jangka Panjang	12.941.654	5.387.659	5.387.659	17.473.772	7.557.525	7.557.525
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	5.875.090	1.572.243	1.572.243	6.882.172	1.897.421	1.897.396
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	7.086.599	7.086.599	7.086.599	7.643.757	7.643.757	7.643.757
7.	Kredit Pegawai atau Pensiunan	152.345.116	76.172.558	76.172.558	156.206.546	78.103.273	78.103.273
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	553.355.373	415.016.529	358.565.668	408.401.547	306.301.160	292.768.980
9.	Tagihan Kepada Korporasi	248.248.039	246.181.708	229.534.822	244.813.428	243.242.977	223.633.931
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6.587.981	9.819.274	9.798.321	6.821.031	10.154.290	10.153.446
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	125.396	125.396	125.396	154.510	154.511	154.511
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	6.462.585	9.693.878	9.672.925	6.666.521	9.999.779	9.998.935
11.	Aset Lainnya	96.155.996	-	70.053.127	75.826.102	-	44.822.787
	a. Uang tunai, emas, dan <i>commemorative coin</i>	26.907.791	-	-	31.034.802	-	-
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	5.897.151	-	6.670.171	1.388	-	2.082
	1) Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	-	-	-	-	-	-
	2) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	1.546.039	-	2.319.059	1.388	-	2.082
	3) Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	4.351.112	-	4.351.112	-	-	-
	c. Aset tetap dan inventaris neto	46.971.406	-	46.971.406	30.871.954	-	30.871.954
	d. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)	63.803	-	95.705	61.586	-	92.379
	e. Antar kantor neto	-	-	-	-	-	-
	f. Lainnya	16.315.845	-	16.315.845	13.856.372	-	13.856.372
	TOTAL	1.608.213.034	796.001.225	792.772.815	1.400.020.658	686.859.147	698.409.707

Eksposur Tagihan Komitmen/Kontinjensi - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel AA.a Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif – Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	3.964	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-	3.964	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.956.571	8.478.285	8.478.285	10.899.518	5.449.759	5.449.759
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	20.832.982	9.498.322	9.498.322	19.557.587	9.643.695	9.643.695
	a. Tagihan Jangka Pendek	3.060.564	612.113	612.113	450.327	90.065	90.065
	b. Tagihan Jangka Panjang	17.772.418	8.886.209	8.886.209	19.107.260	9.553.630	9.553.630
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	162.226	121.670	121.670	101.986	76.490	76.490
9.	Tagihan Kepada Korporasi	2.391.534	2.391.534	2.391.534	4.098.239	4.098.239	4.098.239
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	40.343.312	20.489.810	20.489.810	34.661.294	19.268.183	19.268.183

Tabel AA.b Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif –Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	3.964	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-	3.964	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.957.541	8.478.770	8.478.770	10.914.518	5.457.259	5.457.259
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	Tagihan kepada Bank	20.832.982	9.498.322	9.498.322	19.557.587	9.643.695	9.643.695
	a. Tagihan Jangka Pendek	3.060.564	612.113	612.113	450.327	90.065	90.065
	b. Tagihan Jangka Panjang	17.772.418	8.886.209	8.886.209	19.107.260	9.553.630	9.553.630
5.	Kredit Beragun Rumah Tinggal	20	7	7	9	3	3
6.	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit Pegawai/Pensiunan	40	20	20	61	30	30
8.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	171.216	128.411	128.411	154.861	116.147	116.147
9.	Tagihan Kepada Korporasi	2.514.022	2.514.023	2.514.023	4.266.932	4.266.932	4.266.932
10.	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	97	146	146	-	-	-
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
	b. Selain Kredit Beragun Rumah Tinggal	97	146	146	-	-	-
TOTAL		40.475.918	20.619.699	20.619.699	34.897.932	19.484.066	19.484.066

Eksposur Counterparty Credit Risk - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel AB.a Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	53.919.992	-	-	43.581.732	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	53.919.992	-	-	43.581.732	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	2.156.018	632.162	632.162	1.677.242	478.514	478.514
	a. Tagihan Jangka Pendek	1.486.155	297.231	297.231	1.200.356	240.071	240.071
	b. Tagihan Jangka Panjang	669.863	334.931	334.931	476.886	238.443	238.443
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
TOTAL		56.076.010	632.162	632.162	45.258.974	478.514	478.514

Tabel AB.b Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan – Konsolidasi dengan Entitas Anak (*Counterparty Credit Risk*)

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	54.570.370	-	-	46.629.464	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	54.570.370	-	-	46.629.464	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	2.156.018	632.162	632.162	1.677.242	478.514	478.514
	a. Tagihan Jangka Pendek	1.486.155	297.231	297.231	1.200.356	240.071	240.071
	b. Tagihan Jangka Panjang	669.863	334.931	334.931	476.886	238.443	238.443
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	56.726.388	632.162	632.162	48.306.706	478.514	478.514

Eksposur *Settlement Risk* - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel AC.a Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*) -Bank Secara Individual

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<i>Delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-

Tabel AC.b Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*) -Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<i>Delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
a.	Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
b.	Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
c.	Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
d.	Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2.	<i>Non-delivery versus payment</i>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	-	-

Eksposur Sekuritisasi - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel AD.a Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi - Bank Secara Individual

Jenis Transaksi	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1. ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)	-	-	-	-
2. ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)	-	-	-	-
3. Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-	-	-	-
TOTAL	0	0	0	0

Tabel AD.b Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi - Konsolidasi dengan Entitas Anak

Jenis Transaksi	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
1. ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>External Rating Base Approach</i> (ERBA)	-	-	-	-
2. ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode <i>Standardized Approach</i> (SA)	-	-	-	-
3. Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-	-	-	-
TOTAL	0	0	0	0

Eksposur Derivatif - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel AE.a Pengungkapan Eksposur Derivatif - Bank Secara Individual

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	40.530	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-	40.530	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	366.664	183.332	183.332	468.817	234.103	234.103
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	1.842.107	451.568	451.568	2.643.030	604.179	604.179
	a. Tagihan Jangka Pendek	1.373.785	310.487	310.487	2.148.671	443.570	443.570
	b. Tagihan Jangka Panjang	468.321	141.081	141.081	494.359	160.609	160.609
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	118.933	118.933	118.933	72.231	72.231	72.231
7.	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>			155.368			245.068
TOTAL		2.327.703	753.833	909.201	3.224.608	910.514	1.155.582

Tabel AE.b Pengungkapan Eksposur Derivatif - Konsolidasi dengan Entitas Anak

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	1.831	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-	1.831	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	366.664	183.332	183.332	145.845	57.160	57.160
3.	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4.	Tagihan kepada Bank	1.842.107	451.568	451.568	541.204	127.960	127.960
	a. Tagihan Jangka Pendek	1.373.785	310.487	310.487	402.806	80.586	80.586

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	b. Tagihan Jangka Panjang	468.321	141.081	141.081	138.398	47.374	47.374
5.	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Kepada Korporasi	118.933	118.933	118.933	20.241	20.241	20.241
7.	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)</i>	-	-	155.368			193.123
TOTAL		2.327.703	753.833	909.201	709.121	205.361	398.483

Eksposur di Unit Usaha Syariah - Bank secara Individual dan Konsolidasi dengan Entitas Anak

Tabel AF Pengungkapan Eksposur di Unit Usaha Syariah dan/atau Entitas Anak yang Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah

	31 Desember 2021		31 Desember 2021	
	Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
Total Eksposur	0	0	0	28.113.800

Tabel AG.a Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit – Bank Secara Individu

		31 Desember 2021	31 Desember 2020
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)	762.297.607	703.178.739
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	995.460	861.954
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	761.302.147	702.316.786
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)		

Tabel AG.b Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit - Konsolidasi dengan Entitas Anak

		31 Desember 2021	31 Desember 2020
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)	814.933.877	783.951.223
FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit	(B)	995.460	859.808
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	813.938.417	783.091.416

Risiko Pasar

Pengungkapan Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar

Sebagai Bank yang memenuhi kriteria sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34 /POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, BRI secara berkala melakukan pengungkapan risiko pasar dengan menggunakan Metode Standar yang dilaporkan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk posisi konsolidasi dengan Entitas Anak dilaporkan secara triwulanan.

Tabel AH. Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2021			
		Individual		Konsolidasian	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Risiko Suku Bunga				
	a. Risiko Spesifik	4.434	55.422	4.434	55.422
	b. Risiko Umum	100.945	1.261.808	103.955	1.299.436
2	Risiko Nilai Tukar	156.650	1.958.120	188.248	2.353.098
3	Risiko Ekuitas *)			23.673	295.917
4	Risiko Komoditas *)			23.673	295.917
5	Risiko Option				
	Total	262.028	3.275.349	343.983	4.299.790

Selain metode standar di atas, saat ini BRI juga telah melakukan perhitungan risiko pasar dengan Metode Internal dengan perhitungan *Value at Risk* (VaR) yang menunjukkan suatu nilai yang menggambarkan potensi maksimum atas kerugian yang dialami oleh Bank sebagai akibat pergerakan pasar yang memengaruhi eksposur risiko Bank dalam kondisi pasar yang normal dengan tingkat kepercayaan 99%. Metodologi yang digunakan dalam perhitungan VaR saat ini adalah metode *Delta Gamma* dan sedang dalam pengembangan metode *Historical Simulation*.

Tabel AI Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Model Internal (Value at Risk/VaR) - Bank secara Individual

No	Jenis Risiko	31 Desember 2021				31 Desember 2020			
		VaR Rata-rata	VaR Minimum	VaR Maksimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-rata	VaR Minimum	VaR Maksimum	VaR Akhir Periode
1	Suku Bunga	60.651	4.680	501.987	71.095	19.797	14.238	29.419	18.367
2	Nilai Tukar	13.100	65	32.808	4.747	7.549	135	13.947	6.101
	Total	73.751	4.745	534.795	75.842	27.346	14.773	47.366	24.468

Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book* merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Dalam melakukan perhitungan Risiko Suku Bunga, BRI menggunakan panduan sesuai dengan SEOJK nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang "Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum". Metode yang digunakan bank dalam melakukan pengukuran Risiko IRRBB sebagai berikut:

1. Pengukuran berdasarkan perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (*economic value of equity*) atau ΔEVE , yaitu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank; dan
2. Pengukuran berdasarkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*) atau ΔNII , yaitu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap pendapatan Bank.

31 Desember 2020				
Individual		Konsolidasian		
Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	
(7)	(8)	(9)	(10)	
6.705	83.818	6.705	83.818	
196.315	2.453.935	202.612	2.532.649	
148.168	1.852.094	180.540	2.256.751	
25.279	315.983	25.279	315.983	
376.466	4.705.830	415.136	5.189.201	

Tabel AJ.a Pengungkapan Exposure Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Bank Secara Individu

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
	2021	2020	2021	2020
Parallel Up	(13.959.947)	(13.166.071)	(12.018.503)	(12.435.174)
Parallel Down	14.435.264	13.606.741	11.315.097	11.775.659
Steeper	(6.957.828)	(6.724.876)	-	-
Flattener	3.584.656	3.531.030	-	-
Short Rate Up	(3.202.479)	(2.894.231)	-	-
Short Rate Down	3.215.273	2.905.648	-	-
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	13.959.947	13.166.071	(12.018.503)	12.435.174
Modal Tier 1(untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	231.396.820	174.757.491	96.154.617	91.809.215
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	6,03%	7,53%	12,50%	13,54%

Tabel AJ.b Pengungkapan Exposure Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) Bank Secara Konsolidasi

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
	2021	2020	2021	2020
Parallel Up	(14.336.751)	(14.272.484)	(12.392.876)	(13.094.486)
Parallel Down	14.823.871	14.749.985	11.689.471	12.435.007
Steeper	(7.157.436)	(7.369.974)	-	-
Flattener	3.691.951	3.903.072	-	-
Short Rate Up	(3.279.814)	(3.075.460)	-	-

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
	2021	2020	2021	2020
Short Rate Down	3.292.979	3.087.675	-	-
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	14.336.751	14.272.484	12.392.876	13.094.486
Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	233.429.587	183.867.599	96.185.161	95.632.155
Nilai Maksimum dibagi Modal Tier 1 (untuk Δ EVE) atau <i>Projected Income</i> (untuk Δ NII)	6,14%	7,76%	12,88%	13,69%

Selain pengungkapan eksposur IRRBB, juga dilakukan pengungkapan risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar timbul karena pergerakan nilai tukar pasar yang berlawanan dengan posisi valuta asing BRI. Risiko nilai tukar berasal dari aset dan liabilitas neraca Bank dalam valuta asing, transaksi valuta asing dengan nasabah dan *counterparty* yang menyebabkan *open position* dalam valuta asing, maupun posisi struktural dalam valuta asing akibat penyertaan modal. BRI mengelola risiko nilai tukar dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) sesuai dengan limit risiko dan regulasi dengan posisi aktual per akhir Desember 2021 PDN absolut BRI sebesar 0,81% dari modal.

Tabel AJ.c Pengungkapan Laporan Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB

Analisa Kualitatif	
Penjelasan mengenai bagaimana Bank mendefinisikan IRRBB untuk pengukuran dan pengendalian risiko.	
1	<p><i>Interest Rate Risk in The Banking Book</i> (IRRBB) merupakan risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar akibat berlawanan dengan posisi <i>Banking Book</i> yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas BRI baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang. Risiko pergerakan suku bunga BRI terjadi karena penyesuaian suku bunga aset lebih lambat dari penyesuaian suku bunga liabilitas, hal ini disebabkan komposisi aset BRI yang didominasi suku bunga <i>fixed</i> dan mempunyai <i>repricing maturities</i> lebih panjang.</p> <p>BRI melakukan pengukuran IRRBB menggunakan metode perubahan pada nilai ekonomis dari ekuitas (economic value of equity) atau ΔEVE dan perubahan pada pendapatan bunga bersih (net interest income) atau ΔNII. Simulasi ΔEVE dan ΔNII dilakukan sesuai skenario kenaikan dan penurunan suku bunga (rate shock) dalam SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018.</p> <p>Bank melakukan pengendalian serta mitigasi risiko suku bunga melalui strategi recomposisi aset dan liabilities atau strategi <i>hedging</i>.</p>
Penjelasan mengenai strategi manajemen dan mitigasi IRRBB.	
2	<p>Dalam mitigasi risiko IRRBB, BRI merumuskan strategi pengelolaan dampak pergerakan suku bunga melalui komite <i>Assets & Liability Management</i> (ALCO) dan <i>Risk Management Committee</i> (RMC). ALCO dilaksanakan setiap bulan membahas strategi pengelolaan aset dan liabilitas yang diantaranya adalah <i>balanced pricing, assets allocation, funding mix, gap management, dan capital management</i>. Sedangkan RMC dilaksanakan setiap triwulan dengan salah satu pembahasannya adalah profil risiko pasar dan <i>risk issue</i> terkini.</p>
Periodisasi perhitungan IRRBB bank, dan penjelasan mengenai tindakan spesifik yang digunakan bank untuk mengukur sensitivitas terhadap IRRBB.	
3	<p>BRI melakukan perhitungan IRRBB secara triwulanan dengan menggunakan <i>metode Economic Value of Equity</i> (EVE) dan <i>Net Interest Income</i> (NII). Metode EVE menggunakan perspektif jangka panjang dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap modal Tier 1 BRI. Metode EVE ini sesuai dengan <i>guideline</i> dari Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan metode NII menggunakan perspektif jangka pendek dalam menghitung sensitivitas suku bunga terhadap estimasi pendapatan BRI dalam satu tahun ke depan.</p>
Penjelasan mengenai skenario shock suku bunga dan skenario <i>stress</i> yang digunakan bank untuk mengestimasi perubahan <i>economic value</i> dan <i>earnings</i>.	
4	<p>Skenario yang digunakan dalam perhitungan IRRBB adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Parallel Up</i> (400 bps) b) <i>Parallel Down</i> (400 bps) c) <i>Steeper</i> (350 bps) d) <i>Flattener</i> (350 bps) e) <i>Short Rate Up</i> (500 bps) f) <i>Short Rate Down</i> (500 bps)

Analisa Kualitatif

Asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam Internal Measurement System (IMS) – apabila ada.

Bank tidak memiliki asumsi permodelan yang digunakan secara signifikan dalam *Internal Measurement System* (IMS).

Penjelasan mengenai bagaimana bank melakukan lindung nilai terhadap IRRBB (apabila ada), beserta perlakuan akuntansi terkait.

Bank melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas posisi risiko suku bunga dengan mempertimbangkan tingkat risiko, strategi bisnis, serta proyeksi pergerakan faktor pasar di masa depan.

Penjelasan komprehensif mengenai asumsi utama pemodelan dan parametrik yang digunakan dalam menghitung Δ EVE dan Δ NII.

- 5 Dalam perhitungan IRRBB, BRI menggunakan asumsi-asumsi utama pemodelan dan parametrik sebagai berikut:
- a) Perhitungan arus kas, *instrument* dengan suku bunga *float* menggunakan *risk free* yang bersumber dari JIBOR & *Government Bonds* untuk mata uang rupiah, serta *risk free* valas menggunakan LIBOR dan *Government Bonds* USD. Margin yang digunakan bersumber dari margin rata-rata setiap *instrument*. Sedangkan *Instrument* dengan suku bunga *fix* menggunakan acuan *effective yield* sebagai dasar penentuan *cashflow*.
 - b) *Account Non Maturity Deposit* (NMD) yang terdiri dari giro dan tabungan ditempatkan pada *time bucket overnight*, *time bucket 3 s.d 4 tahun* & *time bucket 4 s.d 5 tahun* sesuai dengan *caps* maksimal yang telah ditentukan oleh regulator. NMD yang ditempatkan pada *time bucket* terpanjang merupakan *core fund* BRI yang mempunyai tingkat sensitivitas suku bunga lebih rendah daripada *non core fund* yang ditempatkan pada *time bucket overnight*.
 - c) Penentuan *prepayment risk* berdasarkan data historis sesuai dengan segmen & produk pinjaman dalam jangka waktu yang dianggap memadai. Perhitungan *baseline* persentase *prepayment* merupakan rasio total saldo pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh tempo terhadap total saldo pinjaman tersebut pada masing-masing segmen. Sedangkan dalam menentukan *early redemption*, metode yang dipakai menggunakan pendekatan historis dengan sumber data yang memadai. Persentase *baseline* yang digunakan dalam *early redemption* merupakan saldo deposito yang dilunasi sebelum jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu terhadap total saldo deposito bulan berjalan.
 - d) Selain pemodelan *prepayment risk* dan *early redemption*, BRI juga menetapkan pemodelan internal untuk *account-account* NPL. NPL Ritel Komersial dengan plafond maksimal 5 miliar rupiah ditempatkan pada *time bucket 3.5 tahun*. Sedangkan NPL Menengah Korporasi dengan plafond di atas 5 miliar rupiah ditempatkan pada *time bucket 3 tahun*. *Account* NPL termasuk *non rate* dimana estimasi *cashflow* nya tidak memperhitungkan *interest*.
 - e) Perhitungan IRRBB menggunakan mata uang rupiah dan USD. Mata uang asing selain mata uang tersebut diagregasikan ke dalam perhitungan USD.

Analisa Kuantitatif

Rata-rata repricing maturity yang diterapkan untuk NMD.

- 1 Giro dan Tabungan merupakan simpanan yang tidak mempunyai jangka waktu dan secara kontraktual mempunyai *maturity overnight*. Sedangkan secara behavioural, BRI menempatkan giro dan tabungan pada *time bucket overnight*, *time bucket 3* sampai dengan 4 tahun dan *time bucket 4* sampai dengan 5 tahun. Penyebaran *Non Maturity Deposit* BRI sesuai jangka waktu posisi 31 Desember 2021:
- a. **Giro**; *time bucket Overnight* (56,45%), *time bucket 3* sampai dengan 4 tahun (31,11%) dan *time bucket 4* sampai dengan 5 tahun (12,44%).
 - b. **Tabungan**; *time bucket Overnight* (17,76%) dan *time bucket 4* sampai dengan 5 tahun (82,24%)

Repricing maturity terpanjang yang diterapkan untuk NMD.

Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. BRI melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan mengukur rasio kecukupan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang yang dihadapi Bank menggunakan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR). Adapun pengungkapan rasio LCR dan NSFR disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Pengungkapan Risiko Likuiditas

Tabel AK Pengungkapan Nilai *Liquidity Coverage Ratio*

No	Komponen	Individual				
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya		
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	
1	Jumlah data poin yang digunakan dalam perhitungan LCR	-	86 hari	-	75 hari	
HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)						
2	Total <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA)	-	393.373.767	-	372.644.043	
ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)						
3	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	575.898.877	32.386.943	565.368.706	31.858.627	
	a. Simpanan/ Pendanaan stabil	504.058.899	25.202.945	493.564.870	24.678.243	
	b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil	71.839.978	7.183.998	71.803.836	7.180.384	
4	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	425.720.123	141.224.958	411.293.379	126.603.724	
	a. Simpanan operasional	173.268.295	38.493.553	166.505.985	34.542.164	
	b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	252.384.922	102.664.499	244.787.394	92.061.560	
	c. Surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank	66.907	66.907	0	0	
5	Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>)	1.567.975	0	10.090.080	2.823.076	
6	Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari:	251.665.120	27.185.539	265.790.810	31.266.580	
	a. Arus kas keluar atas transaksi derivatif	14.931.026	14.931.026	21.210.793	21.210.793	
	b. Arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	0	0	0	0	

(dalam Jutaan Rupiah)

Konsolidasi				
Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
-	86 hari		-	75 hari
-	398.458.113		-	379.421.619
577.822.135	32.509.650		567.446.870	31.993.179
505.451.266	25.272.563		495.030.165	24.751.508
72.370.869	7.237.087		72.416.705	7.241.670
434.551.075	145.168.204		422.164.984	132.240.740
176.524.353	39.283.834		168.928.778	35.125.330
257.959.815	105.817.463		253.236.206	97.115.410
66.907	66.907		0	0
1.567.975	0		10.090.080	2.823.076
252.615.185	27.281.177		266.770.284	31.354.710
14.931.026	14.931.026		21.210.793	21.210.793
0	0		0	0

No	Komponen	Individual			
		Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
		Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).
	c. Arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	0	0	0	0
	d. Arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	111.334.250	8.474.631	129.064.411	6.496.523
	e. Arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	0	0	0	0
	f. Arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	125.381.403	3.761.442	115.418.909	3.462.567
	g. Arus kas keluar kontraktual lainnya	18.441	18.441	96.698	96.698
7	TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW)	-	200.797.440	-	192.552.007
ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)					
8	Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i>	516.971	0	51.977	0
9	Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>)	12.103.153	6.051.880	12.399.708	6.200.079
10	Arus kas masuk lainnya	24.353.343	24.353.343	24.758.188	24.758.188
11	TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW)	-	30.405.222	-	30.958.267
		-	TOTAL ADJUSTED VALUE¹⁾	-	TOTAL ADJUSTED VALUE¹⁾
12	TOTAL HQLA	-	393.373.767	-	372.644.043
13	TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)	-	170.392.218	-	161.593.740
14	LCR (%)	-	230,86%	-	230,61%

Keterangan : 1) *Adjusted value* dihitung pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.

Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* di atas dibuat berdasarkan POJK No.42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum dan POJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan SE OJK No. 09/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Konsolidasi				
Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya	
Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate).	
0	0	0	0	
112.270.244	8.569.846	130.014.210	6.583.763	
0	0	0	0	
125.395.475	3.761.864	115.448.583	3.463.457	
18.441	18.441	96.698	96.698	
-	204.959.032	-	198.411.705	
516.971	0	51.977	0	
12.360.109	6.200.372	12.646.404	6.333.229	
24.371.354	24.362.348	24.778.633	24.768.411	
-	30.562.720	-	31.101.639	
-	TOTAL ADJUSTED VALUE¹⁾	-	TOTAL ADJUSTED VALUE¹⁾	
-	398.458.113	-	379.421.619	
-	174.396.312	-	167.310.065	
-	228,48%	-	226,78%	

Analisis secara Individu

- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) BRI secara Individu posisi Triwulan IV 2021 sebesar 230,86% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan posisi Triwulan III 2021 sebesar 230,61%. Peningkatan rasio ini antara lain disebabkan oleh :
 - a. Peningkatan HQLA sebesar Rp20,73 T atau sebesar 5,56%, yang didominasi antara lain :
 - Peningkatan komponen Kas dan Setara Kas sebesar Rp0,18 T,
 - Penurunan komponen penempatan pada Bank Indonesia yang dapat ditarik saat kondisi stres sebesar Rp16,80 T, dan
 - Peningkatan komponen Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebesar Rp37,39 T.
 - b. Peningkatan *Net Cash Outflow* sebesar Rp8,80 T atau sebesar 5,44% yang merupakan selisih antara Arus Kas Keluar terhadap Arus Kas Masuk. Jumlah Arus Kas Keluar meningkat sebesar Rp8,25 T yang didominasi oleh :
 - Peningkatan Jumlah Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan sebesar Rp0,56 T,
 - Penurunan Jumlah Penarikan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp0,03 T,
 - Peningkatan Jumlah Penarikan yang berasal dari Nasabah Korporasi sebesar Rp14,62 T,
 - Penurunan Jumlah Penarikan Pendanaan dengan Agunan (*Secured Funding*) sebesar Rp2,82 T, dan
 - Penurunan Jumlah Penarikan terkait Arus Kas Keluar Lainnya (*Additional Requirement*) sebesar Rp4,08 T
 Jumlah Arus Kas Masuk menurun sebesar Rp0,55 T yang berasal antara lain dari :
 - Penurunan Jumlah Arus Kas Masuk berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) sebesar Rp0,15 T, dan
 - Penurunan Arus Kas Masuk lainnya yang berasal dari Transaksi *Derivatif* sebesar Rp0,40 T.
- Komposisi HQLA BRI (*Bank Only*) didominasi oleh aset Level 1 sebesar 99,75% yang terdiri atas komponen kas, Cadangan Likuiditas di Bank Indonesia (GWM dan Penempatan pada BI) dan Surat berharga yang tergolong aset level 1. Sedangkan komposisi aset level 2 sebesar 0,25%.
- Mayoritas sumber pendanaan BRI (*Bank Only*) selama Triwulan IV 2021 berasal dari CASA sebesar 63,30% dengan komposisi sebagai berikut :

Komponen Sumber Pendanaan	Komposisi
Giro	19,45%
Tabungan	43,85%
CASA	63,30%
Deposito	36,70%
Total	100,00%

- BRI telah memiliki strategi pengelolaan, *early warning indicator*, dan *Contingency Funding Plan* terkait risiko Likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas antara lain dilakukan dengan menggunakan perhitungan proyeksi arus kas, profil maturitas, monitoring limit likuiditas dan pelaksanaan *stress testing* secara periodik.
- Pengelolaan risiko likuiditas dan simulasi *contingency plan* dilakukan oleh unit kerja yang membidangi *treasury*. Penetapan dan monitoring limit sebagai *early warning indicator* likuiditas serta pelaksanaan *stress testing* likuiditas, secara periodik dilakukan oleh unit kerja *risk management*. Selain itu, saat ini BRI telah memiliki Rencana Aksi (*Recovery Plan*), yang merupakan salah satu langkah *enhancement* dalam Penerapan *Risk Management* dan sebagai pemenuhan ketentuan Regulator.

Tabel AL.a Pengungkapan Nilai *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) – Bank Secara Individu

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan September 2021					Total Nilai Tertimbang
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
1 Modal	-	-	-	-	230.937.456	
2 Modal sesuai POJK KPMM	230.937.456	0	0	0	230.937.456	
3 Instrumen modal lainnya	0	0	0	0	0	
4 Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	491.538.998	119.853.136	6.937.256	1.052.321	585.178.540	
5 Simpanan dan Pendanaan stabil	468.360.260	81.039.291	3.195.809	605.796	525.571.387	
6 Simpanan dan Pendanaan kurang stabil	23.178.739	38.813.845	3.741.447	446.525	59.607.153	
7 Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	185.752.117	258.698.356	52.698.357	34.817.598	275.222.372	
8 Simpanan operasional	185.752.117	0	0	0	92.876.059	

Analisis secara Konsolidasi

- *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* BRI secara Konsolidasi posisi Triwulan IV 2021 sebesar 228,48% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan posisi Triwulan III 2021 sebesar 226,78%. Peningkatan rasio ini antara lain disebabkan oleh :
 - a. Peningkatan HQLA sebesar Rp19,04 T atau sebesar 5,02%, yang didominasi antara lain :
 - Peningkatan komponen Kas dan Setara Kas sebesar Rp0,17 T,
 - Penurunan komponen penempatan pada Bank Indonesia yang dapat ditarik saat kondisi stres sebesar Rp17,22 T, dan
 - Peningkatan komponen Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing sebesar Rp36,12 T.
 - b. Peningkatan *Net Cash Outflow* sebesar Rp7,09 T atau sebesar 4,24% yang merupakan selisih antara Arus Kas Keluar terhadap Arus Kas Masuk. Jumlah Arus Kas Keluar meningkat sebesar Rp6,55 T yang didominasi oleh :
 - Peningkatan Jumlah Penarikan Simpanan Nasabah Perorangan sebesar Rp0,55 T,
 - Penurunan Jumlah Penarikan Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar Rp0,04 T,
 - Peningkatan Jumlah Penarikan yang berasal dari Nasabah Korporasi sebesar Rp12,93 T,
 - Penurunan Jumlah Penarikan Pendanaan dengan Agunan (*Secured Funding*) sebesar Rp2,82 T, dan
 - Penurunan Jumlah Penarikan terkait Arus Kas Keluar Lainnya (*Additional Requirement*) sebesar Rp4,07 T.
 Jumlah Arus Kas Masuk menurun sebesar Rp0,54 T yang berasal antara lain dari :
 - Penurunan Jumlah Arus Kas Masuk berdasarkan pihak lawan (*counterparty*) sebesar Rp0,13 T, dan
 - Penurunan Arus Kas Masuk lainnya yang berasal dari Transaksi *Derivatif* sebesar Rp0,41 T.
- Komposisi HQLA BRI (Konsolidasi) didominasi oleh aset Level 1 sebesar 99,67% yang terdiri atas komponen Kas, Cadangan Likuiditas di Bank Indonesia (GWM dan Penempatan pada BI) dan Surat Berharga yang tergolong aset level 1. Sedangkan komposisi aset level 2 sebesar 0,33%.
- Mayoritas sumber pendanaan BRI (Konsolidasi) selama Triwulan IV 2021 berasal dari CASA sebesar 63,00% dengan komposisi sebagai berikut:

Komponen Sumber Pendanaan	Komposisi
Giro	19,40%
Tabungan	43,60%
CASA	63,00%
Deposito	37,00%
Total	100,00%

- BRI secara konsolidasi telah menetapkan limit-limit terkait risiko Likuiditas. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan monitoring terhadap limit risiko likuiditas BRI dan Anak Perusahaan serta pelaksanaan *stress testing* likuiditas secara periodik.
- BRI secara rutin berkoordinasi dengan Anak Perusahaan terkait monitoring terhadap limit risiko likuiditas yang telah ditetapkan. Selain itu, BRI secara rutin melakukan pertemuan dengan Anak Perusahaan dalam forum *Risk Management Committee* Terintegrasi dimana salah satu agendanya membahas kondisi likuiditas BRI secara konsolidasi dan membahas rencana tindak lanjut atas isu-isu likuiditas yang berdampak pada BRI secara konsolidasi.

Posisi Tanggal Laporan September 2021

Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)

	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang
	241.129.464	-	-	-	241.129.464
	0	0	0	0	241.129.464
	515.841.662	0	0	0	0
	492.147.751	110.817.092	11.521.921	2.247.772	605.350.778
	23.693.911	78.152.223	4.507.999	1.160.535	547.228.109
	196.336.193	32.664.869	7.013.922	1.087.237	58.122.669
	196.336.193	222.585.202	51.853.493	36.046.073	264.597.992
	0	0	0	0	98.168.097

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan September 2021					Total Nilai Tertimbang
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	0	258.698.356	52.698.357	34.817.598	182.346.313
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	0	0	0	0	0
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya:		-	-	-	
12	NSFR liabilitas derivatif	0	-	-	-	0
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	41.889.300	17.193.592	4.529.585	18.054.426	20.319.219
14	Total ASF	-	-	-	-	1.111.657.587

Komponen RSF	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)					Total Nilai Tertimbang
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR	-	-	-	-	3.466.213
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	22.261.995	0	0	0	11.130.998
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga	0	188.351.575	346.783.937	2.011.303.660	665.618.579
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	0	276.867	0	0	27.687
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	0	0	0	0	0
20	kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	0	62.545.291	114.900.690	660.390.904	650.055.259
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	0	0	0	564.863	367.161
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya:	0	0	0	0	0
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	0	6.957	34.645	5.379.569	3.517.521
24	Surat Berharga yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	0	417.963	1.977.931	12.297.652	11.650.951
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	0	0	0	0	0
26	Aset lainnya:	0	0	0	0	121.061.796
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	0				
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)	-	0	0	0	-
29	NSFR aset derivatif	-	3.211.527	0	0	3.211.527

Posisi Tanggal Laporan September 2021					
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang
	0	222.585.202	51.853.493	36.046.073	166.429.896
		0	0	0	0
	0	-	-	-	
	45.819.587	-	-	-	0
	-	56.923.318	1.121.971	17.994.426	18.555.412
	-	-	-	-	1.129.633.646

Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)					
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang
	-	-	-	-	4.702.095
	15.642.960	0	0	0	7.821.480
	0	247.647.619	276.149.971	2.063.662.970	678.881.322
	0	344.762	0	0	34.476
	0	0	0	0	0
	0	82.286.559	91.287.679	677.935.403	663.032.212
	0	0	0	557.846	362.600
	0	0	0	0	0
	0	12.649	32.985	5.170.067	3.383.361
	0	405.233	2.187.978	12.673.021	12.068.673
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	123.660.821
	0				
	-	0	0	0	-
	-	3.211.527	0	0	3.211.527

Komponen RSF	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)					Total Nilai Tertimbang
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin	-	488.709	0	0	488.709
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	7.657.601	2.533.319	3.182.753	103.987.886	117.361.559
32	Rekening Administratif	-	8.832.294	75.050.835	8.240.722.861	9.300.381
33	Total RSF	-	-	-	-	810.577.966
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))	-	-	-	-	137,14%

Analisis

Net Stable Funding Ratio (NSFR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk posisi Desember 2021 sebesar 136,94% mengalami penurunan dibandingkan posisi September 2021 sebesar 137,14%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan komponen ASF lebih rendah dibandingkan peningkatan pada komponen RSF.

Peningkatan komponen ASF sebesar Rp17,98 triliun atau sebesar 1,62% antara lain berasal dari:

- Peningkatan Modal BRI sebesar Rp10,19 triliun.
- Peningkatan pendanaan dari nasabah perorangan sebesar Rp20,13 triliun.
- Peningkatan pendanaan dari nasabah mikro usaha kecil sebesar Rp0,04 triliun.
- Penurunan pendanaan dari nasabah korporasi sebesar Rp10,62 triliun.
- Serta penurunan liabilitas dan ekuitas lainnya sebesar Rp1,76 triliun.

Peningkatan komponen RSF sebesar Rp14,32 triliun atau sebesar 1,77% antara lain berasal dari:

- Peningkatan HQLA dalam rangka perhitungan NSFR sebesar Rp1,24 triliun.
- Penurunan simpanan pada lembaga keuangan lainnya untuk tujuan operasional sebesar Rp3,31 triliun.
- Peningkatan pinjaman kategori lancar dan DPK (performing) dan surat berharga sebesar Rp13,26 triliun.
- Peningkatan aset lainnya sebesar Rp2,60 triliun.
- Serta peningkatan rekening administratif sebesar Rp0,53 triliun.

Tabel AL.b Pengungkapan Nilai Net Stable Funding Ratio (NSFR) – Bank Secara Konsolidasi

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan September 2021					Total Nilai Tertimbang
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
1	Modal	-	-	-	-	233.456.343
2	Modal sesuai POJK KPMM	233.456.343	0	0	0	233.456.343
3	Instrumen modal lainnya	0	0	0	0	0
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	492.985.891	123.642.425	6.944.601	1.060.806	590.106.609
5	Simpanan dan Pendanaan stabil	469.482.351	83.918.545	3.202.654	612.301	529.385.673
6	Simpanan dan Pendanaan kurang stabil	23.503.541	39.723.880	3.741.947	448.505	60.720.936
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	189.037.894	267.023.417	52.698.357	35.056.397	280.173.559
8	Simpanan operasional	189.037.894	0	0	0	94.518.947
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	0	267.023.417	52.698.357	35.056.397	185.654.611
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	0	0	0	0	0

Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)					
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang
	-	488.709	0	0	488.709
	9.326.701	2.664.024	3.979.618	103.990.242	119.960.585
	-	11.071.250	80.068.647	8.408.097.084	9.834.292
	-	-	-	-	824.900.011
	-	-	-	-	136,94%

Posisi Tanggal Laporan September 2021					
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang
	-	-	-	-	243.545.696
	243.545.696	0	0	0	243.545.696
	0	0	0	0	0
	517.375.812	113.899.605	11.560.744	2.253.328	609.721.190
	493.335.855	80.442.176	4.528.322	1.166.091	550.557.126
	24.039.957	33.457.429	7.032.422	1.087.237	59.164.064
	199.879.081	227.881.036	51.853.493	36.284.936	268.476.278
	199.879.081	0	0	0	99.939.541
	0	227.881.036	51.853.493	36.284.936	168.536.738
	0	0	0	0	0

Komponen ASF	Posisi Tanggal Laporan September 2021					Total Nilai Tertimbang
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya:	42.456.387	17.540.583	4.529.585	18.054.426	20.319.219
12	NSFR liabilitas derivatif	-	-	-	-	0
13	Ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas	42.456.387	17.540.583	4.529.585	23.758.144	20.319.219
14	Total ASF	-	-	-	-	1.124.055.729

Komponen RSF	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)					Total Nilai Tertimbang
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR	-	-	-	-	3.499.172
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	22.261.995	122.394	0	0	11.192.195
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (performing) dan surat berharga	0	66.005.930	117.824.491	688.456.102	675.592.281
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	0	953.307	0	0	95.331
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	0	196.782	68.818	979.583	1.043.509
20	kepada perusahaan non-keuangan, nasabah perorangan dan nasabah usaha mikro dan usaha kecil, Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	0	64.279.054	115.735.760	668.819.404	658.503.900
21	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	0	150.506	6.991	575.671	452.935
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya:	0	1.305	235	322.681	275.049
23	memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit	0	7.013	34.755	5.461.111	3.570.606
24	Surat Berharga yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar, dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	0	417.963	1.977.931	12.297.652	11.650.951
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	0	0	0	0	0
26	Aset lainnya:	7.657.288	6.446.386	3.182.798	104.797.454	122.083.926
27	Komoditas fisik yang diperdagangkan, termasuk emas	0	-	-	-	0
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)	-	0	0	0	0
29	NSFR aset derivatif	-	3.211.527	0	0	3.211.527
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin	-	488.709	0	0	488.709
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori di atas**)	7.657.288	2.746.149	3.182.798	104.797.454	118.383.689

Posisi Tanggal Laporan September 2021					
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang
	46.137.533	57.272.697	1.121.971	17.994.426	18.555.412
	-	-	-	-	0
	46.137.533	57.272.697	1.121.971	23.758.144	18.555.412
	-	-	-	-	1.140.298.577

Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)					
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang
	-	-	-	-	4.738.031
	15.642.960	192.801	0	0	7.917.880
	0	85.264.079	94.468.956	703.306.653	686.155.582
	0	995.140	899	0	99.964
	0	247.502	84.767	830.851	910.360
	0	83.592.642	92.152.798	683.674.452	668.996.004
	0	10.636	8.230	559.290	372.972
	0	224	999	320.642	273.157
	0	12.703	33.284	5.248.398	3.434.452
	0	405.233	2.187.978	12.673.021	12.068.673
	0	0	0	0	0
	9.326.335	6.575.296	3.979.969	104.828.901	124.710.502
	0	-	-	-	0
	-	0	0	0	0
	-	3.211.527	0	0	3.211.527
	-	488.709	0	0	488.709
	9.326.335	2.875.059	3.979.969	104.828.901	121.010.265

Komponen RSF	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)					Total Nilai Tertimbang
	Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		
32	Rekening Administratif	-	8.858.022	75.051.100	105.658.372	9.301.190
33	Total RSF	-	-	-	-	821.668.763
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio (%)</i>)	-	-	-	-	136,80%

Analisis

Net Stable Funding Ratio (NSFR) secara Konsolidasi Posisi Desember 2021, NSFR BRI Konsolidasi tercatat sebesar 136,83% mengalami peningkatan sebesar 0,03% dibandingkan posisi September 2021 sebesar 136,80%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan prosentase komponen *Available Stable Funding* (ASF) sebesar 1,45% lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan prosentase pada komponen *Required Stable Funding* (RSF) sebesar 1,42%.

Total ASF BRI Konsolidasi periode bulan Desember 2021 sebesar Rp1.140,30 triliun meningkat sebesar Rp16,24 triliun dibandingkan dengan periode bulan September 2021 sebesar Rp1.124,06 triliun.

Peningkatan komponen ASF antara lain berasal dari :

- Peningkatan modal sebesar Rp10,09 T.
- Peningkatan simpanan yang berasal dari nasabah perorangan sebesar Rp20,12 triliun.
- Penurunan pendanaan yang berasal dari nasabah UMKM sebesar Rp0,51 triliun.
- Penurunan pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebesar Rp11,70 triliun.
- Serta penurunan Liabilitas dan ekuitas lainnya sebesar Rp1,76 triliun.

Total RSF BRI Konsolidasi periode Bulan Desember 2021 sebesar Rp833,36 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp11,69 triliun dibandingkan dengan periode Bulan September 2021 sebesar Rp821,67 triliun.

Peningkatan Komponen RSF BRI antara lain berasal dari:

- Peningkatan total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR sebesar Rp1,24 triliun.
- Penurunan simpanan pada lembaga keuangan lainnya untuk aktivitas operasional sebesar Rp3,27 triliun.
- Peningkatan Pinjaman kategori lancar dan DPK (*performing*) dan surat berharga yang tidak gagal bayar sebesar Rp10,56 triliun.
- Peningkatan aset lainnya sebesar Rp2,63 triliun.
- Serta peningkatan total transaksi rekening administratif sebesar Rp0,53 triliun.

Risiko Operasional

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional

BRI melakukan perhitungan beban modal dan ATMR risiko operasional dengan menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai dengan Surat Edaran OJK No.24/SEOJK.03/2016 perihal Perhitungan ATMR untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). Berikut merupakan tabel beban modal dan ATMR risiko operasional dengan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sesuai ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas.

Tabel AD Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual dan Konsolidasi

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	101.961.970	15.294.296	191.178.694	97.371.698	14.605.754	182.571.933
	Total	101.961.970	15.294.296	191.178.694	97.371.698	14.605.755	182.571.933

Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa jangka Waktu (Dalam juta Rupiah)					
Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)					
	Tanpa Jangka Waktu	< 6 Bulan	6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun	Total Nilai Tertimbang
	-	11.077.637	80.070.805	109.974.446	9.834.549
	-	-	-	-	833.356.544
	-	-	-	-	136,83%

No.	Pendekatan Yang Digunakan	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	106.283.337	15.942.501	199.281.257	100.035.459,73	15.005.319	187.566.487
	Total	106.283.337	15.942.501	199.281.257	100.035.460	15.005.319	187.566.487

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2021, BRI melakukan ikatan material dengan sejumlah pihak untuk investasi barang modal tahun 2021 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Objek	2021	2020
	Nilai Pengadaan	Nilai Pengadaan
Pengadaan <i>Managed Service CRM RBB</i>	934.991	990.724
Sewa Saluran Komunikasi	996.930	260.899
<i>Managed Service Hub and Remote VSAT Fase-3 Integrasi BRIsat</i>	-	181.776
<i>Managed Service VSAT Remote Terminal Untuk Migrasi 4.733 ex. Fase 1 ke Hub Jupiter (Fase 4)</i>	225.435	-

Tujuan Ikatan

Dalam perikatan pengadaan barang modal menggunakan anggaran investasi menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian (PKS) sesuai dengan tiring nilai pengadaan dan jangka waktu pengadaan. Tujuan diadakan perikatan agar dapat terinci uraian pelaksanaan pekerjaan pengadaan kepada penyedia barang yang sifatnya mengikat dan memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Untuk mempercepat proses pengadaan barang utamanya dengan menggunakan metode pembelian langsung dan swakelola

sesuai dengan *best practice* tidak memerlukan SPK, maka panitia pengadaan cukup menerbitkan *Purchase Order* (PO) atau surat permintaan penawaran atau cukup dibuktikan dengan kuitansi pembelian/struk pembelian.

Prinsip umum pengadaan barang dalam perusahaan harus mengacu prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel, standarisasi barang, sentralisasi, desentralisasi dan telah ditentukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

Sumber Dana

Sumber dana menggunakan Anggaran dalam Perusahaan BRI yang telah dialokasikan (*breakdown*) sesuai mata anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

Mata Uang yang Menjadi Denominasi dan Langkah yang Direncanakan untuk Melindungi Risiko dari Posisi Mata Uang Asing

Seluruh pengadaan menggunakan mata uang rupiah, dan diwajibkan seluruh pengadaan baik yang sudah disepakati dalam mata uang asing akan dilakukan penyesuaian didalam SPK maupun PKS untuk menggunakan mata uang rupiah. Sehingga BRI tidak akan melakukan lindung nilai diakibatkan perubahan nilai tukar mata uang asing.

Investasi Barang Modal

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Nilai Tahun 2021	Nilai Tahun 2020	Nilai Tahun 2019	Nilai Tahun 2018
Tanah dan Bangunan	79.915	2.194.862	4.580.996	2.555.168
Meubelair dan Inventaris	50.723	260.159	215.046	248.210
Kendaraan	491.332	115.583	115.754	88.353
Komputer dan Perangkat Lunak	1.368.411	573.173	1.413.248	1.243.266

Tujuan Investasi Barang Modal

Pengadaan Barang selain untuk menunjang operasional Perusahaan, tujuan lainnya agar mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, pengguna barang dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguna barang dan/atau jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, Entitas Anak BUMN, Entitas Anak BRI, dan/

atau Entitas Anak dari badan-badan yang didirikan oleh BRI sepanjang barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMN, Entitas Anak BUMN, Entitas Anak BRI dan/atau Entitas Anak dari badan-badan yang didirikan BRI yang bersangkutan, dan sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipedangjawabkan serta memperhatikan hubungan kerja sama secara wajar (*arm'length principle*).

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi Hutang dan Modal atau Lainnya

Investasi

Efek-Efek

BRI melakukan investasi pada sejumlah efek-efek, adapun rincian investasi BRI per 31 Desember 2020 dan 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel Rincian Investasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020
Nilai wajar melalui laba rugi	19.001.253	28.165.784
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	201.526.369	188.940.165

Uraian	2021	2020
Biaya perolehan diamortisasi	151.521.026	110.199.670
Total Efek-Efek	372.048.648	327.305.619

Selain investasi efek-efek, BRI melakukan investasi berupa penyertaan modal yang diuraikan sebagai berikut:

PT Bank Raya Indonesia

Sesuai Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. 23 tanggal 27 September 2021 telah memberikan Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat (1) melakukan perubahan nama Perseroan, semula bernama "PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk" dengan nama komersial BRI AGRO, menjadi bernama "PT Bank Raya Indonesia Tbk" dengan nama komersial Bank RAYA. Perubahan Anggaran Dasar ini sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.24 tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn telah mendapatkan Persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052731.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Raya Indonesia Tbk.

Selain perubahan nama, Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Raya Indonesia Tbk No. 23 tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn telah memberikan Persetujuan untuk Penerbitan Saham Baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IX ("PUT IX")

Pada tanggal 30 September 2021 melalui surat nomor B.562/DIR.01/SKP/09/2021, Bank Raya menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD IX kepada Dewan Komisiner OJK sebanyak-banyaknya 2.150.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 18 November 2021, Dewan Komisiner OJK melalui surat No.S-207/D.04/2021 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 1.054.545.185 lembar saham.

Hasil dari PMHMETD IX menyebabkan Anggaran Dasar Bank Raya mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 17 Desember 2021, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Raya sebesar 85,72% dan publik 14,28%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0487031 tanggal 17 Desember 2021.

Ekspansi

BRI tidak melakukan kegiatan ekspansi sepanjang tahun 2021.

Penggabungan/Peleburan Usaha

BRI tidak melakukan penggabungan/peleburan usaha sepanjang tahun 2021.

Divestasi

BRI melakukan kegiatan divestasi PT BRI Syariah Tbk yang diuraikan sebagai berikut.

PT Bank Syariah Tbk (BSI)

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS, dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) akan menjadi entitas yang menerima penggabungan atau *surviving entity* dan seluruh pemegang saham PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) efektif sebagai bank hasil penggabungan (*merger*) sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha dan OJK Perbankan melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke Dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Sejak tanggal efektif penggabungan, struktur kepemilikan saham terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,95%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,91%, BRI sebesar 17,29%, DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah sebesar 1,83%, PT BNI Life Insurance sebesar 0,01%, PT Mandiri Sekuritas sebesar 0,00% dan masyarakat (publik) sebesar 5,01%.

Hasil MESOP tahap I tahun 2021 dengan Periode Pelaksanaan yang terhitung 30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Mei 2021 hingga 18 Juni 2021 menyebabkan Anggaran Dasar BSI mengalami perubahan pasal 4 ayat 2 sebagaimana dituangkan dalam Akta No.54 tanggal 27 Juli 2021 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn, sehingga terdapat perubahan struktur kepemilikan saham menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25%, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85%, DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah sebesar 1,6%, PT BNI Life Insurance sebesar 0,01%, PT Mandiri Sekuritas sebesar 0,00% dan masyarakat (publik) sebesar 5,41%. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0434796 tanggal 5 Agustus 2021.

Selanjutnya Anggaran Dasar BSI mengalami perubahan pasal 1 ayat 1 sebagaimana dituangkan dalam akta No. 25 Tanggal 08 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta mengenai perubahan Kedudukan Kantor Pusat BSI sehubungan pemindahan alamat Kantor Pusat yang sebelumnya di Jalan Abdul Muis No.2-4 Jakarta Pusat 10160 menjadi di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0445911 tanggal 8 September 2021 dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0048485.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 8 September 2021.

Berdasarkan hasil MESOP tahap II tahun 2021 dengan Periode Pelaksanaan yang terhitung 30 Hari Bursa sejak tanggal 1 November 2021 hingga 10 Desember 2021 menyebabkan perubahan Kembali Anggaran Dasar BSI pasal 4 ayat 2 sebagaimana dituangkan dalam Akta No.82 tanggal 30 Desember 2021 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn, sehingga terdapat perubahan struktur kepemilikan saham menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,25%, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85%, DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah sebesar 0,98%, PT BNI Life Insurance sebesar 0,01%, PT Mandiri Sekuritas sebesar 0,00% dan masyarakat (publik) sebesar 6,09%. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0494300 tanggal 30 Desember 2021.

Akuisisi

Informasi tentang akuisisi PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Bank Raya Indonesia disajikan sebagai berikut:

PT Pegadaian

Pada tanggal 13 September 2021 telah dilakukan pengalihan seluruh saham seri B milik Negara RI pada PT Pegadaian. Pengalihan saham tersebut merupakan tambahan penyertaan modal Negara RI pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang dilakukan melalui mekanisme *inbreng*.

Melalui mekanisme ini struktur kepemilikan PT Pegadaian yang masing-masing sahamnya dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menjadi sebesar 99,99% dan Negara RI memiliki 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna.

Modal dasar PT Pegadaian sebesar Rp25.000 Juta yang terbagi menjadi Rp1 Juta Saham Seri A milik Negara RI dan Rp24.999 Juta saham Seri B milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No.15 Tanggal 23 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Pegadaian, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para Pemegang Saham sebanyak 6.250.000 (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp6.250.000.000.000 (Enam Triliun Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai seluruhnya Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Saham Seri B sebesar 6.249.999 (Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan) lembar, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan nilai seluruhnya Rp6.249.999.000.000 (Enam Triliun Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

Pada tanggal 13 September 2021 telah dilakukan pengalihan seluruh saham seri B milik Negara RI pada PT Permodalan Nasional Madani. Pengalihan saham tersebut merupakan tambahan penyertaan modal Negara RI pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang dilakukan melalui mekanisme *inbreng*.

Melalui mekanisme ini struktur kepemilikan PT Permodalan Nasional Madani yang masing-masing sahamnya dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk menjadi sebesar 99,99% dan Negara RI memiliki 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna.

Modal dasar PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp3.800 Juta terbagi menjadi 1 Juta Saham Seri A milik Negara RI dan 3,79 juta saham Seri B milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 26 Tanggal 21 September 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No.AHU-0061225.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para Pemegang Saham sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai seluruhnya Rp1.000.000,- dan 3.799.999 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp3.799.999.000.000 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Restrukturisasi Hutang dan Modal

BRI tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang dan modal sepanjang tahun 2021.

Lainnya

PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Pada tanggal 2 Maret 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melakukan kerjasama strategis jangka panjang dengan FWD Group dalam rangka pengembangan bisnis BRI Life dimana FWD Financial Services Pte. Ltd. melakukan penyertaan modal melalui penerbitan saham baru BRI Life. Perubahan struktur kepemilikan tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan OJK melalui surat No. S-12/NB.1/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Persetujuan Atas Rencana Perubahan Kepemilikan PT Asuransi BRI Life. Pada tanggal 13 Oktober 2021 FWD Financial Services Pte. Ltd. mengalihkan kepemilikan sahamnya di BRI Life kepada FWD Management Holdings Limited. Perubahan kepemilikan BRI Life tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari OJK melalui surat No. S-93/NB.1/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Persetujuan Atas Rencana Perubahan Kepemilikan PT Asuransi BRI Life.

Komitmen dan Kontinjensi

Penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara individual dengan menggunakan bukti obyektif, kecuali komitmen dan kontinjensi milik BRIS (entitas anak berdasarkan prinsip syariah) dilakukan dengan menggunakan panduan kolektibilitas Bank Indonesia.

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020
Komitmen		
Tagihan Komitmen		
Pembelian <i>Spot</i> dan Mata Uang Asing	11.120.883	3.078.534
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas Kredit yang Diberikan kepada Debitur yang Belum Digunakan	140.242.306	125.176.691
L/C yang Tidak Dapat Dibatalkan yang Masih Berjalan dalam Rangka Impor	9.687.797	8.974.190
Penjualan <i>Spot</i> dan berjangka Mata Uang Asing	74.761.798	55.418.797
Fasilitas Pembiayaan yang Diberikan kepada Debitur yang Belum Digunakan	-	618.452
Komitmen - Neto	(213.571.018)	(187.109.596)
Kontinjensi		
Tagihan Kontinjensi		
Tagihan Bunga dalam Penyelesaian	3.537	144.901
Liabilitas Kontinjensi		
Garansi yang Diterbitkan dalam Bentuk		
<i>Standby L/C</i>	15.334.403	8.752.803
Garansi Bank	36.518.208	35.931.693
Kontinjensi - Neto	(51.849.074)	(44.539.595)

Perjanjian Signifikan

Uraian perjanjian-perjanjian signifikan BRI disajikan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Juli 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan Managed Service CRM RBB Tahun 2021 (Zona 1 dan Zona 2) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp613.766 juta.
2. Pada tanggal 26 Juli 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Insan Teknologi Semesta sehubungan dengan Pengadaan Managed Service CRM RBB Tahun 2021 (Zona 3) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp315.225 juta.
3. Pada tanggal 22 Maret 2021 dan 24 Maret 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Gigantara, PT Swadharma Sarana Informatika, PT Tunas Artha Gardatama, PT Advantage Supply Chain Management dan PT Jalim Pembayaran Nusantara sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan Jasa Pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga Tahun 2021 (CRO Versi 3 dan 4), kemudian tanggal 9 Juni 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Gigantara sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan Jasa Pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga Tahun 2021 (CRO Kolaborasi) untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dengan nilai kontrak senilai Rp838.736 juta.
4. Pada tanggal 3 Mei 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT SAP Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Software BRIFIRST untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp280.000 juta.
5. Pada tanggal 2 Maret 2021, BRI menandatangani Perjanjian Distribusi (Distribution Agreement) dengan BRI Life sehubungan dengan kerjasama pemasaran produk BRI Life melalui saluran distribusi BRI.
6. Pada tanggal 5 Januari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Menara BRI Medan untuk jangka waktu 420 (empat ratus dua puluh) hari dengan nilai kontrak senilai Rp316.500 juta.
7. Pada tanggal 15 Januari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan SPK Sewa Jaringan Komunikasi MPLS Provider Satkomindo untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp82.144 juta.
8. Pada tanggal 13 November 2020 dan 3 November 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi dan PT Datindo Infonet Prima sehubungan dengan Pengadaan Managed Service CRM RBB Tahun 2020 (Zona 1, 2 dan 3) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp682.328 juta dan Rp308.396 juta.
9. Pada tanggal 3 November 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Seluler sehubungan dengan Pengadaan Sewa Saluran Komunikasi untuk Kebutuhan Penggantian Perangkat BRISPOT bagi Pejabat Kredit Lini Bisnis Mikro dengan nilai kontrak Rp260.899 juta.

10. Pada tanggal 8 Juli 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) sehubungan dengan Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan VSAT Satlink untuk Integrasi BRISat Fase 3 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak Rp181.777 juta.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan

Pandemi COVID-19 telah berjalan memasuki tahun kedua di mana kehadiran varian Delta telah berdampak pada terjadinya gelombang kasus aktif baru yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Walaupun demikian, upaya pengendalian pandemi COVID-19 terus dilakukan dengan vaksinasi yang intensif dan disertai dengan diberlakukannya kembali pembatasan kegiatan masyarakat di beberapa negara. Indonesia sendiri pada Triwulan III 2021 mampu melewati gelombang tersebut dengan baik yang terlihat pada turunnya jumlah kasus harian dan akumulasi kasus aktif.

Pemulihan aktivitas ekonomi domestik mulai yang ditandai dengan pertumbuhan positif ekonomi Indonesia pada 2 kuartal berturut-turut yaitu 7,07% YoY pada Triwulan II 2021 dan 3,51% pada Triwulan III 2021. Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan konsistensi perbaikan dalam arah pemulihan ekonomi pasca pandemi yang secara tahunan memperlihatkan bahwa seluruh komponen pengeluaran dari Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami pertumbuhan yang positif.

Namun demikian, di sisa akhir tahun 2021 terdapat beberapa disrupsi yang secara global dapat memperlambat laju pemulihan ekonomi. Krisis energi global yang menyebabkan harga komoditas energi meningkat cukup tinggi, disrupsi rantai pasok akibat peningkatan biaya logistik, serta kembali merebaknya varian baru virus COVID-19 dengan penularan cukup masif di beberapa negara besar dunia dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi global dan berpotensi mengganggu perekonomian nasional.

Memperhatikan kondisi makro ekonomi, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan strategi BRI ke depan, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik di akhir tahun 2021, sehingga pemulihan perekonomian nasional akan semakin kuat pada tahun 2022.
2. Daya beli dan tingkat konsumsi diperkirakan berlangsung kembali normal di tahun 2022 seiring dengan pulihnya aktivitas masyarakat yang didukung dengan semakin baiknya pengendalian pandemi oleh Pemerintah.



3. Perbankan tetap perlu waspada dan berhati-hati dengan terus memonitor perkembangan kasus COVID-19, krisis energi global, gangguan rantai pasok, dan dampak dari rencana *tapering AS* di akhir tahun 2021.

Sejalan dengan faktor tersebut, BRI memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan akan meningkat di tahun 2022 sebesar 6,4%-7,9% secara YoY. Sementara itu, pertumbuhan DPK perbankan akan meningkat di tahun 2022 sebesar 6,1%-7,4% secara YoY. Untuk pertumbuhan kredit BRI (*bank only*) sendiri, diharapkan akan tumbuh sebesar 9,79% YoY dan pertumbuhan DPK BRI (*bank only*) diharapkan akan tumbuh sebesar 8,07% YoY pada tahun 2022.

Oleh sebab itu, pengembangan bisnis BRI selama periode tahun 2022-2024 akan mempertimbangkan perkembangan perekonomian Indonesia dan selaras dengan strategi jangka panjang perusahaan tahun 2021-2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)/Corporate Plan (Corplan) BRI tahun 2021-2025, yaitu menjadi *The Most Valuable Banking Group* di Asia Tenggara dan *Champion of Financial Inclusion*. Namun, ketidakpastian situasi pandemi COVID-19 diyakini masih berpotensi mendisrupsi kinerja BRI dalam jangka pendek maupun menengah. Oleh sebab itu, BRI terus memperkuat kapasitas internal Perseroan untuk dapat lebih kuat mendorong akselerasi bisnis di masa pasca pandemi (*strengthen the core to scale up and scope up*). Semangat penguatan atas aspek-aspek inti (bisnis beserta *enabler*-nya) yang berimplikasi kuat terhadap kinerja Perseroan, masih relevan untuk dilanjutkan di tahun berikutnya sebagai strategi fundamental guna menjaga kemampuan BRI untuk tetap tumbuh sehat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian *strategic objectives* akan dilakukan dengan eksekusi strategi yang berfokus pada lima aspek, yaitu:

1. *Asset Quality*, menjaga kualitas aset produktif dengan fokus pada kualitas kredit (*Loan to Assets Ratio/LAR*), peningkatan *success rate* restrukturisasi kredit, serta pengendalian biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

2. *Selective Growth*, ekspansi bisnis secara selektif dengan memanfaatkan stimulus pemerintah, serta melakukan eksplorasi *new growth engine* termasuk optimalisasi *ultra micro business* dan *salary based loan* yang lebih kompetitif;
3. *Excellence Enabler*, memperkuat kompetensi aspek-aspek penunjang bisnis terutama pada bidang teknologi digital, *human capital, culture, distribution channel*, dan tata kelola risiko.
4. *Current Account Saving Account (CASA)*, meningkatkan perolehan dana murah dengan mengendalikan biaya dana sekaligus mendorong aktivitas transaksi nasabah untuk menjaga stabilitas pengendapannya.
5. *BRI Group Synergy*, penguatan sinergi bisnis dan non bisnis antara BRI Induk dan Entitas Anak maupun antar sesama Entitas Anak untuk meningkatkan *cross selling* produk *BRI Group, sharing resources*, dan eksplorasi *new investment opportunities*.

Agar fokus strategi dapat berjalan dengan baik, BRI dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki seperti:

1. Jaringan kerja BRI yang tersebar dan terbesar.
2. Kapabilitas BRI dalam bisnis mikro yang didukung oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah (*agent of development*).
3. Produk dan layanan jasa keuangan yang lengkap serta *brand positioning* yang kuat di Indonesia.
4. *Customer base* yang besar yang ditambah dengan pembentukan *Holding Ultra Mikro* sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru BRI.
5. Digitalisasi *loan processing* segmen Mikro & Konsumer.
6. *First mover Environmental, Social & Corporate Governance*.

Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki, maka BRI optimis memiliki prospek yang baik di masa mendatang.

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021, Rencana Bisnis Bank PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2022-2024

Pencapaian Target dan Target Ke Depan

Pencapaian Target 2021

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan Keuangan

(Bank Saja, dalam miliar Rupiah)

Uraian	Desember 2021 (Bank Saja)		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Aset	1.505.916	1.572.761	104,44%
Pendapatan Bunga	116.198	119.828	103,12%
Kredit yang diberikan	944.978	943.703	99,87%
Dana Pihak Ketiga	1.108.523	1.127.849	101,74%
Laba Bersih	23.516	32.215	136,99%
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	79,00%	74,30%	106,33%
<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	85,25%	83,67%	98,15%

Uraian	Desember 2021 (Bank Saja)		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,38%	3,08%	109,59%
Non Performing Loan (NPL) Net	0,97%	0,70%	138,04%
Net Interest Margin (NIM)	6,48%	6,89%	106,33%
Capital Adequacy Ratio (CAR)	22,07%	25,28%	114,58%
Credit Cost Nett	2,63%	2,45%	107,50%
Cost to Income Ratio (CIR)	46,08%	43,26%	106,52%

BRI masih mampu mencapai dan bahkan melampaui target kinerja 2021 yang telah ditetapkan seperti target aset mencapai 104,44%, pendapatan bunga mencapai 103,12%, dan dana pihak ketiga mencapai 101,74%. Kondisi tingginya pertumbuhan simpanan yang masih belum diimbangi oleh pencapaian kredit yang diberikan yang hanya mencapai 99,87% dari target, yang berdampak pada pencapaian kinerja LDR belum mencapai target. Meskipun demikian, pada tahun 2021 BRI masih mampu mencatat pertumbuhan segmen Mikro yang kuat (*double digit*) sejalan dengan komitmen Perseroan untuk tumbuh di segmen UMKM.

Dengan optimalisasi portofolio terutama di segmen UMKM tersebut, BRI tetap mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp32,22 triliun, atau mencapai 136,99% dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut didukung juga oleh fokus strategi BRI dalam pengelolaan kualitas aset dan efisiensi biaya operasional serta biaya dana yang mampu mendukung pertumbuhan profitabilitas BRI di tengah ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 yang belum mereda.

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal (*Capital Structure*)

Pada posisi Desember 2021, secara keseluruhan struktur permodalan BRI telah mencapai target. Total modal BRI mencapai 115,20% dan ATMR 100,99%. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) telah memenuhi ketentuan atau sebesar 25,28% dengan pencapaian 115,57% dari target CAR BRI. Adapun uraian target dan realisasi struktur modal BRI selama periode bisnis 2021 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Modal Inti (Tier 1)	200.196.374	231.982.043	115,88%
Modal Inti Utama (CET 1)	200.196.374	231.982.043	115,88%
Modal Pelengkap (Tier 2)	9.587.325	9.678.720	100,95%
Total Modal Tersedia	209.783.699	241.660.763	115,20%
ATMR untuk Risiko Kredit setelah memperhitungkan risiko spesifik	754.985.962	761.302.147	100,84%
ATMR untuk Risiko Pasar	4.491.254	3.275.350	72,93%
ATMR untuk Risiko Operasional	191.178.694	191.178.694	100,00%
Total ATMR	950.655.910	955.756.191	100,54%
Rasio CAR	22,07%	25,28%	115,57%
Rasio CET 1	21,06%	24,27%	115,24%
Rasio Tier 1	21,06%	24,27%	115,24%
Rasio Tier 2	1,01%	1,01%	100,00%
Rasio Minimum Tier 1	-	6,00%	n/a
Rasio Minimum CET 1	-	4,50%	n/a
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	-	9,60%	n/a

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Sepanjang tahun 2021, BRI fokus pada kegiatan *marketing campaign* untuk meningkatkan CASA dan transaksi seperti Pesta Rakyat Simpedes (PRS) Virtual dan BritAma Festival. Program *campaign* ini dilakukan secara terintegrasi pada media *digital* dan *non-digital*. Melalui *campaign* tersebut, diharapkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati akses inklusi finansial yang lebih menyeluruh terlebih khusus mempunyai akses terhadap layanan finansial perbankan.

Program Pesta Rakyat Simpedes (PRS) Virtual 2021

Rangkaian Pesta Rakyat Simpedes 2021 merupakan program akuisisi dan retensi kepada nasabah tabungan Simpedes yang berfokus pada *sharing wawasan, tips* dan edukasi kepada pelaku Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahannya melalui kegiatan *workshop*, kuis interaktif, UMKM BRILiaN *Check*, serta *talkshow*. Keberhasilan program Pesta Rakyat Simpedes dapat dilihat dari meningkatnya saldo Tabungan Simpedes dari Rp285,9 triliun di 2020 menjadi Rp309,3 triliun di 2021.

Program BritAma Festival 2021

Rangkaian BritAma Festival 2021 merupakan program akuisisi dan retensi kepada masyarakat dan nasabah Tabungan BRI BritAma yang setia dan loyal dalam menggunakan berbagai fasilitas layanan perbankan BRI. Keberhasilan program BritAma Festival dapat dilihat dari meningkatnya saldo tabungan BritAma dari Rp162,7 triliun di 2020 menjadi Rp177,1 triliun di 2021.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2021		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Dana Pihak Ketiga: Tabungan	492.437	494.576	100,43%
Fee Based Income	16.132	16.548	102,58%

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Pada tahun 2021, sebagian target telah tercapai dengan baik. Secara total pencapaian target pengembangan SDM berhasil melampaui target yang mencapai 127,09%. Pencapaian pengembangan SDM melalui pendidikan *development* mencapai 413,96%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan, untuk pendidikan *enhancement* sedikit berada di bawah target yang mencapai 89,23%, hal ini disebabkan karena adanya kendala berupa *turnover* pekerja dan kenaikan pekerja baru yang lebih membutuhkan pendidikan *development*. Untuk FGD dan sosialisasi mencapai 82,83% dikarenakan adanya kendala pandemik yang menyebabkan inefisiensi dalam penyelenggaraan kegiatan.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

(dalam orang)

Uraian	2021		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Development	1.390	5.754	413,96%
Enhancement	117.629	104.965	89,23%
E-Learning (Peserta)	2.500.000	3.285.407	131,42%
Focus Group Discussion (FGD)	109.822	90.491	82,40%
Sosialisasi	42.000	34.789	82,83%
Total	2.770.841	3.521.406	127,09%

Target ke Depan

Manajemen BRI telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2022 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2022, baik dari segi makro maupun mikro.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

No.	Asumsi	2022
Asumsi Makro		
1.	Pertumbuhan PDB (%)	4,80 – 5,30
2.	Inflasi (%)	2,20 – 3,10
3.	Kurs IDR/USD	Rp14.479 – Rp14.955
4.	BI 7 Days Rate	3,50 – 3,75
Asumsi Mikro		
1.	Pertumbuhan Kredit Nasional (%)	5,80 – 7,50
2.	Pertumbuhan Simpanan Nasional (%)	4,80 – 6,50
3.	Pertumbuhan Kredit BRI (%)	8,27 – 10,60
4.	Pertumbuhan Simpanan BRI (%)	5,14 – 6,84

Sumber: Tim Economist BRI

Proyeksi Keuangan

Pertumbuhan aset BRI ke depan didorong dari pertumbuhan pinjaman pada segmen Mikro, Kecil, dan Konsumer. Aset non kredit diproyeksikan tumbuh lebih rendah sebagai dampak dari peran pertumbuhan bisnis pembiayaan khususnya UMKM yang akan semakin meningkat, termasuk optimalisasi portfolio untuk memaksimalkan profit. Di sisi liabilitas, pertumbuhan DPK terus

meningkat, dengan *driver* utama pertumbuhan tabungan. Profitabilitas BRI pada tahun 2022 diproyeksikan akan tumbuh yang bersumber dari penguatan pertumbuhan pinjaman, potensi *Cost of Fund* (COF) dan *Current Account Saving Account* (CASA) rasio yang semakin membaik, serta pengendalian *Over Head Cost* (OHC) yang meningkat.

Tabel Proyeksi Keuangan

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	Proyeksi 2022
Kredit yang diberikan	9%-11%
<i>Fee Based Income Growth</i>	9%-10%
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	86%-88%
<i>Non Performing Loan</i> (NPL) Gross	2,8%-3,0%
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	6,8%-7%
<i>Overhead Cost</i> (OHC)	5%-7%
<i>Credit Cost</i> (CoC)	2,8%-3%

Proyeksi Struktur Modal (*Capital Structure*)

Modal posisi Desember 2022 diproyeksikan Rp236,70 triliun dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dalam periode tiga tahun ke depan diproyeksikan tetap berada di atas 18% permodalan BRI tetap memenuhi ketentuan regulator perbankan dan jasa keuangan. Proyeksi tersebut telah telah memperhitungkan reklasifikasi cadangan tujuan dan rencana revaluasi aset dan dampak dari PSAK 71. Adapun uraian proyeksi modal dan pemenuhan KPMM BRI selama periode bisnis 2022-2024 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Permodalan BRI

Uraian	Proyeksi		
	Desember 2024	Desember 2023	Desember 2022
Modal Inti (Rp triliun)	268,66	247,13	226,29
Total Modal (Rp triliun)	280,84	258,17	236,70
Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap (%)	2.234,41	2.258,08	2.173,71
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (Rp triliun)	1.299,86	1.167,85	1.018,92
Rasio KPMM (%)	21,61	22,11	23,23

Untuk mempertahankan rasio permodalan tetap sesuai dengan ketentuan Regulator, BRI mengupayakan pemenuhannya dari *retained earning* dan pengelolaan dividen payout ratio yang optimal.

Rencana Perubahan Modal

Pada tahun 2022, BRI berpotensi mengalami perubahan struktur permodalan yang akan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti rencana *corporate action*. Dengan memperhitungkan rencana tersebut, maka komposisi dalam struktur kepemilikan saham perusahaan diproyeksikan akan berubah. Secara ringkas, proyeksi komposisi pemegang saham BRI dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Proyeksi Komposisi Pemegang Saham

Pemilik	Nilai (Rp Miliar)				Komposisi (%)			
	2024 Forecasting	2023 Forecasting	2022 Forecasting	2021 Forecasting	2024 Forecasting	2023 Forecasting	2022 Forecasting	2021 Forecasting
1 Negara Republik Indonesia	4.031	4.031	4.031	4.031	53,19	53,19	53,19	53,19
2 Publik	3.547	3.547	3.547	3.547	46,81	46,81	46,81	46,81
Total	7.578	7.578	7.578	7.578	100,00	100,00	100,00	100,00

Proyeksi Kebijakan Dividen

Dalam memutuskan besaran dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, BRI memerhatikan faktor proyeksi pertumbuhan bisnis ke depan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan faktor *sustainable* tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga tahun ke depan. Keputusan penentuan besaran dividen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Pada tahun 2022, BRI berencana membagikan dividen atas laba Perseroan tahun buku 2021. Besarnya pembayaran dividen tunai akan melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2022. Secara historis, Perseroan membagikan dividen dengan kisaran 20%-65% dari laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan pemberian dividen ini akan tetap dilakukan dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, kecuali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menyatakan lain atas pertimbangan tertentu.

Proyeksi Pemasaran

Uraian proyeksi pemasaran yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Pemasaran

No	Produk	Deskripsi
1	Memperluas pangsa pasar pemasaran produk asuransi melalui aktivitas <i>bancassurance</i> (termasuk Perusahaan Anak/ PA)	Kerjasama pemasaran produk <i>bancassurance</i> dengan Perusahaan Asuransi Jiwa dan Umum (PA dan non PA).

Proyeksi Pengembangan SDM

Proyeksi pengembangan SDM tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM

(dalam orang)

Uraian	Proyeksi 2022
Development	1.500
Enhancement	102.000
E-Learning	2.600.000
FGD	100.000
Sosialisasi	40.000
Total	2.843.500

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Seluruh saham Seri B Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan memiliki hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), selama Perseroan memiliki laba positif dan telah mencadangkan laba tersebut, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) Pemegang Saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan dan (2) Perseroan memiliki saldo laba yang positif.

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham non WNI akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam memutuskan pemberian dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, Perseroan memperhatikan faktor pertumbuhan bisnis ke depan, pemenuhan rasio kecukupan modal dan *sustainability* tingkat imbal hasil atas ekuitas dalam tiga

tahun ke depan serta mempertimbangkan kontribusi yang dapat diberikan Perseroan kepada Pemerintah untuk pembangunan serta mempertimbangkan Pemegang Saham minoritas maupun mayoritas. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Secara historis, Perseroan membagikan dividen dengan kisaran 20%-65% dari laba bersih konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kebijakan pemberian dividen ini akan tetap dilakukan dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, kecuali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menyatakan lain atas pertimbangan tertentu.

Besarnya pembayaran dividen tunai akan dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perbankan.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS. Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan pada tanggal 25 Maret 2021, BRI telah membagikan dividen sebesar Rp12,13 triliun atau 65% dari laba tahun buku 2020 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk BRI tahun buku 2020 sebesar Rp18,65 triliun. Pemegang saham menyetujui peningkatan rasio pembayaran dividen dari 60% dari laba bersih pada tahun buku 2019 menjadi 65% dari laba bersih pada tahun buku 2020. Jumlah dividen tunai per saham sebesar Rp98,90 dan dibayarkan pada tanggal 28 April 2021 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 25 Maret 2021.

Pembayaran dividen tahun buku 2020 dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021, adapun untuk kinerja keuangan tahun buku 2021 akan diputuskan pada RUPST tahun 2022.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Uraian	Tahun Buku 2020	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018
Laba (miliar Rp)	18.654,75	34.372,61	32.351,13
Dividen Kas (miliar Rp)	12.125,58	20.623,56	16.175,56
Dividen Non Kas	-	-	-
Dividen Kas Per Saham (Rp)	98,90	168,11	132,17
Dividen Non Kas Per Saham	-	-	-
Rasio Pembayaran Dividen/ Dividend Pay Out Ratio (%)	65% dari laba bersih tahun 2020	60% dari laba bersih tahun 2019	50% dari laba bersih tahun 2018
Tanggal Pengumuman (RUPST)	25 Maret 2021	18 Februari 2020	15 Mei 2019
Tanggal Pembayaran Dividen Kas	26 Maret 2021	18 Maret 2020	13 Juni 2019
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas	-	-	-

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, BRI telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagai berikut.

Tabel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

(dalam Rupiah Penuh)

No	Jenis Pewanaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum		
			Jumlah Hasil Penawaran Umum	Biaya Emisi Efek	Hasil Bersih
1	Penawaran Umum dengan Memberikan HMETD	27 September 2021	95.924.851.521.937	94.800.960.450	95.830.050.561.487

Rencana Penggunaan Dana			
Modal ditempatkan dan Disetor Pegadaian melalui Inbreng	Modal ditempatkan dan Disetor PNM melalui Inbreng	Modal Kerja	Total
48.670.527.621.242	6.100.068.061.095	41.059.454.879.150	95.830.050.561.487

Realisasi Penggunaan Dana				Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
Modal ditempatkan dan Disetor Pegadaian melalui Inbreng	Modal ditempatkan dan Disetor PNM melalui Inbreng	Modal Kerja	Total	
48.670.527.621.242	6.100.068.061.095	26.136.010.567.508	80.906.606.249.845	14.923.444.311.642

Tabel Rincian Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Memberikan HMETD BRI Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah Penuh)

No	Rincian	Realisasi
A	Biaya Emisi Efek	
	Biaya Jasa Penjamin Pelaksana Emisi	64.539.352.750
	Biaya Jasa Konsultan Hukum	9.800.000.000
	Biaya Jasa Konsultan Uji Tuntas	6.641.000.000
	Biaya Jasa Notaris	85.000.000
	Biaya Jasa Penilai Publik (KJPP)	900.000.000
	Biaya Jasa KAP Penjatahan	147.000.000
	Biaya Jasa KAP Proforma	8.500.000.000
	Biaya Jasa Biro Administrasi Efek	198.000.000
	Biaya Jasa PR Agency	2.941.400.000
	Biaya Jasa Percetakan	216.707.700
	Biaya Pendaftaran OJK	750.000.000
	Biaya Pendaftaran IDX	82.500.000
	Jumlah	94.800.960.450
B	Modal Kerja	
	Ultra Mikro	15.647.033.418.246
	Mikro	6.801.913.350.468
	Kecil	3.687.063.798.794
	Jumlah	26.136.010.567.508

Tabel Rincian Penempatan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum melalui HMETD

(dalam Rupiah Penuh)

No	Sisa Dana	Instrumen Keuangan	Institusi Penyimpanan	Tingkat Suku Bunga	Hubungan Afiliasi Dengan Emiten	Keterangan (Maturity)
1.	955.000.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	3,36	-	15 Juni 2022
2.	1.100.000.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	5,18	-	15 September 2022
3.	1.141.000.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	5,72	-	15 Mei 2028
4.	1.911.000.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	4,14	-	15 Maret 2024
5.	171.400.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	6,12	-	15 Maret 2029
6.	380.000.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	6,33	-	15 Mei 2031
7.	1.215.000.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	4,14	-	15 Mei 2024
8.	1.461.335.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	4,83	-	15 Juni 2025
9.	1.559.927.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	6,25	-	15 Februari 2031
10.	583.125.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	6,05	-	15 April 2032
11.	110.150.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	3,84	-	15 Juli 2023
12.	177.885.000.000	Surat Utang Negara (SUN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	4,49	-	15 Februari 2024

No	Sisa Dana	Instrumen Keuangan	Institusi Penyimpanan	Tingkat Suku Bunga	Hubungan Afiliasi Dengan Emiten	Keterangan (Maturity)
13.	1.545.000.000.000	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	3,17	-	15 Januari 2022
14.	246.610.000.000	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	6,46	-	15 Februari 2037
15.	311.000.000.000	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	6,79	-	15 April 2043
16.	100.000.000.000	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	6,43	-	15 November 2031
17.	200.300.000.000	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	7,13	-	15 Juli 2047
18.	330.000.000.000	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	4,93	-	15 Oktober 2025
19.	100.000.000.000	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	6,67	-	15 Mei 2033
20.	1.278.000.000.000	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	3,86	-	15 Mei 2033
21.	46.712.311.642	Deposit Facility (DEPFAC)	Bank Indonesia	2,75	-	-
	14.923.444.311.642					

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Lingkup Transaksi:

Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dalam:

- 1 (satu) kali transaksi; atau
- Suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

Batasan Nilai:

- (1) Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

- (2) Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal:
 - Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
 - Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
 - Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
 - Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).
- (3) Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi/situasi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimiliki BRI memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan secara objektif. BRI memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertian dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan adalah:

1. Mengutamakan kepentingan publik.
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang mampu menangani benturan kepentingan.

Sampai dengan akhir tahun 2021, BRI tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Afiliasi

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik Langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham utama.

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.

Transaksi Afiliasi Pengalihan Saham (*Inbreng*) PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Tanggal Transaksi	: 13 September 2021
Nilai Transaksi	: Nilai transaksi <i>inbreng</i> melalui pengambilan bagian secara penuh HMETD Negara RI dalam PMHMETD I sebanyak 16.108.998.710 saham Seri B dengan harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp3.400 (tiga ribu empat ratus Rupiah) per saham seluruhnya sebesar Rp54.770.595.614.000 (lima puluh empat triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat belas ribu Rupiah). Nilai transaksi <i>inbreng</i> di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 dengan mempertimbangkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan usaha Pegadaian dan PNM dibagi dengan pendapatan usaha Perseroan nilainya lebih dari 20%, namun tidak melebihi 50%, dari pendapatan usaha Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2021; dan b. Nilai transaksi <i>inbreng</i> melebihi 20%, namun tidak melebihi 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2021. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Maret 2021 telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited). Dengan demikian, transaksi <i>inbreng</i> bukan merupakan transaksi material yang membutuhkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau RUPS Independen.
Objek Transaksi	: Objek dari transaksi adalah saham yang diperoleh Perseroan berdasarkan transaksi <i>inbreng</i> . Objek transaksi tersebut, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Saham Pegadaian sebesar 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor Pegadaian; dan b. Saham PNM sebesar 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% modal ditempatkan dan disetor PNM, sebagai bentuk penyeteroran Negara RI dalam PMHMETD I. Transaksi <i>inbreng</i> telah dilakukan pada tanggal 13 September 2021. Transaksi <i>inbreng</i> dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani kepada dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pihak Yang Melakukan Transaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi	<p>: Transaksi <i>inbreng</i> dilakukan antara Negara RI (yang melakukan penyeteroran saham) dengan Perseroan (yang menerima saham dari penyeteroran tersebut).</p> <p>Transaksi <i>inbreng</i> juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Sifat dan hubungan afiliasi atas Transaksi <i>Inbreng</i>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Negara RI merupakan pemegang saham pengendali Perseroan; dan Wakil Menteri BUMN II merupakan Komisaris Utama Perseroan.
Kewajaran Transaksi dan Mekanisme Review Transaksi	<p>: Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy dan Rekan (SRR) sebagai penilai independen dalam penilaian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6.249.999 saham Seri B Pegadaian (Saham Pegadaian); dan 3.799.999 saham Seri B PNM (Saham PNM). <p>Penilaian kewajaran dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif dari rencana transaksi. Analisis kualitatif memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari rencana transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif mempertimbangkan potensi keuntungan sebelum dan setelah dilakukannya rencana transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.</p> <p>Berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan dalam pendapat kewajaran, SRR berpendapat rencana transaksi adalah wajar.</p> <p>Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Transaksi <i>inbreng</i> bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Fakta penting material dan relevan telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini sehingga tidak terdapat informasi yang menyesatkan. <p>Transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arm's length principle</i>).</p>
Pemenuhan Ketentuan terkait	<p>: Dalam rangka memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, BRI telah melakukan pelaporan transaksi tersebut kepada OJK pada 15 September 2021 berdasarkan Surat Nomor 0019-CSC/CMS/CGC/2021 Perihal keterbukaan Informasi.</p>
Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan	<p>: Melalui transaksi <i>inbreng</i>, Perseroan menjadi Pemegang Saham mayoritas pada Pegadaian dan PNM. Selanjutnya, Perseroan bersama-sama dengan Pegadaian dan PNM mengembangkan bisnis melalui pemberian jasa keuangan di segmen ultra mikro sehingga akan berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Penguatan struktur permodalan ini juga diharapkan mendukung kegiatan usaha Perseroan ke depan, baik induk maupun secara grup, demi menciptakan <i>value</i> bagi Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.</p> <p>Dengan kepemilikan saham mayoritas tersebut, laporan keuangan Pegadaian dan PNM akan terkonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan konsolidasian di masa mendatang.</p>

Transaksi Afiliasi Sinergi Jaringan Kantor (Co-Location) PT Pegadaian

Tanggal Kejadian	: 15 September 2021
Objek Transaksi	<p>: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama No.B.30-UMI/ECO/9/2021 dan No.146/00033/00/2021 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Pegadaian tentang Sinergi Jaringan Kantor.</p> <p>Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Jaringan Kantor (<i>Co-Location</i>). <i>Co-Location</i> adalah bentuk kerja sama sinergi ultra mikro yang memungkinkan PT Pegadaian menempatkan unit layanannya pada jaringan kantor/unit kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk guna perluasan dan pendekatan layanan para pihak.</p>
Nama Para Pihak	<p>: a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk b. PT Pegadaian</p>
Sifat Hubungan Afiliasi	: PT Pegadaian merupakan entitas anak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kewajaran dan Mekanisme Review Transaksi	<p>: Transaksi afiliasi ini memenuhi Pasal 8 POJK 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Kegiatan <i>Co-Location</i> dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dijalankan secara rutin dan berulang dan/atau berkelanjutan. Oleh karenanya, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 1 POJK 42/POJK.04/2020 yaitu Perusahaan Terbuka yang melakukan transaksi afiliasi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud; Mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat. Menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan Terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> Nilai transaksi afiliasi memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS; Transaksi afiliasi yang dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan/atau Melakukan transaksi afiliasi yang berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen. <p>Transaksi afiliasi ini termasuk transaksi pengecualian sehingga tidak wajib melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai yang berlaku umum (<i>arm's length principle</i>).</p>

Pemenuhan Ketentuan terkait	: Dalam rangka memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, BRI telah melakukan pelaporan transaksi tersebut kepada OJK pada 17 September 2021 berdasarkan Surat Nomor B.0022-CSC/CSM/CGC/09/2021 Perihal Laporan Transaksi Afiliasi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BRI dengan Pegadaian tentang Sinergi Jaringan Kantor.
Dampak Kejadian Transaksi Afiliasi terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan atau Kelangsungan Usaha Emiten	: Transaksi afiliasi tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Transaksi Afiliasi Sinergi Jaringan Kantor (*Co-Location*) PT Permodalan Nasional Madani

Tanggal Kejadian	: 21 September 2021
Objek Transaksi	: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama No.B.31-UMI/ECO/9/2021 dan No.141/PKS/PNM/IX/21 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Permodalan Nasional Madani tentang Sinergi Jaringan Kantor. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Jaringan Kantor (<i>Co-Location</i>). <i>Co-Location</i> adalah bentuk kerja sama sinergi ultra mikro yang memungkinkan PT Permodalan Nasional Madani menempatkan unit layanannya pada jaringan kantor/unit kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk guna perluasan dan pendekatan layanan para pihak.
Para Pihak	: a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk b. PT Permodalan Nasional Madani
Sifat Hubungan Afiliasi	: PT Permodalan Nasional Madani merupakan entitas anak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kewajaran dan Mekanisme Review Transaksi	: Transaksi afiliasi ini memenuhi Pasal 6 Ayat 1 POJK 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Oleh karenanya, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat 1 POJK 42/POJK.04/2020. Kegiatan <i>Co-Location</i> dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dijalankan secara rutin dan berulang dan/atau berkelanjutan. Transaksi afiliasi ini termasuk transaksi pengecualian sehingga tidak wajib melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai yang berlaku umum (<i>arm's length principle</i>).
Pemenuhan Ketentuan terkait	: Dalam rangka memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, BRI telah melakukan pelaporan transaksi tersebut kepada OJK pada 23 September 2021 berdasarkan Surat Nomor B.0024-CSC/CSM/CGC/09/2021 Perihal Laporan Transaksi Afiliasi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BRI dengan PNM tentang Sinergi Jaringan Kantor.
Dampak Kejadian Transaksi Afiliasi terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan atau Kelangsungan Usaha Emiten	: Transaksi afiliasi tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Transaksi Afiliasi Layanan Transaksi Nasabah (*Host To Host*)

Tanggal Kejadian	: 31 Desember 2021
Nilai Transaksi	: Para pihak akan menerima <i>fee</i> dari nasabah pihak kedua yang bertansaksi. Komposisi <i>fee</i> transaksi terdiri dari: a. 70% pihak pertama dan b. 30% pihak kedua. Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dengan potensi <i>fee</i> mencapai Rp1,8 miliar.
Objek Transaksi	: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama No.B.2228-DIR/SBM/12/2021 dan No.BANKRAYA/PKS-117/OJK/12/2021 antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk tentang Layanan Transaksi Nasabah Pihak Kedua di Unit Kerja Pihak Pertama. Para pihak telah menandatangani perjanjian kerja sama layanan transaksi nasabah. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyediakan fasilitas <i>host to host</i> sehingga nasabah PT Bank Raya Indonesia Tbk dapat bertransaksi di unit kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Transaksi <i>host to host</i> dimaksud meliputi antara lain setor tunai, tarik tunai, serta <i>transfer</i> antar PT Bank Raya Indonesia Tbk dan PT Bank Raya Indonesia Tbk ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Para pihak akan menerima <i>fee</i> dari nasabah PT Bank Raya Indonesia Tbk yang bertransaksi. Transaksi ini merupakan perwujudan sinergi antar kelompok usaha perbankan dalam rangka efisiensi dan optimalisasi sumber daya.
Para Pihak	: a. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Pertama) b. PT Bank Raya Indonesia Tbk (Pihak Kedua)

Sifat Hubungan Afiliasi	: PT Bank Raya Indonesia Tbk merupakan entitas anak dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kewajaran dan Mekanisme Review Transaksi	: Transaksi afiliasi ini memenuhi Pasal 6 Ayat 1 POJK 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Oleh karenanya, Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat 1 POJK 42/POJK.04/2020. Perjanjian kerja sama layanan transaksi nasabah ditandatangani untuk mendukung bisnis para pihak dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha, serta dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan. Transaksi afiliasi ini termasuk transaksi pengecualian sehingga tidak wajib melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai yang berlaku umum (<i>arm's length principle</i>).
Pemenuhan Ketentuan terkait	: Dalam rangka memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, BRI telah melakukan pelaporan transaksi tersebut kepada OJK pada 04 Januari 2022 berdasarkan Surat Nomor B.0024-CSC/CSM/CGC/09/2022 Perihal Laporan Transaksi Afiliasi Layanan Transaksi Nasabah.
Dampak Kejadian Transaksi Afiliasi terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan atau Kelangsungan Usaha Emiten	: Transaksi afiliasi tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, baik pada saat ini maupun selama pelaksanaan perjanjian kerjasama layanan transaksi nasabah.

Transaksi Pihak Berelasi

BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika:

- 1) Secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan BRI dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan entitas anak;
- 2) Suatu pihak yang berelasi dengan BRI dan entitas anak;
- 3) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan entitas anak sebagai *venturer*;
- 4) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci BRI dan entitas anak atau induk;
- 5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- 6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- 7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan entitas anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan entitas anak.

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Tabel Pihak Berelasi

No	Pihak – Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
1.	Karyawan Kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Simpanan nasabah
2.	Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek
3.	Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
4.	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
5.	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
6.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
7.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
8.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain.

No	Pihak – Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
9.	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
10.	PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor.
11.	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor.
12.	PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
13.	PT Bahana TCW Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
14.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain .
15.	PT Perusahaan Gas Negara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
16.	PT Pupuk Kalimantan Timur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
17.	PT PP Urban	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
18.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
19.	PT Danareksa Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham, Efek-efek
20.	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
21.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
22.	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
23.	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Kredit yang diberikan Tagihan akseptasi
24.	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Wesel ekspor dan tagihan lainnya, Tagihan akseptasi
25.	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
26.	PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Efek-efek
27.	PT Pertamina Patra Niaga	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
28.	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
29.	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Tagihan akseptasi.
30.	PT Wijaya Karya Beton (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
31.	PT Telekomunikasi Selular	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
32.	PT Bank Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
33.	PT Rekayasa Industri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
34.	PT Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
35.	PT Bio Farma (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
36.	PT PP Presisi Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
37.	PT Adhi Persada Beton	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
38.	PT Petrosida Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, wesel ekspor dan tagihan lainnya
39.	PT Trans Jabar Tol	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
40.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan



No	Pihak – Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
41.	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan Wesel ekspor dan tagihan lainnya
42.	PT Wijaya Karya Bangunan GedungTbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
43.	PT Utama Karya Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
44.	PT Hakaaston	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
45.	PT Prima Armada Raya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
46.	PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
47.	PT Wijaya Karya Industri Energi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
48.	PT Fintek Karya Nusantara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
49.	PT Pefindo Biro Kredit	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha BRI. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan (*Arm's Length Transaction*). Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi diuraikan sebagai berikut

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2021	2020
Aset		
Giro pada bank lain	1.982.594	2.617.594
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	2.564.688	1.907.400
Efek-efek	323.568.645	298.341.153
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	1.844.871	1.815.692
Kredit yang diberikan	67.582.834	72.373.693
Piutang dan Pembiayaan Syariah	-	3.798.857
Piutang Sewa Pembiayaan	26.719	41.153
Tagihan Akseptasi	3.771.305	1.773.080
Penyertaan saham	5.091.108	1.020.529
Total aset dari pihak-pihak berelasi	406.432.764	383.689.151
Total aset konsolidasian	1.678.097.734	1.610.065.344
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	24,22%	23,83%
Liabilitas		
Giro	94.650.332	57.871.641
Tabungan	580.219	660.274
Deposito Berjangka	123.487.205	77.371.511
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya	1.041.927	1.281.947
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.784.315	654.089
Pinjaman yang Diterima	20.107.689	22.262.333
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci	1.789.325	1.226.313
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	245.441.012	161.328.108

Uraian	2021	2020
Total liabilitas konsolidasian	1.386.310.930	1.347.101.486
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	17,70%	11,98%
Dana Syirkah Temporer		
Entitas, Lembaga Pemerintah dan karyawan kunci	-	6.613.045
Persentase terhadap total dana syirkah temporer	0,00%	19,71%
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan	28.175.821	22.304.596
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	6.120.391	5.238.469
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi	247.497	231.905
Tantiem, bonus dan insentif Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci	1.290.440	1.390.356

Tabel Persentase Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi Terhadap Total Aset Dan Liabilitas Konsolidasian BRI dan Entitas Anak

(dalam %)

Uraian	2021	2020
Aset		
Giro pada Bank lain	0,118	0,163
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	0,153	0,018
Efek-efek	19,282	18,530
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	0,110	0,113
Kredit yang diberikan	4,027	4,495
Piutang dan pembiayaan syariah	0,000	0,236
Piutang sewa pembiayaan	0,002	0,003
Tagihan akseptasi	0,225	0,110
Penyertaan saham	0,303	0,063
Total	24,220	23,831
Liabilitas		
Giro	6,827	4,296
Tabungan	0,042	0,049
Deposito berjangka	8,908	5,744
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya	0,075	0,095
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	0,273	0,049
Pinjaman yang diterima	1,450	1,653
Kompensasi kepada Manajemen Karyawan kunci	0,129	0,091
Total	17,704	11,977

Kebijakan Mekanisme Reviu atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan

dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan entitas anak dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah RI diungkapkan juga pada Catatan 44 tersebut.

Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus melalui mekanisme review sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, dilakukan dengan syarat normal dan wajar. Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi

yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Persyaratan dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi secara umum dilakukan sebagaimana dengan pihak ketiga yang direview oleh Komite Audit serta wajib mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Penyesuaian Yang Dilakukan/ Dampak Bagi BRI
1.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020.	Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan salah satu upaya tindak lanjut yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan amanat Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 31 UU OJK yaitu OJK diberikan kewenangan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya serta melakukan pelayanan pengaduan. Di samping itu, peraturan ini juga mengatur secara lebih lanjut ketentuan mengenai layanan konsumen dan masyarakat oleh OJK yang merupakan salah satu materi muatan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Adanya pengaturan mengenai layanan konsumen dan masyarakat melalui OJK ini memperkuat kepastian hukum bagi pelaku usaha jasa keuangan, konsumen dan masyarakat tentang perangkat, mekanisme dan persyaratan pelaksanaan layanan konsumen dan masyarakat oleh OJK. Selain itu, dengan adanya pengaturan ini diharapkan semua pihak di sektor jasa keuangan dapat bersinergi dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> BRI wajib memenuhi permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait pengaduan berindikasi sengketa dari Otoritas Jasa Keuangan. BRI wajib melaksanakan dan melaporkan tindak lanjut hasil fasilitasi kepada Otoritas Jasa Keuangan. BRI wajib memantau Pengaduan pada sistem layanan konsumen terintegrasi di sektor jasa keuangan dan wajib menginformasikan tindak lanjut pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/35/PADG/2020 tanggal 23 Desember 2020.	Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona.	<ol style="list-style-type: none"> Latar belakang PADG Nomor 22/35/PADG/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/4/PADG/2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank Yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona adalah Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona. Substansi pengaturannya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Penambahan rincian sektor prioritas lainnya. Penyesuaian rincian periode pemberian insentif sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Penyesuaian cakupan penyediaan dana yaitu dengan menambah penyediaan dana terkait sektor prioritas lainnya. <p>Penyesuaian sumber data LBU dan LSMK BUS UUS yaitu dengan menambah sumber data terkait sektor prioritas lainnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> BRI wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan baru yang diatur dalam PADG dimaksud. BRI wajib memperhatikan kegiatan ekonomi yang dapat diberikan insentif oleh Bank Indonesia. BRI wajib menyampaikan data penyediaan dana kepada Bank Indonesia sebagai dasar pemberian insentif. BRI mendapatkan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian yaitu sebesar 0,5%.

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Penyesuaian Yang Dilakukan/ Dampak Bagi BRI
3.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tanggal 29 Desember 2020.	Sistem Pembayaran.	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai tindak lanjut dari upaya reformasi pengaturan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menerbitkan PBI tentang Sistem Pembayaran (SP) yang diharapkan dapat menata kembali struktur industri SP, serta memayungi ekosistem penyelenggaraan SP secara menyeluruh sejalan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan. Substansi pengaturannya antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Tahapan pemrosesan transaksi pembayaran meliputi kegiatan pratransaksi, inisiasi, otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pascatransaksi. Terdapat beberapa aktivitas, yaitu: aktivitas PJP, PIP dan penyelenggara penunjang dalam perosesan transaksi pembayaran. Terdapat risiko pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama meliputi: risiko rendah, sedang, dan tinggi. Apabila pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dikategorikan risiko rendah, maka PJP dan PIP wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia atas rencana pengembangan tersebut, sementara itu apabila pengembangan tersebut memenuhi kategori risiko sedang atau tinggi, PJP dan PIP wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia. 	<p>Dampak dari PBI tersebut bagi BRI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> BRI wajib memenuhi ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam PBI dimaksud terutama dalam pengembangan aktivitas, pengembangan produk dan atau kerjasama dengan PJP, PIP atau penyelenggara penunjang lainnya, maka BRI harus terlebih dahulu melakukan penilaian risiko secara <i>self assessment</i> terhadap rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang akan diselenggarakan berdasarkan kategori risiko (rendah, sedang, dan tinggi). BRI wajib menyampaikan laporan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerjasama kepada Bank Indonesia, jika pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerjasama memenuhi kategori berisiko rendah. Terhadap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama memenuhi kategori berisiko sedang atau tinggi maka BRI wajib menyampaikan permohonan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama kepada Bank Indonesia. BRI wajib memastikan bahwa transaksi yang akan diproses diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia. Terkait Pertukaran data individual nasabah, BRI wajib memastikan telah mendapat persetujuan nasabah atas penggunaan data pribadinya (<i>consumer consent</i>).
4.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021.	Sertipikat Elektronik.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik diterbitkan untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> BRI wajib menyesuaikan ketentuan internal terkait kepemilikan hak atas tanah yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen elektronik berupa sertipikat elektronik. BRI melakukan kajian terkait penggantian Sertipikat hak atas tanah terhadap aset-aset BRI dan/atau terhadap bukti kepemilikan agunan debitur.

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Penyesuaian Yang Dilakukan/ Dampak Bagi BRI
5.	Surat Edaran OJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tanggal 31 Maret 2021	Rencana Bisnis Bank Umum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang diterbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank Umum ini sebagai pedoman bagi Bank dalam rangka menyusun rencana bisnis agar mencerminkan kompleksitas bisnis bank umum. 2. Dengan diberlakukannya SEOJK ini, kewajiban penyampaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan OJK (APOLO). 3. Laporan rencana bisnis yang disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan OJK (APOLO), yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Realisasi Rencana Bisnis (triwulanan) yang berisi tentang paling sedikit mencakup penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis, rasio keuangan dan pos-pos tertentu, serta informasi lainnya. b. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis (semesteran) yang berisi tentang paling sedikit meliputi penilaian mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis, faktor faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Umum secara umum, serta upaya memperbaiki kinerja Bank Umum dalam hal dari hasil penilaian terjadi penurunan kinerja. c. Rencana Bisnis (tahunan) yang berisi penggabungan antara poin a dan b. 	<p>Dampak dari SEOJK tersebut bagi BRI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BRI menyesuaikan ketentuan Internal terkait Rencana Bisnis Bank Umum (penghimpunan dana, penanaman dana, penyertaan modal, penerapan manajemen risiko, dan format pencantuman rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru) sesuai dengan SEOJK dimaksud. 2. BRI wajib menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (APOLO).
6.	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 /SEOJK.04/2021 tanggal 29 Juni 2021.	Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang terkait Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik (SEOJK) merupakan ketentuan pengganti yang mencabut keberlakuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 2. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Penjelasan strategi keberlanjutan; b. Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c. Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d. Penjelasan Direksi; e. Tata kelola keberlanjutan; f. Kinerja keberlanjutan; g. Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h. Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada; dan i. Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. j. Penyusunan Laporan Keberlanjutan sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI akan menyesuaikan ketentuan internal terkait pelaporan profil emiten atau perusahaan publik. 2. BRI melakukan penyesuaian isi laporan tahunan pada bagian Laporan Direksi, Dewan Komisaris, dan Profil Emiten dan Perusahaan Publik pada pelaporan tahunan periode 2021 sesuai dengan SEOJK ini, kemudian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2022. 3. BRI wajib melaporkan analisis dan pembahasan management pada laporan tahunan perusahaan publik.

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Penyesuaian Yang Dilakukan/ Dampak Bagi BRI
7.	Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021.	Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan.	<ol style="list-style-type: none"> Latar belakang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bidang pencegahan korupsi yang salah satunya melalui pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan. Pokok bahasan ketentuan tersebut diterbitkan dalam rangka tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG) Kementerian/Lembaga/BUMN/D/Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang menyepakati komitmen untuk menciptakan budaya anti gratifikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> BRI wajib mencegah dan memastikan tidak terdapat kegiatan dan/atau ketentuan atas produk dan/atau aktivitas bisnis yang mengarah pada pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamakan dalam bentuk <i>fee marketing</i>, <i>collection fee</i>, refund, atau penamaan lainnya. BRI wajib memastikan bahwa atas setiap tindakan promosi, pengembangan pasar, dan kegiatan operasional jasa keuangan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintah/ BUMN/BUMD, hanya dapat diberikan kepada instansi dan tidak diberikan secara langsung kepada individu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021.	Penyelenggaraan Produk Bank Umum.	<ol style="list-style-type: none"> Latar belakang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum ini diterbitkan karena adanya peningkatan kompetisi di industri jasa keuangan, yang mendorong bank untuk melakukan transformasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, guna mendorong transformasi layanan bank, diperlukan dukungan otoritas atas pemanfaatan teknologi agar menghasilkan inovasi dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran. Di samping sebagai salah satu upaya untuk mendukung bank dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran, sehingga diperlukan mekanisme perizinan penyelenggaraan produk yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah. Pokok bahasan Produk Bank dikelompokkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> Produk Bank Dasar Produk Bank dasar terdiri dari produk, layanan, dan/atau jasa yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana, dan/atau kegiatan sederhana lain. Produk Bank Lanjutan Merupakan produk, layanan, dan/atau jasa selain Produk Bank dasar yang: <ul style="list-style-type: none"> Berbasis Teknologi Informasi (TI); Berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank; Memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain; dan/atau Bersifat kompleks. OJK menetapkan Produk Bank dasar dalam Lampiran POJK. OJK dapat menetapkan Produk Bank lanjutan menjadi Produk Bank dasar di kemudian hari berdasarkan pertimbangan tertentu. <ul style="list-style-type: none"> Bank mencantumkan rencana penyelenggaraan Produk Bank baru dalam Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB). 	<ol style="list-style-type: none"> BRI untuk dapat melakukan reviu dan menyesuaikan serta melakukan pengkajian secara berkala Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE.75-DIR/DOR/12/2020 tentang Manajemen Risiko atas Rencana Penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan memperhatikan kecukupan pengaturan. BRI apabila akan melakukan penerbitan dan/ atau pengembangan produk atau aktivitas baru untuk memperhatikan pemenuhan atas ketentuan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pencantuman rencana penyelenggaraan produk baru dalam RPPB, kriteria produk bank baru, penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal atas penyelenggaraan produk bank, perlindungan konsumen, perizinan hingga penghentian produk bank.

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Penyesuaian Yang Dilakukan/ Dampak Bagi BRI
9.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021.	Bank Umum.	<ol style="list-style-type: none"> Latar belakang bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka OJK memandang perlu untuk menerbitkan ketentuan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan bank yang kuat dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan industri perbankan termasuk perkembangan dan inovasi teknologi informasi. Pokok bahasan secara khusus, penerbitan POJK ini bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menyesuaikan dengan dinamika perkembangan industri keuangan dan teknologi baik di tingkat regional maupun global; Mendorong akselerasi transformasi digital; Mendukung akselerasi konsolidasi bank, melalui peningkatan modal pendirian bank umum baru atau pembukaan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN) baru; Memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk menyediakan produk bank yang inovatif, dinamis, serta sesuai dengan kebutuhan nasabah (customer centric) termasuk kebutuhan akan transaksi keuangan secara digital; Mendukung terciptanya sinergi perbankan; Mendorong pendekatan pengaturan yang bersifat principle-based tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. 	<ol style="list-style-type: none"> BRI wajib memiliki rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Peraturan OJK ini berlaku. BRI wajib melakukan penilaian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif yang meliputi penilaian terhadap aspek integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi. BRI wajib mencantumkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan memperoleh persetujuan OJK ketika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan terdapat rencana pemindahan alamat unit kerja. BRI wajib mengajukan permohonan izin kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan pembukaan/penutupan jaringan kantor BRI. Adapun dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
10.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021.	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> Latar belakang peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini dikeluarkan untuk melaksanakan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara guna turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara dan juga untuk pengoptimalan pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara yang berorientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya. Pokok bahasan Program TJSL BUMN bertujuan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan. Program TJSL BUMN meliputi tahapan: <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan; Pelaksanaan; Pengawasan; dan Monitoring dan Evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> BRI wajib memastikan kembali dalam pembuatan dan pelaksanaan program TJSL BUMN secara sistematis dan terpadu. BRI dalam melakukan perencanaan Program TJSL BUMN sebagai suatu strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan program.

No	Peraturan	Perihal	Keterangan	Penyesuaian Yang Dilakukan/ Dampak Bagi BRI
11.	SE Menteri BUMN RI No.: SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021.	Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor: SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, dengan terbitnya SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara bertujuan untuk meningkatkan transparansi guna menciptakan perusahaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk meningkatkan kepatuhan para pejabat di lingkungan BUMN. Oleh karena itu, perlu melakukan penyesuaian serta perluasan kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan BUMN. 2. Surat Edaran tersebut juga ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi yang terkonsolidasi dengan BUMN. 3. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK sesuai dengan jenis laporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. BRI wajib menetapkan pejabat satu tingkat di bawah Direksi untuk menyampaikan LHKPN. 5. Pemantauan penyampaian LHKPN melalui Satuan Pengawasan Intern. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BRI akan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan SE Menteri BUMN RI No.: SE-12/MBU/10/2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. 2. Memastikan penyampaian LHKPN BRI telah sesuai dengan ketentuan.
12.	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019.	Ekonomi Kreatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/ atau teknologi. 2. Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. 3. Pelaku ekonomi kreatif terdiri atas pelaku kreasi dan pengelola kekayaan intelektual. 4. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif. 5. Sistem pengembangan pendidikan ekonomi kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelaku ekonomi kreatif yang mampu bersaing dalam skala global. 6. Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. 	BRI melakukan penyusunan ketentuan internal terkait kebijakan perkreditan BRI agar dapat mempertimbangkan untuk melakukan kajian terkait mekanisme penerimaan pelaku ekonomi kreatif sebagai debitur BRI serta melakukan kajian terkait jenis agunan yang akan diserahkan kepada BRI.

Perubahan peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan di atas tidak memiliki dampak kuantitatif yang signifikan terhadap Laporan Keuangan BRI.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi di tahun 2021 disebabkan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sebagai bentuk adopsi dari International Financial Reporting Standards (IFRS) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) efektif per tanggal 1 Januari 2021. Perubahan kebijakan akuntansi mencakup penerapan PSAK No. 22 (Amandemen 2019), “Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis” yang mengadopsi Amademen IFRS 3, Amendemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”, Amendemen PSAK No 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, Amendemen PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, Amendemen PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK No. 73, “Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2”, dan PSAK No. 112, “Akuntansi Wakaf”.

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi	Paparan Konsekuensi dan Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Secara Kuantitatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan
1	PSAK No. 22 (Amandemen 2019), “Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis”, Amandemen ini yang diadopsi dari Amandemen IFRS 3 <i>Business Combinations: Definition of Business</i> merupakan hasil dari <i>joint project</i> antara <i>International Accounting Standards Board (IASB)</i> dan <i>US Financial Accounting Standards Board (FASB)</i> . Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian kebijakan terhadap dampak penerapan PSAK No.22 (Amandemen 2019) “Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis”. Melakukan penyesuaian terhadap amandemen yang ada, khususnya untuk transaksi-transaksi terdampak. Khusus untuk kombinasi bisnis antar entitas sepengendali BRI menerapkan PSAK 38 - Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. 	Penerapan PSAK ini, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
2	Amendemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”, Amendemen PSAK No 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2. Amendemen ini menjelaskan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang <i>Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2</i> .	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyesuaian terhadap amandemen yang ada, khususnya untuk transaksi-transaksi terdampak. 	Penerapan PSAK ini, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
3	PSAK No. 112, “Akuntansi Wakaf”, efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan. PSAK ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi wakaf dari donor korporasi kepada penerima individu dan korporasi.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian terkait dampak dari PSAK No.112 “Akuntansi Wakaf”. Berdasarkan kajian, PSAK No.112 tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan. 	Penerapan PSAK ini, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat Kesehatan Bank dinilai berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk – Based Bank Rating*). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menggunakan pendekatan risiko (*Risk – Based Bank Rating*) dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap 4 (empat) faktor berikut:

1. Profil Risiko
2. *Good Corporate Governance* (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Tabel Tingkat Kesehatan BRI Secara Individu (Self Assessment)

Faktor Penilaian	Penilaian Per Semester II 2021	Penilaian Per Semester II 2020
	Peringkat	Peringkat
Profil Risiko	2	2
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	2	2
Rentabilitas	2	2
Permodalan	1	1
Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko	2	2

Peringkat Tingkat Kesehatan Bank BRI dengan metode penilaian berbasis risiko (RBBR) berada pada Peringkat Komposit 2 (PK 2) – SEHAT dengan rincian untuk masing-masing faktor penilaian yaitu Profil Risiko BRI berada pada Peringkat 2 (*Low to Moderate*), GCG berada pada Peringkat 2 (Baik), Rentabilitas berada pada Peringkat 2 (Memadai) dan Permodalan berada pada Peringkat 1 (Sangat Memadai).

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Ancaman kelangsungan usaha BRI bisa bersumber dari potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam (*natural disaster*), tindakan yang disengaja, kegagalan proses bisnis maupun disrupsi teknologi. Untuk mengantisipasi dampak dari potensi gangguan tersebut, Direksi BRI mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) yang sudah diatur dalam Surat Edaran BRI NOSE: S.61-DIR/DOR/10/2021. Tujuan kebijakan BCM antara lain untuk melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja BRI, keluarga, nasabah serta *stakeholders* sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sudah dimiliki. Selain itu BCM bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI, serta memiliki respon yang memadai dalam setiap kondisi baik itu dalam kondisi Normal, kondisi krisis, fase pemulihan bencana hingga kondisi kembali normal (*new normal*).

Saat ini tantangan dari BCM selain dari ke 4 (empat) faktor di atas adalah terkait adanya Pandemi COVID-19 di era *new normal* serta digitalisasi perbankan dan sistem keuangan yang dapat menimbulkan banyak disrupsi gangguan salah satunya adalah gangguan serangan siber.

Assessment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Beserta Asumsi Yang Digunakan

Dalam rangka penerapan BCM yang proaktif, maka telah dilakukan pengkinian Kebijakan BCM yang terdiri dari: Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB), *Business Impact Analysis* (BIA), *Business Continuity Plan* (BCP), *Emergency Response Plan* (ERP), *Crisis Management Plan* (CMP), *Disaster Recovery Plan* (DRP), dan Sosialisasi dan Uji Coba. Untuk memastikan penerapan BCM dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), telah dilakukan uji coba BCP di Divisi Kritisal BRI, serta sosialisasi dan uji coba tanggap darurat bencana (*emergency response*) di seluruh *regional office* dan unit kerja supervisinya.

Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB)/*Risk and Threat Assessment* yang bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman/bencana tertinggi di unit kerja serta sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana tersebut.

Selama masa pandemi COVID-19, BCM *Department* bekerjasama dengan Divisi terkait dan *regional office* secara aktif melakukan pengendalian COVID-19 di lingkungan Bank, mulai dari penyusunan

kebijakan, memastikan penerapan protokol kesehatan bagi pekerja di lingkungan kantor maupun di luar kantor, pemantauan kesehatan pekerja, dan membantu proses pemulihan pekerja dan keluarga pekerja yang terkonfirmasi positif COVID-19

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa Unit Kerja BRI, termasuk pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi. Penanganan COVID-19 dilakukan dengan melakukan langkah - langkah *Tracing*, *Testing* dan *Treatment* (3T) di unit kerja serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Aspek Perpajakan

BRI dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya. BRI telah menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Pajak	Tahun 2021	Tahun 2020
PPh Pasal 21	1.856.647	2.066.891
PPh Pasal 22	37.126	27.960
PPh Pasal 23	121.146	235.505
PPh Pasal 26	1.654.886	1.378.848
PPh Final pasal 4 ayat (2)	3.679.235	5.138.719
PPN & PPnBM	319.292	105.850
Bea Materai	42.871	46.871
Sub Jumlah Pajak Potput	7.711.203	9.000.644
PPh Badan (<i>Corporate Tax</i>)	12.459.925	7.611.026

Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Sepanjang tahun 2021, BI telah menurunkan suku bunga BI *7 days reverse repo rate* sebesar 25 bps dari 3,75% menjadi 3,50%. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kredit dan pada akhirnya mendorong kegiatan konsumsi dan investasi nasional. Selain itu, BI juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut, melalui berbagai langkah berikut:

- Melanjutkan kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.
- Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas *stance* kebijakan moneter akomodatif.
- Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan:
 - Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%.
 - Rasio *Intermediasi Makroprudensial* (RIM) pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 80% (1 September-31 Desember 2021) dan 84% (sejak 1 Januari 2022)
 - Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas *repo* sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas *repo* sebesar 4,5%.
- Melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit/ pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Melanjutkan pelonggaran rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan), bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- Memperkuat kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan suku bunga kredit baru per sektor/subsektor ekonomi.
- Menetapkan implementasi BI-FAST tahap pertama mulai minggu ke-2 Desember 2021, dengan kebijakan penyelenggaraan yang mencakup kepesertaan, penyediaan infrastruktur, batas maksimal nominal transaksi, serta skema harga yang akan diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2021.

8. Memperpanjang masa berlaku kebijakan kartu kredit untuk:
 - a. Batas minimum pembayaran kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan sampai dengan 30 Juni 2022.
 - b. Penurunan nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit sebesar 1% dari *outstanding* atau maksimal Rp100.000 sampai dengan 30 Juni 2022.
9. Mengakselerasi implementasi penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS) dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra, dengan memperkuat sinergi bersama Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dan dunia usaha.
10. Memperluas dukungan kepada Pemerintah dalam memfasilitasi promosi investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra utama.

Secara umum serupa dengan pergerakan pemulihan global, pemulihan ekonomi nasional juga diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2022, namun dengan beberapa tantangan. Persoalan pandemi yang masih belum berakhir dapat terus membayangi tren pemulihan ekonomi nasional, dimana jika kewaspadaan menurun maka bisa saja kita “tersandung” kembali dan mengganggu momentum pemulihan. Laju vaksinasi harus terus konsisten untuk dilakukan, sehingga diharapkan Indonesia

dapat mencapai *herd immunity* ketika proporsi penduduk yang divaksin sudah cukup tinggi. Selain tantangan di sisi kesehatan, tantangan sisi ekonomi seperti gangguan rantai pasok global dan normalisasi kebijakan moneter utamanya oleh The FED juga perlu diwaspadai oleh perekonomian nasional.

Pertumbuhan kredit industri perbankan pada Oktober 2021 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 3,24% YoY. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih mampu bertahan meski terdampak Pandemi COVID-19. Di sisi lain, masih adanya ketidakpastian pandemi menyebabkan tingginya kecenderungan masyarakat untuk menabung. Hal ini mendorong peningkatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Oktober 2021 menjadi 9,44% YoY. Hal ini berdampak pada likuiditas perbankan yang melimpah, hal ini tercermin pada rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang turun cukup signifikan dari 82,54% pada Oktober 2020 menjadi 78,27% pada Oktober 2021.

Sebagai respon atas penurunan suku bunga acuan BI dan juga normalisasi kebijakan moneter oleh The FED, BRI secara selektif turut melakukan penyesuaian suku bunga dana maupun suku bunga dasar kredit (SBDK). Per Desember 2021, SBDK BRI adalah sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

(dalam %)

Suku Bunga	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non-KPR
Desember 2021	8,00	8,25	14,00	7,25	8,75

Selain itu, sepanjang tahun 2021, BRI juga secara aktif terus melaksanakan program efisiensi biaya operasional dengan menjaga produktivitas melalui digitalisasi dan *business process reengineering* secara berkesinambungan yang mengedepankan penguatan *transaction banking dan payment ecosystem* sebagai *enabler* perolehan pendapatan *fee* dan peningkatan CASA.

Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BRI telah menetapkan kebijakan yang mencakup batasan dalam pemberian dana kepada pihak terkait sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 /POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dan POJK No. 38 /POJK.03/2019 Tentang Perubahan Atas POJK No. 32/POJK.03/2018 Tentang BMPK dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Dana Besar

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha Bank yaitu Penyediaan dana yang tidak didukung oleh kemampuan Bank dalam mengelola konsentrasi Penyediaan Dana secara efektif. Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha Bank sebagai akibat dari konsentrasi Penyediaan Dana, Bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana terutama melalui pembatasan Penyediaan Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun

selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (*Tier 1*) Bank, yang dikenal dengan BMPK dan Penyediaan Dana Besar. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan daya saing nasional, diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan yang dilakukan dengan memberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK dan Penyediaan Dana Besar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-

hatian. Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait atau Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank yang diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.36-DIR/KRD/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 beserta perubahannya.

Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Pemberian kredit kepada Direksi dan Komisaris termasuk ke dalam penyediaan kepada Pihak Terkait, dan hal ini wajib mendapat persetujuan kepada Dewan Komisaris. Pendanaan kepada Pihak Terkait telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan Perseroan yaitu Kebijakan Batas Minimum Pemberian Kredit BRI. Ketentuan dan prosedur pemberian kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris berlaku sama seperti pemberian kredit kepada calon debitur Bank BRI pada umumnya dan diberikan sesuai bunga pasar (*market rate*) dan wajar (*arm length basis*) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Mekanisme Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

1. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank diajukan secara mandiri atau kolektif melalui *Wholesale Credit Risk Analyst Division* dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
2. Pemberian Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait wajib di *review* terlebih dahulu oleh Komite Independen BRI sebelum dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.
3. Pemberian Penyediaan Dana (khusus kredit) kepada Direksi dan Dewan Komisaris harus dilakukan secara adil dan wajar (*equal treatment*).

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Ketentuan tentang pengaturan limit BMPK adalah Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. Ketentuan pihak lainnya yang diatur adalah:

1. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana.
2. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris Bank.
3. Bank dilarang membeli aset berkualitas rendah (aset yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan atau macet dan/ atau telah dilakukan restrukturisasi) dari Pihak Terkait.
4. Dalam hal kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian untuk memperbaiki dengan cara:
 - a. Pelunasan kredit paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penurunan kualitas penyediaan dana; dan/atau
 - b. Melakukan restrukturisasi kredit sejak penurunan kualitas Penyediaan Dana.

5. Dalam hal Bank memberikan Penyediaan Dana dalam bentuk Penyertaan Modal yang mengakibatkan pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal menjadi Pihak Terkait, Bank wajib memastikan:
 - a. Rencana Penyediaan Dana ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
 - b. Penyediaan Dana yang akan dan telah diberikan kepada pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal setelah ditambah dengan seluruh portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank;
 - c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3.

Pihak terkait meliputi:

1. Perorangan atau perusahaan yang merupakan pengendali Bank.
2. Badan hukum dalam hal Bank bertindak sebagai pengendali.
3. Perusahaan dalam hal perorangan atau perusahaan sebagaimana pada poin 1 bertindak sebagai pengendali.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif Bank.
5. Pihak yang mempunyai hubungan keluarga secara horizontal atau vertical:
 - i. Dari perorangan yang merupakan pengendali Bank sebagaimana dimaksud dalam poin 1; dan
 - ii. Dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Bank sebagaimana dimaksud dalam poin 4;
6. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan/atau 3.
7. Perusahaan yang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan anggota Dewan Komisaris pada Bank.
8. Perusahaan yang 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris merupakan Direksi dan/atau Komisaris pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2 dan 3. Jumlah 50% (lima puluh persen) atau lebih dihitung dari jumlah kumulatif Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
9. Perusahaan yang:
 - a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank bertindak sebagai pengendali; dan
 - a. Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan/ atau 3 bertindak sebagai pengendali.
10. Kontrak Investasi Kolektif dimana Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1-9 memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih saham pada manajer investasi kontrak investasi kolektif tersebut.
11. Perusahaan yang memiliki hubungan keuangan dengan Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1- 9 di atas.
12. Peminjam berupa perorangan atau perusahaan bukan bank yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1-11.
13. Peminjam yang memiliki hubungan keuangan melalui penjaminan yang diberikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1-11.

14. Bank lain yang memiliki hubungan keuangan melalui pemberian jaminan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1-11 dalam hal terdapat penjaminan kembali (counter guarantee) dari Bank dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1-11 kepada bank lain tersebut.
15. Perusahaan lain yang didalamnya terdapat kepentingan berupa kepemilikan saham sebesar 10% (sepuluh persen) atau lebih secara sendiri atau bersama-sama, dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 5.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Selain Pihak Terkait

1. Penyediaan Dana kepada:
 - a. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau
 - b. 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait
2. Penyediaan Dana kepada 1 (satu) peminjam selain Pihak Terkait atau 1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (*Tier 1*) Bank.
3. Bank wajib menetapkan penggolongan Peminjam dalam suatu kelompok peminjam dalam hal Peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan Peminjam lain melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau keuangan.
4. Penggolongan kelompok Peminjam dengan kriteria:
 - a. Peminjam merupakan pengendali Peminjam lain;
 - b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Peminjam;
 - c. 50% (lima puluh persen) anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Peminjam menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pada Peminjam lain;
 - d. Peminjam memiliki hubungan keuangan dengan Peminjam lain; dan/atau
 - e. Peminjam memiliki hubungan keuangan berupa penerbitan jaminan untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Peminjam lain dalam hal Peminjam lain gagal memenuhi kewajiban kepada Bank.
5. Penggolongan Kelompok Peminjam tidak berlaku untuk:
 - a. Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan oleh Bank kepada debitur dalam kegiatan usaha Bank pada umumnya; dan
 - b. Pemberian jaminan oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, Pemerintah Republik Indonesia, dan/ atau pemerintah negara lain.
 - c. Pemberian Kredit kepada debitur melalui perusahaan dengan metode penerusan.

- d. Pemberian Kredit dengan pola kemitraan inti-plasma dengan skema perusahaan inti menjamin Kredit kepada plasma.
- e. Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara masing-masing pemerintah Kabupaten/ Kota.

Penyediaan Dana

Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan Penyediaan Dana Besar merupakan seluruh Penyediaan Dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*.

1. Jenis- Jenis Penyediaan Dana yaitu:
 - a. Penempatan;
 - b. Transaksi derivatif;
 - c. Surat berharga;
 - d. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo);
 - e. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo);
 - f. Tagihan akseptasi;
 - g. Kredit;
 - h. Penyertaan modal;
 - i. Penyertaan modal sementara;
 - j. Transaksi rekening administratif; dan
 - k. Bentuk penyediaan dana lain yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf j.
2. Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.
3. Penyediaan Dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan antara lain Penyediaan Dana untuk:
 - a. Pengadaan pangan;
 - b. Pengadaan rumah sangat sederhana;
 - c. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan minyak dan gas bumi serta sumber alam pengganti energy lain yang setara;
 - d. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan air;
 - e. Pengadaan, penyediaan dan/atau pengelolaan listrik;
 - f. Pengadaan dan/atau pengelolaan komoditas yang berorientasi ekspor;
 - g. Pengadaan instruktur penunjang transportasi darat, laut dan udara berupa pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara; dan/atau
 - h. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN) yang ditetapkan dan diprioritaskan pemerintah pusat.

Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK)

BRI wajib menerapkan teknik MRK yang memenuhi persyaratan tertentu dalam perhitungan BMPK dalam hal BRI mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik MRK dalam menghitung aset tertimbang menurut risiko kredit pendekatan standar dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Pengecualian dari Perhitungan BMPK

Penempatan pada setiap *Prime Bank* dikecualikan dari perhitungan BMPK dengan ketentuan:

1. Penempatan pada setiap *Prime Bank*.
2. Bagian Penyediaan Dana kepada Peminjam yang memperoleh jaminan dari *Prime Bank*.
3. Penyediaan Dana kepada Pemerintah Pusat.
4. Penempatan pada Bank Indonesia.
5. Pembelian Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
6. Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh jaminan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan syarat tertentu.
7. Penyediaan Dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan dan Bagian Penyediaan Dana yang memperoleh

jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu.

8. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu dan memenuhi persyaratan tertentu.
9. Penyediaan Dana yang telah menjadi faktor pengurang Modal.

Pelampauan BMPK

Kondisi Pelampauan

Penyediaan Dana oleh BRI dikategorikan sebagai Pelampauan BMPK yang disebabkan oleh:

1. Penurunan Modal atau Modal Inti (*Tier 1*)
2. Perubahan nilai tukar
3. Perubahan nilai wajar
4. Penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan, dan/ atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan Pihak Terkait dan/atau kelompok Peminjam;
5. Perubahan ketentuan (mengenai perubahan pihak yang dikategorikan sebagai Pihak Terkait atau kelompok Peminjam).

Penentuan Peminjam dalam perhitungan Pelampauan BMPK dilakukan sesuai ketentuan perhitungan Penyediaan Dana. Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.

Penyelesaian Pelanggaran dan Pelampauan BMPK

Selama tahun 2021, BRI tidak pernah melakukan pelanggaran maupun pelampauan BMPK. Dalam hal Bank melakukan pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK, BRI wajib menyusun rencana tindak lanjut untuk penyelesaian pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK beserta target waktu penyelesaian.

Tabel Pelanggaran dan Pelampauan BMPK

BMPK	Pihak Terkait	Pihak Tidak Terkait	Pihak Tidak Terkait (Kelompok Peminjam)	BUMN
Pelanggaran BMPK	-	-	-	-
Pelampauan BMPK	-	-	-	-

Pelaporan

Pelaporan Eksternal

BRI menyampaikan laporan Penyediaan Dana, Penyediaan Dana Besar, Pengecualian Penyediaan Dana Besar, Pelanggaran BMPK atau Pelampauan BMPK, secara individu dan secara konsolidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala.

Pelaporan Internal

Secara internal, BRI menyusun pelaporan BMPK yang melibatkan unit kerja terkait dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penentuan BMPK dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*), Divisi FMA menyediakan data Modal BRI posisi terakhir kepada Divisi yang membidangi portofolio kredit.
2. Divisi Bisnis Kantor Pusat, Kanca, UKLN, Divisi/Desk yang membidangi Entitas Anak, dan unit kerja terkait melaporkan data yang diperlukan untuk pelaporan sesuai fungsinya masing-masing kepada Divisi yang membidangi portofolio kredit.
3. Divisi yang membidangi portofolio kredit melakukan konsolidasi dan membuat laporan BMPK dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*) dan menyampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

BMPK Internal BRI

1. Sebagai bentuk penerapan kehati-hatian dan *risk appetite*, BRI menetapkan besaran BMPK internal maksimum sebesar 75% dari BMPK yang ditentukan oleh OJK per obligor.
2. Penyaluran dana pinjaman BRI difokuskan kepada segmen UMKM.

Transaksi Kepada Pihak Terkait

Pada tahun 2021, transaksi kepada pihak terkait (*related party transaction*) telah dilakukan secara adil, berlaku umum (*normal commercial terms*), wajar (*arm length basis*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Transaksi Kepada Pihak Terkait

Penyediaan Dana	2021		2020	
	Jumlah Debitur	Outstanding (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah Debitur	Outstanding (dalam jutaan Rupiah)
Pihak Terkait	630	9.699.852	614	5.992.379
Individu	50	117.002.859	50	109.361.728
Top 25 BUMN	25	54.570.649	25	50.483.506
Top 25 Non BUMN	25	60.367.945	25	58.646.765
Group	50	154.525.021	50	152.548.248
Top 25 Group BUMN	25	66.513.819	25	71.231.545
Top 25 Group Non BUMN	25	83.179.996	25	68.745.599

Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

BRI melakukan transaksi lindung nilai untuk melindungi nilai portofolio aset berdenominasi mata uang asing dan juga lindung nilai terhadap suku bunga. Dalam hal ini, BRI tidak menerbitkan transaksi derivatif untuk tujuan perdagangan. Transaksi *spot* dan transaksi derivatif mengacu pada sistem manajemen risiko yang sesuai dengan ketentuan dan praktik terbaik. Seluruh transaksi derivatif yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan BRI maupun nasabah. Sepanjang tahun 2021, BRI melakukan transaksi *spot* dan transaksi derivatif dalam bentuk *swap* mata uang dan suku bunga, *swap* suku bunga, *option*, pembelian dan penjualan *forward* mata uang asing, *swap* mata uang asing, pembelian dan penjualan *spot* mata uang asing. Secara rinci transaksi *spot* dan derivatif yang dilakukan BRI (Konsolidasian) termuat dalam tabel berikut.

Tabel Transaksi Spot dan Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

Transaksi	Tagihan Derivatif			Liabilitas Derivatif		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Swap mata uang asing	353.982	1.177.679	139.081	47.769	195.687	34.341
Pembelian dan Penjualan <i>forward</i> mata uang asing	104.450	142.912	21.975	43.440	35.799	21.943
Swap suku bunga	103.575	110.358	19.264	104.817	158.856	74.114
Option saham	-	-	17.306	-	-	-
Option mata uang	-	-	9.092	-	1.851	21.424
Swap mata uang dan suku bunga	167.159	144.151	3.151	1.972	14.421	32.338
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	917	1.559	527	1.697	1.160	445
Total	730.083	1.576.659	210.396	199.695	407.774	184.605





Tinjauan Fungsi Pendukung Bisnis

“Pada era transformasi *digital*, BRI telah membangun *Capability-Driven Digital Strategy framework* dengan fokus pengembangan produk-produk *digital* yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) *digital outcome* yaitu *Digitizing Core, Digital Ecosystem, dan New Digital Prepositions*”



» Sumber Daya Manusia

“BRI didukung SDM dengan kompetensi dan pengalaman yang lengkap dan beragam, dengan porsi terbesar kalangan millennial yang tangguh dan lebih melek digital”

Menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0 dan pertumbuhan bisnis ditengah pemulihan ekonomi pasca COVID-19, BRI telah melakukan berbagai perubahan dan pengembangan terutama dalam pengelolaan *human capital*. Berbagai kegiatan transformasi dan pengembangan otomasi pada Human Capital (HC) telah dilakukan BRI selama tahun 2021 salah satunya melalui *from Good to Great* untuk mencapai Visi BRI dengan *enabler*-nya adalah **“Home to the best talent”**. Direksi dan Dewan Komisaris BRI juga telah menetapkan 3 (tiga) hal strategis yang mampu mendorong pencapaian Visi BRI, yaitu **BRI One Culture, BRILiaN Ways** dan **Employee Value Proposition “Memberi Makna Indonesia”**. BRI One Culture digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan dan membangun budaya perusahaan yang kuat untuk mencapai Visi BRI, yang terdiri dari Core Values Akhlak, BRILiaN Belief, dan BRILiaN Ways. Selanjutnya untuk memberikan pedoman bagi Pemimpin dan Pekerja BRI untuk menjalankan aktivitasnya ditetapkan perilaku spesifik dari berbagai jabatan dan menjadi pengukuran **Behavior Objective** dalam penilaian *performance* individu. Implementasi BRI One Culture terus dilakukan melalui penguatan *role model* seperti *Culture Leader*, 600 *Culture Agent Coordinator* dan 3200 *Culture Agent*. *Culture Agent* dan *Leader* di seluruh Unit Kerja berkolaborasi merancang dan menjalankan aktivasi budaya (**Culture Activation Program**) dengan berbagai ide kreatif untuk mendukung kinerja dan pada tahun 2021 tercatat seluruh Unit Kerja telah memiliki *Culture Activation Program*.

Sebagai salah satu bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan kompensasi yang tidak hanya dapat dinikmati oleh pekerja dalam jangka pendek namun juga di jangka panjang, serta untuk meningkatkan *engagement* pekerja untuk



mewujudkan BRI menjadi **“Home to the best talent”**, HC BRI telah mengimplementasikan program kepemilikan saham Pekerja dalam bentuk *Employee Stock Allocation (ESA)* dan *Employee Stock Option Plan (ESOP)*. Program *Employee Stock Option Plan (ESOP)* juga merupakan salah satu bentuk implementasi *performance driven culture*, dimana program ini memberikan opsi/ hak pembelian saham dengan harga tertentu khusus diberikan kepada Pekerja dengan kinerja terbaik yang termasuk kategori *Top Talent & Value Creator BRI*.

Dengan memperhatikan strategi Perusahaan dalam bidang *Human Capital*, BRI melakukan *Strategic Workforce Planning (SWP)* yang bertujuan untuk menghasilkan rencana strategis jangka panjang untuk *Headcount Projection*, *Future competency demand* dan *new resourcing strategy*. Dalam SWP, terdapat proses *Reinventing Jobs* dimana BRI harus melakukan rekonstruksi jabatan dan memetakan ulang untuk menghasilkan solusi transformasi proses bisnis yang mengadaptasi teknologi terkini maupun melalui otomasi/teknologi sehingga diharapkan melalui inisiatif SWP akan didapatkan efisiensi, optimalisasi maupun augmentasi dari suatu jabatan.

Untuk mendukung *Development* Pekerja dalam menghadapi era saat ini maupun kedepan, HC BRI telah membentuk **BRILiaN Development Centre (BDC)**. BDC dibentuk untuk mempercepat perkembangan Insan BRILiaN secara optimal untuk menjadi *Great Talent & Great Leader* BRI. BDC pun memiliki strategi *Talent Attraction*, yakni **Multi Channel from Multi Sources** yang terdiri dari **BRILiaN Future Leader Program (BFLP)** yakni Program perekrutan sekaligus pendidikan untuk menjaring kandidat-kandidat potensial sumber eksternal, **BRILiaN Next Leader**



Program (BNLP) yakni Program perekrutan sekaligus pendidikan untuk menjangkir kandidat-kandidat potensial sumber internal, **BRILiaN Banking Officer Program (BBOP)** yakni Program perekrutan sekaligus Pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru di level *Corporate Title Assistant*. Adapun **Multi Sources** yang dimiliki yakni **BRILiaN Scholarship Program (BSP)** yakni Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 yang memiliki kriteria tertentu dalam rangka Rekrutmen Pekerja BRI, **BRILiaN Creativity Contest Program (BCCP)** yakni Program kompetisi bagi para peserta *eksternal* dan *internal* BRI untuk menuangkan ide-ide inovasi *brilliant*, baik dalam bentuk kolaborasi tim maupun individu, **BRILiaN Get Talent Program (BGTP)** yakni Program pencarian kandidat/*talent scouting* yang memiliki prestasi unggul berdasarkan rekomendasi pejabat yang berwenang. Dalam pengembangannya, BRI juga telah memberikan program-program paling sesuai kepada insan BRILiaN demi mengembangkan diri pekerja sekaligus pengembangan bisnis BRI, baik *leadership program*, kompetensi spesifik, pendidikan lebih lanjut, hingga kepemimpinan tingkat global. Pada akhir masa kerja, Insan BRILiaN juga dipersiapkan dengan diberikan pelatihan persiapan Pensiun.

Pada tahun 2021, BRI berhasil melakukan *New Way of Learning* dimana Insan Brilian dapat melakukan pengembangan diri secara *flexible* secara *online* maupun *offline* sehingga total pencapaian target Pengembangan insan BRILiaN berhasil melampaui target yakni sebesar 127,09%.

Dalam upaya memperkuat BRI Group, Direktorat human capital membuat program *Integrated Talent Management Framework for Subsidiaries* yang berfungsi sebagai *strategic enabler* dalam meningkatkan sinergi BRI Group serta meningkatkan pemerataan kompetensi Pekerja BRI Group.

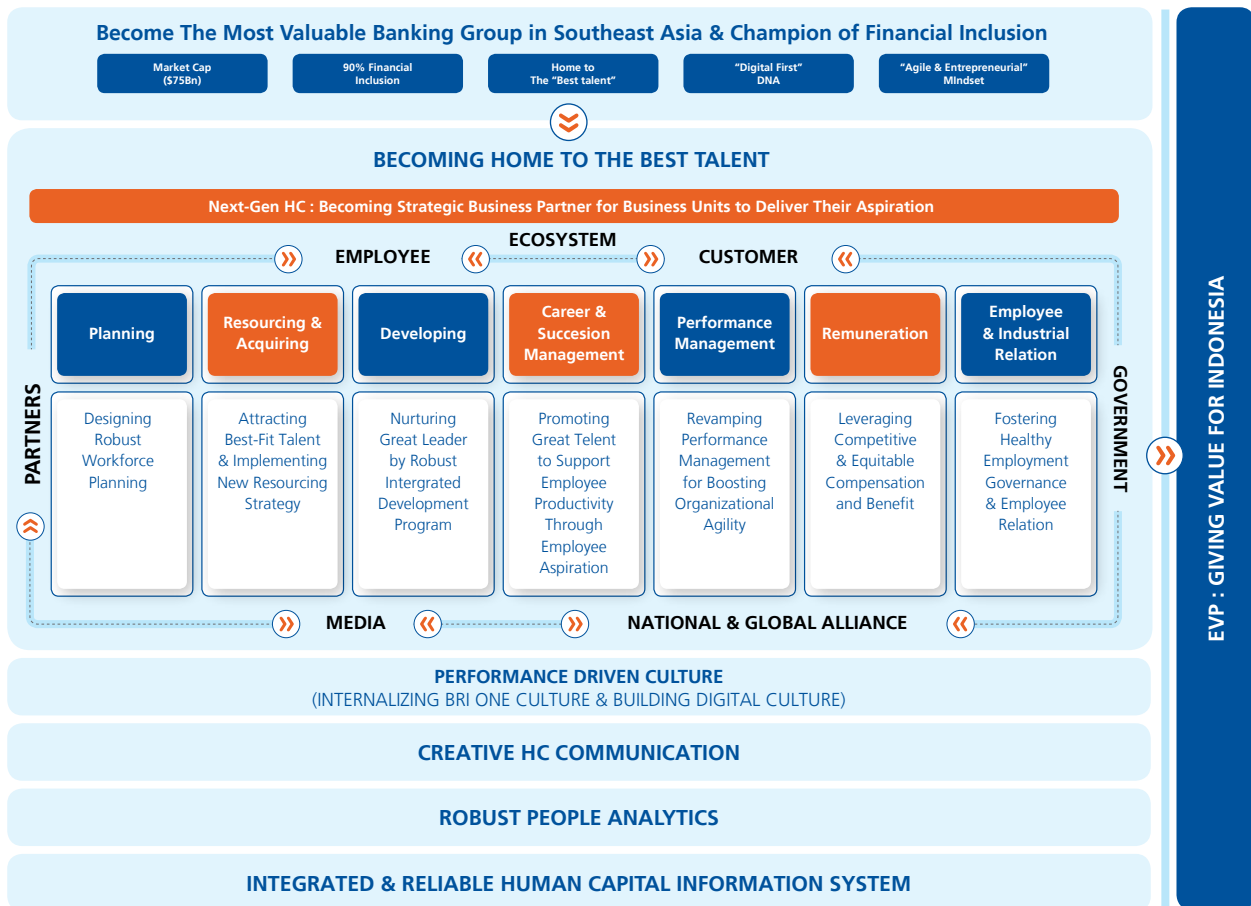
Dalam rencana pengembangan HC selanjutnya, sejalan dengan inisiatif perusahaan yang dituangkan dalam BRIVolution 2.0 akan difokuskan untuk mengubah peran HC yang semula merupakan proses administrator yang efisien menjadi HC yang lebih *advance/ Next Gen HC: Becoming Strategic Business Partner for Business Units to Deliver Their Aspiration*. Untuk mencapai hal tersebut, HC BRI berencana menyusun kembali strategy serta organisasi *Human Capital* menjadi "*true strategic business partner*", penguatan data dan *analytics* dalam *people analytics*, penguatan *talent management* di BRI Group pada beberapa area seperti *Employee Value Proposition*, rekrutmen dan *onboarding*, *succession planning* dan *subsidiary talent management*, penyempurnaan mekanisme evaluasi kinerja, Penguatan HC *Development*, dan Penguatan *Culture Transformation* untuk mendukung BRIVolution 2.0. Selaras dengan hal tersebut serta sebagai landasan pengelolaan Human Capital, HC BRI telah menyusun *Arsitektur/Framework Human Capital* yang diturunkan ke dalam 7 (tujuh) fokus utama pengelolaan HC yaitu mulai dari *HC Planning, Resourcing & Acquiring, Developing, Career & Succession Management, Performance Management, Remuneration, Employee & Industrial Relation*.

Sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan *performance driven culture* di bidang *performance management*, Human Capital BRI akan terus mengembangkan BRI *Continuous Performance Management (BRICORE)* sebagai suatu alat *monitoring* untuk menyelaraskan sasaran unit kerja dan target individu pekerja serta memfasilitasi diskusi yang objektif, terbuka dan fokus pada pengembangan ke depan melalui salah satu fitur didalamnya yang dinamakan *Courageous Performance Dialogue*. Untuk mendukung hal tersebut HC BRI akan mengimplementasikan sebuah inisiatif KPI yang *agile* yang dinamakan KPI Merdeka, yang terdiri dari *Fully Centralized* (Konten dan bobot KPI ditentukan oleh Kantor Pusat), *Semi-Autonomous* (Konten KPI oleh Kantor Pusat dan Bobot KPI diatur oleh *Regional Office* dengan *range* tertentu) dan *Fully Autonomous* (Kantor Pusat menetapkan *Glossary* Konten KPI yang dapat dipilih oleh *Regional Office & Bobot KPI* ditentukan sendiri oleh *Regional Office*).

Sejalan dengan transformasi *digital* dalam bidang *Human Capital*, pada Tahun 2022 Direktorat Human Capital akan meningkatkan fokus digitalisasi melalui penguatan *performance management system* melalui Pengembangan Aplikasi MyCore, *share service* layanan *Human Capital Digital Office* BRI dengan BRI Group melalui pengembangan Aplikasi BRISTARS untuk BRI Group serta peningkatan *employee experience* melalui *enhancement* Aplikasi Basic dan Brilliance.

Strategi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mewujudkan aspirasi BRI menjadi *the Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion*, BRI telah menyusun strategi pengelolaan *Human Capital* (HC) yang menjadikan HC sebagai *Strategic Business Partner* serta mewujudkan BRI sebagai *Home to the best talent*. Guna mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2021 BRI telah mewujudkan berbagai inisiatif sebagai bagian dari *Setup role of HC as Strategic Business partner* dan pada tahun 2022 pengelolaan HC akan difokuskan pada *Develop robust capability building to embrace future competency demand*. Fokus strategi HC tersebut selaras pula dengan inisiatif-inisiatif dalam BRIVOLUTION 2.0. *Framework*/arsitektur pengelolaan HC di BRI dijabarkan dalam gambar berikut:



Pengembangan Organisasi

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan kondisi eksternal yang sangat cepat, antara lain perubahan pola perilaku dan kebutuhan nasabah, perkembangan teknologi serta peningkatan persaingan bisnis yang tidak hanya persaingan di industri perbankan tetapi sudah meningkat menjadi persaingan lintas industri, diperlukan inisiatif transformasi Perseroan dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi internal. Perubahan dan tantangan tersebut telah direspon Perseroan melalui transformasi Brivolution 2.0. Untuk dapat mengimplementasikan transformasi tersebut, diperlukan perubahan dan penyesuaian dari sisi Organisasi sebagai kendaraan untuk melaksanakan transformasi melalui pembentukan Unit Kerja baru maupun re-Organisasi Unit Kerja yang sudah ada di Kantor Pusat.

Disamping itu, Perseroan juga melakukan perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan Organisasi selama tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian dan perubahan model Organisasi di Kantor Pusat dengan melakukan *restructuring* level jabatan di Kantor Pusat melalui pembentukan *Department* serta menerapkan konsep *agile Organization* menggunakan model *team based* melalui pembentukan Tim di bawah *Department*. Dengan penyesuaian dan perubahan tersebut, maka hierarki dan birokrasi dalam Organisasi menjadi lebih sederhana. Organisasi menjadi lebih flat dan lebih agile sehingga proses bisnis dan proses pengambilan keputusan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih efektif.

2. Penyesuaian dan perubahan model Organisasi di Regional Office sebagai berikut:
 - Perubahan nama jabatan Pemimpin Wilayah menjadi Regional CEO yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis dan operasional secara end to end di masing-masing Regional Office.
 - Pembagian peran di bawah Regional CEO pada level Regional Head sesuai dengan segmen bisnis dan fungsinya untuk memperjelas accountability dan responsibility serta jalur koordinasi dan komunikasi dengan Kantor Pusat.
 - Pembentukan Department dan Team di bawah Regional Head sebagai representasi fungsi strategic execution dari Unit Kerja yang di Kantor Pusat.
3. Penyesuaian dan perubahan model Organisasi di Kantor Cabang sebagai berikut:
 - Pembagian peran di bawah Pemimpin Cabang di level Manager sesuai dengan segmen bisnis dan fungsinya untuk memperjelas accountability dan responsibility serta jalur koordinasi dan komunikasi dengan Regional Office.
 - Simplifikasi melalui penggabungan jabatan-jabatan yang mempunyai karakteristik yang hampir sama untuk fleksibilitas mengantisipasi peningkatan kebutuhan formasi melalui optimalisasi sumber daya yang ada.

Manajemen Sumber Daya Manusia

Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Para pekerja BRI yang dipanggil “**Insan BRILiaN**” didapatkan dari seleksi yang ketat sehingga dihasilkan kandidat terbaik. Untuk mendapatkan kandidat terbaik dan mengembangkan talenta Insan BRILiaN, secara khusus BRI membentuk **BRILiaN Development Centre** dalam mengawal penyiapan sistem dan digitalisasi proses bagi Insan BRILiaN. Pembentukan **BRILiaN Development Centre** diciptakan agar dapat mempercepat perkembangan Insan BRILiaN secara maksimal & optima serta menjadi *Great Talent & Great Leader* BRI secara berkesinambungan.

BRILiaN Development Centre memiliki strategi tersendiri dalam meningkatkan *Talent Attraction*, yaitu **Multi Channel from Multi Sources**.

A. **Multi Channel**

Multi Channel adalah gerbang masuk calon Insan BRILiaN untuk bergabung dengan BRI. Ada beberapa-program yang ditawarkan oleh BRI kepada putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung yaitu:

1. **BRILiaN Future Leader Program (BFLP)**

Program perekrutan sekaligus pendidikan untuk menjaring kandidat-kandidat potensial sumber **eksternal** serta memberikan Pendidikan sebagai bekal untuk menjadi pemimpin-pemimpin BRI Group di masa depan. Tahun 2021 BRI berhasil mendapatkan talenta terbaik dari program BFLP General sebanyak 132 dan sebanyak 89 pekerja dari BFLP IT.

2. **BRILiaN Next Leader Program (BNLP)**

Program perekrutan sekaligus pendidikan untuk menjaring kandidat-kandidat potensial sumber **internal** serta memberikan Pendidikan sebagai bekal untuk menjadi pemimpin-pemimpin BRI di masa depan. Sepanjang tahun 2021, BRI berhasil menyaring 47 kandidat potensial untuk mengikuti program BNLP.

3. **BRILiaN Banking Officer Program (BBOP)**

Program perekrutan sekaligus Pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru di level *Corporate Title Assistant* agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI. Sepanjang tahun 2021 sebanyak 2.935 pekerja dinyatakan layak untuk mengikuti program pengembangan ini.

Pendaftaran program-program BRI sudah terintegrasi pada <https://e-recruitment.bri.co.id/>.

B. **Multi Sources**

Multi Sources adalah strategi BRI untuk meningkatkan *Talent Attraction*. Dengan meningkatkan *Talent Attraction* maka kemungkinan mendapatkan kandidat terbaik pada saat seleksi *Multi Channel* menjadi lebih besar. Beberapa *Multi Sources* yang sudah dirumuskan oleh BRI adalah:

1. **BRILiaN Scholarship Program (BSP)**

Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 yang memiliki kriteria tertentu dalam rangka Rekrutmen Pekerja BRI. Pada tahun 2021 sebanyak 16 mahasiswa berhak atas program ini. Ke-16 Mahasiswa tersebut meliputi tiga orang mahasiswa **Universitas Gadjah Mada**, tiga **Institut Teknologi Bandung**, dua dari **Institut Teknologi Sepuluh Nopember**, dua dari **Universitas Diponegoro**, satu dari **Telkom University**, satu **Bina Nusantara**, satu dari **Universitas Hasanuddin**, satu dari **Universitas Indonesia**, satu dari **Universitas Sebelas Maret**, satu dari **Universitas Gunadarma**, dan satu dari **Universitas Brawijaya**. Setelah lulus pendidikan, Penerima BSP secara otomatis langsung dapat mengikuti program Manajemen Trainee BRI, BFLP.



2. BRILiaN Creativity Contest Program (BCCP)

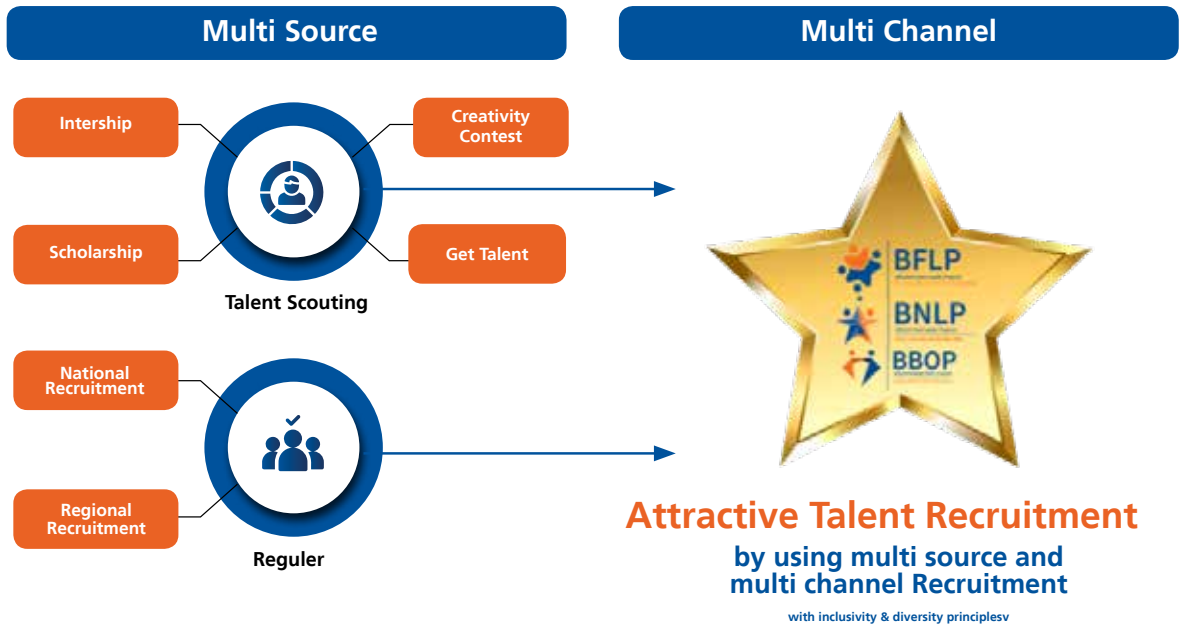
Program kompetisi bagi para peserta eksternal dan internal BRI menuangkan ide-ide inovasi *brilliant*, baik dalam bentuk kolaborasi tim maupun individu yang dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan bangsa Indonesia secara umum dan BRI pada khususnya. Tahun 2021 BRI mengadakan **BRILiaN Data Hackathon 2021** dengan tema “membangun Bangsa dengan literasi data”. Kegiatan ini yang sukses menjangkir 11.599 peserta terdaftar dan menjangkir 4 juta orang melalui kegiatan sosialisasi dan promosi yang dilakukan secara daring.



3. BRILiaN Get Talent Program (BGTP)

Program pencarian kandidat/*talent scouting* yang memiliki prestasi unggul berdasarkan rekomendasi pejabat yang berwenang. *Talent* yang dimaksud dapat berasal dari kemampuan olah raga, seni, atau memenangkan sebuah kompetisi.

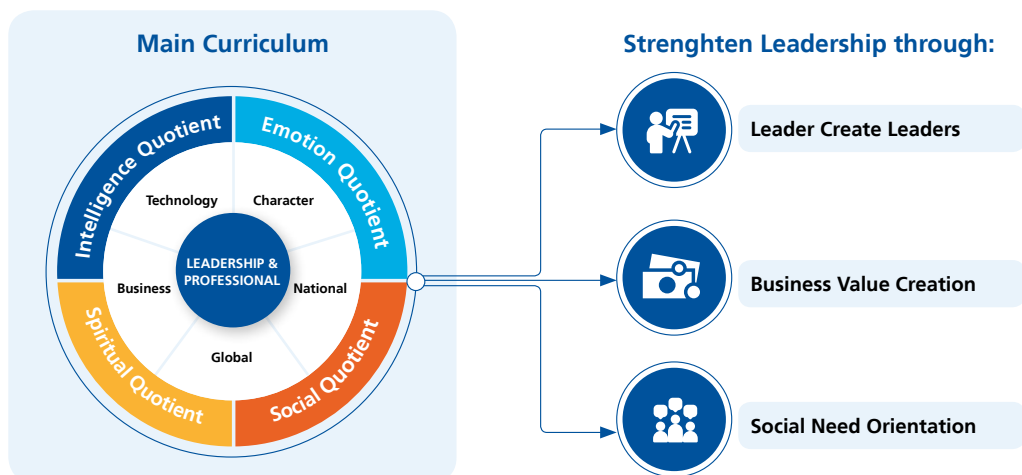
MULTI SOURCE & MULTI CHANNEL RECRUITMENT



Pengembangan Karir

Sejalan dengan konsep pengembangan tersebut, para Insan BRILiaN akan melalui serangkaian pendidikan untuk mengembangkan potensi diri menjadi seorang *Great Talent & Great Leader* sesuai dengan BRILiaN *Development Journey*, yaitu:

1. BRILiaN Banking Officer Program (BBOP)
Program Pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru di level Corporate Title Assistant agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.
2. BRILiaN Future Leader Program (BFLP)
Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru dari sumber eksternal di level Corporate Title Officer agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI Group.
3. BRILiaN Next Leader Program (BNLP)
Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja baru dari sumber internal di level Corporate Title Officer agar dapat menunjukkan performa maksimal sesuai dengan standar operasional dan nilai-nilai yang berlaku di BRI.
4. BRILiaN Leader Development Program (BLDP)
Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja menjadi *Great Leader* melalui pengembangan *leadership* yang berkelanjutan dan komprehensif yang memberikan penekanan pada penguatan karakter, wawasan kebangsaan, wawasan global, wawasan bisnis/perbankan, serta wawasan teknologi. Dalam pengembangannya, BLDP dibangun berdasarkan kurikulum yang komprehensif dan memperkuat kepemimpinan Insan BRILiaN dengan memfokuskan pada konsep, *Leader create leader*, *Business Value*, dan *Social Need Orientation*. Sepanjang tahun 2021, sudah ada 5.503 pekerja yang mengikuti program ini untuk dipersiapkan menjadi pemimpin BRI yang unggul dan siap mengemban amanah yang lebih besar.



5. BRILiaN Specialist Development Program (BSDP)
Program pendidikan pengembangan kompetensi teknis (*Technical Competency*) berkelanjutan dan komprehensif dengan memberikan penekanan pada pengetahuan dan keterampilan spesifik sesuai kebutuhan kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi spesialis di bidang tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
6. BRILiaN Global Development Program (BGLP)
Program pengembangan khusus untuk mempersiapkan para *Top Talent* yang tergabung dalam BRILiaN Society Member (BSM) Band 3 (Corporate Title setingkat Assistant Vice President/Senior Manager) dan Band 4 (Corporate Title setingkat Manajer) sebagai calon *Global Leader* yang memiliki kompetensi dan wawasan bisnis global. Untuk mencapai tujuan itu, salah satu agenda dalam program ini adalah dengan menghadirkan pembicara global yang profesional pada bidangnya. Program bergengsi ini diikuti oleh 17 pekerja pilihan sepanjang tahun 2021.
7. BRILiaN Society Elite Program (BSEP)
Program pengembangan khusus untuk mempersiapkan para *Top Talent* yang tergabung dalam BRILiaN Society Member (BSM) Band 2 (Corporate Title setingkat Vice President) dan Band 1 (Corporate Title setingkat Executive Vice President/Senior Vice President) dalam mempersiapkan diri untuk bertindak pada peran *Leader* yang lebih kompleks. Program ini bekerja sama dengan perusahaan global dalam menghadirkan narasumber berkualitas dunia. Pada tahun 2021, terdapat 10 (sepuluh) orang yang sudah mengikuti program ini.
8. BRILiaN Bright Scholarship Program (BBSP)
Program pendidikan bagi Pekerja Tetap BRI untuk menempuh Pendidikan ke S2 di Luar Negeri yang dibiayai oleh Perusahaan. BBSP menasar insan BRILian yang memiliki keinginan untuk terus belajar di Top 50 Universitas terbaik dunia. Sepanjang tahun 2021, ada 22 pekerja yang sudah diberangkatkan untuk mengembangkan kemampuan mereka.



Pelepasan keberangkatan penerima BBSP 2021, 15 Juni 2021

9. BRILiaN Leader Retirement Program (BLRP)
Program pendidikan untuk mempersiapkan Pekerja sebelum memasuki masa pensiun melalui pembekalan pengetahuan, wawasan, dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menjalani masa pensiun. Persiapan yang dilakukan sudah secara menyeluruh mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis. Sepanjang tahun 2021, sebanyak 483 pekerja mengikuti program ini.

Learning Program

Distance Learning		
No	Materi	Durasi
1	Hak dan Kewajiban	4 Sesi
2	Retired Not Expired	2 Sesi
3	Profil Bisnis	2 Sesi
4	Gaya Hidup	2 Sesi
5	Financial Health Check Up	3 Sesi
6	Hukum Waris dan Wasiat	2 Sesi
7	Pengenalan Syariah	8 Sesi
8	Business Model Canvas	2 Sesi
9	Sharing Session	2 Sesi
10	Dana Pensiun	3 Sesi



**Total
Distance Learning: 30 sesi (4 Hari Kerja)**

In Class Learning		
No	Materi	Durasi
11	Character Building	1 Sesi
12	Field Trip	8 Sesi
13	Aspek Psikologi	2 Sesi
14	Inspirasi Hobby	2 Sesi



**Total
In Class Learning: 13 sesi (2 Hari Kerja)**

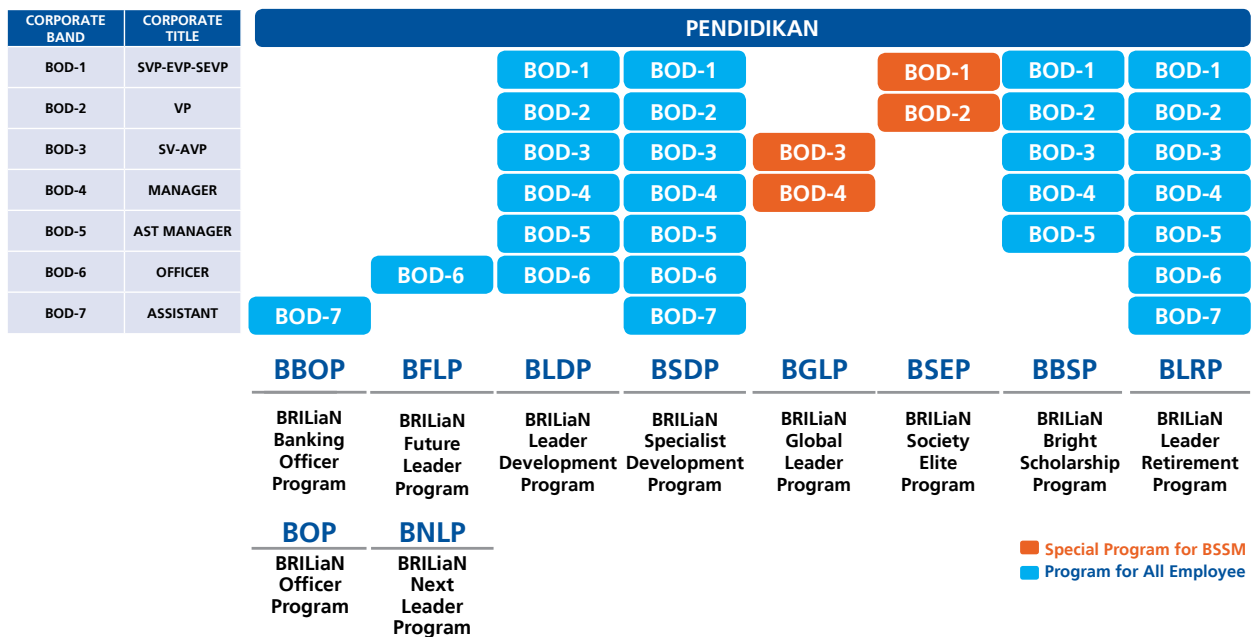
In Class

Akan dilaksanakan setelah Pandemi Berakhir

Brilian Development Journey

BRI sudah memilih putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi Insan BRILiaN sejak awal masa berkarir. Dalam pengembangannya pula, BRI memberikan program-program paling sesuai kepada insan BRILiaN demi mengembangkan diri pekerja sekaligus pengembangan bisnis BRI, baik pelatihan kepemimpinan, kompetensi spesifik, pendidikan lebih lanjut, hingga kepemimpinan tingkat global. Pada akhir masa kerja, Insan BRILiaN juga dipersiapkan dengan diberikan pelatihan persiapan pensiun yang melibatkan konsultan ahli pada bidangnya.

BRILIAN DEVELOPMENT JOURNEY



...Building and nurturing leadership is a critical issues in transformation. Great leadership will have a positive impact across organization...

Pengembangan Kompetensi

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan bisnis, BRI juga membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang menyelenggarakan pendidikan terkait keprofesian pekerja. Komitmen BRI dalam mengembangkan kompetensi pekerja dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi pekerjanya dimulai dari keberhasilan BRI dalam mendapatkan lisensi sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi tersebut tertuang pada SK lisensi BNSP No. KEP.0352/BNSP/II/2020.



Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2021, BRI telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dengan realisasi jumlah peserta pendidikan sebanyak 3.521.406 peserta dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Pendidikan	2021	2020	2019
1.	Development	5.754	8.018	13.350
2.	Enhancement	104.965	160.571	115.961
3.	E - Learning	3.285.407	5.003.522	3.802.672
4.	FPK/FGD	90.491	68.087	122.889
5.	Sosialisasi	34.789	33.916	112.096
	Total	3.521.406	5.274.114	4.166.964

Catatan:

Untuk program Pendidikan *Enhancement* termasuk pendidikan sertifikasi, *public course* dan *e-Learning*. Sedangkan untuk Pendidikan *development* termasuk Pendidikan master degree/S2.

Biaya Pengembangan *Human Capital*

Biaya pendidikan dan pengembangan *human capital* BRI di tahun 2021 tercatat sebesar Rp309 miliar, dengan biaya per pekerja sebesar Rp87.878 per peserta melalui implementasi teknologi (*e-learning*). Berikut rincian biaya pendidikan *Human Capital* BRI tahun 2021:

(dalam Jutaan Rupiah)

Program	2021
Development	97.130
Enhancement	150.848
Total Development dan Enhancement	247.978
FGD	23.609
Sosialisasi	1.559
E-Learning	-
Support	36.309
Total FGD, Sosialisasi, E-Learning, dan Support	61.477
Total Biaya	309.455

Pada tahun 2020 sudah terdapat 22 skema sertifikasi yang dimiliki oleh LSP. Kemudian, pada tahun 2021 11 skema tambahan sudah dalam proses pengajuan dan BRI berkomitmen terus menambah skema sertifikasi untuk mengembangkan kompetensi pekerjaannya. LSP BRI dengan aktif menciptakan pekerja yang memiliki sertifikasi profesi. Sepanjang tahun 2021 BRI juga sudah berhasil memberikan sertifikasi profesi kepada 2.032 pekerja.

General Banking	<i>General Banking 1</i>	637
	<i>General Banking 2</i>	3
	<i>General Banking 3</i>	6
Funding	<i>Funding Sales Representative</i>	61
Landing	<i>Credit Officer</i>	834
	<i>Senior Credit Officer</i>	46
Compliance & AML	<i>Compliance & AML Officer</i>	310
	<i>Auditor</i>	80
Audit	<i>Auditor Supervisor</i>	34
	<i>Auditor Manager</i>	3
	<i>IT Network Engineer</i>	3
IT	<i>IT Lead Project Manager</i>	2
	<i>IT Quality Assurance</i>	4
	Lecturer & Learning Designer	<i>Lecturer</i>
Total		2.032

Penilaian Kinerja

Untuk menghadapi persaingan dan kondisi bisnis yang kian *challenging*, Perseroan berupaya mewujudkan *performance driven culture* untuk memastikan bahwa produktivitas Pekerja terjaga dan dapat dijadikan sebagai salah satu landasan untuk mewujudkan strategi jangka pendek maupun jangka panjang yang dimiliki Perusahaan. Untuk menjawab hal tersebut, Perseroan telah mengembangkan sistem penilaian kinerja yang telah dimiliki menjadi BRI *Continuous Performance Mangement* atau yang lebih dikenal dengan BRICORE. BRICORE merupakan sistem pengelolaan kinerja yang salah satunya mencakup pengelolaan kinerja individu (*individual performance management*) yang merupakan pengembangan dari Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang selama ini digunakan Perseroan. Dalam implementasinya, BRICORE akan mampu menyesuaikan diri dengan prinsip *adaptive goals management*, dapat digunakan untuk organisasi yang lebih *fluid*, serta penekanan *Courageous Performance Dialogue* (CPD) yang merupakan metode pengelolaan kinerja yang berkelanjutan.



Dengan adanya BRICORE, Perusahaan telah melakukan penajaman khususnya pada aspek pengelolaan kinerja individu. Saat ini, dimensi pengukuran dalam BRICORE dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1. Performance Objective**, merupakan sasaran kinerja dalam *individual performance management* yang merupakan refleksi dari dari "APA" yang akan dicapai selama periode kinerja dan merupakan hasil aktual kontribusi dari masing-masing Pekerja. Pengukuran yang digunakan untuk dimensi tersebut adalah berupa *key performance indicator* (KPI), *Goals*, dan *Tasks*.
- 2. Behaviour Objective**, sasaran kinerja dalam *individual performance management* yang merupakan refleksi dari

"Bagaimana" cara mencapai *performance objective* sehingga menggambarkan perilaku Pekerja yang diyakini dapat mendukung pencapaian *performance objective*. Pengukuran yang digunakan untuk dimensi ini adalah penilaian BRILIAN Ways yang yang merupakan perilaku utama Pekerja untuk mendukung pencapaian kinerja terbaik (*performance driven behaviour*). BRILIAN Ways juga merupakan panduan perilaku bagi Pekerja yang selaras dengan *core value* AKHLAK.

Selain itu, dalam BRICORE juga terdapat penajaman pada sisi *managing* dalam siklus pengelolaan kinerja yaitu dengan adanya *Courageous Performance Dialogue* (CPD). CPD merupakan metode dalam pengelolaan kinerja yang berkelanjutan dimana terdapat komunikasi dua arah antara Pekerja dan Penilai untuk meningkatkan pengembangan kinerja secara efektif dan efisien. Dengan adanya CPD diharapkan tercipta Pekerja yang lebih produktif dan mengoptimalkan peran Leader dalam membimbing Pekerja dalam menyampaikan target kinerja yang ditetapkan.

Untuk menciptakan pengelolaan kinerja individu yang lebih objektif, Perusahaan juga telah melaksanakan *midyear check out* bagi Pekerja tertentu, penilaian kinerja dengan mempertimbangan *challenges factor* dan orientasi *leader* yang merupakan rangkaian dalam evaluasi kinerja masing-masing Pekerja.

Remunerasi

Struktur remunerasi Pekerja didasarkan beberapa faktor seperti penilaian kinerja, kompetensi, dan tingkat biaya hidup di masing-masing geografis Unit Kerja. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan sistem remunerasi yang adil, kompetitif, dan sesuai kebutuhan serta kemampuan Perseroan.

Salah satu kunci untuk memenangkan persaingan dalam menarik, mempertahankan, dan memotivasi Pekerja terbaik (*talent war*) di Perseroan adalah melalui sistem pengelolaan remunerasi yang baik. Pengelolaan sistem remunerasi di BRI dilaksanakan dengan asas adil secara internal, kompetitif secara eksternal, sejalan dengan strategi Perseroan dan kepatuhan terhadap regulasi. Remunerasi di BRI tidak membedakan gender (pekerja laki-laki maupun wanita), tidak membedakan ras, agama, dan suku yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi NOKEP. S.208 - DIR/SDM/08/2011 tentang Peraturan Pengupahan Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penerapan strategi remunerasi di BRI dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kemampuan Perseroan.

Secara umum, implementasi sistem remunerasi BRI meliputi pemberian upah, penyesuaian besaran upah setiap tahun, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK), tunjangan cuti tahunan, dan tunjangan cuti besar yang diberikan untuk setiap periode masa kerja 6 (enam) tahunan.

BRI juga memberikan Insentif Jangka Pendek khusus bagi Tenaga pemasar secara Triwulan secara otomatis melalui sistem. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi Tenaga Pemasar khususnya untuk mencapai dan melebihi target. Selain itu, BRI juga memberikan bonus kepada Pekerja sebagai bentuk penghargaan kepada Pekerja serta meningkatkan motivasi Pekerja untuk berkinerja lebih baik di masa yang akan datang. Bonus Tahun 2021 diterapkan dengan menggunakan Konsep *Bonus Pool*, yang bertujuan untuk mendorong penerapan nilai-nilai sebagai berikut:

1. *Alignment* Kinerja Individu dan Unit Kerja
Konsep *Bonus Pool* akan menjaga pemberian bonus sejalan dengan pencapaian individu dan juga dengan pencapaian kinerja unit kerja.

2. Penanaman Nilai Kolaborasi
Konsep *Bonus Pool* diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai kolaborasi antar individu dalam suatu Unit Kerja, mengingat pencapaian kinerja Unit Kerja akan berdampak langsung terhadap bonus individu di Unit kerja tersebut.

Perseroan juga menyediakan fasilitas kesehatan bagi Pekerja dan anggota keluarganya, yang meliputi jaminan rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, persalinan, rawat gigi, general medical check up, tunjangan penggantian kacamata serta program kesehatan pensiunan yang dapat digunakan saat purna tugas.

BRI juga memberikan kompensasi yang bersifat *fixed* (tidak berkaitan dengan kinerja) dan *variable* (berkaitan dengan kinerja) kepada Pekerja di antaranya tunjangan premium yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tunjangan jabatan khusus, kompensasi lembur, bonus pencapaian kinerja, insentif jangka pendek serta program *long term incentive* dalam bentuk kepemilikan saham BRI oleh Pekerja. Sedangkan untuk menunjang kedinasan, BRI memberikan fasilitas kedinasan meliputi bantuan sewa rumah, rumah dinas, dan kendaraan dinas sewa serta Program Kepemilikan Kendaraan.

Jenis Kompensasi dan Benefit

Kompensasi dan *benefit* bagi Pekerja BRI, yaitu:

1. Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan
2. Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja
3. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam bekerja, BRI memberikan fasilitas berupa *benefit* kepada Pekerja. *Benefit* ini diterima selama masa kerja seperti program pemeliharaan Kesehatan maupun yang diterima setelah berakhirnya hubungan kerja seperti program pensiun, serta fasilitas lain yang lazim diberikan oleh Perusahaan sejenis di industri perbankan.
4. Untuk meningkatkan *engagement* pekerja dan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap Perusahaan dan untuk memberikan motivasi/ insentif jangka panjang agar mencapai target-target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan, BRI pada tahun 2020 telah memiliki Program Kepemilikan Saham bagi Pekerja BRI yang dikemas dalam 2 (dua) program, yaitu:
 - a. *Employee Stock Allocation* (ESA)
Program kepemilikan saham dalam bentuk *Stock Allocation* Program ini diberikan melalui 4 tahap kepada seluruh level Pekerja yang memenuhi kriteria yang terdiri dari masa kerja, kinerja individu, dan *track record* pekerja dalam menjalani tanggung jawabnya.
 - b. *Employee Stock Option Plan* (ESOP)
Program kepemilikan saham dalam bentuk opsi pembelian saham dengan harga khusus. Program ini diberikan kepada para Pekerja Level tertentu yang termasuk *Top Talent* BRI dan memenuhi kriteria *performance* maupun *Capacity/Potential*.

Kenaikan Kompensasi

Sesuai strategi remunerasi Perseroan untuk mendorong *performance driven culture*, Perseroan memberikan *cash compensation* kepada Pekerja yang ditentukan berdasarkan kinerja. Dengan demikian, kompensasi yang diterima oleh Pekerja akan berbanding lurus dengan kontribusi yang diberikan Pekerja kepada Perusahaan. Pada tahun 2021, BRI telah memberikan kenaikan upah kepada Pekerja yang ditentukan dengan metode *merit increase*. Selain itu, Perusahaan juga memberikan insentif dan bonus kepada Pekerja untuk mendorong motivasi Pekerja dalam mencapai dan melampaui target yang ditetapkan Perusahaan di tengah kondisi pandemi COVID-19 dan situasi perekonomian global maupun nasional yang menantang.

Pensiun

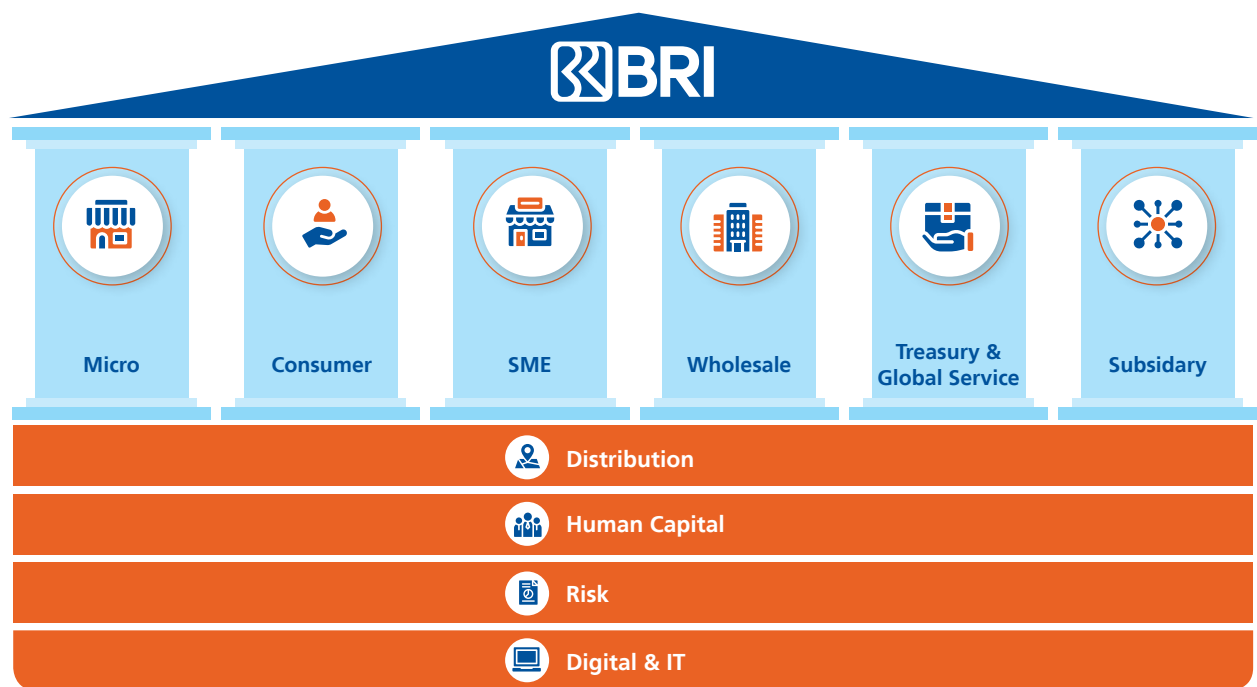
Untuk meningkatkan kenyamanan bagi Pekerja selama masih aktif bekerja, BRI menyiapkan program pemberian *benefit* setelah berakhirnya hubungan kerja atau masa pensiun. Beberapa program yang dilaksanakan mencakup:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
3. Program Tunjangan Hari Tua (THT)
4. Program Jaminan Hari Tua (BPJS Ketenagakerjaan)
5. Program Jaminan Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan)
6. Program Pemeliharaan Kesehatan Pensiunan (Prospens)
7. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (BPJS Kesehatan)

Dalam masa persiapan pensiun, Pekerja berhak mendapatkan pendidikan kewirausahaan dari Perusahaan sebagai bekal untuk memasuki masa pensiun. Selama pensiun Pekerja masih terlindungi oleh program pemeliharaan kesehatan Prospens dan BPJS Kesehatan.

Internalisasi Budaya

Transformasi BRI memiliki 2 (dua) fokus utama transformasi yaitu *Digital* dan *Culture* (Budaya Perusahaan). BRI menempatkan Budaya Perusahaan sebagai salah satu pondasi tercapainya Visi dan Misi Perseroan.



Menyadari pentingnya untuk membentuk karakter dan perilaku pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan dinamis serta dalam rangka mendukung transformasi BRI yang sistematis, konsisten dan terukur maka sejak tahun 2020, BRI membentuk Divisi Culture Transformation di bawah Direktorat Human Capital.

Implementasi Akhlak

Dalam melaksanakan internalisasi dan eksternalisasi budaya kerja yang digunakan di lingkungan BRI Group adalah *Core Value* AKHLAK yakni merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Kata kunci dan pedoman perilaku disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri BUMN No: SE-7/MBU/07/2020 Tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai semangat kolaborasi di antara BRI Group, pada tahun 2020 dimulainya pengelolaan budaya perusahaan yang terintegrasi antara BRI Induk, Perusahaan Anak, dan Perusahaan Terafiliasi yang kemudian disebut dengan BRI One Culture.

BRI One Culture merupakan strategi BRI Group untuk melakukan internalisasi *culture* (budaya kerja) untuk keberhasilan mencapai visi BRI 2025. Perjalanan budaya kerja BRI dari masa ke masa selalu mengalami transformasi dan perubahan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sampai dengan awal tahun 2020, sejak diberlakukannya *Core Values* AKHLAK untuk seluruh BUMN, maka BRI melakukan *launching* BRI One Culture.

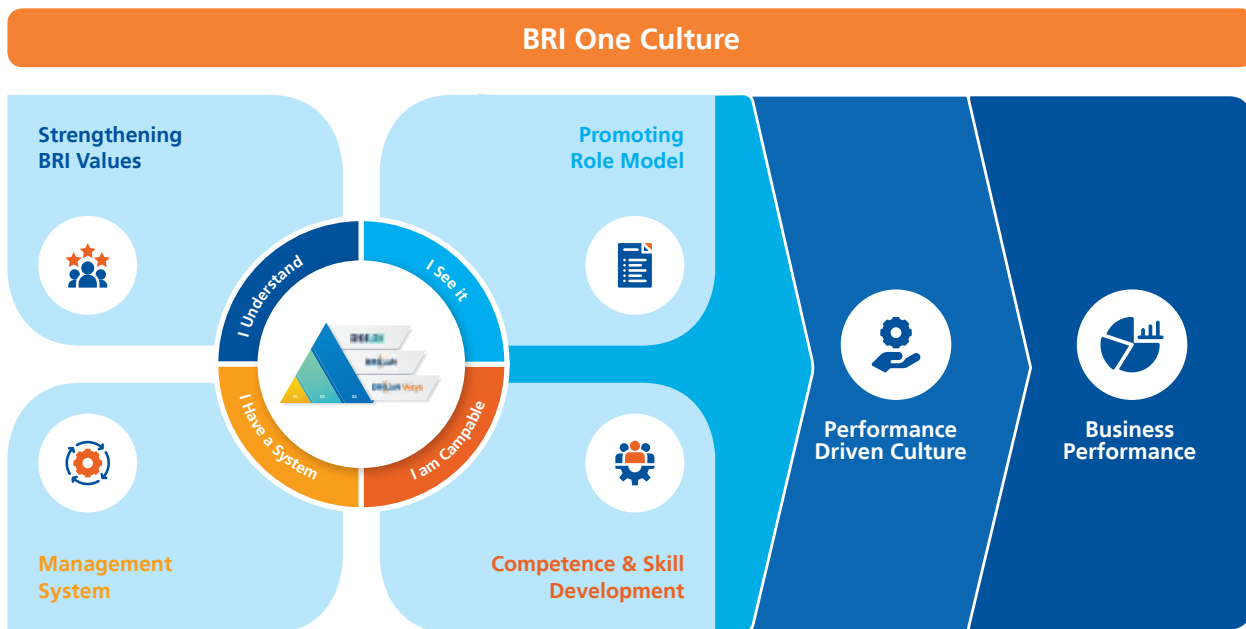
Implementasi Inisiatif dan Internalisasi Budaya Kerja

Sepanjang 2021, BRI telah melakukan beberapa inisiatif dan internalisasi budaya kerja melalui pengembangan yang sesuai dengan framework BRI One Culture. BRI One Culture bertujuan membentuk *performance driven culture* (budaya perusahaan berbasis kinerja) untuk mendorong produktivitas yang berdampak terhadap kinerja bisnis yang optimal. Syarat kesuksesan Implementasi BRI One Culture adalah setiap Insan BRILian paham dan mengerti (*I Understand*), meneladani/role model (*I see it*), selalu mengasah skill dan kompetensi (*I am capable*) dan perusahaan menyediakan sistem (*I have a system*) dan terus menyempurnakannya. Terdapat 4 (empat) pilar utama implementasi dan internalisasi BRI One Culture dalam menciptakan *Performance Driven Culture*, yang terdiri dari:

1. **Strengthening BRI Values** yakni setiap Insan BRILian mengerti dan memahami *core values* perusahaan dan perilaku-perilakunya. BRI fokus terhadap internalisasi dan penguatan nilai-nilai utama serta artefak budaya kerja. Dengan adanya

Internalisasi nilai-nilai utama diharapkan setiap Unit Kerja dipimpin oleh *leader* yang peduli terhadap aktivitas internalisasi nilai budaya kerja BRI, sehingga membentuk tindakan dan perilaku Pekerja yang sesuai dengan *Core Values* BRI.

2. **Promoting Role Model** dengan jumlah *Culture Agent* Koordinator mencapai 2.825 orang pekerja, *Culture Agent* sebanyak 8.315 pekerja dan dipimpin oleh seluruh pemimpin Unit Kerja sebagai *Culture Leader* BRI memberikan pelatihan dan diharapkan Pekerja tersebut mampu menjadi *role model* serta menjadi contoh dan teladan bagi seluruh Pekerja. BRI memastikan di setiap level pimpinan Unit Kerja mampu merancang dan menjalankan ide kreatif *culture activation program* di Unit Kerjanya masing-masing.
3. **Competence & Skill Development** merupakan pengembangan *skill* dan kompetensi Pekerja dan materi terkait internalisasi Budaya Kerja yang terintegrasi dalam setiap Program Pengembangan Pekerja (BFLP, BLDP, BGLP, dan lain-lain). BRI fokus terhadap upaya pengembangan kompetensi dan skill, untuk memastikan kompetensi pimpinan dan pekerja selaras dengan Budaya Kerja BRI (*Culture Fit*).
4. **Management System** yaitu perusahaan menyediakan *tools* dan sistem monitoring dalam hal pengelolaan Budaya Kerja agar lebih tersistematis. Fokus BRI adalah dalam upaya membangun *culture system management*, baik itu dalam sisi kebijakan, proses bisnis, sistem pengendalian, maupun sistem pengukuran kinerja. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat mendorong insan BRI ke arah perilaku yang sesuai dengan *Core Values* BRI.



Culture Activation Program

Dalam mengimplementasikan budaya berbasis kinerja (*Performance Driven Culture*) maka selama tahun 2021, seluruh Unit Kerja BRI, baik di level Divisi Kantor Pusat hingga ke Kantor Cabang telah merancang dan mengimplementasikan *Culture Activation Program* (CAP), berupa program inisiatif terkait Budaya Kerja yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja di masing-masing Unit Kerja. *Culture Activation Program* (CAP) diinisiasi dan dirancang oleh masing-masing Unit Kerja dan merupakan komitmen bersama di Unit Kerja. Di akhir periode penilaian kinerja, implementasi *Culture Activation Program* (CAP) menjadi salah satu penilaian kinerja Unit Kerja.



Tema Budaya Nasional

Culture Activation Program (CAP) dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas penerapan perilaku-perilaku BRILiaN Ways yang berdampak pada perbaikan iklim kerja dan mendorong pencapaian kinerja. Untuk menyelaraskan *Culture Activation Program* (CAP) di semua level Unit Kerja, manajemen BRI telah menetapkan Tema Budaya Nasional yang disebut “*We Care More*”. Tema Budaya Nasional merupakan payung penyusunan CAP di seluruh Unit Kerja yang akan mendorong/memperkuat perilaku-perilaku kunci BRILiaN Ways dan aspirasi BRIVolution 2.0. Tema Budaya Nasional “*We Care More*” terdiri atas 3 (tiga) tema utama yaitu *Efficiency*, *Execution* dan *Experience*.

BRI Excellence Awards

BRI Excellence Awards merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan BRI kepada pekerja dan Unit Kerja BRI yang secara konsisten memberikan kinerja terbaiknya dalam melaksanakan pekerjaan utamanya dan berperan aktif diluar pekerjaan utamanya dengan maksud agar pekerja dan Unit Kerja dapat meningkatkan produktivitas serta mendorong agar lebih berprestasi secara terus menerus dari tahun ke tahun. Di tahun 2021, terdapat penambahan kategori *Best Culture* untuk level Unit Kerja serta *Best Culture Agent* dan *Best Culture Leader* untuk level Pekerja.

BRI Excellence Award Kategori *Best Innovation* merupakan penyelenggaraan *Best Innovation* tahun ke-7 sepanjang sejarah penyelenggaraan *award*. Kategori ini merupakan sarana perusahaan untuk membangun budaya inovasi sekaligus menampung aspirasi atau ide kreatif dari seluruh pekerja dan unit kerja. Perusahaan memberikan penghargaan kepada individu yang memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan melalui ide inovasi. Proses pengumpulan ide inovasi dilakukan kapan saja, di mana saja sepanjang tahun berjalan. Penentuan pemenang dibagi ke dalam 2 (dua) *batch* yang kemudian disaring dalam beberapa tahap penjurian, antara lain Seleksi Unit Kerja, Seleksi Regional, Seleksi Nasional hingga Seleksi Final yang akan menentukan Ide Inovasi Terbaik Nasional. Pemenang penghargaan berkesempatan mewujudkan ide inovasinya dalam Program EMBRIO BRI sebagai wadah pengembangan dan perwujudan ide inovasi perusahaan.

The New Way of Working dan Penghargaan

Dalam mendukung *The New Way of Working* di BRI, perusahaan telah menyediakan fasilitas BRIWORK yang merupakan fasilitas kantor yang mendukung fleksibilitas kerja di kota-kota satelit sekitar Jakarta. Terdapat 3 (tiga) BRIWORK yang telah dibangun yaitu di area Serpong, Bintaro, dan Bekasi.

Selama tahun 2021, BRI mendapatkan beberapa penghargaan pada *Stellar Workplace Awards 2021* dalam kategori diantaranya *The Best Stellar Workplace in Innovative Engagement During Pandemic Category*, *The Best Stellar Workplace in Digital Transformation Readiness Category*, dan *Stellar Workplace Recognition in Employee*

Commitment & Satisfaction. Selain itu, BRI juga terpilih sebagai perusahaan dengan manajemen terbaik, khususnya di bidang HR atau SDM melalui penghargaan internasional bergengsi dari HR Asia Media sebagai salah satu tempat bekerja terbaik di Asia tahun 2021 atau *Best Companies to Work For in Asia 2021*.

Monitoring Implementasi Budaya Kerja

Implementasi Budaya Kerja BRI, dimonitor dan diukur secara periodik melalui:

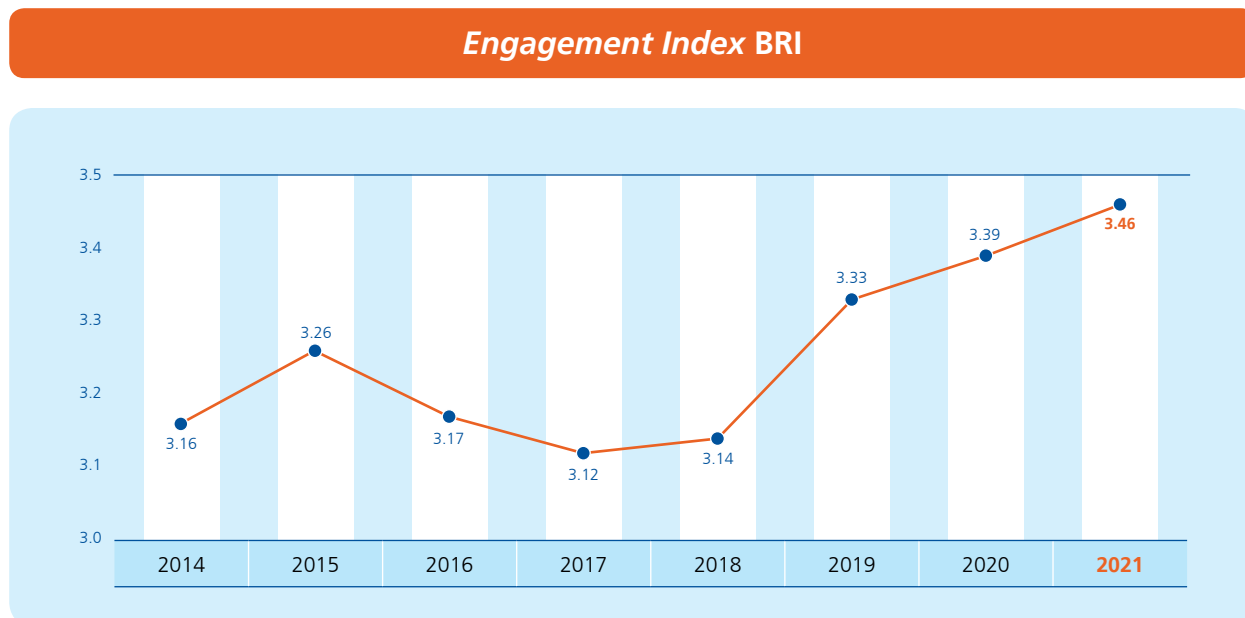
1. Nilai *Organizational Culture Health Index* (OCHI) yang merupakan pencerminan tingkat *toxic* yang diukur di setiap Unit Kerja. Hasil OCHI dipergunakan *Culture Leader* dan *Culture Agent* sebagai salah satu input penerapan *Culture Activation Program* Unit Kerja.
2. Nilai *BRI Employee Engagement Survey* (EES) yang merupakan hasil survei atau input dari seluruh Pekerja yang menggambarkan sikap, perilaku dan hubungan antara Pekerja dengan pekerjaan dan perusahaannya.
3. *Survey Employer Branding* yang merupakan hasil survei peringkat BRI dalam membangun reputasinya menjadi *top 5 employer of choice* dan merupakan salah satu ukuran tercapainya *enabler* BRIVolution 2.0 yaitu *Home to The Best Talent* dalam pencapaian aspirasi BRI.
4. Nilai INDI 4.0 (*Indonesia Industry 4.0 Readiness Index*) dan *Digital Maturity Assessment* yang merupakan pencerminan kesiapan industri BUMN dalam bertransformasi menuju industri 4.0 serta mengukur seberapa matang kapabilitas digital perusahaan.
5. BRICORE yang merupakan *individual performance management* dimana *behavior* (perilaku) menjadi salah satu komponen penilaian kinerja di BRI dengan berlandaskan 8 (delapan) perilaku BRILiaN Ways (*Performance Driven Behavior*).

Engagement Pegawai

BRI menyadari bahwa pekerja merupakan modal penting dalam mendukung tercapainya pertumbuhan kinerja perusahaan yang berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karena itu, BRI berkomitmen menjaga kondusifitas lingkungan kerja salah satunya dengan mengukur tingkat keterikatan pekerja terhadap perusahaan melalui *Employee Engagement Survey* (EES). Selain sebagai sarana pengukuran tingkat keterikatan pekerja, EES pun menjadi media untuk menjaring aspirasi perbaikan pengelolaan *human capital*.

Dalam mengukur keterikatan pekerja, BRI menganalisis respon pekerja pada dimensi *Say*, *Stay*, dan *Strive*. Adapun ketiga dimensi tersebut merupakan pertanyaan proksi yang menggambarkan sejauh mana kebanggaan pekerja menjadi bagian dari perusahaan, keinginan pekerja untuk tetap menjadi bagian dari perusahaan dalam kurun waktu tertentu, dan kegigihan pekerja untuk berjuang memberikan kemampuan terbaik bagi perusahaan. *Engagement Index* menunjukkan tingkat keterikatan dan komitmen pekerja kepada Bank BRI yang diukur melalui rata-rata penilaian pekerja (*average*) dari skala 1-4, Indeks ini dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat keterikatan dan komitmen pekerja kepada Perseroan.

Sejak tahun 2018, *Engagement Index* BRI mengalami peningkatan. Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2021 indeks keterikatan pekerja di BRI mengalami peningkatan, semula 3.39 dari skala 4 di tahun 2020 menjadi **3.46** dari skala 4 di tahun 2021 dengan persentase pekerja *engaged* sebesar 92%. Jumlah responden yang berpartisipasi pada EES 2021 adalah 50.075 orang responden. Berikut data perkembangan *Engagement Index* BRI dari tahun 2014 sampai dengan 2021:



Tahun 2021 merupakan tahun pertama bagi BRI mengikutsertakan Anak Perusahaan BRI sebagai bagian dari peserta BRI *Employee Engagement Survey* dengan hasil **3.46**.

Hubungan Industrial

Perseroan meyakini bahwa seluruh insan BRI adalah aset sekaligus tulang punggung Perseroan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya menciptakan suasana kerja yang terbuka dan positif. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Perusahaan adalah dengan cara menjaga kondusifitas hubungan industrial antara Pekerja dan Perseroan.

Pekerja diberikan wadah untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan kinerja. Adanya kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) juga sebagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan bagi Pekerja dengan Perseroan, sehingga tercipta kondusivitas hubungan anatara Pekerja dengan Perusahaan. Dalam menjalin hubungan dengan Pekerja, BRI senantiasa menjunjung prinsip dasar pengelolaan hubungan industrial yaitu:

Menjunjung Kebebasan Berserikat

Setiap Pekerja BRI diperkenankan untuk berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapatnya. Di lingkup Perusahaan, setiap Pekerja dapat secara mudah mendaftarkan diri dan bergabung dalam keanggotaan Serikat Pekerja. Saat ini 42.798 pekerja atau 70,2% pekerja tetap merupakan anggota Serikat Pekerja. Serikat Pekerja BRI adalah partner strategis Perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang berkualitas dan harmonis.

Beberapa hal yang dilakukan Perusahaan guna menjaga keharmonisan hubungan industrial antara Perusahaan dan Pekerja di antaranya diwujudkan dengan:

1. Pada tahun 2021 BRI bersama Serikat Pekerja BRI telah melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk periode 2021-2023 pada tanggal 7-9 Desember 2021.
2. Pelaksanaan Forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sebagai sarana mengomunikasikan kebijakan-kebijakan Perusahaan terbaru, sebagai sarana menampung segala aspirasi/usulan dari Pekerja, dan juga sebagai sarana koordinasi antara manajemen Perusahaan dengan Pekerja sehingga perselisihan atau permasalahan yang mungkin timbul di Unit Kerja dapat dideteksi lebih dini.
3. Pelaksanaan pertemuan berkala antara Pengurus Serikat Pekerja Nasional dengan Manajemen Tingkat Pusat.
4. *Support* kegiatan Serikat Pekerja antara lain: Rakernas, Rapimnas, Munas, Muswil, dan Muscab.
5. Pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan *level of engagement* Pekerja terhadap Perusahaan dan melakukan bentuk komunikasi lain seperti dalam kegiatan ibadah, sosial, olah raga, seni, dan kegiatan lain yang melibatkan Pekerja.

Menerapkan Keberagaman

Sebagai salah satu Bank BUMN terbesar dengan Unit Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, demografi insan BRI sangat beragam. BRI meyakini bahwa keberagaman yang ada merupakan nilai tambah yang dapat membantu Perusahaan untuk tetap menjadi yang terbaik. Saat ini BRI mempekerjakan pekerja dengan berbeda latar belakang, agama, suku, dan ras.

BRI juga menjunjung tinggi adanya keberagaman, asas kesetaraan dan menerapkan kebijakan anti diskriminasi di setiap fungsi pengelolaan *human capital*, baik dalam aspek pengembangan karir, remunerasi maupun aspek pengelolaan *human capital* lainnya. Salah satu wujud nyata penerapan keberagaman di BRI adalah dengan dibukanya kesempatan bagi Pekerja disabilitas (d disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan Pekerja). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat kerja Pekerja, memberikan keragaman pada perusahaan, meningkatkan kualitas layanan pelanggan dari kalangan penyandang disabilitas serta sekaligus meningkatkan produktivitas Pekerja untuk bekerja dalam keberagaman. Selama tahun 2020-2021, berikut adalah jumlah pegawai penyandang disabilitas yang bekerja di BRI:

Tabel Jumlah Pegawai Penyandang Disabilitas

Unit Kerja	2021		2020	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
Kantor Pusat	15	12	16	10
Kantor Wilayah	20	17	21	20
Total	66		67	

Monitoring Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin

Sebagai bagian dari upaya untuk penguatan *good corporate governance* (GCG), BRI memfasilitasi pelaporan pelanggaran disiplin oleh Pekerja melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS) yang langsung dimonitor oleh manajemen BRI. Selain itu terdapat Manajemen BRI senantiasa berkomitmen untuk menegakkan disiplin Pekerja di Perseroan sebagai usaha mempertahankan suasana dan etos kerja yang baik. Saat ini, melalui aplikasi Portal Hubungan Industrial, progress penyelesaian kasus pelanggaran disiplin di seluruh Unit Kerja BRI dapat dimonitor oleh manajemen di Kantor Pusat BRI.

Dalam rangka mitigasi pelanggaran disiplin, Human Capital menerbitkan ketentuan perihal *Know Your Employee* (KYE) yang diharapkan bisa menjadi *early warning* dalam rangka pencegahan dan pengendalian fraud.

Hak Asasi Manusia

BRI berkomitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia kepada seluruh pekerja maupun para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia kepada seluruh pekerja, BRI telah mengikuti seluruh ketentuan terkait ketenagakerjaan. Salah satu bentuk wadah dalam penerapan hak asasi manusia adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sekali yang bertujuan untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban dari Perusahaan, Serikat Pekerja dan Pekerja, mempertahankan dan meningkatkan

hubungan kerja yang harmonis antara Perusahaan, Serikat Pekerja dan Pekerja, menerapkan asas-asas hubungan industrial.

Health & Well-being

BRI senantiasa berkomitmen kepada pekerja demi terciptanya *work life balance*. Dalam mendukung adanya *worklife balance* Pekerja, sejak 25 April 2018 BRI membentuk BRILiaN Community yang merupakan kumpulan komunitas yang dibentuk oleh Pekerja. BRI yang memiliki minat ketertarikan terhadap suatu aktivitas ataupun kegiatan yang sama. Semua Pekerja diberikan akses yang sama terhadap komunitas melalui aplikasi BRILiaNApps. Saat ini BRI telah memiliki 24 komunitas yang dikelola oleh pengurus yang dipilih oleh para anggotanya, mencakup berbagai kegiatan dan aktivitas, antara lain:

1. BRI Bikers Community
2. BRICCO
3. Aerobic Club
4. BRI E-Sport Community
5. BRI Futsal Community
6. BRI Badminton Community
7. BRI Fotografer Community
8. BRI Basketball Community
9. BRIPALA
10. BRI Band Community
11. BRI Football Community
12. BRILiaN Voice
13. BRI Golf Community
14. BRI Runners Community
15. BRITAC
16. Persatuan Tenis Meja BRI
17. BRI Tennis Community
18. BRI Volleybal Community
19. BRI Dance Community
20. BRI Fishing Community
21. BRI Dive
22. BRI Martial Art Community
23. BRI Bowling Community
24. BRI Srikandi

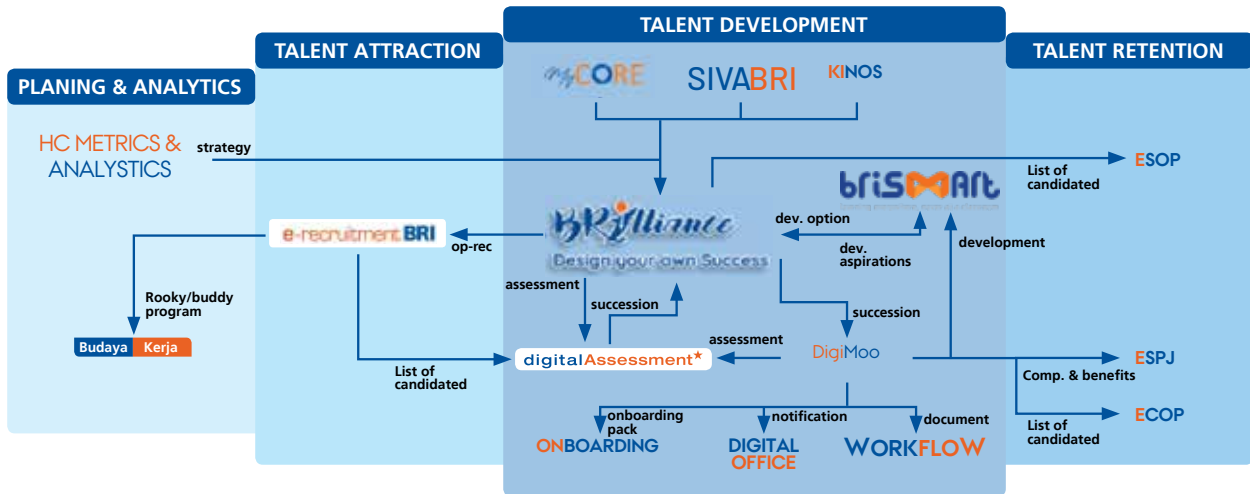
BRI mempunyai tempat yang dikhususkan untuk mengembangkan talenta pekerja, menyalurkan hobi pekerja, maupun untuk melakukan program-program *work life balance* yaitu BRILIAN CENTRE. Selain itu, BRI juga secara rutin mengadakan event-event dan seminar dalam mendukung *worklife balance* pekerja serta peningkatan *health and well-being* pekerja dengan mendatangkan pembicara-pembicara dari kalangan praktisi, motivator, psikolog, maupun *influencer* yang sudah dikenal luas. BRI juga memberikan wadah untuk melakukan konseling bagi para pekerja, yaitu kegiatan konsultasi/bantuan yang dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan pribadi pekerja yang berdampak kepada kinerja.

Dalam rangka meningkatkan *Health & Well-being* bagi pekerja, BRI mewajibkan *block leave* bagi pekerja yaitu kebijakan mengambil cuti selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dalam 1 (satu) tahun untuk penyegaran (*refreshing*) kepada Pekerja agar dapat meningkatkan produktifitas. BRI tidak hanya memberikan *maternity leave* kepada pekerja wanita sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, namun juga *paternity leave* pekerja laki-laki yang istrinya melahirkan dan jumlah hari yang diberikan lebih baik dibandingkan *paternity leave* yang dipersyaratkan Undang-Undang.

Untuk memberikan rasa tenang dan aman bagi pekerja wanita yang mempunyai anak balita, BRI juga memberikan fasilitas berupa *child care facilities* berupa Day Care di lingkungan kantor. Contohnya *Day Care* di lingkungan BRI Kantor Pusat yang diresmikan bulan Desember 2021.

Integration of Human Capital Information System

Dalam mewujudkan strategi *Human Capital* untuk menjadi *Strategic Business Partner* serta sebagai *Home to the best talent* yang selaras dengan inisiatif dalam BRIVOLUTION 2.0, maka pengelolaan *human capital* di BRI perlu didukung oleh suatu sistem dan teknologi. Hal ini bertujuan agar informasi dan layanan *human capital* dapat diakses oleh para pekerjanya setiap saat (*every time, every where, and every devices*). Untuk mewujudkan hal tersebut, BRI membangun *integrated & reliable human capital information system* yang digambarkan melalui arsitektur **BRISTARS Next Generation** sebagai berikut:



Strategi Perseroan dalam mengelola *human capital* seperti penetapan komposisi dan formasi pekerja diformulasikan dalam **Aplikasi HC Metrics & Analytics**. Formasi yang terbuka memberikan peluang karir baik bagi kandidat eksternal yang dapat diakses melalui **Aplikasi E-Recruitment BRI**, maupun bagi kandidat internal sebagai pengembangan karir pekerja.

Dalam mengembangkan karir Pekerja, **Aplikasi BRILLIANCE** yang merupakan *tools* untuk mengimplementasikan *talent management* BRI, memetakan pekerja berdasarkan kompetensi dan *performance*. Kompetensi pekerja diukur melalui **Aplikasi Digital Assessment** sementara *performance* pekerja diukur melalui **Aplikasi MyCore** (bagi pekerja tetap), **Aplikasi SIVABRI** (bagi pekerja kontrak) serta **Aplikasi Kinos** (bagi pekerja *Outsourcing*).

Untuk memastikan pengembangan karir sesuai dengan ekspektasi pekerja, maka **Aplikasi BRILLIANCE** menangkap aspirasi karir pekerja, selanjutnya aspirasi tersebut di-*assessment* terhadap kualifikasi jabatan tujuan. Bagi hasil *assessment* yang *unmatch*, dalam hal ini perlu adanya *development*, maka **Aplikasi BRILLIANCE** akan merekomendasikan pekerja untuk mengikuti program *development* yang ada pada **Aplikasi BRISMART**. Di lain hal, bagi hasil *assessment* yang *match*, maka pekerja termasuk ke dalam *talent* yang siap untuk mutasi (*rotasi* atau *promosi*).

Pengelolaan mutasi pekerja diputus oleh *talent comitee* secara *digital* melalui **Aplikasi BRILLIANCE**, selanjutnya administrasi terhadap mutasi yang telah diputus diselesaikan melalui **Aplikasi Digimoo**. Secara otomatis surat pemberitahuan mutasi akan

dikirimkan melalui **Aplikasi Digital Office** (aplikasi surat-menyurat BRI), surat keputusan mutasi secara otomatis terbit melalui **Aplikasi Workflow** (aplikasi arsip dokumen pekerja), hak pekerja berupa lumpsum pindah dan *benefit* lainnya secara otomatis terbayar kepada rekening pekerja melalui **Aplikasi E-SPJ** (aplikasi perjalanan dinas BRI), bagi jabatan tertentu yang mendapatkan *promosi* maka **Aplikasi E-COP** akan menyelesaikan administrasi atas *Car Ownership Program* yang diberikan oleh Perseroan. Bagi pekerja yang mengalami mutasi ke jabatan yang baru, **Aplikasi OnBoarding** akan menuntun pekerja untuk mengetahui hal-hal yang perlu dikuasai dan perlu dilakukan pada 3 bulan pertama di jabatan baru tersebut.

Pengelolaan *end-to-end human capital* secara *digital* tersebut diharapkan selain memberikan *benefit* bagi BRI berupa efisiensi, juga memberikan kenyamanan bagi Insan BRILiaN dalam bekerja. Insan BRILiaN tidak perlu memikirkan bagaimana hak dan karirnya untuk diperjuangkan, karna perusahaan akan memberikannya secara otomatis.

Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

BRI berkomitmen untuk menerapkan *Human Capital (HC) practices* kelas dunia (*becoming a world class human capital system & practices*) demi mewujudkan BRI sebagai *Home to the Best Talent*. Sebagai wujud komitmen tersebut, BRI senantiasa memperbaiki kerangka strategi atau arsitektur pengelolaan HC Perseroan



dengan ditopang oleh 3 (tiga) pilar, yakni pilar *People*, pilar *Culture*, dan pilar *Organization*. Dengan ketiga pilar ini diharapkan Perseroan dapat memenuhi hak-hak para pekerja BRI dan mereka memperoleh peluang dan kesempatan yang sama dalam pengelolaan dan pengembangan pekerja baik dari sisi peningkatan kompetensi, penilaian kinerja, pengembangan karir maupun pengupahan sehingga lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman dapat tercipta, dan seluruh pekerja termotivasi untuk memberikan kemampuan terbaiknya demi mencapai visi misi Perseroan.

Kebijakan dan Strategi Penerapan Kebijakan dasar yang diterapkan mencakup ketiga pilar (*people, culture, organization*) yang dikelola dalam kerangka ekosistem penting yang saling terkait dalam pengelolaan HC. Ekosistem tersebut yakni, *Employee, Customer, Government, National & Global Alliances, Media* serta *Partners*. Lebih jauh, pilar dan ekosistem tersebut ditopang pula oleh pondasi-pondasi yang menjadi pendukung suksesnya sebuah sistem dan *practices* HC, yakni *HC Communications, Certified HC Practitioners, HC Information System* dan *Healthy Industrial Relations*.

Sementara untuk memenuhi tanggung jawab terhadap aspek ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan menerapkannya sesuai dengan kesepakatan kerja Bersama yang telah ditandatangani antara Bank dengan perwakilan pekerja, dalam hal ini adalah Serikat Pekerja. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini ditinjau berkala dan memiliki masa berlaku 2 (Perseroan) tahun dengan maksimum perpanjangan selama 1 tahun.

Selain implementasi PKB, Perseroan menyusun dan memberlakukan kebijakan-kebijakan internal sebagai pelengkap dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, meliputi:

1. Pengembangan Karir;
2. Kompensasi dan *Benefit*;
3. Manajemen Kinerja; dan
4. Hubungan Industrial.

Kesempatan Pengembangan Diri

Perseroan memberi kesempatan setara kepada seluruh pekerja, baik pria maupun wanita untuk mengikuti program pengembangan dan pelatihan serta untuk diberi kesempatan berkarir mencapai jenjang jabatan yang semakin tinggi, sesuai dengan kompetensi dan hasil kinerjanya. BRI telah mengimplementasikan *Blended Learning*, yaitu metode pendidikan dengan perpaduan *in-class learning* secara tatap muka langsung dan *e-learning*.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Perseroan senantiasa berupaya menangani pengaduan dari para pekerja dengan sebaik-baiknya. Hal ini merupakan bentuk penegasan komitmen BRI dalam menjaga keharmonisan hubungan antara Manajemen dengan seluruh Pekerja. Penegasan komitmen Manajemen terhadap penanganan komplain Pekerja tersebut diwujudkan melalui kebijakan mengenai *Whistle Blowing System* (WBS). Selain melalui WBS, BRI pun memiliki saluran komunikasi *Call Center SDM* untuk penanganan komplain Pekerja di bidang

SDM. Melalui *Call Center SDM*, pekerja dapat menyampaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan terkait pekerjaan maupun permasalahan pribadi yang membawa dampak secara langsung terhadap pekerjaan. Kedua sarana dan fasilitas komunikasi tersebut menunjukkan komitmen kuat BRI dalam menjaga harmonisasi hubungan antara Perseroan dan pekerja.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu risiko operasional yang penting dikelola oleh perusahaan. BRI memiliki strategi dan upaya untuk selalu mengutamakan keselamatan jiwa pekerja serta *stakeholders* BRI baik dalam kondisi normal maupun bencana. Strategi tersebut tertuang di dalam beberapa ketentuan antara lain:

1. Kebijakan *Business Continuity Management*.
2. Panduan *Emergency Response Plan*.
3. Kebijakan Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja.

Upaya upaya yang telah dilakukan untuk menjaga keselamatan jiwa pekerja dan *stakeholders* BRI antara lain:

1. Internalisasi Budaya Tanggap Darurat pada pekerja.
2. Mengkomunikasikan prosedur tanggap darurat pada *stakeholders* yang berada di lingkungan BRI.
3. Menyediakan peralatan tanggap darurat.
4. Menyediakan perlengkapan medis di lingkungan tempat kerja.
5. Melakukan simulasi tanggap darurat secara berkala.
6. Melakukan identifikasi risiko bencana di lingkungan kerja BRI.

Struktur Pengelola Direktorat Human Capital

Produktivitas pekerja perlu didukung oleh pengelolaan *human capital* yang berstandar internasional. Untuk mendukung hal tersebut, BRI telah memiliki organisasi pengelolaan human capital yang terdiri dari Divisi Human Capital Strategy & Policy, Human Capital Development, Human Capital Business Partner, Culture Transformation dan BRI Corporate University.

Secara garis besar, Divisi Human Capital Strategy & Policy bertanggung jawab atas penyusunan strategi human capital, perencanaan human capital, *people analytics*, dan human capital research. Selain itu, Divisi Human Capital Strategy & Policy bertanggung jawab pula atas pengelolaan *reward, employee governance, dan individual performance management*, serta pengelolaan biaya tenaga kerja.

Sementara Divisi Human Capital Development berfokus pada *career and people development* serta *resourcing and assessment* di BRI. Disisi lain terdapat Divisi Human Capital Business Partner yang mengelola aktivitas HC sebagai partner bagi seluruh divisi lain di BRI dalam mendukung bisnis Perusahaan, *human capital information system, career and succession, industrial relation, dan reward operations*.

BRI juga memiliki Divisi Corporate University yang bertanggung jawab mengelola aktivitas pendidikan dan pelatihan dengan konsep corporate university, sementara untuk memastikan berjalannya proses culture transformation, BRI telah membentuk divisi khusus, yakni Divisi Culture Transformation yang bertanggung jawab mengelola *culture policy*, *culture activation*, *culture evaluation*, *human capital communication*, dan *employee engagement & experience*.

Program Strategis Human Capital 2021

Menjawab tantangan pertumbuhan bisnis ditengah pemulihan ekonomi pasca COVID-19, perkembangan teknologi yang cepat, serta perubahan preferensi dan perilaku nasabah, dibutuhkan langkah adaptif dari BRI termasuk dalam hal pengelolaan *human capital* (HC). Dalam hal ini, pengelolaan HC yang efektif tidak hanya berdampak pada produktivitas pekerja dan profitabilitas perusahaan, namun juga pada keberlanjutan bisnis BRI kedepan.

Oleh karena HC merupakan salah satu aset strategis BRI, maka dalam BRIVolution 2.0 sistem pengelolaan HC akan dibentuk dari semula yang saat ini HC merupakan proses administrator yang efisien menjadi yang lebih *advance/Next Gen HC: Becoming Strategic Business Partner for Business Units to Deliver Their Aspiration*. Peranan HC akan menjadi *Strategic Business Partner* seperti HC sebagai mitra strategis dalam bisnis terkait, pengembangan talent dan proses perencanaan suksesi diselenggarakan dengan baik dan dijalankan dengan benar, perekrutan menjadi *enabler* strategis dalam inisiatif *breakthrough Bank, Performance driven culture*, serta metode *learning* yang menarik dan berfokus pada pengembangan *skill* holistik Pekerja dan *leadership skill*.

Untuk menjadi *Next Gen HC: Becoming Strategic Business Partner for Business Units to Deliver Their Aspiration*, HC BRI memiliki strategi inisiatif yakni menyusun kembali fungsi HC sebagai "*true strategic business partner*", penguatan data dan *analytics* dalam *people analytics*, penguatan *talent management* pada beberapa area yakni *Employee Value Proposition*, rekrutmen dan *onboarding*, *succession planning*, dan *subsidiary talent management*, penyempurnaan mekanisme evaluasi kinerja, penguatan HC *Development*, dan Penguatan *Culture Transformation* untuk mendukung BRIVolution 2.0. BRI juga telah menyusun *Arsitektur/Framework Human Capital* yang diturunkan ke dalam 7 (tujuh) fokus utama pengelolaan HC yaitu mulai dari HC *Planning*, *Resourcing & Acquiring*, *Developing*, *Career & Succession Management*, *Performance Management*, *Remuneration*, *Employee & Industrial Relation*.

Rencana dan Strategi Pengembangan Human Capital Tahun 2022

Selaras dengan adanya perkembangan industri 4.0, serta menjawab tantangan *global Future Bank*, BRI telah melakukan penyesuaian proses bisnis dan peningkatan optimalisasi *digital* dengan mendorong penyempurnaan dan pengembangan proses bisnisnya. Berbagai bentuk proyek digitalisasi dan otomasi juga telah dilakukan BRI dengan salah satunya berkerjasama dengan konsultan Willis Tower Watson melaksanakan proyek *Strategic Workforce Planning* (SWP). Proyek *Strategic Workforce Planning* bertujuan untuk menghasilkan kajian *Headcount Projection*, *Future competency demand* dan *new resourcing strategy* yang nantinya akan digunakan BRI sebagai landasan menentukan kebutuhan tenaga kerja dan *skill* masa depan yang dibutuhkan BRI sehingga BRI dapat melaksanakan proses pemberdayaan dan efisiensi tenaga kerjanya.

Dalam pelaksanaan Proyek SWP, terdapat beberapa proses yang dilakukan. Salah satunya melakukan proses *demand reduction*, penggabungan beberapa pekerjaan/jabatan serupa serta proses *Re-Inventing Job* (proses rekonstruksi jabatan yakni proses *breakdown* jabatan ke dalam rincian tugas dan mengidentifikasi daftar tugas yang dapat dioptimalisasikan melalui otomasi/teknologi). Proyek *Strategic Workforce Planning* dilaksanakan BRI pada tahun 2020 dan telah selesai di pertengahan tahun 2021, dan saat ini sedang berlangsung proses implementasi hasil *Strategic Workforce Planning* yang direncanakan berlangsung hingga tahun 2025.

Secara garis besar, langkah-langkah strategis pengembangan Bidang *Human Capital* BRI pada tahun 2022-2024 bertujuan untuk dapat mensukseskan transformasi *human capital* BRI dari *human capital* sebagai "*process administrator*" menjadi "*strategic business partner*".

Tenaga Alih Daya

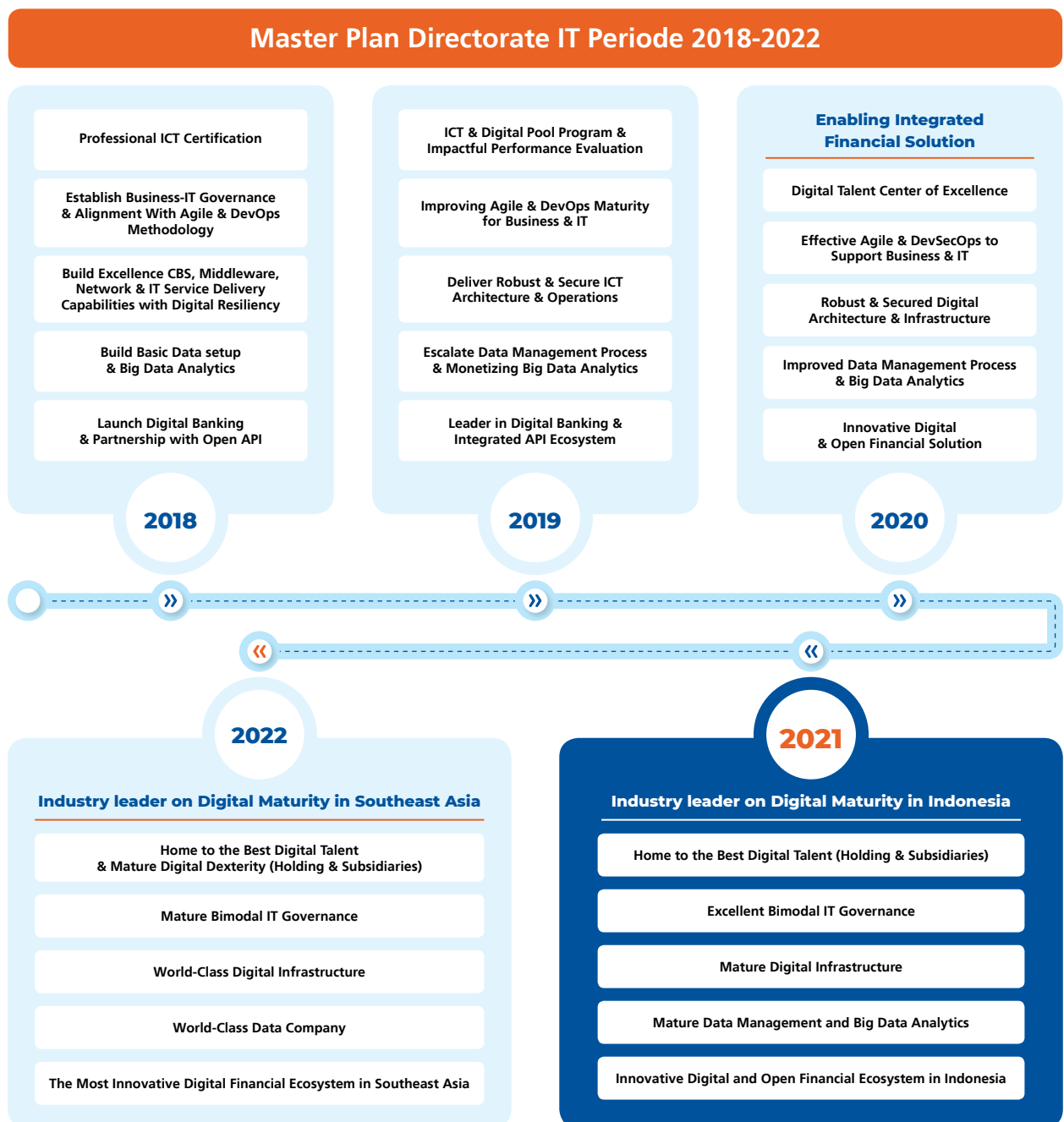
Dengan memperhatikan strategi transformasi HC sebagaimana telah diuraikan, maka pengelolaan HC terutama pemenuhan kebutuhan pekerja juga didasarkan pada strategi transformasi bisnis. Seiring dengan *business process reengineering* yang tengah dilakukan Perseroan dan semakin meningkatnya peranan layanan *digital* dan penggunaan teknologi dalam produk dan layanan BRI serta adanya transformasi pada *branch model* dan mempertimbangkan hasil dari *Strategic Workforce Planning*, maka kebutuhan jumlah pekerja dimasa yang akan datang mengalami penurunan.

Kendati demikian, Perseroan tetap mempertimbangkan opsi penggunaan Tenaga Alih Daya untuk memenuhi kebutuhan pekerja untuk pekerjaan bidang penunjang berisiko rendah, tidak memerlukan kompetensi perbankan tinggi, dan tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank. Dalam hal pemenuhannya, BRI bekerja sama melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja dengan beberapa perusahaan penyedia jasa rekanan.

» Teknologi Informasi

“Pada era transformasi digital, BRI telah membangun *Capability-Driven Digital Strategy (Customer Centric Mindset, Agile Governance, Scalable Reliable & Secured Technology, Open Innovation Ecosystem, dan Data-Driven Organization) framework* dengan fokus pengembangan produk-produk digital yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) digital outcome yaitu *Digitizing Core, Digital Ecosystem, dan New Digital Prepositions.*”

Master Plan Teknologi Informasi



Untuk mencapai Strategi Perusahaan tahun 2021, Direktorat Digital dan Teknologi Informasi (DTI) masih mengacu pada *Information Technology (IT) Strategic Plan 2018-2022* dengan 5 (lima) *high level* strategi di antaranya *Home to the Best Talent (Holding & Subsidiaries)*, *Excellent Bimodal IT Governance*, *Mature Digital Infrastructure*, *Mature Data Management and Big Data Analytics* dan *Innovative Digital and Open Financial Ecosystem in Indonesia*.

Strategi Teknologi Informasi

Untuk mencapai Strategi Perseroan, Direktorat Digital dan Teknologi Informasi menetapkan *Grand Strategy* berdasarkan 5 (lima) pilar strategi fungsional untuk mendukung *Strategic Initiatives* dan Program Kerja Utama BRI, yaitu: *Groom Breakthrough Innovation*, *Resilience IT Platform*, *Excel Data-driven Organization*, *Agile 10X Governance*, dan *Transform Digital Talent*, yang kemudian disebut *Grand Strategy "GREAT"*.

1. Groom Breakthrough Innovation

BRI melakukan *reimagined engagement* berdasarkan ekosistem dan produk, yang dibagi menjadi 3 (tiga) inisiatif, diantaranya:

- *Go Beyond Banking*: Menciptakan *Open Banking (Bank as a Platform)* dengan Mobile dan BRIMO sebagai unicorn super apps.
- *Intelligent Products Innovation*: Mengembangkan dan menciptakan produk berbasis *Artificial Intelligence (AI)*.
- *Emerging Hyper Automation*: Menciptakan ekosistem *smart services and operations*.

2. Resilience IT Platform

BRI akan membangun *future-ready platform* IT yang *reliable*, *secured* dan *responsive* untuk menopang pertumbuhan bisnis BRI dengan melakukan:

- *Pursue Intelligent Infrastructure*: Menciptakan infrastruktur yang smart dan reliabel dengan mengadopsi *cloud* dan *automation* berbasis AI.
- *Strengthen Cybersecurity & Establish Data Protection*: Meningkatkan kapabilitas IT *security* salah satunya dengan terus melakukan pengembangan *Fraud Detection System* berbasis *Big Data* dan AI.
- *Following the Core*: Menciptakan *high performance core banking*.
- *Accelerate Resilient Application*: Melakukan *application revamp* serta *active-active application system*.

3. Excel Data-driven Organization

BRI terus meningkatkan kapabilitasnya di bidang *Big Data* dan AI. Hal ini dikarenakan di era Digital, *data is the new oil*. Dalam hal ini, BRI melakukan *wide digital and analytics adoption* melalui *strong AI capabilities* dengan menjalankan beberapa

inisiatif untuk mencapai *Excel Data-driven Organization*, antara lain dengan memperkuat penggunaan data dengan terus membangun *Intelligent Data Analysis for Business Development*, *self service analytic* dengan memanfaatkan teknologi *Big Data* dan AI. Implementasi *Master Data Management* yang tidak lain untuk memperkuat kapabilitas BRI dalam mengelola *Big Data* secara BRI Group.

4. Agile 10X Governance

Dalam era *Digital* saat ini mantranya adalah kecepatan, dan untuk menjawab hal tersebut, BRI dituntut untuk dapat memberikan sebuah produk atau layanan dengan cepat namun berkualitas. BRI menerapkan "*Be a Strategic Thought Partner To Business*" agar strategi teknologi informasi (TI) sesuai dengan kebutuhan bisnis, serta tetap mengadopsi metode *DevSecOps* agar BRI dapat menghasilkan produk dengan cepat, berkualitas dan aman (*secure*). Dalam *Agile 10X Governance* ini, proses pengembangan dilakukan dengan pendekatan *product-centric* yang terdiri dari *squad-squad* tim produk yang pengembangannya dilakukan secara *agile* dan digiring oleh *collaboration tools* dan *automation*.

Selain itu, untuk terus meningkatkan kualitas dan mengimplementasikan *Agile 10X Governance*, BRI melakukan *IT Maturity Assessment* berdasarkan pada COBIT 2019. Sedangkan untuk mengukur *Digital Transformation* yang dilakukan BRI, BRI juga melakukan *INDI 4.0 Assessment* dan melakukan berbagai Sertifikasi ISO untuk terus meningkatkan kualitas TI.

5. Transform Digital Talent

Kompetensi keunggulan profesional yang tinggi dari setiap pekerja menjadi persyaratan utama, khususnya mengingat lingkungan bisnis yang kini sangat dinamis dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Oleh sebab itu, penyiapan talenta *digital* perlu dilakukan secara berkesinambungan agar terus relevan dengan perkembangan kebutuhan industri. Untuk menjawab hal tersebut, BRI mempersiapkan *digital talent*-nya dengan berbagai kompetensi dan sertifikasi.

Pada tahun 2021, Direktorat Digital dan Teknologi Informasi mengusung Tema: *Industry Leader on Digital & IT Maturity in Indonesia*. *Masterpiece program* pada tahun 2021 yaitu *Leading Omni Channel Innovation*, *Strengthening DRP Implementation*, *Integrated Cyber Threat Detection System*, dan *BRIBRAIN for Analytics Scoring*. Dari *Masterpiece program* tersebut, didapatkan score IT *maturity* 4,72 dari skala 5,00, *availability* layanan IT pada 99,85%, serta *success rate* pada 99,95%. Selain itu pencapaian lainnya antara lain sebagai berikut:

Performance & Healthiness Metrics 2021



<p>Outcome</p>	<p>BRImo Sales Volume: 1.345 T Transaction: 1.27 M</p> <p>BRIAPI Sales Volume: 182,7 T Transaction: 235 M</p>	<p>Apps Rating (BRImo): Play Store (4,0) App Store (4,7)</p>	<p>Integrated Customer Data Management Golden CIF: 143Jt</p>	<p># of application release: 1133</p>	<p>200+FTE Acquisitions Student Ranking #8 2021 from #19 in 2020</p>
<p>Output</p>	<p>BRImo, BRIAPI, TebuChaln, Senyum, Micropayment, KECEKU, CBM, dll</p>	<p>Availability: 99,85% Success Rate: 99,95% Fast Track IT Resilience: Active-active BRImo</p>	<p>BRIBRAIN: BRIDaya, Credit Scoring, BRISpot Debtor Acquisition Model Big Data: SSA, ML Ops, CPA, LR Mantri MDM: Golden CIF, ICM Data Privacy: ROPA, DFM, DPIA TIA</p>	<p>IT Maturity 2021: 4,72 ISO 27001 (7) ISO 9001:2015 (15) ISO 20000 (7) PCI PA-DSS (1) CyberSec Maturity: 3.37</p>	<p>IT Branding: Job Posting LinkedIn, Webinar, goes to campus IT Training & Certification: Soun Product Owner, ITIL TOGAF, Digital Mindset</p>
<p>Capabilities</p>	<p>Open API, Blockchain, Reusable service</p>	<p>Microservices, Multi-site Application System, Core Modernization, Improvement Cybersecurity</p>	<p>BRIBRAIN (AI BRI) Big Data MDM Data Privacy Management</p>	<p>IT & Digital Maturity ISO Certification</p>	<p>IT Branding Program Talent Development: New Mindset, New Practice, New Competency</p>
<p>Grand Strategy</p>	<p>Groom Breakthrough Innovation</p>	<p>Resilience IT Platform</p>	<p>Excel Data-driven Organization</p>	<p>Agile 10x Governance</p>	<p>Transform Digital Talent</p>

Bukan hanya IT Governance dan Digital Maturity assessment, International Standards Certification seperti ISO dan PCI juga berhasil didapatkan BRI pada fasilitas IT dan juga produk-produk BRI selama periode 2019-2020. Di tahun 2021, BRIMO dan BRILink Mobile menjadi digital apps yang berhasil memperoleh rekomendasi ISO 20000-1:2018.

Hasil pencapaian sertifikasi ISO 20000 untuk aplikasi BRIMO dan BRILink Mobile:



Framework Transformasi Digital

Pada era transformasi *digital*, BRI telah membangun *Capability-Driven Digital Strategy* (*Customer Centric Mindset, Agile Governance, Scalable Reliable & Secured Technology, Open Innovation Ecosystem, dan Data-Driven Organization*) framework

dengan fokus pengembangan produk-produk *digital* yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) *digital outcome* yaitu *Digitizing Core, Digital Ecosystem, dan New Digital Propositions*.

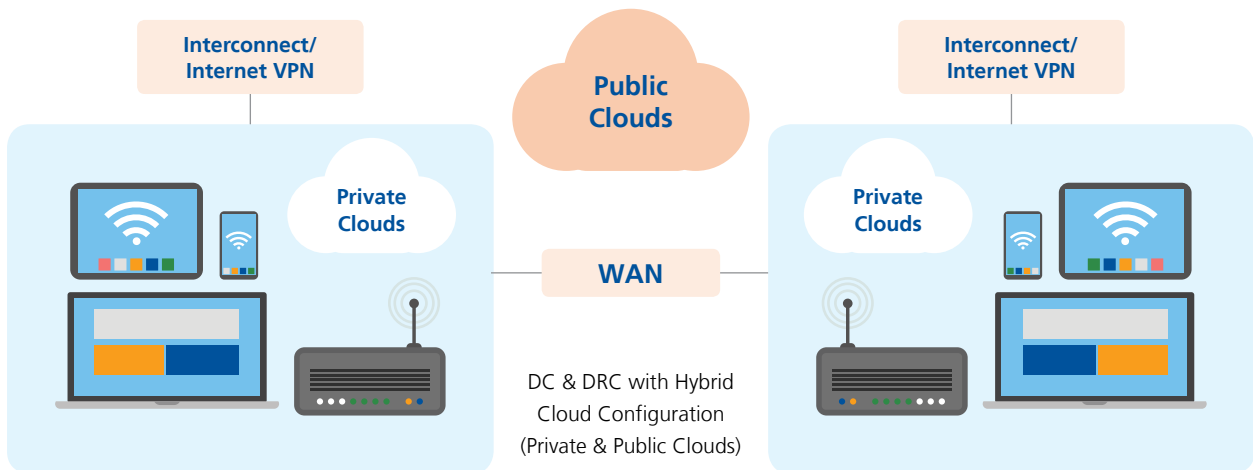
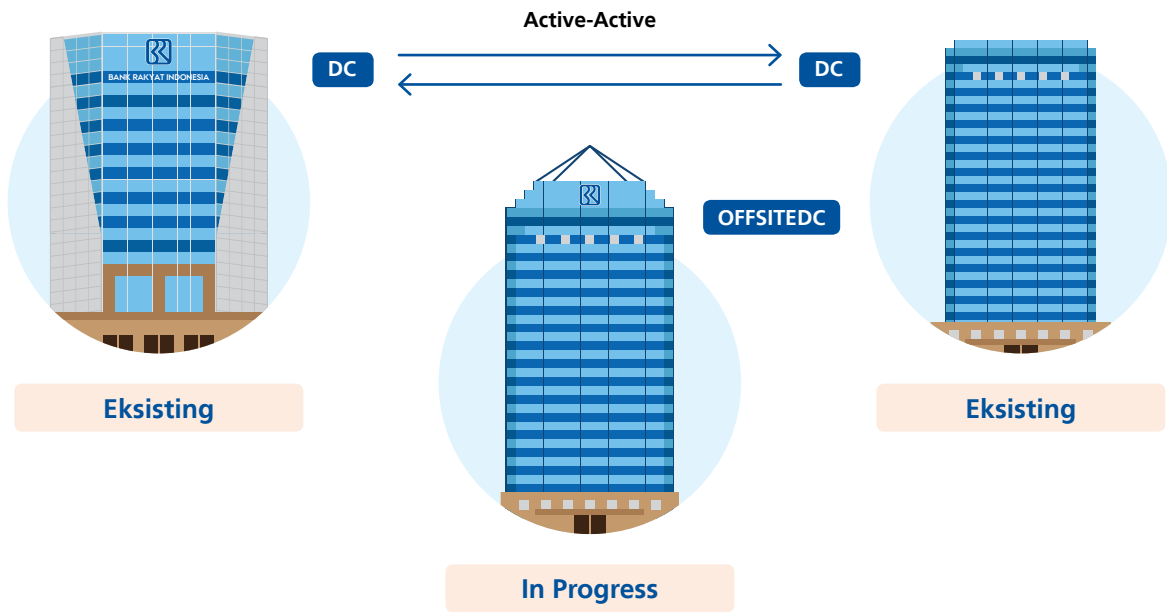


Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur TI dengan *high availability* sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan operasional TI di BRI. Bisnis BRI yang terus bertumbuh mengharuskan BRI untuk terus menerus melakukan perbaikan pada infrastruktur TI. Saat ini BRI telah didukung oleh fasilitas 3 (tiga) *Data Center* (DC) yang telah mencapai tier 3, dengan *active-active* DC yang menunjang

kontinuitas bisnis ketika terjadi bencana. 3 DC yang dimiliki BRI merupakan wujud dalam mendukung layanan *banking* yang *high availability*. Selain itu, BRI juga mulai memanfaatkan teknologi cloud dalam hal meningkatkan kapabilitas infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan bisnis BRI dan memberikan layanan yang optimal kepada nasabah.

TIER 3 DATA CENTER



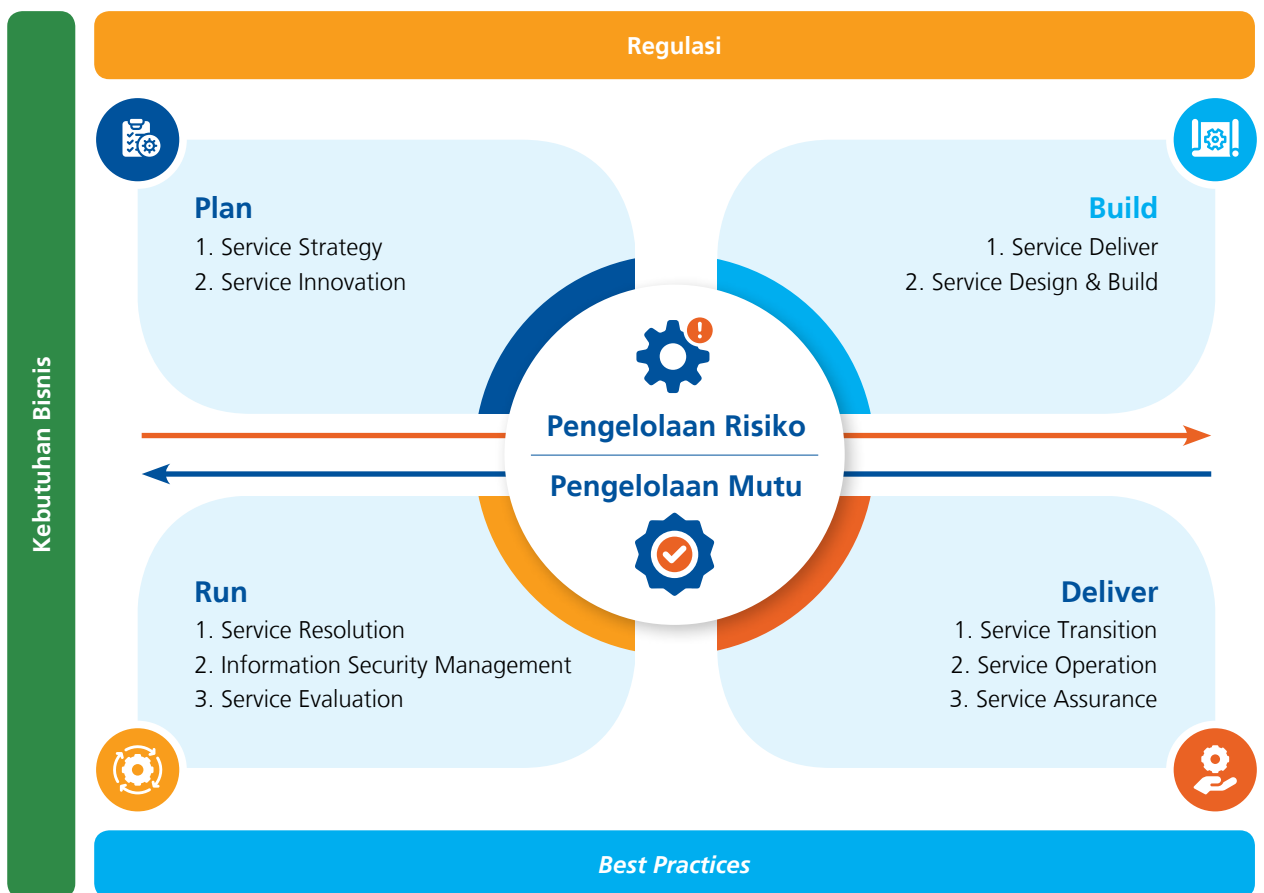
IT Governance

Penerapan kebijakan untuk pengelolaan TI dilakukan dengan berpedoman pada prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang mendukung pengelolaan risiko TI dan tetap memberikan nilai strategis bagi Perseroan. Tata Kelola TI BRI menggunakan kerangka kerja tata kelola TI yang efektif dan efisien sehingga mencerminkan suatu proses pengambilan keputusan yang baik serta kepemimpinan dalam penyelenggaraan tata kelola TI.

BRI berkomitmen membangun perilaku yang sesuai dengan standar etika BRI dalam rangka menerapkan manajemen yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam

pelaksanaannya, BRI senantiasa mengacu pada praktek terbaik (*best practice*) dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku, berkesinambungan dan konsisten melalui penerapan nilai-nilai GCG, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian, dan Kewajaran.

BRI juga melakukan adopsi standar-standar internasional yang demi meningkatkan keamanan informasi dan siber, sistem manajemen kualitas dan sistem kualitas layanan yang setara dengan standar industri internasional.



Dalam mengimplementasikan kebijakan untuk pengelolaan TI, BRI menggunakan *framework* yang menyelaraskan antara Kebutuhan Bisnis, Regulasi dan *Best Practices*. Penyelarasan ketiga poin tersebut diantaranya dengan melakukan pengelolaan risiko saat perencanaan *service strategy* dan *innovation* serta saat membangun *service deliver & design* serta melakukan pengelolaan mutu saat implementasi dan *delivering*.

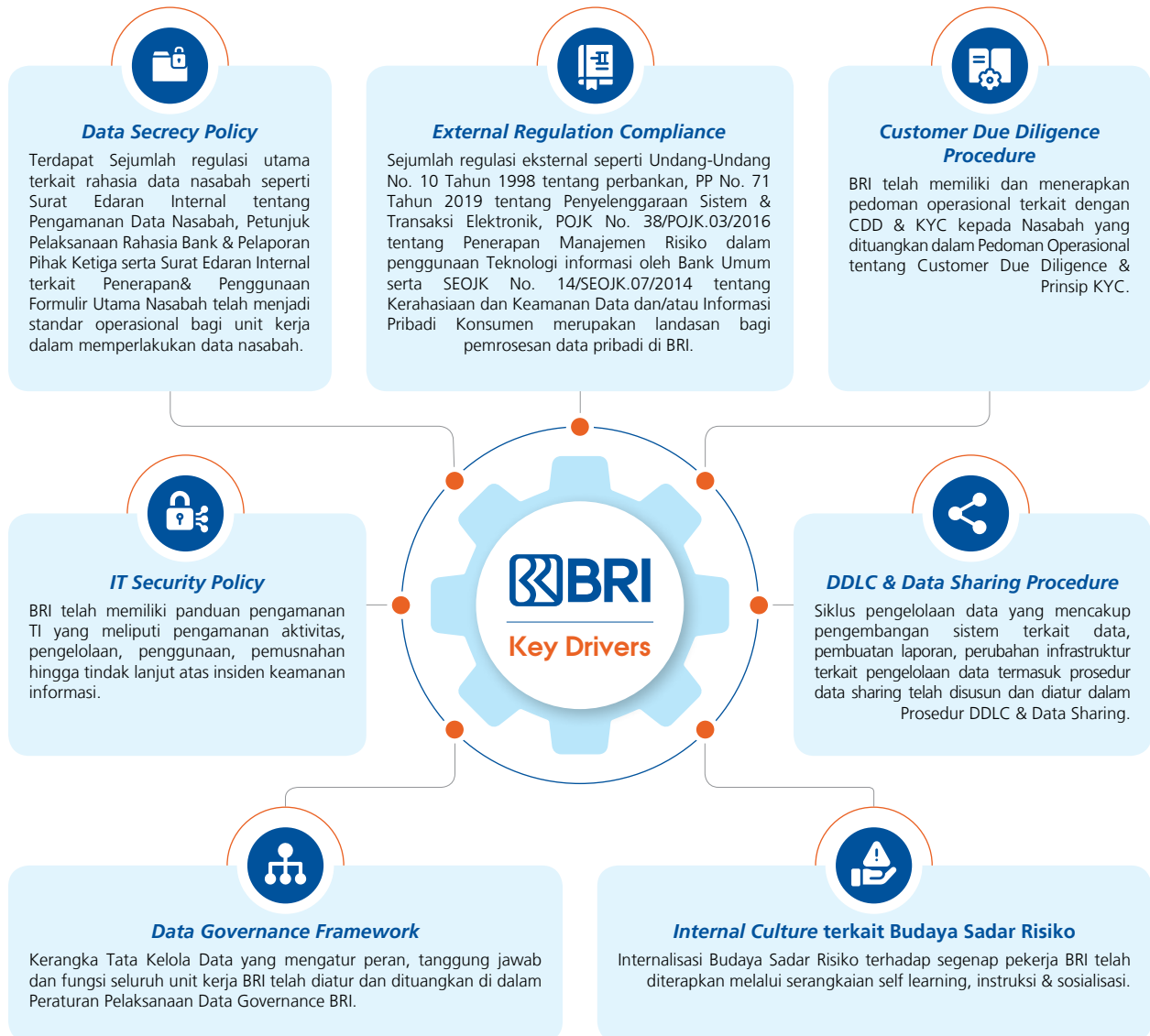
Pengelolaan risiko TI pada penerapan *framework* kebijakan tidak lepas dari pentingnya *data privacy* dan *security* yang menjadi poin kritical dengan risiko tertinggi karena menyangkut data-data nasabah. Oleh sebab itu, BRI juga mengatur kebijakan dan pedoman untuk mengelola risiko terkait data.

Data Privacy dan Security

BRI telah mengadopsi dan menerapkan serangkaian kebijakan dan pedoman operasional pengamanan privasi data nasabah di seluruh operasional unit kerja. Hal ini diterapkan melalui berbagai Pedoman Pelaksanaan Pengamanan Informasi yang meliputi panduan proses pengelolaan, penggunaan, pemusnahan, pemantauan, evaluasi, pelaporan informasi dan tindak lanjut atas insiden keamanan informasi. Melalui penerapan Pedoman Pelaksanaan ini, privasi dan keamanan nasabah dapat terjaga dengan baik.

Pelaksanaan Kebijakan Pendukung Data Privacy & Security di BRI

» BRI sangat berkomitmen untuk meningkatkan keamanan informasi data yang kami kelola. Kami telah melaksanakan prinsip-prinsip di dalam pengamanan dan pengelolaan data nasabah yang dituangkan dalam beragam regulasi utama perusahaan.



BRI sangat berkomitmen untuk meningkatkan keamanan informasi data yang dikelola. Berikut prinsip-prinsip dalam pengamanan dan pengelolaan data nasabah yang dituangkan dalam berbagai regulasi internal.

1. *External Regulation Compliance*: Sejumlah regulasi eksternal terkait seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, PP No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum serta SEOJK No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen merupakan landasan bagi pemrosesan data pribadi di Bank BRI.
2. *Data Secrecy Policy*: Berdasarkan regulasi eksternal dari otoritas di atas, BRI menurunkan sejumlah regulasi utama internal dan turunannya terkait rahasia data nasabah. Regulasi tersebut diantaranya seperti Prosedur Internal Pengamanan Data Nasabah (Perlindungan data nasabah di seluruh tahap siklus perolehan data mulai dari perolehan/pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, pemindahan/pengiriman, pembukaan akses hingga pemusnahan data) termasuk juga dengan bagaimana prosedur untuk enkripsinya, Petunjuk Pelaksanaan mengenai Rahasia Bank, penundaan Transaksi dan pelaporan Pihak Ketiga serta Prosedur Internal tentang Penerapan & penggunaan Formulir Utama Nasabah. Beberapa kebijakan internal ini telah menjadi standar operasional bagi unit kerja Bank BRI dalam mengelola data nasabah.
3. *IT Security Policy*: BRI telah memiliki panduan pengamanan TI dengan berpedoman pada prosedur atau standar *best practice* industri yang mengacu SEOJK No. 21/SEOJK.03/2017, Standar ISO/IEC 27001:2013 tentang Teknologi Informasi-Teknik keamanan-Sistem Manajemen keamanan Nasional-Persyaratan serta PCI DSS Versi 3.2 tahun 2016 *Requirement 12.1 Establish, Publish, Maintain, Disseminate Security policy*. Hal ini dituangkan di dalam Panduan Utama pedoman pelaksanaan pengamanan Informasi meliputi pengamanan aktivitas, pengelolaan, penggunaan, pemusnahan hingga tindak lanjut atas insiden keamanan informasi (PP 08/ISC/09/2020).
4. *Data Governance Framework*: BRI telah menetapkan dan mengadopsi Kerangka tata kelola data yang mengatur peran, tanggung jawab dan fungsi seluruh unit kerja BRI telah diatur dan dituangkan dalam Prosedur Internal tentang Pedoman pelaksanaan *Data Governance*.
5. *Customer Due Diligence Procedure*: BRI mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap seluruh nasabah maupun calon nasabah. Menindaklanjuti hal ini, BRI telah memiliki dan menerapkan pedoman operasional terkait dengan

Customer Due Diligence Procedure (CDD) dan *Know Your Customer* (KYC) kepada nasabah yang dituangkan dalam Buku pedoman Operasional yang dilaksanakan dan menjadi standar bagi seluruh unit kerja BRI.

6. *Data Development Life Cycle* (DDLC) dan *Data Sharing Procedure*: Siklus pengelolaan data yang mencakup pengembangan sistem terkait data, pembuatan laporan, perubahan infrastruktur terkait pengelolaan data termasuk prosedur *data sharing* telah disusun dan diatur dalam prosedur internal mengenai DDLC dan Prosedur *Data sharing*.
7. *Internal Culture* terkait Budaya Sadar Risiko: BRI memahami bahwa serangkaian prosedur di atas harus diikuti oleh internalisasi budaya kerja bagi segenap manajemen dan karyawan BRI. Oleh karena itu, Internalisasi Budaya Sadar Risiko terhadap segenap pekerja BRI telah diterapkan melalui serangkaian *self-learning* rutin, instruksi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Selain itu, BRI juga berkomitmen untuk melindungi informasi/data nasabah, sebagai bentuk kepatuhan atas beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut adalah acuan peraturan perundang-undangan dan penjelasan dari peraturan internal Bank BRI terkait perlindungan informasi atau data nasabah:

1. UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. PP No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
5. Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
6. Dan berbagai aturan terkait lainnya.

BRI telah mengadopsi aturan-aturan tersebut melalui penerbitan ketentuan internal tentang pengaduan nasabah, yakni Surat Keputusan Tentang Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Melalui prosedur ini, setiap keluhan terkait pelanggaran kerahasiaan nasabah akan langsung ditindaklanjuti. Selain itu ada juga ketentuan yang menegaskan perlindungan data dan/atau informasi nasabah pada Surat Edaran Tentang Pengamanan Data Nasabah.

Dalam proses pembukaan rekening, BRI telah meminta persetujuan (*consent*) dari calon nasabah terkait ijin penggunaan data calon nasabah untuk keperluan penawaran produk-produk dan jasa perbankan baik oleh BRI ataupun Grup BRI. Seiring dengan perjalanan program *data privacy* di BRI, aktivitas *consent* ini akan diperluas sesuai dengan *data subject* yang diatur dalam *framework data privacy management* yang ditetapkan BRI.

Selain itu, BRI juga memiliki Petunjuk Pelaksanaan Rahasia Bank, Penundaan Transaksi dan Pelaporan kepada Pihak ketiga, yang pada pokoknya berisi diantaranya:

1. Ketentuan tentang rahasia bank pada umumnya serta prosedur langkah-langkah ketat yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembukaan, penundaan transaksi, penghentian sementara, penyitaan, pemblokiran dan pelaporan terkait data nasabah yang memuat pengertian dan ketentuan, wewenang dan tanggung jawab, alur dan uraian pekerjaan serta *flowchart*.
2. Prosedur ini juga mengatur bagaimana pembukaan rahasia bank dalam hal:
 - a. Kepentingan Perpajakan.
 - b. Kepentingan Peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya.
 - c. Tukar menukar informasi Bank.
 - d. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah secara tertulis.
 - e. Pemeriksaan Bank oleh Bank Indonesia.
 - f. Dan sebagainya.

BRI telah memiliki dan menerapkan peraturan internal terkait Prosedur Penyediaan *Data Sharing* untuk Kebutuhan Pihak Ketiga. Di dalam prosedur ini telah diatur dokumen apa saja yang harus dilengkapi dalam hal permintaan data. Hal ini tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip kerahasiaan bank. Selain itu di dalam prosedur ini juga telah diatur tentang tingkat klasifikasi data yang dimiliki oleh BRI sehingga jelas mekanisme pemenuhannya dari masing-masing tingkat klasifikasi data. Permohonan permintaan data juga wajib mendapatkan otorisasi sesuai dengan tingkat klasifikasi datanya.

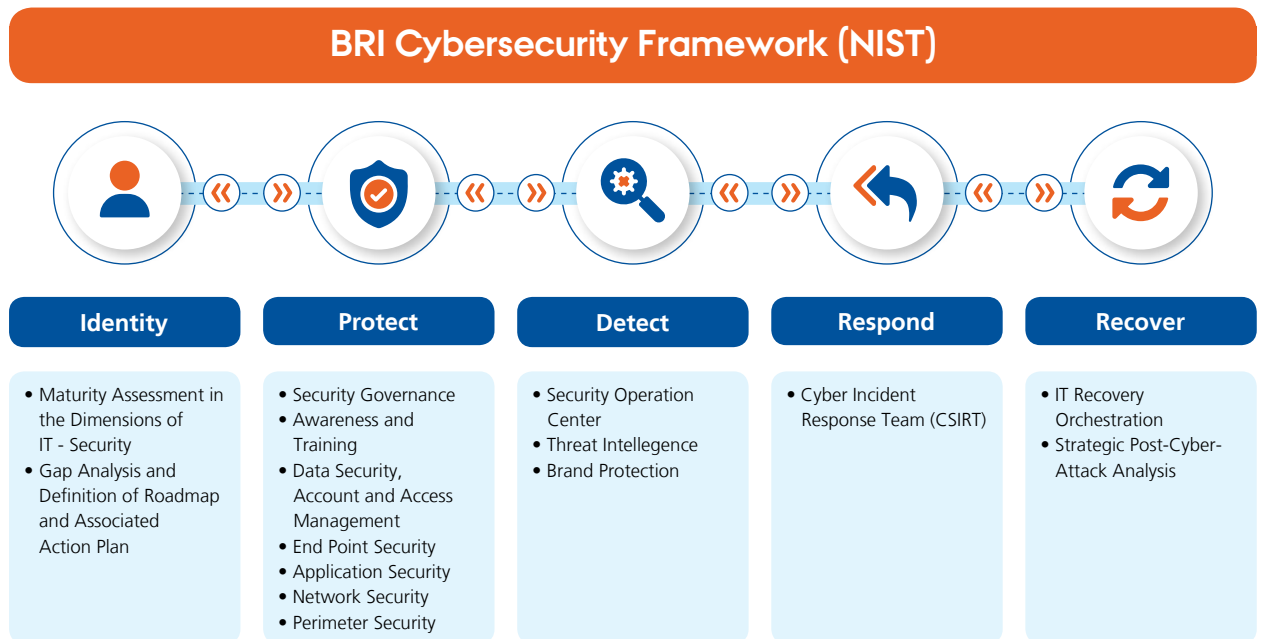
BRI juga melakukan prinsip kehati-hatian dalam hal menyerahkan atau menerima data dari Pihak Ketiga untuk melindungi datanya. Oleh karena itu, dalam pertukaran data dengan pihak ketiga, BRI selalu meminta pihak ketiga untuk sepakat atas Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) baik sebagai pengungkap data ataupun di antara para pihak yang saling mengungkapkan data.

Cyber Security

Pada tahun 2018, sesuai perkembangan digitalisasi BRI dan seiring dengan *trend* perkembangan serangan *cyber*, BRI membentuk unit kerja di bawah Direktur Digital Teknologi Informasi dan Operasi yang secara khusus menangani keamanan informasi. Unit kerja keamanan informasi bertanggung jawab untuk melakukan:

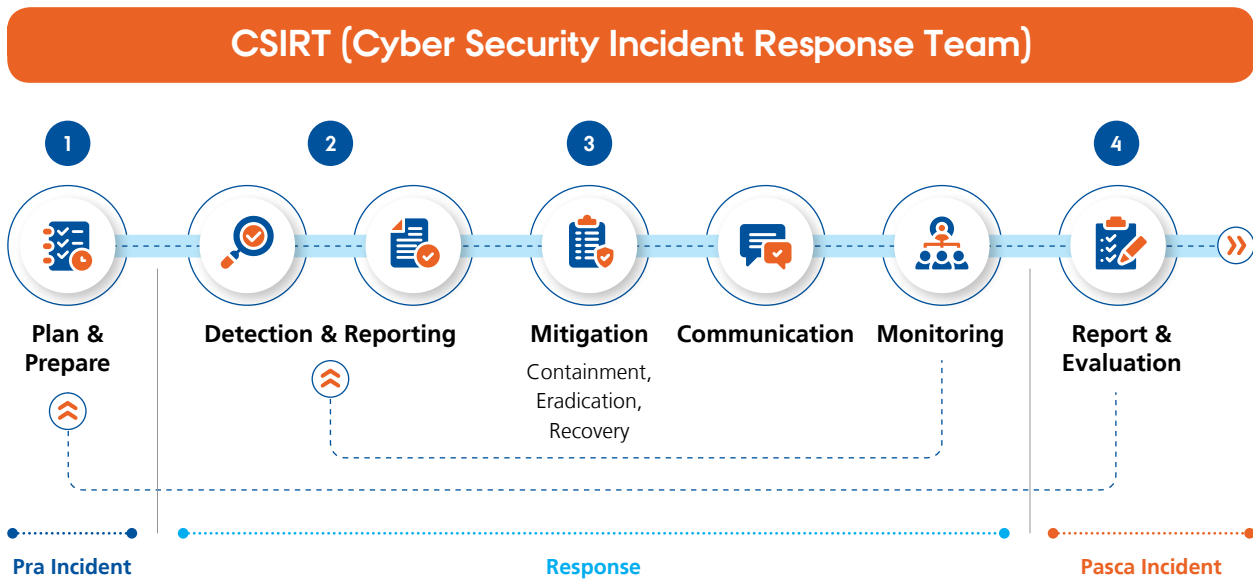
1. Penyusunan *security* arsitektur
2. Operasional *security*
3. *Cyber risk* dan *cyber intelligence*
4. Data loss and fraud prevention
5. Identity and access management
6. Program *management*, investigasi dan forensik
7. Security governance

Unit kerja keamanan informasi dipimpin oleh seorang Chief Information Security Officer (CISO) yang memiliki pengalaman terkait *security* dan sertifikasi antara lain CISA (*Certified Information System Auditor*) dan CISSP (*Certified Information Systems Security Professional*). BRI telah menyusun *Enterprise Security Architecture* yang menggunakan *framework* NIST *Cyber Security* yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan *cyber security* di BRI.

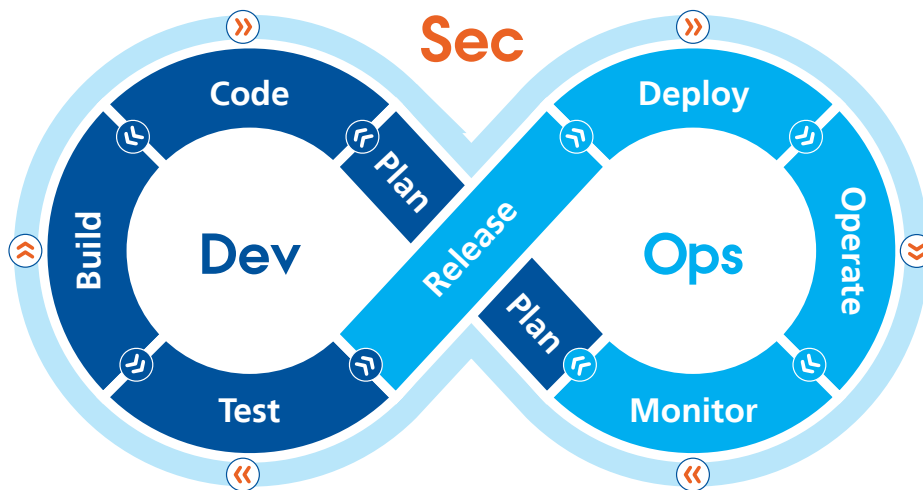


BRI telah memiliki Kebijakan *cyber security* yang mengatur terkait keamanan informasi BRI secara *bank wide*. Kebijakan *cyber security* ini disusun berdasarkan standar internasional ISO27001:2013, PCI DSS dan kebijakan regulator POJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

BRI memiliki prosedur penanganan insiden keamanan informasi dan tim tanggap insiden siber (CSIRT) yang sejalan dengan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Business Continuity Plan* (BCP) BRI. BRI bekerjasama dengan *international security experts* yang memiliki pengalaman global dalam tanggap insiden untuk membantu BRI dalam menangani insiden *cyber*.



Untuk memastikan keamanan sistem BRI, maka aspek *security* wajib dimasukkan dalam setiap proses pengembangan aplikasi (*Software Development Life Cycle - SDLC*) baik pada tahap desain, pengembangan, dan pengujian aplikasi.



BRI memiliki fungsi/bagian khusus terkait *Security Operation Center* (SOC) yang melakukan *monitoring* terhadap *cyber threat* secara kontinu (24 jam, setiap minggu, selama 365 hari). Dalam melakukan *monitoring* keamanan *cyber*, BRI juga melakukan *monitoring* secara proaktif melalui layanan *threat intelligence service* dari provider yang berskala internasional. Selain itu, untuk memonitor dan memitigasi ancaman *Brand abuse*, BRI memiliki

program *brand protection* yang bertugas untuk memonitor penyalahgunaan brand di sosial media. Hal ini membuat BRI sejak tahun 2019 belum pernah terjadi adanya *data breach*. BRI juga bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan identifikasi kerentanan sistem BRI dan *review* terhadap keamanan informasi BRI secara independen berupa *vulnerability assessment*, *penetration test* dan *cyber-attack simulation* (*red team*).

Budaya Keamanan Informasi

Dalam rangka meningkatkan kepedulian karyawan BRI terhadap pengamanan informasi, BRI secara rutin melakukan program peningkatan kepedulian melalui berbagai bentuk dan media antara lain:

1. Poster dan publikasi internal BRI
2. *E-learning* kepada seluruh pekerja BRI
3. Webinar kepada seluruh pekerja BRI
4. Email phishing campaign

Sebagai bentuk komitmen penegakan terhadap tata kelola keamanan informasi, BRI menerapkan hukuman disiplin terhadap pelaku pelanggaran keamanan informasi yang menyebabkan dampak terhadap bisnis bank.

BRI Cyber Security Talent Roadmap

Untuk meningkatkan kapabilitas BRI dalam menangani *cyber security*, BRI memiliki *cyber security talent roadmap* yang memastikan seluruh *talent* di bidang *security* sudah terstandarisasi, tersertifikasi, dan memiliki *skill* sesuai standar internasional. BRI juga melakukan rekrutmen tenaga profesional yang memiliki pengalaman dan sertifikasi di bidang *cyber security*. Sertifikasi *information security* internasional yang sudah dimiliki antara lain *Certified Ethical Hacker* (CEH), *Computer Hacking Forensics Investigator* (CHFI), *EC-Council Certified Incident Handler* (ECIH), *EC-Council Certified Security*

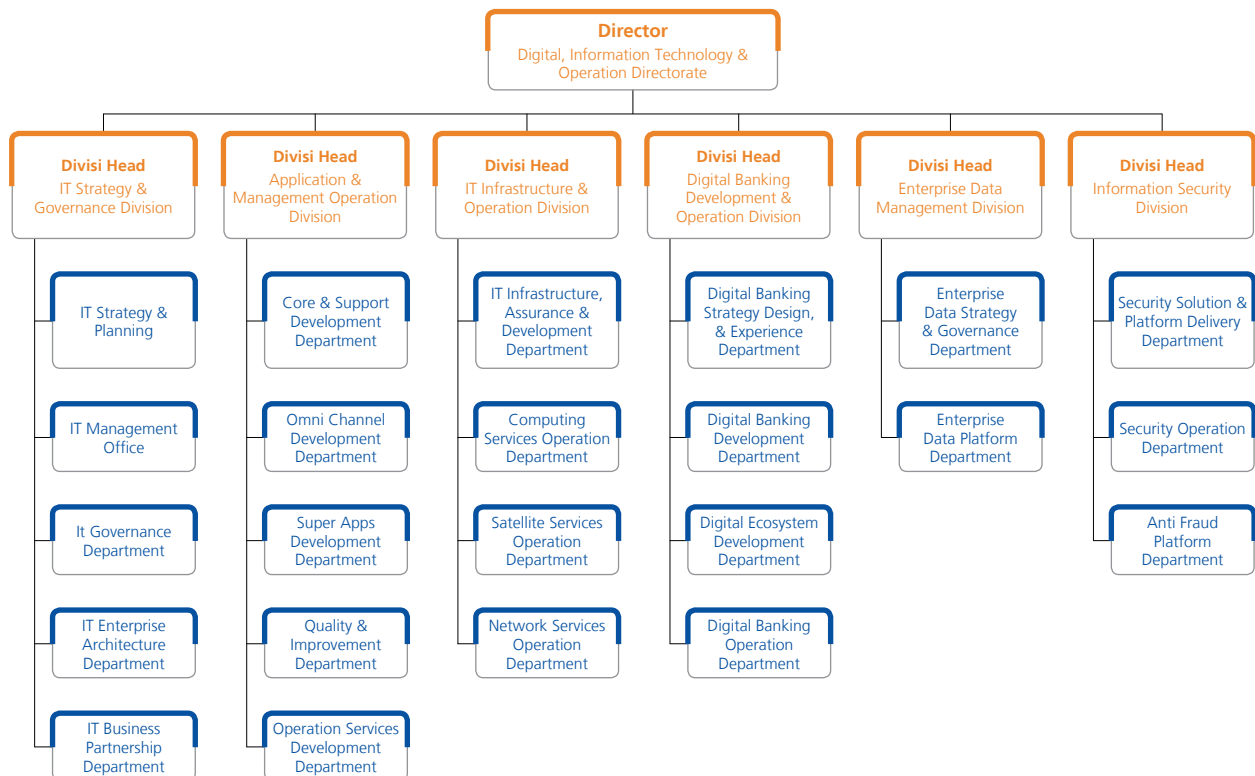
Analyst (ECSA), *Ecole Nationale Superieure d'Art* (ENSA), *OFFICE*, *ISO 27001 Lead Auditor*, *ISO27001 Lead Implementer*, *Certified Information Systems Security Professional* (CISSP) dan lainnya.

Dalam rangka memastikan *governance* terhadap keamanan informasi dan internasional standar pada proses di BRI, maka dilakukan sertifikasi ISO 27001:2013 antara lain pada ruang lingkup *Big Data*, *BRI-API Platform*, *Managing Event & Cyber Threat Monitoring*, *Card Production*, *Satellite Service Operation Department* dan *Data Center Infrastructure*. BRI juga aktif melakukan koordinasi dan kerjasama terkait *cyber security* dengan berbagai institusi negara dan komunitas antara lain dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), *CSSP-SP* Bank Indonesia, Forum Himbara, dan Forum Perbanas.

Profil Direktorat Teknologi Informasi

Peran Teknologi sangat diandalkan untuk mendukung proses bisnis dan mempercepat proses Transformasi Digital BRI. Hal ini khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 di mana keterbatasan ruang gerak mengarahkan nasabah untuk menggunakan layanan digital perbankan. Layanan digital perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah, khususnya transaksi finansial menjadi semakin cepat, mudah, aman dan efisien yang semakin reliabel agar dapat memberikan pengalaman yang positif bagi nasabah BRI.

Digital, Information Technology & Operation Directorate



Transformasi *Digital* dan IT di BRI perlu didukung dengan pengelolaan *Platform Digital* dan Infrastruktur TI yang berstandar internasional dan dikelola dengan standar *best practice*. Sehubungan dengan hal tersebut sejak tahun 2020 BRI telah mengesahkan model organisasi dalam mengelola *platform digital* dan IT. Organisasi Digital dan IT di BRI sebagai berikut:

- IT Strategi & Governance
- Application Management & Operation
- IT Infrastruktur & Operation
- Digital Development & Operation
- Enterprise Data Management
- Desk Information Security

Secara garis besar, Divisi IT Strategi & Governance bertanggung jawab menyusun strategi dan melakukan *governance* terkait dengan Digital dan IT di BRI. Divisi Application Management & Operation bertanggung jawab melakukan pengembangan dan operasional terhadap seluruh aplikasi BRI. Divisi IT Infrastruktur & Operation bertugas membantu menyediakan *next gen* infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan aplikasi BRI. Dalam hal inovasi

Digital, Divisi Digital Development & Operation bertanggung jawab untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan digital banking. Dalam hal pengelolaan Data, dimana BRI memiliki data yang cukup besar, Divisi Enterprise Data Management memiliki tanggung jawab untuk mengelola big data dan terus meningkatkan kemampuan *data analytic* di BRI. Kemudian pada era *digital* dimana *cyber security* menjadi perhatian penting, *Desk Information Security* bertanggung jawab menjaga *cyber security* yang ada di BRI.

Pengembangan Kompetensi

Untuk mendukung implementasi TI sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan Perseroan, BRI secara terus menerus melakukan pengembangan kemampuan dan kompetensi SDM yang difokuskan pada bidang-bidang yang sesuai kebutuhan Perseroan. Sampai dengan Desember 2021, terdapat 752 orang jumlah Sumber Daya Manusia pada 6 Divisi dibawah Direktorat Digital Teknologi Informasi & Operasi terdiri dari:

Divisi	Pekerja Kontrak	PT (Peserta Pensiun)	Grand Total
Divisi APP	22	249	271
Divisi DDB	54	61	115
Divisi EDM	18	62	80
Divisi INF	10	150	160
Divisi ISC	5	42	47
Divisi ISG	22	57	79
Grand Total	131	621	752

Training dan Sertifikasi

Training dan Sertifikasi Kompetensi Digital dan TI

Dalam menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia TI, BRI terlebih dulu melakukan riset terhadap materi-materi pelatihan yang dibutuhkan. Terkait pelatihan dalam rangka pengembangan serta peningkatan kompetensi khususnya bidang Digital dan TI, BRI telah melakukan *mapping* kebutuhan pelatihan dan sertifikasi untuk pekerja yang bersifat teknis, non teknis serta manajerial pekerja sesuai kebutuhan. Data Distribusi Pelatihan dan Sertifikasi pada masing-masing Divisi di Jajaran Direktorat Digital Teknologi Informasi dan Operasi tahun 2021 sebagai berikut:

Bidang	APP	DDB	INF	ISC	ISG	EDM	Jumlah Sertifikasi
<i>Data Management</i>	7	0	0	0	1	4	12
<i>Software Engineering</i>	20	5	0	0	4	5	34
<i>Software Management</i>	1	0	0	0	0	0	1
<i>UI/UX Design Specialist</i>	1	1	0	0	1	1	4
<i>IT Infrastructure Specialist</i>	0	2	26	0	1	1	30
<i>IT Architecture Specialist</i>	2	1	0	0	2	0	5
<i>IT Security Specialist</i>	3	1	0	7	1	0	12
<i>IT Product Manager</i>	10	3	0	1	1	2	17
TOTAL							115

Sertifikasi Bidang Data Management

No.	Topik Sertifikasi
1.	Certified Data Management Professional (CDMP)
2.	IHT Data Management Book of Knowledge 2
3.	Certified Data Management Professional (CDMP)
4.	Cloudera Certified Associate (CCA)
5.	Data Analysis
6.	Certified Data Management Professional (CDMP)
7.	MySQL for DBA

No.	Topik Sertifikasi
8.	Developing Microsoft SQL Server Databases
9.	Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
10.	MCSE: Data Management and Analytics
11.	Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server
12.	MCSA: SQL 2016 Database Administration

Sertifikasi Bidang Software Engineering

No.	Topik Sertifikasi
1.	DevOps Engineer Database Management System (DevSecOps)
2.	Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
3.	COBIT 2019
4.	ISTQB Certification
5.	CompTIA Mobile App Security (ComTIA A+)
6.	Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
7.	DevOps Engineer Database Management System (DevSecOps)
8.	OKR Sertification
9.	Scrum Master Web Method Developer (SoftwareAG)
10.	Developing APIs with Google Cloud's Apigee API Platform Specialization
11.	Certified Tester ISTQB Foundation Level (CTFL)
12.	Finacle Training Technical Core
13.	Agile software architecture for developers
14.	Google Associate Android Developer Certification
15.	MySQL Performance Tuning & MySQL Cluster
16.	DevOps Fundamental
17.	DevOps Test Engineer
18.	Scrum developer

No.	Topik Sertifikasi
19.	Scrum Master
20.	AS400 advanced
21.	Cardlink
22.	MySQL Database Developer Oracle Certified Professional
23.	React Native Course
24.	MongoDB Developer Certification
25.	MongoDB Professional Certification
26.	Sertifikasi MCSA: Web Application
27.	Training Certified Secure Programmer (ECSP)
28.	MCSA SQL Server 2012/2014 (atau yang terbaru)
29.	MCSA SQL 2016 Database Development (atau yang terbaru)
30.	WebMethods Integration Developer
31.	AS400 fundamental
32.	Build Modern API & Microservices with Golang (Training)
33.	MCSA SQL Server Database Development
34.	Scrum Foundation
35.	CIW Web Design Spec (intermediate)

Sertifikasi Bidang IT Architecture

No.	Topik Sertifikasi
1.	ITIL@v4 Foundation
2.	TOGAF Certification
3.	Togaf Certification
4.	Red Hat OpenShift Development I: Containerizing Applications
5.	Red Hat: Introduction to OpenShift Applications

Sertifikasi Bidang UI/UX Design

No.	Topik Sertifikasi
1.	CIW Web Design Spec (intermediate)
2.	NN Group UX Certification
3.	UI/UX Design

Sertifikasi Bidang IT Infrastructure

No.	Topik Sertifikasi
1.	Cisco Certified Network Associate (CCNA)
2.	Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
3.	certified internal audit (CIA)
4.	Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4
5.	COBIT
6.	Satellite Link Budgets with SatMaster 9 Software
7.	Juniper Networks Certified Associate (JNCIA)
8.	Cisco Certified Network Professional (CCNP)
9.	Cisco Certified Network Associate (CCNA)
10.	Project Management Professional (PMP)
11.	Certified Associate in Project Management (CAPM)
12.	Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
13.	F5 Certified BIG-IP Administrator
14.	Sertifikasi Ahli K3 Listrik
15.	Certified Data Center Professional (CDCP)
16.	Certified Data Center Professional (CDCP)
17.	Certified in the Governance of Enterprise Information Technology (CGEIT)

No.	Topik Sertifikasi
18.	Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4
19.	Certified Data Centre Specialist (CDCS)
20.	Certified Information Technology Professional (CITP)
21.	Project Management Professional (PMP)
22.	Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4
23.	Certified Information Technology Professional (CITP)
24.	VMware Certified Profesional
25.	VMware Certified Advanced Professional
26.	RedHat Certification (RHCSA)
27.	Microsoft Windows Certification : Windows Operating system
28.	Mysql Database Administrator
29.	Google Cloud Certified Associate Cloud Engineer
30.	Elastic Certification & Preparation Course
31.	Juniper Networks Certified Specialist (JNCIS)
32.	Juniper Network Certified Professional (JNCIP)

Sertifikasi Bidang IT Security

No.	Topik Sertifikasi
1.	Comptia Security +
2.	Certified Ethical Hacker
3.	Certified Information System Security Professional
4.	Comptia Security +
5.	DevSecOps
6.	certified fraud examiner

No.	Topik Sertifikasi
7.	Computer Hacking Forensic Investigator
8.	ISO27001 Lead Implementer
9.	ISO27001 Lead Implementer
10.	Certified ITIL Foundation V.4
11.	CISA
12.	CISM

Sertifikasi Bidang Product Manager

No.	Topik Sertifikasi
1.	Agile Hands-On Workshop Training
2.	Agile Leadership Training
3.	Scrum Master Training
4.	Design Thinking
5.	CAPM® Exam Preparation
6.	Digital Business Strategy
7.	Professional Scrum Product Owner (PSPO)
8.	Agile Hands-On Workshop Training
9.	Agile Leadership Training
10.	Scrum Master Training
11.	Design Thinking

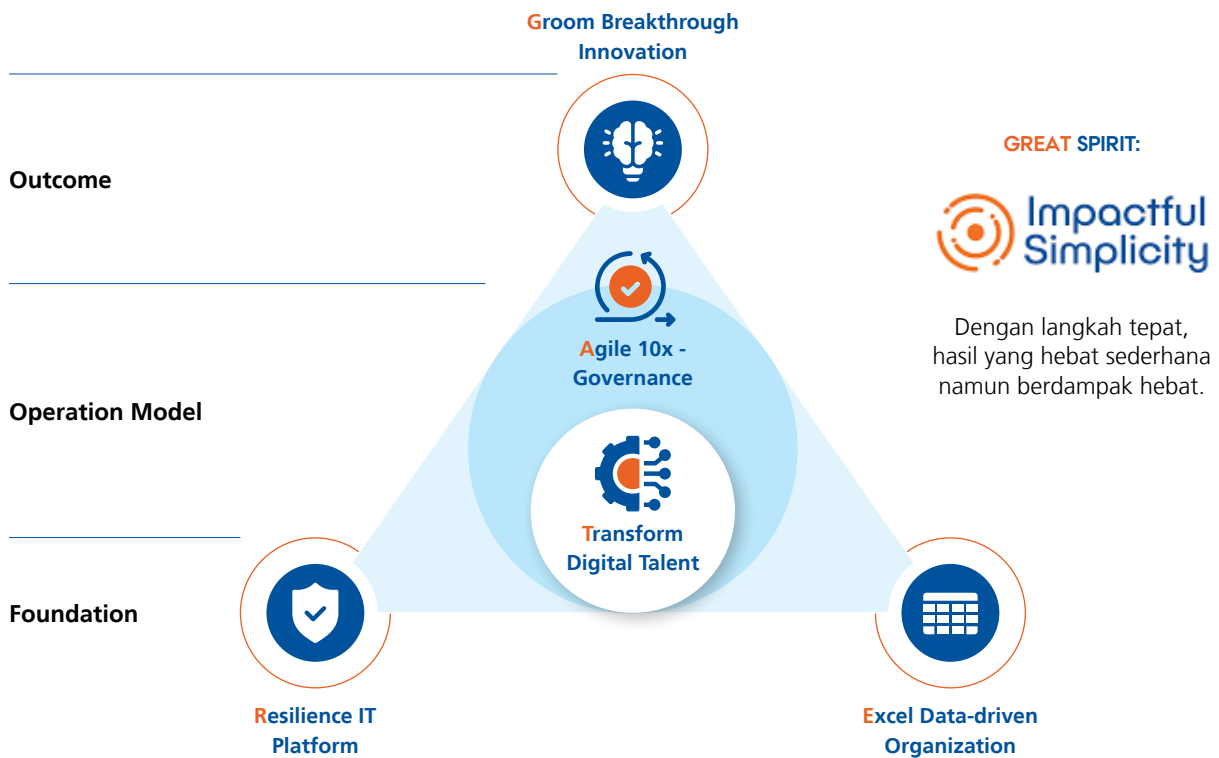
No.	Topik Sertifikasi
12.	Certified Scrum Master by Scrum Alliance
13.	Developing Communication Skills for Business Professionals
14.	IT Asset Management Foundation and Exam Preparation
15.	Alibaba Netpreneur Training
16.	AWS IoT: Developing and Deploying an Internet of Things
17.	Certified COBIT 5
18.	Atlassian Product (Jira, Confluence, BitBucket, Bamboo)
19.	Fintech Program
20.	Mastering Project Communication Management: Profesional Skills, Techniques and Strategies

Rencana dan Strategi Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2022

Dalam rangka mendukung BRIVolution 2.0, Direktorat Digital dan Teknologi Informasi tetap menerapkan *Grand Strategy* "GREAT" dan mengusung tema *Pursue for Speed, Smart, and Simplicity* untuk tahun 2022. *Masterpiece* program pada tahun 2022 berada pada *Groom Breakthrough Innovation* di mana BRI akan mendorong *go beyond banking, Resilience IT platform* pada

infrastruktur BRI akan menjadi *intelligent Infrastructure, Excel Data-driven Organization* yang akan memperkuat BRIBRAIN yang telah dibangun, serta DTI akan melanjutkan *Transform Digital Talent* dimana BRI menjalankan *Enhance Hiring, Sourcing & Onboarding Strategy*.

Pursue for Speed, Smart & Simplicity



» Fixed Assets Management & Procurement

Ringkasan Kinerja dan Strategi Tahun 2021

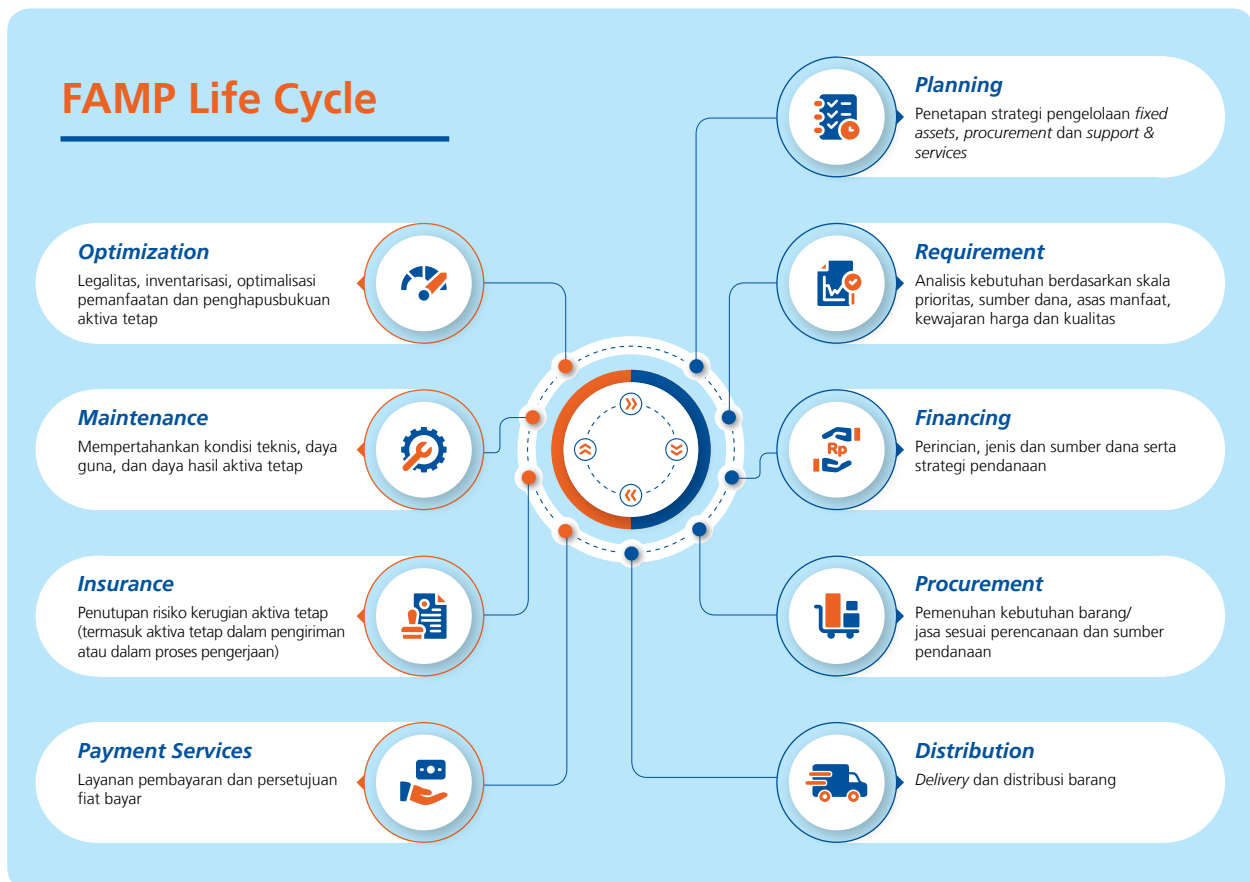
Pada tahun 2021, Direktorat Fixed Assets Management & Procurement (FAMP) telah menyelesaikan Arsitektur Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan "FAMP Bluebook 1.0" sebagai sebagai suatu rancangan strategis Direktorat FAMP. FAMP Bluebook 1.0 hadir sebagai *framework*, *roadmap* dan arah pengembangan yang terstruktur dan sistematis bidang pengelolaan aset tetap dan pengadaan untuk jangka waktu 2021-2025. Secara garis besar FAMP Bluebook disusun dengan ruang lingkup utama *Discover-Dream-Design*.

Melalui *headline* yaitu sebagai "**Strategic Support Fixed Assets & Procurement yang Fully Digital, Handal dan Efisien untuk BRI Group**" dan dengan *value proposition* "*The Excellence of Fixed Assets Management and Procurement*", Direktorat FAMP optimis mendukung pencapaian *Corporate Destination* BRI yaitu

mewujudkan BRI sebagai "*The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia & Champion of Financial Inclusion*" melalui BRIVolution 2.0.

Fokus Direktorat FAMP

Penyelenggaraan bidang tugas FAMP oleh Direktorat FAMP BRI difokuskan pada dua aspek utama: (1) Aspek *Fixed Assets Management & Procurement Policy* yang merupakan fokus Direktorat FAMP yang menitikberatkan pada penyediaan strategi, kebijakan dan tatakelola yang dilaksanakan oleh *Fixed Assets Management & Procurement Policy Division*; dan (2) Aspek *Procurement* yang merupakan fokus Direktorat FAMP yang menitikberatkan pada penyelenggaraan operasional pengadaan barang dan/atau jasa di BRI yang dilaksanakan oleh *Procurement & Logistic Operation Division*. Kedua aspek tersebut menjunjung tinggi *Good Corporate Governance* (GCG).



Mengacu kepada *strategic framework* Direktorat FAMP sesuai Arsitektur Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan “FAMP Bluebook 1.0”, bahwa penyelenggaraan bidang tugas FAMP adalah menerapkan konsep *supply chain management* yang terintegrasi dan terpadu melalui *FAMP Cycle Process*. *FAMP Cycle Process* terdiri dari beberapa tahapan fungsi yang saling berurutan, berhubungan dan membentuk satu mata rantai proses pengelolaan aset tetap dan pengadaan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.

Kinerja Tahun 2021

Kinerja Direktorat FAMP pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan

a. Pengelolaan Anggaran

Direktur FAMP bertanggungjawab mengelola anggaran investasi dan eksploitasi non teknologi informasi (Koordinator Anggaran). Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur FAMP berkolaborasi dengan Sub Koordinator Anggaran. Realisasi Anggaran Capex dan Opex Non IT yang dikelola selama tahun anggaran 2019-2021, yaitu:

Tabel Realisasi Anggaran Capex dan Opex Non IT

(Dalam Rp juta)

	2019		2020		2021	
	Realisasi	RKA	Realisasi	RKA	Realisasi	RKA
Capex	1.215.188	5.153.804	1.909.951	4.319.838	2.010.105	4.287.723
Opex	5.896.778	6.770.324	5.871.495	5.952.298	6.650.479	6.825.688
Total	7.111.965	11.924.129	7.773.446	10.272.136	8.660.584	11.113411

b. Cost Efisiensi Anggaran

Efisiensi merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Untuk itu, BRI selalu berupaya untuk melakukan *cost efficiency* yang merupakan salah satu penerapan dari strategi *value for money*. Pada tahun 2021, Direktorat FAMP dapat melaksanakan *cost efficiency*, dengan rata-rata sebesar 13,83 % atau sebesar Rp442,9 miliar (posisi September 2021).

Jenis Pengadaan	2019		2020		2021	
	% Cost Efficiency	Rp Miliar	% Cost Efficiency	Rp Miliar	% Cost Efficiency	Rp Miliar
Barang & Jasa	16,46	1.170,6	10,81	439,5	18,98	1.769,40
Fasilitas Penunjang Gedung	17,25	4,4	16,85	3,4	32,73	24,68
Total		1.175		442,9		1.794,08

2. Kinerja Non Keuangan

Program kerja tahun 2021 yang telah dilaksanakan oleh Direktorat FAMP adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Arsitektur Direktorat Fixed Assets Management & Procurement.
- Dalam rangka mendorong penggunaan *Platform* PaDi (Pasar Digital UMKM Indonesia) yang merupakan aplikasi pasar digital yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN, unit kerja BRI di seluruh lini telah berperan aktif dalam menggunakan PaDi. Sebagai alat bantu penyediaan barang dan jasa, nilai transaksi penggunaan PaDi oleh unit kerja BRI pada posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp498,9 miliar yang naik 16,6% YoY.
- Mendukung implementasi *The New Fixed Assets Information System*, yaitu SAP-FAM sesuai *Roadmap* Tranformasi BRI.
- Pengembangan digitalisasi bisnis proses pengelolaan aset tetap dan pengadaan di Direktorat FAMP.
- Mengoptimalkan peran dan fungsi koordinator pengelola anggaran untuk meningkatkan program efisiensi anggaran Opex melalui pelaksanaan program efisiensi di seluruh lini unit kerja BRI, antara lain efisiensi penggunaan listrik, air, BBM, dan kertas.
- Pengawasan dan Pengadaan *Holding UMi*.
- Pembangunan Menara BRILian.

Strategi 2022

Dalam rangka penerapan "**Strategic Support Fixed Assets & Procurement yang Fully Digital, Handal dan Efisien untuk BRI Group**" dibutuhkan *Strategic Initiatives* yang akan dilaksanakan Direktorat FAMP untuk 2022 sebagai berikut:

1. *Development* aplikasi penunjang FAMP, antara lain *planning* dan *budgeting*, *e-procurement*, *dashboard* FAMP dan asuransi.
2. Penerapan Konsep ESG di dalam pengelolaan *Fixed Assets*.
3. Perencanaan Penyediaan Rumah Dinas Pejabat BRI Dalam Rangka Optimalisasi *Assets*.
4. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan (PJB)/*Sustainable Procurement*.
5. Pembangunan BRILian Club Sisingamangaraja.

Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Komite Pengadaan Barang dan Jasa adalah Komite di Kantor Pusat yang bertugas dan berwenang untuk melakukan evaluasi dan memberi keputusan atas permohonan pelaksanaan dan hasil dari suatu pengadaan dengan nilai tertentu. Berikut Dasar Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: 656-DIR/PPM/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Komite Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Rapat Komite

Nama Komite Pengadaan	Nilai Pengadaan (Rp)	Jumlah Pengadaan
Komite Pengadaan I	2.589.662.772.478	6
Komite Pengadaan II	433.400.000.000	3
Komite Pengadaan III	1.391.134.981.937	28
Komite Pengadaan IV	2.242.059.347.691	156
Total	6.656.257.102.106	193

Posisi: 31 Desember 2021

Penerapan ISO



ISO 37001:2016

ISO 37001:2016

Anti Bribery Management System,
the scope certification of Fixed Asset Management
Directorate (Register No.SAB 00019).



ISO 9001: 2015

Provision of Establishment Strategy and Policy
(Incl. Vendor Mgt.) (Register No.10156337).

ISO 9001: 2015

Provision of Cost Estimation Processes (Register
No.10162162).

» Network & Services

Strategi utama BRI dalam pengelolaan jaringan kerja 2021 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2021 BRI fokus pada *Distribution Channel Transformation* melalui beberapa *strategic inisiatif* yaitu:

1. End-To-End Branch Operating Model

Merupakan perubahan bisnis model operasional Unit Kerja secara *end to end*, yaitu melakukan perubahan pola Unit Kerja dari “*Services*” ke “*Sales*” yaitu dengan memperkenalkan formasi jabatan baru di Unit Kerja, Universal Banker. Universal Banker merupakan peran gabungan antara Teller, Customer Services dan Relationship Manager (RM). Di tahun 2021, telah diimplementasikan peran Universal Banker sebanyak **2.619 orang** dalam 539 Unit Kerja, 13 *Regional Office*. Diharapkan peran Universal Banker dapat meningkatkan *productivity* unit kerja dan menjawab kebutuhan nasabah yang semakin kompleks, *seamless*, dan dilayani secara *omni-channel*.

Di lain pihak, selain memperkenalkan peran Universal Banker, BRI juga berperan aktif untuk membantu nasabah melakukan migrasi transaksi dari Unit Kerja ke *Digital* atau *Remote Channel* dengan mengimplementasikan *New Machine Banking* diantaranya *Self Services Passbook Printing* (SSPP) di 40 Unit Kerja dan *Replacement Card Machine*

(RCM) di 42 Unit Kerja yang bertujuan untuk simplifikasi alur kegiatan yang telah ada sehingga mempercepat proses layanan sehingga dapat mengurai antrian di unit kerja operasional dan meningkatkan *customer experience*. Dengan diimplementasikan mesin-mesin tersebut, nasabah dapat secara aktif melakukan transaksi sederhana dan Unit Kerja dapat fokus kepada pemasaran bisnis.

2. Customize Branch Formats

Di tengah tantangan pandemi COVID-19, BRI terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan perbankan terbaik bagi nasabah. Melalui transformasi jaringan kantor, BRI bereksplorasi secara kreatif dalam menghadirkan berbagai format kantor baru (*new branch format*) untuk memberikan *experience* baru kepada nasabah, diantaranya *Community Branch* melalui BRIWork dan BRICafe. *Community Branch* dihadirkan untuk menangkap potensi *community* sekitar dengan menyesuaikan gaya hidup melalui konsep perbankan yang menyatu dengan *café*, *coworking space* maupun *merchant* ritel lainnya sehingga memberikan *experience* pelayanan perbankan yang nyaman dan modern bagi nasabah dan pengunjung.

Adapun beberapa Unit Kerja yang telah dilakukan perubahan format menjadi *Community Branch* (BRIWork dan BRICafe), diantaranya:



Kantor Kas BRIWork
Fisipol UGM



Kantor Kas BRICafe
Marina Bay Labuan Bajo



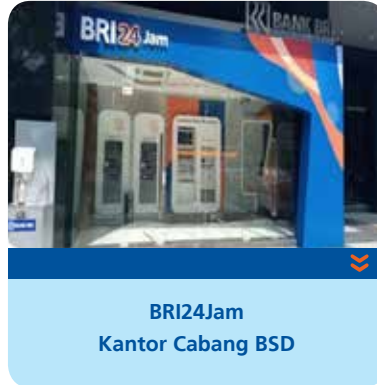
Kantor Kas
BRISmescoffee

Perubahan *branch format* ini bertujuan untuk meningkatkan *brand awareness* dan *brand image* BRI terhadap nasabah khususnya millennial dan masyarakat umum, dengan strategi *branding* kolaborasi yang tepat bersama universitas dan *coffeeshop* sehingga diharapkan kedepan dapat meningkatkan engagement nasabah dan pengunjung/komunitas tersebut dan berpotensi besar meningkatkan akuisisi nasabah.

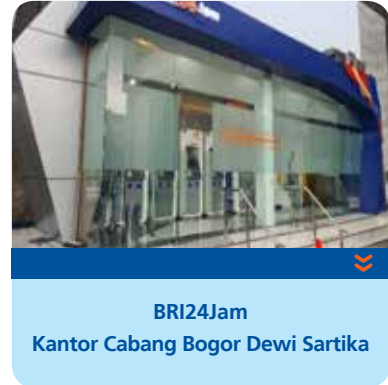
Selain *Community Branch*, BRI juga menghadirkan format *Smart Branch*, yaitu *Bank fully automated self-service* yang dapat diakses oleh nasabah selama 24 jam. *Smart Branch* dihadirkan untuk meningkatkan pelayanan perbankan dengan mengakselerasi teknologi digital sehingga membuat pelayanan lebih cepat dan mudah bagi nasabah. Konsep *Smart branch* menggunakan *digital sales & services* dengan menyediakan *remote RM* untuk melayani kebutuhan perbankan nasabah. Saat ini *Smart branch* telah hadir di 3 (tiga) unit kerja yaitu:



BRI24Jam
Kantor Cabang Bintaro



BRI24Jam
Kantor Cabang BSD



BRI24Jam
Kantor Cabang Bogor Dewi Sartika

Layanan BRI 24 Jam ini terdiri layanan pembukaan rekening, penggantian kartu nasabah, termasuk *complain handling* melalui video banking yang dapat dilayani selama 24 jam. Diharapkan dengan adanya layanan tersebut, nasabah dapat mengakses layanan perbankan selama 24 jam serta memberikan *experience* yang baru kepada nasabah terkait digitalisasi perbankan saat ini.

3. Automate & Digitize Business Processes

Menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat, BRI juga senantiasa melakukan automasi dan digitasi bisnis proses transaksi nasabah di Unit Kerja. Adapun perubahan bisnis proses dimaksud di antaranya simplifikasi proses bisnis dari sisi operasional UKO yaitu kegiatan di awal hari hingga rekonsiliasi akhir hari menjadi lebih efektif dan efisien.

Saat ini masih banyak proses operasional UKO yang dilakukan secara manual (konvensional) seperti Register O/U dan *Report Akhir Hari* yang ke depannya dilakukan secara digital sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu pekerja yang dapat dialihkan pada aktivitas sales yang memiliki *added value*. Selain itu, juga dilakukan perubahan proses bisnis pada penerbitan Kartu Debit dan transaksi di UKO BRI dengan menggunakan *One Time Password* (OTP). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan *experience* dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Dengan adanya digitalisasi proses bisnis operasional UKO tersebut diharapkan dapat meningkatkan *User Experience* nasabah dan mendukung konsep *paperless* yang mendorong efisiensi di UKO.

Strategi dan Program Kerja Service & Contact Center BRI

BRI senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh nasabah yang berbasis *Customer Centric* dengan melakukan revitalisasi standar layanan dan peningkatan performa layanan *Contact BRI*. Dengan langkah tersebut, diharapkan peringkat kualitas layanan BRI di Industri perbankan nasional akan terus meningkat.

Untuk memonitor dan mengetahui kualitas Layanan tersebut, BRI bekerjasama dengan lembaga independen untuk melakukan pengukuran secara objektif dengan menggunakan *variable* pembandingan, yaitu layanan yang dilakukan oleh kompetitor

di industri perbankan. Hasil yang diperoleh pada Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2021 by Marketing Research Indonesia (MRI):
 - Peringkat 2 dari 23 Performa Convenient Branch Experience.
 - Peringkat 2 dari 11 bank untuk Pelayanan Prima Contact Center.
 - Peringkat 2 dari 24 bank untuk Performa Overall E-banking.
 - Peringkat 3 dari 23 Bank untuk Performa Mobile Banking.
 - Peringkat 3 dari 24 bank untuk Internet Banking.
 - Peringkat 3 dari 16 bank untuk Overall Digital Channel.
2. Satisfaction, Loyalty, and Engagement (SLE) 2021 by Marketing Research Indonesia (MRI):
 - Peringkat 1 dari 7 bank untuk Customer Satisfaction Mobile Banking Bank BUKU IV.
 - Peringkat 2 dari 7 bank untuk Customer Satisfaction ATM Bank BUKU IV.
3. Customer Experience Service Quality Index (CX-SQI) 2021 by CARRE Peringkat Diamond.
4. Penghargaan Bidang Contact BRI sebagai berikut:
 - Top brand award kategori Call Center peringkat ke 4.
 - Contact Center World (CCW) dengan kategori:
 - Best Recruitment Campaign (Outsourced) Gold Winner.
 - Best Sales Campaign - Inbound or Outbound (Internal) Silver Winner.
 - Best Home/Remote Agent Program (Internal) Silver Winner.
 - Best Project Manager (Internal) Silver Winner.
 - Best Analyst (Outsourced) Silver Winner.
 - Best Contact Center Design Award (Internal) Bronze Winner.
 - Best Green Contact Center (Internal) Bronze Winner.
 - Best Green Contact Center (Internal) Bronze Winner.
 - Best Incentive Scheme (Internal) Bronze Winner.
 - Best Outbound Campaign (Internal) Bronze Winner.
 - Contact Center World (CCW) Region Asia Pacific dengan kategori:
 - Best Recruitment Campaign Gold Winner.
 - Best Green Contact Center Bronze Winner.

- Best Home/Remote Agent Program Silver Winner.
- Best Project Manager Silver Winner.
- Best Analyst Silver Winner.
- Best Contact Center Design Award Bronze Winner.
- Best Green Contact Center Bronze Winner.
- Best Incentive Scheme Bronze Winner.
- Best Outbound Campaign Bronze Winner.
- Best Sales Campaign - Inbound Or Outbound Silver Winner.
- Indonesia Contact Center Award (ICCA) dengan kategori :
 - Best Manager Platinum Winner.
 - Best Manager Gold Winner.
 - Best Desk Control Gold Winner.
 - Best Smart Team Bronze Winner.
 - Best Agent Digital Media Sosial Bronze Winner.
 - Best Agent Digital Email Bronze Winner.
 - Best Team Leader Digital Bronze Winner.
 - Best Of The Best Team Leader Digital Bronze Winner.
 - Best Desk Control Bronze Winner.
 - Best Backoffice Bronze Winner.
 - Best Quality Assurance Silver Winner.
 - Best Agent Digital Email Silver Winner.
 - Best Team Leader Inbound Silver Winner.
 - Best Team Leader Digital Silver Winner.

Strategi dan Program Kerja BRILink Network BRI

Pada Tahun 2021, BRI fokus pada perbaikan kualitas dan peningkatan produktivitas AgenBRILink. Posisi 31 Desember 2021, terdapat 503.151 AgenBRILink yang tersebar di 55ribu desa di seluruh Indonesia dan 17 ribu BUMDes telah menjadi AgenBRILink, serta hadir di 7.600 pasar tradisional di Indonesia.

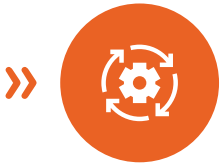
Dengan adanya Agen Juragan dan Jawara sebesar 54.219 Agen mampu meningkatkan jumlah transaksi finansial dan sales volume. Adapun jumlah transaksi finansial AgenBRILink tumbuh 27,61% dari 728 juta transaksi menjadi 929 transaksi dengan sales volume mencapai Rp1.144 triliun.

Dari transaksi yang telah dilakukan AgenBRILink, BRI memperoleh fee base income sebesar Rp1,3 triliun, tumbuh 18,18% dari Rp1,1 triliun posisi Desember 2020. Dalam perolehan dana murah (CASA) AgenBRILink berhasil menghimpun dana sebesar Rp19,4 triliun, tumbuh 45,86% dari Rp13,3 triliun posisi Desember 2020. Kemajuan teknologi membuat BRILink terus melakukan inovasi dan terobosan baru, sebagai berikut:

1. Implementasi EDC Android (MPOS)

EDC berbasis OS Android dengan dukungan aplikasi BRILink Mobile sebagai alat transaksi yang lebih canggih bagi AgenBRILink untuk melayani kebutuhan keuangan dan perbankan masyarakat. Pada EDC Android (MPOS) tersebut terdapat fitur-fitur BRILink terupdate yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi keuangan.
2. Penerapan Teknologi Chips (NSICCS) pada EDC BRILink

Pada versi terbaru (NSICCS), transaksi pada mesin EDC akan menggunakan data Chip untuk kartu ATM dan/ atau kartu Debet yang telah berchip. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan pada saat bertransaksi menggunakan EDC BRILink.
3. Melakukan partnership initiatives dengan:
 - a. Pegadaian dan PNM (Permodalan Madani) pada semen ultra mikro. Pembiayaan tersebut bertujuan untuk memperluas jalur distribusi produk dan layanan ultra mikro melalui jaringan AgenBRILink yang tersebar di seluruh Indonesia.
 - b. Bank Raya dalam memberikan fasilitas dana talangan bagi AgenBRILink. Fasilitas dana talangan tersebut bertujuan untuk menambah modal Agen dalam meningkatkan usahanya. Fasilitas dana talangan tersebut dibuka untuk kelas Agen Juragan dan Jawara.
 - c. Pertashop, yaitu kerjasama BRI dengan pertamina retail yaitu memberikan fasilitas pertashop bagi AgenBRILink yang sesuai dengan persyaratan.
 - d. SRC, yaitu kerjasama BRI dengan SRC (Sampoerna Retail Community) dengan akuisisi panel SRC menjadi AgenBRILink.
 - e. Koperasi TNI dan POLRI, yaitu kerjasama akuisisi koperasi TNI dan POLRI sebagai AgenBRILink.



Tata Kelola Perusahaan

“Mengawal Transformasi *Culture* dan Digital yang dijalankan pada tahun 2021, BRI semakin mengukuhkan Peran Tata Kelola sebagai dasar dalam melakukan pengembangan dan pelaksanaan bisnis perusahaan melalui peningkatan *awareness* pekerja, penyempurnaan sistem, dan pengkinian kebijakan. Peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* BRI memperoleh pengakuan dari berbagai pihak sehingga BRI mendapatkan peringkat sebagai *Most Trusted Company*”





Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga perusahaan publik, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) BRI merupakan tolak ukur dasar yang digunakan oleh Pemegang Saham dalam melakukan penilaian kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan penerapan GCG menjamin keberlangsungan perusahaan dan menciptakan nilai positif bagi perusahaan (*company's value*).

Sejalan dengan arah perusahaan untuk melakukan Transformasi *Culture* dan Transformasi Digital, BRI juga mengukuhkan peran Tata Kelola sebagai dasar dalam melakukan pengembangan dan pelaksanaan bisnis perusahaan. Peningkatan penerapan *Good Corporate Governance* mencakup pengkinian kebijakan, penyempurnaan sistem serta peningkatan *awareness* pekerja.

» Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan



» Komitmen

Implementasi GCG di BRI diterapkan berdasarkan prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Untuk efektivitas implementasi GCG BRI, diukur dari kualitas *governance system* yang mencakup aspek *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* yang dimiliki oleh perusahaan.

Governance Structure diukur berdasarkan kecukupan struktur dan infrastruktur GCG agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Governance Process dinilai berdasarkan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan. *Governance Outcome* diukur berdasarkan pada kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan yang merupakan hasil dari penerapan prinsip tata kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola.

Pada Tahun 2021, BRI melakukan beberapa peningkatan terkait praktik *good corporate governance* diantaranya penyempurnaan kebijakan *whistleblowing system*, *surveillance* ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan penyempurnaan sistem seperti aplikasi *whistleblowing system* terintegrasi dengan KPK, *enhancement* GCG Online System 2.0 dan Aplikasi Sistem Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan *Company tree*.

» Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan prinsip-prinsip GCG dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
7. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
9. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
10. Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
11. Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
13. Surat Edaran OJK No. 13/SE.OJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
14. Peraturan Materi BUMN No.PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
15. Peraturan Materi BUMN No.PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
16. Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-2/MBU/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern.

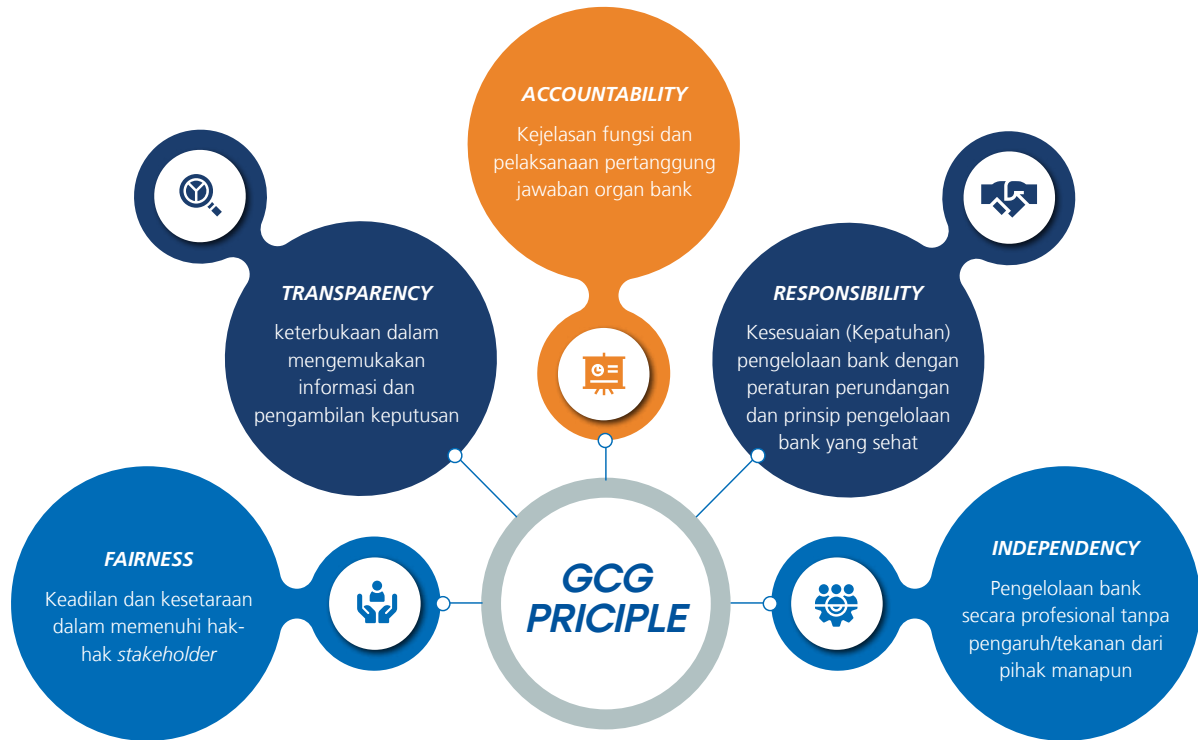
BRI juga mengadopsi standar terbaik serta pedoman dan *best practice* terkini dalam meningkatkan kualitas mutu penerapan GCG antara lain:

1. Prinsip-prinsip GCG oleh *Organization for Economic Cooperation and Development*.
2. ASEAN Corporate Governance Scorecard.
3. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance.
4. *Principles for Enhancing Corporate Governance* oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

» Kerangka Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Penerapannya

BRI menerapkan prinsip-prinsip GCG guna meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan dalam rangka tata kelola yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:



Perumusan prinsip-prinsip GCG untuk mendukung aktivitas usaha berkelanjutan BRI dijabarkan sebagai berikut:

Transparansi

1. Bank mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
2. Bank mengungkapkan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di antaranya visi dan misi Bank, nilai-nilai/sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham pengendali, struktur organisasi, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pelaksanaan GCG serta kepatuhan Bank.
3. Prinsip keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban informasi rahasia Bank dan Nasabah sesuai peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas

1. Bank menetapkan sasaran usaha jangka panjang dan jangka pendek yang dipertanggungjawabkan kepada *shareholders* dan *stakeholders*.
2. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan pertanggungjawaban keuangan dalam RUPS.
3. Bank menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan berlaku kepada otoritas pengawas Bank dan *stakeholders* lainnya sesuai ketentuan berlaku.
4. Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan organ perusahaan serta jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi dan misi Bank.
5. Bank memastikan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.

6. Bank memastikan adanya struktur, sistem dan SOP yang dapat menjamin bekerjanya mekanisme *check and balance* dalam pencapaian visi dan misi Bank.
7. Bank memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.

Tanggung Jawab

1. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan internal Bank.
2. Bank memelihara kelestarian alam melalui kebijakan perkreditan dan kebijakan lain yang mendukung terpeliharanya sumber daya alam.
3. Bank bertindak sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*) melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Independensi

1. Bank menghindari dominasi dari pihak manapun, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas benturan kepentingan dan segala pengaruh atau tekanan sehingga bertindak objektif.
2. Bank melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan internal Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan Kesetaraan

1. Bank memberikan perilaku yang wajar dan setara kepada *stakeholders* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Bank.
2. Bank memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta adanya akses keterbukaan informasi.

Tujuan Implementasi Tata Kelola Perusahaan

BRI terus berkomitmen untuk menerapkan GCG yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Tujuan penerapan GCG adalah untuk:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan melalui kinerja yang signifikan.
2. Memberikan pedoman bagi seluruh insan BRI dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi Perusahaan.
3. Memberikan kepercayaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan bahwa Perusahaan dijalankan dan diawasi secara profesional.
4. Mendukung penetapan kebijakan serta pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
5. Mewujudkan terciptanya *good corporate citizen*.

Monitoring Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Monitoring implementasi GCG Bank BRI dilakukan oleh beberapa organ perusahaan diantaranya:

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite di bawah Dewan Komisaris, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Komite Audit

Komite dibawah Dewan Komisaris, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas serta fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal (*internal control system*), memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal, independensi dan kualitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab pengawasannya terhadap pelaksanaan kebijakan nominasi dan remunerasi pada setiap tingkatan organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris merupakan organ yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan Perseroan. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Satuan Kerja Kepatuhan

Memiliki fungsi untuk membantu Direktur yang membawahkan Satuan Kerja Kepatuhan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Satuan Kerja Audit Intern

SKAI memiliki fungsi untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance*.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Manajemen Risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan *return* terhadap risiko. Skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, membuat BRI harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal, khususnya dalam hal terkait keterbukaan Informasi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui pelaporan kepada instansi pemerintahan dan pengumuman dalam website serta media cetak (apabila diwajibkan), organisasi pelaksanaan RUPS.

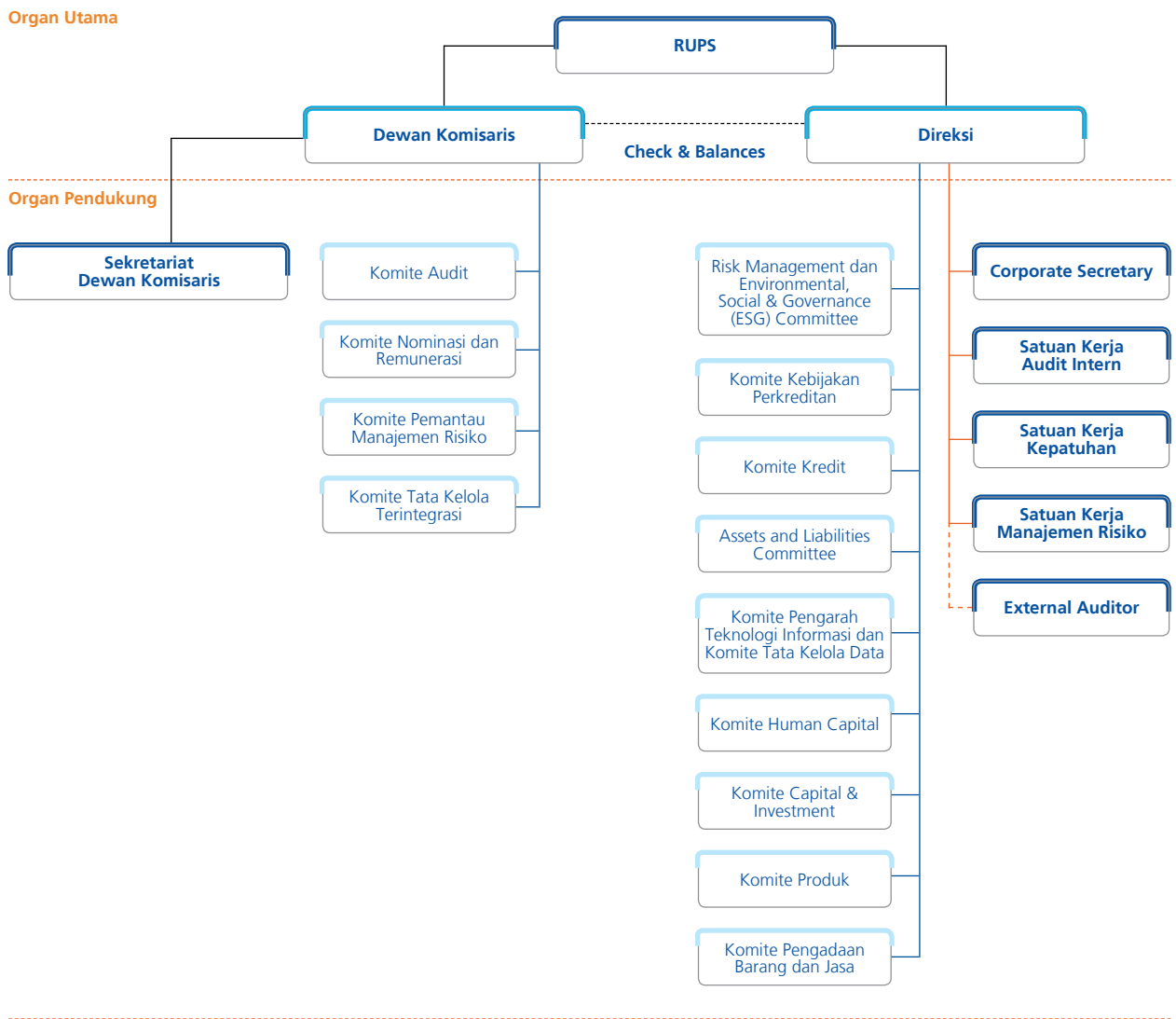
Komite di bawah Direksi

Ketentuan lebih rinci terkait Komite dibawah Direksi tertuang dalam pedoman dan tata tertib kerja komite Direksi dan akan dibahas dalam bab tersendiri dalam laporan tahunan ini.

1. Asset and Liability Committee (ALCO)
2. Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee
3. Komite Kredit
4. Komite Capital & Investment
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi & Komite Tata Kelola Data
7. Komite Pengadaan Barang & Jasa
8. Komite Human Capital
9. Komite Produk

» Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan



Governance Soft Structure

Governance soft structure yang dimiliki Bank BRI antara lain:

1. Anggaran Dasar No. 4 tanggal 06 Oktober 2021 telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 07 Oktober 2021.
2. Surat Edaran Direksi No: SE.22-DIR/KPD/05/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pengelolaan Kebijakan dan Prosedur
3. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.65-DIR/DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Kode Etik BRI.
4. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris.
5. Surat Keputusan Direksi No. B.299-DIR/SKP/04/2020 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Direksi.
6. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 11-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Audit.
7. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Pemantau Manajemen Risiko.
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 13-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi.
9. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 14-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Tata Kelola Terintegrasi.
10. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 02-KOM/02/2020 dan No. 01-DIR/KPT/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
11. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 06-KOM/BRI/07/2015 dan No. S.339-DIR/DKP/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
12. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 09-KOM/BRI/11/2017 dan No. S.1023-DIR/KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Kebijakan Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
13. Surat Keputusan Direksi Nomor KB.01-DIR/MAT/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Pengelolaan Aktiva Tetap dan Logistik PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
14. Surat Edaran Direksi No. SE.65-DIR/KEP/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang *Whistleblowing System*.
15. Surat Edaran Direksi No. SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Ketentuan Anti Penyusapan dan Pengendalian Gratifikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
16. Surat Edaran Direksi No. SE.18-DIR/MOP/03/2020 tanggal 20 Maret 2020 perihal Strategi Anti *Fraud* BRI.
17. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 02-KOM/BRI/05/2012 dan No. S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
18. Surat Keputusan Direksi No. S.297-DIR/CDS/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Bank.
19. Surat Edaran Direksi No: SE.78-DIR/PPM/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Rencana Bisnis Bank
20. Surat Keputusan No. S.296-DIR/CDS/03/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Kebijakan Umum Rencana Bisnis Bank PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
21. Surat Keputusan Direksi No. B.299-DIR/SKP/04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
22. Surat Keputusan Direksi No. B.242-DIR/SKP/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Rapat Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham perusahaan. Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

Saham BRI terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:

1. Saham Seri A Dwiwarna
Saham Seri A Dwiwarna dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun.
2. Saham Seri B.
Saham Seri B dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

Hak Pemegang Saham

Pemegang saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara. Kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna tersebut memberikan hak istimewa kepada pemerintah sebagai pemegang saham utama sebagai berikut:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Persetujuan perubahan permodalan.
 - c. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Persetujuan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan asset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.

- g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain.
 - h. Persetujuan penggunaan laba.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mencalonkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
 3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
 4. Hak untuk meminta akses data dan dokumen perusahaan, dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan.

Di luar dari hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tersebut, Pemegang Saham Seri A dan Pemegang Saham Seri B memiliki hak yang sama sepanjang tidak diatur lain oleh Anggaran Dasar yaitu:

1. Menghadiri RUPS baik secara langsung maupun mealui perwakilan, menyampaikan pendapat dan/atau pengambilan keputusan. Masing-masing pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara dan mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
2. Menerima informasi terkait BRI yang akurat dan tepat waktu dengan prinsip kesetaraan informasi terhadap seluruh pemegang saham.
3. Menerima pembagian dividen dan pembagian keuntungan BRI dalam bentuk lainnya sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya.
4. Menerima pembagian sisa hasil likudasi Bank dalam hal terjadinya kepailitan.
5. Meminta diselenggarakannya RUPS oleh seorang atau lebih pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, atas dasar kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
6. Memperoleh penjelasan lengkap dan Informasi yang akurat mengenai persyaratan prosedur penyelenggaraan RUPS.
7. Mengajukan gugatan terhadap Perusahaan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
8. Meminta kepada Perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan/aksi korporasi yang merugikan pemegang saham atau Perseroan.
9. Memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS sepanjang berkaitan dengan mata acara Rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

1. Seluruh Pemegang Saham harus dapat:
 - a. Memisahkan kepemilikan harta perusahaan dengan kepemilikan harta pribadi.
 - b. Memisahkan fungsinya sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.
2. Pemegang Saham Pengendali harus dapat:
 - a. Memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang Pemegang Saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
 - c. Mengupayakan akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan dapat dilakukan secara transparan, dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa perusahaan.
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Serta Pelaksanaannya

Pengungkapan informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 02-KOM/BRI/02/2020 dan NOKEP 01-DIR/KPT/02/2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan (dhi. Divisi Sekretariat Perusahaan) mengenai kepemilikan saham dan setiap perubahannya atas saham.
2. Informasi dilaporkan kepada Divisi Sekretariat Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan.
3. *Corporate Secretary Division* melaporkan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada OJK selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham tersebut.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan.

Pembelian/penjualan saham Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian /Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Pelaporan
1.	Kartika Wirdjoatmodjo	Komisaris Utama	Pembelian	0	178.300	4.117	178.300	11 Okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
2.	Nicolaus T.B. Harjanto	Komisaris	Pembelian	814.861	44.300	3.661	849.161	15 Okt 2021	Investasi pribadi	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
3.	Nicolaus T.B. Harjanto	Komisaris	Pembelian	629.961	184.900	4.117	814.861	11 Okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
4.	Hadiyanto	Komisaris	Pembelian	625.800	184.900	4.117	810.700	11 Okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
5.	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Pembelian	0	160.400	4.117	160.400	11 Okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
6.	Sunarso	Direktur Utama	Pembelian	1.353.656	456.700	4.117	1.810.356	11 Okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
7.	Sunarso	Direktur Utama	Pembelian	1.008.000	345.656	3.400	1.353.656	27 Sep 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B.0025-CSC/CSM/CGC/09/2021
8.	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Pembelian	404.957	411.000	4.117	815.957	11 Okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
9.	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Pembelian	329.200	75.757	3.400	404.957	16 Sep 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B.0025-CSC/CSM/CGC/09/2021
10.	Indra Utoyo	Direktur	Pembelian	2.123.692	388.100	4.117	2.511.792	11 okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
11.	Indra Utoyo	Direktur	Pembelian	1.726.400	397.292	3.400	2.123.692	21 Sept 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B.0025-CSC/CSM/CGC/09/2021
12.	Handayani	Direktur	Penjualan	2.462.400	3.400	4.210	2.459.000	2 Nov 2021	-	Surat No.B.0043-CSC/CSM/CGC/11/2021
13.	Handayani	Direktur	Pembelian	2.074.300	388.100	4.117	2.462.400	11 okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
14.	Handayani	Direktur	Pembelian	1.564.500	509.800	3.400	2.074.300	27 Sept 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B.0025-CSC/CSM/CGC/09/2021
15.	Supari	Direktur	Pembelian	1.535.414	388.100	4.117	1.923.514	11 Okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
16.	Supari	Direktur	Pembelian	1.248.400	287.014	3.400	1.535.414	20 Sept 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B.0025-CSC/CSM/CGC/09/2021



No.	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian /Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Pelaporan
17.	A. Solichin Lutfiyanto	Direktur	Pembelian	2.233.170	388.100	4.117	2.621.270	11 Okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
18.	A. Solichin Lutfiyanto	Direktur	Pembelian	1.819.400	413.770	3.400	2.233.170	15 Sept 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B.0025-CSC/CSM/CGC/09/2021
19.	Agus Sudiarto	Direktur	Pembelian	363.100	388.100	4.117	751.200	11 Okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
20.	Agus Sudiarto	Direktur	Pembelian	362.300	800	4.100	363.100	6 Okt 2021	Investasi Pribadi	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
21.	Agus Sudiarto	Direktur	Pembelian	294.600	67.700	3.400	362.300	20 Sept 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B0025-CSC/CSM/CGC/09/2021
22.	Agus Noorsanto	Direktur	Pembelian	511.741	388.100	4.117	899.841	11 Okt 2021	Tantiem/Insentif Kinerja 2020	Surat No.B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
23.	Agus Noorsanto	Direktur	Pembelian	383.900	127.841	3.400	511.741	27 Sep 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B.0025-CSC/CSM/CGC/09/2021
24.	Agus Winardono	Direktur	Pembelian	357.781	157.200	4.410	509.981	24 Des 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
25.	Agus Winardono	Direktur	Pembelian	290.181	62.600	4.410	352.781	2 Nov 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
26.	Agus Winardono	Direktur	Pembelian	158.781	131.400	2.240	290.181	11 Okt 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
27.	Agus Winardono	Direktur	Pembelian	129.100	29.681	3.400	158.781	20 Sept 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B0025-CSC/CSM/CGC/09/2021
28.	Amam Sukriyanto	Direktur	Pembelian	487.054	50.400	4.410	537.454	24 Des 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
29.	Amam Sukriyanto	Direktur	Pembelian	374.654	112.400	2.240	487.054	2 Des 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
30.	Amam Sukriyanto	Direktur	Pembelian	312.054	62.600	4.410	374.654	2 Nov 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
31.	Amam Sukriyanto	Direktur	Pembelian	173.754	138.300	2.240	312.054	12 Okt 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
32.	Amam Sukriyanto	Direktur	Pembelian	129.500	44.254	3.400	173.754	27 Sept 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B.0025-CSC/CSM/CGC/09/2021

No.	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi	Jumlah Pembelian /Penjualan	Harga Saham	Jumlah Saham Setelah Transaksi	Tanggal Transaksi	Tujuan Transaksi	Pelaporan
33.	Viviana Dyah Ayu R.K.	Direktur	Pembelian	423.100	50.400	4.410	473.500	24 Desember 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
34.	Viviana Dyah Ayu R.K.	Direktur	Pembelian	310.700	112.400	2.240	423.100	24 Nov 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
35.	Viviana Dyah Ayu R.K.	Direktur	Pembelian	248.100	62.600	4.410	310.700	2 Nov 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
36.	Viviana Dyah Ayu R.K.	Direktur	Pembelian	109.800	138.300	2.240	248.100	12 Okt 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
37.	Viviana Dyah Ayu R.K.	Direktur	Pembelian	105.000	4.800	3.400	109.800	22 Sept 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B0025-CSC/CSM/CGC/09/2021
38.	Arga M. Nugraha	Direktur	Pembelian	345.085	29.400	4.410	374.485	24 Des 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
39.	Arga M. Nugraha	Direktur	Pembelian	238.285	106.800	2.240	345.085	2 Des 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
40.	Arga M. Nugraha	Direktur	Pembelian	201.885	36.400	4.410	238.285	2 Nov 2-21	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
41.	Arga M. Nugraha	Direktur	Pembelian	70.485	131.400	2.240	201.885	12 Okt 2021	Pelaksanaan hak ESA/ESOP pada saat status sebagai Pekerja	Surat No. B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021
42.	Arga M. Nugraha	Direktur	Pembelian	57.300	13.185	3.400	70.485	13 Sept 2021	Penebusan HMETD dalam rangka PMHMETD I Perseroan	Surat No. B0025-CSC/CSM/CGC/09/2021

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

BRI menjunjung tinggi kesetaraan perlakuan terhadap seluruh Pemegang Saham yang tercermin dari:

1. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah kepemilikan saham, dengan hak mengajukan RUPS bagi pemegang saham minimal 10%.
2. Penyediaan akses informasi yang sama melalui kanal Investor Relations antara lain melalui interaksi langsung pada acara *Public Expose, Non-deal Roadshow, Press Conference*, atau *1-on-1 Meeting, Conference Call*, dan Email, serta Dokumen yang tersedia pada *website* Perusahaan, Investor Relations, dan Bursa Efek Indonesia meliputi Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Audited, dan *Highlights* Kinerja Keuangan Perusahaan.
3. Jumlah Komisaris Independen di atas batas minimum Bank Indonesia, yaitu 6 (enam) orang Komisaris dari total 10 (sepuluh) orang Komisaris.

4. Pemegang saham memiliki kesetaraan untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank, diantaranya informasi kinerja Perseroan, laporan keuangan, dan pelaksanaan RUPS.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Hubungan dengan Pemegang saham diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dalam bagian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Segala komunikasi dengan para Pemegang Saham merupakan tanggung jawab juru bicara perusahaan. Semua Pemegang Saham harus mendapatkan perlakuan dan informasi yang sama (*equitable treatment*) secara tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direksi Nomor S.08-DIR/06/2014 tentang Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk.

Rapat Umum Pemegang Saham

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Tahapan penyelenggaraan RUPS Tahun 2021 telah memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau POJK No. 16/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagai berikut:

Tahapan	Kegiatan
Pemberitahuan kepada OJK	Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum pengumuman RUPS.
Pengumuman RUPS	Pengumuman RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perusahaan Terbuka.
Pemanggilan RUPS	Pemanggilan RUPS dilaksanakan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perusahaan Terbuka.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Pengumuman ringkasan risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah RUPS, dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perusahaan Terbuka.
Penyampaian Risalah RUPS	Risalah RUPS disampaikan kepada OJK selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah RUPS.

Ketentuan Kuorum

No.	Mata Acara	Kuorum Kehadiran	Kuorum Putusan
1	Pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan lebih dari 50 jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak.	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2	Persetujuan Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang Saham Independen dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang Saham Independen dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3	Perubahan terkait Direksi, Dewan Komisaris, Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan/atau Peningkatan modal ditempatkan dan disetor.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
4	Perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5	Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran Perseroan.	Dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.	Disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya/kuasanya yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
6	Di luar dari Mata Acara 1 s.d 5 tersebut di atas.	Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.	Disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

Tata Tertib RUPS

Tata tertib dalam pelaksanaan RUPS adalah sebagai berikut:

1. Tata tertib RUPS diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir dan dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Kesempatan diberikan kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara RUPS.
3. Pimpinan RUPS atau Direktur yang ditunjuk Pimpinan RUPS akan menjawab atau menanggapi pertanyaan/tanggapan dari pemegang saham.

4. Pemungutan suara dilakukan setelah semua pertanyaan/tanggapan selesai dijawab. Suara hanya dapat disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
5. Penghitungan dan/atau validasi suara dalam RUPS dilakukan oleh pihak Independen yaitu Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Upaya Mengajak Pemegang Saham Hadir dalam RUPS

BRI berupaya agar seluruh Pemegang Saham hadir dan menggunakan hak dan kewenangannya dalam RUPS. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS yang disampaikan secara tepat waktu melalui situs web Penyedia e-RUPS, situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan/atau Koran berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
2. Memaparkan materi dari setiap mata acara rapat sebagai referensi Pemegang Saham.
3. Membuka akses bagi Pemegang Saham untuk berkomunikasi dengan Perusahaan terkait penyelenggaraan RUPS melalui kontak yang tersedia di *website* Perusahaan.

Ketentuan Pemungutan Suara RUPS

Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Tata cara pemungutan suara dalam RUPS yaitu:

1. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir fisik, pemberian suara abstain dan suara tidak setuju dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan keputusan mata acara yang sedang dibicarakan.
2. Sedangkan untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, proses pemungutan suara dilakukan melalui eASY. KSEI (*e-Voting*). Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara yang sedang berlangsung sampai dengan waktu pemungutan suara berakhir, maka Pemegang Saham dianggap abstain.
3. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
4. Pimpinan RUPS/Pihak yang ditunjuk akan mengumumkan hasil pemungutan suara.
5. Setiap Pemegang Saham dapat diwakili pada RUPS oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS namun dilarang bertindak sebagai kuasa dalam pemungutan suara.

Pemungutan Suara RUPS Melibatkan Pihak Independen

Dalam penyelenggaraan RUPS, BRI tidak hanya mengundang para Pemegang Saham namun juga selalu melibatkan pihak Independen terutama dalam pemungutan dan perhitungan suara, yaitu Notaris Fathiah Helmi S.H dan PT Datindo Entrycom.

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

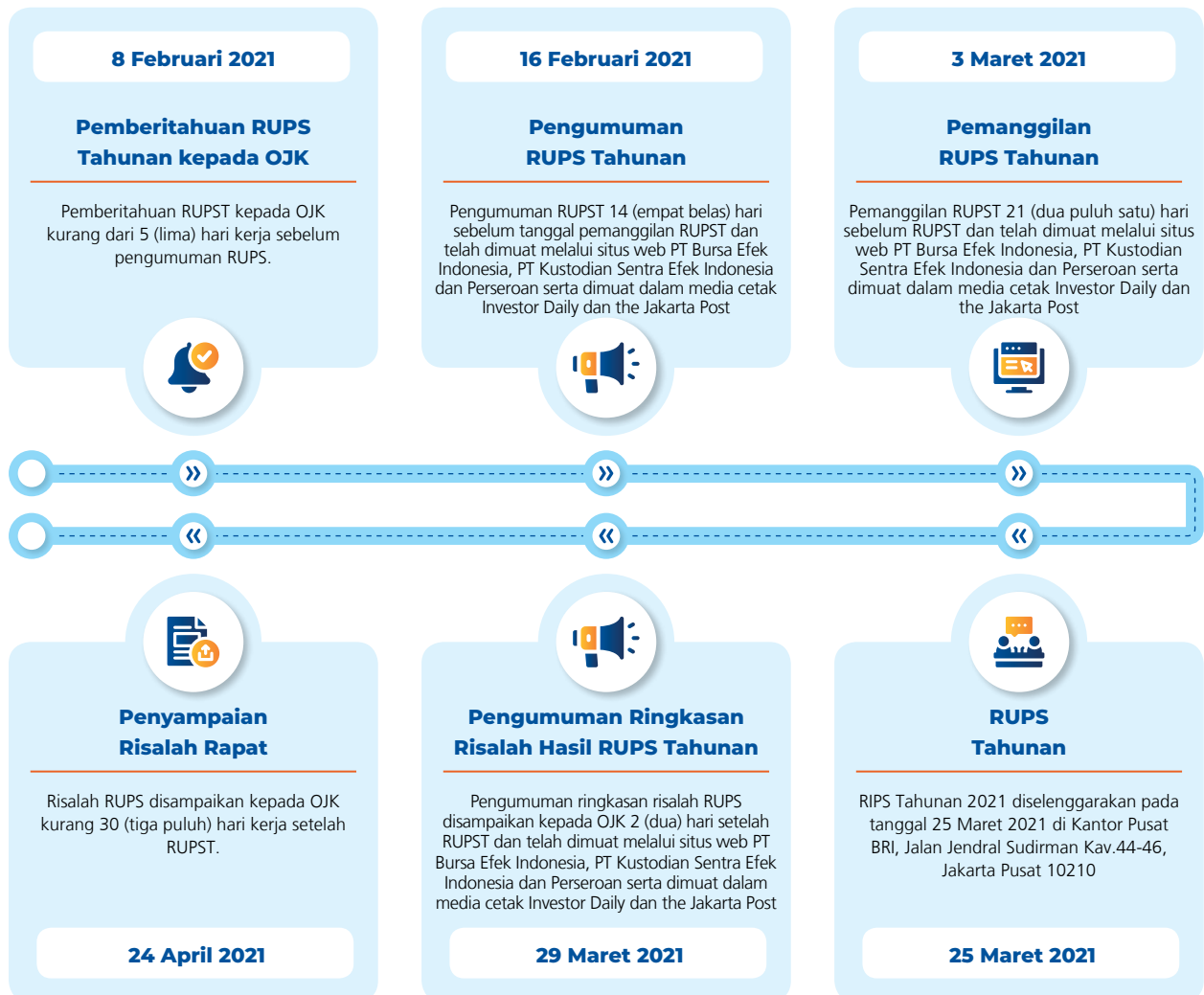
Ketentuan kuorum, pemungutan suara, pemberian kuasa dan tanya jawab serta bahan mata acara dan tata tertib RUPS diungkapkan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham sebelum penyelenggaraan RUPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2021 dan Realisasinya

RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2021 sesuai POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau POJK No. 16/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.R.74- DIR/SKP/CSM/02/2021 tanggal 08 Februari 2021.
2. Memuat iklan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham pada 2 (dua) surat kabar harian, berbahasa Indonesia dan berbahasa asing, yaitu harian Investor Daily dan The Jakarta Post, serta situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 16 Februari 2021.
3. Memuat iklan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham pada 2 (dua) surat kabar harian, berbahasa Indonesia dan berbahasa asing, yaitu harian Investor Daily dan The Jakarta Post, serta situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 3 Maret 2021.

Tahapan RUPS Tahunan 25 Maret 2021



Sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUPT), Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Selanjutnya, sesuai Pasal 42 ayat (2) UUPT, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran

Dasar Perseroan, keputusan Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa total saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 107.208.421.308 saham yang setara dengan 87,44% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mata Acara

Kesatu	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.
Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Ketiga	Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2021, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2020, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Keempat	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2021.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2021

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada RUPS Tahunan 2021 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir
1	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	✓	
2	Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	✓	
3	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	✓	
4	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	✓	
5	Hadiyanto**	Komisaris		✓
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	✓	
7	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	✓	
8	Zulnahr Usman	Komisaris Independen	✓	
9	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	✓	
10	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	✓	
11	Sunarso	Direktur Utama	✓	
12	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	✓	
13	Indra Utoyo	Direktur Digital & Teknologi Informasi	✓	
14	Handayani	Direktur Konsumer	✓	
15	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	✓	
16	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	✓	
17	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	✓	
18	Agus Winardono*	Direktur Human Capital	✓	
19	Amam Sukriyanto*	Direktur Bisnis Kecil & Menengah	✓	
20	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari*	Direktur Keuangan	✓	
21	Arga Mahanana Nugraha*	Direktur Jaringan & Layanan	✓	
22	Supari**	Direktur Bisnis Mikro		✓

Catatan:

*) Anggota Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**1) dari 10 Anggota Dewan Komisaris dan 1 dari 12 Anggota Direksi tidak hadir pada RUPS dalam rangka memenuhi tugas kedinasan.

Kehadiran Pihak Independen

No.	Nama	Keterangan
1	Fathiah Helmi, S.H.	Notaris, Kantor Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, S.H.
2	E. Agung Setiawati	Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom
3	Christophorus Alvin Kossim	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja

Perhitungan suara dilakukan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Kesempatan Mengajukan Pernyataan/Pendapat dan Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut.

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	106.935.406.618 suara atau 99,745% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	18.565.300 suara atau 0,017% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	254.449.390 atau 0,237% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedua	106.744.335.831 suara atau 99,567% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	201.163.343 suara atau 0,187% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	262.922.134 suara atau 0,245% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	96.863.139.775 suara atau 90,350% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	9.444.331.099 suara atau 8,809% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	900.950.454 suara atau 0,840% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	102.594.251.444 suara atau 95,696% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	4.567.849.274 suara atau 4,260% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	46.320.590 suara atau 0,043% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2021

Mata Acara Kesatu

Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00037/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/2021 tanggal 29 Januari 2021.
- Mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00087/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/2021 tanggal 19 Februari 2021.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, berikut pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Realisasi: Telah diselesaikan.

Mata Acara Kedua

Keputusan

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp18.654.752.774.721,48 sebagai berikut:

- Bagian 65% atau sebesar Rp12.125.589.303.568,96 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada Pemegang Saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham atau sekurang-kurangnya sebesar Rp6.881.395.089.544,00 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - Dividen untuk Tahun Buku 2020 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pemotongan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku.
- Bagian 35% atau sebesar Rp6.529.163.471.152,52 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Realisasi: Telah diselesaikan.

Mata Acara Ketiga

Keputusan

1. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Besarnya Tantiem/Insentif Kinerja untuk Tahun Buku 2020; dan
 - b. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun Buku 2021.

Realisasi: Telah diselesaikan.

Mata Acara Keempat

Keputusan

1. Menyetujui penunjukan Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Purwantono, Sungkoro & Surja (a member Firm of Ernst & Young Global Limited), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

Realisasi: Telah diselesaikan.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 dan Realisasinya

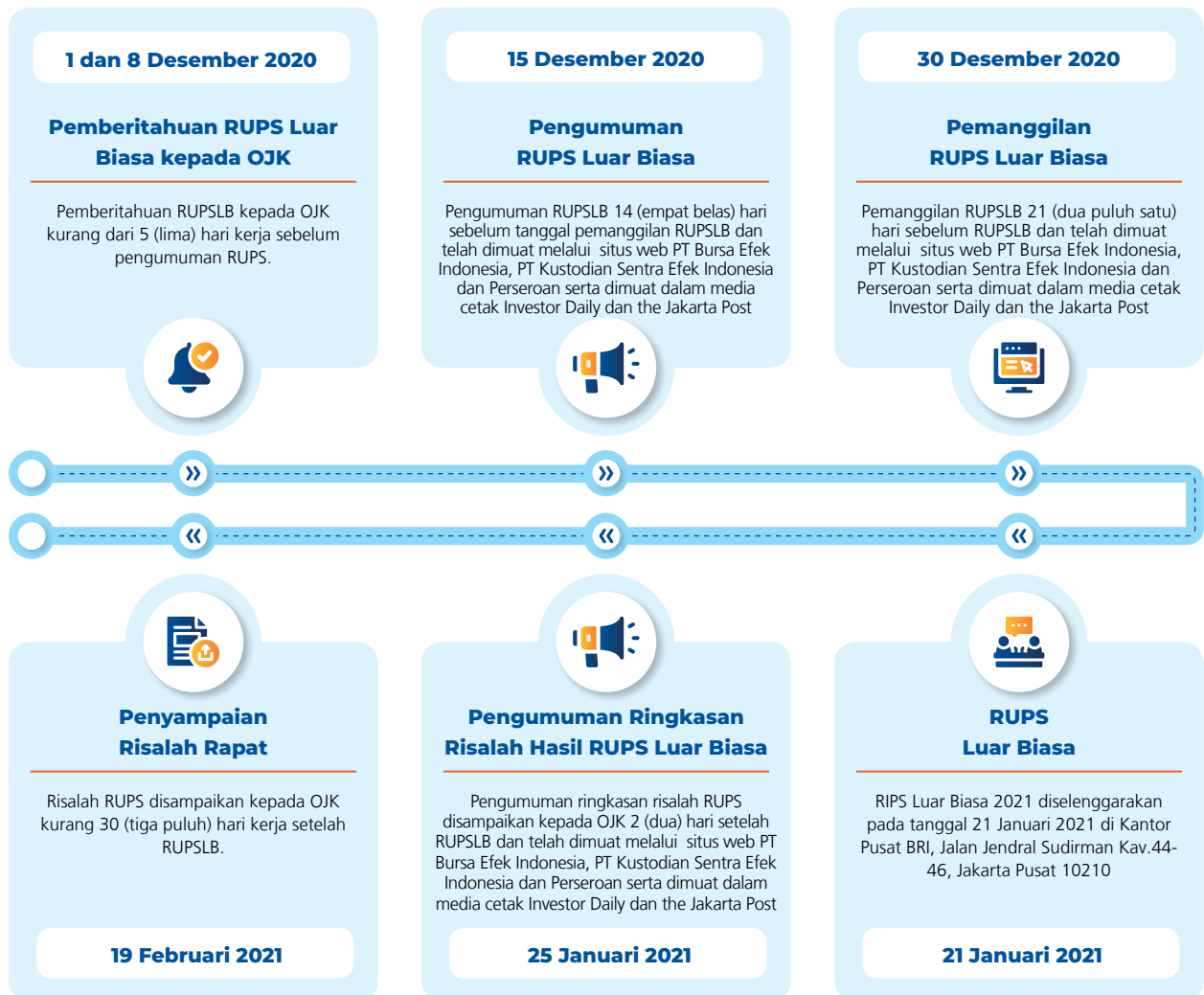
Pada tahun 2021, diselenggarakan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa, yaitu pada tanggal 21 Januari 2021, 22 Juli 2021 dan 7 Oktober 2021. RUPS Luar Biasa diselenggarakan sesuai POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau POJK No. 16/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

RUPS Luar Biasa Tanggal 21 Januari 2021

RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2021 sesuai POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan/atau POJK No. 16/POJK.04/2021 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.R.659-DIR/SKP/CSM/12/2020 tanggal 01 Desember 2020 dan Surat No.R.677-DIR/SKP/CSM/12/2020 tanggal 08 Desember 2020.
2. Memuat iklan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham pada 2 (dua) surat kabar harian, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, yaitu harian Investor Daily dan The Jakarta Post, serta situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 15 Desember 2020.
3. Memuat iklan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham pada 2 (dua) surat kabar harian, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, yaitu harian Investor Daily dan The Jakarta Post, serta situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2020.

Tahapan RUPS Luar Biasa 21 Januari 2021



Untuk Mata Acara 1, sesuai Pasal 25 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Untuk Mata Acara 2 sampai dengan Mata Acara 4, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK No.15/2020, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Untuk mata acara 5, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Selanjutnya, ketentuan pengambilan keputusan dalam rapat tiap-tiap mata acara adalah sebagai berikut:

Untuk Mata Acara 1, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK No. 15/2020, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Untuk Mata Acara 2 sampai dengan Mata Acara 4, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK No. 15/2020, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Untuk Mata Acara 5, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa total saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 106.167.139.580 saham yang setara dengan 86,59% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mata Acara

Kesatu	Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Kedua	Pengukenan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Ketiga	Pengukenan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.
Keempat	Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Treasuri (<i>Treasury Stock</i>).
Kelima	Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir
1	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	✓	
2	Ari Kuncoro	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	✓	
3	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	✓	
4	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	✓	
5	Hadiyanto	Komisaris	✓	
6	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	✓	
7	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	✓	
8	Zulnahr Usman	Komisaris Independen	✓	
9	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	✓	
10	R. Widyo Pramono*	Komisaris Independen		✓
11	Sunarso	Direktur Utama	✓	
12	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	✓	
13	Haru Koesmahargyo	Direktur Keuangan	✓	
14	Indra Utoyo	Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi	✓	
15	Handayani	Direktur Konsumer	✓	
16	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	✓	
17	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	✓	
18	Herdy Rosadi Harman	Direktur Human Capital	✓	
19	Priyastomo	Direktur Bisnis Kecil , Ritel dan Menengah	✓	
20	Ahmad Solichin Lutfiyanto***	Direktur Jaringan & Layanan	✓	
21	Supari	Direktur Bisnis Mikro	✓	

Catatan:

- *) 1 (satu) dari 10 (sepuluh) orang Anggota Dewan Komisaris tidak hadir pada Rapat.
- **) Seluruh Anggota Direksi yang berjumlah 11 (sebelas) orang hadir pada Rapat.
- ***) Direktur Pengganti Direktur Kepatuhan. Selama menjalankan fungsi kepatuhan, Direktur Pengganti Direktur Kepatuhan senantiasa memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran Pihak Independen

Pihak independen yang hadir dalam RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 yaitu:

No.	Nama	Keterangan
1	Fathiah Helmi, S.H.	Notaris, Kantor Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, S.H.
2	Soma M. Nur Huda	Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom

Perhitungan suara dilakukan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Kesempatan Mengajukan Pernyataan/Pendapat dan Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	79.116.235.568 suara atau 74,520% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	26.509.221.793 suara atau 24,969% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	541.682.219 suara atau 0,510% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kedua	106.107.956.665 suara atau 99,944% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.081.500 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	58.101.415 suara atau 0,054% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	106.107.956.365 suara atau 99,944% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.081.500 suara atau 0,001% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	58.101.715 suara atau 0,054% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	81.403.454.567 suara atau 76,674% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	24.569.728.294 suara atau 23,142% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	193.956.719 suara atau 0,182% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kelima	76.711.186.088 suara atau 72,255% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	28.753.137.745 suara atau 27,082% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	702.815.747 suara atau 0,661% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tanggal 21 Januari 2021

Mata Acara Kesatu
<p>Keputusan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain dalam rangka penyesuaian dengan POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang perubahannya sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rapat. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat. Kuasa dan wewenang tersebut termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, beserta mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. <p>Realisasi</p> <p>Telah diselesaikan.</p>
Mata Acara Kedua
<p>Keputusan</p> <p>Menguukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.</p> <p>Realisasi</p> <p>Telah diselesaikan.</p>
Mata Acara Ketiga
<p>Keputusan</p> <p>Menguukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor: PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya.</p> <p>Realisasi</p> <p>Telah diselesaikan.</p>

Mata Acara Keempat

Keputusan

- Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham (*buyback*) yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) sebanyak-banyaknya 16.400.000 (enam belas juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham Pekerja tersebut.

Realisasi

Telah diselesaikan.

Mata Acara Kelima

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Keputusan

- Mengakukan pemberhentian dengan hormat Tuan R. Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 18 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 11 November 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan:
 - Priastomo : sebagai Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah;
 - Herdy Rosadi Harman : sebagai Direktur Human Capital;
 - Haru Koesmahargo : sebagai Direktur Keuangan.

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2015, Keputusan RUPSLB Tahun 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019. Pemberhentian Anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Direksi.
- Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
 - Semula Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah menjadi Direktur Bisnis Kecil dan Menengah
 - Semula Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi
- Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - Tuan Indra Utoyo, semula Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi menjadi Direktur Digital dan Teknologi Informasi
 - Tuan Ahmad Solichin Lutfiyanto, semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Kepatuhan

Masing-masing Anggota Direksi diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017. Dengan demikian, masa jabatan Anggota Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - Tuan Amam Sukriyanto : sebagai Direktur Bisnis Kecil dan Menengah;
 - Tuan Agus Winardono : sebagai Direktur *Human Capital*;
 - Nyonya Viviana Dyah Ayu Retno : sebagai Direktur Keuangan;
 - Tuan Arga Mahanana Nugraha : sebagai Direktur Jaringan dan Layanan.
- Masa jabatan Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, maka susunan Anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Direktur Utama : Sunarso
 - Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto
 - Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu Retno****
 - Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN : Agus Noorsanto
 - Direktur Bisnis Mikro : Supari
 - Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Indra Utoyo
 - Direktur Bisnis Kecil dan Menengah : Amam Sukriyanto****
 - Direktur Jaringan dan Layanan : Arga Mahanana Nugraha****
 - Direktur Kepatuhan : Ahmad Solichin Lutfiyanto****
 - Direktur Manajemen Risiko : Agus Sudiarto
 - Direktur Konsumer : Handayani
 - Direktur *Human Capital* : Agus Winardono****

Keterangan:

****) Anggota Direksi tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Anggota Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka Anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud.
- Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada OJK untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan Rapat dalam bentuk Akta Notaris, serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang, untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Realisasi

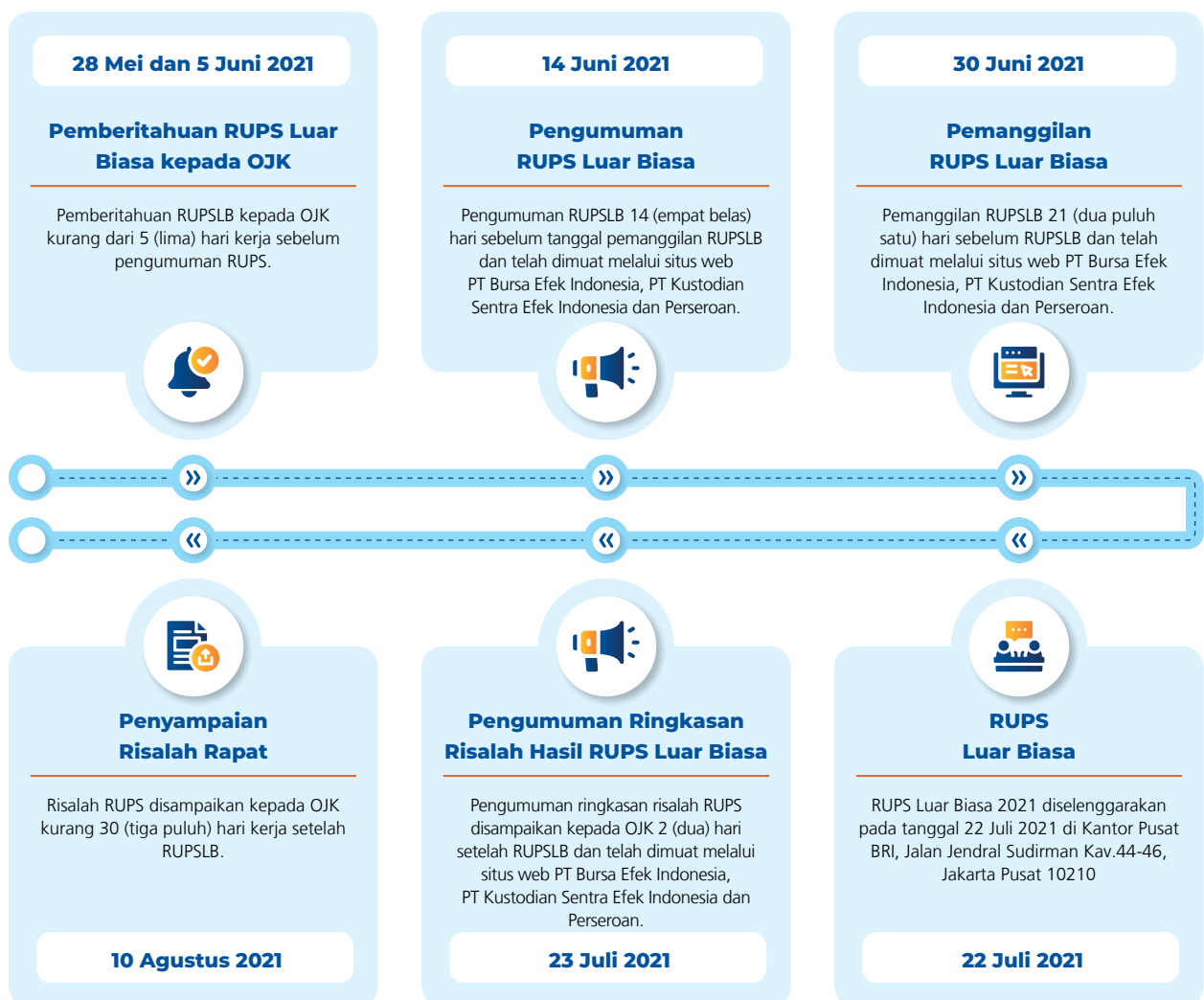
Telah diselesaikan.

RUPS Luar Biasa Tanggal 22 Juli 2021

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat ini telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.R.314- DIR/SKP/CSM/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Surat No.R.384- DIR/CSC/CSM/06/2021 tanggal 25 Juni 2021.
2. Memuat publikasi Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 14 Juni 2021.
3. Mengumumkan Keterbukaan Informasi, serta Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, sehubungan dengan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui situs web Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 14 Juni 2021 dan 19 Juli 2021.
4. Memuat publikasi Pemanggilan Rapat berikut Tambahan Informasi kepada para Pemegang Saham melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2021 dan 16 Juli 2021.

Tahapan RUPS Luar Biasa 22 Juli 2021



Sesuai Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Selanjutnya, Sesuai Pasal 42 ayat (2) UUP, Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Mata Acara Rapat sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa total saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 108.589.795.711 saham yang setara dengan 88,574% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mata Acara

Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tanggal 22 Juli 2021

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir
1	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	✓	
2	Nicolaus Teguh Budi Harjanto*	Komisaris	✓	
3	Hadiyanto	Komisaris	✓	
4	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	✓	
5	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	✓	
6	Hendrikus Ivo*	Komisaris Independen	✓	
7	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	✓	
8	Zulnahr Usman*	Komisaris Independen	✓	
9	Dwi Ria Latifa*	Komisaris Independen	✓	
10	Sunarso	Direktur Utama	✓	
11	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	✓	
12	Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	✓	
13	Handayani	Direktur Konsumer	✓	
14	Supari*	Direktur Bisnis Mikro	✓	
15	Ahmad Solichin Lutfiyanto*	Direktur Kepatuhan	✓	
16	Agus Noorsanto*	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	✓	
17	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	✓	
18	Agus Winardono*	Direktur <i>Human Capital</i>	✓	
19	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	✓	
20	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	Direktur Keuangan	✓	
21	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Jaringan dan Layanan	✓	

Catatan:

- Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hadir dalam Rapat.
- Ari Kuncoro mengundurkan diri sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan per tanggal 21 Juli 2021.
- *) Hadir secara elektronik

Kehadiran Pihak Independen

Pihak independen yang hadir dalam RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juli 2021 yaitu:

No.	Nama	Keterangan
1	Fathiah Helmi, S.H.	Notaris, Kantor Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, S.H.
2	E. Agung Setiawati	Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom
3	Christophorus Alvin Kossim	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja

No.	Nama	Keterangan
4	Ocky Rinaldy	Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan
5	Putu Suryastuti	Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners
6	Boumediene Sihombing	Perwakilan Penjamin Pelaksana Emisi PT BRI Danareksa Sekuritas

Perhitungan suara dilakukan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Kesempatan Mengajukan Pernyataan/Pendapat dan Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
104.223.172.801 suara atau mewakili 95,978% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	4.363.611.420 suara atau mewakili 4,018% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	3.011.490 atau mewakili 0,002% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tanggal 22 Juli 2021

Keputusan

- Menyetujui Perseroan menerbitkan saham baru dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk jumlah sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh enam ribu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I dengan memenuhi syarat dan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dan harga pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan, termasuk akta Notaris dan Pernyataan Pendaftaran berikut kelengkapan dokumennya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - Menentukan jadwal Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - Menentukan penggunaan dana hasil Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia, kecuali atas 1% saham yang tidak dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia;
 - Menegaskan 1 (satu) atau lebih keputusan dalam Rapat pada 1 (satu) atau lebih akta Notaris.
- Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - Menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.
 - Menandatangani, mencetak, menerbitkan dan/atau mengajukan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan realisasi jumlah saham tersebut di atas.

Realisasi

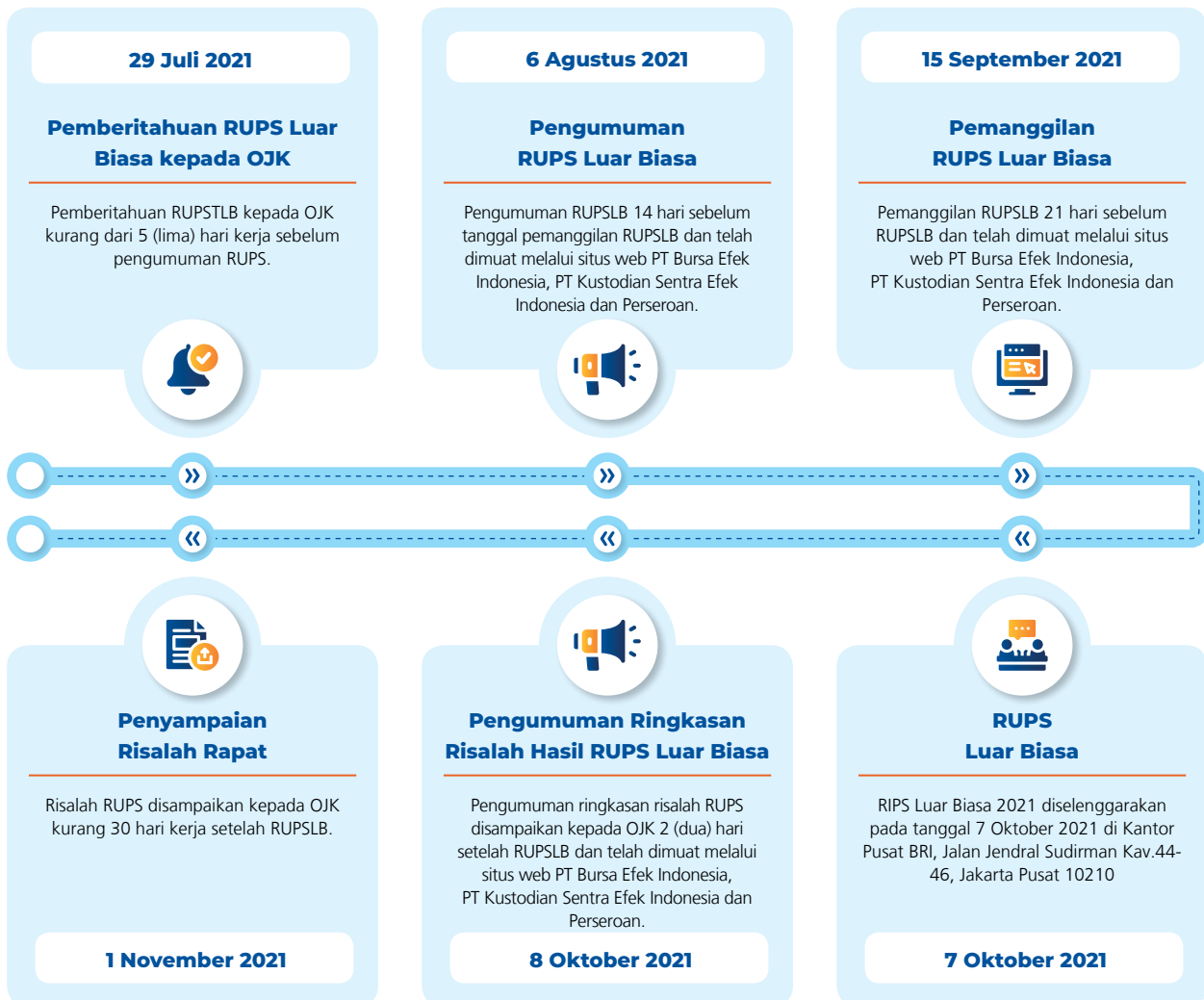
Telah diselesaikan.

RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Oktober 2021

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan Rapat ini telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberitahukan rencana diselenggarakannya Rapat kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No.R.16- DIR/CSC/CSM/07/2021 tanggal 29 Juli 2021.
- Memuat publikasi Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan pada tanggal 6 Agustus 2021.
- Memuat publikasi Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan pada tanggal 15 September 2021.

Tahapan RUPS Luar Biasa 7 Oktober 2021



Untuk Mata Acara 1, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK RUPS, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Untuk Mata Acara 2, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Selanjutnya, ketentuan pengambilan keputusan rapat tiap-tiap mata acara adalah sebagai berikut:

Untuk Mata Acara 1, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK RUPS,

Keputusan Mata Acara Rapat harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Untuk Mata Acara 2, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Mata Acara harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa total saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 122.319.731.793 saham yang setara dengan 88,0128% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mata Acara

Kesatu	Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
Kedua	Peretujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Oktober 2021

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir
1	Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	✓	
2	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	✓	
3	Hadiyanto	Komisaris	✓	
4	Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	✓	
5	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	✓	
6	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	✓	
7	R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	✓	
8	Zulnahr Usman	Komisaris Independen	✓	
9	Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	✓	
10	Sunarso	Direktur Utama	✓	
11	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	✓	
12	Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	✓	
13	Handayani	Direktur Konsumer	✓	
14	Supari	Direktur Bisnis Mikro	✓	
15	Ahmad Solichin Lutfiyanto*	Direktur Kepatuhan	✓	
16	Agus Noorsanto	Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN	✓	
17	Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	✓	
18	Agus Winardono	Direktur <i>Human Capital</i>	✓	
19	Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	✓	
20	Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari	Direktur Keuangan	✓	
21	Arga Mahanana Nugraha	Direktur Jaringan dan Layanan	✓	

Catatan:

- Seluruh Dewan komisaris dan Direktur hadir dalam Rapat.
- Ari Kuncoro mengundurkan diri sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen per tanggal 21 Juli 2021
- *) Hadir secara elektronik

Kehadiran Pihak Independen

No.	Nama	Keterangan
1	Fathiah Helmi, S.H.	Notaris, Kantor Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, S.H.
2	E. Agung Setiawati	Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom

Perhitungan suara dilakukan oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Kesempatan Mengajukan Pernyataan/Pendapat dan Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	122.291.864.593 suara atau 99,9772% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	12.138.600 suara atau 0,0099% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	15.728.600 suara atau 0,0129% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	(tidak ada)
Kedua	122.047.689.200 suara atau 99,7776% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	47.069.500 suara atau 0,0385% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	224.973.093 suara atau 0,1839% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	(tidak ada)

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tanggal 7 Oktober 2021

Mata Acara Kesatu

Keputusan

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Realisasi

Telah diselesaikan.

Mata Acara Kedua

Keputusan

1. Memberhentikan Sdr. Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ('RUPS') Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 18 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021, dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan.
2. Mengubah nomenklatur jabatan Anggota Direksi sebagai berikut:
 - a. Semula Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN menjadi Direktur Bisnis *Wholesale* dan Kelembagaan
 - b. Semula Direktur Konsumer menjadi Direktur Bisnis Konsumer
3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Rofikoh Rokhim, semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - b. Agus Noorsanto, semula Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN menjadi Direktur Bisnis *Wholesale* dan Kelembagaan
 - c. Handayani, semula Direktur Konsumer menjadi Direktur Bisnis Konsumer

Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, Tahun 2019 dan Tahun 2017. Dengan Demikian, masa jabatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan meneruskan sisa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatannya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Mengangkat Sdr. Heri Sunaryadi sebagai Komisaris Independen Perseroan.
5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris & Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Rabin Indrajat Hattari
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	: Zulnahr Usman
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi

Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Indra Utoyo
Direktur Bisnis Konsumer	: Handayani
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Kepatuhan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Human Capital	: Agus Winardono
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Jaringan dan Layanan	: Arga Mahanana Nugraha

6. Anggota Dewan Komisaris baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ('OJK') atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan ('Fit & Proper Test') dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

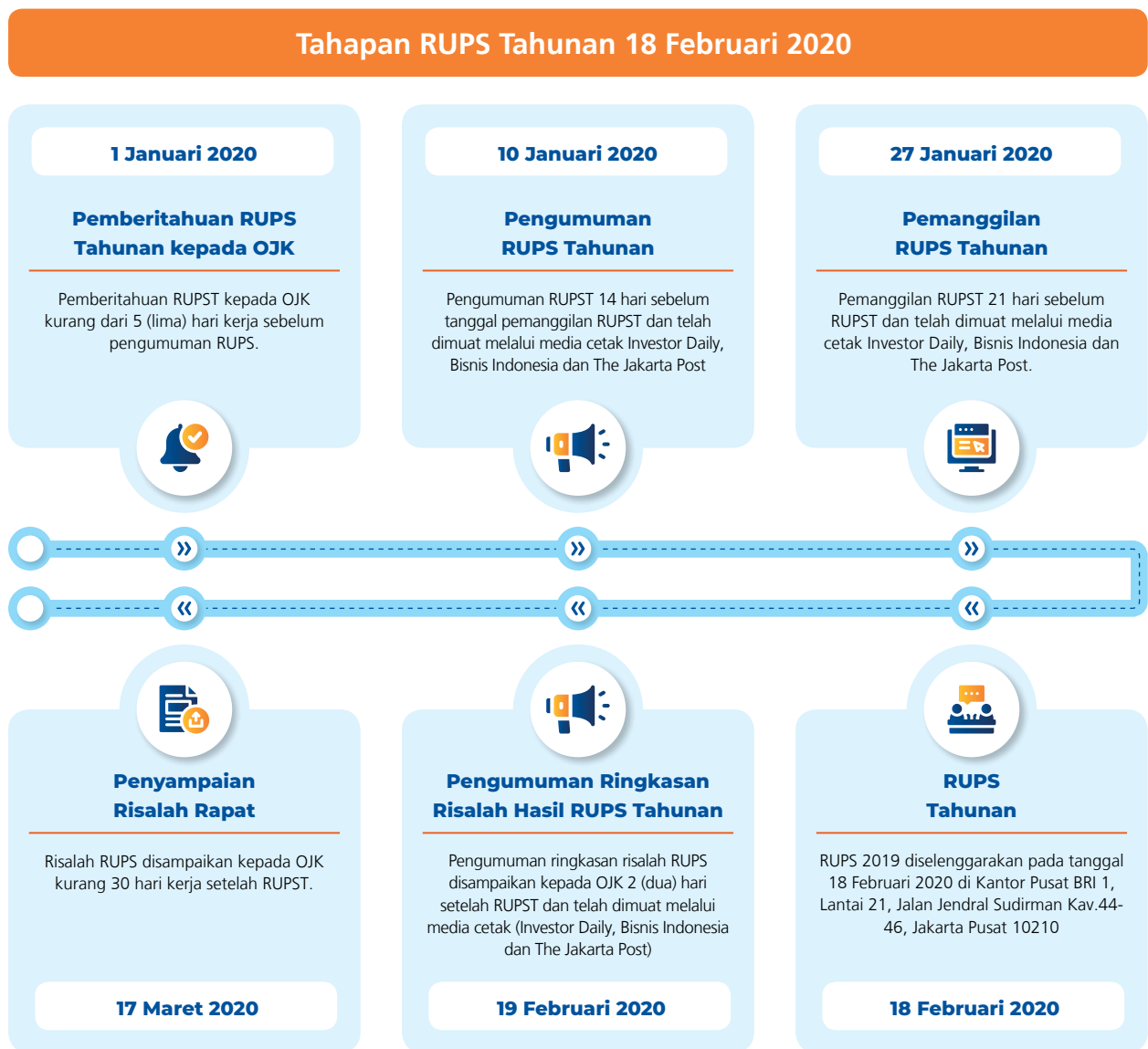
8. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam *Fit & Proper Test* oleh OJK, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, serta meminta JK untuk melakukan *Fit & Proper Test* terhadap Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi

Telah diselesaikan.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020 dan Realisasinya

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2020 dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2020, dan telah memenuhi POJK No. 32/POJK.04/2014, dengan jadwal tahapan sebagai berikut:



Untuk mata acara 1 sampai dengan mata acara 4, sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Untuk mata acara 5, sesuai Pasal 25 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, kuorum adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Proses Perhitungan Suara dan Pihak Independen yang Melakukan Pemungutan Suara RUPS Tahunan 2020

Sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah:

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp50,00.
- 108.997.971.025 saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 setiap saham atau seluruhnya sejumlah 108.997.971.026 saham atau lebih kurang sejumlah 89,0647% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara oleh Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 24-01-2020 yang diterbitkan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan sejumlah 122.380.635,500 saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat, dengan demikian kuorum untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara

Kesatu	Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, termasuk pertanggungjawaban realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
Kedua	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.
Ketiga	Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Keempat	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
Kelima	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan 2020

RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah memenuhi persyaratan kuorum serta seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Andrinof A. Chaniago	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	A. Sonny Keraf	Komisaris Independen	Hadir
3.	Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	Hadir
4.	Rofikoh Rokhim	Komisaris Independen	Hadir
5.	A. Fuad Rahmany	Komisaris Independen	Hadir
6.	Hadiyanto	Komisaris	Hadir
7.	Loeke Larasati Agoestina	Komisaris	Hadir
8.	Sunarso	Direktur Utama	Hadir
9.	Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Hadir
10.	Haru Koesmahargyo	Direktur	Hadir
11.	Agus Noorsanto	Direktur	Hadir
12.	Priyastomo	Direktur	Hadir
13.	Indra Utoyo	Direktur	Hadir
14.	Supari	Direktur	Hadir
15.	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur	Hadir
16.	Azizatun Azhimah	Direktur	Hadir
17.	Agus Sudiarto	Direktur	Hadir
18.	Handayani	Direktur	Hadir
19.	Herdy R. Harman	Direktur	Hadir

Kesempatan Mengajukan Pernyataan /Pendapat dan Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau Pendapat dalam RUPS terkait dengan masing-masing mata acara rapat. Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah berdasarkan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan melalui mekanisme elektronik dan dilakukan oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek). Dalam RUPST jumlah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Opini/Pernyataan
Kesatu	108.466.980.392 saham (99,51%)	25.470.000 saham (0,004%)	505.520.634 saham (0,46%)	4 (empat) orang
Kedua	108.958.720.336 saham (99,96%)	4.704.800 saham (0,004%)	34.545.890 saham (0,031%)	Tidak Ada
Ketiga	100.586.235.383 saham (92,28%)	5.934.579.391 saham (5,44%)	2.477.156.252 saham (2,27%)	1 (satu) orang
Keempat	103.281.600.691 saham (94,75%)	5.043.792.481 saham (4,62%)	672.577.854 saham (0,61%)	1 (satu) orang
Kelima	74.209.180.289 saham (68,08%)	28.190.817.454 saham (25,86%)	6.597.973.283 saham (6,05%)	1 (satu) orang

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2020

Mata Acara Kesatu

Keputusan:

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00021/2.1032/AU1/07/1008-3/1/1/2020 tanggal 24-01-2020.
- Menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja sesuai dengan Laporan Nomor 00031/2.1032/AU 2/10i1008-3/1/1/2020 tanggal 24-01-2020.
- Menerima laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BRI Tahap I Tahun 2019.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31-12-2019, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berakhir pada tanggal 31-12-2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan telah tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Status:

Telah diselesaikan

Mata Acara Kedua

Keputusan:

Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2019 sebesar Rp34.372.607.635.200,90 sebagai berikut:

- Sebesar 60% atau Rp20.623.564.581.120,50 ditetapkan sebagai Dividen Tunai dibagikan kepada para pemegang saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
Dividen bagian Negara Republik Indonesia atas kepemilikan sekurang-kurangnya 56,75% saham sebesar Rp11.704.082.373.600,20 akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Dividen untuk tahun buku 2019 akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
- Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen tahun buku 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pematangan pajak Dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
 - Hal-hal terkait teknis lain dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku. Sebesar 40% atau Rp13.749.043.054.080,40 akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Status:

Telah diselesaikan

Mata Acara Ketiga

Keputusan:

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris:
 - Besarnya tantiem untuk tahun buku 2019.
 - Gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk tahun buku 2020.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi:
 - Besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2019.
 - Gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya untuk Tahun Buku 2020.

Status:

Telah diselesaikan

Mata Acara Keempat

Keputusan:

- Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young global limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020.
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan KAP pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status:

Telah diselesaikan

Mata Acara Kelima

Keputusan:

- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Tuan Wahyu Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama yang diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 15-05-2019 terhitung sejak tanggal 18-11-2019 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat Wakil Komisaris Utama Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - Azizaton Azhimah sebagai Direktur Kepatuhan
 - Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Keuangan
 Pemberhentian anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Direksi.
- Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Direksi:
 - Wisto Prihadi sebagai Direktur Kepatuhan
 - Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Keuangan
 Anggota Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Memberhentikan dengan hormat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
 - Andrinof A. Chaniago sebagai Komisaris Utama/Independen
 - Fuad Rahmany sebagai Komisaris Independen
 - Sonny Keraf sebagai Komisaris Independen
 - Loeke Larasati A. sebagai Komisaris
 Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat anggota Dewan Komisaris.
- Mengangkat nama-nama berikut sebagai anggota Dewan Komisaris:
 - Kartika Wirjoatmodjo sebagai Komisaris Utama
 - Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
 - Rabin Indrajad Hattari sebagai Komisaris
 - R. Widyo Pramono sebagai Komisaris Independen
 - Dwi Ria Latifa sebagai Komisaris Independen
 - Zulnahr Usman sebagai Komisaris Independen
 Anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Kartika Wirjoatmodjo
- Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Ari Kuncoro
- Komisaris: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
- Komisaris: Hadiyanto
- Komisaris: Rabin Indrajad Hattari
- Komisaris Independen: Rofikoh Rokhim
- Komisaris Independen: Hendrikus Ivo
- Komisaris Independen: Zulnahr Usman
- Komisaris Independen: R. Widyo Pramono
- Komisaris Independen: Dwi Ria Latifa

Direksi

- Direktur Utama: Sunarso
- Wakil Direktur Utama: Catur Budi Harto
- Direktur Keuangan: Haru Koesmahargyo
- Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN: Agus Noorsanto
- Direktur Bisnis Mikro: Supari
- Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi: Indra Utoyo
- Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah: Priyastomo
- Direktur Jaringan dan Layanan: Ahmad Solichin Lutfiyanto
- Direktur Kepatuhan: Wisto Prihadi
- Direktur Manajemen Risiko: Agus Sudiarto
- Direktur Konsumer: Handayani
- Direktur Human Capital: Herdy Rosadi Harman

7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang dimaksud yang diangkat pada angka 3 dan angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Negara maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang dan melakukan penyesuaian dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

Status:

Telah diselesaikan

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris dan disahkan dalam Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 yang memuat diantaranya:

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Komisaris Utama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Memimpin pelaksanaan rapat Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi.
2. Memimpin pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris.
4. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga, dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
7. Membentuk Komite Audit dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.
9. Memberhentikan sewaktu-waktu Anggota Direksi untuk sementara dengan menyebutkan alasannya apabila Anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern.
13. Memberikan persetujuan tertulis atas perbuatan Direksi sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.
14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dalam Anggaran Dasar Perseroan mengatur keputusan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris, yaitu:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal dan sektor perbankan untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar.
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari nilai yang ditetapkan Dewan Komisaris untuk nominal Rp200 miliar sampai dengan Rp500 miliar dan jangka waktu 5-10 tahun.
3. Melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
4. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.
5. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis sesuai Batasan dan/atau kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
6. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal untuk nominal Rp150 miliar sampai dengan Rp200 miliar.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Kriteria anggota Dewan Komisaris BRI disusun berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2015 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi, POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, POJK No. 27/03.POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan serta ketentuan internal Dewan Komisaris BRI Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor Keputusan 07-KOM/BRI/07/2015 tentang Kebijakan Nominasi Anggota Komisaris dan Direksi.

Kualifikasi Umum

1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. Dinyatakan pailit.
 - b. Menjadi anggota Direksi atau Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
3. Tidak memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
 - b. Jabatan lainnya yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan embaga keuangan.
 - b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
5. Tidak termasuk rangkap jabatan, apabila:
 - a. Anggota Dewan Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya.
 - b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Kualifikasi umum tersebut di atas antara lain dapat dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis dari Bakal Calon yang bersangkutan.

Persyaratan Integritas

Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki:

1. Akhlak dan moral yang baik.
2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

Pemenuhan POJK No.27/03.POJK/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Dewan Komisaris sebagai Pengurus Bank wajib mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatuhan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia). Pengurus Bank wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Pemenuhan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/ 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki:

1. Pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya.
2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
3. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018. Tata Tertib Dewan Komisaris merupakan acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya dan sebagai dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Dewan Komisaris. Adapun isi Tata Tertib Dewan Komisaris yaitu:

Bab I	Pendahuluan 1.1 Pengertian Umum 1.2 Dasar Hukum
Bab II	Pedoman dan Tata Tertib Kerja 1.1 Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab, dan Larangan 1.2 Pembagian Kerja 1.3 Waktu Kerja 1.4 Etika Kerja 1.5 Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) 1.6 Rapat Dewan Komisaris 1.7 Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris 1.8 Organisasi 1.9 Laporan dan Korespondensi
Bab III	Penutup

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Ari Kuncoro*)	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Hadiyanto	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Audit
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Zulnahr Usman	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Heri Sunaryadi **)	Komisaris Independen	-

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

**) Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan & kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama		✓		✓	✓			✓		✓		✓		✓
Ari Kuncoro	Wakil Komisaris / Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hadiyanto	Komisaris		✓		✓	✓			✓		✓		✓		✓
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris		✓		✓	✓			✓		✓		✓		✓
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris		✓		✓	✓			✓		✓		✓		✓
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen		✓		✓	✓			✓		✓		✓		✓
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen		✓		✓	✓			✓		✓		✓		✓
Zulnahr Usman	Komisaris Independen		✓		✓	✓			✓		✓		✓		✓
Heri Sunaryadi**)	Komisaris Independen		✓		✓	✓			✓		✓		✓		✓

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

**) Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan & kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris BRI mengacu ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK-04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu tidak melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada:

1. Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank.
2. Lebih dari 1 (satu) Lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	Wakil Menteri	Kementerian BUMN
Ari Kuncoro*)	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	Rektor	Universitas Indonesia
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	-	-
Hadiyanto	Komisaris	Dirjen Perbendaharaan	Kementerian Keuangan
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	Staf Khusus Mensetneg Bidang Komunikasi Politik dan Kelembagaan	Sekretariat Negara Republik Indonesia
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Staf Khusus Menteri	Kementerian BUMN
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	-	-
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	-	-
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	-	-
Zulnahr Usman	Komisaris Independen	-	-
Heri Sunaryadi **)	Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT Integra Indocabinet Tbk

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

**) Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan & kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki benturan kepentingan dalam transaksi dan/atau aksi korporasi Perseroan wajib menyatakan benturan kepentingan dan dirinya tidak dapat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan terkait transaksi dan/atau aksi korporasi tersebut. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Pada tahun 2021 tidak terdapat transaksi atau aksi korporasi BRI yang mengandung benturan kepentingan dan dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengungkapkan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BRI maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Seluruh Dewan Komisaris tidak mempunyai kepemilikan saham mencapai 5% (lima persen). Adapun kepemilikan saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	178.300	Nihil	Nihil	Nihil
Ari Kuncoro*)	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Hadiyanto	Komisaris	810.700	Nihil	Nihil	Nihil
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	849.161	Nihil	Nihil	Nihil
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	160.400	Nihil	Nihil	Nihil
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Zulnahr Usman	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Heri Sunaryadi**)	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

**) Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan & kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komisaris Independen

Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Komposisi Komisaris Independen pada posisi tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 6 (enam) orang dari 10 (sepuluh) orang Komposisi Dewan Komisaris atau sebesar 60%.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen					
	Hendrikus Ivo	Rofikoh Rokhim	R. Widyo Pramono	Dwi Ria Latifa	Zulnahr Usman	Heri Suryadi
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pernyataan Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rokhoh Rokhim
 Tempat/tanggal lahir : Klaten/12 Februari 1971
 No KTP : 3112010010000000000
 Alamat domisili (copy KTP) : RT 001/RW 001, Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah
 Nomor HP : 08123456789
 Jabatan : Komisaris Independen
 Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Nomor telepon perusahaan : 021 5751620

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

 Sunarsa
 Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 7 Oktober 2021

 Rokhoh Rokhim

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulnihar Usman
 Tempat/tanggal lahir : Medan / 20 Mei 1963
 No KTP : 1110010010000000000
 Alamat domisili (copy KTP) : Jl. H. Agus Salim No. 11, Kelurahan Sei Putih, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara
 Nomor telepon rumah : -
 Jabatan : Komisaris Independen
 Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Nomor telepon perusahaan : 021 5751620

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

 Sunarsa
 Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 4 April 2020

 Zulnihar Usman

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dewi Ria Lattifa
Tempat/tanggal lahir	: Tanjung Balai Karimun / 2 Desember 1966
No KTP	: 1110010010000000000
Alamat domisili (copy KTP)	: RT 001/RW 001, Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah
Nomor telepon rumah	: 021 5751620
Jabatan	: Komisaris Independen
Nama perusahaan	: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Nomor telepon perusahaan	: 021 5751620

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

 Sunarsa
 Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 01 Desember 2020

 Dewi Ria Lattifa

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Sunaryadi
 Tempat/tanggal lahir : Jember/26-06-1965
 No KTP : 3112010010000000000
 Alamat KTP : RT 001/RW 001, Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah
 Alamat domisili : RT 001/RW 001, Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah
 Nomor telepon rumah : -
 Jabatan : Komisaris Independen
 Nama perusahaan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 Nomor telepon perusahaan : 021 5751620

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- Merupakan pihak yang independen terhadap pemilik bank atau PSP
- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Apabila dikemudian hari, saya ditemukan memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui

 Sunarsa
 Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk.

Jakarta, 7 Oktober 2021

 Heri Sunaryadi

- d. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk membantu, mengatur dan mempersiapkan rapat, menyiapkan, dan membagikan agenda rapat dan materi diskusi.
 - e. Dalam hal rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi/Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris dapat berkoordinasi dengan Divisi Sekretariat Perseroan.
 - f. Materi rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi/Direktur, harus diberikan kepada Dewan Komisaris paling lambat tiga hari kerja sebelum rapat berlangsung, sehingga Dewan Komisaris memiliki kesempatan untuk menelaah informasi dan/atau untuk meminta informasi tambahan sebelum rapat.
8. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Komisaris.
 9. Materi rapat Dewan Komisaris didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan, kecuali rapat diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari satu per dua bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
2. Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
3. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya. Dalam kuasa sebagaimana dimaksud, anggota Dewan Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Dewan Komisaris dapat mengajukan pendapatnya mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Suara

1. Hak suara dalam rapat diatur sebagai berikut:
 - a. Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk Anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut;
 - b. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara yang terbanyak dari yang hadir;
 - d. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu rapat dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
2. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.

Dokumentasi

Dalam setiap rapat harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan hal-hal yang diputuskan. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para Anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Pedoman pembuatan risalah rapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Hasil Rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris baik yang hadir dan yang memberikan serta disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
2. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi (Radirkom maupun Rakom) wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
3. Risalah rapat sebagaimana dimaksud wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Rencana Rapat	Periode
1	Reviu <i>audited</i> laporan keuangan konsolidasian	Triwulan I
2	Persiapan Rapat Umum Pemegang Saham	
3	Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tahun 2021	
4	Reviu profil risiko, tingkat kesehatan bank, strategi anti <i>fraud</i> dan fungsi kepatuhan	
5	Realisasi Rencana Bisnis Bank	Triwulan II
6	Reviu laporan kinerja keuangan dan	
7	Reviu kinerja Entitas Anak	
8	Profil Risiko	
9	Realisasi Rencana Bisnis Bank dan RKAP	Triwulan III
10	Reviu kinerja laporan kinerja keuangan dan realisasi Rencana Bisnis Bank	
11	Profil Risiko	
12	Reviu kinerja entitas anak	
13	Usulan RBB dan RJPP	Triwulan IV
14	Reviu profil risiko, tingkat kesehatan bank, strategi anti <i>fraud</i> dan fungsi kepatuhan	
15	Reviu kinerja laporan kinerja keuangan dan realisasi Rencana Bisnis Bank	
16	Profil Risiko	
17	Reviu kinerja entitas anak	

Realisasi Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda	KWA	AK*)	RR	HI	RWP	NBH	HD	RIH	ZU	DRL	HS**)
1	26 Januari 2021	Pemaparan Laporan Kegiatan Dewan Komisaris Tahun 2020 dan Rencana Kegiatan Dewan Komisaris Tahun 2021	Izin	1	1	1	1	1	1	Izin	1	1	-
2	10 Februari 2021	Penetapan Keanggotaan Komite	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
3	23 Maret 2021	Evaluasi Kinerja Direksi Tahun 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
4	5 April 2021	Persetujuan Perubahan Nomenklatur dan Nominasi Pengurus Bank Agro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
5	13 April 2021	Sekretariat Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
6	6 Mei 2021	Pembahasan Usulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
7	31 Mei 2021	Realisasi dan rencana kerja Dewan Komisaris 2021, penguatan organ pendukung Dewan Komisaris 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-

No.	Tanggal	Agenda	KWA	AK*)	RR	HI	RWP	NBH	HD	RIH	ZU	DRL	HS**)
8	29 Juni 2021	Progres Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
9	28 Juli 2021	Penetapan Anggota Komite Dewan Komisaris dan Review Perjanjian Komite	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-
10	28 September 2021	Persetujuan Perubahan Pengurus BRINS	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	09 November 2021	Laporan Sekretaris Dewan Komisaris	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	15 November 2021	Diskusi inbreg Pegadaian dan PNM dan BRI	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

***) Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan & kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan

KWA Kartiko Wirjoatmodjo
AK Ari Kuncoro
RR Rofikoh Rokhim
HI Hendrikus Ivo
RWP R. Widyo Pramono
HS Heri Sunaryadi

NBH Nicolaus T. Budi Harjanto
HD Hadiyanto
RIH Rabin Indrajad Hattari
ZU Zulnahr Usman
DRL Dwi Ria Latifa

Rapat Gabungan Dewan Komisaris

Realisasi Rapat Gabungan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat											Direksi/SEVP/Divisi Terkait
			KWA	AK*)	RR	HI	RWP	NBH	HD	RIH	ZU	DRL	HS**)	
1	5 Januari 2021	Sampel Survei BRI <i>Small 7 SME Index</i> (BSMI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Chief Economic BRI Corporate Development Strategy Division
2	5 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> <i>Individual & Collective Imparment</i> NPL BRI Rencana tindak lanjut pengelolaan nasabah Eks restruk Perlakuan pencatatan akutansi bunga nasabah Eks Restruk 	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Manajemen Risiko Direktur Keuangan
3	12 Januari 2021	Update rencana pelaksanaan RUPSLB BRI Tahun 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Corporate Secretary Division
4	12 Januari 2021	Update penerapan APU PPT dan tindak lanjut temuan OJK terkait penerapan APU PPT BRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Kepatuhan
5	12 Januari 2021	Pembahasan perubahan KPI Direksi tahun 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Keuangan Corporate Development Strategy Division

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat											Direksi/SEVP/Divisi Terkait	
			KWA	AK*)	RR	HI	RWP	NBH	HD	RIH	ZU	DRL	HS**)		
6	19 Januari 2021	Implementasi Pelaksanaan Program <i>Employee Stock Option</i> , Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham yang disimpan sebagai Saham Treasury	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Keuangan Direktur Human Capital
7	27 Januari 2021	Mekanisme dan Parameter penambahan fasilitas kredit Debitur Restrukturisasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Manajemen Risiko
8	27 Januari 2021	Realisasi RBB Periode Triwulan IV Tahun 2020	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Human Capital Direktur Konsumer Direktur Manajemen Risiko Direktur Jaringan dan Layanan Direktur Digital, IT dan Operasi Direktur Bisnis Mikro Direktur Kecil dan Menengah Direktur Wholesale dan Kelembagaan Direktur Kepatuhan
9	15 Maret 2021	<i>Update progress project towards a world class wholesale banking</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	SEVP Treasury SEVP Change Management
10	30 Maret 2021	Overview BOC Charter Himbara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Manajemen Risiko
11	05 April 2021	<i>Update Kinerja Rencana Transformasi Bisnis</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	SEVP Corporate Transformation
12	13 April 2021	<i>Update Kondisi, Pengelolaan dan Aspek Mitigasi Risiko atas Portofolio Bisnis Kecil dan Menengah beserta Proyeksi Kondisi Portofolio Bisnis Pasca COVID-19 secara Riil.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Manajemen Risiko Direktur Bisnis Kecil dan Menengah Direktur Human Capital

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat											Direksi/SEVP/Divisi Terkait	
			KWA	AK*)	RR	HI	RWP	NBH	HD	RIH	ZU	DRL	HS**)		
13	21 Mei 2021	Realisasi Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2021, Evaluasi atas Pencapaian RKAP 2021 dan RBB 2021-2023 Periode Triwulan I 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Bisnis Mikro Direktur Digital, IT dan Operasi Direktur Konsumer Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN Direktur Manajemen Risiko Direktur Bisnis Kecil dan Menengah Direktur Jaringan dan Layanan Kepala SKAI SEVP Treasuri SEVP Change Management SEVP Fixed Asset Management SEVP Corporate Banking SEVP Operation
14	31 Mei 2021	Rencana Jangka Panjang Perusahaan, RBB, dan <i>update</i> pencapaian Kinerja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Keuangan
15	31 Mei 2021	BOC <i>charter</i> dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Manajemen Risiko SEVP SKAI
16	8 Juni 2021	Pembahasan atas Usulan Penetapan KPI BRI tahun 2021	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Keuangan
17	22 Juni 2021	Pembahasan Usulan Revisi RBB dan RJP	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Keuangan SEVP Change Management
18	3 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Laporan Keuangan Triwulan II tahun 2021 Evaluasi atas Pencapaian RKAP 2021 	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Wakil Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Human Capital Direktur Konsumer Direktur Manajemen Risiko Direktur Jaringan dan Layanan Direktur Digital, IT dan Operasi Direktur Bisnis Mikro Direktur Kecil dan Menengah Direktur Wholesale dan Kelembagaan Direktur Kepatuhan
19	3 Agustus 2021	Strategi Segmen SME dalam Mencapai Target Pertumbuhan	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah
20	10 Agustus 2021	Permohonan Persetujuan Kepada Dewan Komisaris atas Penyediaan dana Kepada BRI Finance	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Keuangan Direktur Manajemen Risiko Direktur Hubungan Kelembagaan
21	19 Agustus 2021	Penetapan Harga Pelaksanaan HMETD BRI	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	Direktur Keuangan

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat											Direksi/SEVP/Divisi Terkait	
			KWA	AK*)	RR	HI	RWP	NBH	HD	RIH	ZU	DRL	HS**)		
22	26 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi Laporan Keuangan Tw III/2021 Evaluasi Pencapaian RKAP dan RBB 2021 	1	-	1	1	1	1	1	Izin	1	1	1	1	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Keuangan Direktur Human Capital Direktur Konsumer Direktur Manajemen Risiko Direktur Jaringan dan Layanan Direktur Digital, IT dan Operasi Direktur Bisnis Mikro Direktur Kecil dan Menengah Direktur Wholesale dan Kelembagaan Direktur Kepatuhan
23	15 November 2021	Kebijakan <i>Talent</i> dan Nominasi Kepala SKAI	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Direktur Utama Wakil Direktur Utama
24	15 November 2021	Pembahasan tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Direktur Kepatuhan

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Gabungan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	12	11	92%	24	24	100%	4	4	100%
Ari Kuncoro*	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	8	8	100%	17	17	100%	4	4	100%
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	12	12	100%	24	24	100%	4	4	100%
Hadiyanto	Komisaris	12	12	100%	24	23	96%	4	3	75%
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	12	12	100%	24	24	100%	4	4	100%
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	12	11	92%	24	24	100%	4	4	100%
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	12	12	100%	24	24	100%	4	4	100%
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	12	12	100%	24	24	100%	4	3	75%
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	12	12	100%	24	24	100%	4	4	100%
Zulnahr Usman	Komisaris Independen	12	12	100%	24	24	100%	4	4	100%
Heri Sunaryadi**)	Komisaris Independen	2	2	100%	3	3	100%	4	4	100%

*) Sdr. Ari Kuncoro aktif sejak periode 1 Januari 2021 sampai 6 Oktober 2021

***) Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan & kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelatihan dan Program Orientasi Anggota Dewan Komisaris

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah diatur pada Surat Keputusan Direksi NOKEP S.43-DIR/SKP/01/2018 tentang Kebijakan Program Orientasi dan Pendidikan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan program pendidikan Dewan Komisaris bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.

3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan professional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Dewan Komisaris selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Dewan Komisaris merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan Perseroan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* Perseroan.

Program pendidikan dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	<i>Asset Liability Management in uncharted New Normal – Strategy & Optimization</i>	26 Oktober 2021, Jakarta	BARA Risk Forum
		Kepemimpinan di Masa Krisis	25 Februari 2021	BRI Group Leadership Forum
Ari Kuncoro*)	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Kepemimpinan di Masa Krisis	25 Februari 2021	BRI Group Leadership Forum
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Pelatihan Investasi Forensik	10 dan 12 Maret 2021, Jakarta	Visi Integritas
		Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i>	25 Maret 2021, Jakarta	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP)
		<i>Business Policy and Case Studies</i>	22 April 2021, Jakarta	Universitas Indonesia
		<i>Integrated Auditing for The Public Sector</i>	22 Juni 2021, Jakarta	Institute Pemeriksa Keuangan Negara
		Pelatihan Penggunaan <i>Platform Edx</i>	31 Juli 2021, Jakarta	Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan
		Setahun Akhlak BUMN	12 Agustus 2021, Jakarta	Visi Integritas
		<i>Financial Consumer Protection Linked Theories & Evidence to Policy Practice</i>	6-7 Agustus 2021, Online	IAFICO
		<i>How to Thrive Your Business During Pandemic</i>	19 Agustus 2021, Jakarta	BCA
		Mencegah korupsi korporasi melalui bisnis <i>judgement rule</i>	27 Agustus 2021, Jakarta	Visi Integritas
		Pentingnya Sertifikat Halal Bagi UMKM	14 Agustus 2021, Jakarta	Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia
		Jurus Baru Manajemen Risiko Kredit selama Pandemi	7 Oktober 2021, Jakarta	ASTA Consulting
		PSAK Terkini Sesuai Dengan Konversi IFRS	15 Oktober 2021, Bali	Ikatan Akuntan Indonesia
		Pencegahan Korupsi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi dan Organ BUMN/D	3 November 2021, Jakarta	Visi Integritas
		<i>Leading Digital Business Transformation Program</i>	6-10 Desember 2021, Lausanne - Switzerland	International Institute For Management Development (IMD)
		Kepemimpinan di Masa Krisis	25 Februari 2021	BRI Group Leadership Forum

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	Kepemimpinan di Masa Krisis	25 Februari 2021	BRI Group Leadership Forum
		Inovasi, Kolaborasi dan Transformasi Digital, Kunci Akselerasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	14 September 2021	Kementerian Sekretariat Negara
		<i>Knowledge Sharing Program on Enhancing the Development of Small and Medium Industry</i>	13 s.d. 17 September 2021	Biro KTLN, Kemensetneg dan Kemenperin bekerja sama dengan Colombo Plan
		<i>Records and Archive Management: Documenting History of Nation</i>	9 September 2021	Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) & Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
		<i>Training of Trainers on Climate Field School (CFS 2021)</i>	23 s.d 27 Agustus 2021	Kemensetneg, BMKG, dan Colombo Plan
		Webinar - InnoGram Series #2: Mengetahui Konsep <i>Product Development</i>	3 Agustus 2021	Kemensetneg
		Webinar - InnoGram Series #3: Mengetahui Konsep UI/UX	4 Agustus 2021	Kemensetneg
Hadiyanto	Komisaris	Kepemimpinan di Masa Krisis	25 Februari 2021	BRI Group Leadership Forum
		Diklat Penguatan Anti Korupsi Bagi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU INTEGRITAS)	29 September 2021, Jakarta	KPK
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	Kepemimpinan di Masa Krisis	25 Februari 2021	BRI Group Leadership Forum
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i>	25 Maret 2021, Jakarta	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP)
		Pencegahan Korupsi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi dan Organ BUMND	3 November 2021, Jakarta	Visi Integritas
		Kepemimpinan di Masa Krisis	25 Februari 2021	BRI Group Leadership Forum
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i>	25 Maret 2021, Jakarta	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP)
		<i>Integrated Governance Risk Management Compliance</i>	22-23 April 2021, Jakarta	PT. Asia Strategi Consulting
		Kepemimpinan di Masa Krisis	25 Februari 2021	BRI Group Leadership Forum
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris Dalam Menjaga Kepatuhan Bank menuju Era Pengaturan <i>Principle Based</i>	25 Maret 2021, Jakarta	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP)
		PSAK Terkini Sesuai Dengan Konversi IFRS	15 Oktober 2021, Bali	Ikatan Akuntan Indonesia
		Pencegahan Korupsi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi dan Organ BUMND	3 November 2021, Jakarta	Visi Integritas
		Kepemimpinan di Masa Krisis	25 Februari 2021	BRI Group Leadership Forum
Zulnihar Usman	Komisaris Independen	Pencegahan Korupsi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi dan Organ BUMND	3 November 2021, Jakarta	Visi Integritas
		Kepemimpinan di Masa Krisis	25 Februari 2021	BRI Group Leadership Forum
Heri Sunaryadi**)	Komisaris Independen	-	-	-

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

**) Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan & kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Program Orientasi diadakan untuk setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan yang baru. Program Orientasi merupakan program pengenalan perusahaan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris baru. Pelaksanaan program ini berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit kerja perusahaan serta pengkajian dokumen atau program lainnya. Tujuan dari program orientasi Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:

1. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
2. Menambah pengetahuan untuk dan Komisaris baru mengenai Visi, Misi, Profil dan tujuan Bank BRI.
3. Memberikan gambaran tanggung jawab, wewenang dan larangan sebagai Komisaris BRI.



4. Memberikan pedoman, gambaran tugas dan tanggung jawab Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
5. Menambah pemahaman Dewan Komisaris mengenai sistem kerja dan operasional di Bank BRI.
6. Menambah pemahaman mengenai sistem kerja dan operasional di Bank BRI; pemahaman *value creation* untuk para *stakeholders*, manajemen risiko, pemahaman industri perbankan atau bisnis perusahaan anak Bank BRI.
7. Menambah wawasan dan pengetahuan Dewan Komisaris yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis BRI.
8. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.

Realisasi program orientasi bagi Dewan Komisaris Baru di tahun 2021

Peserta	Tempat Pelaksanaan	Pemberi Materi	Materi orientasi
Heri Sunaryadi	Ruang Rapat Dewan Komisaris, Gedung BRI I lantai 16	1. Corporate Secretary Division, 2. Investor Relation Division, 3. Sekretariat Dewan Komisaris 4. Market, Portfolio & Enterprise Risk Management Divisio 5. Policy & Procedure Division	1. Pembekalan Manajemen Risiko bagi Dewan Komisaris BRI 2. Pengetahuan mengenai perusahaan, antara lain Visi dan Misi, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan. 3. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Dewan Komisaris, wewenang, waktu kerja, rapat Dewan Komisaris, hubungan dengan Direksi, aturanaturan/ ketentuan yang relevan. 4. Ketentuan perusahaan terkait GCG, Kode Etik, Budaya Perusahaan dan ketentuan GCG lainnya sebagai penunjang bidang tugas Dewan Komisaris. 5. Kebijakan perusahaan yang relevan dan sesuai kebutuhan program orientasi. 6. Pengenalan proses bisnis Bank BRI dan struktur bisnis secara konsolidasi. 7. Hak dan Kewajiban Dewan Komisaris.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Pengurus Bank (dhi. Dewan Komisaris dan Direksi) wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

No	Jabatan	Level	Masa Berlaku
1	Komisaris	Minimal tingkat 1	4 Tahun
2	Komisaris Independen	Minimal tingkat 2	4 Tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala paling kurang:

1. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau
2. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Adapun tabel sertifikasi manajemen risiko Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi / Refreshment		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Tahun Terbit
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	LSPP	Level 5	2021
Ari Kuncoro*)	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2017
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris / Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2017
Hadiyanto	Komisaris	LSPP	Level 1	2018
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	LSPP	Level 2	2019
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	LSPP	Level 1	2017
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	BSMR	Level 3	2020
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	LSPP	Level 2	2020
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2020
Zulnahr Usman	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2020
Heri Sunaryadi**)	Komisaris Independen	BSMR	Level 2	2021

*) Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

**) Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan & kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang mencakup antara lain kebijakan dan strategi manajemen. Hasil pengawasan tersebut dituangkan dalam Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tiap semester.

Sesuai Surat Kementerian BUMN RI No. S-76/D3.MBU/2014 tanggal 03 Juni 2014 tentang Permintaan Tanggapan atas Laporan Triwulanan, Dewan Komisaris wajib menyampaikan Tanggapan atas Pencapaian Kinerja Perseroan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tiap triwulan. Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah membuat dan menyampaikan Laporan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank sebagai berikut:

OJK	Kementerian BUMN
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja PT BRI Semester II Tahun 2020 tanggal 16 Februari 2021	Evaluasi Kinerja BRI pada tanggal 16 Februari 2021
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester I Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021	Evaluasi Kinerja PT BRI Triwulan I Tahun 2021 tanggal 31 Mei 2021 Evaluasi Kinerja PT. BRI (Persero) Tbk. Triwulan II Tahun 2021 tanggal 25 Agustus 2021 Evaluasi Kinerja PT BRI TW III 2021 tanggal 16 November 2021

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang ditetapkan. Tugas, kewajiban dan tanggung jawab dilaksanakan melalui Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau Rapat dan Evaluasi bersama komite-komite di bawah Dewan Komisaris. dan surat Dewan Komisaris kepada Direksi. Adapun pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2021 antara lain:

- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi selama tahun 2020, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021, Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB).
- Melakukan pemantauan dan memberikan nasihat kepada Direksi terhadap program kerja tahun 2021, aksi korporasi Perseroan, inisiatif strategis Perseroan, aspek manajemen risiko, perkreditan, sinergi BRI dengan entitas anak, penguatan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan BRI, khususnya adanya dampak dari pandemi COVID-19.
- Melakukan pemantauan berkala terhadap penerapan Program Pemerintah terkait Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penerapan seluruh program telah berjalan sesuai dengan ketentuan.
- Melakukan pemantauan berkala pada *stress testing*, perkembangan perkembangan *Loan at Risk* (LaR), Perkembangan Portofolio Restrukturisasi COVID-19, CKPN, dan pengakuan bunga restrukturisasi kredit.
- Melakukan review terhadap pelaksanaan Aksi Korporasi Entitas Anak seperti Ultra Mikro BRI dengan Pegadaian dan PMN, dan Bank Digital Bank Raya.

- Melakukan review dan memberikan persetujuan atas penyediaan dana kepada pihak terkait yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris.
- Melakukan pemantauan berkala terhadap aspek *Reliability, Availability, Security, dan Data Integrity* pada infrastruktur TI dan ekosistem.
- Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan atas usulan RKAP Tahun 2022, RBB Tahun 2022 – 2024, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, dan Recovery Plan.
- Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal.
- Mengusulkan penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian dan laporan PKBL tanggal 31 Desember 2021.
- Melakukan review atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 Perseroan.
- Melakukan review pada *talent pool* Perseroan dalam nominasi pengurus Perseroan, pengurus entitas anak.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi.
- Melakukan review dan memberikan persetujuan terhadap setiap usulan pemberian fasilitas kredit atau tindakan Direksi yang wajib mendapat persetujuan tertulis Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- Memberikan saran dan rekomendasi dalam konsultasi kredit Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola Perseroan secara terintegrasi.
- Melakukan pemantauan berkala terhadap efektivitas *whistleblowing system*.
- Melakukan pemantauan berkala terhadap *progress* penerapan program penguatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU – PPT).

Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2021, Dewan Komisaris telah mengeluarkan sebanyak 20 (dua puluh) surat persetujuan dan 9 (sembilan) surat keputusan yang menjadi wewenang Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

Persetujuan Dewan Komisaris

No	Tanggal	Persetujuan
1	16 Februari 2021	Persetujuan Proses Pengadaan Jasa KAP dalam rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian & Laporan Keuangan Program PKBL BRI Tahun Buku 2021
2	24 Februari 2021	Persetujuan Rencana Audit Tahunan (PAT) SKAI Tahun 2021
3	26 Februari 2021	Persetujuan HPS Pengadaan Jasa KAP dalam rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program PKBL BRI Tahun 2021
4	26 Februari 2021	Persetujuan HPS Penambahan Scope Pekerjaan Pengadaan KAP dalam rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian & Laporan Keuangan Program PKBL BRI Tahun 2020
5	3 Maret 2021	Persetujuan Pengadaan Jasa KAP dalam Rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian & Laporan Keuangan Program PKBL BRI Tahun Buku 2021
6	3 Maret 2021	Persetujuan Pengangkatan <i>Executive Director</i> PT BRI Remittance Co. Ltd.
7	5 Maret 2021	Persetujuan Pencalonan Pengurus PT BRI Agroniaga
8	12 Maret 2021	Persetujuan Addendum SPK Ke-2 Pengadaan Jasa KAP dalam Rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Program PKBL Tahun Buku 2020
9	5 Mei 2021	Persetujuan Perubahan Ruang Lingkup Laporan Keuangan 31 Maret 2021
10	18 Mei 2021	Persetujuan Addendum SPK Pengadaan Jasa KAP dalam rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL BRI tahun buku 2021
11	24 Juni 2021	Persetujuan atas Revisi RBB BRI Tahun 2021-2023 dan RKAP BRI Tahun 2021
12	24 Juni 2021	Persetujuan Rencana Jangka Panjang BRI 2021-2023
13	19 Agustus 2021	Persetujuan Penyediaan Dana kepada Pihak terkait an. PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)
14	20 Agustus 2021	Persetujuan Penetapan Jumlah Saham dan Harga Pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
15	27 September 2021	Persetujuan Penambahan Penyertaan Modal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
16	15 November 2021	Persetujuan Addendum PAT 2021
17	29 November 2021	Persetujuan Rencana Bisnis Bank
18	7 Desember 2021	Persetujuan atas Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Audit KAP untuk Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK BRI Tahun 2021
19	14 Desember 2021	Persetujuan Pengangkatan Komisaris Utama PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS).
20	21 Desember 2021	Persetujuan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait a.n PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
21	22 Desember 2021	Persetujuan Penyediaan Dana Uncommitted Credit Line (UCL) PT. Bank Raya Indonesia, Tbk

Surat Keputusan Dewan Komisaris

No	Tanggal	Persetujuan
1	27 Januari 2021	Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris BRI
2	3 Februari 2021	Pengadaan Jasa Audit KAP dalam Rangka Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL Tahun Buku 2021
3	6 Juli 2021	Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4	28 Juli 2021	Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
5	1 September 2021	Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
6	9 November 2021	Penugasan Pihak Independen Untuk Reviu dan Pemberian Saran Kepada Dewan Komisaris
7	15 November 2021	Pengadaan Jasa Audit untuk Laporan Keuangan dan Laporan Investasi DPLK BRI
8	15 November 2021	Pengangkatan kembali Staf Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
9	28 Desember 2021	Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyusun rencana kerja pada awal tahun dan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) berdasarkan pencapaian kerja Dewan Komisaris dan *Key performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Selain itu, Dewan Komisaris juga

melakukan reviu atas pelaksanaan tugas komite-komite dan Sekretariat Dewan Komisaris sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Berdasarkan hasil revidu serta *self-assessment* kinerja Dewan Komisaris dan Komite di dinyatakan bahwa seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021 dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *self-assessment* atas kinerja Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Indikator atau kriteria kinerja Dewan Komisaris diukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun. Adapun program kerja Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris antara lain meliputi perspektif *Learning & Growth*, *Internal process*, *compliance* dan *financial*. Kriteria penilaian Dewan Komisaris tahun 2021 sebagai berikut:

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)		
1.	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Dewan Komisaris	a	Organisasi Dewan Komisaris Sesuai ketentuan	Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00	
			b	Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Organisasi organ di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00	
		Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	a	Program orientasi Dewan Komisaris baru	Seluruh Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi	2,00	
			b	Anggota Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Anggota Komisaris memenuhi kewajiban Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan	2,00	
			c	Program pendidikan/ <i>training</i> /seminar untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Anggota Komisaris minimal mengikuti satu kali	2,00	
		Sub Total					10,00
		2.	<i>Internal Process</i>	Perencanaan	a	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)
b	Pengesahan RBB dan/atau revisi RBB tepat waktu				RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	5,00	
Pelaksanaan	a			Persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Permohonan persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi diberikan paling lambat 15 hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris	5,00	
	b			Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan minimal empat bulan sekali.	10,00	
	c			Menyusun kebijakan Nominasi dan Pelaksanaan Proses Nominasi Calon pengurus Perseroan termasuk anak perusahaan yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris	a. Surat Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna b. Kebijakan Nominasi Perseroan	2,50	
	d			Menyusun kebijakan remunerasi dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	2,50	
	e			Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	5,00	
Pengawasan	a			Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Seluruh Kanwil dikunjungi minimal satu kali oleh Anggota Dewan Komisaris	7,50	
				Pelaksanaan Reviu pengendalian internal	Reviu atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal	2,50	
	b			Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit internal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	
	c			Pelaksanaan Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	Reviu Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eskternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	



No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator		Parameter	Bobot (%)
			d	Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
		Sub Total				50,00
3	<i>Compliance Prespective</i>	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai <i>Good Corporate Governance</i>	a	Pelaksanaan Penilaian <i>self-assessment</i> GCG	Penilaian <i>self-assessment</i> GCG dilaksanakan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50
	b		Pelaksanaan <i>self-assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian <i>self-assessment</i> GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	
	c		Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	5,00	
	d		Skor penilaian CGPI lebih baik dari tahun sebelumnya	Skor penilaian CGPI sesuai dengan target	2,50	
		Pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	a	Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko .	Pelaksanaan reviu atas Laporan Profil Risiko setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	10,00
	b		Pelaksanaan fungsi kepatuhan	Skor <i>self-assessment</i> reviu pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester	2,50	
	c		Pelaksanaan Reviu atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Pelaksanaan Reviu atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	
	d		Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan Reviu Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	
		Sub Total				30,00
4	<i>Financial Perspective</i>	Penilaian Aspek rentabilitas dan permodalan	a	Laba Bersih	Pencapaian target laba bersih sesuai RKAP	2,50
	b		Aset	Pencapaian target Aset sesuai RKAP	2,50	
	c		NPL	Pencapaian target NPL sesuai RKAP	2,50	
	d		CAR	Pencapaian target CAR sesuai RKAP	2,50	
		Sub Total				10,00
TOTAL						100,00

Pihak yang Melakukan Assessment

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2021 secara *self-assessment* dan dilaporkan dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir
1.	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Dewan Komisaris	a Organisasi Dewan Komisaris Sesuai ketentuan	Organisasi Dewan Komisaris <i>compliance</i> dengan ketentuan yang berlaku	2,00	Organisasi Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK, KBUMN dan Regulator	Organisasi Dewan Komisaris dan Organ dibawah Dewan Komisaris telah <i>comply</i> dengan ketentuan regulator. Organisasi Dewan Komisaris tertuang dalam Pedoman dan Tata Terib Dewan Komisaris BRI	1,00	2,00

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir	
			b	Organisasi Organ Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Organisasi organ dibawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2,00	Organisasi Organ di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK, KBUMN dan Regulator	Organisasi Dewan Komisaris dan Organ di bawah Dewan Komisaris telah <i>comply</i> dengan ketentuan regulator. Organisasi Dewan Komisaris tertuang dalam Pedoman dan Tata Terib Dewan Komisaris BRI	1,00	2,00
		Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris	a	Program orientasi Dewan Komisaris baru	Seluruh Anggota Dewan Komisaris baru mengikuti program orientasi Dewan Komisaris	2,00	Setiap Dewan Komisaris yang baru diangkat memperoleh program orientasi Dewan Komisaris	Selama Tahun 2021 terdapat satu Anggota Dewan Komisaris baru Heru Sunaryadi telah mengikuti program orientasi Dewan Komisaris	1,00	2,00
			b	Anggota Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Seluruh Anggota Komisaris dinyatakan lulus <i>fit and proper test</i> OJK dan memenuhi kewajiban Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan	2,00	Anggota Komisaris memenuhi kewajiban Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan	Sepuluh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan	1,00	2,00
			c	Program pendidikan/ <i>training</i> /seminar untuk meningkatkan kompetensi	Setiap Anggota Komisaris minimal mengikuti satu kali	2,00	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan <i>training</i> minimal satu kali dalam setahun	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan <i>training</i> minimal satu kali dalam setahun	1,00	2,00
Sub Total 1					10,00				10,00	
2	<i>Internal Proses</i>	Perencanaan	a	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	2,50	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	RKAP Dewan Komisaris Tahun 2022 disahkan pada tanggal 30 Desember 2021	1,00	2,50
			b	Pengesahan RBB dan/ atau revisi RBB tepat waktu	RBB disahkan sebelum tanggal 30 November dan Revisi RBB disahkan oleh Dewan Komisaris sebelum 30 Juni setiap tahun	5,00	Dewan Komisaris memberikan persetujuan dan tanggapan atas usulan RBB ke Direksi Paling lambat tanggal 30 November 2018	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas RBB BRI pada tanggal 29 November 2021	1,00	5,00
		Pelaksanaan	a	Persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan	Pemohonan persetujuan Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima oleh Dewan Komisaris	5,00	Dewan Komisaris memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan aksi korporasi atau tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan	Selama tahun 2021, terdapat 20 (dua puluh) persetujuan yang disampaikan Dewan Komisaris atas seluruh permohonan yang disampaikan Direksi	1,00	5,00

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir	
			b	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target	Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan minimal sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dilaksanakan minimal 4 bulan sekali.	10,00	Dewan Komisaris minimal melaksanakan rapat dengan Direksi sebulan sekali dan Rapat Dewan Komisaris minimal 4 (empat) bulan sekali.	selama Tahun 2021 terdapat 12 (dua belas) Rapat Dewan Komisaris, 24 (dua puluh empat) Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan 97 (sembilan puluh tujuh) Rapat Komite di bawah Dewan Komisaris	1,00	10,00
			c	Menyusun kebijakan Nominasi dan Pelaksanaan Proses Nominasi Calon pengurus Perseroan termasuk anak perusahaan yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris	a. Surat Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna b. Kebijakan Nominasi Perseroan	2,50	a. Dewan Komisaris menyampaikan surat Nominasi Pengurus Perseroan paling lambat Minggu III Maret 2020. b. Kebijakan Nominasi Perseroan tersedia sesuai ketentuan	a. Usulan calon Pengurus Perseroan BRI disampaikan melalui tanggal 18 Februari 2020. b. Dewan Komisaris telah menetapkan kebijakan Nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 28 Juli 2015	1,00	2,50
			d	Menyusun kebijakan remunerasi dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan komisaris	a. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna	2,50	a. Terdapat ketentuan Dewan Komisaris terkait Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. b. Rekomendasi struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Seri A Dwi Warna disampaikan paling lambat Minggu I Juni 2021	a. Dewan Komisaris memiliki kebijakan sebagai berikut: 1. Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 2. Kebijakan Tata Kelola Remunerasi 3. Pelaksanaan Pemberian Remunerasi Yang Ditangguhkan b. Dewan Komisaris telah menyampaikan usulan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2021 dan tantiem atas kinerja tahun 2020 kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna tanggal 31 Mei 2021	1,00	2,50
			e	Penunjukkan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	5,00	Rekomendasi KAP yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan perseroan diberikan sebelum RUPS Tahunan Perseroan	Usulan KAP yang melaksanakan audit umum laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2021 disampaikan sebelum RUPST 2021 yaitu tanggal 3 Februari 2021	1,00	5,00

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir	
		Pengawasan	a	Pelaksanaan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Seluruh Kanwil dikunjungi minimal satu kali oleh Anggota Dewan Komisaris	7,50	Selama Tahun 2021 Dewan Komisaris melaksanakan Kunjungan kerja sebanyak 22 kali ke 18 Kanwil	Selama Tahun 2021 Dewan Komisaris melaksanakan Kunjungan kerja sebanyak 26 kali ke 19 Kanwil	1,00	7,50
				Pelaksanaan <i>review</i> pengendalian internal	<i>Review</i> atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal	2,50	<i>Review</i> atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan.	<i>Review</i> atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI dan evaluasi atas pelaksanaan audit internal disampaikan sesuai target pada tanggal 24 Februari 2021	1,00	2,50
			b	Pelaksanaan <i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit internal	<i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil Pemeriksaan Audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sebanyak 4 kali	Rekomendasi tertulis atas hasil pemeriksaan audit internal berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi telah disampaikan setiap triwulan	1,00	2,50
			c	Pelaksanaan <i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal dan tindak lanjut hasil audit eksternal	<i>Review</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Audit eskternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Rekomendasi Dewan Komisaris atas Hasil Pemeriksaan Audit eskternal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi disampaikan setiap triwulan	1,00	2,50
			d	Pelaksanaan <i>Review</i> Laporan Keuangan	<i>Review</i> Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	Telaah Laporan keuangan dilaksanakan setiap triwulan dan berdasarkan penelaahan dan Diskusi SKAI dengan Komite Audit tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material yang disebabkan ketidak konsistenan penyajian pos-pos di dalam <i>Draft</i> Laporan Keuangan Perseroan	1,00	2,50
		Sub Total				50,00				50,00

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir	
3	Compliance Perspective	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai <i>Good Corporate Governance</i>	a	Pelaksanaan Penilaian <i>Self-Assessment</i> GCG	Penilaian <i>Self-Assessment</i> GCG dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	<i>Self-Assessment</i> GCG dilaksanakan 2 kali dalam setahun	Pada tahun 2021, Dewan Komisaris telah melaksanakan <i>self-assessment</i> GCG SM II 2020 dan SM I 2021 dan memberikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi	1,00	2,50
			b	Pelaksanaan <i>Self-Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi	Penilaian <i>Self-Assessment</i> GCG terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Penilaian <i>Self-Assessment</i> GCG Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester	Penilaian <i>self-assessment</i> GCG Terintegrasi tahun 2020 dilaksanakan 2 kali yaitu SA TKT SM II 2020 dan SA TKT SM I 2021 telah dilakukan sesuai ketentuan dan tepat waktu	1,00	2,50
			c	Opini Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Perseroan	Opini Akuntan Publik Tanpa Pengecualian	5,00	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	1,00	5,00
			d	Skor nilai <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI)	Skor CGPI sesuai dengan target	2,50	Target Skor nilai CGPI lebih tinggi dari tahun sebelumnya (93,10)	Skor CGPI tahun 2021 dengan skor 95,10	1,00	2,50
		Pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	a	Pelaksanaan <i>Review</i> atas Laporan Profil Risiko .	Pelaksanaan <i>review</i> atas Laporan Profil Risiko setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	10,00	Terdapat rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris Pelaksanaan <i>review</i> atas Laporan Profil Risiko	Dewan Komisaris telah menyampaikan rekomendasi secara tertulis berupa pendapat dan saran kepada Direksi terhadap laporan profil risiko setiap triwulan	1,00	10,00
			b	Pelaksanaan fungsi kepatuhan	a. Pelaksanaan <i>review</i> atas fungsi kepatuhan BRI dilaksanakan setiap semester. B. Nilai <i>self-Assessment Review</i> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilaksanakan setiap Semester	2,50	peringkat risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (<i>Low to Moderate</i>) menurut <i>assessment</i> OJK	Risiko Kepatuhan masih dalam batas yang baik yaitu peringkat 2 (<i>Low to Moderate</i>)	1,00	2,50
			c	Pelaksanaan <i>Review</i> atas Laporan Profil Risiko dan Fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank.	Pelaksanaan <i>review</i> atas fungsi Kepatuhan serta tingkat kesehatan bank dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Terdapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas <i>review</i> fungsi kepatuhan dan tingkat kesehatan bank yang dilaksanakan setiap semester	Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran kepada Direksi atas pelaksanaan fungsi Kepatuhan dan tingkat kesehatan bank Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021	1,00	2,50

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Parameter	Bobot (%)	Target	Pencapaian	Nilai	Nilai Akhir	
			d	Pelaksanaan <i>review</i> Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi.	Pelaksanaan <i>Review</i> Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu sesuai target	2,50	Terdapat rekomendasi tertulis Dewan Komisaris atas Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap Semester	Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi atas Kecukupan Pengendalian Intern Terintegrasi, Profil Risiko Terintegrasi, Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Laporan Tahunan Tata Kelola Terintegrasi Semester II tahun 2020 dan Semester I tahun 2021	1,00	2,50
			Sub Total			30,00				30,00
4	<i>Financial Perspective</i>	Penilaian Aspek rentabilitas dan permodalan	a	Laba Bersih	Pencapaian target laba bersih sesuai RKAP	2,50	Rp.23,53 Triliun	Rp.32,21 Triliun		2,50
			b	Aset	Pencapaian target Aset sesuai RKAP	2,50	Rp.1.505,92 Triliun	Rp.1.572,76 Triliun		2,50
			c	NPL	Pencapaian target NPL sesuai RKAP	2,50	3,38%	3,08%		2,50
			d	CAR	Pencapaian target CAR sesuai RKAP	2,50	22,07%	25,28%		2,50
			Sub Total			10,00				10,00
TOTAL						100,00				100,00

Penilaian Kinerja Direksi

Penjelasan tentang Penilaian Kinerja Direksi disajikan pada bagian Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan KPI yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan dilakukan setiap setahun sekali. Adapun kriteria penilaian (KPI) kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu *Learning & Growth Perspective*, *Internal Process Perspective*, *Compliance Perspective*. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2021 komite Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing komite. Informasi pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) Komite di bawah Dewan Komisaris disajikan pada tiap-tiap bagian Komite Dewan Komisaris.

1. Komite Audit

Komite Audit membantu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan

dalam melakukan pemantauan dan proses perbaikan secara berkesinambungan atas kebijakan, prosedur dan implementasi pada seluruh tingkatan organisasi Perseroan termasuk dalam pengendalian internal dan kecukupan proses laporan keuangan. Selama tahun 2021, Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan melaksanakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali dan memberikan rekomendasi diantaranya:

1. Pelaksanaan penelaahan atas Perencanaan Audit Tahunan SKAI.
2. Melakukan rewiu atas laporan pokok-pokok hasil audit SKAI setiap triwulan.
3. Penyusunan rekomendasi antara lain penelaahan audit laporan keuangan dan laporan PKBL, penunjukan KAP, evaluasi penyesuaian *Annual Audit Plan*, Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan.
4. Melakukan koordinasi dengan SKAI dan/atau unit kerja terkait untuk melakukan diskusi dan pembahasan terhadap isu-isu terkini yang berdampak terhadap Perseroan.
5. Membantu dalam implemenasi *Internal Control over Financial Report* (BRI).
6. Penguatan Satuan Kerja Audit Terintegrasi dalam tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan BRI.



2. Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi remunerasi dan nominasi. Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali selama periode tahun 2021. Pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi diantaranya:

1. Memberikan rekomendasi/usulan calon yang memenuhi syarat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Mengusulkan sistem remunerasi yang sesuai bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Usulan susunan pengurus/manajemen di Perusahaan Anak.

3. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terhadap penerapan manajemen risiko Perseroan dan kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan Perseroan. Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali selama periode tahun 2021. Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko diantaranya:

1. Melakukan evaluasi kecukupan kebijakan manajemen risiko, kebijakan umum perkreditan, APU PPT.
2. Melakukan evaluasi profil risiko Perseroan secara berkala.
3. *Review* terhadap usulan permohonan kredit yang mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan penyediaan kepada Pihak Terkait, baik permohonan kredit baru, perpanjangan dan suplesi.
4. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap kecukupan modal Perseroan sesuai profil risiko Perseroan secara menyeluruh, dan melakukan *review risk appetite* Perseroan.
5. Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi korporasi yang meliputi namun tidak terbatas pada tambahan modal pada perusahaan anak, penyertaan modal/akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan dan rencana strategis Perseroan lainnya.
6. Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan
7. Melakukan evaluasi Rencana Aksi (*recovery plan*) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan.
8. *Review* permohonan lainnya yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris

4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola Konglomerasi Keuangan Perseroan. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan rapat sebanyak 15 kali selama tahun 2021. Pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi diantaranya:

1. Melakukan evaluasi pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan fungsi SKAI terintegrasi, Kepatuhan Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi.

3. Melakukan evaluasi terhadap realisasi KPI Perusahaan Anak.
4. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan permodalan, manajemen likuiditas, transaksi intra-group, dan manajemen risiko penyediaan dana.
5. Melakukan evaluasi terhadap penilaian (*Self-Assessment*) tata kelola terintegrasi.
6. Membantu dalam penguatan pelaksanaan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan BRI.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Komisaris

Masa jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang, dan pengunduran diri).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar Direksi secara kolegial bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Tanggung Jawab kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

1. Melaksanakan keputusan RUPS.
2. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya serta perubahannya untuk disampaikan guna mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

3. Menyelenggarakan RUPS berdasarkan permintaan tertulis dari satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah.
4. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berisi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh Komisaris dan Direksi termasuk keluarga mereka dalam Bank dan di perusahaan lain.
5. Mengkonsultasikan pemberian kredit di atas jumlah tertentu kepada Dewan Komisaris dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

Tanggung Jawab Akuntansi dan Laporan Tahunan

1. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Bank sesuai dengan praktik yang umum berlaku bagi perusahaan.
2. Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
3. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan berkala.

Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko

1. Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
2. Memonitor dan menilai adanya proses manajemen yang baik untuk menilai kecukupan sistem manajemen risiko dan pengendalian intern, pelaporan keuangan dan kepatuhan.
3. Memastikan adanya suatu sistem pengendalian yang efektif untuk menjamin keandalan dan integritas informasi, kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, peraturan dan undang-undang yang berlaku, penjagaan atas harta kekayaan Bank, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien, serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk operasional.

Tanggung Jawab Terkait Organisasi

Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Hak dan Wewenang Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi memiliki kewenangan di bawah ini sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan:

1. Menetapkan Kebijakan yang sesuai dengan pengelolaan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada orang dan/atau badan lain.

3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiunan, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan.
6. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya diluar pokok yang dilakukan dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan.
8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

Kriteria Direksi

Kriteria Direksi BRI telah memenuhi persyaratan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Menteri BUMN No.PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta ketentuan yang berlaku lainnya.

Kualifikasi Umum

1. Orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah:
 - a. Dinyatakan pailit;
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau

- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Bank, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
4. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta;
 - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
 - d. Pengurus partai politik dan atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan atau
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016

Mendapatkan predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bank Indonesia). Pemenuhan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.

Pembidangan Tugas Direksi

Adapun pembidangan tugas Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Sunarso	Direktur Utama	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: <ul style="list-style-type: none"> • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin seluruh Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan; dan • pencapaian target perusahaan.
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	Menjalankan tugas dan wewenang dalam: <ul style="list-style-type: none"> • mengarahkan strategi dan rencana kerja Perusahaan; • memimpin seluruh Direktorat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan; dan • pencapaian target perusahaan.
Haru Koesmahargyo*	Direktur Keuangan	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> • pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen; • penyusunan & implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Keuangan; • pencapaian target Direktorat Keuangan; • pembinaan bisnis Perusahaan Anak; • pembinaan kinerja Kantor Wilayah atau Kantor Cabang Khusus; dan • pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan stakeholder terkait.
Viviana Dyah Ayu Retno**	Direktur Keuangan	

Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perbankan dan relevan dengan jabatannya, pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

Persyaratan Integritas

Dalam rangka memenuhi persyaratan integritas, calon anggota Direksi wajib memiliki:

1. Akhlak dan moral yang baik.
2. Komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi BRI telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board charter*) Nokep B.299-DIR/SKP/04/2020 tanggal 11 November 2015. *Board charter* Direksi berisi tentang aturan dan panduan tentang tata kerja Direksi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai visi dan misi yang ingin dicapai oleh Perseroan.

Board charter Direksi berisi antara lain:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Direksi
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Wewenang dan kewajiban Direksi
4. Nilai-nilai perusahaan
5. Etika kerja Direksi
6. Waktu kerja Direksi
7. Rapat Direksi
8. Struktur Keanggotaan Direksi
9. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Direksi

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> • pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen; • penyusunan & implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Wholesale dan Kelembagaan; • pencapaian target bisnis wholesale dan kelembagaan; • pembinaan bisnis Perusahaan Anak; • pembinaan kinerja Kantor Wilayah atau Kantor Cabang Khusus; dan • pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.
Supari	Direktur Bisnis Mikro	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> • pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen; • penyusunan & implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Mikro; • pencapaian target bisnis mikro, inkubasi bisnis serta pelaksanaan & penyaluran Program Pemerintah; • pembinaan bisnis Perusahaan Anak; • pembinaan kinerja Kantor Wilayah atau Kantor Cabang Khusus; dan • pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.
Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> • pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen; • penyusunan & implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Digital dan Teknologi Informasi; • pencapaian target Direktorat Digital dan Teknologi Informasi; • pembinaan bisnis Perusahaan Anak; • pembinaan kinerja Kantor Wilayah atau Kantor Cabang Khusus; dan • pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.
Priyastomo*	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> • pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen; • penyusunan & implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Kecil dan Menengah;
Amam Sukriyanto**	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> • pencapaian target bisnis program, kecil dan menengah; • pembinaan bisnis Perusahaan Anak; • pembinaan kinerja Kantor Wilayah atau Kantor Cabang Khusus; dan • pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.
Ahmad Solichin Lutfiyanto***	Direktur Kepatuhan	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> • pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen; • penyusunan & implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Kepatuhan; • pencapaian target Direktorat Kepatuhan; • pembinaan bisnis Perusahaan Anak; • pembinaan kinerja Kantor Wilayah atau Kantor Cabang Khusus; dan • pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> • pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen; • penyusunan & implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Manajemen Risiko; • pencapaian target Direktorat Manajemen Risiko; • pembinaan bisnis Perusahaan Anak; • pembinaan kinerja Kantor Wilayah atau Kantor Cabang Khusus; dan • pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> • pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen; • penyusunan & implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Bisnis Konsumer; • pencapaian target bisnis konsumer; • pembinaan bisnis Perusahaan Anak; • pembinaan kinerja Kantor Wilayah atau Kantor Cabang Khusus; dan • pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Herdy Rosadi Harman*	Direktur Human Capital	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen; penyusunan & implementasi strategi serta pengembangan Direktorat <i>Human Capital</i>; pencapaian target Direktorat <i>Human Capital</i>; pembinaan bisnis Perusahaan Anak; pembinaan kinerja Kantor Wilayah atau Kantor Cabang Khusus; dan pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.
Agus Winardono**	Direktur Human Capital	
Arga Mahanana Nugraha**	Direktur Jaringan dan Layanan	Menjalankan tugas dan wewenang: <ul style="list-style-type: none"> pencapaian target Perusahaan dalam Kontrak Manajemen; penyusunan & implementasi strategi serta pengembangan Direktorat Jaringan dan Layanan; pencapaian target Direktorat Jaringan dan Layanan; pembinaan bisnis Perusahaan Anak; pembinaan kinerja Kantor Wilayah atau Kantor Cabang Khusus; dan pengelolaan Organisasi Direktorat dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> terkait.

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021.

** Diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif tanggal 14 April 2021.

*** Dialihkan penugasannya semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Kepatuhan pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Hubungan Afiliasi Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sunarso	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Haru Koesmahargo*	Direktur Keuangan		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Viviana Dyah Ayu Retno**	Direktur Keuangan		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Supari	Direktur Bisnis Mikro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Priyastomo*	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Amam Sukriyanto**	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Ahmad Solichin Lutfiyanto***	Direktur Kepatuhan		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi													
		Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Herdy Rosadi Harman*	Direktur Human Capital		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Agus Winardono**	Direktur Human Capital		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Arga Mahanana Nugraha**	Direktur Jaringan dan Layanan		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021.

** Diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif tanggal 14 April 2021.

*** Dialihkan penugasannya semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Kepatuhan pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan tata Kelola Bagi Bank Umum dan Anggaran Dasar Perseroan Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta.
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
4. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/ atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Sunarso	Direktur Utama	-	-
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	-	-
Haru Koesmahargo*	Direktur Keuangan	-	-
Viviana Dyah Ayu Retno**	Direktur Keuangan	-	-
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	-	-
Supari	Direktur Bisnis Mikro	-	-
Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	-	-
Priyastomo*	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	-	-
Amam Sukriyanto**	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	-	-
Ahmad Solichin Lutfiyanto***	Direktur Kepatuhan	-	-
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	-	-
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	-	-
Herdy Rosadi Harman*	Direktur Human Capital	-	-
Agus Winardono**	Direktur Human Capital	-	-
Arga Mahanana Nugraha**	Direktur Jaringan dan Layanan	-	-

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021.

** Diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif tanggal 14 April 2021.

*** Dialihkan penugasannya semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Kepatuhan pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Selama tahun 2021, seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan kebijakan terkait

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan, serta reputasi Perseroan maupun perusahaan anaknya. Selain itu, anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan Perseroan selain remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) dan tantiem yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepemilikan Saham Direksi

Direksi wajib mengungkapkan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BRI maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Adapun kepemilikan saham Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		BRI	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Sunarso	Direktur Utama	1.810.356 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	815.957 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Haru Koesmahargo*	Direktur Keuangan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Viviana Dyah Ayu Retno**	Direktur Keuangan	473.500 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	899.841 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Supari	Direktur Bisnis Mikro	1.923.514 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	2.511.792 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Priyastomo*	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	2.853.120 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Amam Sukriyanto**	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	537.454 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Ahmad Solichin Lutfiyanto***	Direktur Kepatuhan	2.621.270 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	751.200 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	2.459.000 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Herdy Rosadi Harman*	Direktur Human Capital	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Agus Winardono**	Direktur Human Capital	509.981 lembar	Nihil	Nihil	Nihil
Arga Mahanana Nugraha**	Direktur Jaringan dan Layanan	374.485 lembar	Nihil	Nihil	Nihil

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021.

** Diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif tanggal 14 April 2021.

*** Dialihkan penugasannya semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Kepatuhan pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Direksi yang telah diatur dalam Pedoman Tata Kerja Direksi yaitu:

Etika Rapat

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Selain rapat Direksi, bersama Dewan Komisaris, Direksi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris.

2. Rapat pada prinsipnya dilaksanakan pada hari tertentu di bulan berjalan. Rapat dapat dijadwalkan pada hari lainnya apabila:

- Dipandang perlu oleh 1 (satu) orang atau lebih anggota Direksi.
- Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
- Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. Berdasarkan pertimbangan tertentu, rapat dapat diselenggarakan dengan cara konferensi (melalui media elektronik, antara lain media telekonferensi, video conference atau sarana media elektronik lainnya).

- Direksi wajib menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dengan agenda yang disesuaikan dengan Kalender Manajemen. Penjadwalan rapat tersebut ditetapkan dalam Rapat Direksi.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan. Selain rapat yang telah terjadwal tersebut, bahan rapat disampaikan paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa adanya keberatan berdasarkan suara terbanyak dari anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir.
- Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi atau kontrak, baik yang telah ada maupun akan ada, dengan Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat. Oleh karenanya, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak berhak mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Pemanggilan Rapat

- Pemanggilan rapat disampaikan langsung kepada setiap peserta rapat secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik dan/atau pesan digital dan/atau sarana lainnya dengan tanda terima yang memadai.
- Pemanggilan rapat tersebut mencantumkan agenda, pemateri, tanggal, waktu dan tempat rapat.

Kuorum dan Pengambilan Keputusan

- Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Direktur Utama memimpin rapat Direksi. Komisaris Utama memimpin rapat Direksi – Dewan Komisaris.
- Keputusan dalam rapat diambil oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan suara yang sah secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
- Setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diwakilinya dengan sah dalam rapat.
- Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

Risalah Rapat

- Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang merupakan bukti sah untuk anggota Direksi mengenai keputusan yang diambil.
- Risalah rapat sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan.
 - Agenda yang dibahas.
 - Daftar hadir yang ditandatangani peserta rapat.
 - Lamanya rapat berlangsung.
 - Keputusan yang diambil.
 - Hal-hal yang dibicarakan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan dan/atau keberatan (*dissenting opinion*) beserta alasannya, jika ada.
- Risalah rapat didokumentasikan oleh Perseroan.

Rencana Rapat Direksi Tahun 2022

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Adapun jadwal Rapat Direksi diagendakan dilaksanakan setiap hari Senin. Rapat Direksi dapat dijadwalkan pada hari lainnya apabila dipandang perlu. Dalam rangka mendukung kinerja dan perencanaan kegiatan setiap awal tahun melalui Rapat Direksi, Direksi telah menyusun agenda rutin yang akan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

Agenda Rapat Direksi yang rutin ditetapkan Direksi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Agenda Rapat Tahun 2022	Waktu
1	Evaluasi Kinerja dan Pelaporan tahun buku 2021	Minggu ke II Januari 2022
2	Evaluasi Kinerja Triwulan I tahun 2022	Minggu ke I April 2022
3	Evaluasi Kinerja Triwulan II tahun 2022	Minggu ke I Juli 2022
4	Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2022	Minggu ke II Oktober 2022
5	Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2022	Minggu ke II Januari 2023
6	Evaluasi dan rencana Revisi Rencana Bisnis Bank 2020-2022	Minggu ke II Juni 2022
7	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2022	Minggu ke IV Juni 2022
8	Aktivitas operasional dan putusan perusahaan yang membutuhkan persetujuan melalui Rapat Direksi	Minimal dilaksanakan 1 bulan sekali di tahun 2022

Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
1	04 Januari 2021	Update Balance Sheet Akhir Tahun 2020. Rencana Corporate Action. Usulan Vaksinasi COVID-19 Untuk Pekerja.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	11	12	91,67%
2	05 Januari 2021	BRI Continuous Performance Management (BRI Core) dan Rakerwil 2021 – Strengthen for Growth. Update Corporate Action.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	11	12	91,67%
3	11 Januari 2021	Update Progress Corporate Action. Pembahasan Executive Education Program (EEP) dan Brilian Society Elite Program (BSEP). Update RUPSLB 2021.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	11	12	91,67%
4	18 Januari 2021	Operational Excellence	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	11	12	91,67%
5	25 Januari 2021	Penetapan Direktur Pengganti, Wilayah Binaan dan Pembinaan Perusahaan Anak. Update Acara BRI Group Economic Forum 2021. Project Portfolio in Monitoring PMO Posisi Desember 2020. Update Pelaksanaan Analyst Meeting dan Publikasi Laporan Keuangan BRI Tahun 2020.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	10	12	83,33%
6	01 Februari 2021	Update Materi RDP. Update CA Polis Saving Plan. Rencana Relokasi Corporate University.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
7	08 Februari 2021	Update Corporate Action. Rencana Corporate Action. Update Corporate Governance Guidelines.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
8	09 Februari 2021	Update Rencana Relokasi Corporate University (Lanjutan). Update Piloting di Kanwil Surabaya.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir. HC	Dir. Keu	Dir. HBL	Dir. Ritmen	Dir. TIO	Dir. MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
9	15 Februari 2021	BMS Index Q4 – 2020. Tata Kelola Organisasi dan <i>Performance Management</i> . Tim Implementasi BRI Financial <i>Enterprises System</i> . <i>Update Credit Portfolio Risk & CKPN</i> . <i>Update Stakeholder Management Mapping</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
10	22 Februari 2021	Rencana <i>Corporate Action</i> . <i>Update Progress Corporate Action</i> . <i>Update Rencana RUPS Perusahaan Anak</i> . <i>Update Rencana Pelaksanaan Program BritAma FSTVL Jilid 2</i> . Proses Pengusulan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak. Penetapan Penilaian Kinerja Unit Kerja Tahun 2020 dengan mempertimbangkan Faktor Tantangan. <i>Update Pengelolaan Pekerja Kontrak dan Outsourcing</i> . <i>Update Leadership Forum</i> .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
11	01 Maret 2021	Konsep Brilian <i>Young Great Leader Indonesia</i> . <i>BRI Microfinance Outlook 2021</i> . <i>Dividen Payout Ratio dan Update SBDK</i> . Kesiapan Bank BRI untuk menjalankan Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia. <i>Review Pengupahan</i> .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
12	08 Maret 2021	New SME Business Model. <i>Review Komposisi Upah Pokok</i> . <i>Challenges Divisi & AIW</i> . Tindakan Simbolis (<i>Symbolic Acts</i>). Fungsi Organisasi Direktorat Digital & Teknologi Informasi.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%



No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
13	15 Maret 2021	Update Corporate Action. Pengelolaan Pekerja Kontrak BRI. Update RUPST Tahun 2021. Fungsi Organisasi Direktorat Jaringan dan Layanan. Fungsi Organisasi Direktorat. Kelembagaan dan BUMN. Update Kepengurusan Dana Pensiun, YKP dan YBM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
14	22 Maret 2021	Update Diskontinue Libor. Usulan Penyelenggaraan SIPK 2020 dan Ketentuan SIPK 2021. Update Corporate Action. PMO Project Report.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
15	29 Maret 2021	Update Implementasi Kebijakan BRI Young Leader Indonesia. Update BOC Charter.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%	
16	5 April 2021	Agenda Re-Modelling Job Family dan Job Function. Update Corporate Action. Piloting Project di Kanwil Surabaya dan Kanwil Medan.	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	1	8	12	75%	
17	12 April 2021	SIPK Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Alternatif Rencana Penyelesaian Kredit Kerja Sama Perusahaan Asuransi Jiwa. Update Organisasi. Putusan Postur Revisi RKAP 2021, RBB 2021-2023.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%	
18	19 April 2021	Online Reputation di Sosial Media. Update Sektor Infrastruktur BUMN di BRI. Update Hasil Alokasi Over Head Cost. Update Corporate Action. Update Vaksin KBUMN.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%	

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
19	26 April 2021	BRI Lian Club. Laporan <i>Culture Activation Program</i> 2020. BRI Micro SME Index Q1-2021. KPI Kolegial. Analisis Komoditas Karet. <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
20	3 Mei 2021	<i>Update</i> BRISpot. <i>Update Corporate Action</i> . Profitability Per Segmen.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
21	10 Mei 2021	<i>Update</i> Laporan Menara BRI. Pembangunan di Rawasari. <i>Update</i> Kesiapan Layanan, Operasional dan Komunikasi pada Periode Lebaran 2021.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
22	17 Mei 2021	<i>Update</i> Laporan Keuangan Triwulan I. <i>Update</i> Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
23	24 Mei 2021	Persiapan <i>Analyst Meeting</i> Q1 2021. <i>Update Corporate Action</i> . Kajian Penjajakan Bisnis Baru Perusahaan. BRI <i>Continuous Performance Management</i> (BRI Core).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
24	31 Mei 2021	Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bangga. Buatan Indonesia 2021 di Jawa Timur. Pembentukan Jabatan Penyuluh Digital BRI. <i>Highlight</i> Audit Q1 2021. <i>Update</i> Program BRIFIRST. <i>Update Corporate Action</i> . <i>Fintech in Bank: Competition & Opportunities</i> .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
25	7 Juni 2021	Konsolidasi <i>Learning dan Research & Innovation</i> Institute Kementerian BUMN. Pemaparan Hasil <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Pemenuhan Komitmen Internal (BOC <i>Focus of Concerns</i>). <i>Update Corporate Action</i> . Pembahasan RBB BRI 2021-2023 Revisi.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
26	14 Juni 2021	Putusan Skema Bonus <i>Pool</i> . <i>Update Corporate Action</i> . <i>Update Progress Project BRIFIRST</i> . <i>Progress Report PMO</i> .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
27	21 Juni 2021	<i>Integrated Commodity Chain</i> (Ekosistem Endhog di Blitar). <i>Update</i> Rencana Penjajakan Potensi <i>anorganic growth</i> Bisnis Konsumer. RJP, RBB dan SO BRI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	11	12	91,67%	
28	28 Juni 2021	Konsep <i>Variable Pay</i> 2021. <i>Rebranding</i> BRI Agro. <i>Update Corporate Action</i> . <i>Update Calendar Event Corporate & Sponsorship</i> .	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	11	12	91,67%	
29	05 Juli 2021	<i>Update Operational Transformation Project</i> 2021. <i>Update RUPSLB</i> BRI 2021. Putusan <i>Design Kalender</i> BRI 2022. <i>Update Audit Eksternal</i> .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
30	12 Juli 2021	<i>Update Corporate Action</i> . Implementasi SME Center Selindo. <i>Credit Risk Portfolio Update</i> . <i>Update Breakthrough</i> Direktorat Konsumer. <i>Update Audit</i> .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
31	15 Juli 2021	<i>Update Corporate Action</i> .	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir. HC	Dir. Keu	Dir. HBL	Dir. Ritmen	Dir. TIO	Dir. MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
32	19 Juli 2021	Penetapan Tim Implementasi SI <i>Brivolution 2.0. Rebranding BRI Agro. ICoFR (Internal Control Over Financial Report). Update Rakernas BRI.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
33	26 Juli 2021	<i>Update BRILianpreneur 2021. Update BRINETS Enhancement.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
34	02 Agustus 2021	<i>Update Pelaksanaan Analyst Meeting. Hasil Audit dan Publikasi Laporan Keuangan TW 2 Tahun 2021. Penyesuaian RBB 2021-2023. Persetujuan Penghapusan dan Pengalihan Aktiva Tetap Milik BRI.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
35	09 Agustus 2021	<i>Update Transaction Banking. Kajian Bisnis Baru Perusahaan BMS Index Q2 – 2021. Laporan Progress Model Bisnis Klaster Padi.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
36	10 Agustus 2021	<i>Update Corporate Action.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
37	16 Agustus 2021	<i>ESG Strategic Initiative. Update Audit. Update Corporate Action. Update RUPSLB. Implementasi UUCK Terkait Imbalan Pasca Kerja. Persiapan Implementasi Standar Nasional Open API.</i>	1	1	1	1	1	-	1	-	1	-	1	1	9	12	75,00%	
38	23 Agustus 2021	<i>Asuransi Kredit Konsumtif. Update Perhitungan Kebutuhan Kalender 2022. Update Project Portofolio Agustus 2021.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
39	30 Agustus 2021	<i>Update Corporate Action. Progress dan Follow-Up Strategic Workforce Planning.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
40	6 September 2021	<i>Update Kinerja dan Strategi Menghadapi US Tapering. Update Asuransi Kredit Konsumtif.</i>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%



No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi											Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum		
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir HC	Dir. Keu	Dir HBL	Dir Ritmen	Dir TIO	Dir MIK	DirJaLan	DirKep				DirKons	
41	13 September 2021	Update Postur RKAP 2022. Update Culture Journey.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
42	20 September 2021	Update Distribution Transformation. Piloting Pencairan Kredit Korporasi. Update Stok Kartu Ber-chip. Update Corporate Action. Update RUPSLB.	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%
43	27 September 2021	Prognosa Timeline Evaluasi Kinerja dan Pembayaran Variable Pay 2022. Usulan Implementasi Stakeholder Management. Update Rencana BRI Danareksa Sekuritas dan Danareksa Investment Management. Update Pembahasan RUU KUP.	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	1	10	12	83,33%	
44	4 Oktober 2021	HUT BRI 126. Konsep Variabel Pay. Update TC Asuransi Kredit Konsumtif dari IFG.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%	
45	11 Oktober 2021	Update Ketenagakerjaan di BRI. Update Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Project Portfolio Report. The Transformation Journey. Update Stakeholder Action.	1	1		1	1		1	1	1	1	1	1	10	12	83,33%	
46	18 Oktober 2021	Brilianpreneur 2021. Update Pemaparan Materi CGPI.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	11	12	91,67%	
47	25 Oktober 2021	Analys Meeting Laporan Keuangan Q3 2021 dan BMS Index Q3 – 2021. Update Corporate Action. Update Perhitungan ATMR Risiko Operasional.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	11	12	91,67%	
48	01 November 2021	Implementasi UUCK terhadap Pekerja Kontrak FL. FriF.	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	9	12	75,00%	
49	08 November 2021	Update Hasil Challenge Session. Organisasi UKO. Penetapan KPI UKO dan KPI Merdeka.	-	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	9	12	75,00%	

No.	Tanggal	Agenda	Daftar Hadir Direksi												Direktur yang Hadir	Total Direksi	Kuorum	
			Dirut	Wadirut	Dir. MR	Dir. HC	Dir. Keu	Dir. HBL	Dir. Ritmen	Dir. TIO	Dir. MIK	DirJaLan	DirKep	DirKons				
50	15 November 2021	Update Corporate Project. Agenda RBB dan RKAP. Risk Appetite Statement 2022.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100,00%
51	22 November 2021	Hyperlocal Ecosystem PARI. Update Organisasi UKO. Update Rakernas.	1	-	1	0	1	1	1	1	1	1	1	-	9	12	75,00%	
52	29 November 2021	Usulan Review Manfaat THT. Usulan Penyetaraan PPIP. Usulan Utilisasi. Update Corporate Project.	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	12	91,67%	
53	06 Desember 2021	BRI Corpu Pandemic and Post Pandemic. PMO Project Report. Update Perundingan PKB. Update Treasury Stock.	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	11	12	91,67%	
54	13 Desember 2021	Performance Management. Manfaat Pasca Kerja. Product Alignment.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
55	20 Desember 2021	Update Persiapan Natal dan Tahun Baru 2021. Update Pelaksanaan BI Fast.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	
56	27 Desember 2021	Prognosa Kinerja BRI 2021. Culture Activation. Update Shareholder Action.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Bab Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Sunarso	Direktur Utama	56	54	96,43%	5	4	80%	4	4	100%
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	56	54	96,43%	5	5	100%	4	4	100%
Haru Koesmahargyo*	Direktur Keuangan	4	4	100,00%	3	3	100%	1	1	100%

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Viviana Dyah Ayu Retno**	Direktur Keuangan	52	51	98,08%	8	8	100%	4	4	100%
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	56	53	94,64%	5	5	100%	4	4	100%
Supari	Direktur Bisnis Mikro	56	53	94,64%	4	4	100%	4	3	75%
Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	56	52	92,86%	4	4	100%	4	4	100%
Priyastomo*	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	4	4	100,00%	-	-	-	1	1	100%
Amam Sukriyanto**	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	52	50	96,15%	6	6	100%	4	4	100%
Ahmad Solichin Lutfiyanto***	Direktur Kepatuhan	56	50	89,29%	6	6	100%	4	4	100%
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	56	54	96,43%	10	10	100%	4	4	100%
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	56	54	96,43%	4	4	100%	4	4	100%
Herdy Rosadi Harman*	Direktur Human Capital	4	4	100,00%	4	4	100%	1	1	100%
Agus Winardono**	Direktur Human Capital	52	51	98,08%	5	5	100%	4	4	100%
Arga Mahanana Nugraha**	Direktur Jaringan dan Layanan	56	51	91,07%	4	4	100%	4	4	100%

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021.

** Diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif tanggal 14 April 2021.

*** Dialihkan penugasannya semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Kepatuhan pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Pelatihan dan Program Orientasi Anggota Direksi

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi telah diatur pada Surat Keputusan Direksi NOKEP S.43-DIR/SKP/01/2018 tentang Kebijakan Program Orientasi dan Pendidikan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan program pendidikan Direksi bertujuan untuk:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan Direksi yang sesuai dengan bidangnya dan perkembangan bisnis.
2. Menambah relasi dan hubungan dengan pemangku kepentingan di luar.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang didukung oleh pengetahuan hasil pendidikan.
4. Mengembangkan pengetahuan profesional, kompetensi dan kemampuan kepemimpinan para Direksi selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri dan tata kelola perusahaan yang baik.
5. Bahwa program pendidikan, pengenalan dan pengembangan bagi Direksi merupakan bagian penting dari proses belajar dan mengembangkan Perseroan di samping penguatan struktur dan penguatan *governance* Perseroan.

Program pendidikan dilaksanakan oleh anggota Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Dewan Komisaris selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Sunarso	Direktur Utama	-	-	-
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	-	-	-
Haru Koesmahargyo*	Direktur Keuangan	-	-	-
Viviana Dyah Ayu Retno**	Direktur Keuangan	<i>Succeeding as a Strategic CFO</i>	01/12/2021 - 04/12/2021; Online	Harvard Business School
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	<i>Effective Decision Making: Thinking Critically and Rationally</i>	08/11/2021 - 11/11/2021; Amerika Serikat	Wharton
Supari	Direktur Bisnis Mikro	-	-	-
Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	<i>Venture Capital</i>	06/12/2021 - 10/12/2021; Online	Wharton
Priyastomo*	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	-	-	-
Amam Sukriyanto**	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Program <i>Onboarding Directorship</i> Program Angkatan III Tahun 2021	01/10/2021 - 25/11/2021; Online	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)
		<i>Effective Decision Making: Thinking Critically and Rationally</i>	08/11/2021 - 11/11/2021; Amerika Serikat	Wharton
Ahmad Solichin Lutfiyanto***	Direktur Kepatuhan	-	-	-
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	<i>Loan Covid Restructuring after Implementation of POJK 48 2020</i>	5 Agustus 2021, Jakarta	BARa Risk Forum
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	-	-	-
Herdy Rosadi Harman*	Direktur Human Capital	-	-	-
Agus Winardono**	Direktur Human Capital	<i>Compensation Committees New Challenges, New Solutions</i>	17/11/2021 - 19/11/2021; Amerika Serikat	Harvard Business School
Arga Mahanana Nugraha**	Direktur Jaringan dan Layanan	<i>High Potentials Leadership Program - In Class</i>	17/10/2021 - 22/10/2021; Amerika Serikat	Harvard Business School

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021.

** Diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif tanggal 14 April 2021.

*** Dialihkan penugasannya semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Kepatuhan pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Bentuk program orientasi bagi Direksi baru dapat berupa:

- Meminta presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan unit kerja/divisi terkait.
- Mengadakan pertemuan dengan anggota Dewan Komisaris/Direksi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan terkini yang ada di Perseroan atau informasi lain yang dibutuhkan.
- Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi usaha Bank BRI.
- Meminta data/dokumen terkait visi dan misi Perseroan, kebijakan Bank BRI, Strategi dan Rencana jangka menengah dan panjang, kinerja serta keuangan Bank BRI.
- Melakukan diskusi dengan Unit Kerja terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu serta memberikan *feedback* kepada Unit Kerja terkait.

Selama tahun 2021, program orientasi bagi Direksi baru yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Program Orientasi	Pelaksanaan
Amam Sukriyanto	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	<i>Update</i> Strategi & Kinerja Bisnis Direktorat	Triwulan I tahun 2021
Arga Mahanana Nugraha	Direktur Jaringan dan Layanan	<i>Update</i> Strategi & Kinerja Bisnis Direktorat	Triwulan I tahun 2021
Viviana Dyah Ayu Retno	Direktur Keuangan	<i>Update</i> Strategi & Kinerja Bisnis Direktorat	Triwulan I tahun 2021
Agus Winardono	Direktur Human Capital	<i>Update</i> Strategi & Kinerja Bisnis Direktorat	Triwulan I tahun 2021

Sertifikasi Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Sertifikasi/ Refreshment		
		Lembaga Sertifikasi	Tingkat	Tahun Terbit
Sunarso	Direktur Utama	LSPP	Level 5	2020
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	LSPP	Level 5	2021
Haru Koesmahargyo*	Direktur Keuangan	LSPP	Level 5	2020
Viviana Dyah Ayu Retno**	Direktur Keuangan	LSPP	Level 5	2020
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	BSMR	Level 5	2020
Supari	Direktur Bisnis Mikro	LSPP	Level 5	2020
Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	LSPP	Level 5	2019
Priyastomo*	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	BSMR	Level 5	2019
Amam Sukriyanto**	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	LSPP	Level 5	2020
Ahmad Solichin Lutfiyanto***	Direktur Kepatuhan	BSMR	Level 5	2020
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	LSPP	Level 5	2019
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	BSMR	Level 5	2021
Herdy Rosadi Harman*	Direktur Human Capital	LSPP	Level 5	2019
Agus Winardono**	Direktur Human Capital	BSMR	Level 5	2021
Arga Mahanana Nugraha**	Direktur Jaringan dan Layanan	LSPP	Level 5	2019

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021.

** Diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif tanggal 14 April 2021.

*** Dialihkan penugasannya semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Kepatuhan pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Selama tahun 2021, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, diantaranya namun tidak terbatas pada:

- Melaksanakan RUPS yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 3 (tiga) kali RUPS Luar Biasa.
- Menyusun Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan rencana kerja lainnya
- Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- Memastikan sistem akuntansi Bank telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama dalam hal pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan keuangan.
- Memastikan kecukupan proses dan sistem untuk mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
- Melaksanakan rapat internal Direksi maupun bersama Divisi terkait.
- Membuat struktur organisasi, tugas dan menetapkan tanggung jawab yang jelas termasuk pengangkatan manajemen.

Selain itu, keputusan-keputusan Direksi diputuskan melalui forum Komite yang dibentuk oleh Direksi serta Forum Rapat Direksi yang secara detail dilaporkan pada Sub-Bab Rapat Direksi tahun 2021 pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja direksi dilakukan secara rutin setiap tahun. Penilaian kinerja dilakukan atas *Key Performance Indicator* KPI kolejal atau KPI bersama dan KPI Direktorat (Individu) sesuai dengan Permen BUMN Nomor PER - 11/MBU/11/2020 tentang Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian Kinerja Individu

Kinerja Direktorat (Individu) dinilai berdasarkan atas pencapaian target KPI masing-masing Direktorat dengan penjelasan sebagai berikut:

Direktur Utama

- Tingkat kesehatan Bank terjaga
- Target keuangan perusahaan tercapai sesuai anggaran (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)
- Pelaksanaan program-program dari Pemerintah selesai tepat waktu
- Efisiensi *cost of fund* dan CASA lebih baik dari target
- Kualitas aktiva produktif & kecukupan cadangan kerugian terjaga
- Pelaksanaan Holding Ultra Mikro selesai

Wakil Direktur Utama

- Tingkat kesehatan Bank terjaga
- Target keuangan perusahaan tercapai sesuai anggaran (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)
- Pelaksanaan program-program dari Pemerintah selesai tepat waktu
- Efisiensi *cost of fund* dan CASA lebih baik dari target
- Kualitas aktiva produktif & kecukupan cadangan kerugian terjaga
- Pelaksanaan Holding Ultra Mikro selesai

Direktorat Keuangan

- Target keuangan perusahaan tercapai sesuai anggaran (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)
- Target kinerja perusahaan anak secara keseluruhan tercapai
- Target *market capitalization* tercapai
- *Rating* ESG meningkat
- Pelaksanaan Holding Ultra Mikro selesai

Direktorat Konsumer

- Target CASA untuk segmen consumer tercapai
- Kualitas pinjaman segmen consumer terjaga
- Target *fee based income* untuk segmen consumer tercapai
- Target penggunaan *Internet Banking* (incl. BRImo) tercapai

Direktorat Bisnis Mikro

- Target program pemerintah untuk penyaluran KUR dan bantuan sosial tercapai
- Target kualitas pinjaman segmen mikro tercapai
- Target simpanan dan pinjaman segmen mikro tercapai
- Target *fee based income* segmen mikro tercapai

Direktorat Bisnis Kecil dan Menengah

- Target program pemerintah untuk penyaluran KUR untuk segmen SME tercapai
- Target *volume supply chain* tercapai
- Kualitas pinjaman segmen SME terjaga
- Target *fee-based income* segmen SME tercapai
- Model bisnis baru segmen SME di kantor wilayah terimplementasi

Direktorat Bisnis Wholesale dan Kelembagaan

- Target simpanan segmen kelembagaan & wholesale tercapai
- *Volume trade finance* dan bank garansi meningkat
- Kualitas aset segmen bisnis wholesale terjaga

Direktorat Bisnis Korporasi

- Target *fee based income* segmen korporasi tercapai
- Target simpanan segmen korporasi tercapai
- Kualitas aset segmen bisnis korporasi terjaga

Direktorat Treasury and Global Services

- Target keuntungan bisnis treasury tercapai
- Target *fee based income & interest correspondent* bank tercapai
- Target *volume & fee based income* bisnis *investment services business* tercapai

- Target kontribusi UKLN secara keseluruhan tercapai
- Pembukaan Kantor Cabang BRI Taipei terlaksana

Direktorat Manajemen Risiko

- Profil risiko bank terjaga
- Tingkat Kesehatan Bank terjaga
- Kualitas aktiva produktif & kecukupan cadangan kerugian terjaga
- *Rating* ESG meningkat

Direktorat Kepatuhan

- Skor *Good Corporate Governance* (GCG) tercapai sesuai target
- Peringkat CGPI tertinggi untuk kategori bank di Indonesia tercapai
- Target pengendalian *fraud* internal tercapai

Direktorat Jaringan dan Layanan

- Model Bisnis Layanan Bank baru terimplementasi
- 153 Cabang *Co-Location* bersama dengan PNM & Pegadaian terimplementasi
- Target produktivitas jaringan kerja tercapai
- Kepuasan pelanggan terjaga
- Target produktivitas bisnis dari *branchless banking* (BRILink) tercapai

Direktorat Human Capital

- Employee Engagement Index meningkat
- Target *Organization Culture Health Index* tercapai
- Jumlah perempuan dan milenial dalam level BOD-1 (1 tingkat dibawah BOD) dan BOD-2 (2 tingkat di bawah BOD) meningkat
- Target *Digital Maturity Assessment* tercapai

Direktorat Digital & Teknologi Informasi

- Target IT *maturity level* tercapai
- Availability jaringan dan layanan IT terjaga
- Target *zero incident* dalam IT *security* (*cybersecurity*) *breach* tercapai

Direktorat Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan

- Target efisiensi biaya dalam proyek pengadaan tercapai
- Target optimalisasi properti tercapai

Direktorat Change Management & Transformation Office

- Target efektivitas pengelolaan *project* Perusahaan tercapai
- Transformasi bisnis Wholesale terlaksana
- Desain BRIVOLUTION 2.0 (*Corporate Plan* 2021-2025) selesai

Satuan Kerja Audit Internal

- Kerugian akibat kelemahan *internal control* terjaga
- Pengembangan *fraud risk indicator framework* selesai
- Indikator kunci kinerja perusahaan tercapai

Direktorat Operations

- Target *cash ratio* tercapai
- BRI Document Management System (BRIMEN) terimplementasi sesuai *milestone*
- *Enhancement* aplikasi BRISpot sesuai *milestone*



Penilaian Kinerja Direksi Kolegial

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi atas kinerja Direksi berdasarkan atas pencapaian (KPI) telah disepakati sebelumnya melalui mekanisme RUPS oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Adapun kriteria evaluasi kinerja yang diukur adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia yang terdiri dari aspek finansial dan sosial
2. Inovasi Model Bisnis
3. Kepemimpinan Teknologi
4. Peningkatan Investasi
5. Pengembangan Talenta

Pihak yang Melakukan Penilaian

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan Pemegang Saham yang dilakukan melalui mekanisme RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

Perspektif		Bobot	Ukuran
Nilai Ekonomi & Sosial bagi Indonesia	Finansial	5,0%	Net Profit After Tax (NPAT) tercapai dengan skor pencapaian 110% atas revisi RKAP 2021
		6,0%	Pre-Provision Operating Profit Margin (PPOP Margin) tercapai dengan skor pencapaian 110% atas revisi RKAP 2021
		4,0%	ROIC (<i>Return on Invested Capital</i>) melampaui WACC dengan skor pencapaian 110% atas revisi RKAP 2021
	Operasional	4,0%	NPL Coverage Ratio tercapai dengan skor pencapaian 107% atas revisi RKAP 2021
		5,0%	LAR Coverage Ratio tercapai dengan skor pencapaian 110% atas revisi RKAP 2021
		4,0%	Credit Cost dengan tercapai dengan skor pencapaian 101% atas revisi RKAP 2021
		5,0%	Cost to Income Ratio tercapai dengan skor pencapaian 106% atas revisi RKAP 2021
	Sosial	5,0%	Penyaluran KUR melebihi target 95% dari kuota pemerintah
		5,0%	Penyaluran program bantuan sosial melebihi target 90% dari kuota Pemerintah
Inovasi Model Bisnis	5,0%	Implementasi Holding Ultra Micro (BRI, PNM, Pegadaian) terlaksana sesuai <i>milestone</i>	
	5,0%	Pertumbuhan nasabah retail yang menggunakan fasilitas Internet Banking (termasuk BRImo) melebihi target 2021	
	4,0%	Hasil survei kepuasan pelanggan oleh surveyor independen sama dengan tahun lalu	
Kepemimpinan Teknologi	5,0%	Pengembangan <i>blockchain</i> pada bisnis berbasis ekosistem terimplementasi sesuai <i>milestone</i>	
	4,0%	Tidak terdapat insiden <i>IT security (cybersecurity) breach</i>	
	4,0%	IT Maturity Level lebih dari Level 3	
	3,0%	Reliability BRILink melebihi 98%	
	3,0%	Proyek Percepatan <i>Digital Attacker</i> BRI Agro terlaksana sesuai <i>milestone</i>	
Peningkatan Investasi	5,0%	Implementasi merger BSM, BRIS, dan BNIS sesuai <i>milestone</i>	
	5,0%	CGPI Score berada di antara level 85-100	
Pengembangan Talenta	5,0%	% perempuan dalam <i>nominated talent</i> pada level C-1 (1 tingkat di bawah BOD) dan C-2 (2 tingkat di bawah BOD) tercapai sesuai target	
	5,0%	% milenial (<40 tahun) dalam <i>top talent</i> pada level C-1 (1 tingkat di bawah BOD) dan C-2 (2 tingkat di bawah BOD) tercapai sesuai target	
	4,0%	<i>Employee engagement / development</i> index lebih baik dari tahun lalu	

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Bank, Direksi BRI dibantu oleh sembilan Komite yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Hingga 31 Desember 2021, BRI memiliki 9 (sembilan) Komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

No	Komite	Nomor Surat Keputusan
1.	Komite Capital & Investment	B.727-DIR/CDS/11/2020
2.	Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data	B.728-DIR/CDS/11/2020
3.	Komite Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee	B.657-DIR/PPM/10/2021
4.	Asset & Liability Committee (ALCO)	B.726-DIR/CDS/11/2020
5.	Komite Barang dan Jasa (PBJ)	B.656-DIR/PPM/10/2021
6.	Komite Kebijakan Perkreditasi (KKP)	B.655-DIR/PPM/10/2021

No	Komite	Nomor Surat Keputusan
7.	Komite Human Capital (HC)	B.488-DIR/CDS/08/2021
8.	Komite Produk	B.213-DIR/CDS/06/2021
9.	Komite Kredit	B.851-DIR/KRD/12/2020

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilaksanakan berdasarkan kontribusi masing-masing Komite kepada Perseroan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun kriteria penilaian kinerja adalah efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing Komite.

Penilaian Unit Kerja Manajemen Risiko

Selain melakukan penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi, Direksi juga melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit di bawah Direksi termasuk unit kerja Manajemen Risiko yang dilakukan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI). Penilaian KPI unit kerja Manajemen Risiko antara lain diukur dengan menggunakan Aspek Kuantitatif dan Kualitatif. KPI untuk Aspek Kuantitatif meliputi pencapaian atas rasio-rasio keuangan perusahaan. Sedangkan KPI aspek kualitatif diukur melalui beberapa pencapaian antara lain Tingkat Kesehatan Bank, Predikat Profil Risiko baik untuk individu maupun secara terintegrasi dengan Konglomerasi Keuangan, pelaksanaan Forum Manajemen Risiko (RMC dan RMC Terintegrasi) serta tingkat maturitas atas penerapan manajemen risiko perseroan.

Pada tahun 2021, secara umum Unit Kerja Manajemen Risiko telah mencapai target KPI yang telah ditetapkan.

Penilaian Sekretaris Perusahaan

Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan kepada manajemen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang. Pada tahun 2021 Corporate Secretary BRI telah memiliki dan melaksanakan target pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI) antara lain target penyaluran Biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Penilaian Risiko Reputasi, Index Corporate Image, Pemenuhan Ketentuan di bidang Pasar Modal, Pengelolaan Pemberitaan dan Media Sosial, Pencapaian Proyek & Strategic Inisiatif, Pembentukan Integrasi Ultra Mikro serta terkait audit dan support penilaian GCG BRI. Pada tahun 2021, secara umum Corporate Secretary telah mencapai dan melampaui target KPI yang telah ditetapkan.

Penilaian Unit Kerja Audit Intern

Penilaian kinerja terhadap unit kerja Audit Intern baik di level pusat maupun wilayah dilakukan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI). Penilaian KPI unit kerja Audit Intern dilakukan menggunakan Aspek Kuantitatif dan Aspek Kualitatif. KPI untuk Aspek Kuantitatif diukur berdasarkan pencapaian atas rasio-rasio keuangan perusahaan, serta pengendalian kerugian/denda akibat

kelemahan *internal control* ataupun gangguan sistem. Sedangkan KPI untuk Aspek Kualitatif diukur melalui beberapa pencapaian antara lain: Penyelesaian rekomendasi temuan auditor eksternal/pengawas, Tingkat kepuasan stakeholder (Manajemen BOD, BOC dan Auditor Eksternal) terhadap kinerja audit intern, *Skor quality assurance* dari pihak independen, Kecepatan deteksi fraud, serta Tata kelola audit intern terintegrasi.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Pemberhentian Masa jabatan seorang anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia
2. Masa jabatannya berakhir
3. Diberhentikan dalam RUPS, disebabkan alasan yang dinilai tepat oleh Rapat Umum Pemegang Saham demi kepentingan dan tujuan Perseroan
4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar BRI dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, termasuk rangkap jabatan yang dilarang, maupun pengunduran diri. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada BRI dan BRI wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris merupakan organ yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan Perseroan. Sekretariat Dewan Komisaris dipimpin oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan, diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas usul Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib Sekretariat Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep: 10-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 yang memuat tugas dan tanggung jawab sekretariat Dewan Komisaris diantaranya:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Staf, Sekretaris Komisaris, dan Pelaksana di Lembaga Dewan Komisaris.
2. Mengkoordinasikan rapat-rapat Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif kesekretariaan dan protokoller Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Perseroan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan/atau keluarganya pada Perseroan.
5. Menyusun laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Menyusun laporan tentang pelaksanaan *Self Assessment* GCG Dewan Komisaris dan Komite setiap semester.
7. Mengkoordinasikan tercapainya pelaksanaan tugas komite-komite Dewan Komisaris.
8. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun laporan mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi.
11. Mengkoordinasikan penyusunan saran dan pendapat mengenai agenda dan materi RUPS.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris



Edi Eko Cahyono

Sekretaris Dewan Komisaris

Warga negara Indonesia, lahir di Pati, 28 Mei 1982 / Usia 39 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Depok.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor NOKEP: 01-KOM/BRI/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



PERIODE MENJABAT

Februari 2021 – Sekarang



JABATAN RANGKAP

- Kepala Bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Kementerian BUMN



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Diploma III – Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (2003)
- Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia (2008)
- Magister Akuntansi – Universitas Gadjahmada (2014)



PENGALAMAN KERJA

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk – 1 Juni 2019 s.d. Januari 2021
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik – 17 Juni 2016 s.d. 17 Juni 2019
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium - 3 Maret 2014 s.d. 4 Maret 2017

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Asset Liability Management in Uncharted New Normal – Strategy & Optimization	Jakarta, 26 Oktober 2021	BARa Risk Forum

Pelaksanaan Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris telah mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat Dewan Komisaris, yaitu:

- Menyusun konsep agenda-agenda, waktu dan tempat pelaksanaan rapat berdasarkan arahan Dewan Komisaris dan masukan dari Komite Dewan Komisaris.
- Mempersiapkan, mengkoordinasikan, dan memperoleh materi rapat dari sumber-sumber yang terkait dengan agenda rapat, untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan/atau kepada Komite jika diperlukan.
- Menyusun konsep risalah rapat dan menyimpan salinannya.

2. Pelaksanaan Tugas Kesekretariatan

Mengkoordinasikan tugas-tugas administratif, kesekretariatan, dan protokoler Dewan Komisaris, termasuk dalam hal:

- Melakukan penatakelolaan persuratan, arsip dan dokumen lainnya yang ditujukan kepada Dewan Komisaris berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.
- Mengkoordinasikan tindak lanjut arahan/disposisi Dewan Komisaris atas surat dan/atau dokumen tersebut, termasuk melakukan korespondensi dengan pihak manajemen Perseroan, pihak eksternal, dan pihak-pihak lainnya, khusus hal-hal yang telah mendapatkan keputusan Dewan Komisaris yang tidak tercakup dalam tugas-tugas Komite;
- Melakukan penatakelolaan kegiatan Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, antara lain keikutsertaan dalam program training/workshop/seminar, kunjungan kerja, perjalanan dinas, dan lain-lain, termasuk memastikan tersedianya sarana dan logistik untuk mendukung kelancaran kegiatan/acara tersebut;

3. Penyusunan Konsep Rencana Kerja dan Laporan Dewan Komisaris

Sekretariat Dewan Komisaris telah berkoordinasi dengan Komite-komite Dewan Komisaris dalam menyusun:

- Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun Direksi
- Laporan mengenai hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Perseroan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku, Laporan Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris kepada RUPS, serta laporan-laporan lainnya yang diperlukan.

4. Pelaksanaan Tugas Lain yang menjadi Tugas Sekretariat Dewan Komisaris

Mengacu pada Piagam Sekretariat Dewan Komisaris yang disetujui oleh Dewan Komisaris, Sekretariat Dewan Komisaris melaksanakan tugas-tugas lain, termasuk:

- Mengkoordinasikan dan melakukan tindak lanjut atas permintaan Dewan Komisaris dalam pengumpulan data/informasi dari dan/atau kepada pihak manajemen Perseroan, termasuk informasi mengenai peraturan dan ketentuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penilaian mandiri atas *Good Corporate Governance* pada Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Komite Audit

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Perseroan. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dengan memberikan opini secara independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit telah diatur dalam:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan perubahannya.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nokep:11/KOM/11/2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Audit.
- Surat Keputusan Direksi BRI No. 594-DIR/HCB/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan bersama Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas hasil audit termasuk kesulitan yang dihadapi.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik, KAP atau Tim Audit dari KAP atas jasa yang diberikannya.
4. Melakukan penelaahan atas laporan tahunan untuk meyakinkan kecukupan, konsistensi dan keakuratan informasi. Pengendalian Internal Memonitor, menelaah dan mendiskusikan dengan Manajemen, SKAI dan Akuntan Publik atau Tim Audit dari KAP atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan termasuk adanya kelemahan material, baik dalam rancangan maupun operasi, yang dapat mengganggu kemampuan Perseroan dalam mencatat, memproses, mengikhtisarkan dan melaporkan informasi keuangan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

1. Memantau efektivitas kerja SKAI.
2. Memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
3. Melakukan penelaahan terhadap Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Intern.
4. Melakukan penelaahan terhadap setiap Laporan SKAI yang disampaikan kepada Dewan Komisaris c.q. Komite Audit termasuk setiap laporan mengenai penyimpangan yang disampaikan kepada Direksi.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh SKAI dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.

Auditor Independen

1. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, agar mengusulkan ke RUPS, dalam hal Akuntan Publik dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1) tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan Akuntan Publik dan/atau KAP pengganti dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

3. Dalam hal Komite Audit tidak dapat merekomendasikan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada Dewan Komisaris sebelum RUPS sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit merekomendasikan pendelegasian kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. Kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
4. Dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin 1), Komite Audit harus mempertimbangkan:
 - a. Independensi Akuntan Publik, KAP, dan orang dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
5. Menyampaikan rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik kepada Direksi BRI dan/atau Pengurus DPLK untuk digunakan sebagai lampiran Laporan Penunjukan AP dan/atau KAP kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Mengusulkan pemberhentian Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP apabila dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
7. Menelaah calon Akuntan Publik, atau Tim Audit dari KAP yang akan melakukan audit umum atas laporan keuangan entitas anak yang dikonsolidasi ke laporan keuangan konsolidasi Perseroan. KAP untuk entitas anak yang dikonsolidasi ditunjuk dan ditetapkan oleh entitas anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya tetapi harus dikonsultasikan dengan Komite Audit untuk menilai aspek independensi, keahlian dan ruang lingkup penugasan calon Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dan supervisi audit yang dijalankan oleh Komite Audit.
8. Memberikan persetujuan terlebih dahulu (*pre-approval*) atas jasa non-asurans yang akan ditugaskan kepada KAP yang menjadi auditor independen Perseroan.
9. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP paling sedikit melalui:
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik, KAP, atau Tim Audit dari KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik;
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau KAP; dan
 - e. Hal lainnya.
10. Menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 9) kepada OJK melalui Direksi BRI dan/atau Pengurus DPLK BRI.

Kepatuhan (Compliance)

1. Memonitor efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko *fraud* yang terkait dengan pelaporan keuangan (*fraudulent financial reporting risks*) yang telah disiapkan dan dilaksanakan oleh Direksi.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Pengaduan

Menelaah pengaduan baik yang berkaitandengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, maupun pengaduan lainnya.

Lain-Lain

1. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
2. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
3. Melaksanakan penugasan yang diminta oleh Komisaris.

Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit Perseroan diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI Nokep:11/KOM/11/2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Audit. Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit merupakan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan prinsip GCG di Perseroan.

Isi Piagam Komite Audit antara lain:

Bab I	Pendahuluan Pengertian Umum Dasar Hukum
Bab II	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Tujuan Tugas dan Tanggung Jawab serta Kewenangan Struktur Komposisi dan Persyaratan Keanggotaan Kode Etik Waktu Kerja Rapat Pelaporan Tata Cara dan Prosedur Kerja Surat/Dokumen Tindak Lanjut Hasil Rapat Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan
Bab III	Penutup

Wewenang Komite Audit

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawab Komite Audit untuk:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:

1. Seorang Komisaris Independen.
2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Periode 1 Januari 2021 s.d 25 April 2021

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Hendrikus Ivo	Ketua	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Audit
2	Ari Kuncoro	Anggota	Komisaris Independen	Ekonomi, Perbankan
3	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen	Ekonomi, Finance
4	R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu Hukum
5	Sahat Pardede	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi, Audit
6	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Audit, Risk Compliance
7	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Audit

Periode 26 April 2021 s.d 29 September 2021

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Hendrikus Ivo	Ketua	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Audit
2	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen	Ekonomi, Finance
3	R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu hukum
4	Zulnahr Usman	Anggota	Komisaris Independen	Bisnis, Industri
5	Sahat Pardede	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi, Audit
6	Irwanto	Anggota	Pihak Independen	Perbankan Akuntansi
7	Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Audit, Risk Compliance
8	Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Audit

Periode 30 September 2021 s.d 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	Hendrikus Ivo	Ketua	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Audit
2	Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen	Ekonomi, Finance
3	R. Widyo Pramono	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu hukum
4	Zulnahr Usman	Anggota	Komisaris Independen	Bisnis, Industri
5	Sahat Pardede	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi, Audit
6	Irwanto	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Akuntansi
7	Bambang Harudi	Anggota	Pihak Independen	Banking, Audit
8	Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	Pihak Independen	Banking, Audit

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Hendrikus Ivo
Ketua Komite Audit/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

R. Widyo Pramono
Anggota Komite Audit/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Rofikoh Rokhim
Anggota Komite Audit/Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Zulnahr Usman
Anggota Komite Audit/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris



Sahat Pardede

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir di Balige, 3 Oktober 1961 /
Usia 60 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 246-DIR/HCB/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



SERTIFIKASI

Certified Public Accountant (CPA)



PERIODE MENJABAT

Maret 2020 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

- PT AKR Corporindo Tbk (2014 s.d sekarang)
- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (2021 s.d sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, Indonesia
- Master of Business Administration, Saint Mary's University, Halifax, Canada



PENGALAMAN KERJA

- Kantor Akuntan Publik Ghazali, Sahat, dan Partners (2001 s.d sekarang)
- Financial Expert PT Telkom Indonesia (2004)
- Anggota Komite Risiko dan Kepatuhan Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2006)
- Komite Pengawas SKK Migas (2013 - 2020)



Irwanto

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir di Padang, 30 Maret 1962 / Usia 59 tahun Per Desember 2021 Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 195-DIR/HCB/04/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, LSPP



PERIODE MENJABAT

April 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Padang (1988)
- Magister Akuntansi Universitas Indonesia (2000)



PENGALAMAN KERJA

- Pengawas Bank, Bank Indonesia (1994-2009)
- Wakil Ketua Tim BASEL, DPNP Bank Indonesia (2009-2012)
- Wakil Kepala Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (2012-2015)
- Kepala Divisi Perijinan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (2015-2016)
- Kepala Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (2016-2017)
- Peneliti Eksekutif Sistem Pembayaran (2017-2018)
- Anggota Komite Audit dan Anggota KPMR Bank Resona (2018-2021)
- Anggota Komite Audit dan Anggota KPMR Bank J Trust (2020-2021)



Bambang Harudi

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir di Kediri, 15 Mei 1965 /
Usia 56 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 594-DIR/HCB/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko (MR 1-4)
- Certified Wealth Managers (CWM)
- Qualified Internal Auditor (QIA)



PERIODE MENJABAT

September 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Pertanian, Universitas Brawijaya Malang
- Master of Business Administration, Georgia State University, Atlanta-GA



PENGALAMAN KERJA

- Kepala Audit Intern Wilayah BRI Bandung 2020-2021
- Kepala Audit Intern Wilayah BRI Makassar 2019-2020
- Kepala Audit Intern Wilayah BRI Manado 2019



Bardiyono Wiyatmojo

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, lahir di Gunungkidul, 24 April 1964 / Usia 57 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Tangerang Selatan, Banten.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 594-DIR/HCB/09/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



SERTIFIKASI

- Certified in the Governance of Enterprise Information Technology (CGEIT)
- Qualified Internal Auditor (QIA)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, 2, 3 dan 4
- Sertifikasi Asesor Kompetensi



PERIODE MENJABAT

September 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada – 1990
- Master of Business Administration, University of Kentucky – 2000
- Magister Management, Universitas Gadjah Mada, 2002



PENGALAMAN KERJA

- Kepala Divisi Audit Teknologi Informasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Kepala Audit Intern Wilayah Jayapura, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
 - b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit dan manajemen risiko.
 - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundangan di bidang perbankan, Pasar Modal, BUMN dan peraturan perundangan terkait lainnya.
 - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui Pendidikan dan pelatihan.

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Hendrikus Ivo	Ketua	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam bidang audit dan pengawasan perbankan
Rofikoh Rokhim	Anggota	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi dan manajemen
R. Widyo Pramono	Anggota	Sarjana Hukum Magister Hukum Doktor Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang Hukum dan pengawasan perbankan
Zulnahr Usman	Anggota	Sarjana Teknik Perminyakan	Memiliki pengalaman dalam bidang bisnis dan industri
Sahat Pardede	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister Administrasi Bisnis	Memiliki pengalaman dibidang akuntansi, audit dan pengawasan perbankan
Irwanto	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister Akuntansi	Memiliki pengalaman dibidang akuntansi, audit dan pengawasan perbankan
Bambang Harudi	Anggota	Sarjana Pertanian Magister Administrasi Bisnis	Memiliki pengalaman dibidang audit dan pengawasan perbankan
Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Magister Administrasi Bisnis Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dibidang audit dan pengawasan perbankan

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Hendrikus Ivo	Ari Kuncoro*	Rofikoh Rokhim**	R. Widyo Pramono	Zulnahr Usman	Sahat Pardede	Irwanto	Bambang Harudi	Bardiyono Wiyatmojo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

** Dialihkan penugasannya yang semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

Pengaturan rapat Komite Audit diatur sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
3. Setiap pemanggilan Rapat dapat dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Komite Audit atau salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris, atau dilakukan secara lisan atau media komunikasi lainnya.
4. Rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat dan wajib dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik.
5. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
6. Setiap rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan dalam hal Ketua Komite Audit tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
7. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
8. Perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite Audit, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Agenda Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Tabel Agenda Rapat Komite Audit

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	12 Januari 2021	<i>Kick off meeting</i> Audit atas laporan keuangan DPLK BRI Tahun 2020.	Hendrikus Ivo Ari Kuncoro Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Sahat Pardede Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
2	16 Januari 2021	<i>Exit Meeting</i> Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2020	Hendrikus Ivo Ari Kuncoro Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Sahat Pardede Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
3	2 Februari 2021	Perencanaan audit tahunan BRI Tahunan BRI tahun 2021, Laporan pokok pokok hasil audit triwulan IV tahun 2020	Hendrikus Ivo Ari Kuncoro Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Sahat Pardede Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
4	16 Februari 2021	Pembahasan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) 2021	Hendrikus Ivo Ari Kuncoro Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Sahat Pardede Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
5	22 Februari 2021	1. Pembahasan Perencanaan Audit IT BRI Tahun 2021 2. Demo <i>Dashboard</i> SKAI	Hendrikus Ivo Ari Kuncoro Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Sahat Pardede Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
6	2 Maret 2021	<i>Sharing Session</i> PWC dalam rangka pengembangan cakupan SKAI dan <i>ICoFR roadmap</i>	Hendrikus Ivo Ari Kuncoro Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Sahat Pardede Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
7	18 Maret 2021	Efektivitas <i>Whistleblowing System</i> Bank BRI	Hendrikus Ivo Ari Kuncoro Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Sahat Pardede Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
8	27 April 2021	Pembahasan Laporan Hasil <i>Review Kinerja KPI</i> Kolegial Aspek Finansial Tahun 2020	Hendrikus Ivo Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Zulnihar Usman Sahat Pardede Irwanto Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
9	5 Mei 2021	<i>Monitoring</i> tindak lanjut atas temuan auditor eksternal (<i>management letter</i>)	Hendrikus Ivo Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Zulnihar Usman Sahat Pardede Irwanto Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
10	17 Mei 2021	Audit laporan keuangan dana pensiun lembaga keuangan BRI tahun buku 2020	Hendrikus Ivo Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Zulnihar Usman Sahat Pardede Irwanto Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
11	18 Mei 2021	<i>Closing Meeting</i> Audit KAP Triwulan 1/2021	Hendrikus Ivo Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Zulnihar Usman Sahat Pardede Irwanto Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
12	25 Mei 2021	Penelaahan atas Laporan Pokok Pokok Hasil Audit Triwulan I Tahun 2021	Hendrikus Ivo Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Zulnihar Usman Sahat Pardede Irwanto Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
13	3 Agustus 2021	1. Evaluasi Kinerja Satuan Kerja Audit Intern BRI Periode Triwulan II Tahun 2021 2. Penelaahan atas Laporan Pokok-pokok Hasil Audit Triwulan II tahun 2021	Hendrikus Ivo Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Zulnihar Usman Sahat Pardede Irwanto Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
14	21 September 2021	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Hendrikus Ivo Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Zulnihar Usman Sahat Pardede Irwanto Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto
15	22 September 2021	<i>Kick Off Meeting</i> Audit Laporan Keuangan BRI Tahun 2021	Hendrikus Ivo Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Zulnihar Usman Sahat Pardede Irwanto Pamuji Gesang Raharjo Sunuaji Noor Widiyanto

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
16	22 Oktober 2021	Penelaahan Laporan Keuangan BRI TW III 2021	Hendrikus Ivo Rofikoh Rokhim R. Widyo Pramono Zulnihar Usman Sahat Pardede Irwanto Bambang Harudi Bardiyono Wiyatmojo

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Hendrikus Ivo	Ketua	16	16	100%
Ari Kuncoro*	Anggota	12	12	100%
Rofikoh Rokhim	Anggota	16	16	100%
R. Widyo Pramono	Anggota	16	16	100%
Zulnihar Usman	Anggota	9	9	100%
Sahat Pardede	Anggota	16	16	100%
Irwanto	Anggota	9	9	100%
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	13	13	100%
Sunuaji Noor Widiyanto	Anggota	13	13	100%

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Penghasilan Komite Audit

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris). Besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit pada Tahun 2021

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Hendrikus Ivo	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Rofikoh Rokhim	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
R. Widyo Pramono	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Zulnihar Usman	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Sahat Pardede	Anggota	PSAK <i>refreshment overview</i> penyusunan laporan keuangan tahun 2022	Juni 2021	IAPI
		Audit IT untuk menunjang pekerjaan akuntan publik dalam audit laporan keuangan	Januari 2021	IAPI
		Dampak Perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Agustus 2021	IAI
		OJK Pasar Modal <i>year end closing financial reporting 2022</i>	September 2021	OJK Pasar Modal
		<i>Annual Update</i> OJK-IKNB Sektor Asuransi & Tantangan PSAK 74	Desember 2021	OJK-IKNB
Irwanto	Anggota	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta	BRI Corporate University
Bambang Harudi	Anggota	-	-	-

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Bardiyono Wiyatmojo	Anggota	Anticorruption Leaders Training "Pencegahan Korupsi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Terhadap Korporasi dan Organ BUMND"	Jakarta, 3 November 2021	Visi Integritas Law Office

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Audit

Indikator atau kriteria kinerja Komite Audit (KA) diukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KA dalam setiap rapat.

Adapun program kerja KA disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan proses telaah terhadap laporan keuangan, hasil audit internal dan eksternal (KAP), dan memberikan rekomendasi atas pemilihan KAP.

Secara umum seluruh KPI KA telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KA tahun 2021 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KA yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KA dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.

Adapun pencapaian indikator atau kinerja Komite Audit adalah sebagai berikut.

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Komite	Komposisi Anggota Komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KA sesuai dengan POJK, Peraturan KBUMN dan Regulator	Komposisi Anggota KA tahun 2021 telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN.	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Review Piagam Komite Audit	Piagam Komite Audit pada Tahun 2021 telah dilakukan <i>review</i> sesuai ketentuan	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KA memiliki kompetensi diantaranya 1. memiliki pengetahuan di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi 2. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi	Anggota KA diantaranya memiliki kompetensi bidang keuangan dan/atau akuntansi, hukum, ekonomi, audit dan perbankan.	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.	Masa tugas Anggota KA BRI KA tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris.	5	5

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
		Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP KA pada Tahun 2021 disahkan tahun 2020	RKAP KA pada Tahun 2021 disahkan pada tanggal 30 Desember 2020	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Satu bulan sekali (12 kali)	Selama Tahun 2021 dilaksanakan 16 (enam belas) kali Rapat Komite Audit	5	5
			Evaluasi dan persetujuan Direksi atas Perencanaan Audit Tahunan (PAT)	setahun sekali	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran kepada Dewan tentang Persetujuan Terhadap Perencanaan Audit Tahunan SKAI BRI Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021	5	5
			Memberikan Rekomendasi terkait usulan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	setahun sekali	Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik atas pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan PKBL BRI tahun buku 2021 pada tanggal 3 Maret 2021	5	5
			Melaksanakan penugasan lain sesuai arahan Dewan Komisaris	sesuai tugas dan arahan Dewan Komisaris	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan	5	5
2	<i>Internal Process Perspective</i>	Pengawasan	Reviu laporan hasil pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut hasil temuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	Setiap Triwulan	Rekomendasi tertulis berupa pendapat dan saran disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui setiap Triwulan	5	5
			Reviu laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Penelaahan dan diskusi antara Komite Audit, Dewan Komisaris dan SKAI dituangkan dalam risalah rapat sebanyak 3 Kali dengan KAP dan dua kali dengan SKAI	Penelaahan dan diskusi antara Komite Audit, Dewan Komisaris dan SKAI dituangkan dalam risalah rapat sebanyak 3 Kali dengan KAP dan dua kali dengan SKAI	10	10
			Reviu terhadap pengelolaan <i>Whistleblowing System</i>	setahun sekali	Komite Audit telah melakukan reviu terhadap efektivitas <i>Whistleblowing System</i> BRI	5	5
			Reviu pelaksanaan audit umum Laporan keuangan dan kinerja DPLK BRI	setahun sekali	Komite Audit telah melakukan penelaahan Komite Audit atas laporan hasil audit atas laporan keuangan DPLK BRI Tahun Buku 2020	10	10
			Reviu tindak lanjut Management Letter dan tindak lanjut atas temuan audit yang dilakukan oleh Pihak eksternal.	setahun sekali	Komite Audit telah melakukan reviu atas <i>monitoring</i> tindak lanjut atas temuan auditor eksternal (<i>management letter</i>) tanggal 5 Mei 2021	10	10
			Penelaahan Atas Laporan Kejadian <i>fraud</i> yang diperkirakan Berdampak Signifikan	setahun sekali	Selama tahun 2021 Komite Audit telah menyampaikan Penelaahan Atas Laporan Kejadian <i>fraud</i> yang diperkirakan Berdampak Signifikan	5	5
3	<i>Compliance Perspective</i>	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Opini Akuntan Publik Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Opini hasil pemeriksaan KAP atas Laporan Keuangan BRI Wajar Tanpa Pengecualian	10	10
Total						100	100

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2021

Pelaksanaan kegiatan Komite pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Komite Audit dengan Satuan Kerja Audit Intern

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Menelaah dan memberikan rekomendasi persetujuan atas Perencanaan Audit Tahunan	1. Rekomendasi atas Persetujuan Perencanaan Audit Tahunan (PAT) SKAI Tahun 2021	18 Januari 2021
		2. Persetujuan perencanaan audit tahunan (PAT) SKAI Tahun 2021	23 Februari 2021
		3. Addendum PAT tahun 2021	15 November 2021
2	Menelaah laporan pokok-pokok hasil audit (LHA) secara triwulan	1. Evaluasi laporan pelaksanaan dan pokok pokok hasil audit triwulan IV semester II tahun 2020	3 Februari 2021
		2. Penelaahan atas Laporan Pokok Pokok Hasil Audit Triwulan I Tahun 2021	25 Mei 2021
		3. Laporan Pelaksanaan & Pokok-pokok Hasil Audit Triwulan II Tahun 2021	3 Agustus 2021
		4. Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Triwulan Tahun III 2021	4 Desember 2021
3	Penelaahan terhadap Laporan Keuangan Perseroan Secara Triwulanan	1. Exit Meeting Audit atas Laporan Keuangan Tahun 2020	26 Januari 2021
		2. Closing Meeting Laporan Keuangan Audited Periode 31 Maret 2021	17 Mei 2021
		3. Hasil Reviu KAP PSS (EY) Atas laporan Keuangan BRI Posisi 30 Juni 2021	31 Agustus 2021
		4. Penelaahan Laporan Keuangan BRI TW III 2021	10 Oktober 2021
		5. Kick off meeting rencana Audit laporan Keuangan BRI posisi 31 Desember 2021 oleh KAP PSS	22 September 2021
4	Pengawasan terhadap penerapaaan <i>Whistleblowing System</i>	1. Pengaduan Nasabah	4 Februari 2021
		2. Permintaan informasi dan perbaikan aplikasi WBS	16 Februari 2021
		3. Tindak lanjut laporan pengaduan	22 Februari 2021
		4. Pengaduan Nasabah	18 Maret 2021
		5. Efektifitas <i>Whistleblowing System</i> Bank BRI	18 Maret 2021
		6. Pengaduan Nasabah	24 Maret 2021
		7. Pengaduan Nasabah	21 April 2021
		8. Tanggapan atas Draft Revisi Surat Edaran <i>Whistleblowing System</i> BRI dan Draft Nota Dinas Mekanisme Penetapan Laporan <i>Whistleblowing System</i> Tindak Pidana Korupsi (TPK).	8 Juni 2021
		9. Pengaduan Nasabah	22 Juni 2021
		10. Laporan pengaduan nasabah	19 Juli 2021
		11. Laporan pengaduan nasabah	26 Juli 2021
6	Tugas Komite Audit lainnya	1. Penugasan audit khusus SKAI atas perhitungan <i>Expected Credit Loss</i> (ECL) untuk posisi 31 Desember 2020	6 Januari 2021
		2. Peningkatan <i>Internal Control over Financial Reporting</i> (ICoFR)	4 Maret 2021

2. Komite Audit dengan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Kajian Komite Audit	1. Dampak dan perubahan proses bisnis (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) TJSL BRI terhadap Permen BUMN No: PER-05/MBU/04/2021	16 September 2021
2	Pengadaan jasa audit Kantor Akuntan Publik	1. Ijin pelaksanaan pengadaan jasa kantor akuntan publik dalam rangka audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2021	16 Februari 2021
		2. Persetujuan HPS pengadaan jasa kantor akuntan publik dalam rangka audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI Tahun Buku 2021	24 Februari 2021

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
		3. Pengadaan jasa kantor akuntan publik dalam rangka audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI tahun buku 2021	3 Maret 2021
		4. Rekomendasi KA atas KAP yang akan melaksanakan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan PKBL BRI Tahun Buku 2021	3 Maret 2021
		5. Perubahan ruang lingkup pekerjaan pengadaan jasa kantor akuntan publik dalam rangka audit umum atas laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan program kemitraan dan bina lingkungan BRI tahun Buku 2021	10 Mei 2021
3	Rekomendasi Komite Audit	1. Rekomendasi komite audit dalam penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik	18 Maret 2021
4	Laporan evaluasi Komite Audit	1. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Laporan Keuangan BRI Tahun Buku 2020 oleh KAP	15 Juni 2021
		2. Laporan Hasil Reviu Terbatas KAP Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Posisi Tanggal 30 Juni 2021	31 Agustus 2021

3. Komite Audit dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas lainnya

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan	exit meeting hasil pemeriksaan OJK terhadap BRI Denpasar Gajah Mada	9 November 2021
		Exit meeting BRI dan OJK	24 Desember 2021

4. Komite Audit dengan Manajemen

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Memantau penerapan standar akuntansi	Review Atas Penyaluran BPUM, Penerapan PSAK 71 (CKPN/ ECL), dan Indikasi Praktik Plafondering Pinjaman	3 Februari 2021
2	Penelaahan Komite Audit	1. Rekomendasi atas Kontrak Manajemen yang Memuat KPI Direksi secara Kolegial dan Individual Tahun 2021	28 September 2021
3	Rekomendasi Komite Audit	1. Remunerasi SKAI	15 April 2021
		2. Pemberhentian Kepala SKAI	29 Oktober 2021
		3. Usulan Pengangkatan Kepala SKAI	15 November 2021

5. Komite Audit dengan DPLK

No	Tugas	Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
1	Laporan keuangan	1. Kick off meeting Audit atas laporan keuangan DPLK BRI Tahun 2020	12 Januari 2021
		2. Penelaahan komite audit atas laporan hasil audit atas laporan keuangan DPLK BRI Tahun Buku 2020	18 Mei 2021
2	Pengadaan jasa audit	1. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit BRI terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan DPLK BRI Tahun Buku 2020 oleh KAP Mirawati sensi Idris (KAP MSI)	28 Mei 2021
		2. Pengadaan Jasa Audit Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan DPLK BRI Tahun 2021.	15 November 2021
		3. Rekomendasi atas Usulan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Jasa Audit KAP untuk Laporan Keuangan DPLK BRI Tahun 2021	15 November 2021

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Manajemen Risiko

Komite Audit menilai bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
9. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
10. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah di ubah pada Permen BUMN No. PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
11. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan perubahannya yang terakhir.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Surat keputusan Dewan Komisaris No. B.13-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang mengatur diantaranya:

1. Pengertian Umum
2. Dasar Hukum
3. Tujuan Pembentukan Komite
4. Tugas dan Tanggung Jawab
5. Kewajiban, Larangan dan Kewenangan
6. Kedudukan Komite
7. Keanggotaan Komite
8. Etika dan Waktu Kerja
9. Pelaksanaan Rapat dan Laporan
10. Penutup

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan melalui SK Direksi Nokep: 419-DIR/HCB/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Calon Wakil Perseroan yang akan dijadikan Pengurus Perusahaan anak yang diusulkan oleh Direksi.
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk meminta informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi serta kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen sumber daya manusia dari pihak internal.

Larangan Komite

1. Mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
2. Menerima penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris bagi anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi BRI adalah sebagai berikut:

1. Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;

2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen;
3. Anggota Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai ketua merangkap anggota, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif satu tingkat di bawah Direksi yang menangani kebijakan SDM (*ex-officio*) atau seorang perwakilan pekerja Perseroan, anggota lainnya dapat berasal dari pihak luar Perseroan;
4. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang;
5. Dewan Komisaris dapat mengangkat Pihak Independen sebagai anggota Komite, dengan ketentuan:
 - a. Wajib memenuhi syarat:
 - i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - ii. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - iii. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
 - b. Dipilih oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
 - c. Masa kerja paling lama adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk masa kerja berikutnya dengan memperhatikan masa kerja Dewan Komisaris dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
6. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite;
7. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
8. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Masa jabatan anggota tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
10. Penggantian anggota yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 27 Juli 2021

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	R. Widyo Pramono	Ketua	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Manajemen
2	Rofikoh Rokhim*	Sekretaris	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Ekonomi, Finance
3	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	Perbankan, Manajemen
4	Ari Kuncoro **	Anggota	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Ekonomi, Perbankan
5	Nicolaus T.B Harjanto	Anggota	Komisaris	Komunikasi, Politik
6	Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Ilmu Hukum, Manajemen
7	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistik, Manajemen
8	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Audit
9	Zulnahr Usman	Anggota	Komisaris Independen	Bisnis, Industri
10	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Manajemen
11	E.R.A. Taufiq	Anggota	Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business Partner)	Perbankan, Human Capital

* Dialihkan penugasannya yang semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

** Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Susunan Anggota Komite Periode 28 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
1	R. Widyo Pramono	Ketua	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Manajemen
2	Rofikoh Rokhim*	Sekretaris	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Ekonomi, Finance
3	Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	Perbankan, Manajemen
4	Nicolaus T.B. Harjanto	Anggota	Komisaris	Komunikasi, Politik
5	Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Ilmu Hukum, Manajemen
6	Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistik, Manajemen
7	Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Audit
8	Zulnahr Usman	Anggota	Komisaris Independen	Bisnis, Industri
9	Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Manajemen
10	E.R.A. Taufiq	Anggota	Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business Partner)	Perbankan, Human Capital

* Dialihkan penugasannya yang semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

R. Widyo Pramono Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Rofikoh Rokhim Sekretaris Komite Nominasi dan Remunerasi/ Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Kartika Wirjoatmodjo Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Utama Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Nicolaus T.B. Harjanto
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Hadiyanto
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Rabin Indrajad Hattari
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Hendrikus Ivo
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

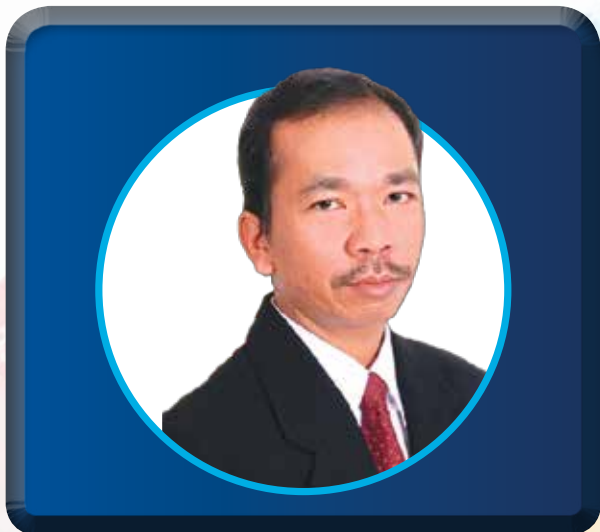
Zulnahr Usman
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris

Dwi Ria Latifa
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/Komisaris Independen

Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris





E.R.A. Taufiq

**Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/
Ex Officio (Kepala Divisi Human Capital Business
Partner)**

Warga negara Indonesia, lahir di Bandung, 13 Mei 1967.
Usia 54 tahun Per Mei 2021.
Berdomisili di Bekasi.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Nokep: 419-DIR/HCB/07/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.



SERTIFIKASI

1. *Assessor for Competency Based Assessment Center*
2. Sertifikasi *Wealth Management*
3. Manajemen Umum Dana Pensiun
4. Manajemen Risiko Dana Pensiun
5. *Training Assessment Center Assessor Certification*



PERIODE MENJABAT

Juli 2021 – sekarang



JABATAN RANGKAP

1. Komisaris PT Upaya Purnabakti Sejahtera (BRImedika) (20/11/2020 – 19/11/2023)
2. Ketua Koperasi Swakarya BRI (01/05/2020 - Sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum Perdata, Universitas Parahyangan, Bandung (1991)



PENGALAMAN KERJA

1. Division Head Human Capital Business Partner (01/11/2019 - Sekarang)
2. Division Head Kebijakan dan Pengembangan Human Capital (01/05/2019 - 31/10/2019)
3. Wakil Kepala Divisi Bidang Manajemen Karier, Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital (01/03/2014 - 30/04/2019)
4. Kepala Bagian Pengembangan Karier, Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital (01/05/2012 - 28/02/2014)
5. Kepala Bagian Operasional SDM, Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM (01/03/2012 – 30/04/2012)
6. Kepala Bagian Assessment Center, Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM (01/10/2007 – 29/02/2012)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
R. Widyo Pramono	Ketua	Sarjana Hukum Magister Hukum Doktor Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang Hukum dan pengawasan perbankan
Rofikoh Rokhim*	Sekretaris	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi dan manajemen
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Sarjana Akuntansi Master of Business Administration	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan dan manajemen
Ari Kuncoro **	Anggota	Sarjana Ilmu Ekonomi Master of Arts Ph.D. in Economics	Memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi dan pengawasan perbankan
Nicolaus T.B Harjanto	Anggota	Sarjana Ilmu Politik Master of Arts Ph.D. Ilmu Politik dan Hubungan Internasional	Memiliki pengalaman dalam bidang ilmu komunikasi dan politik
Hadiyanto	Anggota	Sarjana Hukum Master of Law Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pengawasan perbankan
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Sarjana Ekonomi & Matematika Magister Manajemen Ph.D. in Economics,	Memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi dan pengawasan perbankan
Hendrikus Ivo	Anggota	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam bidang audit dan pengawasan perbankan
Zulnahr Usman	Anggota	Sarjana Teknik Perminyakan	Memiliki pengalaman dalam bidang bisnis dan industri
Dwi Ria Latifa	Anggota	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas Magister of Science	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan manajemen
E.R.A. Taufiq	Anggota	Sarjana Hukum Perdata	Memiliki pengalaman dalam bidang <i>human capital</i>

* Dialihkan penugasannya yang semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

** Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Aspek Independensi	R Widyo Pramono	Rofikoh Rokhim*	Kartika Wirjoatmodjo	Nicolaus T.B Harjanto	Hadiyanto	Rabin Indrajad Hattari	Hendrikus Ivo	Zulnahr Usman	Dwi Ria Latifa	Ari Kuncoro **	E.R.A Taufiq
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Dialihkan penugasannya yang semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

** Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Pengaturan rapat Komite diatur sebagai berikut:

- Rapat dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
- Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota, termasuk Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.
- Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
- Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan surat elektronik (*email*) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
- Pemanggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat.
- Rapat dipimpin oleh ketua Komite.
- Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
- Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang memutuskan.
- Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik serta wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
- Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
- Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
- Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	Selasa, 19 Januari 2021	Nominasi calon pengurus BRI.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
2	Kamis, 21 Januari 2021	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPSLB BRI Tahun 2021.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
3	Selasa, 2 Februari 2021	Nominasi calon anggota komite Dewan Komisaris	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
4	Rabu, 10 Februari 2021	Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
5	Selasa, 16 Februari 2021	Kebijakan Human Capital dan Tindak Lanjut pengelolaan SDM di Wilayah BRI	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
6	Selasa, 2 Maret 2021	Evaluasi <i>Talent Pool</i> BRI.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
7	Selasa, 30 Maret 2021	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
8	Selasa, 13 April 2021	Usulan Direksi dan Komisaris Perusahaan Anak.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
9	Selasa, 27 April 2021	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan Konsultan.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
10	Selasa, 6 Juli 2021	Nominasi calon anggota Komite Dewan Komisaris.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
11	Selasa, 13 Juli 2021	Nominasi calon anggota Komite Dewan Komisaris.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Ari Kuncoro Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
12	Senin, 2 Agustus 2021	Nominasi dan Penetapan calon anggota Komite Dewan Komisaris.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
13	Selasa, 7 September 2021	Nominasi dan Persetujuan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
14	Selasa, 21 September 2021	Nominasi Calon Pengurus Perusahaan Anak.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
15	Senin, 04 Oktober 2021	Pembahasan Remunerasi Pengurus Perseroan.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
16	Rabu, 6 Oktober 2021	Mekanisme Nominasi Calon Pengurus Perseroan.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
17	Kamis, 7 Oktober 2021	Nominasi Pengurus Perseroan dalam RUPSLB BRI 7 Oktober 2021.	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq
18	Selasa, 21 Desember 2021	1. Pembahasan Perubahan Pengurus Perusahaan Cucu 2. Persetujuan DPS dan Plt. DPS Perusahaan Anak 3. Anggota Komite yang akan Habis Kontrak Tahunan	R. Widyo Pramono Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa E.R.A. Taufiq

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
R. Widyo Pramono	Ketua	18	18	100%
Rofikoh Rokhim*	Sekretaris	18	18	100%
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	18	18	100%
Ari Kuncoro **	Anggota	11	11	100%
Nicolaus T.B Harjanto	Anggota	18	18	100%
Hadiyanto	Anggota	18	18	100%
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	18	18	100%
Hendrikus Ivo	Anggota	18	18	100%
Zulnahr Usman	Anggota	18	18	100%
Dwi Ria Latifa	Anggota	18	18	100%
E.R.A. Taufiq	Anggota	18	18	100%

* Dialihkan penugasannya yang semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

** Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
R. Widyo Pramono	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Rofikoh Rokhim*	Sekretaris	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Ari Kuncoro **	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Nicolaus T.B Harjanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Hadiyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Hendrikus Ivo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Zulnahr Usman	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Dwi Ria Latifa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
E.R.A. Taufiq	Anggota	<i>Brilian Specialist Development Program (BSDP) Development Program+Modul Key Performance Indicator</i>	2021/Jakarta (Online)	BRI Corporate Univeristy
		<i>IHT Special Request Culture Leader</i>	2021/Jakarta (Online)	BRI Corporate Univeristy
		<i>IHT All Participants - End User Training Modul SAP: Fixed Asset Management Stream</i>	2021/Jakarta (Online)	BRI Corporate Univeristy
		<i>Coaching & Mentoring Executive Class</i>	2021/Jakarta (Online)	BRI Corporate Univeristy

* Dialihkan penugasannya yang semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

** Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan Honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat Honorarium khusus bagi setiap anggota Komite. Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri BUMN Nomor PER-12.MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ pendukung Dewan Komisaris sebagaimana telah di ubah pada Permen BUMN Nomor PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Nominasi dan Remunerasi

Indikator atau kriteria kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) di ukur dari pencapaian atas program kerja/rencana kerja dan anggaran (RKA) yang telah disusun pada setiap awal tahun dan tingkat kehadiran Anggota KNR dalam setiap rapat. Adapun program kerja KNR disusun untuk mendukung faktor-faktor utama keberhasilan (*Key Success Factors*) pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan proses nominasi pengurus perseroan dan anak perusahaan, evaluasi kebijakan remunerasi pekerja dan ketenagakerjaan, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengelolaan SDM secara keseluruhan.

Secara umum seluruh KPI KNR telah tercapai dengan dilaksanakannya seluruh Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KNR tahun 2021 sesuai target yang ditetapkan dan tingkat kehadiran anggota KNR yang memenuhi ketentuan sehingga rapat KNR dapat dilaksanakan dengan quorum dalam setiap mengambil keputusan.



Adapun pencapaian indikator atau kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

No	Perspektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	Learning & Growth Perspective	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KNR sesuai dengan POJK Peraturan Kementerian BUMN dan Regulator	Komposisi Anggota KNR tertuang dalam SK Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan ketentuan POJK & Kementerian BUMN	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Seluruh Anggota KNR Lulus <i>Fit & Proper test</i> OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2021	Seluruh Anggota Komisaris anggota KNR dinyatakan lulus <i>Fit and Proper Test</i> OJK dan mengikuti Pendidikan.	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di <i>Update</i> sesuai ketentuan dan masa jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Penetapan Ketua dan Anggota KNR BRI, Masa jabatan ketua dan Anggota KNR telah sesuai ketentuan	5	5
2	Internal Process Perspective	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP Dewan Komisaris disahkan sebelum pelaksanaan Tahun berjalan RKAP tersebut berlaku (Paling Lambat 31 Desember)	RKA KNR pada Tahun 2022 disahkan pada tanggal 31 Desember 2021	10	10
			Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Sesuai ketentuan, rapat Komite dilaksanakan minimal sekali dalam 4 (empat) bulan	Selama tahun 2021 dilaksanakan 18 (delapan belas) kali rapat	10
		Nominasi pengurus BRI		Minimal sekali dalam setahun	Nominasi Pengurus BRI telah dilakukan sesuai rincian rapat di atas.	10	10
		Nominasi pengurus anak perusahaan		Tentative sesuai dengan usulan Direksi	Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan nominasi pengurus anak perusahaan sesuai rincian rapat di atas.	10	10
		Reviu dan menyusun rekomendasi Struktur Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris		Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Rekomendasi KNR atas usulan Remunerasi Pengurus Perseroan	10	10
		Mereviu/ Pembahasan Remunerasi Direksi dan Komisaris		Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	KNR telah melakukan Pembahasan Remunerasi Pengurus Perseroan sesuai rincian rapat.	10	10
		Pengawasan	Review/ Pembahasan Kebijakan Ketenagakerjaan dan remunerasi Pekerja secara periodik	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	KNR melakukan pembahasan Kebijakan HC dan Tindak Lanjut pengelolaan SDM di Wilayah BRI ada 16 Februari 2021 dan <i>review</i> perjanjian Komite pada 28 Juli 2021	10	10
3	Compliance Perspective	Pelaksanaan aktivitas korporasi sesuai GCG	Evaluasi kinerja Direksi	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Melaksanakan Rapat pembahasan Evaluasi Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 23 Maret 2021.	5	5
			Pelaksanaan penilaian <i>self assesment</i> GCG Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara semesteran	Hasil penilaian <i>self assesment</i> GCG di Dewan Komisaris diperoleh dengan peringkat komposit 1.	5	5
			Penilaian kinerja Organ Dewan Komisaris	Dilaksanakan secara periodik setiap tahun sekali	Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris dan evaluasi Anggota Komite telah dilaksanakan setiap akhir tahun dan disampaikan dalam Laporan Tahunan BRI.	5	5
Total						100	100

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

Pelaksanaan kegiatan Komite pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Nominasi Calon Pengurus Perseroan

No.	Tanggal	Agenda
1	Selasa, 19 Januari 2021	Nominasi calon pengurus BRI
2	Kamis, 21 Januari 2021	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPSLB BRI Tahun 2021.
3	Selasa, 2 Maret 2021	Evaluasi <i>Talent Pool</i> BRI
4	Rabu, 6 Oktober 2021	Mekanisme Nominasi Calon Pengurus Perseroan
5	Kamis, 7 Oktober 2021	Nominasi Pengurus BRI dalam RUPSLB BRI 7 Oktober 2021

2. Nominasi Calon Pengurus di Perusahaan Anak atau Wakil Perseroan yang ditempatkan di anak Perusahaan atau Pihak Terkait

No.	Tanggal	Agenda
1	Rabu, 10 Februari 2021	Usulan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak
2	Selasa, 30 Maret 2021	Nominasi Pengurus Perusahaan Anak
3	Selasa, 13 April 2021	Usulan Direksi dan Komisaris Perusahaan Anak
4	Selasa, 7 September 2021	Nominasi dan Persetujuan Perubahan Pengurus Perusahaan Anak
5	Selasa, 21 September 2021	Nominasi Calon Pengurus Perusahaan Anak
6	Selasa, 21 Desember 2021	1. Pembahasan Perubahan Pengurus Perusahaan Cucu 2. Persetujuan DPS dan Plt. DPS Perusahaan Anak

3. Evaluasi Kebijakan Human Capital

No.	Tanggal	Agenda
1	Selasa, 16 Februari 2021	Kebijakan Human Capital dan Tindak Lanjut pengelolaan SDM di Wilayah BRI

4. Review kebijakan dan Struktur Remunerasi Direksi & Komisaris

No.	Tanggal	Agenda
1	Selasa, 27 April 2021	Usulan Remunerasi Dekom Direksi dengan Konsultan
2	Senin, 04 Oktober 2021	Pembahasan Remunerasi Pengurus Perseroan

5. Nominasi dan Evaluasi Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda
1	Selasa, 2 Februari 2021	Nominasi calon anggota komite Dewan Komisaris
2	Selasa, 6 Juli 2021	Nominasi calon anggota komite Dewan Komisaris
3	Selasa, 13 Juli 2021	Nominasi calon anggota komite Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda
4	Senin, 2 Agustus 2021	Nominasi dan Penetapan calon anggota komite Dewan Komisaris
5	Selasa, 21 Desember 2021	Anggota Komite yang akan Habis Kontrak Tahunan

Secara umum Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada penjelasan di atas telah di sampaikan rincian Rapat KNR yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. KNR telah melaksanakan Rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali antara lain melakukan pembahasan Nominasi Calon Pengurus Perseroan, Nominasi Calon Pengurus di Perusahaan Anak atau Wakil Perseroan yang ditempatkan di anak Perusahaan atau Pihak Terkait, Evaluasi Kebijakan Human Capital, Evaluasi Kinerja Direksi, Review kebijakan dan Struktur Remunerasi Direksi dan Komisaris, Evaluasi, Nominasi dan Wawancara Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris.

Komite Remunerasi dan Nominasi menilai, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai contoh, dalam hal pemilihan calon Direksi, setiap calon terlebih dahulu harus lulus *assessment* yang dilakukan oleh pihak independen dan Dewan Komisaris memberikan rekomendasi calon pengurus Perseroan berdasarkan data *Top Talent* BRI yang berasal dari Pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau Direksi Perusahaan Anak yang selanjutnya menjalani proses *Fit and Proper Test* oleh Dewan Komisaris dengan metode wawancara langsung.

Komite Nominasi dan Remunerasi menilai, pengukuran kinerja untuk Dewan Komisaris dan untuk Direksi yang dilakukan secara kolektif kolegial saat ini dinilai telah mencukupi. Selain saat ini telah dikembangkan penilaian kinerja individu, khususnya untuk Direksi, yang dapat mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dari masing-masing Direksi tanpa mengesampingkan bahwa terdapat kinerja individu Direksi yang bersifat kolegial (dipengaruhi/ mempengaruhi kinerja Direksi lain atau harus dikerjakan bersama Direksi lain).

Dalam hal kriteria dan prosedur seleksi bagi calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi menilai bahwa Direksi telah menerapkan sistem, kriteria dan prosedur yang *prudent*, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan remunerasi, Perusahaan dinilai telah menerapkan remunerasi bagi Direksi berdasarkan kinerja yang dicapai, *benchmark* ke industri dan *peers group* serta didasarkan pada evaluasi yang komprehensif yang dibantu oleh pihak independen yang kompeten. Demikian pula dengan penetapan remunerasi bagi pekerja secara keseluruhan diterapkan secara wajar, adil dan memotivasi pekerja, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan dan remunerasi yang diberikan dalam industri.

Rencana Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2022

No.	Rencana Agenda Rapat	Target Waktu
1	Usulan Nominasi Direksi dan Komisaris	Triwulan I
2	Evaluasi Kinerja Direksi	Triwulan I
3	Nominasi Calon Pengurus Perusahaan Anak	Tentative Sesuai Usulan Direksi
4	Reviu Usulan Struktur Remunerasi Direksi dan Komisaris	Triwulan II
5	Reviu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi	Triwulan II
6	Rekomendasi dan atau Evaluasi Pihak Independen Anggota Komite Dewan Komisaris	Minimal setahun 1 kali

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi telah disajikan pada Sub Judul Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) merupakan salah satu Komite di bawah Dewan Komisaris yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan evaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko

1. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan OJK No 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. Peraturan Menteri BUMN No. PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
7. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko memiliki Pedoman Kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 12-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 mengatur tentang:

1. Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab.
2. Pembagian kerja.
3. Waktu dan etika kerja.

4. Rapat Komite.
5. Struktur organisasi, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR).

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Manajemen Risiko

KPMR membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengevaluasi dan memastikan penerapan manajemen risiko Perseroan tetap memenuhi unsur-unsur kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko, sehingga kegiatan Perseroan tetap dapat terkendali pada batas/limit risiko yang dapat diterima serta menguntungkan Perseroan. Tugas dan tanggung KPMR adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko yang diperlukan.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Perseroan secara triwulanan dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan.
4. Melakukan pemantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko serta memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko. Evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
6. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya *Fraud* Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan.
7. Mengevaluasi dan menganalisa pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Perseroan paling kurang secara semesteran dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang Perseroan.
8. Mengevaluasi dan menganalisa penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi serta kebijakan Perseroan yang

terkait penggunaan Teknologi Informasi dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan.

9. Mengevaluasi dan menganalisa Tingkat Kesehatan Bank setiap semester dan memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara Tingkat Kesehatan Bank.
10. Mengevaluasi dan menganalisa paket usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
11. Memberikan pendapat dan/atau rekomendasi atas pemberian kredit diatas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris.
12. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko

Wewenang Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi yang relevan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dari pihak internal maupun eksternal Perseroan.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengelolaan risiko Perseroan.
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Perseroan.
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Penerapan Strategi Anti *Fraud* Perseroan.
7. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Perseroan.
8. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi oleh Perseroan.
9. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka memelihara dan meningkatkan Tingkat Kesehatan Perseroan.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Manajemen Risiko

Struktur Komite Pemantau Manajemen Risiko selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Struktur Komite Pemantau Risiko Periode 01 Januari 2021 – 25 April 2021

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ari Kuncoro	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Independen	Ekonomi, Perbankan
Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen	Ekonomi, Finance
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	Perbankan, Manajemen
Nicolaus T.B Harjanto	Anggota	Komisaris	Komunikasi, Politik
Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Ilmu Hukum, Manajemen
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistik, Manajemen
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Manajemen
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Akuntansi, Manajemen Risiko
A. Sigid Sudahno	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Akuntansi, Manajemen Risiko
Sumaryo	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Akuntansi, Manajemen Risiko
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Banking, Finance

Struktur Komite Pemantau Risiko Periode 26 April 2021 – 27 Juli 2021

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Ari Kuncoro*	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Independen	Ekonomi, Perbankan
Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen	Ekonomi, Finance
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	Perbankan, Manajemen
Nicolaus T.B Harjanto	Anggota	Komisaris	Komunikasi, Politik
Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Ilmu Hukum, Manajemen
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistik, Manajemen
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Manajemen
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Akuntansi, Manajemen Risiko
A. Sigid Sudahno	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Akuntansi, Manajemen Risiko

*Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Struktur Komite Pemantau Risiko Periode 28 Juli 2021 – 14 November 2021

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim*	Ketua	Komisaris Independen	Ekonomi, Finance
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	Perbankan, Manajemen
Nicolaus T.B Harjanto	Anggota	Komisaris	Komunikasi, Politik
Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Ilmu Hukum, Manajemen
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistik, Manajemen
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Manajemen
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Akuntansi, Manajemen Risiko
A. Sigid Sudahno	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Akuntansi, Manajemen Risiko

* Dialihkan penugasannya yang semula Komisaris Independen menjadi Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Struktur Komite Pemantau Risiko Periode 15 November 2021 – 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Independen	Ekonomi, Finance
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama	Perbankan, Manajemen
Nicolaus T.B Harjanto	Anggota	Komisaris	Komunikasi, Politik
Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Ilmu Hukum, Manajemen
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Komisaris	Statistik, Manajemen
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen	Ilmu Hukum, Manajemen
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Akuntansi, Manajemen Risiko
A. Sigid Sudahno	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Akuntansi, Manajemen Risiko
Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	Pihak Independen Bidang Manajemen Risiko	Perbankan, Manajemen Risiko

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Rofikoh Rokhim Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko/Wakil Komisaris Utama/Independen Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Kartika Wirjoatmodjo Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris Utama Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Nicolaus T.B Harjanto Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Hadiyanto Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Rabin Indrajad Hattari Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Dwi Ria Latifa Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/Komisaris Independen Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris



Bintoro Nurcahyo

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/
Pihak Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 03 Oktober 1963.
Usia 58 tahun Per Oktober 2021.
Berdomisili di Bekasi.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 245-DIR/HCB/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, LSPP
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4, LSPP



PERIODE MENJABAT

Maret 2020 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1988)
- Master of Finance, The Weatherhead School of Management (Finance) Case Western Reserve University, Cleveland. USA (1998)



PENGALAMAN KERJA

- Kepala Bagian Pengembangan Organisasi, Divisi Renstra, Kantor Pusat BRI (2005-2006)
- Kepala Bagian Kebijakan Akuntansi (Tim PSAK 50/55), Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan Kantor Pusat BRI (2006 – 2013)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional, Kanwil BRI Banjarmasin (2013 – 2016)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional, Kanwil BRI Surabaya (2016 – 2017)
- Expert Lecturer 2 Corporate University BRI (2017)
- Ketua Tim Implementasi PSAK 71, Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan Kantor Pusat BRI (2017 – 2018)
- Kepala Divisi Risiko Enterprise dan Manajemen Portofolio Kantor Pusat BRI (2018 – 2019)



A. Sigid Sudahno

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/
Pihak Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Semarang, 09 November 1961.
Usia 60 tahun Per November 2021.
Berdomisili di Semarang .



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 245-DIR/HCB/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3, BNSP
- Sertifikasi Gelar Profesi Broker Asuransi, APARI



PERIODE MENJABAT

Maret 2020 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Manajemen Pemasaran, Universitas Diponegoro Semarang (1987).
- Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Universitas Padjadjaran Bandung (2000).



PENGALAMAN KERJA

- Pemimpin Cabang, BRI So'E Timor - Tengah Selatan (2002 – 2005)
- Senior Account Officer Kantor Wilayah BRI Padang (2005 – 2006)
- Kepala Bagian Kebijakan Risiko Kredit Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI (2007- 2013)
- Wakil Kepala Divisi Kebijakan Risiko Kredit Divisi Administrasi Kredit Kantor Pusat BRI (2013 – 2017)
- Ketua Tim Penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Sebagai Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (2018 – 2019)
- Komisaris Pada Bringin Sejahtera Makmur Insurance Broker (2018 – 2019)



Ridwan Darmawan Ayub

Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko/
Pihak Independen

Warga negara Indonesia, lahir di Bogor, 07 Juli 1962.
Usia 59 tahun Per Desember 2021.
Berdomisili di Bogor.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: 695-DIR/HCB/11/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, BSMR
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, BSMR



PERIODE MENJABAT

November 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan – Bandung (1985)
- Magister Manajemen Keuangan, Universitas Mercu Buana – Jakarta (2008)



PENGALAMAN KERJA

- Wakil Kepala Divisi Operational Risk Bank International Indonesia (Persero) Tbk. (2002 – 2005)
- Komite Pemantau Risiko Bank International Indonesia (Persero) Tbk. (2006 – 2014)
- Komite Pemantau Risiko Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2014 – 2019)
- Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 – 2019)
- Komite Audit Bank Mandiri (Persero) Tbk. (2019 – 2021)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rofikoh Rokhim	Ketua	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi dan pengawasan perbankan
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Sarjana Akuntansi Master of Business Administration	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan dan manajemen
Nicolaus T.B Harjanto	Anggota	Sarjana Ilmu Politik Master of Arts Ph.D. Ilmu Politik dan Hubungan Internasional	Memiliki pengalaman dalam bidang ilmu komunikasi dan politik
Hadiyanto	Anggota	Sarjana Hukum Master of Law Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pengawasan perbankan
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Sarjana Ekonomi & Matematika Magister Manajemen Ph.D. in Economics,	Memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi dan pengawasan perbankan
Dwi Ria Latifa	Anggota	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas Magister of Science	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan manajemen
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Sarjana Ekonomi Master of Finance	Memiliki pengalaman dalam hukum dan bidang pengawasan perbankan
A. Sigid Sudahno	Anggota	Sarjana Ekonomi Manajemen Pemasaran Magister Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran	Memiliki pengalaman dalam hukum dan bidang pengawasan perbankan
Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman dalam hukum dan bidang pengawasan perbankan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota KPMR tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI. Syarat Independensi Anggota KPMR sebagai berikut:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota KPMR;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi.
4. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.
5. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Staf Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite pada BUMN atau perusahaan lain.

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Rofikoh Rokhim	Kartika Wirjoatmodjo	Nicolaus T.B Harjanto	Hadiyanto	Rabin Indrajad Hattari	Dwi Ria Latifa	Bintoro Nurcahyo	A. Sigid Sudahno	Ridwan Darmawan Ayub
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

- Rapat Komite dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
- Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
- Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Ketua Komite. Panggilan Rapat Komite harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komite dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail), WA paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- Panggilan rapat tersebut diatas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan rapat yang diadakan sebelumnya.
- Panggilan rapat harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat.
- Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Rapat dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
- Rapat dapat mengundang Direksi dan/atau Kepala Divisi/Pejabat Eksekutif Perseroan untuk meminta penjelasan, pemaparan, dan informasi terkait dengan agenda rapat.
- Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan setiap anggota Komite hanya berhak untuk memberikan 1 (satu) suara.
- Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat Komite yang memutuskan.
- Pimpinan rapat harus mengemukakan kesimpulan dan keputusan pada setiap akhir rapat.
- Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- Perbedaan pendapat atau dissenting opinion yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- Risalah rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- Risalah rapat merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.
- Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen memberikan persetujuannya secara tertulis.

Agenda Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	10 Februari 2021	Profil Risiko Induk Triwulan IV 2020 Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2020 Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester II 2020 Pembahasan Fungsi Kepatuhan Semester II 2020 Pembahasan APU PPT Semester II 2020	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
2	16 Februari 2021	<i>Update Debitur High Risk.</i>	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
3	16 Februari 2021	<i>Update Kondisi dan Strategi BRI dalam menghadapi posisi likuiditas dan posisi surat berharga.</i>	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
4	22 Februari 2021	Pembahasan Hasil Asesmen Maturitas IT BRI	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
5	15 Maret 2021	<i>Update</i> dan strategi pengembangan bisnis kecil dan menengah BRI.	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
6	21 April 2021	Pembahasan <i>Technical Assistance</i> BRI ke Bank Banten termasuk aspek SDM dalam Tim <i>Technical Assistance</i> .	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
7	21 April 2021	<i>Roadmap</i> Pengembangan <i>Human Capital</i> (RM dan Risk) Bisnis Kecil dan Menengah.	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
8	27 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Evaluasi Kinerja Investasi DPLK BRI - Rencana Bisnis DPLK 2021, - Strategi APU/PPT DPLK BRI - <i>Self Assesment</i> Penerapan Tata Kelola DPLK 	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
9	05 Mei 2021	25 <i>Customer Based Wholesale Banking</i> BRI dan <i>Roadmap</i> Pengembangan <i>Talent</i> segmen <i>Wholesale Banking</i> .	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
10	10 Mei 2021	Profil Risiko Triwulan I 2021	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
11	10 Mei 2021	Penilaian Tingkat Risiko TPPU dan TPPT BRI Tahun 2020	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
12	10 Mei 2021	Kesiapan Implementasi Standar Nasional Teknologi Chip dan PIN Online 6 Digit Pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
13	08 Juni 2021	Konsultasi Kredit 3 Debitur: - PT Energi Unggul Persada - PT Asia Pasific Rayon - PT Pelita Agung Agrindustri	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
14	08 Juni 2021	<i>BRI's Strategic Workforce Planning</i>	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
15	15 Juni 2021	<i>Update Kondisi dan Strategi masing-masing Direktorat dalam peng-himpunan Dana dan Fee Based Income</i>	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
16	15 Juni 2021	<i>Update Kondisi Bisnis dan Kinerja Dana Pensiun BRI</i>	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
17	22 Juni 2021	Konsultasi Kredit 4 Debitur: a. PT Telkom b. Sinarmas Group: - PT Ivo Mas Tunggal - PT Indah Kiat Pulp & Paper - PT Pelindo Deli Pulp & Paper Mills	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
18	29 Juni 2021	Pembahasan Permohonan Rencana Penyertaan Modal <i>Project Cyperus</i>	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
19	06 Juli 2021	Strategi Segmen Mikro dalam Mencapai Target Pertumbuhan	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
20	28 Juli 2021	Penilaian Profil Risiko BRI Triwulanan II/2021 Tingkat Kesehatan Bank Semester I/2021 Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester I/2021 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Semester I/2021 Penerapan APU PPT BRI Semester I/2021	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
21	10 Agustus 2021	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait atas nama PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
22	10 Agustus 2021	a. PT Sumber Segara Primadaya (S2P) b. Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) c. Freeport Indonesia	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
23	10 Agustus 2021	Review Portofolio Aktiva produktif (Kredit, Surat Berharga, Penempatan, Penyertaan)	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
24	31 Agustus 2021	Strategi Pertumbuhan Kredit Briguna	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
25	07 September 2021	Persetujuan Penambahan Modal BRI Agro	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
26	14 September 2021	Pelepasan Aktiva Tetap Tidak Bergerak BRI Kanwil Aceh	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
27	21 September 2021	Rencana Pemanfaatan, Pencairan dan Optimalisasi Aset Terbengkalai BRI	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
28	21 September 2021	Persiapan <i>Discontinuing</i> LIBOR dan dampaknya terhadap kinerja keuangan BRI	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
29	28 September 2021	Konsultasi Kredit: 1. PT. Pegadaian 2. PT. Adhi Karya 3. PT. Pembangunan Perumahan	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Rabin Indrajad Hattari Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
30	28 September 2021	BRI Dokumen <i>Management System</i> (BRIMEN)	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Rabin Indrajad Hattari Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
31	06 Oktober 2021	Agenda Konsultasi Kredit: 1. Pelindo 1 2. Inalum 3. Pertamina	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
32	06 Oktober 2021	<i>Update</i> Penerapan <i>Design</i> Fungsi <i>Secondline</i> dan <i>Thirdline</i>	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
33	11 Oktober 2021	Agenda Konsultasi Kredit: Pindad	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
34	11 Oktober 2021	<i>Update</i> Perkembangan Kinerja Portofolio Kredit Korporasi	Rofikoh Rokhim Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
35	19 Oktober 2021	Strategi Pengembangan Kupedes terkait Akuisisi PNM dan Pegadaian Strategi dan <i>Journey</i> Pengembangan Kupedes di tengah peningkatan Target KUR.	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
36	26 Oktober 2021	<i>Review</i> Profil Risiko Tw III/2021	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
37	09 November 2021	<i>Update</i> Project Helios (Evaluasi dan Penyusunan Strategi Jangka Panjang Dapen BRI dengan Konsultan PT Milliman Indonesia)	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno
38	23 November 2021	Pembahasan Usulan Rencana Bisnis Bank tahun 2022-2024.	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub
39	23 November 2021	Pembahasan Usulan <i>Risk Appetite Statement</i> (RAS) tahun 2022	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub
40	23 November 2021	Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2022	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub



No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
41	23 November 2021	Pembahasan Usulan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> 2022.	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub
42	November 2021	<i>Update</i> Transformasi dan Evaluasi Jaringan dan Layanan Strategi kesiapan Jaringan dan Layanan BRI dalam mendukung Sentra Layanan Ultra Mikro (Senyum)	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub
43	30 November 2021	Persetujuan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (Program PUMK)	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub
44	30 November 2021	Konsultasi Kredit untuk Debitur Korporasi atas nama PT Adi Karya Gemilang, PT Kebun Tebu Mas, AAA Oil & Fats Pte Ltd, PT Kutai Nusantara dan PT Riau Andalan Pulp & Paper.	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub
45	07 Desember 2021	Persetujuan Perubahan Kebijakan Umum Perkreditan dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko	Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub
46	07 Desember 2021	<i>Loan Portfolio Guideline Review</i> dan <i>Enhancement Credit Risk Rating (CRR)</i> dan <i>Credit Risk Scoring (CRS)</i>	Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub
47	07 Desember 2021	1). Pemaparan Kinerja Bisnis DPLK BRI 2). Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis DPLK BRI 2022	Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub
48	21 Desember 2021	Persetujuan Penyediaan Dana untuk: PT Permodalan Nasional Madani (PNM) PT Bank Raya Indonesia Tbk. (Bank Raya)	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T.B Harjanto Hadiyanto Rabin Indrajad Hattari Dwi Ria Latifa Bintoro Nurcahyo A. Sigid Sudahno Ridwan Darmawan Ayub

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Rofikoh Rokhim	Ketua	48	48	100%
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	48	47	98%
Ari Kuncoro*	Anggota	22	22	100%
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	48	48	100%
Hadiyanto	Anggota	48	46	96%
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	48	46	96%
Dwi Ria Latifa	Anggota	48	46	96%
Bintoro Nurcahyo	Anggota	48	48	100%
A. Sigid Sudahno	Anggota	48	48	100%
Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	11	11	100%

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Anggota KPMR BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; atau minimal dua tahun di bidang manajemen risiko di bidang keuangan dan/atau perbankan. Latar belakang anggota KPMR BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Rofikoh Rokhim	Ketua	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Ari Kuncoro*	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Hadiyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Rabin Indrajad Hattari	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Dwi Ria Latifa	Anggota	Pendidikan dan/atau Pelatihan dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau pelatihan anggota Dewan Komisaris		
Bintoro Nurcahyo	Anggota	<i>Asset Liability Management in Uncharted New Normal-Strategy & Optimization</i>	26 Oktober 2021, Jakarta	Bankers Association for Risk Management
A. Sigid Sudahno	Anggota	<i>Asset Liability Management in Uncharted New Normal-Strategy & Optimization</i>	26 Oktober 2021, Jakarta	Bankers Association for Risk Management
Ridwan Darmawan Ayub	Anggota	-	-	-

Penghasilan Komite Pemantau Risiko

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri BUMN Nomor PER-12.MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ pendukung Dewan Komisaris.

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Pemantau Risiko

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KPMR sesuai dengan POJK Peraturan KBUMN dan Regulator	Penetapan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN	5	5
			Piagam Komite telah diperbaharui sesuai ketentuan	Reviu Piagam KPMR pada Tahun 2020	Pada Tahun 2020 telah dilakukan reviu dan tidak ada perubahan terhadap piagam KPMR	5	5
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KPMR dari Dewan Komisaris telah lulus <i>fit & proper test</i> OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2020	Terdapat 1 (satu) Anggota KPMR menunggu hasil <i>fit & proper test</i> OJK yaitu Dwi Ria Latifa serta untuk Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KPMR.	5	5
			Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di <i>Update</i> sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	Penetapan Ketua dan Anggota KPMR BRI. Komposisi Anggota KPMR telah sesuai dengan POJK dan Ketentuan Kementerian BUMN.	5	5
2	<i>Internal Process Perspective</i>	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKAP KPMR pada Tahun 2020 disahkan pada tanggal 28 Desember 2020	RKAP KPMR pada Tahun 2021 disahkan pada tanggal 31 Desember 2021.	5	5
		Perencanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Minimal 4 (empat) kali rapat.	Selama Tahun 2021 dilaksanakan 48 (empat puluh delapan) kali Rapat KPMR. Selain itu KPMR juga ikut aktif dalam rapat bersama Dewan Komisaris	5	5
			Evaluasi atas pemberian kredit di atas jumlah tertentu yang memerlukan konsultasi dengan Dewan Komisaris	Seluruh paket pemberian kredit di atas jumlah tertentu di evaluasi sesuai ketentuan	Selama tahun 2021 KPMR melakukan <i>review</i> sebanyak 6 (enam) kali konsultasi kredit.	5	5
			Evaluasi atas penyediaan dana bagi pihak terkait	Seluruh penyediaan dana kepada Pihak terkait di evaluasi sesuai ketentuan	Selama tahun 2021 KPMR melakukan <i>review</i> sebanyak 4 (empat) kali persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2021	5	5
			Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: tambahan modal anak perusahaan lain, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya)	Rencana Aksi korporasi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris di evaluasi sesuai ketentuan	Selama tahun 2021 KPMR melakukan <i>review</i> sebanyak 3 (tiga) kali persetujuan rencana aksi korporasi. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2021	10	10

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Ouput/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
		Pengawasan	Review kecukupan kebijakan umum manajemen risiko dan <i>Recovery Plan</i>	Sekali setahun	Selama tahun 2021 KPMR melakukan <i>review</i> KUMR dan <i>Recovery Plan</i> . Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2021	5	5
			Review kebijakan umum perkreditan dan Evaluasi portfolio perkreditan/ portfolio guideline	Sekali setahun	<i>Review</i> Kebijakan Umum Perkreditan portfolio perkreditan/ Loan portfolio guideline masih berlaku	5	5
			Review pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik	Setiap Semester	Selama tahun 2021 KPMR melakukan <i>review</i> pelaksanaan pengendalian risiko secara periodik. <i>Output</i> Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2021	5	5
			Review pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendaan Terorisme (APU & PPT)	Setiap Semester	Selama tahun 2020 KPMR melakukan <i>Review</i> pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pendaan Terorisme (APU & PPT). Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2021.	5	5
			Mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya <i>fraud</i> Perseroan	Setiap Semester	Selama tahun 2021 KPMR melakukan evaluasi dan menganalisis pelaksanaan pengendalian risiko terjadinya <i>fraud</i> Perseroan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2021	5	5
			Memantau dan mengevaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan	Sekali setahun	Selama tahun 2021 KPMR melakukan evaluasi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Perseroan meningkatkan efektivitas dan kualitas penerapan manajemen risiko Perseroan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2021.	5	5
3	<i>Compliance Perspective</i>	Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	Evaluasi profil risiko Perseroan	Setiap Triwulan	Selama tahun 2021 KPMR melakukan Evaluasi profil risiko Perseroan setiap triwulan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2021	10	10
			Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan	Setiap Semester	Selama tahun 2021 KPMR melakukan Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank dan fungsi Kepatuhan secara periodik sesuai ketentuan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020	5	5
			Evaluasi penerapan <i>Good Pension Fund Governance</i>	Setiap Semester	Selama tahun 2020 KPMR melakukan Evaluasi penerapan <i>Good Pension Fund Governance</i> secara periodik sesuai ketentuan. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KPMR tahun 2020	5	5
Total						100	100



Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Tahun 2021

No	Tugas dan Tanggung Jawab		Pelaksanaan	
	Ruang Lingkup	Aktivitas	Pelaksanaan	Agenda
1	Evaluasi dan Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Strategis Perkreditan dan Perubahan/Persempurnaan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Perubahan/Persempurnaan Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR)	07 Desember 2021	Persetujuan Perubahan Kebijakan Umum Perkreditan dan Kebijakan Umum Manajemen Risiko
		Perubahan/Persempurnaan Kebijakan Perkreditan Bank		<i>Loan Portfolio Guideline Review</i> dan <i>Enhancement Credit Risk Rating (CRR)</i> dan <i>Credit Risk Scoring (CRS)</i>
		Perubahan/Persempurnaan <i>Loan Portfolio Guidance (LPG)</i>		
		<i>Risk Appetite Statement (RAS)</i>	23 November 2021	Pembahasan Usulan <i>Risk Appetite Statement (RAS)</i> tahun 2022
2	Evaluasi Kebijakan dan Penerapan Pedoman Tata Kelola DPLK dan Dana Pensiun	Laporan Penerapan Pedoman Tata Kelola DPLK Tahun 2020	27 April 2021	a. Pembahasan Evaluasi Kinerja Investasi DPLK BRI
		Laporan Hasil <i>Self Assessment</i> Penerapan Manajemen Risiko DPLK		b. Rencana Bisnis DPLK 2021, c. Strategi APU/PPT DPLK BRI d. <i>Self Assessment</i> Penerapan Tata Kelola DPLK
		Laporan Rencana Bisnis Dana Pensiun.	15 Juni 2021	Update Kondisi Bisnis dan Kinerja Dana Pensiun BRI
		Laporan Pengawasan Realisasi RBDPLK	07 Desember 2021	1). Pemaparan Kinerja Bisnis DPLK BRI 2). Permohonan Persetujuan Rencana Bisnis DPLK BRI 2022
3	<i>Review</i> dan Evaluasi Profil Risiko	Laporan Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2020	10 Februari 2021	Profil Risiko Triwulan IV Tahun 2020
		Laporan Profil Risiko Triwulan I Tahun 2021	10 Mei 2021	Profil Risiko Triwulan I Tahun 2021
		Laporan Profil Risiko Triwulan II Tahun 2021	28 Juli 2021	Profil Risiko Triwulan II Tahun 2021
		Laporan Profil Risiko Triwulan III Tahun 2021	26 Oktober 2021	Profil Risiko Triwulan III Tahun 2021
4	<i>Review</i> dan Evaluasi Laporan Pelaksanaan Program APU PPT	Laporan Pelaksanaan Program APU PPT Semester II Tahun 2021	10 Februari 2021	Pembahasan APU PPT Semester II 2020
		Laporan Pelaksanaan Program APU PPT Semester I Tahun 2022	28 Juli 2021	Penerapan APU PPT BRI Semester I/2021
5	<i>Review</i> dan Evaluasi Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester II 2020	10 Februari 2021	Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester II 2020
		Laporan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester I 2021	28 Juli 2021	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> Semester I/2021
6	<i>Review</i> dan Evaluasi Laporan Penerapan Manajemen Risiko Penggunaan IT dan Rencana Strategis IT	Laporan Penerapan Manajemen Risiko Penggunaan IT dan Rencana Strategis IT	22 Februari 2021	Pembahasan Hasil Asesmen Maturitas IT BRI
7	<i>Review</i> dan Evaluasi Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Juli - Desember 2020	10 Februari 2021	Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2020
		Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Januari - Juni 2021	28 Juli 2021	Tingkat Kesehatan Bank Semester I/2021
8	<i>Review</i> dan Evaluasi Portofolio Aktiva Produktif	<i>Review</i> Portofolio Aktiva Produktif dan Portfolio Guideline	10 Agustus 2021	<i>Review</i> Portofolio Aktiva produktif (Kredit, Surat Berharga, Penempatan, Penyertaan)

No	Tugas dan Tanggung Jawab		Pelaksanaan	
	Ruang Lingkup	Aktivitas	Pelaksanaan	Agenda
9	Konsultasi Kredit Direksi Kepada Dewan Komisaris	Konsultasi Kredit Dengan Forum Rapat Konsultasi Kredit Konsultasi Kredit Tanpa Forum Rapat Konsultasi Kredit	08 Juni 2021 22 Juni 2021 28 September 2021 06 Oktober 2021 11 Oktober 2021 30 November 2021	1. Konsultasi Kredit 3 Debitur: - PT Energi Unggul Persada - PT Asia Pasific Rayon - PT Pelita Agung Agrindustri" 2. Konsultasi Kredit 4 Debitur: a. PT Telkom b. Sinarmas Group: - PT Ivo Mas Tunggal - PT Indah Kiat Pulp & Paper - PT Pelindo Deli Pulp & Paper Mills" 3. Konsultasi Kredit an: a. PT. Pegadaian b. PT. Adhi Karya c. PT. Pembangunan Perumahan" 4. Agenda Konsultasi Kredit a. Pelindo 1 b. Inalum c. Pertamina 5. Agenda Konsultasi Kredit - Pindad 6. Konsultasi Kredit untuk Debitur Korporasi atas nama: a. PT Adi Karya Gemilang b. PT Kebun Tebu Mas c. AAA Oil & Fats Pte Ltd d. PT Kutai Nusantara f. PT Riau Andalan Pulp & Paper
10	Persetujuan atas Pemberian Fasilitas Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	Proposal fasilitas penyediaan dana kepada Perusahaan Anak/Pihak Terkait	15 Juni 2021 10 Agustus 2021 30 November 2021 21 Desember 2021 07 September 2021	1. <i>Update</i> Kondisi dan Strategi masing-masing Direktorat dalam penghimpunan Dana dan <i>Fee Based Income</i> 2. <i>Update</i> Kondisi Bisnis dan Kinerja Dana Pensiun BRI 3. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait atas nama PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) 4. Persetujuan Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (Program PUMK) 5. Persetujuan Penyediaan Dana, untuk: a. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) b. PT Bank Raya Indonesia, Tbk (Bank Raya)
11	<i>Review</i> dan Evaluasi <i>Recovery Plan</i>	Perubahan/Penyempurnaan <i>Recovery Plan</i>	23 November 2021	Pembahasan Usulan Pengkinian <i>Recovery Plan</i> 2022.
12	Aksi Korporasi pada Perusahaan Anak	Proposal aksi korporasi pada Perusahaan Anak	21 Desember 2021	Persetujuan Penyediaan Dana, untuk: a. PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) b. PT Bank Raya Indonesia, Tbk (Bank Raya)

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) merupakan salah satu komite yang membantu Dewan Komisaris serta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan evaluasi dan memastikan penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam konglomerasi keuangan Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 sebagaimana diubah Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada

Badan Usaha Milik Negara yang pada pokoknya mewajibkan Dewan Komisaris untuk menyusun program atau rencana kerja dan anggaran tahunan.

2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan

6. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
7. Surat Edaran OJK No. 014/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
8. Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
9. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
10. Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) Tbk. dan perubahannya.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pedoman kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan diatur dalam Surat keputusan Dewan Komisaris No. B.14-KOM/11/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Komite Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi menjadi acuan Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan pedoman dan tata tertib kerja bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan tata kelola sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dalam konglomerasi keuangan Perseroan.

Isi Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

- Bab I Pendahuluan**
Pengertian Umum
Dasar Hukum
- Bab II Pedoman dan Tata Tertib Kerja**
Tujuan, Tugas dan Tanggung Jawab, Kewajiban, Larangan serta Wewenang Organisasi
- Tujuan
 - Tugas dan Tanggung Jawab
 - Kewenangan
 - Etika kerja
 - Organisasi
 - Etika Kerja
 - Waktu Kerja
 - Rapat
 - Laporan
 - Mekanisme Surat Menyurat
- Bab III Penutup**

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan Komite Tata Kelola Terintegrasi tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern, pelaksanaan fungsi kepatuhan dan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bila dianggap perlu.
3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris BRI untuk disampaikan kepada Direksi BRI terkait pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (*Self Assessment*) setiap semester kepada Direksi BRI.
5. Menyampaikan hasil evaluasi Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi BRI.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pengendalian intern secara terintegrasi.
4. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
5. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris Entitas Utama dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama.

Keanggotaan Komite

1. Anggota Komite paling kurang terdiri dari satu Komisaris dari setiap anggota konglomerasi keuangan BRI, seorang pihak independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Anggota Komite paling kurang terdiri dari:
3. Seorang Komisaris Independen dari Entitas Utama sebagai ketua merangkap anggota.
4. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota.
5. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

6. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota.
7. Setiap anggota Komite harus independen dengan pengertian:
8. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
9. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris;
10. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
11. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan.
12. Penunjukan dan penggantian anggota Komite ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, khusus untuk anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen, berlaku ketentuan:
13. Dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
14. Masa kerja ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris jangka waktu kontrak dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.
15. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 01 Januari 2021 – 05 Juli 2021

Nama	Jabatan	Keterangan
Ari Kuncoro*	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI
Nicolaus T. B Harjanto	Anggota	Komisaris BRI
Hadiyanto	Anggota	Komisaris BRI
Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen BRI
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI
Zulnahr Usman	Anggota	Komisaris Independen BRI
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen BRI
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen BRI
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia
Iman Sundoro	Anggota	Komisaris Independen BRI Asuransi Indonesia
Syukhandri	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia

Nama	Jabatan	Keterangan
Hadi Susanto	Anggota	Komisaris Utama BRI Ventura Investama
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas
Eko Suwardi	Anggota	Komisaris Independen BRI Syariah
M. Gunawan Yasni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas BRI Syariah
Eko Wahyu Andriastono	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life
Anna Maria Tjiadarma	Anggota	Komisaris Independen BRI Agro Niaga

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 06 Juli 2021 – 05 September 2021

Nama	Jabatan	Keterangan
Ari Kuncoro*	Ketua	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen BRI
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI
Nicolaus T. B Harjanto	Anggota	Komisaris BRI
Hadiyanto	Anggota	Komisaris BRI
Rofikoh Rokhim	Anggota	Komisaris Independen BRI
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI
Zulnahr Usman	Anggota	Komisaris Independen BRI
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen BRI
Bintoro Nurcahyo	Anggota	Pihak Independen BRI
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia
Iman Sundoro	Anggota	BRI Asuransi Indonesia
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.



Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 06 September 2021 – 27 Desember 2021

Nama	Jabatan	Keterangan
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI
Nicolaus T. B Harjanto	Anggota	Komisaris BRI
Hadiyanto	Anggota	Komisaris BRI
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI
Zulnahr Usman	Anggota	Komisaris Independen BRI
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen BRI
Duma Riana Hutapea	Anggota	Pihak Independen BRI
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia
Iman Sundoro	Anggota	BRI Asuransi Indonesia
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi periode 28 Desember 2021 – 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian
Rofikoh Rokhim	Ketua	Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI	Ekonomi, Finance
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Komisaris Utama BRI	Ekonomi, Manajemen
Nicolaus T. B Harjanto	Anggota	Komisaris BRI	Komunikasi, Politik
Hadiyanto	Anggota	Komisaris BRI	Ilmu Hukum, Manajemen
Hendrikus Ivo	Anggota	Komisaris Independen BRI	Ilmu Hukum, Audit
Zulnahr Usman	Anggota	Komisaris Independen BRI	Bisnis, Industri
Dwi Ria Latifa	Anggota	Komisaris Independen BRI	Ilmu Hukum, Manajemen
Suindiyo	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Finance
Duma Riana Hutapea	Anggota	Pihak Independen BRI	Akuntansi, Keuangan
Tedi Nurhikmat	Anggota	Pihak Independen BRI	Banking, Finance
Eko B Supriyanto	Anggota	Komisaris Independen Bank Raya Indonesia	Ekonomi, Manajemen
Iman Sundoro	Anggota	BRI Asuransi Indonesia	Ekonomi, Manajemen
Abdul Ghoni	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	Manajemen, Keuangan Syariah
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Komisaris Independen Asuransi BRI Life	Ilmu Hukum, Manajemen
Mohammad Hidayat	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Asuransi BRI Life	Ilmu Hukum, Keuangan Syariah
Sumihar Manullang	Anggota	Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas	Akuntansi, Manajemen
Sumantri Suwarno	Anggota	Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia	Ekonomi, Bisnis
Omar Arip Tirta	Anggota	Komisaris Independen BRI Ventura Investama	Manajemen, Scientific Computing
Muhammad Sulhan Fauzi	Anggota	Komisaris Independen Pegadaian	Ekonomi, Manajemen
Muhammad Cholil Nafis*	Anggota	Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian	Manajemen, Keuangan Syariah
Meidyah Indreswari	Anggota	Komisaris Independen Permodalan Nasional Madani	Akuntansi, Manajemen

*) Efektif setelah lulus *Fit and Proper Test* Otoritas Jasa Keuangan

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rofikoh Rokhim Ketua/Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI
Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Kartika Wirjoatmodjo Anggota/Komisaris Utama BRI
Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Nicolaus T. B Harjanto Anggota/Komisaris BRI
Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Hadiyanto Anggota/Komisaris BRI
Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Hendrikus Ivo Anggota/Komisaris Independen BRI
Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Zulnihar Usman Anggota/Komisaris Independen BRI
Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris
Dwi Ria Latifa Anggota/Komisaris Independen BRI
Profil dapat dilihat pada bagian profil anggota Dewan Komisaris



Suindiyo

Anggota/Pihak Independen BRI

Warga negara Indonesia, lahir di Blora , 27 April 1959. Usia 62 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta .



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 06-KOM/BRI/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV



PERIODE MENJABAT

Juni 2020 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Diploma PT Telkom Indonesia (1980)
- Sarjana Ekonomi Universitas Jember (1985)
- Master of Business Administration (Finance), Virginia Polytechnic Institute & State University (Virginia Tech), USA (1994)



PENGALAMAN KERJA

- Komite Pemantau Manajemen Risiko (2015-2020)
- Komisaris Multifinance (2015-2015)
- EVP Audit Intern Wilayah (Manado, Medan, Denpasar, Malang) (2010-2015)
- Wakil Kepala Divisi (Administrasi Kredit dan Restrukturisasi dan Recovery) (2005-2006)



Duma Riana Hutapea

Anggota/Pihak Independen BRI

Warga negara Indonesia, lahir di Balige, 17 Juni 1961.
Usia 60 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Jakarta .



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

-



PERIODE MENJABAT

Juli 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



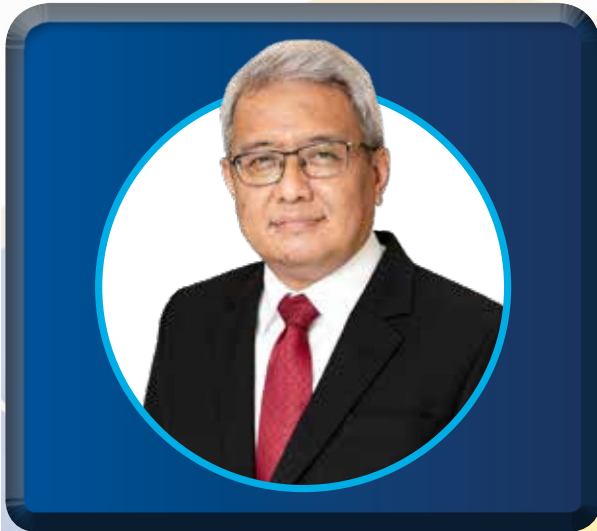
RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara (1986)
- Master of Science in Business Administration, University of Illinois, USA (1999)



PENGALAMAN KERJA

- Direktur Eksekutif, Unit Kerja Pendukung Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV, OJK (2020 – 2021)
- Direktur Manajemen Strategis, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK, Kantor OJK Regional 1, Jakarta-Banten (2015 – 2019)
- Direktur Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan, OJK (2015 – 2015)
- Deputi Direktur Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan, OJK (2013 – 2014)
- Bank Indonesia, Departemen Kredit, Departemen Keuangan, Departemen Kredit dan UMKM, Departemen Penelitian dan Pengembangan Perbankan, Departemen Pengendalian Pengawasan Perbankan (1989-2013)



Tedi Nurhikmat

Anggota/Pihak Independen BRI

Warga negara Indonesia, lahir di Bogor, 20 Oktober 1965.
Usia 56 tahun Per Desember 2021.
Berdomisili di Bogor .



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5
- Assesor Kompetensi Risk Management
- *Learning Value Chain Certification*
- *Risk Management Trainers – BSMR GAARP*



PERIODE MENJABAT

Desember 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Pertanian & Sumber Daya, Institut Pertanian Bogor (1989)
- MBA (Exchange Program) University of Washington, Seattle, USA (1997)
- MBA Banking and Finance, International University of Japan, Niigata Japan (1998)



PENGALAMAN KERJA

- SVP Mandiri University Group & Head of Technical Capability Management Project Phase II with EY, (2018 -2021)
- SVP, Head of Credit Risk and Portfolio Management Group & Head of ERM Project Mandiri with KPMG, & Head of Central Liabilities System Project, Mandiri with Moody's (2010-2018)
- VP Head of Enterprise Risk Management Dept & Head of Basel II & ERM System Project Mandiri with Oracle , (2007 – 2010)
- VP Head of Consumer Risk Scoring & MIS Dept & Head of Scoring Model Project, Mandiri with IdX (2004 – 2007)
- VP Head of Electronic Banking Policy, Procedure & Supporting Dept.(2003 – 2004)



Eko B Supriyanto

Anggota/Komisaris Independen Bank Raya Indonesia

Warga negara Indonesia, lahir di Cepu, 16 Mei 1964/
Usia 57 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Jakarta .



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

-



PERIODE MENJABAT

Juli 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Direktur Utama PT Infoarta Pratama (Infobank)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta. 1996
- Magister Manajemen, Universitas Trisakti, Jakarta 2014



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen Bank Raya Indonesia
- Komisaris Independen Pelabuhan Maritim Learning Indonesia (Jan 2020 – Juli 2020)
- Advisor PT. Pelindo Investama Indonesia (PII) (Jan 2019 – Des 2019)
- Komisaris Utama Independen PT Bank MNC Internasional Tbk Mei 2016 – Mei 2018
- Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank MNC Internasional Tbk Mei 2016 – Mei 2018
- Direktur Utama PT Infoarta Pratama (Infobank) 2015 – Sekarang



Iman Sundoro

Anggota/Komisaris Independen BRI Asuransi Indonesia

Warga negara Indonesia, lahir di Magelang, 30 Juli 1962 /
Usia 59 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Surakarta .



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

- Profesional Tata Kelola Risiko Berkualifikasi (QRGP)
- Manajemen Risiko Perbankan Level 4
- *International Wealth Management Certification Program (CWMA)*



PERIODE MENJABAT

Juli 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Ekonomi, UPN Veteran Yogyakarta 1987



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen BRI Asuransi Indonesia (Maret 2019 - sekarang)
- Inspektur Kanwil Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Maret – Juli 2018)
- Inspektur Kanwil Jayapura PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (April 2017 – Februari 2018)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis Jakarta 3 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Maret 2016-Maret 2017)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis Semarang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (Oktober 2013 – Februari 2016)



Abdul Ghoni

Anggota/Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia

Warga negara Indonesia, lahir di Tanjungkarang, 02 Juni 1977 / Usia 44 tahun Per Desember 2021 Berdomisili di Tangerang Selatan .



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Akta No.10 Tanggal 21 April 2021 – Berita Acara RUPST PT. BRI Asuransi Indonesia dan ditunjuk sebagai anggota KTKT dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

-



PERIODE MENJABAT

Juli 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Reliance Indonesia (2020-sekarang)
- Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019 – sekarang)
- Dosen Tidak Tetap PKN STAN Kemenkeu RI (2015 – sekarang)
- Dosen Tidak Tetap Universitas Thamrin (2015 – sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, STIE Bhakti Pembangunan (2002)
- Magister Manajemen, Universitas Mercubuana (2015)
- Doktor Pengkajian Islam, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2018)



PENGALAMAN KERJA

- Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia (2021 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Reliance Indonesia (2020 – sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Paralomas (2019 – 2020)
- Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019 – sekarang)
- Dosen Tidak Tetap PKN STAN Kemenkeu RI (2015 – sekarang)
- Dosen Tidak Tetap Universitas Thamrin (2015 – sekarang)



Premita Fifi Widhiawati

Anggota/Komisaris Independen Asuransi BRI Life

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 31 Agustus 1966/
Usia 55 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Jakarta .



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

Sertifikasi Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi LSPMR – BNSP (2020)



PERIODE MENJABAT

Juli 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

- CEO dan CoFounder PT National Survey & Advisory (2015 – sekarang)
- Senior Consultant PT Mars Data Science (2014 – sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Hukum, Universitas Indonesia (1991)



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen PT Asuransi BRI Life (Juni 2020 – sekarang)
- Sekertaris Satuan Tugas Promosiv Pariwisata Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2016)
- CEO dan CoFounder PT National Survey & Advisory (2015 – sekarang)
- Senior Consultant PT Mars Data Science (2014 – sekarang)



Mohammad Hidayat

Anggota/Anggota Dewan Pengawas Syariah
Asuransi BRI Life

Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta, 03 Mei 1967 /
Usia 54 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

-



PERIODE MENJABAT

Juli 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri (September 1991 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah BTN Syariah (Maret 2018 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Manulife Syariah (April 2020 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Allianz Syariah (Oktober 2020 – sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 1992
- Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, 2004
- Magister Islamic Economic and Finance, Universitas Trisakti, 2014



PENGALAMAN KERJA

- Anggota Dewan Pengawas Syariah Asuransi BRI Life (April 2021 – sekarang)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri (September 1991 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah BTN Syariah (Maret 2018 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Manulife Syariah (April 2020 – sekarang)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Allianz Syariah (Oktober 2020 – sekarang)



Sumihar Manullang

Anggota/Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas

Warga negara Indonesia, lahir di Bakara, 22 Oktober 1962 / Usia 59 tahun Per Desember 2021 Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

Wakil Perantara Pedagang Efek



PERIODE MENJABAT

Juli 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Pendidikan Sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran (1987)
- Magister Manajemen Keuangan Universitas Katolik Atmajaya (2000).



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen BRI Danareksa Sekuritas
- Kepala Divisi Kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2018)
- Kepala Audit Intern Wilayah Medan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017)
- Kepala Audit Intern Wilayah Manado PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016)
- Kepala Audit Intern Wilayah Jayapura PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015).



Sumantri Suwarno

Anggota/Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia

Warga negara Indonesia, lahir di Bantul, 02 Maret 1976 /
Usia 45 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

-



PERIODE MENJABAT

Juli 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

- Direktur Pengembangan Bisnis PT Rukun Raharja, Tbk (April 2021 – sekarang)
- Komisaris PT Sirius Surya Sentosa (2019 – sekarang)
- General Manager PT Usahatama Mandiri Nusantara (2013 – sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia, 2002
- Magister Bisnis, Univeristas Prasetiya Mulya, Jakarta



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen BRI Multifinance Indonesia (Juni 2020 – sekarang)
- Direktur Pengembangan Bisnis PT Rukun Raharja, Tbk (April 2021 – sekarang)
- Komisaris PT Sirius Surya Sentosa (2019 – sekarang)
- Komisaris PT IPC TPK (Januari 2020 – Juli 2020)
- General Manager PT Usahatama Mandiri Nusantara (2013 – sekarang)



Omar Arip Tirta

Anggota/Komisaris Independen BRI Ventura Investama

Warga negara Indonesia, lahir di Bandung, 14 Maret 1978/
Usia 44 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Bandung.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

-



PERIODE MENJABAT

Juli 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

President PT Setiap Hari Dipakai (Evermos) (2018 – sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Bachelor of Science, Mathematics of Computation University of California, Los Angeles (UCLA) 2002
- Master of Science, Scientific Computing, Stanford University 2004



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen BRI Ventura Investama (Juni 2020 – sekarang)
- President PT Setiap Hari Dipakai (Evermos) (2018 – sekarang)
- Managing Director PT Bobobox Mitra Indonesia (2017 – 2018)
- CEO PT Teknologi Kreasi Anak Bangsa (2017 – 2018)
- Director of Investment Analysis & Strategy Hercules Capital. Inc (HTGC) New York Stock Exchange (2004 -2011)



Muhammad Sulhan Fauzi

Anggota/Komisaris Independen Pegadaian

Warga negara Indonesia, lahir di Purbalingga, 13 Mei 1972 /
Usia 49 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Nomor: SK-44/MBU/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dan ditunjuk sebagai anggota KTKT dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

CRMP



PERIODE MENJABAT

Desember 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Pendiri/Dewan Penasehat, TK/SD Al Azhar 37, Banjar Baru (2014-sekarang)



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Management Keuangan Universitas Islam Indonesia, 1994
- Magister Management, Manajemen Strategik Universitas Brawijaya, 2004



PENGALAMAN KERJA

- Direktur Utama PT. Purba Griya Utama (2016-2021)
- Direktur Utama PT. Pancanaka Indonesia Baru (2014 - 2021)
- Pendiri/Dewan Penasehat, TK/SD Al Azhar 37, Banjar Baru (2014 - sekarang)
- Branch Manager, PT Bank Syariah Mandiri (2010 - 2014)
- Branch Manager , PT Bank BTN Syariah (2007 - 2009)



Muhammad Cholil Nafis

Anggota/Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian

Warga negara Indonesia, lahir di Sampang, 1 Juni 1975 / Usia 46 tahun Per Desember 2021 Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia (2012)
- Pelatihan Asesor Kompetensi Pengawas Syariah (2016).



PERIODE MENJABAT

Desember 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

- Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asyki (2015-sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah Puskop Syariah DKI Jaya (2014-sekarang).



RIWAYAT PENDIDIKAN

- LC dari Ibnu Sa'ud Islamic University, Jakarta (1996-2000).
- Sarjana Agama dari Sekolah Tinggi Agama Islam Az Ziyadah, Jakarta (1996-2000).
- MA dari Program Pascasarjana UIN Jakarta (2001-2003).
- Ph.D. dari University of Malaya, Malaysia (2008-2010).



PENGALAMAN KERJA

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Pegadaian (2011 - sekarang)
- Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asyki (2015-sekarang).
- Dewan Pengawas Syariah Puskop Syariah DKI Jaya (2014-sekarang).
- Sekretaris Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (2014-2017).
- Kelompok Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK (2013-2017).
- Dosen Sekolah Tinggi Al Qur'an Al Hikam, Depok (2011-sekarang).



Meidyah Indreswari

Anggota/Komisaris Independen PNM

Warga negara Indonesia, lahir di Bandung, 02 Mei 1957 /
Usia 64 tahun Per Desember 2021
Berdomisili di Jakarta.



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



SERTIFIKASI

- Certified Knowledge Manager (CKM)
- Certified Risk Management Assurance (CRMA)
- Certified Control Self – Assessment (CSSA)
- Certified Accountant (CA)
- Certified Forensic Auditor (CFrA)
- Certified Professional Management Accountant (CPMA)



PERIODE MENJABAT

Desember 2021 s.d sekarang



JABATAN RANGKAP

Tidak Ada



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1983
- Master of Science in Accounting di University of Saskatchewan, Canada, 1992
- Ph.D bidang Development Studies dari Massey University, New Zealand 2006.



PENGALAMAN KERJA

- Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani (2018 – sekarang)
- Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara (2017)
- Sekretaris Utama BPKP (2013-2017)
- Kepala Pusdiklatwas BPKP (2010-2013)
- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jakarta II (2008–2010)

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Pihak Independen yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan pengalaman
2. Pihak Independen yang memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan entitas anak antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
4. Memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep risiko dan pengendalian risiko dalam aktivitas usaha serta pengendalian intern perusahaan.
5. Komisaris Independen dari setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI sebagai anggota.
6. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari BRI Syariah sebagai anggota

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Pendidikan	Pengalaman Kerja
Rofikoh Rokhim	Ketua	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi dan manajemen
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Sarjana Akuntansi Master of Business Administration	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan dan manajemen
Nicolaus T. B Harjanto	Anggota	Sarjana Ilmu Politik Master of Arts Ph.D, Ilmu Politik dan Hubungan Internasional	Memiliki pengalaman dalam bidang ilmu komunikasi dan politik
Hadiyanto	Anggota	Sarjana Hukum Master of Law Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pengawasan perbankan.
Hendrikus Ivo	Anggota	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam bidang audit dan pengawasan perbankan
Zulnahr Usman	Anggota	Sarjana Teknik Perminyakan	Memiliki pengalaman dalam bidang bisnis dan industri
Dwi Ria Latifa	Anggota	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas Magister of Science	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan manajemen
Suidiyo	Anggota	Sarjana Ekonomi Master of Business Administration Finance	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan manajemen bisnis
Duma Riana Hutapea	Anggota	Sarjana Akuntansi Master of Science in Business Administration	Memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan perbankan dan manajemen bisnis
Tedi Nurhikmat	Anggota	Sarjana Ekonomi Pertanian & Sumber Daya MBA (Exchange Program) MBA Banking and Finance	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan manajemen bisnis
Eko B Supriyanto	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan ekonomi
Iman Sundoro	Anggota	Sarjana Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan ekonomi
Abdul Ghoni	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Manajemen Doktor Pengkajian Islam	Memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan keuangan syariah
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Sarjana Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan manajemen
Mohammad Hidayat	Anggota	Sarjana Syariah Magister Ilmu Hukum Magister Islamic Economic and Finance	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan keuangan syariah
Sumihar Manullang	Anggota	Sarjana Akuntansi Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan keuangan
Sumantri Suwarno	Anggota	Sarjana Ekonomi Magister Bisnis	Memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan bisnis
Omar Arip Tirta	Anggota	Bachelor of Science, Mathematics of Computation Master of Science, Scientific Computing	Memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan <i>scientific computing</i>
Muhammad Sulhan Fauzi	Anggota	Sarjana Ekonomi, Management Keuangan Magister Management, Manajemen Strategik	Memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan ekonomi
Muhammad Cholil Nafis*	Anggota	Sarjana Agama MA Ph.D	Memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan keuangan syariah
Meidyah Indreswari	Anggota	Sarjana Ekonomi Master of Science in Accounting Ph.D bidang Development Studies	Memiliki pengalaman dalam bidang akuntansi dan manajemen

*) Efektif setelah lulus Fit and Proper Test Otoritas Jasa Keuangan

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Untuk menjamin independensi pelaksanaan tugas dan pemberian pandangan maupun saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, seluruh anggota KTKT tidak memiliki afiliasi dengan Direktur, Komisaris lainnya maupun pemegang saham pengendali BRI dan bukan merupakan pemegang saham, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari Perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Persyaratan independensi anggota KTKT adalah:

1. Tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan anak Perseroan, atau afiliasinya, kecuali upah, gaji, dan fasilitas lainnya yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
1. Tidak mempunyai hubungan keluarga maupun bisnis dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Tidak mempunyai kedudukan rangkap pada Perseroan dan Perseroan lainnya yang terafiliasi dengan Bank; dan
3. Tidak memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang menimbulkan benturan kepentingan

Tabel Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Aspek Independensi	AK	RR	KW	NTBH	HY	ZU	DRL	HI	SY	BN	DRH	TN	EBS	IS	AG	PFW	MH	SM	SS	OAT	MSF	MCN	MI	SH	HS	ES	MGY	EWA	AMT
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Keterangan

Ari Kuncoro (AK), Rofikoh Rokhim (RR), Kartika Wirjoatmodjo (KW), Nicolaus T.B Harjanto (NTBH), Hadiyanto (HY), Zulnihar Usman (ZU), Dwi Ria Latifa (DRL), Hendrikus Ivo (HI), Suindiyo (SY), Bintoro Nurcahyo (BN), Duma Riana Hutapea (DRH), Tedi Nurhikmat (TN), Eko B Supriyanto (EBS), Iman Sundoro (IS), Abdul Ghoni (AG), Premita Fifi Widhiawati (PFW), Mohammad Hidayat (MH), Sumihar Manullang (SM) Sumantri Suwarno(SS), Omar Arip Tirta (OAT), Muhammad Sulhan Fauzi (MSF), Muhammad Cholil Nafis* (MCN), Meidyah Indreswari (MI), Syukhandri (SH), Hadi Susanto (HS), Eko Suwardi (ES), M Gunawan Yasni (MGY), Eko Wahyu Andriastono (EWA), Anna Maria Tjandra (AMT)

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengaturan rapat Komite diatur sebagai berikut:

- Rapat Komite dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas inisiatif seorang atau lebih anggota Komite dengan menyebutkan agenda yang akan dibahas. Rapat Komite dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat Komite diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Komite.
- Rapat Komite yang terjadwal harus dilakukan pemanggilan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan seorang anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama, sedangkan rapat yang dilakukan karena adanya hal-hal yang mendesak atau tidak terjadwal dapat dilakukan pemanggilannya secara lisan atau komunikasi melalui *video conference*.
- Rapat Komite harus mencantumkan agenda rapat, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat.
- Setiap rapat Komite dipimpin oleh ketua Komite dan dalam hal ketua Komite tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Komite yang berasal dari Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Jika terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka harus dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- Risalah rapat Komite harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh pimpinan rapat. Risalah rapat tersebut wajib ditandatangani semua anggota Komite yang hadir dalam rapat.
- Risalah rapat Komite merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat dimaksud.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	22 Februari 2021	Pembahasan Metodologi dan Parameter Penilaian Pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi	Ari Kuncoro Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Rofikoh Rokhim Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo
2	09 Maret 2021	Profil Risiko, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester II 2020, Audit Terintegrasi Semester II 2021, dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Anak BRI Semester II 2020	Ari Kuncoro Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Rofikoh Rokhim Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo Sumihar Manullang Sumantri Suwarno Syukhandri Hadi Susanto Eko Wahyu Andriastono Anna Maria Tjandra
3	21 April 2021	Evaluasi Kecukupan Permodalan, Manajemen Likuiditas, Transaksi Intra Group dan Manajemen Risiko Penyediaan Dana	Ari Kuncoro Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Rofikoh Rokhim Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
4	05 Mei 2021	Pembahasan Jasa Konsultan Tata Kelola Terintegrasi	Ari Kuncoro Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Rofikoh Rokhim Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo
5	03 Agustus 2021	Update Kondisi IT Security dan Tata Kelola IT pada BRI Life	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo Premita Fifi Widhiawati
6	19 Agustus 2021	Profil Risiko Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester I 2021, Audit Terintegrasi Semester I 2021 dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Anak BRI Semester I 2021	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo Eko B Supriyanto Iman Sundoro Abdul ghoni Premita Fifi Widhiawati Sumihar Manullang Sumantri Suwarno Omar Arip Tirta

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
7	20 Agustus 2021	Pembahasan Concern Dewan Komisaris dalam Rangka <i>Kick Off Meeting</i> TKT	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo
8	24 Agustus 2021	BRI Danareksa Sekuritas a. <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini b. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo Sumihar Manullang
9	24 Agustus 2021	BRI Agro a. <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini b. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo Eko B Supriyanto
10	31 Agustus 2021	BRI Ventura Investama a. <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini b. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo Omar Arip Tirta
11	31 Agustus 2021	BRI Life a. <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini b. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo Premita Fifi Widhiawati

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
12	31 Agustus 2021	BRI Finance a. <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini b. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Bintoro Nurcahyo Sumantri Suwarno
13	07 September 2021	<i>Kick off Meeting</i> Penguatan Implementasi Tata Kelola Terintegrasi BRI	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Duma Riana Hutapea
14	21 September 2021	BRI Insurance a. <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini b. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Duma Riana Hutapea Iman Sundoro Abdul Ghoni
15	19 Oktober 2021	Strategi Pengembangan Bisnis BRI dan Perusahaan Anak (PNM dan Pegadaian)	Rofikoh Rokhim Kartika Wirjoatmodjo Nicolaus T. B Harjanto Hadiyanto Hendrikus Ivo Zulnahr Usman Dwi Ria Latifa Suindiyo Duma Riana Hutapea Sumantri Suwarno Iman Sundoro Abdul Ghoni Omar Arip Tirta Sumihar Manullang Premita Fifi Widhiawati Mohammad Hidayat Eko B Supriyanto

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentasi
Rofikoh Rokhim	Ketua	15	15	100%
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	15	15	100%
Nicolaus T. B Harjanto	Anggota	15	15	100%
Hadiyanto	Anggota	15	15	100%
Hendrikus Ivo	Anggota	15	15	100%
Zulnahr Usman	Anggota	15	15	100%
Dwi Ria Latifa	Anggota	15	15	100%
Suindiyo	Anggota	15	15	100%
Duma Riana Hutapea	Anggota	3	3	100%
Eko B Supriyanto	Anggota	2	2	100%
Iman Sundoro	Anggota	3	3	100%
Abdul Ghoni	Anggota	2	2	100%
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	3	3	100%
Sumihar Manullang	Anggota	3	3	100%
Sumantri Suwarno	Anggota	3	3	100%
Omar Arip Tirta	Anggota	2	2	100%
Ari Kuncoro¹ Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI	Ketua	4	4	100%
Syukhandri² Anggota Dewan Pengawas Syariah BRI Asuransi Indonesia	Anggota	1	1	100%
Hadi Susanto² Komisaris Utama BRI Ventura Investama	Anggota	1	1	100%
Eko Wahyu Andriastono² Komisaris Independen Asuransi BRI Life	Anggota	1	1	100%
Anna Maria Tjiadarma² Komisaris Independen BRI Agro Niaga	Anggota	1	1	100%
Bintoro Nurcahyo³	Anggota	12	12	100%

Keterangan:

1. Sdr. Ari Kuncoro mengundurkan diri sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen per tanggal 21 Juli 2021
2. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 04-KOM/BRI/09/2021 tanggal 06 Juli 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. memberhentikan penunjukan Sdr. Syukhandri dari BRI Asuransi Syariah, Sdr. Hadi Susanto dari BRI Ventura Investama, Sdr. Eko Wahyu Andriastono dari BRI Life, dan Sdr. Anna Maria Tjiadarma dan BRI Agro Niaga sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
3. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 06-KOM/BRI/09/2021 tanggal 06 September 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Memberhentikan penunjukan Sdr. Bintoro Nurcahyo dari Pihak Independen BRI dan mengangkat Sdr. Mohammad Hidayat dari Dewan Pengawas Syariah BRI Life sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
4. Adanya merger tiga bank syariah yakni BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia mulai 1 Februari 2021 lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan izin untuk Bank Syariah Indonesia sebagai entitas baru sehingga memberhentikan penunjukan Sdr. Eko Suwardi dan Sdr. Gunawan Yasni dari BRI Syariah sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
5. Terkait Holding Ultra Mikro yang disahkan melalui RUPSLB pada tanggal 22 Juli 2021 dan Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 09 November 2021, menunjuk Sdr. Tedi Nurhikmat dari Pihak Independen BRI, Sdr. Muhammad Sulhan Fauzi dari Pegadaian, Sdr. Muhammad Cholil Nafis dari Pegadaian, dan Sdr. Meidyah Indreswari PNM sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BRI NOKEP: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Program Peningkatan Kompetensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Anggota KTKT BRI memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing dengan pengalaman minimal lima tahun. Latar belakang anggota KTKT BRI cukup beragam, yakni berpengalaman pada bidang manajemen strategis, manajemen risiko, perbankan, keuangan dan akuntansi sehingga dapat menjamin kualitas rekomendasi dan saran perbaikan kepada Dewan Komisaris. Pelatihan/*training* yang diikuti oleh anggota KTKT Komisaris selama tahun 2021 dapat dilihat pada daftar pendidikan/*training* Dewan Komisaris selama Tahun 2021.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Rofikoh Rokhim	Ketua	Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Pendidikan Dewan Komisaris		
Kartika Wirjoatmodjo	Anggota	Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Pendidikan Dewan Komisaris		
Nicolaus T. B Harjanto	Anggota	Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Pendidikan Dewan Komisaris		
Hadiyanto	Anggota	Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Pendidikan Dewan Komisaris		
Hendrikus Ivo	Anggota	Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Pendidikan Dewan Komisaris		
Zulnahr Usman	Anggota	Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Pendidikan Dewan Komisaris		
Dwi Ria Latifa	Anggota	Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Anggota Tata Kelola Terintegrasi, dapat dilihat pada bagian Pendidikan Dewan Komisaris		
Suindiyo	Anggota	<i>Asset Liability Management in Uncharted New Normal-Strategy & Optimization</i>	Jakarta, 26 Oktober 2021	Bankers Association for Risk Management
Duma Riana Hutapea	Anggota	<i>Asset Liability Management in Uncharted New Normal-Strategy & Optimization</i>	Jakarta, 26 Oktober 2021	Bankers Association for Risk Management
Tedi Nurhikmat	Anggota	<i>Asset Liability Management in Uncharted New Normal-Strategy & Optimization</i>	Jakarta, 26 Oktober 2021	Bankers Association for Risk Management
Eko B Supriyanto	Anggota	Pendidikan <i>Executive Coaching Bank Management for Board of Commissioners</i>	Jakarta, 22-23 Mei 2021	LPPI
		<i>Webinar Digital Risk Leadership: Orchestrating Business & Boardroom in Mitigating Risk</i>	Jakarta, 22-23 Mei 2021	LPPI
Iman Sundoro	Anggota	<i>How To Grow & Diversity Portfolio in a Post Pandemic World?</i>	5 November 2021 via Zoom	CWMA
		Evaluasi Manajemen Risiko dan Dasar Teknis Aktuaria pada Perusahaan Asuransi	25 September 2021 via zoom	Itikad Academy
		Pelatihan Seri-9 Komisaris Profesional "Menjadi Komisaris Yang Kompeten dan Bertanggung Jawab	12-13 Agustus 2021 via zoom	Intipesan
		Webinar Kupas Tuntas Asuransi "Keseimbangan Bisnis, Perlindungan Konsumen dan Kepentingan Stakeholder	24 Juni 2021 via zoom	LPPI
		Penguatan Peran Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program APU-PPT	09 Februari 2021 via zoom	OJK
Abdul Ghoni	Anggota	<i>Webinar Workshop Pra-Ijtima' Sanawi</i> DPS Tahun 2021	4 dan 7 Oktober 2021	DSN - MUI
		<i>Webinar Ijtima' Sanawi</i> (Annual Meeting) DPS Tahun 2021	2-3 Desember 2021	DSN – MUI
		Webinar Kesiapan <i>Spin off</i> Asuransi Syariah Menyongsong <i>Spin Off</i> Asuransi Syariah	29 September 2021	AASI
		Sosialisasi dan Literasi Manajemen Resiko	8 Desember 2021	AASI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Premita Fifi Widhiawati	Anggota	Webinar Series "Integrating Risk Management And Compliance"	Jakarta, 23 Februari 2021	LSPMR – GRC Management
		GRC Webinar Series "Managing Market Risk In Insurance Industry"	Jakarta, 29 Juni 2021	LSPMR – GRC Management
		Master Class Series XIX "Continuous Professional Education"	Jakarta, 15 – 16 Juli 2021	LSPMR - BNSP
		Pelatihan Seri 9 "Komisaris Profesional menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab	Jakarta, 11 – 12 Agustus 2021	Inti Pesan
		"Developing Risk Management"	Jakarta, 29 – 30 Sept 2021	LSPMR – GRC Management
		Master Class Series XXI "Competitive Strategy In A Changing Business Environment"	Jakarta, 2 – 3 Desember 2021	LSPMR - BNSP
Mohammad Hidayat	Anggota	Pra Ijtima dan Ijtima Sanawi DSN MUI bidang Pasar Modal	Jakarta, tahun 2021	DSN MUI
		Uji Kompetensi Ahli Syariah Pasar Modal	Jakarta, tahun 2021	LSP MUI
		Annual Meeting BI Tahun 2021	Jakarta, tahun 2021	BI
		Governance Risk and Compliance	Jakarta, tahun 2021	BSI
		Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah	Jakarta, tahun 2021	DSN MUI
		Workshop Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021 Bidang Pasar Modal	Jakarta, tahun 2021	DSN MUI
		Pembahasan dan Pengesahan Fatwa pada Rapat Pleno DSN MUI ke 54	Jakarta, tahun 2021	DSN MUI
		Knowledge Sharing Forum: Peran Leader dalam Menguatkan Budaya Anti Gratifikasi	Jakarta, tahun 2021	KPK dan Bank Syariah Indonesia University: PT Bank Syariah Indonesia Tbk
		Workshop Manajemen Risiko Sosialisasi POJK No. 44 Tahun 2020 Bagi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	Jakarta, tahun 2021	Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
		For Attending and Digital Risk Management in Insurance 2021, Waves of Change: Entering New Dynamics Of Life Insurance	Jakarta, tahun 2021	Asosisasi Asuransi Jiwa Indonesia
Sumihar Manullang	Anggota	Sharing Session: Penguatan Peran Dewan Komisaris, Direksi dan Compliance Officer Anggota Bursa dalam Penerapan Program APU PPT	5 Maret 2021 – Virtual - Jakarta	Bursa Efek Indonesia
		Program Pendidikan Berkelanjutan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek	23 April 2021 – Virtual - Jakarta	APEI
		Peran CFO, Optimalisasi Sumber Daya Finansial untuk Kinerja Berprinsip	4 November 2021 - Virtual - Jakarta	LPPI
		Peran CRO (Chief Risk Officer), Membangun Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Menuju Kinerja Berprinsip	25 November 2021 – Virtual - Jakarta	LPPI
Sumantri Suwarno	Anggota	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris	23 Juli 2020, Online	SPPI
		Multifinance Road To Recovery	1 Oktober 2020	APPI
		Strategi Multifinance Bertahan di Tengah Resesi Ekonomi Indonesia	1 Desember 2020	APPI
		Seminar Online Mengembangkan SDM dan Digitalisasi di Era Pandemi	23 November 2021, Online	APPI

Penghasilan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Remunerasi bagi anggota komite yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris merupakan satu kesatuan dengan honorarium yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan tidak terdapat honorarium khusus bagi setiap anggota Komite.

Honorarium anggota Komite dari Pihak independen (Non Komisaris), besarnya honorarium ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 20% dari Gaji Direktur Utama dan tidak diberikan penghasilan lain selain honorarium tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri BUMN Nomor PER-12.MBU/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Organ pendukung Dewan Komisaris.

Pencapaian Key Performance Indicator Komite Tata Kelola Terintegrasi

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
1.	<i>Learning & Growth Perspective</i>	Organisasi Komite	Komposisi anggota komite sesuai ketentuan	Komposisi Anggota KTKT sesuai dengan POJK Peraturan KBUMN dan Regulator	Perubahan Anggota KTKT melalui SK Dewan Komisaris: 1. Nokep: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 2. Nokep: 05-KOM/BRI/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. Nokep: 06-KOM/BRI/09/2021 tanggal 06 September 2021 4. Nokep: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021	10	10
		Kompetensi Anggota Komite	Anggota Komite memiliki kompetensi sesuai ketentuan	Anggota KTKT telah lulus <i>Fit & Proper test</i> OJK dan/atau mengikuti pendidikan selama Tahun 2021	Anggota KTKT dari Dewan Komisaris dan Pihak Independen memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan KTKT.	5	5
			Masa jabatan anggota komite sesuai ketentuan	SK Anggota Komite di <i>Update</i> sesuai ketentuan dan Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan POJK dan KBUMN	SK Dewan Komisaris BRI Nokep: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi BRI, masa jabatan ketua dan Anggota KTKT sesuai ketentuan.	5	5
		Pelaksanaan tugas	Pelaksanaan tugas lain sesuai arahan Dewan Komisaris	Tugas dilaksanakan sesuai ketentuan	Seluruh tugas dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan.	5	5
2.	<i>Internal Process Perspective</i>	Perencanaan	Pengesahan Rencana Kerja Komite tepat waktu	RKA KTKT pada Tahun 2022 dibuat dan disahkan pada tahun 2021	RKAP KTKT pada Tahun 2022 dibuat dan sahkan pada tanggal 27 Desember 2021	5	5
		Pelaksanaan	Rapat Komite dilaksanakan sesuai ketentuan dan rencana yang disusun	Minimal 2 kali	Selama Tahun 2021 dilaksanakan 15 kali Rapat KTKT.	10	10
			Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	Satu kali	Selama tahun 2021 KTKT melakukan <i>review</i> Laporan Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tanggal 28 Juli 2021	5	5
			Evaluasi rencana aksi korporasi (antara lain: minimal 14 hari kerja melakukan <i>review</i> Evaluasi tambahan modal anak perusahaan, akuisisi perusahaan lain, divestasi anak, perusahaan, dan rencana strategis BRI lainnya)	Kajian disampaikan sejak surat diterima	Selama tahun 2021 rencana aksi korporasi sebanyak 1 kali	10	10
Pengawasan	Reviu penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi	Setiap semester	Selama tahun 2021 KTKT melakukan <i>review</i> Laporan Tahunan penilaian kecukupan pengendalian intern terintegrasi dan fungsi kepatuhan terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2021.	10	10		

No	Perpektif Penilaian	Aspek Penilaian	Indikator	Target	Output/Pencapaian Target	Bobot	Nilai
			Reviu kebijakan umum Manajemen risiko (KUMR) terintegrasi	Sekali	Reviu kebijakan KUMR terintegrasi dilakukan bersamaan dengan review kebijakan KUMR BRI tanggal 07 Desember 2021	5	5
			Evaluasi penerapan tata kelola terintegrasi	Setiap semester	Selama tahun 2021 KTKT melakukan Evaluasi penerapan tata kelola terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Output Dokumen terkait dapat dilihat dalam realisasi RKA KTKT tahun 2021	5	5
			Evaluasi keterkaitan kepemilikan dan/ atau pengendalian dengan LJK lain untuk meyakini bentuk Konglomerasi Keuangan Perseroan	Minimal sekali dalam setahun	Selama tahun 2021 KTKT melakukan Evaluasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain untuk meyakini bentuk Konglomerasi Keuangan Perseroan sesuai ketentuan berlaku.	5	5
			Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik	Setiap semester	Selama tahun 2021 KTKT melakukan Evaluasi penerapan manajemen risiko terintegrasi secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.	10	10
3.	<i>Compliance Perspective</i>	Pelaksanaan Fungsi pengawasan terhadap Pengelolaan Manajemen Risiko	Evaluasi profil risiko terintegrasi secara periodik sesuai ketentuan	setiap semester	Selama tahun 2021 KTKT melakukan Evaluasi profil risiko terintegrasi secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku	5	5
			<i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi sesuai ketentuan	setiap semester	Selama tahun 2021 KTKT melakukan <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi SM II 2020 dan SM 1 2021 dengan hasil penilaian dengan peringkat 2 (Baik).	5	5
Total						100	100

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2021

No	Ruang Lingkup	Aktivitas	Pelaksanaan	Agenda
1.	Evaluasi Kinerja LJK Anak (Agro, BRIF, BRINS, BRILife, DS & BRI Ventures)	<ol style="list-style-type: none"> Mengevaluasi kinerja finansial dan non finansial Perusahaan Anak Mengevaluasi strategi bisnis berdasarkan pencapaian kinerja berdasarkan sektor usaha (<i>main business</i>) dan <i>issue</i> strategis pada Entitas Anak 	<p>24 Agustus 2021</p> <p>24 Agustus 2021</p> <p>31 Agustus 2021</p> <p>31 Agustus 2021</p> <p>31 Agustus 2021</p> <p>21 September 2021</p> <p>19 Oktober 2021</p> <p>03 Agustus 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> BRI Danareksa Sekuritas <ol style="list-style-type: none"> <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak BRI Agro <ol style="list-style-type: none"> <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak BRI Ventura Investama <ol style="list-style-type: none"> <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak BRI Life <ol style="list-style-type: none"> <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak BRI Finance <ol style="list-style-type: none"> <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak BRI Insurance <ol style="list-style-type: none"> <i>Update</i> Kondisi Bisnis Semester I/2021, Rencana Strategi Kedepan dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terkini Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan Anak Strategi Pengembangan Bisnis BRI dan Perusahaan Anak (PNM dan Pegadaian) <i>Update</i> Kondisi IT Security dan Tata Kelola IT pada BRI Life
2.	Evaluasi Kecukupan Permodalan, Manajemen Likuiditas, dan Manajemen Risiko Penyediaan Dana	Mengevaluasi rasio-rasio permodalan dan mengkaitkan dengan tingkat risiko bank	21 April 2021	Evaluasi Kecukupan Permodalan, Manajemen Likuiditas, Transaksi Intra Group dan Manajemen Risiko Penyediaan Dana

No	Ruang Lingkup	Aktivitas	Pelaksanaan	Agenda
3.	Pembahasan Metodologi dan Parameter Penilaian Pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi beserta Kerangka Acuan Kerja untuk Konsultan	Mengevaluasi usulan Direksi dalam menyampaikan <i>framework</i> dan metodologi pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi agar sesuai dengan <i>best practice</i>	22 Februari 2021 05 Mei 2021 20 Agustus 2021 07 September 2021 16 November 2021 23 November 2021	1. Pembahasan Metodologi dan Parameter Penilaian Pengelolaan Tata Kelola Terintegrasi 2. Pembahasan Jasa Konsultan Tata Kelola Terintegrasi 3. Pembahasan <i>Concern</i> Dewan Komisaris dalam Rangka <i>Kick Off Meeting</i> TKT 4. <i>Kick off Meeting</i> Penguatan Implementasi Tata Kelola Terintegrasi BRI 5. Pembahasan jawaban atas pertanyaan PWC terkait <i>project</i> penguatan TKT 6. Wawancara dengan PwC sebagai Konsultan TKT
4.	Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Tata Kelola Terintegrasi	Mengevaluasi kecukupan pengendalian Intern terintegrasi, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, dan penilaian <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menguji efektivitasnya	09 Maret 2021 19 Agustus 2021	1. Profil Risiko dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Anak BRI Semester II 2020, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester II 2020, Audit Terintegrasi Semester II 2020 2. Profil Risiko dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Anak BRI Semester I 2021, Fungsi Kepatuhan Terintegrasi Semester I 2021, Audit Terintegrasi Semester I 2021
		Penilaian <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi dilakukan setiap Semester	1. 15 Maret 2021 2. 28 Juli 2021	1. <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi Semester II 2020 2. <i>Self Assessment</i> Tata Kelola Terintegrasi Semester I 2021
5.	Perubahan dan penetapan anggota KTKT konglomerasi keuangan BRI	<i>Review</i> terhadap usulan anggota KTKT dari LJK dilakukan 4 kali selama tahun 2021	Perubahan Anggota KTKT melalui SK Dewan Komisaris pada tanggal: 1. 06 Juli 2021 2. 30 Juli 2021 3. 06 September 2021 4. 28 Desember 2021	Perubahan Anggota KTKT melalui SK Dewan Komisaris: 1. Nokep: 04-KOM/BRI/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 2. Nokep: 05-KOM/BRI/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 3. Nokep: 06-KOM/BRI/09/2021 tanggal 06 September 2021 4. Nokep: 10-KOM/BRI/12/2021 tanggal 28 Desember 2021

Tata Cara Penggantian Komite di Bawah Dewan Komisaris

Penunjukan dan penggantian anggota Komite ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris, khusus untuk anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen, berlaku ketentuan:

1. Dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui mekanisme perekrutan dan seleksi.
2. Masa kerja ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisaris jangka waktu kontrak dan peraturan pekerja kontrak yang berlaku di Perseroan, dengan tidak menutup kemungkinan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sebelum jangka waktu kontrak berakhir.

Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan pasar modal, khususnya dalam hal terkait keterbukaan Informasi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui pelaporan kepada instansi pemerintahan dan pengumuman dalam *website* serta media cetak (apabila diwajibkan), organisasi pelaksanaan RUPS. Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak eksternal seperti regulator pasar modal, pemegang saham, media serta pemangku kepentingan lainnya.

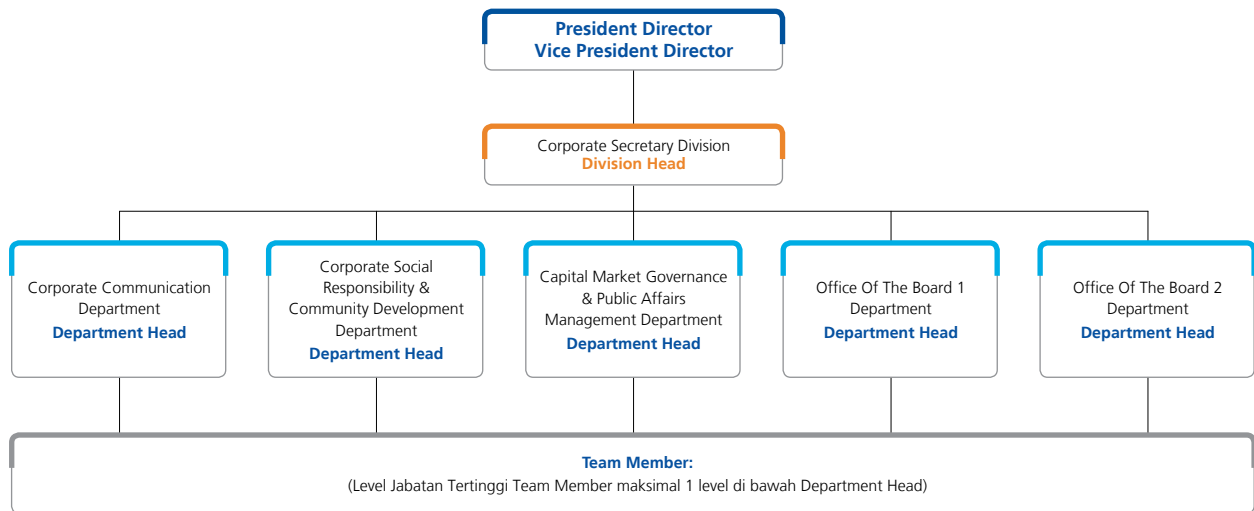
Dasar Pengangkatan Sekretaris Perusahaan

Pembentukan Sekretaris Perusahaan didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-09/MBU/2012, Bagian Kesembilan mengenai Sekretaris Perusahaan.

Struktur Sekretaris Perusahaan



Function:

- | | | | | |
|---|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Corporate Communication & Media Relation • Eksternal Corporate Event & Sponsorship • Museum | <ul style="list-style-type: none"> • Planning, Strategy & Administration • Program & Activation | <ul style="list-style-type: none"> • Capital Market Governance • Public Affairs Management • Strategic & Project Portfolio | <ul style="list-style-type: none"> • BOC General Affair • Internal BOC Activity • Executive Assistant | <ul style="list-style-type: none"> • BOD General Affair • Internal Corporate Event • Executive Assistant |
|---|---|---|--|---|

Sekretaris Perusahaan memimpin unit kerja Corporate Secretary Division dalam melaksanakan fungsinya dengan jabatan setingkat Executive Vice President. Corporate Secretary Division berada di bawah binaan Wakil Direktur Utama dan Direktur Utama. Organisasi Corporate Secretary Division membawahkan:

1. Corporate Communication Department yang mengelola fungsi:
 - a. Corporate Communication & Media Relation.
 - b. Eksternal Corporate Event & Sponsorship.
 - c. Museum Perusahaan.
2. Corporate Social Responsibility & Community Development Department yang mengelola fungsi:
 - a. Planning, Strategy & Administration.
 - b. Program & Activation.
3. Capital Market Governance & Public Affairs Management Department yang mengelola fungsi:
 - a. Capital Market Governance.
 - b. Public Affairs Management.
 - c. Strategic & Project Portofolio.
4. Office of the Board 1 Department yang mengelola fungsi:
 - a. Board General Affair (Dewan Komisaris).
 - b. Internal BOC Activity.
 - c. Executive Assistant.
5. Office of the Board 2 Department yang mengelola fungsi:
 - a. Board General Affair (Direksi dan SEVP).
 - b. Internal Corporate Event.
 - c. Executive Assistant.

Alur Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

1. *Pool of Candidate* calon Corporate Secretary melalui Talent Committee (Komite Human Capital).
2. Pengusulan Calon Corporate Secretary oleh Direksi.
3. Pembahasan Calon EVP Corporate Secretary Division.
4. Pembahasan usulan EVP Corporate Secretary Division.
5. Persetujuan oleh Dewan Komisaris.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi, antara lain:

Tugas dan Tanggung Jawab Umum

1. Sekretaris Perusahaan paling kurang:
 - a. Memastikan Perusahaan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keterbukaan informasi dan penerapan GCG.
 - b. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - c. Memberikan pelayanan kepada *stakeholders* atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan.
 - d. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 - e. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
 - f. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan GCG Perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan.
 - Penyampaian laporan kepada regulator tepat waktu.
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris (dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris).
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
 - g. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) atau *contact person* antara Perusahaan dengan *stakeholders*.
 - h. Menatausahakan dan menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, serta RUPS.
 - i. Melakukan kegiatan komunikasi Perusahaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan *corporate image* Perusahaan, termasuk melaksanakan program *event* eksternal, pemberian *sponsorship* Perusahaan dan pengelolaan museum Perusahaan.

- j. Mengelola fungsi penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan, serta publikasi Laporan Keuangan dan informasi/laporan penting lainnya di media cetak, media elektronik dan Situs Web Perusahaan kepada pihak terkait/regulator sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Menyelenggarakan RUPS dan *public expose*.
 - l. Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang diperlukan dalam rangka *corporate action*.
2. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Komunikasi

1. Mengelola fungsi penyusunan kebijakan, implementasi dan evaluasi strategi komunikasi/publikasi Perusahaan.
2. Mengelola *brand image* dan *brand positioning* Bersama dengan unit kerja yang mengelola *marketing communication*.
3. Membina hubungan baik dengan media cetak maupun media elektronik, lembaga/instansi/institusi, dan pihak eksternal lainnya.
4. Mengelola fungsi penyediaan materi komunikasi terkait Perusahaan.
5. Mengelola fungsi penyusunan dan analisis konsep jawaban/tanggapan/naskah, termasuk dalam memberikan tanggapan/*press conference* yang berkaitan dengan isu Perusahaan yang muncul di media massa berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
6. Mengelola Situs Web dan media sosial Perusahaan bersama dengan unit kerja yang membidangi fungsi layanan dan unit kerja yang membidangi fungsi *marketing communication*.
7. Mengelola Museum BRI Purwokerto.

CSR dan Community Development

1. Mengelola kegiatan pemetaan sasaran komunitas penerima program CSR & *Community Development*.
2. Mengelola kegiatan pelaksanaan program CSR & *Community Development*.

Capital Market Governance dan Public Affairs Management

1. Mengarahkan kepatuhan yang terkait dengan ketentuan regulator, pasar modal dan lain-lain.
2. Mengelola aktivitas kesekretariatan, administrasi dan dokumentasi Perusahaan.
3. Pengelolaan *stakeholder management*.
4. Mengelola administrasi dan dokumentasi Direksi.

Protokol dan Pelayanan Intern Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP

1. Mengelola kegiatan-kegiatan untuk mendukung fungsi dan kegiatan Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
2. Mengelola fungsi komunikasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dengan pihak internal dan eksternal Perusahaan.
3. Mengelola fungsi pelaksanaan pemberian hak dan fasilitas Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.

4. Mengelola fungsi penyusunan dan analisis materi pidato, makalah, dengar pendapat, presentasi, wawancara dan materi pendukung lainnya untuk Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
5. Mengelola fungsi penatakerjaan agenda Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.
6. Mengelola pelaksanaan dan evaluasi protokoler dan sekretaris Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP.

Rapat

1. Memastikan Direksi mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Memastikan Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
3. Memastikan Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan Rapat Direksi – Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Memastikan Rapat dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Rapat dan ketentuan lainnya.
5. Menjadi penghubung bagi Dewan Komisaris, Direksi dan SEVP dalam berkoordinasi perihal agenda Rapat rutin maupun insidental.
6. Memastikan bahwa agenda Rapat membutuhkan pengambilan keputusan atau hal-hal yang berdampak besar bagi kesejahteraan Perusahaan.
7. Apabila diperlukan, mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa setiap Rapat pembahasan akan difokuskan terutama pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
8. Apabila diperlukan, mengingatkan Dewan Komisaris dan Direksi bahwa tingkat kewenangan untuk hal-hal yang didelegasikan benar dan dipatuhi.
9. Memastikan bahwa Risalah Rapat ditatakerjakan sesuai dengan ketentuan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Memastikan Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir atau menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
2. Memastikan rangkaian penyelenggaraan dan administrasi RUPS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan penunjukan Pemimpin RUPS sebelum penyelenggaraan RUPS.
4. Memastikan bahwa kegiatan RUPS telah meliputi pengambilan keputusan untuk setiap pokok pembahasan (mata acara).
5. Berkoordinasi dengan pihak independen terkait (Notaris dan Biro Administrasi Efek) untuk kelancaran pelaksanaan RUPS.
6. Berkoordinasi dengan divisi terkait perihal rumusan dan skenario dalam mata acara RUPS.
7. Memastikan pengumuman dan pemanggilan RUPS telah dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya.

Pendalaman Pengetahuan

1. Memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi menerima program pengenalan (orientasi) yang memadai pada kesempatan pertama dan selanjutnya

berdasarkan kebutuhan. Sasaran program ini bertujuan untuk memberikan wawasan secara ringkas kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengenai Perusahaan agar para anggota baru dapat sesegera mungkin memberikan kontribusi kepada Perusahaan. Khusus bagi anggota Dewan Komisaris baru, program pengenalan ditentukan oleh Komisaris Utama dan/atau ditentukan oleh kebutuhan anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, untuk anggota Direksi baru, program pengenalan ditentukan oleh Direktur Utama dan/atau ditentukan oleh kebutuhan anggota Direksi. Apabila terdapat kondisi Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama adalah anggota baru, maka penentuan program orientasi ditentukan oleh Wakil Komisaris Utama atau Wakil Direktur Utama atau 2 (dua) Komisaris atau 2 (dua) Direktur sesuai ketentuan Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Informasi atau pengetahuan dasar yang perlu diketahui oleh setiap anggota Sekretaris Perusahaan paling kurang:
 - a. Informasi atau pengetahuan intern, antara lain:
 - Anggaran Dasar.
 - Tugas, tanggung jawab dan kewenangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 - Visi, Misi dan tujuan Perusahaan.
 - Rencana strategis Perusahaan.
 - Kinerja keuangan Perusahaan.
 - Segmentasi usaha, produk dan jasa Perusahaan.
 - Manajemen risiko bank, profil risiko, penilaian dan pemantauan risiko.
 - Struktur Organisasi Perusahaan.
 - Fungsi Satuan Kerja Audit Intern dan Ekstern.
 - Informasi relevan lainnya yang dapat membantu tugas dan kinerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
 - b. Informasi atau pengetahuan ekstern, antara lain:
 - Perkembangan ekstern yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi, dsb.
 - Posisi Perusahaan diantara pesaing, nasabah dan *stakeholders* lainnya.
 - Peran dan hubungan dengan pihak yang berwenang di pemerintahan di bidang moneter, serta badan berwenang lainnya.
 - Peraturan perundang-undangan yang relevan.
 - Informasi ekstern lainnya yang relevan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - c. Dokumen yang perlu disiapkan atau dibagikan selama masa pengenalan/orientasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang baru diangkat, antara lain:
 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya.
 - Laporan Tahunan terbaru.
 - Kontrak Manajemen dan rencana Perusahaan terakhir.
 - Struktur Organisasi Perusahaan.
 - Dokumen lainnya, sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Membahas kebutuhan pengembangan diri yang berkelanjutan dengan Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan dan membuat perencanaan untuk program pelatihan bersama dengan unit kerja terkait.
4. Mengumpulkan informasi mengenai pelatihan, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan informasi dan kerjasama dengan divisi terkait.
5. Menentukan/merekomendasikan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi atau berdasarkan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Program orientasi/pengenalan perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Pelaksanaan pendidikan/pelatihan mengikuti ketentuan pendidikan yang berlaku di BRI Corporate University.

Daftar Pemegang Saham dan Kepemilikan

1. Sekretaris Perusahaan membantu Direksi untuk mengelola Daftar Pemegang Saham dan Daftar Kepemilikan Khusus Saham (Seri A Dwiwarna).
2. Sekretaris Perusahaan membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung, pada perusahaan terbuka $\geq 5\%$ dari modal disetor perusahaan.
3. Sekretaris Perusahaan membantu Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaporkan kepemilikan sahamnya kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila atas kepemilikannya pada perusahaan terbuka terdapat perubahan $\geq 0,5\%$ (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam perusahaan, baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.
4. Laporan sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka tersebut.

Koordinasi Persiapan Laporan Tahunan

1. Laporan Tahunan diantaranya paling sedikit meliputi Ikhtisar Data Keuangan, Laporan Dewan Komisaris dan Direksi, Profil Perusahaan, Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan, GCG, Informasi Keuangan dan informasi lainnya yang dianggap relevan sesuai dengan perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice* terkini.
2. Laporan Tahunan paling lambat diselesaikan maksimal bulan ke-4 (keempat) setelah akhir tahun buku berjalan dan selambat-lambatnya diterima oleh pemegang saham sebelum RUPS.

3. Persetujuan Laporan Tahunan dilaksanakan pada RUPS dan harus ada dalam salah satu mata acara RUPS.
4. Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan (*Annual Report*).

Pasar Modal

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya mengenai peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Memberikan masukan kepada Direksi untuk memenuhi ketentuan terkait dengan pasar modal dan peraturan terkait lainnya.
3. Sebagai pihak yang dapat dihubungi mewakili Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Lainnya

1. Mengelola implementasi manajemen risiko di Corporate Secretary Division.
2. Menyusun Rencana Kerja Fungsional (RKF) dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) di Corporate Secretary Division.
3. Mengelola Human Capital, memenuhi kebutuhan Pekerja, meningkatkan kompetensi dan mendorong kinerja agar pengelolaan Human Capital berjalan sesuai kebijakan yang berlaku di Corporate Secretary Division.
4. Menyediakan dokumen/data/informasi terkait pelaksanaan audit dan realisasi tindak lanjut audit di Corporate Secretary Division.
5. Membuat laporan-laporan di tingkat Divisi/Department agar sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan unit kerja lain atau instansi terkait.
6. Mengelola logistik dan kesekretariatan di tingkat Divisi/Department, termasuk penggunaan biaya-biaya terkait logistik dan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Mengelola pengembangan platform/sistem aplikasi berkoordinasi dengan divisi terkait.
8. Melakukan penyempurnaan kebijakan/ketentuan terkait output (hasil kerja) Corporate Secretary Division dan unit kerja lain (termasuk antara lain: *Service Level Agreement/SLA*, Buku Prosedur Operasional/BPO, dll).
9. Melakukan koordinasi dan kerja sama di tingkat Divisi/Department, serta membina hubungan baik dengan unit kerja lain, lembaga atau instansi atau instansi atau pihak ketiga, termasuk antara lain pengadaan dan pelaksanaan Perjajian Kerjasama (PKS) yang terkait bidang tugas Corporate Secretary Division.

Profil Sekretaris Perusahaan



Aestika Oryza Gunarto

Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia, lahir di Kendal, 5 Oktober 1970. Usia 51 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Perusahaan, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (1994)
- Magister Manajemen Pemasaran, Universitas Padjajaran Bandung (2005)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan BRI sejak 2 September 2020 berdasarkan Keputusan Direksi No. Nokep: 140.e-DIR/KHC/07/2019 22 Juli 2020 serta Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. SR.20-KOM/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Persetujuan Penggantian Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia.



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3



PENGALAMAN KERJA

Beliau memulai karir BRI sejak tahun 1991 dengan berbagai posisi antara lain:

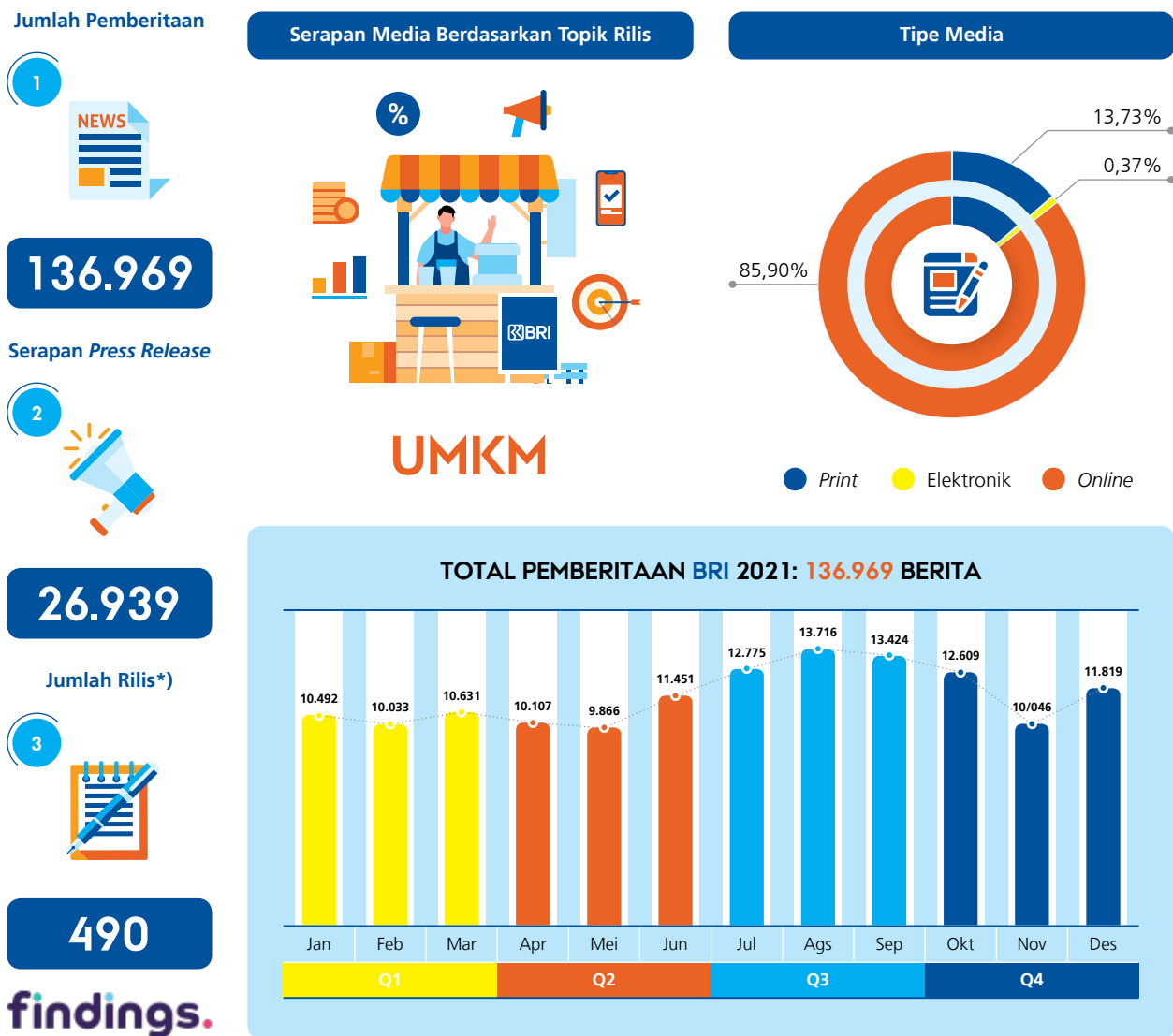
- Pemimpin Cabang, Kantor Cabang Jakarta Jatinegara, Jakarta Jatinegara, Kantor Wilayah Jakarta 1 (01-06-2014 sampai 30-11-2015)
- Pj. Kepala Biro Direksi, Biro Direksi Kantor Pusat, Kantor Pusat (01-12-2015 sampai 30-11-2016)
- Wakil Kepala Divisi, Bidang Kesekretariatan dan Protokoler Kantor Pusat, Kantor Pusat (01-12-2016 sampai 31-12-2017)
- Wakil Kepala Divisi, Bidang Kesekretariatan dan Protokoler Kantor Pusat, Kantor Pusat (01-01-2018 sampai 30-04-2019)
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kantor Wilayah Makassar, Kantor Wilayah Makassar (01-05-2019 sampai 31-10-2019)
- Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kantor Wilayah Semarang, Kantor Wilayah Semarang (01-11-2019 sampai 31-05-2020) Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Bisnis, Bidang Bisnis Kecil Kantor Wilayah Semarang, Kantor Wilayah Semarang (01-06-2020 sampai 05-08-2020)
- Pj. Executive Vice President, Corporate Secretary Division Kantor Pusat, Kantor Pusat (06-08-2020 sampai 05-11-2020)
- Executive Vice President, Corporate Secretary Division Kantor Pusat, Kantor Pusat (06-11-2020 sampai Sekarang)

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
High Potentials Leadership Program - In Class	17/10/2021 - 22/10/2021; Amerika Serikat	Harvard Business School Campus

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2021
 Hubungan dengan Media Massa

Performa Pemberitaan



Pelaksanaan komunikasi korporat dilakukan dengan melibatkan berbagai media sebagai *strategic partner* yang meliputi media cetak, elektronik, maupun *online*. Komunikasi dilakukan melalui penerbitan *press release* yang selama tahun 2021 telah mencapai sejumlah 490 siaran pers oleh perusahaan, dengan total serapan oleh media sebanyak 26.939 artikel atau sebesar 11 persen dari total keseluruhan pemberitaan mengenai BRI.

UMKM adalah topik tertinggi dari *press release* yang diserap oleh media.

BRI memandang bahwa usaha mikro memiliki peranan kunci dalam membangun perekonomian nasional dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Untuk itu, narasi dalam rilis BRI lebih menekankan pada 3 (tiga) angle utama UMKM, yakni:

1. Penguatan UMKM melalui penyaluran kredit yang lebih kompetitif dan pemberdayaan ekosistem bisnis klaster
2. Mendorong pemberdayaan ekonomi serta proses inklusi keuangan bagi UMKM agar dapat naik kelas dan bagi seluruh masyarakat Indonesia
3. Kisah-kisah inspiratif keberhasilan UMKM naik kelas yang didampingi BRI, untuk meningkatkan semangat optimisme pemulihan ekonomi nasional

Selain itu, publikasi mengenai kegiatan CSR BRI menjadi topik tertinggi kedua dalam ekspos pemberitaan sepanjang 2021. Tanggapan bencana dalam bentuk bantuan sarana/prasarana percepatan evakuasi dan bantuan pengungsi dari BRI Peduli merupakan angle yang paling banyak diberitakan. Keterlibatan BRI Peduli dalam kegiatan percepatan vaksinasi nasional guna mewujudkan *herd immunity* juga banyak mewarnai pemberitaan CSR 2021.

Aksi korporasi terbesar di tahun 2021, yakni Holding Ultra Mikro (UMi), yang mengintegrasikan ekosistem usaha milik BRI, Pegadaian dan PNM, menjadi topik terbesar ketiga dalam pemberitaan

mengenai BRI. Aksi korporasi ini dinilai bukan sekadar aksi korporasi biasa, tetapi juga diproyeksikan bakal memberi banyak manfaat untuk masyarakat pelaku usaha, karena berfokus pada pemberdayaan usaha mikro dan mendorong sumber pertumbuhan baru bagi masing-masing entitas melalui holding.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan BRI Liga I, komunikasi mengenai BRI Liga I di media berkontribusi positif terhadap citra BRI dalam mendorong bangkitnya UMKM melalui sepak bola, dengan total 21.830 artikel pemberitaan di platform media print, online, dan elektronik.

Dengan komunikasi yang baik dan terukur, sepanjang 2021 BRI berhasil mempertahankan performa positif di media sebesar 98,09 persen. Selain itu Corporate Secretary juga melakukan pemantauan rutin terhadap aktivitas di media sosial untuk menjaga sekaligus meningkatkan citra positif BRI. Citra positif BRI dibangun melalui konten-konten positif mengenai kinerja BRI, kegiatan korporat, dan edukasi perbankan. Sehingga di triwulan 4 citra positif BRI di media sosial mencapai 95,8 persen.

Corporate Secretary juga bertindak sebagai *spokeperson* untuk menjawab berbagai pertanyaan dari wartawan, mendampingi jajaran Direksi BRI dalam kegiatan wawancara bersama media, menyelenggarakan kegiatan *press conference* untuk meningkatkan citra perusahaan, serta melakukan *monitoring* hingga klarifikasi terhadap pemberitaan negatif atau isu-isu yang dapat menurunkan reputasi Bank BRI.

Kegiatan dengan Media Massa Tahun 2021

Selama tahun 2021, BRI melaksanakan kegiatan dengan Media Massa diantaranya:

No	Tanggal	Kegiatan/Acara
1	6 Januari 2021	Media & Pemred <i>Gathering</i>
2	21 Januari 2021	<i>Press Conference</i> RULB BRI
3	29 Januari 2021	Media & Pemred <i>Gathering</i>
4	25 Maret 2021	<i>Press Conference</i> RUPST BRI
5	25 Mei 2021	<i>Press Conference</i> Kinerja BRI Triwulan I 2021
6	22 Juli 2021	<i>Press Conference</i> RULB BRI
7	5 Agustus 2021	Media & Pemred <i>Gathering</i>
8	06 Agustus 2021	<i>Press Conference</i> Kinerja BRI Triwulan II 2021
9	02 September 2021	Media & Pemred <i>Gathering</i>
10	07 Oktober 2021	<i>Press Conference</i> RULB BRI
11	27 Oktober 2021	<i>Press Conference</i> Kinerja BRI Triwulan III 2021

Penyelenggaraan RUPS

Selama tahun 2021, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 4 (empat) kali sebagaimana dilaporkan pada sub bab RUPS pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Transparansi Penyampaian Laporan dan Keterbukaan Informasi

Sela tahun 2021, Corporate Secretary telah melakukan laporan keterbukaan informasi, laporan rutin, laporan insidental dan/atau permintaan data oleh regulator. Rincian pelaporan telah disampaikan pada Sub Bab Transparansi Penyampaian Laporan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Satuan Kerja Audit Intern

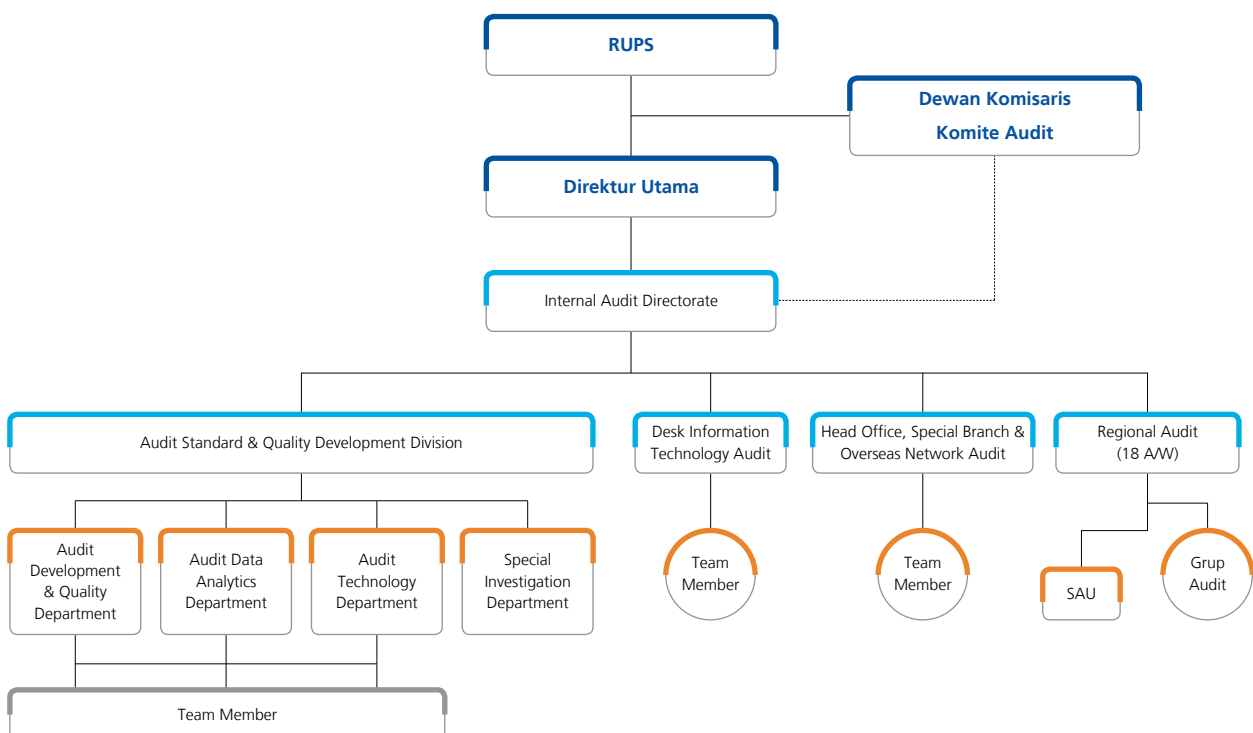
Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.35/ SEOJK03/2017 Tanggal 7 Juli 2017 Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 Tanggal 1 September 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
7. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP Tanggal 09 Desember 2011 Perihal Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.56/POJK/04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
9. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Nokep. 376-DIR/CDS/05/2018 Tanggal 18 Mei 2018 tentang Organisasi, Penetapan Formasi Jabatan & Penetapan Deskripsi Jabatan Satuan Kerja Audit Intern.

Sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance*, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung *strategic business objective* melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* yang efektif dan sesuai dengan arah serta strategi perusahaan. Pelaksanaan fungsi SKAI yang efektif dapat memberikan jaminan kepada perusahaan terkait kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko serta sistem tata kelola untuk melindungi organisasi dan reputasi perusahaan. Dalam rangka mendukung aspirasi perusahaan sebagai *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia dan Champion of Financial Inclusion* pada tahun 2025, maka SKAI menerapkan pendekatan audit yang lebih lincah (*agility*) agar dapat meningkatkan kinerja, kualitas, memenuhi ekspektasi *stakeholders*. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen, jumlah dan kompetensi Auditor yang memadai, pengembangan metodologi dan *tools* audit yang *agile*. SKAI juga senantiasa meningkatkan sinergi dengan fungsi *1st line* dan *2nd line* melalui koordinasi, kolaborasi dan komunikasi yang teratur dan efektif dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan yang baik

Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit Intern

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, SKAI didukung dengan struktur organisasi yang independen dan jumlah serta kompetensi Auditor yang memadai. SKAI BRI dipimpin oleh SEVP SKAI yang membawahi Audit Standard & Quality Development Division; Head Office, Special Branch & Overseas Network Audit; Desk Digital & Information Technology Audit dan 18 (delapan belas) Audit Intern Wilayah. Berikut adalah Struktur Organisasi SKAI.



SKAI secara struktural terdiri dari Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit dan unit kerja yang melaksanakan pengembangan Standar & Kualitas Audit sebagai berikut:

1. Unit Kerja yang melaksanakan kegiatan audit sebagai berikut:
 - a. Audit Intern Wilayah
Melaksanakan seluruh kegiatan audit dan pemberian jasa konsultasi sebagai *strategic business partner* dengan objek audit Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Layanan Prioritas, KCP, Kantor Kas dan BRI Unit di wilayah kerjanya. Saat ini BRI memiliki 18 (delapan Belas) Audit Intern Wilayah yang berdampingan dengan 18 (delapan belas) Kantor Wilayah BRI. Keberadaan Audit Intern Wilayah yang berdampingan dengan Kantor Wilayah merupakan salah satu strategi BRI agar peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* dan fungsi *assurance* dapat lebih efektif dan efisien mengingat struktur organisasi, kewenangan, tugas dan tanggung jawab pengelolaan bisnis dan aset BRI terdesentralisasi.
 - b. Head Office, Special Branch & Overseas Network Audit
Melaksanakan seluruh kegiatan audit (*assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting*) sebagai *strategic business partner* dengan objek audit Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang Khusus, Unit Kerja Luar Negeri, LJK Konglomerasi Keuangan BRI (Perusahaan Anak dan Perusahaan Terelasi), dan Perusahaan Anak diluar LJK Konglomerasi Keuangan BRI yang di miliki BRI lebih dari 50%. Head Office, Special Branch & Overseas Network Audit juga melaksanakan kaji ulang terhadap beberapa hal yang telah diatur oleh regulator diantaranya Strategi Anti *Fraud*, Penerapan Manajemen Risiko dan Manajemen Permodalan Terintegrasi.

- c. Desk Information Technology Audit
Melaksanakan kegiatan audit (*assurance*) dan pemberian jasa konsultasi (*consulting*) sebagai *strategic business partner* terhadap terhadap unit kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan dan penggunaan Teknologi Sistem Informasi (meliputi proses pengembangan dan operasional aplikasi *Core* dan *Non Core Banking*; operasional infrastruktur TSI pada Data Center, *Disaster Recovery Center* dan seluruh Unit Kerja; pengamanan informasi; aplikasi; infrastruktur TSI; strategi dan kebijakan pengembangan TSI; manajemen risiko TI; penunjang TSI (pengelolaan aset & logistik, pengadaan barang dan jasa IT yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat BRI) serta *End User Computing*.
 - d. Special Investigation Team
Melakukan investigasi atas indikasi *fraud* dan pengaduan *whistleblowing system* dengan kewenangan objek audit seluruh Unit Kerja BRI. Special Investigation Team berada di bawah Audit Standard & Quality Development Division dan bertanggung jawab langsung kepada Division Head Audit Standard & Quality Development Division.
2. Audit Standard & Quality Development Division melakukan penyusunan visi, misi dan strategi Internal Audit Directorate BRI, melaksanakan evaluasi kualitas audit oleh jajaran Internal Audit Directorate BRI, pihak independen *maupun internal quality assurance* terhadap Internal Audit Directorate perusahaan anak, melaksanakan pengkajian dan perancangan *software* maupun *hardware* untuk mendukung pelaksanaan audit, melakukan analisis dan penyusunan laporan hasil audit serta melakukan pengembangan dan pengelolaan *analytical tools* data audit. Berikut adalah posisi 18 (Delapan belas) Audit Intern Wilayah BRI yang tersebar di Seluruh Indonesia:



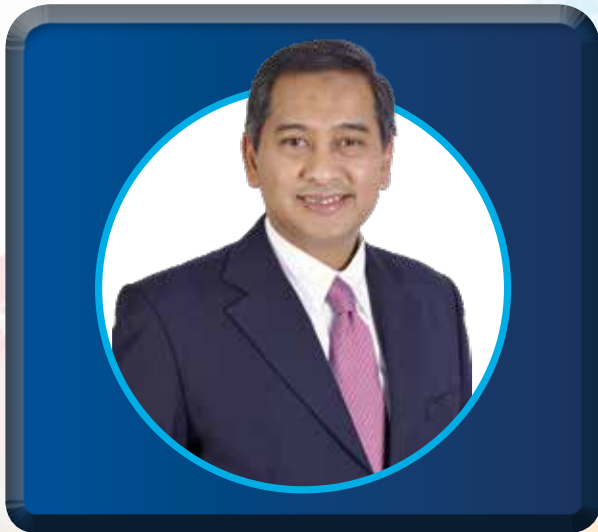
Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern Dalam Struktur Organisasi

Secara struktural, SKAI BRI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan audit dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif. Organisasi SKAI dipimpin oleh SEVP Satuan Kerja Audit Intern. Organisasi SKAI dipimpin oleh Senior Executive Vice President (SEVP)/Kepala Satuan Kerja Audit Intern.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern

SEVP Satuan Kerja Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan SEVP SKAI telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Intern



Hari Siaga Amijarso

SEVP Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, 9 Oktober 1965.
Usia 56 tahun Per Desember 2021.
Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

Sarjana Administrasi Niaga dari Universitas Brawijaya, Malang (1989)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai SEVP Satuan Kerja Audit Intern BRI sejak Juli 2019 berdasarkan Keputusan Direksi No. R. 231-DIR/KHC/04/2019 tanggal 10 April 2019 dan persetujuan Dewan Komisaris No. R.33-KOM/07/2019 tanggal 2 Juli 2019. Pengangkatan SEVP Satuan Kerja Audit Intern BRI yang baru tersebut telah dilaporkan kepada OJK dan dipublikasikan melalui situs web BRI dan Bursa Efek Indonesia.



SERTIFIKASI

- Qualified Internal Auditor (QIA)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
- Certified Forensic Auditor (CFrA)



PENGALAMAN KERJA

- Pemimpin Wilayah BRI Jakarta 1 (Juli 2018 – 1 Juli 2019)
- Pemimpin Wilayah BRI Yogyakarta (Januari 2018 – Juni 2018)
- Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan (2015-2017)
- Kepala Biro Direksi Divisi Sekretariat Perusahaan (Agustus 2012-Oktober 2015)
- Pemimpin Cabang BRI Gresik (2010-2012)

* Catatan: SEVP SKAI memasuki masa purnabakti TMT 31 Oktober 2021.

Internal Audit Charter

SKAI memiliki Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) sesuai Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 05-KOM/BR/05/2019 dan Nokep S.348-DIR/SAI/05/2019 tanggal 31 Mei 2019, dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan mengacu pada International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (ISPPA) dari The Institute of Internal Auditors (IIA).

Piagam Audit Intern BRI merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), inisiasi komunikasi SKAI dengan unit kerja yang diperiksa, pemeriksaan aktivitas bank serta kewenangan SKAI dalam mengakses catatan, dokumen, dan fisik aset bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. Dalam hal fungsi SKAI terintegrasi dalam konglomerasi keuangan, SKAI memiliki Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan sebagai pedoman utama tata kelola terintegrasi yang harus dipatuhi oleh semua SKAI LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit di semua level Unit Kerja BRI secara independen, objektif dan profesional serta melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Auditor Intern dalam melaksanakan tugas.
6. Menjadi Liaison Officer bagi pihak eksternal BRI dalam kaitannya dengan fungsi audit. SKAI bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan Auditor Ekstern.
7. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern.
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI.

3. Memastikan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.
4. Memastikan seluruh kegiatan asurans dan konsultasi dilakukan dengan mematuhi Standar Profesional Audit Intern.
5. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
6. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik.
7. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
8. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern.
9. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
10. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
11. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
12. Dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern, maka SKAI memastikan bahwa:
 - a. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI dengan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara.
 - b. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
 - c. Pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank.
13. SKAI BRI sebagai SKAI perusahaan induk:
 - a. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak
 - b. Merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu.
14. Memastikan dalam hal terdapat permintaan saksi ahli kepada jajaran SKAI, maka dapat memberikan penugasan kepada Auditor tertentu untuk menjadi saksi ahli dengan mempertimbangkan kompetensi, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman sesuai dengan kasus yang dihadapi.
15. Memastikan apabila terdapat permintaan atas dokumen audit oleh pihak eksternal (terkait litigasi), telah dilakukan koordinasi dengan Divisi Hukum atau Legal Officer.

Kewenangan Satuan Kerja Audit Internal

1. Mendapatkan akses data, informasi, personil, sistem dan properti fisik yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara, seperti Rapat Direksi, Rapat ALCO, Rapat Komite Manajemen Risiko, dan lainnya.

Komposisi Personil Satuan Kerja Audit Intern

SKAI terus berkomitmen mengembangkan kualitas, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi Auditor melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Berikut disajikan data jumlah Auditor jajaran SKAI.

No	Jabatan	Jumlah
1	SEVP	1
2	Division Head	1
3	Audit Head	1
4	Kepala Audit Intern Wilayah	18
5	Head Desk	1
6	Department Head	1
7	Wakil Kepala Divisi	1
8	Wakil Kepala Audit Intern Wilayah	7
9	Group Head	68
10	Team Leader	20
11	Team Member	90
12	Auditor (Senior Auditor s/d Associate Auditor)	441
Total		650

Sertifikasi Profesi Personil Satuan Kerja Audit Intern

Untuk memastikan pelaksanaan tugas audit yang berkualitas, SKAI BRI didukung tenaga audit profesional yang diantaranya telah bersertifikasi nasional maupun internasional sebagai berikut:

A. Sertifikasi Internasional

No	Nama Sertifikasi	Jumlah
1	Certified Fraud Examiner (CFE)	21
2	Certified Information System Auditor (CISA)	10
3	Certified Ethical Hacker (CEH)	4
4	Certified Data Center Professional (CDCP)	1
5	Certified Financial Planer (CFP)	2
6	Certified Wealth Management (CWM)	3
7	Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)	4
8	COBIT 5 Foundation Certificate (COBIT 5)	2
9	Certified Statement Analysis (CSA)	3
10	Certified Blockchain Business Foundations (CBBF)	1

B. Sertifikasi Nasional

No	Nama Sertifikasi	Jumlah
1	Certified Qualified Internal Auditor (QIA)	20
2	Certified Bank Internal Audit (CBIA)	51
3	Certified Forensic Auditor (CFrA)	22
4	Lead Auditor ISO 9001:2015 IRCA Approved	2
5	Big Data Administrator (BIG DATA)	4

No	Nama Sertifikasi	Jumlah
6	Kepatuhan	2
7	Lead Auditor ISO 37001:2016	1
8	Lead Auditor ISO 27001:2013 and ISO 19011:2011	2
9	Certified Forensic Security Specialist (CFSS)	1
10	Certification in Risk Management Assurance (CRMA)	1
11	Sertifikasi Treasury Dealer level Basic (Treasury)	1
12	Certified Data Center Specialist (CDCS)	1
13	Business Continuity Certified Planner (BCCP)	1
14	Data Science Professional Certificate (DSPC)	1
15	Certified Blockchain Solution Architect (CBSA)	1
16	Certified Professional Coach (CPC)	3
17	Certified Risk Governance Professional (CRGP)	1
18	Data Science Foudation Specialist (DSFS)	1
19	Applied Data Science Specialist (ADSS)	1
20	Artificial Intelligence Foundations Specialist (AIFS)	1
21	Applied Artificial Intelligence Professional (AAIP)	1
22	Manajemen Risiko Level 1	90
23	Manajemen Risiko Level 2	49
24	Manajemen Risiko Level 3	14
25	Manajemen Risiko Level 4	8
26	General Banking 1	36
27	Sertifikasi LSP BRI Level Supervisor	34
28	Sertifikasi LSP BRI Level Auditor	115

C. Kualifikasi Pendidikan Formal Jajaran SKAI

Pendidikan	Jumlah
S1	602
S2	71
Lainnya	12

Program Peningkatan Kompetensi Satuan Kerja Audit Intern

Selain itu dilakukan pendidikan berkelanjutan melalui *on job training*, pendidikan *development dan enhancement (Inclass, In House Training, Public Course dan Seminar)* dan sertifikasi profesional Auditor. Adapun pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan Pendidikan	Jumlah Peserta
1	<i>Enhancement Materi Audit</i>	439
2	<i>Enhancement Materi Non Audit</i>	555
3	<i>Public Course Dalam Negeri</i>	102
4	<i>Development</i>	719
5	Pendidikan Sertifikasi	226

Partisipasi Dalam Asosiasi Profesi Audit Internal

Dalam rangka memperluas wawasan dan kompetensi profesional audit intern, SKAI telah berpartisipasi dalam asosiasi profesi audit internal salah satunya dengan keikutsertaan SKAI BRI dalam organisasi eksternal, antara lain:

Nama Kegiatan/ Organisasi	Jabatan
Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB)	SEVP SKAI BRI sebagai Ketua Dewan Pengawas IAIB Vice President, Senior Manager Audit Standard & Quality Development Division BRI dan Head Office, Special Branch & Overseas Network Audit Office sebagai Anggota Bidang Training, Edukasi & Sertifikasi; Anggota Bidang Komunikasi; Anggota Bidang Standar, Etika, Riset & Pengembangan; Anggota Bidang Keanggotaan.

Sertifikasi Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern telah melakukan resertifikasi ISO 9001:2015 terkait Sistem Manajemen Mutu dari lembaga Sertifikasi SGS Indonesia pada bulan Februari 2021 dengan hasil tidak terdapat temuan Major maupun Minor. SKAI BRI dapat mempertahankan sertifikat ISO 9001:2015 yang berlaku hingga Desember 2023, dalam hal ini SKAI BRI telah mendapatkan Sertifikasi ISO selama 19 tahun sejak pertama kali dilakukannya sertifikasi ISO 9001:2000 pada tahun 2002. Sertifikasi ISO tersebut diberikan kepada seluruh unit kerja SKAI termasuk Audit Standard & Quality Development Division, Head Office Audit, Digital & Information Technology Audit dan 18 Audit Intern Wilayah BRI Seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa SKAI BRI telah menerapkan sistem manajemen mutu dalam setiap pelaksanaan audit, sehingga dapat turut mewujudkan visi SKAI BRI menjadi *strategic business partner* yang handal dalam rangka mencapai visi BRI dan menjadi *benchmark of best practice* bagi Satuan Kerja Audit Intern di Indonesia.



Kode Etik Auditor

SKAI BRI memiliki kode etik berupa prinsip dasar perilaku pribadi dan profesional yang harus dipatuhi oleh Auditor Intern baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan kegiatan audit untuk meningkatkan budaya etik dalam Profesi Audit Intern. Kode Etik Auditor BRI terdiri dari 4 (empat) prinsip, yaitu:

1. Integrity principle

Jujur, membangun kepercayaan yang menjadi dasar berpijak auditor intern dalam melaksanakannya tugas dan tanggung jawabnya.

2. Objectivity principle

Auditor Internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

Auditor Internal harus menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang objek yang diuji.

3. Confidentiality principle

Menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diwajibkan oleh hukum atau profesi.

4. Competency principle

Menerapkan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

Komitmen Auditor Intern terhadap Kode Etik dinyatakan dengan menandatangani Deklarasi Kode Etik Audit Intern dan diperbaharui setiap tahun. Hal ini dilakukan agar setiap Auditor diingatkan kembali akan adanya Kode Etik yang harus dijunjung tinggi dan ditaati.

Independensi SKAI BRI

SKAI sebagai *3rd line* secara struktural telah independen terhadap fungsi *1st line* (Unit Kerja Operasional) dan fungsi *2nd line* (Jajaran Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan). Kedudukan SKAI dalam perusahaan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Utama, serta memiliki akses komunikasi (*communication line*) dengan Dewan Komisaris (dalam hal ini dengan Komite Audit). Hal tersebut mendukung independensi dan objektivitas pelaksanaan dan pelaporan audit, sehingga dapat mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan BRI. Komunikasi SKAI dengan Komite Audit dalam bentuk koordinasi maupun penyampaian laporan hasil audit secara rutin. Untuk menjaga objektivitas Auditor Intern, dilakukan perubahan penugasan secara berkala.

Sistem Manajemen Informasi Audit

SKAI memiliki Sistem Manajemen Informasi Audit yang memadai dikenal dengan **BRI Sistem Manajemen Audit (BRISMA)**. BRISMA merupakan sebuah *suite application* dalam bidang Manajemen Audit yang memfasilitasi penetapan standar audit pada semua tahapan proses audit intern di BRI mulai dari tahap Perencanaan hingga *Monitoring*.

Metodologi Audit

Satuan Kerja Audit Intern menerapkan *metode risk based audit* (RBA) dalam melaksanakan fungsi audit dengan memfokuskan pada area yang berisiko tinggi. Penetapan *audit universe* dilakukan dengan memperhatikan tujuan perusahaan, evaluasi terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan memastikan sistem pengendalian intern yang ada telah dapat memitigasi risiko. Dengan metodologi tersebut, maka pelaksanaan audit difokuskan pada area yang memiliki potensi risiko yang tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan *risk based audit*, SKAI menggunakan *Computer Assisted Audit Technique* (CAAT's) sebagai *analytical tools audit* untuk menentukan prioritas audit, ruang lingkup dan sampel audit.

Di samping kegiatan audit, Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan deteksi dini (*early warning signal*) terhadap potensi risiko melalui kegiatan *monitoring off site* yang dilaksanakan Unit Kerja Audit. Peran audit dalam *Early Warning Signal* diharapkan dapat memberikan deteksi dini atas peningkatan risiko yang terjadi di Unit Kerja. Pelaksanaan *monitoring off site* didukung dengan pengembangan indikator risiko melalui teknologi *big data*. Untuk mewujudkan peran SKAI sebagai *Strategic Business Partner* telah dilakukan beberapa hal diantaranya penyampaian saran, ide dan masukan untuk penyempurnaan draft kebijakan dan prosedur, melakukan forum komunikasi antara Audit Intern Wilayah dan Kantor Wilayah, Program Auditor Mengajar, kegiatan konsultasi, dan *sharing knowledge*, khususnya terkait dengan pengendalian intern, manajemen risiko dan GCG. Kegiatan tersebut merupakan wujud visi SKAI sebagai SBP yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi BRI. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya sadar risiko, budaya kepatuhan dan budaya GCG di seluruh level unit kerja

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2021

Kegiatan audit dilaksanakan berdasarkan hasil *risk assessment* dan Perencanaan Audit Tahunan yang telah disetujui Direktur Utama dan Komisaris Utama. Selama tahun 2021 pelaksanaan kegiatan audit mencapai 111% dari target. Secara terperinci, audit telah dilaksanakan terhadap Unit Kerja sebagai berikut:

Tabel Realisasi Audit Reguler

No	Unit Kerja	Realisasi Audit
1	Divisi	5
2	Kantor Wilayah	18
3	Kantor Cabang Khusus	1
4	Kantor Cabang	450
5	Kantor Cabang Pembantu	591
6	Kantor Kas	314
7	BRI Unit	2.075
8	Seksi Administrasi Umum AIW	18
9	Perusahaan Anak	7

Di samping kegiatan reguler audit tersebut di atas, SKAI melaksanakan kegiatan Regulatory Audit dan Audit Tematik. Regulatory audit dilaksanakan dengan ruang lingkup dan tujuan tertentu sesuai ketentuan regulator. Selama 2021, SKAI telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan Regulatory Audit sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Bank Indonesia.
2. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
3. *Anti Money Laundering & Counter-Terrorism Financing* di BRI Timor Leste Branch.
4. Pengelolaan Kas Titipan Bank Indonesia.
5. Vendor Penyedia Jasa Pengolahan Uang Rupiah (PJPUR).

Audit tematik dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran profil kecukupan dan efektivitas pengendalian intern secara menyeluruh (*end to end process*). Pada tahun 2021 SKAI melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan audit tematik yang terdiri dari:

1. 9 (sembilan) audit tematik terkait pemanfaatan teknologi informasi.
2. 9 (sembilan) audit tematik terhadap Divisi di Kantor Pusat.
3. 3 (tiga) audit tematik terhadap Unit Kerja Operasional di wilayah.

Rapat Satuan Kerja Audit Intern

Satuan Kerja Audit Intern dapat menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. Satuan Kerja Audit Intern BRI dapat mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara, seperti rapat ALCO, rapat Komite Manajemen Risiko dan komite lainnya.

Selama tahun 2021, SKAI telah melaksanakan rapat bersama Direksi, Dewan Komisaris, Komite di bawah Dewan Komisaris serta Komite di bawah Direksi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah Rapat
Dewan Komisaris	9
Direksi	3
Dewan Komisaris dan Direksi	6
Komite Audit	9
Komite Pemantau Manajemen Risiko	1
Komite Tata Kelola Terintegrasi	2
Komite Produk	3

Tindak Lanjut atas Temuan Auditor Eksternal

No	Lembaga Pemeriksa	Σ Rekomendasi	Tindak Lanjut s.d. TW IV/2021			
			Selesai	%	Dalam Pemantauan	%
1	Otoritas Jasa Keuangan	416	404	97,1%	12	2,9%
2	Badan Pemeriksa Keuangan RI	265	247	93,2%	18	6,8%
3	Bank Indonesia	-	-	-	-	-
4	KAP Ernst & Young	477	467	97,9%	10	2,1%
Total		1.158	1.118	96,5%	40	3,5%

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

SKAI melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap komitmen perbaikan kelemahan pengendalian intern sesuai rekomendasi SKAI, Pengawas maupun Auditor Eksternal. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan komitmen manajemen sampai dengan posisi 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Tindak Lanjut atas Temuan SKAI

No	Hasil Monitoring	% Rekomendasi
1	Memadai	97,81%
2	Tidak Memadai ¹⁾	0,01%
3	Dalam Pemantauan ²⁾	2,18%
Total		100,0%

Keterangan:

- 1) Terhadap rekomendasi yang mendapatkan opini "tidak memadai" akan menjadi objek audit di periode audit berikutnya.
- 2) Dalam pemantauan merupakan komitmen tindak lanjut yang belum jatuh tempo pada 31 Desember 2021.

Di samping pemantauan terhadap tindak lanjut temuan SKAI, sebagai fungsi *Liason Officer* pihak Auditor Eksternal dan Pengawas, SKAI telah melakukan pemantauan progres tindak lanjut dan perbaikan berdasarkan temuan Auditor Eksternal dan Pengawas. Hasil pemantauan komitmen manajemen terhadap temuan Auditor Eksternal dan Pengawas sebagai berikut.

Sinergi dengan Assurance Provider

SKAI melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fungsi pengendalian lainnya terutama dalam hal pemetaan cakupan asuransi (meliputi risiko signifikan, pihak yang melakukan asuransi dsb). Hal tersebut dilakukan untuk membantu mengidentifikasi *gap* dan duplikasi cakupan asuransi serta membantu SKAI untuk mengevaluasi kecukupan jasa asuransi di masing-masing risiko. Hasil pemetaan tersebut didiskusikan dengan fungsi pengendalian lainnya untuk memperoleh kesepakatan mengenai koordinasi kegiatan dalam meminimalkan duplikasi pekerjaan, memaksimalkan efisiensi dan meningkatkan efektivitas cakupan *assurance*.

Unit Manajemen Risiko

Manajemen risiko diterapkan pada seluruh aktivitas bank dengan mengacu pada ketentuan manajemen risiko yang ditetapkan oleh Regulator. Proses manajemen risiko terdiri dari aktivitas identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkesinambungan oleh *three lines model*.

First line menjalankan aktivitas operasional bank untuk memberikan jasa dan layanan kepada nasabah, termasuk mengelola risiko untuk mencapai tujuan perusahaan. *Second line* membantu *first line* dalam mengelola risiko dengan menyediakan dukungan berupa *risk and control assessment, monitoring*, dan evaluasi penerapan manajemen risiko. *Third line* memberikan *assurance* atas kecukupan *control* dan efektivitas pelaksanaan *internal control* oleh *first line* dan *second line*.

Satuan kerja manajemen risiko Bank terdiri dari *Market, Portfolio & Enterprise Risk Division, Operational Risk Division, Digital Risk Division*, dan *Credit & Product Risk Policy Division*.

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko *enterprise*, kredit, pasar, likuiditas, operasional, digital dan Manajemen Kelangsungan Usaha, serta Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
2. Menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan usulan penetapan *Risk Appetite, Risk Tolerance, Risk Limit*, dan *Loan*

Portfolio Guideline kepada Direksi dengan memperhatikan masukan dari Unit Kerja Operasional.

3. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
4. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
5. Memantau implementasi kebijakan, strategis, dan pedoman penerapan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh *Risk Management Committee (RMC)* dan/atau yang telah disetujui oleh Direksi.
6. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan (*composite*), maupun per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
7. Melakukan *stress testing* setiap triwulanan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, untuk mengetahui dampak dari perubahan kondisi ekonomi terhadap portofolio atau kinerja secara keseluruhan.
8. Mengkaji ulang secara berkala proses manajemen risiko berdasarkan temuan audit dan/atau perkembangan praktik-praktik manajemen risiko yang berlaku secara internasional.
9. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru, termasuk dalam pengkajian adalah penilaian kemampuan Bank untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.
10. Mengevaluasi akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, apabila menggunakan model untuk keperluan intern (*internal Model*) dan/atau regulator.
11. Memberikan rekomendasi kepada Unit Kerja Operasional dan/atau kepada RMC sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang dapat diterima Bank.
12. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direksi dan Komisaris setiap triwulan. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.
13. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan untuk memastikan kecukupan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, keakuratan metodologi penilaian risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko.
14. Menyusun dan menyampaikan kewajiban-kewajiban pelaporan tertentu sesuai dengan regulasi yang berlaku kepada regulator.

Profil Kepala Divisi yang Membidangi Manajemen Risiko



Benny Imam Safi

Operational Risk Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Surabaya, 19 Juli 1966. Usia 55 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 Sarjana Pertanian – Universitas Brawijaya (1990)
- S2 Magister Manajemen – Universitas Gadjah Mada (2008)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi No. R.297-DIR/HCB/05/2020 tanggal 20 Mei 2020



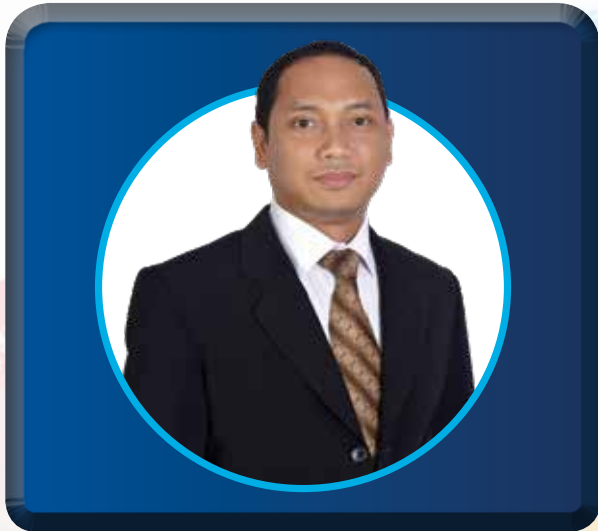
SERTIFIKASI

- Pendidikan PCP Madya 3 Angkatan 16/2003
- Pendidikan Internal Audit Tingkat Pra Manajerial & Manajerial (QIA)
- Sespibank Angkatan 67
- Sertifikasi Perbankan Umum
- Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko Bank Level 4
- Sertifikasi Risk Governance Professional (CRGP)
- Sertifikasi Professional Coach



PENGALAMAN KERJA

- Kepala Bagian Pemasaran Divisi Consumer Banking (2002 – 2003)
- Kepala Bagian Pemasaran Dana dan Jasa Kantor Cabang Khusus (2003 – 2008)
- Wakil Kepala Divisi Manajemen Aktiva Tetap (2008 – 2011)
- Wakil Inspektur Kantor Inspeksi BRI (2011 – 2017)
- Inspektur Kantor Inspeksi BRI (2017 – 2018)
- Digital & Operation Risk Management Division Head (2018 - 2020)



Dinar Widyantoro

Digital Risk Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Semarang, 15 Agustus 1975. Usia 46 tahun Per Desember 2021. Berdomisili di Bogor.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- S1 – Teknik Penerbangan Institut Teknologi Bandung (1998)
- S2 – Master of Science in Computer Science, Purdue University Indianapolis (2012)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Menjabat sebagai Division Head Digital Risk sejak 1 September 2021 berdasarkan Keputusan Direksi No. R.558-DIR/HCB/09/2021 tanggal 3 September 2021



SERTIFIKASI

- Manajemen Risiko Perbankan Level 4 (LSPP)
- CDMP - Certified Data Management Professional (Data Management International)



PENGALAMAN KERJA

- Bergabung dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (2003)
- Vice President Perencanaan Strategi TI (2018)
- Vice President Pengembangan Omni Channel Platform (2019)
- Executive Vice President Enterprise Data Management (2020)
- Executive Vice President Digital Risk Division (2021)



Ety Yuniarti

Market, Portfolio & Enterprise Risk Division Head

Warga negara Indonesia, lahir di Klaten.
Usia 40 tahun Per Desember 2021.
Berdomisili di Bogor.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- MBA, Melbourne Business School (2012)
- S1, Teknik Elektro UGM (2003)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

SK Penunjukkan Jabatan Divisi MPE No.R.837-DIR/HCB/12/2021 Tanggal 20 Desember 2021



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4



PENGALAMAN KERJA

- Junior Information System Auditor (CISA Certified) (2005)
- Junior Operational Risk Analyst (2008)
- Research and Development Analyst (2012)
- Investor Relations Officer (2013)
- Kepala Bagian Investor Communication (2015)
- Kepala Bagian Equity Management & Strategic Investment (2018)
- Wakil Kepala Divisi Asset, Liabilities & Management Information System (2019)
- Kepala Divisi Micro, SME, Consumer Credit Risk & Policy (2020)
- Kepala Divisi Market, Portfolio & Enterprise Risk (2021)

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Program pendidikan dan pengembangan kompetensi selama tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pengantar Manajemen Risiko dan Perangkat Manajemen Risiko.
2. Sertifikasi Manajemen Risiko.
3. Sertifikasi ATMR Operasional dan Budaya Manajemen Risiko.
4. ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
5. ISO 37001:2016 *Awareness* dan Penyampaian *Timeline Persiapan Surveillance Audit ISO 37001:2016*.
6. ISO 20000:2018 *IT Service Management System*.
7. *In House Training* (IHT) Pelatihan Dasar Penanganan Bencana.
8. *In House Training* (IHT) Data Analytic - Concept & Processing Technologies.
9. BSDP 1 Digital Teknologi Informasi (DTI).
10. Seritifikasi dan Pembekalan Governance, Risk & Compliance Professional (GRCP).
11. *In House Training Spesial Request* Pembekalan *Hard Skill VP RRM (Regional Risk Management)*.
12. *Inhouse Training* Metodologi Validasi dan *Modelling CRR* dan CRS
13. *Inhouse Training* Pendidikan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4
14. *Inhouse Training* Culture Leader
15. *Executive Education Program Risk Management for Corporate Leaders*, Harvard Business School
16. *BRILiaN Specialist Development Program (BSDP) 1 for BRI Unit Risk and Compliance (URC)*, meliputi:
 - a. *Modul 1 Compliance*
 - b. *Modul 2 Enterprise Risk Management*
 - c. *Modul 3 Critical Point Aktivitas Perkreditan*
 - d. *Modul 4 Operational Risk Management*
 - e. *Modul 5 Critical Point Aktivitas Operasional*
17. *BRILiaN Specialist Development Program (BSDP) 1 for Branch Risk and Compliance (BRC)*, meliputi:
 - a. *Modul 1 Compliance*
 - b. *Modul 2 Enterprise Risk Management*
 - c. *Modul 3 Critical Point Aktivitas Perkreditan*
 - d. *Modul 4 Operational Risk Management*
 - e. *Modul 5 Critical Point Aktivitas Operasional*
18. *BRILiaN Specialist Development Program (BSDP) Specialist for Credit Risk Analyst (CRA)*, meliputi:
 - a. *Modul 1 CFA (Chartered Financial Analyst)*
 - b. *Modul 2 CPSAK (Certified Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)*
19. *In House Training Spesial Request - Risk Upgrade Series*, meliputi:
 - a. *BRI Document Management System (BRIMEN)*
 - b. *Pengawasan Bansos dan BPUM*
 - c. *Identifikasi dan Kontrol Penyelesaian Rekening IA Not Comply*
 - d. *KMK Tangguh*
 - e. *KUR Super Mikro*
 - f. *Mitigasi Agunan dengan Kondisi Sulit Dieksekusi*

- g. *Mitigasi Pengelolaan Kas ATM/CRM*
- h. *Mitigasi Risiko Kredit KMK Konstruksi*
- i. *Mitigasi Risiko Pengelolaan Klaim KUR pada Platform BRISurf*
- j. *Mitigasi Risiko Pinjaman Briguna dan KPR*
- k. *Mitigasi Risiko Pinjaman KMK Withdrawal Approval (KMK WA)*
- l. *Mitigasi Risiko Pinjaman Mikro Skema GP 6 Bulan*
- m. *Monitoring* Penyaluran BPUM
- n. *Risiko Reputasi*

Sertifikasi Manajemen Risiko

Karyawan yang telah memiliki sertifikasi manajemen risiko di BRI tahun 2021 adalah sebagai berikut.

No	Level Sertifikasi	Peserta
1	1	1895
2	2	985
3	3	158
4	4	72
Total		3119

Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Tahun 2021

1. Penetapan *Risk Appetite Statement (RAS)* dan *Limit Risiko*

Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi BRI telah menetapkan *Risk Appetite Statement (RAS)* dalam bentuk pernyataan yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan ketidaktoleranan (*zero tolerance*). RAS dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis BRI serta perubahan kondisi lingkungan bisnis. RAS digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan risiko dan sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik.

Selanjutnya RAS diturunkan menjadi limit risiko untuk setiap indikator risiko. Penetapan RAS dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil maupun strategi dan target Bank secara keseluruhan. Limit risiko yang ditetapkan meliputi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per-aktivitas fungsional. Adapun penetapan limit risiko digunakan sebagai panduan bagi aktivitas Unit Kerja untuk mengelola jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima.

2. Penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bank Sistemik

Sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia, BRI memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi.

Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial BRI sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang berdampak pada permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset yang membahayakan kelangsungan usaha BRI.

Pada dokumen Rencana Aksi, terdapat analisis materialitas dan pemeringkatan untuk menentukan peringkat lini bisnis, jaringan kantor dan perusahaan anak. Analisis dilakukan dengan menggunakan *scorecard* materialitas berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan lini bisnis, peringkat perusahaan anak dan jaringan kantor.

Analisis keterkaitan usaha eksternal didasarkan pada beberapa aspek, yaitu (1) *Intrafinancial system assets*, (2) *Intrafinancial system liabilities*, dan (3) *securities outstanding* serta analisis *counterpart* signifikan (Obligor, Deposan, *Treasury Counterparties*) sesuai dengan *common practice* yang ada. Untuk analisis skenario dampak perubahan sistemik, BRI melakukan *Stress Testing* yang dibagi dalam 3 (tiga) skenario yaitu *Idiosyncratic*, *Market-wide* dan kombinasi dari keduanya. Untuk skenario *Idiosyncratic* BRI mengembangkan skenario terkait konsentrasi pada obligor serta industri yang ada. Untuk skenario *Market-wide*, BRI mengembangkan skenario berdasarkan kondisi pandemi COVID-19. Sedangkan skenario kombinasi merupakan skenario terburuk yang berasal dari kombinasi *idiosyncratic* dan *market wide*.

Berdasarkan hasil *Stress-Testing* tersebut, BRI kemudian menyusun dan menetapkan opsi pemulihan berdasarkan indikator permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset. Selain itu, BRI juga menetapkan *trigger level* dari setiap indikator yang digunakan untuk mengaktifasi implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*). *Trigger level* tersebut diurutkan berdasarkan level pencegahan, pemulihan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*). Laporan Pengungkapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) disampaikan kepada pihak internal dan eksternal dengan tingkat pengungkapan yang disesuaikan dengan masing-masing *targeted audience*.

3. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan Aktivitas Baru (PAB)

Product owner wajib melakukan *self assessment* pada setiap rencana penerbitan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB). Kemudian, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan penilaian kecukupan pengelolaan risiko sebelum disetujui oleh Komite Produk. Rencana pengembangan produk baru yang telah disetujui oleh Komite Produk, kemudian diproses sesuai POJK No.13/POJK.03/2021 mengenai Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

4. Pembentukan *Regional Risk Management (RRM Team)*

Penambahan peran *Regional Risk Management (RRM)* dilakukan dalam rangka mewujudkan aspirasi manajemen risiko "*Managing Risk for Sustainable Bussines, Operational Excellent, and Banking Resilience*". Struktur organisasi RRM terdiri dari RRM Head yang mensupervisi Risk Management and Compliance (RMC) dan Credit Risk Analyst (CRA).

RMC yang berkedudukan di *Regional Office* mensupervisi *Branch Risk and Compliance (BRC)* dan *BRI Unit Risk and Compliance (URC)* yang berkedudukan di Kantor Cabang dan *BRI Unit*.

RRM team tersebut memiliki tugas utama untuk memastikan pelaksanaan manajemen risiko operasional dan kepatuhan dalam rangka memastikan pencapaian target kinerja, pengendalian *fraud* dan *human error*, pelaksanaan BCM dan K3, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal di masing-masing unit kerja binaan.

5. Implementasi Budaya Sadar Risiko

BRI telah menyusun *BRI One Culture* dengan tema "*We Care More (about) Efficiency, Execution, Experience*" yang mengacu pada *core values* AKHLAK, *BRILiAn Belief* dan *BRILiAn Ways*. Budaya sadar risiko dan kepatuhan termasuk di dalam tema budaya "*Execution*" untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan pada setiap upaya pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* pekerja dan unit kerjanya.

Program internalisasi budaya sadar risiko yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Culture Activation Program (CAP)
Setiap unit kerja telah menetapkan CAP untuk membentuk perilaku-perilaku yang dibutuhkan untuk mencapai KPI. Dalam CAP dan perilaku-perilaku kunci selalu memasukkan unsur budaya sadar risiko dan kepatuhan.
2. Membangun *Risk Awareness* Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) dan unit kerja pengelola risiko selalu membuat *risk awareness* secara rutin setiap bulan untuk membangun budaya sadar risiko bagi seluruh pekerja dan nasabah. *Risk awareness* disampaikan dalam bentuk surat, media infografis, webinar, podcast, *e-learning*, akun media sosial resmi Bank dan email/WA/sms blast.

6. Pengembangan Organisasi *Digital & Operational Risk Management Division*

Dalam rangka mengamankan transformasi digital yang dijalankan oleh Bank, maka untuk mengantisipasi peningkatan ancaman *cyber* seiring dengan pertumbuhan transaksi dan layanan perbankan digital, maka dibentuk *Digital Risk Division* yang merupakan pengembangan dari *Digital Department* dari *Digital and Operational Risk Division*. *Digital Risk Division* tersebut memiliki tugas untuk mengelola risiko digital, meliputi penyusunan kebijakan, penerapan proses manajemen risiko, dan monitoring serta evaluasi risiko digital beserta pengedaliannya di seluruh aktivitas Bank.

Selain itu, untuk penguatan pelaksanaan GCG dan penerapan POJK No.39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud*, Bank membentuk *Fraud Risk Management and Recovery Department* yang mempunyai tugas menyusun kebijakan Strategi Anti *Fraud*, memastikan penerapan Strategi Anti *Fraud* yang meliputi Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dengan tujuan untuk mencegah risiko kejadian *fraud* dan melakukan upaya *recovery* atas kerugian *fraud*.

7. Penerapan *Business Continuity Management (BCM)* dan K3

Dalam rangka penerapan BCM yang proaktif, BRI telah dilakukan pengkinian Kebijakan BCM yang terdiri dari: Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB), *Business Impact Analysis (BIA)*, *Business Continuity Plan (BCP)*, *Emergency Response Plan (ERP)*, *Crisis Management Plan (CMP)*, *Disaster Recovery Plan (DRP)*, dan Sosialisasi dan Uji Coba.

Selama tahun 2021, sosialisasi risiko ancaman bencana dan Program K3 kepada seluruh unit kerja, serta uji coba BCP Divisi Kritis juga telah dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penerapan BCM dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Selama masa pandemi COVID-19, *BCM Department* bekerjasama dengan Divisi terkait dan *Regional Office* secara aktif melakukan pengendalian COVID-19 di lingkungan Bank, mulai dari penyusunan kebijakan, memastikan penerapan protokol kesehatan bagi pekerja di lingkungan kantor maupun di luar kantor, pemantauan kesehatan pekerja, dan membantu proses pemulihan pekerja dan keluarga pekerja yang terkonfirmasi positif COVID-19.

8. Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Kredit Basel III Reform Pendekatan Standar

Per-1 Januari 2023, BRI akan mulai menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK No 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Perubahan metodologi perhitungan dalam ketentuan tersebut meliputi perubahan bobot risiko lebih granular dan dalam jumlah *bucket* yang lebih banyak. Selain itu juga terdapat klasifikasi kategori portofolio yang lebih beragam dan keharusan pelaksanaan *due diligence* terhadap pihak lawan untuk memastikan pemahaman atas profil risiko dan karakteristik dari pihak lawan agar penentuan bobot risiko tidak hanya bergantung pada peringkat eksternal.

Sebagai persiapan penerapan standar perhitungan baru tersebut, BRI telah mulai mengembangkan tools perhitungan

baru terutama untuk klasifikasi aset pinjaman dan diperkirakan dapat digunakan mulai pelaporan uji coba untuk posisi 31 Desember 2021.

9. Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Operasional Pendekatan Standar

Dalam rangka penerapan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2023, maka BRI sedang melakukan reviu proses pencatatan data kerugian dan *recovery* kerugian risiko operasional, serta uji coba perhitungan pendekatan standar berdasarkan data keuangan 10 (sepuluh) tahun terakhir.

10. *Credit Decision Engine & Credit Risk Model for Consumer Segment*

Produk di segmen konsumen merupakan *mass product* yang membutuhkan proses approval cepat dan efektif, namun membutuhkan pengukuran tingkat risiko kegagalan kredit yang akurat. Untuk itu secara berkala dilakukan *review* terhadap proses *scoring* debitur berbasis risiko yang efektif baik pada tahapan *Credit Underwriting*, monitoring kredit maupun *collection*, dengan *Application scoring*, *Behavior scoring* dan *Collection scoring*, yang dikelola secara terpusat pada *Credit Decision Engine* sehingga dapat dilakukan monitoring dan validasi secara berkelanjutan.

11. Pengembangan *Early Warning Signal* untuk kredit korporasi

Dalam rangka peningkatan pemantauan risiko kredit, BRI mengembangkan sistem *Early Warning System (EWS)*. Sistem EWS dibangun dengan menggunakan indikator risiko secara internal dan secara makro serta menerapkan analisa *forward looking*. Sistem EWS saat ini diterapkan untuk segmen small, medium, dan korporasi. Sistem EWS berfungsi untuk menghasilkan sinyal (*warning*) yang digunakan oleh BRI sebagai acuan dalam menentukan tindakan yang perlu diambil dalam proses pengelolaan aset.

12. Perubahan kebijakan kredit yang direstrukturisasi terdampak COVID-19

Penyebaran wabah COVID-19 telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian di Indonesia yang berakibat pada penurunan kinerja dan kapasitas usaha debitur. Menyikapi hal tersebut, BRI melakukan beberapa perubahan kebijakan untuk kredit yang direstrukturisasi terdampak COVID-19 antara lain terkait penetapan kualitas kredit setelah restrukturisasi, kebijakan restrukturisasi ulang, jangka waktu, keringanan tunggakan bunga, dan skema restrukturisasi. Adapun dalam pemberian relaksasi tersebut, BRI tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan menetapkan kriteria selektif untuk debitur yang dapat menerima relaksasi restrukturisasi COVID-19.

13. Pengembangan Metodologi Validasi Model Pemeringkatan Internal (CRR dan CRS)

Berdasarkan *Basel Capital Accord* dan sesuai dengan persyaratan OJK, model internal harus memenuhi serangkaian kriteria minimal. Sejalan dengan ketentuan Basel dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, disebutkan bahwa bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. OJK juga mensyaratkan agar Bank memiliki proses internal yang kuat dalam melakukan validasi seluruh komponen dari model risiko kredit yang digunakan. Oleh karena itu, disusun pedoman untuk menstandarisasi pelaksanaan aktivitas proses validasi model pemeringkatan internal (CRR dan CRS) sesuai dengan metodologi yang telah ditetapkan.

Komite di Bawah Direksi

Direksi telah membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan bank. Per 31 Desember 2021, BRI memiliki 9 (sembilan) Komite di bawah Direksi sebagai berikut:

1. Asset and Liability Committee (ALCO)
2. Risk Management and ESG Committee (RMC)
3. Komite Kredit
4. Komite Capital & Investment
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi & Tata Kelola Data
7. Komite Pengadaan Barang & Jasa
8. Komite Human Capital
9. Komite Produk

Asset and Liability Committee (ALCO)

ALCO merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggungjawab menyusun dan menetapkan kebijakan aset (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) berikut penetapan tarif *Fund Transfer Price* (FTP).

Piagam Asset and Liability Committee (ALCO)

Dalam melaksanakan tugasnya ALCO mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 726-DIR/CDS/11/2020 tentang Asset and Liability Committee yang mengatur terkait Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Tata Kerja serta Rapat ALCO Terbatas.

Tugas dan Tanggung Jawab Asset And Liability Committee (ALCO)

Asset and Liability Committee (ALCO) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kinerja Perusahaan serta menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan *asset and liability* yang optimum dengan memperhatikan *potential risk*, *optimum yield generation* dan *cost efficiency*.
2. Menetapkan suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), *Fund Transfer Price* (FTP) dan *pricing* lainnya yang berdampak langsung pada pencapaian net interest income (NII).
3. Menetapkan kewenangan Pejabat Pemutus dalam memutus suku bunga khusus simpanan, pinjaman dan/atau produk bank lainnya.
4. Menentukan kebijakan *Net Open Position* (NOP).
5. Memonitor bahwa pengelolaan *asset and liability* di perusahaan dilaksanakan sesuai dengan hasil putusan Rapat ALCO.

Struktur Keanggotaan Asset and Liability Committee (Alco)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	✓
VP, Assets & Liabilities Management	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	✓
1. Direktur Keuangan 2. Direktur Bisnis Mikro 3. Direktur Bisnis Kecil, Ritel & Menengah 4. Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN 5. Direktur Konsumer 6. Direktur Jaringan & Layanan 7. Direktur Digital, Teknologi Informasi & Operasi 8. Direktur Manajemen Risiko 9. Direktur Human Capital 10. SEVP Treasury & Global Services 11. SEVP Bisnis Korporasi 12. SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan 13. SEVP Change Management & Transformation Office 14. EVP, Corporate Banking 1 15. EVP, Corporate Banking 2 16. EVP, SOE Business 1 17. EVP, SOE Business 2 18. EVP, Syndication & Financial Services 19. EVP, Institutional Business 20. EVP, Transaction Banking 21. EVP, Social Entrepreneurship & Incubation	Anggota Tetap	✓

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
22. EVP, Wealth Management 23. EVP, Consumer Lending Sales & Development 24. EVP, Card & Digital Lending 25. EVP, Mass Funding 26. EVP, Retail Payment 27. EVP, Treasury Business 28. EVP, Investment Services 29. EVP, Internasional Business 30. EVP, Micro Business Development 31. EVP, Micro Sales Management 32. EVP, Small Sales Management 33. EVP, Small & Medium Business Development 34. EVP, Medium Business 1 35. EVP, Medium Business 2 36. EVP, Micro, SME, Consumer Credit Risk & Policy 37. EVP, Market, Portfolio & Enterprise Risk Management 38. EVP, Wholesale Credit Risk Analyst 39. EVP, Credit Restructuring & Recovery 40. EVP, Corporate Development & Strategy 41. EVP, Financial & Management Accounting 42. EVP, Change Management 43. EVP, Project Management Office 44. Pemimpin Wilayah Jakarta 1 45. Pemimpin Wilayah Jakarta 2 46. Pemimpin Wilayah Jakarta 3 47. Pemimpin Cabang Khusus		
1. Direktur Kepatuhan 2. SEVP Internal Audit	Anggota Tetap	-

Profil Anggota Asset and Liability Committee (ALCO)

Profil anggota ALCO dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Asset and Liability Committee (ALCO)

Seluruh anggota ALCO tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan Dan/Atau Peningkatan Kompetensi Asset And Liability Committee (ALCO) Tahun 2021

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi ALCO dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat Dan Pelaksanaan Tugas Asset And Liability Committee (ALCO) Tahun 2021

Kebijakan Rapat

- Sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Asset and Liability Committee (ALCO) menyelenggarakan Rapat ALCO untuk membahas pengelolaan *asset and liability* Perusahaan yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan dalam hal:
 - Perkembangan kinerja bank.
 - Komposisi dan pertumbuhan portofolio bank.
 - Alokasi aset produktif, diversifikasi *funding*, dan *capital management*.
 - Pengelolaan risiko.

- Suku bunga simpanan, suku bunga pinjaman, suku bunga dasar kredit (SBDK), *fund transfer price* (FTP) dan *pricing* lainnya.
- Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO. Dalam hal Ketua ALCO berhalangan maka Rapat ALCO dipimpin oleh Ketua ALCO Pengganti.
 - Koordinasi dalam penyelenggaraan Rapat ALCO menjadi tanggung jawab Sekretaris ALCO diantaranya berupa:
 - Mempersiapkan Rapat ALCO.
 - Menyusun dan mempresentasikan materi Rapat ALCO.
 - Memastikan Rapat ALCO dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota ALCO untuk dapat diselenggarakan.
 - Menyusun dan mendistribusikan notulen Rapat ALCO.
 - Dalam hal Sekretaris ALCO berhalangan hadir maka posisinya dijalankan oleh AVP, Assets & Liabilities Management.
 - Rapat ALCO harus dihadiri oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) Anggota ALCO. Dalam hal Pemimpin Unit Kerja yang menjadi Anggota ALCO berhalangan hadir maka yang bersangkutan dapat menunjuk penggantinya setingkat VP atau sekurangnya setingkat AVP.
 - Untuk efisiensi administrasi terkait perubahan organisasi, atas Anggota tambahan dapat diusulkan tersendiri kepada Ketua ALCO melalui Sekretaris ALCO dimana surat persetujuan usulan keanggotaan menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ALCO.
 - Keputusan Rapat ALCO diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penuh maka keputusan Rapat ALCO dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota ALCO yang memiliki hak suara ditambah dengan 1 (satu) orang Anggota ALCO, termasuk anggota Direksi yang salah satunya adalah Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti.

8. Sekretaris ALCO dapat mengundang peserta yang relevan untuk mengikuti ALCO sesuai dengan topik pembahasan di dalam ALCO.
9. Dalam hal kondisi yang sangat mendesak (*contingency*) untuk dilaksanakannya ALCO, namun Ketua dan/atau Ketua Pengganti berhalangan untuk memimpin rapat, maka Ketua ALCO dapat melakukan pendelegasian kepada salah satu Direktur untuk memimpin ALCO yang surat keputusannya disetujui oleh Ketua ALCO dan ditatakerjakan oleh Sekretaris ALCO.

Rapat ALCO Terbatas

1. Asset and Liability Committee (ALCO) secara insidental dapat menyelenggarakan Rapat ALCO Terbatas untuk membahas

pengelolaan asset and liability yang berkaitan dengan strategi dan kebijakan BRI dalam hal terdapat issue khusus yang harus segera mendapatkan hasil putusan Rapat ALCO.

2. Ketua ALCO atau Ketua ALCO Pengganti dan Sekretaris ALCO berwenang menetapkan Anggota ALCO yang diminta hadir di dalam Rapat ALCO Terbatas di dalam suatu Surat undangan tersendiri.
3. Rapat ALCO Terbatas harus dihadiri oleh seluruh Anggota ALCO.

Realisasi Rapat dan Pelaksanaan Tugas Asset and Liability Committee (ALCO) Tahun 2021

Selama tahun 2021, ALCO telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Adapun pembahasan rapat ALCO adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda Rapat
1.	22 Januari 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
2.	18 Februari 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
3.	10 Maret 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
4.	13 April 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
5.	7 Mei 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
6.	10 Juni 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
7.	13 Juli 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
8.	12 Agustus 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
9.	14 September 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
10.	13 Oktober 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
11.	16 November 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.
12.	15 Desember 2021	– <i>Economic & Market Update.</i> – <i>Balance Sheet Management (Financial Performance, Margin Analysis, Risk Mitigation, and Concerns & Recommendations)</i> – Perkembangan Saham BRI.

Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Piagam Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Dalam melaksanakan tugasnya Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 657-DIR/PPM/10/2021 tentang Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee yang mengatur terkait Organisasi, Utusan dan Kehadiran, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

Profil Anggota Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Risk Management dan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee Tahun 2021

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Risk Management Committee

Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta Perubahannya termasuk penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee (RMC) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk penerapan kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko dan contingency plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama untuk penetapan metodologi pengukuran risiko dan perubahannya.
3. Merekomendasikan penetapan limit dan perubahannya
4. Menyampaikan laporan Profil Risiko dan hasil pemantauan risiko serta rekomendasi perubahan apabila diperlukan.

Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi BRI atas penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi serta perubahannya.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempumaan kepada Direksi BRI dan Direksi Perusahaan Anak berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Menyampaikan laporan Profil Risiko Terintegrasi, laporan Profil Risiko individual Perusahaan Anak serta hasil pemantauan risiko kepada Direksi BRI.
4. Menyampaikan analisa permodalan terintegrasi.
5. Menyampaikan simulasi *stress testing* terintegrasi dan/atau individual serta *contingency plan* untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

Struktur Keanggotaan Risk Management Committee

Risk Management Committee (RMC) memiliki struktur sebagai berikut:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Ketua	✓
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti/Anggota tetap	✓
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	✓
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	✓
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Division Head, Market, Portfolio & Enterprise Risk	Sekretaris	-
Pemimpin Unit Kerja Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	-

Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi memiliki struktur sebagai berikut:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Manajemen Risiko	Ketua	✓
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti/Anggota tetap	✓
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	✓
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	✓
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Direktur Utama Bank Raya	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Life	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Finance	Anggota Tetap	-

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama BRI Insurance	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas	Anggota Tetap	-
Direktur Utama BRI Ventura	Anggota Tetap	-
Direktur Utama Pegadaian	Anggota Tetap	-
Direktur Utama PNM	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan Bank Raya	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan BRI Life	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan BRI Finance	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan BRI Insurance	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan BRI Danareksa Sekuritas	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan BRI Ventura	Anggota Tetap	-
Direktur Kepatuhan PNM	Anggota Tetap	-
Direktur/SEVP yang membawahkan Fungsi Kepatuhan di Pegadaian	Anggota Tetap	-
Division Head, Market, Portfolio & Enterprise Risk	Sekretaris	-
Pemimpin Unit Kerja Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	-

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Risk Management Committee Tahun 2021

KEBIJAKAN RAPAT

- Rapat Komite Bidang Risk Management diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali per Triwulan. Rapat Komite Bidang Risk Management Terintegrasi diselenggarakan berkala sekurangnya setiap 6 (enam) bulan.
- Penyelenggaraan rapat Komite Bidang Risk Management dan Bidang *Risk Management* Terintegrasi dapat dilakukan di luar jadwal berkala apabila terdapat *issue* penting dan mendesak, antara lain:
 - Terjadi perubahan pada Profil Risiko BRI secara signifikan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis, faktor makro ekonomi, pelanggaran limit risiko internal, atau faktor lain.
 - Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan tanggapan atau sikap cepat dan segera dari organisasi.
 - Terjadi kondisi *force majeure* yang disebabkan faktor alam, faktor manusia, gangguan eksternal, faktor disruptif lain.
 - Terdapat faktor yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat Komite Bidang Risk Management dan Bidang Risk Management Terintegrasi.
- Rapat Komite Bidang Risk Management dan Bidang Risk Management Terintegrasi membahas, mengkaji ulang dan menyetujui usulan dan rekomendasi yang disampaikan di dalam rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Usulan dan rekomendasi dimaksud diantaranya mencakup kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko.
- Rapat Komite Bidang Risk Management dan Bidang Risk Management Terintegrasi dipimpin oleh Direktur Manajemen

Risiko. Dalam hal Direktur Manajemen Risiko berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Surat Keputusan ini.

- Rapat Komite Bidang Risk Management dan Bidang Risk Management Terintegrasi dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite.
- Hasil keputusan pada Rapat Komite Bidang Risk Management dan Bidang Risk Management Terintegrasi dapat dianulir oleh Direksi melalui Rapat Direksi.
- Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Bidang Risk Management dan Bidang Risk Management Terintegrasi menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite Bidang Risk Management dan Bidang Risk Management Terintegrasi.
- Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Keputusan rapat Komite Bidang ESG diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite Bidang ESG dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS RISK MANAGEMENT COMMITTEE TAHUN 2021

Pada tahun 2021, *Risk Management Committee* (RMC) telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda
1	10 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Pemaparan <i>Self Assessment</i> Tingkat Kesehatan Bank Semester II 2020 – Analisa portfolio Surat Berharga dan <i>Stress Test Market & Liquidity</i> – Pemaparan kecukupan permodalan, indikator <i>recovery plan</i> dan <i>stress test bank wide</i> – Pemaparan <i>Overview Loan Quality</i> – <i>Monitoring Restructured COVID-19 Loan</i> – <i>Loan Quality projection 2021</i> – <i>Highlight</i> profil risiko operasional yang menjadi <i>concern</i> – <i>Update</i> implementasi RRM team – <i>Summary</i> pekerja BRI Group terdampak COVID-19
2	29 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Pemaparan <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Triwulan I 2021 – Pemaparan kecukupan permodalan, indikator <i>recovery plan</i> dan <i>stress test bank wide</i> – Pemaparan indikator risiko operasional yang perlu menjadi <i>concern</i> – <i>Market & Liquidity stress testing</i> – Analisis FVOCI dan risiko IRRBB – <i>Concern</i> terhadap Diskontinu London Interbank Offered Rate (LIBOR) – Pemaparan <i>Overview Loan Quality</i> – <i>Monitoring Restructured COVID-19 Loan</i> – Pemaparan Klasifikasi Risiko Restru Covid
3	21 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Pemaparan <i>Self Assessment</i> Tingkat Kesehatan Bank Semester I 2021 – Pemaparan kecukupan permodalan, indikator <i>recovery plan</i> dan <i>stress test bank wide</i> – Usulan perubahan metodologi penilaian profil risiko – <i>Update</i> implementasi sustainable finance dan keanggotaan komite ESG – Pemaparan <i>Overview Loan Quality</i> – <i>Monitoring Restructured COVID-19 Loan</i> – Pemaparan dampak PPKM Darurat terhadap Portfolio Restru Covid & Non Covid – <i>Market & Liquidity stress testing</i> – <i>Update progress</i> Transisi LIBOR dan risiko IRRBB – Analisis kenaikan minimum GWM Primer – Analisis risiko operasional akibat <i>Human error</i> dan <i>fraud</i> – <i>Update</i> penanganan pekerja terdampak COVID-19
4	21 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Pemaparan <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Triwulan III 2021 – Pemaparan kecukupan permodalan, indikator <i>recovery plan</i> dan <i>stress test bank wide</i> – Pemaparan dan persetujuan atas hasil pengkinian <i>recovery plan</i> – Pemaparan <i>Overview Loan Quality</i> – <i>Monitoring Restructured COVID-19 Loan</i> – Pemaparan <i>Overview</i> segmen <i>loan quality</i> dan <i>write off & recovery</i> – Pemaparan profil restru covid yang default dan proyeksi kualitas portfolio akhir tahun. – Proyeksi pergerakan <i>yield</i> dan risiko IRRBB – <i>Update progress</i> transisi Diskontinuitas LIBOR – Analisa Deposito <i>Wholesale</i> dan Konsentrasi Deposita Inti – Uji coba <i>contingency funding plan</i>

Pada tahun 2021, *Risk Management Committee* (RMC) Terintegrasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda
1	10 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Pemaparan <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi Semester II 2020 – Analisa Kecukupan Likuiditas Konglomerasi Keuangan – Pemaparan kecukupan permodalan Terintegrasi – Pemaparan <i>Stress Test</i> Terintegrasi – Pemaparan <i>Key Risk Issue</i> masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.
2	29 April 2021	<ul style="list-style-type: none"> – Pemaparan <i>Self Assessment</i> Profil Risiko Terintegrasi Semester II 2020 – Analisa Kecukupan Likuiditas Konglomerasi Keuangan – Pemaparan kecukupan permodalan Terintegrasi – Pemaparan <i>Stress Test</i> Terintegrasi – Persetujuan <i>Risk Appetite Statement</i> masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan. – Pemaparan <i>Key Risk Issue</i> masing-masing anggota Konglomerasi Keuangan.

Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Environmental, Social & Governance (ESG) Committee adalah Komite yang bertanggungjawab atas penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi strategi, kebijakan, program/inisiatif ESG.

Tugas dan Tanggung Jawab Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

1. Melakukan *review* dan evaluasi terkait implementasi kebijakan atau tata kelola (*governance*) parameter inisiatif ESG dan inisiatif TJSL yang telah disusun oleh Unit Kerja terkait yang kemudian diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
2. Menetapkan dan merekomendasikan program kerja (baik eksisting maupun baru) untuk dikategorikan sebagai inisiatif ESG dan inisiatif TJSL sesuai dengan parameter yang ada kepada ESG Committee maupun persetujuan sirkuler.
3. Melakukan *review* dan evaluasi terkait implementasi program kerja yang masuk ke dalam parameter inisiatif ESG dan inisiatif TJSL serta pelaporan data dan informasi terkait ESG.
4. Melakukan *review* atas laporan ESG Rating, *Investor concerns* atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG dan TJSL BRI.
5. Merekomendasikan isu material yang didapat dari hasil *review* atas laporan ESG Rating, *Investor concerns* atau Pihak Ketiga lainnya terhadap kinerja dan implementasi ESG dan TJSL BRI.
6. Menetapkan rencana tindak lanjut atas hasil *review* dan evaluasi untuk kemudian dapat diusulkan menjadi program kerja baru yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait.
7. Memberikan informasi terkini kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai seluruh isu yang terus berkembang terkait ESG dan TJSL, termasuk peraturan perundang-undangan, inisiatif global, praktek bisnis, serta informasi penting lain terkait ESG dan TJSL.

Struktur Keanggotaan Environmental, Social & Governance (ESG) Committee

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Desk Head, Environmental, Social & Governance atau Unit Kerja Pengelola ESG	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	✓
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	✓
SEVP Change Management & Transformation Office	Anggota Tetap	✓
Seluruh Direktur atau SEVP Bidang Terkait	Anggota Tidak Tetap	✓
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Environmental, Social & Governance (ESG) Committee Tahun 2021

KEBIJAKAN RAPAT

1. Tim Penunjang Komite mempersiapkan kajian dan analisis sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Rapat Komite Bidang ESG diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
2. Penyelenggaraan rapat Komite Bidang ESG dapat dilakukan di luar jadwal berkala apabila terdapat issue penting dan mendesak, antara lain:
 - a. Terjadi perubahan ESG Rating BRI secara signifikan yang dapat disebabkan oleh perubahan kondisi bisnis, faktor makro ekonomi, pelanggaran terhadap kepatuhan dan kebijakan/governance ESG, atau faktor penyebab lainnya.
 - b. Terjadi perubahan Regulasi terkait ESG yang membutuhkan tanggapan atau sikap cepat dan segera dari Perusahaan.
 - c. Terdapat faktor yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat Komite Bidang ESG.
3. Rapat Komite Bidang ESG dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Surat Keputusan ini.
4. Rapat Komite Bidang ESG dapat diselenggarakan apabila dihadiri sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite dan dihadiri Ketua Komite.

Keputusan rapat Komite Bidang ESG diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite Bidang ESG dianggap sah dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) COMMITTEE TAHUN 2021

Selama tahun 2021, ESG Committee telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali. Adapun pembahasan rapat ESG Committee adalah sebagai berikut.

Tanggal	Agenda
30 Desember 2021	Usulan penyesuaian SK ESG Committee BRI Usulan aspirasi ESG Tahun 2022-2024 Usulan rencana penetapan KPI ESG untuk unit kerja Usulan penggunaan alokasi dana TJSL untuk program berbasis lingkungan sebagai strategi Carbon Offset BRI Update implementasi ESG BRI Update mengenai TJSL

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite operasional yang membantu Direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan kredit untuk jumlah dan atau jenis kredit tertentu yang ditetapkan oleh Direksi.

Piagam Komite Kredit

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Kredit mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 851-DIR/KRD/12/2020 tentang Komite Kredit yang mengatur terkait Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

1. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk penetapan/ perubahan struktur kredit.
2. Melaksanakan tugas dalam pemberian putusan kredit berdasarkan kemahiran professional secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.
3. Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan kredit yang hanya bersifat formalitas atau diluar asas-asas perkreditan yang sehat.
4. Membubuhkan tanda tangan pada formulir Putusan Kredit (atau media lain yang ditentukan oleh Direksi dan berfungsi sebagai putusan kredit) sebagai bukti pemberian putusan kredit serta sebagai wujud tanggung jawab Komite Kredit.

Struktur Keanggotaan Komite Kredit

1. Sesuai dengan jenis kewenangan yang dimilikinya, Komite Kredit terbagi menjadi:
 - a. Komite Kredit Non-Restrukturisasi, yaitu komite kredit yang memiliki kewenangan untuk memutus prakarsa kredit baru, perpanjangan, suplesi, perubahan syarat, dan putusan kredit lainnya bukan dalam rangka restukturisasi; dan
 - b. Komite Kredit Restrukturisasi, yaitu komite kredit yang memiliki kewenangan untuk memutus prakarsa kredit dalam rangka restrukturisasi *performing loan* maupun *non-performing loan*, penyelesaian kredit, penghapusbukuan kredit, hapus tagih.
2. Masing-masing komite kredit terdiri dari jajaran fungsi Risk dan fungsi Bisnis.
3. Struktur dan anggota komite kredit sesuai dengan SE PDWK (Putusan Delegasi Wewenang Kredit) yang berlaku.
4. Masing-masing komite kredit tersebut berkedudukan di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, dan Unit Kerja Luar Negei (UKLN).

Adapun struktur keanggota Komite Kredit adalah sebagai berikut.

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Fungsi	Hak Suara
Direktur Utama	Anggota Tetap	Risk	✓
Wakil Direktur Utama	Anggota Tetap	Risk	✓
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	Risk	✓
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	Risk	✓
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	Anggota Tetap	Risk	✓
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	Risk	✓
SEVP Change Management & Transformation Office	Anggota Tetap	Risk	✓
SEVP Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan	Anggota Tetap	Risk	✓
SEVP Operations	Anggota Tetap	Risk	✓
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	Anggota Tetap	Bisnis	✓
Direktur Bisnis Mikro	Anggota Tetap	Bisnis	✓
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	Anggota Tetap	Bisnis	✓
Direktur Bisnis Konsumer	Anggota Tetap	Bisnis	✓
Direktur Jaringan dan Layanan	Anggota Tetap	Bisnis	✓
SEVP Corporate Business	Anggota Tetap	Bisnis	✓
SEVP Treasury & Global Services Business	Anggota Tetap	Bisnis	✓

Profil Anggota Komite Kredit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Kredit

Seluruh anggota Komite Kredit tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Kredit Tahun 2021

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2021

Kebijakan Rapat

1. Rapat Komite Kredit sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya anggota Komite Kredit sesuai susunan Komite Kredit pada ketentuan PDWK, baik dari jumlah dan komposisi dari jajaran fungsi Risk maupun fungsi Bisnis serta anggota Komite Kredit yang *mandatory* wajib hadir.
2. Rapat Komite Kredit dapat dilaksanakan secara fisik, maupun dengan cara konferensi melalui sarana media elektronik yang disepakati oleh setiap anggota Komite Kredit yang ikut serta.
3. Sekretaris Komite Kredit bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan Rapat Komite Kredit (RKK) seperti waktu dan tempat pelaksanaan termasuk mendokumentasikan/ menyusun Berita Acara RKK dan penyediaan Risalah RKK.

Realisasi Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Kredit telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 46 (empat puluh enam) kali dengan 200 (dua ratus) jumlah putusan, dengan rincian sebagai berikut.

Bulan	Tanggal	Pelaksanaan RKK (kali)	Jumlah Putusan	Agenda	Kuorum Kehadiran & Putusan
Januari	6, 27	2	5	Pembahasan dan pemberian putusan kredit segmen korporasi	Kuorum
Februari	4, 10, 17, 24	4	21		Kuorum
Maret	10, 17, 24	3	14		Kuorum
April	7, 14, 21, 28	4	24		Kuorum
Mei	5, 19	2	9		Kuorum
Juni	2, 9, 16, 17, 23, 25, 30	7	39		Kuorum
Juli	7, 14, 21, 28	4	17		Kuorum
Agustus	5, 10, 18, 25	4	10		Kuorum
September	1, 10, 15, 22, 29	5	16		Kuorum
Oktober	12, 19, 28	3	11		Kuorum
November	3, 17, 25, 30	4	25		Kuorum
Desember	6, 13, 15, 22	4	9		Kuorum
Total		46	200		

Komite Capital & Investment

Komite Capital & Investasi merupakan Komite yang bertanggung jawab terhadap kegiatan aksi korporasi dan pengelolaan perusahaan anak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Capital & Investment

1. Melakukan *review* atas langkah korporasi yang diusulkan oleh Tim Penunjang Komite.
2. Menetapkan dan merekomendasikan langkah korporasi untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama baik melalui rapat Direksi atau persetujuan sirkuler.
3. Menetapkan rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Perusahaan Anak, termasuk *key performance indicator* dan rencana deviden Perusahaan Anak.
4. Melakukan *review* kinerja dan menetapkan langkah-langkah perbaikan kinerja bersama Direksi Perusahaan Anak.
5. Mengevaluasi dan merekomendasikan langkah korporasi Perusahaan Anak BRI untuk selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direktur Utama/Wakil Direktur Utama baik melalui rapat Direksi maupun secara sirkuler.
6. Menetapkan putusan apabila terjadi *deadlock* inisiatif sinergi Perusahaan Anak BRI yang bersifat strategis.

Struktur Keanggotaan Komite Capital & Investment

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Keuangan	Ketua	V
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	V
EVP, Subsidiary Management	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	-
1. Direktur atau SEVP terkait 2. Direktur atau SEVP Pembina Bisnis Perusahaan Anak	Anggota tidak Tetap	V
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Profil Anggota Komite Capital & Investment

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Capital & Investment

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Capital & Investment Tahun 2021

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Capital & Investment Tahun 2021

Kebijakan Rapat

1. Tim Penunjang Komite mempersiapkan kajian dan analisa sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
2. Kajian dipresentasikan pada rapat Komite oleh Anggota Komite dan atau Anggota Tim Penunjang dan/atau perwakilan Perusahaan Anak sesuai ruang lingkupnya masing-masing.
3. Komite menyelenggarakan rapat minimal 1 (satu) kali per Triwulan untuk membahas usulan, kajian dan analisa yang berasal dari Tim Penunjang Komite.

4. Rapat dinyatakan memenuhi kuorum bila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti. Rapat hanya dapat dilaksanakan bila kuorum tercapai.
5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua. Apabila Ketua berhalangan hadir, maka Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti
6. Ketua Komite memimpin Rapat Komite Capital & Investment dan mempunyai hak suara.
7. Sekretaris Komite bertanggung jawab mengoordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Capital & Investment, berupa antara lain:
 - a. Mempersiapkan agenda, jadwal dan tempat rapat.
 - b. Menyusun Risalah Rapat.
 - c. memantau implementasi putusan rapat
8. Rekomendasi dan/atau putusan Komite ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh Ketua dan seluruh anggota Komite. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, maka rekomendasi dan/atau putusan Rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara + 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
9. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Realisasi Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Capital & Investment Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Capital & Investment telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan rincian sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda
1	26 Maret 2021	Pembahasan Tantiem Perusahaan Anak BRI
2	22 April 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 1 PT BRI Asuransi Indonesia
3	22 April 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 1 PT BRI Ventura Investama
4	23 April 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 1 PT BRI Multifinance Indonesia
5	23 April 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 1 PT Asuransi BRI Life
6	26 April 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 1 PT BRI Agroniaga Tbk.
7	5 Mei 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 1 PT BRI Danareksa Sekuritas
8	4 Agustus 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 2 PT BRI Multifinance Indonesia
9	4 Agustus 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 2 PT BRI Asuransi Indonesia

No	Tanggal	Agenda
10	4 Agustus 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 2 PT BRI Danareksa Sekuritas
11	4 Agustus 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 2 PT BRI Ventura Investama
12	19 Agustus 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 2 PT BRI Agroniaga Tbk.
13	19 Agustus 2021	Pembahasan Kinerja Triwulan 2 PT Asuransi BRI Life
14	25 Mei 2021	Pembahasan RKAP dan RBB PT BRI Danareksa Sekuritas
15	25 Mei 2021	Pembahasan RKAP dan RBB PT BRI Ventura Investama
16	25 Mei 2021	Pembahasan RKAP dan RBB PT BRI Multifinance Indonesia
17	3 Juni 2021	Pembahasan RKAP dan RBB PT BRI Agroniaga Tbk.
18	3 Juni 2021	Pembahasan RKAP dan RBB PT BRI Asuransi Indonesia
19	3 Juni 2021	Pembahasan RKAP dan RBB PT Asuransi BRI Life
20	2 November 2021	Pembahasan Rencana Bisnis PT BRI Ventura Investama
21	2 November 2021	Pembahasan Rencana Bisnis PT BRI Asuransi Indonesia
22	3 November 2021	Pembahasan Rencana Bisnis PT Bank Raya Indonesia Tbk.
23	9 November 2021	Pembahasan Rencana Bisnis PT Asuransi BRI Life
24	9 November 2021	Pembahasan Rencana Bisnis PT Danareksa Sekuritas
25	22 November 2021	Pembahasan Rencana Bisnis PT BRI Multifinance Indonesia

Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan adalah komite di Kantor Pusat yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan BRI dan memberikan saran perbaikan terhadap kebijakan perkreditan.

Piagam Komite Kebijakan Perkreditan

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Kebijakan Perkreditan mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 657-DIR/PPM/10/2021 tentang Komite Kebijakan Perkreditan (KPP) yang mengatur terkait Organisasi, Utusan dan Kehadiran, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) khususnya perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan sebagaimana diatur di dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB) OJK.
2. Mengawasi penerapan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan penuh kesinambungan serta merumuskan alternatif dan solusi penerapan bila terdapat kendala.
3. Melakukan *review* berkala Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) BRI minimal 3 (tiga) tahun sekali.
4. Melakukan evaluasi terhadap:
 - a. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau penyediaan dana.
 - b. Kebenaran menjalankan proses pemberian kredit atau penyediaan dana, perkembangan dan kualitas kredit dari kredit yang diberikan kepada Pihak yang Terkait dengan Bank dan Debitur besar tertentu.
 - c. Kebenaran pelaksanaan ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
 - d. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
 - e. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
 - f. Kecukupan penyisihan cadangan kerugian karena penurunan nilai kredit (CKPN) dan cadangan penghapusbukuan.
 - g. Debitur besar tertentu dan kredit dalam daftar Kredit Dalam Perhatian Khusus.
5. Melakukan kajian menilai efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan.
6. Menyampaikan laporan berkala minimal 1 (satu) tahun sekali dan memberikan masukan perbaikan kepada Direksi dengan tembusan/tindakan kepada Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
 - b. Hasil evaluasi hal yang berhubungan dengan Pasal 3 ayat 1.d.
7. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.

Struktur Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Division Head, Product Risk Policy atau Unit Kerja yang Mengelola Fungsi Kebijakan Kredit)	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	✓
Direktur atau SEVP sesuai Bidang/Pembina terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tidak Tetap	✓
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
SEVP Satuan Kerja Audit Internal	Anggota Tetap	-
Division Head di bawah Direktur Manajemen Risiko terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tidak Tetap	-
Division Head/Desk Head lainnya, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tidak Tetap	-

Profil Anggota Komite Kebijakan Perkreditan

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Kebijakan Perkreditan

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2021

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2021

Kebijakan Rapat

- Perubahan atau revisi KPB wajib dibahas terlebih dahulu di dalam rapat. KKP wajib melakukan rapat pembahasan final Draft perubahan atau revisi KPB sebelum diteruskan untuk mendapat putusan Direksi.
- Rapat KKP dilakukan dalam rangka pertemuan mengusulkan penyusunan, perubahan, revisi KPB maupun terkait isu

penting dan mendesak yang memerlukan tanggapan cepat dan segera dari Perusahaan.

- Apabila terdapat masalah mendesak untuk dibahas di dalam KKP maka Unit Kerja terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris KKP untuk melakukan Rapat KKP.
- Rapat KKP dipimpin oleh Direktur Utama sebagai Ketua KKP. Dalam hal Ketua KKP berhalangan, rapat dipimpin oleh Ketua Pengganti sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Surat Keputusan ini.
- Rapat KKP kuorum bila dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti.
- Terhadap setiap perubahan isi KPB BRI yang tidak bersifat materiil, agar dapat dilakukan secara sirkuler ke seluruh Direktur dan untuk selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada seluruh anggota KKP.

Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah bila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang hadir ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite.

Realisasi Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Perkreditan Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1	3 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> Review PDWK 2020 Perubahan PDWK Mekanisme <i>Override</i> Prosedur Konsultasi Direksi Kepada Komisaris Update ECL Januari Maret 2021
2	11 Oktober 2021	<ol style="list-style-type: none"> Usulan dan <i>update</i> Perubahan Kebijakan Perkreditan 2021 <ol style="list-style-type: none"> Perubahan Kebijakan PDWK Perubahan Kebijakan BMPK <i>Update</i> Kebijakan Restrukturisasi Kredit, Lelang Agunan, Pelayanan Anggota Grup Usaha, dan Penandatanganan Akad Kredit saat pemberlakuan kebijakan PPKM Review Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) Mekanisme <i>Override</i>
3	6 Desember 2021	<i>Switching</i> Anggaran PH

Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan Komite di Kantor Pusat yang bertanggung jawab memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi tentang perencanaan, tata kelola, pengembangan dan operasional teknologi informasi.

Piagam Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengarah Teknologi Informasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 728-DIR/CDS/10/2020 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (Information Technology Steering Committee) dan Komite Tata Kelola Data yang mengatur terkait Tujuan, Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi rencana strategik teknologi informasi jangka panjang yang sejalan dengan *Corporate Plan* dan Rencana Bisnis Bank yang dituangkan di dalam IT SP BRI.
2. Merumuskan kebijakan, standar, prosedur teknologi informasi yang utama.
3. Memastikan kesesuaian antara proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan IT SP BRI.
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pekerjaan proyek-proyek teknologi informasi agar sesuai dengan rencana proyek yang disepakati (*Project Charter*).
5. Melakukan evaluasi kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen untuk operasional dan bisnis bank.
6. Memantau efektivitas pengelolaan risiko atas investasi di bidang teknologi informasi agar investasi yang ditanamkan mampu berkontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan bisnis BRI.
7. Memantau performa sistem teknologi informasi dan memberlkan rekomendasi upaya peningkatannya.
8. Memberi rekomendasi upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh Unit Kerja pengguna teknologi informasi dan penyelenggara teknologi informasi secara efektif, efisien, tepat waktu.
9. Memberi rekomendasi dalam rangka memastikan keeukupan atas alokasi *resources* yang dimiliki BRI.

Struktur Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Digital Teknologi Informasi & Operasi	Ketua	✓
Direktur Human Capital	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	✓
VP, IT Strategy & Governance	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	-
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jaringan & Layanan 2. Direktur Manajemen Risiko 3. SEVP, Manajemen Aktiva Tetap & Pengadaan 4. EVP, IT Strategy & Governance 5. EVP, Application Management & Operation 6. EVP, IT Infrastructure & Operation 7. EVP, Digital Banking Development 8. EVP, Enterprise Data Management 9. EVP, Distribution Network 10. EVP, Information Security 	Anggota Tetap	✓
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Keuangan 2. Direktur atau SEVP bidang pengusul 	Anggota tidak tetap	✓
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Profil Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Pengarah Teknologi Informasi

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2021

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2021

KEBIJAKAN RAPAT

- Komite Pengarah teknologi informasi dan Komite Tata Kelola Data mengadakan rapat berkala sedikitnya 2 (dua) kali per tahun.
- Pelaksanaan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data sekurangnya dihadiri oleh:
 - Ketua Komite
 - Sekretaris Komite
 - 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite yang diundang dan terkait dengan agenda pembahasan Rapat Komite.
- Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti
- Ketua Komite memimpin Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data serta mempunyai hak suara
- Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - Mempersiapkan dan mengundang rapat.
 - Menyusun dan mempresentasikan materi rapat.
 - Menyusun dan mendistribusi Risalah Rapat kepada Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi.
 - Memonitor putusan Komite Pengarah yang ditindaklanjuti di Unit Kerja yang terkait.
- Keputusan rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
- Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2021

Selama tahun 2021, Komite Kredit telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1	14 Januari 2021	Deployment Project BRINETs Tactical Enhancement (BTE) Release 3
2	15 Januari 2021	Modernisasi Credit Card System
3	18 Februari 2021	Deployment Project BRINETs Tactical Enhancement (BTE) Release 4
4	24 Maret 2021	Deployment Project BRINETs Tactical Enhancement (BTE) Release 4.5
5	21 April 2021	Deployment Project BRINETs Tactical Enhancement (BTE) Release 5
6	10 Juni 2021	<ol style="list-style-type: none"> Update Strategic Initiatives Direktorat DTI untuk Mendukung Brivolution 2.0. Strategy IT dan Digital Talent Update Progress Brifirst (Highlight pada Source System Enhancement) Persetujuan Technical Deployment Project BRINETs Tactical Enhancement (BTE) R 4.5
7	9 Juli 2021	Deployment Project BRINETs Tactical Enhancement (BTE) R 5
8	12 Agustus 2021	Deployment Project BRINETs Tactical Enhancement (BTE) R6
9	3 September 2021	Deployment Project BRINETs Tactical Enhancement (BTE) R6.5
10	9 September 2021	Deployment Project BRINETs Tactical Enhancement (BTE) R6.5
11	15 November 2021	Deployment Project BRIFIRST Modul FAM

Komite Tata Kelola Data

Komite Tata Kelola Data adalah suatu forum yang memberikan arahan terkait data *governance*, serta memberikan putusan terkait dengan *leading issue* pada data yang tidak dapat diselesaikan di level Data Owners dan Data Stewards maupun di level Data Management Office.

Piagam Komite Tata Kelola Data

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola Data mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 728-DIR/CDS/10/2020 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) dan Komite Tata Kelola Data yang mengatur terkait Tujuan, Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Data

Komite Tata Kelola Data memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- Memastikan kebutuhan data seluruh *stakeholder* BRI dapat dipenuhi.
- Memastikan proteksi terhadap data sebagai aset strategik Perusahaan.
- Mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan standar data untuk menegakkan kerangka kerja proses data *governance* yang baik, dan kualitas data secara *enterprise*.
- Memastikan aspek privasi dan kerahasiaan data Nasabah dan Perusahaan terlindungi.
- Memastikan tidak adanya akses data yang ilegal, manipulasi data serta penggunaan data dan informasi yang tidak sesuai.
- Memastikan data agar dapat digunakan secara efektif serta mendatangkan *value* bagi Perusahaan.
- Mengarahkan dan memutuskan solusi dari masalah-masalah yang dieskalasi ke Komite.

Struktur Keanggotaan Komite Tata Kelola Data

Organisasi Komite Tata Kelola Data terdiri dari:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Digital Teknologi Informasi & Operasi	Ketua	✓
Direktur Human Capital	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	✓
VP, Enterprise Data Management	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	-
1. Direktur Keuangan 2. Direktur Jaringan & Layanan 3. Direktur Konsumer 4. EVP, Enterprise Data Management	Anggota Tetap	✓
Direksi atau SEVP Bidang terkait	Anggota tidak tetap	✓
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-

Profil Anggota Komite Tata Kelola Data

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Tata Kelola Data

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Tata Kelola Data Tahun 2021

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Data Tahun 2021

KEBIJAKAN RAPAT

- Komite Pengarah teknologi informasi dan Komite Tata Kelola Data mengadakan rapat berkala sedikitnya 2 (dua) kali per tahun.
- Pelaksanaan rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data sekurangnya dihadiri oleh:
 - Ketua Komite
 - Sekretaris Komite
 - 2/3 (dua per tiga) dari Anggota Komite yang diundang dan terkait dengan agenda pembahasan Rapat Komite.

- Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti
- Ketua Komite memimpin Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data serta mempunyai hak suara
- Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komite Tata Kelola Data menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite dengan tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - Mempersiapkan dan mengundang rapat.
 - Menyusun dan mempresentasikan materi rapat.
 - Menyusun dan mendistribusi Risalah Rapat kepada Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi.
 - Memonitor putusan Komite Pengarah yang ditindaklanjuti di Uker Kerja yang terkait.
- Keputusan rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan rapat Komite dianggap sah apabila disetujui oleh 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite yang memiliki hak suara ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
- Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

REALISASI DAN RAPAT PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA DATA TAHUN 2021

Selama tahun 2021, Komite Tata Kelola Data telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut

No.	Tanggal	Agenda
1.	05 Maret 2021	<i>Kick off Meeting Project Pra Implementasi Data Privacy Management.</i>
2.	8 Juni 2021	<i>Project Sponsor Meeting Pekerjaan Pra Implementasi Data Privacy Management.</i>
3.	18 Agustus 2021	<i>Project Sponsor Meeting Ke II Pekerjaan Pra Implementasi Data Privacy Management.</i>
4.	2 September 2021	<i>Closing Project Pra Implementasi Data Privacy Management</i>

Komite Human Capital

Komite Human Capital merupakan Komite di Kantor Pusat yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis dan operasional di bidang Human Capital dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi di dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan human capital serta meningkatkan kualitas pengelolaan human capital berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.

Organisasi Komite Human Capital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terdiri dari:

1. Bidang Kebijakan *Human Capital*
2. Bidang *Human Capital Planning*
3. Bidang *Talent*
4. Bidang *Performance Management*
5. Bidang Etik
6. Bidang Evaluasi Jabatan

Piagam Komite Human Capital

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Human Capital mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 488-DIR/SDC/08/2021 tentang Komite Human Capital yang mengatur terkait Tujuan, Organisasi, Ruang Lingkup, dan Tata Kerja.

Profil Anggota Komite Human Capital

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Human Capital

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Human Capital Tahun 2021

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

1. Rapat Komite Human Capital dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka Rapat Komite Human Capital dipimpin oleh Ketua Komite Pengganti.
2. Seluruh Anggota Komite Human Capital memiliki tugas dan tanggungjawab yang sarna.

3. Penyelenggaraan rapat Komite Human Capital menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite yaitu yang antara lain:
 - * Mempersiapkan agenda rapat;
 - * Mempresentasikan materi rapat;
 - * Menyusun Risalah Rapat;
 - * Menindaklanjuti dan/atau meneruskan hasil rapat kepada Unit Kerja yang terkait sesuai kebutuhan.
4. Apabila terdapat issue penting dan mendesak yang membutuhkan jalan keluar dan/atau sikap dari Komite Human Capital maka Unit Kerja yang terkait dapat mengusulkan kepada Sekretaris Komite melakukan Rapat Komite Human Capital.
5. Rapat memenuhi kuorum bila dihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota Komite dan wajib dihadiri oleh Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti.
6. Keputusan Komite Human Capital ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh Anggota yang hadir. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Komite Human Capital dinyatakan sah dan mengikat apabila 50% (lima puluh persen) dari jumlah Anggota Komite ditambah 1 (satu) orang Anggota Komite memberikan suara setuju dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Pengurus atau Anggota Komite terdapat Direksi maka Ketua Komite atau Ketua Komite Pengganti dan Direktur Human Capital memberikan suara setuju.
 - b. Dalam hal Pengurus atau Anggota Komite tidak terdapat Direksi maka Ketua Komite memberikan suara setuju
7. Persetujuan Komite dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite yang hadir.
8. Dalam hal rapat Komite Human Capital tidak dapat diselenggarakan maka Komite Human Capital dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.
9. Apabila diperlukan maka Komite Human Capital dapat menghadirkan Pihak Lain yang terkait sebagai narasumber.
10. Kehadiran Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama menambah Anggota Tetap dengan hak suara.

Komite Human Capital Bidang Kebijakan Human Capital Tugas dan Tanggung Jawab Komite Human Capital Bidang Kebijakan Human Capital

1. Menetapkan prioritas strategi pengembangan, arah kebijakan dan peningkatan kualitas *human capital* BRI dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Corporate Plan* BRI.
2. Menetapkan kebijakan strategis, manajemen karier dan *corporate culture* dibidang human capital.
3. Menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak.

Struktur Keanggotaan Komite Human Capital Bidang Kebijakan Human Capital

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	✓
Division Head, Human Capital yang membidangi Kebijakan	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	✓
Direktur Human Capital	Anggota Tetap	✓
Direksi atau SEVP Bidang terkait	Anggota tidak tetap	✓

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Human Capital Bidang Kebijakan Human Capital Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Human Capital Bidang Kebijakan Human Capital telah melaksanakan tugasnya dengan membahas terkait peningkatan kualitas *human capital* BRI, kebijakan strategis, manajemen karier dan *corporate culture*.

Komite Human Capital Bidang Human Capital Planning

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Human Capital Bidang Human Capital Planning

Menetapkan perencanaan jumlah Formasi Jabatan dan strategi pemenuhan Formasi Jabatan.

Struktur Keanggotaan Komite Human Capital Bidang Human Capital Planning

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap anggota tetap)	✓
Division Head, Human Capital yang membidangi Kebijakan	Sekretaris (Merangkap anggota tetap)	✓
Direktur Human Capital	Anggota Tetap dengan hak suara	✓
1. Direktur Human Capital 2. Direktur Keuangan 3. Direktur Jaringan & Layanan 4. Division Head yang membidangi pengelolaan jaringan kerja BRI	Anggota tetap dengan hak suara	✓

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Human Capital Bidang Human Capital Planning Tahun 2021

Selama tahun 2021, Komite Human Capital Bidang Human Capital Planning telah melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1	18 Januari 2021	<i>Steering Committee Strategic Workforce Planning</i>
2	29 Maret 2021	<i>Strategic Workforce Planning</i>
3	30 Agustus 2021	<i>Follow-up Implementasi Strategic Workforce Planning</i>

Komite Human Capital Bidang Bidang Talent

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Human Capital Bidang Talent

1. Penetapan mutasi pekerja, termasuk penetapan kepengurusan Perusahaan Anak dan Terafiliasi.
2. Penetapan *Talent Cluster*, termasuk identifikasi dan penetapan *top talent*.
3. Penetapan *Succession Plan* untuk seluruh jabatan.
4. Penetapan *Talent Pool* berdasarkan bidang keahlian Pekerja.
5. Melakukan *Talent Review*.

Struktur Keanggotaan Komite Human Capital Bidang TalentBidang Talent 1 (untuk Pekerja level Jabatan BOD-1 dengan *Corporate Title Executive Vice President* dan *Senior Vice President*)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Division Head Human Capital Business Partner	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Seluruh Direktur dan SEVP	Anggota Tetap	✓

Bidang Talent 2 (untuk Pekerja level Jabatan BOD-2 dengan *Corporate Title Vice President* dan Pemimpin Cabang Kelas 1)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Wakil Direktur Utama	Ketua	✓
Direktur Human Capital	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Division Head Human Capital Business Partner	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur atau SEVP Bidang/Pembina terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tetap	✓

Bidang Talent 3 (untuk Pekerja level Jabatan BOD-3 dengan *Corporate Title Assistant Vice President* dan *Senior Manager* di luar Pemimpin Cabang Kelas 1)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Human Capital	Ketua	✓
Division Head Human Capital Business Partner	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Direktur atau SEVP Bidang/Pembina terkait, menyesuaikan dengan agenda komite	Anggota Tetap	✓

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Human Capital Bidang Talent Tahun 2021

Bidang Talent 1

No.	Tanggal	Agenda
1	11 Januari 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1
2	9 Februari 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1
3	26 Februari 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1 dan Penetapan <i>Brilian Society Member Level BOD-1</i>
4	22 Maret 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1
5	3 Mei 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1
6	7 Mei 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1
7	12 Juli 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1
8	16 Juli 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1
9	30 Agustus 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1
10	28 Oktober 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1

No.	Tanggal	Agenda
11	15 Desember 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1
12	20 Desember 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-1

Bidang Talent 2

No.	Tanggal	Agenda
1	07 Juli 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2
2	29 Juli 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2
3	05 Agustus 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2
4	27 Agustus 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2
5	14 September 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2
6	04 Oktober 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2
7	25 Oktober 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2

No.	Tanggal	Agenda
8	25 November 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2
9	07 Desember 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2
10	17 Desember 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2
11	22 Desember 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-2

Bidang Talent 3

No.	Tanggal	Agenda
1	04 Januari 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
2	12 Januari 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
3	18 Januari 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
4	25 Januari 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
5	01 Februari 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
6	12 Februari 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
7	19 Februari 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
8	03 Maret 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
9	12 Maret 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
10	02 April 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
11	21 April 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
12	29 April 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
13	06 Mei 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
14	18 Mei 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3

No.	Tanggal	Agenda
15	24 Mei 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
16	31 Mei 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
17	10 Juni 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
18	17 Juni 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
19	28 Juni 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
20	06 Juli 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
21	14 Juli 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
22	30 Juli 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
23	05 Agustus 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
24	16 Agustus 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
25	30 Agustus 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
26	03 September 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
27	17 September 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
28	30 September 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
29	12 Oktober 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
30	18 Oktober 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
31	25 Oktober 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
32	02 November 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
33	12 November 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
34	29 November 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
35	13 Desember 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3
36	22 Desember 2021	Mutasi Pekerja Level BOD-3

Komite Human Capital Bidang Performance Management

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Human Capital Bidang Performance Management

1. Mengevaluasi tantangan kinerja unit kerja 1 Level di bawah BOD (termasuk Kantor Wilayah).
2. Mengevaluasi Orientasi Leader Pemimpin Unit Kerja 1 Level di bawah BOD (termasuk Kantor Wilayah) dan Department Head di Kantor Pusat.

Struktur Keanggotaan Komite Human Capital Bidang Performance Management

Sub Bidang Evaluasi Tantangan Kinerja 1 (untuk Kinerja Kanwil, KCK, Audit Intern Wilayah, dan Divisi/Desk)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
1. Division Head Divisi Human Capital Strategy & Policy 2. Divisi Head Divisi Planning, Budgeting & Performance Management	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Seluruh Direktur dan SEVP	Anggota Tetap	✓

Sub Bidang Evaluasi Orientasi Leadership 1 (untuk orientasi Leadership Pemimpin Unit Kerja BOD-1)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
1. Division Head Divisi Human Capital Strategy & Policy 2. Divisi Head Divisi Planning, Budgeting & Performance Management	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Seluruh Direktur dan SEVP	Anggota Tetap	✓

Sub Bidang Evaluasi Orientasi Leadership 2 (untuk orientasi leadership Department Head di Kantor Pusat)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur atau SEVP Bidang	Ketua	✓
1. Division Head Divisi Human Capital Strategy & Policy 2. Divisi Head Divisi Planning, Budgeting & Performance Management	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Division Head atau Desk Head Bidang Terkait	Anggota Tetap	✓

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Human Capital Bidang Performance Management Tahun 2021

No.	Tanggal	Agenda
1	12 Maret 2021	Evaluasi tantangan kinerja 1 untuk kinerja tahun 2020.
2	13 Maret 2021	Evaluasi orientasi <i>leadership</i> 1 untuk kinerja tahun 2020.
3	18 - 19 Maret 2021	Evaluasi orientasi <i>leadership</i> 2 untuk kinerja tahun 2020.

Komite Human Capital Bidang Etik

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Human Capital Bidang Etik

Memutus kasus Pelanggaran Disiplin dengan mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Tim Pemeriksa dan atau Forum Pembahasan Kasus Pelanggaran.

Struktur Keanggotaan Komite Human Capital Bidang Etik

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Utama	Ketua	✓
Wakil Direktur Utama	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Division Head Human Capital Business Partner	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
Seluruh Direktur dan SEVP	Anggota Tetap	✓

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Human Capital Bidang Etik Tahun 2021

No.	Tanggal	Agenda
1	21 Mei 2021	Pelanggaran Disiplin Pekerja
2	06 September 2021	Pelanggaran Disiplin Pekerja

Komite Human Capital Bidang Evaluasi Jabatan

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Human Capital Bidang Evaluasi Jabatan

Mereview, merekomendasi dan/atau menetapkan Golongan Jabatan.

Struktur Keanggotaan Komite Human Capital Bidang Evaluasi Jabatan

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Keuangan	Ketua	✓
Direktur Human Capital	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Department Head, Organization Development, Corporate Development & Strategy Division	Sekretaris (Merangkap Anggota Tetap)	-
1. Direktur Manajemen Risiko 2. Division Head, Corporate Development & Strategy 3. Division Head, Human Capital Strategy & Policy	Anggota Tetap	✓

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Human Capital Bidang Evaluasi Jabatan Tahun 2021

No.	Tanggal	Agenda
1	31 Mei 2021	Permohonan Persetujuan atas Usulan Penetapan Level Jabatan Department Head di Kantor Pusat
2	24 November 2021	Usulan Penetapan Golongan Jabatan (<i>Job Grade</i>)

Komite Produk

Komite Produk adalah komite di Kantor Pusat yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan putusan atas usul pengembangan produk dan jasa baru, pengembangan produk dan jasa existing, penghentian produk dan jasa existing, memutus produk dan jasa bundling di atas kewenangan Direktur atau SEVP Bidang Pemilik Produk, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan jasa.

Piagam Komite Produk

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Produk mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 213-DIR/CDS/06/2021 tentang Komite Produk yang mengatur terkait Organisasi, dan Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

1. Memberikan putusan atas usul pengembangan produk/jasa baru atau pengembangan produk/jasa yang sudah berjalan, di atas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
2. Memberikan putusan atas penghentian produk/jasa yang sudah berjalan, di atas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
3. Memberikan putusan atas produk dan/atau jasa *bundling*, di atas kewenangan Direktur/SEVP Bidang Pemilik Produk.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi atas strategi pengembangan produk dan/atau jasa.

Struktur Keanggotaan Komite Produk

Komite Produk 1 Segmen Wholesale

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Wakil Direktur Utama	Ketua	✓
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Division Head, Corporate Development & Strategy	Sekretaris	-
a. Direktur Manajemen Risiko b. Direktur Jaringan & Layanan c. Direktur Digital & Teknologi Informasi d. SEVP Operation e. SEVP Change Management & Transformation Office	Anggota Tetap	✓
1. Direktur Hubungan Kelembagaan & BUMN* 2. SEVP Treasury & Global Services* 3. SEVP Bisnis Korporasi	Anggota Tidak Tetap	✓
4. Direktur Kepatuhan 5. SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Komite Produk 1 Segmen Non Wholesale

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Wakil Direktur Utama	Ketua	✓
Direktur Keuangan	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Division Head, Corporate Development & Strategy	Sekretaris	-
Direktur Manajemen Risiko Direktur Jaringan & Layanan Direktur Digital & Teknologi Informasi SEVP Operation SEVP Change Management & Transformation Office	Anggota Tetap	✓

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Bisnis mikro* Direktur Konsumer Direktur Bisnis Kecil dan Menengah*	Anggota Tidak Tetap	✓
Direktur Kepatuhan SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Komite Produk 2 segmen *wholesale*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Keuangan	Ketua	✓
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Division Head, Corporate Development & Strategy	Sekretaris	-
Direktur Kelembagaan & BUMN* Direktur Digital & Teknologi Informasi Direktur Jaringan & Layanan SEVP Bisnis Korporasi SEVP Treasury & Global Services* SEVP Operation SEVP Change Management & Transformation Office	Anggota Tidak Tetap	✓
Direktur Kepatuhan SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Komite Produk 2 segmen *non wholesale*

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara Voting
Direktur Keuangan	Ketua	✓
Direktur Manajemen Risiko	Ketua Pengganti (Merangkap Anggota Tetap)	✓
Division Head, Corporate Development & Strategy	Sekretaris	-
Direktur Bisnis Mikro Direktur Bisnis Konsumer Direktur Bisnis Kecil & Menengah* Direktur Jaringan dan Layanan Direktur Digital & Teknologi Informasi SEVP Operation SEVP Change Management & Transformation Office	Anggota Tidak Tetap	✓
Direktur Kepatuhan SEVP Satuan Kerja Audit Intern	Anggota Tetap	-

* Terdapat produk lintas segmen

Profil Anggota Komite Produk

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Produk

Seluruh anggota tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Produk Tahun 2021

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Produk Tahun 2021 Kebijakan Rapat

1. Rapat Komite Produk diselenggarakan berkala sekurangnya 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis.

2. Rapat di luar rapat berkala dapat diselenggarakan dengan kriteria sebagai berikut:
 - Terjadi perubahan kondisi bisnis secara signifikan yang membutuhkan pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.
 - Terjadi perubahan regulasi yang membutuhkan respon dalam pengembangan produk atau penghentian produk secara cepat dan segera.
 - Faktor-faktor lainnya yang menyebabkan Direksi memutuskan untuk dilakukan Rapat Komite Produk.
3. Rapat Komite Produk dipimpin oleh Ketua Komite Produk.
4. Dalam hal Anggota Komite Produk berhalangan, maka tugas dan kewenangan Anggota Komite Produk dimaksud digantikan oleh Direktur Pengganti sesuai Surat Keputusan yang berlaku. Direktur Pengganti memiliki dua kapasitas dalam Komite Produk yakni selaku Direktur Pengganti dan selaku Anggota Komite Produk dalam melakukan keputusan.
5. Rapat Komite Produk dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite dan dihadiri oleh Anggota dengan Hak Suara dengan kriteria sebagai berikut:

No	Komite Produk	Syarat Kehadiran
1	Komite Produk 1	Minimal 3 (tiga) Anggota Dengan Hak Suara
2	Komite Produk 2	Minimal 2 (dua) Anggota Dengan Hak Suara

*Dari Anggota dengan Hak Suara yang hadir dimaksud minimal terdapat 1 (satu) Direktur

6. Keputusan Rapat Komite diambil secara musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka keputusan Rapat Komite dianggap sah dengan persetujuan dari 50% (lima puluh persen) jumlah Anggota Komite yang memiliki Hak Suara ditambah 1 (satu) Anggota Komite termasuk Ketua Komite.
7. Koordinasi penyelenggaraan Rapat Komite Produk menjadi tanggung jawab Sekretaris Komite.
8. Dalam hal rapat Komite Produk tidak dapat diselenggarakan, maka Komite Produk dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan Persetujuan Ketua Komite dan Anggota Komite Lainnya. Proses pengambilan keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler ditatakerjakan oleh Sekretaris Komite Produk.
9. Risalah Rapat Komite Produk ditandatangani oleh Sekretaris Komite Produk serta Ketua Komite Produk, dan disampaikan kepada Seluruh Direksi SEVP dan Unit Kerja di Kantor Pusat BRI yang terkait dengan putusan Komite Produk dimaksud.

Realisasi Rapat Dan Pelaksanaan Tugas Komite Produk Tahun 2021

No.	Tanggal	Agenda
1	23 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ownership</i> Indonesia Mall • Usulan Pengembangan Tebu Chain • Usulan Pengembangan Apps Bayari • Usulan Produk Briguna • Sosialisasi KMK dan SCF • Laporan Aplikasi Penarikan
2	24 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan Segmentasi & Layering Putusan Komite Produk • Usulan Disposasi Aplikasi • Pengelolaan Portofolio KKB Langsung Existing
3	3 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Usulan Pengembangan Platform BRI Connexion • Usulan Pengembangan Platform BRI HR • Usulan Pengembangan Platform BRI Smart Campus
4	24 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan dan <i>Review Rate</i> Kredit Dinamis • Fasilitas Dana Talangan Agen BRILink
5	31 Agustus 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Briguna • Usulan Pengembangan & Penetapan Product • Owner Ambilin • Usulan Pengembangan & Penetapan Product Owner PPOB • Pelaporan Perpindahan Product Owner AMKKM, AJK • BRiguna & AJK Kupedes
6	18 November 2021	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Update</i> Realisasi PAB 2021 & Dashboard APM • Sosialisasi POJK 13/POJK.03 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum • Usulan Pengembangan UMi Corner Self-Service (Senyum Mobile) • Usulan Pengembangan BRIfast <i>Outgoing Remittance International Transfer</i> pada BRImo
7	22 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Parameter Dashboard APM (Application Portofolio Management) • Usulan Scale Up Produk Kupedes s.d 500 Juta • Usulan Penyesuaian <i>Counter Rate</i> Pinjaman SME

Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Komite Pengadaan Barang dan Jasa adalah komite di Kantor Pusat yang bertugas dan berwenang untuk melakukan evaluasi dan memberi keputusan atas permohonan hasil dari suatu pengadaan dengan nilai tertentu.

Piagam Komite Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Surat Keputusan Direksi NOKEP: 656-DIR/PPM/10/2021 tentang Komite Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur terkait Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengadaan Barang dan Jasa

1. Melaksanakan pemberian putusan pengadaan secara profesional, jujur, bertanggung jawab, obyektif, akuntabel dan seksama.
2. Menghindari benturan kepentingan dalam pemberian persetujuan pengadaan.
3. Mengevaluasi, memberi masukan atas usul pengadaan yang diajukan.
4. Memberi putusan setuju atau menolak pengadaan sesuai limit wewenangnya dalam hal diselenggarakan melalui rapat Komite.
5. Memberikan putusan pengadaan, melalui:
 - a. Risalah Rapat Direksi, atau
 - b. Risalah Rapat Komite Pengadaan, atau
 - c. Nota Dinas Sirkuler.

Struktur Keanggotaan Komite Pengadaan Barang & Jasa

Komite Pengadaan I (nilai pengadaan > Rp.200 Miliar)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	✓
Division Head, Procurement & Logistic Operation atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	✓
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	✓
Direktur/SEVP User ²	Anggota Tetap	✓
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	✓
Direktur Kepatuhan	Anggota Tetap	-
Direktur/SEVP terkait ³	Anggota Tidak Tetap	✓

Komite Pengadaan II (nilai pengadaan > Rp.100 Miliar sd. Rp.200 Miliar)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
Wakil Direktur Utama	Ketua	✓
Division Head, Procurement & Logistic Operation atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur Keuangan	Anggota Tetap	✓
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	✓
Direktur/SEVP User ²	Anggota Tetap	✓
SEVP Manajemen AT dan Pengadaan	Anggota Tetap	✓
Direktur/SEVP terkait ³	Anggota Tidak Tetap	✓

Komite Pengadaan III (nilai pengadaan > Rp 30 Miliar sd. Rp.100 Miliar)

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Ketua	✓
Division Head, Procurement & Logistic Operation atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur Manajemen Risiko	Anggota Tetap	✓
Direktur/SEVP User ²	Anggota Tetap	✓
Direktur/SEVP terkait ³	Anggota Tidak Tetap	✓

Komite Pengadaan IV (nilai pengadaan > Rp.7,5 Miliar sd. Rp.30 Miliar)

Struktur Keanggotaan ¹	Jabatan	Hak Suara
SEVP Manajemen Aktiva Tetap dan Pengadaan	Ketua	✓
Division Head, Procurement & Logistic Operation atau Unit Kerja Pengelola Fungsi Pengadaan	Sekretaris	
Direktur/SEVP User ²	Anggota Tetap	✓
Direktur/SEVP terkait ³	Anggota Tidak Tetap	✓

Keterangan:

- 1) Dalam kedudukannya sendiri maupun selaku pejabat pengganti
- 2) Dalam hal Direktur Kepatuhan atau SEVP yang membidangi Audit Intern bertindak sebagai User, maka pejabat yang berwenang untuk memberikan persetujuan adalah Direktur Manajemen Risiko
- 3) Direktur atau SEVP Bidang/Pemina Unit Kerja terkait sesuai dengan jenis objek pengadaan.

Profil Anggota Komite Pengadaan Barang & Jasa

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Pernyataan Independensi Komite Pengadaan Barang & Jasa

Seluruh anggota komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur Lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun karyawan dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan BRI.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2021

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dapat dilihat pada bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Rapat dan Pelaksanaan Tugas Komite Pengadaan Barang & Jasa Tahun 2021

Kebijakan Rapat

1. Keputusan Komite Pengadaan diambil dalam rapat Komite Pengadaan. Rapat Komite Pengadaan dilaksanakan di Kantor Pusat atau tempat lainnya dengan fasilitator Unit Kerja Pengadaan yang terkait.
2. Putusan Komite Pengadaan diambil secara unanimous dan dianggap disetujui apabila seluruh Anggota Komite dengan hak suara yang hadir atau yang mewakili menyatakan setuju.

3. Dalam hal Anggota Komite Pengadaan berhalangan maka tugas dan kewenangan Anggota Komite Pengadaan dimaksud digantikan oleh Direktur atau SEVP Pengganti sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pengganti. Direktur atau SEVP Pengganti dapat bertindak di dalam Komite sebagai dua kapasitas yaitu selaku Pejabat Pengganti dan dalam kapasitasnya selaku Anggota Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Dalam hal rapat Komite Pengadaan tidak dapat diselenggarakan, maka Komite Pengadaan dapat mengambil keputusan melalui Nota Dinas Sirkuler dengan persetujuan dari Ketua Komite dan Anggota Komite lainnya.
5. Dalam hal pengadaan barang dan jasa sudah diputus oleh Direksi melalui Rapat Direksi, maka putusan dimaksud dipersamakan dengan putusan Komite Pengadaan Barang dan Jasa yang dibuktikan dengan Risalah Rapat Direksi.
6. Tugas dan tanggung jawab fasilitator untuk rapat Komite Pengadaan dilaksanakan oleh Sekretaris Komite Pengadaan antara lain:
 - a. Mengkoordinasikan persiapan materi rapat Komite.
 - b. Mempersiapkan agenda rapat, jadwal dan tempat rapat.
 - c. Melaksanakan fungsi surat menyurat, memperbanyak dokumen, dan fungsi pengarsipan dokumen Komite.
 - d. Membuat Risalah Rapat dan Berita Acara Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
 - e. Mendistribusikan keputusan Komite untuk ditindaklanjuti Unit Kerja terkait.

REALISASI RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2021

Nama Komite Pengadaan	Nilai Pengadaan (Rp,-)	Jumlah Pengadaan
Komite Pengadaan I	2,589,662,772,478	6
Komite Pengadaan II	433,400,000,000	3
Komite Pengadaan III	1,391,134,981,937	28
Komite Pengadaan IV	2,242,059,347,691	156
Total	6,656,257,102,106	

Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

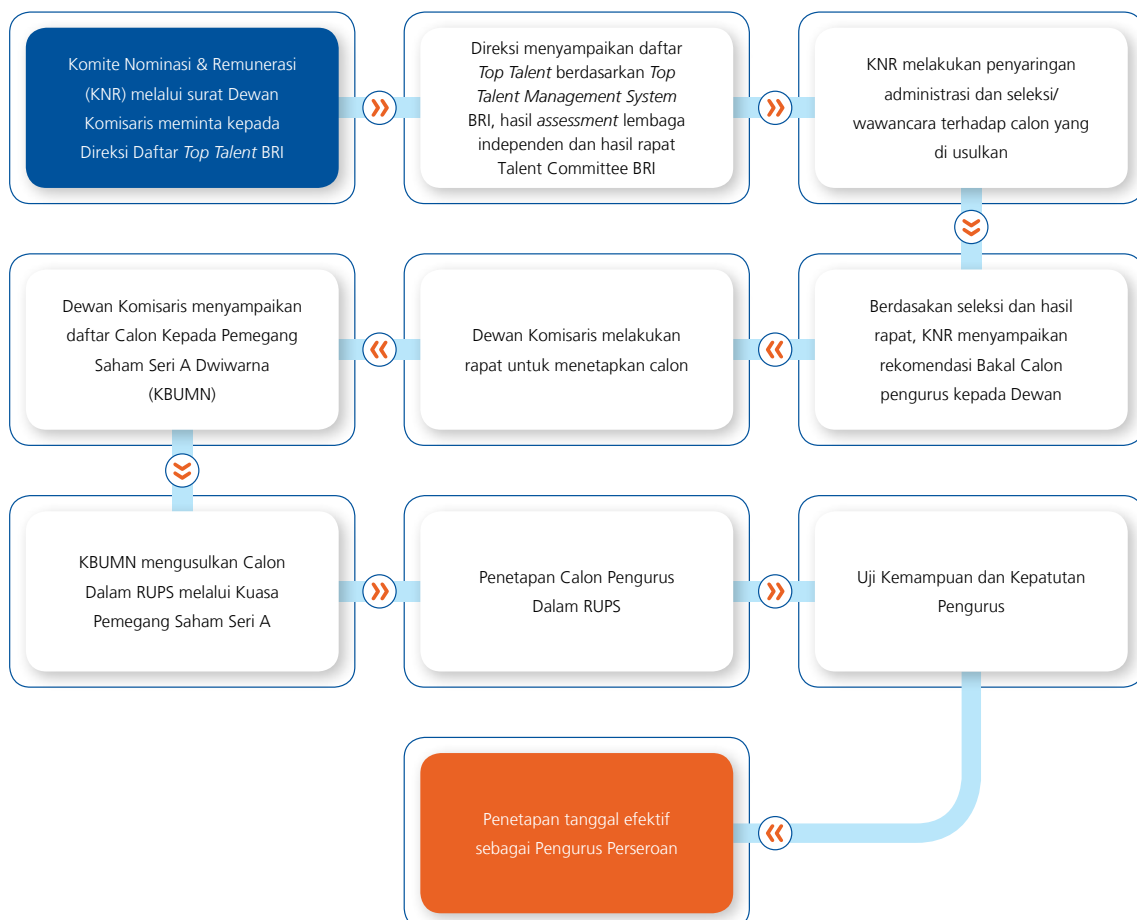
Bahwa dalam rangka implementasi praktik bisnis yang sehat dan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* serta prinsip kehati-hatian di lingkungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dewan Komisaris telah menetapkan Kebijakan Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Surat Keputusan NOKEP:07-KOM/BRI/07/2015, tanggal 28 Juli 2015. Secara Umum Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Bank.
2. Untuk calon anggota Direksi, proses Nominasi yang dilakukan adalah untuk bakal calon yang berasal dari internal Bank, yaitu:
 - a. Anggota Direksi yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Direksi;
 - b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
 - c. Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan.
3. Untuk calon anggota Dewan Komisaris, proses Nominasi dilakukan untuk bakal calon yang berasal dari anggota Dewan

Komisaris yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

4. Untuk bakal calon anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris selain Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan Direksi Anak Perusahaan, proses Nominasi dilakukan bersama dalam suatu Tim yang dibentuk oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dan sekaligus menetapkan bakal calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam melakukan proses Nominasi, Komite diwakili oleh Ketua Komite dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka digantikan oleh salah seorang anggota Komite yang berasal dari Komisaris Independen.
6. Keputusan ini sekaligus memberikan mandat kepada Ketua Komite atau Komisaris Independen untuk:
 - a. Mewakili Komite sebagai anggota Tim Penilai yang dibentuk Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
 - b. Memberikan rekomendasi atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan calon.
7. Ketua Komite atau Komisaris Independen yang mewakili Komite wajib menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan wajib menjaga independensinya.

Adapun prosedur Nominasi calon Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

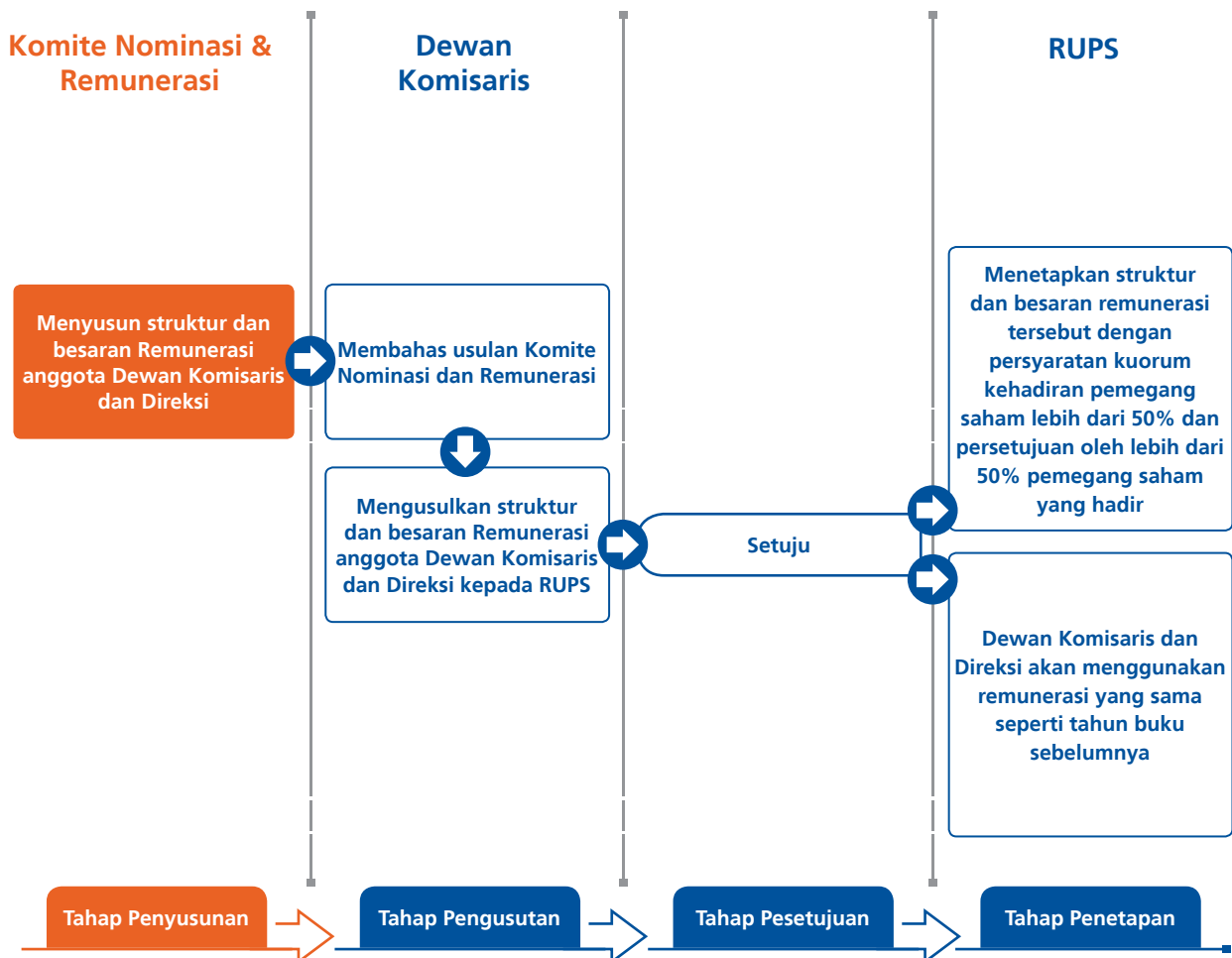


Prosedur Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi Diatur Sebagai Berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Dewan Komisaris meminta daftar *Top Talent* BRI yang memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan sebagai Bakal Calon pengurus BRI.
2. Direksi menyampaikan daftar *Top Talent* BRI berdasarkan data *Talent Management System* BRI, hasil *assessment* oleh lembaga profesional independen serta hasil Rapat *Talent Committee* BRI.
3. Berdasarkan daftar yang disampaikan oleh Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) menjangkau Bakal Calon yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Untuk bakal calon anggota Direksi Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa dan Direksi anak perusahaan atau perusahaan patungan, komite dapat meminta usulan Bakal Calon kepada Direksi Bank yang terlebih dahulu dilakukan *assessment* oleh Lembaga Profesional dengan indikator kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang dianggap layak selanjutnya diusulkan oleh KNR kepada Dewan Komisaris untuk mengikuti proses Evaluasi.
5. KNR melakukan proses evaluasi untuk menggali informasi komprehensif mengenai kualifikasi dan kompetensi Bakal Calon, sebagai berikut:
 - a. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari anggota Direksi yang masih menjabat yang akan berakhir masa jabatannya namun masih dapat diangkat kembali, evaluasi dilakukan antara lain dengan meminta pendapat dari Direktur Utama.
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi menjangkau bakal calon anggota Direksi yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan. Proses penjangkauan ini melibatkan lembaga *assessment* profesional/eksternal atau *Professional Search Firm* antara lain: PPM Manajemen *Assesment Center* Indonesia (ACI) Telkom), DDI, Bina Potensia, SHL dan LMFE UI, selanjutnya hasil *assessment* tersebut diserahkan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - c. Untuk bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa, atau yang berasal dari Direksi anak perusahaan/perusahaan patungan, evaluasi dilakukan dengan cara:
 - 1) Melakukan *interview*/wawancara terhadap Bakal Calon anggota Direksi yang direkomendasikan; dan/ atau,
 - 2) Meminta Bakal Calon anggota Direksi untuk memberikan presentasi mengenai topik tertentu, yang menggambarkan kemampuan Bakal Calon sesuai dengan persyaratan.
 - d. Untuk Bakal Calon anggota Dewan Komisaris, evaluasi untuk menggali kualifikasi dan kompetensi dilakukan dari daftar riwayat hidup yang bersangkutan.
6. Hasil penggalian informasi mengenai Bakal Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dibahas dalam rapat Komite untuk memutuskan Bakal Calon yang terpilih menjadi Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
7. Hasil pembahasan Komite dituangkan dalam Nota Dinas Komite kepada Dewan Komisaris. Nota Dinas tersebut merupakan dokumen rekomendasi Komite atas pencalonan Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan.
8. Dewan Komisaris memutuskan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam rapat Dewan Komisaris yang sekaligus sebagai dasar rekomendasi Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk selanjutnya di sampaikan dalam RUPS.
9. RUPS Menentukan susunan dan perubahan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BRI, dalam hal anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang diangkat belum disetujui oleh OJK, maka pengangkatan dimaksud belum efektif. Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BRI yang belum mendapat persetujuan OJK, yang bersangkutan dilarang melakukan tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dalam kegiatan Bank dan atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. RUPS juga memberhentikan Direksi yang terpilih pada RUPS sebelumnya, jika yang bersangkutan tidak disetujui oleh OJK.
10. BRI Mengajukan permohonan kepada OJK untuk melakukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
11. OJK berwenang untuk memberikan penilaian atas kemampuan dan kepatutan Direksi terpilih yang meliputi penelitian administratif dan wawancara. Persetujuan atau penolakan atas permohonan dimaksud akan diberikan oleh OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Tahapan	Aktivitas
Tahap Penyusunan	<p>Komite Nominasi dan Remunerasi</p> <p>Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan evaluasi struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan kinerja, risiko, kewajaran dengan <i>peer group</i>, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komite Nominasi dan Remunerasi merekomendasikan struktur dan besaran Remunerasi tersebut dalam rapat Dewan Komisaris.</p>
Tahap Pengusulan	<p>Dewan Komisaris</p> <p>Dewan Komisaris mengajukan usulan mengenai penetapan honorarium, tunjangan dan fasilitas serta tantiem untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</p>
Tahap Penetapan	<p>Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)</p> <p>RUPS dapat menyetujui dan menetapkan struktur dan besaran remunerasi tersebut dengan persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lebih dari 50% dan persetujuan oleh lebih dari 50% pemegang saham yang hadir. Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan tersebut, maka Dewan Komisaris dan Direksi akan menggunakan struktur dan besaran remunerasi yang sama seperti tahun buku sebelumnya. Dalam hal RUPS belum menetapkan Struktur dan besaran remunerasi, maka RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan struktur dan besaran remunerasi setelah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham seri A Dwiwarna.</p>



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mempertimbangkan pencapaian kinerja, hasil *benchmarking* remunerasi dengan industri sejenis (*peer group*), tingkat inflasi, ukuran dan kompleksitas dari operasi Perseroan serta kondisi dan kemampuan keuangan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris mencakup sebagai berikut:

1. Honorarium dan Tantiem

Honorarium dan Tantiem Komisaris Utama ditetapkan sebesar 50% dari gaji Direktur Utama, sedangkan Honorarium dan Tantiem Wakil Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan masing-masing sebesar 95% dan 90% dari Honorarium Komisaris Utama.

2. Tunjangan

Tunjangan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Jenis	Uraian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK)	THR diberikan sejak diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Besaran THR maksimal 1 (satu) kali honorarium per bulan dan dibayarkan secara penuh.
Tunjangan Transportasi	Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan sebesar 20% dari honorarium per bulan masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dalam hal Komisaris telah diberikan fasilitas kendaraan dengan cara sewa sebagaimana diatur dalam SK sebelumnya, maka diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan pemberian fasilitas kendaraan tetap berpedoman pada keputusan terdahulu sampai dengan masa sewanya berakhir, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan di atas. Bagi Komisaris yang berhenti dari jabatannya dan periode sewa kendaraan belum berakhir maka diberikan kesempatan membeli kendaraan sebesar sisa biaya sewa yang belum dibayarkan, dengan catatan harga beli kendaraan tersebut dapat dinegosiasikan dengan pihak vendor. Bagi Komisaris dimaksud diberikan masa transisi selama 30 (tiga puluh) hari untuk menggunakan kendaraan tersebut.
Asuransi Purna Jabatan	Diiikutsertakan dalam Program Asuransi Purna Jabatan. Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per Tahun.
Keanggotaan pada Club	Diberikan dua keanggotaan Club Profesi.
Pakaian <i>Corporate</i>	Diberikan dua stel jas <i>corporate</i> dan satu baju batik per Tahun.

3. Fasilitas

Fasilitas yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Jenis	Uraian
Kesehatan	Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi anggota Dewan Komisaris dan keluarga yang menjadi tanggungannya diganti penuh oleh Perusahaan. Keluarga yang ditanggung adalah suami/istri dan maksimal tiga orang anak yang belum pernah menikah atau bekerja dan berumur di bawah 25 Tahun Fasilitas Kesehatan diberikan berupa: rawat jalan dan obat; <ul style="list-style-type: none"> - rawat inap dan obat; - <i>medical check up</i>. Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud di atas termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Penggantian Frame setiap dua Tahun maksimal sebesar Rp15 juta. - Penggantian Lensa setiap 1 Tahun. <i>Medical check up</i> diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Medical check up</i> diberikan 1 kali setiap Tahun. - <i>Medical check up</i> dilakukan di dalam negeri. Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping.
Fasilitas Bantuan Hukum	Diberikan Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dengan tata cara dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku.

2. Fasilitas Lainnya

Fasilitas lainnya yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Jenis	Uraian
Fasilitas Lainnya	Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas lain dalam rangka pelaksanaan tugas operasionalnya berupa perjalanan dinas, pemberian laptop/ipad dan pengemudi yang diberikan sesuai ketentuan intern perusahaan yang diatur dalam suatu keputusan Direksi.

Struktur Remunerasi Direksi

Struktur remunerasi Direksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris R.43-KOM/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dan Persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan surat Nomor S-421/MBU/D5/06/2020 sebagai berikut:

- Honorarium dan Tantiem Besarnya Gaji dan Tantiem Direksi ditetapkan proporsional terhadap gaji dan tantiem Direktur Utama, yaitu Wakil Direktur Utama sebesar 95%, gaji Direktur yang membidangi sumber daya manusia sebesar 90% dari Direktur Utama dan gaji Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
- Tunjangan

Jenis	Besaran per anggota Direksi	Keterangan
Tunjangan Hari Raya	Besaran THR maksimal 1 (satu) kali Gaji per bulan dan dibayarkan secara penuh.	Diberikan sejak diangkat oleh RUPS.
Tunjangan Perumahan	Rp27,5 juta per bulan, termasuk di dalamnya biaya utilitas.	Tidak diberikan bagi anggota Direksi yang menempati rumah jabatan
Asuransi Purna Jabatan	Maksimum premi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium per tahun.	Diikutsertakan sejak dinyatakan efektif lulus <i>fit and proper test</i> oleh OJK.
Keanggotaan Klub	Direktur Utama/Wakil Direktur Utama: 2 (dua) keanggotaan Golf. 2 (dua) keanggotaan Club Financial. 1 (satu) keanggotaan club Kebugaran (family club) 2 (dua) club profesi. Direktur: 1 (satu) keanggotaan Golf. 1 (satu) keanggotaan club Kebugaran (family club). 2 (dua) club profesi	Keanggotaan bersifat untuk pengembangan potensi bisnis dan relasi.
Pakaian <i>corporate</i>	Berupa 2 (dua) stel jas corporate dan 1 (satu) baju batik per tahun.	Berupa pakaian untuk kegunaan dinas.
Komunikasi	Biaya pulsa diganti sesuai dengan pemakaian	Diberikan 2 (dua) unit HP yang dapat diganti setiap tahun.

3. Fasilitas

Jenis	Uraian
Kesehatan	<p>Biaya pengobatan dan perawatan kesehatan bagi anggota Direksi dan keluarga yang menjadi tanggungannya diganti penuh oleh Perusahaan.</p> <p>Keluarga yang ditanggung adalah suami/istri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum pernah menikah atau bekerja dan berumur di bawah 25 (dua puluh lima) Tahun Fasilitas Kesehatan diberikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rawat jalan dan obat; - Rawat inap dan obat; - <i>Medical check up</i>. <p>Fasilitas Kesehatan berupa rawat jalan dan obat sebagaimana dimaksud termasuk pemeriksaan mata berikut obat, serta pembelian kacamata yang diganti penuh oleh perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggantian Frame setiap 2 (dua) Tahun maksimal sebesar Rp15 juta. - Penggantian Lensa setiap 1 (satu) Tahun. <p><i>Medical check up</i> diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Medical check up</i> diberikan 1 (satu) kali setiap Tahun. - <i>Medical check up</i> dilakukan di dalam negeri. <p>Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk berobat di luar negeri, pemberian fasilitas kesehatan dapat diberikan secara penuh. Fasilitas ini termasuk transportasi dan akomodasi bagi pasien dan satu orang pendamping.</p>
Fasilitas Bantuan Hukum	<p>Diberikan Fasilitas Bantuan Hukum dalam hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan.</p> <p>Fasilitas Bantuan Hukum diberikan dengan tata cara dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN yang berlaku.</p>

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Dewan Komisaris

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Honorarium	THRK	Tantiem Sebelum Pajak	Tunjangan Transport	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
KOMISARIS BRI							
1	Kartika Wirjoatmodjo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Ari Kuncoro**	✓	✓	-	✓	✓	✓
3	Rofikoh Rokhim	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Hadiyanto	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Hendrikus Ivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Rabin Indrajad Hattari	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	R. Widyo Pramono	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Zulnihar Usman	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Dwi Ria Latifa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Heri Sunaryadi*	✓	-	-	✓	-	✓
JUMLAH TOTAL		18.891.930.000	1.516.425.000	91.768.958.780	3.747.531.000	4.757.175.800	120.682.020.580

* Pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI terhitung mulai tanggal 21 Juli 2021 telah disetujui dalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 Oktober 2021.

** Diangkat pada RUPS Luar Biasa 07 Oktober 2021

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Honorarium	THRK	Tantiem Sebelum Pajak	Bantuan Sewa Rumah	Pengobatan	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
Direksi BRI								
1	Sunarso	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
2	Catur Budi Harto	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
3	Haru Koesmahargyo *)	✓	-	✓	-	✓	-	✓
4	Agus Noorsanto	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
5	Priyastomo *)	✓	-	✓	✓	-	-	✓
6	Indra Utoyo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Supari	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
8	Ahmad Solichin Lutfiyanto	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
9	Agus Sudiarto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Handayani	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
11	Herdy Rosadi Harman *)	✓	-	✓	✓	-	-	✓
12	Amam Sukriyanto **)	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
13	Agus Winardono **)	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

(Dalam Rupiah)

No	Nama	Honorarium	THRK	Tantiem Sebelum Pajak	Bantuan Sewa Rumah	Pengobatan	Premi Asuransi Purna Jabatan	Total
14	Viviana Dyah Ayu Retno K **)	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
15	Arga Mahanana Nugraha **)	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
	Jumlah Total	48.782.625.805	3.817.150.000	256.527.006.152	2.897.258.062	124.225.485	12.611.000.000	324.759.265.504

*) masa jabatan berakhir pada 21 Januari 2021

**) masa jabatan mulai pada 21 Januari 2021

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Sesuai POJK 45/POJK.03/2015

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah dijelaskan pada Sub Judul Komite Remunerasi dan Nominasi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Lapoan Tahunan ini.

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Proses penyusunan kebijakan remunerasi meliputi:

1. Latar belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi
Dalam rangka menjaga dan mempertahankan Pekerja, maka perlu diatur kebijakan Remunerasi yang dapat memelihara dan meningkatkan motivasi Pekerja serta mendorong terciptanya iklim kerja kondusif. Perseroan menyusun kebijakan Remunerasi dengan tujuan untuk menarik calon Pekerja potensial, mempertahankan Pekerja kompeten dan memelihara motivasi Pekerja untuk berkinerja unggul.
2. Evaluasi kebijakan remunerasi tahun sebelumnya, beserta perbaikannya.
Perseroan menyusun kebijakan Remunerasi berdasarkan praktek di pasar tenaga kerja bidang perbankan serta selalu mengkaji dan memperbaharunya sesuai dengan perubahan dan perkembangan bisnis dengan tetap memperhatikan kemampuan Perseroan.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri

Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perseroan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium. Perseroan mengadakan peninjauan terhadap Tunjangan Premium apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan tingkat kemahalan di setiap wilayah dan kemampuan Perseroan. Perusahaan Anak memiliki Kebijakan Remunerasi terpisah dan disusun sendiri oleh Perusahaan Anak. Dalam rangka menyelaraskan perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah, Perseroan memberikan bantuan penyesuaian tingkat kemahalan berupa Tunjangan Premium.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Remunerasi dikaitkan dengan risiko dan disusun berdasarkan pertimbangan *Person Grade* dan/atau *Job Grade* Pekerja dalam suatu struktur upah yang menggambarkan Remunerasi Pekerja dari jabatan terendah sampai dengan jabatan tertinggi. Pada setiap jabatan ditentukan suatu rentang upah tertentu yang menggambarkan upah minimum, upah *midpoint* (nilai tengah) sampai dengan upah maksimum. Besaran remunerasi yang diterima oleh Pekerja mempertimbangkan/setara dengan beban dan potensi risiko jabatan yang melekat pada jabatan tersebut. Semakin tinggi jabatan tersebut maka akan semakin tinggi tugas dan tanggung jawab Pekerja dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil/eksposur risiko Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan pihak-pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan potensi risiko yang timbul atas suatu jabatan yang dimiliki. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka Perusahaan akan menanggungkan pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat variabel.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi meliputi:

1. Kebijakan remunerasi terhadap penilaian kinerja.
Guna mendorong Pekerja untuk berkinerja unggul, Perseroan memiliki program kompensasi variabel yang diberikan kepada Pekerja yang berhasil mencapai dan melampaui target kinerja. Pekerja dengan prestasi tinggi akan memperoleh kompensasi variabel yang tinggi pula. Sebaliknya, Pekerja yang kurang berprestasi akan memperoleh kompensasi variabel yang rendah, atau tidak mendapatkan kompensasi variabel sama sekali.
2. Metode remunerasi individu dengan kinerja perusahaan, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.
Dalam pemberian kompensasi variabel bagi Pekerja, besarnya nilai kompensasi yang diterima oleh Pekerja tergantung dari pencapaian kinerja Perusahaan, kinerja unit kerja dan kinerja individu dimana masing-masing komponen tersebut memiliki indikator pencapaian target, bobot, dan faktor pengali yang berdiri sendiri.

3. Metode penyesuaian remunerasi terhadap kinerja yang tidak tercapai.

Pada awal tahun Perusahaan telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pekerja untuk memperoleh kompensasi variabel, salah satunya adalah kinerja yang harus dicapai. Bagi Pekerja yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan tersebut tidak akan memperoleh kompensasi variabel.

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang meliputi:

1. Kebijakan remunerasi terhadap besaran dan kriteria yang bersifat variabel yang ditangguhkan
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor 09-KOM/ BRI/11/2017 dan S.1023-DIR/ KPS/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Kelola Remunerasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bagi pihak yang ditetapkan sebagai MRT, maka sebagian remunerasi yang bersifat variabelnya akan ditangguhkan.
 - b. Besarnya penangguhan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah setinggi-tingginya 20% dari tantiem.
2. Kebijakan remunerasi terhadap variabel yang ditangguhkan yang ditunda atau dibatalkan pembayarannya (Malus)
Perseroan dapat menunda pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada MRT apabila terjadi kondisi berupa:
 - a. Terbukti adanya Individual *Fraud*.
 - b. *Restatement* laporan keuangan perseroan yang menjadi dasar penetapan pemberian Remunerasi yang bersifat variabel.
 - c. Peringkat risiko pada Triwulan terakhir sebelum waktu pelaksanaan pembayaran Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan adalah 4 (*Moderate to High*) atau lebih buruk.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Salah satu prinsip remunerasi Perseroan adalah kompetitif secara eksternal dimana Remunerasi diberikan pada tingkat yang kompetitif terhadap industri perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bekerja sama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris telah disajikan pada Sub Judul Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Kompensasi kepada Pekerja diberikan dalam kerangka sistem yang adil, kompetitif, serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Bank. Kompensasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Kompensasi yang bersifat tetap, terdiri dari Upah Pokok dan Tunjangan.
2. Kompensasi yang bersifat variabel yang diberikan kepada Pekerja berdasarkan pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut:
 - Tunjangan Kinerja.
Tunjangan Kinerja merupakan kompensasi variabel yang dijanjikan oleh Perusahaan di awal tahun. Tunjangan Kinerja bertujuan untuk mendorong motivasi Pekerja, memberikan reward secara langsung dalam mencapai dan melampaui target individu, target unit kerja maupun target perusahaan.
 - Bonus.
Bonus merupakan kompensasi variabel yang tidak dijanjikan oleh Perusahaan. Bonus diberikan kepada Pekerja dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja Perusahaan.
3. Perusahaan memberikan kompensasi variabel yang lebih besar bagi Tenaga Pemasar, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tenaga Pemasar merupakan pencetak laba.
 - b. Mendorong Tenaga Pemasar untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan.
 - c. Apresiasi kepada Tenaga Pemasar.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Penerima remunerasi yang bersifat variabel yaitu Direksi sebanyak 12 (sebelas) orang, Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) orang dan SEVP sebanyak 7 (tujuh) orang.

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers*

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) yang ditetapkan berdasarkan jumlah manajemen pada periode tahun laporan adalah sebagai berikut:

1. Direksi (12 orang)
2. Dewan Komisaris (10 orang)
3. Senior Executive Vice President (SEVP) (7 orang)

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan	Program	Jumlah Share Option yang Diberikan	Jumlah Share Option yang Dieksekusi	Jangka Waktu Berlakunya Eksekusi
1	Dedi Sunardi	SEVP	ESOP 1	184.000	184.000	s.d 31 November 2021
			ESOP 2	96.800	96.800	s.d 31 November 2021
2	Hari Siaga Amijarso	SEVP	ESOP 1	506.000	506.000	s.d 31 November 2021
			ESOP 2	556.600	556.600	s.d 31 November 2021
3	Lina Sari	SEVP	ESOP 1	506.000	506.000	s.d 31 November 2021
			ESOP 2	532.400	532.400	s.d 31 November 2021
4	Listiarini Dewajanti	SEVP	ESOP 1	506.000	506.000	s.d 31 November 2021
			ESOP 2	556.600	556.600	s.d 31 November 2021

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	2021	2020	2019
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	36,67	31,13	31,24
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,18	1,18	1,16
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11	1,11	1,14
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,24	2,88	2,6

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat

Belum terdapat pemberian kompensasi variabel yang dijamin tanpa syarat.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Tidak terdapat jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total pesangon yang dibayarkan.

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

No	Pihak MRT	Remunerasi Variabel yang Ditangguhkan (tahun buku 2021)	
		Tunai (Gross)	Saham (setara rupiah)
1	SEVP	1.963.292.227	69.400 lembar
2	Dewan Komisaris	3.818.857.449	732.900 lembar
3	Direksi	-*	4.411.900

*) Tidak terdapat remunerasi variabel dalam bentuk tunai yang ditangguhkan bagi Direksi

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Tidak terdapat remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditanggunghkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	-	-	-	-
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (*Management Stock Option Plan (MSOP)*).

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Untuk meningkatkan *engagement* pekerja dan meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap Perusahaan dan untuk memberikan motivasi/ insentif jangka panjang agar mencapai target-target kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan, BRI pada tahun 2021 telah memiliki Program Kepemilikan Saham bagi Pekerja BRI yang dikemas dalam 3 program, yaitu:

1. *Employee Stock Allocation (ESA)*
Program kepemilikan saham dalam bentuk Stock Allocation Program ini diberikan melalui 4 (empat) tahap kepada seluruh level Pekerja yang memenuhi kriteria yang terdiri dari masa kerja, kinerja individu, dan *track record* pekerja dalam menjalani tanggung jawabnya.
2. *Employee Stock Option Plan (ESOP)*
Program kepemilikan saham dalam bentuk opsi pembelian saham dengan harga khusus. Program ini diberikan kepada para Pekerja Level tertentu yang termasuk *Top Talent* BRI dan memenuhi kriteria *performance* maupun *Capacity/Potential*. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Pekerja untuk meningkatkan kinerja Perusahaan untuk mencapai Visi Perusahaan "*The Most Valuable Banking in South East Asia and Champion Financial Inclusion*".

Jumlah Saham dan/atau OPSI

Program	Jumlah Saham
<i>Employee Stock Allocation (ESA)</i>	585.605.800
<i>Employee Stock Option Plan (ESOP)</i>	148.926.100

Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu *vesting period*, atau periode dimana hak Pekerja atas saham masih tergantung pada persyaratan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Program	Vesting Period
<i>Employee Stock Allocation (ESA)</i>	Februari – Desember 2021
<i>Employee Stock Option Plan (ESOP)</i>	Oktober – Desember 2021

Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen yang Berhak

Program pemberian sejumlah saham Perseroan berupa ESA diberikan kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan *grant* dan *vesting program*, seperti salah satunya memenuhi masa kerja minimum, tercapainya kinerja Perusahaan dan kinerja Individu pada periode yang ditentukan, serta *track record* Pekerja dalam menjalani tanggung jawabnya. Sementara untuk program kepemilikan saham Pekerja lainnya yang diberikan dalam bentuk pemberian hak untuk membeli sejumlah saham perusahaan, yakni berupa ESOP, ditujukan kepada Pekerja yang termasuk ke dalam kategori *High Potential Talent & Value Creator* BRI yakni yang memenuhi kriteria *performance* maupun *Capacity/Potential*.

Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga Pelaksanaan

Pada program kepemilikan saham Pekerja BRI telah ditetapkan harga perolehan saham pada waktu tertentu, yakni untuk program *Employee Stock Allocation (ESA)* sebesar Rp4.410,- dan *Employee Stock Option Plan (ESOP)* sebesar Rp. 2.240,- per lembar saham.

Akuntan Publik

Penunjukan Akuntan Publik

Penunjukan Akuntan Publik mengacu pada POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Adapun prosedur pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai berikut:

1. Proses pengadaan jasa audit KAP dilaksanakan oleh Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS, dan Tim Pengadaan.
2. Komite Audit bertugas sebagai Koordinator Tim Teknis, Tim Penyusunan HPS, dan Tim Pengadaan serta bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh kegiatan pengadaan jasa audit KAP kepada Dewan Komisaris.
3. Metode pengadaan jasa audit KAP dilakukan dengan Metode Seleksi Langsung berpedoman kepada ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di BRI.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee Periode 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee dan Izin KAP Periode 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Imbalan Jasa			Izin AP
					Asurans (Audit)	Non-asurans	Total	
2021	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 6	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 2	13.215.296.000	500.000.000	13.715.296.000	AP.1681
2020	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 5	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 1	15.523.800.000	500.000.000	16.023.800.000	AP.1681
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 4	Danil Setiadi Handaja, CPA	Periode ke 3	10.700.000.000	-	10.700.000.000	AP.1008
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 3	Danil Setiadi Handaja, CPA	Periode ke 2	7.999.500.000	200.500.000	8.200.000.000	AP.1008
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 2	Danil Setiadi Handaja, CPA	Periode ke 1	7.121.500.000	178.500.000	7.300.000.000	AP.1008

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2021, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja mendapatkan penugasan dari Perseroan untuk melakukan jasa *non assurans* berupa Perikatan untuk melaksanakan prosedur yang disepakati atas informasi keuangan. Total fee untuk penugasan tersebut sebesar Rp500.000.000 atas reuviu KPI Direksi (Kolegial & Individu) dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri BUMN RI perihal Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Opini Audit

Tahun	Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
2021	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2020	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Manajemen Risiko

Bank BRI melakukan pengelolaan risiko secara proaktif dan *prudent* pada setiap proses bisnis dan operasional untuk mencapai *profitability* yang optimal sesuai dengan *risk appetite* yang telah ditentukan. BRI memiliki komitmen dalam menjalankan manajemen risiko yang baik dengan memiliki kebijakan, proses, kompetensi, akuntabilitas, pelaporan dan teknologi pendukung yang bertujuan agar pengelolaan risiko Bank BRI senantiasa berjalan efektif dan efisien.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Dasar penerapan manajemen risiko Perseroan mengacu pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 26/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
12. Surat Keputusan Nokep: KB.03 DIR/MPE/12/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kerangka Manajemen Risiko

Kerangka kerja Manajemen Risiko Perseroan tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko BRI yang dilakukan melalui pendekatan pengelolaan modal dan pengelolaan risiko dalam operasional dan bisnis yang meliputi seluruh jajaran organisasi BRI dan anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Secara sederhana, kerangka kerja manajemen risiko BRI digambarkan sebagai berikut:

Four Pillars of Risk Governance & Risk Management

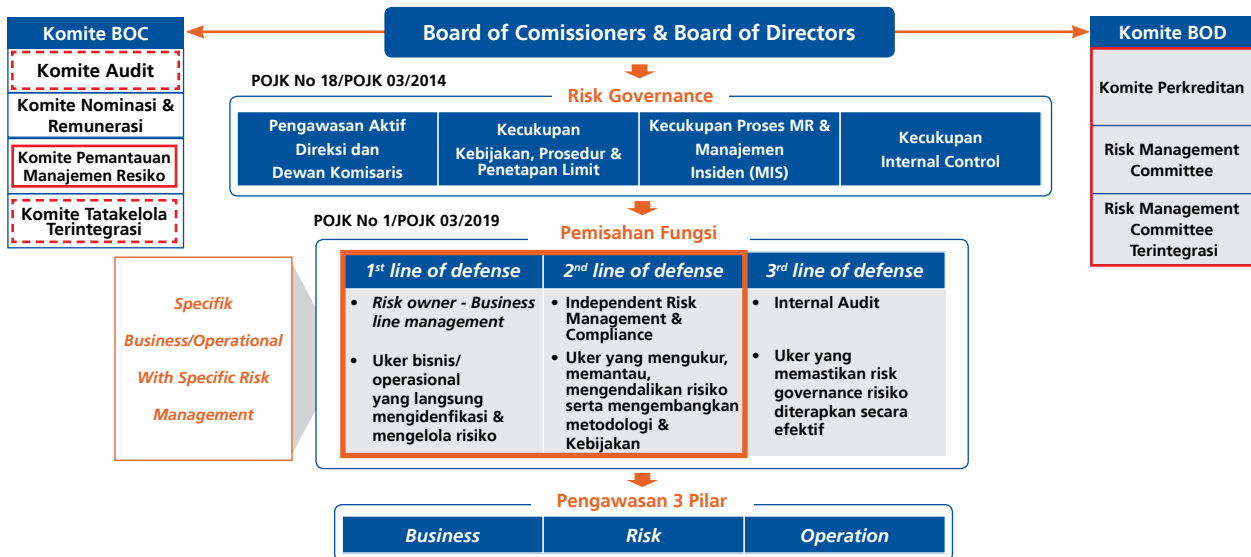


Dalam mendukung pengendalian risiko dan memastikan kepatuhan pelaksanaan pilar bisnis serta *support*, sehingga kinerja BRI tetap sehat dan sustain dengan didukung oleh *operational excellence* guna peningkatan *value*.

Untuk melaksanakan proses tersebut BRI memiliki 4 (empat) pilar pendukung yaitu:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi.
4. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi



Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko BRI terdiri dari Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Komite Audit. Direksi menjalankan fungsi kebijakan risiko melalui Komite terkait manajemen risiko yaitu Risk Management Committee, Risk Management Committee Terintegrasi, dan Komite Kebijakan Perkreditan. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*Regional Risk Management*) bersama Unit Bisnis melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko serta pengendalian risiko pada tingkat operasional.

Pengawasan Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan Manajemen Risiko antara lain meliputi:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada nomor 1 yang dilakukan paling sedikit secara triwulanan.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, yang dimaksud dengan transaksi adalah transaksi yang telah melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskan transaksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal BRI yang berlaku.

Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko yang tertuang dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko. Tugas komite antara lain:

1. Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko.
2. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara triwulanan.
3. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Komite Pemantau Manajemen Risiko secara berkala mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam notulensi. Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko baik secara individu maupun terintegrasi telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada tanggal 10 Februari 2021, 10 Mei 2021, 28 Juli 2021, dan 26 Oktober 2021.

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris BRI mencakup paling sedikit:

1. Mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
2. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh Direksi BRI secara berkala. Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggungjawaban Direksi BRI.

Adapun pertemuan untuk membahas profil risiko dan penerapan manajemen risiko terintegrasi telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 9 Maret 2021 dan 19 Agustus 2021.

Pengawasan Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi BRI berkaitan dengan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) BRI dan perubahannya yang direkomendasikan oleh *Risk Management Committee* (RMC), serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
2. Menetapkan KMR BRI berikut perubahannya setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
3. Menyusun arah kebijakan, dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko, maupun per aktivitas fungsional.
4. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan Kerangka Manajemen Risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BRI, eksposur risiko, dan/atau Profil Risiko secara signifikan.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan KMR BRI yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko yang membidangi.
6. Menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan.
7. Memutus transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, yang antara lain meliputi transaksi yang telah melampaui kewenangan pejabat BRI satu tingkat di bawah Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku.
8. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

9. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
10. Mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
11. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
12. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen.
13. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
14. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI yang ditemukan oleh Audit Intern BRI.
15. Menyetujui usulan produk dan/atau aktivitas baru dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Divisi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko yang membidangi.

BRI sebagai Entitas Utama menetapkan Direktur Manajemen Risiko BRI menjadi Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Wewenang dan tanggung jawab Direksi BRI mencakup paling sedikit:

1. Menyusun kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara tertulis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang telah ditetapkan serta mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan BRI secara signifikan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang berdampak pada kecukupan permodalan, Profil Risiko, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat Profil Risiko Konglomerasi Keuangan BRI, antara lain dengan memberikan rekomendasi atas usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada setiap anggota Konglomerasi Keuangan BRI.
5. Mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan dalam Konglomerasi Keuangan BRI agar dipahami secara jelas.

6. Mengembangkan budaya sadar risiko sebagai bagian dari penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BRI, antara lain dilakukan dengan memupuk kesadaran risiko (*risk awareness*) melalui komunikasi yang memadai dalam Konglomerasi Keuangan BRI tentang pentingnya pengendalian risiko dan pengendalian intern yang efektif.
7. Memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko.
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi kepada Dewan Komisaris BRI secara berkala.
9. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi, dan kecukupan sumber daya manusia di BRI untuk melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain dilakukan dengan cara:
 - a. Penetapan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada Manajemen Risiko.
 - c. Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit kerja bisnis, Manajemen Risiko, maupun unit kerja *support* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - d. Peningkatan kompetensi SDM melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - e. Meningkatkan pemahaman seluruh SDM terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan kerangka risiko secara terintegrasi serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang dilakukan.
10. Memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara independen dan bebas dari benturan kepentingan antara BRI dengan Perusahaan Anak.
11. Mengevaluasi hasil kaji ulang yang dilakukan oleh Divisi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko yang membidangi secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko Terintegrasi.
12. Menetapkan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko secara terintegrasi.
13. Memastikan kecukupan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.

Selama tahun 2021 Direksi BRI telah menetapkan komite-komite pengelola risiko antara lain mengenai:

1. Risk Management Committee dilaksanakan secara triwulanan mengenai pembahasan exposure risiko secara *bank wide* dilaksanakan secara semesteran telah dilaksanakan selama periode 2021 meliputi:
 - a. RMC I tanggal 10 Februari 2021
 - b. RMC II tanggal 29 April 2021
 - c. RMC III tanggal 21 Juli 2021
 - d. RMC IV tanggal 21 Oktober 2021
2. Risk Management Committee Terintegrasi mengenai pembahasan exposure risiko secara Konglomerasi Keuangan dilaksanakan secara semesteran telah dilaksanakan selama periode 2021 meliputi:
 - a. RMCT I tanggal 4 Maret 2021
 - b. RMCT II tanggal 15 Agustus 2021

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

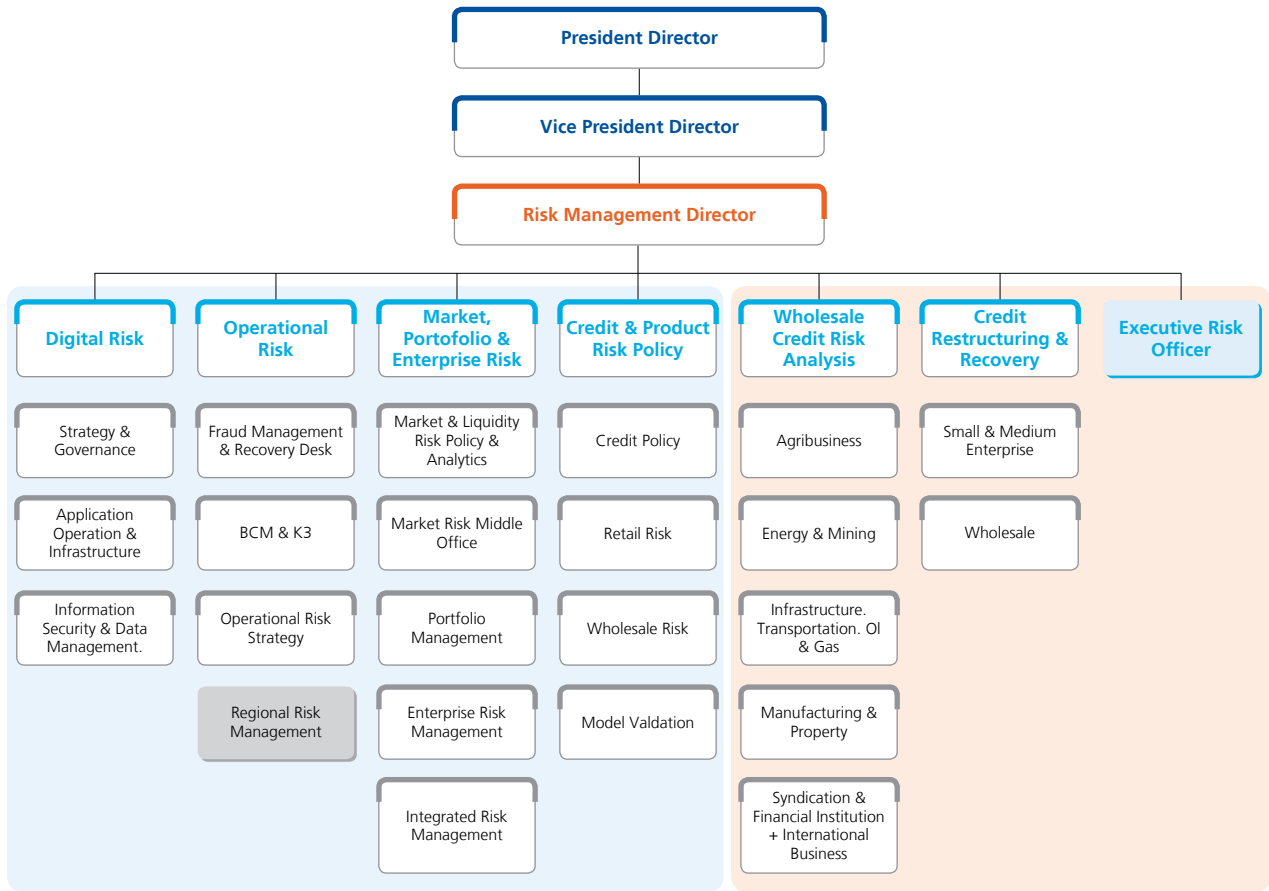
Sesuai dengan POJK No. 18/POJK/2016 Direksi BRI telah menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif yang disetujui dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. BRI telah melakukan memiliki dan melakukan *review* atas kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang memuat limit Risiko keseluruhan maupun limit risiko fungsional untuk area bisnis yang lebih spesifik misalnya di bidang perkreditan, *treasury*, dan operasional secara berkala. Beberapa Kebijakan yang telah dikinikinkan sepanjang tahun 2021 antara lain:

1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko
2. Kebijakan Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (*Risk Based Bank Rating*) dan Profil Risiko Terintegrasi
3. Kebijakan Limit Putusan Delegasi wewenang (PDWK)
4. Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit
5. Kebijakan *Credit Risk Rating* dan *Credit Risk Scoring*
6. Penetapan Limit Transaksi dan Limit Risiko Pasar Instrumen Aset Keuangan Terkait Aktivitas *Treasury*
7. Penetapan Limit Verifikasi Pembukuan dalam Transaksi Unit Kerja Operasional
8. Penetapan *Risk Appetite Statement* dan Limit Risiko

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, Serta Sistem Informasi Pendukung

Dalam menyusun strategi pengelolaan risiko dalam kegiatan bisnis bank sehari-hari BRI mengacu kepada kerangka kerja *Enterprise Risk Management* dengan *Two-Prong Approach* yang mengelola risiko melalui proses bisnis dan operasional sehari-hari dan mengelola risiko melalui pencadangan modal. Dengan pendekatan tersebut, penerapan ERM BRI mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pilar pendukung dalam penerapan ERM dengan pendekatan *two-prong*, antara lain:

1. Organisasi *Front, Mid & Back End*



 : Satuan Kerja Manajemen Risiko

 : *Daily Operation*

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) BRI memiliki tanggung jawab dalam menjalankan proses manajemen risiko dan bersifat independen dari Unit Kerja Operasional, Satuan Kerja Audit Intern, dan Unit Kerja Kepatuhan. Struktur organisasi SKMR BRI telah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BRI serta risiko yang melekat pada BRI. Divisi dalam SKMR BRI yang membidangi ditetapkan oleh Direksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur bidang Manajemen Risiko. Tanggung jawab SKMR BRI meliputi:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- b. Menyusun, mengevaluasi dan menyampaikan usulan penetapan *Risk Appetite*, *Risk Tolerance*, dan limit risiko kepada Direksi dengan memperhatikan masukan dari Unit Kerja Operasional.
- c. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- d. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh RMC dan/atau yang telah disetujui oleh Direksi.
- e. Memantau posisi/eskposur risiko secara keseluruhan (*composite*), maupun per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
- f. Melakukan *stress testing* setiap triwulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, untuk mengetahui dampak dari perubahan kondisi ekonomi terhadap portofolio atau kinerja secara keseluruhan.
- g. Mengkaji ulang secara berkala proses manajemen risiko berdasarkan perkembangan praktek-praktek manajemen risiko yang berlaku secara internasional untuk memastikan kecukupan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, keakuratan metodologi penilaian risiko, dan kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
- h. Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru termasuk kemampuan BRI untuk melakukan aktivitas dan/atau produk baru dan kajian usulan perubahan sistem dan prosedur.
- i. Mengevaluasi akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko, apabila menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*).
- j. Menyusun dan menyampaikan kewajiban-kewajiban pelaporan eskposur risiko sesuai dengan regulasi yang berlaku kepada regulator.

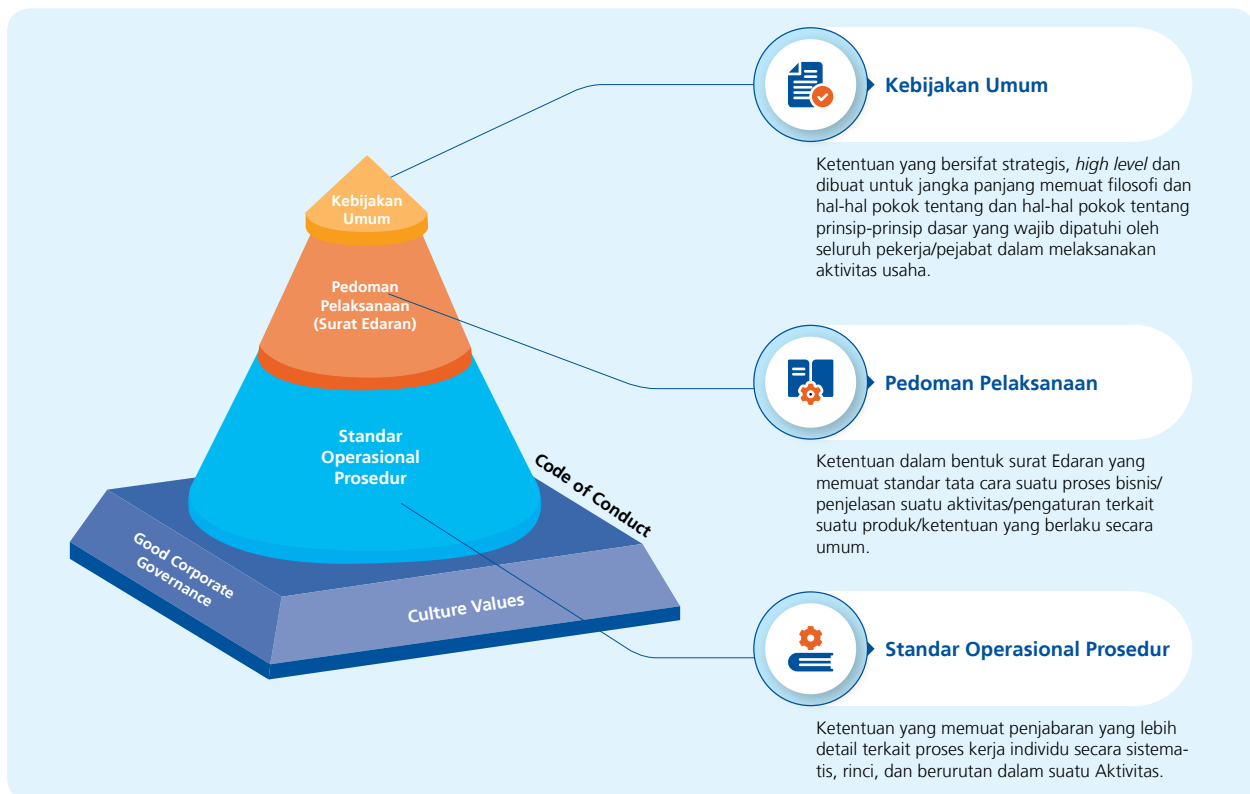
Selain SKMR, untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, maka BRI juga meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan Unit Kerja Operasional, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman (*track record*), kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen risiko dengan cara:

- Peningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam pengelolaan risiko melalui pelatihan di Corporate University atau melalui program sertifikasi maupun *public course*.
- Peningkatan *risk awareness* di seluruh UKO.
- Sosialisasi, forum diskusi maupun forum lainnya untuk menginternalisasi budaya sadar risiko.

Khusus untuk pejabat dan staf yang ditempatkan di Satuan Kerja Manajemen Risiko harus memiliki:

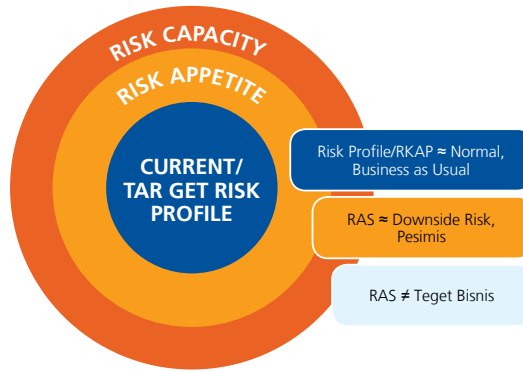
- pemahaman mengenai risiko-risiko yang terkandung dalam setiap produk/aktivitas fungsional bank.
- pemahaman mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk dan/atau aktivitas fungsional BRI, serta mampu mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha BRI.
- pengalaman dan kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko BRI kepada Direksi dan RMC secara tepat waktu.

2. Kebijakan dan Prosedur



BRI telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional dan pengelolaan modal yang menjadi panduan dalam:

- Kebijakan umum dalam penetapan jenis risiko, filosofi risiko, peranan, sasaran, dan kaji ulang penerapan manajemen risiko BRI.
- Kebijakan perkreditan bank, pedoman pelaksanaan perkreditan, SE dan SOP mengenai aktivitas perkreditan.
- Kebijakan operasional non perkreditan, pedoman pelaksanaan aktivitas operasional non perkreditan, SE dan SOP mengenai aktivitas operasional non perkreditan.
- Organisasi manajemen risiko, meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan unit kerja dalam proses manajemen risiko BRI.
- Penetapan *Risk Appetite* dan Limit Risiko.



- f. Mengatur proses manajemen risiko, meliputi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang wajib dikelola BRI serta Mengatur Manajemen Risiko Terintegrasi.
- g. Mengatur *Enterprise Risk Management*, meliputi proses pengelolaan secara terintegrasi berbagai jenis risiko, validasi dan evaluasi, serta penilaian peringkat risiko.
- h. Mengatur sistem informasi manajemen risiko.
- i. Mengatur penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
- j. Mengatur permodalan meliputi kecukupan perencanaan dan pengelolaan permodalan.
- k. Mengatur pengelolaan risiko produk dan/atau aktivitas baru.
- l. Mengatur Manajemen Kelangsungan Usaha (MKU)/*Business Continuity Management (BCM)* dan Strategi Anti *Fraud*.
- m. Mengatur Penerapan Manajemen Risiko secara Terintegrasi.

2. Sistem *Rating*, *Limit* dan *Database*

Sistem *rating* dan *limit* risiko yang dipergunakan untuk memastikan tingkat akurasi serta ketepatan dalam pengambilan keputusan diantaranya meliputi:

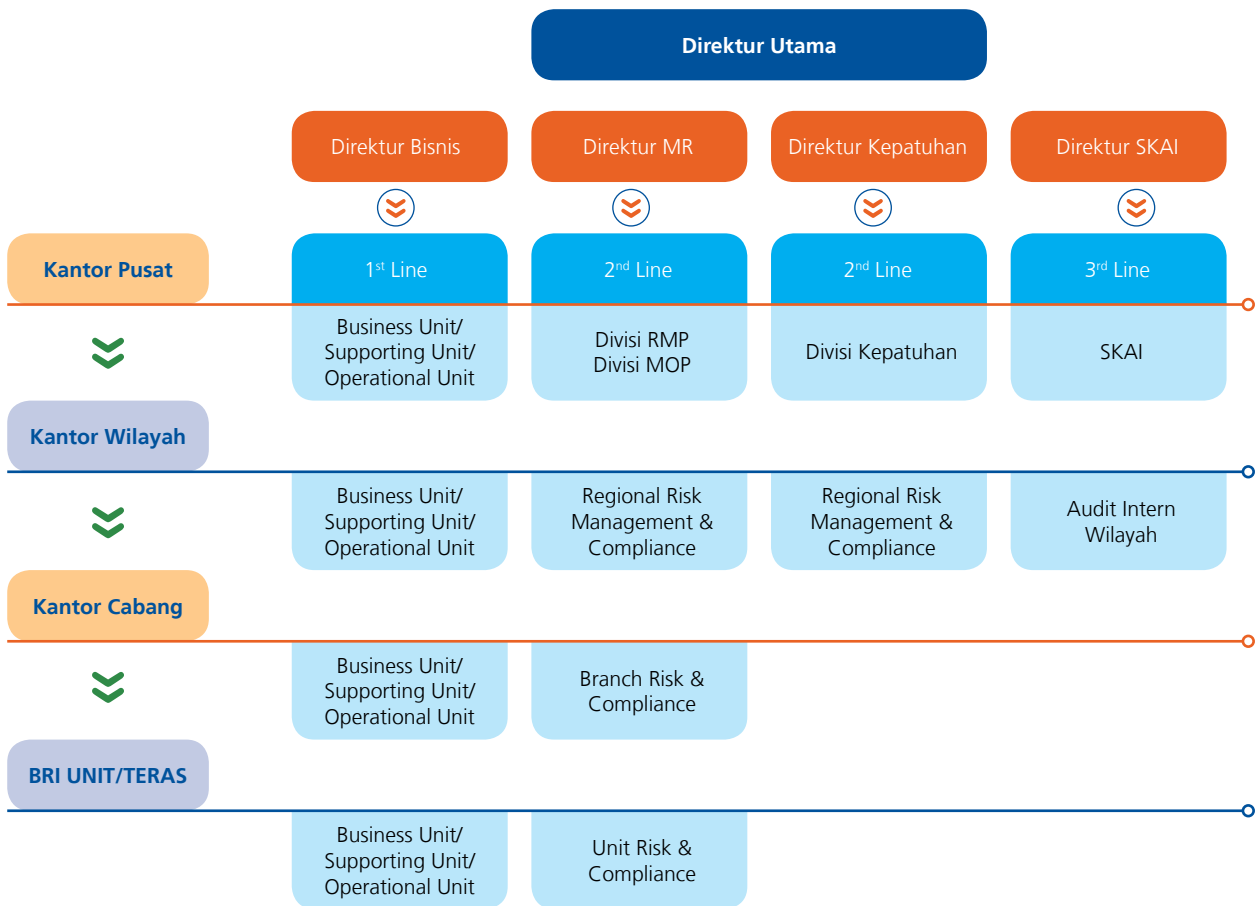
Sistem	Tujuan
<i>Loan Portfolio Guideline</i>	Penetapan limit kualitas portfolio kredit berdasarkan sektor industri
<ul style="list-style-type: none"> · Loan Approval System · Consumer Loan Approval System · Loan Origination System · BRISPOP 	Efisiensi dan mitigasi proses putusan kredit
<i>Early Warning System</i>	Memprediksi Kemungkinan gagal bayar dari debitur eksisting
<i>Risk Performance Analysis Dashboard</i>	<i>Dealer Profitability analysis</i>
<i>Overseas Branches Transaction Monitoring Dashboard</i>	Sistem <i>Monitoring</i> aktivitas Unit Kerja Luar Negeri
<i>Daily Market & Liquidity Risk Dashboard</i>	<i>Monitoring</i> aktivitas <i>treasury</i> harian
<i>Early Warning Indicator</i>	<i>Liquidity early warning signal dashboard</i>
BRISIM <i>Dashboard</i> Pengawasan Operasional	<i>Monitoring</i> aktivitas operasional rekening suspend, kas, dsb
BRISIM <i>Dashboard</i> Pengawasan Kredit	<i>Monitoring</i> Kredit dengan tunggakan
BRISIM <i>Dashboard</i> <i>Regional Office Risk Profile</i>	<i>Monitoring</i> profil risiko per <i>Regional Office</i>

Database yang dipergunakan untuk memastikan tingkat akurasi serta ketepatan dalam pengambilan keputusan yang digunakan BRI diantaranya meliputi:

Sistem	Tujuan
<i>Credit Risk Analysis System</i>	<i>Monitoring Loan at Risk</i> per segmen per divisi, per provinsi, per unit kerja dan per sektor ekonomi
GUAVA System	<i>Market risk middle office treasury System & Database</i>
BRIOPRA	Database pencatatan <i>human error</i> , insiden, dan bencana
	Database Pencatatan <i>Fraud</i>
BRISIM	Database BRI

Sistem Pengendalian Intern

Penerapan Sistem Pengendalian Intern di BRI mengadopsi konsep *Three Line of Defense* yang merupakan implementasi dari strategi pengendalian dalam *framework* COSO, dengan rincian sebagai berikut:



Dengan konsep *Three Line of Defense* maka kegiatan pengendalian internal dilakukan dengan pemisahan fungsi yang jelas dalam mengelola risiko. Selain itu pemantauan atas eksposur risiko dilakukan secara berkala dan tindakan koreksi dilakukan segera sehingga risiko dapat terjaga sesuai dengan *Batasan risk appetite* dari Bank. Kaji ulang dan penilaian efektivitas terhadap sistem pengendalian internal dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal secara berkala.

Sistem Manajemen Risiko

Prinsip Manajemen Risiko

Direksi BRI menetapkan Filosofi Risiko BRI sebagai dasar dari strategi penerapan manajemen risiko BRI untuk pengembangan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi. Filosofi risiko akan mendasari kegiatan-kegiatan dalam penetapan tujuan perusahaan, pelaksanaan aktivitas bisnis bank, dan pemenuhan harapan *stakeholders*. Filosofi Risiko BRI terdiri dari empat komponen, sebagai berikut:

1. Integritas
 Sesuai dengan Nilai Budaya Kerja BRI, dengan penekanan pada:
 Secara tegas membedakan yang benar dengan yang salah serta melakukan kegiatan yang diyakini kebenarannya, demi kepentingan BRI dan nasabah.
2. Profesionalisme
 Sesuai dengan Nilai Budaya Kerja BRI, dengan penekanan pada:
 - a. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan serta tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dengan mengutamakan kepentingan BRI.
 - b. Optimalisasi hubungan risk-return, yaitu mengoptimalkan potensi pendapatan pada suatu tingkat risiko tertentu.

3. Prinsip Kehati-hatian
Menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam mendukung bisnis BRI dengan cara menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
4. Peningkatan Kompetensi yang Berkelanjutan
 - a. Menginvestasikan waktu dan sumberdaya dalam rangka mengembangkan perangkat, sistem, dan pelatihan praktis yang dapat mendukung pengelolaan risiko yang efektif.
 - b. Terus menerus meningkatkan kemampuan dan kecakapan dalam rangka membangun kemampuan pengelolaan risiko yang sesuai dengan praktik terbaik (*best practices*).

Filosofi risiko tersebut menjadi dasar bagi manajemen dalam mengembangkan kemampuan manajemen risiko dengan cara:

1. memahami dan mengelola eksposur risiko secara proaktif,
2. mengoptimalkan hubungan risk-return yang konsisten dengan strategi bisnis, dan
3. menetapkan kebijakan dan menjamin pelaksanaan *good corporate governance*.

Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko BRI dilaksanakan secara lengkap yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material, yaitu faktor-faktor risiko kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan BRI. Faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur risiko.

1. Identifikasi Risiko

BRI mengidentifikasi risiko dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha BRI yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Proses identifikasi risiko akan sangat menentukan cakupan dan skala tahapan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis BRI dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas BRI serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko BRI sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis BRI. Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya.

Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha BRI, produk, transaksi, dan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BRI.

3. Pemantauan Risiko

Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha BRI serta efektivitas proses manajemen risiko. Pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan BRI antara lain dapat didasarkan atas penilaian potensi risiko dengan menggunakan *historical trend*.

Penyempurnaan proses pelaporan risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha BRI, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

BRI menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut. Hasil pemantauan risiko dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.

4. Pengendalian Risiko

Proses pengendalian risiko dilaksanakan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern BRI yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BRI. Kerangka kerja proses pengendalian risiko didasarkan atas suatu hasil evaluasi atas eksposur risiko yang terdapat pada seluruh portofolio produk dan aktivitas fungsional BRI.

Prosedur dan metodologi pengendalian risiko ditetapkan oleh Direksi BRI dengan memperhatikan kompleksitas usaha, kondisi implementasi dan kemampuan sistem manajemen risiko internal serta ketentuan yang berlaku.

Penetapan prioritas dan cara pengendalian risiko harus mempertimbangkan pemetaan risiko inheren BRI melalui analisis terhadap besarnya potensi kerugian finansial dan kemungkinan kejadian risiko serta pertimbangan asas manfaat dan biaya. Prioritas utama dalam mitigasi adalah terhadap risiko yang memiliki dampak kerugian tinggi atau frekuensi kejadian tinggi. Mitigasi dalam bentuk penyempurnaan dan pelaksanaan pengendalian risiko.

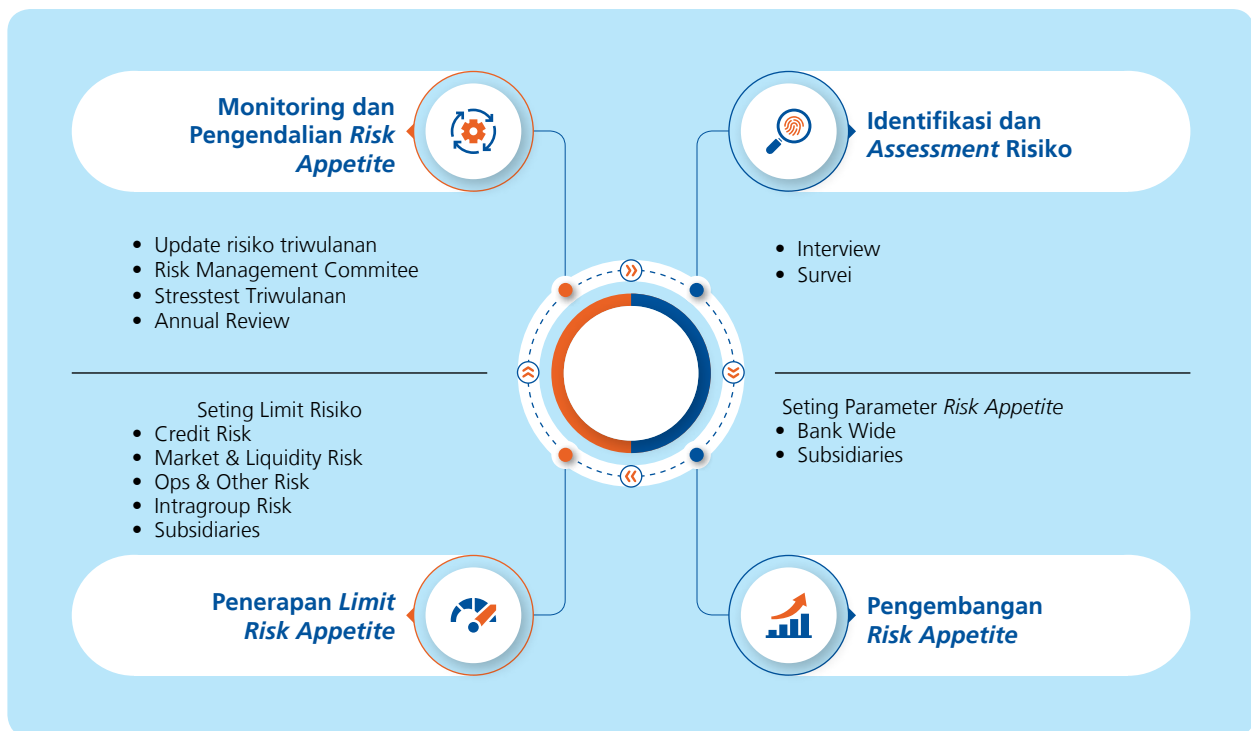
Selain melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian, terdapat proses pendukung lainnya dalam proses manajemen risiko, seperti:

1. Komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja perusahaan sehingga setiap individu dalam perusahaan memahami kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko, Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut.
2. Konsultasi, untuk menjamin tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan dapat tercapai dan tepat sasaran.
3. Monitoring dan *review* (sistem pengendalian intern), yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko.

Risk Appetite Statement

Risk Appetite/tingkat risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil BRI dalam rangka mencapai sasarannya. Penetapan *Risk Appetite* digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan Risiko, sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik serta sebagai panduan dari Manajemen kepada Unit Kerja mengenai jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima dan dikelola.

Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis (Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Bank), serta mencakup seluruh jenis risiko yang bersifat material dalam operasional bisnis BRI. Direksi BRI menetapkan *Risk Appetite* dalam bentuk pernyataan yang bersifat kuantitatif, kualitatif, dan ketidaktoleranan (*zero tolerance*) yang terkait dengan sasaran dan tujuan bisnis BRI. *Risk Appetite* dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis BRI serta perubahan kondisi lingkungan bisnis seperti pada kondisi pandemic COVID-19 saat ini. *Framework* penetapan *Risk Appetite* BRI adalah sebagai berikut:

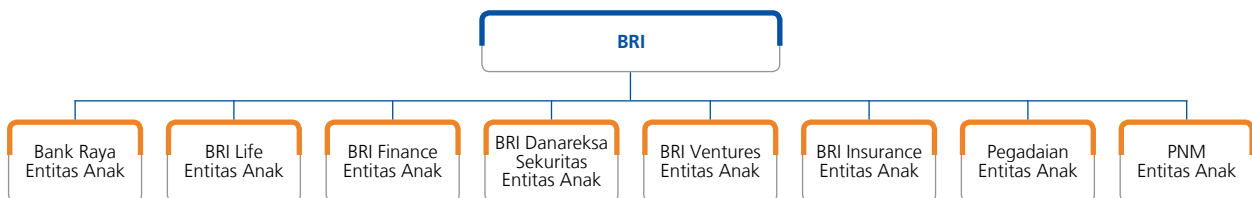


Dimension	Risk Metric
Credit	Non Performing Loan & Coverage
	Loan at Risk & Coverage
Market	Unrealized Loss AFS
	IRRBB
Liquidity	Loan Deposit & Intermediary Macroprudential Ratio
Operational & Digital	Operational Loss & Operational Cost
	Failed rate BRIMO & BRISPOT Transaction
Legal	Legal impairment & Incracht loss ratio
Strategic	CET 1
Finansial	ROA pre tax
	ROE Tier 1
Compliance	Denda pelanggaran dan ketidakpatuhan
Reputation	Complain rate
	Daily return gap BBRI - IDXFIN
Integrated	Subsidiary contribution
	Subsidiaries composite risk rating

Manajemen Risiko Terintegrasi

Dalam rangka pengukuran risiko secara lebih menyeluruh, BRI telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/ 2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Konglomerasi Keuangan BRI adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok dengan BRI karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. BRI sebagai perusahaan induk merupakan Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BRI. Konglomerasi Keuangan BRI memiliki struktur yang terdiri dari BRI sebagai Entitas Utama serta perusahaan anak dan/atau perusahaan terelasi.

Struktur Konglomerasi Keuangan dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi BRI adalah sebagai berikut:



Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi dalam pengelolaan risiko di BRI diantaranya:

1. Penetapan Limit Risiko Terintegrasi

Direksi BRI berwenang untuk menetapkan limit risiko untuk Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*), toleransi risiko, dan strategi Konglomerasi Keuangan BRI secara keseluruhan. Penetapan limit risiko sejalan dengan strategi bisnis, Profil Risiko, kemampuan modal Konglomerasi Keuangan BRI untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, serta ketentuan regulator yang berlaku.

Penyusunan limit dilakukan oleh Divisi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi BRI yang membidangi dengan mempertimbangkan masukan dari anggota Konglomerasi Keuangan BRI. Penetapan limit risiko mencakup:

- limit secara keseluruhan
- limit setiap jenis risiko
- limit setiap anggota Konglomerasi Keuangan yang memiliki eksposur risiko

Limit tersebut direview secara berkala oleh Divisi dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi BRI yang membidangi untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Limit harus dipahami oleh setiap pihak terkait dalam Konglomerasi Keuangan BRI dan dikomunikasikan dengan baik termasuk jika terjadi perubahan.

Jenis risiko-risiko yang dikelola dalam Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi:



2. Penyediaan Permodalan Modal Minimum Terintegrasi

BRI sebagai Entitas Utama memiliki Perusahaan Anak yang berbentuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sehingga membentuk Konglomerasi Keuangan BRI, bahwa dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, Konglomerasi Keuangan BRI perlu memiliki kecukupan permodalan yang memadai.

Modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas Konglomerasi Keuangan BRI secara keseluruhan, *cushion* untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), dan jaring pengaman (*safety net*) dalam kondisi krisis. Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga mendukung kondisi dan kestabilan Konglomerasi Keuangan BRI. BRI selalu memastikan bahwa Konglomerasi Keuangan telah memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Terintegrasi minimum sebesar 100%.

Pelaksanaan Implementasi Basel

Perseroan telah menerapkan beberapa Pilar Basel dalam implementasi Manajemen Risiko, antara lain:

1. *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP)

Sesuai dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, BRI telah memastikan bahwa modal BRI telah memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, dan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), yang meliputi *Capital Conversation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik, di samping itu BRI telah memenuhi persyaratan minimum *Leverage Ratio* yang telah dilaporkan kepada regulator secara triwulanan.

Selain itu dalam rangka *Supervisory review process* BRI telah melaksanakan *Bottom Up Stress Testing* dalam mendukung penerapan kerangka pengelolaan stabilitas sistem perbankan di Indonesia, yang meliputi pengujian *solvency stress test* dan *liquidity assessment*.

2. Kredit

Perhitungan modal minimum untuk risiko kredit dilakukan dengan menggunakan Standardized Model sesuai dengan SE OJK No. 11/SEOJK.03/2018 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Namun demikian, terhitung mulai Tahun 2023 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko kredit wajib menggunakan Pendekatan Standar dengan berpedoman pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021.

3. Operasional

Perhitungan modal minimum untuk risiko operasional dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar. Namun demikian, terhitung mulai Tahun 2023 Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional wajib menggunakan Pendekatan Standar dengan berpedoman pada SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020.

4. Pasar dan Likuiditas

- a. Perhitungan modal minimum untuk risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan POJK No. 38/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.
- b. Pengukuran ketahanan Likuiditas Bank dengan menggunakan Basel III *Approach: Liquidity Coverage Ratio & Net Stable Funding Ratio*, sesuai dengan POJK No. 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum dan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum. Sebagai tambahan pilar Basel dalam pengukuran ketahanan likuiditas, terhitung mulai Tahun 2023 akan dilakukan implementasi *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* (ILAAP).
- c. Pengukuran *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) sesuai dengan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam Banking Book (*Interest Rate Risk in The Banking Book*).

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Terdapat 10 (sepuluh) Risiko yang dikelola BRI yaitu:

Risiko Kredit

Risiko kredit terjadi akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank yang pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Bank yang kinerjanya bergantung

pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*), atau kinerja peminjam dana (*borrower*) dan dapat diakibatkan juga oleh terkonsentrasinya penyediaan dana debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Dalam penerapan manajemen risiko kredit, BRI melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemisahan pejabat kredit bidang:
 - a. *Relationship Management/RM* yang bertanggung jawab melakukan asesmen *Business Feasibility* serta melakukan upaya penagihan pinjaman *performing loan*.
 - b. *Credit Risk Management/CRM* yang bertanggung jawab melakukan asesmen *Business Risk* dalam proses pemberian kredit serta memantau *Early Warning System*.
 - c. *Credit Restructuring and Recovery/CRR* yang bertanggung jawab mengelola kredit bermasalah dengan mengoptimalkan pengembalian pinjaman bermasalah.
2. Pengembangan *Internal Risk Rating* sebagai alat bantu pada proses identifikasi dan pengukuran tingkat risiko calon debitur.
3. Pengembangan *Early Warning System* sebagai alat bantu pada proses pemantauan tingkat risiko kredit secara portfolio.
4. Penetapan kebijakan manajemen risiko kredit, di antaranya tata kelola, pengelolaan limit putusan kredit, penentuan batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit berdasarkan geografis dan pengelolaan limit konsentrasi per industri/sektor.

Pengembangan sistem informasi berupa *Dashboard Monitoring Credit Risk Analisis Sistem* (CRAS) untuk mengukur kualitas kredit (LAR, CL, SML, NPL) hingga level unit kerja, segmen bisnis dan sektor industri debitur untuk membantu proses pengelolaan risiko kredit secara portfolio.

Risiko Pasar

Risiko yang muncul pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari variabel pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Ekuitas dan Risiko Komoditas. Untuk Risiko Nilai Tukar dan Risiko Suku Bunga dapat berasal dari posisi *trading book* dan *banking book*.

Pengukuran risiko pasar di BRI dilakukan secara berkala (harian, mingguan, bulanan dan triwulanan) antara lain dengan:

1. Menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan metode pengukuran *standardized* dan pengukuran internal model (VaR),
2. Melakukan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar maupun *benchmark rate* serta *repricing gap* atas aset dan liabilitas.
3. Mengimplementasikan sistem terintegrasi untuk *treasury and market risk*, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*.

Dalam manajemen risiko pasar, BRI secara rutin menyelenggarakan forum *Risk Management Committee* yang membahas profil risiko pasar, *market risk issue* baik internal maupun eksternal, dan *stress testing risiko pasar*. Selain itu BRI juga melakukan rapat ALCO yang

dilakukan setiap bulan untuk membahas kondisi *asset* dan *liability* antara lain *maturity profile*, *interest rate risk*, *NII simulation*, dan pengelolaan *PDN*.

Fungsi manajemen risiko pasar terbagi menjadi tiga fungsi yang terdiri dari unit kerja *front office* (*Treasury Business Division*), *middle office* (*Market, Portfolio & Enterprise Risk Management Division*), dan *back office* (*Payment Operation Division*). *Front office* memantau pergerakan harga pasar dan melakukan aktivitas *Treasury*, menyesuaikan portofolio sesuai dengan arah pergerakan *market*, *middle office* menetapkan dan memantau limit risiko pasar, limit transaksi dan secara berkala memastikan data pasar (*market price*) yang digunakan untuk *mark to market* (MTM), sedangkan *back office* melakukan *settlement* dan secara harian dan menetapkan MTM pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman pekerja.

Kebijakan, prosedur dan limit risiko pasar telah disusun dan tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan *Treasury* serta Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (PPMPRP) dan Ketentuan Penetapan Limit atas Transaksi dan Limit Risiko Pasar Instrumen Keuangan terkait aktivitas *Treasury* BRI. Adapun limit yang tercantum dalam kebijakan tersebut seperti limit *open position* untuk *trading*, limit transaksi *dealer*, limit *cut loss* dan *stop loss*, limit *uncommitted credit line*, *counterparty limit* serta limit *value at risk* (VaR).

BRI juga melakukan simulasi *stress testing* risiko pasar yang bertujuan untuk mengukur potensi risiko pada portofolio yang dimiliki pada kondisi *stress*. Dalam *stress testing*, *shock* dapat berasal dari nilai tukar maupun suku bunga yang berdampak pada eksposur risiko pasar yang mencakup Posisi Devisa Neto (PDN), Surat Berharga kategori *Fair Value through Other Comprehensive Income* (FVTOCI) dan *Fair Value through Profit or Loss* (FVTPL).

Risiko Likuiditas

Risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Guna mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas yang mencakup:

1. Manajemen likuiditas
2. Pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal
3. Penetapan strategi pendanaan
4. Sistem peringatan dini
5. Proyeksi arus kas
6. Profil maturitas
7. Penetapan limit risiko likuiditas
8. *Stress testing* risiko likuiditas

9. Rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*)
10. Pedoman pengelolaan risiko likuiditas jangka pendek dan jangka panjang.

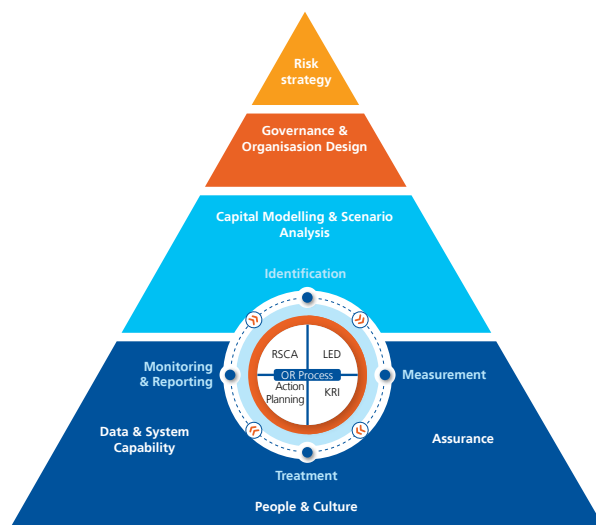
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan risiko likuiditas yang memadai antara lain kecukupan dana harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi. Strategi pendanaan diutamakan berasal dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI juga melakukan simulasi *stress testing* risiko likuiditas untuk mengukur ketahanan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan permodalan selama kondisi krisis. *Stress testing* ini juga digunakan sebagai acuan untuk menyusun rencana pendanaan darurat (*contingency plan*) serta penetapan dan pemantauan limit risiko likuiditas.

Untuk memenuhi penerapan Basel III, BRI melakukan *monitoring* terhadap dua rasio utama likuiditas yaitu Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/ LCR*) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio/ NSFR*). Hasil *monitoring* terhadap kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa posisi BRI berada di atas batas minimum rasio yang ditetapkan Basel III.

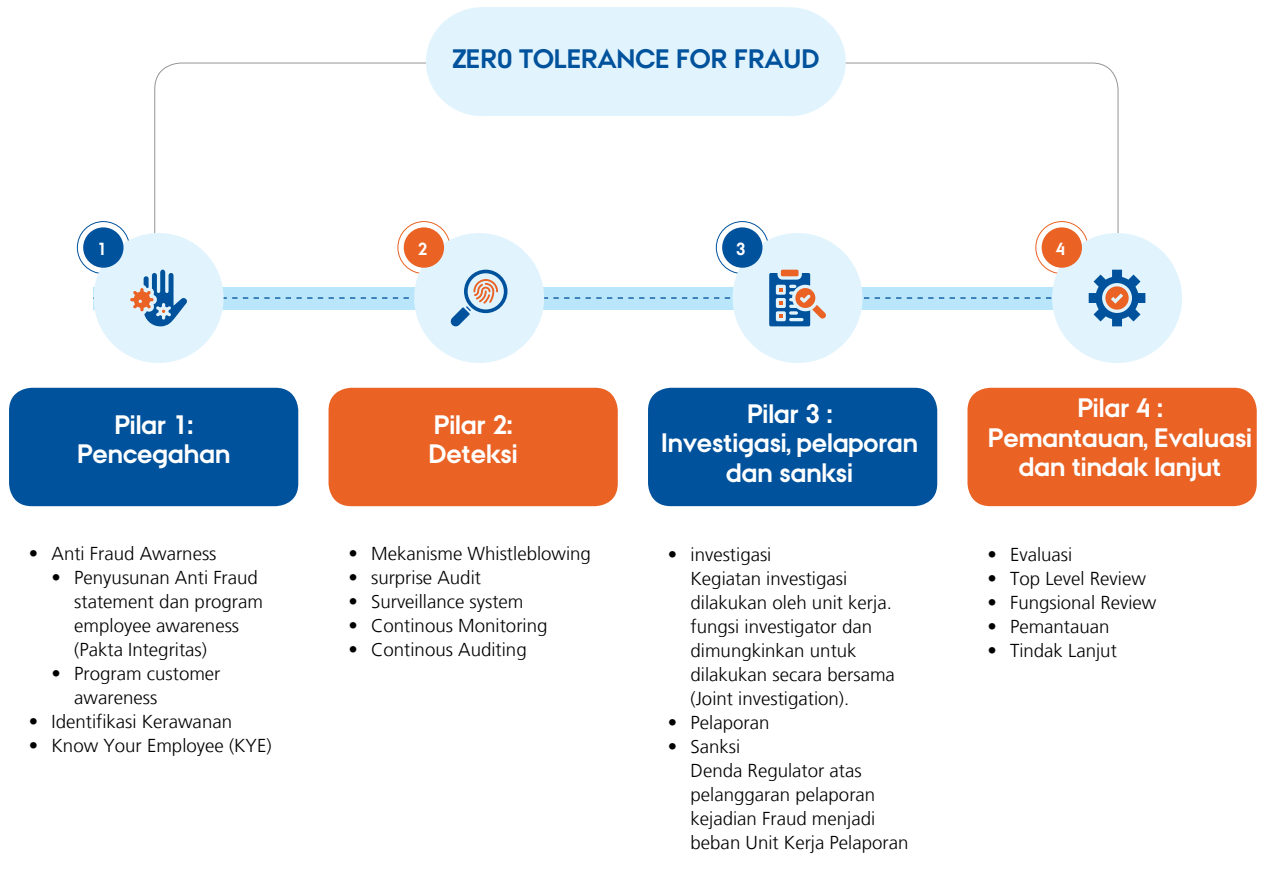
Risiko Operasional

Risiko Operasional terjadi karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya gangguan eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Kejadian Risiko Operasional merupakan kejadian risiko yang melekat pada setiap proses bisnis dan operasional yang dijalankan Bank. Risiko Operasional dapat memicu terjadi Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, serta Risiko lainnya apabila risiko operasional tidak dikelola dengan baik. Strategi dalam pengelolaan Risiko Operasional BRI digambarkan sebagai berikut:



Pengendalian risiko operasional di BRI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemisahan fungsi *Maker*, *Checker*, dan/atau *Signer* (MCS) dalam setiap aktifitas operasional bank sesuai dengan tingkat risiko dengan tujuan untuk memastikan kebenaran aktivitas Bank. Pemisahan fungsi MCS ditetapkan dalam ketentuan Bank dan diimplementasikan pada semua sistem Bank, antara lain: *Branch Delivery System*, *Fixed Asset Management System*, *Human Capital System* dan sebagainya. Pengendalian internal dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana aktivitas sebagai *first line*.
2. Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) sebagai *second line* melakukan *continuous monitoring* untuk memastikan pelaksanaan pengendalian internal oleh *first line*, antara lain melalui kegiatan *control verification*, *control improvement* dan internalisasi budaya sadar risiko dan kepatuhan guna mencapai *zero fraud*.



3. Identifikasi Risiko dilaksanakan melalui penyusunan/pengkinian *Risk Control Self Assesment* (RCSA) yang dilakukan pada setiap awal semester menggunakan data historis kejadian risiko operasional dan kelemahan kontrol, serta rencana bisnis ke depan. Kejadian risiko operasional meliputi *fraud*, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian bencana/eksternal.
4. Pengukuran risiko dilakukan bersamaan dengan identifikasi risiko pada saat penyusunan RCSA.
5. Pemantauan risiko dilakukan oleh Unit Kerja selaku *Risk Owner* dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) terhadap *Key Risk Indicator* (KRI) dan data anomali yang terdapat dalam *Dashboard* pemantauan risiko.
6. Pengendalian Risiko dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penyusunan kebijakan dalam bentuk SOP yang berisi penetapan *internal control* untuk setiap aktivitas Bank.
 - b. Pelaksanaan *internal control* oleh pekerja yang menjalankan aktivitas Bank di Unit Kerja sesuai dengan kewenangannya.
 - c. Melakukan *monitoring* pelaksanaan *internal control* oleh BRC (*Branch Risk and Compliance*) dan URC (*BRI Unit Risk and Compliance*) yang merupakan SKMRO di Unit Kerja. BRC dan URC juga bertugas untuk melaksanakan Internalisasi Budaya Sadar Risiko dan Kepatuhan di Unit Kerja.
 - d. Pengendalian risiko pada Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB) dalam bentuk *Risk Self Assessment* oleh Product Owner dan Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko oleh SKMRO.
 - e. Penyusunan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) dan pelaksanaan uji coba BCM secara berkala minimal satu tahun sekali untuk memastikan kesiapan resiliensi Bank dalam menghadapi bencana/krisis.

BRI berkomitmen mengembangkan Teknologi dan Sistem Informasi dalam penerapan manajemen risiko operasional. BRI telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional yang dinamakan BRIOPRA, dengan cakupan meliputi:

a. Risk & Control Self Assessment (RCSA)

Merupakan modul penilaian potensi risiko operasional dan efektivitas kontrol untuk memprediksi risiko operasional di setiap unit kerja.

b. Manajemen Insiden (MI)/Loss Event Database (LED)

Merupakan modul untuk pencatatan insiden/kerugian akibat risiko operasional yang telah terjadi beserta mitigasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menjadi pelajaran dalam mengelola risiko di kemudian hari dan sebagai sumber data dalam menghitung beban modal risiko operasional.

c. Key Risk Indicator (KRI)

Merupakan modul untuk memantau indikator risiko operasional yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan/unit kerja. KRI telah disusun sampai level unit kerja operasional untuk membantu pemimpin unit kerja mengelola risiko sejak dini.

d. Forum Manajemen Risiko

Merupakan modul untuk mendokumentasikan dari pelaksanaan Forum Manajemen Risiko yang membahas potensi risiko yang telah/akan terjadi beserta mitigasi risiko yang dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko/kerugian operasional. Forum Manajemen Risiko dilakukan oleh setiap unit kerja secara berkala.

e. Maturitas Penerapan Manajemen Risiko

Merupakan modul untuk melakukan *self assessment* terhadap tingkat Maturitas penerapan Manajemen Risiko Unit Kerja. Penilaian tingkat maturitas dilakukan oleh pemimpin unit kerja (*self assessment*) dan diverifikasi oleh SKMRO di Wilayah (*Risk Management and Compliance/RMC*) dan di Kantor Pusat.

f. Business Continuity Management (BCM)

Merupakan modul untuk mencatat hasil Penilaian Risiko Ancaman Bencana (PRAB), *Business Impact Analysis* (BIA), Penetapan Strategi Pemulihan, Penyusunan *Business Continuity Plan* (BC Plan), Penyusunan *Emergency Response Plan* (ER Plan), dan pelaksanaan uji coba. Modul ini dapat memberikan informasi kesiapan unit kerja menghadapi bencana/krisis.

g. Capital Calculation

Merupakan modul untuk simulasi perhitungan beban modal risiko operasional.

h. Pembentukan organisasi Digital Risk Division

Dengan semakin rentannya BRI terhadap *cybercrime* seiring dengan digitalisasi yang dilakukan BRI maka dibentuk Digital

Risk Division yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian risiko digital. Sebelumnya BRI telah memiliki unit kerja khusus yang menangani risiko Digital tetapi masih setingkat Department di bawah supervisi Operation Risk Division.

Risiko Hukum

Manajemen risiko hukum dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran adanya potensi risiko hukum pada setiap aktivitas operasional dan bisnis BRI sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sedini mungkin, membantu memecahkan permasalahan hukum, dan meminimalkan potensi kerugian akibat risiko hukum.

Unit kerja Hukum beserta jajarannya merupakan unit kerja yang berfungsi sebagai pengawas bidang hukum/*legal watch* untuk menyediakan analisis dan advis hukum kepada seluruh pekerja pada setiap jenjang organisasi.

Dalam rangka meminimalisasi potensi kejadian risiko hukum, secara berkala dilakukan sosialisasi aspek-aspek hukum yang berlaku untuk meningkatkan *awareness* pekerja dan unit kerja operasional terhadap konsekuensi hukum yang terdapat dalam setiap aktivitas yang dijalankan.

Divisi Legal secara aktif men-sosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum di Unit Kerja Operasional. Pengendalian Risiko Hukum dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

1. Divisi Legal sebagai koordinator Risiko Hukum di BRI melakukan kajian terhadap perubahan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa ketentuan internal BRI tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Divisi Legal memberikan advis/opini hukum atas perjanjian kerjasama (PKS)/*agreement* antara BRI dengan pihak lain, untuk melindungi kepentingan hukum BRI sebelum perjanjian/*agreement* ditandatangani oleh pejabat BRI yang berwenang.
3. Setiap transaksi perbankan di BRI yang meliputi operasional, perkreditan dan hubungan ketenagakerjaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh dokumen hukum yang memadai
4. Divisi Legal bekerja sama dengan *Legal Officer* (LO) di *Regional Office* memantau risiko hukum di seluruh Unit Kerja BRI dengan mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum serta mensosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum.
5. Divisi Legal menyusun pedoman-pedoman hukum misalnya pedoman penyusunan PKS dan buku saku hukum baik untuk bidang operasional maupun bidang perkreditan.
6. Pembinaan staf pada Unit Kerja Operasional (UKO) di *Regional Office* dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi dalam mengendalikan risiko hukum di wilayah kerja yang bersangkutan diantaranya berupa sosialisasi, diskusi mengenai opini atas suatu kejadian dari sisi hukum yang berlaku.

7. Legal Officer (LO) di *Regional Office* memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya kepada UKO apabila terjadi kasus hukum di UKO dan berkoordinasi dengan Divisi Legal.
8. Divisi Legal memberikan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus.
9. Apabila diperlukan, UKO dapat berkonsultasi dengan Divisi Legal mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang bersifat teknis.
10. Dalam hal adanya tuntutan hukum yang memiliki potensi kerugian sangat signifikan bagi Bank dan atau adanya tuntutan hukum yang secara signifikan bisa berdampak negatif pada reputasi BRI, maka sebagai *contingency plan* harus dilakukan tindakan untuk mengurangi risiko hukum, antara lain melalui penggunaan jasa pengacara dan melaporkan perkembangannya kepada Direksi.
11. Sebagai bagian dari pemantauan terhadap risiko hukum, Divisi Legal berkoordinasi dengan Divisi Operation Risk terkait dengan pelaporan profil risiko hukum BRI setiap bulan kepada Direksi melalui *Dashboard* Profil risiko

Implementasi perangkat manajemen risiko seperti RCSA, MI dan KRI digunakan juga untuk menunjang pelaksanaan proses manajemen risiko hukum dalam mengidentifikasi, memantau dan *monitoring* atas tuntutan/gugatan hukum terhadap BRI sehingga langkah-langkah pengendalian risiko hukum dapat dilakukan sedini mungkin. Saat ini telah dilakukan pengembangan sistem untuk dapat memudahkan dalam melakukan pemantauan dan *monitoring* aspek legal BRI seperti: laporan MR hukum, data perkembangan perkara, dokumen legalitas perusahaan, dan lainnya.

Risiko Strategik

Risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber Risiko Strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Evaluasi risiko strategik BRI dilakukan Direksi secara berkala melalui forum yang membahas tentang strategi dan kebijakan risiko strategik, antara lain forum *Bisnis Performance Review*, ALCO, *Risk Management Committee*, dan Rapat Direksi yang digunakan untuk menyelaraskan strategi BRI. Perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk di dalamnya Rencana Jangka Panjang (*corporate plan*), RBB, dan RKAP.

RBB dan RKAP di-*review* kembali setiap tahun berdasarkan perubahan lingkungan usaha dan rencana perusahaan. Sementara itu, Rencana Jangka Panjang menjadi pedoman dalam melakukan perencanaan setiap tahun dan dapat di-*review* apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terhadap lingkungan bisnis dan sumber daya.

Dalam rangka memitigasi risiko strategik, BRI telah mengimplementasikan perangkat pemantauan secara berkala melalui parameter yang tercermin pada profil risiko strategik. Pengukuran risiko strategik antara lain dilakukan dengan menganalisis eksposur dan membandingkan eksposur risiko dengan limit yang ditetapkan, antara lain ekspansi pinjaman, dana pihak ketiga, BOPO dan *fee-based income*. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut atas eksposur risiko strategik didokumentasikan dalam Rapat *Risk Management Committee*.

Risiko Kepatuhan

Perbankan merupakan suatu industri yang *highly regulated*, sehingga BRI senantiasa melakukan *monitoring* atas kepatuhan terhadap ketentuan yang diterbitkan oleh Regulator maupun instansi berwenang lainnya. Sanksi regulator terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dimaksud bervariasi dari teguran, denda/penalti, hingga pencabutan lisensi. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan pada seluruh aktivitas BRI sesuai ketentuan yang berlaku.

BRI menerapkan metodologi *Risk Based Approach* yang terangkum dalam kebijakan dan SOP (*Standard Operational Procedure*) terkait APU dan PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Selain itu, adanya sistem AML (*Anti Money Laundering*) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko kepatuhan, BRI juga melakukan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagai proses yang lebih mendalam dari *Customer Due Diligence* (CDD), yang sebelumnya dikenal dengan *Know Your Customer* (KYC).

Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Fungsi pengendalian risiko reputasi dilakukan oleh Unit kerja Sekretariat Perusahaan (SKP) sebagai *public relations* BRI. Langkah yang dilakukan BRI dalam manajemen risiko reputasi antara lain melalui komunikasi yang konsisten, dengan menjaga keterbukaan informasi dan transparansi kepada seluruh *stakeholder*, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak media dalam hal menjaga nama BRI secara korporat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meminimalkan dan menangani keluhan atau *complain* dari *stakeholder* yang mengakibatkan timbulnya publikasi negatif terhadap BRI.

Selain pengelolaan risiko reputasi dari aspek sisi publik, BRI juga mengelola risiko reputasi yang timbul dari interaksi dengan nasabah. BRI segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Mitigasi risiko reputasi maupun kejadian yang menimbulkan risiko reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan asas materialitas permasalahan dan biaya.

Dalam rangka pengendalian risiko reputasi yang lebih besar di masa depan, tindakan pencegahan dan pemulihan risiko reputasi yang telah dilakukan diikuti dengan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko reputasi. Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk Corporate Secretary Division untuk menangani setiap informasi negatif. Proses pengelolaan risiko reputasi tertuang dalam DUJ maupun BPO Corporate Secretary Division. Prosedur penanganan aduan (*Complaint Handling*) dengan SLA tertentu.

Risiko Intragrup

Risiko Transaksi Intragrup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Pengelolaan Risiko Intragrup di BRI adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Intragrup dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif untuk eksposur yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
2. Direksi BRI membentuk Risk Management Committee Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risiko Intragrup, Kebijakan Risiko Intragrup serta Pemantauan dan Pengendalian Risiko Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BRI untuk membahas Risk Issue Risiko Intragrup dan rencana tindak lanjutnya.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Intragrup.

BRI telah mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan limit risiko intragrup meliputi:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Penetapan parameter & limit risiko intragroup konglomerasi keuangan.
3. Risk Management Committee Terintegrasi.

Risiko Asuransi

Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Pengelolaan Risiko Asuransi di BRI adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Risiko Asuransi secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI terhadap Anak Perusahaan yang bergerak dibidang Asuransi.
2. Direksi BRI membentuk Risk Management Committee Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Asuransi dan kebijakan Risiko Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan BRI.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengarahkan, meyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - b. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
4. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Asuransi.
5. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas *Risk Issue* Risiko Asuransi dan rencana tindak lanjutnya.

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan limit risiko asuransi meliputi:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
2. Penetapan parameter & limit risiko asuransi konglomerasi keuangan.
3. Risk Management Committee Terintegrasi.

Pelaksanaan Edukasi Manajemen Risiko

Untuk menerapkan manajemen risiko yang berkualitas, dibutuhkan pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang tugasnya. Untuk mendapatkan SDM yang andal dalam bidang manajemen risiko sekaligus memenuhi ketentuan regulator tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, maka BRI melaksanakan edukasi manajemen risiko antara lain:

1. *Sertifikasi Manajemen Risiko dan Refreshment*
Pendidikan Sertifikasi Manajemen Risiko diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pekerja BRI dengan *corporate title Senior Manager* ke atas. Bagi yang telah mendapat Sertifikasi Manajemen Risiko, maka BRI tetap melaksanakan edukasi dengan program *refreshment* agar yang bersangkutan tetap mendapatkan informasi terkini mengenai manajemen risiko.
2. *Metode e-learning*
Edukasi manajemen risiko juga dilaksanakan melalui metode pembelajaran interaktif melalui *e-learning*. *E-learning* ditujukan untuk seluruh pekerja BRI sebagai media edukasi mandiri agar memahami filosofi dan penerapan manajemen risiko.

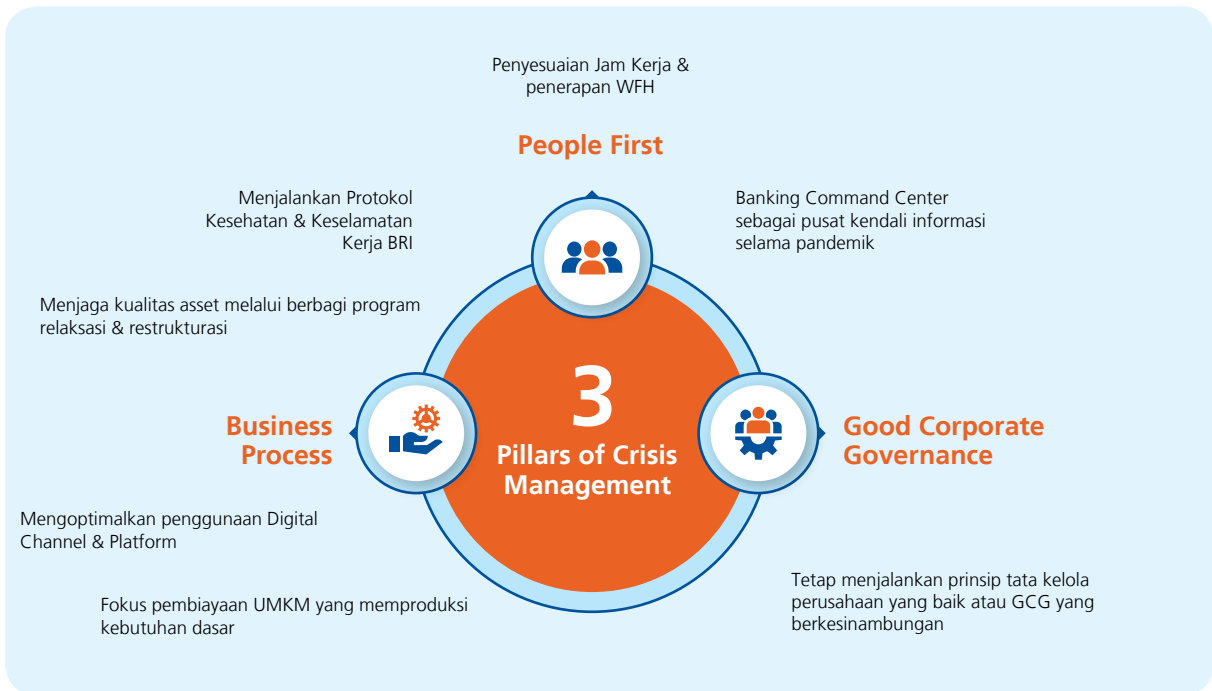
3. Sosialisasi
Sosialisasi rutin dilakukan oleh unit kerja manajemen risiko kepada seluruh jajaran pekerja BRI seluruh Indonesia. Sosialisasi terutama dilakukan mengenai perangkat manajemen risiko yang digunakan di BRI.
4. Pendidikan
Pendidikan bagi pekerja BRI melalui seminar dan *training* yang diselenggarakan pihak eksternal maupun internal.

Top Emerging Risk

Selama tahun 2021 dan beberapa tahun kedepan, risiko yang sedang dihadapi oleh BRI diantaranya mengenai COVID-19 Uncertainty, Financial Economic, Cybercrime, Countercyclical

1. COVID-19 Uncertainty

Ketidakpastian berakhirnya *pandemic* COVID-19 (munculnya varian-varian baru) masih memberikan kontraksi terhadap lajunya pemulihan ekonomi. Selama menghadapi pandemi COVID-19, BRI menempatkan kesehatan dan keselamatan manusia, baik karyawan maupun pelanggan, sebagai prioritas utama. Protokol bisnis berupa serangkaian kebijakan dan manfaat telah dibuat untuk mendukung prioritas ini, seperti menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan bagi pekerja BRI dan mendorong nasabah untuk menggunakan *e-channel* BRI agar nasabah tetap aman bertransaksi dari mana saja. Sebagai pusat kendali dan informasi selama pandemi, BRI juga telah membangun *Banking Command Center* untuk memonitor perkembangan terkini terkait COVID-19 dan dampaknya terhadap operasional dan kinerja keuangan.



Sedangkan dalam pengelolaan manajemen risiko kredit beberapa hal yang dilakukan antara lain perubahan kebijakan perkreditan sesuai dengan relaksasi OJK, memastikan Pencadangan yang cukup, melakukan *Portfolio stress test & analysis* serta melakukan *Portfolio monitoring* terutama terhadap kredit yang direstrukturisasi terdampak Covid.

2. Financial Economic

Kebijakan *tapering off* Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed) yang dilakukan dengan cara pengurangan stimulus moneter berupa pembelian aset sejak November 2021 secara bertahap hingga tahun 2022 diprediksi akan dilanjutkan dengan kebijakan kenaikan suku bunga The Fed. Dari sisi nilai tukar, hal ini tidak menyebabkan gejala berlebihan dikarenakan The Fed telah memberikan sinyal akan melakukan *tapering* sejak awal tahun 2021, sehingga pasar sudah mengantisipasi terjadinya dampak terhadap pergerakan nilai tukar. Dari sisi suku bunga, potensi kenaikan suku bunga The Fed setelah *tapering off* dapat mempengaruhi kenaikan suku bunga Bank Indonesia BI-7 *Days Reverse Repo Rate* (BI-7DRR) dan selanjutnya kepada suku bunga yang berlaku di BRI. Dalam penetapan tingkat suku bunga yang berlaku baik untuk simpanan maupun pinjaman serta pengelolaan aset dan kewajiban lainnya seperti surat berharga, BRI menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan pergerakan suku bunga pasar dan isu terkini seperti *tapering off*. Pengukuran risiko atas pengelolaan aset dan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga diperhitungkan dalam *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) yang limitnya telah ditetapkan dalam *Risk Appetite Statement* (RAS) BRI.

3. Cybercrime

Seiring dengan tren digitalisasi perbankan, serangan siber menjadi ancaman berkelanjutan bagi BRI baik frekuensi maupun intensitas serangan dari lokal maupun dalam skala global selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021, sebagai upaya dalam mengantisipasi tren digitalisasi perbankan tersebut serta memperkuat transformasi digital Perusahaan, BRI membangun Digital Risk Division yang bertugas untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko digital bank dan konglomerasi. Diharapkan dengan adanya penguatan Manajemen Risiko digital BRI dapat meminimalisir dan mengendalikan risiko digital yang muncul di seluruh aktivitas Bank guna menjamin keamanan layanan dan transaksi nasabah.

4. Countercyclical

Countercyclical risk merupakan risiko akibat terjadinya pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. *Countercyclical risk* diproyeksikan dapat terjadi apabila *excessive economy recovery*, *Inflation unmanageable*, dan *Loan Growth faster than funding* yang kemudian mengarah pada *Countercyclical*. BRI menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan penyediaan dana dan apabila terjadi *Countercyclical* BRI telah mempersiapkan beberapa strategi antara lain:

- Faster clean up/bad-debt write-offs, aim for higher recovery rate*
- Lower coverage ratio, enhance risk-based pricing model to boost product competitiveness*
- More relax LPG as guidelines for growth strategy*

Penilaian Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan oleh *three line of defense*, yaitu seluruh *risk taking unit* selaku *first line*, unit kerja kepatuhan dan manajemen risiko selaku *second line* dan unit internal audit selaku *third line*. Hasil penilaian profil risiko pada triwulan III 2021, peringkat profil risiko BRI berada pada tingkat *low to moderate*. Selain penilaian risiko secara individu, BRI sebagai Konglomerasi Keuangan juga melakukan penilaian risiko secara terintegrasi. Hasil penilaian profil risiko terintegrasi pada semester I 2021, peringkat profil risiko terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI berada pada tingkat *low to moderate*. Hasil *self assessment* tersebut menunjukkan bahwa BRI mampu menjaga tingkat pengelolaan risiko seiring dengan berkembangnya bisnis dan persaingan bank di Indonesia.

Self Assessment

Profil Risiko Individu dan Konsolidasi

Profil Risiko BRI posisi Triwulan IV-2021 disusun berdasarkan data Bulan Desember 2021. Secara komposit, Profil Risiko BRI Triwulan IV-2021 mendapatkan peringkat komposit 2 (*low to moderate*). Dari 8 (delapan) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko *low to moderate* yaitu risiko kredit, hukum, stratejik, kepatuhan dan reputasi. Adapun yang mendapatkan peringkat *low* yaitu risiko pasar dan likuiditas. Sedangkan yang mendapatkan peringkat *moderate* yaitu risiko operasional.

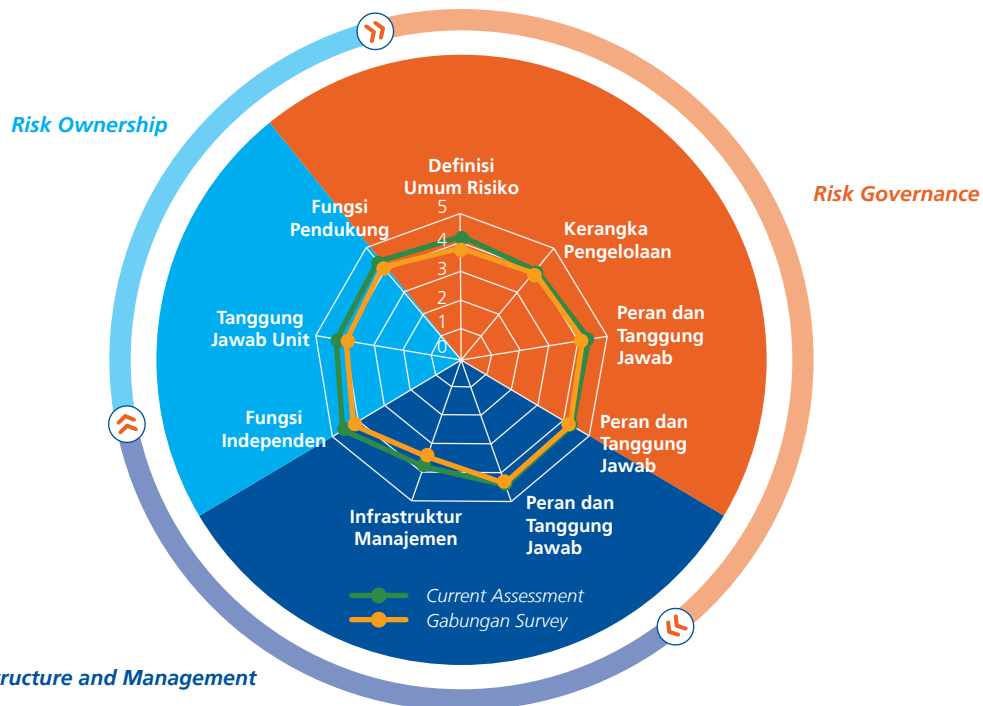
No	Jenis Risiko	Triwulan III 2021		
		Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
1	Kredit	Moderate*	Satisfactory	Low to Moderate
2	Pasar	Low	Satisfactory	Low
3	Likuiditas	Low	Satisfactory	Low
4	Operasional	Moderate*	Fair*	Moderate
5	Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
6	Stratejik	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
7	Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
8	Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
Predikat Komposit		Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate (Peringkat 2)

Profil Risiko Terintegrasi

Profil Risiko Terintegrasi BRI Semester I-2021 disusun berdasarkan data Bulan Juni 2021. Secara komposit, Profil Risiko Terintegrasi BRI Semester I-2021 mendapatkan peringkat komposit 2 (*low to moderate*). Dari 10 (sepuluh) risiko yang dilakukan *self assessment*, yang mendapatkan peringkat risiko *low to moderate* yaitu risiko kredit, pasar, stratejik, kepatuhan, reputasi, intragrup dan asuransi. Adapun yang mendapatkan peringkat *low* yaitu risiko likuiditas dan hukum. Sedangkan yang mendapatkan peringkat *moderate* yaitu risiko operasional.

No	Jenis Risiko	Semester I 2021		
		Tingkat Risiko Inheren	Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Tingkat Risiko
1	Kredit	Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
2	Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
3	Likuiditas	Low	Satisfactory	Low
4	Operasional	Moderate	Fair	Moderate
5	Hukum	Low	Satisfactory	Low
6	Stratejik	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
7	Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
8	Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
9	Transaksi Intra-grup	Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate
10	Asuransi	Low	Satisfactory	Low to Moderate
Predikat Komposit		Low to Moderate	Satisfactory	Low to Moderate

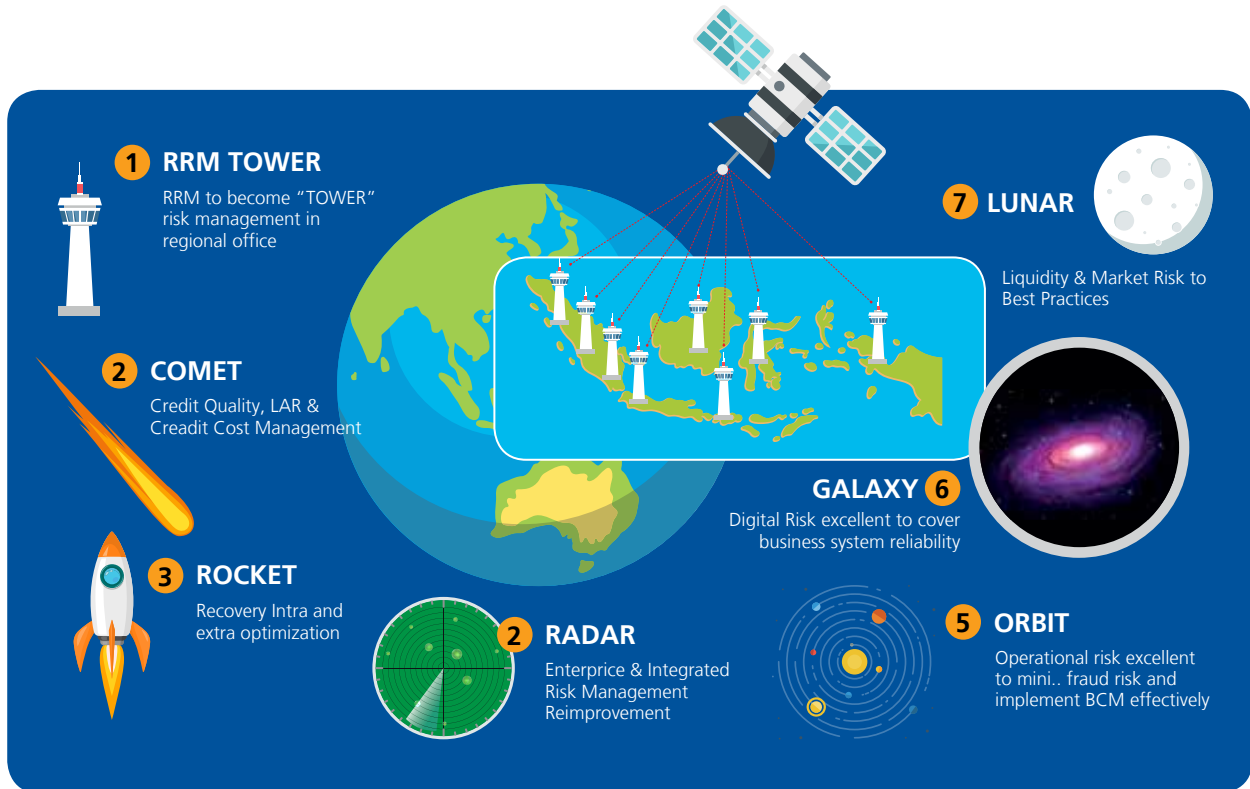
Evaluasi Efektivitas Sistem Manajemen Risiko



Sejak terbentuk Direktorat Manajemen Risiko pada tahun 2017, secara berkala dilakukan pengujian efektivitas sistem manajemen risiko melalui kaji ulang manajemen risiko yang dilakukan oleh satuan terpisah dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun pihak eksternal untuk menjaga objektivitas dan *independency* penilaian efektivitas sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi efektivitas manajemen risiko BRI pada tahun 2021 oleh pihak eksternal independen yaitu BRI berada pada peringkat *Mature Systemic-Institusi* dengan kriteria telah memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait aktivitas manajemen risiko, Implementasi manajemen risiko telah terstandarisasi pada setiap unit institusi dan manajemen risiko telah menjadi bagian dari proses, budaya dan struktur manajemen risiko.

Strategi Manajemen Risiko Tahun 2022

Pengembangan manajemen risiko BRI pada tahun 2022 akan berfokus pada 4 (empat) aspek yaitu **Navigate, Accelerate, Signal & Achieve** dengan visi **Strengthening Risk Management for Sustainable Business, Operational Excellent & Banking Resilience**. Kerangka pengembangan dari aspek dan visi tersebut sebagai berikut:



Untuk strategi pengelolaan manajemen risiko kredit dalam jangka pendek ke depan ini, mengingat tingkat *uncertainty* yang masih cukup tinggi, BRI memilih langkah *preventive* dan *anticipative* antara lain:

- 1. Tumbuh selektif** dengan berpedoman pada Loan Portfolio Guideline yang ada di wilayah dan prinsip *Business follow stimulus* (penjaminan pemerintah, subsidi bunga).
- Melakukan **monitoring dan supervisi yang ketat** terhadap nasabah dan kondisi usahanya sebagai upaya menjaga kualitas portfolio.
- Melakukan **review debitur yang telah direstrukturisasi secara periodik** untuk memastikan *going concern*.
- Deteksi dini** apabila ada potensi kegagalan restru dan melakukan langkah penyelamatan.
- Tidak memaksakan upaya restru apabila kondisi usaha sudah tidak memadai** atau debitur tidak kooperatif.
- Lebih **selective dalam unflagging** nasabah restrukturisasi.
- Menyiapkan biaya pencadangan** yang tepat sesuai dengan risiko yang ada.
- Mengoptimalkan upaya recovery** baik melalui penagihan maupun penyelesaian lainnya terhadap debitur yang telah dihapus buku.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Audit, Auditor Independen, Internal Auditor, dan beberapa Divisi Terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai manajemen risiko perusahaan telah memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut.

Sistem Pengendalian Internal

BRI telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup 5 (lima) komponen:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan budaya pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Seluruh manajemen dan pekerja BRI memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BRI. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BRI antara lain *1st line* (Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI), *2nd line* (Jajaran Manajemen Risiko termasuk Fungsi Manajemen Risiko, dan Jajaran Kepatuhan), dan *3rd line*.

Pengawasan Oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Dewan Komisaris dan Direksi telah berperan aktif melakukan pengawasan dan membentuk budaya pengendalian di perusahaan.

1. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
2. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan intern telah dilaksanakan oleh seluruh pekerja.

Adapun implementasi dari pengawasan oleh manajemen, diantaranya:

1. BRI telah memiliki prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi bank. Dewan Komisaris ikut berperan dalam menetapkan tingkat toleransi risiko perusahaan.
2. BRI memiliki struktur organisasi yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. BRI telah memiliki arsitektur kebijakan yang di dalamnya terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional.
4. Melakukan *monitoring* terhadap perbaikan temuan audit internal dan eksternal.
5. Melaksanakan komunikasi pada seluruh jenjang organisasi secara berkala, termasuk komunikasi antara Direksi dan Komisaris.
6. Pemantauan efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
7. Pelaksanaan Kaji Ulang Sistem Pengendalian Intern.

Direksi dan Dewan Komisaris menciptakan suatu budaya organisasi yang menekankan kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya pengendalian intern. Adapun implementasinya meliputi:

1. Seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional didokumentasikan secara tertulis dan dapat diakses oleh seluruh pekerja, antara lain melalui:
 - a. Aplikasi BRIPEDIA
 - b. Aplikasi BRISHARE
 - c. Pustaka SDM pada aplikasi BRISTARS
2. Kebijakan terkait Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam core value BRI, Kebijakan GCG BRI, Kode Etik BRI, Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Benturan Kepentingan yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
3. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan human capital BRI mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan & pelatihan, remunerasi, manajemen kinerja dan hukuman disiplin.
4. Penandatanganan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pekerja BRI.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

BRI secara periodik dan berkelanjutan melakukan penilaian risiko yang dapat mempengaruhi tujuan perusahaan. Penilaian risiko juga dilakukan oleh jajaran audit internal dalam pelaksanaan kegiatan audit melalui *risk based audit*. Identifikasi dan penilaian risiko secara lebih rinci disampaikan pada BAB Manajemen Risiko. Pengendalian intern dilaksanakan kaji ulang oleh SKAI setiap tahunnya melalui kegiatan Kaji Ulang Manajemen Risiko.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (Pengendalian Keuangan dan Operasional)

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi BRI.

Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Review*)

BRI secara berkala setiap tahunnya melaksanakan *top level review* terkait Strategi Anti *Fraud*. Hasil kaji ulang tersebut meliputi evaluasi menyeluruh terkait pilar penerapan strategi anti *fraud* perusahaan sehingga dapat mendeteksi permasalahan yang ada untuk selanjutnya dirumuskan perbaikan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja terkait.

Kaji Ulang Operasional (*Functional Review*)

Satuan Kerja Audit Intern melakukan kegiatan *assurance* dan pemberian jasa konsultasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko dan *corporate governance*. Kegiatan audit dilakukan secara berkala untuk setiap level Unit Kerja BRI. SKAI menyampaikan laporan secara berkala

kepada Direktur Utama, dan Komite Audit dengan tindakan kepada Direktur Kepatuhan. SKAI melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah perbaikan yang disampaikan oleh Auditee. Selain pelaksanaan kegiatan audit, secara berkala SKAI BRI telah melaksanakan kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko dan penerapan Strategi Anti *Fraud*.

Pengendalian Sistem Informasi dan Teknologi

Satuan Kerja Teknologi Informasi (TI) menerapkan praktik-praktik pengendalian yang memadai sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko TI secara keseluruhan dengan memperhatikan diantaranya:

1. Hasil penilaian risiko.
2. Kriteria penanganan risiko dan rekomendasi bentuk penanganan risiko.
3. Ketentuan perundang-undangan dan persyaratan hukum atau kontrak lainnya.
4. Praktik-praktik pengendalian antara lain:
 - a. Penerapan kebijakan, standar, prosedur dan struktur organisasi termasuk alur kerjanya.
 - b. Pengendalian intern yang efektif yang dapat memitigasi risiko dalam proses TI.
 - c. Penetapan kebijakan, standar, prosedur sistem pengelolaan pengamanan informasi yang diperlukan BRI untuk melakukan pengamanan aset terkait penyelenggaraan dan penggunaan TI.
 - d. Evaluasi hasil kaji ulang dan pengujian atas *Disaster Recovery Plan*.
 - e. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI.
 - f. Evaluasi kemampuan penyedia jasa TI untuk menjaga tingkat keamanan yang diterapkan oleh BRI dari kerahasiaan, integritas data dan ketersediaan informasi.
 - g. Pengawasan dan pemantauan sebagai tanggung jawab manajemen BRI dengan melakukan alih daya (*outsourcing*) operasional TI kepada pihak penyedia jasa TI.
 - h. Pemakaian asuransi sebagai upaya dalam mitigasi potensi kerugian dalam penyelenggaraan TI.

Pengendalian Aset Fisik

Pengendalian aset fisik BRI tertuang dalam Kebijakan Umum Manajemen Aktiva Tetap dan Logistik (KEMAL). KEMAL memuat kebijakan manajemen aktiva tetap dan pengelolaan logistik BRI secara terpadu yang meliputi kegiatan perencanaan, penentuan kebutuhan, pendanaan, pengadaan, pembayaran, distribusi, asuransi, pemeliharaan, optimalisasi aset, administrasi dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Dokumentasi

Perseroan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumen tersebut di-*update* secara berkala untuk menggambarkan kegiatan operasional Perseroan dan diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Akurasi dan ketersediaan dokumen juga dilaksanakan penilaian pada pelaksanaan audit oleh auditor intern.

Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)

Pemisahan dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di seluruh jenjang organisasi dan seluruh kegiatan operasional. Implementasinya meliputi:

1. Penerapan fungsi *Dual Control* dalam kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
2. Penetapan kewenangan limit dalam akses dan pemberian keputusan atas transaksi.
3. Menghindari pemberian tanggung jawab dan wewenang yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
4. Pemisahan fungsi *Maker*, *Checker*, dan *Signer* ke beberapa orang dalam mitigasi risiko operasional dan bisnis.

Pengendalian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangannya Lainnya

Pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara umum dijalankan oleh Satuan Kerja Kepatuhan. Tanggung jawab Direktur Kepatuhan antara lain memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan sistem pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRI tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum termasuk melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BRI telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan efektivitas pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, secara berkala Satuan Kerja Kepatuhan memiliki program kerja penilaian efektivitas budaya kepatuhan. BRI telah memiliki parameter pengukuran efektivitas penerapan budaya kepatuhan untuk unit kerja yang dilakukan sekali dalam satu tahun. Penilaian tersebut memberikan gambaran kepada manajemen untuk mengetahui tingkat kepatuhan masing-masing unit kerja yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai KPI masing-masing unit kerja.

Penilaian terhadap kecukupan implementasi Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh Direksi secara berkala melalui Laporan Fungsi Kepatuhan yang secara semesteran juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ringkasan pelaksanaan implementasi yang tertuang dalam Laporan Fungsi Kepatuhan memuat informasi yang cukup menyeluruh antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, program pengendalian gratifikasi, program APU-PPT, dan lainnya.



Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Bertujuan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pekerja. Implementasinya meliputi:

1. Sistem akuntansi telah didukung dengan penetapan prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.
2. BRI memiliki sistem informasi yang memadai diantaranya BRI Sistem Informasi Manajemen (BRISIM), *Loan Approval System* (LAS) yang merupakan sistem informasi meliputi kegiatan usaha Bank di bidang perkreditan, aplikasi BRIOPRA yang merupakan sistem informasi terkait manajemen risiko, aplikasi *treasury and market risk* (GUAVA), Sistem Informasi Human Capital BRISTARS, dll.
3. BRI telah memiliki *Disaster Recovery Plan* dan sistem *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Secara berkala dilakukan pengujian untuk memastikan sistem dapat bekerja secara efektif.
4. Sistem Komunikasi dapat memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* baik pihak eksterne maupun interne dengan menyediakan saluran komunikasi yang efektif.
 - a. BRI telah memiliki Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi yang berisikan pedoman dalam memberikan layanan informasi kepada pihak yang berkepentingan.
 - b. Tersedia media komunikasi untuk sosialisasi kebijakan kepada seluruh pekerja (BRISHARE, BRIPEDIA dan Pusataka SDM).
 - c. Pelaksanaan forum komunikasi (informasi ke atas, ke bawah dan lintas unit kerja) terkait informasi eksposur risiko, kinerja operasional, dan strategi perusahaan seperti Forum *Risk Management Committee*, *Business Performance Review*, *Support Performance Review*, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, *Focus Group Discussion* dan Forum Peningkatan Kinerja.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

BRI secara terus menerus melaksanakan pemantauan terhadap efektivitas keseluruhan pengendalian interne baik yang dilakukan oleh unit kerja operasional maupun jajaran Satuan Kerja Audit Interne. SKAI telah melaksanakan pemantauan terhadap sistem pengendalian interne yang disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

Kesesuaian dengan Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission (COSO)

BRI telah menerapkan sistem pengendalian interne sesuai dengan COSO Internal Control Framework yaitu *Control Environment*, *Risk Assessment*, *Control Activities*, *Information & Communication and Monitoring*.

Internal Environment

Elemen pertama dari struktur pengendalian interne BRI mencakup komitmen, kebijakan, perilaku termasuk kepedulian Direksi,

Dewan Komisaris dan seluruh pekerja BRI terhadap pentingnya pengendalian interne yang efektif. Dewan Komisaris BRI memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian interne melalui pertemuan berkala secara berkala dengan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Interne. Direksi memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian interne dengan memastikan kegiatan fungsi pelaksanaan interne telah dilaksanakan oleh pejabat dan pekerja. Dalam melakukan pengawasan, manajemen BRI membentuk budaya pengendalian meliputi:

1. Pembentukan struktur organisasi BRI yang memadai dengan penetapan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan *human capital* BRI mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan dan pelatihan, remunerasi dan manajemen kinerja.
3. Integritas dan nilai-nilai etika tercermin dalam *core value* BRI dan Kode Etik BRI yang harus dipedomani oleh seluruh pekerja BRI.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris senantiasa memperhatikan prinsip *Good Corporate Governance*.

Risk Assessment

Merupakan rangkaian kesadaran seluruh pekerja BRI terhadap budaya sadar risiko meliputi tindakan evaluasi, menilai dan memitigasi risiko. Penjelasan lebih rinci terkait Sistem pengendalian interne terhadap seluruh jenis risiko Bank disampaikan pada pilar 4 Bab Manajemen Risiko. Bank BRI melakukan evaluasi terhadap profil risiko secara periodik sebagai mitigasi risiko yang berpotensi merugikan perusahaan. Dalam pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi pada konglomerasi keuangan, BRI melakukan pengelolaan termasuk penilaian terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu:

1. Risiko kredit
Penilaian dilakukan dengan interne model menggunakan model standar yaitu menghitung *probability of default* dan *loss given default* untuk masing – masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitasnya. Selain itu, serangkaian *stress test* juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi *stress*.
2. Risiko pasar
Dilakukan penilaian secara berkala (harian, mingguan, bulanan) dengan menghitung risiko pasar meliputi pendekatan dengan metode standar dan pengukuran interne model (VaR) melalui aplikasi GUAVA dan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil maturity surat berharga. Pendekatan dengan metode standar dilakukan dengan melakukan perhitungan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko suku bunga dan risiko nilai tukar.
3. Risiko Likuiditas
Identifikasi, pengukuran dan pemantauan dilakukan melalui dashboard profil likuiditas harian sedangkan pengendalian dilakukan melalui *protocol liquidity contingency plan*. Penilaian

risiko likuiditas meliputi penilaian rasio likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas, NSFR dan LCR, penetapan limit risiko likuiditas dan *stress test*.

4. Risiko Operasional
Menilai risiko yang disebabkan adanya ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum
Meliputi penilaian terhadap risiko yang disebabkan adanya kelemahan yuridis meliputi tuntutan hukum, ketiadaan perundang – undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.
6. Risiko Strategik
Penilaian meliputi penetapan dan pelaksanaan startegi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif pada bank terhadap perubahan eksternal.
7. Risiko Reputasi
Meliputi risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Pengukuran bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan risiko reputasi yang dihadapi BRI. Penilaian meliputi parameter berupa pengaruh reputasi dari pemilik bank dan perusahaan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank dan frekuensi serta materialitas pemberitaan negatif bank dan keluhan nasabah.
8. Risiko Kepatuhan
Merupakan risiko yang disebabkan karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Penilaian dilakukan terhadap parameter jenis, signifikansi, nominal dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
9. Risiko Asuransi
Menilai risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidak cukupan proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dan/atau penanganan klaim.
10. Risiko Transaksi Intra Group
Menilai risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Selain melakukan penilaian risiko secara berkala, manajemen juga melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian profil risiko perusahaan untuk ditetapkan tindakan dan kontrol terhadap penilaian risiko tersebut. Manajemen telah menetapkan *Early Warning System* pada setiap proses bisnis yang berisiko dan berpotensi merugikan perusahaan.

Control Activities

Mencakup tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan suatu risiko pada semua tingkatan organisasi dan berbagai proses bisnis yang ada di BRI. Aktivitas pengendalian dapat membantu Direksi dan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Bentuk aktivitas pengendalian BRI antara lain:

1. Kegiatan pengendalian secara umum melibatkan seluruh pekerja BRI di semua jenjang organisasi. Aktivitas pengendalian BRI tertuang dalam seluruh kebijakan dan prosedur BRI seperti yang tertuang dalam Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BRI. Sistem pengendalian pada setiap proses bisnis, meliputi:
 - a. Penerapan fungsi MCS (*maker, checker, signer*) dalam aktivitas otorisasi dan verifikasi.
 - b. Penerapan *segregation of duties* berupa pemisahan fungsi dalam menjalankan tugas sehingga tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
 - c. Penerapan *Four Eyes Principles* dalam proses kredit seluruh segmen; pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus.
 - d. Penerapan *three line of defense* untuk aktivitas pertahanan berlapis.
2. Kegiatan pengendalian sesuai fungsi organisasi meliputi:
 - a. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen (*Top Management Reviews*)
 - b. Kegiatan pengendalian pada penerapan Manajemen Risiko, meliputi:
 - Pengendalian risiko kredit meliputi prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur meminimalkan kerugian kualitas kredit melalui restrukturisasi, prosedur penghapusan buku kredit bermasalah.
 - Pengendalian risiko pasar meliputi penyusunan disain manajemen risiko pasar, menyusun dan menganalisa laporan berkala atas output yang dihasilkan model internal seperti analisa laporan harian posisi devisa netto, laporan eksposur risiko pasar, pelaksanaan forum Market Risk Management Committee dan forum Asset & Liability Committe (ALCO).
 - Pengendalian risiko likuiditas meliputi *Protocol Liquidity Contingency Plan*.
 - Pengendalian risiko operasional meliputi prosedur asesmen produk, *Protocol Liquidity Contingency Plan* untuk kejadian yang bersifat katastrofik.
 - Pengendalian risiko hukum dengan melakukan telaah terhadap aspek hukum pada produk dan aktivitas baru.
 - Pengendalian risiko strategik tertuang pada kebijakan Umum Rencana Jangka Panjang, Pedoman Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

- Pengendalian risiko reputasi tertuang pada Surat Edaran Direksi BRI mengenai Kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
- Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap setiap regulasi eksternal dan dilakukan analisa dampak bagi perusahaan untuk selanjutnya dituangkan pada setiap ketentuan internal perusahaan.
- Pengendalian risiko asuransi sebagai bagian dari risiko yang melekat pada BRI sebagai entitas utama yang membawahi perusahaan anak yang bergerak pada bidang asuransi adalah melalui pelaksanaan Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak.
- Pengendalian risiko intra grup dilaksanakan oleh *Desk Subsidiary* yang ditunjuk oleh manajemen sebagai unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

Information & Communication

BRI telah memiliki sistem informasi yang relevan dan berkualitas terkait kondisi keuangan, kegiatan usaha, penerapan manajemen risiko dan kepatuhan, kondisi pasar, dan kondisi lainnya dalam mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Pelaksanaan komunikasi secara internal dan eksternal juga dilaksanakan secara berkala dalam rangka mendukung pengendalian internal perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Monitoring

Meliputi proses penilaian secara berkelanjutan atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen telah dilaksanakan dan berfungsi. *Monitoring* sistem pengendalian intern BRI dilakukan melalui *Three line of defence*, yaitu:

1. *1st line* selaku *risk owner* yaitu Unit Kerja yang melakukan aktivitas bisnis dan operasional serta mengelola risiko yang dihadapi (antara lain Unit Kerja Operasional).
2. *2nd line* yaitu Unit Kerja yang melakukan pengawasan fungsional (antara lain Jajaran MR Kantor Pusat & Wilayah, Divisi Kepatuhan dan Divisi Kebijakan & Prosedur).
3. *3rd line* yaitu Unit Kerja yang melakukan *assurance*. SKAI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern yang melakukan fungsi pengawasan atas *monitoring* sistem pengendalian intern.

Hasil pelaksanaan pengawasan dan *monitoring* SKAI terhadap sistem pengendalian intern disampaikan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggungjawab memastikan penerapan sistem pengendalian intern (SPI) yang handal dan efektif serta berkewajiban meningkatkan dan memastikan budaya sadar risiko melekat di setiap jenjang organisasi.

SKAI bertanggungjawab melaksanakan evaluasi kecukupan dan efektivitas dan efisiensi SPI serta berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas SPI secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan BRI. SKAI melaksanakan evaluasi SPI melalui kegiatan pemeriksaan dan review secara periodik di Unit Kerja dan Entitas Anak.

Hasil evaluasi SKAI disampaikan kepada Direksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait. Dewan Komisaris khususnya Komite Audit turut berperan aktif dalam mengevaluasi SPI dengan melakukan telaah terhadap hasil evaluasi yang dilaksanakan SKAI. Hasil evaluasi selama tahun 2021 menunjukkan bahwa SPI di BRI telah berjalan secara memadai.

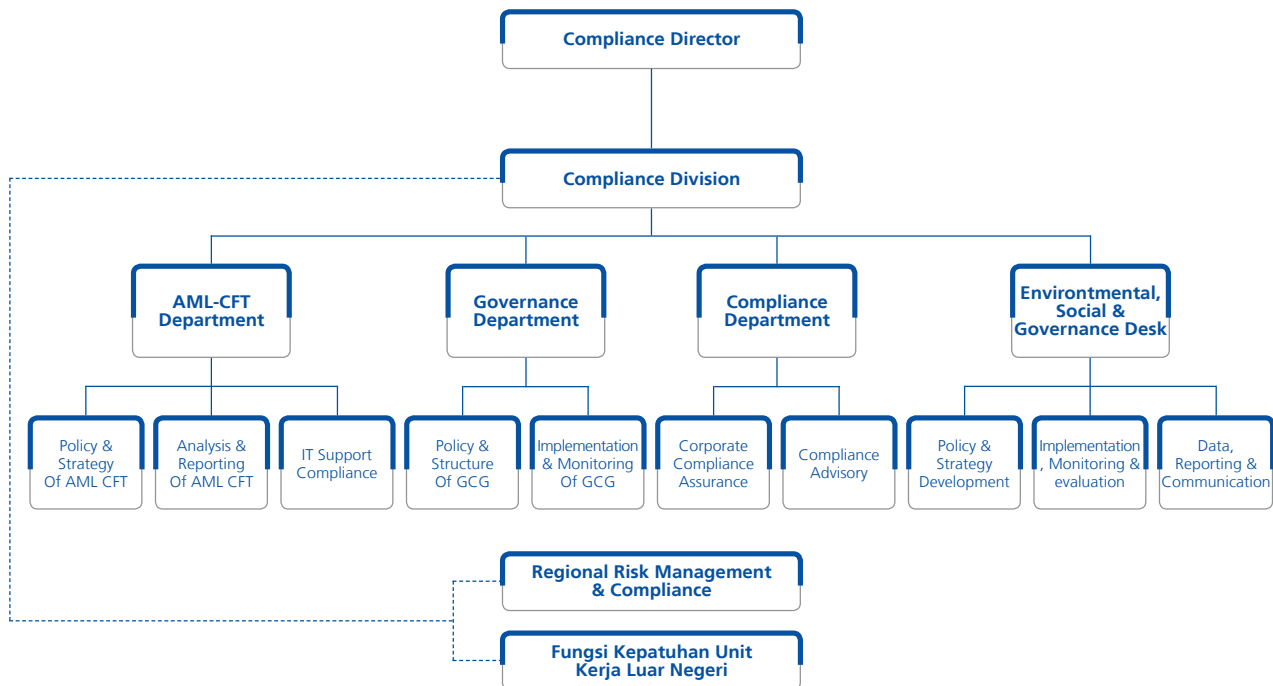
Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Audit, Auditor Independen, SKAI, dan beberapa Divisi Terkait bahwa Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian intern dan manajemen risiko perusahaan telah memadai dalam mengidentifikasi risiko sehingga Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut.

Fungsi Kepatuhan

BRI berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan baik di tingkat korporasi maupun Unit Kerja Operasional. Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum. BRI memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang terdiri dari Direktur Kepatuhan, Compliance Division Kantor Pusat serta fungsi kepatuhan di kantor wilayah BRI yang berada di bawah Bagian Manajemen Risiko & Kepatuhan Kantor Wilayah serta fungsi kepatuhan Unit Kerja Luar Negeri yang berada di bawah garis koordinasi Compliance Division Kantor Pusat. Jajaran kepatuhan bersifat Independen dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun fungsi penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. BRI telah memiliki kebijakan dan standar prosedur kepatuhan yang menjabarkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Regulator dan *best practice* terkini.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Sesuai dengan hasil keputusan RUPSLB pada tanggal 21 Januari 2021, Direktur Kepatuhan BRI dijabat oleh A. Solichin Lutfiyanto, menggantikan Wisto Prihadi yang menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak 18 Februari 2020.

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan BRI dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diantaranya:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi BRI.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk sistem ketentuan dan pedoman internal BRI.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BRI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh BRI.
6. Melakukan sistem pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRI tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Independensi Direktur Kepatuhan

Independensi Direktur Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi dengan mengacu Peraturan OJK No. 46/ POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Tidak rangkap jabatan dan hubungan afiliasi.
2. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali
3. Direktur Kepatuhan tidak membawahi fungsi:
 - a. Bisnis dan operasional.
 - b. Manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan bagi kegiatan usaha Bank.
 - c. Treasury.
 - d. Keuangan dan Akuntansi.
 - e. Logistik dan pengadaan barang dan jasa.
 - f. Teknologi dan informasi.
 - g. Audit intern.

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan bersifat independen dan terpisah dari fungsi bisnis, operasional maupun penunjang lainnya dalam kegiatan usaha BRI. Jajaran kepatuhan harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari unit kerja lain, bebas dari benturan kepentingan, bertindak profesional dan objektif.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan



Kris Hananto

Compliance Division Head

Warga negara Indonesia, Surakarta, 20 September 1972.
Usia 49 tahun Per Desember 2021.
Berdomisili di Cibubur, Bogor.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Hukum Universitas Diponegoro (1995)
- Master of Laws (LLM) Melbourne University – Australia (2004)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. No. R.268-DIR/HCB/05/2021 tanggal 7 Mei 2021.



SERTIFIKASI

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 & Level 2
- Sertifikasi Kepatuhan Level 1



PENGALAMAN KERJA

- Kepala Bagian Dokumentasi & Administrasi Kredit, Divisi Administrasi Kredit BRI (2013 - 2017)
- Group Head Legal Advice, Legal Division BRI (2017 – 2018)
- Vice President Legal Assessment & Advice, Legal Division BRI (2019 – 2021)
- Division Head, Compliance Division BRI (2021 – sekarang)

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan BRI diantaranya:

1. Menyusun sistem-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha BRI pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BRI dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Melakukan *review* (kaji ulang) dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BRI agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BRI telah sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan BRI terhadap komitmen yang dibuat oleh BRI kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh insan BRI mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
 - c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Bank bagi pihak internal maupun eksternal.

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Sepanjang tahun 2021, pekerja di jajaran satuan kerja kepatuhan secara reguler telah mengikuti program pendidikan guna pengembangan kompetensi, antara lain:

1. Pelaksanaan *training*, *short course*, seminar dan/atau *workshop* dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan.
2. Pelaksanaan *virtual training* kepada jajaran fungsi kepatuhan Kanwil.
3. Pelaksanaan *sharing session* dengan Regulator.
4. Pelaksanaan sertifikasi Kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan (LSPP).

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan program kerja Fungsi Kepatuhan selama tahun 2021, antara lain:

1. Penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Di tahun 2021 ini BRI telah melaksanakan *Surveillance Audit* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan berhasil mempertahankan sertifikat ISO SMAP.
2. Penguatan Tata Kelola Terintegrasi
BRI melakukan penyempurnaan *framework* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi keuangan BRI yang mencakup Kepatuhan Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi, Audit Intern Terintegrasi dan *Performance Management*.
3. Penguatan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
Dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya kompleksitas produk, layanan jasa keuangan dan pola pemasaran (*multichannel marketing*) serta teknologi

perbankan, Bank BRI senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan program APU PPT baik di internal maupun *group wide*. Beberapa inisiatif perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pengembangan sistem *monitoring* transaksi mencurigakan dengan memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence* (AI).
 - b. Memperkuat *database screening* dan identifikasi nasabah dengan memanfaatkan aplikasi PEP PPATK.
 - c. *Review* Penilaian Risiko TPPU & TPPT dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/RBA*) sesuai *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) terkini.
 - d. Optimalisasi penerapan program APU PPT di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang melalui peningkatan peran *Regional Risk Management & Compliance* dan *Branch Risk & Compliance*.
4. Penilaian Efektivitas Budaya Kepatuhan
BRI telah memiliki parameter pengukuran efektivitas penerapan budaya kepatuhan untuk unit kerja yang dilakukan sekali dalam satu tahun. Penilaian tersebut memberikan gambaran kepada manajemen untuk mengetahui tingkat kepatuhan masing-masing unit kerja yang dapat menjadi pertimbangan untuk menilai KPI masing-masing unit kerja.
 5. Peningkatan *Awareness*
BRI menyelenggarakan program *awareness* melalui kerja sama dengan Corporate University (Corpu) BRI menyelenggarakan *Compliance Skill and Knowledge Upgrade* (COLLEGE) Tahun 2021 secara *online* dengan menghadirkan ekspertise dari OJK, PPATK, KPK, DJP dan POLRI sebagai narasumber. Di samping itu, BRI juga meningkatkan *awareness* melalui *In House Training*, webinar dan *self learning*.
 6. Digitalisasi Sistem
 - a. Aplikasi *Whistleblowing* Sistem Terintegrasi
BRI berkomitmen untuk Bersama-sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal mengelola pengaduan indikasi pelanggaran WBS yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi (TPK).
 - b. Aplikasi Sistem Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan *Company Tree*
BRI mengembangkan sistem untuk melakukan perhitungan BMPK secara *real time* sesuai dengan ketentuan regulator. Hal ini merupakan salah satu wujud kepatuhan BRI dalam mematuhi ketentuan regulator yaitu POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum serta untuk mendukung perkembangan bisnis BRI.
 - c. GCG *Online System 2.0*.
BRI melakukan peningkatan proses pemantauan dan pelaporan terkait dengan tata kelola melalui digitalisasi sistem yang bisa di akses oleh seluruh pekerja sesuai dengan level kewenangan yang telah ditetapkan.



Pelaksanaan Aktivitas Kepatuhan Lainnya

1. Pelaksanaan Pengujian Prinsip Kehati-hatian
Dalam rangka mencegah penyimpangan dari ketentuan kehati-hatian baik di bidang perkreditan maupun bidang non perkreditan, Direktur Kepatuhan BRI telah melakukan Pengujian Prinsip Kehati-hatian terhadap Rencana Kebijakan, Keputusan dan Perjanjian dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi.
2. *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Pengujian
Merupakan kelanjutan dari kegiatan Pengujian Prinsip Kehati-hatian yang dilaksanakan untuk memastikan kembali bahwa tidak terdapat adanya penyimpangan dalam tindak lanjut rencana kebijakan dan atau keputusan yang telah dinyatakan memenuhi prinsip kehati-hatian (*comply*).
3. Tanggapan Aspek Kepatuhan
Divisi Kepatuhan menyampaikan tanggapan/opini aspek kepatuhan kepada unit kerja terkait. Tanggapan aspek kepatuhan dapat diberikan dalam hal terdapat rencana kebijakan/putusan Direksi, rencana perubahan mekanisme operasional, rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru serta hal lain yang memiliki *issue* terkait dengan risiko kepatuhan.
4. Resume Kebijakan Eksternal
Baik resume maupun penerusan kebijakan eksternal dilakukan terhadap kebijakan baru maupun perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh regulator eksternal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan sehingga kebijakan eksternal dimaksud dapat segera dijadikan acuan oleh unit kerja terkait dalam bidang tugasnya.
5. Analisa Dampak Kebijakan Eksternal
Dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketentuan eksternal yang berlaku terhadap kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini sekaligus memastikan bahwa kebijakan internal BRI yang berlaku saat ini telah sesuai dengan ketentuan eksternal.
6. Pelaporan Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).
Pelaporan rencana penerbitan PAB kepada regulator (dhi. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia) dalam rangka untuk memperoleh persetujuan regulator dilakukan secara satu pintu melalui Divisi Kepatuhan.
7. Pemantauan Komitmen
Pemantauan terhadap komitmen BRI terhadap regulator/ otoritas pengawas lainnya yang berwenang. Divisi Kepatuhan memantau pemenuhan seluruh komitmen dari unit kerja sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Evaluasi Efektivitas Fungsi Kepatuhan

Penilaian terhadap kecukupan implementasi Fungsi Kepatuhan di BRI dilaksanakan oleh Direksi secara berkala melalui Laporan Fungsi Kepatuhan yang secara semesteran juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ringkasan pelaksanaan implementasi yang tertuang dalam Laporan Fungsi Kepatuhan memuat informasi yang cukup menyeluruh antara lain pengelolaan risiko kepatuhan, program pengendalian gratifikasi, program APU-PPT, dan lainnya.

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Dengan adanya dinamika nasional, regional dan global serta semakin kompleksnya produk, aktivitas, dan layanan jasa keuangan termasuk pemasarannya (*multichannel marketing*) serta teknologi informasi, menyebabkan peningkatan risiko APU dan PPT yang dihadapi oleh Perseroan. Menyikapi kondisi tersebut dan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan regulator, Perseroan melakukan Penerapan Program APU dan PPT secara memadai.

Dasar Hukum

Ketentuan Eksternal

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
5. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Kepala PPATK), dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Kepala Bapeten), No. 4 Tahun 2017, No. 1 Tahun 2017, No. 9 Tahun 2017, No. 5 Tahun 2017 Tanggal 16 Mei 2017 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta (DPPSPM) atas Dana Milik Orang Atau Korporasi yang Tercantum Dalam DPPSPM.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris (DTTOT).
8. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. PER- 11/1.02/PPATK/09/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan.
9. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan

Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan Jo. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. PER- 04/1.02/ PPATK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. PER- 12/1.02/PPATK/06/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan.
11. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. PER-21/1.02/PPATK/11/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Tunai bagi Penyedia Jasa Keuangan.
12. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. PER- 02/1.02/PPATK/02/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.
13. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. PER- 14/1.02/PPATK/11/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan.
14. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. PER-02/1.02/PPATK/02/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
15. Surat Edaran PPATK No. 8 Tahun 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu melalui Aplikasi Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

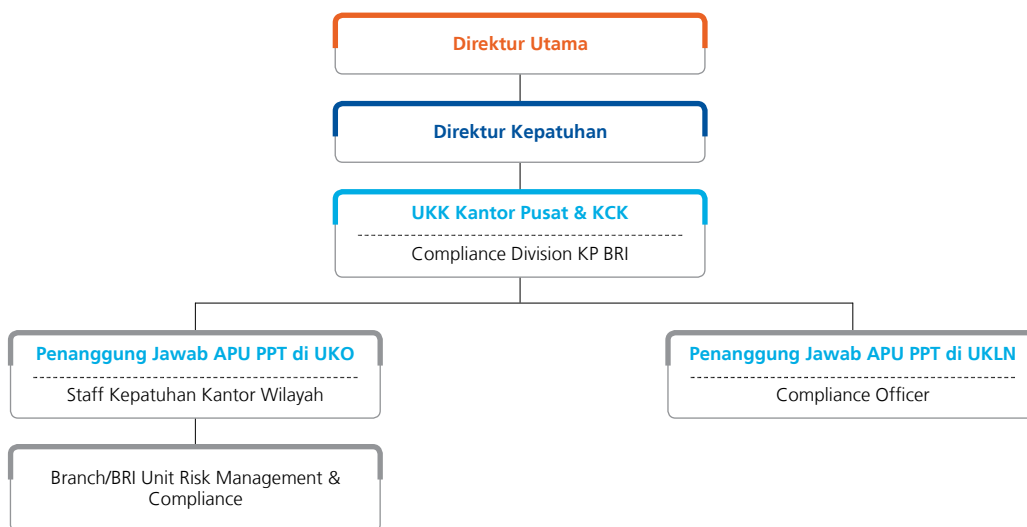
Ketentuan Internal

1. Surat Keputusan Direksi BRI Nomor PP.01-DIR/KPT/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) BRI.
2. Surat Keputusan Nomor BP.13-DIR/KPD/05/2019 tentang Buku Prosedur Operasional (BPO) *Customer Due Diligence* (CDD).
3. Surat Edaran Nomor SE.09-DIR/KPT/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Penilaian Tingkat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) Berdasarkan Pendekatan Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
4. Petunjuk Teknis Nomor JN.03-KPD/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Aplikasi *Risk Based Approach* (RBA) APU dan PPT.

Pengelola APU-PPT

Penanggung jawab Penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang berada di setiap level organisasi. UKK Kantor Pusat BRI dilaksanakan oleh Compliance Division KP BRI yang merupakan unit kerja struktural dalam struktur organisasi BRI. Dalam menjalankan tugasnya, Compliance Division KP BRI melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan BRI. Sedangkan Penanggung jawab Penerapan Program APU-PPT di Unit Kerja Operasional dilakukan oleh Pejabat Penanggung Jawab APU-PPT Unit Kerja Operasional. Dalam hal ini dijabat oleh Staff Kepatuhan Kantor Wilayah, dimana pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab kepada Compliance Division KP BRI. Selain itu terdapat BRC (Branch Risk & Compliance) & URC (BRI Unit Risk & Compliance) sebagai perpanjangan fungsi APU PPT di Kantor Cabang dan BRI Unit.

Struktur Organisasi APU-PPT



Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola APU–PPT

Tugas dan Tanggung Jawab UKK Kantor Pusat BRI cq. Divisi Kepatuhan KP BRI terhadap penerapan Program APU dan PPT adalah:

1. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).
2. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko.
3. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
4. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha, volume transaksi, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
5. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT.
6. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah.
7. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT) dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (TKL).
8. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
9. Melakukan koordinasi pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
10. Memantau rekening efek dan pelaksanaan transaksi nasabah custodian.
11. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi transaksi efek.
12. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank serta ketentuan regulator.
13. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*.
14. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait.

15. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai.
16. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/ atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja.
17. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri untuk disampaikan kepada PPATK.
18. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik.
19. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.
20. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum).

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional terhadap Penerapan Program APU dan PPT di Unit Kerja Operasional adalah sebagai berikut:

1. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah di Unit Kerja Operasional dibawah supervisi Kantor Wilayah.
2. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Transaksi Keuangan Tunai.
3. Memonitor pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah.
4. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan Anti *Tipping-Off*.
5. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap unit kerja operasional dibawah supervisi Kantor Wilayah.
6. Menerima, dan memverifikasi laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh unit kerja operasional di bawah supervisi Kantor Wilayah.
7. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pekerja unit kerja operasional di bawah supervisi Kantor Wilayah.
8. Berperan sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT (antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum).

Sosialisasi APU-PPT

Dalam meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU PPT di BRI, Pengelola APU PPT melakukan sosialisasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. Mengadakan Sosialisasi secara *online* dengan media Webinar kepada pekerja BRI dan perusahaan anak baik dari jajaran operasional maupun pemasaran terkait dengan materi APU PPT.
2. Pelaksanaan *self-learning* dengan materi APU PPT selama 2 (dua) kali dengan materi *Know Your Customer* (KYC).

Implementasi APU-PPT 2021

Penerapan Program APU dan PPT dilakukan berdasarkan 5 (lima) pilar, sebagai berikut:

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

1. Pengawasan aktif Direksi, sebagai berikut:
 - a. Memastikan BRI memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT.
 - b. Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis, seperti penetapan Nasabah yang dikategorikan sebagai *Politically Exposed Person* (PEP) dan pengelompokan calon Nasabah, Nasabah, dan/atau *Walk In Customer* (WIC) berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - c. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, seperti perubahan struktur organisasi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT.
 - d. Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan serta pengembangan sistem pendukung Program APU dan PPT.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus (UKK) atau pejabat yang bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPT.
 - f. Membentuk UKK dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT.
 - g. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT.
 - h. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
 - i. Memberikan persetujuan dan/atau pendelegasian persetujuan kepada pejabat Compliance Division KP BRI atas Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR), kewajiban laporan Program APU dan PPT lainnya, dan pemberian informasi data nasabah terkait program APU dan PPT kepada regulator.

- j. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala. Adapun pegawai dimaksud adalah pegawai yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan Nasabah dan/atau WIC, seperti *frontliner*, petugas pemasaran, pejabat yang bertanggung jawab terhadap program APU dan PPT.
2. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, sebagai berikut:
 - a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang bersifat strategis diusulkan oleh Direksi.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT.
 - c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/ atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Frekuensi pembahasan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan penilaian risiko BRI.

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

1. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme berdasarkan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*) terkait dengan Nasabah, negara/area geografis, produk, jasa dan transaksi, serta jaringan distribusi (*delivery channels*).
2. Uji Tuntas Nasabah/*Customer Due Diligence* (CDD) dan/atau Uji Lanjut Nasabah/*Enhanced Due Diligence* (EDD) terhadap calon Nasabah, Nasabah, dan *Walk In Customer* (WIC).
3. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi.
4. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur.
5. Pengkinian dan pemantauan.
6. Pelaporan kepada Pejabat Senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT.
7. Pelaporan kepada PPAK.

Pengendalian Intern

1. Tersedianya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai; Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
2. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan APU dan PPT.
3. Pemeriksaan dilakukan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT.

Sistem Informasi Manajemen (SIM)

1. Aplikasi Pendukung Penerapan Program APU dan PPT.
2. Aplikasi Penilaian *Risk Based Approach* (RBA) untuk menilai kategori risiko Nasabah dan Unit Kerja Operasional BRI terkait APU dan PPT.
3. Sistem APU dan PPT yang digunakan untuk melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan ke Luar Negeri (TKL).



4. Aplikasi penyediaan data untuk pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
5. Aplikasi mutasi rekening yang menyediakan informasi lawan transaksi.
6. Aplikasi pencatatan profil dan transaksi *Walk In Customer* (WIC).
7. Aplikasi pelaporan *Suspicious Transaction Report* (STR) dan *Cash Transaction Report* (CTR) WIC online.
8. Aplikasi pencarian data keuangan nasabah terintegrasi.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam rangka pencegahan penggunaan BRI sebagai media atau tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme, BRI wajib melakukan Prosedur penyaringan (*pre-employee screening*) pada saat penerimaan pegawai baru sebagai bagian dari penerapan *Know Your Employee* (KYE).

Dalam meningkatkan pemahaman pekerja terhadap implementasi APU PPT di BRI, Pengelola APU PPT melakukan pendidikan dan/atau pelatihan sebagai berikut:

1. Pelatihan terkait Penerapan Program APU dan PPT sebagai materi wajib (*mandatory*) dalam pelaksanaan pendidikan terhadap pekerja baru di BRI maupun pendidikan regular lainnya yang diselenggarakan BRI.
2. Compliance Division bekerja sama dengan Corporate University (Corpu) BRI menyelenggarakan *Compliance Skill and Knowledge Upgrade* (COLLEGE) Tahun 2021 secara online dengan menghadirkan ekspertise dari OJK, PPATK, KPK, DJP dan POLRI sebagai narasumber dimana pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan sebanyak 6 (enam) event.
3. Compliance Division bekerjasama dengan Corpu menyelenggarakan *In House Training* (IHT) yang menghadirkan pembicara dari OJK dan PPATK dengan materi sebagai berikut:
 - a. Penerapan APU PPT berbasis risiko terkait proliferasi, TPA Korupsi, Narkotika, Perpajakan, Lingkungan Hidup, Luar Negeri dan BEC.
 - b. Tipologi Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Korpusi, Perpajakan, Bea Cukai, Narkotika, dan Terorisme, BEC dan Analisis LTKM.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian dana kegiatan sosial BRI telah disajikan pada Laporan Keberlanjutan. Selama tahun 2021, BRI tidak melakukan pemberian dana kegiatan politik.

Perkara Hukum

Perkara hukum material yang dihadapi oleh BRI pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

1. Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 298 perkara
2. Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 094 perkara
3. Perkara Operasional & Jasa : 043 perkara
4. Perkara Support (SDM, Logistik, dll) : 018 perkara
5. Perkara Treasury, Trade Finance & IT : 000 perkara

Dengan rincian sebagai berikut:

2021					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	62	61	75	100	298
Kredit Non Lelang	20	22	22	30	94
Ops & Jasa	12	2	12	17	43
Support	6	3	6	3	18
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL					453

Total Perkara yang telah memperoleh Keputusan Hukum yang tetap/berstatus (*Inkracht Van Gewijsde*) adalah sebanyak 109 perkara yang terdiri dari:

1. Perkara *Inkracht* Menang
 - Perkara *Inkracht* Menang pada tahun 2021 sebanyak 107 Perkara, yang terdiri dari:
 - Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 78 perkara
 - Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 18 perkara
 - Perkara Operasional & Jasa : 10 perkara
 - Perkara Support (SDM, Logistik, dll) : 01 perkara
 - Perkara Treasury, Trade Finance & IT : 00 perkara

Inkracht Menang 2021					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	4	25	7	42	78
Kredit Non Lelang	0	1	2	15	18
Ops & Jasa	0	7	1	2	10
Support	0	0	0	1	1
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL					107

2. Perkara *Inkracht* Kalah
 - Perkara *Inkracht* Kalah pada tahun 2021 sebanyak 2 (dua) Perkara, yang terdiri dari:
 - Perkara Kredit (Penundaan Lelang Agunan) : 1 perkara
 - Perkara kredit (Non Lelang Agunan) : 0 perkara
 - Perkara Operasional & Jasa : 1 perkara
 - Perkara Support (SDM, Logistik, dll) : 0 perkara
 - Perkara Treasury, Trade Finance & IT : 0 perkara

Inkracht Menang 2021					
Perihal	TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL
Kredit (Penundaan Lelang)	0	0	1	0	1
Kredit Non Lelang	0	0	0	0	0
Ops & Jasa	0	0	0	1	1
Support	0	0	0	0	0
Treasury, Trade Finance & IT	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL					2

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2012, BRI melakukan Kerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya sesuai Perjanjian Kerjasama Distribusi tentang Pemasaran Produk Asuransi <i>Provest Saving Plan</i> Jiwasraya. Bahwa Perjanjian tersebut telah di addendum sebanyak 1 (satu) kali pada Januari 2016. Bahwa Para Penggugat meurupakan nasabah Bank yang mengajukan Permohonan <i>Penggunaan Provest Saving Plan</i> Asuransi Jiwasraya sesuai dengan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Selanjutnya Para Penggugat telah menerima Polis Asuransi dari Pihak Asuransi dan/atau sebagaimana bukti pembayaran Premi Asuransi yang telah dipenuhi oleh Para Penggugat. Diketahui PT Asuransi Jiwasraya mengalami gagal bayar kepada nasabah – nasabah pemegang polis asuransi jiwa, sehingga Sdr. Alim Hutomo Njoo dkk mengajukan Gugatan kepada BRI, PT Asuransi Jiwasraya, dan OJK sebagaimana tercantum dalam Gugatan No.775/Pdt.G/2020/PN.Sby dengan petitum sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum; Menghukumi Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Sisa Nilai Tunai Jatuh Tempo Periode Investasi sesuai masing-masing Polis Para Penggugat. 	Sidang Pembuktian dgn menghadirkan Saksi Ahli Perbankan an. Bapak Yunus Husen	Risiko Reputasi	-	Dapat berdampak pada reputasi perusahaan dan finansial perusahaan apabila BRI kalah dalam gugatan tersebut mengingat Nasabah Pemegang Polis Jiwasraya menuntut pengembalian dana kepada BRI.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2021, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Nama Anak Perusahaan	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Risiko dan Nominal Gugatan	Sanksi yang dikenakan	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan
PT Asuransi BRI Life	Nihil				
PT BRI Ventura Investama	Nihil				
PT BRI Danareksa Sekuritas (d/h PT Danareksa Sekuritas)	DS digugat wanprestasi atas perjanjian restrukturisasi hutang dengan jaminan saham dan aset tetap yang dibuat oleh dan antara DS dengan PT Evio Securities (Evio)	Putusan majelis hakim pada tingkat pertama telah dibacakan tanggal 12 Agustus 2021 dengan putusan Gugatan Evio dan Gugatan Balik BRIDS "Tidak Dapat Diterima" atau N.O (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>) DS dan Evio tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.	Nominal Gugatan sebesar Rp484 Miliar	-	Tidak berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan baik perizinan maupun operasional. Memperhatikan hasil putusan majelis hakim pada tingkat pertama terhadap gugatan rekonsensi dinyatakan N.O. maka tidak ada kewajiban bagi Perseroan untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebesar nilai tuntutan yang diajukan.
PT BRI Asuransi Indonesia	Nihil				
PT Bank Raya Indonesia Tbk.	Nihil				
PT Permodalan Nasional Madani	Nihil				
BRI Remittance Co.Ltd	Nihil				



Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Selama tahun 2021, tidak terdapat sanksi administratif material oleh Regulator yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

BRI secara transparan menyediakan informasi laporan keuangan dan informasi perusahaan terkini yang dapat diakses publik melalui berbagai media cetak dan elektronik termasuk diantaranya situs Perusahaan, Sosial Media, Bursa Efek Indonesia, dan portal BUMN.

Sekretaris Perusahaan

Aestika Oryza Gunarto

Telp. (+62 21) 575 1966

Fax : (+62 21) 570 0916

Email : humas@bri.co.id

Alamat Perusahaan

Kantor Pusat Bank BRI

Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 1210, Indonesia

Telp : (+62 21) 251 0244, 251 0254

Fax : (+62 21) 250 0065, 250 0077

Situs Perusahaan

www.bri.co.id

Call Centre

14017, 1500017, (+62 5798 7400)

Customer Care

callbri@bri.co.id

Media Sosial

Facebook : Bank BRI

Instagram : @bankbri_id

Twitter : @kontakBRI, @promo_

BRI, @bankbri_id

Youtube : BANK BRI

Chatbot: Sabrina

Melalui facebook messenger

dan whatsapp/telegram: 081-212-14017

Investor Relation

Divisi Hubungan Investor BRI memiliki peranan khusus untuk membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kegiatan komunikasi perusahaan kepada Investor. Selain itu, Divisi Hubungan Investor BRI berperan dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.

Contact Investor Relation

Rustarti Suri Pertiwi

Gedung BRI II lantai 7

Jl. Jendral Sudirman No-44-46 Jakarta Pusat 10210

Telp. : +62 21 575 2019

Fax : +62 21 575 2010

Email : ir@bri.co.id

Website : www.ir-bri.com

Tugas dan Tanggung Jawab Investor Relation

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan peraturan serta meningkatkan komunikasi yang efektif, Divisi Hubungan Investor BRI melakukan beragam kegiatan yaitu:

1. *Analyst Meeting*

Merupakan kegiatan yang dilakukan rutin setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para *analyst*/perusahaan sekuritas yang bertujuan agar *analyst*/perusahaan sekuritas tersebut dapat menyajikan report dengan data terkini kepada para investor.

2. *Company Visit - Field Visit*

Menerima kunjungan dari investor/*analyst* yang ingin meng-*update* kinerja terkini serta ingin mengetahui dan melihat secara langsung operasi perusahaan baik di kantor pusat maupun di unit kerja operasional.

3. *Conference Call*

Melakukan kegiatan *teleconference* untuk mengakomodasi kebutuhan para investor/*analyst* dalam mendapatkan informasi perusahaan maupun kondisi perekonomian yang memberikan pengaruh ke bisnis dan operasional perusahaan.

4. *Investor Newsletter*

Update informasi terkini melalui penerbitan newsletter pada website hubungan investor BRI.

5. *Investor Conference dan Non-deal Roadshow*

Melakukan kegiatan komunikasi melalui 1-on-1 *meeting* maupun *group meeting* dengan para investor baik di dalam dan luar negeri terutama pada kota-kota pusat keuangan dunia di Asia, Eropa dan Amerika.

6. *Rating Review*

Melakukan kegiatan komunikasi dan penyampaian data BRI dalam rangka pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang digunakan BRI, baik lembaga pemeringkat internasional (Moody's, Fitch Rating, S&P) maupun lembaga pemeringkat domestik (Pefindo).

7. *Pengelolaan Website* Hubungan Investor

Melakukan pengelolaan informasi pada *website* hubungan investor agar pemegang saham, pemegang surat hutang, analis, lembaga pemeringkat serta masyarakat umum memiliki kemudahan dalam mengakses informasi terkini dari perusahaan. *Website* yang dikelola oleh Divisi Hubungan Investor tersebut juga terkoneksi dengan *website* perusahaan yaitu www.bri.co.id.

8. *Advisory Report*

Melakukan penyusunan materi *advisory* yang berisi hasil valuasi saham BRI dan hasil identifikasi *gap* antara *intrinsic value* dan target *price* analis maupun hasil analisa lainnya untuk dikomunikasikan secara internal kepada *Board of Management*.

9. *Market Update Advisory*

Melakukan penyusunan materi berupa update kondisi pasar saham, harga saham BRI dan pers untuk dikomunikasikan secara internal kepada *Board of Management*.

10. *Financial Update*

Melakukan penyusunan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka pemaparan kinerja BRI kepada para *analyst*/perusahaan sekuritas pada kegiatan *Analyst Meeting*.

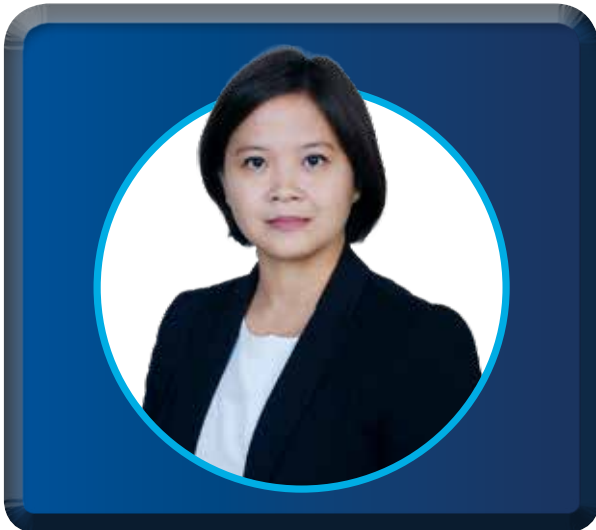
11. *Financial Brief*

Melakukan penyusunan ringkasan materi kinerja keuangan setiap triwulan dalam rangka mengkomunikasikan kinerja BRI kepada para pekerja BRI.

12. *BBRI News*

Melakukan penyusunan materi terkait *issue* terkini yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan untuk dikomunikasikan secara internal baik kepada *Board of Management* ataupun pekerja BRI.

Profil Head of Investor Relation



Rustarti Suri Pertiwi

Head of Investor Relation

Warga negara Indonesia, lahir di Kebumen.
Usia 44 tahun Per Desember 2021.
Berdomisili di Jakarta.



RIWAYAT PENDIDIKAN

- Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto (1999)
- MBA dari Monash Business School, Monash University, Melbourne – Australia (2005)



DASAR HUKUM PENGANGKATAN

SK No. R.509-DIR/HCB/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021



SERTIFIKASI

Sertifikasi Manajemen Risiko



PENGALAMAN KERJA

Memulai karir di BRI sejak tahun 2006 dengan beberapa jabatan yaitu:

- Kepala Divisi Subsidiary Management
- Kepala Desk Asset & Liabilities Management
- Kepala Bagian Investor Communication, Divisi Investor Relation
- Kepala Bagian Internal Report, Divisi Financial and Management Accounting



Kegiatan Investor Relation Selama Tahun 2021

Beberapa kegiatan komunikasi kepada pemegang saham, pemegang surat hutang, analis dan lembaga pemeringkat BRI yang dilakukan oleh Divisi Hubungan Investor selama tahun 2021 meliputi:

1. Penyelenggaraan *Analyst Meeting* yang dilaksanakan setiap triwulan. Sepanjang tahun 2021 telah dilakukan *Analyst Meeting* sebanyak 4 kali dengan rincian sebagai berikut:
 - *Analyst Meeting* FY 2020 dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021
 - *Analyst Meeting* TW I Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2021
 - *Analyst Meeting* TW II Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021
 - *Analyst Meeting* TW III Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2021
2. Kegiatan komunikasi berupa 3 *Field Visit*, 226 *Virtual Meeting*, 33 *Conference/Non Deal Roadshow*, 1 *Deal Roadshow*
3. Penyelenggaraan BRI BISA (Bincang Saham) kepada pekerja BRI.
4. *ESG Rating*.
5. Penyelenggaraan *Annual Rating Review* untuk Fitch, Moodys, S&P serta Pefindo.
6. Penyelenggaraan *Public Expose*, RUPS, RUPSLB dan Investor Newsletter.
7. Pengelolaan informasi terkini pada *website Investor Relations* (www.ir-bri.com) meliputi:
 - a. Informasi Perusahaan.
 - b. Kinerja Keuangan dan Presentasi Perusahaan.
 - c. *Corporate Governance*.
 - d. Informasi Terkait RUPS.
8. *Disclosure* atas *Regulatory Filings*, *Events Calender*, *Release*, Kinerja Saham dan Informasi Surat Berharga yang diterbitkan.

Siaran Pers

Salah satu kinerja yang telah dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2021 yaitu telah melaksanakan siaran pers sebanyak 490 (empat ratus sembilan puluh) kali yang dapat diakses pada website Perseroan dengan kategori sebagai berikut.

No.	Kategori	Total
1.	UMKM	92
2.	CSR	48
3.	Penghargaan/Award	45
4.	Holding Ultra Mikro	39
5.	Kinerja BRI	38
6.	Produk	36
7.	Transformasi Digital	34
8.	<i>Event & Sponsorship</i>	23
9.	BRIlink	21
10.	Layanan Perbankan	16
11.	Kebijakan PEN	15
12.	Kerjasama Antar Lembaga	14
13.	ESG	12
14.	<i>Human Capital</i>	10
15.	Penyalur KUR	9
16.	Transaksi <i>E-Channel</i>	9
17.	Lainnya	29
	Grand Total	490

Buletin

Selain melakukan siaran pers Sekretaris Perusahaan juga mengeluarkan Buletin yaitu Brilian News yang diterbitkan 1 (satu) kali setiap bulan. Adapun buletin yang telah diterbitkan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Edisi	Tema
Januari 2021	Brivolution 2.0
Februari 2021	Digital sebagai solusi
Maret 2021	Pemberdayaan UMKM
April 2021	Produktivitas Jaringan
Mei 2021	Kontribusi SDM

Edisi	Tema
Juni 2021	Inovasi Bisnis Ritel dan Menengah
Juli 2021	Bisnis Mikro semakin kuat
Agustus 2021	Inovasi <i>Cashless Payment</i>
September 2021	Jadi Lebih besar bersama UMi
Oktober 2021	Komitmen UMi
November 2021	Dari Indonesia Untuk Dunia (UMKM Export)
Desember 2021	Memberi Makna Indonesia

Transparansi Penyampaian Laporan

Salah satu bentuk transparansi Perseroan yaitu menyampaikan laporan-laporan kepada regulator. Penyampaian laporan kepada regulator dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Adapun transparansi penyampaian laporan yang telah dilakukan selama tahun 2021, antara lain:

No	No. Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
1	B.04-SKP/CSM/01/2021	7 Januari 2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Desember 2020	OJK
2	B.05-SKP/CSM/01/2021	7 Januari 2021	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Desember 2020	OJK
3	B.06-SKP/CSM/01/2021	7 Januari 2021	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Desember 2020	OJK
4	B.16-SKP/CSM/02/2021	5 Februari 2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Januari 2021	OJK
5	B.17-SKP/CSM/02/2021	5 Februari 2021	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Januari 2021	OJK
6	B.18-SKP/CSM/02/2021	5 Februari 2021	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Januari 2021	OJK
7	B.21-SKP/CSM/CGC/02/2021	15 Februari 2021	Pemberitaan di Media Massa	OJK
8	B.26-SKP/CSM/03/2021	3 Maret 2021	Penyampaian Laporan Tahunan PT Bank Rakyat Indonesia Tahun Buku 2020	OJK
9	B.36-SKP/CSM/CGC/03/2021	18 Maret 2021	Penyampaian Salinan Akta Notaris tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OJK
10	B.47-SKP/CSM/04/2021	7 April 2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Maret 2021	BEI
11	B.48-SKP/CSM/04/2021	7 April 2021	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Maret 2021	OJK
12	B.46-SKP/CSM/04/2021	7 April 2021	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Maret 2021	OJK
13	B.54-SKP/CSM/CGC/04/2021	27 April 2021	Perubahan Komite Audit	OJK
14	B.56-SKP/CSM/CGC/04/2021	30 April 2021	Tanggapan Permintaan Penjelasan Mengenai Gugatan PKPU	OJK
15	B.64-SKP/CSM/05/2021	6 Mei 2021	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan April 2021	OJK
16	B.63-SKP/CSM/05/2021	6 Mei 2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan April 2021	BEI
17	B.67-SKP/CSM/CGC/05/2021	11 Mei 2021	Tanggapan Permintaan Klarifikasi dan Penjelasan atas DURat Pengaduan GRPKN	OJK
18	B.70-SKP/CSM/CGC/05/2021	25 Mei 2021	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 31 Maret 2021	BEI
19	B.79-SKP/CSM/06/2021	07 Juni 2021	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Mei 2021	OJK
20	B.81-SKP/CSM/06/2021	07 Juni 2021	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Mei 2021	OJK
21	B.80-SKP/CSM/06/2021	07 Juni 2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Mei 2021	BEI
22	B.850-DIR/CSC/06/2021	14 Juni 2021	Keterbukaan Informasi/ <i>Disclosure of Information</i>	OJK
23	B.90-CSC/CSM/CGC/06/2021 B.91-CSC/CSM/CGC/06/2021	22 Juni 2021 23 Juni 2021	Penyampaian Dokumen Pendukung Tambahan Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD	OJK



No	No. Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
24	B.92-CSC/CSM/CGC/06/2021	30 Juni 2021	Publikasi Pemanggilan RUPLB	OJK
25	B.0001-CSC/CSM/08/2021	06 Agustus 2021	Publikasi Pengumuman RUPSLB	OJK
26	B.0002-CSC/CSM/CGC/08/2021	06 Agustus 2021	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Juli 2021	OJK
27	B.0003-CSC/CSM/CGC/08/2021	06 Agustus 2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Juli 2021	OJK
28	B.0004-CSC/CSM/CGC/08/2021	06 Agustus 2021	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Juli 2021	OJK
29	B.0005-CSC/CSM/CGC/08/2021	09 Agustus 2021	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanggal 30 Juni 2021	BEI
30	B.0006-CSC/CSM/CGC/08/2021	10 Agustus 2021	Risalah RUPSLB	OJK
31	B.0007-CSC/CSM/CGC/08/2021 B.83.e-CSC/CSM/CGC/08/2021	26 Agustus 2021	Rencana <i>Public Expose</i>	BEI
32	B.0008-CSC/CSM/CGC/08/2021	31 Agustus 2021	Informasi Tambahan dan/atau Perubahan Prospektus Ringkas HMETD I	OJK
33	B.0009-CSC/CSM/CGC/09/2021	03 September 2021	Pemeringkatan atas Perusahaan, Obligasi Berkelanjutan dan Obligasi Subordinasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OJK
34	B.0010-CSC/CSM/CGC/09/2021	03 September 2021	Pemeringkatan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	OJK
35	B.0011-CSC/CSM/CGC/09/2021	06 September 2021	Materi Public Expose Tahun 2021	BEI
36	B.0012-CSC/CSM/CGC/09/2021	06 September 2021	Prospektus HMETD I	OJK
37	B.0013-CSC/CSM/CGC/09/2021	07 September 2021	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Agustus 2021	OJK
38	B.0014-CSC/CSM/CGC/09/2021	07 September 2021	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Agustus 2021	OJK
39	B.0015-CSC/CSM/CGC/09/2021	07 September 2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Agustus 2021	BEI
40	B.0016-CSC/CSM/CGC/09/2021	14 September 2021	Laporan Public Expose 2021	BEI
41	B.0017-CSC/CSM/CGC/09/2021	14 September 2021	Informasi Penambahan Logo PT Bank BRI	OJK
42	B.0018-CSC/CSM/CGC/09/2021	14 September 2021	Tanggapan Permintaan Informasi Pengendali Perusahaan Terbuka	OJK
43	B.0019-CSC/CSM/CGC/09/2021	15 September 2021	Keterbukaan Informasi/Disclosure of Information	OJK
44	B.0020-CSC/CSM/CGC/09/2021	15 September 2021	Publikasi Pemanggilan RUPSLB	OJK
45	B.0021-CSC/CSM/CGC/09/2021	16 September 2021	Laporan Perubahan Komite Audit	OJK
46	B.0022-CSC/CSM/CGC/09/2021	17 September 2021	Laporan Transaksi Afiliasi Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Sinergi Jaringan Kantor antara BRI dengan Pegadaian	OJK
47	B.0023-CSC/CSM/CGC/09/2021	23 September 2021	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham	OJK
48	B.0024-CSC/CSM/CGC/09/2021	23 September 2021	Laporan Transaksi Afiliasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BRI dengan PNM tentang Sinergi Jaringan Kantor	OJK
49	B.0025-CSC/CSM/CGC/09/2021	30 September 2021	Perubahan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
50	B.0026-CSC/CSM/CGC/10/2021	01 Oktober 2021	Laporan Perubahan Komite Audit	OJK
51	B.0027-CSC/CSM/CGC/10/2021	06 Oktober 2021	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan September 2021	OJK
52	B.0028-CSC/CSM/CGC/10/2021	06 Oktober 2021	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan September 2021	OJK
53	B.0029-CSC/CSM/CGC/10/2021	06 Oktober 2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan September 2021	BEI
54	B.0030-CSC/CSM/CGC/10/2021	08 Oktober 2021	Publikasi Ringkasan Risalah	OJK
55	B.0031-CSC/CSM/CGC/10/2021	12 Oktober 2021	Penyampaian Adendum Perubahan Anggaran Dasar	OJK
56	B.0032-CSC/CSM/CGC/10/2021	11 Oktober 2021	Penyampaian Adendum Perubahan Anggaran Dasar	Kementerian BUMN

No	No. Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
57	B.0033-CSC/CSM/CGC/10/2021	14 Oktober 2021	Penyampaian Perubahan Modal Disetor dalam Anggaran Dasar dan Komposisi Pemegang Saham	OJK
58	B.0034-CSC/CSM/CGC/10/2021	19 Oktober 2021	Perubahan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK
59	B.0036-CSC/CSM/CGC/10/2021	28 Oktober 2021	Penyampaian Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Triwulan III Tahun 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	BEI
60	B.0039-CSC/CSM/CGC/11/2021	05 November 2021	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan Oktober 2021	OJK
61	B.0040-CSC/CSM/CGC/11/2021	05 November 2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan Oktober 2021	BEI
62	B.0041-CSC/CSM/CGC/11/2021	05 November 2021	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan Oktober 2021	OJK
63	B.0042-CSC/CSM/CGC/11/2021	09 November 2021	Laporan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern	OJK
64	B.0043-CSC/CSM/CGC/11/2021	09 November 2021	Laporan Perubahan Kepemilikan Saham (Ibu Handayani)	OJK
65	B.0045-CSC/CSM/CGC/12/2021	06 Desember 2021	Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing BRI Bulan November 2021	OJK
66	B.0046-CSC/CSM/CGC/12/2021	06 Desember 2021	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Bulan November 2021	BEI
67	B.0047-CSC/CSM/CGC/12/2021	06 Desember 2021	Laporan Struktur Kepemilikan Saham BRI berdasarkan Kelompok Usaha Bulan November 2021	OJK
68	B.0048-CSC/CSM/CGC/12/2021	15 Desember 2021	Keterbukaan Informasi/ <i>Disclosure of Information</i>	OJK
69	B.0050-CSC/CSM/CGC/12/2021	24 Desember 2021	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham	OJK

Program Anti Korupsi

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), *Fraud*, Suap dan/atau Gratifikasi

Sebagai bentuk komitmen BRI dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di lingkungan perusahaan, BRI telah memiliki ketentuan Anti Penyuapan & Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Surat Edaran Direksi BRI No. SE.63-DIR/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020. Selain ketentuan tersebut, ketentuan lain yang mendukung pemberantasan korupsi tertuang pada Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.18-DIR/MOP/03/2020 tentang Strategi Anti *Fraud* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Strategi Anti *Fraud*

Strategi anti *Fraud* merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *Fraud* yang dirancang untuk mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan program kepatuhan anti *Fraud* di Bank, dengan mengacu pada proses terjadinya *Fraud* dan memperhatikan karakteristik serta jangkauan dari potensi terjadinya *Fraud* yang tersusun secara komprehensif integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Penerapan strategi anti *Fraud* merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern. Penerapan strategi anti *Fraud* BRI memuat 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pencegahan
2. Deteksi

3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi.
4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pencegahan

Pilar pencegahan memuat langkah untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling sedikit mencakup:

1. Kesadaran Anti *Fraud*
Kesadaran anti *Fraud* yaitu upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank. Melalui kepemimpinan yang baik dan didukung dengan kesadaran anti *Fraud* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank dan berbagai pihak yang berhubungan dengan Bank terhadap pentingnya pengendalian *Fraud*. Moral dan kesadaran dari pimpinan terhadap anti *Fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran anti *Fraud* dilakukan antara lain melalui:
 - a. Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti *Fraud*
 - b. Program Budaya Anti *Fraud* bagi Pegawai
 - c. Program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi Nasabah
2. Identifikasi Kerawanan
Identifikasi kerawanan merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud* yang dapat dilakukan secara berkala atau dalam hal terdapat indikasi *Fraud*.

3. Kebijakan Mengenal Pegawai

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *Fraud*, Bank menerapkan kebijakan mengenal pegawai yang merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM.

Deteksi

Pilar deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup:

1. Kebijakan dan Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing*)
2. Pemeriksaan Dadakan (*Surprised Audit*)
3. Sistem Pengawasan

Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud*, yang mencakup:

1. Investigasi
Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi selalu diproses sesuai standar investigasi dan pelaku diproses sesuai ketentuan.
2. Pelaporan
Bank menyusun mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi terhadap kejadian *Fraud* yang ditemukan.
3. Pengenaan Sanksi
Bank menyusun kebijakan pengenaan sanksi secara intern yang efektif untuk menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku *Fraud*

Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*, paling sedikit mencakup:

1. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* yaitu memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap *Fraud*, baik sesuai ketentuan intern Bank maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank memelihara data kejadian *Fraud*. Data kejadian dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* dilakukan secara berkala.

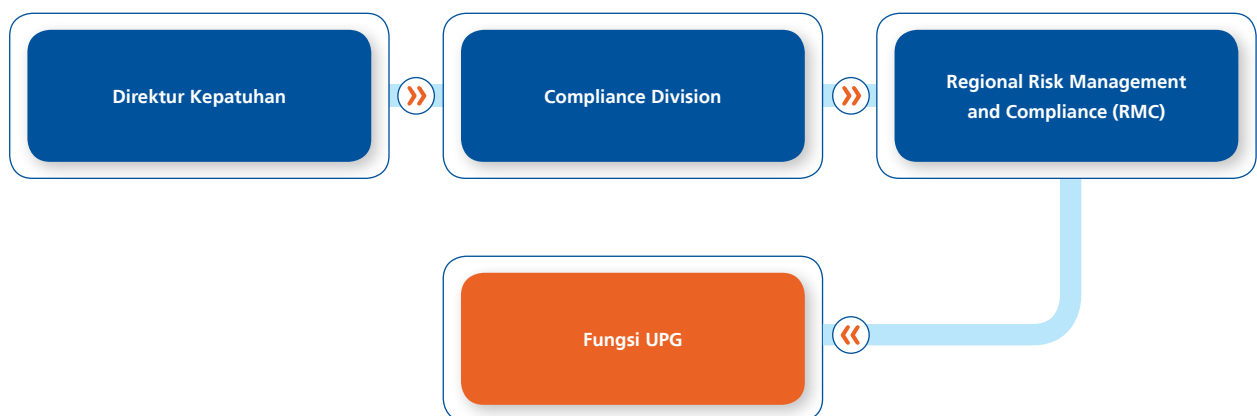
3. Tindak lanjut

Bank menyusun mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa.

Untuk mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*, Perseroan membentuk unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *Fraud* dalam organisasi, dalam hal ini dikelola oleh Operational Risk Division yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi merupakan satu-satunya Unit Kerja yang bertugas dalam melakukan pengelolaan pengendalian gratifikasi di BRI. Unit Pengendalian Gratifikasi sendiri merupakan suatu unit atau fungsi di lingkungan BRI yang menjalankan fungsi pengendalian praktik penerimaan maupun pemberian gratifikasi. Pengendalian gratifikasi di BRI dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibentuk pada tahun 2017 dan melekat pada Satuan Kerja Kepatuhan BRI, yaitu Compliance Division dan Regional Risk Management and Compliance (RMC) BRI di Kantor Wilayah dengan rincian sebagai berikut.



Unit Pengendalian Gratifikasi di Compliance Division memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

1. Menyusun ketentuan pengendalian gratifikasi.
2. Melakukan sosialisasi ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BRI.
3. Melakukan pengelolaan laporan gratifikasi berupa menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi Insan BRI.
4. Menjadi admin aplikasi GCG *Online System* dan Gratifikasi Online KPK.
5. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui sistem gratifikasi *online*.
6. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status terhadap barang gratifikasi dimaksud.
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi pengendalian gratifikasi.
8. Menyampaikan pelaksanaan program pengendalian gratifikasi kepada Direksi yang paling sedikit memuat rekapitulasi laporan gratifikasi yang dilaporkan oleh Insan BRI dan pemetaan area rawan penerimaan gratifikasi.
9. Memastikan tindak lanjut atas laporan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi telah sesuai dengan ketentuan.
10. Memberikan persetujuan surat penetapan kepemilikan barang gratifikasi apakah menjadi milik Perusahaan atau menjadi milik Penerima Gratifikasi.

Unit Pengendalian Gratifikasi di Regional Risk Management & Compliance memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

1. Menjalankan program-program pengendalian gratifikasi yang disusun oleh Compliance Division.
2. Melakukan *monitoring* terhadap kepatuhan pelaporan gratifikasi di Kantor Wilayah dan Unit Kerja Supervisinya melalui GCG *Online System*.

3. Melakukan sosialisasi ketentuan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal BRI di Kantor Wilayah.
4. Melakukan konfirmasi kepada Pelapor Gratifikasi terkait laporan gratifikasi.
5. Menyampaikan putusan status gratifikasi dan pengelolaan barang gratifikasi kepada Pelapor Gratifikasi berdasarkan surat dari Compliance Division.

Pengelola Pelaporan Gratifikasi

Unit Pengendali Gratifikasi di Compliance Division merupakan satu-satunya pengelola pelaporan gratifikasi di BRI yang untuk selanjutnya melakukan analisa dan administrasi terhadap Laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh pekerja BRI. Sesuai dengan kebijakan BRI terkait dengan Gratifikasi, terdapat dua jenis gratifikasi yaitu:

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan
Penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi yang dilakukan oleh Insan BRI berdasarkan/terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan adalah pemberian yang diterima oleh Insan BRI, tidak terkait jabatan atau kewenangan yang dimiliki dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

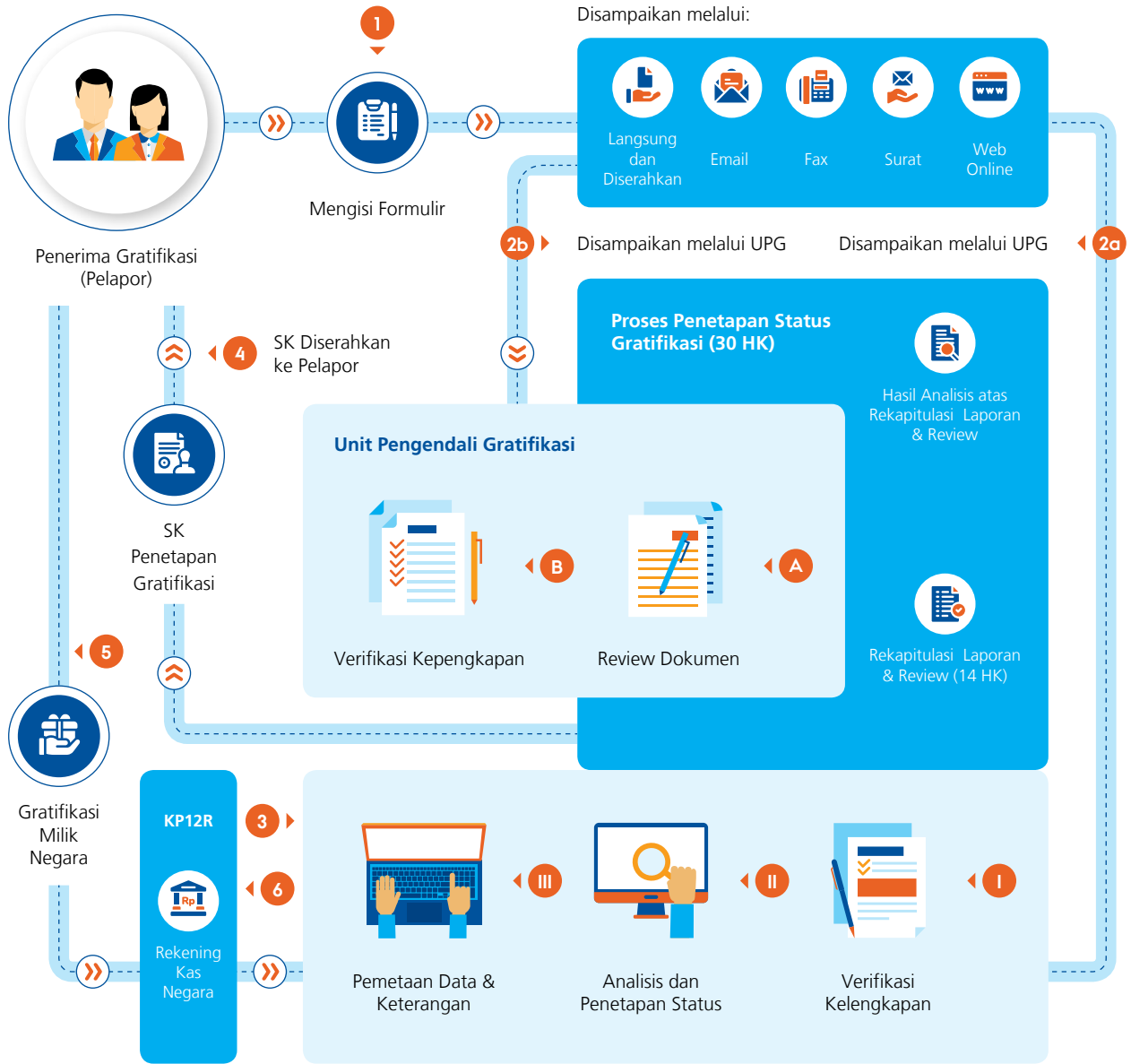
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Dalam melakukan pelaporan gratifikasi, seluruh Insan BRI wajib melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi BRI melalui media pelaporan yang telah disediakan yaitu:

The infographic consists of three blue rounded rectangular boxes arranged horizontally on a light blue background. Each box contains an icon in a white circle at the top, followed by text. The first box has a person icon and text: 'Human Capital System (BRlstars) GCG Online System'. The second box has an email icon and text: 'Email: upg.bri@corp.bri.co.id'. The third box has a building icon and text: 'Surat ke Compliance Division BRI Gedung BRI 2 Lantai 10, Jl. Jendral Sudirman Kav 44-46'.

Penjelasan mekanisme pelaporan gratifikasi adalah sebagai berikut.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi



Penerapan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2021

Selama tahun 2021, BRI telah menjalankan program-program pengendalian gratifikasi antara lain yaitu:

Pakta Integritas

Sebagai salah satu wujud dukungan BRI dalam menjalankan pengendalian gratifikasi, seluruh Insan BRI baik Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pekerja BRI di seluruh Indonesia melakukan penandatanganan komitmen anti gratifikasi dan penyuapan yang tertuang dalam Pakta Integritas Untuk Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pekerja BRI Selindo.

Selain komitmen tersebut, penandatanganan pakta integritas juga dilakukan pada saat proses pengadaan barang dan jasa oleh panitia pengadaan barang dan jasa BRI serta vendor/rekanan BRI untuk menjaga integritas dan independensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Program Pendidikan dan Sosialisasi Tentang Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan

Unit Pengendalian Gratifikasi BRI (UPG BRI) secara berkala telah menyampaikan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan kepada seluruh pekerja melalui program pendidikan,

sosialisasi, dan melalui media komunikasi lainnya bekerja sama dengan BRI Corporate University, Human Capital Business Partner Division, Culture Transformation Division, Service & Contact Center Division, Corporate Secretary, dan Marketing & Communication Division.

Beberapa bentuk aktivitas, program pendidikan, dan sosialisasi yang telah dilakukan UPG BRI selama tahun 2021, antara lain:

1. Pelaksanaan *Self Learning* Anti Penyuapan dan Gratifikasi bagi Seluruh Pekerja BRI secara *online* melalui BRISMART.
2. Penyampaian materi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan melalui Program Pendidikan BRILian *Specialist Development Program* (BSDP) bagi jajaran Regional Risk Management Team selindo.
3. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan kepada Divisi-Divisi di Kantor Pusat terutama yang menjadi ruang lingkup anggota Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.
4. Pelaksanaan Webinar BRI *E-College* dengan judul "*Awareness* terhadap Potensi Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses

Pengadaan Barang dan Jasa di Perbankan" dan "Cegah Gratifikasi Untuk BRI Yang Berintegritas" kepada pekerja di Kantor Pusat, Regional Office, Kantor Cabang, KCP dan BRI Unit.

5. Penyampaian video terkini terkait dengan Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan kepada seluruh pekerja BRI.
6. Penyampaian Compliance *Awareness* tentang Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan setiap bulannya kepada Regional *Risk Management* Team selindo.
7. Pembuatan infografis terkini terkait dengan Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan BRI.
8. Publikasi komitmen anti gratifikasi dan penyuapan pada media cetak nasional dalam rangka hari raya keagamaan.

Laporan Gratifikasi Tahun 2021

Selain melalui pendidikan dan sosialisasi, salah satu langkah BRI untuk meningkatkan *awareness* pengendalian gratifikasi adalah dengan mewajibkan pelaporan gratifikasi bagi seluruh Insan BRI. Selama tahun 2021, jumlah laporan gratifikasi yang ada di BRI sebanyak 805 laporan

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

No.	Pelatihan/Sosialisasi	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Pelaksana
1.	Budaya Anti <i>Fraud</i>	20 Mei 2021	31 Desember 2021	Corporate University
2.	<i>E-learning</i> BRI Finance 2021 : APU PPT - Anti Korupsi - GCG - Strategi Anti <i>Fraud</i>	18 Juni 2021	31 Desember 2021	Corporate University
3.	<i>10 Ways Fraudsters Steal Our Customers Money</i>	03 November 2021	30 November 2021	Corporate University
4.	Penerapan APU PPT berupa Identifikasi WIC dan <i>Conductor</i>	14 September 2021	31 Oktober 2021	Corporate University
5.	Anti Penyuapan dan Gratifikasi	13 Agustus 2021	30 September 2021	Corporate University

Kode Etik

Kode etik BRI merupakan bagian penting dari kerangka kerja GCG BRI dan memberikan pedoman etika bagi insan BRI dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya. Kebijakan yang mengatur mengenai elemen kode etik BRI dan implementasinya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No. 06-KOM/BRI/12/2013 dan Nokep: S.65-DIR/DKP/12/2013 tentang Kode Etik BRI.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode etik BRI memiliki 9 (sembilan) elemen yaitu:

1. **Kepatuhan terhadap Hukum dan Kebijakan Bank**
Komitmen Bank patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penguatan budaya kepatuhan Bank.
2. **Hubungan dengan Pemangku Kepentingan**
 - a. Etika terhadap Nasabah
Komitmen Bank memberikan pelayanan prima kepada Nasabah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
 - b. Etika terhadap Mitra Kerja
Komitmen Bank dengan Mitra Kerja berdasarkan praktik-

praktik usaha yang sah dan wajar dan menjunjung tinggi sikap profesionalisme dengan selalu mengutamakan kepentingan perusahaan.

- c. Etika terhadap Pesaing
Komitmen Bank mengedepankan persaingan yang sehat dalam menjalankan usahanya, dengan meningkatkan Bank pesaing sebagai pemacu peningkatan kinerja.
 - d. Etika terhadap Regulator
Komitmen Bank memenuhi kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator perbankan dan otoritas berwenang lainnya.
 - e. Etika terhadap Pemegang Saham
Komitmen Bank dalam upaya memberikan kontribusi positif dan optimal kepada Pemegang saham (*shareholders*).
2. **Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Hidup**
Komitmen Bank menjunjung nilai-nilai masyarakat setempat (*local wisdom*) dan memberikan manfaat serta mendukung pelestarian lingkungan hidup dimana Bank menjalankan operasionalnya.
 3. **Hubungan Perusahaan dengan Karyawan Bank**
 - a. Komitmen Bank dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua pekerja untuk berpartisipasi dalam mencapai visi dan misi Bank.

b. Komitmen Bank untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan etika sesama pekerja.

4. Kerahasiaan Informasi Bank

Komitmen Bank melindungi seluruh informasi nasabah dan internal Bank dari pihak luar/tidak berkepentingan.

5. Integritas dan Akurasi Pelaporan Bank

Komitmen insan BRI menyampaikan laporan Bank secara tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

6. Benturan Kepentingan

Komitmen insan BRI menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan dan tidak menempatkan pada kondisi/ situasi timbulnya benturan kepentingan antara dirinya dengan Bank, Nasabah, dan Pihak Ketiga yang dapat merugikan perusahaan.

7. Kontribusi dan Aktivitas Politik

Komitmen insan BRI untuk tidak berkontribusi dalam aktivitas politik atau usaha sejenis lainnya.

8. Larangan Menerima Hadiah

Insan BRI tidak diperkenankan meminta dan menerima hadiah atau imbalan apapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

BRI memiliki kode etik yang merupakan nilai dasar bagi Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja BRI selalu menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap kode etik setiap tahunnya sebagai bentuk komitmen dalam kepatuhan terhadap kode etik perusahaan. Kode Etik BRI berlaku bagi seluruh insan BRI diseluruh jenjang organisasi perusahaan. Penerapan kode etik BRI secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya perusahaan.

Seluruh Insan BRI yaitu, Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh pekerja wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BRI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh Insan BRI wajib menyatakan kepatuhannya atas Kode Etik BRI. Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BRI merupakan syarat keberlanjutan hubungan kerja dengan Perseroan.

Sosialisasi Kode Etik

BRI telah melakukan komunikasi kebijakan kode etik kepada seluruh Insan BRI antara lain melalui:

1. *Website* Perseroan.
2. *Landing Page* pada aplikasi BRISTARS.
3. Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja Perseroan dengan Manajemen Perseroan.
4. Poster, video dan media advertising lain pada kantor Perseroan.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Dalam upaya penegakan kode etik di perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pekerja BRI memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis Bank dengan menerapkan etika dalam sistem perbankan. Wujud komitmen tersebut dilakukan dalam:

1. **Pernyataan Kepatuhan Kode Etik BRI**
Seluruh Insan BRI wajib mengetahui dan memahami dengan baik serta menyatakan "Pernyataan Kepatuhan Terhadap Kode Etik" setiap tahun.
2. **Komitmen Manajemen dan Seluruh Pekerja BRI**
Komitmen manajemen dan seluruh Pekerja untuk tidak menerima dan memberi gratifikasi dalam bentuk uang dan/ atau barang yang berhubungan dengan kewajiban atau tanggungjawabnya yang dipublikasikan pada media massa dan *website* Perseroan.
3. **Annual Disclosure Benturan Kepentingan**
Seluruh Insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) tidak memiliki benturan kepentingan setiap tahun, serta seluruh unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan setiap bulan.
4. **Pakta Integritas**
Penandatanganan pakta integritas dilakukan oleh panitia pengadaan, unit kerja *user*, *vendor* atau rekanan pada seluruh proses pengadaan barang dan jasa di BRI. Selain itu, setiap tahun Direksi dan Dewan Komisaris menandatangani *GCG Statement* sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sedangkan seluruh pekerja menandatangani komitmen anti *fraud* dan pengendalian gratifikasi pada Forum Peningkatan Kinerja yang diselenggarakan setiap tahun.
5. **Whistleblowing System**
Seluruh pelanggaran terhadap kode etik BRI dilaporkan melalui mekanisme *Whistleblowing System (WBS)*. Apabila berdasarkan hasil investigasi pelanggaran kode etik tersebut terbukti, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pelanggaran disiplin BRI.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Kategori Sanksi
Pemutusan Hubungan Kerja
Peringatan Tertulis
Teguran Tertulis
Turun Jabatan 1 <i>Grade</i>
Turun Jabatan 2 <i>Grade</i>

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Jumlah pelanggaran internal yang terjadi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Pelanggaran Internal	Jumlah Pelanggaran	
	Pekerja Tetap	Non Pekerja Tetap
	2021	2021
Telah Diselesaikan	611	582
Dalam Proses Penyelesaian	229	0
Total	840	582

Selama tahun 2021, pelanggaran internal yang telah selesai diproses sebanyak 611 (enam ratus sebelas). Adapun rincian sanksi yang diberikan adalah sebagai berikut.

Kategori Sanksi	Jumlah
Pemutusan Hubungan Kerja	58
Peringatan Tertulis	275
Teguran Tertulis	180
Turun Jabatan 1 <i>Grade</i>	59
Turun Jabatan 2 <i>Grade</i>	39
Grand Total	611

Whistleblowing System

Dalam meningkatkan implementasi penerapan *Good Corporate Governance* di BRI, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan berlandaskan pada perilaku yang sesuai dengan kode etik dan *corporate culture*. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik, manajemen telah menyiapkan media pelaporan yang dikelola secara transparan dan adil melalui sarana *Whistleblowing System*.

Kebijakan *Whistleblowing System* BRI telah diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI NOSE: SE.65-DIR/KEP/10/2021 yang mengatur sistem, mekanisme dan prosedur penanganan laporan indikasi pelanggaran yang dikelola secara rahasia dan independen.

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Sarana pelaporan *Whistleblowing System* dapat dilaporkan melalui.

1. SMS: 08118200600
2. Whatsapp: 08118200600
3. Surat Tertulis: PO BOX 1895 JKP 10900
4. Webmail: whistleblower@corp.bri.co.id
5. Website: <https://whistleblowing-system.bri.co.id>

Reward & Punishment

BRI menyadari secara penuh akan pentingnya implementasi *whistleblowing system* dalam pencegahan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan. Untuk itu, BRI memberikan apresiasi kepada pekerja yang memberanikan diri untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi melalui *whistleblowing system*.

Seluruh laporan *whistleblowing system* yang diterima akan ditindaklanjuti secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam proses pengelolaan laporan *whistleblowing system*, baik berupa pembocoran identitas pelapor maupun penyampaian laporan palsu, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Bagi Whistleblower

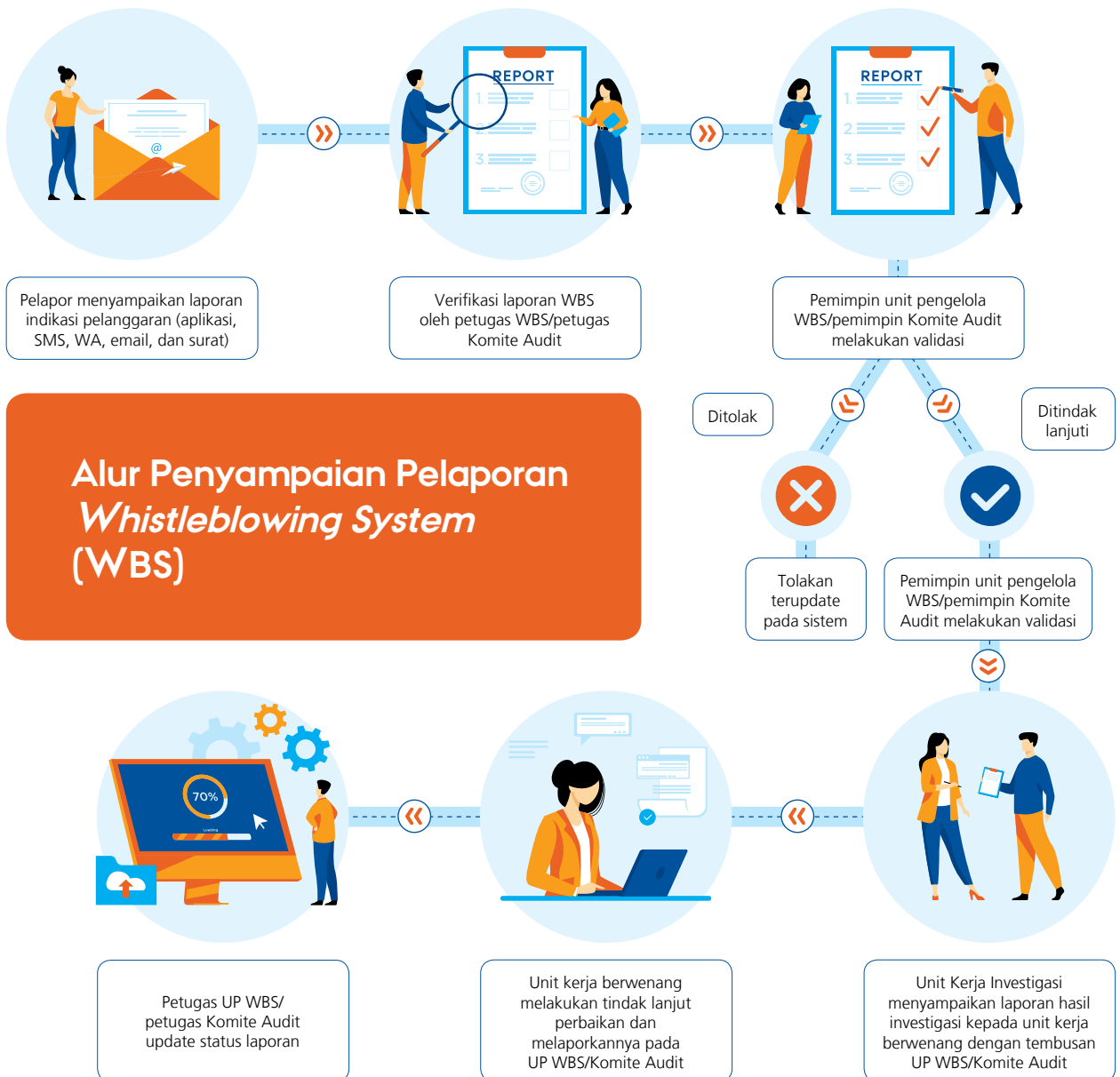
BRI memberikan perlindungan kepada Pelapor atas kerahasiaan data diri dan informasi yang dilaporkan. Pemberian perlindungan juga diberikan kepada Pelapor internal dari adanya tekanan dari atasan, penundaan kenaikan pangkat, diskriminasi, pemecatan dan mutasi sepihak. Di samping itu, BRI juga memberikan perlindungan berupa bantuan hukum kepada pelapor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme Pelaporan Whistleblowing System

1. Pelapor menyampaikan laporan indikasi pelanggaran melalui sarana *Whistleblowing System*.
2. Pelapor yang menyampaikan laporan indikasi pelanggaran memperoleh kode laporan dan kata kunci untuk melihat proses tindak lanjut laporan pada *website whistleblowing system* (www.whistleblowing-system.bri.co.id).
3. Pelapor yang menyampaikan indikasi pelanggaran melalui sarana selain *website* (SMS, Whatsapp, Surat dan Email), maka Petugas *Whistleblowing System* (WBS) memberikan kode laporan dan kata kunci kepada Pelapor yang menyampaikan identitas diri atau surel.
4. Petugas *Whistleblowing System* mencatat seluruh laporan indikasi pelanggaran pada aplikasi *whistleblowing system*.
5. Petugas WBS melakukan analisa awal (verifikasi) laporan indikasi pelanggaran sesuai kriteria laporan *whistleblowing system*.
6. Apabila diperlukan, Petugas WBS dapat meminta informasi tambahan dan konfirmasi kepada Pelapor dalam memenuhi informasi dan data laporan.
7. Pemimpin Unit Pengelola WBS melakukan validasi terhadap hasil verifikasi laporan indikasi pelanggaran dan memutuskan tindak lanjut laporan yaitu:
 - a. Menindaklanjuti untuk dilakukan investigasi; atau
 - b. Tidak dilakukan tindak lanjut (laporan ditolak) karena tidak sesuai kriteria laporan WBS.
8. Unit Pengelola WBS menunjuk Unit Kerja Investigasi untuk melakukan investigasi laporan WBS.
9. Unit Pengelola WBS membuat surat penugasan dan menyampaikan surat tugas kepada Unit Kerja Investigasi.

10. Unit Kerja Investigasi menyampaikan laporan hasil investigasi (termasuk rekomendasi atas tindak lanjut perbaikan) apabila:
 - a. Investigasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Laporan investigasi disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit kepada Unit Kerja berwenang dengan tindakan Unit Pengelola WBS. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan hasil investigasi dilakukan oleh Unit Kerja Investigasi.
 - b. Investigasi dilakukan oleh konsultan atau pihak independen Laporan hasil investigasi disampaikan kepada Unit Pengelola WBS. Pemantauan terhadap tindak lanjut perbaikan hasil investigasi dilakukan oleh Unit Pengelola WBS.
11. Laporan tindak lanjut perbaikan diantaranya memuat:
 - a. Tindak lanjut terhadap pelaku indikasi pelanggaran dan perbaikan terhadap kelemahan yang terjadi serta mitigasi risiko yang dilakukan.
 - b. Memberikan informasi kepada atasan terlapor dalam rangka menjaga nama baik terlapor apabila laporan WBS tidak terbukti.
12. Unit kerja berwenang melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Unit kerja berwenang menyampaikan laporan tindak lanjut perbaikan kepada Unit Pengelola WBS.

Alur Penyampaian Whistleblowing System



Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Informasi pelaporan indikasi pelanggaran yang dapat disampaikan dan ditindaklanjuti melalui sarana *Whistleblowing System* (WBS) yaitu:

1. Kecurangan (*fraud*)
2. Penipuan/Penggelapan/Pemalsuan/Pencurian
3. Gratifikasi/Penyuapan/Korupsi
4. Benturan Kepentingan
5. Pelanggaran terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan BRI
6. Pelanggaran ketentuan/prosedur perusahaan
7. Pelanggaran etika, antara lain membuka rahasia bank untuk kepentingan pribadi, pelaku insider, perbuatan asusila di dalam dan di luar Perseroan, pelecehan, penggunaan narkoba dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

Kelengkapan Laporan *Whistleblowing System*

Laporan indikasi pelanggaran paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang Dilaporkan
Pokok pelaporan/informasi pelanggaran yang terjadi disertai perkiraan jumlah kerugian (apabila diketahui).
2. Pihak yang Terlibat
BRI maupun seluruh pihak yang diketahui terlibat melakukan indikasi pelanggaran yang dilaporkan.
3. Waktu Terjadinya Pelanggaran
Periode waktu terjadinya indikasi pelanggaran.
4. Tempat Terjadinya Pelanggaran
Lokasi/tempat unit kerja terjadinya pelanggaran.
5. Kronologi Kejadian
Deskripsi peristiwa/kronologi kejadian indikasi pelanggaran.
6. Bukti Pelanggaran
Dokumentasi terjadinya indikasi pelanggaran berupa dokumen, foto, video, dan informasi pendukung lainnya.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Pengelolaan laporan *Whistleblowing System* dilakukan oleh Unit Pengelola WBS yang berada di bawah Direktur Utama dan dimonitor oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Unit Pengelola WBS yang bertanggung jawab dalam mengelola dan menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran.

Independensi Pengelolaan *Whistleblowing System*

Dalam menjaga independensi dan kerahasiaan dalam penerapan *Whistleblowing System*, Unit Kerja yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti laporan indikasi pelanggaran wajib untuk:

1. Patuh terhadap kode etik BRI yang dibuktikan dengan penandatanganan pernyataan kode etik dan pakta integritas.
2. Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, informasi dan dokumen atas laporan indikasi pelanggaran.
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dalam tindak lanjut terhadap seluruh laporan indikasi pelanggaran.
4. Menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam tindak lanjut laporan indikasi pelanggaran.
5. Melakukan pencatatan dan pengkinian terhadap seluruh aktivitas dalam tindak lanjut laporan indikasi pelanggaran *whistleblowing system*.
6. Menatakerjakan seluruh data dan dokumen laporan *whistleblowing system* dan disimpan ditempat yang aman.
7. Dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan maka unit kerja yang ditunjuk harus mengedepankan independensi dan kerahasiaan laporan dan pelapor WBS.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Pelaksanaan sosialisasi WBS BRI telah dilakukan kepada Pihak Internal (Pekerja BRI) dan Eksternal diantaranya:

1. Menyampaikan kebijakan WBS yang dapat oleh seluruh pekerja melalui portal internal BRI.
2. Menyampaikan materi WBS pada program *development* dan *enhancement* Pekerja BRI.
3. Sosialisasi WBS ke Unit Kerja melalui materi komunikasi yang efektif.
4. Memasang *message from CEO* pada *landing page* aplikasi Bristars (portal internal BRI).
5. Melaksanakan *e-learning* WBS untuk seluruh pekerja BRI.
6. Penyampaian informasi WBS melalui *website* perseroan.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Selama tahun 2021 diterima 54 (lima puluh empat) laporan pengaduan pelanggaran (WBS) yang memuat 116 (seratus enam belas) sub indikasi pelanggaran, adapun tren perkembangan laporan WBS 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	2019	2020	2021
Jumlah Pengaduan	134	126	54
Sub Indikasi Pelanggaran	297	239	116

Berdasarkan data tersebut, sub indikasi pelanggaran yang paling banyak dilaporkan dan terbukti pada tahun 2021 adalah pelanggaran ketentuan/prosedur, kecurangan (*fraud*) sebagaimana data berikut:

Indikasi Pelanggaran	Pengaduan Diterima	Status		
		Terbukti	Tidak Terbukti	Dalam Proses
Benturan Kepentingan	12	3	8	1
Gratifikasi/ Penyuapan/ Korupsi	6	1	3	2
Kecurangan (<i>Fraud</i>)	25	13	10	2
Pelanggaran Etika	16	10	5	1
Pelanggaran Ketentuan/ Prosedur	54	20	33	1
Penipuan/ Penggelapan/ Pemalsuan/ Pencurian	3		1	2
Grand Total	116	47	60	9

Media pelaporan WBS yang paling banyak digunakan selama tahun 2021 adalah melalui website sejumlah 30 (tiga puluh) pelaporan (56.6%), email sebanyak 10 (sepuluh) pelaporan (18.9%), whatsapp sebanyak 8 (delapan) pelaporan (14.8%). Tren Penggunaan media pelaporan WBS selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	2019	2020	2021
Email	50	22	10
SMS	44	24	5
Surat	6	9	1
Website	34	62	30
Whatsapp	0	9	8

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan di Tahun 2021

Sanksi/ Tindak Lanjut	Hukuman Disiplin
Dalam Proses	17
Teguran Tertulis	4
Tidak bersalah	2
Peringatan Tertulis	2
Turun Jabatan 2 Grade	2
Permintaan Pekerja	2
Kontrak Habis	1
Mangkir	1
Total	31

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No: 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi dan pemahaman tentang manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan atau keahlian yang dibutuhkan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang efisien dan efektif serta dapat membantu Perseroan dalam mencapai target jangka pendek maupun jangka Panjang perusahaan.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Kartika Wirjoatmodjo	Komisaris Utama	48 tahun	Laki-laki	Sarjana Akuntansi Master of Business Administration	Memiliki pengalaman dalam bidang perbankan dan manajemen	Ekonomi, Perbankan
Ari Kuncoro*	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	60 tahun	Laki-laki	Sarjana Ilmu Ekonomi Master of Arts Ph.D. in Economics	Memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi dan pengawasan perbankan	Ekonomi, Perbankan
Rofikoh Rokhim	Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	51 tahun	Perempuan	Sarjana Ekonomi Sarjana Ilmu Politik Master bidang Public Finance Master International & Development Economics Doktor bidang Ekonomi	Memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi dan manajemen	Ekonomi, Finance
R. Widyo Pramono	Komisaris Independen	64 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Magister Hukum Doktor Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang Hukum dan pengawasan perbankan	Ilmu Hukum
Hendrikus Ivo	Komisaris Independen	63 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman dalam bidang audit dan pengawasan perbankan	Ilmu Hukum, Audit
Dwi Ria Latifa	Komisaris Independen	55 tahun	Perempuan	Sarjana Hukum Alumni Lemhanas Magister of Science	Memiliki pengalaman dalam bidang hukum dan manajemen	Ilmu Hukum, Manajemen
Zulnahr Usman	Komisaris Independen	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Pertambangan	Memiliki pengalaman dalam bidang bisnis dan industri	Bisnis, Industri
Heri Sunaryadi***	Komisaris Independen	56 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Pertanian	Memiliki pengalaman dalam bidang manajemen dan pengawasan perbankan	Manajemen
Rabin Indrajad Hattari	Komisaris	46 tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi & Matematika Magister Manajemen Ph.D. in Economics,	Memiliki pengalaman dalam bidang ekonomi dan pengawasan perbankan	Statistik, Manajemen
Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Komisaris	48 tahun	Laki-laki	Sarjana Ilmu Politik Master of Arts Ph.D, Ilmu Politik dan Hubungan Internasional	Memiliki pengalaman dalam bidang ilmu komunikasi dan politik	Komunikasi, Politik
Hadiyanto	Komisaris	59 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Master of Law Doktor Ilmu Hukum	Memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pengawasan perbankan	Ilmu Hukum, Manajemen

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021.

** Diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 7 Oktober 2021 dan masih dalam proses *fit and proper test*.

*** Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan & kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberagaman Komposisi Direksi

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Sunarso	Direktur Utama	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Agronomi Magister Administrasi Bisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Administrasi Bisnis, Manajemen
Catur Budi Harto	Wakil Direktur Utama	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Agronomi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Haru Koesmahargyo*	Direktur Keuangan	55 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Industri Pertanian MBA, Investment Banking	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen, Investment
Viviana Dyah Ayu Retno**	Direktur Keuangan	43 tahun	Perempuan	Sarjana Peternakan Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Administrasi Bisnis
Agus Noorsanto	Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	56 tahun	Laki-laki	Sarjana Akuntansi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi, Manajemen
Supari	Direktur Bisnis Mikro	55 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Pertanian Magister Manajemen Agribisnis	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Indra Utoyo	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	60 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Elektro Telekomunikasi Magister Communication and Signal Processing Doctor Strategic Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang Telekomunikasi	Teknologi Informasi, Manajemen Strategi
Priyastomo*	Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Peternakan Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Amam Sukriyanto**	Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	53 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Industri Pertanian Master of Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Ahmad Solichin Lutfiyanto***	Direktur Kepatuhan	51 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknologi Pertanian Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Agus Sudiarto	Direktur Manajemen Risiko	56 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang penerbangan dan perbankan	Hukum, Manajemen
Handayani	Direktur Bisnis Konsumer	56 tahun	Perempuan	Sarjana Kedokteran Gigi Magister Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang penerbangan dan perbankan	Manajemen
Herdy Rosadi Harman*	Direktur Human Capital	58 tahun	Laki-laki	Sarjana Hukum Master of Business Administration (MBA) Master of Law (LLM Program)	Memiliki pengalaman kerja di bidang Telekomunikasi	Administrasi Bisnis, Hukum
Agus Winardono**	Direktur Human Capital	56 tahun	Laki-laki	Sarjana Ekonomi Perusahaan Magister Manajemen Keuangan	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi, Manajemen Keuangan
Arga Mahanana Nugraha**	Direktur Jaringan dan Layanan	41 tahun	Laki-laki	Sarjana Teknik Informatika Master of Science	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Informatika, Manajemen

* Diberhentikan dengan hormat pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021.

** Diangkat berdasarkan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif tanggal 14 April 2021.

*** Dialihkan penugasannya semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Kepatuhan pada RUPS Luar Biasa tanggal 21 Januari 2021 dan terhitung efektif sejak tanggal 31 Maret 2021.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG, BRI juga mematuhi peraturan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kebijakan

- Pejabat yang wajib melaporkan LHKPN
Sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan transparansi, pencegahan korupsi dan mendukung budaya bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, anggota Komisararis, Direksi, SEVP, EVP dan VP di BRI wajib untuk melaporkan harta kekayaan sesuai dalam ketentuan internal Surat Edaran Direksi BRI No. SE.65-DIR/KEP/12/2020 tanggal 16 Desember 2020. Data yang dilaporkan dalam laporan tersebut meliputi posisi

harta kekayaan sebelum saat dan setelah selesai menjabat. Ketentuan pelaporan tersebut senantiasa diperbaharui agar menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

- Koordinator Pelaporan LHKPN
Koordinator pelaporan yang ditunjuk oleh BRI untuk mengelola dan memonitor proses pelaporan LHKPN adalah Kepala Bidang Kesekretariatan dan Protokoler dan Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Human Capital. Berdasarkan struktur organisasi saat ini, terdapat 259 (dua ratus lima puluh sembilan) Wajib Laporan LHKPN yang wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Dari seluruh pejabat tersebut, mayoritas telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan kewajiban pelaporan pada LHKPN.

Pelaporan LHKPN

BRI telah menyampaikan laporan LHKPN untuk periode laporan tahun 2020 yang dilaporkan pada tahun 2021 sebagai berikut.

No	Jabatan	Wajib LHKPN	Wajib LHKPN yang telah melaporkan		Wajib LHKPN yang belum melaporkan	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Dewan Komisararis	8	8	100%	0	0%
2	Direksi	16	16	100%	0	0%
3	Pekerja BRI	235	235	100%	0	0%
	Total	259	259	100%	0	0%

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2021 tidak terdapat *buyback* saham dan *buyback* obligasi.

Rencana Strategis Bank

Informasi terkait Rencana Strategis Bank telah disajikan pada Sub Bab Strategi Bank pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Informasi terkait Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar telah disajikan pada Sub Bab Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi/situasi dimana seseorang karena kedudukan, jabatan atau wewenang yang dimiliki BRI memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja dari pelaksanaan tugas yang diamanatkan secara objektif. BRI memiliki kebijakan benturan kepentingan yang tertian dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisararis dan Direksi BRI No:02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan

Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan adalah:

- Mengutamakan kepentingan publik.
- Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan.
- Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan.
- Menciptakan dan membina budaya organisasi yang mampu menangani benturan kepentingan.

Komitmen

Dewan Komisararis, Direksi dan seluruh insan BRI berkomitmen dan profesionalitas dalam penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Sebagai wujud komitmen insan BRI dalam implementasi kebijakan dan pengungkapan benturan kepentingan diantaranya:

- Seluruh insan BRI wajib membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclosure*) tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan perilaku yang telah ditetapkan perusahaan.
- Setiap unit kerja wajib menyampaikan laporan transaksi/putusan yang mengandung benturan kepentingan.

Sosialisasi

BRI senantiasa melakukan sosialisasi kebijakan GCG dan benturan kepentingan kepada pekerja BRI melalui program pendidikan, *In House Training* dan pembelajaran secara *online*, dan pernyataan benturan kepentingan yang dibuat oleh masing-masing pekerja BRI.

Laporan Transaksi Benturan Kepentingan 2021

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah fraud yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2020)	Tahun Berjalan (2021)	Tahun Sebelumnya (2020)	Tahun Berjalan (2021)	Tahun Sebelumnya (2020)	Tahun Berjalan (2021)
Total Fraud	-	-	154	107	21	11
Telah Diselesaikan	-	-	153	59	21	10
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	-	-	1	48	-	1
Belum Diupayakan Penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-

Keterangan

Internal Fraud dengan nilai lebih dari Rp100 juta.

Pencegahan Transaksi Orang dalam (*Insider Trading*)

Insider Trading merupakan perdagangan saham perusahaan atau surat berharga lainnya (obligasi atau opsi saham) yang dilakukan individu perusahaan yang memiliki akses informasi non publik terhadap perusahaan. Perseroan memiliki kebijakan yang mengatur kegiatan *insider trading* bagi seluruh insan BRI. Kebijakan *insider trading* tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dewan Komisaris dan Direksi BRI No: 02-KOM/BRI/05/2012 dan Nokep: S.104-DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan BRI.

Kebijakan terkait kegiatan *insider trading* mengatur bahwa:

1. Setiap insan BRI harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi ini tidak tidak terbuka untuk umum.
2. Seluruh insan BRI tidak memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan.
3. Seluruh insan BRI dilarang melakukan segala aktivitas yang terkait dengan *insider trading* yang merujuk pada kegiatan ilegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan/aksi korporasi yang dipublikasikan.
4. Pelanggaran terhadap kegiatan di atas akan dikenakan sanksi disiplin sesuai yang berlaku di BRI.

Dalam mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik, seluruh insan BRI diwajibkan membuat pernyataan tahunan (*Annual Disclosure*) diantaranya pengungkapan terhadap transaksi *insider trading* yang dilakukan oleh insan BRI.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank BRI secara transparan melakukan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan perusahaan dan melaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi kondisi keuangan dan non keuangan disampaikan kepada publik baik melalui media cetak atau situs perusahaan (www.bri.co.id/laporan) sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada situs perusahaan.
2. Laporan Keuangan Triwulan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
3. Laporan Tahunan yang disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan pada media cetak dan situs perusahaan.
4. Informasi tata kelola perusahaan meliputi:
 - a. Visi dan Misi Perusahaan
 - b. Komposisi dan profil Dewan Komisaris
 - c. Komposisi dan profil Direksi
 - d. Penerapan Tata Kelola BRI
5. Transparansi informasi produk Bank yang disampaikan melalui media cetak, elektronik, dan situs perusahaan.

» Penerapan Tata Kelola Terintegrasi

Wujud komitmen penerapan GCG oleh BRI Group dalam penerapan tata kelola terintegrasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulator. BRI sebagai Entitas Utama senantiasa melakukan penilaian sendiri dan melaporkan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disusun dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI No. 14/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan RI No. 14/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Konglomerasi Keuangan.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku.
2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda.
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir.
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi transaksi intra-grup.

Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

BRI sebagai Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2021 untuk periode semester I dan semester II. Adapun hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagai berikut:

Peringkat	Keterangan
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Kebijakan Transaksi Intra Group

Hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan diberbagai sektor keuangan menyebabkan dampak secara langsung atau tidak langsung terhadap eksposur risiko yang timbul dalam kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan.

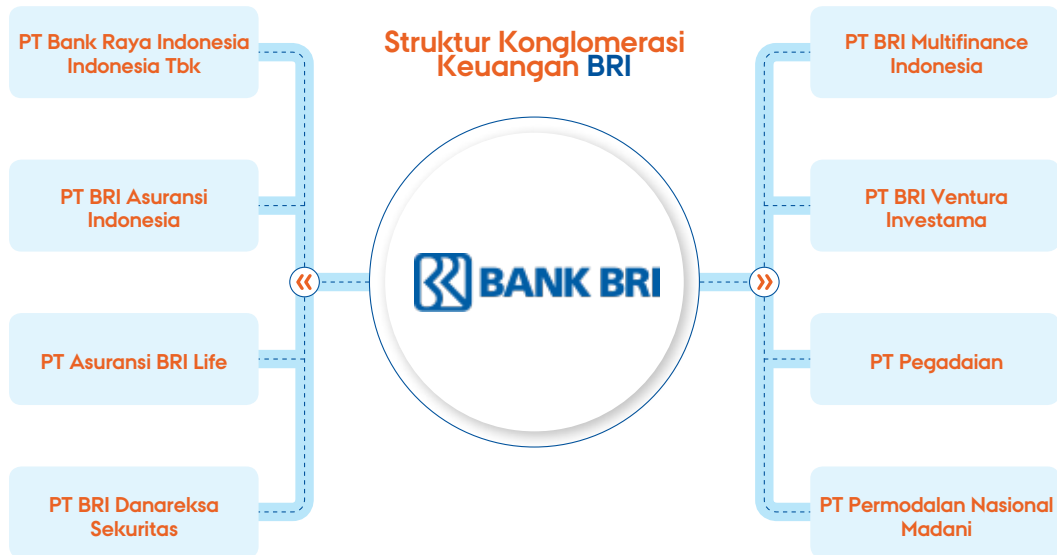
Berdasarkan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank BRI sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan wajib mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi terhadap risiko transaksi intra group.

Kebijakan transaksi intra group diatur dalam ketentuan internal BRI yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi BRI No: KB.03-DIR/MPE/12/2020 tentang Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Surat Edaran (SE) BRI No. SE.70-DIR/SBM/11/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pengelolaan Sinergi BRI Group. Pengendalian risiko intra group bertujuan agar dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan ketergantungan LJK baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam Konglomerasi Keuangan.

BRI senantiasa mengawasi kinerja dan risiko bisnis yang timbul pada perusahaan anak dengan memastikan transaksi intra group sesuai aturan dan limit yang ditetapkan oleh regulator.

Struktur Konglomerasi Keuangan BRI

Sesuai surat Surat Keputusan Direksi Nokep: B.1570-DIR/SBM/10/2021 tanggal tentang Penetapan Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Struktur Konglomerasi Keuangan BRI per 6 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:



Struktur Kepemilikan Konglomerasi Keuangan BRI

Struktur Kepemilikan sebagaimana dilaporkan pada bab Profil Perusahaan.

Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan konglomerasi keuangan BRI sesuai dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Komite TKT	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Internal	Fungsi Manajemen Risiko
Bank Raya	✓	✓	✓	✓
BRI Insurance	✓	✓	✓	✓
BRI Life	✓	✓	✓	✓
Danareksa Sekuritas	✓	✓	✓	✓
BRI Finance	✓	✓	✓	✓
BRI Ventures	✓	✓	✓	✓
Pegadaian	✓	✓	✓	✓
PNM	✓	✓	✓	✓

Struktur Organisasi Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan BRI

Entitas Utama

Struktur Organisasi Entitas Utama dibahas dalam BAB Dewan Komisaris dan Direksi pada Laporan Tahunan ini.

Anggota Konglomerasi Keuangan BRI

Bank Raya

Dewan Komisaris	
Budi Satria	Komisaris Utama
Eko B. Supriyanto	Komisaris Independen
Rina Saadah	Komisaris Independen
Rama Notowidigdo	Komisaris Independen
Achmad F.C. Bahrir	Komisaris

Direksi	
Kaspar Situmorang	Direktur Utama
Bhimo Wikan Hantoro	Direktur
Arif Wicaksono	Direktur
Ernawan	Direktur
Sigit Murtiyoso	Direktur

BRI Insurance

Dewan Komisaris	
Bambang Krisminarno	Komisaris Utama
Soegeng Hernowo	Komisaris Independen
Imam Sundoro	Komisaris Independen

Direksi	
Fankar Umran	Direktur Utama
Rahmat Budi Legowo	Direktur
Sony Harsono	Direktur
Heri Supriyadi	Direktur
Ade Zulfikar	Direktur

Dewan Pengawas Syariah (DPS) - BRINS

Bertugas tidak terbatas hanya memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, namun memastikan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan prinsip syariah berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah	
Hj. Nilmayetty Yusri	Ketua
Abdul Ghoni	Anggota

BRI Life

Dewan Komisaris	
Muhammad Syafri Rozi	Komisaris Utama
Jonathan Hekster	Komisaris
Premita Fifi Widhiawati	Komisaris Independen
Ubaidillah Nugraha	Komisaris Independen
Eko Wahyu Andriastono	Komisaris Independen

Direksi	
Iwan Pasila	Direktur UtUtama
Danny Cahya R	Direktur
Yosie William Iroth	Direktur
Sutadi	Direktur
Lim Chet Ming	Direktur

Dewan Pengawas Syariah – BRILife

Dewan Pengawas Syariah BRI Life merupakan Organ Perusahaan yang direkomendasikan DSN MUI yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan majelis pengawas aspek syariah, dimana setiap Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah didukung oleh Perangkat Dewan Pengawas Syariah yaitu sekretaris dan atau staff khusus Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah	
KH. DR.Mohamad Hidayat, MBA, MH	Ketua
M Ir. H. Agus Haryadi.AAAIJ, FIIS	Anggota
Hj. Siti Haniatunnisa, LLB, MH	Anggota

Danareksa Sekuritas

Dewan Komisaris	
Rico Rizal Budidarmo	Komisaris
Soehandjono	Komisaris Independen
Sumihar Manullang	Komisaris Independen

Direksi	
Friderica Widayarsi	Direktur Utama
Mohammad Adib	Direktur
Santi Suryandari	Direktur
Boumediene Samurung Halomoan	Direktur

BRI Finance

Dewan Komisaris	
I Komang Sudiarsa	Komisaris Utama
Ngalim Sawega	Komisaris
Sumantri Soewarno	Komisaris Independen

Direksi	
Azizatun Azhimah	Direktur Utama
Primartono Gunawan	Direktur
Ari Prayuwana	Direktur
Willy Halim Sugiarda	Direktur

BRI Ventures

Dewan Komisaris	
Hadi Susanto	Komisaris Utama
Arip Tirta	Komisaris Independen
Agoosh Yoosran	Komisaris Independen

Direksi	
Nicko Widjaja	Direktur Utama
Yosephine Ajeng Sekar Putih	Direktur
William Gozali	Direktur

Pegadaian

Dewan Komisaris	
Loto Srinaita Ginting	Komisaris Utama
Umiyatun Hayati T.	Komisaris
Sudarto	Komisaris
Makmur Keliat	Komisaris Independen
Rini Widyantini	Komisaris
Otok Kuswandaru	Komisaris
Muhammad Sulhan Fauzi	Komisaris Independen

Direksi	
Kuswiyoto	Direktur Utama
Hariato Widodo	Direktur
Damar Latri Setiawan	Direktur
Teguh Wahyono	Direktur
Ridwan Arbian Syah	Direktur
Ninis Kesuma Adriani	Direktur
Gunawan Sulistyio	Direktur

Dewan Pengawas Syariah (DPS) - PEGADAIAN

Bertugas tidak terbatas hanya memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, namun memastikan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan prinsip syariah berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah	
Muhammad Cholil Nafis	Ketua
Muhammad Asrorun Ni'am Sholeh	Anggota

PNM

Dewan Komisaris	
Arif Rahman Hakim	Komisaris Utama
M. Sholeh Amin	Komisaris Independen
Veronica Colondam	Komisaris Independen
Meidyah Indreswari	Komisaris Independen
Parman Nataatmadja	Komisaris

Direksi	
Arief Mulyadi	Direktur Utama
Tjatur H. Priyono	Direktur Keuangan dan Operasional
Anton Fahlevie	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Kindaris	Direktur Bisnis
Sunar Basuki	Direktur Kelembagaan dan Perencanaan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) - PNM

Bertugas tidak terbatas hanya memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, namun memastikan aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan prinsip syariah berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah	
Didin Hafidhuddin	Ketua Dewan Pengawas Syariah
Muhammad Syafii Antonio	Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan BRI, Entitas Utama memiliki pedoman untuk mendorong LJK Konglomerasi keuangan memiliki tata kelola yang lebih *prudent* sesuai prinsip-prinsip GCG. Dalam implementasi pedoman tersebut, seluruh organ entitas utama dan LJK konglomerasi keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam fungsi pengawasan dan pengendalian intern.

Dewan Komisaris dan Entitas Utama

1. Pengawasan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan BRI sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BRI atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
3. Evaluasi pedoman dan penerapan tata kelola terintegrasi.

Direksi Entitas Utama

1. Menyusun pedoman tata kelola terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan evaluasi pelaksanaan pedoman tata kelola terintegrasi.

3. Menindaklanjuti arahan dan evaluasi Dewan Komisaris terhadap pedoman dan pelaksanaan tata kelola terintegrasi
4. Memastikan temuan dan rekomendasi dari pengawasan OJK atau regulator, auditor eksternal, satuan kerja audit terintegrasi, telah ditindaklanjuti.

Dewan Komisaris Anggota LJK

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris LJK Konglomerasi Keuangan

1. Pengawasan penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi, serta tindak lanjut temuan audit.
2. Membentuk Komite Pemantauan Audit dan Komite Pemantauan Kepatuhan.
3. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.
4. Memiliki pedoman tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Dewan Pengawas Syariah BRI Life

Dewan Pengawas Syariah BRI Life bertugas melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah, yang secara teknis *disupport* oleh manajemen, terhadap:

1. Kegiatan Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dan atau baru, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
2. Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi; dan
3. Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Dewan Pengawas Syariah BRI Life

Dalam memberikan nasihat dan saran, Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat yang berpedoman pada Piagam Dewan Pengawas Syariah yang diatur sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diadakan secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat dapat diadakan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa Anggota Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
3. Keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
4. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Asuransi sesuai dengan prinsip syariah;
3. Menyelenggarakan rapat rutin antara DPS dan/atau dengan manajemen paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun;
4. Membuat Risalah Rapat dengan lengkap, melalui bantuan manajemen, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan dengan baik, serta disampaikan kepada seluruh DPS, baik yang hadir maupun yang tidak hadir;
5. Menyusun laporan tahunan melalui bantuan manajemen, tentang Pengawasan Dewan Pengawas Syariah terhadap perusahaan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah diatur oleh Regulator.
6. Menyampaikan hasil laporan pengawasan tersebut kepada OJK dan menyampaikan salinannya kepada Manajemen serta menjadi bagian dari isi laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
7. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan berkala tersebut;
8. Meminta penjelasan kepada Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang dinilai oleh DPS tidak sesuai dengan prinsip syariah;
9. Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS, DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS.
10. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada butir 8 tersebut, DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
11. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada butir 10. DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Kepala Eksekutif dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

Direksi LJK Konglomerasi Keuangan

1. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Menindaklanjuti temuan audit dari pihak internal dan eksternal.

3. Memastikan ketersediaan peraturan tata tertib kerja di LJK Konglomerasi Keuangan.
4. Menyelenggarakan rapat Direksi mencakup frekuensi, kehadiran, dan tata cara pengambilan keputusan.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Memberikan masukan strategis kepada Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi.
4. Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dan laporan yang diperlukan.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan BRI termasuk pemenuhan prinsip syariah.
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Kepatuhan.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Mengacu pada POJK tentang Tata Kelola Terintegrasi, POJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BRI dan disetujui oleh Direksi Konglomerasi Keuangan BRI tentang Piagam Audit Intern Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI, tertuang tugas dan tanggung jawab SKAI Terintegrasi sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direksi Utama Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Melakukan pengawasan atas penerapan fungsi audit intern dalam konglomerasi keuangan minimal meliputi:
 - a. Laporan kegiatan audit dan laporan pokok-pokok hasil audit perusahaan anak.
 - b. Area-area yang mengalami peningkatan risiko secara signifikan dan kejadian fraud signifikan yang terjadi di Perusahaan Anak.

- c. Kualitas SKAI Perusahaan Anak yang meliputi namun tidak terbatas pada metode dan prosedur audit, Sumber Daya Manusia (SDM) dan *tools audit*.
3. Melaksanakan audit atau *join audit* dengan SKAI Perusahaan Anak atau berdasarkan laporan dan internal audit Perusahaan Anak secara independen, objektif dan profesional dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak setelah mendapat persetujuan Direktur Utama Entitas Utama.
4. Menyusun standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal-hal yang diatur dalam Standar Profesional Audit Intern sebagai pedoman bagi Audit Intern dalam melaksanakan tugas.
5. SKAI Terintegrasi berkomunikasi dengan SKAI Perusahaan Anak secara berkala, minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
6. SKAI Terintegrasi dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tata Kelola Terintegrasi.
7. Menginformasikan semua temuan audit yang terkini dan signifikan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi pada kesempatan pertama, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Direktur yang melakukan pengawasan terhadap LJK Konglomerasi Keuangan.
8. SKAI terintegrasi dapat bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain, antara lain manajemen risiko terintegrasi dan kepatuhan terintegrasi pada perusahaan dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 2021

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2021 dibahas dalam Sub Bab Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Pelaksanaan kerja Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi selama tahun 2021 sebagai berikut:

1. Menjaga struktur TKT telah memenuhi prinsip TKT dan ketentuan regulator diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Satuan Kerja Terintegrasi dan kebijakan/prosedur.
2. Evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi pada konglomerasi keuangan yang mencakup:
 - a. Penerapan *Good Corporate Governance*.
 - b. Pemantauan prinsip kehati-hatian.
 - c. Pengelolaan komitmen.
 - d. Pengelolaan risiko kepatuhan.
 - e. Pelaksanaan Program APU-PPT.
 - f. Analisa Dampak Ketentuan Eksternal.
 - g. Laporan Transaksi/Putusan yang Mengandung Benturan Kepentingan.

3. Penilaian *self assessment* TKT pada konglomerasi keuangan BRI.
4. Penilaian *Self Assesment* GCG Individu dan konsolidasi.
5. Penyampaian pelaporan pelaksanaan TKT kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pelaksanaan Pendidikan BRI bersama dengan Konglomerasi Keuangan BRI.

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Dalam rangka mendorong konglomerasi keuangan BRI memiliki fungsi audit intern yang handal sehingga dapat menjadi *strategic business partner* dalam mendukung tujuan perusahaan dalam konglomerasi keuangan dan untuk memastikan pelaksanaan audit intern di LJK dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Bank, maka selama tahun 2021 SKAI Terintegrasi telah melaksanakan berbagai program kerja, antara lain:

1. Evaluasi terhadap fokus dan strategi audit SKAI LJK sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Audit Tahunan (PAT) 2021 masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan.
2. Monitoring terhadap pelaksanaan fungsi audit intern secara berkala setiap Triwulanan dengan ruang lingkup pelaksanaan monitoring, sbb:
 - a. Monitoring pencapaian kinerja LJK
 - b. Monitoring Laporan Hasil Audit SKAI LJK
 - c. Monitoring tindak lanjut temuan signifikan LJK
 - d. Monitoring pemenuhan SDM Audit LJK
 - e. Monitoring tingkat maturitas SKAI LJK
3. Audit individual terhadap BRI Finance, BRI Danareksa Sekuritas, BRI Life, BRI Venture, BRI Insurance, BRI Remittance Company
4. Pelaksanaan *Joint Audit* antara SKAI Terintegrasi dengan SKAI BRI Insurance.
5. Melaksanakan *Quality Assurance Review and Improvement Program* (QAIP) di SKAI LJK dalam rangka mengembangkan dan memelihara program peningkatan kualitas audit yang mencakup seluruh aktivitas audit internal. QAIP yang dilaksanakan oleh SKAI Terintegrasi terhadap SKAI LJK dilaksanakan juga dalam rangka mengevaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap standar, kode etik Auditor dan menilai efisiensi serta efektivitas aktivitas audit internal untuk kemudian diidentifikasi peluang peningkatannya. Selama tahun 2021, SKAI Terintegrasi telah melaksanakan *Quality Assurance* terhadap SKAI LJK (BRI Life, BRI Danareksa Sekuritas, Bank Raya Indonesia, BRI Finance, BRI Insurance)
6. Upaya peningkatan kualitas dan kompetensi SKAI LJK Konglomerasi Keuangan melalui penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan perwakilan Auditor LJK dengan total peserta 76 orang, sbb:
 - a. *Training root cause analysis*: 15 peserta
 - b. Training Internal Audit ISO 9001:2015 Sist Manajemen Mutu: 22 peserta
 - c. *Training* Standar Proses Audit Tahun 2021: 10 peserta
 - d. *Training ISO 37001:2016* (SMAP) : 16 peserta
 - e. Training Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO Tahun 2021: 9 peserta
 - f. Panduan Audit Intern Lateral Joiner: 19 peserta
7. Pendampingan pengembangan metodologi & tools audit:
 - a. Penyusunan program audit SKAI BRI Danareksa
 - b. Brainstorming pengembangan audit tools SKAI BRINS.
 - c. Pengembangan indikator *fraud* SKAI BRI Finance
 - d. Pengembangan *risk control matriks* SKAI BRI Finance
 - e. Pengembangan metodologi *rating* audit SKAI BRI Insurance
 - f. Pendampingan pelaksanaan audit TI SKAI BRI Finance
8. Penyampaian Laporan Audit Intern Terintegrasi yang dilakukan setiap semester.
9. *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi dilaksanakan setiap semester. Hasil penilaian sendiri terhadap Faktor 5 Indikator Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi baik meliputi aspek struktur, proses dan hasil adalah 1 (sangat baik). Atas penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum SKAI Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BRI telah melakukan penerapan tata kelola terintegrasi yang secara umum sangat baik. Hal tersebut tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan tata kelola terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan tata kelola terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/ atau LJK.
10. Dalam rangka akselerasi proses *transfer knowledge* dari SKAI BRI kepada SKAI LJK, telah ditempatkan Auditor BRI di SKAI LJK dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bank Raya Indonesia : Kepala SKAI (1 Orang), Auditor TI (1 Orang) , Auditor (3 Orang)
 - b. BRI Life : Kepala SKAI (1 Orang), KTA (1 Orang), Auditor (1 Orang)
 - c. BRI Finance : Pgs. Kepala Desk (1 Orang), Auditor (2 Orang)

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Pelaksanaan kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi selama periode tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Risk Management Committee (RMC) Terintegrasi.
2. Pelaksanaan Profil Risiko Terintegrasi.
3. Laporan Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi BRI
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Konsolidasi.
5. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.
6. Stress Test Terintegrasi

» Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Pelaksanaan penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan terbuka, yang mengatur tentang 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan prinsip tata kelola.

Penerapan rekomendasi tersebut dalam GCG BRI adalah sebagai berikut:

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.	Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.	
A.1.	Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
A.1.1.	<p>Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.</p> <p>Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci.</p> <p>Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.</p>	<p>Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham BRI dilaksanakan menggunakan metode pemungutan suara satu hak suara (<i>one vote one share</i>). Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dengan cara mengangkat tangan dan Petugas mengumpulkan hak suara dengan menghampiri seluruh pemegang saham yang hadir.</p> <p>Perseroan telah menggunakan tata cara pengambilan keputusan melalui pengumpulan suara (<i>voting</i>) yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham sesuai ketentuan OJK, Perseroan telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas mata acara RUPS yang dituangkan ke dalam Tata Tertib RUPS Bank BRI yang diumumkan kepada pemegang saham melalui website perseroan. - Prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) melibatkan Pihak Independen yaitu Notaris, PT Datindo Entrycom, Kantor Akuntan Publik. - Proses pengumpulan hak suara telah diatur dalam Anggaran Dasar BRI dan Tata Tertib RUPS yang dimuat pada <i>website</i> Perusahaan. <p>Keterangan : Memenuhi</p>
A.1.2.	<p>Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.</p>	<p>Tidak semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPS terakhir.</p> <p>Terdapat 1 (satu) dari 10 (sepuluh) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) dari 12 (dua belas) anggota Direksi yang tidak hadir dalam RUPS Tahunan.</p> <p>Keterangan : Belum Memenuhi</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A.1.3.	<p>Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.</p>	<p>Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPST dan RUPS LB dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.</p> <p>Risalah rapat dipublikasikan dalam website perseroan 1 (satu) hari kerja yaitu tanggal 26 Maret 2021. Adapun RUPST diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2021. Risalah RUPST Bank tersedia selama lebih dari 1 (satu) tahun pada <i>website</i> BRI. (www.bri.co.id)</p> <p>Selama tahun 2021 terdapat tiga kali RUPSLB.</p> <p>Informasi terkait RUPS Tahunan dan Luar Biasa pada tahun 2021 telah disajikan pada Sub Bab Rapat Umum Pemegang Saham pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
A.2.	Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	
A.2.1.	<p>Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka.</p> <p>Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Kebijakan ini mencakup aktivitas hubungan investor diantaranya <i>analyst meeting</i>, <i>public expose</i> bertujuan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan. Bank BRI memiliki satu unit kerja khusus yaitu Divisi Investor Relation yang berfungsi untuk mengelola hubungan dengan investor. Akses Keterbukaan Informasi Laporan Tahunan</p> <p>ini dan juga diungkapkan melalui <i>Website</i></p> <p>Perseroan (www.bri.co.id dan www.ir-bri.com).</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
A.2.2.	<p>Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.</p>	<p>Pengungkapan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor telah di <i>upload</i> dalam situs web Perseroan yaitu www.bri.co.id dan www.ir-bri.com.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.	Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	
B.1.	Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
B.1.1.	<p>Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.</p>	<p>Jumlah anggota Dewan Komisaris BRI posisi 31 Desember 2021 adalah 10 (Sepuluh) orang yang terdiri 6 (enam) Komisaris Independen dan 4 (empat) Komisaris non Independen.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
B.1.2.	<p>Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.</p>	<p>Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Komposisi dan Pembidangan Tugas Dewan Komisaris BRI.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
B.2.	Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
B.2.1.	<p>Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegiat. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegiat, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>BRI melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan. Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam <i>Board Charter</i> sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja dewan komisaris Laporan Tahunan ini serta <i>website</i> Perseroan (www.bri.co.id)</p> <p>Keterangan:Memenuhi</p>
B.2.2.	<p>Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.</p>	<p>Dewan Komisaris telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam <i>Board Manual</i> sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta <i>website</i> Perseroan (www.bri.co.id)</p> <p>Keterangan:Memenuhi</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
B.2.3.	<p>Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Dewan Komisaris yang terdapat pada Anggaran Dasar Perusahaan dan kebijakan pengunduran diri Dewan Komisaris diungkapkan pada laporan tahunan BRI 2021 pada Bab Dewan Komisaris.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
B.2.4.	<p>Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.</p> <p>Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.</p>	<p>Kebijakan suksesi Direksi mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan Suksesi Direksi disampaikan pada Bab Komite Nominasi dan Remunerasi pada laporan tahunan BRI 2021.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
C.	Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi	
C.1.	Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
C.1.1.	<p>Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.</p>	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi telah melalui pertimbangan matang dan telah mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Direksi BRI tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) Direksi.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.1.2.	<p>Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegal.</p>	<p>Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk meyakini bahwa kompetensi, pengalaman serta latar belakang pendidikan anggota Direksi telah sesuai dengan kelayakan berdasarkan ketentuan yang berlaku maupun kebutuhan Perseroan dan diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi Laporan Tahunan ini.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
C.1.3.	<p>Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.</p> <p>Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait.</p>	<p>Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Direktur yang membidangi/ membawahi bidang akuntansi atau keuangan dijabat oleh Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi, antara lain:</p> <p>Pendidikan:</p> <p>Meraih gelar MBA, Finance & Strategy dari Simon School of Business-University of Rochester, Amerika Serikat (2010)</p> <p>Sarjana Peternakan, dari Institut Pertanian Bogor (2001).</p> <p>Pengalaman:</p> <p>Executive Vice President Subsidiary Management Division Vice President Management Desk Assistant Vice President Aquity Management</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
C.2.1.	<p>Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.</p> <p>Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>BRI melaksanakan penilaian kinerja Direksi berlandaskan hukum dan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta meningkatkan kinerja BRI secara berkesinambungan.</p> <p>Direksi telah memiliki Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self Assessment</i>) yang tercantum dalam Board Charter sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini serta <i>website</i> Perseroan (www.bri.co.id)</p> <p>Keterangan:Memenuhi</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C.2.2.	<p>Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.</p>	<p>Kebijakan <i>Self Assessment</i> atas kinerja Direksi telah diungkapkan pada bagian hasil Penilaian Kinerja Direksi pada laporan Tahunan BRI Tahun 2021.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
C.2.3.	<p>Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi.</p> <p>Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<p>Bank BRI telah memiliki kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi yang menyatakan Pemberhentian anggota Direksi apabila yang bersangkutan Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai yang tertera pada <i>Board Charter</i>. Kebijakan terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar BRI.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
D.	Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan	
D.1.	Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
D.1.1.	<p>Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>.</p> <p>Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.</p>	<p>Kebijakan BRI tentang <i>Insider Trading</i> diatur dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kode Etik BRI (Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI Nomor 06-KOM/BRI/12/ 2013 dan Nomor S.65 DIR/ DKP/12/2013 tanggal 16 Desember 2013). 2. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi BRI No.02 – KOM/ BR/05/2012 dan Nokep: S.104- DIR/DKP/05/2012 tanggal 24 Mei 2012). <p>Keterangan: Memenuhi</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.2.	<p>Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.</p>	<p>Pelaksanaan penerapan Strategi Anti <i>fraud</i> di BRI diatur dalam Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.18-DIR/MOP/03/2020 tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Strategi Anti <i>Fraud</i> yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian <i>Fraud</i>, memiliki 4 (empat) pilar yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, pelaporan, dan sanksi, pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut.</p> <p>Perusahaan juga memiliki kebijakan terkait praktik korupsi yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi BRI No:SE.63-Dir/KEP/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen BRI bersama KPK dalam pencegahan korupsi.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
D.1.3.	<p>Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan.</p> <p>Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.</p> <p>Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor Nomor S.35-Dir/MAT/12/2015 perihal Pendaftaran Rekanan Penyedia Barang dan Jasa PT. Bank rakyat Indonesia (persero) Tbk. BRI memiliki mengembangkan aplikasi manajemen vendor yang terintegrasi dengan aplikasi BRISMILE yang mencakup proses pendaftaran dan seleksi Calon rekanan, <i>monitoring</i>, pemeliharaan rekanan (<i>Vendor Maintenance</i>) sampai dengan evaluasi performance rekanan sehingga BRI mempunyai database dalam mendukung pelaksanaan</p> <p>pengadaan barang dan jasa BRI.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
D.1.4.	<p>Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.</p>	<p>Perseroan telah memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur yang dituangkan pada setiap Perjanjian Kredit antara BRI dengan debitur. Pada perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban kedua belah pihak seperti transparansi laporan keuangan kepada kreditur.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
D.1.5.	<p>Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Penjelasan : Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.</p>	<p>Kebijakan mengenai <i>Whistleblowing System</i> di BRI yang diatur Surat Edaran Direksi Nomor. SE.65-Dir/KEP/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021. Kebijakan <i>Whistleblowing System</i> BRI mengatur tentang jenis pelanggaran yang dilaporkan, sarana pelaporan, perlindungan & kerahasiaan pelapor, serta unit pengelola <i>Whistleblowing System</i>.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
D.1.6.	<p>Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.</p> <p>Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.</p> <p>Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.</p>	<p>Insentif jangka panjang pekerja terdapat dalam Bagian Kesejahteraan Pekerja dalam Laporan Tahunan BRI Tahun 2021.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>
E. Aspek 5 : Keterbukaan Informasi		
E.1.	Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
E.1.1.	<p>Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.</p>	<p>Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>Stakeholders</i> melalui media teknologi informasi, selain <i>website</i> Perseroan. Omni Channel BRI adalah sarana dan akses tempat nasabah BRI bisa mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan BRI secara lengkap dan menyampaikan keluhan melalui channel yang tersedia yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tatap muka melalui <i>Customer Service</i> di seluruh Unit kerja operasional BRI 2. Telepon melalui 14017, 1500017, dan 021-57987400 / Premium call melalui 021-5758899 dan 08001017017, SMS 0812 12 14017. 3. Web chat melalui website www.bri.co.id 4. Email callbri@bri.co.id Telegram 0812 12 14017 5. Internet Banking di https://ib.bri.co.id 6. Twitter di @kontak_bri Facebook di Bank BRI Official <p>Keterangan: Memenuhi</p>
E.1.2.	<p>Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p> <p>Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Pada Laporan Tahunan BRI Tahun 2021 menyampaikan kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut.</p> <p>Keterangan: Memenuhi</p>

» Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 (dua belas) prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya, dapat disampaikan, sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di BRI
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman Tata tertib Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 diantaranya Dewan Komisaris memberikan pendapat dan persetujuan terhadap rencana kerja Perseroan yang terdiri dari Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP), Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Ruang lingkup kewajiban Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman Tata tertib Dewan Komisaris dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nokep:09-KOM/11/2018 tanggal 1 November 2018 diantaranya Dewan Komisaris berperan memastikan terselenggaranya pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Dalam rangka mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris bertanggung jawab diantaranya untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik kepada RUPS 2. Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada RUPS.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya memberikan arahan dan pengawasan kepada Direksi dalam kepemimpinan Perseroan. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap rencana dan kerja perseroan dan pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Prinsip 5 Struktur Governance Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris BRI memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan. Hal ini terlihat dalam keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi dan pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i> . Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa meningkatkan pengetahuan terhadap perkembangan perbankan terkini dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan baik di dalam dan luar negeri.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumberdaya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	BRI memiliki fungsi Manajemen Risiko yang berfungsi diantaranya mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko Perusahaan yang dilaksanakan oleh 5 (lima) Divisi yaitu Market, Portofolio & Enterprise Risk Management Division, Digital Risk Division, Operational Risk Division, Wholesale Credit Risk Division dan Credit Risk Policy Division. Dalam upaya fungsi pengawasan, Direksi mengkomunikasikan pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Manajemen Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan dengan secara berkesinambungan. Pengelolaan risiko dilakukan pada seluruh aktivitas kegiatan bank dengan mengacu kepada ketentuan standar pengelolaan yang ditetapkan oleh pihak regulator.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian profil risiko Bank dilakukan dan disampaikan dalam Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris setiap triwulan.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di BRI
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap risiko Kepatuhan Bank dilakukan oleh Komite Pemantau Manajemen Risiko terkait penerapan prinsip kehati-hatian guna memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan usaha telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. <i>Review</i> dan evaluasi fungsi kepatuhan dilakukan setiap semesteran.
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi BRI berada langsung dibawah Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dalam hal pengawasan dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab SKAI bertanggungjawab melaksanakan kegiatan <i>assurance</i> dan konsultasi yang independen dan obyektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan operasional.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Struktur remunerasi Bank BRI mengacu terhadap Peraturan OJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum. Penerapan Tata Kelola Remunerasi Bank BRI disampaikan dalam Laporan Tahunan BRI 2020 pada Bab Kebijakan Tata Kelola Remunerasi.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Pengungkapan dan transparansi Bank BRI kepada Pemegang saham disampaikan melalui <i>website</i> perusahaan www.bri.co.id terhadap informasi terkini. Keterbukaan informasi Bank BRI juga disampaikan pada Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

» Good Corporate Governance Assessment

BRI melaksanakan evaluasi dan penilaian GCG melalui 2 (dua) pendekatan yaitu penilaian oleh pihak eksternal dan pihak regulator yang mandatori sesuai POJK Tata Kelola bagi Bank Umum. Evaluasi dari pihak internal dilakukan oleh Komite di bawah Dewan Komisaris secara berkala sesuai prinsip pengawasan yang berlaku. Selanjutnya, evaluasi oleh OJK dilaksanakan secara periodik sesuai dengan ketentuan regulator (semesteran) berdasarkan *self assessment* yang dilakukan. Sedangkan penilaian dan evaluasi oleh pihak eksternal dilakukan 1 (satu) tahun sekali untuk menilai penerapan GCG di BRI sesuai dengan standar *best practice* dan ketentuan yang berlaku.

Self Assessment GCG

Berdasarkan POJK No/55/POJK.03/2016 dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank harus melakukan Penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *Governance* yaitu:

1. Governance Structure

Penilaian bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses prinsip tata kelola yang baik menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

2. Governance Process

Penilaian bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*.

3. Governance Outcome

Penilaian bertujuan untuk menilai *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip GCG serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Kriteria Penilaian

Penilaian sendiri (*Self Assessment*) tersebut dilakukan secara berkala terhadap prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari 11 (sebelas) faktor penilaian tata kelola yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi audit intern.
7. Penerapan fungsi audit ekstern.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis Bank.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Self Assessment GCG dikoordinasikan oleh Divisi Kepatuhan dan dievaluasi oleh Komite di bawah Dewan Komisaris secara berkala selanjutnya dilaporkan ke OJK.

Skor Penilaian

Penilaian *Self Assessment* GCG dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Hasil penilaian GCG selama tahun 2021 mencapai nilai komposit 2 (BAIK), dengan rincian sebagai berikut.

Periode	Peringkat	Definisi
2021	Peringkat Komposit 2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen BRI telah melakukan penerapan GCG pada aspek <i>Governance Structure</i> , <i>Governance Process</i> , dan <i>Governance Outcome</i> yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BRI

Analisis

Struktur Tata Kelola	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada aspek <i>governance structure</i> secara umum telah memadai dengan telah dimilikinya struktur tata kelola, kebijakan, sumber daya manusia, dan sistem yang terintegrasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di BRI. Kelemahan yang terjadi pada <i>governance structure</i> telah ditindaklanjuti sehingga tidak mengganggu kinerja Perusahaan.
Proses Tata Kelola	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada aspek <i>governance process</i> secara umum telah berjalan dengan baik, proses bisnis yang dijalankan mengacu pada rencana bisnis yang telah ditetapkan serta setiap organ perusahaan telah menjalankan proses bisnis sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, BRI senantiasa melakukan <i>review</i> dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan. Kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan <i>governance process</i> dapat segera dilakukan tindak lanjut perbaikan.
Hasil	Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> pada aspek <i>governance outcome</i> secara umum telah dilaksanakan dengan baik, proses pengungkapan dan transparansi informasi, data dan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas kelemahan dalam pelaporan yang dilakukan, BRI telah melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi manajemen dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan memberikan kemudahan bagi para <i>stakeholder</i> untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Selama tahun 2021 tidak terdapat rekomendasi dari OJK.

Corporate Governance Perception Index

Hasil penilaian CGPI selama 4 (empat) tahun terakhir telah menjadi acuan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan penerapan GCG secara terukur. Secara konsisten BRI terus melakukan perbaikan dan peningkatan GCG secara komprehensif sehingga pada tahun 2021 BRI memperoleh skor CGPI tertinggi di industri. Hal ini merupakan komitmen manajemen BRI untuk secara terus menerus dan berkesinambungan mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan.

Kriteria Penilaian

Pelaksanaan penilaian CGPI di tahun 2021 mengusung tema “Membangun Ketahanan Perusahaan Dalam Kerangka *Good Corporate Governance*”. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan 3 (tiga) aspek yaitu:

1. *Governance Structure* meliputi struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan.
2. *Governance Process* meliputi sistem dan mekanisme tata kelola perusahaan.
3. *Governance outcome* meliputi *output*, *outcome* dan *impact* dari proses implementasi GCG.

Pihak yang Melakukan Penilaian

CGPI diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan.

Skor Penilaian

2018	2019	2020	2021
89,06	90,75	93,25	95,10

Hasil penilaian terhadap CGPI berdasarkan penilaian tahun 2021 mendapat skor 95.10 poin dengan peringkat **Sangat Terpercaya (Most Trusted)** dengan rincian penilaian sebagai berikut.

Governance Structure	33,72
Governance Process	34,38
Governance Outcome	27,00
Total Score	95,10

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<p>Governance Structure</p> <p>BRI masih perlu meningkatkan kelengkapan dan kecukupan struktur organ perusahaan serta melakukan penguatan/penajaman pada infrastruktur sistem governansi yang mencakup pedoman, kebijakan dan strategi pengurusan perusahaan, sehingga menjadi keunggulan bersaing perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan dan mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan.</p>	<p>BRI terus melakukan penyempurnaan tata kelola melalui pengkinian kebijakan, pedoman dan strategi perusahaan. Di samping itu, BRI terus melakukan inovasi di bidang tata kelola dengan digitalisasi sistem dan penguatan kesadaran pekerja atas Budaya Perusahaan.</p>
<p>Governance Process</p> <p>BRI masih perlu terus melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan industri dan bisnisnya melalui perencanaan strategis, perancangan sistem dan mekanisme pengurusan perusahaan yang efektif dan efisien. Efektivitas pelaksanaan sistem dan mekanisme pengurusan perusahaan dapat ditingkatkan dengan mengembangkan kerangka kerja, prosedur dan tingkat kematangan dari setiap sistem dan mekanisme tersebut. Demikian juga efisiensi mekanisme pengurusan perusahaan dapat diwujudkan dengan ketuntasan proses kerja, dilakukan pemantauan, evaluasi hasil capaian serta tindak lanjut program perbaikannya.</p>	<p>Perencanaan strategis BRI tertuang dalam <i>corporate plan</i> BRI yang merupakan dasar bagi perusahaan dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis.</p> <p>Dalam penyusunan strategi tersebut, BRI telah mempertimbangkan berbagai aspek selain finansial yaitu Keuangan Berkelanjutan.</p>
<p>Governance Outcome</p> <p>BRI masih perlu meningkatkan hasil governansi dengan melakukan penguatan/penajaman pada strategi, perluasan kebijakan dan program-program yang di inisiasi untuk pencapaian kinerja perusahaan yang maksimal dalam rangka membangun keunggulan bersaing perusahaan yang berorientasi pada penciptaan nilai bagi pemangku kepentingan secara berkelanjutan.</p>	<p>BRI mengukuhkan hasil dari tata kelola dalam pencapaian kinerja finansial dan non finansial. Selain itu, BRI juga terus konsisten dalam turut serta membangun perekonomian di Indonesia.</p>

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Salah satu penilaian eksternal yang dilakukan terhadap praktik tata kelola BRI selama beberapa tahun terakhir adalah penilaian berdasarkan kriteria ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) yang mengadopsi prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). ACGS merupakan salah satu inisiatif dari ASEAN Capital Market Forum (ACMF) yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk meningkatkan praktik tata kelola perusahaan tercatat di ASEAN dan mempromosikan perusahaan tercatat di ASEAN menjadi *asset class*. Indonesia menjadi salah satu dari 6 (enam) negara ASEAN yang berpartisipasi dalam inisiatif ini.



Penilaian atas praktik tata kelola perusahaan tercatat dilakukan dengan *me-review* informasi dalam Bahasa Inggris yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan, situs web, pengumuman dan edaran yang dibuat oleh perusahaan tercatat.

Metodologi penilaian terdiri dari 2 (dua) tingkat yaitu:

1. Tingkat 1: item standar minimum yang diharapkan untuk diterapkan di setiap negara anggota ASEAN dan mencakup peraturan perundangan serta prinsip OECD.
2. Tingkat 2: item bonus yang merefleksikan praktik baik melebihi ekspektasi standar minimum, serta item penalti yang merefleksikan tata kelola yang buruk.

Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian ACGS meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut:

1. Hak-hak Pemegang Saham.
2. Perlakuan Setara terhadap Pemegang Saham.
3. Peran Pemangku Kepentingan.
4. Pengungkapan dan Transparansi.
5. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris.

Pihak yang Melakukan Penilaian

Penilaian dilakukan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) melalui Domestic Ranking Body (DRB) sebagai perwakilan di setiap negara peserta untuk melakukan penilaian di skala nasional dan ditunjuk oleh regulator masing-masing negara. Sejak tahun 2016, OJK menunjuk RSM sebagai DRB untuk Indonesia. Untuk menjaga independensi penilaian, dilakukan pula verifikasi penilaian oleh DRB negara lain, anggota ASEAN.

Skor Penilaian

Dari hasil penilaian tingkat praktik GCG sesuai kriteria ACGS di tahun 2019, BRI memperoleh penghargaan dengan **Top 3 PLCs Indonesia** dalam pemeringkatan Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) dengan skor 110.22.

Rekomendasi dan Tindakanlanjutnya

Berdasarkan hasil penilaian ACGS Bank BRI Tahun 2019, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan terkait pelaksanaan dan pengungkapan tata kelola di BRI antara lain sebagai berikut:

Kriteria Penilaian ACGS	Tindak Lanjut
Perusahaan memiliki kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan Dewan Komisaris maupun Direksi.	BRI selalu memastikan pelaksanaan program-program Pendidikan Dewan Komisaris maupun Direksi berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan kebijakan internal yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nokep: S.43-DIR/SKP/01/2018 tanggal 17 Januari 2018.
Perusahaan menerbitkan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan minimal 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan.	BRI terus konsisten dalam menerapkan transparansi khususnya perbitan pengumuman RUPS Tahunan 28 (dua puluh delapan) hari sebelum pelaksanaan.
Materi Rapat Dewan Komisaris maupun Direksi tersedia setidaknya 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat.	BRI selalu memastikan persiapan pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan dengan tertib termasuk penyediaan materi rapat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan.



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan





Cegah Covid19
Cuci Tangan Pakai Sabun



BRI berkomitmen mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *corporate governance* yang baik di setiap operasional Perseroan. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya Tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mendukung SDGs dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai Bank terbesar di Indonesia, BRI menyatakan dukungannya melalui penerapan keuangan berkelanjutan dengan mengacu pada implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017.

Tanggung jawab sosial perusahaan dilaksanakan selaras dengan komitmen Perseroan dalam mendukung SDGs dan penerapan keuangan berkelanjutan. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 /SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik informasi tanggung jawab sosial perusahaan khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip *environment, social and governance* (ESG) disajikan pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

» Kriteria OJK dan ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices	
Umum				
Laporan tahunan disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.				
Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.				
Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas.	Nama perusahaan dan tahun <i>annual report</i> ditampilkan di:			
	1. Sampul muka;			
	2. Samping;			
	3. Sampul belakang; dan			
	4. Setiap halaman.			
Laporan tahunan ditampilkan di <i>website</i> perusahaan.				
Kilas Kinerja				
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:			
	1. Pendapatan/penjualan;	31	SEOJK 9 SEOJK 16	
	2. Laba bruto;	32		
	3. Laba (rugi);	32		
	4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	32	SEOJK 16 ARA	
	5. Total laba (rugi) komprehensif;	32	SEOJK 16	
	6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali;	32		
	7. Laba (rugi) per saham;	33	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA	
	8. Jumlah aset;	30		
	9. Jumlah liabilitas;	30		
	10. Jumlah ekuitas;	31		
	11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	35		
	12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	35	SEOJK 16	
	13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	35		
	14. Rasio lancar;	35		
	15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	35		
	16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset;	35		
	17. Rasio KPMM;	35		SEOJK 9
	18. Rasio <i>Return on Asset</i> (ROA);	35		
	19. Rasio <i>Return on Equity</i> (ROE);	35		
20. Aset produktif	35			

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices	
	21. Rasio <i>Non-performing Loans</i> (NPL);	34	SEOJK 9	
	22. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);	35		
	23. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR);	35		
	24. Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM);	35		
	25. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);	35		
	26. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM);	35		
	27. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan	35		
	28. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	35	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA	
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16 ARA	
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	37		
	a. Jumlah saham yang beredar;			
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;			
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan			
	d. <i>Volume</i> perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.			
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;			
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	40		SEOJK 16 ARA
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;			
	b. Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;			
c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;				
d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan				
e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;				
3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut; dan	41	SEOJK 16		
4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	41	SEOJK 16		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.	Informasi memuat:	40-41	ARA
	1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (<i>outstanding</i>);		
	2. Tingkat bunga/imbalan;		
	3. Tanggal jatuh tempo; dan		
	4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2020 dan 2021.		
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.			

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	57	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;		SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;		
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	57	
	f. Struktur organisasi;		SEOJK 9
	g. Aktivitas utama;	55	
	h. Teknologi informasi;	56	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;	55	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana;		
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar;		
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;	55	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor;		
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank;		
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;		
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan		
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	56	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.		
	4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.		SEOJK 9 ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		SEOJK 16
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	71-74	
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	75	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	75-80	
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	82-83	
Tanda tangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut:	86-87	ARA
	1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;		
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;		
	3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan		
	4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.		
Profil Perusahaan			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	90-91	SEOJK 16 ARA
	1. Alamat;		
	2. Nomor telepon;		
	3. Alamat surat elektronik; dan		
	4. Alamat situs web;		
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	Mencakup antara lain: tanggal/ tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	92-95	SEOJK 16 ARA
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		
Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain:		SEOJK 16 ARA
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;	102	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan	102	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	103-109	
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:	96-101	SEOJK 16 ARA
	1. Visi perusahaan;		
	2. Misi perusahaan;		
	3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan		
	4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	110-113	SEOJK 16 ARA
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	114-115	SEOJK 16 ARA
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	113	SEOJK 16
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	116-133	SEOJK 16 ARA
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;		
	2. Foto terbaru;		
	3. Usia;		
	4. Kewarganegaraan;		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan		
c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	SEOJK 16		
7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan			
8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;			
Profil Dewan Komisaris	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	134-145	SEOJK 16 ARA
	1. Nama dan jabatan;		
	2. Foto terbaru;		
	3. Usia;		
	4. Kewarganegaraan;		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	<p>b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;</p> <p>c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;</p> <p>d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;</p>	134-145	SEOJK 16 ARA
	<p>7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;</p> <p>8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan</p> <p>9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;</p>		SEOJK 16
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	<p>Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku;</p> <p>Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	150-162	SEOJK 16 ARA
Komposisi pemegang saham	<p>Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:</p> <p>1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;</p> <p>3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;</p> <p>Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.</p> <p>Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>4. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:</p> <p>a. Kepemilikan institusi lokal;</p> <p>b. Kepemilikan institusi asing;</p> <p>c. Kepemilikan individu lokal; dan</p> <p>d. Kepemilikan individu asing;</p> <p>Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.</p>	<p>162</p> <p>165</p> <p>166-167</p> <p>165</p> <p>167</p>	SEOJK 16 ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	168	SEOJK 16
Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	169-175	SEOJK 16 ARA
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank		177	SEOJK 9
Struktur grup perusahaan	Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i> , dan <i>special purpose vehicle (SPV)</i> .	176	SEOJK 16 ARA
Kronologi pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	177-181	SEOJK 16 ARA
Kronologis penerbitan efek (termasuk <i>private placement</i>) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku.	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbil hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	180-184	SEOJK 16 ARA
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 1. Nama dan alamat; 2. Periode penugasan; 3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; 4. Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan 5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut. Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel.	185	SEOJK 16
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	186	SEOJK 16 ARA
Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi; 2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	187-195	ARA
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain: 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.	196-197	SEOJK 16 ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Informasi pada <i>Website</i> Perusahaan	Meliputi paling kurang:	198-199	ARA
	1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;		
	2. Isi Kode Etik;		
	3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;		
	4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);		
	5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan		
	6. Piagam/ <i>Charter</i> Dewan Komisaris, Direksi, Komite Komite, dan Unit Audit Internal.		
Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan			
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	220-267	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	220-267	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;	220-267	
	c. Penjualan/pendapatan usaha; dan	264-267	
	d. Profitabilitas	264-267	
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	270-277	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;	270-280	
	3. Ekuitas;	280-281	
	4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan;	283-289	
	5. Arus kas;	289-291	
	6. Suku bunga dasar kredit;	297	
	7. Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.	298-300, 293-294	
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	Penjelasan tentang:		SEOJK 16 ARA
	1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dan	292	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	294	
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>)	Penjelasan atas:		SEOJK 16 ARA
	1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan	301	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan	300-301	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen	300-301	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang:		SEOJK 16 ARA
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan;	375-376	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut;	375-376	
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;	375-376	
	4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan	375-376	
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	375-376	
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	Penjelasan tentang:		SEOJK 16 ARA
	1. Jenis investasi barang modal;	376	
	2. Tujuan investasi barang modal; dan	376	
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	376	
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan;	381-382	SEOJK 16 ARA
	2. Laba (rugi);	381-382	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>);	382	SEOJK 16
	4. Pemasaran;	383	ARA
	5. Pengembangan SDM;	383	ARA
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	381-383	SEOJK 16 ARA
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang,		
	mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan;	384	SEOJK 16 ARA
	2. Laba (rugi);	384	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>);	385	SEOJK 16
	4. Kebijakan dividen;	385	
	5. Pemasaran;	386	ARA
6. Pengembangan SDM;	386	ARA	
7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	384	SEOJK 16 ARA	
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.	380	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
	Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan agar diungkapkan.		
Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	380-381	SEOJK 16 ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Uraian tentang aspek pemasaran	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	215-219	SEOJK 9 SEOJK 16 ARA
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16 ARA
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	386	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	387	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas);	387	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	387	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16 ARA
	1. Total perolehan dana;	387-389	
	2. Rencana penggunaan dana;	387-389	
	3. Rincian penggunaan dana;	387-389	
	4. Saldo dana; dan	387-389	
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	387-389	
Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.			
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16 ARA
	1. Tanggal, nilai, dan objek transaksi;	389-393	
	2. Nama pihak yang melakukan transaksi;	389-393	
	3. Sifat hubungan afiliasi (jika ada);	389-393	
	4. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	389-393	
	5. Pemenuhan ketentuan terkait;	389-393	
	6. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) sampai dengan angka 5), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:	389-393	
	a. Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>); dan	389-393	
b. Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>);	389-393		
7. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	389-393		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	8. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;		SEOJK 16 ARA
	9. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16 ARA
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	397-402	
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	397-402	
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	397-402	
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	Uraian memuat antara lain:		SEOJK 16 ARA
	1. Perubahan kebijakan akuntansi;	403	
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan	403	
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	403	
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.	403	
Informasi kelangsungan usaha	Pengungkapan informasi mengenai:		ARA
	1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;	404-405	
	2. <i>Assessment</i> manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan	404-405	
	3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan <i>assessment</i> .	404-405	
	Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.		
Tata Kelola Perusahaan			
RUPS	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	468-487	SEOJK 16
	a. keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan		
	b. keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;		
	dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Direksi	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	513-534	SEOJK 16 ARA
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;		
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:		SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);		
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:		SEOJK 16 ARA
	a. prosedur penilaian kinerja; dan		
	b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	Dewan Komisaris		1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;			
3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.			
4. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:		SEOJK 16	
a. kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan			
b. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);			
5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		SEOJK 16	
a. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;			
b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan c. pihak yang melakukan penilaian; dan			

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:		SEOJK 16 ARA
	a. prosedur penilaian kinerja; dan	512-513	
	b. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	512-513	
Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	Meliputi antara lain:		ARA
	1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan	492-494	
	2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	492-494	
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	658-664	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:		SEOJK 16 ARA
	a. prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;	658-664	
	b. struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan	658-664	
	c. besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	658-664	
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	658-664		
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum		664-667	POJK 45
Komite audit	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;		SEOJK 16 ARA
	2. Usia;		
	3. Kewarganegaraan;		
	4. Riwayat pendidikan;		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik;		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit;		
	7. Pernyataan independensi komite audit;		
8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);			
9. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan			
10. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit;			
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik	Paling sedikit memuat:		SEOJK 16 ARA
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;		
	2. Usia;		
	3. Kewarganegaraan;		
	4. Riwayat pendidikan;		

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; 6. Periode dan masa jabatan anggota komite;		
	7. Pernyataan independensi komite;		SEOJK 16 ARA
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);		
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab;		
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter);		
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;		
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan		
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite; dan		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;		
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris	Paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; 2. Usia; 3. Kewarganegaraan; 4. Riwayat pendidikan; 5. Riwayat jabatan, meliputi informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; 6. Periode dan masa jabatan anggota komite; 7. Pernyataan independensi komite; 8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan 9. Uraian tugas dan tanggung jawab; 10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; 11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan 12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; 		SEOJK 16 ARA
Sekretaris perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Domisili; 		SEOJK 16 ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	3. Riwayat jabatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; c. Riwayat pendidikan; d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan e. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; 		SEOJK 16 ARA
Unit Audit Internal	1. Nama kepala unit audit internal;		SEOJK 16 ARA
	2. Riwayat jabatan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; 		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);		
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;		
	5. Struktur dan kedudukan unit audit internal;		
	6. Uraian tugas dan tanggung jawab;		
	7. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan		
	8. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit;		
Akuntan Publik	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	668	ARA
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	668	
	3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	668	
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	668	
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal Control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik,	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	691-695	SEOJK 16 ARA
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; an	691-695	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	691-695	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	668-690	SEOJK 16 ARA
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya;	668-690	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	668-690	
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	668-690	SEOJK 16

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada),	1. Pokok perkara/gugatan;	703-704	SEOJK 16 ARA
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan	703-704	
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik;	703-704	
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota dewan komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada)		705	SEOJK 16 ARA
Akses informasi dan data perusahaan: Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.		705-710	ARA
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik	1. Pokok-pokok kode etik;	714-716	SEOJK 16 ARA
	2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	714-716	
	3. Penyebarluasan kode etik;	714-716	
	4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	714-716	
	5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	714-716	
	Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/msop) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (employee Stock ownership program/esop); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock Ownership program/MSOP</i>) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock Ownership program/ESOP</i>),	Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:	667	SEOJK 16
	1. Jumlah saham dan/atau opsi;	667	
	2. Jangka waktu pelaksanaan;	667	
	3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	667	
	4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.	667	
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi	1. Kepemilikan saham anggota direksi dan anggota Dewan komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka; dan	463-466	SEOJK 16
	2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;		
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran;	716-719	SEOJK 16 ARA
	2. Perlindungan bagi pelapor;	716-719	
	3. Penanganan pengaduan;	716-719	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan	716-719	
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	716-719	
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku; dan	716-719	
	b. Tindak lanjut pengaduan;	716-719	
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	716-719	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>Fraud</i> , suap dan/ atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	710-714	SEOJK 16 ARA
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	710-714	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.	710-714	
Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin. Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.		719-721	ARA
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	731-738	SEOJK 16
	2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternative pelaksanaannya (jika ada).	731-738	
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	731-738	
Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2020 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	Memuat uraian mengenai:		ARA
	1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian	740-743	
	2. Pihak yang melakukan penilaian	740-743	
	3. Skor penilaian masing-masing kriteria	740-743	
	4. Rekomendasi hasil penilaian	740-743	
	5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.	740-743	
Informasi Keuangan			
Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang TanggungJawab atas Laporan Keuangan	Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi	ARA
Opini auditor independen atas laporan keuangan		LK Halaman Opini	ARA
Deskripsi Auditor Independen di Opini	Deskripsi memuat tentang:	LK Halaman Opini	ARA
	1. Nama dan tanda tangan;		
	2. Tanggal Laporan Audit; dan		
	3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.		
Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:		ARA
	1. Laporan posisi keuangan;	LK Halaman 1-4	
	2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	LK Halaman 5-7	
	3. Laporan perubahan ekuitas;	LK Halaman 8-9	
	4. Laporan arus kas;	LK Halaman 10-11	
	5. Catatan atas laporan keuangan;	LK Halaman 12-310	
	6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	LK Halaman 1-310	
	7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membupenyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	-	

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	LK Halaman 5-7	ARA
Laporan Arus Kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. 	LK Halaman 10-11	ARA
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. 	LK Halaman 35 LK Halaman 36 LK Halaman 65-66 LK Halaman 63 LK Halaman 35-69	ARA
Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait. 	LK Halaman 292-294 LK Halaman 295-300	ARA
Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; 2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan; 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. 	LK Halaman 229-233 LK Halaman 230-232 LK Halaman 233 LK Halaman 230-232	ARA
Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penyusutan yang digunakan; 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi an model biaya; 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. 	LK Halaman 54-56 LK Halaman 147-151	ARA
Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	Hal-hal yang harus diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 	LK Halaman 66	ARA

Kriteria	Penjelasan	Halaman	Regulasi/ Best Practices
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. 	LK Halaman 271-274	ARA
Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; 4. Kebijakan manajemen risiko; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. 	<p>LK Halaman 37-44</p> <p>LK Halaman 43</p> <p>LK Halaman 234-266</p> <p>LK Halaman 234</p> <p>LK Halaman 235-266</p>	ARA
Penerbitan laporan keuangan	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. 	LK Halaman Surat Pernyataan Direksi	ARA

Keterangan

SEOJK 16 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

SEOJK 9 : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

POJK 45 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

ARA : Kriteria Annual Report Award.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya

Laporan keuangan konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210
 Telepon: 021 2510244, 2510254, 2510264, 2510269, 2510279
 Faksimili: 021 2500077 Kawat: KANPUSBRI
 Telex: 65293, 65456, 65459, 65461

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG
 TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sunarso
 Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
 Alamat Domisili : Jl. At Taqwa II No. 4 Jati Pulo, Palmerah, Jakarta barat
 Nomor Telepon : 021 - 575 1761
 Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Viviana Dyah Ayu R.K.
 Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
 Alamat Domisili : Jl. Bumi Serpong Damai Blok L. 10/3 Serpong, Tangerang Selatan
 Nomor Telepon : 021 - 575 1751
 Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
 b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 3 Februari 2022

Atas nama dan mewakili Direksi

Sunarso
 Direktur Utama

Viviana Dyah Ayu R.K.
 Direktur Keuangan

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 4
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	5 - 7
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	8 - 9
Laporan Arus Kas Konsolidasian	10 - 11
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	12 - 310
Laporan Posisi Keuangan - Entitas Induk	Lampiran 1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Entitas Induk.....	Lampiran 2
Laporan Perubahan Ekuitas - Entitas Induk.....	Lampiran 3
Laporan Arus Kas - Entitas Induk.....	Lampiran 4
Catatan atas Informasi Keuangan Entitas Induk	Lampiran 5

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00049/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00049/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2022 (lanjutan)

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal-hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan BRI (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681

3 Februari 2022



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020^{*)}</u>
ASET			
Kas	2a,2c,3	26.299.973	32.274.988
Giro pada Bank Indonesia	2a,2c,2f,4	56.426.573	51.530.969
Giro pada Bank lain	2a,2c,2d, 2e,2f,5,44	14.065.097	12.266.266
Cadangan kerugian penurunan nilai		(29.078)	(93.843)
		<u>14.036.019</u>	<u>12.172.423</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	2a,2c,2d, 2e,2g,6,44	58.982.842	67.851.406
Cadangan kerugian penurunan nilai		(6.177)	(18.070)
		<u>58.976.665</u>	<u>67.833.336</u>
Efek-efek	2a,2c,2d, 2e,2h,7,44	372.048.648	327.305.619
Cadangan kerugian penurunan nilai		(311.120)	(348.941)
		<u>371.737.528</u>	<u>326.956.678</u>
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	2c,2d,2e, 2i,8,44	29.664.225	27.573.004
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.142.349)	(1.326.190)
		<u>28.521.876</u>	<u>26.246.814</u>
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	2c,2u, 9	54.915.498	46.818.568
Tagihan Derivatif	2c,2aj,10	730.083	1.576.659
Kredit yang Diberikan	2c,2d,2e, 2j,11,44	994.416.523	943.787.634
Cadangan kerugian penurunan nilai		(84.833.734)	(66.810.179)
		<u>909.582.789</u>	<u>876.977.455</u>

^{*)} Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (lihat catatan 1f, 2b dan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020^{*)}</u>
ASET (lanjutan)			
Piutang dan Pembiayaan Syariah	2c,2d,2e, 2k,12,44	9.159.501	49.065.478
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.410.907)	(2.582.167)
		<u>7.748.594</u>	<u>46.483.311</u>
Piutang Pembiayaan	2c,2d,2e,2l, 13,44	39.291.429	27.339.856
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.584.776)	(1.002.307)
		<u>37.706.653</u>	<u>26.337.549</u>
Tagihan Akseptasi	2c,2d,2e, 2m,14,44	9.554.238	6.817.436
Cadangan kerugian penurunan nilai		(488.233)	(546.260)
		<u>9.066.005</u>	<u>6.271.176</u>
Penyertaan Saham	2c,2d,2e, 2n,15,44	6.086.062	1.519.699
Cadangan kerugian penurunan nilai		(14.335)	(19.370)
		<u>6.071.727</u>	<u>1.500.329</u>
Aset Tetap	2d,2o,2p, 16		
Biaya perolehan		65.038.484	60.884.854
Akumulasi penyusutan		(17.068.297)	(17.178.222)
Nilai buku - neto		<u>47.970.187</u>	<u>43.706.632</u>
Aset Pajak Tangguhan - neto	2ak,38c	16.284.898	9.885.990
Aset Lain-lain - neto	2c,2e,2p, 2q,17	32.022.666	33.492.467
TOTAL ASET		<u>1.678.097.734</u>	<u>1.610.065.344</u>

*) Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (lihat catatan 1f, 2b dan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020^{*)}</u>
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Segera	2c,2s,18	18.735.387	15.473.574
Simpanan Nasabah	2c,2d,2t,44		
Giro	19	220.590.197	184.848.351
Giro <i>Wadiah</i>		-	6.258.078
Tabungan	20	497.676.739	460.671.367
Tabungan <i>Wadiah</i>		-	9.247.604
Deposito Berjangka	21	420.476.279	426.399.550
Total Simpanan Nasabah		<u>1.138.743.215</u>	<u>1.087.424.950</u>
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan lainnya	2c,2d,2t,22,44	13.329.434	23.785.997
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	2c,2d,2u,7,23,44	29.408.508	40.478.672
Liabilitas Derivatif	2c,2aj,10	199.695	407.774
Liabilitas Akseptasi	2c,2d,2m,14,44	9.554.238	6.817.436
Utang Pajak	2ak,38a	4.214.318	1.949.356
Surat Berharga yang Diterbitkan	2c,2v,24	55.306.697	57.757.028
Pinjaman yang Diterima	2c,2d,2w,25,44	68.458.547	72.164.236
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	2d,2e,2an,26,44	7.000.268	3.681.709
Liabilitas Imbalan Kerja	2d,2ae,27,42,44	18.105.921	13.435.842
Liabilitas Lain-lain	2c,2y,2z,28,45b	22.753.327	22.259.520
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	2c,2x,29	501.375	1.465.392
TOTAL LIABILITAS		<u>1.386.310.930</u>	<u>1.347.101.486</u>
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Giro <i>Mudharabah</i>		-	1.623.563
Tabungan <i>Mudharabah</i>		-	6.147.015
Deposito Berjangka <i>Mudharabah</i>	2d, 2t	-	25.726.398
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER		<u>-</u>	<u>33.496.976</u>

*) Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (lihat catatan 1f, 2b dan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020^{*)}</u>
LIABILITAS, DANA SYIRKAH			
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)			
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham Modal dasar - 300.000.000.000 Lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 151.559.001.604 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 151.559.001.603 lembar saham Seri B) pada 31 Desember 2021 dan 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B) pada 31 Desember 2020	1,31a	7.577.950	6.167.291
Tambahan modal disetor	31b	76.242.898	3.411.813
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	2o,16	17.006.230	17.099.207
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2ah,31c	(115.975)	(54.749)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	2h	1.949.387	4.623.064
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	547.026	975.877
(Kerugian)/Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	2ae	(1.423.685)	(1.469.726)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	1d	(45.997)	(1.649.076)
Opsi saham	2af, 30	19.255	72.894
Cadangan kompensasi atas saham bonus	31f	210.266	1.228.805
Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali	31g	1.758.580	-
Modal pro forma atas transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali		-	29.538.484
Saldo laba	31d,31e		
Telah ditentukan penggunaannya		3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya		181.986.363	163.949.482
Total Saldo Laba		185.009.048	166.972.167
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk		288.734.983	226.916.051
Kepentingan non-pengendali		3.051.821	2.550.831
TOTAL EKUITAS		291.786.804	229.466.882
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		1.678.097.734	1.610.065.344

*) Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (lihat catatan 1f, 2b dan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021	2020 ^{*)}
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga dan Syariah	32		
Pendapatan bunga	2z	141.164.784	128.910.617
Pendapatan syariah	2k,2ab	2.358.545	6.853.944
Total Pendapatan Bunga dan Syariah		143.523.329	135.764.561
Beban Bunga dan Syariah	33		
Beban bunga	2z	(28.135.797)	(39.883.405)
Beban syariah	2ab	(1.293.103)	(2.297.043)
Total Beban Bunga dan Syariah		(29.428.900)	(42.180.448)
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto		114.094.429	93.584.113
Pendapatan premi	2ac	6.989.783	6.205.775
Beban klaim	2ac	(5.946.708)	(5.327.065)
Pendapatan premi - neto		1.043.075	878.710
Pendapatan Operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	2aa	17.062.124	16.180.935
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		9.005.760	7.252.171
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2h,7	3.452.785	2.871.331
Keuntungan transaksi mata uang asing neto	2ah,2ai	1.713.531	1.257.838
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek	2h,7	120.067	342.351
Lain-lain		9.861.540	10.195.129
Total Pendapatan Operasional Lainnya		41.215.807	38.099.755
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	2e,34	(35.806.312)	(33.024.492)
Pembalikan (beban) penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi - neto	2an,26d	(3.321.266)	(2.157.162)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	2p	(163.243)	(98.374)
Beban Operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	2d,2ae,35,42,44	(38.047.126)	(33.105.269)
Umum dan administrasi	2o,36,16	(23.269.044)	(21.004.682)
Lain-lain		(14.601.938)	(13.393.898)
Total Beban Operasional lainnya		(75.918.108)	(67.503.849)
LABA OPERASIONAL		41.144.382	29.778.701
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO	37	(152.317)	214.705
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		40.992.065	29.993.406
BEBAN PAJAK	2ak,38b	(7.835.608)	(8.951.971)
LABA SEBELUM LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI		33.156.457	21.041.435

^{*)} Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (lihat catatan 1f, 2b dan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021	2020 ^{*)}
LABA BERSIH PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI		(2.400.691)	(2.381.042)
LABA BERSIH		30.755.766	18.660.393
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		487.841	(2.473.364)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		(67.751)	464.563
Surplus revaluasi aset tetap	16	(92.127)	81.910
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2aj	(61.226)	(39.780)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	(3.143.546)	4.633.558
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2h	(425.090)	868.462
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		478.796	(698.690)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak		(2.823.103)	2.836.659
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM PENGHASILAN KOMPREHENSIF PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI		30.333.354	23.878.094
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PRO FORMA DARI TRANSAKSI AKUISISI DENGAN ENTITAS SEPENGENDALI		(2.776.220)	(2.120.315)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		27.557.134	21.757.779

^{*)} Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (lihat catatan 1f, 2b dan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021	2020 ^{*)}
LABA TAHUN BERJALAN			
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		31.066.592	18.654.753
Kepentingan non-pengendali		(310.826)	5.640
TOTAL		30.755.766	18.660.393
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF			
TAHUN BERJALAN YANG DAPAT			
DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		27.855.902	21.727.515
Kepentingan non-pengendali		(298.768)	30.264
TOTAL		27.557.134	21.757.779
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM			
DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN			
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
(dalam Rupiah penuh)	2ah,49		
Dasar		238	152
Dilusian		238	151

*) Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (lihat catatan 1f, 2b dan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahkan modal disetor	Modal Pro forma atas Transaksi Akuisisi dengan Entitas Sepengendali	Cadangan penurunan nilai atas efek-efek nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur melalui nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham Treasuri	Cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus Revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Opsi saham	Saldo Laba		Total Ekuitas pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
												Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 (dilaporkan Sebelumnya)	6.167.291	2.900.994	-	-	(14.970)	715.770	189.519	(2.106.014)	21.796	17.099.207	22.409	3.022.685	178.304.746	206.323.433	2.460.903	208.784.336
Transaksi akuisisi sepengendali	-	-	24.919.043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.919.043	17.631	24.936.674
Dampak penyesuaian atas penerapan PSAK No. 71	-	-	-	111.385	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.386.452)	(12.275.067)	(52.327)	(12.327.394)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 (setelah penyajian kembali)	6.167.291	2.900.994	24.919.043	111.385	(14.970)	715.770	189.519	(2.106.014)	21.796	17.099.207	22.409	3.022.685	165.918.294	218.967.409	2.426.207	223.423.993
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.654.753	18.654.753	5.640	18.660.393
Penghasilan komprehensif lainnya	2h,2ae, 2ah	-	-	864.492	(39.779)	3.907.294	(1.659.245)	-	-	-	-	-	-	3.072.762	24.624	3.097.386
Laba bersih pro forma atas transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali	-	-	2.380.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.380.168	874	2.381.042
Penghasilan komprehensif lainnya pro forma atas transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali	-	-	(260.727)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(260.727)	-	(260.727)
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	2.119.441	864.492	(39.779)	3.907.294	(1.659.245)	-	-	-	-	-	18.654.753	23.846.956	31.138	23.878.094
Transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali	-	-	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	(1.483)	2.498.517
Pembagian laba Dividen	31d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.623.565)	(20.623.565)	(3.614)	(20.627.179)
Saham bonus	31f	-	510.819	-	-	-	-	504.285	1.207.009	-	-	-	-	2.222.113	-	2.222.113
Opsi saham	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.485	-	-	50.485	94.548	145.033
Saham treasuri	1d	-	-	-	-	-	-	(47.347)	-	-	-	-	-	(47.347)	-	(47.347)
Perubahan kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.035	20.183
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	6.167.291	3.411.813	29.538.484	975.877	(54.749)	4.623.064	(1.469.726)	(1.649.076)	1.228.805	17.099.207	72.894	3.022.685	163.949.482	226.916.051	2.550.831	229.466.882

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahkan modal disetor	Modal Pro forma atas Transaksi Akuisisi dengan Entitas Sepengendali	Cadangan penurunan nilai atas efek-efek nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur melalui nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham Treasuri	Opsi saham dan Cadangan kompensasi atas saham bonus	Surplus Revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali	Saldo Laba		Total Ekuitas pemilik entitas induk	Kepentingan non pengendali	Total ekuitas
												Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	6.167.291	3.411.813	29.538.484	975.877	(54.749)	4.623.064	(1.469.726)	(1.649.076)	1.301.699	17.099.207	-	3.022.685	163.949.482	226.916.051	2.550.831	229.466.882
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.066.592	31.066.592	(310.826)	30.755.766
Penghasilan komprehensif Laba tahun berjalan	2h,2ae, 2ah	-	-	(428.851)	(61.226)	(2.673.677)	46.041	-	-	(92.977)	-	-	-	(3.210.690)	12.058	(3.198.632)
Laba bersih pro forma atas transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali	-	-	2.397.718	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.397.718	2.973	2.400.691
Penghasilan komprehensif lainnya pro forma atas transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali	-	-	375.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.503	26	375.529
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	2.773.221	(428.851)	(61.226)	(2.673.677)	46.041	-	-	(92.977)	-	-	31.066.592	30.629.123	(295.769)	30.333.354
Transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali	-	(23.370.339)	(32.311.705)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(55.682.044)	5.977	(55.676.067)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi atas entitas anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.758.850	-	-	1.758.580	-	1.758.580
Pembagian laba deviden	31d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.125.589)	(12.125.589)	-	(12.125.589)
Saham bonus	31f	-	1.154.211	-	-	-	-	1.278.122	(1.018.539)	-	-	-	-	1.413.794	-	1.413.794
Opsi saham	30	-	62.862	-	-	-	-	324.957	(51.457)	-	-	-	-	336.362	(1.710)	334.652
Perubahan kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.012.244	2.012.244
Kehilangan pengendalian atas entitas anak	-	565.209	-	-	-	-	-	-	(2.182)	-	-	-	(904.122)	(341.095)	(1.452.824)	(1.793.919)
Penerbitan saham	-	1.410.659	94.419.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.829.801	233.072	96.062.873
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	7.577.950	76.242.898	-	547.026	(115.975)	1.949.387	(1.423.685)	(45.997)	229.521	17.006.230	1.758.580	3.022.685	181.986.363	288.734.983	3.051.821	291.786.804

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021	2020 ^{*)}
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI			
Pendapatan yang diterima			
Penerimaan bunga dan investasi		140.183.030	125.439.096
Pendapatan syariah		2.358.545	6.853.944
Pendapatan premi		6.989.783	6.205.775
Beban yang dibayar			
Beban bunga		(28.533.680)	(39.883.405)
Beban syariah		(1.293.103)	(2.297.043)
Beban klaim		(5.946.708)	(5.327.065)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan		9.005.760	7.252.171
Pendapatan operasional lainnya		34.345.472	31.580.969
Beban operasional lainnya		(73.658.162)	(63.609.646)
(Beban) pendapatan non operasional - neto		(203.971)	179.491
Pembayaran atas pajak penghasilan badan		(11.164.431)	(5.936.444)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		72.082.535	60.457.843
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain		945.891	264.550
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		9.164.531	(12.440.166)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya		(2.091.221)	6.744.495
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		(8.096.930)	(24.236.324)
Kredit yang diberikan		(68.377.027)	(80.715.775)
Piutang dan pembiayaan syariah		39.905.977	(23.299.281)
Piutang pembiayaan		(11.951.573)	(23.148.260)
Aset lain-lain		1.422.631	23.311.739
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera		3.261.813	7.924.262
Simpanan:			
Giro		35.741.846	16.022.216
Giro <i>Wadiah</i>		(6.258.078)	4.237.212
Tabungan		37.005.372	55.315.884
Tabungan <i>Wadiah</i>		(9.247.604)	2.295.916
Deposito berjangka		(5.923.271)	13.175.897
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya		(10.456.563)	5.816.168
Liabilitas derivatif		(208.079)	223.169
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		(11.070.164)	(9.424.266)
Liabilitas lain-lain		235.264	(1.398.837)
(Penurunan) kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer		(33.496.976)	8.678.142
Kas Neto yang Diperoleh dari Kegiatan Operasi		32.588.374	29.804.584

^{*)} Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (lihat catatan 1f, 2b dan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2021	2020 ^{*)}
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI			
Hasil Penjualan aset tetap		51.654	35.214
Penyertaan saham		(315.724)	(284.347)
Penerimaan dividen	15	4.349	5.530
Perolehan aset tetap	16	(8.254.116)	(4.375.066)
Kenaikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi		(64.581.768)	(111.830.687)
Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi		(73.095.605)	(116.449.356)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN			
Pembayaran pinjaman yang diterima		(4.229.199)	41.131.054
Penambahan modal		41.059.206	-
Pembagian laba untuk dividen		(12.125.589)	(20.623.565)
Penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan	24	12.547.672	12.619.200
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	24	(14.608.236)	(11.245.300)
Kas Neto yang Diperoleh Dari Kegiatan Pendanaan		22.643.854	21.881.389
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(17.863.377)	(64.763.383)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING		(2.190)	(352.878)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		171.790.168	236.906.429
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		153.924.601	171.790.168
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:	2a		
Kas	3	26.299.973	32.274.988
Giro pada Bank Indonesia	4	56.426.573	51.530.969
Giro pada bank lain	5	14.065.097	12.266.266
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	6	57.132.958	65.043.738
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7	-	10.674.207
Total Kas dan Setara Kas		153.924.601	171.790.168

^{*)} Disajikan kembali terkait penerapan PSAK No. 38 (lihat catatan 1f, 2b dan 51)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BRI") didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran Dasar BRI kemudian diubah dengan Akta No. 7 tanggal 4 September 1998 Notaris Imas Fatimah, S.H., pasal 2 tentang "Jangka Waktu Berdirinya Perseroan" dan pasal 3 tentang "Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha" untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.

Berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang "SK Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa", BRI telah ditetapkan sebagai bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25 September 1956.

Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang "Perseroan Terbatas" dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")), No. IX.J.I tentang "Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik", yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68, Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

Selanjutnya, Anggaran Dasar BRI dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021. Perubahan dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta modal disetor.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI, ruang lingkup kegiatan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki BRI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

BRI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Program Rekapitalisasi

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah, BRI telah menerima seluruh jumlah rekapitalisasi sebesar nominal Rp29.149.000 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diterbitkan dalam 2 (dua) tahap yaitu sebesar nominal Rp20.404.300 pada tanggal 25 Juli 2000 dan Rp8.744.700 pada tanggal 31 Oktober 2000.

Lebih lanjut, seperti yang disebutkan dalam Kontrak Manajemen tanggal 28 Februari 2001 antara Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan BRI, Pemerintah telah menetapkan bahwa total kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Liabilitas Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Oleh karena itu, BRI telah mengembalikan kelebihan total rekapitalisasi sebesar Rp85.469 dalam bentuk Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 5 November 2001.

Pada tanggal 30 September 2003, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003 tentang besarnya nilai akhir dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal BRI dalam rangka program rekapitalisasi bank umum. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan bahwa nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi BRI adalah sebesar Rp29.063.531.

c. Penawaran Umum Saham Perdana, Pemecahan Saham (Stock Split) dan Penawaran Umum Terbatas Saham

Dalam rangka penawaran umum saham perdana BRI, berdasarkan pernyataan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2003, Pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyetujui untuk melakukan penawaran umum saham perdana (*Initial Public Offering (IPO)*) sebesar 3.811.765.000 lembar saham biasa BRI atas nama seri B, yang terdiri dari 2.047.060.000 lembar milik Negara Republik Indonesia (divestasi) dan 1.764.705.000 lembar atas nama Seri B baru, serta bersamaan dengan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih.

Penawaran umum saham perdana meliputi penawaran kepada masyarakat internasional (Peraturan 144A dari Perundang-undangan Sekuritas dan peraturan "S") dan penawaran kepada masyarakat Indonesia. BRI menyerahkan pendaftarannya kepada Bapepam-LK dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-2646/PM/2003 tanggal 31 Oktober 2003.

Penawaran umum saham perdana BRI meliputi 3.811.765.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp875 (Rupiah penuh) per lembar saham. Selanjutnya, opsi pemesanan lebih sejumlah 381.176.000 lembar saham dan opsi penjatahan lebih sejumlah 571.764.000 lembar saham masing-masing dengan harga Rp875 (Rupiah penuh) setiap lembar saham telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 10 November 2003 dan 3 Desember 2003. Setelah IPO BRI dan opsi pemesanan lebih dan opsi penjatahan lebih dilaksanakan oleh Penjamin Pelaksana Emisi, Negara Republik Indonesia memiliki 59,50% saham di BRI. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 10 November 2003 dan pada saat yang bersamaan seluruh saham BRI juga telah dicatatkan (Catatan 31b).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Saham Perdana, Pemecahan Saham (Stock Split) dan Penawaran Umum Terbatas Saham (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 38 tanggal 24 November 2010, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp500 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp250 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.10-33481 tanggal 29 Desember 2010. Pemecahan saham dilakukan pada tahun 2011 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 11 Januari 2011.

Berdasarkan akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari Rp250 (Rupiah penuh) per saham menjadi Rp50 (Rupiah penuh) per saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU.AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017. Pemecahan saham dilakukan pada tahun 2017 dan BRI menjadwalkan bahwa akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama atau Rp250 (Rupiah penuh) per lembar saham di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi adalah tanggal 9 November 2017 dan tanggal dimulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru atau Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham adalah tanggal 10 November 2017.

Dalam rangka pembentukan Holding Ultra Mikro, BRI meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I), sesuai hasil keputusan RUPSLB tanggal 22 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 61 tanggal 22 Juli 2021, Notaris Fathiah Helmi S.H., serta telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 Agustus 2021 sesuai dengan Surat OJK No. S-152/D.04/2021 tanggal 30 Agustus 2021.

Dalam PMHMETD I tersebut, BRI menawarkan sebanyak-banyaknya 28.213.191.604 saham baru Seri B dengan nilai nominal per lembar saham Rp50 (nilai penuh) dalam bentuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan harga pelaksanaan per lembar saham Rp3.400 (nilai penuh). Tanggal perdagangan dan eksekusi HMETD tersebut mulai dari 13 September sampai dengan 22 September 2021.

Dari penawaran umum terbatas ini BRI telah meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 28.213.191.604 lembar saham, sehingga mengakibatkan komposisi kepemilikan saham BRI adalah 56,82% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 43,18% dimiliki oleh publik

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri)

BRI melalui surat No. R.224-DIR/DIS/09/2015 tanggal 25 September 2015 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham BRI kepada OJK sebanyak-banyaknya Rp5.000.000, dan telah disetujui oleh OJK melalui Surat No. S-101/PB.31/2015 tanggal 6 Oktober 2015. Selanjutnya BRI menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000 melalui surat No. B.695-DIR/SKP/10/2015 tanggal 9 Oktober 2015. Pembelian kembali tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, antara tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016. Sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 221.718.000 lembar saham sebelum *stock split*. Ketika *buyback* tahun 2016 harga perolehan rata-rata persahamnya Rp10.944 dengan dana yang digunakan Rp2.418.947.067.500 (nilai penuh). Sehingga setelah *stock split* (1:5) saham yang telah dibeli kembali dicatat sebanyak 1.108.590.000 lembar dengan harga perolehan rata-rata persahamnya Rp2.182.

Pada tanggal 23 sampai dengan 27 Mei 2019, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 143.415.500 lembar dengan harga perolehan sebesar Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp312.933.098.043 (nilai penuh), harga wajar ESA 1 sebesar Rp3.630 (nilai penuh) atau setara Rp520.598.265.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam Agio sebesar Rp207.665.166.957 (nilai penuh).

Pada tanggal 25-28 Februari 2020, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 231.111.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara total Rp504.284.970.744 (nilai penuh), dimana implementasi ini terdiri dari program ESA 1 sebanyak 4.396.700 lembar saham dengan harga wajar sebesar Rp3.630 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp15.960.021.000 (nilai penuh) dan program ESA 2 sebanyak 226.714.300 lembar dengan harga wajar Rp4.410 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp999.810.063.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp511.485.113.256 (nilai penuh).

BRI melalui surat No. R.154-DIR/ALM/03/2020 tanggal 10 Maret 2020 mengajukan permohonan persetujuan pembelian kembali saham BRI kepada OJK sebanyak-banyaknya Rp3.000.000, dan telah disetujui oleh OJK melalui Surat No. S.47/PB.31/2020 tanggal 12 Maret 2020. Selanjutnya BRI menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan dan tercatat di BEI sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000 melalui surat No. B.427-DIR/SKP/03/2020 tanggal 13 Maret 2020. Pembelian kembali tersebut secara bertahap dalam periode 13 Maret 2020 sampai dengan 12 Juni 2020. Sampai dengan tanggal 12 Juni 2020, BRI telah melakukan pembelian saham sebanyak 16.400.000 lembar saham (nilai nominal Rp50 (nilai penuh) per lembar saham) dengan harga perolehan sebesar Rp47.254.000.000 dengan rata-rata harga pembelian Rp2.881,34 per lembar saham. Atas transaksi ini total saham treasuri yang dimiliki oleh BRI sebanyak 750.463.500 lembar saham.

Pada tanggal 5 Februari 2021, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 84.600 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara total Rp184.597.481 (nilai penuh), harga wajar program diskresi saham bonus sebesar Rp3.240 (nilai penuh) atau setara Rp274.104.000 (nilai penuh), selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp89.506.518 (nilai penuh).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2021, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebesar 2.096.400 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara total Rp4.574.351.773 (nilai penuh), dimana implementasi ini terdiri dari ESA 1 sebanyak 831.000 lembar saham dengan harga wajar Rp3.630 per lembar saham atau setara Rp3.016.530.000 (nilai penuh) dan ESA 2 sebanyak 1.265.400 lembar saham dengan harga wajar Rp4.410 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp5.580.414.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp4.022.592.226 (nilai penuh).

Pada tanggal 7 Oktober – 17 Desember 2021 terdapat implementasi program saham option kepada karyawan BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 11.613.900 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp25.341.568.431 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp26.015.136.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp4.680.363.069 (nilai penuh).

Pada tanggal 25 Oktober 2021, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 590.000 lembar saham dengan harga perolehan Rp2.182 (nilai penuh) per lembar saham atau setara total Rp1.287.381.963 (nilai penuh), harga wajar Discretionary Pool sebesar Rp3.750 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp2.212.500.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp925.118.037 (nilai penuh).

Pada tanggal 27 Oktober 2021, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 263.904.800 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara total Rp575.841.151.426 (nilai penuh), harga wajar ESA 3 sebesar Rp4.020 (nilai penuh) atau setara Rp1.060.897.296.000 (nilai penuh), selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp485.056.144.574 (nilai penuh).

Pada tanggal 5 November – 6 Desember 2021 terdapat implementasi program saham option kepada karyawan BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 124.565.200 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp271.801.680.741 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp279.026.048.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp7.224.367.259 (nilai penuh).

Pada tanggal 17 Desember 2021, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 282.159.300 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara total Rp615.672.531.146 (nilai penuh), harga wajar ESA 4 sebesar Rp3.926 (nilai penuh) atau setara Rp1.107.757.411.800 (nilai penuh), selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp492.084.880.654 (nilai penuh).

Pada tanggal 17 Desember 2021 terdapat implementasi program saham *option* kepada karyawan BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 11.004.400 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp24.011.637.404 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp24.649.856.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp4.660.603.096 (nilai penuh).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Modal Saham Diperoleh Kembali (Saham Treasuri) (lanjutan)

Pada tanggal 27 Desember 2021, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 6.049.800 lembar saham terdiri dari ESA 1 sebanyak 16.000 lembar saham dengan harga wajar Rp3.630 per lembar saham atau setara Rp58.080.000 (nilai penuh), ESA 2 sebanyak 266.400 lembar saham dengan harga wajar Rp4.410 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp1.174.824.000 (nilai penuh), ESA 3 sebanyak 4.813.700 lembar saham dengan harga wajar Rp4.020 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp19.351.074.000 (nilai penuh), dan ESA 4 sebanyak 953.700 lembar saham dengan harga wajar Rp3.926 (nilai penuh) per lembar saham atau setara Rp3.744.226.200 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp11.127.520.477 (nilai penuh).

Pada tanggal 28 Desember 2021 terdapat implementasi program saham option kepada karyawan BRI (Catatan 30) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 1.742.600 lembar saham dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp3.802.358.996 (nilai penuh), harga pelaksanaan program ESOP 1 dan 2 sebesar Rp2.240 (nilai penuh) atau setara Rp3.903.424.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp732.402.204 (nilai penuh).

Pada tanggal 30 Desember 2021, terdapat implementasi program saham bonus kepada karyawan BRI (Catatan 31f) yang bersumber dari saham treasuri. Hal ini mengakibatkan pengurangan saham treasuri sebanyak 30.720.900 lembar saham dengan rincian sebanyak 30.252.500 lembar dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.182 (nilai penuh) atau setara Rp66.011.055.629 (nilai penuh) dan sebanyak 468.400 lembar dengan harga perolehan per lembar saham Rp2.881 (nilai penuh) atau setara Rp1.349.460.400 (nilai penuh), harga wajar ESA Khusus sebesar Rp4.080 (nilai penuh) atau setara Rp125.341.272.000 (nilai penuh). Selisih antara nilai saham treasuri dan total biaya implementasi berdasarkan harga wajar dicatat dalam agio sebesar Rp57.980.755.971 (nilai penuh). Per tanggal 31 Desember 2021, total saham treasuri BRI sebanyak 15.931.600 lembar saham.

e. Struktur dan Manajemen

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BRI memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Kantor Wilayah	18	19
Kantor Audit Intern Pusat	1	1
Kantor Audit Intern Wilayah	18	19
Kantor Cabang Dalam Negeri	450	461
Kantor Cabang Khusus	1	1
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan di Luar Negeri	6	5
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dalam Negeri	588	608
Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Luar Negeri	3	3
Kantor Kas	525	547
BRI Unit	5.222	5.382
Teras dan Teras Keliling	1.829	1.999
Teras Kapal	4	4

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 BRI memiliki 5 (lima) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di New York, Cayman Islands, Singapura, Timor-Leste dan Taipei, serta 1 (satu) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di Hong Kong.

Pada tanggal 31 Desember 2020, BRI memiliki 4 (empat) Kantor Cabang di luar negeri yang berlokasi di New York, Cayman Islands, Singapura dan Timor-Leste, serta 1 (satu) Kantor Perwakilan di luar negeri yang berlokasi di Hong Kong.

Pada tanggal 31 Desember 2021 BRI memiliki 9 (sembilan) entitas anak yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk), BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas (dahulu PT Danareksa Sekuritas), PT BRI Ventura Investama, PT BRI Asuransi Indonesia (dahulu PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur), PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 BRI memiliki 8 (delapan) entitas anak yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Raya Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk), BRI Remittance Co. Ltd. Hong Kong, PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas (dahulu PT Danareksa Sekuritas), PT BRI Ventura Investama dan PT BRI Asuransi Indonesia (dahulu PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur).

Berdasarkan kebijakan akuntansi BRI, manajemen kunci BRI cakupannya adalah anggota komisaris, direksi, *senior executive vice president*, komite audit, komite remunerasi, kepala divisi, kepala satuan kerja audit intern dan kepala audit intern wilayah, pemimpin wilayah, pemimpin cabang khusus dan pemimpin cabang. Total karyawan BRI dan entitas anak masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60.966	61.531
Entitas Anak	18.432	22.814
	79.398	84.345

Susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan Tahunan BRI yang masing-masing dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 24 tanggal 23 April 2021 dan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 5 tanggal 7 Oktober 2021. Adapun Susunan Dewan Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI yang dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 19 tanggal 18 Februari 2020 dan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 9 tanggal 16 November 2020:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Komisaris Utama/Komisaris :	Kartika Wirjoatmodjo	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/ :		
Komisaris Independen :	Rofikoh Rokhim	Ari Kuncoro
Komisaris Independen :	Hendrikus Ivo	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen :	Zulnahr Usman	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen :	Dwi Ria Latifa	Zulnahr Usman
Komisaris Independen :	R. Widyo Pramono	Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen :	Heri Sunaryadi ^{*)}	R. Widyo Pramono
Komisaris :	Nicolaus Teguh Budi Harjanto	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris :	Hadiyanto	Hadiyanto
Komisaris :	Rabin Indrajad Hattari	Rabin Indrajad Hattari

^{*)} Baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dan Tahunan BRI yang masing-masing dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 24 tanggal 23 April 2021 dan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 5 tanggal 7 Oktober 2021. Adapun Susunan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan RUPS Tahunan BRI yang dimuat dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 19 tanggal 18 Februari 2020 dan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 9 tanggal 16 November 2020:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Direktur Utama :	Sunarso	Sunarso
Wakil Direktur Utama :	Catur Budi Harto	Catur Budi Harto
Direktur :	Viviana Dyah Ayu R.K	Haru Koesmahargyo
Direktur :	Amam Sukriyanto	Priyastomo
Direktur :	Indra Utoyo	Indra Utoyo
Direktur :	Handayani	Handayani
Direktur :	Supari	Supari
Direktur :	Arga Mahanana Nugraha	Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur :	Agus Sudiarto	Agus Sudiarto
Direktur :	Agus Noorsanto	Agus Noorsanto
Direktur :	Agus Winardono	Herdy Rosadi
Direktur :	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Wisto Prihadi*)

*) Mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 11 November 2020. dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank pada tanggal 21 Januari 2021.

Susunan Komite Audit BRI pada tanggal 31 Desember 2021 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.Kep 594-DIR/HCB/09/2021 tanggal 30 September 2021, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep 548-DIR/HCB/08/2020 tanggal 12 Agustus 2020:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Ketua :	Hendrikus Ivo	Hendrikus Ivo
Anggota :	R. Widyo Pramono	Ari Kuncoro
Anggota :	Rofikoh Rokhim	Rofikoh Rokhim
Anggota :	Zulnihar Usman	R. Widyo Pramono
Anggota :	Sahat Pardede	Pamuji Gesang Raharjo
Anggota :	Irwanto	Sunuaji Noor Widiyanto
Anggota :	Bambang Harudi	Sahat Pardede
Anggota :	Bardiyono Wiyatmojo	Handayani Wibowo

Sekretaris Perusahaan BRI pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Aestika Oryza Gunarto, sesuai dengan Surat No. R.453-DIR/HCB/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

e. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI pada tanggal 31 Desember 2020 dijabat Hari Siaga Amijarso sesuai Surat Keputusan Direksi BRI No. R. 401-DIR/KHC/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Adapun Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI pada tanggal 31 Desember 2021 dijabat Catur Budi Harto-Wakil Direktur Utama-yang ditunjuk sebagai pengambil alih tugas Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI sesuai Berita Acara Serah Terima Jabatan No. B.35-DIR/SAI/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dan Surat Keputusan Direksi BRI No. S.367a-DIR/CDS/08/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: S.367-DIR/CDS/08/2021 tanggal 06 Agustus 2021 tentang Penetapan Direktur Pengganti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada saat penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2021, Anik Hidayati menjabat sebagai Pejabat Pengganti Sementara Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI sesuai Surat Keputusan Direksi BRI NOKEP: 45-DIR/HCB/01/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penugasan Sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Kepala Satuan Kerja Audit Intern BRI.

f. Entitas Anak

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS)

Pada tanggal 29 Juni 2007, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Bank Jasa Arta ("BJA") untuk mengakuisisi 100% saham BJA dengan harga pembelian sebesar Rp61.000.000.000 (Rupiah penuh). Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan Akta No. 3 tanggal 5 September 2007 Notaris Imas Fatimah, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BJA tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 9/188/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Desember 2007 dan No. 9/1326/DPIP/Prz tanggal 28 Desember 2007. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan akta Akuisisi No. 61 Notaris Imas Fatimah, S.H., dimana BRI memiliki 99,99875% dari total saham yang dikeluarkan BJA dan sebesar 0,00125% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BJA berdasarkan akta No. 45 tanggal 22 April 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., telah berubah menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSB"). Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, BSB memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selama 60 (enam puluh) hari setelah keputusan tersebut, BSB wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari setelah keputusan, BSB wajib menyelesaikan seluruh kredit dan liabilitas debitur atau nasabah dari kegiatan konvensional.

BRI pada tanggal 19 Desember 2008 sepakat untuk melakukan pemisahan (*spin-off*) atas Unit Usaha Syariah BRI ("UUS BRI") kedalam BSB yang telah diaktakan dengan "Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BRI ke dalam PT Bank Syariah BRI" No. 27 tanggal 19 Desember 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana tanggal efektif pemisahan adalah tanggal 1 Januari 2009. Akibat dari pemisahan yang ditetapkan tersebut, terhitung sejak tanggal efektif pemisahan maka:

1. Semua aset dan liabilitas UUS BRI yang dimiliki oleh BRI, karena hukum telah beralih kepada dan menjadi hak atau kepunyaan, serta liabilitas atau beban dari dan akan dijalankan oleh dan atas tanggungan BSB, selaku perseroan yang menerima pemisahan.
2. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas kantor UUS BRI karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau diusahakan oleh BSB atas keuntungan, kerugian dan tanggungan BSB.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) (lanjutan)

BRI pada tanggal 19 Desember 2008 sepakat untuk melakukan pemisahan (spin-off) atas Unit Usaha Syariah BRI ("UUS BRI") kedalam BSB yang telah diaktakan dengan "Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BRI ke dalam PT Bank Syariah BRI" No. 27 tanggal 19 Desember 2008 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana tanggal efektif pemisahan adalah tanggal 1 Januari 2009. Akibat dari pemisahan yang ditetapkan tersebut, terhitung sejak tanggal efektif pemisahan maka (lanjutan):

3. Semua hak, piutang, wewenang dan liabilitas UUS BRI berdasarkan perjanjian, tindakan atau peristiwa apapun yang telah ada, dibuat, dilakukan atau terjadi pada atau sebelum tanggal efektif pemisahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tercatat dalam daftar aset dan liabilitas UUS BRI, serta semua hubungan hukum antara UUS BRI dengan pihak lain karena hukum beralih kepada dan akan dijalankan atau dilaksanakan oleh BSB atas keuntungan atau kerugian dan tanggungan BSB.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham BSB No. 18 tanggal 14 April 2009, Notaris Fathiah Helmi, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Syariah BRI menjadi PT Bank BRISyariah ("BRIS") dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar BRIS antara lain mengenai peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp7,5 triliun terdiri atas 15 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dan perubahan nama dari PT Bank BRISyariah menjadi PT Bank BRISyariah Tbk. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dan penerimaan pemberitahuan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018. Akta tersebut juga mencantumkan persetujuan pemegang saham antara lain:

1. Rencana Bank untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
2. Perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2014 beserta perubahannya, dan POJK No. 33/POJK.04/2014.
3. Pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk Manajemen dan Karyawan, dengan jumlah maksimal 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO selesai dilaksanakan.

Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S.37/D.04/2018 tanggal 30 April 2018 perihal pemberitahuan efektifnya pernyataan pendaftaran PT Bank BRISyariah Tbk. atas penawaran umum perdana saham sesuai dengan surat terakhir yang disampaikan ke OJK No. S.B.147-PDR/04-2018 tanggal 24 April 2018, OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) (lanjutan)

Penawaran umum perdana saham BRIS (termasuk ESA) meliputi 2.623.350.600 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp510 (Rupiah penuh) per lembar saham. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di BEI pada tanggal 9 Mei 2018. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum Pasal 4 Ayat 2 dan 3, yang antara lain menetapkan bahwa Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah saham yang bersangkutan, maka sebanyak 97.161.135 lembar saham BRIS yang dimiliki oleh BRI tidak dicatatkan di Bursa, sehingga total saham BRIS yang dicatatkan di Bursa adalah 9.618.952.363 lembar saham. Setelah IPO BRIS, berdasarkan surat No. DE/V/18-2545 tanggal 24 Mei 2018 dari PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, kepemilikan BRI atas saham BRIS adalah sebesar 73,00%.

Anggaran Dasar BRIS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRIsyariah Tbk No. 27 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan ketentuan masa jabatan Pengurus Perseroan dan beberapa penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan lainnya yang relevan dengan kegiatan Perseroan. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0302291 tanggal 23 Juli 2019.

Struktur kepemilikan saham BRIS pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari BRI sebesar 71,64%, DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah sebesar 8,25% dan masyarakat (publik) sebesar 20,11%.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRIS yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRIS adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Total aset BRIS pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp57.871.075 atau 3,59% dari total aset konsolidasian.

Total pendapatan pengelolaan dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.347.121 atau 3,06% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS, dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) akan menjadi entitas yang menerima penggabungan atau *surviving entity* dan seluruh pemegang saham PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Tbk ("BSI") efektif sebagai bank hasil *merger* sesuai dengan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan OJK Perbankan melalui Surat Keputusan No. 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank BRIsyariah Tbk dan perubahan izin usaha.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) (lanjutan)

Sejak tanggal efektif penggabungan, struktur kepemilikan saham terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,95%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,91%, BRI sebesar 17,29%, DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah sebesar 1,83%, PT BNI Life Insurance sebesar 0,01%, PT Mandiri Sekuritas sebesar 0,00% dan masyarakat (publik) sebesar 5,01%.

Hasil dari MESOP tahun 2021 dengan Periode Pelaksanaan yang terhitung 30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Mei 2021 menyebabkan Anggaran Dasar BSI mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta No.54 tanggal 27 Juli 2021 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn, sehingga kepemilikan saham BRI di BSI menjadi 17,25% PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 24,85%, DPLK Bank Rakyat Indonesia-Saham Syariah sebesar 1,6%, PT BNI Life Insurance sebesar 0,01%, PT Mandiri Sekuritas sebesar 0,00% dan masyarakat (publik) sebesar 5,46% Perubahan ini telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0434796 tanggal 5 Agustus 2021.

Sejak tanggal 1 Februari 2021 BRI telah kehilangan pengendalian atas BRIS yang mengakibatkan BRI harus menghentikan pengakuannya terhadap aset bersih BRIS pada nilai tercatatnya sebesar Rp909.707 dan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali terdahulu kepada BRIS ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non pengendali) senilai Rp1.452.824. Setelah itu BRI mengakui investasi pada BSI sesuai dengan rasio penggabungan dimana selisih antara net aset BRIS dengan investasi BSI dicatat sebagai tambahan modal disetor sebesar Rp565.209 (Catatan 31b).

Setelah pengukuran awal nilai investasi BSI kemudian ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi BSI sesuai PSAK No. 15 "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama".

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro))

Pada tanggal 19 Agustus 2010, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) selaku pemegang 95,96% saham PT Bank Agroniaga Tbk ("Bank Agro") untuk mengakuisisi saham Bank Agro dengan total nominal sebesar Rp330.296 untuk 3.030.239.023 lembar saham dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Komposisi kepemilikan saham Bank Agro nantinya adalah BRI akan memiliki 76%, Dapenbun 14% dan publik 10%.

Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 37 tanggal 24 November 2010 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap Bank Agro. Selain itu, Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan melalui Surat No. 13/19/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 16 Februari 2011. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 3 Maret 2011 berdasarkan akta akuisisi No. 14 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 88,65% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Bank Agro, sebagaimana dimuat dalam akta No. 68 tanggal 29 Desember 2009, Notaris Rusnaldy, S.H. Hal tersebut diatas telah mempertimbangkan efek dari Waran Seri I yang dapat dieksekusi sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)) (lanjutan)

Untuk memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008, tanggal 30 Juni 2008, tentang "Pengambilalihan Perusahaan Terbuka", BRI sebagai pengendali baru Bank Agro diwajibkan untuk melaksanakan Penawaran Tender terhadap saham Bank Agro yang dimiliki pemegang saham publik. Pernyataan Penawaran Tender telah dinyatakan efektif pada tanggal 4 Mei 2011 berdasarkan Surat Ketua Bapepam-LK No. S-4985/BL/2011 dan telah diumumkan pada dua surat kabar harian, yaitu *Bisnis Indonesia* dan *Investor Daily*, keduanya pada tanggal 5 Mei 2011. Masa penawaran Tender dimulai pada tanggal 5 Mei 2011 dan berakhir pada tanggal 24 Mei 2011. Pada tanggal penutupan masa Penawaran Tender, terdapat 113.326.500 lembar saham (3,15% dari seluruh saham Bank Agro) yang dibeli oleh BRI. Harga penawaran Tender yang digunakan adalah sebesar Rp182 (Rupiah penuh) per lembar.

Pada tanggal 1 Juli 2011, telah dilaksanakan penjualan saham kepada Dapenbun sejumlah 256.375.502 lembar atas eksekusi opsi beli Dapenbun dengan harga Rp109 (Rupiah penuh) per lembar. Selanjutnya sesuai peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, jangka waktu pengembalian *tender offer* adalah selama 2 (dua) tahun, namun khusus untuk Bank Agro maka BRI wajib memenuhi kepemilikan saham publik minimal adalah sebesar 10%, dan harus dipenuhi paling lambat pada tanggal 24 Mei 2013. Hal ini untuk memenuhi Surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011. Sampai dengan 31 Desember 2011, saham Bank Agro yang berhasil dijual ke publik sebesar 500.000 lembar, sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Agro per 31 Desember 2011 menjadi 79,78% dan Dapenbun 14%. Selama tahun 2012 dan 2013 tidak terdapat penjualan saham, kemudian pada tahun 2014 terdapat penjualan saham sebesar 130.000 lembar saham, sehingga per tanggal 31 Desember 2014, kepemilikan saham publik untuk memenuhi surat Bursa Efek Indonesia No. S-06472/BEI.PPJ/09-2011 tanggal 23 September 2011 sebesar 10% pada tanggal 24 Mei 2013 belum dapat dipenuhi BRI karena tidak aktifnya harga saham Bank Agro di pasar modal.

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 30 tanggal 16 Mei 2012, Notaris Rusnaldy, S.H., dilakukan perubahan nama dari PT Bank Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk ("BRI Agro") dan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sesuai Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

Pada tanggal 10 Mei 2013, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 3.846.035.599 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 26 Juni 2013, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-186/D.04/2013 menyetujui Pernyataan Penawaran Umum Terbatas IV tersebut, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.832.685.599 lembar saham.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (Bank Raya) (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)) (lanjutan)

Hasil dari PUT IV menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 107 tanggal 30 Juli 2013, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 80,43%, Dapenbun 14,02% dan publik 5,55%. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0074249.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 1 Agustus 2013.

Pada tanggal 11 Mei 2015, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V ("PUT V") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak 5.588.085.883 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) setiap lembar saham. Pada tanggal 17 Juni 2015, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-259/D.04/2015 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas V, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.028.934.521 lembar saham.

Hasil dari PUT V menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro menjadi 87,23%, Dapenbun 9,10% dan publik 3,67%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0951264 tanggal 14 Juli 2015.

Pada tanggal 17 Oktober 2016, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham dan menerbitkan Waran Seri II sebanyak 616.908.103 lembar. Pada tanggal 25 November 2016, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-695/D.04/2016 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VI, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 3.845.996.122 lembar saham. Waran Seri II dapat dikonversi menjadi saham BRI Agro dengan nilai Rp130 per lembar (Rupiah penuh) dengan periode pelaksanaan dari 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

Hasil dari PUT VI menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 27 Desember 2016, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro tetap sebesar 87,23%, Dapenbun 7,08% dan publik 5,69%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0112637 tanggal 27 Desember 2016.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya) (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)) (lanjutan)

Sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 (akhir dari konversi waran), jumlah waran yang telah dikonversi menjadi saham sejumlah 612.937.654 lembar, sehingga meningkatkan modal saham Bank sebesar Rp61.294.

Pada tanggal 2 Mei 2017, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 2.515.555.707 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 12 Juni 2017, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-293/D.04/2017 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VII, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.515.555.707 lembar saham.

Hasil dari PUT VII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 19 tanggal 21 Juli 2017, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,16%, Dapenbun 6,44% dan publik 6,39%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0154825 tanggal 21 Juli 2017.

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI Agro menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas VIII ("PUT VIII") kepada Dewan Komisiner OJK dalam rangka PMHMETD sebanyak-banyaknya 5.001.089.604 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 30 Agustus 2018, Dewan Komisiner OJK melalui surat No. S-113/D.04/2018 memberitahu mengenai Efektifnya PUT VIII, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 2.889.085.049 lembar saham.

Hasil dari PUT VIII menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 2 Oktober 2018, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 87,10%, Dapenbun 5,00% dan publik 7,90%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0249178 tanggal 4 Oktober 2018.

Pada Akta RUPS Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. 51 tanggal 26 Juni 2018 telah memberikan Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebagaimana diatur dalam POJK NO. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 dalam rangka *Program Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP), sebanyak-banyaknya 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) lembar saham dengan nominal Rp100 (Rupiah penuh), - per lembar saham sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 249.376.451 lembar saham.

Hasil dari MESOP tahun 2021 dengan Periode Pelaksanaan yang terhitung 30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Agustus s.d 14 September 2021 menyebabkan Anggaran Dasar BRI Agro mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.26 tanggal 27 September 2021 dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal S.H., M.Kn mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di BRI Agro sebesar 85,70% dan publik 14,30%. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Kemenkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0453530 tanggal 27 September 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia (Bank Raya) (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro)) (lanjutan)

Pada Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT Bank Raya Indonesia Tbk No. 23 tanggal 27 September 2021 yang dibuat oleh Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn telah memberikan Persetujuan untuk Penerbitan Saham Baru melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas IX ("PUT IX").

Pada tanggal 30 September 2021 melalui surat Nomor B.562/DIR.01/SKP/09/2021, Bank Raya menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Terbatas dalam rangka PMHMETD IX kepada Dewan Komisiner OJK sebanyak-banyaknya 2.150.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 (Rupiah penuh) per saham. Pada tanggal 18 November 2021, Dewan Komisiner OJK melalui surat No.S-207/D.04/2021 memberitahu mengenai Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, sehingga meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 1.054.545.185 lembar saham.

Hasil dari PMHMETD IX menyebabkan Anggaran Dasar Bank Raya mengalami perubahan sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 17 Desember 2021, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh, sehingga kepemilikan saham BRI di Bank Raya sebesar 85,72% dan publik 14,28%. Perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk No. AHU-AH.01.03-0487031 tanggal 17 Desember 2021.

Anggaran Dasar Bank Raya telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 27 April 2021, Notaris M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, mengenai penyesuaian beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang relevan dengan kegiatan Perseroan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan terdaftar pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0078302.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 April 2021.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 27 September 2021, Notaris Mochamad Nova Faisal S.H., M.KN, dilakukan perubahan nama dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menjadi PT Bank Raya Indonesia Tbk yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat No. AHU-0052731.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 27 September 2021 dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Nokep.-65/PB.1/2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Raya Indonesia Tbk pada tanggal 1 November 2021. Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan diterbitkan berdasarkan No. 22 tanggal 17 Desember 2021.

Total aset Bank Raya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp16.927.208 dan Rp27.966.392 atau 1,01% dan 1,74% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp1.641.997 dan Rp1.928.438 atau 1,09% dan 1,36% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan Bank Raya adalah menjalankan kegiatan umum di bidang perbankan. BRI Agro berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/1037/UUps/Ps6D tanggal 26 Desember 1989, telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum.

Kantor pusat Bank Raya berlokasi di Gedung BRI Agro, Jl. Warung Jati Barat No.139, Jakarta, dan memiliki 12 kantor cabang, 7 *community branch*, 11 kantor cabang pembantu dan 13 kantor kas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

BRI Remittance Co. Limited Hong Kong (BRI Remittance)

Pada tanggal 16 Desember 2011, BRI telah menandatangani *Instrument of Transfer* dan *Bought and Sold Notes* untuk mengakuisisi 100% atau 1.600.000 (angka penuh) saham BRIngin Remittance Co. Ltd. (BRC) Hong Kong dengan harga pembelian sebesar HKD1.911.270. Akuisisi ini telah disahkan oleh *Inland Revenue Department* (IRD) Hong Kong dengan *stamp duty* pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 13/32/DPB1/TPB1-3/Rahasia pada tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Tahunan BRIngin Remittance Company Limited tanggal 2 Juli 2012, serta dengan diterbitkannya *Certificate of Change of Name* No. 961091 tanggal 11 Oktober 2012 oleh *Registrar of Companies Hong Kong Special Administrative Region*, maka nama BRIngin Remittance Company Limited secara resmi berubah menjadi BRI Remittance Company Limited Hong Kong.

Total aset BRI Remittance pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp13.094 dan Rp8.481 atau 0,00078% dan 0,0005% dari total aset konsolidasian.

Sesuai dengan ijin usaha resmi dari Regulator Hong Kong sebagai *Money Service Operator* (MSO), ruang lingkup kegiatan BRI Remittance adalah menjalankan layanan remitansi untuk pekerja migran Indonesia serta lingkup layanan operasional lain terkait dengan rekening BRI yang dimiliki oleh nasabah BRI yang berdomisili di Hong Kong sesuai dengan ketentuan yang diperkenankan oleh otoritas Hong Kong.

Kantor pusat BRI Remittance berlokasi di Shop 3 G/F, 24-36 Causeway Road, Causeway Bay, Hong Kong dan memiliki 4 (empat) kantor cabang serta 1 (satu) *management office* yang tersebar di wilayah Causeway Bay, Mongkok, Yuen Long dan Tsuen Wan.

PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Pada tanggal 6 Oktober 2015, BRI telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dengan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera ("BRI Life") untuk mengakuisisi 91,001% saham BRI Life dengan harga pembelian sebesar Rp1.627.000.000.000 (Rupiah penuh). Berdasarkan RUPS Luar Biasa BRI sesuai dengan akta No. 14 tanggal 14 Desember 2015 Notaris Fathiah Helmi, S.H., para pemegang saham telah menyetujui akuisisi terhadap BRI Life tersebut dan juga telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-151/PB.31/2015 tanggal 23 Desember 2015. Akuisisi ini diselesaikan pada tanggal 29 Desember 2015 berdasarkan akta Pengambilalihan Saham dalam PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera No. 41 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 91,001% dari total saham yang dikeluarkan BRI Life dan sebesar 8,999% diserahkan kepada Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

Berdasarkan Akta No. 31 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Dahlia, S.H., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dilakukan perubahan nama dari PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera menjadi PT Asuransi BRI Life dan sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-140/NB.11/2017 tanggal 20 Maret 2017, BRI Life memperoleh pemberlakuan izin usaha di bidang asuransi jiwa sehubungan perubahan nama perusahaan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Asuransi BRI Life (BRI Life) (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013073.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 Maret 2021, diatur mengenai perubahan nomenklatur, susunan Pengurus, dan perubahan Anggaran Dasar yang salah satunya terkait dengan adanya peningkatan modal dan perubahan struktur kepemilikan BRI Life melalui penerbitan sebanyak 936.458 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham baru untuk diambil bagian oleh FWD Financial Services Pte. Ltd.. Sebagai akibat dari Penerbitan Saham Baru tersebut, maka terhitung sejak tanggal 2 Maret 2021 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi: BRI 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 6,31%, dan FWD Financial Services Pte. Ltd 29,86%. Adapun Perubahan struktur kepemilikan ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari OJK melalui surat No. S-12/NB.1/2021 tanggal 4 Februari 2021.

Berdasarkan Akta No. 58 tanggal 11 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta diatur mengenai perubahan ketentuan Pasal 11 Ayat (5) dan Pasal 18 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseoran, perubahan nomenklatur dan perubahan susunan Pengurus. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Asuransi BRI Life No. AHU-AH.01.03-0325327 tanggal 24 Mei 2021.

Kepemilikan BRI Life mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 59 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Asuransi BRI Life Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Asuransi BRI Life No. AHU.AH.01.03-0460422 tanggal 13 Oktober 2021, Pemegang Saham BRI Life menyetujui Pengalihan Saham FWD Financial Services Pte. Ltd kepada FWD Management Holdings Limited. Pengalihan ini untuk memenuhi surat OJK No. S-12/NB.1/2021 tanggal 4 Februari 2021. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2021 susunan kepemilikan saham BRI Life menjadi: BRI 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI 6,31%, dan FWD Management Holding Limited 29,86%. Adapun perubahan kepemilikan ini sebelumnya telah mendapat persetujuan dari OJK IKNB melalui Surat No S.93/NB.1/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Persetujuan Atas Perubahan Kepemilikan BRI Life.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BRI Life yang terakhir, ruang lingkup kegiatan BRI Life adalah melakukan usaha di bidang perasuransian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BRI Life mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-181/KMK.13/1988 tanggal 10 Oktober 1988.

BRI Life mendapatkan ijin pembukaan kantor cabang dan unit Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-007/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Total aset BRI Life pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp18.334.912 dan Rp13.042.450 atau 1,09% dan 0,81% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan premi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp6.390.836 dan Rp5.679.455 atau 4,25% dan 4,00% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat BRI Life berlokasi di Gedung Graha Irama Lantai 15, Jl. H.R Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 dan 2, Jakarta, dan memiliki 6 kantor CCC (*Customer Care Center*) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 21 kantor CC (*Customer Care*).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance)

Pada tanggal 12 Juli 2016, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd ("BTMU") dalam rangka peningkatan kepemilikan saham BRI pada PT BTMU-BRI Finance ("BBF") dari semula sebesar 45% menjadi 99%, dengan harga pembelian sebesar Rp378.548, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-102/PB.31/2016 tanggal 21 September 2016. Pengalihan saham ini diselesaikan pada tanggal 30 September 2016, berdasarkan akta No. 75 Notaris Fathiah Helmi, S.H., dimana BRI memiliki 99% dari total saham yang dikeluarkan PT BRI Multifinance Indonesia ("BRI Finance") dan sebesar 1% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI. Atas akuisisi BRI Finance, BRI mencatat *goodwill* sebesar Rp51.915 yang diklasifikasikan dalam akun Aset Lain-lain.

Berdasarkan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 67 tanggal 15 September 2016, yang dibuat di hadapan Notaris I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama dari PT BTMU-BRI Finance menjadi PT BRI Multifinance Indonesia, dan sesuai Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-771/NB.11/2016 tanggal 17 Oktober 2016, sehubungan dengan perubahan nama tersebut maka BRI Finance memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan pembiayaan atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sanwa-BRI Finance, yang selanjutnya berubah nama menjadi PT UFJ-BRI Finance dan PT BTMU-BRI Finance.

Anggaran Dasar BRI Finance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BRI Multifinance Indonesia No. 237 tanggal 23 April 2019, yang dibuat di hadapan I Gede Buda Gunamanta, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023113.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 29 April 2019, dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0223685 tanggal 29 April 2019, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 2019, Tambahan Berita Negara No. 35668/2019, antara lain berkaitan dengan perubahan tempat kedudukan BRI Finance dari semula di Jakarta Pusat menjadi di Jakarta Selatan, perubahan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dan tindak lanjut atas arahan dari Pemegang Saham Pengendali untuk penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan anggaran dasar terakhir adalah sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 November 2020, yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0188874.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 11 November 2020, dan pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0406497 tanggal 11 November 2020, antara lain mengatur tentang perubahan peningkatan Modal Ditempatkan/Disetor BRI Finance.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) (lanjutan)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Finance adalah melakukan usaha dalam bidang pembiayaan.

Total aset BRI Finance pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.246.043 dan Rp4.055.885 atau 0,31% dan 0,25% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp594.944 dan Rp479.376 atau 0,40% dan 0,34% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat BRI Finance berlokasi di Menara Brilian Lantai GF, 21 dan 22, Jalan Gatot Subroto No. 177A Kav. 64 Jakarta Selatan dan memiliki 12 cabang dan 11 kantor pemasaran.

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures)

Pada tanggal 29 Juni 2018, BRI telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Dalam PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura ("Sarana NTT Ventura") dengan PT Bahana Artha Ventura ("BAV") dalam rangka pengambilalihan seluruh kepemilikan saham BAV dalam Sarana NTT Ventura menjadi milik BRI sebanyak 97,61%, dengan harga pembelian sebesar Rp3.090, dan telah mendapatkan persetujuan masing-masing dari Dewan Komisaris BRI selaku wakil dari pemegang saham lewat suratnya No. R. 67-KOM/09/2018 tanggal 26 September 2018 serta persetujuan dari OJK melalui surat No. S-112/PB.31/2018 tanggal 25 September 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 20 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham No. 70 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dimana BRI memiliki 97,61% dari total saham yang dikeluarkan oleh PT BRI Ventura Investama (dahulu Sarana NTT Ventura).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 74 tanggal 14 November 2018, yang dibuat di hadapan Zantje Mathilda Voss Tomasowa, S.H., M.Kn, Notaris di Kupang, telah dilakukan perubahan nama dari PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura menjadi PT BRI Ventura Investama ("BRI Ventures"), beserta perubahan tempat kedudukan Perusahaan dari semula di kota Kupang menjadi di kota Jakarta. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0030398.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018. Sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisaris OJK No. KEP-189/NB.11/2019 tanggal 1 April 2019, sehubungan dengan perubahan nama tersebut, BRI Ventures telah memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang perusahaan modal ventura atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Sarana Nusa Tenggara Timur Ventura.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir terkait dengan perubahan Pasal 11 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 Februari 2020. Keputusan ini telah dicatat dalam Akta Notaris No. 19 tanggal 12 Februari 2020 oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03.0128050 tanggal 6 Maret 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) (lanjutan)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Ventures adalah menyelenggarakan usaha modal ventura termasuk mengelola dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK serta kegiatan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu pasangan usaha dan atau debitur yang memiliki usaha produktif dan atau memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.

Total aset BRI Ventures pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.047.894 dan Rp1.822.745 atau 0,12% dan 0,11% dari total aset konsolidasian.

Kantor pusat BRI Ventures berlokasi di District 8 Office SCBD, Prosperity Tower Lantai 16 Unit F, Jalan Jenderal Sudirman No 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) (dahulu PT Danareksa Sekuritas)

Pada tanggal 27 September 2018, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan PT Danareksa (Persero) dalam rangka pengambilalihan sebagian kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas ("Danareksa Sekuritas") dari PT Danareksa (Persero) menjadi milik BRI sebanyak 67%, dengan harga pembelian sebesar Rp446.888, dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-1496/PM.21/2018 tanggal 21 Desember 2018. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 21 Desember 2018, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengambilalihan Saham No. 53 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 67% dari total saham Danareksa Sekuritas dan sebesar 33% dimiliki oleh PT Danareksa (Persero).

Anggaran Dasar BRIDS telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan yang dituangkan dalam akta notaris Imas Fatimah, S.H., No. 91 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-83282.AH.01.02.Th.2008 tanggal 10 November 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 Tambahan No. 9870 tanggal 7 April 2009.

Pada tahun 2017 terdapat perubahan pada maksud dan tujuan Perusahaan sesuai ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akta Notaris Ffidiana, S.H., S.S., M.Kn, No. 1 tanggal 5 Juli 2017. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0013998.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 7 Juli 2017.

Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 9 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., Notaris di Jakarta, terkait dengan perubahan nama PT Danareksa Sekuritas menjadi PT BRI Danareksa Sekuritas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0069706.AH.01.02.TAHUN 2020. Sehubungan dengan perubahan nama PT BRI Danareksa Sekuritas telah dicatatkan dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-1210/PM.212/2020 tanggal 26 Oktober 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) (dahulu PT Danareksa Sekuritas) (lanjutan)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRIDS adalah sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek serta kegiatan usaha penunjang lainnya yang ditetapkan dan/atau disetujui oleh OJK.

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-291/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992 dan No. KEP-292/PM/1992 tanggal 16 Oktober 1992.

Sebagai bagian dari perijinan yang telah dimiliki, Perusahaan juga telah memperoleh persetujuan kegiatan usaha penunjang sebagai Penatalaksana (*Arranger*) *Medium Term Notes* (MTN), *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Hybrid Product* seperti *Perpetuity Notes*, pinjaman sindikasi, *Global Medium Term Notes* (GMTN), *Global Bond* dan Penasihat Keuangan (*Financial Advisory*) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-143/PM.21/2017 tanggal 16 Maret 2017.

Total aset BRIDS pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.143.643 dan Rp1.095.479 atau 0,07% dan 0,07% dari total aset konsolidasian.

Kantor pusat BRIDS berlokasi di Gedung BRI II Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav.44-46, Jakarta dan memiliki 10 cabang, 13 Gerai dan 3 kemitraan.

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance)

Pada tanggal 20 Juni 2019, BRI menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat ("PPJB") dengan Dana Pensiun BRI dalam rangka pengambilalihan kepemilikan saham Dana Pensiun BRI dalam PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur ("BRI Insurance") menjadi milik BRI sebanyak 90%, dengan harga pembelian sebesar Rp1.041.000.000.000 (Rupiah penuh) dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK melalui surat No. S-135/NB.1/2019 tanggal 16 September 2019. Pengalihan saham ini telah dilaksanakan secara efektif pada tanggal 26 September 2019, sebagaimana dituangkan dalam Akta Akuisisi Saham No. 31 yang dibuat di hadapan Dina Chozie, SH., notaris pengganti dari Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, dimana BRI memiliki 90% dari total saham BRI Insurance dan sebesar 10% dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pekerja (YKP) BRI.

Anggaran Dasar BRI Insurance telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 03 tanggal 31 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Tri Wahyuwidayati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara lain mengenai perubahan Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan dilakukannya perubahan nama Perseroan dari PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur menjadi PT BRI Asuransi Indonesia ("BRI Insurance"). Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0011603.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan BRI Insurance adalah melaksanakan kegiatan usaha asuransi kerugian, membuat dan menutup perjanjian dari segala asuransi kerugian, asuransi kerugian non-konvensional, termasuk pula perjanjian-perjanjian, reasuransi, terkecuali pertanggungan jiwa.

Perusahaan memperoleh izin usaha di bidang asuransi kerugian pada tanggal 26 Agustus 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.-128/KM.13/1989. Sesuai Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No.KEP-105/NB.11/2020 tanggal 6 Maret 2020, BRI Insurance memperoleh pemberlakuan Izin Usaha di bidang asuransi umum atas izin usaha yang sebelumnya telah diberikan kepada PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur yang selanjutnya berubah nama menjadi PT BRI Asuransi Indonesia.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (lanjutan)

BRI Insurance mendapatkan izin pembukaan kantor cabang dengan prinsip Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-006/KM.6/2003 tanggal 21 Januari 2003.

Total aset BRI Insurance pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.838.163 dan Rp3.048.872 atau 0,23% dan 0,19% dari total aset konsolidasian.

Total pendapatan premi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp999.738 dan Rp712.199 atau 0,66% dan 0,50% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat BRI Insurance berlokasi di Graha BRI Insurance, Jl. Mampang Prapatan Raya No.18, Jakarta Selatan dan memiliki 21 kantor cabang, 2 kantor cabang syariah, 9 kantor perwakilan *marketing*, 2 kantor perwakilan *marketing* syariah, 44 *marketing channel* dan 12 *marketing office* syariah.

PT Pegadaian (Pegadaian)

Pada tanggal 13 September 2021, Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri BUMN dan BRI menandatangani perjanjian pengalihan hak atas saham Negara Republik Indonesia pada PT Pegadaian (Persero) (Pegadaian) dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham BRI, yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 13 tanggal 13 September 2021. Melalui perjanjian tersebut, Negara Republik Indonesia mengalihkan kepada BRI berupa hak atas seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Pegadaian dengan jumlah sebanyak 6.249.999 saham seri B yang seluruhnya senilai Rp48.670.528. Dengan demikian, sejak tanggal 13 September 2021, BRI adalah pemilik saham yang dialihkan dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pemilik dari saham-saham yang dialihkan.

Anggaran Dasar Pegadaian telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 15 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0053287.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 serta telah mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Pegadaian Nomor : AHU-AH.01.03-0454524, tanggal 29 September 2021.

Berdasarkan Akta Pendirian, maksud dan tujuan Pegadaian adalah melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa usaha pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis teknologi informasi/platform digital (untuk selanjutnya disebut "TI") dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Pegadaian untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Pegadaian dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Total aset Pegadaian pada 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp65.156.475 dan Rp70.830.542 atau 3,88% atau 4,40% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp12.834.121 dan Rp13.538.924 atau 8,53% dan 9,54% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat Pegadaian berlokasi di Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat 10430 dan mempunyai 12 kantor wilayah, 61 kantor area, 642 kantor cabang, dan 3.443 kantor unit pelayanan cabang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

f. Entitas Anak (lanjutan)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM)

Pada tanggal 13 September 2021, BRI menandatangani perjanjian pengalihan hak atas saham Negara Republik Indonesia pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam rangka penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham BRI. Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri BUMN mengalihkan kepada BRI berupa hak atas seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PNM dengan jumlah sebanyak 3.799.999 saham seri B yang seluruhnya senilai Rp6.100.068. Dengan demikian, sejak tanggal 13 September 2021, BRI adalah pemilik saham yang dialihkan dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pemilik dari saham-saham yang dialihkan.

Anggaran Dasar PNM telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Nomor 59 tanggal 28 Oktober 2021 dibuat dihadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan tertanggal 2 November 2021 Nomor AHU-0061225.AH.01.02. TAHUN 2021 serta pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 2 November 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0468155.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan PNM adalah jasa pembiayaan termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit program dan/atau pembiayaan sistem tanggung renteng, penyertaan kepada Lembaga Keuangan Mikro/Syariah(LKM/S) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) serta jasa manajemen dan kemitraan.

Total aset PNM pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp43.797.911 dan Rp31.659.127 atau 2,61% dan 1,97% dari total aset konsolidasian. Total pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp8.292.778 dan Rp5.573.049 atau 5,51% dan 3,93% dari total pendapatan bunga, syariah dan premi konsolidasian.

Kantor pusat PNM berlokasi di Menara Taspen Lantai 1,2,6,7,8,10,12,12A,15 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 2 Jakarta dan memiliki 2.916 kantor cabang PNM Mekaar, 62 kantor cabang PNM ULamm dan 626 kantor unit PNM ULamm.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan Tentang Prakarsa Pengungkapan".

Sejak 1 Februari 2021 BRI telah menghentikan pengakuan atas aset dan liabilitas BRIS, sedangkan sebelum 1 Februari 2021, BRIS (entitas anak) yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi *Istishna*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi *Ijarah*" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 tentang "Akuntansi *Sukuk*", PSAK No. 111 tentang "Akuntansi *Wa'd*" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam grup kecuali entitas anak dan kantor cabang tertentu yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan Dolar Hongkong. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BRI dan entitas anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh BRI.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas anak dimulai atau diakhiri dalam suatu periode berjalan maka hasil usaha entitas anak yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu berakhir.

Pengendalian didapat ketika BRI terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak.

BRI mengendalikan entitas anak jika dan hanya jika BRI memiliki hal berikut ini:

- a) Kekuasaan atas entitas anak (hak yang ada saat ini yang memberi kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak).
- b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak.
- c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil BRI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

b. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

Sejak 13 September 2021, BRI menjadi pemegang saham mayoritas dari Pegadaian dan PNM dan memiliki kontrol atas kedua entitas anak tersebut sehingga Pegadaian dan PNM menjadi bagian dari laporan keuangan konsolidasian BRI pada tanggal 31 Desember 2021.

Transaksi kombinasi bisnis antara entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38 "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" dimana selisih harga perolehan yang dibayar dengan nilai tercatat aset neto yang diperoleh dicatat sebagai bagian akun tambahan modal disetor di ekuitas. Berdasarkan PSAK No. 38 tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari PNM dan Pegadaian, untuk periode komparatif sajian laporan keuangan konsolidasian BRI yaitu untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak 1 Januari 2020, PNM dan Pegadaian telah bergabung dalam sepengendalian.

Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BRI dan entitas anak sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan entitas anak menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut.

Kepentingan non-pengendali dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas atas laba neto dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak tersebut.

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, efek-efek, wesel ekspor dan tagihan lainnya, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, piutang pembiayaan, tagihan akseptasi, penyertaan saham dengan metode biaya dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain serta pinjaman dan surat berharga subordinasi.

(i) Klasifikasi

Untuk menentukan kategori dan klasifikasi, BRI dan entitas anak menilai seluruh aset keuangan, kecuali instrumen ekuitas dan derivatif, berdasarkan kombinasi dari model bisnis pengelolaan aset dan karakteristik arus kas kontraktual instrument terkait. Berikut klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan, dalam hal ini instrumen utang, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dengan keuntungan/kerugian diakui pada laba rugi pada saat pelepasan;
- Aset keuangan, dalam hal ini Instrumen ekuitas, yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan/kerugian tidak diakui pada laba rugi pada saat pelepasan; atau
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

BRI dan entitas anak mengklasifikasi dan mengukur instrumen derivatif dan portofolio *trading* pada aset keuangan yang diakui pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal BRI dan entitas anak dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*").

Pada saat pengakuan awal, BRI dan entitas anak dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- a. Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci BRI dan entitas anak;
- b. Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- c. Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, BRI dan entitas anak mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage*;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

BRI dan entitas anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori:

- a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh BRI dan entitas anak untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

BRI dan entitas anak mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;
- Kontrak jaminan keuangan;
- Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar; atau
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajarnya dan perubahan atas nilai wajar tersebut dicatat pada penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya dan perubahan diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- 1) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- 2) BRI dan entitas anak mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*); dan antara (a) BRI dan entitas anak telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI dan entitas anak tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika BRI dan entitas anak telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass-through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan BRI dan entitas anak yang berkelanjutan atas aset tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika (lanjutan):

BRI dan entitas anak melepaskan aset keuangan, seperti kredit yang diberikan, ketika syarat dan kondisi telah direnegosiasi hingga secara substansial, kredit yang diberikan tersebut menjadi baru, dengan perbedaan akan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian dari pelepasan, jika kerugian penurunan nilai belum dicatat. Kredit yang diberikan tersebut akan diklasifikasikan sebagai *Stage 1* untuk penilaian *Expected Credit Losses* (ECL), kecuali kredit yang diberikan tersebut dianggap aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*).

Jika modifikasi tidak akan menghasilkan arus kas yang secara substansi berbeda, maka modifikasi tidak akan berujung pada pelepasan aset. Berdasarkan perbedaan arus kas yang didiskonto pada *Effective Interest Rate* (EIR) awal, Bank akan mencatat keuntungan atau kerugian akibat modifikasi, sampai dengan jumlah kerugian penurunan nilai yang belum diakui.

Penghapusbukuan kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara BRI dan entitas anak dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukuan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai.

Akumulasi keuntungan/kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan BRI dan entitas anak untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

- a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- c. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan lainnya atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari *item* moneter, dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

BRI dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah. Tidak terdapat reklasifikasi untuk liabilitas keuangan.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika BRI dan entitas anak memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan nilai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

BRI dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, BRI dan entitas anak menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan *input* level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

BRI dan entitas anak untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hierarki nilai wajar (Catatan 40).

(x) Aset keuangan sukuk

Berdasarkan PSAK No. 110, entitas anak BRIS menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai berikut:

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

Berdasarkan PSAK No. 110, entitas anak BRIS menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai berikut (lanjutan):

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika:

- 1) Secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan BRI dan entitas anak; (ii) memiliki kepentingan dalam BRI dan entitas anak yang memberikan pengaruh signifikan atas BRI dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas BRI dan entitas anak;
- 2) Suatu pihak yang berelasi dengan BRI dan entitas anak;
- 3) Suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan entitas anak sebagai *venturer*;
- 4) Suatu pihak adalah anggota dari personel manajemen kunci BRI dan entitas anak;
- 5) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- 6) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- 7) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari BRI dan entitas anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan entitas anak.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan Bank telah memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang "Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu", pada saat transaksi-transaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara BRI dan entitas anak dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Pemerintah RI diungkapkan juga pada Catatan 44 tersebut.

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

BRI dan entitas anak mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

BRI dan entitas anak mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian seumur hidup, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- a. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- b. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

BRI dan entitas anak menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risikonya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode berjalan.

Kerugian kredit ekspektasian untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar tidak mengurangi nilai tercatat di dalam aset keuangan di laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu nilai wajar. Kerugian kredit ekspektasian diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan.

Instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar tidak dilakukan penilaian penurunan nilai sesuai PSAK No. 71.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank; dan
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

Aset Keuangan yang Direstrukturasikan

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, BRI dan entitas anak menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Memburuk (lanjutan)

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi; atau
- Sulit untuk mengidentifikasi peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit.

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Berdasarkan proses di atas, BRI dan entitas anak melakukan pembagian atas aset keuangan atas *Stage 1*, *Stage 2*, *Stage 3* dan POCI, sebagai berikut:

- *Stage 1*: Mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk instrumen-instrumen keuangan ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan. Aset keuangan di dalam *Stage 1* termasuk fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan dapat direklasifikasi dari *Stage 2*.
- *Stage 2*: Mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali BRI dan entitas anak merasa risiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk instrumen-instrumen ini, akan berlaku perhitungan ECL Seumur Hidup. ECL Seumur Hidup adalah kerugian kredit ekspektasian yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut. *Stage 2* juga mencakup fasilitas dimana risiko kredit telah membaik dan aset keuangan telah direklasifikasi dari *Stage 3*.
- *Stage 3*: Mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Kelompok ini biasanya terdiri atas debitur yang mengalami gagal bayar. BRI dan entitas anak mencatat cadangan ECL Seumur Hidup.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*) (lanjutan)

Berdasarkan proses di atas, BRI dan entitas anak melakukan pembagian atas aset keuangan atas *Stage 1*, *Stage 2*, *Stage 3* dan POCI, sebagai berikut (lanjutan):

- POCI: Aset POCI adalah aset keuangan yang mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian risiko kredit pada saat pengakuan awal. Aset tersebut dicatat pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, dan pendapatan bunga akan diakui selanjutnya berdasarkan metode suku bunga efektif yang disesuaikan. Cadangan ECL hanya dicatat atau dilepaskan jika ada perubahan selanjutnya pada kerugian kredit ekspektasian.

Terdapat kriteria kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan aset keuangan tercakup dalam *stage* tertentu yang telah diformalkan di dalam Surat Edaran Bank.

Perhitungan penurunan nilai secara individual dilakukan untuk aset keuangan yang signifikan dan pernah mengalami gagal bayar ataupun restrukturisasi. Selain itu, perhitungan penurunan nilai akan dilakukan secara kolektif.

Penurunan nilai individual

Metode perhitungan penurunan nilai secara individual akan mempertimbangkan 3 (tiga) skenario kemungkinan pengembalian, yaitu: (i) skenario dasar (*Base*), (ii) skenario buruk (*Bad*), dan (iii) skenario terburuk (*Worst*). Pembuatan skenario dilakukan dengan menggunakan metode *discounted cash flow* (DCF) dan mempertimbangkan *confidence level* yang menggambarkan kondisi industri dan perusahaan terkait. Nantinya ECL yang dihasilkan oleh masing-masing skenario akan dirata-ratakan secara tertimbang terhadap bobot skenario yang telah diatur.

Penurunan nilai kolektif

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep *Probability of Default* (PD), *Loss Given Default* (LGD), dan *Exposure at Default* (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

BRI dan entitas anak menggunakan model (i) *Skalar Bayesian*, (ii) *Credit Index* dan (iii) *Vasicek* maupun pendekatan lainnya dalam menentukan nilai PD dari setiap debitur.

BRI dan entitas anak menggunakan metode (i) *Historical*, (ii) *Diminish Balance* dan (iii) *Value to Loan* dalam menentukan nilai LGD dari setiap debitur. LGD menggambarkan persentase nominal fasilitas yang tidak akan dapat di-*recover* oleh Bank terhadap debitur *default*. LGD biasa dihitung dengan $1 - \text{Recovery Rate}$. *Recovery rate* dihitung mempertimbangkan *Time Value of Money* dari pengembalian dari kewajiban yang telah *default*. Tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghitung *Time Value of Money* dari *Recovery* adalah EIR awal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan yang Dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk (*Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI*) (lanjutan)

Penurunan nilai kolektif (lanjutan)

EAD merupakan estimasi nilai buku pada saat terjadi gagal bayar, dengan mempertimbangkan arus kas instrumen keuangan terkait, serta kemungkinan penarikan tambahan dari limit kredit sampai dengan tanggal gagal bayar. EAD juga mempertimbangkan jadwal pembayaran dan amortisasi serta perubahan dalam utilisasi saldo yang belum ditarik menjelang terjadinya kegagalan bayar. Pemodelan EAD akan dilakukan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan terkait, yang dibagi ke dalam beberapa kategori: (i) kredit angsuran (ii) kredit *revolving*, (iii) *trade finance* (iv) *treasury*.

Pengukuran ECL berdasarkan PSAK 71 mewajibkan Bank untuk memodelkan ECL sesuai dengan skenario *forward-looking* yang ada, dengan mempertimbangkan kemungkinan ekonomi baik dan buruk. Oleh karena itu, nilai ECL yang dihasilkan Bank harus berdasarkan hasil probabilitas dari tiga skenario (kasus ekonomi normal, baik/*good*, dan buruk/*bad*). PD dan LGD akan dihitung menurut tiga skenario dengan nilai makro-ekonomi sesuai dengan skenario-skenario tersebut. Untuk segmentasi beragunan (*secured*), LGD juga akan dihitung berdasarkan tiga skenario ketika data sudah mencukupi. Bobot dari skenario baik, normal dan buruk dapat disesuaikan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan diskresi BRI dan entitas anak.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Bank tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- Instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Bank menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Bank dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI dan entitas anak menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain adalah penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *Deposit Facility*, *Term Deposit* dan *Deposit Facility Syariah*, sedangkan penempatan dana pada bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang (*inter-bank call money*), deposito berjangka, dan *banker's acceptance*.

Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan diklasifikasikan masing-masing sebagai biaya perolehan diamortisasi.

h. Efek-efek

Efek-efek terdiri atas surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang dan modal seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Obligasi Pemerintah, obligasi subordinasi, unit penyertaan reksadana, *Medium-Term Notes*, *U.S. Treasury Bonds*, *U.S Treasury Bills*, *Singapore Government Securities*, *Negotiable Certificate of Deposits*, *Monetary Authority of Singapore (MAS) bills*, dan surat berharga komersial lainnya serta obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Termasuk di dalam efek-efek adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah yang tidak terkait dengan program rekapitalisasi seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi Pemerintah dalam mata uang asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

h. Efek-efek (lanjutan)

Efek-efek pada awalnya disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, Efek-efek dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi.

Penilaian Efek-efek didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
- 2) Efek-efek yang diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar Efek-efek diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
- 3) Efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas Efek-efek diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas sampai dengan efek-efek tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

i. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Wesel ekspor dan tagihan lainnya adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan secara diskonto dan dijaminan oleh bank lainnya sedangkan wesel tagih merupakan tagihan ataupun dokumen penagihan dalam bentuk wesel/*bill of exchange* kepada pihak tertagih/*drawee* atas dasar diskonto ataupun suatu pembiayaan tertentu. Wesel ekspor dan tagihan lainnya dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh BRI dan entitas anak.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai kini penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai di laporan posisi keuangan konsolidasian.

k. Piutang dan pembiayaan syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan BRIS, dimana BRIS membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode *margin* efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Mudharabah adalah akad pembiayaan kerjasama antara BRIS sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

k. Piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

l. Piutang pembiayaan

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Piutang pembiayaan diakui sebesar investasi bersih yang merupakan nilai wajar dikurangi pendapatan administrasi dan ditambah biaya-biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode tingkat suku bunga efektif. Piutang pembiayaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, nilai wajar investasi bersih dalam sewa pembiayaan merupakan piutang pembiayaan ditambah nilai sisa yang akan diterima pada akhir masa sewa dikurangi dengan pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan dan simpanan jaminan. Selisih antara nilai piutang bruto dan nilai kini piutang diakui sebagai pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui. Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui dialokasikan sebagai pendapatan tahun berjalan menggunakan suku bunga efektif.

m. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *letter of credit* (L/C) yang diaksep oleh bank pengaksep (*accepting bank*).

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi sedangkan liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

n. Investasi pada entitas asosiasi

Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana BRI mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari 20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangkan untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi setelah tanggal perolehan. Bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi diakui dalam laba rugi BRI. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, BRI mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai hasil transaksi-transaksi antara BRI dan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan BRI dalam entitas asosiasi.

Setelah menerapkan metode ekuitas, BRI menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi BRI dalam entitas asosiasi. BRI menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, BRI menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Investasi BRI pada Entitas Asosiasi yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan dibawah 20% dicatat pada nilai wajar sesuai dengan PSAK No. 71.

o. Aset tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	15
Kendaraan bermotor	5
Komputer dan mesin	3 - 5
Perlengkapan kantor	5
Satelit	15
<i>Main System</i>	5
<i>Non Main System</i>	3

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan kedalam laba rugi untuk tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 16).

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif maka perlu dilakukan revaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi pada jumlah tercatat aset tetap terkait, bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

o. Aset tetap (lanjutan)

Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

BRI dan entitas anak menerapkan PSAK 73: Sewa untuk seluruh sewa dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas terkait. BRI menerapkan sewa yang termasuk PSAK 73 atas kelas aset tanah bangunan (landed) dan kendaraan roda empat (empat) dengan aset pendasar bernilai di atas Rp 75.000.000,- dan mempunyai jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan.

Pada tanggal inepsi suatu kontrak, BRI dan entitas anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, BRI dan entitas anak menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian
- BRI dan entitas anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- BRI dan entitas anak memiliki hak untuk mengendalikan aset identifikasian dalam bentuk:
 - a. BRI dan entitas anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset.
 - b. BRI dan entitas anak mempunyai hak untuk menetapkan tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal inepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, BRI dan entitas anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi:

- a. Pembayaran lunas dimuka.
- b. Pembayaran angsuran tetap.
- c. Pembayaran angsuran sewa berubah yang bergantung pada fluktuasi pembayaran sewa yang ditetapkan oleh *counter part*.

BRI dan entitas anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna diukur sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Bunga inkremental sewa mengacu pada *cost corporate bond* Bank dan tingkat suku bunga pinjaman entitas anak.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. BRI dan entitas anak akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, BRI dan entitas anak menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan diperlukan penurunan atas nilai aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis), maka BRI dan entitas anak akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai". Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2c).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

q. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit (disajikan dalam akun "Aset Lain-lain") diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

BRI dan entitas anak mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (*reconditioning cost*) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

r. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI dan entitas anak kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

t. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya

Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.

Giro *wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan diberikan bonus berdasarkan kebijakan BRIS. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di BRIS.

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai sarana perintah pembayaran yang telah disepakati. Giro *mudharabah* dicatat sebesar liabilitas BRIS.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada BRIS, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut BRIS tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas BRIS.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan BRIS atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian antara penyimpan dengan BRI dan Bank Raya. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau yang diperjanjikan.

Deposito berjangka *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka *mudharabah* dan BRIS. Deposito berjangka *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dan BRIS.

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka dan *inter-bank call money* dengan promes yang berjangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari serta dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya tersebut.

Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana *syirkah* temporer yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BRI dan entitas anak kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

v. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan oleh BRI, Bank Raya, BRI Finance, Pegadaian dan PNM adalah Obligasi, *Negotiable Certificate Deposit* (NCD), *Medium Term Notes* (MTN) dan Sukuk Mudharabah. Surat berharga yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Pinjaman dan surat berharga subordinasi

Pinjaman dan surat berharga subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR), sedangkan BRIS (entitas anak) pengukuran biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

y. Provisi

Provisi diakui jika BRI dan entitas anak memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling terkini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

z. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan entitas anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

aa. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ab. Pendapatan dan beban syariah

Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Pendapatan dari transaksi *ijarah* diakui dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri dari beban bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ab. Pendapatan dan beban syariah (lanjutan)

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode margin efektif. Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, BRIS mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati.

ac. Pendapatan premi dan beban klaim

Premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Premi kontrak asuransi bukan jangka pendek diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Premi yang diterima sebelum diterbitkannya polis asuransi atau tanggal premi jatuh tempo dicatat sebagai titipan premi.

Premi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai deposit melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

Premi reasuransi bruto diakui sebagai beban pada saat dibayarkan atau pada tanggal di mana polis tersebut efektif.

Klaim dan manfaat asuransi merupakan klaim-klaim yang telah disetujui (*approved claim*). Klaim dan manfaat tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai klaim reasuransi pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

Klaim dan manfaat asuransi terkait kontrak investasi dan jumlah komponen risiko keuangan kontrak asuransi dicatat sebagai penarikan (*withdrawal*) melalui laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai penyesuaian terhadap akun liabilitas kontrak investasi.

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi

Liabilitas kontrak asuransi

a. Liabilitas manfaat polis masa depan

Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Liabilitas manfaat polis masa depan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi bukan jangka pendek.

Kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan liabilitas manfaat polis masa depan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ad. Liabilitas kontrak asuransi dan reasuransi (lanjutan)

Liabilitas kontrak asuransi (lanjutan)

b. Estimasi liabilitas klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan klaim dalam proses penyelesaian yang ditentukan berdasarkan estimasi kerugian dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, termasuk klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (*Incurred but not reported (IBNR)*).

Perubahan dalam estimasi liabilitas klaim diakui dalam laba rugi tahun berjalan. Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dikeluarkan atau dibatalkan.

c. Premi yang belum merupakan pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian premi yang telah dilunasi, namun belum merupakan pendapatan karena masa pertanggungan asuransi masih berjalan pada akhir tahun. Premi yang belum merupakan pendapatan merupakan liabilitas atas kontrak asuransi jangka pendek.

Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggungan yang besarnya ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah proteksi yang diberikan selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi asuransi jangka pendek.

Kenaikan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan sedangkan penurunan premi yang belum merupakan pendapatan diakui sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan. Liabilitas ini dihentikan pengakuannya pada saat kontrak berakhir, dilepaskan atau dibatalkan.

Reasuransi

BRI Life dan BRI Insurance mensesikan risiko asuransi dalam bisnis normal pada setiap lini bisnisnya.

Manfaat BRI Life dan BRI Insurance atas kontrak reasuransi yang dimiliki diakui sebagai aset reasuransi. Aset ini terdiri dari piutang yang bergantung pada klaim yang diperkirakan dan manfaat yang timbul dalam kontrak reasuransi terkait. Sebagaimana disyaratkan oleh PSAK No. 62, aset reasuransi tidak saling hapus dengan liabilitas kontrak asuransi terkait.

Piutang reasuransi diestimasi secara konsisten dengan klaim yang disetujui terkait dengan kebijakan reasuradur dan sesuai dengan kontrak reasuransi terkait.

BRI Life dan BRI Insurance mereasuransikan sebagian risiko atas ekspektasi pertanggungan yang diperoleh kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi. Jumlah premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sebagai premi reasuransi sesuai periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dibukukan sehubungan dengan kontrak asuransi tersebut.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* liabilitas manfaat polis masa depan, *ceded* estimasi liabilitas klaim, dan *ceded* premi yang belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ad. Liabilitas kontrak asuransi, dan reasuransi (lanjutan)

Reasuransi (lanjutan)

Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti objektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa BRI Life dan BRI Insurance tidak dapat menerima seluruh jumlah karena di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, BRI Life dan BRI Insurance mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laba rugi tahun berjalan.

Aset atau liabilitas reasuransi dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktualnya hilang atau berakhir, atau ketika kontrak dialihkan kepada pihak lain.

ae. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Merupakan iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BRI. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS dan program manfaat lain manfaat dana tambahan dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan peraturan yang berlaku.

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iv) Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain yang tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.
- (v) Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.
- (vi) Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

af. Opsi saham

Biaya kompensasi saham pada tanggal penerbitan dihitung berdasarkan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" berdasarkan program hak yang diakui pada tahun berjalan (*cliff-vesting scheme*) dengan metode garis lurus selama masa tunggu (*vesting period*). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas. Nilai wajar dari opsi saham tersebut dinilai dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Black-Scholes*.

ag. Laba per lembar saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk BRI dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Laba per lembar saham dilusian dihitung setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar.

ah. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

BRI dan entitas anaknya menyelenggarakan catatan akuntansi dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang timbul dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1 Dolar Amerika Serikat	14.252,50	14.050,00
1 Pound Sterling Inggris	19.250,86	19.012,46
1 Yen Jepang	123,77	135,97
1 Euro Eropa	16.112,46	17.234,43
1 Dolar Hong Kong	1.828,03	1.812,30
1 Riyal Arab Saudi	3.796,00	3.744,50
1 Dolar Singapura	10.554,67	10.606,18
1 Ringgit Malaysia	3.417,67	3.481,17
1 Dolar Australia	10.346,61	10.752,47
1 Renminbi	2.235,72	2.150,26
1 Baht Thailand	428,52	468,10
1 Franc Swiss	15.585,02	15.900,87
1 Dolar Kanada	11.192,92	10.980,86
1 Dolar Brunei Darussalam	10.360,56	10.213,36
1 Kroner Denmark	2.166,50	2.316,42
1 Won Korea Selatan	11,98	12,94
1 Dolar Selandia Baru	9.732,32	10.087,90
1 Kina Papua Nugini	4.061,98	3.951,60
1 Dirham Uni Emirat Arab	3.880,19	3.825,06
1 Kroner Swedia	1.570,60	1.713,65
1 Kroner Norwegia	1.613,49	1.635,74
1 Rupee India	191,96	191,65
1 Peso Filipina	279,49	292,47
1 Rupee Pakistan	1,99	1,99
1 Dolar Taiwan	513,22	499,77
1 Dong Vietnam	0,63	0,61

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ai. Penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dan Perwakilan di luar negeri

BRI memiliki 1 (satu) Entitas Anak di Hong Kong, 5 (lima) Kantor Cabang di New York, Cayman Islands, Singapura, dan Timor-Leste dan Taipei serta 1 (satu) Kantor Perwakilan masing-masing di New York dan Hong Kong yang merupakan entitas asing yang terpisah.

Untuk tujuan penggabungan laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun entitas anak, kantor cabang dan perwakilan di luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs sebagai berikut:

- a. Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.
- b. Pendapatan, beban, laba dan rugi - menggunakan kurs tengah rata-rata yang berlaku pada bulan yang bersangkutan. Saldo akhir tahun merupakan penjumlahan saldo bulanan pendapatan, beban, laba dan rugi selama tahun yang bersangkutan.
- c. Pos ekuitas - Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor menggunakan kurs historis.
- d. Laporan arus kas - menggunakan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan, kecuali pos-pos laba rugi yang menggunakan kurs tengah rata-rata dan pos-pos ekuitas yang menggunakan kurs historis.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai "Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing".

aj. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2c).

Derivatif melekat tidak lagi dipisahkan dari kontrak utama non derivatif yang merupakan aset keuangan/liabilitas keuangan, BRI dan entitas anak mengklasifikasikan aset/liabilitas keuangan secara keseluruhan berdasarkan model bisnis dan jangka waktu kontraktualnya sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2c.

ak. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

ak. Perpajakan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan, Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika BRI dan entitas anak mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masing-masing entitas tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

al. Informasi segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari BRI dan entitas anak yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen operasi), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

BRI dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu Direksi.

BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen operasi) yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi, lainnya dan entitas anak, serta berdasarkan segmen geografis.

Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Timor-Leste dan Taipei.

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak sebagai berikut:

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2 : Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Kontinjensi

Manajemen BRI dan entitas anak sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum BRI dan entitas anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen BRI dan entitas anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. BRI dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali BRI dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang pembiayaan

Manajemen BRI dan entitas anak menelaah portofolio kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang pembiayaan setiap tahun, untuk menilai penurunan nilai dengan memperbarui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas terkait.

Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, BRI dan entitas anak membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah serta piutang pembiayaan (lanjutan)

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status pembayaran kelompok peminjam, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. BRI dan entitas anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Manajemen BRI menentukan bahwa surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penurunan nilai aset non-keuangan

BRI dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Manajemen BRI dan entitas anak mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan dalam hal terdapat kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dikompensasi terhadap kerugian yang dapat digunakan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

BRI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Nilai kini atas imbalan kerja

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

am. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Liabilitas Klaim

Estimasi liabilitas klaim merupakan liabilitas yang disisihkan untuk memenuhi liabilitas klaim yang terjadi dan yang masih dalam proses penyelesaian atas polis-polis asuransi yang masih berlaku (*policies in force*). Pertimbangan manajemen BRI diperlukan untuk menentukan jumlah estimasi liabilitas klaim yang dapat diakui.

Liabilitas Manfaat Polis Masa Depan

BRI mencatat liabilitas kontrak asuransi jangka panjang dengan metode nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan. Asumsi utama yang mendasari metode tersebut adalah pengalaman klaim masa lalu dan tingkat diskonto.

an. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif

Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, BRI dan Bank Raya tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif, namun manajemen BRI tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Atas aset non produktif, manajemen BRI dan Bank Raya menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

ao. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2021, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan konsolidasian, yaitu:

- a. PSAK No. 22 (Amandemen 2019), "Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis", Amandemen ini yang diadopsi dari Amandemen IFRS 3 *Business Combinations: Definition of Business* merupakan hasil dari *joint project* antara *International Accounting Standards Board* (IASB) dan *US Financial Accounting Standards Board* (FASB). Amandemen ini mengklarifikasi definisi bisnis dengan tujuan untuk membantu entitas dalam menentukan apakah suatu transaksi seharusnya dicatat sebagai kombinasi bisnis atau akuisisi aset.
- b. Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", Amendemen PSAK No 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK No. 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2. Amendemen ini menjelaskan tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang *Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2*.
- c. PSAK No. 112, "Akuntansi Wakaf", efektif 1 Januari 2021, dan penerapan lebih awal diizinkan. PSAK ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi wakaf dari donor korporasi kepada penerima individu dan korporasi.

Penerapan PSAK di atas, tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

ap. Tanggung jawab sosial dan lingkungan

Berdasarkan PER-05/MBU/04/2021, istilah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) tidak digunakan lagi dan diganti menjadi TJSL (Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan). Alokasi dana tidak dialokasikan dari saldo laba berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan tetapi diakui dan dibebankan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		25.083.698		31.291.635
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	38.585.104	549.934	31.599.011	443.966
Ringgit Malaysia	102.947.505	351.840	9.755.822	33.962
Dolar Singapura	11.087.901	117.029	14.765.055	156.601
Riyal Arab Saudi	24.988.835	94.858	27.325.087	102.319
Dolar Taiwan	77.958.740	40.010	180.423.440	90.169
Euro Eropa	1.567.913	25.263	2.836.914	48.893
Yen Jepang	71.981.156	8.909	161.285.585	21.929
Dirham Uni Emirat Arab	1.665.346	6.462	2.573.096	9.842
Dolar Australia	532.360	5.508	3.628.475	39.015
Renminbi	1.973.778	4.413	1.472.480	3.166
Dolar Hong kong	2.153.537	3.937	4.902.304	8.884
Dolar Brunei Darussalam	215.527	2.233	482.763	4.931
Dolar Selandia Baru	161.118	1.568	262.053	2.643
Pound Sterling Inggris	69.916	1.346	229.201	4.358
Franc Swiss	54.629	851	204.369	3.250
Kina Papua Nugini	159.540	648	142.050	561
Baht Thailand	1.444.625	619	11.053.645	5.174
Dolar Kanada	35.005	392	103.155	1.134
Won Korea Selatan	21.069.694	252	39.247.287	508
Rupiah India	658.333	127	649.827	125
Peso Filipina	222.530	62	1.936.110	566
Dong Vietnam	22.112.164	14	2.227.982.164	1.357
		1.216.275		983.353
Total		26.299.973		32.274.988

Saldo kas sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebesar Rp4.729.997 dan ASD721.540 (angka penuh) pada tanggal 31 Desember 2021 serta Rp6.041.368 dan ASD819.580 (angka penuh) pada tanggal 31 Desember 2020.

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Giro pada Bank Indonesia terdiri atas:

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
Rupiah		47.402.684		43.139.976
Dolar Amerika Serikat	633.144.322	9.023.889	597.223.683	8.390.993
Total		56.426.573		51.530.969

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, di dalam giro pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Nihil dan Rp1.084.299.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, GWM dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) PBI No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang telah diubah tiga kali dengan PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021. PBI tersebut dijelaskan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah tujuh kali melalui PADG No. 20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019, PADG No. 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 dan PADG No. 23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021. Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dihitung melalui PBI No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang telah diubah empat kali dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020 dan PBI No. 23/17/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dijelaskan melalui PADG No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang sebagaimana telah diubah dengan PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 dan PADG No. 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020. Pemenuhan rasio-rasio tersebut di atas masing-masing ditentukan sebesar sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Rupiah</u>		
- GWM Primer	3,50%	3,00%
(i) GWM secara harian*)	0,50	0,00
(ii) GWM secara rata-rata	3,00	3,00
- PLM (d/h GWM Sekunder)	6,00	6,00
<u>Mata uang asing</u>	4,00%	4,00%
(i) GWM secara harian	2,00	2,00
(ii) GWM secara rata-rata	2,00	2,00

*) Bagi bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi mendapatkan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada PADG No. 22/04/PADG/2020 dan PADG No. 22/35/PADG/2020 pasal dua ayat tiga sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. PLM adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN) yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank.

Berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, penyebutan *Loan to Funding Ratio* (LFR) berubah menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), dan kewajiban pemenuhan Giro RIM mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. Giro RIM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara RIM yang dimiliki oleh Bank dan RIM Target. Giro RIM dikenakan jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia yang sebesar 14%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM BRI (entitas induk) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Rupiah</u>		
- GWM Primer*)	4,47%	3,19%
(i) GWM secara harian*)	0,50	0,00
(ii) GWM secara rata-rata	3,97	3,19
- PLM (d/h GWM Sekunder)	16,82	16,51
<u>Mata uang asing</u>	4,13%	4,01%
(i) GWM secara harian	2,00	2,00
(ii) GWM secara rata-rata	2,13	2,01

*) Setelah dikurangi insentif sesuai PADG No. 22/04/PADG.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BRI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang rasio-rasio tersebut di atas.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang:

	<u>31 Desember 2021</u>		<u>31 Desember 2020</u>	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		1.318.346		848.101
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	503.398.899	7.174.694	355.168.646	4.990.119
Dolar Singapura	93.336.344	985.134	84.695.915	898.300
Yen Jepang	5.542.706.584	686.021	4.218.430.566	573.559
Renminbi	218.200.425	487.835	166.762.336	358.582
Euro Eropa	20.184.588	325.223	50.845.490	876.293
Dolar Australia	29.739.205	307.700	29.495.659	317.151
Dolar Hong Kong	152.587.912	278.935	107.852.226	195.460
Pound Sterling Inggris	8.615.660	165.859	10.960.757	208.391
Taiwan Dollar	227.797.266	116.910		-
Franc Swiss	4.911.892	76.552	5.366.022	85.324
Dolar Selandia Baru	6.806.488	66.243	3.117.449	31.449
Riyal Arab Saudi	11.570.198	43.920	17.272.344	64.676
Kroner Swedia	12.337.485	19.377	48.791.612	83.612
Dirham Uni Emirat Arab	2.904.815	11.271	27.548.333	105.374
Dolar Kanada	824.101	9.224	590.529	6.485
Kroner Norwegia	3.418.541	5.516	2.877.408	4.707
Ringgit Malaysia	969.095	3.312	176.978	616
Baht Thailand	1.006.682	431	1.010.568	473
		10.764.157		8.800.571
		12.082.503		9.648.672
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		1.948.346		2.561.822
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	1.366.630	19.478	800.378	11.245
Dolar Hong Kong	8.079.938	14.770	24.569.597	44.527
		34.248		55.772
		1.982.594		2.617.594
Total		14.065.097		12.266.266
Cadangan kerugian penurunan nilai		(29.078)		(93.843)
Total - Bersih		14.036.019		12.172.423

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Bank:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	522.520	20.954
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	188.980	85.435
PT Bank Central Asia Tbk	120.740	270.888
PT Bank Permata Tbk	88.348	80.644
PT Bank MNC Internasional Tbk	76.444	16.091
PT Bank Mega Syariah	74.361	141.626
Lainnya	246.953	232.463
	<u>1.318.346</u>	<u>848.101</u>
<u>Mata uang asing</u>		
J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	3.863.022	2.925.377
Standard Chartered Bank	1.461.687	1.764.602
Citibank N.A.	938.559	429.023
Bank of America	795.892	576.623
The Bank of New York Mellon	711.845	190.116
Bank of China, Ltd	438.909	338.481
MUFG Bank, Ltd	414.669	528.333
Lainnya	2.139.574	2.048.016
	<u>10.764.157</u>	<u>8.800.571</u>
	<u>12.082.503</u>	<u>9.648.672</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.056.092	849.706
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	504.703	1.163.378
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	209.764	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	177.787	368.557
PT Bank Syariah Mandiri	-	87.855
PT Bank BNI Syariah	-	92.326
	<u>1.948.346</u>	<u>2.561.822</u>
<u>Mata uang asing</u>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	19.478	7.730
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	14.770	48.042
	<u>34.248</u>	<u>55.772</u>
	<u>1.982.594</u>	<u>2.617.594</u>
Total	14.065.097	12.266.266
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.078)	(93.843)
Bersih	<u>14.036.019</u>	<u>12.172.423</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020, semua giro pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rupiah	0,10%	0,18%
Mata uang asing	0,13	0,10

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan.

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Nilai tercatat awal	12.266.266	-	-	12.266.266
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	1.798.831	-	-	1.798.831
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	14.065.097	-	-	14.065.097
	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Nilai tercatat awal	10.237.736	-	-	10.237.736
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	2.028.530	-	-	2.028.530
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	12.266.266	-	-	12.266.266

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan).

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	93.843	-	-	93.843
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(64.765)	-	-	(64.765)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	29.078	-	-	29.078

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Giro pada Bank Lain</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	24
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	24	-	-	24
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	93.819	-	-	93.819
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	93.843	-	-	93.843

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

- e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan).

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tidak terdapat giro pada bank lain yang dibatasi penggunaannya. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 giro pada bank lain mengalami penurunan nilai secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

- a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Bank Indonesia				
<i>Term Deposit</i>		18.996.446		5.697.836
<i>Deposit Facility</i>		8.372.946		683.682
<i>Deposit Facility Syariah</i>		-		500.000
		27.369.392		6.881.518
 <i>Inter-bank call money</i>				
PT Bank Mega syariah		110.000		135.000
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk		70.038		103.300
PT Bank Nationalnobu Tbk		31.200		50.000
PT Bank Victoria International Tbk		25.000		56.500
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk		20.000		-
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk		15.000		-
PT BPD Kalimantan Tengah		10.000		-
Lembaga Keuangan Lainnya		22.550		742.550
		303.788		1.087.350
 <i>Deposito Berjangka</i>				
PT Bank DKI		256.950		415.500
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		134.014		-
PT Bank OCBC NISP Tbk		92.501		-
PT BPD Jawa Timur Tbk		83.500		-
PT Bank Pan Indonesia Tbk		78.500		-
PT Maybank Indonesia Tbk		61.500		61.500
PT Bank Bukopin Tbk		38.200		4.600
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		35.000		35.000
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk		25.000		-
PT Bank Mega Tbk		20.000		20.000
PT Bank Permata Tbk		18.750		40.000
PT Bank Jabar Banten Syariah		10.000		500
Lembaga Keuangan Lainnya		68.927		141.770
		922.842		718.870

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<i>Deposito on call</i>				
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk		23.700		13.100
		23.700		13.100
		28.619.722		8.700.838
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Bank Indonesia				
<i>Term Deposit</i>	1.499.998.333	21.378.726	3.494.833.577	49.102.412
		21.378.726		49.102.412
<i>Inter-bank call money</i>				
Federal Reserve Bank	139.202.024	1.983.977	181.955.872	2.556.480
The Bank of New York Mellon Corporation	138.400.000	1.972.546	186.700.000	2.623.135
Wells Fargo Bank, N.A	86.100.000	1.227.140	52.900.000	743.245
TD Bank, N.A	14.291.337	203.687	4.954.759	69.614
PT Bank BNP Paribas Indonesia	5.566.355	79.334	4.043.737	56.814
JP Morgan Chase Bank, N.A	1.830.000	26.082	4.190.000	58.870
United Overseas Bank Singapura	1.135.492	16.184		-
Citibank, N.A		-	112.100.000	1.575.005
		5.508.950		7.683.163
<i>Deposito berjangka</i>				
U.S. Bankcorp	44.080.130	628.253	4.226.636	59.384
PT Bank Mega Tbk	2.904.386	41.395		-
PT Bank ICBC Indonesia	2.577.596	36.737		-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.500.849	35.643		-
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	1.200.000	17.103	2.900.000	40.745
TD Bank, N.A.	638.515	9.100	488.943	6.870
		768.231		106.999
<i>Penempatan lainnya</i>				
<i>(Banker's Acceptance)</i>				
PT Bank Woori Saudara				
Indonesia 1906 Tbk	10.000.000	142.525	20.000.000	281.000
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		-	4.350.000	61.118
		142.525		342.118
<u>Dolar Singapura</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
UOB Singapore		-	799.174	8.476
		-		8.476
		27.798.432		57.243.168
		56.418.154		65.944.006

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		7.000		-
		7.000		-
<i>Deposit on Call</i>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		-		3.000
		-		3.000
<i>Deposito berjangka</i>				
PT Bank Tabungan				
Negara (Persero) Tbk		553.250		561.400
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		324.200		-
PT Bank Negara Indonesia				
(Persero) Tbk		265.900		228.650
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		34.000		42.100
PT Bank Syariah Mandiri		-		12.000
PT Bank BNI Syariah		-		6.500
		1.177.350		850.650
		1.184.350		853.650
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	85.000.000	1.211.463	75.000.000	1.053.750
		1.211.463		1.053.750
<u>Dolar Singapura</u>				
<i>Inter-bank call money</i>				
PT Bank Negara Indonesia				
(Persero) Tbk	16.000.000	168.875		-
		168.875		-
		1.380.338		1.053.750
		2.564.688		1.907.400
Total		58.982.842		67.851.406
Cadangan kerugian penurunan nilai		(6.177)		(18.070)
Bersih		58.976.665		67.833.336

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

b) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu penempatan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	28.467.608	8.695.838
> 1 bulan - 3 bulan	106.600	5.000
> 3 bulan - 1 tahun	-	-
> 1 tahun	45.514	-
	<u>28.619.722</u>	<u>8.700.838</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	27.577.775	48.533.996
> 1 bulan - 3 bulan	78.132	8.428.172
> 3 bulan - 1 tahun	142.525	-
> 1 tahun	-	281.000
	<u>27.798.432</u>	<u>57.243.168</u>
	<u>56.418.154</u>	<u>65.992.006</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	1.111.850	853.650
> 1 bulan - 3 bulan	72.500	-
	<u>1.184.350</u>	<u>853.650</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	168.875	843.000
> 1 bulan - 3 bulan	855.150	-
> 3 bulan - 1 tahun	142.525	140.500
> 1 tahun	213.788	70.250
	<u>1.380.338</u>	<u>1.053.750</u>
	<u>2.564.688</u>	<u>1.907.400</u>
Total	58.982.842	67.851.406
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.177)	(18.070)
Bersih	<u>58.976.665</u>	<u>67.833.336</u>

c) Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, semua penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain diklasifikasikan "Lancar".

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

d) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia	2,81%	3,21%
Penempatan pada Lembaga Keuangan Lain	0,00	3,46
<u>Mata Uang Asing</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia	0,02%	0,08%
Penempatan pada Lembaga Keuangan Lain	0,39	0,72

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan.

	31 Desember 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Penempatan pada BI dan Lembaga</u>				
<u>Keuangan Lain</u>				
Nilai tercatat awal	67.851.406	-	-	67.851.406
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	58.982.842	-	-	58.982.842
Aset Keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(67.851.406)	-	-	(67.851.406)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	58.982.842	-	-	58.982.842
31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Penempatan pada BI dan Lembaga</u>				
<u>Keuangan Lain</u>				
Nilai tercatat awal	116.854.727	-	-	116.854.727
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	67.851.406	-	-	67.851.406
Aset Keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(116.854.727)	-	-	(116.854.727)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	67.851.406	-	-	67.851.406

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan).

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	18.070	-	-	18.070
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	6.177	-	-	6.177
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(18.070)	-	-	(18.070)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	6.177	-	-	6.177
31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Penempatan pada BI dan Lembaga Keuangan Lain</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	668
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	668	-	-	668
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	18.070	-	-	18.070
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(668)	-	-	(668)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	18.070	-	-	18.070

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain yang dibatasi penggunaannya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN (lanjutan)

- e) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan).

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya mengalami penurunan nilai secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah kerugian penurunan nilai telah memadai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

7. EFEK-EFEK

- a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis:

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Reksadana		3.348.260		3.279.238
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>		127.009		49.419
Obligasi Subordinasi		48.909		48.313
Obligasi		18.829		18.511
Lainnya		63.513		87.480
		3.606.520		3.482.961
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Reksadana	130.252.584	1.856.425	332.234.586	4.667.896
Obligasi	2.389.613	34.058		-
<i>U.S. Treasury Bond</i>		-	1.054.531	14.816
Lainnya	3.407.037	48.559	4.229.395	59.423
		1.939.042		4.742.135
<u>Dolar Singapura</u>				
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>		-	1.000.000	10.606
		-		10.606
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia		10.201.667		18.358.072
Reksadana		1.605.811		336.835
Obligasi		114.228		275.864
Obligasi Subordinasi		2.057		-
Lainnya		1.414.190		687.495
		13.337.953		19.658.266
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	7.686.427	109.551	11.108.388	156.073
Obligasi		-	4.915.950	69.069
Lainnya	574.414	8.187		-
		117.738		225.142
<u>Euro Eropa</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia		-	2.708.198	46.674
		-		46.674
		19.001.253		28.165.784

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Reksadana		5.396.406		473.676
Obligasi		4.009.535		3.032.475
Obligasi Subordinasi		101.046		196.344
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>		67.444		582.047
Lainnya		114.307		153.766
		9.688.738		4.438.308
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Sertifikat Bank Indonesia	688.382.033	9.811.165	759.730.066	10.674.207
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	56.659.069	807.533	55.409.192	778.499
Obligasi	16.369.209	233.302	13.478.482	189.373
<i>U.S. Treasury Bills</i>		-	14.999.734	210.746
		10.852.000		11.852.825
<u>Dolar Singapura</u>				
<i>Monetary Authority of Singapore (MAS) Bills</i>	103.956.406	1.097.226	76.980.563	816.470
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>	41.190.980	434.757	37.928.360	402.275
		1.531.983		1.218.745
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia		110.394.198		109.882.540
Obligasi		8.691.219		9.737.241
Reksadana		2.403.750		-
<i>Medium-Term Note</i>		67.397		341.167
Obligasi Subordinasi		25.717		-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>		-		98.415
Lainnya		134.579		141.189
		121.716.860		120.200.552
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	3.697.815.700	52.703.118	3.440.535.854	48.339.529
Obligasi	274.645.031	3.914.378	140.936.158	1.980.153
		56.617.496		50.319.682
<u>Euro Eropa</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	51.020.204	822.061	52.804.334	910.053
		822.061		910.053
<u>Yen Jepang</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	2.401.480.492	297.231		-
		297.231		-
		201.526.369		188.940.165

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

a) Berdasarkan Tujuan, Mata Uang dan Jenis (lanjutan):

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>				
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi		177.035		409.984
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>		96.676		-
Obligasi Subordinasi		34.056		35.065
<i>Medium-Term Note</i>		-		50.000
Lainnya		1.027		5.698
		308.794		500.747
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Lainnya	1.442.057.612	20.552.926	193.461.866	2.718.139
		20.552.926		2.718.139
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia		96.923.657		78.609.483
Obligasi		1.021.704		1.359.413
<i>Medium-Term Note</i>		11.000		36.000
Obligasi Subordinasi		7.000		-
		97.963.361		80.004.896
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	2.226.276.817	31.730.010	1.854.581.018	26.056.863
Obligasi	23.234.802	331.154	34.487.241	484.546
		32.061.164		26.541.409
<u>Euro Eropa</u>				
Obligasi Pemerintah Indonesia	39.396.899	634.781	25.209.935	434.479
		634.781		434.479
		151.521.026		110.199.670
Total		372.048.648		327.305.619
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(311.120)		(348.941)
Bersih		371.737.528		326.956.678

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, semua efek-efek diklasifikasikan "Lancar", kecuali pada 31 Desember 2020, Obligasi I Tahun 2003 yang diterbitkan oleh PT Great River International Tbk diklasifikasikan "Macet" yang dimiliki oleh BRI Life (entitas anak), dimana obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp758.

Atas hal tersebut di atas, pada tanggal 31 Desember 2020 manajemen BRI Life telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp758.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

c) Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo:

Klasifikasi jangka waktu efek-efek berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	13.295.259	7.932.026
> 1 bulan - 3 bulan	1.027	5.698
> 3 bulan - 1 tahun	282.576	312.536
> 1 tahun	25.190	171.756
	<u>13.604.052</u>	<u>8.422.016</u>
 <u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	17.702.075	19.043.814
> 1 bulan - 3 bulan	5.024.317	444.151
> 3 bulan - 1 tahun	12.149.559	1.054.485
	<u>34.875.951</u>	<u>20.542.450</u>
	<u>48.480.003</u>	<u>28.964.466</u>
 <u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	135.449.861	139.858.817
> 1 bulan - 3 bulan	67.074	122.090
> 3 bulan - 1 tahun	3.357.525	9.552.385
> 1 tahun	94.143.714	70.330.422
	<u>233.018.174</u>	<u>219.863.714</u>
 <u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	58.199.727	51.501.551
> 1 bulan - 3 bulan	509.431	168.648
> 3 bulan - 1 tahun	3.474.664	1.400.796
> 1 tahun	28.366.649	25.406.444
	<u>90.550.471</u>	<u>78.477.439</u>
	<u>323.568.645</u>	<u>298.341.153</u>
Total	<u>372.048.648</u>	<u>327.305.619</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(311.120)	(348.941)
Bersih	<u>371.737.528</u>	<u>326.956.678</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit:

d.1. Obligasi Pemerintah

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds*, *U.S. Treasury Bills* dan *Singapore Government Securities*. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Rupiah</u>		
Surat Perbendaharaan Negara	5.922.455	11.586.330
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>	2.269.614	2.187.408
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	1.210.388	2.996.361
Obligasi Pemerintah Sukuk	591.438	1.274.953
Obligasi Republik Indonesia	207.772	313.020
	10.201.667	18.358.072
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah Sukuk	88.622	77.648
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat	20.929	78.425
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	-	46.674
<i>Singapore Government Securities</i> (SIGB)	-	10.606
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	-	14.816
	109.551	228.169
	10.311.218	18.586.241
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>	69.326.102	71.274.544
Obligasi Pemerintah Sukuk	35.049.032	33.314.783
Obligasi Republik Indonesia	3.579.404	1.891.155
Surat Perbendaharaan Negara	1.893.798	1.619.435
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	545.862	1.782.623
	110.394.198	109.882.540

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Obligasi Pemerintah merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam rangka pengelolaan portofolio surat utang negara tersebut, seperti Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Pemerintah valuta asing yang diperoleh melalui pasar perdana dan juga pasar sekunder, termasuk *U.S. Treasury Bonds*, *U.S. Treasury Bills* dan *Singapore Government Securities*. Rincian Obligasi Pemerintah adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>(lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat	29.049.399	28.602.080
Obligasi Pemerintah Sukuk	23.653.719	19.737.449
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	822.061	910.053
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	807.533	778.499
<i>Singapore Government Securities</i> (SIGB)	434.757	402.275
Obligasi Pemerintah Yen Jepang	297.231	-
<i>U.S. Treasury Bills</i>	-	210.746
	55.064.700	50.641.102
	165.458.898	160.523.642
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>		
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>	79.260.623	53.497.079
Obligasi Pemerintah Sukuk	17.551.078	25.007.050
Obligasi Republik Indonesia	111.956	70.983
Surat Perbendaharaan Negara	-	34.371
	96.923.657	78.609.483
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat	17.420.836	14.264.437
Obligasi Pemerintah Sukuk	14.309.174	11.792.426
Obligasi Pemerintah Euro Eropa	634.781	434.479
	32.364.791	26.491.342
	129.288.448	105.100.825
Total	305.058.564	284.210.708

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
<u>Rupiah</u>		
Surat Perbendaharaan Negara	Beragam	Beragam
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
FR0061	7,00	15 Mei 2022
FR0063	5,63	15 Mei 2023
FR0070	8,38	15 Maret 2024
FR0077	8,13	15 Mei 2024
FR0081	6,50	15 Juni 2025
FR0084	7,25	15 Februari 2026
FR0086	5,50	15 April 2026
FR0087	6,50	15 Februari 2031
FR0090	5,31	15 April 2027
FR0091	6,38	15 april 2023
Surat Perbendaharaan Negara Syariah	Beragam	Beragam
Obligasi Pemerintah Sukuk		
PBS002	5,45	15 Januari 2022
PBS003	6,00	15 Januari 2027
PBS017	6,13	15 Oktober 2025
PBS026	6,63	15 Oktober 2024
PBS027	6,50	15 Mei 2023
PBS029	6,38	15 Maret 2034
PBS031	4,00	15 Juli 2024
PBS032	4,88	15 Juli 2026
SR012	6,30	10 Maret 2023
SR013	6,05	10 September 2023
Obligasi Republik Indonesia		
ORI016	6,80	15 Oktober 2022
ORI017	6,40	15 Juli 2023
ORI018	5,70	15 Oktober 2023
ORI019	5,57	15 Februari 2024
ORI020	4,95	15 Oktober 2024
<u>Mata uang asing</u>		
Obligasi Pemerintah Sukuk		
INDOIS 22	3,40	21 November 2022
INDOIS 22A	3,40	29 Maret 2022
INDOIS 23	3,75	1 Maret 2023
INDOIS 24	4,35	10 September 2024
INDOIS 24A	3,90	20 Agustus 2024
INDOIS 25	4,33	28 Mei 2025
INDOIS 26	4,55	29 Maret 2026
INDOIS 27	4,15	29 Maret 2027
INDOIS 28	4,40	1 Maret 2028
INDOIS 29	4,45	20 Februari 2029

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.1. Obligasi Pemerintah (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga dan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>		
Obligasi Pemerintah <i>Fixed Rate</i>		
Dolar Amerika Serikat		
RI0122	3,70	8 Januari 2022
RI0123	2,95	11 Januari 2023
RI0124	5,88	15 Januari 2024
RI0125	4,13	15 Januari 2025
RI0126	4,75	8 Januari 2026
RI0229	4,75	11 Februari 2029
RI0422	3,75	25 April 2022
RI0423	3,38	15 April 2023
RI0727	3,85	18 Juli 2027
RI1023	5,38	17 Oktober 2023
Obligasi Pemerintah Euro Eropa		
RIEUR0227	0,90	14 Februari 2027
RIEUR0333	1,10	12 Maret 2033
RIEUR0623	2,63	14 Juni 2023
RIEUR0724	2,15	18 Juli 2024
RIEUR0725	3,38	30 Juli 2025
RIEUR0729	1,00	28 Juli 2029
Obligasi Pemerintah Yen Jepang		
RIJPY0524	0,33	27 Mei 2024
RIJPY0526	0,57	27 Mei 2026
<i>U.S. Treasury Bonds</i>	Beragam	Beragam
<i>U.S Treasury Bills</i>	-	Beragam
<i>Singapore Government Securities</i>		
SIGB 0625	2,38	1 Juni 2025
SIGB 0626	2,13	1 Juni 2026
SIGB 1125	0,50	1 November 2025

Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain" berkisar dari 93,47% sampai dengan 139,47% dan 94% sampai dengan 157,20% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Indosat Tbk	10.963	10.592
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.130	5.137
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.736	2.782
	18.829	18.511
<u>Mata Uang Asing</u>		
PT Indonesia Infrastructure Finance	34.058	-
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	63.585	100.655
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	24.944	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	13.250	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	7.405	55.033
PT Timah (Persero) Tbk	5.044	4.955
PT Pupuk Indonesia (Persero)	-	55.123
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	22.626
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	20.696
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	16.776
	114.228	275.864
<u>Mata Uang Asing</u>		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	54.020
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	15.049
	-	69.069
	167.115	363.444
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	662.293	433.518
PT Astra Sedaya Finance	637.088	441.156
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	566.469	600.216
PT Federal International Finance	319.067	150.976
PT Bank Pan Indonesia Tbk	313.068	129.998
PT Candra Asri Petrochemical	248.354	18.154
PT Indonesia Infrastrukture Financial	190.928	16.469
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	189.932	123.051
PT Bank Maybank Indonesia Finance	183.632	24.541
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	168.951	195.552
Lainnya	529.753	898.844
	4.009.535	3.032.475

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>		
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>		
<u>Mata Uang Asing</u>		
PT Indonesia Infrastructure Finance	68.116	-
Bank of America	9.147	9.452
Citigroup. Inc.	7.927	8.173
JP Morgan Chase Bank. N.A	7.594	7.878
The Royal Bank of Canada	5.801	5.954
Verizon Communications. Inc.	5.726	5.910
Stanley Black & Decker. Inc.	5.660	5.642
Bank Nova Scotia	5.448	5.330
Enterprise Products Operating. LLC	5.411	5.546
Berkshire Hathaway. Inc.	5.379	4.671
Lainnya	107.093	130.817
	<u>233.302</u>	<u>189.373</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk	1.186.714	1.392.283
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1.039.035	1.133.196
PT Pupuk Indonesia (Persero)	926.582	278.174
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	895.789	872.833
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	802.789	1.044.633
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	634.553	589.026
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	607.170	800.687
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	426.870	553.208
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	414.028	713.650
PT Utama Karya (Persero)	311.426	273.306
Lainnya	1.446.263	2.086.245
	<u>8.691.219</u>	<u>9.737.241</u>
<u>Mata Uang Asing</u>		
PT Pertamina (Persero)	1.081.256	717.857
PT Indonesia Asahan Aluminium	956.684	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	486.730	319.186
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	478.143	334.488
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	394.940	315.232
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	199.989	138.858
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	165.921	-
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	135.503	136.860
PT Utama Karya (Persero)	15.212	17.672
	<u>3.914.378</u>	<u>1.980.153</u>
	<u>16.848.434</u>	<u>14.939.242</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Indosat Tbk	78.331	92.960
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	65.674	-
PT Indonesia Infrastructure Finance	20.000	70.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000	10.000
PT Aneka Gas Industri Tbk	3.030	3.062
Lainnya	-	233.962
	177.035	409.984
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	377.334	378.571
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	200.195	200.257
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	152.580	261.649
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	83.055	223.426
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	75.000	-
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	35.000	35.000
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	30.163	30.489
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	30.000	30.000
PT Bank Mandiri Taspen	18.004	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.373	-
PT Industri Kereta Api	10.000	10.000
Lainnya	-	190.021
	1.021.704	1.359.413
<u>Mata Uang Asing</u>		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	162.710	204.778
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	57.023	56.058
PT Pertamina (Persero)	50.844	164.199
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	38.040	37.196
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	22.537	22.315
	331.154	484.546
	1.529.893	2.253.943
Total	18.545.442	17.556.629

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga</u>			
<u>Rupiah</u>			
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk			
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri C	8,40	14 Juli 2022	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017 Seri C	8,90	22 Maret 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2017 Seri C	7,55	12 Desember 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018 Seri D	7,50	21 Maret 2023	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri D	9,00	16 Agustus 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019 Seri C	9,50	23 Januari 2024	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019 Seri B	8,60	16 April 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019 Seri C	9,15	16 April 2024	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019 Seri B	7,80	4 Oktober 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019 Seri C	8,10	4 Oktober 2024	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020 Seri B	7,90	7 Juli 2023	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri A	4,25	03 Agustus 2022	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri B	5,50	23 Juli 2024	idAAA
PT Aneka Gas Industri			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri B	9,90	5 Desember 2022	A-(idn)
Sukuk <i>Ijarah</i> berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri B	9,90	5 Desember 2022	A-(idn)sy
Sukuk <i>Ijarah</i> berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019 Seri B	11,00	19 Maret 2022	A-(idn)sy
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019 Seri A	11,00	19 Maret 2022	A-(idn)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Astra Sedaya Finance			
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017 Seri C	7,65	2 November 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2019 Seri C	9,20	13 Februari 2024	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2019 Seri B	7,70	23 Oktober 2022	idAAA
Seri C	7,95	23 Oktober 2024	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2020 Seri B	7,00	27 Maret 2023	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri B	6,35	15 April 2024	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2021 Seri B	5,30	22 Oktober 2024	idAAA
PT Bank CIMB Niaga Tbk			
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,15	23 Agustus 2022	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2017 Seri C	7,75	2 November 2022	idAAA
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2017 Seri C	8,80	20 September 2023	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019	7,80	19 Desember 2024	idAAA
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri B	7,55	19 Desember 2022	idAAA
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri B	7,90	21 Agustus 2022	idAAA
Tahap II Tahun 2019 Seri C	8,25	21 Agustus 2024	idAAA
Tahap III Tahun 2020 Seri B	7,00	27 Maret 2023	idAAA
Sukuk <i>Mudharabah</i> Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 Seri C	7,25	27 Maret 2025	idAAA
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk			
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 Seri A	7,55	26 November 2022	idAAA
Seri B	7,75	26 November 2024	idAAA
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018	7,60	27 Februari 2023	idAA
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,15	6 Desember 2022	idAA-
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2019 Seri B	8,50	18 Oktober 2024	idAA-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri B	9,10	12 Desember 2022	idAA-
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri C	9,00	1 Maret 2025	idAA-
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2020 Seri B	8,20	29 Oktober 2028	idAA-
PT Federal International Finance			
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 Seri B	8,55	25 Juni 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 Seri B	7,25	7 Oktober 2023	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 Seri B	6,25	8 Juni 2024	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 Seri A	4,60	18 Juni 2022	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri A	3,60	7 November 2022	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2021 Seri B	5,30	27 Oktober 2024	idAAA
PT Bank Maybank Indonesia Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri A	8,00	11 Juli 2022	AAA***
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri C	8,65	11 Juli 2027	AAA***
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2018	7,15	15 Maret 2023	AAA***
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	8,80	26 Oktober 2023	idAAA
PT Indonesia Infrastructure Finance			
Tahap I Tahun 2016 Seri C	9,00	19 Juli 2023	idAAA
Tahap I Tahun 2019 Seri B Tahap II Tahun 2020	7,75	18 Desember 2022	idAAA
Seri B	6,65	21 Oktober 2023	idAAA
PT Maybank Indonesia Finance			
Berkelanjutan I Tahap IV Tahun 2017 Seri B	7,90	15 November 2022	AA+(idn)
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018 Seri B	8,00	17 Mei 2023	AA+(idn)
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019 Seri A	9,00	2 April 2022	AA+(idn)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Indosat Tbk			
Obligasi VIII Tahun 2012 Seri B	8,88	27 Juni 2022	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri B	11,20	8 Desember 2025	idAAA(sy)
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2015 Seri D	11,20	8 Desember 2025	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri E	9,25	31 Mei 2027	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri E	8,65	9 November 2027	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	7,65	3 Mei 2023	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri E	8,70	3 Mei 2028	idAAA
PT Medco Energi Internasional Tbk			
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 Seri C	11,30	14 Juni 2022	idA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 Seri B	9,15	29 Maret 2023	idA+
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
Bank of America			
Tahun 2026	1,32	19 Juni 2026	A2**)
Tahun 2026	3,50	19 April 2026	A2**)
Tahun 2031	2,50	13 Februari 2031	A2**)
Tahun 2031	1,92	24 Oktober 2031	A2**)
The Bank of Nova Scotia			
Tahun 2024	0,70	15 April 2024	A2**)
Tahun 2025	1,30	11 Juni 2025	A2**)
Tahun 2025	4,50	16 Desember 2025	Baa1**)
Berkshire Hathaway, Inc.			
Tahun 2023	2,75	15 Maret 2023	Aa2**)
Tahun 2030	1,85	12 Maret 2030	Aa2**)
Citigroup, Inc.			
Tahun 2024	3,75	16 Juni 2024	A3**)
Tahun 2028	3,52	27 Oktober 2028	A3**)
Tahun 2031	2,67	29 Januari 2031	A3**)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>			
<u>Dolar Amerika Serikat (lanjutan)</u>			
Enterprise Products Operating LLC			
Tahun 2023	3,35	15 Maret 2023	Baa1**)
Tahun 2028	4,15	16 Oktober 2028	Baa1**)
JP Morgan Chase Bank, N.A			
Tahun 2025	3,22	1 Maret 2025	A2**)
Tahun 2026	2,01	13 Maret 2026	A2**)
Tahun 2029	4,45	5 Desember 2029	A2**)
PT Indonesia Infrastructure Finance	1,50	27 Januari 2026	BBB***)
The Royal Bank of Canada			
Tahun 2024	2,55	16 Juli 2024	A2**)
Tahun 2025	1,15	10 Juni 2025	A2**)
Tahun 2026	4,65	27 Januari 2026	Baa1**)
Stanley Black & Decker, Inc.			
Tahun 2024	3,70	23 Oktober 2024	A1**)
Tahun 2027	3,63	20 Januari 2027	A1**)
Tahun 2027	1,59	4 Mei 2027	A1**)
Tahun 2031	2,70	22 Januari 2031	A1**)
Verizon Communications, Inc.			
Tahun 2028	4,33	21 September 2028	Baa1**)
Tahun 2032	2,36	15 Februari 2032	Baa1**)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>			
<u>Rupiah</u>			
PT Adhi Karya (Persero) Tbk			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2012	9,25	22 Juni 2022	idA-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016			
Seri B	8,50	30 September 2023	idAAA
Seri C	8,65	30 September 2026	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017			
Seri A	8,00	15 Juni 2022	idAAA
Seri B	8,50	15 Juni 2024	idAAA
Seri C	8,65	15 Juni 2027	idAAA
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2018			
Seri A	8,50	21 September 2023	idAAA
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020			
Seri A	7,75	12 Mei 2025	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017	8,00	11 Juli 2022	idAAA
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	7,90	5 Juni 2022	idAA+
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	7,90	27 Maret 2027	idAA+
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 Seri C	10,00	8 Juli 2022	idAA+
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,50	13 Juli 2022	idAA+
Seri D	8,90	13 Juli 2027	idAA+
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 Seri B	8,75	28 Juni 2022	idAA+
Seri C	9,00	28 Juni 2024	idAA+
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 Seri B	7,80	19 Agustus 2023	idAA+
PT Bank Mandiri Taspen Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019 Seri B	8,20	26 November 2024	idAA
PT Utama Karya (Persero) Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016	8,55	21 Desember 2026	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	8,07	6 Juni 2027	idAAA
Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2017 Seri A	7,80	26 September 2022	idAAA
PT Industri Kereta Api (Persero) <i>Mudharabah</i> I Tahun 2020	9,35	24 Februari 2023	idBBB+(sy)
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Berkelanjutan II Tahun 2017 Seri A	7,75	21 November 2022	idAA+
Seri B	8,25	21 November 2024	idAA+
Berkelanjutan II Tahun 2019 Seri A	7,75	13 Desember 2024	idAA+
Seri B	8,20	13 Desember 2026	idAA+

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2016			
Seri D	8,50	22 November 2023	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2017			
Seri C	8,90	23 Februari 2022	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2017			
Seri B	7,90	15 Agustus 2022	idAAA
Seri C	8,25	15 Agustus 2024	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2018			
Seri B	6,70	14 Februari 2023	idAAA
Seri C	6,90	14 Februari 2025	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2018			
Seri C	8,30	6 Juni 2025	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2018			
Seri C	8,40	5 September 2023	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018			
Seri D	9,75	8 November 2025	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019			
Seri B	8,40	23 April 2022	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap IV Tahun 2019			
Seri C	8,90	23 April 2024	idAAA
Seri D	9,25	23 April 2026	idAAA
Seri E	9,50	23 April 2029	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap V Tahun 2019			
Seri B	8,45	9 Juli 2022	idAAA
Seri C	8,70	9 Juli 2024	idAAA
Seri D	9,20	9 Juli 2026	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VI Tahun 2019			
Seri D	8,50	3 September 2026	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019			
Seri D	8,50	29 Oktober 2026	idAAA
Seri E	8,75	29 Oktober 2029	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VIII Tahun 2019			
Seri C	8,10	6 Desember 2026	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			
Tahap IX Tahun 2007 Seri B	10,90	10 Juli 2022	idAAA
Tahap XII Tahun 2010 Seri B	10,40	8 Juli 2022	idAAA
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 Seri B	8,25	5 Juli 2023	idAAA
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60	10 Desember 2023	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,20	3 November 2027	idAAA
Seri D	8,70	3 November 2032	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri C	7,25	22 Februari 2028	idAAA
Seri E	8,75	22 Februari 2038	idAAA
Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	9,00	10 Oktober 2025	idAAA
Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2019 Seri B	9,10	19 Februari 2024	idAAA
Seri D	9,60	19 Februari 2029	idAAA
Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri A	8,00	1 Agustus 2024	idAAA
Seri B	8,50	1 Agustus 2026	idAAA
Seri C	8,70	1 Agustus 2029	idAAA
Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 Seri A	7,90	1 Oktober 2024	idAAA
Seri B	8,40	1 Oktober 2026	idAAA
Seri D	9,40	1 Oktober 2034	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VII Tahun 2019 Seri D	9,10	6 Mei 2030	idAAA
Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 Seri A	7,20	18 Februari 2025	idAAA
Seri B	7,70	18 Februari 2027	idAAA
Seri C	8,00	18 Februari 2030	idAAA
Seri D	8,70	18 Februari 2035	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 Seri A	6,70	8 September 2025	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Tahap V Tahun 2010 Seri B	10,40	8 Juli 2022	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 Seri B	9,60	10 Desember 2023	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 Seri A	7,70	11 Juli 2022	idAAA
Tahun 2017 Seri B	8,50	11 Juli 2027	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017 Seri C	8,70	3 November 2032	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (lanjutan)			
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2018 Seri A	6,50	22 Februari 2023	idAAA
Tahun 2018 Seri B	7,25	22 Februari 2028	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri B	9,00	10 Oktober 2025	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 Seri A	7,90	1 Oktober 2024	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2019 Seri B	8,50	1 Agustus 2026	idAAA
Sukuk <i>Ijarah</i> Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 Seri C	8,75	18 Februari 2035	idAAA
PT Pupuk Indonesia (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 Seri B	8,60	12 Juli 2024	AAA(idn)
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 Seri B	7,90	9 November 2022	AAA(idn)
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2020 Seri A	7,00	3 September 2023	AAA(idn)
Seri B	7,70	3 September 2025	AAA(idn)
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2021 Seri A	5,60	10 Maret 2024	AAA(idn)
Seri B	6,20	10 Maret 2026	AAA(idn)
Seri C	7,20	10 Maret 2028	AAA(idn)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2018 Seri C	6,95	20 Februari 2023	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VII Tahun 2019 Seri B	8,80	12 Februari 2022	idAAA
Seri C	9,25	12 Februari 2024	idAAA
Berkelanjutan IV Tahap VIII Tahun 2019 Seri B	8,45	22 Maret 2022	idAAA
Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2019 Seri B	8,50	4 Juli 2022	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019 Seri A	7,80	28 Agustus 2022	idAAA
Seri B	8,10	28 Agustus 2024	idAAA
Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2020 Seri B	7,50	18 Februari 2025	idAAA
Berkelanjutan V Tahap IV Tahun 2020 Seri B	8,10	14 Juli 2025	idAAA

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)			
(lanjutan)			
EBA SP SMF BTN05 Kelas A Seri A1	8,50	7 Mei 2032	idAAA
Berkelanjutan V Tahap V tahun 2021			
Seri B	5,75	10 Februari 2024	idAAA
Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2021	6,00	17 November 2026	idAAA
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II			
Tahap I Tahun 2021	5,60	8 Juli 2024	idAAA
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)			
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2019			
Seri B	8,50	25 Juni 2022	idAAA
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2019			
Seri D	8,50	28 Agustus 2026	idAAA
Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2019			
Seri B	7,75	30 Oktober 2022	idAAA
Seri C	7,95	30 Oktober 2024	idAAA
Seri D	8,30	30 Oktober 2026	idAAA
Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2019			
Seri A	7,80	28 Agustus 2022	idAAA
Seri B	8,10	28 Agustus 2024	idAAA
Sukuk <i>Mudharabah</i> I Tahap II Tahun 2019			
Seri A	8,50	28 Agustus 2026	idAAA
Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2020			
Seri B	7,60	21 Juli 2023	idAAA
Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2020			
Seri A	6,30	11 Desember 2023	idAAA
Seri B	6,70	11 Desember 2025	idAAA
PT Semen Indonesia (Persero)			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017			
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019			
Seri A	9,00	28 Mei 2024	idAA+
PT Telekomunikasi Indonesia			
(Persero) Tbk			
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015			
Seri A	9,93	23 Juni 2022	idAAA
Seri B	10,25	23 Juni 2025	idAAA
Seri D	11,00	23 Juni 2045	idAAA
PT Timah (Persero) Tbk			
Sukuk <i>Jarah</i> Berkelanjutan I Tahap II			
Tahun 2019	8,75	15 Agustus 2024	idA(sy)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.2. Obligasi (lanjutan)

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Tingkat Suku Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*)
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>			
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Berkelanjutan III 2021 Seri B	6,10	24 September 2026	idAAA
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Berkelanjutan II Tahap 1 Tahun 2021	8,25	8 September 2024	idA
<u>Mata Uang Asing</u>			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2024	3,75	11 April 2024	BBB-***)
Tahun 2025	4,75	13 Mei 2025	BBB-***)
Tahun 2026	2,00	19 April 2026	BBB-***)
PT Hutama Karya (Persero) Tbk Tahun 2030	3,75	11 Mei 2030	BBB-***)
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tahun 2023	5,71	15 November 2023	BBB-***)
Tahun 2025	4,75	15 Mei 2025	BBB-***)
Tahun 2028	3,02	15 November 2028	BBB-***)
Tahun 2030	5,45	15 Mei 2030	BBB-***)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Tahun 2025	4,25	5 Mei 2025	BBB-***)
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tahun 2023	4,50	2 Mei 2023	BBB-***)
Tahun 2024	4,88	1 Oktober 2024	BBB-***)
PT Pertamina (Persero) Tahun 2022	4,88	3 Mei 2022	BBB***)
Tahun 2023	4,30	20 Mei 2023	BBB***)
Tahun 2029	3,65	30 Juli 2029	BBB***)
Tahun 2030	3,10	21 Januari 2030	BBB***)
Tahun 2031	2,30	9 Februari 2031	BBB***)
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2024	5,13	16 Mei 2024	BBB-***)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2027	4,13	15 Mei 2027	BBB***)
Tahun 2028	5,45	21 Mei 2028	BBB***)
Tahun 2029	5,38	25 Januari 2029	BBB***)
Tahun 2030	3,38	5 Februari 2030	BBB***)
Tahun 2050	4,00	30 Juni 2050	BBB***)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tahun 2026	2,05	11 Mei 2026	BBB***)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

***) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch Ratings

*****) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Standard & Poor's

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Schroder Investment Management Indonesia	2.203.315	2.128.820
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	1.078.632	452.225
PT Sucorinvest Asset Management	31.177	61.705
PT BNP Paribas Investment Partners	18.243	15.758
PT Avrist Asset Management	10.317	10.184
PT Insight Investments Management	6.576	7.996
PT Ashmore Asset Management Indonesia	-	58.046
PT Panin Asset Management	-	42.502
PT Mega Capital Investama	-	20.781
PT RHB Asset Management Indonesia	-	12.576
Lainnya	-	468.645
	<u>3.348.260</u>	<u>3.279.238</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	1.420.291	2.112.386
PT BNP Paribas Asset Management	427.407	714.162
PT Schroder Investment Management Indonesia	8.727	434.456
PT Ashmore Asset Management Indonesia	-	1.406.892
	<u>1.856.425</u>	<u>4.667.896</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Danareksa Investment Management	1.539.516	170.890
PT Bahana TCW Investment Management	54.657	131.442
PT Mandiri Manajemen Investasi	11.638	34.503
	<u>1.605.811</u>	<u>336.835</u>
	<u>6.810.496</u>	<u>8.283.969</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan):

d.3. Reksadana (lanjutan)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Nilai Wajar melalui Penghasilan</u>		
<u>Komprehensif Lain</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Trimegah Asset Management	1.812.280	473.676
PT Syailendra Capital	1.507.439	-
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia	758.100	-
PT Sucorinvest Asset Management	704.687	-
PT Berdikari Manajemen Investasi	575.237	-
PT Mega Capital Investama	20.782	-
PT Ashmore Aset Management Indonesia	17.881	-
	<u>5.396.406</u>	<u>473.676</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bahana TCW Investment Management	925.232	-
PT BNI Asset Management	750.591	-
PT Danareksa Investment Management	705.350	-
PT Mandiri Manajemen Investasi	22.577	-
	<u>2.403.750</u>	<u>-</u>
	<u>7.800.156</u>	<u>473.676</u>
Total	<u>14.610.652</u>	<u>8.757.645</u>

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/ nilai tercatat	
				<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>					
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Maybank Indonesia Tbk					
Tahun 2020 Seri C	50.000	4,28	8 Apr 2021	-	49.419
XIII tahun 2021	60.000	4,07	29 Sept 2022	58.165	-
PT BPD Bali					
I Tahun 2021	20.000	4,75	24 Nov 2022	19.304	-
PT Bank DKI					
Tahun 2021 Seri A	50.000	4,25	9 Mar 2022	49.540	-
				<u>127.009</u>	<u>49.419</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan)

d.4. *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)* (lanjutan)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/ nilai tercatat	
				31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>					
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.					
V Tahap II Tahun 2020 Seri C	200.000	5,26	22 Jul 2021	-	194.876
V Tahap I Tahun 2020 Seri D	150.000	5,70	18 Feb 2021	-	149.160
PT Bank Maybank Indonesia Tbk					
XII Tahun 2020 Seri C	50.000	5,12	13 Ags 2021	-	48.576
XIV Tahun 2021	70.000	3,75	8 Des 2022	67.444	-
PT Bank Commonwealth					
VII Tahap I Tahun 2020	190.000	5,94	29 Jan 2021	-	189.435
				67.444	582.047
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					
Tahap I Tahun 2020 Seri D	100.000	5,80	7 Mei 2021	-	98.415
				-	98.415
				67.444	680.462
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>					
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Maybank Indonesia Tbk					
XIV Tahun 2021	70.000	3,75	9 Sept 2022	67.605	-
PT Bank DKI					
Tahun 2021 Seri B	30.000	4,65	8 Des 2022	29.071	-
				96.676	-
Total				291.129	729.881

d.5. Obligasi Subordinasi

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank KEB Hana Indonesia		
Seri I Tahun 2016	33.438	33.170
PT Bank Central Asia Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri B	15.471	15.143
	48.909	48.313

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan)

d.5. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)</u>		
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	2.057	-
	50.966	48.313
 <u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Permata Tbk		
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	-	36.685
PT Bank Pan Indonesia Tbk		
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	40.297	40.183
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2014	-	30.855
Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	24.365	24.312
PT Bank UOB Indonesia		
Seri I Tahun 2014	-	28.641
Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	21.541	21.059
PT Bank KEB Hana Indonesia		
Seri I Tahun 2016	9.708	9.630
PT Bank Central Asia Tbk		
Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018 Seri A	5.135	4.979
	101.046	196.344
 <u>Pihak berelasi</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	25.717	-
	126.763	196.344

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan)

d.5. Obligasi Subordinasi (lanjutan)

	Nilai Wajar/Nilai Tercatat	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>		
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Subordinasi I 2015	34.056	35.065
	34.056	35.065
<u>Pihak berelasi</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	7.000	-
	41.056	35.065
Total	218.785	279.722

Informasi mengenai tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan peringkat adalah sebagai berikut:

	Tingkat Bunga Per Tahun (%)	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat ^{*)}	
			31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank KEB Hana Indonesia Seri I Tahun 2016	9,95	21 Des 2023	AA(idn)	AA(idn)
PT Bank Central Asia Tbk Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2018				
Seri A	7,75	5 Jul 2025	idAA	idAA
Seri B	8,00	5 Jul 2030	idAA	idAA
PT Bank Maybank Indonesia Tbk Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016	9,63	10 Jun 2023	AA(idn)	AA(idn)
PT Bank Permata Tbk Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2014	11,75	24 Okt 2021	-	idAA
PT Bank Pan Indonesia Tbk Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017	10,25	17 Mar 2024	idA+	idA+
PT Bank UOB Indonesia Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017	9,25	17 Okt 2024	AA(idn)	AA(idn)
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Subordinasi I 2015	12,25	18 Des 2022	idA	idA
<u>Pihak berelasi</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Syariah Indonesia Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I Tahun 2016	9,25	16 Nov 2023	idA+	-

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

d) Berdasarkan Jenis dan Penerbit (lanjutan)

d.6. *Medium-Term Note* (MTN)

	Nilai Nominal	Tingkat Bunga per Tahun (%) ¹⁾	Tanggal Jatuh Tempo	Nilai wajar/ Nilai tercatat	
				31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>					
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
Perum Perumnas					
Tahap III Tahun 2018 Seri A	60.000	11,25	10 Des 2023	67.397	61.542
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk					
Tahap I Tahun 2018 Seri C	100.000	8,35	4 Sep 2021	-	101.645
PT Kimia Farma (Persero) Tbk					
Tahap II Tahun 2018	36.000	7,75	15 Mar 2021	-	36.380
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)					
Tahap X Tahun 2020	40.000	5,25	5 Des 2021	-	40.351
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk					
Tahap I Tahun 2018	100.000	10,50	28 Des 2021	-	101.249
				67.397	341.167
<u>Biaya perolehan diamortisasi</u>					
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk					
Seri VII Tahun 2018	50.000	10,25	20 Apr 2021	-	50.000
				-	50.000
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bio Farma (Persero)					
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)					
VIII Seri A	11.000	11,00	26 Jun 2024	11.000	11.000
				11.000	36.000
				11.000	86.000
Total				78.397	427.167

¹⁾ Bunga diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

e) Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah memadai.

f) Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rupiah	6,73%	6,90%
Dolar Amerika Serikat	3,88	4,09
Euro Eropa	2,44	2,79
Dolar Singapura	0,98	1,33
Yen Jepang	0,61	-

g) BRI mengakui keuntungan yang belum direalisasi-neto dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan dalam "Nilai Wajar melalui Laba Rugi" sebesar Rp120.067 dan Rp342.351 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

h) BRI mengakui keuntungan neto atas penjualan efek-efek sebesar Rp3.452.785 dan Rp2.871.331 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang dilaporkan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

i) Efek-efek sejumlah nominal Rp31.083.001 dan Rp33.906.302 masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 23).

j) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Nilai tercatat awal	188.940.165	-	-	188.940.165
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	13.144.585	-	-	13.144.585
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	152.501.486	-	-	152.501.486
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(153.099.314)	-	-	(153.099.314)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	39.447	-	-	39.447
Nilai tercatat akhir	201.526.369	-	-	201.526.369

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

j) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	110.198.912	-	758	110.199.670
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	8.391.059	-	-	8.391.059
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	123.192.423	-	-	123.192.423
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(90.575.264)	-	-	(90.575.264)
Penghapusbukuan	-	-	(758)	(758)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	313.896	-	-	313.895
Nilai tercatat akhir	151.521.026	-	-	151.521.026
31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Nilai tercatat awal	124.153.732	-	-	124.153.732
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(5.315.721)	-	-	(5.315.721)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	115.009.231	-	-	115.009.231
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(46.132.091)	-	-	(46.132.091)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.225.014	-	-	1.225.014
Nilai tercatat akhir	188.940.165	-	-	188.940.165

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

j) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	53.974.385	-	758	53.975.143
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	60.039.476	-	-	60.039.476
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.970.110)	-	-	(3.970.110)
Penghapusbukuan				
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	155.161	-	-	155.161
Nilai tercatat akhir	110.198.912	-	758	110.199.670
31 Desember 2021				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	979.846	-	-	979.846
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(297.227)	-	-	(297.227)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	212.919	-	-	212.919
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(317.552)	-	-	(317.552)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(23.230)	-	-	(23.230)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir^{*)}	554.756	-	-	554.756

*) Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain sehingga nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

j) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	348.183	-	758	348.941
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(161.776)	-	-	(161.776)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	120.678	-	-	120.678
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(16.321)	-	-	(16.321)
Penghapusbukuan	-	-	(758)	(758)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	20,356	-	-	20,356
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	311.120	-	-	311.120
31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	111.385
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	111.385	-	-	111.385
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	491.402	-	-	491.402
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	510.852	-	-	510.852
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(30.281)	-	-	(30.281)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(103.512)	-	-	(103.512)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir^{*)}	979.846	-	-	979.846

*) Cadangan kerugian kredit ekspektasian atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain sehingga nilai tercatatnya disajikan sebesar nilai wajarnya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

j) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	758
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	43.093
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	43.093	-	758	43.851
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	99.772	-	-	99.772
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	103.696	-	-	103.696
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.888)	-	-	(1.888)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	103.510	-	-	103.510
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	348.183	-	758	348.941

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Wesel Tagih		6.880.260		6.211.397
Surat Kredit Berdokumen				
Dalam Negeri (SKBDN)		1.891.478		3.956.830
Wesel Ekspor		1.884.650		2.416.160
Tagihan Lainnya		1.371.456		412.784
		12.027.844		12.997.171
<u>Mata uang asing</u>				
Surat Kredit Berdokumen				
Dalam Negeri (SKBDN)				
Dolar Amerika Serikat		-	870.862	12.236
Euro Eropa		-	3.021	51
Renminbi		-	2.006.235	4.314
		-		16.601
Wesel Ekspor				
Dolar Singapura	222.699.088	2.350.515		-
Dolar Amerika Serikat	55.929.764	797.139	357.954.093	5.029.255
Renminbi	288.027.134	643.948	255.016.373	548.350
		3.791.602		5.577.605

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>				
Wesel Tagih				
Dolar Amerika Serikat	619.249.281	8.825.850	458.573.808	6.442.962
Dolar Singapura	148.772.294	1.570.242	-	-
Euro Eropa	14.494.199	233.537	1.769.995	30.505
Renminbi	4.718.257	10.549	30.432.774	65.437
		10.640.178		6.538.904
Tagihan Lainnya				
Dolar Singapura	95.478.576	1.007.745	1.209.427	12.827
Dolar Amerika Serikat	23.504.142	349.245	40.228.362	565.208
Yen Jepang	12.010.000	1.486	90.011.140	12.238
Euro Eropa	77.850	1.254	1.914.500	32.995
Renminbi	-	-	1.750.000	3.763
		1.359.730		627.031
		15.791.510		12.760.141
		27.819.354		25.757.312
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Wesel Tagih		1.033.257		235.310
Wesel Ekspor		191.210		1.362
Surat Kredit Berdokumen				
Dalam Negeri (SKBDN)		174.286		313.852
Tagihan Lainnya		86.812		112.818
		1.485.565		663.342
<u>Mata uang asing</u>				
Wesel Ekspor				
Dolar Amerika Serikat	45.874	654	7.271.280	102.161
Tagihan Lainnya				
Dolar Amerika Serikat	22.096.522	314.931	56.995.915	800.793
Euro Eropa	2.581.042	41.587	11.887.485	204.874
Pound Sterling Inggris	110.859	2.134	342.956	6.520
Dolar Singapura	-	-	3.424.607	36.322
Franc Swiss	-	-	105.664	1.680
		358.652		1.050.189
		359.306		1.152.350
		1.844.871		1.815.692
Total		29.664.225		27.573.004
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1.142.349)		(1.326.190)
Bersih		28.521.876		26.246.814

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, semua wesel ekspor dan tagihan lainnya diklasifikasikan "Lancar", kecuali senilai Rp 287.465 dengan kolektibilitas "Dalam Perhatian Khusus" dan Rp 654 dengan kolektibilitas "Macet" tanggal 31 Desember 2021, serta Rp65.867 dengan kolektibilitas "Kurang Lancar" pada tanggal 31 Desember 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu wesel ekspor dan tagihan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
≤ 1 bulan	7.434.111	6.257.818
> 1 bulan - 3 bulan	13.782.300	10.562.414
> 3 bulan - 1 tahun	6.602.943	8.937.080
	<u>27.819.354</u>	<u>25.757.312</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
≤ 1 bulan	502.333	539.838
> 1 bulan - 3 bulan	787.417	630.024
> 3 bulan - 1 tahun	555.121	645.830
	<u>1.844.871</u>	<u>1.815.692</u>
Total	<u>29.664.225</u>	<u>27.573.004</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1.142.349)</u>	<u>(1.326.190)</u>
Bersih	<u>28.521.876</u>	<u>26.246.814</u>

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan.

	<u>31 Desember 2021</u>			<u>Total</u>
	<u>Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan</u>	<u>Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk</u>	<u>Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk</u>	
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Nilai tercatat awal	23.327.544	4.217.965	-	27.545.509
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(279.877)	277.262	-	(2.615)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	29.628.032	48.088	654	29.676.774
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(23.327.544)	(4.217.965)	-	(27.545.509)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(9.934)	-	-	(9.934)
	<u>29.338.221</u>	<u>325.350</u>	<u>654</u>	<u>29.664.225</u>
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	27.495
Nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	(27.495)
Nilai tercatat akhir	<u>29.338.221</u>	<u>325.350</u>	<u>654</u>	<u>29.664.225</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan).

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Nilai tercatat awal	30.292.051	4.003.283	22.165	34.317.499
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(702)	523	-	(179)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	23.327.636	4.217.422	-	27.545.058
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(30.291.441)	(4.003.331)	(22.165)	(34.316.937)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	-	68	-	68
	23.327.544	4.217.965	-	27.545.509
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	-
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	27.495
Nilai tercatat akhir	23.327.544	4.217.965	-	27.573.004
	31 Desember 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Cadangan atas kerugian kredit kredit ekspektasian akhir	1.066.011	260.179	-	1.326.190
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	948.643	(50.335)	-	898.308
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	39.131	212.267	654	252.052
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.066.011)	(260.179)	-	(1.326.190)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(8.011)	-	-	(8.011)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	976.763	161.932	654	1.142.349

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. WESEL EKSPOR DAN TAGIHAN LAINNYA (lanjutan)

- d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan).

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	132.241
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	2.628.902
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	427.853	2.311.525	21.765	2.761.143
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	110.510	26.997	-	137.507
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.066.011	233.182	-	1.299.193
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(534.934)	(2.311.525)	(21.765)	(2.868.224)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(3.429)	-	-	(3.429)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	1.066.011	260.179	-	1.326.190

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai wesel ekspor dan tagihan lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah memadai.

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

- a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari:

	31 Desember 2021				
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank Indonesia					
Obligasi Pemerintah					
FR0040	3,50%	12 Des 2021	04 Jan 2022	8.295.783	8.298.203
VR0047	3,50	27 Des 2021	03 Jan 2022	6.797.082	6.799.725
FR0082	3,02	31 Des 2021	14 Jan 2022	4.920.205	4.920.205
VR0069	3,02	24 Des 2021	07 Jan 2022	4.720.730	4.723.502
FR0092	3,05	29 Des 2021	30 Mar 2022	3.812.560	3.813.206
FR0065	3,03	29 Des 2021	26 Jan 2022	3.781.152	3.781.789
FR0079	3,03	24 Des 2021	21 Jan 2022	3.603.817	3.605.940
FR0088	3,03	31 Des 2021	28 Jan 2022	3.104.571	3.104.571
VR0065	3,02	29 Des 2021	12 Jan 2022	2.773.886	2.774.352
VR0046	3,50	30 Des 2021	06 Jan 2022	2.534.272	2.534.518
VR0069	3,03	15 Des 2021	12 Jan 2022	1.848.810	1.851.300
FR0056	3,50	31 Des 2021	07 Jan 2022	1.655.981	1.655.981
FR0074	3,05	17 Nov 2021	16 Feb 2022	1.169.251	1.173.610
FR0068	3,03	10 Des 2021	07 Jan 2022	1.059.236	1.061.108
VR0062	3,50	29 Des 2021	05 Jan 2022	1.043.817	1.044.020
FR0078	3,03	08 Des 2021	05 Jan 2022	797.869	799.414

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari (lanjutan):

31 Desember 2021					
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>					
<u>Rupiah (lanjutan)</u>					
<u>Bank Indonesia (lanjutan)</u>					
<u>Obligasi Pemerintah (lanjutan)</u>					
FR0050	3,05	17 Nov 2021	16 Feb 2022	575.168	577.312
FR0058	3,05	24 Nov 2021	23 Feb 2022	547.093	548.808
FR0088	3,04	10 Nov 2021	09 Feb 2022	475.712	477.760
FR0080	3,05	21 Okt 2021	20 Jan 2022	323.408	325.354
VR0058	3,50	31 Des 2021	07 Jan 2022	238.130	238.153
VR0058	3,50	31 Des 2021	07 Jan 2022	190.504	190.523
VR0042	3,50	28 Des 2021	04 Jan 2022	153.624	153.683
VR0047	3,50	27 Des 2021	03 Jan 2022	67.986	68.019
FR0065	3,40	05 Mar 2021	04 Mar 2022	47.951	49.314
PT Bank Nationalnoba Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0072	2,90	30 Des 2021	03 Jan 2022	199.250	199.604
PT BPD Kalimantan Timur					
Obligasi Pemerintah					
FR0087	3,55	13 Des 2021	13 Jan 2022	145.512	145.524
Total				54.883.360	54.915.498

31 Desember 2020					
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
<u>Bank Indonesia</u>					
<u>Obligasi Pemerintah</u>					
FR0077	3,75	28 Des 2020	4 Jan 2021	25.505.387	25.513.358
VR0042	3,75	29 Des 2020	5 Jan 2021	14.302.191	14.305.171
VR0035	3,75	28 Des 2020	4 Jan 2021	1.337.042	1.337.600
VR0043	3,75	30 Des 2020	6 Jan 2021	1.328.726	1.329.002
FR0079	3,84	30 Sep 2020	4 Jan 2021	527.602	532.779
VR0039	3,75	29 Des 2020	5 Jan 2021	381.011	381.130
FR0078	3,96	4 Sep 2020	4 Jun 2021	265.915	269.366
FR0078	3,94	4 Sep 2020	4 Jun 2021	265.915	269.349
FR0046	5,15	17 Jan 2020	15 Jan 2021	248.200	260.591
FR0074	3,97	4 Sep 2020	3 Sep 2021	255.897	259.227
VR0036	3,90	4 Sep 2020	5 Mar 2021	237.986	241.028
VR0036	3,86	4 Sep 2020	5 Mar 2021	237.986	240.997
FR0083	4,59	12 Jun 2020	11 Jun 2021	234.431	240.469
FR0080	4,57	12 Jun 2020	12 Mar 2021	233.556	239.545
FR0068	3,57	16 Des 2020	17 Mar 2021	112.674	112.841
FR0078	3,55	7 Sep 2020	4 Jan 2021	109.125	109.384
FR0072	3,57	8 Sep 2020	9 Mar 2021	107.856	108.102
FR0072	3,83	4 Nov 2020	3 Feb 2021	106.840	107.488
FR0082	3,55	16 Des 2020	13 Jan 2021	100.963	101.113
FR0087	3,55	8 Des 2020	5 Jan 2021	99.919	100.146
VR0037	3,84	27 Okt 2020	26 Jan 2021	95.789	96.453
FR0052	3,55	4 Des 2020	4 Jan 2021	63.408	63.576

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

a) Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari (lanjutan):

31 Desember 2020					
	Tingkat Suku Bunga (%)	Tanggal Beli	Tanggal Jual Kembali	Nilai Beli	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>					
<u>Rupiah (lanjutan)</u>					
Bank Indonesia (lanjutan)					
Obligasi Pemerintah (lanjutan)					
FR0071	3,55	2 Des 2020	4 Jan 2021	57.330	57.494
FR0068	3,55	14 Des 2019	11 Jan 2021	56.066	56.160
FR0058	3,57	2 Des 2020	3 Mar 2021	55.341	55.500
FR0080	3,84	11 Nov 2020	10 Feb 2021	52.311	52.590
FR0080	3,82	11 Nov 2020	10 Feb 2021	52.311	52.588
FR0087	3,65	4 Des 2020	3 Sep 2021	49.827	49.963
FR0076	3,60	25 Nov 2020	24 Feb 2021	48.481	48.656
FR0073	3,60	4 Des 2020	4 Jun 2021	36.919	37.019
FR0080	4,60	9 Apr 2020	7 Jun 2021	754	779
PT BPD Maluku dan Maluku Utara					
Obligasi Pemerintah					
FR0084	3,85	22 Des 2020	5 Jan 2021	48.859	48.906
FR0087	3,85	22 Des 2020	5 Jan 2021	140.063	140.198
Total				46.756.681	46.818.568

b) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

31 Desember 2021				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Efek-efek yang dibeli dengan janji</u>				
<u>dijual kembali</u>				
Nilai tercatat awal	46.818.568	-	-	46.818.568
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	84.870.297	-	-	84.870.297
Aset Keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(76.773.367)	-	-	(76.773.367)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	54.915.498	-	-	54.915.498

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI (lanjutan)

b) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang dibeli dengan janji</u>				
<u>dijual kembali</u>				
Nilai tercatat awal	22.582.244	-	-	22.582.244
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	197.245.886	-	-	197.245.886
Aset Keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(173.009.562)	-	-	(173.009.562)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Nilai tercatat akhir	46.818.568	-	-	46.818.568

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Efek-efek yang dibeli dengan janji</u>				
<u>dijual kembali</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	1
Cadangan atas kerugian kredit				
ekspektasian awal PSAK 71	1	-	-	1
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan				
kerugian	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	-	-	-	-
Aset Keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(1)	-	-	(1)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	-	-	-	-
Cadangan atas kerugian kredit				
 ekspektasian akhir	-	-	-	-

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, karena Manajemen berkeyakinan bahwa efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dapat ditagih.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

Ikhtisar transaksi derivatif adalah sebagai berikut:

Transaksi	31 Desember 2021	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap mata uang asing	353.982	47.769
Swap mata uang dan suku bunga	167.159	1.972
Pembelian dan penjualan <i>forward</i> mata uang asing	104.450	43.440
Swap suku bunga	103.575	104.817
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	917	1.697
Total	730.083	199.695

Transaksi	31 Desember 2020	
	Tagihan derivatif	Liabilitas derivatif
Swap mata uang asing	1.177.679	195.687
Swap mata uang dan suku bunga	144.151	14.421
Pembelian dan penjualan <i>forward</i> mata uang asing	142.912	35.799
Swap suku bunga	110.358	158.856
Pembelian dan penjualan <i>spot</i> mata uang asing	1.559	1.160
Option mata uang	-	1.851
Total	1.576.659	407.774

Berikut di bawah ini nilai nosional dari transaksi derivatif:

	Nilai Nosional (mata uang asing nilai penuh, Rupiah dalam jutaan)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Swap mata uang dan suku bunga Rupiah	6.555.350	3.827.625
Swap suku bunga Dolar Amerika Serikat	861.572.073	731.572.074
Option mata uang Kontrak penjualan Dolar Amerika Serikat	102.394.305	41.707.102
Spot mata uang asing Dolar Amerika Serikat	87.400.000	16.000.000
Euro Eropa	750.000	-
Kontrak penjualan Dolar Amerika Serikat	45.860.000	27.143.607
Forward mata uang asing Kontrak pembelian Dolar Amerika Serikat	823.879.883	232.569.444
Renminbi	500.000	2.800.000
Rupiah	481.653	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Berikut di bawah ini nilai nosional dari transaksi derivatif (lanjutan):

	Nilai Nosional (mata uang asing nilai penuh, Rupiah dalam jutaan)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	1.001.126.458	843.687.353
Euro Eropa	-	62.964
Swap mata uang asing		
Kontrak pembelian		
Dolar Amerika Serikat	390.275.542	170.114.774
Kontrak penjualan		
Dolar Amerika Serikat	4.098.300.000	2.808.686.838
Euro Eropa	115.000.000	190.000.000
Pound Sterling Inggris	7.500.000	9.200.000
Dolar New Zealand	6.033.264	-

Para pihak yang melakukan kontrak derivatif dalam bentuk *swap* suku bunga ataupun *swap* mata uang dan suku bunga dengan BRI berkewajiban membayar bunga tetap (*fixed rate*) atau bunga mengambang (*floating rate*) antara lain LIBOR 3 (tiga) bulanan atau 6 (enam) bulanan ditambah dengan margin tertentu.

11. KREDIT YANG DIBERIKAN

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Kupedes	396.952.830	351.337.166
Konsumsi	188.516.538	190.500.242
Modal kerja	171.509.082	160.260.667
Investasi	53.471.380	60.444.522
Program	43.008.167	35.879.902
Sindikasi	177.474	485.119
	853.635.471	798.907.618
<u>Mata uang asing</u>		
Investasi	43.192.413	40.761.907
Modal kerja	28.159.818	30.017.025
Sindikasi	1.108.407	924.464
Konsumsi	737.580	802.927
	73.198.218	72.506.323
	926.833.689	871.413.941

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang (lanjutan):

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan jenis adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Investasi	29.792.012	37.083.949
Modal kerja	23.667.017	23.238.301
Sindikasi	2.539.777	3.953.066
Karyawan kunci	185.023	186.633
Konsumsi	-	3.317
	<u>56.183.829</u>	<u>64.465.266</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Modal kerja	9.287.786	5.765.444
Investasi	2.111.219	2.142.983
	<u>11.399.005</u>	<u>7.908.427</u>
	<u>67.582.834</u>	<u>72.373.693</u>
<u>Total</u>	994.416.523	943.787.634
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(84.833.734)	(66.810.179)
Bersih	<u>909.582.789</u>	<u>876.977.455</u>

Rincian pinjaman yang diberikan berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>		<u>31 Desember 2020</u>	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Rupiah</u>		909.819.300		863.372.884
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	5.930.578.379	84.525.569	5.717.364.006	80.328.965
Dolar Singapura	5.303.336	55.975	6.516.568	69.116
Yen Jepang	90.763.955	11.234	90.909.084	12.360
Euro Eropa	275.884	4.445	250.010	4.309
		<u>84.597.223</u>		<u>80.414.750</u>
<u>Total</u>		994.416.523		943.787.634
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(84.833.734)		(66.810.179)
Bersih		<u>909.582.789</u>		<u>876.977.455</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Perdagangan, perhotelan dan restoran	326.310.024	300.622.637
Pertanian	119.425.736	104.670.330
Perindustrian	58.779.150	48.510.657
Jasa dunia usaha	46.403.362	40.677.620
Konstruksi	14.113.610	18.741.830
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	11.411.890	11.061.454
Jasa pelayanan sosial	5.642.815	5.699.714
Listrik, gas dan air	4.268.426	4.459.079
Pertambangan	2.382.278	2.354.278
Lain-lain	264.898.180	262.110.019
	<u>853.635.471</u>	<u>798.907.618</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Perindustrian	24.895.278	26.184.147
Listrik, gas dan air	17.619.144	14.907.363
Pertanian	9.988.722	12.995.793
Perdagangan, perhotelan dan restoran	6.183.826	4.078.573
Pertambangan	4.497.639	4.861.825
Konstruksi	3.524.451	3.673.480
Jasa dunia usaha	4.886.239	3.707.144
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	656.760	887.115
Jasa pelayanan sosial	160.300	349.487
Lain-lain	785.859	861.396
	<u>73.198.218</u>	<u>72.506.323</u>
	<u>926.833.689</u>	<u>871.413.941</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Konstruksi	15.278.601	16.233.554
Listrik, gas dan air	12.122.677	16.128.027
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	7.936.154	7.677.961
Perindustrian	5.969.157	7.781.515
Pertanian	5.594.426	6.725.037
Perdagangan, perhotelan dan restoran	5.416.184	6.014.905
Jasa dunia usaha	2.644.974	2.877.880
Pertambangan	529.115	505.214
Jasa pelayanan sosial	509.516	331.222
Lain-lain	183.025	189.951
	<u>56.183.829</u>	<u>64.465.266</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

b) Berdasarkan Sektor Ekonomi (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44) (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
Perindustrian	4.286.898	3.687.097
Jasa dunia usaha	4.259.690	1.998.026
Listrik, gas dan air	1.553.372	1.032.396
Pertambangan	737.364	78.264
Jasa pelayanan sosial	557.846	1.112.644
Konstruksi	3.835	-
	<u>11.399.005</u>	<u>7.908.427</u>
	<u>67.582.834</u>	<u>72.373.693</u>
Total	994.416.523	943.787.634
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(84.833.734)	(66.810.179)
Bersih	<u>909.582.789</u>	<u>876.977.455</u>

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	17.790.849	15.715.404
> 1 bulan - 3 bulan	32.341.004	28.590.490
> 3 bulan - 1 tahun	184.188.597	178.328.702
> 1 tahun - 2 tahun	127.879.891	109.451.198
> 2 tahun - 5 tahun	280.489.502	251.661.476
> 5 tahun	210.945.628	215.160.348
	<u>853.635.471</u>	<u>798.907.618</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	1.197.753	3.288.919
> 1 bulan - 3 bulan	3.338.748	3.383.986
> 3 bulan - 1 tahun	11.148.259	15.369.159
> 1 tahun - 2 tahun	13.675.045	5.606.542
> 2 tahun - 5 tahun	15.511.758	20.579.596
> 5 tahun	28.326.655	24.278.121
	<u>73.198.218</u>	<u>72.506.323</u>
	<u>926.833.689</u>	<u>871.413.941</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu (lanjutan):

Klasifikasi jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	3.586.211	3.162.691
> 1 bulan - 3 bulan	1.815.015	8.173.324
> 3 bulan - 1 tahun	7.686.746	5.814.269
> 1 tahun - 2 tahun	736.193	3.114.417
> 2 tahun - 5 tahun	15.743.634	7.625.649
> 5 tahun	26.616.030	36.574.916
	<u>56.183.829</u>	<u>64.465.266</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	60.532	2.057
> 1 bulan - 3 bulan	598.605	413.920
> 3 bulan - 1 tahun	982.743	1.106.582
> 1 tahun - 2 tahun	219.196	287.818
> 2 tahun - 5 tahun	338.650	2.004.088
> 5 tahun	9.199.279	4.093.962
	<u>11.399.005</u>	<u>7.908.427</u>
	<u>67.582.834</u>	<u>72.373.693</u>
Total	<u>994.416.523</u>	<u>943.787.634</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(84.833.734)	(66.810.179)
Bersih	<u>909.582.789</u>	<u>876.977.455</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

d) Berdasarkan Kolektibilitas:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Individual	63.023.353	61.073.399
Kolektif		
Lancar	851.620.045	809.378.232
Dalam perhatian khusus	23.489.255	20.246.495
Kurang lancar	1.853.227	1.288.108
Diragukan	2.868.735	1.711.442
Macet	12.450.938	8.727.389
	<u>892.282.200</u>	<u>841.351.666</u>
Total	955.305.553	902.425.065
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Individual	(39.835.617)	(29.101.946)
Kolektif	(44.113.625)	(37.287.204)
	<u>(83.949.242)</u>	<u>(66.389.150)</u>
Bersih	871.356.311	836.035.915

Kolektibilitas usaha gadai PT Pegadaian (entitas anak):

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kolektif		
Lancar	37.466.983	40.119.755
Dalam perhatian khusus	1.058.743	757.375
Kurang lancar	484.076	375.365
Diragukan	23.275	19.263
Macet	77.893	90.811
	<u>39.110.970</u>	<u>41.362.569</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai:		
Kolektif	(884.492)	(421.029)
Bersih	38.226.478	40.941.540

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

e) Berdasarkan Segmen Operasi:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Mikro	436.909.977	382.998.007
Ritel	382.785.444	378.500.912
Korporasi	33.940.050	37.408.699
	<u>853.635.471</u>	<u>798.907.618</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Korporasi	68.670.392	58.406.031
Ritel	4.527.826	14.100.292
	<u>73.198.218</u>	<u>72.506.323</u>
	<u>926.833.689</u>	<u>871.413.941</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Korporasi	54.260.590	61.487.211
Ritel	1.923.239	2.978.055
	<u>56.183.829</u>	<u>64.465.266</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Korporasi	11.399.005	7.908.427
	<u>11.399.005</u>	<u>7.908.427</u>
	<u>67.582.834</u>	<u>72.373.693</u>
Total	994.416.523	943.787.634
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(84.833.734)	(66.810.179)
Bersih	909.582.789	876.977.455

f) Informasi Penting Lainnya:

1) Tingkat suku bunga rata-rata:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Bunga Kontrak		
Rupiah	10,19%	10,40%
Mata uang asing	3,61	3,80
Bunga Efektif		
Rupiah	11,96%	12,49%
Mata uang asing	4,01	3,97

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

- 2) Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan, surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan (Catatan 19, 20 dan 21).
- 3) Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan barang-barang modalnya.
- 4) Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepada pegawai dan pensiun, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lainnya.
- 5) Kredit program merupakan kredit yang disalurkan BRI berdasarkan petunjuk dari Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan di Indonesia khususnya pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
- 6) Kredit Kupedes merupakan kredit yang disalurkan BRI melalui kantor BRI Unit dengan sasaran usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan tambahan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafon Kupedes. Sektor ekonomi yang menjadi sasaran adalah pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.
- 7) Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Jumlah kredit sindikasi yang diberikan BRI adalah sebesar Rp61.707.304 dan Rp61.909.777 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Keikutsertaan BRI sebagai pimpinan sindikasi berkisar dari 2% sampai dengan 77% dan 55% sampai dengan 77% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sedangkan sebagai anggota sindikasi berkisar dari 1% sampai dengan 68% dan 1% sampai dengan 25% pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
- 8) Pinjaman karyawan adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan dengan tingkat bunga berkisar 4,5% sampai dengan 5,5% per tahun yang ditujukan untuk pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya dengan jangka waktu berkisar antara 4 (empat) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Pembayaran pokok pinjaman dan bunga dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditanggungkan dan dicatat sebagai beban yang ditanggungkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditanggungkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp4.358.420 dan Rp3.161.845 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 17).
- 9) Kredit yang diberikan BRI kepada pihak berelasi diluar kredit yang diberikan kepada karyawan kunci (Catatan 44) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	12.048.560	16.182.590
Perum BULOG	5.258.303	5.841.839
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4.541.653	2.617.195
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	4.203.263	2.414.805
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.976.708	2.355.585
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	2.218.182	2.800.000
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.125.426	1.813.992
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	2.074.259	2.031.937
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia	2.009.097	1.317.915
PT Trans Jabar Tol	1.654.829	1.848.697
Lain-lain	28.287.531	32.962.505
Total	67.397.811	72.187.060

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

- 10) Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi BRI (Entitas Induk) sesuai dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2020 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp46.750.285 dan Rp42.644.077. Skema restrukturisasi umumnya dilakukan dengan perpanjangan masa pelunasan kredit dan penjadwalan kembali bunga yang tertunggak.

Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi (BRI Entitas Induk, Bank Raya dan Pegadaian) akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp163.675.246 dan Rp196.134.131 dengan skema perpanjangan jangka waktu.

- 11) Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) per tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BRI tidak memiliki debitur, baik pihak terkait maupun pihak tidak terkait, yang tidak memenuhi atau melampaui ketentuan BMPK sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.

- 12) Rincian kredit yang mengalami penurunan nilai merupakan kredit yang mengalami penurunan nilai berdasarkan evaluasi secara individual dan kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan sektor ekonomi, serta cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pertanian	17.837.886	18.911.886
Perindustrian	15.264.090	13.831.946
Perdagangan, perhotelan dan restoran	12.993.482	14.664.904
Jasa dunia usaha	9.200.442	3.506.565
Konstruksi	8.682.064	7.820.702
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	7.024.947	3.817.321
Pertambangan	2.989.889	3.498.272
Listrik, gas dan air	2.653.901	2.944.416
Jasa pelayanan sosial	556.635	543.874
Lain-lain	3.578.161	3.745.891
Total	80.781.497	73.285.777
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(50.867.836)	(35.580.728)
Bersih	29.913.661	37.705.049

13) Rasio-rasio

- a. Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) BRI (entitas induk) berdasarkan peraturan terkait adalah sebesar 3,08% dan 2,94% masing-masing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Sedangkan rasio NPL neto BRI (entitas induk) adalah sebesar 0,70% dan 0,80% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
- b. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan BRI adalah sebesar 56,47% dan 53,00% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Kredit yang Diberikan</u>				
Nilai tercatat awal	832.000.055	85.203.737	26.583.842	943.787.634
Pengalihan ke				
Stage 1	2.442.045	(2.271.043)	(171.002)	-
Stage 2	(30.278.635)	31.789.413	(1.510.778)	-
Stage 3	(9.607.434)	(5.061.651)	14.669.085	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(76.699.717)	(18.840.682)	(4.217.326)	(99.757.725)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	332.862.429	37.386.349	8.673.558	378.922.336
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(193.701.796)	(21.166.460)	224.823	(214.643.433)
Penghapusbukuan	(141.367)	(773.537)	(16.833.234)	(17.748.138)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	597.685	112.712	3.145.452	3.855.849
Nilai tercatat akhir	857.473.265	106.378.838	30.564.420	994.416.523

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Kredit yang Diberikan</u>				
Nilai tercatat awal	828.179.134	76.809.937	22.864.422	927.853.493
Pengalihan ke				
Stage 1	19.617.100	(19.126.924)	(490.176)	-
Stage 2	(19.251.485)	19.850.562	(599.077)	-
Stage 3	(4.726.518)	(7.505.025)	12.231.543	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(88.412.151)	(2.945.176)	4.494.597	(86.862.730)
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	312.887.928	34.396.541	4.753.687	352.038.156
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(214.454.006)	(14.210.359)	(4.795.189)	(233.459.554)
Penghapusbukuan	(340.783)	(2.093.639)	(11.924.912)	(14.359.334)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(1.499.164)	27.820	48.947	(1.422.397)
Nilai tercatat akhir	832.000.055	85.203.737	26.583.842	943.787.634

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

f) Informasi Penting Lainnya (lanjutan):

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Kredit yang Diberikan</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	24.923.322	23.065.548	18.821.309	66.810.179
Pengalihan ke				
Stage 1	511.236	(421.673)	(89.563)	-
Stage 2	(3.987.040)	5.037.355	(1.050.315)	-
Stage 3	(302.594)	(1.435.758)	1.738.352	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(6.290.861)	7.398.795	17.704.481	18.812.415
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10.617.220	12.050.507	4.379.257	27.046.984
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(5.410.362)	(3.571.519)	(1.223.740)	(10.205.621)
Penghapusbukuan	(141.367)	(773.537)	(16.833.234)	(17.748.138)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(45.519)	126.339	37.095	117.915
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	19.874.035	41.476.057	23.483.642	84.833.734
	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Kredit yang Diberikan</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	38.708.130
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	12.306.602
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	15.951.790	17.514.379	17.548.563	51.014.732
Pengalihan ke				
Stage 1	2.044.106	(1.726.431)	(317.675)	-
Stage 2	(600.850)	965.870	(365.020)	-
Stage 3	(130.488)	(2.919.946)	3.050.434	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	1.244.257	5.961.757	10.653.530	17.859.544
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	10.856.322	8.418.810	3.499.225	22.774.357
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(4.036.183)	(3.005.945)	(3.336.834)	(10.378.962)
Penghapusbukuan	(340.783)	(2.093.639)	(11.924.912)	(14.359.334)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(64.849)	(49.307)	13.998	(100.158)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	24.923.322	23.065.548	18.821.309	66.810.179

Termasuk dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai BRI (entitas induk) adalah cadangan kerugian untuk daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah rawan bencana atau yang pernah mengalami bencana sesuai penetapan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp1.049.784 dan Rp1.217.393 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 2e).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN (lanjutan)

Jumlah minimum Penyisihan Penghapusan Aset Produktif kredit yang diberikan BRI (Entitas Induk), yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Catatan 2e) adalah sebesar Rp31.366.615 dan Rp31.802.386 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat kredit yang diberikan yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah memadai.

12. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

a) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
Lancar	8.049.752	41.058.102
Dalam perhatian khusus	708.580	2.662.194
Kurang lancar	102.239	459.968
Diragukan	30.490	140.889
Macet	268.440	945.468
	<u>9.159.501</u>	<u>45.266.621</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
Lancar	-	3.798.857
	-	3.798.857
Total	9.159.501	49.065.478
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.410.907)	(2.582.167)
Bersih	<u>7.748.594</u>	<u>46.483.311</u>

b) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan jangka waktu dan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	6.558	558.229
> 1 bulan - 3 bulan	14.727	1.425.964
> 3 bulan - 1 tahun	6.567.241	10.472.126
> 1 tahun - 2 tahun	577.036	4.200.867
> 2 tahun - 5 tahun	1.929.236	14.919.769
> 5 tahun	64.703	13.689.666
	<u>9.159.501</u>	<u>45.266.621</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

b) Piutang dan pembiayaan syariah berdasarkan jangka waktu dan mata uang adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	-	883.543
> 1 bulan - 3 bulan	-	265.583
> 3 bulan - 1 tahun	-	54.178
> 1 tahun - 2 tahun	-	156.963
> 2 tahun - 5 tahun	-	94.278
> 5 tahun	-	2.344.312
	<u>-</u>	<u>3.798.857</u>
Total	9.159.501	49.065.478
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.410.907)	(2.582.167)
Bersih	<u>7.748.594</u>	<u>46.483.311</u>

Piutang dan pembiayaan syariah terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Jumlah piutang dan pembiayaan syariah yang telah direstrukturisasi akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp7.504.101.

Pendapatan piutang *murabahah* yang belum diakui pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.292.665.

Perubahan cadangan kerugian piutang dan pembiayaan syariah:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal	2.582.167	1.072.556*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 34)	278.229	2.093.237
Dampak kehilangan pengendalian atas PT BRI Syariah	(1.449.489)	-
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	-	66.748
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	(650.374)
Saldo akhir	<u>1.410.907</u>	<u>2.582.167</u>

*Termasuk saldo awal PT Pegadaian

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang dan pembiayaan syariah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah memadai.

Jenis jaminan yang diserahkan oleh debitur atas piutang dan pembiayaan konsumen berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan properti lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat piutang dan pembiayaan syariah yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

Efektif sejak tanggal 1 Februari 2021, PT Bank BRISyariah Tbk (BRIS) melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah, serta sejak tanggal 13 September 2021, Pegadaian dan PNM melakukan penggabungan usaha dengan BRI (Catatan 1f)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG PEMBIAYAAN

a) Piutang Pembiayaan sesuai dengan tanggal jatuh temponya

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 tahun	23.492.177	15.217.013
> 1 tahun - 2 tahun	7.515.784	4.574.118
> 2 tahun - 5 tahun	8.022.326	7.148.983
	<u>39.030.287</u>	<u>26.940.114</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
≤ 1 tahun	145.097	201.549
> 1 tahun - 2 tahun	72.305	109.166
> 2 tahun - 5 tahun	17.021	47.874
	<u>234.423</u>	<u>358.589</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 tahun	13.046	23.926
> 1 tahun - 2 tahun	9.643	16.280
> 2 tahun - 5 tahun	4.030	947
	<u>26.719</u>	<u>41.153</u>
Total	39.291.429	27.339.856
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.584.776)	(1.002.307)
Bersih	<u>37.706.653</u>	<u>26.337.549</u>

b) Piutang Pembiayaan sesuai dengan kolektibilitasnya

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pembiayaan Pola Angsuran Mingguan		
<u>Kolektibilitas</u>		
Lancar	25.839.349	14.745.485
Dalam perhatian khusus	76.629	624.307
Kurang lancar	8.184	1.893
Diragukan	11.545	8.862
Macet	3.456	9.039
	<u>25.939.163</u>	<u>15.389.586</u>
Pembiayaan Pola Angsuran Non Mingguan		
<u>Kolektibilitas</u>		
Lancar	11.824.294	10.824.142
Dalam perhatian khusus	1.084.632	767.421
Kurang lancar	100.003	11.849
Diragukan	41.097	75.712
Macet	302.240	271.146
	<u>13.352.266</u>	<u>11.950.270</u>
Total	39.291.429	27.339.856
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.584.776)	(1.002.307)
Bersih	<u>37.706.653</u>	<u>26.337.549</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

- c) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Piutang Pembiayaan</u>				
Nilai tercatatawal	25.536.320	1.396.839	406.697	27.339.856
Pengalihanke				
Stage 1	266.271	(160.041)	(106.230)	-
Stage 2	(61.118)	85.574	(24.456)	-
Stage 3	(87.664)	(16.259)	103.923	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat				
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	13.743.916	12.162	202.809	13.958.887
Aset keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(1.528.696)	(256.512)	(78.525)	(1.863.733)
Penghapusbukuan	(4.306)	(4.067)	(37.074)	(45.447)
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
Telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	(98.134)	-	-	(98.134)
Nilai tercatat akhir	37.766.589	1.057.696	467.144	39.291.429
	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Piutang Pembiayaan</u>				
Nilai tercatat awal	22.339.139	846.066	319.119	23.504.324
Pengalihan ke				
Stage 1	51.053	(43.991)	(7.062)	-
Stage 2	(106.833)	134.152	(27.319)	-
Stage 3	(222.672)	(58.619)	281.291	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat				
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau				
dibeli	4.990.138	547.314	14.732	5.552.184
Aset keuangan yang dihentikan				
pengakuannya	(1.552.764)	(27.229)	(160.685)	(1.740.678)
Penghapusbukuan	(4.249)	(854)	(14.098)	(19.201)
Penerimaan kembali aset keuangan yang				
telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta				
asing dan perubahan lain	42.508	-	719	43.227
Nilai tercatat akhir	25.536.320	1.396.839	406.697	27.339.856

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

c) Tabel berikut menyajikan perubahan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2021			Total
	Stage1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Piutang Pembiayaan</u>				
Cadangan atas kerugian kredit				
Ekspektasian awal	202.259	383.643	416.405	1.002.307
Pengalihan ke				
Stage 1	309.593	(305.480)	(4.113)	-
Stage 2	(840)	1.052	(212)	-
Stage 3	(5.230)	(137.107)	142.337	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	196.448	620.955	36.171	853.574
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(38.330)	(24.593)	(146.364)	(209.287)
Penghapusbukuan	(4.306)	(4.067)	(37.074)	(45.447)
Penerimaan kembali aset keuangan yang Telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(16.373)	-	-	(16.373)
Cadangan atas kerugian kredit Ekspektasian akhir	643.221	534.404	407.151	1.584.776
31 Desember 2020				
	Stage1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Piutang Pembiayaan</u>				
Cadangan atas kerugian kredit				
ekspektasian awal PSAK 71	69.791	313.884	197.868	581.543
Pengalihan ke				
Stage 1	181.752	(163.219)	(18.533)	-
Stage 2	(65.530)	153.979	(88.449)	-
Stage 3	(77.820)	(161.814)	239.634	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	21.574	15.381	93.191	130.146
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	56.490	226.900	88.131	371.521
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(2.152)	(614)	(81.741)	(84.507)
Penghapusbukuan	(4.249)	(854)	(14.098)	(19.201)
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	22.403	-	402	22.805
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	202.259	383.643	416.405	1.002.307

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

- d) Dalam piutang sewa pembiayaan, termasuk informasi terkait piutang sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang terdiri dari:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
Piutang pembiayaan-bruto	5.674.799	4.185.436
Nilai sisa yang terjamin	1.812.929	1.981.977
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(938.511)	(607.364)
Simpanan jaminan	(1.812.929)	(1.981.978)
	<u>4.736.288</u>	<u>3.578.071</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
Piutang pembiayaan-bruto	42.515	48.241
Nilai sisa yang terjamin	1.135	1.677
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(4.488)	(7.088)
Simpanan jaminan	(1.135)	(1.677)
	<u>38.027</u>	<u>41.153</u>
Total	4.774.315	3.619.224
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(211.003)	(213.060)
Bersih	<u>4.563.312</u>	<u>3.406.164</u>

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat piutang sewa pembiayaan yang dialihkan dan/atau digunakan sebagai jaminan atas utang.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah memadai.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

a) Berdasarkan Jenis dan Mata Uang:

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)		2.347.741		3.789.849
<u>Mata uang asing</u>				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	230.122.195	3.279.817	77.786.022	1.092.894
Euro Eropa	5.009.310	80.712	7.155.614	123.323
Renminbi	16.541.101	36.981	4.073.580	8.759
Yen Jepang	297.585.039	36.832	209.237.191	28.449
Pound Sterling Inggris	44.150	850	36.705	698
Dolar Singapura		-	36.236	384
		3.435.192		1.254.507
		5.782.933		5.044.356
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
L/C Impor dan SKBDN		2.117.492		1.548.475
<u>Mata uang asing</u>				
L/C Impor dan SKBDN				
Dolar Amerika Serikat	115.779.850	1.650.152	14.634.549	205.615
Euro Eropa	227.210	3.661	13.168	227
Yen Jepang		-	138.000.000	18.763
		1.653.813		224.605
		3.771.305		1.773.080
Total		9.554.238		6.817.436
Cadangan kerugian penurunan nilai		(488.233)		(546.260)
Bersih		9.066.005		6.271.176

b) Berdasarkan Kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai "Lancar", kecuali Rp418.481 dan Rp500.603 dengan kolektibilitas "Dalam Perhatian Khusus" pada 31 Desember 2021 dan 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

c) Berdasarkan Jangka Waktu:

Klasifikasi jangka waktu tagihan akseptasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
≤ 1 bulan	31.535	2.166
> 1 bulan - 3 bulan	2.643.613	2.319.770
> 3 bulan - 1 tahun	3.107.785	2.722.420
	<u>5.782.933</u>	<u>5.044.356</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
> 1 bulan - 3 bulan	2.446.031	850.673
> 3 bulan - 1 tahun	1.325.274	922.407
	<u>3.771.305</u>	<u>1.773.080</u>
Total	9.554.238	6.817.436
Cadangan kerugian penurunan nilai	(488.233)	(546.260)
Bersih	<u>9.066.005</u>	<u>6.271.176</u>

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Tagihan Akseptasi</u>				
Nilai tercatat awal	6.273.140	500.603	-	6.773.743
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	8.965.952	418.480	-	9.384.432
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(6.273.140)	(320.858)	-	(6.593.998)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(9.939)	-	-	(9.939)
Nilai tercatat akhir	<u>8.956.013</u>	<u>598.225</u>	<u>-</u>	<u>9.554.238</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
Tagihan Akseptasi				
Nilai tercatat awal	9.344.682	-	-	9.344.682
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	6.262.967	500.603	-	6.763.570
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.344.682)	-	-	(9.344.682)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	10.173	-	-	10.173
	6.273.140	500.603	-	6.773.743
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	1.381
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	42.312
Nilai tercatat akhir	6.273.140	500.603	-	6.817.436

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
Tagihan Akseptasi				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	240.154	306.106	-	546.260
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(44.455)	178.433	-	133.979
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	178.314	175.752	-	354.066
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(240.154)	(306.160)	-	(546.260)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	188	-	-	188
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	134.047	354.186	-	488.233

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI (lanjutan)

d) Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Tagihan Akseptasi</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	140.746
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	140.746	-	-	140.746
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	415	-	-	415
Aset Keuangan baru yang diterbitkan atau Dibeli	239.521	306.106	-	545.627
Aset Keuangan yang dihentikan pengakuannya	(140.135)	-	-	(140.135)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(393)	-	-	(393)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	240.154	306.106	-	546.260

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2021 dan 2020 telah memadai.

15. PENYERTAAN SAHAM

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan (%)	31 Desember 2021		
			Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
<u>Metode Ekuitas</u>					
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Perbankan	17,25	3.546.381	508.814	4.055.195
PT Danareksa Investment Management	Perusahaan efek	35,00	371.959	16.718	388.677
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	15,10	71.325	4.622	75.947
			3.989.665	530.154	4.519.819

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2021

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
<u>Metode Nilai Wajar</u>					
<u>Pihak ketiga</u>					
Grab Holding	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	0,08			218.067
Fazz Financial Group Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	3,67			180.413
Investree Singapore Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	4,01			145.037
Tani Nusantara Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	3,29			88.007
Funding Asia Group Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	1,53			79.692
PT Bukalapak.com	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	0,23			77.850
Nium Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	1,29			54.180
Awan Tunai	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	7,91			42.957
Ayo Technology Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	6,88			31.221
Xendit	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	0,20			28.538
PT Pefindo Biro Kredit	Perusahaan informasi				
	pengkreditan	16,09			20.060
PT Majoo Teknologi Indonesia	Penyelenggara Teknologi				
	Finansial	6,71			16.766
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek				
		8,01			7.970
PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional	Keuangan				
		17,50			3.500
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga				
		4,30			1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring				
		2,00			1.000
Investasi lain-lain	Beragam		Beragam		4.146
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Perbankan				
		18,87			565.564
					1.566.243
Cadangan kerugian penurunan nilai					(14.335)
					1.551.908
Total					6.071.727

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Rincian penyertaan saham adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember 2020					
Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Pemilikan (%)	Biaya Perolehan	Akumulasi atas Bagian Laba Neto Asosiasi	Nilai Tercatat
Metode Ekuitas					
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
(Investasi dalam entitas asosiasi)					
PT Danareksa Investment Management	Perusahaan efek	35,00	371.959	8.239	380.198
PT Bahana Artha Ventura	Modal ventura	35,00	71.325	3.071	74.396
			443.284	11.310	454.594
Metode Nilai Wajar					
<u>Pihak ketiga</u>					
Investree Singapore Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	4,01			146.457
Fazz Financial Group Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	3,67			120.480
Funding Asia Group Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	1,63			78.560
Nium Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	1,29			48.255
Ayo Technology Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	6,88			31.437
Tani Nusantara Pte Ltd	Penyelenggara Teknologi Finansial	2,44			28.580
PT Pefindo Biro Kredit	Perusahaan Informasi Pengkreditan	16,09			20.060
PT Pemeringkat Efek Indonesia	Pemeringkat efek	8,01			7.970
PT Syarikat Takaful Indonesia	Penyelenggara Teknologi Finansial	6,92			5.665
Lembaga Pembayaran Nasional	Keuangan	17,50			3.500
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	Jasa penitipan surat berharga	4,30			1.275
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Lembaga kliring	2,00			1.000
PT Jakarta Kyoei Medical Center	Pelayanan kesehatan	1,68			221
Bursa Efek Indonesia	Bursa efek	0,80			135
Investasi lain-lain	Beragam	Beragam			6.265
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara Jasa Sistem Perbankan	13,22			565.245
					1.065.105 (19.370)
					1.045.735
Total					1.500.329

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENYERTAAN SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, semua penyertaan diklasifikasikan "Lancar".

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah cukup.

Jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan laba tahun atau periode berjalan dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Total aset	265.289.081	-
Total liabilitas	61.886.476	-
PT Danareksa Investment Management		
Total aset	282.967	238.491
Total liabilitas	70.931	49.600
PT Bahana Artha Ventura		
Total aset	2.089.927	2.483.252
Total liabilitas	1.303.801	1.862.635
PT Pefindo Biro Kredit		
Total aset	145.122	121.646
Total liabilitas	30.984	47.215
	Untuk tahun yang berakhir	
	pada tanggal 31 Desember	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk		
Total pendapatan	18.608.022	-
Total laba bersih	3.028.205	-
PT Danareksa Investment Management		
Total pendapatan	202.867	91.055
Total laba bersih	36.225	9.471
PT Bahana Artha Ventura		
Total pendapatan	173.441	133.891
Total laba bersih	4.580	(7.791)
PT Pefindo Biro Kredit		
Total pendapatan	118.447	74.259
Total laba bersih	39.865	7.546
Rincian penerimaan deviden adalah sebagai berikut:		
	Untuk tahun yang berakhir	
	pada tanggal 31 Desember	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>BRI</u>		
PT Danareksa Investment Management	4.200	5.530
	4.200	5.530
<u>Entitas Anak</u>		
PT BRI Asuransi Indonesia	110	-
PT Bank Raya Indonesia Tbk	39	-
	149	-
Total	4.349	5.530

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP

Aset tetap terdiri atas:

31 Desember 2021					
Keterangan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan^{*)}	Reklasifikasi^{***)}	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Hak atas tanah	29.642.881	600.486	228.942	-	30.014.425
Bangunan	8.439.460	1.637.063	1.208.797	552.987	9.420.713
Kendaraan bermotor	3.216.178	936.118	540.274	-	3.612.022
Komputer dan mesin ^{****)}	11.043.494	1.369.600	1.694.095	(123.642)	10.595.357
Perlengkapan kantor	3.872.354	457.582	421.008	-	3.908.928
Aset tetap museum	184	-	-	-	184
Satelit	3.284.664	-	-	-	3.284.664
Aset dalam penyelesaian	1.385.639	3.253.267	7.370	(429.345)	4.202.191
	60.884.854	8.254.116	4.100.486	-	65.038.484
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Bangunan	2.979.527	753.531	419.814	-	3.313.244
Kendaraan bermotor	2.390.015	231.754	500.908	-	2.120.861
Komputer dan mesin	8.062.009	1.132.077	1.528.077	-	7.666.009
Perlengkapan kantor	2.962.001	439.464	420.280	-	2.981.185
Satelit	784.670	202.328	-	-	986.998
Hak Guna Tanah	-	-	-	-	-
	17.178.222	2.759.154	2.869.079	-	17.068.297
Nilai buku - Bersih	43.706.632				47.970.187

31 Desember 2020					
Keterangan	Saldo Awal	Penambahan^{**)}	Pengurangan	Reklasifikasi^{***)}	Saldo Akhir
<u>Biaya Perolehan</u>					
Hak atas tanah	21.123.087	8.971.914	453.017	897	29.642.881
Bangunan	4.951.375	4.919.447	1.517.623	86.261	8.439.460
Kendaraan bermotor	2.378.102	1.098.573	260.497	-	3.216.178
Komputer dan mesin ^{****)}	9.660.755	1.518.243	135.545	41	11.043.494
Perlengkapan kantor	1.980.108	2.033.946	141.659	(41)	3.872.354
Aset tetap museum	184	-	-	-	184
Satelit	3.284.664	-	-	-	3.284.664
Aset dalam penyelesaian	697.405	781.778	7.283	(86.261)	1.385.639
	44.075.680	19.323.901	2.515.624	897	60.884.854
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					
Bangunan	2.041.008	1.349.162	410.643	-	2.979.527
Kendaraan bermotor	2.115.204	474.365	199.554	-	2.390.015
Komputer dan mesin	6.379.234	1.775.721	92.946	-	8.062.009
Perlengkapan kantor	1.541.912	1.539.608	119.519	-	2.962.001
Satelit	565.693	218.977	-	-	784.670
	12.643.051	5.357.833	822.662	-	17.178.222
Nilai buku - Bersih	31.432.629				43.706.632

^{*)} Termasuk pengurangan atas aset tetap PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS)

^{**)} Termasuk penambahan atas aset tetap PT Pegadaian dan PT Pemodal Nasional Madani

^{***)} Termasuk reklasifikasi tanah dari aset terbengkalai

^{****)} Termasuk *software*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 pada tabel di atas termasuk juga nilai Aset Hak Guna (AHG) BRI dan entitas anak, dengan rincian sebagai berikut:

	Saldo awal 1 Januari 2021	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 31 Desember 2021
Biaya Perolehan Aset Hak Guna				
Bangunan	1.387.198	741.599	717.568	1.411.229
Kendaraan bermotor	73.876	357.288	58.782	372.382
Komputer dan mesin	2.195	-	2.195	-
Perlengkapan kantor	20.078	7.786	7.008	20.856
	<u>1.483.347</u>	<u>1.106.673</u>	<u>785.553</u>	<u>1.804.467</u>
Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna				
Bangunan	464.660	243.853	251.146	457.367
Kendaraan bermotor	24.034	55.812	17.301	62.545
Komputer dan mesin	789	298	1.087	-
Perlengkapan kantor	8.812	14.074	2.582	20.304
	<u>498.295</u>	<u>314.037</u>	<u>272.116</u>	<u>540.216</u>
Nilai buku - Bersih	<u>985.052</u>			<u>1.264.251</u>
	Saldo awal 1 Januari 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir 31 Desember 2020
Biaya Perolehan Aset Hak Guna				
Hak guna tanah	32.123	1.295	33.418	-
Bangunan	407.761	1.026.545	47.108	1.387.198
Kendaraan bermotor	10.253	66.623	3.000	73.876
Komputer dan mesin	6.991	2.385	7.181	2.195
Perlengkapan kantor	15.252	21.679	16.853	20.078
	<u>472.380</u>	<u>1.118.527</u>	<u>107.560</u>	<u>1.483.347</u>
Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna				
Bangunan	-	505.343	40.683	464.660
Kendaraan bermotor	-	25.837	1.803	24.034
Komputer dan mesin	-	979	190	789
Perlengkapan kantor	-	10.413	1.601	8.812
	<u>-</u>	<u>542.572</u>	<u>44.277</u>	<u>498.295</u>
Nilai buku - Bersih	<u>472.380</u>			<u>985.052</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan beban hak guna yang dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasian:

Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
	Beban penyusutan Aset hak guna	Beban bunga atas liabilitas sewa	Beban yang berhubungan dengan sewa jangka pendek
Hak guna tanah	-	-	711
Bangunan	243.853	43.318	530.711
Kendaraan bermotor	55.812	89.474	135.268
Komputer dan Mesin	298	149	46.899
Perlengkapan kantor	14.074	11.788	119.244
Total	314.037	144.729	832.833

Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
	Beban penyusutan Aset hak guna	Beban bunga atas liabilitas sewa	Beban yang berhubungan dengan sewa jangka pendek
Hak guna tanah	-	-	193
Bangunan	505.343	6.750	190.637
Kendaraan bermotor	25.837	3.152	56.981
Komputer dan Mesin	979	103	15.376
Perlengkapan kantor	10.413	819	32.772
Total	542.572	10.824	295.959

Rata-rata masa sewa berdasarkan kontrak yang dimiliki BRI adalah 2 (dua) tahun.

BRI memiliki sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa aset bernilai rendah, dimana dikecualikan dari pengakuan sewa berdasarkan PSAK No. 73.

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebesar Rp2.759.154 dan Rp3.199.102 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 36).

BRI telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah dan satelit) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian, vandalisme, *force majeure* dan lain-lain kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance), PT Jasaraharja Putera, PT Asuransi Jasa Tania Tbk dan PT Asuransi Raksa Pratikara dengan nilai pertanggungan seluruhnya sebesar Rp16.267.962 dan Rp16.916.714 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

BRI telah mengasuransikan aset tetap satelit kepada PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) (Entitas Anak) dengan nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar ASD160.000.000 (angka penuh) dan ASD176.000.000 (angka penuh), masing-masing polis asuransi tersebut berakhir pada tanggal 19 Juni 2022 dan 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai tercatat bruto aset tetap yang telah terdepresiasi penuh, namun masih digunakan oleh BRI, adalah masing-masing sebesar Rp9.629.764 dan Rp9.768.745 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki BRI yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Pada tanggal 1 April 2016, BRI mengubah kebijakan akuntansi untuk pengukuran hak atas tanah menjadi model revaluasi dari sebelumnya menggunakan model biaya.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" bagian 27 huruf e, dengan mempertimbangkan nilai buku tanah yang telah dilakukan revaluasi pada tahun 2016, maka pada tanggal 1 April 2019, BRI dan entitas anak telah melakukan penilaian kembali atas tanah hanya untuk memenuhi ketentuan Bapepam LK tersebut dan bukan untuk tujuan perpajakan.

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode biaya.

Penilaian atas tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal sebagai berikut:

1. KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto & Rekan, dengan laporan No. 00286/2.0160-00/PI/07/0218/1/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp8.285.841 ditandatangani oleh Nanang Rahayu.
2. KJPP Immanuel, Johnny & Rekan dengan laporan No. 00021T-W/PA/IMM-VI/2019 000101-104/0064-00/PI/07/0184/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp4.588.664 ditandatangani oleh Immanuel H. Sitompul.
3. KJPP Aksa Nelson & Rekan dengan laporan No. 00211/2.0026-00/PI/07/0179/1/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp1.630.648 ditandatangani oleh Aksa Nurdin.
4. KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dengan laporan No. 00233/2.0051-00/PI/07/0152/1/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp1.588.322 ditandatangani oleh Abdullah Fitriantoro.
5. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan dengan laporan No. 00056/2.0014-00/PI/07/0080/1/VII/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp417.084 ditandatangani oleh Okky Danuza.
6. KJPP Satria Iskandar Setiawan & Rekan dengan laporan No. 00078-81/2.0124.00/PI/07/0257/1V/2019 tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp3.825.260 ditandatangani oleh Setiawan.
7. KJPP Iwan Bachron & Rekan dengan laporan No. 000298/2.0047-05/PI/08/0500/1/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 sebesar Rp101.851 ditandatangani oleh Bunga Budiarti.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali atas hak atas tanah sebesar Rp3.215.455 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.316.985, sedangkan penurunan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali sebesar Rp101.530, diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan. Nilai wajar hak atas tanah termasuk pada hierarki nilai wajar level 2. Pada tahun 2021, atas pelepasan aset PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), penurunan nilai tercatat sebesar Rp80.276 disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, jika tanah diukur menggunakan model biaya, nilai tercatatnya masing-masing adalah sebesar Rp13.183.877 dan Rp12.583.734.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. ASET TETAP (lanjutan)

Rincian aset dalam penyelesaian, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021		
	Akumulasi biaya	Persentase penyelesaian	Tanggal estimasi penyelesaian
Bangunan dalam penyelesaian:			
Menara BRI Gatot Subroto	1.086.609	94,35%	30 September 2022
Gedung BRI Kanwil Malang	100.909	88,21%	15 Maret 2022
Menara BRI Medan	70.882	21,36%	13 Juli 2022
Lain-lain	1.720.543	Beragam	Beragam
	2.978.943		
<i>Software</i> dalam penyelesaian:			
Pengadaan Software BRIFIRST	193.340	69,05%	01 Januari 2023
Pengadaan BRINETS Tactical Enhancement	156.965	97,06%	31 Maret 2022
Aplikasi <i>Desktop</i> BRIBOX	62.599	89,44%	29 September 2023
Lain-lain	810.344	Beragam	Beragam
	1.223.248		
Total	4.202.191		

	31 Desember 2020		
	Akumulasi biaya	Persentase penyelesaian	Tanggal estimasi penyelesaian
Menara BRI Gatot Subroto	581.807	56,82%	30 Juni 2021
Gedung TI Tabanan	57.950	95,00%	28 Februari 2021
Gedung Kantor Cabang Cirebon Gunung Jati	43.300	80,00%	31 Maret 2021
Lain-lain	684.367	Beragam	Beragam
Total	1.367.424		

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap selain yang disebutkan di atas dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

17. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri atas:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah</u>		
Tagihan kepada Pemerintah terkait pemberian KUR	4.698.675	3.870.918
Biaya dibayar di muka	4.956.905	3.463.717
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 11f)	4.358.420	3.161.845
Piutang bunga:		
Efek-efek	3.027.840	2.581.705
Lain-lain	2.287.171	2.224.490

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Aset lain-lain terdiri atas (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Tagihan terkait dengan transaksi ATM dan kartu kredit	2.321.009	4.180.805
Aset reasuransi	1.623.169	1.383.245
Persediaan kantor	647.077	629.384
Persekot intern	240.501	386.457
Estimasi tagihan pajak	139.282	72.647
Tagihan atas penyaluran bantuan sosial Pemerintah	86.370	-
Tagihan pinalti pokok dan bunga kredit	66.915	59.993
Agunan yang diambil alih	63.922	67.211
Piutang premi	61.642	71.467
Sewa kantor, gudang, dan ruang kelas	11.364	250.444
Uang muka pajak	-	22.720
Aset Ijarah	-	1.094.012
Pendapatan yang masih harus diterima berdasarkan prinsip syariah	-	757.189
Tagihan atas penyaluran bantuan sosial Pemerintah	-	89.907
Lain-lain	6.331.948	8.086.771
	<u>30.922.210</u>	<u>32.454.927</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Piutang Bunga:		
Efek-efek	1.092.871	939.757
Lainnya	34.176	54.437
Lain-lain	249.664	157.707
	<u>1.376.711</u>	<u>1.151.901</u>
Total	32.298.921	32.606.828
Dikurangi cadangan penurunan nilai	(276.255)	(114.361)
Bersih	32.022.666	33.492.467

18. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera terdiri atas:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Rupiah</u>		
Titipan <i>advance payment</i>	10.454.565	5.500.342
Titipan setoran pajak	972.319	581.816
Utang Subsidi PEN	843.646	1.705.364
Titipan ATM dan kartu kredit	803.149	649.981
Titipan asuransi	211.784	166.245
Utang Kepada Nasabah	147.001	395.885
Titipan kerjasama pihak ketiga	97.204	81.020
Titipan pinjaman kelolaan	82.465	63.836
Titipan setoran kliring	26.344	29.952
Titipan pengiriman uang	20.279	22.009
Penampungan dana bantuan sosial	14	7.561
Lain-lain	4.741.799	5.404.679
	<u>18.400.569</u>	<u>14.608.690</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. LIABILITAS SEGERA (lanjutan)

Liabilitas segera terdiri atas (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Titipan <i>advance payment</i>	84.681	164.517
Titipan setoran pajak	10.661	27.015
Titipan ATM dan kartu kredit	18.868	335
Lain-lain	220.608	673.017
	<u>334.818</u>	<u>864.884</u>
Total	<u>18.735.387</u>	<u>15.473.574</u>

19. GIRO

Giro terdiri atas:

	<u>31 Desember 2021</u>		<u>31 Desember 2020</u>	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		89.777.483		92.818.909
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	2.466.144.937	35.148.732	2.275.152.143	31.965.888
Dolar Singapura	56.183.953	593.003	173.906.682	1.844.486
Euro Eropa	10.847.575	174.781	7.972.675	137.405
Renminbi	81.542.373	182.306	77.911.961	167.531
Yen Jepang	178.546.797	22.099	58.215.378	7.915
Dolar Australia	1.947.702	20.152	2.003.355	21.541
Dolar Hong Kong	7.467.471	13.651	832.026	1.508
Pound Sterling Inggris	299.743	5.770	268.771	5.110
Dirham Uni Emirat Arab	483.058	1.874	1.675.059	6.407
Ringgit Malaysia	3.894	13	2.904	10
Riyal Arab Saudi	336	1		-
		<u>36.162.382</u>		<u>34.157.801</u>
		<u>125.939.865</u>		<u>126.976.710</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		58.407.608		32.451.555
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	2.519.022.824	35.902.373	1.797.654.233	25.257.042
Euro Eropa	19.952.949	321.491	5.156.992	88.878
Yen Jepang	151.926.971	18.804	545.478.053	74.166
Dolar Singapura	5.331	56		-
		<u>36.242.724</u>		<u>25.420.086</u>
		<u>94.650.332</u>		<u>57.871.641</u>
Total		<u>220.590.197</u>		<u>184.848.351</u>

Tingkat suku bunga rata-rata:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rupiah	1,98%	2,85%
Mata uang asing	0,65	0,96

Giro yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp252.263 dan Rp2.006.330 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. TABUNGAN

Tabungan terdiri atas:

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Simpedes		309.347.613		285.960.307
Britama		173.136.373		159.291.579
Lain-lain		11.444.410		12.029.773
		493.928.396		457.281.659
<u>Mata uang asing</u>				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	192.826.688	2.748.262	164.691.567	2.313.917
Yen Jepang	1.869.877.257	231.435	1.866.515.375	253.781
Dolar Singapura	11.362.774	119.930	7.239.262	76.781
Euro Eropa	2.058.963	33.175	2.106.284	36.301
Dolar Australia	1.704.579	17.637	1.085.297	11.670
Pound Sterling Inggris	604.232	11.632	703.622	13.378
Renminbi	1.907.797	4.265	10.340.053	22.234
Riyal Arab Saudi	345.966	1.313	333.869	1.250
Dolar Baru Taiwan	745.653	383		-
Dolar Hong Kong	33.921	62	51.351	93
Dirham Uni Emirat Arab	7.697	30	7.475	29
		3.168.124		2.729.434
		497.096.520		460.011.093
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Britama		471.551		310.246
Simpedes		14.307		12.281
Lain-lain		64.969		318.854
		550.827		641.381
<u>Mata uang asing</u>				
Britama				
Dolar Amerika Serikat	2.019.813	28.787	1.342.362	18.860
Pound Sterling Inggris	23.916	460	1.193	23
Euro Eropa	6.037	97	-	-
Renminbi	14.583	33	571	1
Dolar Singapura	1.239	13	888	9
Saudi Arabian Riyal	293	1	-	-
Dolar Australia	134	1	-	-
		29.392		18.893
		580.219		660.274
Total		497.676.739		460.671.367

Tingkat suku bunga rata-rata:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rupiah	0,42%	0,69%
Mata uang asing	0,18	0,31

Tabungan yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah masing-masing sebesar Rp1.057.143 dan Rp126.223 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka terdiri atas:

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>		251.188.451		291.983.683
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	3.088.731.352	44.022.144	3.869.574.677	54.367.525
Dolar Singapura	73.693.858	777.814	146.201.170	1.550.636
Renminbi	308.181.379	689.007	265.834.697	571.612
Dolar Australia	26.706.738	276.324	28.948.083	311.263
Euro Eropa	2.067.294	33.309	12.488.168	215.226
Pound Sterling Inggris	91.334	1.758	1.314.370	24.989
Yen Jepang	2.000.000	248	22.694.000	3.086
Riyal Arab Saudi	5.004	19	5.001	19
		45.800.623		57.044.356
		296.989.074		349.028.039
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>		93.418.055		42.349.414
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	2.107.036.190	30.030.534	2.484.394.914	34.905.750
Euro Eropa	2.199.999	35.447	6.649.000	114.592
Dolar Singapura	300.267	3.169	165.508	1.755
		30.069.150		35.022.097
		123.487.205		77.371.511
Total		420.476.279		426.399.550

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	8.458.691	14.656.454
Deposito		
1 bulan	82.835.564	105.524.880
3 bulan	89.736.081	126.359.394
6 bulan	30.699.971	21.335.653
12 bulan	33.142.210	12.391.875
Lebih dari 12 bulan	6.315.934	11.715.427
	251.188.451	291.983.683
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	2.453.958	6.721.836
Deposito		
1 bulan	13.977.273	15.552.082
3 bulan	4.267.957	9.877.749
6 bulan	13.633.995	7.114.117
12 bulan	11.019.841	17.505.065
Lebih dari 12 bulan	447.599	273.507
	45.800.623	57.044.356
	296.989.074	349.028.039

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka berdasarkan periode kontrak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
<i>Deposits on call</i>	5.089.264	5.298.872
Deposito		
1 bulan	17.812.972	18.880.984
3 bulan	19.018.915	15.654.291
6 bulan	38.835.110	1.079.504
12 bulan	10.616.294	1.435.763
Lebih dari 12 bulan	2.045.500	-
	<u>93.418.055</u>	<u>42.349.414</u>
<u>Mata uang asing</u>		
<i>Deposits on call</i>	3.123.868	835.828
Deposito		
1 bulan	14.705.225	13.410.028
3 bulan	2.626.988	7.990.114
6 bulan	7.269.198	10.866.152
12 bulan	2.343.871	1.257.681
Lebih dari 12 bulan	-	662.294
	<u>30.069.150</u>	<u>35.022.097</u>
	<u>123.487.205</u>	<u>77.371.511</u>
Total	<u>420.476.279</u>	<u>426.399.550</u>

Tingkat suku bunga rata-rata:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rupiah	3,45%	5,61%
Mata uang asing	0,78	2,24

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh BRI dan entitas anak adalah sebesar Rp134.038 dan Rp460.958 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Dalam rangka implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan PMK No. 104/PMK.05/2020 tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penempatan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, selama tahun 2020 telah dilakukan penempatan dana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- Periode penempatan dana tahap I sebesar Rp1.000.000 dan Rp9.000.000 dalam bentuk deposito dengan suku bunga sebesar 3,42% dari tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020, yang kemudian dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Kementerian Keuangan di Bank Indonesia pada tanggal 25 September 2020.
- Periode penempatan dana tahap II sebesar Rp6.000.000 dan Rp9.000.000 dalam bentuk deposito dengan suku bunga sebesar 2,84% dari tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021, yang kemudian dana tersebut telah dikembalikan ke rekening Kementerian Keuangan di Bank Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri atas:

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
<i>Deposits on call</i>		6.285.000		13.616.500
Deposito berjangka		1.076.890		506.000
Giro		419.749		348.000
<i>Inter-bank call money</i>		10.000		4.715.000
Tabungan		6.764		30.720
		7.798.403		19.216.220
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	173.866.683	2.478.035	141.000.000	1.981.050
Giro	65.848.641	938.508	23.442.800	329.372
Deposito berjangka	56.000.000	798.140	30.000.000	421.500
		4.214.683		2.731.922
<u>Dolar Singapura</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	26.000.000	274.421	52.413.600	555.908
		274.421		555.908
		12.287.507		22.504.050
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro		33.076		152.327
		33.076		152.327
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	70.000.000	997.675	80.400.000	1.129.620
Giro	784.121	11.176		-
		1.041.927		1.281.947
Total		13.329.434		23.785.997

Tingkat suku bunga rata-rata:

	Rupiah		Mata Uang Asing	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<i>Inter-bank call money</i>	3,50%	3,77%	0,12%	0,07%
<i>Deposits on call</i>	2,92	4,46	-	-
Deposito Berjangka	3,12	4,64	1,33	0,39
Giro	1,57	1,33	0,13	0,02
Tabungan	1,41	1,64	-	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021			Total
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
<i>Deposits on call</i>	6.285.000	-	-	6.285.000
Deposito berjangka	59.390	1.017.500	-	1.076.890
Giro	419.749	-	-	419.749
<i>Inter-bank call money</i>	10.000	-	-	10.000
Tabungan	6.764	-	-	6.764
	6.780.903	1.017.500	-	7.798.403
<u>Mata Uang Asing</u>				
Inter-bank call money	1.757.475	211.093	783.888	2.752.456
Giro	938.508	-	-	938.508
Deposito berjangka	-	798.140	-	798.140
	2.695.983	1.009.233	783.888	4.489.104
	9.476.886	2.026.733	783.888	12.287.507
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro	33.076	-	-	33.076
<u>Mata Uang Asing</u>				
<i>Inter-bank call money</i>	997.675	-	-	997.675
Giro	11.176	-	-	11.176
	1.041.927	-	-	1.041.927
Total	10.518.813	2.026.733	783.888	13.329.434

	31 Desember 2020			Total
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
<i>Deposits on call</i>	13.616.500	-	-	13.616.500
<i>Inter-bank call money</i>	4.715.000	-	-	4.715.000
Deposito berjangka	478.000	28.000	-	506.000
Giro	348.000	-	-	348.000
Tabungan	30.720	-	-	30.720
	19.188.220	28.000	-	19.216.220

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA (lanjutan)

Klasifikasi jangka waktu simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	≤ 1 bulan	> 1 - 3 bulan	> 3 bulan - 1 tahun	
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata Uang Asing</u>				
Inter-bank call money	2.536.958	-	-	2.536.958
Deposito berjangka	-	421.500	-	421.500
Giro	329.372	-	-	329.372
	2.866.330	421.500	-	3.287.830
	22.054.550	449.500	-	22.504.050
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Giro	152.327	-	-	152.327
<u>Mata Uang Asing</u>				
Inter-bank call money	1.129.620	-	-	1.129.620
	1.281.947	-	-	1.281.947
Total	23.336.497	449.500	-	23.785.997

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas:

	31 Desember 2021				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
<u>Bank lain</u>					
<u>Obligasi Pemerintah</u>					
FR0090	28 Des 2021	11 Jan 2022	2.000.000	1.867.113	1.867.656
FR0090	21 Des 2021	04 Jan 2022	2.000.000	1.864.800	1.866.612
FR0090	21 Des 2021	04 Jan 2022	2.000.000	1.864.800	1.866.612
FR0086	29 Des 2021	05 Jan 2022	1.500.000	1.449.677	1.449.959
FR0063	08 Mar 2021	15 Mei 2023	1.593.000	1.424.873	1.424.873
FR0090	14 Des 2021	11 Jan 2022	1.500.000	1.404.705	1.406.993
FR0086	29 Des 2021	05 Jan 2022	1.000.000	966.451	966.639
FR0086	29 Des 2021	12 Jan 2022	1.000.000	966.451	966.639
FR0086	24 Des 2021	07 Jan 2022	1.000.000	965.174	965.831
FR0090	28 Des 2021	03 Jan 2022	1.000.000	933.556	933.821
FR0090	22 Des 2021	05 Jan 2022	500.000	466.316	466.724
FR0063	07 Nov 2017	15 Mei 2022	500.000	446.090	446.090
FR0061	28 Feb 2017	13 Mei 2022	362.000	304.722	304.722
FR0086	27 Des 2021	10 Jan 2023	300.000	289.864	289.976
FR0086	29 Des 2021	12 Jan 2022	200.000	193.290	193.328
FR0086	29 Des 2021	12 Jan 2022	200.000	193.290	193.328
FR0088	29 Des 2021	28 Jan 2022	200.000	180.309	180.343
FR0086	29 Des 2021	12 Jan 2022	150.000	144.968	144.996
FR0086	21 Des 2021	18 Jan 2022	100.000	91.222	91.310
FR0087	16 Des 2021	13 Jan 2022	100.000	90.653	90.783
FR0091	22 Des 2021	19 Jan 2022	100.000	90.439	90.517
FR0086	29 Des 2021	05 Jan 2022	90.000	86.981	86.997
			17.395.000	16.285.744	16.294.749

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

	31 Desember 2021				
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>					
<u>Mata uang asing</u>					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
RI0126	16 Des 2021	16 Mar 2022	1.471.427	1.425.314	1.425.462
RI0124	14 Des 2021	14 Mar 2022	712.624	726.674	726.774
RI0124	13 Des 2021	11 Mar 2022	712.624	726.568	726.670
FR0061	03 Juni 2020	15 Mei 2022	842.000	713.361	713.361
FR0086	16 Des 2021	15 Apr 2026	815.000	713.179	713.179
RI0126	14 Des 2021	14 Mar 2022	738.280	712.632	712.723
FR0081	16 Des 2021	13 Juni 2025	791.500	712.264	712.264
FR0043	14 Jan 2019	15 Juli 2022	500.000	453.482	453.482
RI0124	20 Sep 2021	21 Juni 2022	285.050	306.814	306.896
RI0229	28 Okt 2021	28 Apr 2022	228.040	253.466	253.446
RI0727	29 Juli 2021	19 Jan 2022	142.525	151.105	151.206
US TREASURY 0826	16 Des 2021	16 Mar 2022	142.525	144.064	143.980
RI1023	12 Juli 2021	12 Jan 2022	142.525	143.704	143.814
RI0422	25 Okt 2021	24 Jan 2022	142.525	137.294	137.277
FR0061	27 Des 2018	12 Mei 2022	150.000	115.666	115.666
RI1023	16 Des 2021	16 Mar 2022	99.768	103.404	103.352
RI0128	28 Okt 2021	28 Jan 2022	99.768	102.034	102.019
US TREASURY 0523	15 Des 2021	15 Mar 2022	99.768	99.219	99.162
RI0124	12 Juli 2021	12 Jan 2022	71.263	78.362	78.418
US TREASURY 0526	27 Sep 2021	28 Mar 2022	71.263	74.213	74.193
US TREASURY 0623	27 Sep 2021	28 Mar 2022	71.263	71.348	71.329
RI0423	16 Des 2021	16 Mar 2022	71.263	70.407	70.372
RI0331	22 Okt 2021	24 Jan 2022	71.263	61.058	61.023
US TREASURY 0623	20 Sep 2021	21 Mar 2022	57.009	57.107	57.093
RI0125	12 Juli 2021	12 Jan 2022	42.757	45.799	45.832
			8.572.030	8.198.538	8.198.993
Sukuk Berharga Syariah Negara					
INDOIS 24	15 Des 2021	15 Mar 2022	142.525	148.397	148.324
INDOIS 25	29 Okt 2021	29 Apr 2022	142.525	143.729	143.729
INDOIS 27	29 Juli 2021	12 Jan 2022	142.525	137.380	137.513
INDOIS 24	18 Nov 2021	18 Mei 2022	85.515	89.038	89.018
INDOIS 30	16 Des 2021	16 Mar 2022	71.263	67.087	67.047
INDOIS 30	18 Nov 2021	18 Feb 2022	71.263	66.782	66.741
INDOIS 24	27 Sep 2021	27 Juni 2022	57.010	59.603	59.616
INDOIS 24A	18 Nov 2021	18 Mei 2022	57.010	58.871	58.858
INDOIS 22	25 Okt 2021	24 Jan 2022	57.010	54.864	54.857
INDOIS 28	28 Okt 2021	28 Jan 2022	42.757	45.739	45.732
			869.403	871.490	871.435
Obligasi Korporasi					
PT Pertamina (Persero)					
Tahun 2029	16 Des 2021	16 Mar 2022	78.389	80.129	80.089
Tahun 2023	27 Sep 2021	27 Juni 2022	49.883	50.778	50.790
PT Perusahaan Gas Negara (Persero)					
Tahun 2024	27 Sep 2021	27 Juni 2022	71.263	75.823	75.841
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)					
Tahun 2029	16 Des 2021	16 Mar 2022	47.033	52.322	52.296
			246.568	259.052	259.016

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

31 Desember 2021					
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					
Obligasi Pemerintah					
	28 Des 2021	04 Jan 2022	1.500.000	1.400.334	1.400.743
	FR0090				
	29 Des 2021	05 Jan 2022	1.000.000	966.451	966.639
	FR0086				
	27 Des 2021	03 Jan 2022	500.000	483.107	483.295
	FR0086				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					
Obligasi Pemerintah					
	28 Des 2021	04 Jan 2022	500.000	466.778	466.914
	FR0090				
	22 Des 2021	05 Jan 2023	500.000	466.316	466.724
			4.000.000	3.782.986	3.784.315
Total			31.083.001	29.397.810	29.408.508

31 Desember 2020					
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga</u>					
<u>Rupiah</u>					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
	28 Des 2020	04 Jan 2021	2.500.000	5.288.593	5.290.355
	FR0084				
	30 Des 2020	06 Jan 2021	2.500.000	5.065.403	5.065.965
	FR0086				
	19 Des 2020	05 Jan 2021	2.500.000	4.993.115	4.994.225
	FR0053				
	29 Des 2020	29 Jan 2021	2.500.000	2.295.707	2.296.198
	FR0086				
	14 Des 2020	14 Jan 2021	2.000.000	1.881.568	1.884.944
	FR0061				
	17 Des 2020	15 Jan 2021	1.869.300	1.869.300	1.872.062
	FR0087				
	14 Des 2020	14 Jan 2021	1.000.000	928.450	930.116
	FR0053				
	21 Des 2020	21 Jan 2021	1.000.000	915.750	916.717
	FR0086				
	28 Des 2020	11 Jan 2021	1.000.000	911.235	911.523
	FR0086				
	23 Des 2020	22 Jan 2021	908.999	908.999	909.769
	FR0086				
	16 Des 2020	15 Jan 2021	750.000	696.279	697.382
	FR0063				
	28 Des 2020	25 Jan 2021	500.000	529.038	529.217
	FR0084				
	28 Des 2020	11 Jan 2021	500.000	529.038	529.216
	FR0084				
	07 Mei 2019	15 Jul 2021	550.000	519.218	519.218
	FR0053				
	16 Des 2020	15 Jan 2021	500.000	465.256	465.992
	FR0087				
	18 Des 2020	18 Jan 2021	458.889	458.889	459.519
	FR0086				
	18 Des 2020	08 Jan 2021	458.889	458.889	459.511
	FR0086				
	07 Nov 2017	15 Jun 2021	500.000	446.090	446.090
	FR0063				
	06 Sep 2016	15 Mei 2023	450.000	437.025	437.025
	FR0053				
	09 Sep 2016	15 Jul 2021	416.000	390.000	390.000
	FR0053				
	28 Feb 2017	15 Jul 2021	440.000	382.690	382.690
	FR0053				
	06 Sep 2016	15 Jul 2021	300.000	344.315	344.315
	FR0034				
	07 Mei 2019	15 Jun 2021	300.000	313.520	314.480
	FR0034				
	28 Feb 2017	13 Mei 2022	362.000	304.722	304.722
	FR0061				
	28 Des 2020	06 Jan 2021	300.000	273.370	273.457
	FR0086				
	28 Des 2020	07 Jan 2021	300.000	273.370	273.457
	FR0086				
	16 Des 2020	15 Jan 2021	200.000	213.904	214.238
	FR0073				
	15 Des 2020	15 Jan 2021	200.000	185.673	185.987
	FR0053				
	30 Des 2020	14 Jan 2021	200.000	183.769	183.788
	FR0086				
	29 Des 2020	12 Jan 2021	200.000	183.657	183.695
	FR0086				
	28 Des 2020	05 Jan 2021	200.000	182.247	182.305
			25.864.077	32.829.079	32.848.178

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI (lanjutan)

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri atas (lanjutan):

31 Desember 2020					
	Tanggal Jual	Tanggal Beli Kembali	Nilai Nominal	Nilai Jual	Nilai Tercatat
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>					
<u>Mata uang asing</u>					
Bank lain					
Obligasi Pemerintah					
RI0126	30 Des 2020	30 Mar 2021	1.475.250	1.404.438	1.404.456
FR10124	28 Des 2020	29 Mar 2021	1.475.250	1.387.208	1.387.260
FR0061	03 Jun 2020	15 Mei 2022	842.000	703.226	703.226
RI0126	23 Des 2020	23 Mar 2021	702.500	669.101	669.168
FR0043	14 Jan 2019	15 Jul 2022	500.000	447.038	447.038
RI0126	28 Des 2020	28 Jan 2021	351.250	380.765	380.774
RI0521	29 Des 2020	29 Mar 2021	351.250	326.603	326.610
RI0124	30 Des 2020	30 Mar 2021	210.750	225.349	225.351
RI0521	25 Nov 2020	25 Jan 2021	140.500	136.373	136.430
RI0230	30 Des 2020	23 Jun 2021	140.500	130.090	130.092
FR0061	27 Des 2018	12 Mei 2022	150.000	114.023	114.023
SIGB 0625	11 Des 2020	11 Feb 2021	106.062	112.635	112.654
RI10223	23 Okt 2020	13 Okt 2021	98.350	105.662	105.786
US TREASURY 0526	30 Des 2020	29 Jan 2021	70.250	74.676	74.677
RI0423	23 Okt 2020	13 Okt 2021	70.250	70.742	70.824
RI0428	30 Des 2020	23 Jun 2021	70.250	69.738	69.740
US TREASURY 0623	18 Des 2020	17 Feb 2021	70.250	68.987	69.008
US TREASURY 0523	18 Des 2020	17 Feb 2021	70.250	68.708	68.729
US TREASURY 0623	30 Des 2020	29 Jan 2021	56.200	56.341	56.341
			6.951.112	6.551.703	6.552.187
Sukuk Berharga Syariah Negara					
INDOIS 27	18 Des 2020	19 Jan 2021	351.250	368.607	368.640
INDOIS 22	23 Okt 2020	13 Okt 2021	56.200	55.513	55.578
			407.450	424.120	424.218
			7.358.562	6.975.823	6.976.405
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>					
<u>Rupiah</u>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk					
Obligasi Pemerintah					
FR0087	17 Des 2020	15 Jan 2021	483.663	467.324	468.015
FR0063	15 Des 2020	15 Jan 2021	200.000	185.760	186.074
			683.663	653.084	654.089
Total			33.906.302	40.457.986	40.478.672

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Berkelanjutan I BRI		
Tahap II Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp53 pada tanggal 31 Desember 2020	-	2.647.705
Tahap III Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp54 pada tanggal 31 Desember 2020	-	681.740
Obligasi Berkelanjutan II BRI		
Tahap I Tahun 2016		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.882 dan Rp2.287 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	2.758.905	2.944.204
Tahap II Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp606 dan Rp1.206 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	2.208.297	2.224.294
Tahap III Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp933 dan Rp1.793 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	4.147.056	4.146.745
Tahap IV Tahun 2018		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp776 dan Rp1.611 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	2.431.080	2.430.539
Obligasi Berkelanjutan III BRI		
Tahap I Tahun 2019		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.253 dan Rp5.421 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	4.220.168	4.218.115
<i>Negotiable Certificate Deposits</i> Tahun 2020		
setelah dikurang biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp22.984 pada tanggal 31 Desember 2020	-	827.016
Obligasi I BRI Agro Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp125 dan Rp351 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	218.448	218.051
MTN I BRI Finance Tahun 2019		
setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp139 dan Rp436 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	159.225	158.497

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
MTN II BRI Finance Tahun 2021 setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp437 pada tanggal 31 Desember 2021	322.303	-
Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp290 pada tanggal 31 Desember 2020	-	838.710
Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp267 dan Rp693 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	749.733	749.307
Tahap II Tahun 2018 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp524 dan Rp1.074 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.245.476	2.463.581
Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.319 dan Rp2.781 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.985.358	1.966.353
Tahap II Tahun 2019 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp984 dan Rp1.492 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.310.986	1.311.059
Tahap III Tahun 2020 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp479 dan Rp643 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	249.521	249.357
Tahap IV Tahun 2020 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp788 dan Rp2.236 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	828.212	1.731.564
Tahap V Tahun 2021 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp850 pada tanggal 31 Desember 2021	665.350	-
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021 setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp7.592 pada tanggal 31 Desember 2021	2.972.308	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

<u>Rupiah (lanjutan)</u>	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
MTN PNM		
Tahap XIII Tahun 2017	375.000	375.000
Tahap XIX Tahun 2018	-	500.000
Tahap XIX Tahun 2019	-	623.500
Sukuk Mudharabah I PNM		
Tahap I Tahun 2017	-	100.000
Sukuk Mudharabah II PNM		
Tahap I Tahun 2018	300.000	300.000
Sukuk Mudharabah III PNM		
Tahap I Tahun 2019	300.000	300.000
Tahap II Tahun 2019	50.000	50.000
Tahun 2019	657.000	1.442.000
Tahap II Tahun 2021	208.000	-
Sukuk Mudharabah IV PNM		
Tahap I Tahun 2020	200.000	200.000
Tahun 2021	2.000.000	-
Sukuk Berkelanjutan PNM		
Tahap I Tahun 2021	1.993.506	-
Obligasi Berkelanjutan I Pegadaian		
Tahap I Tahun 2011		
setelah dikurang biaya emisi obligasi		
yang belum diamortisasi sebesar Rp100		
pada tanggal 31 Desember 2020	-	486.633
Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian		
Tahap I Tahun 2017		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi		
yang belum diamortisasi masing-masing		
sebesar Rp216 dan Rp496 pada tanggal		
31 Desember 2021 dan 2020	916.468	906.620
Tahap II Tahun 2018		
setelah dikurang biaya emisi obligasi		
yang belum diamortisasi masing-masing		
sebesar Rp420 dan Rp937		
pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	1.755.544	2.896.936
Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian		
Tahap I Tahun 2020		
setelah dikurang biaya emisi obligasi		
yang belum diamortisasi masing-masing		
sebesar Rp184 dan Rp934 pada tanggal		
31 Desember 2021 dan 2020	69.816	353.669
Tahap II Tahun 2020		
setelah dikurang biaya emisi obligasi		
yang belum diamortisasi masing-masing		
sebesar Rp289 dan Rp1.123 pada tanggal		
31 Desember 2021 dan 2020	371.417	1.346.094
Tahap III Tahun 2020		
setelah dikurang biaya emisi obligasi		
yang belum diamortisasi masing-masing		
sebesar Rp665 dan Rp2.227 pada tanggal		
31 Desember 2021 dan 2020	986.584	2.342.554

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERTAHAGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

BRI dan entitas anak menerbitkan surat berharga dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian (lanjutan)		
Tahap IV Tahun 2021		
setelah dikurangi biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.571 pada tanggal 31 Desember 2021	3.162.198	-
MTN Syariah Mudharabah I Seri A	-	250.000
MTN Syariah Mudharabah I Seri B	-	50.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian		
Tahap I Tahun 2020	49.000	100.000
Tahap II Tahun 2020	183.500	500.000
Tahap III Tahun 2020	131.000	835.000
Tahap IV Tahun 2021	765.000	-
Surat Berharga Komersil I Pegadaian Tahun 2021 setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi sebesar Rp437 pada tanggal 31 Desember 2021	146.857	-
	<u>41.093.316</u>	<u>43.764.843</u>
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp17.109 dan Rp27.504 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	7.109.141	6.997.936
Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019) setelah dikurangi diskonto dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp22.010 dan Rp30.752 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020	7.104.240	6.994.249
	<u>14.213.381</u>	<u>13.992.185</u>
Total	<u>55.306.697</u>	<u>57.757.028</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Amortisasi atas biaya emisi surat berharga yang diterbitkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp52.720 dan Rp70.079.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan:

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI

Pada tanggal 25 Juni 2015, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dengan nilai pokok sebesar Rp3.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp655.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2016.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2018.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp1.420.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Juli 2020.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 3 Oktober 2015. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 19 Januari 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.650.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp808.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 8 Februari 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.018.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.823.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 4 Februari 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 4 Mei 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 4 Mei 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.350.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.212.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.437.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp701.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 25 Agustus 2016. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 31 Desember 2020 Obligasi Berkelanjutan I BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

a) Obligasi Berkelanjutan I BRI (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap I Seri C, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri B, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap II Seri C, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri A, Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri B dan Obligasi Berkelanjutan I BRI Tahap III Seri C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp655.000, Rp925.000, Rp1.420.000, Rp808.000, Rp1.018.500, Rp2.823.500, Rp1.212.000, Rp2.437.000 dan Rp701.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI

Pada tanggal 2 Desember 2016, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dengan nilai pokok sebesar Rp4.600.000 dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp616.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2017.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp964.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2019.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp193.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp477.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2023.
- Seri E: Nilai pokok sebesar Rp2.350.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,90% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2026.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Tahun 2016 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 1 Maret 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 12 April 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.100.000 dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.131.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2018.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.743.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2020.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp925.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,30% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2022.
- Seri D: Nilai pokok sebesar Rp1.300.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,80% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 April 2027.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 11 Juli 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

b) Obligasi Berkelanjutan II BRI (lanjutan)

Pada tanggal 25 Agustus 2017, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp5.150.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp980.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.652.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.517.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Agustus 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 24 November 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal 22 Februari 2018, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp2.442.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.837.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2023.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp605.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 2025.

Bunga Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap IV Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 21 Mei 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Obligasi Berkelanjutan II BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap I Seri A, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri A, Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap II Seri B, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I seri C dan Obligasi Berkelanjutan II BRI Tahap III Seri A dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp616.000, Rp964.000, Rp193.000, Rp1.131.000 dan Rp1.743.500 dan Rp980.500 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

c) Obligasi Berkelanjutan III BRI

Pada tanggal 7 November 2019, BRI menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar Rp5.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp737.850 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 17 November 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp2.089.350 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2022.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.172.800 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 November 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Tahun 2019 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Februari 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Obligasi Berkelanjutan III BRI memperoleh *rating* AAA dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BRI adalah untuk mengembangkan bisnis perusahaan dengan penyaluran kredit dengan menerapkan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*.

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi Berkelanjutan adalah BRI tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I Seri A dengan nilai Rp737.850 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

d) Obligasi I BRI Agro

Pada tanggal 7 Juli 2017, setelah menerima Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari OJK No. S-348/D.04/2017 tertanggal 22 Juni 2017, BRI Agro menerbitkan Obligasi I BRI Agro Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp261.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2020.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp239.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2022.

Bunga Obligasi I BRI Agro dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 7 Oktober 2017. Pada saat diterbitkan, Obligasi ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Obligasi I BRI Agro memperoleh *rating* AA dari Pefindo. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran kredit.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

d) Obligasi I BRI Agro (lanjutan)

Persyaratan penting dalam perjanjian Obligasi I BRI Agro adalah BRI Agro tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Obligasi I BRI Agro Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp261.000 telah dilunasi oleh BRI Agro pada tanggal jatuh temponya.

e) *Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)*

Pada tanggal 16 Juli 2018, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2018 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2023 dengan tingkat bunga tetap 4,63% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,696% atau setara dengan ASD498.480.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 20 Januari 2019. Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa2 dan BBB-.

Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat struktur pendanaan umum BRI.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 *Senior Unsecured Notes Due 2023 (Global Bond BRI)* Tahun 2018 memperoleh *rating* Baa2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

f) *Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019)*

Pada tanggal 28 Maret 2019, BRI menerbitkan dan mendaftarkan Obligasi BRI Tahun 2019 dengan nominal sebesar ASD500.000.000 (angka penuh) pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST)* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2024 dengan tingkat bunga tetap 3,95% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan sebesar 99,713% atau setara dengan ASD498.565.000 (angka penuh) dan bunga obligasi tersebut dibayarkan setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 28 September 2019.

Pada saat diterbitkan, obligasi ini diperingkat oleh Moody's dan Fitch dengan *rating* masing-masing Baa2 dan BBB-. Penerimaan neto dari penerbitan Obligasi BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk mendanai *Eligible Project* sesuai dengan *Sustainability Framework*.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 *Senior Unsecured Notes Due 2024 (Sustainability Bond BRI Tahun 2019)* memperoleh *rating* BAA2 dan BBB- masing-masing dari Moody's dan Fitch.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

g) MTN I BRI Finance Tahun 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019, BRI Finance menerbitkan MTN I BRI Finance Tahun 2019 dengan nilai pokok sebesar Rp300.000 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2022 dengan tingkat suku bunga tetap 9,25% per tahun. Bunga MTN Tahap I dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 13 Maret 2020. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* idAA-.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 MTN I BRI Finance Tahun 2019 memperoleh peringkat AA- dari Pefindo.

Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran pinjaman jangka pendek perbankan dan memperkuat struktur pendanaan perseroan. Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI Finance tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

BRI Finance juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan antara lain *gearing ratio* paling rendah nol kali dan paling tinggi 10 kali, rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%, rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset paling rendah 40%, rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan modal kerja paling sedikit 10% dari total saldo piutang pembiayaan, rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%, rasio *non-performing financing* paling tinggi sebesar 5%, memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000 juta, mempertahankan nilai jaminan minimal 50% dari nilai pokok MTN dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

h) *Negotiable Certificates of Deposit* (NCD) I Bank BRI Tahun 2020

Pada tanggal 29 Juni 2020, BRI menerbitkan *Negotiable Certificates of Deposit* (NCD) I Bank BRI Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp2.000.000 juta dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut :

- Seri A : Nilai pokok sebesar Rp630.000 dengan tingkat bunga sebesar 5,35% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020.
- Seri B : Nilai pokok sebesar Rp520.000 dengan tingkat bunga sebesar 5,30% per tahun, untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2020.
- Seri C : Nilai pokok sebesar Rp850.000 dengan tingkat bunga sebesar 5,75% per tahun, untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2021.

Penerimaan neto dari penerbitan *Negotiable Certificates of Deposit* (NCD) BRI tersebut akan dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan likuiditas rupiah.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Negotiable Certificates of Deposit (NCD) I Bank BRI Seri A, B dan C dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp630.000, Rp520.000 dan Rp850.000 telah dilunasi oleh BRI pada tanggal jatuh temponya.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

i) MTN II BRI Finance Tahun 2021

Pada tanggal 17 September 2021, BRI Finance menerbitkan MTN II BRI Finance Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 September 2024 dengan tingkat suku bunga tetap 6,40% per tahun. Bunga MTN Tahap II dibayarkan setiap 3 bulan mulai tanggal 17 Desember 2021. Pada saat diterbitkan, MTN ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating idAA.

Penerimaan neto dari penerbitan MTN tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran pinjaman jangka pendek perbankan dan memperkuat struktur pendanaan perseroan. Persyaratan penting dalam perjanjian MTN adalah BRI Finance tanpa persetujuan tertulis dari agen pemantau tidak akan mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor, melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan dan pengambilalihan perusahaan.

BRI Finance juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan antara lain gearing rasio paling rendah nol kali dan paling tinggi 10 kali, rasio permodalan paling sedikit sebesar 10%, rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset paling rendah 40%, rasio saldo piutang pembiayaan investasi dan modal kerja paling sedikit 10% dari total saldo piutang pembiayaan, rasio ekuitas terhadap modal disetor paling rendah sebesar 50%, rasio non-performing financing paling tinggi sebesar 5%, memiliki ekuitas lebih besar dari Rp200.000 juta, mempertahankan nilai jaminan minimal 50% dari nilai pokok MTN dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.

j) Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II tahun 2016

Pada tanggal 12 Desember 2014, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000 Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-534/D.04/2014 tanggal 12 Desember 2014.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II 2016 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 November 2016 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp661.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 November 2019.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp839.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 November 2021.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. 937/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 20 September 2021 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Obligasi tersebut mendapatkan peringkat idAA (Double A) yang berlaku untuk periode 1 Juli 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

k) Obligasi Berkelanjutan II PNM tahun 2017

Pada tanggal 21 Juni 2017, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000 Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-345/D.04/2014 tanggal 21 Juni 2017.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I 2017 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Juli 2017 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp750.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2020.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp750.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Obligasi Berkelanjutan II PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) rating idAA (Double A).

l) Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II tahun 2018

Pada tanggal 21 Juni 2017, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp4.000.000 Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-345/D.04/2014 tanggal 21 Juni 2017.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II 2018 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 April 2018 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.254.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 13 April 2021.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp1.246.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Obligasi Berkelanjutan II PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) rating idAA (Double A).

m) Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I 2019 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2019 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.401.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp599.000, tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo 28 Mei 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) rating idAA (Double A).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

n) Obligasi Berkelanjutan III PNM tahap II tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp586.500, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2022.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp763.500, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 November 2024.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) rating idAA (Double A).

o) Obligasi Berkelanjutan III PNM tahap III tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp55.100, tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2023.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp194.100, tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal 30 Juli 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) rating idA+ (Single A Plus).

p) Obligasi Berkelanjutan III PNM tahap IV tahun 2020

Pada tanggal 23 Mei 2019, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2020 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp904.800, tingkat bunga tetap sebesar 6,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari kalender dan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2021.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp537.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2023.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp292.000, tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, untuk jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2025.

Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 4 Maret 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) rating idA+ (Single A Plus).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

q) Obligasi Berkelanjutan III PNM tahap V tahun 2021

Pada tanggal 23 Mei 2019, PNM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000. Obligasi telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: S-58/D.04/2019 tanggal 23 Mei 2019.

PNM menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021 yang sudah dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2021 yang terdiri dari:

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp168.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, untuk jangka waktu 370 hari kalender dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2022
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp159.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, untuk jangka waktu 3 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2024.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp339.200, tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, untuk jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Maret 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Obligasi Berkelanjutan III PNM memperoleh peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) rating idAA (Double A).

PNM sudah mematuhi setiap syarat dan pembatasan yang diberikan oleh Wali Amanat atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap V Tahun 2021, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap IV Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap III Tahun 2020, Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I dan II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap II Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan II PNM Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2016, Obligasi Berkelanjutan I PNM Tahap I Tahun 2014, Obligasi II PNM Tahun 2013, dan Obligasi I PNM Tahun 2012.

r) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 pada tanggal 8 Juli 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp6.000.000 dalam 3 (tiga) seri terdiri dari sebagai berikut :

- Seri A: Jumlah pokok sebesar Rp1.158.000, nisbah sebesar 6,00% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender.
- Seri B: Jumlah pokok sebesar Rp515.000, nisbah sebesar 7,00% per tahun, berjangka waktu 3 tahun.
- Seri C: Jumlah pokok sebesar Rp327.000, nisbah sebesar 8,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun.

Pembayaran nisbah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 8 Juli 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 memperoleh rating A+ dari Pefindo.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

r) Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM tahap I tahun 2021 (lanjutan)

Pembatasan yang dipersyaratkan oleh wali amanat:

1. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap perusahaan kepada pihak manapun melebihi 50% dari nilai aktiva tetap dalam satu tahun berjalan;
2. Mengadakan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan tindakan melikuidasi Perusahaan;
3. Melakukan akuisisi saham atau aset;
4. Mengubah bidang usaha perusahaan kecuali atas keputusan pemerintah;
5. Melakukan pengakhiran perjanjian-perjanjian perusahaan yang berdampak negatif secara material;
6. Mengurangi modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

s) Sukuk Mudharabah I PNM

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah I PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2017 Seri B pada tanggal 28 September 2017 sebesar Rp22.000.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, nisbah sebesar 44,7917% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2019. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri B. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah Bank Bukopin dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah I Seri B tercatat di bursa KSEI.

t) Sukuk Mudharabah II PNM

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah II PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Tahun 2018 Seri A pada tanggal 26 Februari 2018 sebesar Rp60.000.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan, nisbah sebesar 30,00% per tahun dari pendapatan yang dibagihasilkan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2022. Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah II Seri A. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah Seri B adalah Bank BJB dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk Mudharabah II seri B tercatat di bursa KSEI.

u) Sukuk Mudharabah III PNM

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahap I : Nilai pokok sebesar Rp300.000 dengan nisbah sebesar 19% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2024.
- Tahun 2019 Seri A: Nilai pokok sebesar Rp435.000 dengan nisbah sebesar 25,48% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021.
- Tahun 2019 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp65.000 dengan nisbah sebesar 3,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Tahun 2019 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp322.000 dengan nisbah sebesar 17,94% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

u) Sukuk Mudharabah III PNM (lanjutan)

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah III PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut (lanjutan):

- Tahun 2019 Seri D: Nilai pokok sebesar Rp350.000 dengan nisbah sebesar 20,50% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 10 bulan 24 hari dan jatuh tempo pada tanggal 24 September 2021.
- Tahun 2019 Seri E: Nilai pokok sebesar Rp100.000 dengan nisbah sebesar 6,00% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 11 bulan 10 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Tahap II Seri E: Nilai pokok sebesar Rp50.000 dengan nisbah sebesar 3,00% per tahun, untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 10 bulan 25 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2022.
- Tahun 2019 Seri F: Nilai pokok sebesar Rp120.000 dengan nisbah sebesar 6,69% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.
- Tahun 2019 Seri H: Nilai pokok sebesar Rp50.000 dengan nisbah sebesar 3,00% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2023.
- Tahun 2021 Tahap II Seri F: Nilai pokok sebesar Rp208.000 dengan nisbah sebesar 11,59% per tahun, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 9 bulan 16 hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2023.

Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah III Waliamanat untuk penerbitan Sukuk Mudharabah III adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk tercatat di bursa KSEI.

v) Sukuk Mudharabah IV PNM

PNM menerbitkan Sukuk Mudharabah IV PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam beberapa seri sebagai berikut:

- Tahun 2020 Tahap I Seri A: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2023.
- Tahun 2020 Seri B: Nilai pokok sebesar Rp780.000 dengan nisbah sebesar 40,95% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024.
- Tahun 2020 Seri C: Nilai pokok sebesar Rp200.000 dengan nisbah sebesar 9,75% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2024.
- Tahun 2020 Seri D: Nilai pokok sebesar Rp308.000 dengan nisbah sebesar 16,17% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2024.

Tidak ada jaminan pada penerbitan Sukuk Mudharabah IV. Waliamanat untuk penerbitan Sukuk adalah Bank Syariah Mandiri dengan pemeringkat Pefindo dan peringkat A+. Jadwal pembayaran nisbah adalah 3 bulanan. Tujuan penerbitan Sukuk ini adalah untuk tambahan modal kerja murabahah melalui Mekaar Syariah dan UlaMM Syariah. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha emiten. Penerbitan Sukuk tercatat di bursa KSEI.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

w) *Medium Term Notes* PNM

PNM menerbitkan MTN XIII Seri A pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri B pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan baik untuk MTN XIII seri A maupun B. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII A dan B adalah Cessie. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Nama Waliamanat dalam penerbitan MTN XII Seri A dan B adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri A dan B adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

PNM menerbitkan MTN XIII Seri C pada tanggal 28 April 2017 sebesar Rp200.000.000.000 dengan jangka waktu 57 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri D pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp15.000.000.000 dengan jangka waktu 56 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan baik untuk MTN XIII seri C maupun D. Jaminan yang diberikan dalam penerbitan MTN Seri XIII C dan D adalah Cessie. Tidak ada keterkaitan waliamanat dengan usaha Emiten dalam penerbitan MTN XIII Seri C dan D. Nama Waliamanat dalam penerbitan MTN XII Seri C dan D adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Tidak ada peringkat dalam penerbitan MTN XIII Seri A dan B. Tujuan penerbitan MTN XIII Seri C dan D adalah untuk penambahan modal kerja dalam rangka pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil.

PNM menerbitkan MTN XIII Seri A pada tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp50.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Januari 2022. Perusahaan menerbitkan MTN XIII Seri B pada tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp110.000.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Maret 2022. Jadwal pembayaran bunga secara 3 bulanan

x) Obligasi Berkelanjutan I Pegadaian

Pada tanggal 11 Oktober 2011, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2011 dengan nilai pokok sebesar Rp1.000.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp250.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2014.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp250.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2016.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 11 Oktober 2021.

Bunga Obligasi Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2011 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 11 Januari 2012. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating idAAA.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

y) Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian

Pada tanggal 3 Oktober 2017, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017 dengan nilai pokok sebesar Rp2.500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,55% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2018.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,40% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 3 Oktober 2020.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Oktober 2022.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2017 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 3 Januari 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating idAAA.

Pada tanggal 16 Maret 2018, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp3.500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp450.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,80% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2019.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.050.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2021.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp2.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2023.

Bunga Obligasi Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2018 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 16 Juni 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating idAAA.

z) Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian

Pada tanggal 13 Mei 2020, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp400.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp330.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,90% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp70.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2023.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 13 Agustus 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating idAAA.

Pada tanggal 08 Juli 2020, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp1.500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.055.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp303.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2023.
- Seri C: Nilai pokok sebesar Rp142.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,95% per tahun, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 08 Juli 2025.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan surat berharga yang diterbitkan (lanjutan):

z) Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian (lanjutan)

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 08 Oktober 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating idAAA.

Pada tanggal 22 September 2020, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 dengan nilai pokok sebesar Rp2.420.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp1.295.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan jatuh tempo pada tanggal 2 Oktober 2021.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.125.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 September 2023.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 22 Desember 2020. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating idAAA.

Pada tanggal 06 April 2021, Pegadaian menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021 dengan nilai pokok sebesar Rp3.280.000 dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A: Nilai pokok sebesar Rp2.172.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,85% per tahun, untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2022.
- Seri B: Nilai pokok sebesar Rp1.107.500 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,20% per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 06 April 2024.

Bunga Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2020 dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan mulai tanggal 06 Juli 2021. Pada saat diterbitkan, Obligasi Berkelanjutan ini diperingkat oleh Pefindo dengan rating idAAA.

25. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman yang diterima terdiri atas:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Bank Indonesia		
Pinjaman likuiditas	15.596	15.656
Pinjaman lainnya	4.274	12.273
Pinjaman lainnya	17.893.316	15.063.254
	17.913.186	15.091.183
<u>Mata uang asing</u>		
Pinjaman sindikasi <i>club loan</i>		
setelah dikurangi biaya transaksi		
yang belum diamortisasi	10.841.689	20.908.210
Pinjaman dari BNP Paribas		
setelah dikurangi biaya transaksi		
yang belum diamortisasi	391.076	492.892
Pinjaman lainnya	19.204.907	13.409.618
	30.437.672	34.810.720
	48.350.858	49.901.903

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Pinjaman yang diterima terdiri atas (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
Pinjaman dari		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	9.576.928	10.797.907
Pusat Investasi Pemerintah	3.917.715	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.899.683	1.700.260
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.891.825	4.136.964
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	1.672.732	-
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	810.871	3.574.291
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	177.148	-
Danareksa Finance	100.000	74.735
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	34.348	17.319
Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir	26.439	15.042
PT Bank Negara Indonesia Syariah	-	975.321
PT Bank Syariah Mandiri	-	970.494
	<u>20.107.689</u>	<u>22.262.333</u>
Total	<u>68.458.547</u>	<u>72.164.236</u>

Klasifikasi jangka waktu pinjaman yang diterima berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	10.275.617	389.156
> 1 bulan - 3 bulan	255.706	677.596
> 3 bulan - 1 tahun	3.243.987	5.200.251
> 1 tahun - 5 tahun	4.075.175	8.810.586
> 5 tahun	62.700	13.594
	<u>17.913.185</u>	<u>15.091.183</u>
<u>Mata uang asing</u>		
≤ 1 bulan	6.596.125	3.792.929
> 1 bulan - 3 bulan	6.862.891	4.080.807
> 3 bulan - 1 tahun	5.577.261	14.786.730
> 1 tahun - 5 tahun	7.119.921	12.143.558
> 5 tahun	4.281.475	6.696
	<u>30.437.673</u>	<u>34.810.720</u>
	<u>48.350.858</u>	<u>49.901.903</u>
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>		
<u>Rupiah</u>		
≤ 1 bulan	-	312.266
> 1 bulan - 3 bulan	235.281	523.434
> 3 bulan - 1 tahun	12.372.552	16.597.848
> 1 tahun - 5 tahun	6.545.958	4.811.466
> 5 tahun	953.898	17.319
	<u>20.107.689</u>	<u>22.262.333</u>
Total	<u>68.458.547</u>	<u>72.164.236</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima:

a) Pinjaman dari Bank Indonesia

Pinjaman likuiditas

Pinjaman ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada debitur-debitur BRI antara lain untuk keperluan Kredit Investasi, Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Tebu Rakyat, Pinjaman untuk BULOG dan KUD, Kredit Modal Kerja Permanen, Pupuk dan lain-lain.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,02%.

b) Pinjaman sindikasi *club loan* (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2018, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD700.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh MUFG Bank (*agent*), yang terbagi atas:

- a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian dan telah jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2019 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
 - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD20.000.000,
 - Commerzbank AG, sebesar ASD20.000.000,
 - DBS Bank, Ltd., sebesar ASD10.000.000,
 - PT Bank HSBC Indonesia, sebesar ASD10.000.000,
 - Mizuho Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD55.000.000,
 - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD10.000.000,
 - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD22.500.000,
 - Wells Fargo Bank, N.A., cabang London sebesar ASD52.500.000.
- b. Fasilitas B sebesar ASD235.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah marjin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
 - Cathay United Bank, sebesar ASD30.000.000,
 - Citibank, N.A., cabang Jakarta sebesar ASD10.000.000,
 - Commerzbank AG, sebesar ASD30.000.000,
 - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD30.000.000,
 - DBS Bank, Ltd., sebesar ASD20.000.000,
 - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar ASD20.000.000,
 - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD32.500.000,
 - United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD32.500.000.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

b) Pinjaman sindikasi *club loan* (lanjutan)

Pada tanggal 19 Desember 2018, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD700.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh MUFG Bank (*agent*), yang terbagi atas (lanjutan):

c. Fasilitas C sebesar ASD265.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2022. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:

- Cathay United Bank, sebesar ASD20.000.000,
- Citibank, N.A., cabang Hong Kong sebesar ASD20.000.000,
- CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD36.000.000,
- DBS Bank Ltd. sebesar ASD20.000.000,
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd., cabang Singapura sebesar ASD30.000.000,
- MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
- Standard Chartered Bank, cabang Singapura ASD63.500.000,
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD25.000.000,
- United Overseas Bank, Ltd., sebesar ASD20.500.000.

Pinjaman sindikasi ini digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang dan *maturity profile* BRI. Pokok pinjaman dibayarkan pada saat periode pinjaman berakhir, sedangkan bunga pinjaman dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, BRI mendapatkan fasilitas pinjaman sindikasi berupa *club loan* dengan total pinjaman sebesar ASD1.000.000.000 (angka penuh). Pinjaman ini difasilitasi oleh Citicorp International Limited (*agent*), penarikan yang telah dilakukan terbagi atas:

a. Fasilitas A sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 14 Agustus 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2021 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:

- MUFG Bank Ltd sebesar ASD32.000.000,
- China Development Bank, cabang Hong Kong, sebesar ASD86.000.000,
- PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD20.000.000,
- CTBC Bank Co., Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD20.000.000,
- Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD22.000.000,
- Citibank, N.A., cabang Indonesia, sebesar ASD20.000.000.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

b) Pinjaman sindikasi club loan (lanjutan)

Pada tanggal 14 Oktober 2020, telah dilakukan penarikan untuk sisa fasilitas pinjaman sindikasi berupa club loan sebesar ASD800.000.000 (angka penuh) yang difasilitasi oleh Citicorp International Limited (*agent*), sebagai berikut:

- a. Fasilitas A sebesar ASD300.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2021 (telah dilunasi oleh BRI). Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- MUFG Bank Ltd sebesar ASD48.000.000,
 - China Development Bank, cabang Hong Kong, sebesar ASD129.000.000,
 - PT Bank Mizuho Indonesia, sebesar ASD30.000.000,
 - CTBC Bank, Co., Ltd., cabang Singapura, sebesar ASD30.000.000,
 - Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD33.000.000,
 - Citibank, N.A., cabang Indonesia, sebesar ASD27.000.000,
 - Wells Fargo Bank, sebesar ASD900.000,
 - The Hyakugo Bank, Ltd., sebesar ASD600.000,
 - PT Bank Permata Tbk, sebesar ASD600.000,
 - DZ Bank AG, Deutsche Zentral, sebesar ASD900.000.
- b. Fasilitas B sebesar ASD200.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan akan jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2022. Bank yang ikut berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- Bank of China (Hong Kong) Limited, sebesar ASD20.000.000,
 - BNP Paribas, cabang Singapura sebesar ASD50.000.000,
 - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD10.000.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura, sebesar ASD50.000.000,
 - United Overseas Bank Limited, sebesar ASD70.000.000.
- c. Fasilitas C sebesar ASD300.000.000 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 3 (tiga) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. Jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal 14 Oktober 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2025. Bank yang berpartisipasi dalam pinjaman ini adalah:
- China Development Bank, sebesar ASD150.000.000,
 - CTBC Bank, Co., Ltd., sebesar ASD25.000.000,
 - MUFG Bank, Ltd., cabang Singapura sebesar ASD20.000.000,
 - Standard Chartered Bank (Singapore) Limited, sebesar ASD50.000.000,
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cabang Singapura sebesar ASD50.000.000,
 - United Overseas Bank Limited, sebesar ASD5.000.000.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

c) Pinjaman dari BNP Paribas

Pada tanggal 7 Juni 2016, BRI telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan skema *Export Credit Financing* (ECF) untuk membiayai komponen dan jasa peluncuran BRIsat yang dilakukan oleh *Arianespace* Perancis. Pinjaman ini terdiri dari 2 (dua) fasilitas, yaitu:

- Fasilitas *Tranche Banque Publique d'Investissement* (BPI) senilai ASD49.961.501,23 (angka penuh), dengan suku bunga tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.
- Fasilitas *Tranche Hermes* senilai ASD9.901.308,77 (angka penuh), dengan suku bunga LIBOR 6 (enam) bulanan ditambah margin tertentu per tahun. BRI melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2017.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 Februari 2025. Angsuran pokok dibayarkan setiap 6 (enam) bulan bersamaan dengan pembayaran bunga. Untuk fasilitas *Tranche BPI*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD3.330.767 (angka penuh) sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk fasilitas *Tranche Hermes*, angsuran pokok pertama kali mulai dibayarkan pada tanggal 5 Februari 2018 sebesar ASD660.087 sampai dengan jatuh tempo. BRI tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan penting (*financial covenants*) dalam perjanjian pinjaman ini antara lain menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimum 9%,
- Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) maksimum 5%.

d) Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

PT BRI Multifinance Indonesia

Pada tanggal 10 Juli 2019, memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* dalam bentuk Kredit Jangka Pendek yang sifatnya *revolving* senilai Rp500.000 dan penambahan fasilitas baru Kredit Modal Kerja senilai Rp500.000. Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Pada tanggal 10 Juli 2020, Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* dalam bentuk Kredit Jangka Pendek yang sifatnya *revolving* senilai Rp500.000.

Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Pada tanggal 15 Desember 2020, Perusahaan memperoleh penambahan fasilitas pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja yang sifatnya *non-revolving* senilai Rp250.000. Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Pada tanggal 29 Desember 2020, Perusahaan memperoleh penambahan fasilitas pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja yang sifatnya *non-revolving* senilai Rp250.000. Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Fasilitas ini dijamin dengan piutang yang tidak memiliki tunggakan yang lebih besar dari 90 hari sebesar 100% dari total saldo pinjaman.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

d) Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Permodalan Nasional Madani

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 37 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir pada 22 februari 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

Pegadaian

Pada tanggal 06 Mei 2021, dihadapan Notaris Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH di Jakarta telah dilakukan penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali (Restatement) Addendum XVII (Ketujuh Belas) Atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : KP-CRO/016/PK-KMK/2008 N0.03 dengan plafon Rp5.500.000.000.000,-(lima triliun lima ratus miliar rupiah) dan Perubahan dan Pernyataan Kembali (Restatement) Addendum X (Kesepuluh) atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO-KP/050/PK-KMK/12 No.04 dengan plafon Rp6.500.000.000.000,-(enam triliun lima ratus miliar rupiah) antara Pihak PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Bank Mandiri") dan PT Pegadaian ("Pegadaian").

Fasilitas dengan total plafon sebesar Rp12.000.000.000.000,-(dua belas triliun rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 s.d 13 Mei 2022. Per 31 Desember 2021 suku bunga yang didapatkan dari Bank Mandiri adalah sebesar 4,00% dengan tenor selama 28 hari. Penentuan besarnya suku bunga dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut :

- Jaminan Piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada Bank sebesar minimum 100 % dari OSL pembiayaan, dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan laporan piutang serta laporan Omzet dan hasil usaha setiap bulannya dan paling lambat telah diterima Bank 30 hari setelah akgirt priode laporan.
- Menyampaikan laporan posisi jaminan fidusia (daftar obyek jaminan fidusia) setiap triwulan.
- Melaprkan kepadsa Bank, perubahan anggaran dasar, perubahan status perusahaan, preubahan susunan pengurus (Direksi) dan Dewan komisaris, pembagian deviden dan memindahtangankan agunan.

e) Pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah

Permodalan Nasional Madani

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan Nomor 15 tanggal 14 Agustus 2020, Pusat Investasi Pemerintah memberikan fasilitas Pinjaman/Pembiayaan kepada Perusahaan sebesar Rp1.147.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 4% efektif per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan tanpa waktu tenggang sejak tanggal pencairan dana. Perusahaan wajib menyalurkan Pinjaman/Pembiayaan khusus untuk Program Mekaar Syariah dan wajib menyerahkan Daftar Piutang yang menjadi Jaminan Fidusia setiap 6 bulan dengan nilai minimal atau sama dengan 100% dari outstanding pinjaman.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

f) Pinjaman dari Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Permodalan Nasional Madani

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 458 tanggal 16 November 2021 Bank BNI memberikan tambahan fasilitas sebesar Rp250.000.000.000 dengan bunga 8,5% sehingga total plafond menjadi Rp 1.000.000.000.000, dengan jangka waktu fasilitas 36 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas Gearing Ratio maksimal 10x, Current Ratio minimal 1.2x, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 3% nett dan jatuh tempo fasilitas berakhir pada bulan November 2022.

g) Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

BRI Multifinance Indonesia

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* sebesar Rp300.000.000. Fasilitas ini bersifat berulang (*revolving*). Fasilitas ini dijamin dengan piutang lancar dari total saldo pinjaman yang diterima sebesar 100%.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 10 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

Pada tanggal 30 Oktober 2020, BNI mengubah pemberian fasilitas pinjaman dari fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* menjadi *Uncommitted Kredit Modal Kerja* sebesar Rp300.000. Fasilitas ini bersifat berulang (*revolving*). Tingkat suku bunga sebesar 8,00%-8,50%. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2021.

Sehubungan dengan seluruh pinjaman yang diterima, Perusahaan telah memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati para kreditur.

Permodalan Nasional Madani

Berdasarkan Akta Perjanjian No. 458 tanggal 16 November 2021 Bank BNI memberikan tambahan fasilitas sebesar Rp250.000.000.000 dengan bunga 8,5% sehingga total plafond menjadi Rp1.000.000.000.000, dengan jangka waktu fasilitas 36 bulan. Dana tersebut untuk pembiayaan ULaMM dan Mekaar. Perusahaan wajib menjaga kualitas Gearing Ratio maksimal 10x, Current Ratio minimal 1.2x, dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 3% nett dan jatuh tempo fasilitas berakhir pada bulan November 2022.

PT Pegadaian

Pada tanggal 01 Februari 2021, telah dilakukan penandatanganan dibawah tangan, Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 012/BIN/PK/2018 Maksimum Rp3.100.000.000.000,-(tiga triliun seratus miliar rupiah) dan Nomor (4) 013/BIN/PK/2018 Maksimum Rp3.000.000.000.000,-(tiga triliun tupiah) antara PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("Bank BNI") dan PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian").

Fasilitas plafon sebesar Rp6.100.000.000.000,-(enam triliun seratus miliar rupiah) dengan pembagian fasilitas Rp3.000.000.000.000,-(tiga triliun rupiah) KMK dan Rp3.100.00.000.000,-(tiga triliun seratus miliar rupiah) Fasilitas Kredit Jangka Pendek (Promes) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 s.d 14 Januari 2022. Per 31 Desember 2021 suku bunga yang didapatkan dari Bank BNI adalah sebesar 4,20% dengan tenor selama 1 (satu) bulan. Penentuan besarnya suku bunga/nisbah dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

g) Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain :

- Jaminan Piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada Bank sebesar 100 % dari plafon pembiayaan, dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan setiap kali terjadi perubahan terbaru atas dokumen-dokumen sebagai berikut.
 - a. Akta perubahan Anggaran Dasar Persusahaan.
 - b. Perijinan yang telah diperpanjang masa berlakunya.
- Dalam rangka pemantauan aktivitas usaha, Bank BNI diperkenankan untuk sewaktu-waktu melakukan peninjauan ke lokasi usaha dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

h) Pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Permodalan Nasional Madani

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 16 Desember 2021, PT. Bank Syariah Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafond sebesar Rp 150.000.000.000 dengan bunga setara 7.5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan Desember 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perusahaan wajib menjaga Current Ratio min 1.2x, Gearing Ratio max. 10x, NPL nett max 5%, financing to asset ratio min 65%, micro financing ratio min 50%, interest coverage ratio min 1.1x

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 24 tanggal 31 Mei 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BNI Syariah) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9.50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%. Telah dilakukan perpanjangan Fasilitas pada tanggal 29 Agustus 2020 dengan Plafond pinjaman Rp.750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga 9,50% fixed pertahun dan jangka waktu pinjaman 12 bulan.

Berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Mudharabah No. 13 tanggal 26 April 2019, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BRISyariah Tbk) memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 42 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Oktober 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Pegadaian

Pada tanggal 29 Januari 2021, dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn di Jakarta telah dilakukan penandatanganan Akta Addendum 20 (Kedua puluh) Akad Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar No.22 plafon sebesar Rp400.000.000.000,-(empat ratus miliar rupiah) (ex-BSM) dan Akta Addendum I (Pertama) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No.23 plafon sebesar Rp1.100.000.000.000,-(satu triliun seratus miliar rupiah) (ex -BSM) serta Addendum V Akad Plafond Pembiayaan Nomor 01/ADD-001/Cb1-FOG/III/2021/LF tertanggal 12 Maret 2021 plafon Rp500.000.000.000,-(lima ratus miliar rupiah) penandatanganan dilakukan dibawah tangan antara Pihak PT Bank Syariah Mandiri, Tbk dan PT Bank BNI Syariah ("Bank BSI") dan PT Pegadaian ("Pegadaian").

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

h) Pinjaman dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Pegadaian (lanjutan)

Fasilitas dengan total plafon PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BNI Syariah) sebesar Rp1.900.000.000.000,-(satu triliun sembilan ratus miliar rupiah) dengan jangka waktu:

- Ex-BSM sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022.
- Ex-BNISyariah sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022.

Per 31 Desember 2021 suku bunga/nisbah yang didapatkan dari Bank BSI adalah sebesar 4,00% dengan tenor selama maksimal 4 (empat) bulan. Penentuan besarnya suku bunga/nisbah dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut :

- Menggunakan fasilitas pembiayaan untuk kepentingan/kebutuhan sesuai dengan tujuan penggunaan yang tercantum di dalam akad pembiayaan.
- Mengizinkan petugas dan/atau kuasa/wakil PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Syariah Mandiri Tbk) atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Syariah Mandiri Tbk) untuk sewaktu – waktu memeriksa pembukuan PT Pegadaian dan bukti – bukti yang terkait langsung dengan akad pembiayaan, oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Syariah Mandiri Tbk) sepanjang terkait dengan pelaksanaan akad pembiayaan ini, dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari kerja terlebih dahulu dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Syariah Mandiri Tbk) dengan seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Syariah Mandiri Tbk).
- Selama pembiayaan ini masih berlangsung, PT Pegadaian harus memberitahukan secara tertulis kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Syariah Mandiri Tbk) paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam hal telah dilakukan sebagai berikut:
 - a. Perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus perusahaan, permodalan dan nilai saham.
 - b. Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak lain.
 - c. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan untuk pihak lain.
 - d. Mengambil deviden atau modal untuk kepentingan di luar usaha dan kepentingan pribadi.
 - e. Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.
- Melakukan pembaharuan daftar piutang syariah yang dijaminan:
 - a. Menyerahkan rincian daftar piutang syariah posisi akhir bulan yang disampaikan triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya periode triwulanan, sebagai dasar pembaharuan daftar piutang syariah tidak kurang dari 100% (seratus persen) dari pokok yang terhutang.
 - b. Menyerahkan surat pernyataan daftar piutang syariah yang menyatakan bahwa :
 1. Benar milik “PT Pegadaian” serta tidak ada pihak lain yang memiliki atau turut serta memiliki.
 2. Tidak sedang dan tidak akan dijaminan kepada pihak ketiga.
 3. Tidak dalam keadaan sengketa serta tidak tersangkut suatu masalah Perdata atau keadaan yandapat menimbulkan suatu sengketa dengan pihak ketiga.
 4. Tidak dalam keadaan sita jaminan.
 - c. Pembaharuan sertifikat jaminan fidusia secara Notaril atas agunan piutang dilakukan maksimal setiap 1 (satu) tahun sekali dengan nilai piutang lancer Syariah minimal sebesar limit pembiayaan.
- Nasabah agar mengupayakan penggunaan fasilitas di atas 80% dari total fasilitas pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (dahulu PT Bank Syariah Mandiri Tbk).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

j) Pinjaman Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Bank Raya Indonesia

Pada tanggal 14 Juni 2021, BRI Agroniaga melakukan transaksi *borrowing* di pasar uang antar bank (*inter-bank call money*) dengan Indonesia Eximbank (LPEI) dalam rangka pemenuhan likuiditas USD Perusahaan. Transaksi ini memiliki jangka waktu 1 bulan dengan suku bunga sebesar 0,17%.

Persyaratan-persyaratan (*covenants*) penting dalam melakukan transaksi *borrowing* di pasar uang antar bank (*inter-bank call money*) ini antara lain, sebelum memperoleh persetujuan tertulis, Bank tidak diperkenankan untuk:

- Mengajukan permohonan pailit;
- Mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain, hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang dan menjaminkan hartakekayaan Bank;
- Menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan tujuannya.

Permodalan Nasional Madani

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 9 Juni 2021, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafon maksimal sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8,50% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 48 bulan dan akan berakhir pada tanggal 9 Juni 2025. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil.

k) Pinjaman dari Danareksa Finance

Permodalan Nasional Madani

Pada tanggal 27 Desember 2019, PT PNM Ventura Capital memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari PT Danareksa Finance berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.17 dengan plafond pembiayaan Rp200.000.000.000 dan telah dicairkan sebesar Rp75.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura Tingkat bunga setara dengan 11% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun, administrasi 0,02% dari plafon kredit.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 20 tanggal 27 Desember 2019, PT Danareksa Finance memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan dengan Plafond sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga menjadi sebesar 10,00% p.a

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 03 tanggal 16 Mei 2019, PT Danareksa Finance memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 12,00% p.a dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

l) Pinjaman dari Sarana Multigriya Finansial (Persero)

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Pada tanggal 14 Desember 2020, Bank menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk penyaluran KPR Sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Fasilitas pinjaman ini memiliki jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% per tahun dan *availability period* sampai dengan tanggal 30 Juni 2021. Angsuran pokok fasilitas pinjaman dibayarkan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan bersamaan dengan pembayaran bunga, dimana angsuran pokok pertama kali akan mulai dibayarkan pada tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp157.003 sampai dengan jatuh tempo. Bank tidak memberikan jaminan apapun atas pinjaman ini.

Persyaratan-persyaratan (*covenants*) penting dalam perjanjian-perjanjian ini antara lain, sebelum memperoleh persetujuan tertulis, Bank tidak diperkenankan untuk:

- Mengajukan permohonan pailit;
- Mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak lain, hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian ini;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung atau penjamin utang dan menjaminkan harta kekayaan Bank;
- Menggunakan fasilitas pinjaman tidak sesuai dengan tujuannya.

Permodalan Nasional Madani

Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Uncommitted Facility Line No.01 tanggal 01 September 2021, PT. Sarana Multigriya Finansial memberikan fasilitas kredit perumahan dengan plafond maksimal sebesar Rp.2.000.000.000.000 (Dua Triliun Rupiah) yang terdiri dari 1,5 Triliun fasilitas konvensional dan 500 Milyar Syariah, dengan suku bunga setara 6.50% p.a *fixed* dengan jangka waktu 36 bulan, Perusahaan wajib menjaga Current Ratio minimal 120%, Gearing Ratio maks. 10 kali, NPL nett maksimum seluruh kredit 5%, Return of Asset min. 0,5%, Return of Equity min. 5%, dan beban operasional berbanding pendapatan operasional kurang dari 100%.

m) Pinjaman dari Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir

Permodalan Nasional Madani

Pada tahun 2019, PT PNM Ventura Syariah memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) - KUMKM berdasarkan surat persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja No. 013/SP3/LPDB/2019 sebesar Rp30.000.000.000 bersifat non-revolving yang digunakan untuk modal kerja pembiayaan modal ventura. Tingkat margin sebesar 40% : 60% dari pendapatan kotor dengan jangka waktu 4 tahun, margin dihitung setiap akhir bulan yang bersangkutan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Central Asia, Tbk		8.062.671		7.359.341
PT Bank DKI		2.806.705		1.257.833
PT Bank Permata, Tbk		904.167		283.333
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		866.489		750.900
PT Bank DKI unit usaha syariah		625.000		925.000
PT Bank CIMB Niaga Tbk		600.869		-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk		518.056		584.722
PT Bank Danamon Indonesia Tbk		450.000		1.000.000
PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk		441.667		91.667
PT Bank Victoria Internasional		374.925		499.630
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk		357.502		-
PT Bank Mega Tbk		349.743		-
PT Bank Mega Syariah		238.645		199.930
PT Bank Permata unit usaha syariah		216.962		414.215
PT Bank Danamon unit usaha syariah		200.154		501.362
PT Bank CIMB Niaga unit usaha syariah		200.000		450.000
PT BPD Sulselbar		144.939		93.504
PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta		144.119		86.111
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ		100.000		-
PT Bank SBI Indonesia		99.615		-
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah		66.528		216.667
PT Bank J Trust Indonesia Tbk		42.794		100.000
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan		40.000		49.500
Bank Indonesia		4.274		12.273
Lainnya		41.766		199.539
		17.897.590		15.075.527
<u>Mata uang asing</u>				
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
Bank of Tokyo Mitsubishi	274.500.000	3.912.469	9.870.000	139.216
The Bank of New York Mellon	190.000.000	2.707.975	100.000.000	1.405.000
Standard Chartered Bank	167.405.200	2.385.943	45.000.000	632.250
BNP Paribas	166.492.645	2.372.937	159.453.336	2.240.319
Wells Fargo Bank, N.A.	70.000.000	997.675	50.000.000	702.500
PT Bank UOB	50.000.000	712.624	50.000.000	702.500
PT Bank CTBC Indonesia	11.416.667	162.904	22.416.682	316.188
JP Morgan	9.467.423	134.935	10.238.969	143.858
MUFG Bank	8.200.000	117.006	195.100.000	2.741.986
Bank Pembangunan Asia	433.619	5.725	474.772	6.697
UOB Singapore	-	-	55.000.000	772.750
Bank of Montreal	-	-	50.000.000	702.500
Citibank, N.A.	-	-	50.000.000	702.500
		13.510.193		11.208.264
<u>Euro Eropa</u>				
JP Morgan	266.928	4.300		-
		4.300		-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing (lanjutan)</u>				
<u>Dolar Singapura</u>				
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.,	107.956.000	1.139.440	-	-
Bank Of America	107.956.000	1.139.440	-	-
CTBC SG	66.797.775	705.028	-	-
Wells Fargo Bank, N.A.	26.395.500	2.706.170	104.438.000	1.107.688
Chinatrust Commercial Bank Singapore Branch	-	-	66.100.000	701.068
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	-	-	37.016.000	392.598
		5.690.078		2.201.354
Pound Sterling Inggris JP Morgan	17.431	336		-
		336		-
		19.204.907		13.409.618
Total		37.102.497		28.485.145

Fasilitas pinjaman diterima lainnya dalam mata uang asing merupakan pinjaman jangka pendek dari beberapa Bank dengan jangka waktu antara 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dengan tingkat suku bunga sebesar LIBOR atau EURIBOR ditambah margin tertentu, termasuk fasilitas pinjaman *refinancing* yang dijamin dengan *letters of credit* (L/C) yang diterbitkan oleh BRI sebesar ASD179.467.423, SGD539.105.275, EUR266.928, dan GBP17.431.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya:

Pinjaman Diterima BRI Multifinance Indonesia

PT Bank BTPN Tbk

Pada tanggal 16 Agustus 2007, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Sumitomo sebesar ASD20.000.000 (nilai penuh). Berdasarkan *addendum* pada tanggal 18 Desember 2017, pinjaman tersebut berubah dari ASD20.000.000 (nilai penuh) menjadi ASD40.000.000 (nilai penuh). Perpanjangan dan *addendum* terakhir pada 21 Desember 2019, fasilitas pinjaman ini telah diperpanjang kembali sampai dengan 6 Januari 2022. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia telah melakukan merger dengan PT Bank BTPN Tbk di tahun 2019 menjadi PT Bank BTPN Tbk.

Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 0,8% ditambah biaya pendanaan yang akan ditentukan pada saat penarikan.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan *Standby Letter of Credit* (SBLC) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, entitas induk.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman ini seluruhnya telah dilindungi nilai dengan kontrak *forward and foreign exchange swap*.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti *gearing ratio* tidak melebihi rasio 8,5 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Perusahaan telah memenuhi persyaratan tersebut di atas.

Seluruh pinjaman yang diterima dipergunakan untuk modal kerja kegiatan perusahaan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance Indonesia (lanjutan)

MUFG Bank, Ltd. Jakarta

Pada tanggal 26 Juli 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa komitmen sebesar ASD60.000.000 (nilai penuh). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan satu tahun sejak tanggal penandatanganan kredit. Fasilitas ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar ICE Libor + 1,00% (ASD) dan Jibor + 1,50% (IDR) dengan jangka waktu pinjaman maksimum 6 bulan.

Berdasarkan perubahan atas Perjanjian Kredit No. 20-0116-GC-LN tanggal 26 Juli 2020, MUFG Jakarta setuju untuk mengubah jatuh tempo fasilitas pembiayaan menjadi tanggal 26 Juli 2021.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan keuangan seperti *gearing ratio* tidak melebihi rasio 10 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan kewajiban penyampaian laporan lainnya. Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut di atas.

PT Bank Victoria International Tbk

Pada tanggal 6 Agustus 2020, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* dalam bentuk *Demand Loan* yang sifatnya *revolving* senilai Rp250.000. Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Fasilitas ini dijamin dengan piutang yang tidak memiliki tunggakan yang lebih besar dari 90 hari sebesar 100% dari total saldo pinjaman.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 8 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2022.

PT Bank CTBC Indonesia

Pada tanggal 14 November 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *Uncommitted Credit Line* dalam bentuk Fasilitas Club Deal yang sifatnya *Non revolving* senilai ASD50.000.000 (nilai penuh). Tingkat suku bunga akan ditentukan saat tanggal penarikan berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Fasilitas ini dijamin dengan piutang yang tidak memiliki tunggakan yang lebih besar dari 90 hari sebesar 100% dari total saldo pinjaman.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga *gearing ratio* maksimum sebesar 8,5 kali serta mempertahankan rasio *Non Performing Loan* ("NPL") di atas 90 (sembilan puluh) hari maksimal 5% dan Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima BRI Multifinance Indonesia (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 27 Januari 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman Committed Kredit Modal Kerja sebesar Rp 300.000.000. Fasilitas ini bersifat berulang (*revolving*). Tingkat suku bunga indikatif sebesar 8%.

Fasilitas ini dijamin dengan piutang lancar dari total saldo pinjaman yang diterima sebesar 100% dan promissory notes.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga rasio pinjaman terhadap modal maksimum 7 kali. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2022.

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani

PT Bank DKI

Berdasarkan akta Perjanjian Kredit No.11 tanggal 10 Mei 2021 antara PT Bank DKI dengan perusahaan, perusahaan dengan plafon Rp500.000.000.000, jangka waktu 36 bulan serta tingkat suku bunga fixed sebesar 9,25% per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui ULaMM dan Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan *Non-Performing Loan gross* maksimal 5%.

PT Bank BPD Jabar Banten Syariah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.39 tgl 30 Juni 2021, PT Bank BPD Jabar Banten Syariah memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil setara 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 24 bulan dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x.

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan akta perjanjian kredit No.12 tanggal 22 september 2021, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan plafond maksimal sebesar Rp300.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 8.35% per tahun dan akan berakhir pada bulan September 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar. Perusahaan wajib menjaga current ratio min 1,2 x dan gearing ratio maksimal 10x serta menjaga NPL maksimal 5%.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No. 10 tanggal 21 Oktober 2020, PT Bank Permata Tbk memberikan fasilitas Musyarakah Mutanaqisah - MMQ II dengan plafon maksimal sebesar Rp100.000.000.000 dengan bagi hasil sebesar 9% per tahun dan akan berakhir pada bulan Oktober 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 10x dan tunggakan Non-Performing Loan di atas 90 hari maksimal 5%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (lanjutan)

Bank SBI Indonesia

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 16 Desember 2021, PT. Bank SBI Indonesia memberikan fasilitas kredit dengan plafond sebesar Rp 150.000.000.000 dengan bunga setara 7.5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan dan akan berakhir pada bulan Desember 2024. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil. Perusahaan wajib menjaga Current Ratio min 1.2x, Gearing Ratio max. 10x, NPL nett max 5%, financing to asset ratio min 65%, micro financing ratio min 50%, interest coverage ratio min 1.1x

PT Bank National Nobu Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 9 tanggal 6 September 2019, PT Bank National Nobu Tbk memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp.100.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,50% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta

Berdasarkan akta perjanjian Kredit Modal Kerja No. 19 tanggal 9 Juli 2020, PT Bank Pembangunan Daerah D.I. Yogyakarta memberikan fasilitas Kredit kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 36 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan akan berakhir di Bulan Juli 2023. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 48 tanggal 20 November 2020, PT Bank PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 10% fixed per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%.

PT Bank J Trust Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 82 tanggal 30 Juni 2021, PT Bank J Trust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% fixed per tahun . Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 9x dan tunggakan Non-Performing Loan di atas 90 hari maksimal 3%.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (lanjutan)

PT Bank J Trust Indonesia Tbk (lanjutan)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 04 tanggal 23 Februari 2021, PT Bank J Trust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% fixed per tahun. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 9x dan tunggakan Non-Performing Loan di atas 90 hari maksimal 3%.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 3 tanggal 2 Desember 2020, PT Bank J Trust Indonesia Tbk memberikan fasilitas Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan jangka waktu fasilitas 18 bulan dan tenor angsuran 12 bulan. Tingkat bunga sebesar 9% fixed per tahun dan akan berakhir pada bulan Desember 2021. Dana tersebut untuk pembiayaan modal kerja jangka pendek. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 9x dan tunggakan Non-Performing Loan di atas 90 hari maksimal 3%.

PT Bank BCA Syariah

Berdasarkan Add Akta Perjanjian Kredit No.9 tanggal 24 Maret 2021, PT Bank BCA Syariah memberikan pinjaman modal kerja dengan plafon sebesar Rp110.000.000.000. Nisbah bagi hasil akan dicantumkan dalam setiap akad realisasi pembiayaan. Dengan jangka waktu 48 bulan untuk fasilitas ULaMM dan 12 bulan untuk Mekaar. Dana tersebut untuk pembiayaan Mekaar dan ULaMM Syariah. Perusahaan wajib menjaga Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 10x dan tunggakan Non-Performing Loan maksimal 5%.

PT Bank Victoria International Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 59 tanggal 23 Maret 2021, PT Bank Victoria International Tbk memberikan fasilitas Kredit Money Market Line kepada Perusahaan sebesar Rp100.000.000.000 dengan suku bunga 9% dengan jangka waktu fasilitas pinjaman 12 bulan sejak penandatanganan kredit dan akan berakhir pada bulan Maret 2022. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan maksimal tidak lebih dari 5%.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 8 November 2021, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memberikan fasilitas kredit dengan plafon maksimal sebesar Rp 300.000.000.000 dengan bagi hasil setara 7.5% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan dan akan berakhir pada tanggal November 2022. Dana tersebut untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil melalui Mekaar Syariah. Perusahaan wajib menjaga gearing ratio maksimal 9x dan kualitas Non Performance Financing untuk produk Mekaar tidak lebih dari 2% dan Current Ratio minimal 1.2 x

PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 33 tanggal 23 Juni 2021, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Perusahaan sebesar Rp250.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,25% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian kredit dan tenor angsuran 12 bulan. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima Permodalan Nasional Madani (lanjutan)

PT Bank Mega Syariah

Berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Penyediaan Fasilitas (Wa'd) Nomor 09 tanggal 30 Desember 2021, PT. Bank Mega Syariah memberikan penambahan fasilitas kepada Perusahaan sebesar Rp. 35.000.000.000 sehingga total plafond menjadi 385.000.000.000 dengan nisbah sebesar 8% per tahun dengan jangka waktu fasilitas 36 bulan untuk ULaMM dan Mekaar. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

PT Bank Mega Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 31 tanggal 15 November 2021, PT Bank Mega Tbk memberikan fasilitas kepada Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun dengan jangka waktu pinjaman 12 bulan untuk Mekaar. Pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Perusahaan wajib menjaga kualitas Non-Performing Loan keseluruhan produk tidak lebih dari 5%, Current Ratio minimal 1.2x, Gearing maksimal 10x, financing to asset ratio min 65%, micro financing ratio min 50%.

Pinjaman Diterima PT Pegadaian

PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 25 Februari 2021, di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH di Jakarta telah dilakukan penandatanganan Akta Perubahan Ke Dua Puluh Empat atas Perjanjian Kredit No.18 antara PT Bank Central Asia, Tbk ("Bank BCA") dan PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian").

Fasilitas ini memiliki plafon sebesar Rp8.600.000.000.000,-(delapan triliun enam ratus miliar rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 26 September 2021. Berdasarkan surat dari Bank No.40809/GBK/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Pemberitahuan perpanjangan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit, jangka waktu perjanjian ini diperpanjang sementara terhitung mulai tanggal 26 September 2021 dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2022. Per 31 Desember 2021 suku bunga yang didapatkan dari Bank BCA adalah sebesar 4,00% dengan tenor selama 1 (satu) bulan. Penentuan besarnya rate dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut:

- Agunan yang dijaminkan adalah sebesar 100% dari plafon.
- Penggunaan fasilitas adalah untuk mendanai penyaluran pinjaman modal kerja Pegadaian.
- Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku.
- Memberitahukan secara tertulis apabila terjadi perubahan status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja tanggal efektifnya terjadi perubahan tersebut disertai dengan dokumen pendukung atas perubahan tersebut.
- Menyerahkan kepada Bank Daftar Piutang (AR) setiap 6 bulan sekali selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak berakhirnya periode laporan 6 bulan tersebut.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima PT Pegadaian (lanjutan)

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 28 Juli 2021, telah dilakukan penandatanganan dibawah tangan, Perubahan Ke-6 Terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas Nomor 30 tanggal 16 Mei 2016 dan Perjanjian Kredit Nomor : 124/CB/JKT/2021 antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk ("Bank CIMB") dan PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian").

Fasilitas ini memiliki plafon sebesar Rp750.000.000.000,-(tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 16 Mei 2022. Adapun penggunaan fasilitas ini dapat dilakukan secara musyarakah ataupun konvensional sesuai dengan kebutuhan dari Pegadaian. Per 31 Desember 2021 suku bunga/nisbah yang didapatkan dari Bank CIMB adalah sebesar/setara 4,00% sd 4,20% dengan tenor selama 1 (satu) bulan dengan perhitungan /pembayaran suku bunga/nisbah selama 14 (empat belas) hari. Penentuan besarnya suku bunga/nisbah dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut:

- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar 60% dari jumlah pembiayaan.
- Penggunaan fasilitas adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja Pegadaian.
- Memberikan informasi kepada Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tindakan dilakukan, dalam hal terjadi perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham atau pengurus atau pihak yang setara lainnya dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan perusahaan antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan pada Pengendali dari Pegadaian dan/atau Pemberi Agunan.
- Daftar tagihan harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan harus diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan (batas waktu pengiriman list piutang maksimum adalah 45 (empat puluh lima) hari setiap akhir 3 (tiga) bulan).

PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 25 Mei 2021, dihadapan Notaris Adi Triharso, SH di Jakarta telah dilakukan penandatanganan Akta Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No.19 dan Akta Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Musyarakah No.20 antara PT Bank Permata, Tbk ("Bank Permata") dan PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian"). Sedangkan untuk fasilitas jangka pendek musyarakah masih berdasarkan Addendum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No.MMQ/20/0551/AMD/SOE tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani dibawah tangan.

Dan pada tanggal 26 November 2021 telah dilakukan penandatanganan dibawah tangan:

- Addendum Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Musyarakah No.MSYR/21/1938/ADD/SOE plafon Rp200.000.000.000,-(dua ratus miliar rupiah).
- Addendum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah No.MMQ/21/1939/ADD/SOE plafon Rp400.000.000.000,-(empat ratus miliar rupiah).
- Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No.MM/21/1937/ADD/SOE plafon Rp800.000.000.000,-(delapan ratus miliar rupiah).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima PT Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk (lanjutan)

Total fasilitas ini memiliki plafon sebesar Rp1.400.000.000.000,-(satu triliun empat ratus miliar rupiah) dengan jangka waktu sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022. Per 31 Desember 2021 suku bunga/nisbah yang didapatkan dari Bank Permata untuk fasilitas musyarakah maupun konvensional adalah sebesar/setara 4,20% dengan tenor selama 1 (satu) bulan. Penentuan besarnya suku bunga/nisbah dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut :

- Fidusia atas Account Receivable nasabah (AR), dengan jumlah minimum sebesar 100% dari outstanding fasilitas.
- Penggunaan fasilitas adalah untuk membiayai usaha pembiayaan modal kerja Pegadaian.
- Selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kalender, Pegadaian melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dalam hal menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas leasing dari pihak lain, perubahan anggaran dasar.
- Laporan A/R setiap triwulan, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya periode laporan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Pada tanggal 12 April 2021, telah dilakukan penandatanganan dibawah tangan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No.280/PP/EB/0321 dan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Pemberian Pembiayaan Musyarakah No.281/PP/EB/0421 antara PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("Bank Danamon") dan PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian").

Fasilitas ini memiliki plafon masing - masing sebesar Rp1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 20 Maret 2022. Per 31 Desember 2021 suku bunga/nisbah yang didapatkan dari Bank Danamon untuk fasilitas Kredit Berjangka (KB) dan fasilitas musyarakah adalah sebesar/setara 4,00% dengan tenor selama 1 (satu) bulan. Penentuan besarnya suku bunga/nisbah dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut :

- Fidusia atas Account Receivables (AR), dengan nilai 100% dari total pinjaman.
- Menggunakan fasilitas kredit semata-mata untuk keperluan pembiayaan Pegadaian.
- Selama jangka waktu Fasilitas dan terdapat jumlah yang terhutang pada Bank, dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank (selambat-lambatnya 30 hari setelah tindakan dilakukan). Tindakan yang dimaksud adalah membubarkan perusahaan, mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/asset, mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha, melakukan merger (penggabungan), konsolidasi (peleburan), pemisahan usaha (spin-off) dan akuisisi (pengambilalihan), merubah anggaran dasar (termasuk merubah kewenangan Direksi, penarikan modal disetor, kuorum rapat atau bidang usaha), membuat Investasi yang material diluar lini bisnis.
- Memberikan update list Account Receivables per kuartal dengan kategori lancar (untuk list Account Receivables yang dijaminan di Bank) maksimum 45 hari setelah periode berakhir.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima PT Pegadaian (lanjutan)

PT Bank DKI

Pada tanggal 19 Mei 2021, dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn di Jakarta telah dilakukan penandatanganan Akta Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Money Market Line Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No.15 dan Akta Addendum XII (Keduabelas) Akad Fasilitas Pembiayaan Musyarakah No.17 antara PT Bank DKI ("Bank DKI") dan PT Pegadaian (Persero) ("Pegadaian").

Fasilitas konvensional memiliki plafon sebesar Rp400.000.000.000,-(empat ratus miliar rupiah) dan fasilitas syariah memiliki plafon sebesar Rp1.200.000.000.000,-(satu triliun dua ratus miliar rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 19 Mei 2022. Per 31 Desember 2021 suku bunga/nisbah yang didapatkan dari Bank DKI adalah sebesar/setara 4,20% dengan tenor selama 1 (satu) bulan. Penentuan besarnya suku bunga/nisbah dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut :

- Jaminan Piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada Bank sebesar minimum 60 % dari plafon pembiayaan, dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan secara tertulis kepada Bank, Perubahan pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) ataupun Anggaran Dasar Perusahaan, status hukum dan lingkup usaha serta penerbitan obligasi/surat berharga/Pinjaman/ pembiayaan dari Bank / lembaga keuangan lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian perubahan.
- Daftar piutang diikat dengan Fidusia Notarial dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia pada saat penandatanganan perpanjangan fasilitas kredit. Daftar piutang diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 02 Juni 2021, dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn di Jakarta telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pemberian Line Facility untuk Pembiayaan Musyarakah No.01 antara Pihak PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk ("Bank Muamalat") dan PT Pegadaian ("Pegadaian").

Fasilitas dengan total plafon sebesar Rp200.000.000.000,-(dua ratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) sejak penandatanganan akad pembiayaan (02 Juni 2021 s.d 02 Juni 2022). Per 31 Desember 2021 suku bunga/nisbah yang didapatkan dari Bank Muamalat adalah sebesar 4,00% s.d 4,20% dengan tenor selama maksimal 6 (enam) bulan. Penentuan besarnya suku bunga/nisbah dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima PT Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut :

- Menyalurkan pembiayaan yang dananya bersumber dari BMI dengan prinsip Syariah (Penyaluran pembiayaan dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah).
- Menyampaikan laporan keuangan un-audited triwulanan (Maret, Juni, September & Desember) paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah akhir laporan, dan laporan keuangan audited tahunan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah akhir periode laporan,
- Memberitahukan secara tertulis kepada BMI atas hal-hal dibawah ini :
 - a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya Perubahan Pemegang Saham, pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi), Permodalan dan Nilai Nominal Saham.
 - b. Memperoleh fasilitas pembiayaan dari Bank/lembaga pembiayaan lainnya.
- Melakukan pengikatan jaminan yang diberikan oleh end user/Rahin kepada PT Pegadaian (Persero) sesuai ketentuan PT Pegadaian (Persero) yang berlaku dan diamankan dengan baik serta tidak dapat diagunkan kepihak lain.
- Mengizinkan BMI atau pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan PT Pegadaian (Persero), serta pemeriksaan terhadap seluruh jaminan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Pegadaian (persero) berdasarkan pemberitahuan dari BMI apabila dalam waktu 14 hari kalender tidak ada balasan maka PT Pegadaian (Persero) dianggap menyetujui pemberitahuan BMI.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 18 Oktober 2021, telah dilakukan penandatanganan dibawah tangan, Perubahan Akad Line Fasilitas Pembiayaan Musyarakah iB (Badan Usaha) Nomor 251/PrbAkad/CDU1/2021 antara PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank Maybank") dan PT Pegadaian ("Pegadaian").

Fasilitas plafon sebesar Rp1.200.000.000.000,-(satu triliun dua ratus miliar rupiah) dengan dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2021 s.d 20 Oktober 2022. Per 31 Desember 2021 tidak ada penarikan dari fasilitas Bank Maybank. Tetapi apabila ada penarikan, penentuan besarnya suku bunga/nisbah dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima PT Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk (lanjutan)

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut :

- Jaminan Piutang/tagihan Pegadaian kepada konsumen yang diserahkan kepada Bank sebesar 100 % dari plafon pembiayaan, dengan kriteria piutang lancar/kolektibilitas 1 (satu).
- Penggunaan fasilitas adalah untuk tambahan modal kerja operasional Pegadaian.
- Menyampaikan Laporan keuangan In-House tiga bulanan (quarterly) untuk tahun buku berjalan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak akhir periode pelaporan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk laporan keuangan kuartal I (pertama) sampai kuartal III (ketiga)
- Menyerahkan Daftar Jaminan Bank berupa Piutang Pembiayaan Nasabah dengan status Lancar, yang disampaikan setiap tiga bulan/triwulanan, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah akhir periode pelaporan.
- Mengizinkan Bank sewaktu-waktu melakukan Random Sampling minimum 1 (satu) kali dalam setahun terhadap Piutang Pembiayaan (Account Receivables) yang dijamin, dengan minimum sampling 100 (seratus) end user dengan nominal terbesar. Data sampling harus berbeda dengan data sampling yang digunakan sebelumnya dan dipilih oleh Bank.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk

Pada tanggal 02 Juni 2021, dihadapan Notaris Dr Agung Iriantoro,SH, MH di Jakarta telah dilakukan penandatanganan Addendum V Perjanjian Kredit No.01 antara Pihak PT Bank BPD Jawa Barat & Banten, Tbk ("Bank BJB") dan PT Pegadaian ("Pegadaian").

Fasilitas dengan total plafon sebesar Rp1.000.000.000.000,-(satu triliun rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) sejak tanggal jatuh tempo fasilitas kredit (02 Juni 2021 s.d 02 Juni 2022). Per 31 Desember 2021 tidak ada penarikan dari fasilitas Bank BJB. Tetapi apabila ada penarikan, penentuan besarnya suku bunga dan tenor ditentukan pada saat penarikan/perpanjangan fasilitas.

Persyaratan-persyaratan (covenant) dalam perjanjian ini antara lain sebagai berikut :

Selama Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit ini belum lunas, maka terhadap debitur -berkewajiban untuk :

- Mempergunakan Fasilitas Kredit ini sesuai dengan tujuan/keperluannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian kredit ini.
- Menyerahkan daftar piutang usaha setiap triwulan (Maret, Juni, September, dan Desember) yang dijadikan agunan pada Bank paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah triwulan pelaporan.
- Mengizinkan Bank atau pihak lain yang ditunjuk Bank untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap pembukuan, catatan keuangan dan administrasi perusahaan serta memeriksa kegiatan usaha dan segala sesuatu yang berhubungan dengan yang dibiayai kepada pihak lain.
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Debitur melakukan spin off, merger, akuisisi dan konsolidasi penyertaan modal baru pada perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
 - b. Debitur melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru dengan core business yang sejenis dengan Debitur.
 - c. Memperoleh fasilitas kredit/pinjaman/pembiayaan dari pihak lain serta menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

25. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman yang diterima (lanjutan):

o) Pinjaman lainnya (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan pinjaman lainnya (lanjutan):

Pinjaman Diterima PT Pegadaian (lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk (lanjutan)

- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadi hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)
 - d. Debitur melakukan pengambilalihan atau mendirikan anak perusahaan baru diluar core businnes Debitur.
 - e. Melaporkan setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pemegang saham dan susunan pengurus Debitur beserta dengan penerimaan dan/atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BRI dan entitas anak telah memenuhi persyaratan penting yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman yang diterima.

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a) Rincian estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Rupiah</u>		
Fasilitas kredit yang belum ditarik	3.245.912	1.796.137
Garansi yang diterbitkan	2.297.831	935.042
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	284.020	105.426
<u>Mata uang asing</u>		
Garansi yang diterbitkan	668.091	633.465
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan	479.405	109.943
Fasilitas kredit yang belum ditarik	25.009	101.696
Total	<u>7.000.268</u>	<u>3.681.709</u>

b) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi (diluar fasilitas kredit yang belum ditarik):

	<u>31 Desember 2021</u>		<u>31 Desember 2020</u>	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga</u>				
<u>Rupiah</u>				
Garansi yang diterbitkan		12.651.210		11.789.349
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		856.030		1.261.016
		<u>13.507.240</u>		<u>13.050.365</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

b) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi (diluar fasilitas kredit yang belum ditarik) (lanjutan):

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional mata uang asing (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Pihak ketiga (lanjutan)</u>				
<u>Mata uang asing</u>				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	664.521.303	9.471.090	624.841.432	8.779.022
Euro Eropa	96.397.000	1.553.193	105.080.484	1.811.002
Yen Jepang	10.480.000	1.297	-	-
Dolar Australia	-	-	49.045	527
Ringgit Malaysia	-	-	-	-
		11.025.580		10.590.551
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	170.020.554	2.423.218	143.235.231	2.012.455
Euro Eropa	10.605.214	170.876	8.691.602	149.795
Yen Jepang	407.466.834	50.432	698.161	94.929
Renminbi	15.164.202	33.903	86.683.075	186.391
Dolar Singapura	2.949.554	31.132	1.401.751	14.867
Pound Sterling Inggris	94.282	1.815	838.999	15.951
Ringgit Malaysia	-	-	91.061	317
		2.711.376		2.474.705
		13.736.956		13.065.256
		27.244.196		26.115.621
<u>Pihak berelasi (Catatan 44)</u>				
<u>Rupiah</u>				
Garansi yang diterbitkan		14.632.834		12.253.235
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor		1.561.094		1.332.481
		16.193.928		13.585.716
<u>Mata uang asing</u>				
Garansi yang diterbitkan				
Dolar Amerika Serikat	900.126.539	12.829.053	653.483.434	9.181.442
Yen Jepang	3.502.001.444	433.443	3.057.637.714	415.747
Ringgit Malaysia	54.016.500	184.610	98.782.000	343.877
Euro Eropa	5.950.765	95.881	4.653.595	80.202
Baht Thailand	-	-	49.744.000	23.285
Dolar Kanada	-	-	620.000	6.808
		13.542.987		10.051.361
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor				
Dolar Amerika Serikat	270.466.563	3.854.825	257.485.694	3.617.674
Euro Eropa	40.567.396	653.640	12.096.427	208.475
Yen Jepang	309.732.572	38.336	514.584.099	69.968
Dolar Singapura	803.924	8.485	220.504	2.339
Pound Sterling Inggris	208.355	4.011	396.139	7.532
		4.559.297		3.905.988
		18.102.284		13.957.349
		34.296.212		27.543.065
Total		61.540.408		53.658.686
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(3.729.347)		(1.783.876)
Bersih		57.811.061		51.874.810

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

c) Rincian transaksi komitmen dan kontinjensi berdasarkan kolektibilitas:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Lancar	200.685.879	177.122.324
Dalam perhatian khusus	851.957	860.669
Kurang lancar	64.578	30.199
Diragukan	72.017	753.424
Macet	108.282	68.761
Total	201.782.713	178.835.377
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(7.000.268)	(3.681.709)
Bersih	194.782.445	175.153.668

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan:

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>L/C yang tidak dapat dibatalkan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	8.582.638	372.705	4.396	8.959.739
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	(168.203)	(973.877)	-	(1.142.080)
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	7.347.879	1.299.907	153	8.647.939
Penghapusbukuan	(6.085.000)	(692.237)	(4.396)	(6.781.633)
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	236	3.596	-	3.282
	9.677.550	10.094	153	9.687.797
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	14.451
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	(14.451)
Nilai tercatat akhir	9.677.550	10.094	153	9.687.797

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>L/C yang tidak dapat dibatalkan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	6.297.120	157.646	-	6.454.766
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Komitmen dan Kontinjensi	(1.029.897)	-	-	(1.029.897)
baru yang diterbitkan atau dibeli Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	10.496.419	372.705	4.396	10.873.520
Penghapusbukuan	(7.257.499)	(157.646)	-	(7.415.145)
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	76.495	-	-	76.495
	8.582.638	372.705	4.396	8.959.739
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	4.715
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	9.736
Nilai tercatat akhir	8.582.638	372.705	4.396	8.974.190

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>L/C yang tidak dapat dibatalkan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	76.327	134.646	4.396	215.369
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(532)	171.885	-	171.353
baru yang diterbitkan atau dibeli Komitmen dan Kontinjensi	67.323	420.809	236	488.368
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(71.045)	(36.929)	(4.479)	(112.453)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	25	763	-	788
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	72.098	691.174	153	763.425

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>L/C yang tidak dapat dibatalkan yang</u>				
<u>diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	135.313
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	34.803
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	22.917	147.199	-	170.116
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(7.107)	-	-	(7.107)
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	77.224	18.421	4.396	100.041
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(16.918)	(31.230)	-	(48.148)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	211	256	-	467
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	76.327	134.646	4.396	215.369
31 Desember 2021				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Bank Garansi yang diukur pada</u>				
<u>biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	42.799.528	1.514.795	1.299	44.315.622
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Komitmen dan Kontinjensi	(468.146)	-	-	(468.146)
baru yang diterbitkan atau dibeli	33.661.490	3.072.519	81.289	36.815.298
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(24.024.764)	(4.583.304)	777	(28.607.291)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(207.046)	4.174	-	(202.872)
	51.761.062	8.184	83.365	51.852.611
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	368.874
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	(368.874)
Nilai tercatat akhir	51.761.062	8.184	83.365	51.852.611

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Bank Garansi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	43.952.185	789.582	103.666	44.845.433
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat Komitmen dan Kontinjensi	50.049	1.622.054	-	1.672.103
baru yang diterbitkan atau dibeli	20.319.890	-	-	20.319.890
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(22.853.295)	(896.841)	(102.367)	(23.852.503)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.330.699	-	-	1.330.699
	42.799.528	1.514.795	1.299	44.315.622
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	205.932
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	162.942
Nilai tercatat akhir	42.799.528	1.514.795	1.299	44.684.496

	31 Desember 2021			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Bank Garansi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	919.432	644.176	1.299	1.564.907
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(100.144)	-	-	(100.144)
Komitmen dan Kontinjensi				
baru yang diterbitkan atau dibeli	600.689	1.579.648	81.289	2.261.626
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(796.750)	36.410	369	(759.971)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(495)	(1)	-	(496)
	622.732	2.260.233	82.957	2.965.922
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	3.600
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	(3.600)
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	622.732	2.260.233	82.957	2.965.922

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

31 Desember 2020				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Bank Garansi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	472.244
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	393.390
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	184.517	577.451	103.666	865.634
Pengalihan ke				
Stage 1	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(105.935)	(21.301)	-	(127.236)
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	1.542.653	396.989	-	1.939.642
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(463.057)	(47.277)	(102.367)	(612.701)
Penghapusbukuan	-	-	-	-
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	(238.746)	(261.686)	-	(500.432)
	919.432	644.176	1.299	1.564.907
Nilai cadangan kerugian dengan prinsip syariah	-	-	-	1.936
Mutasi cadangan kerugian dengan prinsip Syariah	-	-	-	1.664
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	919.432	644.176	1.299	1.568.507
31 Desember 2021				
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	107.385.138	16.633.800	539.301	124.558.239
Pengalihan ke				
Stage 1	1.742.763	(1.603.944)	(138.819)	-
Stage 2	(3.001.602)	3.018.329	(16.727)	-
Stage 3	(264.655)	(76.183)	340.838	-
Pengukuran kembali nilai tercatat	10.477.201	(3.437.195)	(3.088)	7.036.918
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	8.922.549	1.306.076	75.455	10.304.080
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(728.417)	(765.553)	(459.332)	(1.953.302)
Penghapusbukuan	(207)	(1.533)	(176.268)	(178.008)
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	474.352	27	-	474.379
Nilai tercatat akhir	125.007.122	15.073.824	161.360	140.242.306

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Nilai tercatat awal	91.702.174	39.578.171	65.279	131.345.624
Pengalihan ke				
Stage 1	1.763.691	(1.723.453)	(40.238)	-
Stage 2	(1.015.757)	1.046.973	(31.216)	-
Stage 3	(215.615)	(126.872)	342.487	-
Pengukuran kembali nilai tercatat Komitmen dan Kontinjensi	(1.864.242)	(981.600)	(13.273)	(2.859.115)
baru yang diterbitkan atau dibeli	19.715.413	1.357.890	520.174	21.593.477
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(4.579.841)	(22.347.746)	(140.751)	(27.068.338)
Penghapusbukuan	(10.817)	(171.570)	(163.163)	(345.550)
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	1.890.132	2.007	2	1.892.141
	107.385.138	16.633.800	539.301	124.558.239
Nilai tercatat awal dengan prinsip syariah	-	-	-	145.544
Mutasi nilai tercatat dengan prinsip syariah	-	-	-	472.908
Nilai tercatat akhir	107.385.138	16.633.800	539.301	125.176.691

	31 Desember 2021			
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	Total
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal	769.843	984.971	143.019	1.897.833
Pengalihan ke				
Stage 1	26.200	(25.751)	(449)	-
Stage 2	(31.352)	36.050	(4.698)	-
Stage 3	(3.780)	(3.876)	7.656	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	159.458	1.366.634	(45.333)	1.480.759
Komitmen dan Kontinjensi				
baru yang diterbitkan atau dibeli	130.336	91.877	213	222.426
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(257.029)	(43.379)	(30.290)	(330.698)
Penghapusbukuan	(207)	(1.533)	(56.178)	(57.918)
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	50.403	8.116	-	58.519
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	843.872	2.413.109	13.940	3.270.921

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

d) Perubahan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian berdasarkan kategori instrumen keuangan (lanjutan):

	31 Desember 2020			Total
	Stage 1- Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan	Stage 2- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit tidak memburuk	Stage 3- Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya kredit memburuk	
<u>Fasilitas kredit yang belum ditarik yang</u>				
<u>diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>				
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	1.084.883
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian awal PSAK 71	435.781	516.097	133.005	1.084.883
Pengalihan ke				
Stage 1	43.602	(37.871)	(5.731)	-
Stage 2	(7.669)	16.507	(8.838)	-
Stage 3	(1.813)	(4.601)	6.414	-
Pengukuran kembali bersih penyisihan kerugian	(91.044)	169.782	32.281	111.019
Komitmen dan Kontinjensi baru yang diterbitkan atau dibeli	977.562	326.046	292.297	1.595.905
Komitmen dan Kontinjensi yang dihentikan pengakuannya	(591.133)	-	(302.641)	(893.774)
Penghapusbukuan	(298)	(1.031)	(3.769)	(5.098)
Penerimaan kembali Komitmen dan Kontinjensi yang telah dihapusbukukan	-	-	-	-
Perubahan model atau parameter valuta asing dan perubahan lain	4.855	42	1	4.898
Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian akhir	769.843	984.971	143.019	1.897.833

BRI melakukan penilaian atas transaksi komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit secara kolektif dan individual dengan menggunakan bukti objektif.

Jumlah minimum estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar Rp3.600 pada tanggal 31 Desember 2020.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah memadai.

27. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja terdiri atas:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Cadangan Bonus dan Insentif	6.487.862	3.627.108
Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja (Catatan 42)	9.597.223	8.901.588
Cadangan Tunjangan Hari Raya	1.314.852	567.362
Cadangan pekerja kontrak	705.984	-
Cadangan khusus PHK (Qonun)	-	339.784
Total	18.105.921	13.435.842

Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja meliputi program pensiun imbalan pasti, program tunjangan hari tua, program masa persiapan pensiun dan program imbalan jangka panjang lain (Program penghargaan tanda jasa, cuti besar, BPJS kesehatan pasca kerja dan manfaat lain dana manfaat tambahan) sesuai dengan kebijakan BRI dan entitas anak yang dihitung sesuai dengan perhitungan aktuarial independen.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri atas:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Liabilitas manfaat polis masa depan	6.293.662	6.530.727
Liabilitas kontrak investasi	4.093.453	3.145.743
Cadangan kewajiban litigasi (Catatan 45b)	1.972.029	1.141.920
Premi yang belum merupakan pendapatan	1.460.797	1.213.923
Estimasi liabilitas klaim	328.231	268.710
Utang bunga	766.219	1.292.044
Setoran jaminan	15.477	16.128
Utang reasuransi	155.736	155.609
Liabilitas kartu kredit	143.493	105.606
Dana <i>syirkah</i> temporer	181.227	153.260
Cadangan pembayaran bunga tepat waktu	105.887	140.036
Pendapatan diterima di muka	78.268	112.799
Cadangan pajak hadiah simpedes	19.931	22.139
Bagi hasil yang masih harus dibayar	-	188.444
Lain-lain	5.369.741	6.589.640
	<u>20.984.151</u>	<u>21.076.728</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Utang bunga	272.583	367.850
Pendapatan diterima di muka	250.546	202.819
Lain-lain	1.246.047	612.123
	<u>1.769.176</u>	<u>1.182.792</u>
Total	<u>22.753.327</u>	<u>22.259.520</u>

29. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Subordinasi III	498.682	497.712
Pinjaman <i>two-step loan</i>	2.693	3.175
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi I	-	964.505
Total	<u>501.375</u>	<u>1.465.392</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

a. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I

Pada tanggal 17 November 2016, BRIS menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dengan pendapatan bagi hasil yang diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,2013% yang dihitung dari *gross revenue* tunai, yang diindikasikan sebesar 11,8452%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Pada saat diterbitkan, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini diperingkat oleh Fitch Ratings dengan peringkat A+(idn).

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya, dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I memperoleh peringkat A(idn) dari Fitch Ratings. Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Pembatasan dan kewajiban BRIS atas Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengeluaran Sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya BRIS, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.
- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik BRIS kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau Sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aset tetap milik BRIS berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan BRIS atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh BRIS dari pihak ketiga yang bukan terafiliasinya dalam transaksi yang lazim.
- Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

Atas penggabungan usaha merger bank syariah dimana BRIS menjadi Bank yang menerima penggabungan, telah diinformasikan kepada wali amanat dengan surat No. S.B.06-MDB/01-2021 tanggal 6 Januari 2021, perihal "Informasi Mengenai Rencana Penggabungan Usaha PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri".

b. Pinjaman *two-step loan*

Pinjaman *two-step loan* dalam mata uang Rupiah merupakan pinjaman dari Pemerintah yang dananya berasal dari Asian Development Bank (ADB), International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Fund for Agricultural Development (IFAD), United States Agency for International Development (USAID) dan Islamic Development Bank (IDB). Tingkat suku bunga pinjaman ini bervariasi sesuai dengan perjanjian masing-masing dengan jangka waktu antara 15 (lima belas) sampai dengan 40 (empat puluh) tahun.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PINJAMAN DAN SURAT BERHARGA SUBORDINASI (lanjutan)

BRI memperoleh pinjaman dan surat berharga subordinasi dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

b. Pinjaman *two-step loan* (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata untuk pinjaman subordinasi adalah sebesar 2,09% dan 2,00% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Pinjaman-pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada berbagai tanggal sampai dengan tahun 2027.

c. Obligasi Subordinasi III Tahun 2018

Pada tanggal 27 Juni 2018, BRI menerbitkan Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dengan nilai pokok sebesar Rp500.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7,70% per tahun, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2023. Bunga Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 dibayarkan 3 (tiga) bulanan sejak tanggal 26 Juni 2018. Pada saat diterbitkan, Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 ini diperingkat oleh Pefindo dengan *rating* AA.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, Obligasi Subordinasi III tahun 2018 mendapatkan peringkat AA dari Pefindo.

Manajemen berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian telah dipenuhi.

Klasifikasi jangka waktu pinjaman subordinasi berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rupiah		
> 1 tahun - 5 tahun	498.682	1.462.217
> 5 tahun	2.693	3.175
Total	501.375	1.465.392

30. OPSI SAHAM

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 23 Maret 2016, pemegang saham menyetujui untuk mengalihkan saham BRI dari hasil pembelian kembali yang disimpan dalam saham treasuri untuk program kepemilikan saham manajemen dan pekerja.

Tujuan program ini untuk mendorong kepemilikan saham BRI oleh peserta program, menyelaraskan tujuan BRI dengan tujuan peserta program yang merupakan manajemen dan pekerja BRI, serta meningkatkan kinerjanya.

BRI menerbitkan program MESOP pada tanggal 15 Mei 2020 (tanggal pemberian) sejumlah 194.008.300 lembar saham dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap I sebanyak 97.004.150 lembar saham dengan periode *vesting* berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020.
- b. Tahap II sebanyak 97.004.150 lembar saham dengan periode *vesting* berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Masa berlaku opsi sejak tanggal pendistribusian sampai dengan 31 Oktober 2021. Setelah tanggal tersebut, seluruh hak opsi yang tidak digunakan akan menjadi gugur.

Pihak yang memenuhi syarat untuk menerima MESOP adalah direksi, dewan komisaris kecuali komisaris independen dan karyawan tetap dengan mengacu kepada masa kerja, penilaian kinerja, kelompok jabatan dan jabatan.

Perhitungan, metode dan asumsi mengenai MESOP diperoleh dari laporan aktuaris independen, Willis Towers Watson pada tanggal 6 Agustus 2020.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. OPSI SAHAM (lanjutan)

Beban kompensasi yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian sehubungan dengan opsi saham Tahap I dan Tahap II untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp14.686, dan Rp33.466 dan Rp22.370 yang dikreditkan ke opsi saham di ekuitas.

Nilai wajar dari setiap hak opsi diestimasi pada tanggal pemberian hak opsi dengan menggunakan model "Black-scholes", dengan asumsi utama sebagai berikut:

	MESOP Tahap 1	MESOP Tahap 2
Periode <i>vesting</i> (dalam bulan)	5,5	12,5
Harga saham pada tanggal pemberian opsi (dalam Rupiah penuh)	2.240	2.240
Harga pelaksanaan opsi (dalam Rupiah penuh)	2.240	2.240
Nilai wajar opsi (dalam Rupiah penuh)	345	382
Volatilitas harga saham	58,46%	43,85%
Suku bunga bebas risiko	5,23	5,56
Tingkat dividen	5,10	5,10

31. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	300.000.000.000		15.000.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Negara Republik Indonesia				
Saham biasa atas nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	80.610.976.875	50	4.030.548.843.750	53,19
Dewan Komisaris:				
- Kartika Wirjoatmodjo	178.300	50	8.915.000	0,00
- Nicolaus Teguh Budi Harjanto	849.161	50	42.458.050	0,00
- Hadiyanto	810.700	50	40.535.000	0,00
- Rabin Indrajad Hattari	160.400	50	8.020.000	0,00
Direksi:				
- Sunarso	1.810.356	50	90.517.800	0,00
- Catur Budi Harto	815.957	50	40.797.850	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	2.621.270	50	131.063.500	0,00
- Indra Utoyo	2.511.792	50	125.589.600	0,00
- Handayani	2.459.000	50	122.950.000	0,00
- Supari	1.923.514	50	96.175.700	0,00
- Agus Noorsanto	899.841	50	44.992.050	0,00
- Agus Sudiarto	751.200	50	37.560.000	0,00
- Amam Sukriyanto	537.454	50	26.872.700	0,00
- Agus Winardono	509.981	50	25.499.050	0,00
- Viviana Dyah Ayu R.K	473.500	50	23.675.000	0,00
- Arga Mahanana Nugraha	374.485	50	18.724.250	0,00
Masyarakat	70.914.406.217	50	3.545.720.310.850	46,80%
	151.543.070.004		7.577.153.500.200	99,99%
Saham treasury (Catatan 1d)	15.931.600		796.580.000	0,01
Total	151.559.001.604		7.577.950.080.200	100,00%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	Total Lembar Saham	Nilai Nominal per Lembar Saham (Rupiah Penuh)	Total Nilai Saham (Rupiah Penuh)	Persentase Kepemilikan Saham
Modal dasar				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	50	14.999.999.999.950	100,00
Total	300.000.000.000		15.000.000.000.000	100,00%
Modal ditempatkan dan disetor penuh				
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	50	0,00%
Negara Republik Indonesia				
Saham biasa atas nama Seri B				
Negara Republik Indonesia	69.999.999.999	50	3.499.999.999.950	56,75
Dewan Komisaris:				
- Nicolaus Teguh Budi Harjanto	816.300	50	40.815.000	0,00
- Hadiyanto	625.800	50	31.290.000	0,00
Direksi:				
- Sunarso	1.008.000	50	50.400.000	0,00
- Catur Budi Harto	329.200	50	16.460.000	0,00
- Haru Koesmahargyo	1.835.600	50	91.780.000	0,00
- Priyastomo	1.835.600	50	91.780.000	0,00
- Ahmad Solichin Lutfiyanto	1.819.400	50	90.970.000	0,00
- Indra Utoyo	1.726.400	50	86.320.000	0,00
- Handayani	1.602.500	50	80.125.000	0,00
- Supari	1.242.300	50	62.115.000	0,00
- Agus Noorsanto	380.800	50	19.040.000	0,00
- Herdy Rosadi Harman	311.900	50	15.595.000	0,00
- Agus Sudiarto	294.600	50	14.730.000	0,00
Masyarakat	52.581.518.100	50	2.629.075.905.000	42,64%
	122.595.346.500		6.129.767.325.000	99,39%
Saham treasuri (Catatan 1d)	750.463.500		37.523.175.000	0,61
Total	123.345.810.000		6.167.290.500.000	100,00%

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan BRI, pengajuan permohonan agar BRI dinyatakan pailit dan pembubaran BRI.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor

Rincian tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Tambahan modal Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi	1.092.144
Sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya	5
Agio saham dari IPO	589.762
Eksekusi atas opsi saham	
Tahun 2004	49.514
Tahun 2005	184.859
Tahun 2006	619.376
Tahun 2007	140.960
Tahun 2008	29.013
Tahun 2009	14.367
Tahun 2010	43.062
Opsi saham MSOP tahap pertama yang telah jatuh tempo	504
Opsi saham MSOP tahap kedua yang telah jatuh tempo	1.845
Opsi saham MSOP tahap ketiga yang telah jatuh tempo	8.447
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2018	(81.195)
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2019	208.331
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2020	510.819
Kompensasi atas Saham Bonus tahun 2021	1.154.211
Opsi saham MSOP tahap keempat yang telah jatuh tempo	62.862
Kehilangan pengendalian atas entitas anak	565.209
Tambahan modal atas transaksi PMHMETD	94.419.142
Akuisisi entitas sepengendali tahun 2021	(23.370.339)
Total	76.242.898

Sebagai realisasi dari Program Rekapitalisasi Bank Umum sesuai Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang "Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Bank Pemerintah", Pemerintah telah menetapkan bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi BRI untuk mencapai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 4% adalah sebesar Rp29.063.531. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2003, modal dasar dan ditempatkan BRI belum ditingkatkan dengan tambahan modal dari program rekapitalisasi tersebut, sehingga setoran modal Pemerintah sebesar Rp29.063.531 dicatat sementara pada akun "Tambahan Modal Disetor" bersama-sama dengan sisa setoran modal Pemerintah sebelumnya sebesar Rp5.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 427/KMK.02/2003 tanggal 30 September 2003, jumlah final kebutuhan rekapitalisasi BRI sebesar Rp29.063.531, dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.272.000 dan sisanya sebesar Rp25.791.531 dibukukan sebagai agio saham. Selanjutnya, dengan dilaksanakannya kuasi-reorganisasi oleh BRI, saldo rugi sebelum kuasi-reorganisasi pada tanggal 30 Juni 2003 sebesar Rp24.699.387 dieliminasi ke agio saham, sehingga menghasilkan saldo agio saham sebesar Rp1.092.149 pada tanggal 30 Juni 2003.

Pada tanggal 10 November 2003, BRI telah melakukan IPO dengan mengeluarkan 1.764.705.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran Rp875 (Rupiah penuh) per saham sehingga menghasilkan tambahan agio saham sebagai berikut:

Jumlah Saham Biasa Atas Nama Seri B baru yang dikeluarkan untuk masyarakat dalam rangka IPO (lembar saham) (Catatan 1c)	1.764.705.000
Agio saham per saham (Rupiah penuh)	375
Total agio saham - sebelum diskon	661.764
Dikurangi	
- 3% diskon yang diberikan kepada nasabah BRI	(2.961)
- Biaya IPO	(69.041)
Agio saham dari IPO	589.762

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 3 Oktober 2003, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 6 Notaris Imas Fatimah, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (*Management Stock Option Plan (MSOP)*).

Biaya kompensasi atas MSOP diakui sebagai opsi saham, bagian dari ekuitas.

Pegawai BRI telah melakukan eksekusi atas opsi saham untuk MSOP I mulai tanggal 10 November 2004, MSOP II mulai tanggal 10 November 2005 dan MSOP III mulai tanggal 15 November 2006. Selama periode 2004 sampai dengan tahun 2010 telah dilakukan eksekusi atas opsi saham sebanyak 569.876.000 lembar saham untuk MSOP I, II dan III, dimana untuk tahun 2010 sebanyak 4.728.500 lembar saham, tahun 2009 sebanyak 4.553.000 lembar saham, tahun 2008 sebanyak 7.499.000 lembar saham, tahun 2007 sebanyak 31.379.000 lembar saham, tahun 2006 sebanyak 250.721.000 lembar saham, tahun 2005 sebanyak 185.610.000 lembar saham dan tahun 2004 sebanyak 85.385.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp43.062, tahun 2009 adalah sebesar Rp14.367, tahun 2008 sebesar Rp29.013, tahun 2007 sebesar Rp140.960, tahun 2006 sebesar Rp619.376, tahun 2005 sebesar Rp184.859 dan tahun 2004 sebesar Rp49.514.

Transaksi entitas sepengendali

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 70 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, PT Bahana Artha Ventura telah mengalihkan kepemilikan saham PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) sebanyak 15.874 lembar kepada BRI (Catatan 1f), dan berdasarkan Akta Pengambilalihan Saham No. 53 tanggal 21 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., notaris pengganti dari M. Nova Faisal, S.H., M.Kn, PT Danareksa (Persero) telah mengalihkan kepemilikan saham PT Danareksa Sekuritas (Danareksa Sekuritas), sebanyak 335.000.000 lembar saham kepada BRI (Catatan 1f).

Transaksi jual beli tersebut merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Danareksa (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan	Jumlah tercatat investasi	Tambahan modal disetor
Danareksa Sekuritas	446.888	366.359	80.529
BRI Ventures	3.090	2.424	666
Jumlah	449.978	368.783	81.195

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Kehilangan pengendalian atas entitas anak (BRIS)

Pada tanggal 12 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) dan PT Bank BNI Syariah (BNIS) telah menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) atau Perjanjian Penggabungan Bersyarat dalam rangka penggabungan usaha BSM, BRIS dan BNIS (Bank Peserta Penggabungan).

Berdasarkan CMA, setelah tanggal efektif penggabungan, PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) akan menjadi entitas yang menerima penggabungan atau *surviving entity* dan seluruh pemegang saham PT Bank BNI Syariah (BNIS) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) akan menjadi pemegang saham dari entitas yang menerima penggabungan berdasarkan rasio penggabungan.

Berdasarkan rasio penggabungan kepemilikan BRI atas BSI adalah sebesar 17,29% atau sebanyak 7.092.761.655 lembar saham senilai Rp3.546.381.

Transaksi penggabungan ini merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, BNI, Mandiri, BSM, BRIS dan BNIS adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah tercatat investasi sebelumnya dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah tercatat Investasi sebelumnya	Jumlah tercatat investasi akibat merger	Tambahan modal disetor
Kepemilikan BRI atas BSI	2.981.172	3.546.381	565.209

Penerbitan Saham Baru

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa pada tanggal 22 Juli 2021, seperti yang telah diungkapkan dalam Akta No. 61 Notaris Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham menyetujui BRI menerbitkan saham baru dalam rangka penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I).

PMHMETD I tersebut telah memperoleh Pernyataan Efektif dari OJK pada tanggal 30 Agustus 2021. Pemerintah Republik Indonesia, selaku pemegang saham pengendali Perseroan mengambil bagian atas seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang menjadi haknya dengan melakukan Inbreg atas saham milik Pemerintah pada Pegadaian dan PNM kepada BRI, adalah sebagai berikut:

- a) 6.249.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Pegadaian;
- b) 3.799.999 saham Seri B atau mewakili 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam PNM.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan Modal Disetor (lanjutan)

Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

Transaksi inbreng tersebut sesuai Akta Pengalihan Hak Atas Saham Republik Indonesia atas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan Nasional Madani untuk dan dalam rangka Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia Dalam Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. 13 tanggal 13 September 2021, Notaris Fathiah Helmi, S.H, atas Transaksi inbreng tersebut merupakan transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (ultimate shareholder) dari BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi tersebut diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "Tambahan Modal Disetor" pada bagian ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah imbalan yang dialihkan	Jumlah tercatat investasi	Tambahan modal disetor
PNM	6.100.068	6.073.819	26.249
Pegadaian	48.670.528	25.326.438	23.344.090
Jumlah	54.770.596	31.400.257	23.370.339

Jumlah imbalan yang dialihkan sesuai dengan hasil nilai wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan, sesuai dengan laporan No. 00244/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan No. 00245/2.0059-02/BS/07/0242/1/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.

Atas PMHMETD I meningkatkan modal dan disetor penuh sebanyak 28.213.191.604 lembar saham atau sebesar Rp1.410.659, yang terdiri dari inbreng Pemerintah sebanyak 16.108.998.710 lembar saham atau sebesar Rp805.450 dan publik sebanyak 12.104.192.894 lembar saham atau sebesar Rp605.210, yang mengakibatkan kenaikan tambahan modal disetor sebesar Rp94.419.142 (setelah dikurangi oleh biaya emisi).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

- c. Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing

Akun ini merupakan selisih kurs yang timbul karena penjabaran laporan keuangan BRI Kantor Cabang/Perwakilan luar negeri (Cayman Islands, New York, Hong Kong, Singapura, Timor-Leste dan Taipei) dan entitas anak dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, Dolar Hong Kong, Dolar Singapura dan Dolar Taiwan ke dalam mata uang Rupiah (Catatan 2ai). Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi dalam mata uang asing lainnya dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 merupakan penjumlahan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian setiap bulan yang telah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah rata-rata pada bulan yang bersangkutan.

- d. Pembagian Laba

Dalam RUPS Tahunan BRI tanggal 25 Maret 2021 dan 18 Februari 2020 pemegang saham menyetujui pembagian dividen dari laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	Laba tahun berjalan	
	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2020	2019
Konsolidasian	12.125.589	20.623.565

- e. Reklasifikasi Saldo Laba - Telah Ditentukan Penggunaannya

Dalam rangka menjaga struktur permodalannya, BRI telah melakukan reklasifikasi saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya (cadangan tujuan) ke saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.093.056. Hal ini dilakukan sehubungan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 pada tanggal 26 September 2016 tentang "Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum".

- f. Saham bonus BRI

Memperhatikan perkembangan kinerja bisnis BRI serta dalam rangka meningkatkan *sense of belonging* para pekerja terhadap perusahaan dan memberikan insentif jangka panjang kepada pekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Direksi BRI dan entitas anak memutuskan untuk memberikan program bonus kepemilikan saham bagi manajemen dan pekerja (*Employee Stock Allocation* (ESA)). Alokasi saham diberikan kepada masing-masing pekerja berdasarkan kinerja individu dan perusahaan.

Pembayaran Program ESA I BRI Tahap 1 telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Direksi No. 751-DIR/KHC/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Implementasi *Management and Employee Stock Ownership Program* kepada 50.775 pekerja sebanyak 143.415.500 lembar saham (Catatan 1d).

Pembayaran Program ESA I BRI Tahap 2 telah dilaksanakan sesuai dengan Surat No. B.442-DIR/HCS/03/2020 kepada 173 pekerja sebanyak 4.396.700 lembar saham (Catatan 1d).

Sesuai surat Direksi No. B.03-DIR/HCS/01/2020 tanggal 2 Januari 2020, BRI kembali melaksanakan program ESA II, III, dan IV. Program ESA dimaksud memiliki tanggal grant pada 2 Januari 2020, dengan akhir periode vesting pada 31 Januari 2020 (ESA II), 31 Maret 2021 (ESA III), dan 31 Oktober 2021 (ESA IV)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

f. Saham bonus BRI (lanjutan)

Nilai wajar dari ESA II BRI pada saat pemberian adalah sebesar Rp995.148 yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. BRI telah melaksanakan pembayaran atas ESA II di 25 Februari 2020.

Nilai wajar dari ESA III dan ESA IV pada saat pemberian pada tanggal 2 Januari 2020 masing-masing sebesar Rp953.005 dan Rp930.721. Nilai wajar ESA III dan ESA IV diamortisasi selama masa *vesting* dan diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sedangkan akumulasi biaya selama periode *vesting* diakui dalam ekuitas.

Biaya ESA III dan ESA IV yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp953.005 dan Rp930.721 sedangkan untuk 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp764.083 dan Rp464.722.

g. Perubahan proporsi kepemilikan oleh kepentingan nonpengendali di PT Asuransi BRI Life (BRI Life)

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 2 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dimana para Pemegang Saham menyetujui untuk menerbitkan saham baru sehingga modal dasar BRI Life menjadi Rp400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah), terbagi atas 4.000.000 (empat juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) (Catatan 1f).

Berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham tanggal 2 Maret 2021, FWD Financial Services Pte. Ltd akan mengambil alih sebanyak 936.458 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan) saham sebagai kelanjutan dari kerjasama strategis jangka panjang. Sehingga komposisi kepemilikan saham BRI Life adalah BRI sebesar 63,83%, Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI sebesar 6,31% dan FWD Financial Services Pte. Ltd sebesar 29,86% (Catatan 1f).

Dikarenakan proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, BRI menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendalian dan kepentingan nonpengendalian untuk mencerminkan perubahan kepemilikan dalam BRI Life. Perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diterima BRI diakui secara langsung dalam ekuitas yaitu pada akun "Dampak Transaksi Pengendalian Non Pengendali" sebesar Rp1.758.580.

h. Kepentingan non pengendali

Berikut di bawah ini adalah rincian dari kepentingan non-pengendali:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Kepentingan non-pengendali</u>		
Entitas induk		
PT Asuransi BRI Life	2.443.371	368.471
PT Bank Raya Indonesia Tbk	357.683	547.974
PT BRI Asuransi Indonesia	131.948	103.859
PT BRI Danareksa Sekuritas	92.820	60.681
PT Bank BRI Syariah Tbk	-	1.452.824
Entitas anak	25.999	17.022
Total	<u>3.051.821</u>	<u>2.550.831</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. EKUITAS (lanjutan)

- i. Pengalihan Sebagian saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada Indonesia *Investment Authority*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 111 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Lembaga Pengelola Investasi telah ditetapkan penambahan penyertaan modal negara kepada Lembaga Pengelola Investasi (dalam hal ini Indonesia *Investment Authority*). Penambahan penyertaan modal tersebut berasal dari pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan.

Selanjutnya sesuai dengan Akta Notaris No. 33 Tentang Perjanjian Pengalihan Hak atas Saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada dan Dalam Rangka Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Lembaga Pengelola Investasi, yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, SH. Pengalihan Sebagian saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada Indonesia *Investment Authority* telah efektif setelah ditandatanganinya Akta tersebut pada tanggal 23 Desember 2021.

Pengalihan sebagian saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada Indonesia *Investment Authority* sejumlah 5.498.021.834 lembar saham atau sebesar 3,63%, sehingga saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan menjadi sejumlah 80.610.976.875 lembar saham atau 53,19%.

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Pendapatan bunga diperoleh dari:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
<u>Rupiah</u>		
Kredit yang diberikan		
Mikro	70.712.937	61.749.482
Ritel	37.697.355	37.052.147
Korporasi	5.490.439	6.602.197
Piutang Pembiayaan	8.832.218	5.953.408
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi Pemerintah	157.922	599.221
Obligasi	17.253	41.253
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>		400
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	5.076.641	5.149.623
Obligasi	893.381	656.994
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	11.394	71.002
<i>Medium-Term Note</i>	17.368	29.365
Sertifikat Bank Indonesia		2.306
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Pemerintah	5.027.597	3.101.370
Obligasi	183.245	180.222
<i>Medium-Term Note</i>	4.002	6.335
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>		
of Deposit	587	9.610
Sertifikat Bank Indonesia	-	11.314
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	703.213	1.368.312

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH (lanjutan)

Pendapatan bunga diperoleh dari (lanjutan):

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah		
Biaya perolehan diamortisasi	-	20.994
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain		
<i>Inter-bank call money</i>	1.598	40.923
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	566.771	595.656
Lain-lain	322.210	231.890
Giro pada Bank Indonesia	5.580	2.292
Lain-lain	263.063	288.114
	135.984.774	123.764.430
<u>Mata uang asing</u>		
Kredit yang diberikan		
Korporasi	2.446.608	2.387.848
Ritel	418.276	495.299
Efek-efek		
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi Pemerintah	5.685	18.508
Obligasi	585	2.687
Sertifikat Bank Indonesia		-
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi Pemerintah	1.296.269	1.027.971
Obligasi	89.266	81.452
Sertifikat Bank Indonesia	19.071	112.445
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi Pemerintah	688.738	520.101
Obligasi	19.645	21.802
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain		
<i>Inter-bank call money</i>	72.649	77.028
<i>Deposit Facility/Term Deposit</i>	14.656	148.517
Lain-lain	90.657	110.593
Giro pada Bank Indonesia	66	33
Lain-lain	17.839	141.903
	5.180.010	5.146.187
	141.164.784	128.910.617
Pendapatan syariah diperoleh dari:		
<i>Murabahah</i>	-	2.184.362
<i>Musarakah</i>	-	1.316.953
Lain-lain	2.358.545	3.352.629
Total Pendapatan Syariah	2.358.545	6.853.944
Total	143.523.329	135.764.561

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH

Akun ini merupakan beban bunga atas:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Rupiah		
Deposito berjangka	12.249.296	19.570.294
Surat berharga yang diterbitkan	3.049.926	2.922.127
Pinjaman yang diterima	2.191.626	3.165.133
Giro	2.172.458	3.001.817
Tabungan	2.006.450	2.832.365
Simpanan dari bank lain dan Lembaga keuangan lainnya	336.032	413.391
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	212.345	676.803
Pinjaman Subordinasi	39.470	47.184
Sertifikat Deposito	13.170	-
Lain-lain	2.975.964	3.023.151
	25.246.737	35.652.265
Mata uang asing		
Pinjaman yang diterima	858.472	661.356
Deposito berjangka	681.519	2.113.824
Surat berharga yang diterbitkan	635.051	630.847
Giro	451.443	479.900
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	131.588	195.938
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21.535	40.416
Tabungan	5.489	7.044
Lain-lain	103.963	101.815
	2.889.060	4.231.140
	28.135.797	39.883.405
Beban syariah terdiri atas:		
Deposito <i>mudharabah</i>	1.293.103	1.289.073
Lain-lain	-	1.007.970
Total Beban Syariah	1.293.103	2.297.043
Total	29.428.900	42.180.448

34. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN - NETO

Akun ini merupakan beban/(pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Kredit yang diberikan (Catatan 11f)	35.653.778	30.254.939
Piutang dan pembiayaan Syariah (Catatan 12)	278.229	2.093.237
Piutang pembiayaan (Catatan 13c)	644.287	417.160
Efek-efek (Catatan 7j)	(459.279)	1.173.553
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya (Catatan 8d)	(175.830)	(1.431.524)
Tagihan Akseptasi (Catatan 14d)	(58.215)	405.907

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

34. BEBAN PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN – NETO (lanjutan)

Akun ini merupakan beban/(pembalikan) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan sebagai berikut (lanjutan):

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (Catatan 9b)	-	(1)
Giro pada Bank lain (Catatan 5e)	(64.765)	93.819
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain (Catatan 6e)	(11.893)	17.402
Total	35.806.312	33.024.492

35. BEBAN TENAGA KERJA DAN TUNJANGAN

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Gaji, upah dan tunjangan	18.813.732	16.169.197
Bonus, insentif dan tantiem	7.909.183	7.404.511
Pensiun imbalan pasti (Catatan 42a dan 42f)	1.946.190	485.941
Biaya kompensasi saham	1.432.715	2.279.789
Cuti besar (Catatan 42f)	997.448	485.016
Iuran Jamsostek	945.898	907.877
Pemutusan hubungan kerja (Catatan 42d)	807.682	177.916
Tunjangan kesehatan	714.813	788.051
Pendidikan dan pelatihan	434.207	499.111
Pensiun iuran pasti (Catatan 42c)	381.603	352.766
Penghargaan tanda jasa (Catatan 42f)	332.633	247.454
Program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 42f)	148.829	906.326
Masa Persiapan pensiun (42e)	2.797	2.993
Lain-lain	3.179.396	2.398.321
Total	38.047.126	33.105.269

Jumlah gaji dan tunjangan untuk Direksi adalah sebesar Rp177.412 dan Rp168.326 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sedangkan jumlah gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp70.085 dan Rp63.579 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 44).

Jumlah tantiem, bonus dan insentif Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan kunci BRI yang dibayarkan adalah sebesar Rp1.290.440 dan Rp1.390.356 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 44).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Jasa <i>outsourcing</i>	4.835.352	4.646.980
Barang dan jasa pihak ketiga	3.027.955	1.720.913
Penyusutan aset tetap (Catatan 16)	2.759.154	3.199.102
<i>E-Channel</i>	2.274.091	1.854.217
Sewa	1.548.255	1.677.060
Perbaikan dan pemeliharaan	1.390.913	1.366.489
Transportasi	888.666	845.067
Listrik dan air	756.023	805.020
Jasa profesional	693.611	418.905
Percetakan dan benda pos	532.264	471.896
Peralatan kantor	457.913	467.889
Penelitian dan pengembangan produk	365.317	185.431
Komunikasi	216.127	184.948
Instalasi komputer	67.782	74.721
Lain-lain	3.455.621	3.086.044
Total	23.269.044	21.004.682

37. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Laba (Rugi) penjualan aset tetap	44.164	41.211
Pendapatan sewa	1.375	4.927
Sumbangan	(10.143)	(9.257)
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Non PUMK	(270.460)	(179.224)
<i>Corporate Social Responsibility</i>	(21.071)	(30.074)
Lain-lain - neto	103.818	387.122
Total	(152.317)	214.705

38. PERPAJAKAN

a) Utang Pajak

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>BRI (entitas induk)</u>		
Pajak penghasilan		
Pasal 29	3.490.305	1.064.461
	3.490.905	1.064.461
<u>Entitas anak</u>		
Pajak penghasilan	645.588	815.955
Pajak Pertambahan Nilai	78.425	68.940
	724.013	884.895
Total	4.214.318	1.949.356

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
<u>BRI (entitas induk)</u>		
Beban pajak kini dari:		
Periode berjalan	12.459.926	7.611.026
(Manfaat)/Beban pajak penghasilan tangguhan	(5.454.680)	196.782
	<u>7.005.246</u>	<u>7.807.808</u>
<u>Entitas anak</u>		
Beban pajak kini dari:		
Periode berjalan	1.680.576	1.737.101
Periode lalu dari hasil pemeriksaan pajak	-	11.178
Manfaat pajak penghasilan tangguhan	(850.214)	(604.116)
	<u>830.362</u>	<u>1.144.163</u>
Total	<u>7.835.608</u>	<u>8.951.971</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	40.992.065	29.993.406
Laba bersih pro forma dari transaksi akuisisi dengan entitas pengendali	(3.200.921)	(3.268.560)
Bagian laba entitas anak	1.429.563	(563.735)
Laba sebelum beban pajak BRI (entitas induk)	<u>39.220.707</u>	<u>26.161.111</u>
Perbedaan temporer:		
Cadangan kerugian aset produktif	16.532.791	8.827.772
Pembentukan penyisihan beban pegawai	4.448.894	(1.936.490)
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	3.305.535	1.548.413
Pembayaran <i>benefit</i> karyawan berbasis saham	(1.058.078)	1.262.845
Penyusutan aset tetap	209.055	47.234
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	172.611	(87.225)
	<u>23.610.808</u>	<u>9.662.549</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Perbedaan permanen:		
Promosi	1.572.735	1.846.027
Bagian laba entitas asosiasi	(523.044)	(8.148)
Representasi dan sumbangan	185.595	176.566
Humas	68.865	300.243
Pembinaan jasmani dan rohani	49.519	40.737
Perjalanan dan santunan	46.647	288.040
Hadiah non undian	9.068	547.819
Pendapatan yang dikenakan pph final	(1.038.451)	(88.040)
Lain-lain	2.376.102	1.131.128
	<u>2.747.036</u>	<u>4.234.372</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>65.578.551</u>	<u>40.058.032</u>
<u>Entitas induk</u>		
Beban pajak-kini	(12.459.926)	(7.611.026)
Pembayaran angsuran pajak		
penghasilan selama periode berjalan	8.969.621	6.504.817
Kredit pajak luar negeri	-	41.748
Estimasi utang pajak penghasilan - Pasal 29	<u>(3.490.305)</u>	<u>(1.064.461)</u>
Pembayaran angsuran pajak		
penghasilan selama catatan		
tahun berjalan	-	22.720
<u>Entitas anak</u>		
Beban pajak-kini	(1.680.576)	(1.737.102)
Pembayaran angsuran pajak		
penghasilan selama periode berjalan	1.164.555	1.085.319
Estimasi utang pajak penghasilan - Pasal 29 - neto	<u>(516.021)</u>	<u>(651.783)</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

b) Beban Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak penghasilan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Laba sebelum beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	40.992.065	29.993.406
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	7.841.634	5.813.716
Pendapatan yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan		
BRI	521.937	804.531
Entitas anak	440.664	301.057
Pengaruh perbedaan tarif dalam perhitungan pajak tangguhan	-	193.251
Pengaruh penurunan / (kenaikan) tarif dalam perhitungan pajak tangguhan	(968.627)	1.839.416
	7.835.608	8.951.971

c) Aset Pajak Tangguhan

Perhitungan (beban) manfaat pajak tangguhan BRI adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
<u>Entitas Induk</u>		
Pembentukan (Pembalikan) cadangan kerugian aset produktif	3.851.272	(633.222)
Pembentukan/(pembalikan) penyisihan beban pegawai	1.017.445	82.364
Pembentukan cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	701.411	93.668
Pembayaran <i>benefit</i> karyawan berbasis saham	(175.341)	212.940
Kerugian/(keuntungan) yang belum direalisasi dari nilai efek-efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	32.794	(14.828)
Penyusutan aset tetap	27.099	62.296
	5.454.680	(196.782)
<u>Entitas anak</u>	850.214	604.116
Total	6.304.894	407.334

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

c) Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak (dicatat pada akun "aset pajak tangguhan") adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021**)</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Entitas induk</u>		
Cadangan kerugian aset produktif ⁾	9.886.624	6.035.352
Cadangan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi ⁾	1.324.961	623.550
Penyisihan beban pegawai	2.480.767	1.463.322
Penyusutan aset tetap	(80.189)	(107.288)
Pengukuran kembali program imbalan pasti (Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari nilai efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	6.549	(26.245)
Pembayaran <i>benefit</i> karyawan berbasis saham (Keuntungan) kerugian yang belum direalisasi dari efek-efek dan obligasi rekapitalisasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	43.047	218.388
	(438.445)	(898.160)
	<u>13.524.394</u>	<u>7.605.102</u>
<u>Entitas anak</u>	2.760.504	2.280.888
Total	<u>16.284.898</u>	<u>9.885.990</u>

⁾ Pada tahun 2020 termasuk dampak penerapan awal PSAK No. 71 yang dibebankan ke saldo laba 1 Januari 2020 untuk cadangan kerugian aset produktif dan cadangan estimasi komitmen dan kontinjensi masing-masing sebesar Rp3.681.136 dan Rp377.994.

^{*)} Termasuk Pembentukan Aktiva Pajak Tangguhan sebesar Rp968.627 sebagai dampak berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan karena perubahan tarif di tahun 2022.

Pada tanggal 30 Juni 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada 19 Juni 2020.

Adapun aturan tersebut telah menetapkan antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan surat keterangan No. DE//2022-0025 tanggal 3 Januari 2022 dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2021, semua persyaratan tertentu di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No. DE//2020-0282 tanggal 8 Januari 2021 dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham BRI selama tahun 2020, semua persyaratan tertentu di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan BRI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah terpenuhi.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya pembentukan cadangan pajak untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2021 yang belum diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO

Kegiatan usaha BRI senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan risiko kegiatan usaha bank semakin kompleks. Oleh karena itu, agar mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis, BRI dituntut untuk mengelola risiko secara terpadu dan sistematis, yakni pengelolaan terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko hukum.

Prinsip-prinsip pengelolaan risiko terpadu dan sistematis oleh BRI dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Manajemen Risiko (KMR). KMR sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, dimulai dari kebijakan umum, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, proses dan penerapan manajemen risiko, sampai dengan sistem pengendalian intern. Pelaksanaan penerapan manajemen risiko diatur dalam kebijakan-kebijakan turunan sesuai dengan jenis risikonya.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di BRI dan memegang peranan penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapannya di seluruh unit kerja.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko-risiko BRI secara efektif. Dalam melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko BRI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pengawasan Manajemen Risiko (KPMR).

Direksi menentukan arah kebijakan dan strategi manajemen risiko secara komprehensif beserta implementasinya. Selain itu Direksi memastikan seluruh risiko yang material dan dampaknya telah ditindaklanjuti, serta memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha BRI. Direksi menunjuk Direktur khusus, dalam hal ini Direktur Manajemen Risiko, untuk menjalankan proses pengawasan dan pengendalian risiko secara *bank-wide*.

Direksi BRI dibantu oleh *Risk Management Committee* (RMC) individual dan RMC terintegrasi (konsolidasi dengan entitas anak) sebagai komite dalam sistem manajemen risiko BRI yang bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, menyempurnakan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi perkembangan dan kondisi profil risiko serta memberikan saran-saran dan langkah-langkah perbaikan.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada BRI termasuk kegagalan *settlement*. BRI melakukan identifikasi dan mengukur tingkat risiko calon debitur melalui pengembangan *Internal Risk Rating*. BRI memantau kualitas kredit sebagai bagian dari identifikasi dini dari pemburukan kredit. Pengelolaan risiko kredit dilakukan melalui kebijakan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi. BRI menyusun kebijakan manajemen risiko kredit diantaranya tata kelola, pengelolaan limit pada batasan eksposur risiko yang dapat diterima, pengelolaan limit pada batasan geografis, dan pengelolaan limit konsentrasi per industri. *Rating* risiko kredit diperbarui secara berkala untuk memperkirakan *potential loss* sebagai risiko akibat ekspansi kredit dan penentuan tindak lanjut perbaikan.

Penerapan manajemen risiko kredit selain bertujuan untuk mematuhi regulasi yang berlaku, juga merupakan suatu keharusan dalam rangka menerapkan sistem pengelolaan risiko kredit pada tingkat *risk and return* yang optimum dan sesuai dengan praktik di perbankan. Penerapan manajemen risiko kredit diharapkan mampu mendorong kegiatan bisnis BRI namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penyaluran kredit yang dilakukan oleh unit kerja bisnis telah mempertimbangkan dan memperhatikan risiko kredit sejak saat kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut dilunasi. Pemantauan dilakukan secara berkala terhadap kualitas kredit untuk mencegah terjadinya *Non-Performing Loan* (NPL).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit

Melalui penerapan *Early Warning System* (EWS) terhadap perkembangan kondisi usaha debitur, maka pengelolaan risiko kredit yang efektif dapat meminimalkan risiko terjadinya kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal untuk memperoleh pendapatan yang maksimal.

Pengelolaan risiko kredit BRI dimaksudkan agar kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh tidak terbayarnya pinjaman yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya, baik secara tingkat individual maupun portofolio kredit secara keseluruhan dapat dikelola seminimal mungkin. Pengelolaan risiko kredit ini juga dilakukan BRI dalam upaya memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator.

BRI senantiasa melakukan penyempurnaan metodologi penilaian risiko kredit dalam rangka meningkatkan akurasi dalam pengelolaan risiko kredit khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya.

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain kredit yang diberikan dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* atas risiko kredit untuk efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	31 Desember 2021		
	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	54.915.498	54.883.360	32.138
	31 Desember 2020		
	Eksposur Maksimum	Agunan	Net Eksposur
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	46.756.681	61.887

Untuk kredit yang diberikan, BRI menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit BRI dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. *Secured loans*
2. *Unsecured loans*

Untuk *secured loans*, BRI menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan properti.
- b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.
- c. Lainnya berupa garansi, jaminan pemerintah dan lembaga penjamin.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), BRI akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Unsecured loans terdiri dari *fully unsecured loans* seperti kartu kredit dan *partially secured loans* seperti kredit untuk golongan berpenghasilan tetap, kredit untuk para pensiunan dan kredit konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

1. Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya. (lanjutan)

Dengan demikian, meskipun kredit tersebut termasuk dalam kategori *unsecured loans* namun tingkat risiko dari *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat kredit. Sedangkan untuk *fully unsecured loans*, tingkat risiko adalah sebesar nilai tercatat kredit.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured loans* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

2. Analisa konsentrasi risiko

a. Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

	31 Desember 2021							
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	-	-	-	-	-	-	56.426.573
Giro pada Bank lain	8.683.018	-	1	3	15	7.174	5.374.886	14.065.097
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain	51.423.589	184.818	-	83.502	3.000	9.500	7.278.433	58.982.842
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	19.001.253	-	-	-	-	-	-	19.001.253
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	187.872.269	-	-	-	-	-	13.654.100	201.526.369
Biaya perolehan di amortisasi	150.473.482	-	-	-	-	-	1.047.544	151.521.026
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	22.752.541	287.404	76.934	819.892	1.965.984	442.385	3.319.085	29.664.225
Efek-efek yang dibeli								
dengan janji dijual kembali	54.915.498	-	-	-	-	-	-	54.915.498
Tagihan derivatif	730.083	-	-	-	-	-	-	730.083
Kredit yang diberikan								
Mikro	35.431.923	46.770.918	74.755.587	64.725.674	84.884.299	130.341.576	-	436.909.977
Ritel	94.193.213	27.591.617	43.207.273	50.562.763	61.705.392	111.216.887	759.364	389.236.509
Korporasi	121.573.725	10.773.528	2.581.293	5.254.105	11.131.092	5.731.822	11.224.472	168.270.037
Piutang pembiayaan								
Syariah	1.375.909	790.445	631.780	1.711.083	1.811.533	2.838.751	-	9.159.501
Piutang pembiayaan	2.958.929	9.388.240	4.645.217	7.109.769	9.246.196	5.943.078	-	39.291.429
Tagihan akseptasi	7.957.280	691.777	6.860	822.467	34.994	40.860	-	9.554.238
Penyertaan saham*)	1.546.184	-	-	-	-	-	-	1.546.184
Aset lain-lain**)	12.432.776	1.236.165	274.103	327.180	502.384	1.021.808	258.211	16.052.627
Total	829.748.245	97.714.912	126.179.048	131.416.438	171.284.889	257.593.841	42.916.095	1.656.853.468
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(89.806.374)
Bersih								1.567.047.094
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	4.172.199	2.924.471	4.511	385.959	1.720.885	479.772	-	9.687.797
Garansi yang diterbitkan	41.464.449	3.234.175	765.241	1.439.379	1.597.680	3.351.687	-	51.852.611
Total	45.636.648	6.158.646	769.752	1.825.338	3.318.565	3.831.459	-	61.540.408
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(3.729.347)
Bersih								51.811.061

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

a. Sektor geografis (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian konsentrasi risiko aset keuangan konsolidasian dengan eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Kategori wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis BRI yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (lanjutan):

	31 Desember 2020							Total
	Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah dan DIY	Jawa Timur	Sumatera	Indonesia Tengah dan Timur	Lainnya	
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	-	-	-	51.530.969
Giro pada Bank lain	11.264.040	8.081	8.425	13.372	10.271	25.035	937.042	12.266.266
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga keuangan lain	67.814.640	17.900	1.835	1.356	3.100	9.075	3.500	67.851.406
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	28.165.784	-	-	-	-	-	-	28.165.784
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	177.026.188	-	-	-	-	-	11.913.977	188.940.165
Biaya perolehan di amortisasi	107.475.833	-	-	-	-	-	2.723.837	110.199.670
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	21.887.866	825.026	217.788	921.541	1.407.817	2.218.397	94.569	27.573.004
Efek-efek yang dibeli								
dengan janji dijual kembali	46.818.568	-	-	-	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	1.576.659	-	-	-	-	-	-	1.576.659
Kredit yang diberikan								
Mikro	31.514.428	40.105.038	65.018.922	55.095.200	72.687.882	118.576.537	-	382.998.007
Ritel	107.127.424	27.695.572	41.829.294	48.089.485	60.350.970	109.528.928	957.586	395.579.259
Korporasi	118.766.721	10.103.872	3.436.499	5.152.959	12.931.601	4.355.262	10.463.454	165.210.368
Piutang dan pembiayaan syariah	19.227.804	3.852.646	2.675.118	3.320.262	15.055.087	4.934.561	-	49.065.478
Piutang pembiayaan	5.411.740	2.722.696	1.322.993	6.847.520	8.518.721	2.516.186	-	27.339.856
Tagihan akseptasi	5.724.790	537.162	77.519	252.610	225.355	-	-	6.817.436
Penyertaan saham*)	1.045.044	-	-	-	-	-	-	1.045.044
Aset lain-lain**)	10.296.454	49.513	37.687	59.098	143.016	69.487	15.546.836	26.202.091
Total	812.674.952	85.917.506	114.626.080	119.753.403	171.333.820	242.233.468	42.640.801	1.589.180.030
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(72.727.957)
Bersih								1.516.452.073
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	3.980.956	2.784.047	1.063	662.244	1.459.418	86.462	-	8.974.190
Garansi yang diterbitkan	35.346.682	2.343.702	789.155	1.034.316	2.006.160	3.164.481	-	44.684.496
Total	39.327.638	5.127.749	790.218	1.696.560	3.465.578	3.250.943	-	53.658.686
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(1.783.876)
Bersih								51.874.810

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	31 Desember 2021							
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	Total
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	-	-	-	-	-	-	56.426.573
Giro pada bank lain	-	14.065.097	-	-	-	-	-	14.065.097
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	47.373.399	11.609.443	-	-	-	-	-	58.982.842
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	10.311.218	8.407.365	-	114.228	-	13.698	154.744	19.001.253
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	176.367.288	15.744.561	-	7.930.270	-	1.134.317	349.933	201.526.369
Biaya perolehan di amortisasi	129.288.448	21.129.402	11.000	137.867	-	853.570	100.739	151.521.026
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	91.227	-	-	6.868.457	5.839.289	3.877.342	12.987.910	29.664.225
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	54.915.498	-	-	-	-	-	-	54.915.498
Tagihan derivatif	-	730.083	-	-	-	-	-	730.083
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	86.892.871	34.793.779	185.695.673	32.230.818	97.296.836	436.909.977
Ritel	-	316.166	22.438.337	14.229.043	139.605.072	12.294.419	200.353.472	389.236.509
Korporasi	41.398	-	25.676.061	44.844.784	12.488.852	13.543.001	71.675.941	168.270.037
Piutang pembiayaan syariah	-	-	750.680	183.424	2.714.029	16.732	5.494.636	9.159.501
Piutang pembiayaan	-	206.410	4.983.168	2.553.718	21.943.570	3.567.818	6.036.745	39.291.429
Tagihan akseptasi	3.759.799	-	-	710.089	26.962	2.391	5.054.997	9.554.238
Penyertaan saham*)	-	13.959	-	-	-	-	1.532.225	1.546.184
Aset lain-lain**)	3.870.720	122.824	-	1.215.605	460	162.508	10.680.510	16.052.627
Total	482.445.568	72.345.310	140.752.117	113.581.264	368.313.907	67.696.614	411.718.688	1.656.853.468
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(89.806.374)
Bersih								1.567.047.094
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	-	-	93.202	1.840.031	-	2.691.756	5.062.808	9.687.797
Garansi yang diterbitkan	-	-	571.599	19.595.096	279.028	5.374.610	26.032.278	51.852.611
Total	-	-	664.801	21.435.127	279.028	8.066.366	31.095.086	61.540.408
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(3.729.347)
Bersih								57.811.061

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

2. Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

b. Sektor industri (lanjutan)

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lanjutan):

	31 Desember 2020							Total
	Pemerintah (Termasuk BI)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Pertanian	Perindustrian	Perdagangan, hotel dan restoran	Jasa dunia usaha	Lain-lain	
Aset								
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	-	-	-	51.530.969
Giro pada bank lain	-	12.266.266	-	-	-	-	-	12.266.266
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	55.983.929	11.867.477	-	-	-	-	-	67.851.406
Efek-efek								
Nilai wajar melalui laba rugi	18.575.636	9.070.673	-	60.078	-	119.645	339.752	28.165.784
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	171.197.849	10.369.235	-	517.953	-	2.940.380	3.914.748	188.940.165
Biaya perolehan di amortisasi	105.100.849	3.340.156	11.000	75.000	-	990.298	682.367	110.199.670
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	1.782.970	-	55.250	12.940.357	212.171	887.213	11.695.043	27.573.004
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	-	-	-	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	-	1.576.659	-	-	-	-	-	1.576.659
Kredit yang diberikan								
Mikro	-	-	67.760.520	27.911.865	162.511.654	27.141.062	97.672.906	382.998.007
Ritel	-	420.250	25.575.487	21.572.504	136.762.746	12.361.178	198.887.094	395.579.259
Korporasi	82.797	-	31.054.552	36.570.772	11.290.133	9.589.700	76.622.414	165.210.368
Piutang dan pembiayaan syariah	-	75.180	3.770.249	5.453.591	10.182.701	3.580.982	26.002.775	49.065.478
Piutang pembiayaan	-	227.270	68.387	583.887	555.131	379.753	25.525.428	27.339.856
Tagihan akseptasi	1.659.002	-	-	65.401	1.017	20.000	5.072.016	6.817.436
Penyertaan saham*)	-	14.179	-	-	-	-	1.030.865	1.045.044
Aset lain-lain**)	3.349.799	109.055	-	1.071.776	-	156.882	21.514.579	26.202.091
Total	456.082.368	49.336.400	128.295.445	106.823.184	321.515.553	58.167.093	468.959.987	1.589.180.030
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(72.727.957)
Bersih								1.516.452.073
Rekening Administratif								
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	4.611.858	-	-	170.961	3.869	1.379	4.186.123	8.974.190
Garansi yang diterbitkan	17.144.401	284	563.200	1.570.424	305.548	131.872	24.968.767	44.684.496
Total	21.756.259	284	563.200	1.741.385	309.417	133.251	29.154.890	53.658.686
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai								(1.783.876)
Bersih								51.874.810

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

a. Giro pada bank lain

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif.

b. Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lanjutan)

c. Efek-efek

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh efek-efek diklasifikasikan "Lancar", kecuali Obligasi I Tahun 2003 yang diterbitkan oleh PT Great River International Tbk diklasifikasikan "Macet" yang dimiliki oleh BRI Life (entitas anak), dimana obligasi tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp758.

d. Piutang pembiayaan

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Mengalami penurunan nilai Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	280.479	188.226
Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai	351.132	109.595
	<u>38.659.818</u>	<u>27.042.035</u>
	39.291.429	27.339.856
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.584.776)	(1.002.307)
Total	<u>37.706.653</u>	<u>26.337.549</u>

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2021				Total
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai^{*)}	
	<i>High Grade</i>	<i>Standard Grade</i>			
<u>Rupiah</u>					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	212.102.157	96.349.514	13.113.785	12.874.778	334.440.234
Pertanian	92.242.617	15.138.134	2.416.698	15.973.391	125.770.840
Perindustrian	45.837.431	10.109.279	1.620.870	7.364.150	64.931.730
Jasa dunia usaha	31.843.867	10.613.701	1.578.035	5.029.465	49.065.068
Konstruksi	18.184.733	2.091.511	413.485	8.702.482	29.392.211
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	8.563.903	3.518.489	413.173	6.854.314	19.349.879
Listrik, gas dan air	15.231.219	278.509	32.748	849.026	16.391.502
Jasa pelayanan sosial	3.874.112	1.556.353	165.231	556.635	6.152.331
Pertambangan	1.704.984	492.039	67.266	647.104	2.911.393
Lain-lain	216.451.777	45.017.770	5.772.421	3.331.645	270.573.613
	<u>646.036.800</u>	<u>185.165.299</u>	<u>25.593.712</u>	<u>62.182.990</u>	<u>918.978.801</u>

*) Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2021				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai ^{*)}	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Mata uang asing</u>					
Perindustrian	21.159.353	11.722	113.898	7.897.203	29.182.176
Listrik, gas dan air	17.367.641	-	-	1.804.875	19.172.516
Pertanian	8.134.471	-	-	1.854.251	9.988.722
Jasa dunia usaha	4.757.643	6.579	122.017	4.259.690	9.145.929
Perdagangan, perhotelan dan restoran	5.981.621	1.596	2.072	198.537	6.183.826
Pertambangan	2.890.675	1.542	-	2.342.786	5.235.003
Konstruksi	3.526.194	1.710	-	382	3.528.286
Jasa pelayanan sosial	718.146	-	-	-	718.146
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	484.667	1.460	-	170.633	656.760
Lain-lain	780.154	-	2.073	3.632	785.859
	65.800.565	24.609	240.060	18.531.989	84.597.223
Total	711.837.365	185.189.908	25.833.772	80.714.979	1.003.576.024
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(86.244.641)
Bersih					917.331.383

	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai ^{*)}	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Rupiah</u>					
Perdagangan, perhotelan dan restoran	162.562.544	119.360.695	10.366.570	14.347.732	306.637.541
Pertanian	72.477.264	19.898.349	2.140.713	16.879.041	111.395.367
Jasa dunia usaha	36.350.885	12.579.423	981.749	6.381.114	56.293.171
Perindustrian	25.125.220	13.763.822	1.167.364	3.499.094	43.555.500
Listrik, gas dan air	24.767.747	2.165.270	222.803	7.818.564	34.974.384
Konstruksi	19.253.751	347.724	32.316	953.316	20.587.107
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	10.325.974	4.388.777	347.843	3.676.821	18.739.415
Jasa pelayanan sosial	3.226.453	2.083.024	177.585	543.874	6.030.936
Pertambangan	1.374.467	511.014	56.470	917.541	2.859.492
Lain-lain	209.319.560	43.648.564	5.866.395	3.465.452	262.299.971
	564.783.865	218.746.662	21.359.808	58.482.549	863.372.884

*) Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lanjutan)

e. Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif dengan rincian sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai ^{*)}	Total
	High Grade	Standard Grade			
<u>Mata Mata uang asing</u>					
Perindustrian	22.395.818	21.365	12.360	7.441.701	29.871.244
Listrik, gas dan air	13.948.658	-	-	1.991.101	15.939.759
Pertanian	10.992.105	-	-	2.003.688	12.995.793
Jasa dunia usaha	5.697.699	-	-	7.471	5.705.170
Pertambangan	2.356.956	2.402	-	2.580.731	4.940.089
Perdagangan, perhotelan dan restoran	3.820.819	6.227	14.442	237.085	4.078.573
Konstruksi	3.669.656	1.686	-	2.138	3.673.480
Jasa pelayanan sosial	1.462.131	-	-	-	1.462.131
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	717.064	29.551	-	140.500	887.115
Lain-lain	845.355	-	11.889	4.152	861.396
	<u>65.906.261</u>	<u>61.231</u>	<u>38.691</u>	<u>14.408.567</u>	<u>80.414.750</u>
Total	<u>630.690.126</u>	<u>218.807.893</u>	<u>21.398.499</u>	<u>72.891.116</u>	<u>943.787.634</u>
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai					(66.614.491)
Bersih					<u>877.173.143</u>

*) Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

f. Wesel ekspor dan tagihan lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 aset keuangan ini mengalami penurunan nilai baik secara individu dan kolektif.

g. Tagihan akseptasi

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara kolektif dan individual.

h. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

i. Aset lain-lain

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

3. Penurunan nilai aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lanjutan)

j. Rekening administratif

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, akun-akun administratif ini mengalami penurunan nilai dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Rupiah</u>		
Garansi yang diterbitkan	27.284.044	24.042.584
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	2.417.124	2.593.497
	<u>29.701.168</u>	<u>26.636.081</u>
<u>Mata uang asing</u>		
Garansi yang diterbitkan	24.568.567	20.641.912
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor	7.270.673	6.380.693
	<u>31.839.240</u>	<u>27.022.605</u>
	61.540.408	53.658.686
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(3.729.347)	(1.783.876)
Total	<u>54.811.061</u>	<u>51.874.810</u>

4. Kualitas aset keuangan

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*.

	31 Desember 2021				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai^(***)	Total
	High Grade	Standard Grade	Nilai	Nilai^(***)	
<u>Aset</u>					
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	-	-	-	56.426.573
Giro pada bank lain	13.493.391	571.706	-	-	14.065.097
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	58.982.842	-	-	-	58.982.842
Efek-efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	18.832.007	169.246	-	-	19.001.253
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	197.493.082	4.033.287	-	-	201.526.369
Biaya perolehan diamortisasi	151.188.845	332.181	-	-	151.521.026
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	29.664.225	-	-	-	29.664.225
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	54.915.498	-	-	-	54.915.498
Tagihan derivatif	730.083	-	-	-	730.083
Kredit yang diberikan					
Mikro	350.360.301	66.793.149	13.335.390	6.421.137	436.909.977
Ritel	247.184.077	110.346.999	11.471.523	20.233.910	389.236.509
Korporasi	114.292.987	-	235.913	53.741.137	168.270.037
Piutang pembiayaan syariah	-	8.049.760	790.946	318.795	9.159.501
Piutang pembiayaan	37.705.011	954.807	351.132	280.479	39.291.429
Tagihan akseptasi	9.554.238	-	-	-	9.554.238
Penyertaan saham ^(*)	1.546.184	-	-	-	1.546.184
Aset lain-lain ^(**)	10.322.681	5.729.946	-	-	16.052.627
Total	<u>1.352.692.025</u>	<u>196.981.081</u>	<u>26.184.904</u>	<u>80.955.458</u>	<u>1.656.853.468</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit, nilai yang disajikan adalah *gross*. (lanjutan)

	31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo atau Tidak Mengalami Penurunan Nilai		Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai	Mengalami Penurunan Nilai ^{*)}	Total
	High Grade	Standard Grade			
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	51.530.969	-	-	-	51.530.969
Giro pada bank lain	11.853.100	413.166	-	-	12.266.266
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	67.851.406	-	-	-	67.851.406
Efek-efek					
Nilai wajar melalui laba rugi	28.014.345	151.439	-	-	28.165.784
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	188.940.165	-	-	-	188.940.165
Biaya perolehan diamortisasi	109.707.669	491.243	-	758	110.199.670
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.573.004	-	-	-	27.573.004
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	1.576.659	-	-	-	1.576.659
Kredit yang diberikan					
Mikro	274.708.957	94.290.107	10.679.068	3.319.875	382.998.007
Ritel	234.971.081	124.308.220	10.719.431	25.580.527	395.579.259
Korporasi	121.010.086	209.567	-	43.990.715	165.210.368
Piutang dan pembiayaan syariah	39.048.965	7.442.946	1.379.218	1.194.349	49.065.478
Piutang pembiayaan	26.038.322	1.003.713	109.595	188.226	27.339.856
Tagihan akseptasi	6.817.436	-	-	-	6.817.436
Penyertaan saham ^{*)}	1.045.044	-	-	-	1.045.044
Aset lain-lain ^{**)}	24.558.172	1.643.919	-	-	26.202.091
Total	1.262.063.948	229.954.320	22.887.312	74.274.450	1.589.180.030

^{*)} Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

^{**)} Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

^{***)} Termasuk seluruh kredit yang dianalisa secara individual

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

1. Tingkat Tinggi (*High Grade*)

- a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah dan transaksi dengan bank yang telah terdaftar pada Bursa.
- b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, serta tidak pernah direstrukturisasi.
- c) Wesel ekspor dan tagihan lainnya serta tagihan akseptasi yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan memiliki kapasitas finansial yang kuat dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
- d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi dengan *rating* minimal idA- (Pefindo), A- (Fitch), A- (Standard & Poor's), atau A3 (Moody's).
- e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

2. Tingkat Standar (*Standard Grade*)

- a) Giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar pada Bursa.
- b) Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah yaitu pinjaman kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo, dan tidak mengalami penurunan nilai, namun pernah direstrukturisasi.
- c) Wesel ekspor dan tagihan lainnya serta tagihan akseptasi, yaitu tagihan kepada pihak ketiga yang belum jatuh tempo dan memiliki kapasitas finansial yang memadai dalam hal pembayaran kembali seluruh kewajibannya secara tepat waktu.
- d) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah, yaitu efek-efek dan obligasi dengan *rating* antara idBBB+ sampai dengan idBBB- (Pefindo), BBB+ sampai dengan BBB- (Fitch), BBB+ sampai dengan BBB- (Standard & Poor's), atau Baa1 sampai dengan Baa3 (Moody's).
- e) Penyertaan saham, yaitu penyertaan pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa dan memiliki tingkat kinerja keseluruhan yang baik.

Analisis Kualitas Kredit

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

a. Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

1. *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
2. *Probability of default* (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Bank juga menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

1. Pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default* (PD)
2. Indikator kualitatif
3. Tertunggak lebih dari 30 hari.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

b. *Credit Risk Grades*

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

c. Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur PD *term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (seperti restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB), suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

d. Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Kriteria untuk menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan bervariasi untuk setiap portofolio dan termasuk perubahan kuantitatif pada PD dan faktor kualitatif, termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan.

Risiko kredit dari eksposur tertentu dianggap telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika, berdasarkan permodelan kuantitatif Bank, *probability of default* (PD) atas umur tersisa telah meningkat signifikan.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

d. Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan (lanjutan)

Bank juga dapat menggunakan penilaian dari analisis kredit dan, jika mungkin, pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa mungkin eksposur telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dan pengaruhnya mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam analisis kuantitatif secara tepat waktu.

Bank menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara *reviu berkala*.

e. Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

f. Definisi Gagal Bayar (*Default*)

Grup menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari kelompok usahanya; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada kelompok usahanya.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/gagal bayar, Grup mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif - seperti pelanggaran persyaratan penjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif - seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

a. Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

	2020	2021
Pertumbuhan PDB	dasar -0,89% Kisaran antara -1,21 hingga -0,59%	dasar 4,58% Kisaran antara 3,98 hingga 5,18%
Tingkat Konsumsi	dasar 1,97% Kisaran antara -1,38 hingga 2,87%	dasar 5,48% Kisaran antara 1,12 hingga 5,67%
Tingkat Investasi	dasar 6,71% Kisaran antara 0,97 hingga 7,17%	dasar 6,83% Kisaran antara 0,95 hingga 7,25%

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

- *Probability of Default* (PD)
- *Loss of Given Default* (LGD)
- *Exposure at Default* (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan *rating* yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Kredit (lanjutan)

4. Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Analisis Kualitas Kredit (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai (lanjutan)

b. Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo.

5. Berdasarkan PSAK No. 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, dan piutang pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

	31 Desember 2021			
	≤ 30 hari	> 30 - 60 hari	> 60 - 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	5.316.118	3.414.742	4.604.530	13.335.390
Ritel	5.854.507	2.935.287	2.681.729	11.471.523
Korporasi	235.913	-	-	235.913
Piutang dan pembiayaan syariah	222.493	80.127	488.326	790.946
Piutang pembiayaan	309.788	30.742	10.602	351.132
Total	11.938.819	6.460.898	7.785.187	26.184.904
	31 Desember 2020			
	≤ 30 hari	> 30 - 60 hari	> 60 - 90 hari	Total
Kredit yang diberikan				
Mikro	4.813.047	2.629.162	3.236.859	10.679.068
Ritel	5.972.110	2.707.394	2.039.927	10.719.431
Piutang dan pembiayaan syariah	912.213	264.890	202.115	1.379.218
Piutang pembiayaan	41.123	56.141	12.331	109.595
Total	11.738.493	5.657.587	5.491.232	22.887.312

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan BRI untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan sehingga tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan BRI.

BRI mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, serta dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Untuk mendukung pengelolaan likuiditas, BRI menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas (PPMRL) yang mencakup kebijakan manajemen likuiditas, proyeksi arus kas, profil maturitas (*maturity gap*), *net stable funding ratio* dan *liquidity coverage ratio*, pedoman penetapan limit risiko likuiditas, *stress test* risiko likuiditas, *contingency funding plan* dan sistem informasi risiko likuiditas. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan kecukupan pengelolaan risiko likuiditas harian dalam memenuhi kewajiban pada kondisi normal maupun kondisi krisis secara tepat waktu dari berbagai sumber dana yang tersedia, termasuk memastikan ketersediaan aset likuid berkualitas tinggi dan penghimpunan DPK yang memiliki struktur yang sehat dan *sustainable*.

BRI juga melakukan simulasi *stress testing* secara triwulanan yang disampaikan kepada Dewan Direksi dan Komisaris BRI melalui *Risk Management Committee* (RMC). Tujuan dari *stress testing* yaitu untuk mengukur ketahanan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas selama kondisi krisis (*stress*). Selain itu, *stress test* juga digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan atau meningkatkan rencana pendanaan darurat (*contingency plan*), dan limit risiko likuiditas.

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual

Potensi risiko likuiditas yang akan dihadapi BRI di masa mendatang diukur melalui *Liquidity Gap Analysis*, yang merupakan proyeksi *mismatch* likuiditas atas dasar jatuh tempo aset dan liabilitas, setelah memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Informasi ini menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan likuiditas, termasuk juga kebutuhan ekspansi bisnis. Dengan diterapkannya pengelolaan likuiditas yang efektif, diharapkan dapat meminimalkan risiko likuiditas di BRI sekaligus meningkatkan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

31 Desember 2021

Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	26.299.973	-	-	-	-	26.299.973
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	56.426.573	-	-	-	-
Giro pada bank lain	14.065.097	14.065.097	-	-	-	-
Cadangan kerugian	(29.078)	-	-	-	-	(29.078)
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	58.982.842	57.754.782	1.081.934	146.126	-	-
Cadangan kerugian	(6.177)	-	-	-	-	(6.177)
Efek-efek	372.048.648	224.646.920	5.601.849	19.264.324	122.535.555	-
Cadangan kerugian	(311.120)	-	-	-	-	(311.120)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	29.664.225	5.553.156	13.881.769	10.229.300	-	-
Cadangan kerugian	(1.142.349)	-	-	-	-	(1.142.349)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	54.915.498	48.275.488	6.640.010	-	-	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lanjutan):

31 Desember 2021						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset (lanjutan)						
Tagihan Derivatif	730.083	263.928	168.106	91.592	206.457	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	436.909.977	4.351.325	9.609.741	52.441.089	370.507.822	-
Ritel	389.236.509	12.651.301	21.356.134	131.221.896	224.007.178	-
Korporasi	168.270.037	5.632.720	7.127.497	20.343.352	135.166.468	-
Cadangan kerugian	(84.833.734)	-	-	-	-	(84.833.734)
Piutang dan pembiayaan syariah	9.159.501	6.558	14.727	6.567.241	2.570.975	-
Cadangan kerugian	(1.410.907)	-	-	-	-	(1.410.907)
Piutang pembiayaan	39.291.429	15.488	51.822	192.861	39.031.258	-
Cadangan kerugian	(1.584.776)	-	-	-	-	(1.584.776)
Tagihan akseptasi	9.554.238	3.437.312	3.244.266	2.872.660	-	-
Cadangan kerugian	(488.233)	-	-	-	-	(488.233)
Penyertaan saham*)	1.546.184	-	-	-	-	1.546.184
Aset lain-lain**)	16.052.627	387.470	2.925.918	2.510.734	4.067.505	6.161.000
	1.593.347.067	433.468.118	71.703.773	245.881.175	898.093.218	(55.799.217)
Liabilitas						
Liabilitas segera	18.735.387	-	-	-	-	18.735.387
Simpanan nasabah						
Giro	220.590.197	220.590.197	-	-	-	-
Tabungan	497.676.740	497.676.740	-	-	-	-
Deposito berjangka	420.476.279	212.158.376	115.766.343	91.567.481	984.079	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	13.329.434	13.329.434	-	-	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	29.408.508	18.993.456	4.493.222	2.625.424	3.296.406	-
Liabilitas derivatif	199.695	38.763	26.450	29.665	104.817	-
Liabilitas akseptasi	9.554.238	3.437.312	3.244.266	2.872.660	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	55.306.698	-	-	3.740.619	51.566.079	-
Pinjaman yang diterima	68.458.547	16.871.742	7.353.878	21.193.830	23.039.097	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.375	-	-	-	501.375	-
Liabilitas lain-lain***)	10.691.741	711.989	1.766.105	1.088.067	6.418.623	706.957
	1.344.928.839	983.808.009	132.650.264	123.117.746	85.910.476	19.442.344
Perbedaan Jatuh Tempo	248.418.228	(550.339.891)	(60.946.491)	122.763.429	812.182.742	(75.241.561)

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru'* dan dana *syirkah* temporer.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lanjutan):

31 Desember 2020						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Aset						
Kas	32.274.988	-	-	-	-	32.274.988
Giro pada Bank						
Indonesia	51.530.969	51.530.969	-	-	-	-
Giro pada bank lain	12.266.266	12.266.266	-	-	-	-
Cadangan kerugian	(93.843)	-	-	-	-	(93.843)
Penempatan pada Bank						
Indonesia dan lembaga keuangan lain	67.851.406	57.614.764	9.744.892	491.750	-	-
Cadangan kerugian	(18.070)	-	-	-	-	(18.070)
Efek-efek	327.305.619	218.132.187	940.587	12.324.225	95.908.620	-
Cadangan kerugian	(348.941)	-	-	-	-	(348.941)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.573.004	6.797.656	11.192.438	9.582.910	-	-
Cadangan kerugian	(1.326.190)	-	-	-	-	(1.326.190)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	46.818.568	44.433.840	1.259.335	1.125.393	-	-
Tagihan Derivatif	1.576.659	608.655	621.679	135.996	210.329	-
Kredit yang diberikan						
Mikro	382.998.007	3.796.380	8.009.083	41.660.179	329.532.365	-
Ritel	395.579.259	11.481.006	20.829.008	137.664.536	225.604.709	-
Korporasi	165.210.368	8.415.684	12.319.777	19.173.880	125.301.027	-
Cadangan kerugian	(66.810.179)	-	-	-	-	(66.810.179)
Piutang dan pembiayaan syariah	49.065.478	1.728.557	1.666.653	3.574.110	42.096.158	-
Cadangan kerugian	(2.582.167)	-	-	-	-	(2.582.167)
Piutang pembiayaan	27.339.856	41.251	42.680	486.485	26.769.440	-
Cadangan kerugian	(1.002.307)	-	-	-	-	(1.002.307)
Tagihan akseptasi	6.817.436	2.166	3.170.443	3.644.827	-	-
Cadangan kerugian	(546.260)	-	-	-	-	(546.260)
Penyertaan saham*)	1.045.044	-	-	-	-	1.045.044
Aset lain-lain**)	26.202.091	452.394	2.635.364	2.061.124	188.692	20.864.517
	1.548.727.061	417.301.775	72.431.939	231.925.415	845.611.340	(18.543.408)
Liabilitas						
Liabilitas segera	15.473.574	-	-	-	-	15.473.574
Simpanan nasabah						
Giro	184.848.351	184.848.351	-	-	-	-
Giro <i>Wadiah</i>	6.258.078	6.258.078	-	-	-	-
Giro <i>Mudharabah</i>	1.623.563	1.623.563	-	-	-	-
Tabungan	460.671.367	460.671.367	-	-	-	-
Tabungan <i>Wadiah</i>	9.247.604	9.247.604	-	-	-	-
Tabungan <i>Mudharabah</i>	6.147.015	6.147.015	-	-	-	-
Deposito berjangka	426.399.550	245.018.175	124.908.581	48.032.767	8.440.027	-
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	25.726.398	18.272.475	6.722.692	731.231	-	-
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	23.785.997	23.336.497	449.500	-	-	-
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	40.478.672	31.380.589	4.263.236	2.819.748	2.015.099	-
Liabilitas derivatif	407.774	102.160	136.061	26.960	142.593	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Likuiditas (lanjutan)

Analisa Aset dan Liabilitas Sesuai Sisa Jatuh Tempo Kontraktual (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai pemetaan aset dan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (lanjutan):

31 Desember 2020						
Keterangan	Total	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo
Liabilitas (lanjutan)						
Liabilitas akseptasi Surat berharga yang diterbitkan	6.817.436	2.166	3.170.443	3.644.827	-	-
Pinjaman yang diterima Pinjaman dan surat berharga subordinasi	57.757.028	-	3.423.443	6.125.533	48.208.052	-
Liabilitas lain-lain***)	72.164.236	4.494.350	5.281.837	36.584.829	25.803.220	-
	1.465.392	-	-	-	1.465.392	-
	9.054.084	1.349.947	485.666	818.382	6.101.205	298.884
	1.348.326.119	992.752.337	148.841.459	98.784.277	92.175.588	15.772.458
Perbedaan Jatuh Tempo	200.400.942	(575.450.562)	(76.409.520)	133.141.138	753.435.752	(34.315.866)

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

***) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana tabarru' dan dana syirkah temporer.

Manajemen Risiko Pasar

Risiko pasar timbul karena pergerakan faktor pasar yang meliputi suku bunga dan nilai tukar yang berlawanan dengan posisi yang dimiliki BRI, baik posisi yang ada di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. Posisi tersebut merupakan posisi yang ada dalam *trading book* dan *banking book*.

BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi *treasury* dan risiko pasar (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang digunakan oleh fungsi *front office*, *middle office* dan *back office*. *Middle Office* dapat melakukan pengukuran risiko pasar menggunakan model internal (*Value-at-Risk*) yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan *monitoring* eksposur risiko instrumen, *Middle Office* juga melakukan *monitoring limit* risiko pasar.

1. Value-at-Risk (VaR): Tujuan Penggunaan Metode dan Keterbatasannya

BRI menggunakan pendekatan model *internal* untuk mengukur potensi kerugian VaR akibat perubahan harga pasar dari portofolio *trading* berdasarkan pada data historis. Potensi kerugian VaR dari risiko pasar diukur dengan menggunakan asumsi perubahan faktor risiko mengikuti pola distribusi normal. BRI menggunakan VaR untuk menghitung risiko nilai tukar untuk posisi *trading* dan *banking book* serta menghitung risiko suku bunga untuk posisi *trading book*.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

2. Asumsi *Value-at-Risk* (VaR)

Potensi kerugian VaR dihitung berdasarkan nilai estimasi dengan menggunakan tingkat kepercayaan (*confidence level*) di 99% dan posisi risiko pasar yang tidak berubah dalam 1 (satu) hari (*holding period*). Hal ini menunjukkan potensi kerugian yang dapat melebihi nilai VaR dalam kondisi pasar normal, rata-rata dapat terjadi satu kali dalam seratus hari. Metode yang digunakan dalam pengukuran VaR adalah metode Delta Gamma.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai nilai VaR dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020:

	31 Desember 2021	
	Nilai Tukar*)	Suku Bunga
Rata-rata Harian	13.099,57	60.651,27
Tertinggi	32.807,51	501.987,12
Terendah	64,85	4.679,94
	31 Desember 2020 (tidak diaudit)	
	Nilai Tukar*)	Suku Bunga
Rata-rata Harian	7.549,36	19.796,99
Tertinggi	13.946,91	29.419,18
Terendah	134,90	14.237,66

*) Termasuk *trading* dan *banking book*.

3. *Back Testing*

Tujuan dilaksanakannya *back testing* yaitu untuk memastikan bahwa hasil perhitungan internal model untuk risiko suku bunga dan risiko nilai tukar telah sesuai. Ketika melakukan *back testing*, BRI membandingkan antara estimasi VaR harian dengan realisasi perubahan harga.

Berdasarkan prosedur *back testing* untuk risiko nilai tukar dan risiko tingkat suku bunga, hasil kerugian sebenarnya sepanjang tahun telah sesuai secara signifikan dengan VaR *forecast model*.

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book*

a. Risiko Tingkat Suku Bunga

Instrumen keuangan yang berbasis suku bunga memiliki risiko karena terdapat potensi perubahan suku bunga yang akan berdampak pada arus kas di masa depan.

BRI telah mengembangkan metodologi pengukuran dampak pengaruh pergerakan suku bunga dalam *banking book* melalui *Interest Rate Risk in The Banking Book* sesuai SEOJK No. 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Posisi Desember 2021, secara individu BRI mempunyai nilai *delta* EVE (Economic Value of Equity) sebesar 6,03% (perbandingan terhadap modal Tier 1).

Direksi dan Manajemen bertanggung jawab dalam menetapkan, mengelola, serta mengendalikan tingkat suku bunga dengan menimbang *risk appetite* bank dan target pencapaian kinerja keuangan. *Review* atas penetapan suku bunga dilakukan minimal satu kali dalam satu bulan dalam forum *Asset and Liability Committee* (ALCO).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata untuk posisi aset dan liabilitas keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020:

	Rupiah (%)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Aset</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	0,70	3,34
Efek-efek	6,75	6,90
Kredit yang diberikan	11,96	10,40
Piutang pembiayaan	16,99	18,53
<u>Liabilitas</u>		
Simpanan nasabah		
Giro	1,98	2,85
Tabungan	0,42	0,69
Deposito	3,45	5,61
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	1,8	3,17
Pinjaman yang diterima	0,02	0,02
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	4,37	4,85
Surat berharga yang diterbitkan	9,5	8,12
	Valas (%)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Aset</u>		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	0,10	0,40
Efek-efek	1,98	2,74
Kredit yang diberikan	4,01	3,80
Piutang pembiayaan	6,19	5,63
<u>Liabilitas</u>		
Simpanan nasabah		
Giro	0,65	0,96
Tabungan	0,18	0,31
Deposito	0,78	2,24
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lain	0,51	0,53
Pinjaman yang diterima	1,15	1,30
Surat berharga yang diterbitkan	4,29	4,29

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan dalam tingkat suku bunga untuk *banking book*, dengan semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan, terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BRI.

31 Desember 2021	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
+/- 1 %	+/- 2.093.634
31 Desember 2020 (tidak diaudit)	
Perubahan Persentase	Dampak Terhadap Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
+/- 1 %	+/- 2.044.636

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*):

31 Desember 2021						
Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset						
Kas	-	-	-	-	26.299.973	26.299.973
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	-	-	-	-	56.426.573
Giro pada Bank lain	14.065.097	-	-	-	-	14.065.097
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	58.836.717	146.125	-	-	-	58.982.842
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	-	19.001.253	-	19.001.253
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	201.526.369	-	201.526.369
Biaya perolehan di amortisasi	-	-	-	151.521.026	-	151.521.026
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	29.664.225	-	-	-	-	29.664.225
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	54.915.498	-	-	-	-	54.915.498
Tagihan derivatif					730.083	730.083
Kredit yang diberikan						
Mikro	416.743	2.092.488	33.296.344	401.104.402	-	436.909.977
Ritel	33.523.151	91.651.345	120.128.471	143.933.542	-	389.236.509
Korporasi	16.320.556	16.783.013	135.166.468	-	-	168.270.037
Piutang pembiayaan Syariah	-	-	-	-	9.159.501	9.159.501
Piutang pembiayaan	15.488	51.822	192.861	39.031.258	-	39.291.429
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	9.554.238	9.554.238
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.546.184	1.546.184
Aset lain-lain**)	1.799.414	-	-	-	14.253.213	16.052.627
	265.983.462	110.724.793	288.784.144	956.117.850	61.543.192	1.683.153.441

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (lanjutan):

31 Desember 2021

Suku bunga mengambang						
Keterangan	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	18.735.387	18.735.387
Simpanan nasabah						
Giro	-	-	-	220.590.197	-	220.590.197
Tabungan	229.589.042	-	-	268.087.698	-	497.676.740
Deposito berjangka	212.158.376	115.766.343	91.567.481	984.079	-	420.476.279
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	13.329.434	-	-	-	-	13.329.434
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	23.486.678	2.625.424	3.296.406	-	-	29.408.508
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	199.695	199.695
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	9.554.238	9.554.238
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	3.740.619	51.566.078	-	55.306.697
Pinjaman yang diterima	24.225.620	21.193.830	23.039.097	-	-	68.458.547
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	501.375	-	501.375
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	10.691.741	10.691.741
	502.789.150	139.585.597	121.643.603	541.729.427	39.181.061	1.344.928.838
Perbedaan (<i>gap</i>) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	(236.805.688)	(28.860.804)	167.140.541	414.388.423	22.362.131	338.224.603

31 Desember 2020
(tidak diaudit)

Suku bunga mengambang						
Keterangan	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset						
Kas	-	-	-	-	32.274.988	32.274.988
Giro pada Bank						
Indonesia	51.530.969	-	-	-	-	51.530.969
Giro pada Bank lain	6.401.964	-	-	3.555.564	2.308.738	12.266.266
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	58.926.485	8.924.921	-	-	-	67.851.406
Efek-efek						
Nilai wajar melalui laba rugi	-	-	-	28.165.784	-	28.165.784
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	188.940.165	-	188.940.165
Biaya perolehan di amortisasi	-	-	-	110.199.670	-	110.199.670

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

a. Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur aset dan liabilitas keuangan terhadap risiko tingkat suku bunga (*gross*) (lanjutan):

31 Desember 2020
(tidak diaudit)

Keterangan	Suku bunga mengambang			Suku bunga tetap	Tidak dikenakan bunga	Total
	Tidak lebih dari 3 bulan	Lebih dari 3 bulan tidak lebih dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun			
Aset (lanjutan)						
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	27.573.004	-	-	-	-	27.573.004
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	45.693.175	1.125.393	-	-	-	46.818.568
Tagihan derivatif	-	-	-	-	1.567.659	1.567.659
Kredit yang diberikan						
Mikro	11.747.994	64.883.617	-	306.366.396	-	382.998.007
Ritel	32.007.686	172.870.293	49.999.634	140.701.646	-	395.579.259
Korporasi	18.349.442	146.860.926	-	-	-	165.210.368
Piutang dan pembiayaan syariah	-	-	-	-	49.065.478	49.065.478
Piutang pembiayaan	22.834	111.590	415.550	26.788.380	1.502	27.339.856
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	6.817.436	6.817.436
Penyertaan saham*)	-	-	-	-	1.045.044	1.045.044
Aset lain-lain**)	1.576.987	-	-	-	24.625.104	26.202.091
	253.830.540	394.776.740	50.415.184	804.717.605	117.714.949	1.621.455.018
Liabilitas						
Liabilitas segera	-	-	-	-	15.473.574	15.473.574
Simpanan nasabah						
Giro	-	-	-	184.848.351	-	184.848.351
Giro <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	6.258.078	6.258.078
Giro <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	1.623.563	1.623.563
Tabungan	213.723.819	-	-	246.947.548	-	460.671.367
Tabungan <i>Wadiah</i>	-	-	-	-	9.247.604	9.247.604
Tabungan <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	6.147.015	6.147.015
Deposito berjangka	369.926.756	48.032.767	8.440.027	-	-	426.399.550
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	-	-	-	-	25.726.398	25.726.398
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	23.785.997	-	-	-	-	23.785.997
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	35.643.825	2.819.748	2.015.099	-	-	40.478.672
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	407.774	407.774
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	6.817.436	6.817.436
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	57.757.028	-	57.757.028
Pinjaman yang diterima	9.776.188	36.584.830	25.803.220	-	-	72.164.236
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	-	-	-	500.887	964.505	1.465.392
Liabilitas lain-lain***)	-	-	-	-	9.054.084	9.054.084
	652.856.585	87.437.345	36.258.346	490.053.814	81.720.031	1.348.326.119
Perbedaan (<i>gap</i>) repricing suku bunga antara aset dan liabilitas keuangan	(399.026.045)	307.339.395	14.156.838	314.663.791	35.994.918	273.128.899

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

***) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *Tabarru'* dan dana *Syirkah* temporer.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Pasar (lanjutan)

4. Risiko Pasar di luar *Trading Book* (lanjutan)

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya fluktuasi nilai tukar terhadap Rupiah dari posisi valuta asing yang dimiliki BRI. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN (Posisi Devisa Neto).

Menurut ketentuan Bank Indonesia berdasarkan PBI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 mengenai Perubahan Keempat atas PBI No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum tanggal 1 Juli 2010, PDN ditetapkan maksimum sebesar 20% modal.

PDN adalah penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan untuk setiap mata uang asing dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap mata uang asing yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.

Berikut adalah PDN (BRI saja) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, per mata uang, sebagai berikut:

Mata Uang	31 Desember 2021		
	Aset	Liabilitas	PDN
<u>Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	290.693.514	289.479.384	1.214.130
Dolar Kanada	9.481	30.866	21.385
Renminbi	1.155.380	1.141.126	14.254
Yen Jepang	1.277.056	1.264.337	12.719
Dolar Singapura	19.116.295	19.103.798	12.497
Euro Eropa	2.531.448	2.543.191	11.743
Dolar Australia	312.770	314.390	1.620
Pound Sterling Inggris	166.372	165.259	1.113
Lain-lain	1.021.442	378.804	642.638
			1.932.099
Modal (Catatan 48a)			241.660.763
Rasio PDN			0,81%
<u>Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif</u>			
Dolar Amerika Serikat	268.939.015	267.729.710	1.209.305
Dolar Singapura	13.361.892	13.785.073	423.181
Euro Eropa	4.068.561	4.046.125	22.436
Dolar Kanada	7.635	40.090	32.455
Yen Jepang	909.297	888.710	20.584
Dolar Australia	354.057	344.763	9.294
Pound Sterling Inggris	213.020	219.389	6.369
Renminbi	1.025.266	1.019.655	5.611
Lain-lain	728.317	503.740	224.577
			1.953.812
Modal (Catatan 48a)			183.337.537
Rasio PDN			1,07%

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Penerapan manajemen risiko mencakup pilar Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan *limit*, Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan Sistem pengendalian internal.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dimaksud ditujukan untuk mengelola eksposur risiko operasional yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mengganggu aktivitas bisnis dan operasional, seperti faktor ketidakcukupan sumber daya manusia, proses internal, kegagalan sistem teknologi informasi, bencana alam dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi bank. Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di BRI mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Setiap unit kerja operasional BRI bertanggung jawab atas penerapan proses manajemen risiko melalui sistem pengendalian internal dalam aktivitas operasional dan bisnis di masing-masing unit kerja. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahap identifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko. Untuk mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penerapan proses manajemen risiko dilaksanakan sesuai ketentuan, maka Direksi BRI menetapkan fungsi manajemen risiko pada setiap unit kerja mulai dari level Kantor Pusat (Divisi/*Desk*), Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit, Kantor Kas, Sentra Layanan BRI Prioritas dan Unit Kerja Luar Negeri (UKLN).

Satuan Kerja Manajemen Risiko Operasional (SKMRO) bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko operasional, pengembangan dan implementasi kebijakan/prosedur dan metodologi, pengawasan, pengkajian, serta pemantauan proses manajemen risiko operasional. Di samping itu, SKMRO juga berperan dalam penyusunan dan pemantauan profil risiko BRI, penilaian kecukupan pengelolaan risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru, serta mendukung unit kerja operasional/*risk owner* dalam mengembangkan budaya sadar risiko, penerapan strategi *anti fraud*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen risiko. Pembahasan pengelolaan dan perbaikan kontrol atas risiko operasional dilaksanakan dalam *Risk Management Committee* (RMC) setiap triwulanan bersama dengan SKMR dan Divisi/*Desk* lainnya.

Audit Intern selaku *third line of model* yang meliputi Audit Intern Kantor Pusat dan Audit Intern Wilayah BRI seluruh Indonesia bertugas melakukan pemantauan dan validasi atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal di BRI secara *bankwide*.

Penerapan manajemen risiko operasional BRI difasilitasi melalui perangkat manajemen risiko operasional berupa BRI *Operational Risk Assessor* (BRI OPRA) yang mencakup modul *Risk and Control Self Assessment* (RCSA), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI), Manajemen Insiden (MI)/*Loss Even Database* (LED), Forum MR dan Maturitas. Kebijakan Perangkat Manajemen Risiko Operasional telah dikinikan dalam Surat Edaran No. S.17-DIR/MOP/03/2020 tanggal 6 Maret 2020.

Upaya pemahaman manajemen risiko difokuskan pada peningkatan budaya sadar risiko. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi/pelatihan manajemen risiko yang terus dilakukan kepada seluruh pekerja BRI dan peningkatan kualitas pengendalian risiko pada setiap aktivitas operasional.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

1. Risk Control and Self Assessment (RCSA)

RCSA merupakan perangkat manajemen risiko yang bersifat kualitatif dan prediktif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko berdasarkan dimensi dampak (impact) dan kemungkinan kejadian (likelihood), RCSA di BRI telah diterapkan di Divisi/*Desk* Kantor Pusat BRI, Kantor Wilayah, Kantor Cabang Khusus, Kantor Cabang yang juga mewakili BRI Unit, Kantor Cabang Pembantu dan Sentra Layanan BRI Prioritas.

RCSA ditujukan untuk membantu unit kerja dalam mengidentifikasi dan mengukur secara independen risiko operasional pada setiap aktivitas operasional dan bisnis, termasuk melakukan pemantauan dan penentuan langkah-langkah perbaikan/rencana tindak lanjut ke depan.

Pengkinian *risk issue* pada RCSA dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan bisnis BRI yang meliputi implementasi produk dan atau aktivitas baru, segmen pasar baru dan persaingan bisnis, perubahan ketentuan internal/eksternal, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi eksposur risiko BRI. Penilaian dimaksud dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan data Manajemen Insiden (MI)/*Loss Event Database* (LED), Indikator Risiko Utama (IRU)/*Key Risk Indicator* (KRI) dan Laporan Hasil Audit (LHA). RCSA dilaksanakan secara periodik setiap semester, dan frekuensinya akan ditingkatkan apabila terjadi perubahan eksposur risiko yang signifikan.

2. Manajemen Insiden (MI) dan Loss Event Database (LED)

Manajemen Insiden (MI) merupakan *Loss Event Database* (LED) BRI yang mencakup proses pencatatan data kejadian kerugian yang dilakukan untuk setiap jenis kerugian finansial maupun non finansial yang meliputi *actual loss*, *potential loss* dan *near misses* sejak insiden terjadi sampai dengan penyelesaian, termasuk langkah-langkah perbaikan dan penanganan insiden yang dilakukan.

Berdasarkan data kejadian kerugian pada modul MI, dapat dilakukan analisa kejadian kerugian berdasarkan penyebab, aktivitas fungsional, kategori kejadian (*event type*) dan lini bisnis BRI. Sistem informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan langkah-langkah preventif pengendalian risiko berbasis pendokumentasian proses penanganan/penyelesaian insiden baik dari sisi non finansial, kerugian finansial dan *recovery* kerugian maupun proses litigasi.

Dalam rangka perhitungan beban modal dan ATMR Operasional, BRI menggunakan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) yang mulai diterapkan sejak 2010 sesuai dengan ketentuan regulator. Namun demikian, BRI telah melakukan persiapan penerapan Pengukuran Modal Minimum Risiko Operasional (MMRO) Pendekatan Standar yang berpedoman pada Basel III *Framework*.

3. Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator (KRI)

IRU/KRI adalah alat untuk mendeteksi peningkatan dan atau penurunan risiko/tren risiko baik yang bersifat *leading* terhadap kejadian kerugian yang belum terjadi maupun yang bersifat historis. Prediksi tren risiko dimaksud ditujukan untuk menentukan rencana tindak lanjut terkait risiko operasional yang muncul sebelum kerugian finansial atau non finansial terjadi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

3. Indikator Risiko Utama (IRU)/Key Risk Indicator (KRI) (lanjutan)

BRI telah melakukan identifikasi terhadap indikator-indikator risiko utama untuk semua jenis risiko dan menetapkan batasan atau limit risiko yang mencerminkan kondisi dan risiko yang dapat diterima (*risk appetite*) BRI. Identifikasi indikator risiko utama dan penetapan batasan (*threshold*) KRI dilakukan dengan menggunakan *best judgement* dengan mempertimbangkan eksposur risiko dan *risk appetite* BRI. Penentuan *threshold* melibatkan Audit Internal, *Risk Owner* dan Unit Kerja terkait lainnya. Indikator Risiko Utama BRI antara lain tercermin dalam Laporan Profil Risiko *Bankwide* dan Profil Risiko Kantor Wilayah yang di-*monitor* secara rutin dan dilaporkan kepada pihak manajemen setiap bulan.

4. Forum Manajemen Risiko (Forum MR)

Forum Manajemen Risiko (Forum MR) adalah wadah atau forum pertemuan antara pemimpin unit kerja operasional dengan pejabat setingkat dibawahnya, pekerja atau jajarannya untuk membahas permasalahan-permasalahan (risiko) yang melekat pada aktivitas bisnis atau operasional yang menjadi kendala dalam rangka mencapai target bisnis atau kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan Forum Manajemen Risiko di masing-masing unit kerja BRI diharapkan menjadi salah satu pendukung dan pendorong untuk menumbuhkembangkan budaya sadar risiko di BRI.

5. Maturitas

Maturitas merupakan proses *self assessment* terhadap tingkat kemampuan penerapan manajemen risiko di setiap unit kerja BRI yang dilakukan setiap akhir tahun oleh masing-masing pimpinan unit kerja BRI terhadap parameter-parameter tertentu. Dengan melakukan penilaian maturitas diharapkan masing-masing unit kerja dapat mengevaluasi penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan sehingga lebih baik ke depan.

6. Business Continuity Management (BCM)

Potensi gangguan/bencana baik yang disebabkan antara lain oleh alam, manusia dan teknologi merupakan ancaman bagi kelangsungan usaha BRI, dimana BRI memiliki unit kerja operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Direksi BRI memandang perlu untuk mengembangkan dan menerapkan suatu Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) guna melindungi keamanan dan keselamatan jiwa pekerja, melindungi keselamatan jiwa nasabah dan *stakeholders* lainnya yang berada di lingkungan unit kerja operasional BRI (Rencana Penanggulangan Bencana), serta mempertahankan kelangsungan aktivitas-aktivitas bisnis/operasional terpenting, menjaga aset BRI dan memiliki respon yang memadai dalam situasi gangguan/bencana (Rencana Kelangsungan Usaha). Kebijakan BCM diatur melalui Standar Operasional Prosedur BRI No.SO.67-ORD/11/2021 tanggal 29 November 2021.

Implementasi BCM BRI mencakup seluruh unit kerja BRI yang antara lain dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Krisis, penyusunan *Call Tree* dan penetapan *alternate sites*. Unit kerja BRI juga telah melakukan Penilaian Risiko Ancaman dan Bencana (PRAB) yang bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka persiapan menghadapi ancaman/bencana di masing-masing unit kerja. Sebagai salah satu implementasi BCM BRI telah memiliki pedoman *Emergency Response Plan* (ER Plan) dan kebijakan *Business Continuity Plan* (BC Plan) untuk Unit Kerja Kritis. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan saat terjadi gangguan/bencana maka pelaksanaan uji coba ER Plan dan BC Plan dilaksanakan setiap tahun dan diprioritaskan pada unit kerja yang rawan bencana.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Manajemen Risiko Operasional (lanjutan)

6. Business Continuity Management (BCM) (lanjutan)

Kesiapan organisasi BRI untuk memastikan pelaksanaan prosedur kelangsungan usaha sudah teruji dengan baik pada kejadian-kejadian bencana yang dialami oleh beberapa Unit Kerja BRI. Ketentuan mengenai tanggap darurat bencana di tempat kerja dirumuskan melalui Surat Edaran No. 110-DIR/MOP/12/2019 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

7. Penilaian Kecukupan Pengelolaan Risiko Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB)

Dalam rangka penerbitan setiap produk dan/atau aktivitas baru (PAB) di BRI, dilakukan proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko oleh *product owner* terhadap setiap jenis risiko yang mungkin timbul dari penerbitan PAB, termasuk penetapan kontrol dan pengendalian yang ditujukan untuk memitigasi risiko PAB yang dimaksud.

SKMRO bertugas melakukan penilaian kecukupan atas pengelolaan risiko PAB dan merekomendasikan hasil penilaian yang dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Direktur Bidang Manajemen Risiko BRI. Kebijakan PAB diatur dalam Surat Edaran BRI No. SE.75-DIR/DOR/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.

8. Penerapan Strategi Anti Fraud BRI

Penerapan sistem pengendalian *fraud* telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur pengendalian internal BRI, dimana perhatian khusus diberikan terhadap pencegahan agar kejadian *fraud* dapat diminimalkan. Sehubungan dengan hal tersebut BRI telah mengembangkan alat sebagai *early warning system*. Manajemen BRI telah berkomitmen untuk tidak memberikan toleransi terhadap *fraud* (*zero tolerance*). Sebagai bentuk peningkatan *employee awareness* dan pencegahan *fraud*, Direktur dan Komisaris, jajaran manajemen dan seluruh pekerja BRI secara berkala menandatangani Komitmen *Anti Fraud* sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Strategi *Anti Fraud* yang diatur melalui Surat Edaran BRI No. S.18-DIR/MOP/03/2020 tanggal 20 Maret 2020.

Dampak penyebaran virus Covid-19

Kondisi perekonomian global menunjukkan tren pemulihan. Pada Q3-2021 lalu, dunia menghadapi gelombang ketiga Covid-19 yang disebabkan oleh varian Delta. Varian tersebut menyebabkan infeksi yang parah dan gejala yang cukup berat, sehingga tingkat kematian harian global mengalami peningkatan. Akibatnya, banyak negara yang kembali menerapkan kebijakan *lockdown*. Hal tersebut tentunya berimbas pada penurunan aktivitas masyarakat, dan mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara pada Q3-2021 menunjukkan laju yang melambat dibandingkan dengan Q2-2021. Dua negara utama penggerak ekonomi global yakni US dan China mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat pada Q3-2021 dibandingkan pada kuartal sebelumnya, dimana pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut pada Q3-2021 sebesar 4,9%yoy. Secara global, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2021 diperkirakan akan melambat akibat dampak merebaknya varian Delta. Beberapa lembaga internasional telah mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi terbarunya, dan menunjukkan adanya revisi ke bawah terhadap pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 dibandingkan dengan proyeksi sebelum merebaknya varian Delta. IMF pada Oktober 2021 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 sebesar 5,9%yoy, turun dari proyeksi Juli 2021 sebesar 6,0%yoy. Selain itu, OECD pada Desember 2021 juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 5,6%yoy dari sebelumnya sebesar 5,7% pada September 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dampak penyebaran virus Covid-19 (lanjutan)

Setelah berhasil mengendalikan tingkat kasus harian dan melewati gelombang varian Delta, perekonomian dunia mulai kembali ke jalur positif. Penurunan tingkat kasus harian Covid-19 mendorong pemerintah untuk melonggarkan kebijakan *lockdown*-nya dan meningkatkan kembali aktivitas masyarakat pada Q4-2021. Hal tersebut mendorong peningkatan permintaan dan kinerja manufaktur. Hal ini terlihat dari tingkat Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Global yang meningkat pada November 2021 menjadi 54,2, dibandingkan posisi Oktober 2021 sebesar 54,1. Tren pemulihan ekonomi diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2022. Namun demikian, beberapa tantangan dapat membayangi pemulihan ekonomi ke depan. Selain hadirnya Omicron, pemulihan ekonomi juga diiringi dengan laju inflasi yang tinggi pada berbagai negara di akhir tahun 2021. Hal ini dapat mendorong kebijakan yang *hawkish* dari bank sentral dan dapat mendorong pengetatan kebijakan moneter.

Kondisi ekonomi domestik Indonesia pada Q3-2021 mengalami perlambatan dibandingkan pada kuartal sebelumnya, dimana perekonomian nasional tumbuh hanya sebesar 3,51% yoy. Adanya gelombang kedua di Indonesia akibat varian Delta mendorong peningkatan kasus harian yang cepat diiringi dengan tingkat kematian harian yang tinggi, sehingga membuat pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan restriksi ketat yang dikenal sebagai PPKM Berlevel yang mengakibatkan mobilitas masyarakat menurun dan menyebabkan aktivitas ekonomi terganggu. Meskipun menyebabkan pelemahan ekonomi pada Q3-2021, namun kebijakan PPKM Berlevel yang diterapkan oleh pemerintah berjalan efektif dalam mengurangi kasus harian Covid-19.

Setelah berhasil mengendalikan penyebaran varian Delta, sejak September 2021 pergerakan kasus harian COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan. Hal tersebut menyebabkan pemerintah melakukan relaksasi kebijakan PPKM dan mendorong peningkatan aktivitas masyarakat, dimana efeknya mendorong peningkatan permintaan (*demand*) masyarakat serta aktivitas produksi nasional. Hal itu ditandai dengan kembalinya sektor manufaktur ke zona ekspansif (PMI > 50) sepanjang Q4-2021, yakni 52,2 pada September 2021; 57,2 pada Oktober 2021; 53,9 pada November 2021; dan 53,5 pada Desember 2021. Tingkat penjualan ritel juga terus meningkat seiring kembali meningkatnya aktivitas masyarakat. Pertumbuhan penjualan ritel pada Desember 2021 diperkirakan sebesar 8,9%yoy, naik dari posisi September yang terkontraksi sebesar -2,2%yoy. Dari sisi perdagangan, Neraca Perdagangan Indonesia (NPI) juga terus menunjukkan performa yang baik. Pada bulan Oktober 2021, NPI mencatatkan nilai surplus tertinggi sepanjang sejarah yaitu sebesar USD5,73 miliar. Surplus neraca perdagangan tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Secara keseluruhan, NPI telah mencatatkan surplus sebesar USD34,32 miliar pada Januari-November 2021, jauh lebih besar dari periode yang sama tahun 2020 yaitu sebesar USD19,52 miliar.

Industri perbankan Indonesia secara keseluruhan mulai kembali bergerak ke jalur yang positif dan cenderung ekspansif. Pertumbuhan kredit perbankan terus bergerak positif dengan tren yang meningkat sejak bulan Juni 2021. Pada November 2021 pertumbuhannya kredit mencapai 4,7% yoy. Peningkatan pertumbuhan kredit tersebut juga diikuti dengan kualitas kredit yang semakin baik terlihat dari penurunan *non-performing loan* (NPL). Pada November 2021, *Gross NPL* perbankan secara umum sebesar 3,19%. Selain itu, Likuiditas industri perbankan masih cukup memadai yang ditopang pertumbuhan DPK yang semakin meningkat sebesar 10,4% yoy pada November 2021.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dampak penyebaran virus Covid-19 (lanjutan)

Pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2022 meskipun diiringi dengan berbagai tantangan seperti hadirnya Omicron dan tekanan inflasi global. Akselerasi pemulihan akan sangat bergantung oleh penanganan kasus Covid-19 di dalam negeri dan percepatan vaksinasi. Proses penanganan Covid-19 yang baik akan memberikan dampak langsung pada perekonomian maupun bisnis perbankan.

Untuk mengatasi kondisi-kondisi di atas, manajemen BRI juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan *People's First*

- a. Penerapan protokol Kesehatan dan keamanan;
 - 1. Pelaksanaan disinfeksi dan sterilisasi lingkungan kerja;
 - 2. Vaksinasi bagi pekerja; dan
 - 3. Penyediaan alat-alat penunjang bagi pekerja dalam rangka antisipasi persebaran Covid-19 seperti *hand sanitizer*, masker, dan vitamin
- b. Kebijakan *Work from Home*
 - 1. Pembatasan jam kerja operasional;
 - 2. *Work From Home* (WFH); dan
 - 3. Penyediaan *flexible office space*
- c. Optimalisasi Inisiatif Digital
 - 1. Aplikasi *digital office*;
 - 2. Aplikasi digital *loan processing*; dan
 - 3. *Dashboard monitoring* harian melakukan langkah-langkah antisipatif melalui restrukturisasi pada sektor yang terdampak apabila terdapat gejala penurunan *cash flow*.

2. Strategi pertumbuhan yang *sustainable*

a. *Loan portfolio*

- 1. Pertumbuhan bisnis secara selektif dengan memanfaatkan stimulus pemerintah, serta melakukan eksplorasi *new growth engine* termasuk *ultramicro business*
- 2. Program restrukturisasi
- 3. Program relaksasi pinjaman

b. *Liquidity and market activities*

- 1. Menjaga GWM, *secondary reserve*, *loan to deposit ratio*, dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)
- 2. Menjaga posisi devisa neto pada *long position*
- 3. Menjaga *cash ratio*

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

39. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dampak penyebaran virus Covid-19 (lanjutan)

Untuk mengatasi kondisi-kondisi di atas, manajemen BRI juga telah melakukan hal-hal sebagai berikut (lanjutan):

2. Strategi pertumbuhan yang *sustainable* (lanjutan)

c. *Asset Quality*

Menjaga kualitas aset bisnis, termasuk meningkatkan kualitas *enabler* bisnis (*Capability* HC dan Sistem) di antaranya melalui :

1. *Fraud risk management*
2. *Credit Decision Engine & Credit Risk Model*
3. Penguatan EWS

d. *Efficiency*

Upaya efisiensi sebagai bentuk atas adaptasi perlambatan ekonomi dilakukan melalui pengendalian biaya dana, biaya operasional melalui digitalisasi dan *business process re-engineering*.

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Aset				
Kas	26.299.973	26.299.973	32.274.988	32.274.988
Giro pada Bank Indonesia	56.426.573	56.426.573	51.530.969	51.530.969
Giro pada bank lain	14.036.019	14.036.019	12.172.423	12.172.423
Penempatan pada bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	58.976.665	58.976.665	67.883.336	67.883.336
Efek-efek				
Nilai wajar melalui laba rugi	19.001.253	19.001.253	28.190.828	28.165.782
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	201.526.369	201.526.369	189.545.941	188.940.166
Biaya perolehan diamortisasi	151.209.906	154.620.237	109.219.909	118.676.275
Wesel Ekspor dan tagihan lainnya	28.521.876	28.521.876	26.246.814	26.246.814
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	54.915.498	54.915.498	46.818.568	46.818.568
Tagihan derivatif	730.083	730.083	1.576.659	1.576.659
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	917.331.383	886.140.204	923.460.766	910.384.489
Piutang pembiayaan	37.706.653	37.518.153	26.337.549	27.340.447
Tagihan akseptasi	9.066.005	9.066.005	6.271.176	6.271.176
Penyertaan saham *)	1.546.184	1.546.184	1.045.044	1.045.004
Aset lain-lain **)	16.052.627	16.052.627	26.202.091	26.202.091
Total	1.593.347.067	1.565.377.719	1.548.777.061	1.545.529.187

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut. (lanjutan)

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Nilai tercatat	Nilai wajar	Nilai tercatat	Nilai wajar
Liabilitas				
Liabilitas segera	18.735.387	18.735.387	15.473.574	15.473.574
Simpanan nasabah ***)				
Giro	220.590.197	220.590.197	191.106.429	191.106.429
Tabungan	497.676.739	497.676.739	469.918.971	469.918.971
Deposito berjangka	420.476.279	420.476.279	426.399.550	426.399.550
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya				
Giro	1.402.510	1.402.510	829.698	829.698
Tabungan	6.763	6.763	30.720	30.720
Deposito berjangka dan <i>deposit on call</i>	8.160.030	8.160.030	14.544.000	14.544.000
<i>Inter-bank call money</i>	3.760.131	3.760.131	8.381.579	8.381.579
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	29.408.508	29.408.508	40.478.672	40.478.672
Liabilitas derivatif	199.695	199.695	407.774	407.774
Liabilitas akseptasi	9.554.238	9.554.238	6.817.436	6.817.436
Surat berharga yang diterbitkan	55.306.697	54.248.850	57.757.028	56.005.459
Pinjaman yang diterima	68.458.547	68.458.547	72.164.236	72.164.236
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	501.375	519.492	1.465.392	1.479.040
Liabilitas lain-lain ****)	10.691.741	10.691.741	9.054.084	9.054.084
Total	1.344.928.837	1.343.889.107	1.314.829.143	1.313.091.222

*) Penyertaan saham yang tidak memiliki pengaruh signifikan.

**) Aset lain-lain terdiri atas piutang bunga, piutang lain-lain dan pendapatan yang masih akan diterima dengan prinsip syariah.

***) Termasuk simpanan nasabah dengan prinsip syariah.

****) Liabilitas lain-lain terdiri atas utang bunga, setoran jaminan, liabilitas kontrak investasi, utang koasuransi, reasuransi dan diklasifikasi siap untuk dijual, dana *tabarru* dan dana *syirkah* temporer.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- a) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu, kecuali efek-efek yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, piutang pembiayaan, tagihan dan liabilitas derivatif, pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan serta pinjaman dan surat berharga subordinasi, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Estimasi nilai wajar terhadap liabilitas keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- b) Efek-efek

Nilai wajar untuk efek-efek yang diukur melalui biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut (lanjutan):

c) Kredit yang diberikan dan Piutang dan Pembiayaan Syariah

Portofolio kredit BRI secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh BRI. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Portofolio piutang dan pembiayaan syariah secara umum memiliki tingkat margin mengambang dan piutang dan pembiayaan syariah yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap.

d) Piutang Pembiayaan

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar.

e) Tagihan dan liabilitas derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

f) Pinjaman yang diterima, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman dan surat berharga subordinasi

Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh tempo.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c):

	31 Desember 2021			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	10.311.218	10.311.218	-	-
Reksadana	6.810.496	6.810.496	-	-
Tagihan derivatif	730.083	-	730.083	-
Obligasi	167.115	167.115	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	127.009	127.009	-	-
Saham	120.687	120.687	-	-
Obligasi Subordinasi	50.966	50.966	-	-
Lainnya	1.413.764	1.413.764	-	-
	19.731.338	19.001.255	730.083	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2021			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset keuangan (lanjutan)				
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	164.216.608	164.216.608	-	-
Obligasi	16.848.434	16.848.434	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	9.811.165	9.811.165	-	-
Reksadana	7.800.156	7.800.156	-	-
<i>Monetary Authority of Singapore (MAS) Bills</i>	1.097.226	1.097.226	-	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	807.533	807.533	-	-
<i>Singapore Government Securities</i>	434.757	434.757	-	-
Saham	248.886	248.886	-	-
Obligasi Subordinasi	126.763	126.763	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	67.444	67.444	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	67.397	67.397	-	-
	201.526.369	201.526.369	-	-
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	129.288.448	129.288.448	-	-
Obligasi	1.529.893	1.529.893	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	96.676	96.676	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	11.000	11.000	-	-
Obligasi Subordinasi	41.056	41.056	-	-
<i>Tagihan Risk Participation</i>	20.553.953	20.553.953	-	-
	151.521.026	151.521.026	-	-
Kredit yang Diberikan dan Piutang				
Kredit yang diberikan	886.140.204	-	827.314.308	58.825.896
Piutang pembiayaan	37.518.153	-	-	37.518.153
	923.658.357	-	827.314.308	96.344.049
Total aset keuangan	1.296.437.090	372.048.650	828.044.391	96.344.049
Liabilitas keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	199.695	-	199.695	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan				
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	519.492	519.492	-	-
	519.492	519.492	-	-
Total liabilitas keuangan	719.187	519.492	199.695	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

40. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan BRI dan entitas anaknya untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (Catatan 2c) (lanjutan):

	31 Desember 2020			
	Nilai wajar	Level 1	Level 2	Level 3
Aset keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi Pemerintah	18.560.819	18.560.819	-	-
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>	10.606	10.606	-	-
Reksadana	8.283.969	8.283.969	-	-
Obligasi	363.445	363.445	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	49.419	49.419	-	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	14.816	14.816	-	-
Obligasi Subordinasi	48.313	48.313	-	-
Lainnya	834.395	834.395	-	-
Tagihan derivatif	1.576.659	-	1.576.659	-
	<u>29.742.441</u>	<u>28.165.782</u>	<u>1.576.659</u>	<u>-</u>
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi Pemerintah	159.132.122	159.132.122	-	-
Obligasi	14.939.242	14.939.242	-	-
Sertifikat Bank Indonesia	10.674.207	10.674.207	-	-
Reksadana	473.676	473.676	-	-
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	680.462	680.462	-	-
<i>MAS Bills</i>	816.470	816.470	-	-
<i>U.S Treasury Bonds</i>	778.499	778.499	-	-
<i>U.S Treasury Bills</i>	210.746	210.746	-	-
Obligasi Subordinasi	196.344	196.344	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	341.167	341.167	-	-
<i>Singapore Government Securities (SIGB)</i>	402.275	402.275	-	-
Lainnya	294.956	294.956	-	-
	<u>188.940.166</u>	<u>188.940.166</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Biaya perolehan diamortisasi				
Obligasi Pemerintah	113.050.341	113.050.341	-	-
Obligasi	2.716.319	2.716.319	-	-
Obligasi Subordinasi	37.587	37.587	-	-
<i>Medium-Term Note</i>	114.299	114.299	-	-
Tagihan <i>Risk Participation</i>	2.723.837	2.723.837	-	-
<i>Treasury Bill</i>	33.892	33.892	-	-
	<u>118.676.275</u>	<u>118.676.275</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Kredit yang Diberikan dan Piutang				
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah	910.384.489	-	848.201.482	62.183.007
Piutang pembiayaan	27.340.447	-	-	27.340.447
	<u>937.724.936</u>	<u>-</u>	<u>848.201.482</u>	<u>89.523.454</u>
Total aset keuangan	<u>1.275.083.818</u>	<u>335.782.223</u>	<u>849.778.141</u>	<u>89.523.454</u>
Liabilitas keuangan				
Nilai wajar melalui laba rugi				
Liabilitas derivatif	407.774	-	407.774	-
Kewajiban lainnya				
Surat berharga yang diterbitkan	56.005.459	56.005.459	-	-
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.479.040	1.479.040	-	-
	<u>57.484.499</u>	<u>57.484.499</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Total liabilitas keuangan	<u>57.892.273</u>	<u>57.484.499</u>	<u>407.774</u>	<u>-</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak:

a. Nama Perusahaan	Bidang Usaha
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan Konvensional
PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)	Perbankan Konvensional
BRI Remittance Co. Limited Hong Kong	Jasa Keuangan
PT Asuransi BRI Life	Asuransi Jiwa
PT BRI Multifinance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Sekuritas
PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura
PT BRI Asuransi Indonesia	Perusahaan Asuransi
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk*)	Perbankan Syariah
PT Pegadaian	Perusahaan Pembiayaan
PT Permodalan Nasional Madani	Perusahaan Pembiayaan

*) Sejak 1 Februari 2021 sudah tidak menjadi entitas anak BRI

b. Segmen Operasi

Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan ke dalam 5 (lima) segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut:

- Segmen Mikro
- Segmen Ritel
- Segmen Korporasi
- Segmen Lainnya
- Entitas Anak

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan segmen operasi:

Keterangan	Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	51.845.156	25.577.930	3.058.623	15.337.403	19.318.392	115.137.504
Pendapatan operasional lainnya	12.331.701	11.402.685	2.746.155	5.919.971	8.815.295	41.215.807
Total pendapatan	64.176.857	36.980.615	5.804.778	21.257.374	28.133.687	156.353.311
Beban operasional lainnya	(33.277.144)	(18.137.277)	(1.823.531)	(1.539.750)	(21.140.406)	(75.918.108)
Beban CKPN	(11.112.437)	(10.612.154)	(11.775.361)	(518.124)	(5.272.745)	(39.290.821)
Total beban	(44.389.581)	(28.749.431)	(13.598.892)	(2.057.874)	(26.413.151)	(115.208.929)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(9.875)	(61.529)	(101.586)	(30.149)	50.822	(152.317)
Laba sebelum beban pajak	19.777.401	8.169.655	(7.895.700)	19.169.351	1.771.358	40.992.065
Beban pajak	(2.571.062)	(1.877.540)	-	(2.556.644)	(830.362)	(7.835.608)
Laba sebelum laba bersih pro forma dari transaksi akuisisi dengan Entitas sependangali	17.206.339	6.292.115	(7.895.700)	16.612.707	940.996	33.156.457
Laba bersih pro forma dari transaksi akuisisi dengan entitas sependangali	-	-	-	-	(2.400.691)	(2.400.691)
Laba Bersih	17.206.339	6.292.115	(7.895.700)	16.612.707	(1.459.695)	30.755.766

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

b. Segment Operasi (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segment BRI dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan segment operasi (lanjutan):

Keterangan	Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Aset segment						
Kredit yang diberikan						
- bruto	396.959.250	374.318.653	172.424.790	-	50.713.830	994.416.523
Total aset	374.607.910	352.638.995	173.770.090	658.219.646	102.576.195	1.661.812.836
Liabilitas segment						
Total simpanan						
nasabah	356.268.411	429.700.844	341.879.461	-	10.894.499	1.138.743.215
Total liabilitas	356.268.411	429.700.844	358.314.617	142.059.534	99.967.524	1.386.310.930

Berikut ini adalah informasi segment BRI dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan segment operasi (tidak diaudit):

Keterangan	Tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut					
	Mikro	Ritel	Korporasi	Lainnya	Entitas Anak	Total
Pendapatan bunga dan premi - neto	35.234.044	27.969.778	4.685.993	7.257.183	19.315.825	94.462.823
Pendapatan operasional lainnya	9.074.782	12.020.213	3.583.072	3.752.066	9.669.622	38.099.755
Total pendapatan	44.308.826	39.989.991	8.269.065	11.009.249	28.985.447	132.562.578
Beban operasional lainnya	(19.658.307)	(18.911.219)	(3.129.596)	(4.697.136)	(21.107.591)	(67.503.849)
Beban CKPN	(12.370.463)	(12.654.674)	(3.488.650)	(2.475.351)	(4.290.890)	(35.280.028)
Total beban	(32.028.770)	(31.565.893)	(6.618.246)	(7.172.487)	(25.398.481)	(102.783.877)
Pendapatan (beban) non operasional - neto	(38.614)	37.234	(30.077)	833	245.329	214.705
Laba sebelum beban pajak	12.241.442	8.461.332	1.620.742	3.837.595	3.832.295	29.993.406
Beban pajak	(3.653.469)	(2.525.292)	(483.712)	(1.145.335)	(1.144.163)	(8.951.971)
Laba sebelum laba bersih pro forma dari transaksi akuisisi dengan entitas sependangali	8.587.973	5.936.040	1.137.030	2.692.260	2.688.132	21.041.435
Laba bersih pro forma dari transaksi akuisisi dengan entitas sependangali	-	-	-	-	(2.381.042)	(2.381.042)
Laba Bersih	8.587.973	5.936.040	1.137.030	2.692.260	307.090	18.660.393
Aset segment						
Kredit yang diberikan						
- bruto	351.356.224	360.333.387	168.985.146	-	63.112.877	943.787.634
Total aset	334.248.320	341.745.828	140.551.343	597.634.414	185.999.449	1.600.179.354
Liabilitas segment						
Total simpanan						
Nasabah	335.422.171	410.298.277	306.943.422	-	68.258.056	1.120.921.926
Total liabilitas	335.422.171	410.298.277	306.943.422	174.762.035	153.172.557	1.380.598.462

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak (lanjutan):

c. Segmen Geografi

Berikut ini adalah informasi segmen BRI dan entitas anak berdasarkan segmen geografi:

Keterangan	Total Pendapatan	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Indonesia	155.591.153	131.771.610
Amerika Serikat	472.261	510.377
Singapura	184.666	170.540
Timor-Leste	95.089	101.482
Hong Kong	10.097	8.569
Taiwan	45	-
Total	156.353.311	132.562.578

Keterangan	Laba sebelum beban pajak	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Indonesia	40.556.868	29.529.835
Amerika Serikat	275.570	275.445
Singapura	96.861	124.907
Timor-Leste	70.013	62.597
Hong Kong	2.120	622
Taiwan	(9.367)	-
Total	40.992.065	29.993.406

Keterangan	Total Aset	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Indonesia	1.622.979.782	1.567.580.966
Amerika Serikat	21.170.200	19.708.131
Singapura	15.513.263	11.695.606
Timor-Leste	2.016.606	1.186.169
Hong Kong	13.094	8.482
Taiwan	119.891	-
Total	1.661.812.836	1.600.179.354

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

c. Segmen Geografi (lanjutan)

Berikut adalah informasi keuangan tertentu untuk BRI dan entitas anak (lanjutan):

Keterangan	Total Liabilitas	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Indonesia	1.348.381.407	1.349.059.048
Amerika Serikat	20.664.957	18.970.475
Singapura	15.297.947	11.500.136
Timor-Leste	1.834.188	1.067.486
Hong Kong	3.231	1.317
Taiwan	129.200	-
Total	1.386.310.930	1.380.598.462

42. PROGRAM BAGI PEKERJA

Cadangan atas program imbalan kerja bagi pekerja terdiri atas:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Program cuti besar	2.948.868	2.460.616
Program pensiun imbalan pasti	2.160.113	2.078.850
Program pemutusan hubungan kerja	1.962.302	1.773.676
Program penghargaan tanda jasa	1.753.660	1.527.953
Program kesehatan pasca kerja BPJS	598.635	774.578
Program manfaat lain dana manfaat tambahan	153.617	265.245
Program masa persiapan pensiun	20.028	20.670
Total (Catatan 27)	9.597.223	8.901.588

Penilaian aktuarial atas program imbalan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan oleh aktuaris independen sebagai berikut:

Entitas	Aktuarial Independen	Tanggal Laporan	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
Entitas induk	KKA Enny Diah Awal (dahulu PT Bestama Aktuarial)	5 Januari 2022	15 Januari 2021
Entitas anak			
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk)	KKA Enny Diah Awal (dahulu PT Bestama Aktuarial)	-	4 Januari 2021
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	KKA Enny Diah Awal (dahulu PT Bestama Aktuarial)	3 Januari 2022	4 Januari 2021
PT Asuransi BRI Life	KKA Riana & Rekan (dahulu PT Padma Radya Aktuarial)	4 Januari 2022	4 Januari 2021
PT BRI Multifinance Indonesia	KKA Nandi Dan Utama (dahulu PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa)	10 Januari 2022	8 Januari 2021
PT BRI Danareksa Sekuritas	KKA Enny Diah Awal (dahulu PT Jasa Aktuarial Praptasentosa Gunajasa)	18 Januari 2022	22 Januari 2021

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

Penilaian aktuarial atas program imbalan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan oleh aktuaris independen sebagai berikut (lanjutan):

Entitas	Aktuarial Independen	Tanggal Laporan	
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
Entitas anak (lanjutan)			
PT BRI Ventura Investama	KKA Enny Diah Awal (dahulu PT Bestama Aktuarial)	3 Januari 2022	4 Januari 2021
PT BRI Asuransi Indonesia	KKA Steven & Mourits	3 Januari 2022	3 Januari 2021
PT Pegadaian	PT Dian Artha Tama	10 Januari 2022	22 Januari 2021
PT Permodalan Nasional Madani	KKA Riana & Rekan	5 Januari 2022	4 Januari 2021

a. Program Pensiun Imbalan Pasti

Efektif tanggal 1 Januari 2007, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program ini dan hak atas manfaat pensiun diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan dengan memperhatikan faktor penghargaan per tahun masa kerja dan penghasilan dana pensiun. Program dana pensiun BRI dikelola oleh Dana Pensiun BRI (DPBRI). Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI, kontribusi pekerja BRI untuk iuran pensiun adalah sebesar 7% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBRI merupakan kontribusi BRI, dimana kontribusi BRI sejak tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 42,96% dari penghasilan dasar pensiun.

Penilaian aktuarial atas beban pensiun BRI masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah sesuai dengan PSAK 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Entitas induk		
Tingkat diskonto	7,60%	7,70%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	7,50	7,50
Tingkat kenaikan imbalan pensiun	4,00	4,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun
Entitas anak		
Tingkat diskonto	6,00%	6,10%
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	5,00	5,00
Tingkat kematian	TMI 2019	GAM - 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01% dari TMI 2019	0,01% dari GAM - 1971
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Mutasi atas nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti awal tahun	23.322.115	21.024.005
Beban bunga	1.705.433	1.655.229
Biaya jasa kini	430.030	383.363
Biaya jasa lalu	1.327.616	-
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>) (Keuntungan)/kerugian aktuarial	(1.343.640)	(1.113.727)
	177.192	1.373.245
Nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti akhir tahun	25.618.746	23.322.115

Mutasi atas nilai wajar aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Nilai wajar aset program awal tahun	21.243.264	18.829.621
Hasil pengembangan riil	1.214.231	1.252.352
Pembayaran iuran-iuran (<i>contributions</i>) pemberi kerja	2.269.336	2.180.410
Pembayaran iuran-iuran (<i>contributions</i>) peserta program	62.655	68.290
Laba/(rugi) aktuarial pada aset	12.675	26.318
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(1.343.640)	(1.113.727)
Total aset program	23.458.521	21.243.264

Mutasi atas kewajiban program pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal	2.078.850	2.194.385
Beban pensiun imbalan pasti - neto (Catatan 35)	1.820.323	463.277
Pembayaran iuran tahun berjalan	(2.269.448)	(2.180.410)
Pengukuran kembali liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti - neto	530.388	1.601.598
Saldo akhir (Catatan 27)	2.160.113	2.078.850

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) pensiun imbalan pasti masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal	2.859.090	1.257.492
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	177.192	1.373.245
Imbal hasil atas aset program	353.195	228.354
Jumlah pengukuran kembali atas aset imbalan pasti - neto	3.389.477	2.859.091

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun Imbalan Pasti (lanjutan)

Beban pensiun imbalan pasti untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Biaya jasa kini	430.030	382.363
Iuran peserta program	(62.655)	(67.817)
Beban bunga - neto	125.332	148.080
Biaya jasa lalu	1.327.616	-
Beban pensiun imbalan pasti (Catatan 35)	1.820.323	462.626

b. Program Tunjangan Hari Tua

Karyawan BRI juga memperoleh manfaat dari pemberian Tunjangan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI. Program THT dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai BRI.

Iuran THT terdiri dari iuran beban pekerja dan iuran beban BRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BRI.

Berdasarkan perhitungan penilaian aktuaris atas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Tingkat diskonto	7,50%	7,20%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

Status THT sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Nilai wajar aset	5.169.471	4.929.907
Nilai kini liabilitas THT	(3.129.510)	(2.672.216)
Surplus	2.039.961	2.257.691

Mutasi atas liabilitas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	-	-
Beban THT	672.842	138.778
Pengukuran kembali liabilitas THT - neto	(553.505)	(21.690)
Pembayaran iuran periode berjalan	(119.337)	(117.088)
Saldo akhir liabilitas	-	-

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

b. Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas THT masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	278.119	299.809
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(210.317)	286.505
Imbal hasil atas liabilitas (aset) program	37.096	(346.933)
Perubahan atas dampak atas aset di luar bunga - neto	(380.284)	38.738
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas THT - neto	(275.386)	278.119

Perhitungan beban THT untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai dengan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Biaya jasa kini	284.312	201.631
Iuran peserta program	(56.925)	(55.849)
Beban bunga - neto	(6.345)	(7.004)
Biaya jasa lalu	451.800	-
Beban THT	672.842	138.778

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BRI tidak mengakui adanya THT dibayar dimuka dan manfaat THT karena manajemen BRI tidak memiliki keuntungan (benefit) atas aset tersebut dan BRI tidak memiliki rencana untuk mengurangi kontribusinya di masa depan.

c. Program Pensiun Iuran Pasti

(i) BRI (entitas induk)

Karyawan BRI juga diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti sesuai dengan Keputusan Direksi BRI yang berlaku efektif sejak bulan Oktober 2000. Kontribusi BRI pada program ini yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebesar Rp380.726 dan Rp351.955 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 35). Pengelolaan program pensiun iuran pasti dilakukan oleh DPBRI.

(ii) BRI Agro (entitas anak)

BRI Agro menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Jumlah kontribusi BRI Agro untuk dana pensiun adalah sebesar 84.97% dari iuran yang sudah ditetapkan berdasarkan tingkat dari masing-masing karyawan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, sebesar Rp877 dan Rp811 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Catatan 35).

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perhitungan PHK dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi penilaian aktuarial atas kewajiban perseroan yang berkaitan dengan cadangan penyisihan untuk penetapan uang pesangon, uang penghargaan tanda jasa dan ganti kerugian sesuai dengan Peraturan yang berlaku, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Entitas induk		
Tingkat diskonto	7,60%	7,60%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019
Entitas anak		
Tingkat diskonto	7,20 – 8,30%	6,10 - 7,80%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 – 10,00	5,00 - 10,00
Tingkat kematian	TMI 2019 TMI-II 1999 GAM-1971	TMI 2019 TMI-II 1999 GAM-1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01 - 10% dari tingkat kematian	0,01 - 10% dari tingkat kematian

Mutasi atas liabilitas (aset) program PHK masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal	1.773.676	1.432.305
Beban PHK (Catatan 35)	807.682	177.916
Pembayaran manfaat aktual	(618.937)	(54.534)
Pengukuran kembali liabilitas/(aset) PHK - neto	3.912	222.376
luran yang dibayarkan	-	(3.617)
Biaya terminasi	(4.621)	(770)
Dampak Batas Aset	1.885	-
Penyesuaian karena pengakuan pertama kali		
Nilai Wajar Aset	(952)	-
Kontribusi Perusahaan	(343)	-
Saldo akhir (Catatan 27)	1.962.302	1.773.676

Pengukuran kembali atas (aset) program PHK masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal	(781.130)	(1.003.506)
Keuntungan aktuarial	3.912	222.376
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas PHK - neto	(777.218)	(781.130)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

d. Program Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

Perhitungan beban program PHK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai dengan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Biaya jasa kini	209.118	112.802
Beban bunga	104.028	56.528
Beban Pesangon	418.740	14
Beban jasa lalu	161.803	1.630
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang lainnya	-	443
Pembayaran biaya terminasi	2.858	295
Selisih imbalan kerja yang dicatat pada beban	472	6.204
Keuntungan/Kerugian Aktuaria	(89.337)	-
Beban PHK (Catatan 35)	807.682	177.916

e. Program Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Perhitungan aktuaria (PT Pegadaian) atas masa persiapan pensiun (MPP) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Entitas induk		
Tingkat diskonto	7,50%	7,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00	7,00
Tingkat kematian	TMI 2019	GAM - 1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01% dari TMI tingkat kematian	0,01% dari GAM tingkat kematian
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Mutasi atas liabilitas (aset) program masa persiapan pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	20.670	19.560
Beban MPP (Catatan 35)	2.797	2.993
Pembayaran imbalan	(10.106)	(7.198)
Pengukuran kembali liabilitas/(aset) MPP - neto	6.667	5.315
Saldo akhir (Catatan 27)	20.028	20.670

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

e. Program Masa Persiapan Pensiun (MPP) (lanjutan)

Pengukuran kembali atas (aset) program masa persiapan pensiun masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal	32.373	27.058
Keuntungan aktuarial	6.667	5.315
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas MPP - neto	39.040	32.373

Perhitungan beban program Masa Persiapan Pensiun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sesuai dengan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Biaya jasa kini	1.288	1.409
Beban bunga	1.509	1.584
Beban MPP (Catatan 35)	2.797	2.993

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Pekerja BRI dan entitas anak juga memiliki imbalan kerja jangka panjang, seperti penghargaan tanda jasa, cuti besar, program kesehatan pasca kerja BPJS dan program manfaat lain dana manfaat tambahan.

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa

Perhitungan aktuarial atas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Entitas induk		
Tingkat diskonto	7,60%	7,30%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50%
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00%
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI	10,00% dari TMI
Entitas anak		
Tingkat diskonto	4,40 – 7,50%	7,30 - 8,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,00 – 10,00%	7,00 - 10,00%
Tingkat kenaikan harga emas (BRI Agro)	(BRI Agro)	8,00 (BRI Agro)
Tingkat kematian	TMI II 1999 dan TMI IV 2019 GAM-1971	TMI II 1999, TMI IV 2019, GAM-1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01 - 10% dari tingkat kematian	0,01 - 10,00% dari tingkat kematian

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(i) Cadangan penghargaan tanda jasa (lanjutan)

Mutasi untuk liabilitas penghargaan tanda jasa masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal liabilitas	1.527.953	1.383.775
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	332.633	247.454
Pembayaran manfaat aktual (Laba)/Rugi Aktuaria pada kewajiban	(88.701) (18.225)	(139.285) 36.009
Liabilitas penghargaan tanda jasa (Catatan 27)	<u>1.753.660</u>	<u>1.527.953</u>

Beban penghargaan tanda jasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Biaya jasa kini	160.716	125.956
Beban bunga	108.600	107.071
Biaya jasa lalu	137.164	4.131
Keuntungan aktuaria yang diakui	(73.847)	10.296
Beban penghargaan tanda jasa (Catatan 35)	<u>332.633</u>	<u>247.454</u>

(ii) Cuti besar

Perhitungan aktuaria atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuaria adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Entitas induk		
Tingkat diskonto	7,30%	6,90%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan harga emas	10,00	10,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(ii) Cuti besar (lanjutan)

Perhitungan aktuarial atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi-asumsi yang dipertimbangkan oleh aktuarial adalah sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Entitas anak		
Tingkat diskonto	4,70 – 7,50%	4,90 - 7,50%
Tingkat kenaikan penghasilan	5,00 -10,00	5,00 - 10,00
Tingkat kematian	TMI 2019 TMI-II 1999 GAM-1971	TMI 2019 TMI-II 1999 GAM-1971
Tingkat cacat jasmaniah	0,01 – 10,00% dari tingkat kematian	0,10 - 10,00% dari tingkat kematian

Mutasi liabilitas atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal liabilitas	2.460.616	2.291.243
Beban cuti besar (Catatan 35)	997.448	485.016
Pembayaran manfaat aktual oleh BRI	(509.196)	(315.643)
Liabilitas cuti besar (Catatan 27)	<u>2.948.868</u>	<u>2.460.616</u>

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Biaya jasa kini	395.700	312.629
Beban bunga	152.956	169.974
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang diakui	106.735	2.013
Biaya jasa lalu	342.057	400
Beban cuti besar (Catatan 35)	<u>997.448</u>	<u>485.016</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

Perhitungan aktuarial atas program kesehatan pasca kerja BPJS masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi (entitas induk) sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Tingkat diskonto	7,50%	7,10%
Tingkat kenaikan penghasilan	4,88	4,88
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10,00% dari TMI 2019	10,00% dari TMI 2019

Status program kesehatan pasca kerja BPJS sesuai dengan penilaian aktuaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Nilai kini liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS	2.056.353	2.242.107
Nilai wajar aset	(1.457.718)	(1.467.529)
Defisit	598.635	774.578

Mutasi liabilitas atas program kesehatan pasca kerja BPJS pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Saldo awal liabilitas	774.578	22.737
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)	148.829	906.326
Pembayaran iuran periode berjalan	-	(570.082)
Pengukuran kembali (aset)/liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS	(324.772)	415.597
Liabilitas program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 27)	598.635	774.578

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iii) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program kesehatan pasca kerja BPJS masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	395.603	(19.994)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	(391.626)	335.603
Imbal hasil atas aset program	66.854	79.994
Jumlah pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - neto	70.831	395.603

Beban program kesehatan pasca kerja di BPJS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Biaya jasa kini	93.834	50.531
Beban bunga - neto	54.995	(21.247)
Biaya jasa lalu	-	877.042
Beban program kesehatan pasca kerja BPJS (Catatan 35)	148.829	906.326

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan

Penilaian aktuarial atas program manfaat lain dana manfaat tambahan BRI pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2013) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Tingkat diskonto	7,60%	7,70%
Tingkat kenaikan penghasilan	7,50	7,50
Tingkat kenaikan manfaat pensiun	4,00	4,00
Tingkat kematian	TMI 2019	TMI 2019
Tingkat cacat jasmaniah	10% dari TMI 2019	10% dari TMI 2019
Usia pensiun normal	56 Tahun	56 Tahun

Aset DPBRI terutama terdiri dari tabungan, deposito, efek-efek, unit penyertaan reksadana, efek beragunan aset dan investasi jangka panjang berupa saham dan properti.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

Mutasi atas nilai kini liabilitas program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Nilai kini liabilitas awal tahun	1.998.863	1.893.175
Biaya bunga	147.895	145.101
Biaya jasa kini	17.787	18.071
Biaya jasa lalu	91.412	-
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(156.309)	(247.304)
(Keuntungan) kerugian aktuarial	28.083	189.820
Nilai kini liabilitas akhir tahun	2.127.731	1.998.863

Mutasi atas nilai wajar aset program pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Nilai wajar aset program awal tahun	1.733.620	1.827.092
Pembayaran imbalan kerja (<i>benefit paid</i>)	(156.309)	(247.304)
Hasil pengembangan riil	299.267	149.547
Pembayaran iuran-iuran (<i>contributions</i>) pemberi kerja	97.536	4.285
Total aset program	1.974.114	1.733.620

Mutasi atas kewajiban program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	265.245	66.084
Beban program		
manfaat lain dana manfaat tambahan - neto (Catatan 35)	125.867	23.315
Pengukuran kembali (aset)/liabilitas - neto	(139.959)	180.131
Pembayaran iuran-iuran (<i>contributions</i>) pemberi kerja	(97.536)	(4.285)
Saldo akhir (Catatan 27)	153.617	265.245

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

f. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (lanjutan)

(iv) Program Manfaat Lain Dana Manfaat Tambahan (lanjutan)

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) program manfaat lain dana manfaat tambahan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Saldo awal	208.702	28.571
(Keuntungan)/kerugian aktuarial	28.083	189.820
Imbal hasil atas aset program	(168.042)	(9.689)
Jumlah pengukuran kembali atas (aset) liabilitas imbalan pasti - neto	68.743	208.702

Beban program manfaat lain dana manfaat tambahan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Biaya jasa lalu	91.412	-
Biaya jasa kini	17.787	18.072
Bunga - neto	16.668	5.243
Beban program manfaat lain dana manfaat tambahan (Catatan 35)	125.867	23.315

g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) :

(i) Program pemutusan hubungan kerja (PHK)

	31 Desember 2021	
	Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(86.346)
Penurunan	-1,00%	223.745
	31 Desember 2020	
	Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(83.766)
Penurunan	-1,00%	227.117

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

- g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

- (i) Program pemutusan hubungan kerja (PHK) (lanjutan)

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	64.100	56.458
1 - < 2 tahun	59.613	51.710
2 - < 3 tahun	55.481	48.008
3 - < 4 tahun	51.231	44.129
4 - < 5 tahun	48.293	40.531
> 5 tahun	547.688	460.918

- (ii) Program pensiun imbalan pasti

	<u>31 Desember 2021</u>	
	<u>Asumsi</u>	<u>Pengaruh nilai kini</u>
	<u>Tingkat diskonto</u>	<u>atas kewajiban</u>
		<u>imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(603.999)
Penurunan	-1,00%	675.426
	<u>31 Desember 2020</u>	
	<u>Asumsi</u>	<u>Pengaruh nilai kini</u>
	<u>Tingkat diskonto</u>	<u>atas kewajiban</u>
		<u>imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(509.615)
Penurunan	-1,00%	570.339

Juran Jatuh Tempo

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	337.535	313.033
1 - < 2 tahun	308.436	284.962
2 - < 3 tahun	304.606	281.411
3 - < 4 tahun	299.565	276.288
4 - < 5 tahun	293.503	269.731
> 5 tahun	893.639	811.185

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

- g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(iii) Program tunjangan hari tua

		31 Desember 2021	
		Asumsi	Pengaruh nilai kini
		Tingkat diskonto	atas kewajiban
		imbalan kerja	
Kenaikan		+1,00%	(268.757)
Penurunan		-1,00%	310.736
		31 Desember 2020	
		Asumsi	Pengaruh nilai kini
		Tingkat diskonto	atas kewajiban
		imbalan kerja	
Kenaikan		+1,00%	(217.042)
Penurunan		-1,00%	250.687
<u>Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti</u>			
		31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Jatuh Tempo</u>			
< 1 tahun		150.774	160.660
1 - < 2 tahun		133.437	118.883
2 - < 3 tahun		125.522	123.256
3 - < 4 tahun		124.395	120.447
4 - < 5 tahun		116.334	117.896
> 5 tahun		2.479.047	2.031.073

(iv) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS

		31 Desember 2021	
		Asumsi	Pengaruh nilai kini
		Tingkat diskonto	atas kewajiban
		imbalan kerja	
Kenaikan		+1,00%	(311.716)
Penurunan		-1,00%	410.280
		31 Desember 2020	
		Asumsi	Pengaruh nilai kini
		Tingkat diskonto	atas kewajiban
		imbalan kerja	
Kenaikan		+1,00%	(347.202)
Penurunan		-1,00%	455.622

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

- g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

- (iv) Program Kesehatan Pasca Kerja BPJS (lanjutan)

Iuran Jatuh Tempo

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	83.912	94.360
1 - < 2 tahun	88.487	98.986
2 - < 3 tahun	93.086	103.970
3 - < 4 tahun	97.896	108.924
4 - < 5 tahun	103.066	114.058
> 5 tahun	3.071.983	3.464.172

- (v) Cadangan penghargaan tanda jasa

	<u>31 Desember 2021</u>	
	<u>Asumsi Tingkat diskonto</u>	<u>Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(155.544)
Penurunan	-1,00%	180.494
	<u>31 Desember 2020</u>	
	<u>Asumsi Tingkat diskonto</u>	<u>Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(133.063)
Penurunan	-1,00%	154.967

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	103.712	89.521
1 - < 2 tahun	64.611	86.669
2 - < 3 tahun	62.445	53.155
3 - < 4 tahun	86.043	52.553
4 - < 5 tahun	87.029	72.089
> 5 tahun	1.246.763	1.055.471

- (vi) Cuti besar

	<u>31 Desember 2021</u>	
	<u>Asumsi Tingkat diskonto</u>	<u>Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja</u>
Kenaikan	+1,00%	(175.396)
Penurunan	-1,00%	197.905

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. PROGRAM BAGI PEKERJA (lanjutan)

- g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial dan analisa manfaat jatuh tempo adalah sebagai berikut (BRI saja) (tidak diaudit) (lanjutan):

(vi) Cuti besar (lanjutan)

	31 Desember 2020	
	Asumsi Tingkat diskonto	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	+1,00%	(136.108)
Penurunan	-1,00%	153.998
 <u>Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti</u>		
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Jatuh Tempo</u>		
< 1 tahun	246.079	296.462
1 - < 2 tahun	192.167	168.277
2 - < 3 tahun	203.626	128.931
3 - < 4 tahun	237.897	139.280
4 - < 5 tahun	223.580	161.658
> 5 tahun	1.531.638	1.195.996

43. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<u>Komitmen</u>		
Tagihan komitmen		
Pembelian <i>spot</i> dan berjangka mata uang asing	11.120.883	3.078.534
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan (Catatan 26d)	140.242.306	125.176.691
Penjualan <i>spot</i> dan berjangka mata uang asing	74.761.798	55.418.797
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26d)	9.687.797	8.974.190
Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang belum digunakan	-	618.452
	<u>224.691.901</u>	<u>190.188.130</u>
Komitmen - neto	(213.571.018)	(187.109.596)
<u>Kontinjensi</u>		
Tagihan kontinjensi		
Tagihan bunga dalam penyelesaian	3.537	144.901
Liabilitas kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26d) dalam bentuk:		
Garansi bank	36.518.208	35.931.693
Stand by L/C	15.334.403	8.752.803
	<u>51.852.611</u>	<u>44.684.496</u>
Kontinjensi - neto	(51.849.074)	(44.539.595)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
Karyawan Kunci	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang diberikan, Simpanan nasabah
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Kepemilikan mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Efek-efek
Perum BULOG	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Petrokimia Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor,
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Bahana Artha Ventura	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Bahana TCW Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham, Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Perusahaan Gas Negara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Pupuk Kalimantan Timur	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor,
PT PP Urban	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain
PT Danareksa Investment Management	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan saham, Efek-efek
PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Kredit yang diberikan, Tagihan akseptasi
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Wesel ekspor dan tagihan lainnya, Tagihan akseptasi
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, Tagihan akseptasi, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Pertamina (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Efek-efek
PT Pertamina Patra Niaga	Hubungan kepemilikan Melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi Garansi yang diterbitkan, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek, L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, Tagihan akseptasi
PT Wijaya Karya Beton (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Telekomunikasi Selular	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Bank Ekspor Indonesia	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usaha, BRI melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. (lanjutan)

Saldo dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Pihak-pihak berelasi	Jenis hubungan	Unsur transaksi pihak berelasi
PT Rekayasa Industri	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Pertamina Hulu Rokan	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan
PT Bio Farma (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor
PT PP Presisi Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Adhi Persada Beton	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Petrosida Gresik	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi, wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Trans Jabar Tol	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan kepemilikan Melalui Pemerintah Pusat RI	Garansi yang diterbitkan Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan Akseptasi, Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Utama Karya Infrastruktur (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
PT Hakaaston	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
PT Prima Armada Raya	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Piutang pembiayaan
PT Pindad (Persero)	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi Wesel ekspor dan tagihan lainnya
PT Wijaya Karya Industri Energi	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Tagihan akseptasi
PT Fintek Karya Nusantara	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham
PT Pefindo Biro Kredit	Hubungan kepemilikan melalui Pemerintah Pusat RI	Penyertaan Saham

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Aset		
Giro pada bank lain (Catatan 5)		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.070.862	897.748
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	504.703	1.163.378
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	209.764	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	197.265	376.287
PT Bank Syariah Mandiri	-	87.855
PT Bank BNI Syariah	-	92.326
	<u>1.982.594</u>	<u>2.617.594</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain (Catatan 6)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.252.463	1.098.850
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	553.250	561.400
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	434.775	228.650
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	324.200	-
PT Bank Syariah Mandiri	-	12.000
PT Bank BNI Syariah	-	6.500
	<u>2.564.688</u>	<u>1.907.400</u>
Efek-efek (Catatan 7)		
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	303.816.274	282.793.766
PT Danareksa Investment Management	2.244.865	170.890
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.073.214	2.144.784
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.237.701	1.374.914
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.186.714	1.455.260
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.155.296	1.003.489
PT Pertamina (Persero)	1.132.101	882.056
PT Bahana TCW Investment Management	979.889	134.101
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	956.684	-
PT Pupuk Indonesia (Persero)	926.582	333.298
Lainnya	7.859.325	8.048.595
	<u>323.568.645</u>	<u>298.341.153</u>
Wesel ekspor dan tagihan lainnya (Catatan 8)		
PT Wijaya Karya Beton (Persero) Tbk	299.362	10.228
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	283.035	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	278.417	-
PT PP Presisi Tbk	228.445	90.658
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	223.256	63.244
PT Adhi Persada Beton	99.725	1.286
PT Dirgantara Indonesia	72.786	824.381
PT Pindad	60.078	78.889
PT PP Urban	45.628	37.324
PT Petrosida Gresik	42.147	-
Lainnya	211.992	709.682
	<u>1.844.871</u>	<u>1.815.692</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Aset (lanjutan)		
Kredit yang diberikan (Catatan 11)		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	12.048.560	16.182.590
Perum BULOG	5.258.303	5.841.839
PT Waskita Karya (Persero)	4.541.653	2.617.195
PT Garuda Indonesia (Persero)	4.203.263	2.414.805
PT Kereta Api (Persero)	2.976.708	2.355.585
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2.218.182	2.800.000
PT Dirgantara Indonesia	2.125.426	1.813.992
PT Krakatau Steel	2.074.259	2.031.937
PT Garuda Maintenance Facility Aero AsiaTbk	2.009.097	1.317.915
PT Trans Jabar Tol	1.654.829	1.848.697
Karyawan Kunci	185.023	186.633
Lain-lain	28.287.531	32.962.505
	<u>67.582.834</u>	<u>72.373.693</u>
Piutang dan Pembiayaan Syariah (Catatan 12)		
PT Angkasa Pura I (Persero)	-	1.000.000
PT Pegadaian (Persero)	-	558.387
PT Waskita Beton Precast Tbk	-	470.000
PT Semen Indonesia Tbk	-	341.088
PT Citra Waspphutowa	-	324.529
PT Kimia Farma Apotek	-	270.000
PT Jasa Marga JalanLayang Cikampek	-	180.255
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	101.276
PT Cimanggis Cibitung Tollways	-	98.773
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	-	84.919
Karyawan kunci	-	8.274
Lainnya	-	361.356
	<u>-</u>	<u>3.798.857</u>
Piutang Pembiayaan (Catatan 13)		
PT Hutama Karya Infrastruktur	16.308	24.478
PT Prima Armada Raya	9.546	-
PT Hakaaston	865	13.667
PT Hutama Karya (Persero)	-	3.008
	<u>26.719</u>	<u>41.153</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Aset (lanjutan)		
Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (Catatan 14)		
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	1.243.621	683.041
PT Pertamina Patra Niaga	1.544.375	20.507
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	418.481	500.603
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	170.317	-
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	153.426	38.271
PT Pindad (Persero)	93.127	33.119
PT Petrosida Gresik	89.624	21.702
PT Rekayasa Industri	22.910	19.153
PT Wijaya Karya Industri Energi	18.619	36.389
PT Indonesia Asahan Aluminium	7.846	-
Lainnya	8.959	420.295
	<u>3.771.305</u>	<u>1.773.080</u>
Penyertaan saham (Catatan 15)		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	4.055.195	-
PT Fintek Karya Nusantara	565.564	565.245
PT Danareksa Investment Management	388.677	380.198
PT Bahana Artha Ventura	75.947	74.396
PT Pefindo Biro Kredit	5.725	690
	<u>5.091.108</u>	<u>1.020.529</u>
Total aset dari pihak-pihak berelasi	<u>406.432.764</u>	<u>383.689.151</u>
Total aset konsolidasian	<u>1.678.097.734</u>	<u>1.610.065.344</u>
Persentase total aset dari pihak-pihak berelasi terhadap total aset konsolidasian	<u>24,22%</u>	<u>23,83%</u>
Liabilitas		
Giro (Catatan 19)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	94.443.538	57.426.534
Karyawan kunci	6.656	17.430
Lain-lain	200.138	427.677
	<u>94.650.332</u>	<u>57.871.641</u>
Tabungan (Catatan 20)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	117.482	158.893
Karyawan kunci	203.830	221.796
Lain-lain	258.907	279.585
	<u>580.219</u>	<u>660.274</u>
Deposito Berjangka (Catatan 21)		
Entitas dan Lembaga Pemerintah	122.359.789	75.966.314
Karyawan kunci	140.226	176.670
Lain-lain	987.190	1.228.527
	<u>123.487.205</u>	<u>77.371.511</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Liabilitas (lanjutan)		
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya (Catatan 22) Entitas dan Lembaga Pemerintah	1.041.927	1.281.947
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 23) Entitas dan Lembaga Pemerintah	3.784.315	654.089
Pinjaman yang Diterima (Catatan 25) Entitas dan Lembaga Pemerintah	20.107.689	22.262.333
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci (Catatan 42)		
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti	1.015.376	745.340
Nilai kini kewajiban PHK	155.645	117.881
Nilai kini kewajiban THT	280.972	173.811
Nilai kini kewajiban cuti besar	163.469	79.271
Nilai kini kewajiban penghargaan tanda jasa	117.397	61.502
Nilai kini kewajiban program manfaat lain pembayaran manfaat pasti	21.677	19.544
Nilai kini kewajiban BPJS	34.789	28.964
	<u>1.789.325</u>	<u>1.226.313</u>
Total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi	245.441.012	161.328.108
Total liabilitas konsolidasian	1.386.310.930	1.347.101.486
Persentase total liabilitas kepada pihak-pihak berelasi terhadap total liabilitas konsolidasian	17,70%	11,98%
Dana Syirkah Temporer		
Entitas, Lembaga Pemerintah dan karyawan kunci	-	6.613.045
Persentase terhadap total dana syirkah temporer	0,00%	19,71%
	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 26b)		
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	5.140.216	5.172.180
PT Pertamina Patra Niaga	3.955.689	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	3.733.058	3.662.833
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	2.982.871	1.545.340
PT Pertamina (Persero)	2.317.099	1.571.164
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	1.930.965	1.058.282
PT Perusahaan Gas Negara	1.622.196	459.194
PT Pertamina Hulu Rokan	886.819	702.500
PT Bank Ekspor Indonesia	814.532	-
PT Telekomunikasi Selular	619.484	590.219
Lain-lain	4.172.892	7.542.884
	<u>28.175.821</u>	<u>22.304.596</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Komitmen dan Kontinjensi pada		
Rekening Administratif (lanjutan)		
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor (Catatan 26b)		
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1.839.233	1.812.164
PT Pertamina Patra Niaga	852.523	91.416
PT Bio Farma (Persero)	834.440	-
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	702.885	522.705
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	530.925	428.660
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	380.945	134.566
PT Pupuk Kalimantan Timur	293.710	30.036
PT Dirgantara Indonesia	172.036	299.607
PT Pertamina (Persero)	93.670	633.404
PT Petrokimia Gresik	96.324	236.615
Lain-lain	323.700	1.049.296
	<u>6.120.391</u>	<u>5.238.469</u>
	Untuk Tahun yang berakhir	
	pada tanggal 31 Desember	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi (Catatan 35)		
Gaji dan tunjangan Direksi	177.412	168.326
Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris	70.085	63.579
Total	<u>247.497</u>	<u>231.905</u>
Tantiem, bonus dan insentif		
Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci (Catatan 35)		
Tantiem Direksi	339.890	292.518
Tantiem Dewan Komisaris	135.632	136.333
Bonus dan insentif karyawan kunci	814.918	961.505
Total	<u>1.290.440</u>	<u>1.390.356</u>

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan entitas anak adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Aset		
Giro pada Bank lain	0,118%	0,163%
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	0,153	0,018
Efek-efek	19,282	18,530
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	0,110	0,113
Kredit yang diberikan	4,027	4,495
Piutang dan pembiayaan syariah	0,000	0,236
Piutang pembiayaan	0,002	0,003
Tagihan akseptasi	0,225	0,110
Penyertaan saham	0,303	0,063
Total	<u>24,220%</u>	<u>23,831%</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Persentase transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset dan liabilitas konsolidasian BRI dan entitas anak adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Liabilitas		
Giro	6,827%	4,296%
Tabungan	0,042	0,049
Deposito berjangka	8,908	5,744
Simpanan dari Bank lain dan lembaga keuangan lainnya	0,075	0,095
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	0,273	0,049
Pinjaman yang diterima	1,450	1,653
Kompensasi kepada manajemen karyawan kunci	0,129	0,091
Total	17,704%	11,977%

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

- 1) Pada tanggal 26 Juli 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi sehubungan dengan Pengadaan Managed Service CRM RBB Tahun 2021 (Zona 1 dan Zona 2) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp613.766.
- 2) Pada tanggal 26 Juli 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Insan Teknologi Semesta sehubungan dengan Pengadaan Managed Service CRM RBB Tahun 2021 (Zona 3) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp315.225.
- 3) Pada tanggal 22 Maret 2021 dan 24 Maret 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Gigantara, PT Swadharma Sarana Informatika, PT Tunas Artha Gardatama, PT Advantage Supply Chain Management dan PT Jalin Pembayaran Nusantara sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan Jasa Pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga Tahun 2021 (CRO Versi 3 dan 4), kemudian tanggal 9 Juni 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Gigantara sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan Jasa Pengelolaan ATM oleh Pihak Ketiga Tahun 2021 (CRO Kolaborasi) untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dengan nilai kontrak senilai Rp838.736.
- 4) Pada tanggal 3 Mei 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT SAP Indonesia sehubungan dengan Pengadaan *Software* BRIFIRST untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp280.000.
- 5) Pada tanggal 2 Maret 2021, BRI menandatangani Perjanjian Distribusi (Distribution Agreement) dengan BRI Life sehubungan dengan kerjasama pemasaran produk BRI Life melalui saluran distribusi BRI.
- 6) Pada tanggal 5 Januari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan Pengadaan Jasa Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Menara BRI Medan untuk jangka waktu 420 (empat ratus dua puluh) hari dengan nilai kontrak senilai Rp316.500.
- 7) Pada tanggal 15 Januari 2021, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Satkomindo Mediyasa sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan SPK Sewa Jaringan Komunikasi MPLS Provider Satkomindo untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan nilai kontrak sebesar Rp82.144.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

- 8) Pada tanggal 13 November 2020 dan 3 November 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Bringin Inti Teknologi dan PT Datindo Infonet Prima sehubungan dengan Pengadaan Managed Service CRM RBB Tahun 2020 (Zona 1, 2 dan 3) untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan nilai kontrak senilai Rp682.328 dan Rp308.396.
- 9) Pada tanggal 3 November 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Seluler sehubungan dengan Pengadaan Sewa Saluran Komunikasi untuk Kebutuhan Penggantian Perangkat BRISPOT bagi Pejabat Kredit Lini Bisnis Mikro dengan nilai kontrak Rp260.899.
- 10) Pada tanggal 8 Juli 2020, BRI mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) sehubungan dengan Pengadaan Managed Service VSAT Remote Terminal dan VSAT Satlink untuk Integrasi BRISat Fase 3 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan nilai kontrak Rp181.777.

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, BRI menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan, dimana BRI sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, BRI berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas BRI.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, BRI telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing sebesar Rp1.972.029 dan Rp1.141.920 (Catatan 28). Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

46. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (SKB BI dan BPPN) No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin kewajiban tertentu dari seluruh Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia. Berdasarkan perubahan terakhir yang terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus-menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya, Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini, Pemerintah membebaskan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis kewajiban bank umum yang dijamin berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

Selanjutnya, Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang "Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum", Program penjaminan Pemerintah melalui Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) telah berakhir pada tanggal 22 September 2005 untuk periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang "Lembaga Penjamin Simpanan", dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" yang disempurnakan melalui Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 tanggal 25 November 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan pasal 29 bahwa Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah paling tinggi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 3,50% dan 4,50% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah. Untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,25% dan 1,00%.

47. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Berikut adalah ikhtisar PSAK dan ISAK yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI yang relevan untuk BRI dan entitas anak, namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022:

- a. Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual". Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK No. 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.
- b. Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak". Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
- c. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian "10 per sen" untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan". Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023:

- a. Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang", penerapan lebih awal diizinkan. Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

- a. PSAK No. 74, "Kontrak Asuransi", yang diadopsi dari IFRS 17, penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Saat ini BRI dan entitas anaknya sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. INFORMASI TAMBAHAN

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

BRI secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat BRI dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risk*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai kepada pemegang saham.

CAR pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, BRI wajib membentuk tambahan modal penyangga (*buffer*) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge*, yang wajib dibentuk secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.

Pembentukan modal penyangga (*buffer*) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* yang wajib dibentuk oleh BRI berdasarkan persentase tertentu dari ATMR adalah masing-masing 2,5%, 0% dan 2,5%. Sesuai Peraturan OJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal "Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (POJK Perubahan Atas POJK Stimulus Covid-19)", kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer* dalam komponen modal sebesar 2,5% dari ATMR bagi Bank Buku 3 dan Buku 4 sementara ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2022.

Berdasarkan profil risiko BRI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Penentuan kepatuhan BRI terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktis akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 BRI telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk rasio kecukupan modal.

CAR BRI (entitas induk) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dihitung sebagai berikut:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Modal Inti (Tier 1)		
Modal Inti Utama (CET 1)	231.982.043	174.297.803
Modal Pelengkap (Tier 2)	9.678.720	9.039.734
Total Modal	241.660.763	183.337.537
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		
ATMR untuk Risiko Kredit ^{*)}	761.302.147	702.318.932
ATMR untuk Risiko Pasar ^{**)}	3.275.350	4.705.830
ATMR untuk Risiko Operasional ^{***)}	191.178.694	182.571.933
Total ATMR	955.756.191	889.596.695

^{*)} Risiko Kredit dihitung berdasarkan SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

^{**)} Risiko Pasar dihitung berdasarkan SE OJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016.

^{***)} Risiko Operasional dihitung berdasarkan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) (lanjutan)

CAR BRI (entitas induk) pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing dihitung sebagai berikut (lanjutan):

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rasio CAR		
Rasio CET 1	24,27%	19,59%
Rasio Tier 1	24,27	19,59
Rasio Tier 2	1,01	1,02
Rasio Total	<u>25,28</u>	<u>20,61</u>
Rasio Minimum Tier 1	6,00%	6,00%
Rasio Minimum CET 1	4,50	4,50
CAR Minimum Berdasarkan Profil Risiko	<u>9,00</u>	<u>9,00</u>

b. Rasio Kredit *Non-Performing* (NPL)

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rasio NPL BRI adalah sebagai berikut:

(i) Konsolidasian (BRI, Bank Raya, BRI Finance, Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
Rasio NPL – kotor ^{*)}	3,00%	2,88%
Rasio NPL – neto ^{*)}	0,70	0,87

Rasio NPL - neto dihitung berdasarkan NPL setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, sesuai dengan peraturan terkait dibagi dengan jumlah kredit yang diberikan.

^{*)} Untuk 31 Desember 2020 Konsolidasi (BRI, Bank Raya, BRI Finance, Permodalan Nasional Madani, Pegadaian, dan BRI Syariah).

c. Kegiatan Jasa Kustodian

BRI melakukan kegiatan jasa penitipan harta (bank kustodian) sejak tahun 1996 berdasarkan izin operasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. 91/PM/1996 tanggal 11 April 1996 dan telah ditunjuk sebagai *Sub Registry* dalam melaksanakan transaksi obligasi Pemerintah dan penatakerjaan SBI *Scriptless* oleh Bank Indonesia.

Jasa penitipan harta ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Jasa penyimpanan (*safe keeping services*) dan *Portfolio Valuation*;
- Jasa penyelesaian transaksi (*settlement handling*);
- Jasa penagihan penghasilan (*income collection*), termasuk pembayaran pajaknya;
- Jasa *corporate action* dan *proxy services*;
- Jasa informasi dan pelaporan (*reporting services*);
- Jasa *Custody Unit Link* dan DPLK;
- Jasa Kustodian untuk sekuritisasi aset; dan
- Jasa Kustodian Global untuk surat berharga yang diterbitkan di luar negeri.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

c. Kegiatan Jasa Kustodian (lanjutan)

BRI memiliki 438 (empat ratus tiga puluh delapan) dan 384 (tiga ratus delapan puluh empat) nasabah (tidak diaudit) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 terutama dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan asuransi, perusahaan sekuritas, reksadana dan institusi lainnya.

Aset milik nasabah yang dititipkan pada Kustodian BRI (tidak diaudit) adalah sebesar Rp523.266.664 dan Rp440.482.007 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Aset yang disimpan dalam kegiatan jasa kustodian tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasian BRI dan Entitas Anak.

d. Kegiatan Wali Amanat

BRI melakukan kegiatan jasa wali amanat sejak tahun 1996. Izin operasi BRI sebagai wali amanat telah diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1554/KMK.013/1990 tanggal 6 Desember 1990 dan telah terdaftar di OJK sesuai Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

Jasa wali amanat ini merupakan bagian dari kegiatan Divisi *Investment Services* yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- Wali amanat
- Agen jaminan
- Agen pemantau

e. Jasa *Trust*

Layanan Jasa *Trust* BRI merupakan layanan jasa penitipan harta nasabah yang berupa aset *financial* untuk dan atas nama nasabah. BRI merupakan Bank pertama di Indonesia yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk menjalankan layanan Jasa *Trust* di Indonesia melalui surat Bank Indonesia No. 15/19/DPB1/PB1-3 tanggal 12 Februari 2013 dan surat penegasan Bank Indonesia No. 15/30/DPB1/PB1-3 tanggal 19 Maret 2013.

Ruang lingkup layanan Jasa *Trust* BRI meliputi:

- Layanan Jasa Agen Pembayar
- Layanan Jasa Agen Peminjaman
- Layanan Jasa Agen Investasi
- Layanan Jasa Keagenan Lainnya, seperti misalnya Agen Penampungan dan Agen Jaminan

BRI saat ini telah memberikan pelayanan Jasa *Trust* untuk transaksi-transaksi keuangan yang melibatkan proyek minyak dan gas (Migas) baik yang dilaksanakan oleh anggota Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibawah naungan SKK Migas maupun proyek-proyek non K3S.

Di samping memberikan layanan Jasa *Trust*, BRI juga memberikan layanan jasa Agen Pembayar dan Agen Penampungan (non *Trust*) untuk sektor-sektor lain, seperti sektor infrastruktur, energi, perdagangan dan industri kimia. Tak hanya melayani *direct customer*, Jasa *Trust* BRI juga berperan serta mendukung unit kerja pembiayaan BRI dalam transaksi kegiatan pembiayaan infrastruktur, energi dan aktivitas transaksi pembiayaan sindikasi.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

f. Agen Sindikasi

BRI saat ini memberikan pelayanan Jasa Agen Sindikasi untuk pembiayaan kredit sindikasi dari beberapa sektor/industri diantaranya sektor agribisnis, infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, pembangkit tenaga listrik, minyak & gas, tekstil, properti dan manufaktur yang melibatkan proyek-proyek pemerintah (BUMN) maupun proyek-proyek swasta.

Jasa agen sindikasi ini merupakan bagian dari kegiatan sindikasi yang meliputi jasa-jasa sebagai berikut:

- *Arranger*
- Agen Fasilitas
- Agen Jaminan
- Agen Penampungan

Jasa Agen Sindikasi BRI telah mengelola berbagai proyek sindikasi dengan total nilai proyek adalah sebesar Rp397.742.856 dan Rp464.327.597, masing-masing untuk tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

49. LABA PER LEMBAR SAHAM

Perhitungan laba per lembar saham dasar dan dilusian untuk BRI (entitas induk) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2021		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	31.066.592	130.552.591.419	238
Ditambah: penerbitan saham bonus dan opsi saham	-	20.948.648	-
Laba bersih per lembar saham dilusian	31.066.592	130.573.540.067	238
	31 Desember 2020		
	Laba Tahun Berjalan	Rata-rata Tertimbang Saham Biasa yang Beredar	Laba Tahun Berjalan Per Lembar Saham (Rupiah penuh)
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk per lembar saham dasar	18.654.753	122.564.847.240	152
Ditambah: penerbitan saham bonus dan opsi saham	-	750.463.400	-
Laba bersih per lembar saham dilusian	18.654.753	123.315.310.640	151

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

50. PERUBAHAN AKTIVITAS PENDANAAN

	31 Desember 2020	Arus Kas		Perubahan Non Kas	31 Desember 2021
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	72.164.236	6.053.470	(10.282.669)	523.510	68.458.547
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.465.392	-	-	(964.017)	501.375
Surat berharga yang diterbitkan	57.757.028	12.547.672	(14.608.236)	(389.767)	55.306.697
Total	131.386.656	18.601.142	(24.890.905)	(830.274)	124.266.619

	31 Desember 2019	Arus Kas		Perubahan Non Kas	31 Desember 2020
		Penerimaan	Pembayaran		
Pinjaman yang diterima	30.921.771	45.360.252	(4.229.198)	111.411	72.164.236
Pinjaman dan surat berharga subordinasi	1.465.366	-	-	26	1.465.392
Surat berharga yang diterbitkan	38.620.837	12.619.200	(11.245.300)	17.762.291	57.757.028
Total	71.007.974	57.979.452	(15.474.498)	17.873.728	131.386.656

51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 13 September 2021, Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri BUMN dan BRI menandatangani perjanjian pengalihan hak atas saham Negara Republik Indonesia pada PT Pegadaian (Pegadaian) dan pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham BRI. Melalui perjanjian tersebut, Negara Republik Indonesia mengalihkan kepada BRI berupa hak atas seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada Pegadaian dengan jumlah sebanyak 6.249.999 saham seri B yang seluruhnya senilai Rp48.670.528 dan saham Seri B milik Negara Republik Indonesia pada PNM dengan jumlah sebanyak 3.799.999 saham seri B yang seluruhnya senilai Rp6.100.068. Dengan demikian, sejak tanggal 13 September 2021, BRI adalah pemilik saham yang dialihkan dan berhak menjalankan hak-hak sebagai pemilik dari saham-saham yang dialihkan. (Catatan 1f).

Transaksi inbreng tersebut merupakan kombinasi bisnis entitas sepengendali dimana pemegang saham pengendali (*ultimate shareholder*) dari BRI, PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah Pemerintah Republik Indonesia. Oleh karena itu, transaksi diperlakukan berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Untuk penyajian transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali berdasarkan metode penyatuan kepemilikan, laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan seakan-akan penggabungan usaha tersebut terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

Perbedaan antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat investasi yang diperoleh dari transaksi ini dicatat dalam akun "tambahan modal disetor" pada bagian ekuitas. Ekuitas dari Pegadaian dan PNM sebelum tanggal penggabungan disajikan sebagai "modal proforma atas transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali" pada bagian ekuitas.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Pengaruh penyajian kembali pada laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020		
	Sebelum Penyesuaian akun	Penyesuaian akun	Setelah Penyesuaian akun
Laporan Posisi Keuangan			
<u>Konsolidasian</u>			
Aset			
Kas	32.161.564	113.424	32.274.988
Giro pada Bank lain	9.154.378	3.111.888	12.266.266
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	66.539.685	1.311.721	67.851.406
Efek-efek	327.615.655	(310.036)	327.305.619
Kredit yang Diberikan	899.458.207	44.329.427	943.787.634
Cadangan kerugian penurunan nilai	(65.165.002)	(1.645.177)	(66.810.179)
Piutang dan Pembiayaan Syariah	38.915.673	10.149.805	49.065.478
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.449.489)	(1.132.678)	(2.582.167)
Piutang Pembiayaan	3.619.224	23.720.632	27.339.856
Cadangan kerugian penurunan Nilai	(213.060)	(789.247)	(1.002.307)
Penyertaan saham	1.489.800	10.529	1.500.329
Aset tetap			
Biaya perolehan	46.837.964	14.046.890	60.884.854
Akumulasi penyusutan	(14.652.804)	(2.525.418)	(17.178.222)
Aset pajak tangguhan - neto	8.313.545	1.572.445	9.885.990
Aset lain-lain - neto	27.195.956	6.296.511	33.492.467
Liabilitas			
Liabilitas segera	11.845.910	3.627.664	15.473.574
Simpanan Nasabah			
Giro	185.151.229	(302.878)	184.848.351
Giro Wadiah	6.303.202	(45.124)	6.258.078
Tabungan	460.453.588	217.779	460.671.367
Utang pajak	1.400.638	548.718	1.949.356
Surat Berharga yang Diterbitkan	34.489.091	23.267.937	57.757.028
Pinjaman yang diterima	35.968.985	36.195.251	72.164.236
Liabilitas imbalan kerja	10.821.083	2.614.759	13.435.842
Liabilitas lain-lain	19.628.417	2.631.103	22.259.520
Ekuitas			
Modal proforma atas transaksi akuisisi dengan entitas sepengendali	-	29.538.484	29.538.484
Kepentingan non-pengendali	2.533.809	17.022	2.550.831

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

	31 Desember 2020		
	<u>Sebelum</u> <u>Penyesuaian akun</u>	<u>Penyesuaian akun</u>	<u>Setelah</u> <u>Penyesuaian akun</u>
<u>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan</u>			
<u>Komprehensif Lain Konsolidasian</u>			
Pendapatan Bunga dan Syariah			
Pendapatan Bunga	112.584.087	16.326.530	128.910.617
Pendapatan Syariah	4.348.425	2.505.519	6.853.944
Beban Bunga dan Syariah			
Beban Bunga	(36.190.771)	(3.692.634)	(39.833.405)
Beban Syariah	(1.531.824)	(765.219)	(2.297.043)
Pendapatan Premi	6.208.716	(2.941)	6.205.775
Beban Klaim	(5.327.065)	-	(5.327.065)
Pendapatan operasional lainnya			
Provisi dan komisi lainnya	15.122.682	1.058.253	16.180.935
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	7.239.896	12.275	7.252.171
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	2.860.653	10.678	2.871.331
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	1.257.984	(146)	1.257.838
Lain-lain	2.640.273	7.554.856	10.195.129
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto	(30.617.491)	(2.407.001)	(33.024.492)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	(75.231)	(23.143)	(98.374)
Beban operasional lainnya			
Tenaga kerja dan tunjangan	(26.319.791)	(6.785.478)	(33.105.269)
Umum dan administrasi	(17.269.844)	(3.734.838)	(21.004.682)
Lain-lain	(6.341.724)	(7.052.174)	(13.393.898)
Pendapatan non operasional - neto	(49.318)	264.023	214.705
Beban pajak	(8.064.453)	(887.518)	(8.951.971)
<u>Laporan Arus Kas Konsolidasian</u>			
Arus Kas dari Kegiatan Operasi:			
Pendapatan yang Diterima:			
Penerimaan Bunga	109.112.566	16.326.530	125.439.096
Pendapatan Syariah	4.348.425	2.505.519	6.853.944
Pendapatan Premi	6.208.716	(2.941)	6.205.775
Beban yang Dibayar:			
Beban Bunga	(36.190.771)	(3.692.634)	(39.883.405)
Beban Syariah	(1.531.824)	(765.219)	(2.297.043)
Penerimaan Kembali Aset yang Telah Dihapusbukukan	7.239.896	12.275	7.252.171
Pendapatan Operasional Lainnya	25.210.052	6.370.917	31.580.969
Beban Operasional Lainnya	(49.474.810)	(14.134.836)	(63.609.646)
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	(84.532)	264.023	179.491
Pembayaran atas pajak penghasilan Badan	(4.953.877)	(982.567)	(5.936.444)

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun
yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

51. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

	31 Desember 2020		
	Sebelum Penyesuaian akun	Penyesuaian akun	Setelah Penyesuaian akun
Laporan Arus Kas Konsolidasian (lanjutan)			
Perubahan dalam Aset dan Liabilitas			
Operasi:			
Kenaikan (Penurunan) Aset Operasi:			
Efek-efek yang diukur pada nilai			
Wajar melalui laporan laba rugi	(11.940.401)	(499.765)	(12.440.166)
Kredit yang Diberikan	(35.685.632)	(45.030.143)	(80.715.775)
Piutang dan Pembiayaan Syariah	(13.149.476)	(10.149.805)	(23.299.281)
Piutang Pembiayaan	572.372	(23.720.632)	(23.148.260)
Aset Lain-lain	(11.322.226)	34.633.965	23.311.739
Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi:			
Liabilitas Segera			
Simpanan:	4.296.598	3.627.664	7.924.262
Giro	16.325.094	(302.878)	16.022.216
Giro <i>Wadiah</i>	4.282.336	(45.124)	4.237.212
Tabungan	55.098.105	217.779	55.315.884
Liabilitas Lain-lain	291.044	(1.689.881)	(1.398.837)
Kenaikan (Penurunan) Dana Syirkah			
Temporer	8.728.142	(50.000)	8.678.142
 Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Operasi	 66.689.167	 (36.884.583)	 29.804.584
Arus Kas dari Kegiatan Investasi:			
Penyertaan Saham	(280.175)	(4.172)	(284.347)
Penerimaan dividen	6.669	(1.139)	5.530
(Kenaikan) Efek-efek dan Obligasi			
Rekapitalisasi Pemerintah yang			
Diklasifikasikan Sebagai Nilai Wajar			
Melalui Penghasilan Komprehensif			
Lain dan Biaya Perolehan Diamortisasi	(112.640.485)	809.798	(111.830.687)
Perolehan aset tetap	(3.129.034)	(1.246.032)	(4.375.066)
 Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Investasi	 (116.007.811)	 (441.545)	 (116.449.356)
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan			
Penerimaan (Pembayaran) Pinjaman			
Yang Diterima	4.935.803	36.195.251	41.131.054
Penerimaan dari Surat Berharga yang			
Diterbitkan	1.998.840	10.620.360	12.619.200
Pembayaran Atas Surat Berharga yang			
Jatuh Tempo	(6.292.850)	(4.952.450)	(11.245.300)
 Kas Neto yang Digunakan untuk Kegiatan Pendanaan	 (19.981.772)	 41.863.161	 21.881.389
 (Penurunan) Kenaikan Neto Kas dan Setara Kas	 (69.300.416)	 4.537.033	 (64.763.383)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	167.253.135	4.537.033	171.790.168

52. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen BRI bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi BRI pada tanggal 3 Februari 2022.

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
ASET		
Kas	26.190.241	31.020.724
Giro pada Bank Indonesia	55.869.067	49.690.493
Giro pada Bank lain	10.694.557	9.591.417
Cadangan kerugian penurunan nilai	(27.059)	(92.690)
	<u>10.667.498</u>	<u>9.498.727</u>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Lain	56.227.675	64.941.821
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.201)	(8.998)
	<u>56.224.474</u>	<u>64.932.823</u>
Efek-efek	353.999.955	300.759.740
Cadangan kerugian penurunan nilai	(296.295)	(340.375)
	<u>353.703.660</u>	<u>300.419.365</u>
Wesel Ekspor dan Tagihan Lainnya	29.664.225	27.521.765
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.142.349)	(1.326.171)
	<u>28.521.876</u>	<u>26.195.594</u>
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	54.265.120	43.770.835
Tagihan Derivatif	730.083	1.576.659
Kredit yang Diberikan	943.702.693	880.674.757
Cadangan kerugian penurunan nilai	(80.911.213)	(64.129.266)
	<u>862.791.480</u>	<u>816.545.491</u>
Tagihan Akseptasi	9.461.677	6.773.743
Cadangan kerugian penurunan nilai	(488.121)	(546.260)
	<u>8.973.556</u>	<u>6.227.483</u>
Penyertaan Saham	46.050.734	12.566.424
Aset Tetap		
Biaya perolehan	47.245.040	44.189.284
Akumulasi penyusutan	(13.336.745)	(13.659.238)
Nilai buku - neto	<u>33.908.295</u>	<u>30.530.046</u>
Aset Pajak Tangguhan - neto	13.524.394	7.605.102
Aset Lain-lain - neto	21.340.557	21.205.241
TOTAL ASET	<u>1.572.761.035</u>	<u>1.421.785.007</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	12.544.849	11.392.992
Simpanan Nasabah		
Giro	219.397.152	183.002.153
Tabungan	494.575.745	459.148.270
Deposito Berjangka	413.875.819	410.513.447
Total Simpanan Nasabah	<u>1.127.848.716</u>	<u>1.052.663.870</u>
Simpanan dari Bank lain dan Lembaga Keuangan Lainnya	13.125.761	25.318.719
Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	29.408.508	40.478.672
Liabilitas Derivatif	198.369	397.088
Liabilitas Akseptasi	9.461.677	6.773.743
Utang Pajak	3.490.305	1.064.461
Surat Berharga yang Diterbitkan	30.131.995	34.450.311
Pinjaman yang Diterima	30.036.351	34.163.564
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	6.973.479	3.667.943
Liabilitas Imbalan Kerja	14.594.171	10.350.027
Liabilitas Lain-lain	8.027.850	6.203.628
Pinjaman dan Surat Berharga Subordinasi	501.375	500.887
TOTAL LIABILITAS	<u>1.286.343.406</u>	<u>1.227.425.905</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)		
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp50 (Rupiah penuh) per lembar saham		
Modal dasar - 300.000.000.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 299.999.999.999 lembar saham Seri B)		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 151.559.001.604 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 151.559.001.603 lembar saham Seri B) pada 31 Desember 2021 dan 123.345.810.000 lembar saham (terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dan 123.345.809.999 lembar saham Seri B) pada 31 Desember 2020	7.577.950	6.167.291
Tambahan modal disetor	76.324.093	3.493.008
Surplus revaluasi aset tetap - bersih	16.864.083	16.864.083
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(116.522)	(54.510)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	1.869.163	4.385.145
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	533.238	935.856
Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - bersih	(1.283.547)	(1.446.069)
Modal saham diperoleh kembali (saham treasuri)	(45.997)	(1.649.076)
Opsi Saham	16.297	55.836
Cadangan kompensasi atas saham bonus	210.266	1.228.805
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	3.022.685	3.022.685
Belum ditentukan penggunaannya	181.445.920	161.356.048
Total Saldo Laba	<u>184.468.605</u>	<u>164.378.733</u>
TOTAL EKUITAS	<u>286.417.629</u>	<u>194.359.102</u>
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>1.572.761.035</u>	<u>1.421.785.007</u>

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -
ENTITAS INDUK

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk Tahun yang berakhir	
	2021	2020
PENDAPATAN DAN		
BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan Bunga	119.827.583	109.958.749
Beban Bunga	(24.008.471)	(34.811.751)
Pendapatan Bunga - neto	95.819.112	75.146.998
Pendapatan Operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	16.548.485	15.183.058
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	8.917.595	7.161.452
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	1.735.943	1.252.339
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan		
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah - neto	3.190.019	2.513.408
Keuntungan yang belum direalisasi dari		
perubahan nilai wajar efek-efek	-	285.367
Lain-lain	2.008.470	2.034.509
Total Pendapatan Operasional lainnya	32.400.512	28.430.133
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai		
atas aset keuangan - neto	(30.550.081)	(28.714.311)
Beban penyisihan estimasi kerugian		
komitmen dan kontinjensi - neto	(3.305.535)	(2.155.970)
Beban penyisihan kerugian penurunan		
nilai atas aset non-keuangan	(162.460)	(118.857)
Beban Operasional lainnya		
Tenaga kerja dan tunjangan	(29.960.850)	(24.980.447)
Umum dan administrasi	(17.692.713)	(16.107.140)
Kerugian yang belum direalisasi dari		
perubahan nilai wajar efek-efek	(34.477)	-
Lain-lain	(7.089.662)	(5.308.671)
Total Beban Operasional lainnya	(54.777.702)	(46.396.258)
LABA OPERASIONAL	39.423.846	26.191.735
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - NETO	(203.139)	(30.624)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	39.220.707	26.161.111
BEBAN PAJAK	(7.005.246)	(7.807.808)
LABA TAHUN BERJALAN	32.215.461	18.353.303

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -
ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
Penghasilan komprehensif lainnya:		
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	157.626	(2.007.031)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	4.896	362.378
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(62.012)	(39.642)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.975.698)	4.314.399
Cadangan penurunan nilai atas efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(402.618)	824.471
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	459.716	(655.935)
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan - Setelah Pajak	(2.818.090)	2.798.640
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	29.397.371	21.151.943
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM		
Dasar (dalam Rupiah penuh)	247	150
Dilusian (dalam Rupiah penuh)	247	149

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahkan modal disetor	Cadangan penurunan nilai Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tanggungan	Saham treasury	Cadangan kompensasi saham kepada karyawan	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Saldo laba		Total ekuitas pemilik entitas induk
										Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	6.167.291	2.981.523	-	(14.868)	726.681	198.584	(2.106.014)	21.796	16.864.083	3.022.685	175.803.701	203.665.462
Dampak penyesuaian atas penerapan PSAK No.71	-	-	111.385	-	-	-	-	-	-	-	(12.177.391)	(12.066.006)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 setelah penyesuaian	6.167.291	2.981.523	111.385	(14.868)	726.681	198.584	(2.106.014)	21.796	16.864.083	3.022.685	163.626.310	191.599.456
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.353.303	18.353.303
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	824.471	(39.642)	3.658.464	(1.644.653)	-	-	-	-	-	2.798.640
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	824.471	(39.642)	3.658.464	(1.644.653)	-	-	-	-	18.353.303	21.151.943
Pembagian laba deviden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.623.565)	(20.623.565)
Opsi saham	-	-	-	-	-	-	-	55.836	-	-	-	55.836
Saham bonus	-	511.485	-	-	-	-	456.938	1.207.009	-	-	-	2.175.432
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	6.167.291	3.493.008	935.856	(54.510)	4.385.145	(1.446.069)	(1.649.076)	1.284.641	16.864.083	3.022.685	161.356.048	194.359.102

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahkan modal disetor	Cadangan penurunan nilai Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	(Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	Saham treasury	Cadangan kompensasi saham kepada karyawan	Surplus revaluasi aset tetap - setelah pajak terkait	Saldo laba		Total ekuitas pemilik entitas induk
										Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020	6.167.291	3.493.008	935.856	(54.510)	4.385.145	(1.446.069)	(1.649.076)	1.284.641	16.864.083	3.022.685	161.356.048	194.359.102
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.215.461	32.215.461
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-	(402.618)	(62.012)	(2.515.982)	162.522	-	-	-	-	-	(2.818.090)
Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	-	-	(402.618)	(62.012)	(2.515.982)	162.522	-	-	-	-	32.215.461	29.397.371
Kehilangan pengendalian atas entitas anak	-	565.209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	565.209
Pembagian laba deviden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.125.589)	(12.125.589)
Akuisisi dengan Entitas sependangali	-	(23.370.339)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(23.370.339)
Penerbitan saham	1.410.659	94.419.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.829.801
Opsi saham	-	62.862	-	-	-	-	324.957	(39.539)	-	-	-	348.280
Saham bonus	-	1.154.211	-	-	-	-	1.278.122	(1.018.539)	-	-	-	1.413.794
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021	7.577.950	76.324.093	533.238	(116.522)	1.869.163	(1.283.547)	(45.997)	226.563	16.864.083	3.022.685	181.445.920	286.417.629

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
ARUS KAS DARI KEGIATAN OPERASI		
Penerimaan bunga	118.391.824	106.487.228
Pembayaran bunga	(24.381.368)	(34.811.751)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	8.917.595	7.161.451
Pendapatan operasional lainnya	25.042.815	23.830.524
Beban operasional lainnya	(52.346.899)	(45.869.753)
(Beban) pendapatan non operasional - neto	(254.793)	(65.389)
Pembayaran pajak penghasilan badan dan tagihan pajak	(9.999.876)	(4.851.126)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	65.369.298	51.881.184
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:		
(Kenaikan) penurunan aset operasi:		
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain	1.092.058	44.146
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	10.867.514	(12.741.315)
Wesel ekspor dan tagihan lainnya	(2.142.460)	6.354.998
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(10.494.285)	(23.457.571)
Kredit yang diberikan	(77.802.558)	(34.775.080)
Aset lain-lain	32.841.368	(7.682.868)
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi:		
Liabilitas segera	1.151.857	3.989.828
Simpanan:		
Giro	36.394.999	15.159.596
Tabungan	35.427.475	54.788.009
Deposito berjangka	3.362.372	12.966.259
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya	(12.192.958)	7.447.128
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(11.070.164)	(9.424.266)
Liabilitas derivatif	(198.719)	-
Liabilitas lain-lain	(2.835.848)	275.477
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari kegiatan operasi	69.769.949	64.825.525

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS - ENTITAS INDUK (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020
ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Penerimaan dividen	40.991	38.052
Penyertaan saham	(1.000.000)	(263.582)
Perolehan aset tetap	(5.483.279)	(2.101.581)
Hasil penjualan aset tetap	51.654	34.766
Penurunan/(kenaikan) efek-efek yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan biaya perolehan diamortisasi	(77.297.918)	(109.015.200)
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) kegiatan investasi	(83.688.552)	(111.307.545)
ARUS KAS DARI KEGIATAN PENDANAAN (Pembayaran) penerimaan pinjaman yang diterima	(4.127.213)	4.966.785
Penambahan modal	18.901.826	-
Pembagian laba untuk dividen	(12.125.589)	(20.623.565)
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	-	1.998.840
Pembayaran atas surat berharga yang jatuh tempo	(4.567.500)	(6.031.850)
Kas neto yang digunakan untuk kegiatan pendanaan	(1.918.476)	(19.689.790)
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(15.837.079)	(66.171.810)
PENGARUH PERUBAHAN KURS MATA UANG ASING	(2.190)	(354.303)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	162.899.663	229.425.776
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	147.060.394	162.899.663
Kas dan Setara Kas akhir tahun terdiri dari:		
Kas	26.190.241	31.020.724
Giro pada Bank Indonesia	55.869.067	49.690.493
Giro pada bank lain	10.694.557	9.591.417
Penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	54.306.529	61.922.822
Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	10.674.207
Total Kas dan Setara Kas	147.060.394	162.899.663

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN - ENTITAS INDUK
Tanggal 31 Desember 2021 dan Untuk Tahun
yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri entitas induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 4, “Laporan Keuangan Tersendiri”.

PSAK No. 4 mengatur dalam hal entitas menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas dengan menggunakan metode biaya perolehan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak.

2. PENYERTAAN SAHAM PADA ENTITAS ANAK

Informasi mengenai entitas anak yang dimiliki BRI diungkapkan pada Catatan 1f atas laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, entitas induk memiliki penyertaan saham pada entitas anak sebagai berikut:

	31 Desember 2021		31 Desember 2020	
	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan	Harga Perolehan	Persentase Kepemilikan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank BRIsyariah Tbk)	-	-	2.981.172	71,64%
PT Bank Raya Indonesia Tbk (sebelumnya PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)	4.454.636	85,72%	3.454.636	87,10
BRI Remittance Co. Limited	2.289	100,00	2.289	100,00
PT Asuransi BRI Life	1.626.643	63,83	1.626.643	91,00
PT BRI Multifinance Indonesia	1.055.003	99,88	1.055.003	99,88
PT BRI Danareksa Sekuritas	446.888	67,00	446.888	67,00
PT BRI Ventura Investama	1.503.090	99,97	1.503.090	99,97
PT BRI Asuransi Indonesia	1.041.000	99,97	1.041.000	90,00
PT Pegadaian	25.326.438	99,99	-	-
PT Permodalan Nasional Madani	6.073.819	99,99	-	-



**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Head Office**

Jl Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210

Tel. : (62-21) 251-0244, 251-0254,
251-0264, 251-0269, 251-0279

Fax. : (62-21) 250-0077

www.bri.co.id

Sekretariat Perusahaan

Cedung BRI 1 lantai 15
Jl. Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta
10210, Indonesia

Tel. : (62-21) 575 1966

Fax. : (62-21) 570 0916